https://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah guna menjamin sinkronisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayanaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sitematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

b. evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah;

c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

d. rencana kerja dan pendanaan; dan

e. penutup.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kerja:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Inspektorat;

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;

e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

f. Dinas Kesehatan;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

k. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

l. Dinas Tenaga Kerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Lingkungan Hidup;
r. Dinas Pertanian;
s. Dinas Perikanan;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u. Satuan Polisi Pamong Praja;
v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
x. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
y. Badan Kepegawaian Daerah;
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Kecamatan Pemalang;
cc. Kecamatan Taman;
dd. Kecamatan Petarukan;
ee. Kecamatan Comal;
ff. Kecamatan Ampelgading;
gg. Kecamatan Bodeh;
hh. Kecamatan Ulujami;
ii. Kecamatan Bantarbolang;
jj. Kecamatan Randudongkal;
kk. Kecamatan Warungpring;
ll. Kecamatan Moga;
mm. Kecamatan Pulosari;
nn. Kecamatan Belik; dan
oo. Kecamatan Watukumpul.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

A. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.Dalam proses pembangunan, sumberdaya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Keterkaitan Rencana Kerja Sekretariat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

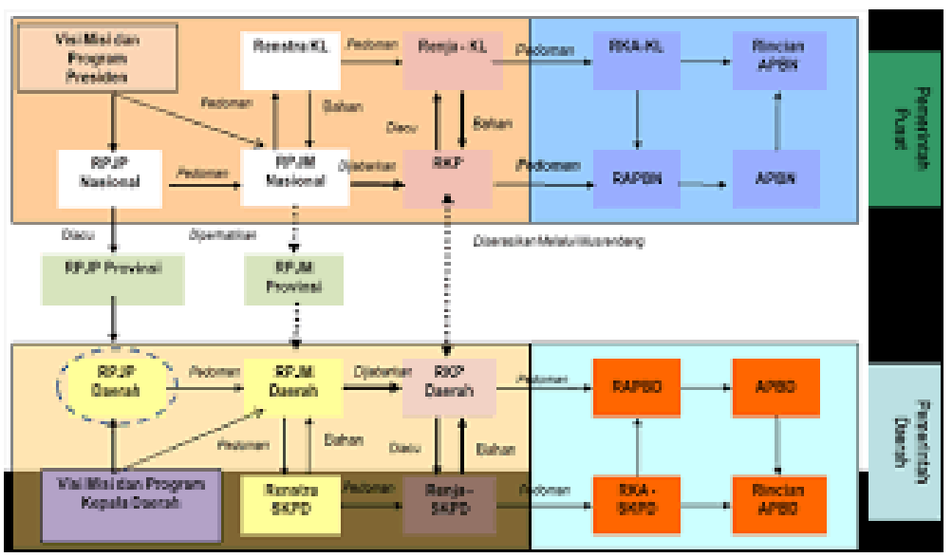

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Sekretariat Daerah memuat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Adapun tahapan yang ditempuh dalam penyusunan Renja Sekretariat daerah sebagaimana telah diatur dalam permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, dimana dua tahapan ini dilaksanakan pada tahun n-2 Renja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan yang dilaksanakan pada tahun n-1 Renja. Tahapan alur penyusunan Renja digambarkan sebagai berikut

BAGAN ALUR 2:
KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA OPD

RPJPN 2025-2045 mengamanatkan pencapaian visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 adalah Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2025-2045 adalah Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945.

RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 saat ini memasuki tahap pertama periode tahun 2021-2025 dengan fokus pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Demikian pula dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 yang saat ini memasuki tahapan lima tahun pertama (tahun 2021-2025) dengan prioritas pembangunan daerah pada fokus :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dari implementasi dokumen-dokumen perencanaan tersebut, mengingat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen mikro penjabaran pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator-indikator makro yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, penyusunan Renja Sekretariat Daerah tidak boleh menyimpang dari arah kebijakan pembangunan yang telah diatur dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016 – 2036;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2026, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan sekretariat daerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2026 guna mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

1) Memberikan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua *stakeholders* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam pada tahun 2026 dapat tercapai.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah untuk :

a. Memberikan acuan bagi para *stakeholders* di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada tahun 2026 guna menunjang pencapaian tujuan.
b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama tahun 2026 bagi para *stakeholders* Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
c. Memberikan arah dan tujuan bagi para *stakeholders* Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 guna mencapai tujuan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menyajikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja Tahun 2026 yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan atas Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Anggaran Belanja yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 51.884.523.271,00 (Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 47.326.180.911,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 91,21 % dengan perincian :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang serta Gaji dan Tunjangan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2024 Belanja Operasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 50.957.489.271,00 (Lima Puluh Milyar Semnilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus tujuh Puluh Satu Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 46.403.736.171,00 (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 91,06% dengan perincian :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai sebesar Rp. 21.093.857.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 19.536.785.236,00 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 92.62 %

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 18.386.632.271,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 17.690.450.935,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 96,21 %

c. Belanja Hibah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Belanja Hibah sebesar Rp. 11.477.000.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 9.176.500.000,00 (Sembilan Milyar Seratu Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 79,96%

2. Belanja Modal

Belanja Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja untuk pembelian peraltan mesin dan asset tetap lainnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2024, Belanja Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 927.034.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 922.444.740,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 99.5 %.

Tabel 2.1 Ikhtisar Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	SEKRETARIAT DAERAH	**51,884,523,271**	**47,326,180,911**	**91.21**
1.	**Belanja Operasi**	**50,957,489,271**	**46,403,736,171**	**91.06**
	Belanja Pegawai	21,093,857,000	19,536,785,236	92.62
	Belanja Barang dan Jasa	18,386,632,271	17,690,450,935	96.21
	Belanja Hibah	11,477,000,000	9,176,500,000	79.96
2.	**Belanja Modal**	**927,034,000**	**922,444,740**	**99.50**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	874,139,000	869,550,740	99.48
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52,895,000	52,894,000	100.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Setda Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.**									
4.01.	**Sekretariat Daerah**	**Persentase peningkatan kinerja penyelenggaran koordinasi dan pelasakanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang Pemerintahan dan Kesra, Perekonomi an dan Pembangunan, serta Administrasi Umum.**	**75,40**	**77,42**	**73,69**	**80,64**	**109,43**	**80,54**	**239**	**316**
4.01. 01.	**Program Administrasi Umum**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana.**	**59,59**	**60,43**	**58,77**	**60,29**	**102,59**	**60,9**	**182**	**305**
4.01. 01. 2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	**83**	**85,99**	**82,7**	**86,42**	**104,50**	**87,00**	**259**	**313**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	120	3	3	3,00	100,00	3	9	8
4.01. 01. 2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	14	1.966	150	1.585	1056,67	150	3701	26436
4.01. 01. 2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1	1	1	1,00	100,00	1	3	300
4.01. 01. 2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.	1	1	1	1,00	100,00	1	3	300
4.01. 01. 2.03.	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	4	2	2	2,00	100,00	2	6	150
4.01. 01. 2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	75	4	4	4,00	100,00	2	10	13
4.01. 01. 2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	50	2	1	1,00	100,00	1	4	8
4.01. 01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	50	300	112	112,00	100,00	0	412	824
4.01. 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	13	13	13	13,00	100,00	13	39	300
4.01. 01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	12	4	4,0	4	100,00	4	12	100
4.01. 01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	12	12	12	12	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.	12	12	12	12	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	12	12	12	12	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.	12	12	12	12	100,00	12	36	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	12	12	9	12	133,33	12	36	300
4.01. 01. 2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	12	12	12	12	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	12	12	12	12	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan.	8	0	1,0	1,00	100,00	3	4	50
4.01. 01. 2.07. 05	Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang disediakan.	4	200	24	24,00	100,00	50	274	6850
4.01.01. 2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan.	5	50	25	25,00	100,00	30	105	2100
4.01. 01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	12	12	12,0	12,00	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	6	6	6,0	6,00	100,00	6	18	300
4.01. 01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	165	150	153	153,00	100,00	150	453	275
4.01. 01. 2.09. 05	Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Mebel yang dipelihara.	5	50	83	83,00	100,00	50	183	3660
4.01. 01. 2.09. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	136	10	2	2,00	100,00	4	16	12
4.01. 01. 2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	12	175	222	222,00	100,00	147	544	4533

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 01. 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	12	17	2	12,00	600,00	2	31	258
4.01. 01. 2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	300	12	12	12,00	100,00	4	28	9
4.01. 01. 2.11. 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	12	2	2	2,00	100,00	2	6	50
4.01. 01. 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.**	**Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.**	83	**85,99**	82,7	86,42	104,50	87	259	313
4.01. 01. 2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.12. 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan.	12	0	12	-	0,00	12	12	100
4.01. 01. 2.12. 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 01. 2.13	**Penataan Organisasi**	**Indeks organisasi.**	1,916	**1,479**	1,734	1,86	106,98	2,214	6	290
4.01. 01. 2.13. 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	4	2	2	2,00	100,00	4	8	200
4.01. 01. 2.13. 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	6	2	2	2,00	100,00	6	10	167
4.01. 01. 2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	1	2	2	2,00	100,00	1	5	500
4.01. 01. 2.13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	2	2,00	100,00	2	6	300
4.01. 01. 2.13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	2	1	1	1,00	100,00	2	4	200
4.01. 01. 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.**	**Persentase terlaksananya Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan.**	100	**93,82**	92	92,59	100,64	93,48	280	280
4.01. 01. 2.14. 01	Fasilitasi Keprotokolan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.14. 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300
4.01. 01. 2.14. 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	12	12	12	12,00	100,00	12	36	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 02.	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.**	72,13	**94,62**	93,13	104,66	112,38	96,41	296	410
4.01. 02. 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan.**	**Persentase terlaksana nya administrasi tata pemerintahan.**	500	**100,00**	100	100,00	100,00	100	300	60
4.01. 02. 2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan.	7	2	2	2,00	100,00	7	11	157
4.01. 02. 2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	2	2	2	2,00	100,00	2	6	300
4.01. 02. 2.01. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	4	3	4	4,00	100,00	4	11	275
4.01. 02. 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.**	**Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat.**	463	**84,84**	92,6	90,26	97,47	95,44	271	58
4.01. 02. 2.02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	6	4	4	4,00	100,00	6	14	233
4.01. 02. 2.02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.	2	2	2	2,00	100,00	2	6	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 02. 2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	2	1	1	1,00	100,00	2	4	200
4.01. 02. 2.03	**Fasilitasi dan koordinasi Hukum.**	**Persentase terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat.**	433,8	**92,51**	86,8	88,71	102,20	93,8	275	63
4.01. 02. 2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun.	550	565	550	766,00	139,27	550	1881	342
4.01. 02. 2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum.	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum.	2	7	2	3,00	150,00	2	12	600
4.01. 02. 2.03. 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi.	550	644	550	766,00	139,27	550	1960	356
4.01. 02. 2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah.**	**Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti.**	500	**113,00**	100	170,00	170,00	100	383	77
4.01. 02. 2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	10	13	10,00	12,00	120,00	10	35	350
4.01. 02. 2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	1	1	1	1,00	100,00	1	3	300
4.01. 02. 2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	2	2	2	2,00	100,00	2	6	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 03.	**Program Perekonomian dan Pembangunan.**	**Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.**	72,13	**77,22**	69,19	76,98	111,25	84,31	239	331
4.01. 03. 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.**	**Persentase terlaksana nya kebijakan perekonomian daerah.**	78,6	**75,20**	78	71,71	91,70	78,4	225	287
4.01. 03. 2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	6	4	3	3,00	100,00	6	13	217
4.01. 03. 2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	4	4	4	4,00	100,00	4	12	300
4.01. 03. 2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.	1	1	1	1,00	100,00	1	3	300
4.01. 03. 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.**	**Perentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah.**	71,11	**70,73**	68,08	72,29	106,18	74,53	218	306
4.01. 03. 2.02. 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah.	6	6	6	6,00	100,00	6	18	300
4.01. 03. 2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	2	4	4	4,00	100,00	4	12	600
4.01. 03. 2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	4	5	4	4,00	100,00	4	13	325

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 03. 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.**	**Persentase terlaksana nya pengelolaan barang dan jasa.**	66,66	**85,73**	61,11	86,93	142,25	100	273	409
4.01. 03. 2.03. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	30	65	55	62,00	112,73	55	182	607
4.01. 03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik.	4	4	4	4,00	100,00	4	12	300
4.01. 03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	20	20	20	20,00	100,00	20	60	300
4.01. 03. 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.**	**Persentase ketaatan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan.**	78,6	**97,91**	100	100,00	100,00	100	298	379
4.01. 03. 2.04. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja.	2	2	2	2,00	100,00	2	6	300
4.01. 03. 2.04. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambang an dan Lingkungan Hidup.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian.	1	1	1	1,00	100,00	1	3	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
4.01. 03. 2.04. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	3	2	2	2,00	100,00	3	7	233

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2024 masuk dalam kategori baik, mengingat banyak capaian realisasi kinerja yang sudah melebihi target yang telah ditentukan. Adapun keterangan dan penjelasan terkait dengan keadaan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	112	Penambahan jumlah peserta karena adanya efisiensi biaya penyelenggaraan kegiatan
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	550	766	Permintaan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang cukup banyak terutama dalam bentuk Surat Keputusan Bupati
3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	3	Terdapat persidangan yang meibatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang perlu mendapatkan pendapingan dan bantuan hukum
4	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi.	550	766	Penambahan jumlah produk hukum yang didokumentasikan dalam JDIH Pemalang maupun adanya alih bentuk penyimpanan ke media digital atas arsip produk hukum yang ada
6	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja	10	12	Terdapat penambahan fasiitasi kerja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Sama Dalam Negeri			sama daerah dari perangkat daerah
7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	55	62	Terdapat penambahan jumlah permintaan fasilitasi pengadan barang dan jasa dari Perangkat Daerah yang disieuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah

Adapun progres pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan tercapai 27%. Kinerja tersebut terlihat rendah, namun demikian hal tersebut selaras dengan periodisasi rencana pencapaian target kinerja yang pada umumya akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV, dimana Sekretariat Daerah banyak mengandalkan kinerja dari hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi vertikal dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV ada pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dimana penyusunan Perda SOTK dan Tusi Perangkat Daerah akan selesai pada Bulan Agustus-November, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang didalamnya berisikan aktivitas pemantauan batas daerah sehingga perlu kesepakatan bersama dengan Kabupaten Tetangga maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tangah dalam pelaksanaan kegiatannya, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang pelaksanaannya terkendala mekanisme pelaksanaan kerjasama luar negeri mengingat hal tersebut terkait dengan regulasi yang diterbitkan oleh banyak pihak seperti Pemprov, Kemendagri, dan Kemenlu.

Dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II 2025, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja Sekretariat Daerah secara utuh, mengingat penyebab utamanya ada pada penempatan periodisasi target yang akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III 2025. Namun demikan, dalam upaya meminilalisir timbulnya risiko yang ada, maka Sekretariat Daerah telah melakukan upaya berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara peridik setiap bulan, sehingga diharapkan ada peringatan dini dan upaya mitigasi yang dapat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ditempuh untuk menjaga pelaksanaan kinerja dalam koridor yang telah disepakati bersama.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tiga sasaran kinerja dan dua Indikator Kinerja Kunci sebagai indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

I. Sasaran, yang meliputi:
   a. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.
   b. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.
   c. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana.

II. Indikator Kinerja Kunci, yang meliputi:
   a. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif.
   b. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

Rincian pencapaian kinerja disajikan dalam tabel berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2024

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024(Th.n-2)	Tahun 2025 (Th. n-1)	Tahun 2026 (Th. n)	Tahun 2027 (Th. n+1)	Tahun 2024 (Th. n-2)	Tahun 2025 (Th.n-1)	Tahun 2026(Th. n)	Tahun 2027 (Th. n+1)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.	-	-	92.27	93.13	94,40	-	94.69	-*	93.13	93.87	
2.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.	-	-	68.40	69.13	72,13	-	68.94	5*	69.13	71.52	
3.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	-	-	58.37	58.77	59,59	-	59.85	12,5*	58.77	59.18	
4.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	-	√	10.6	10.6	10.9	10.6	42.56	-	10.6	10.6	
5.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	√	57.10	57.30	57.5	57.30	43.96	-	57.3	57.30	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan koordinatif atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah telah memenuhi target yang telah ditentukan. Pencapaian kinerja didukung oleh pembagian kerja yang jelas sebagai bentuk pemberian amanah dari atasan ke bawahan yang merata dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan. Pelaksanaan koordinasi yang baik, diharapkan akan mencapai target kinerja pemerintah daerah yang dicapai melalui lintas sektoral, dimana masing-masing sektor akan bergerak kepada satu tujuan sesuai dengan perannya masing-masing.

Adapun kinerja atas IKK yang dibebankan kepada Sekretariat Daerah adalah kinerja layanan pengadaan dengan indikator Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Indikator Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif telah melampaui target yang ditentukan, hal tersebut didukung oleh upaya pembinaan maupun koordinasi yang sangat intensif kepada perangkat daerah, sehingga semua permasalahan maupun kendala dalam pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan dengan baik. Kedepan upaya pembinaan terkait pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah akan terus ditingkatkan melalui *coaching clinic* maupun layanan konsultasi dan pendampingan yang lebih intensif. Selain itu, dari sisi internal, peningkatan kompetensi dari pejabat pengadaan barang dan jasa juga terus dilakukan melalui pengiriman bintek maupun koordinasi dan *sharing* pengetahuan terkait proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan LKPP maupun daerah lain yang memiliki praktik yang lebih baik.

Sementara itu untuk indikator Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan masih belum bisa memenuhi target, yang disebabkan oleh kapasitas keuangan yang terbatas dan hal tersebut memiliki implikasi terhadap jumlah atau nilai belanja untuk dilakukan tender menjadi terbatas pula. Namun demikian, hal tersebut terus diupayakan lebih baik pada masa mendatang dengan dukungan kebijakan yang baik dan diiringi dengan perbaikan tata kelola birokrasi yang lebih baik pula.

Selain itu, terdapat Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang pencapaiannnya menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pelayanan Publik, dan Return of Assets BUMD. Capaian IRB Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 adalah BB (77,33) atau naik 8,36 dibandingkan tahun 2023. Capaian indikator ini pada Provinsi Jawa Tengah adalah 83,13*, Kota Tegal A (85,36), Kabupaten Pekalongan BB (76,98). Perbandingan kinerja tersebut dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Grafik 2.1 Komparasi Capaian Indeks RB Tahun 2023 dan 2024

Untuk capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 mendapat nilai 4,54 (Predikat A) atau mengalami kenaikan dibandingkan periode tahun 2023 dengan capaian 4,41 atau dengan predikat A- (Sangat Baik). Capaian ini bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah mendapat nilai 4,53, capaian tingkat nasional sebesar 4,41, dan Kabupaten Tegal sebesar 4,35.

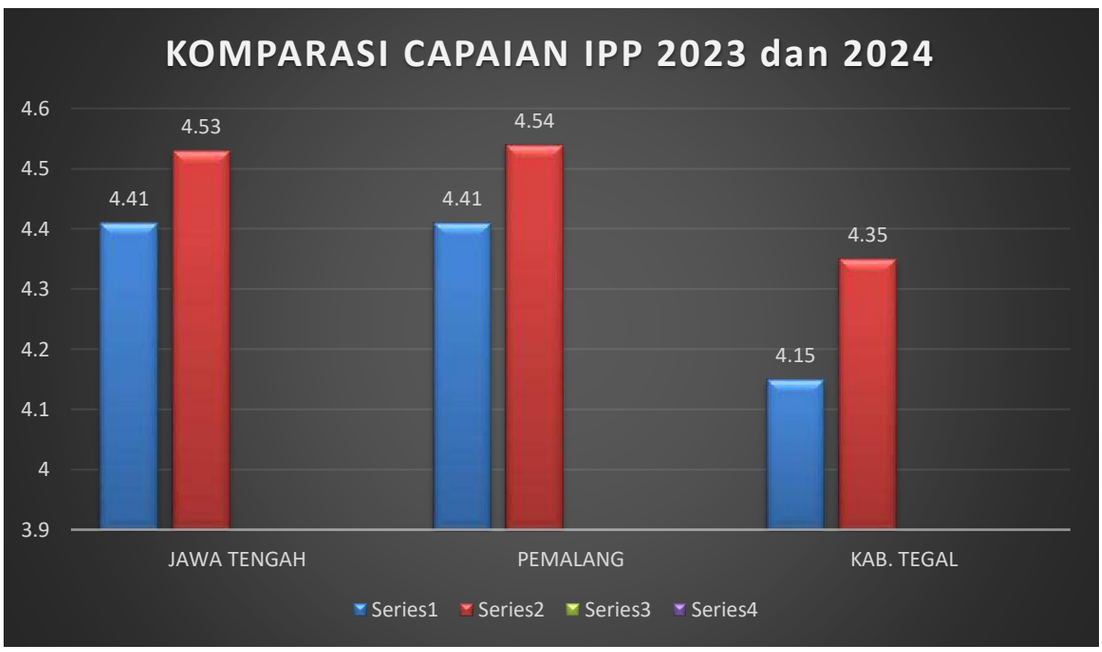

Grafik 2.2 Komparasi Capaian IPP 2023 dan 2024

Idikator Utama Pembangunan yang lain adalah Indeks Reformasi Hukum. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian Indeks

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dimulai Tahun 2022 yang merupakan tahap ujicoba penilaian Indeks Reformasi Hukum dan hasil penilaian tersebut belum menjadi salah satu indikator dalam Indeks Refromasi Birokrasi (IRB), dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 diwajibkan untuk dilaksanakan dan menjadi indikator dalam Indeks Refromasi Birokrasi (IRB), Kabupaten Pemalang pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 sebesar 96,72 (AA/Sangat Istimewa) atau mengalami kenaikan dari tahun 2023 dengan capaian mendapat nilai 56,86 dengan predikat Cukup. Kinerja IRH Kabupaten Pemalang tergolong sangat baik namun lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dengan capaian sebeesar 98,28, Kabupaten Tegal 97,78, Kabupaten Pekalongan 98,42. Dengan kondisi tersebut untuk bisa memacu kinerja yang lebih baik pada periode mendatang.

IUP yang terakhir adalah *Return on Assets* BUMD. ROA (*Return on Assets*) adalah indikator penting untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Capaian RoA pada BUMD di Kabupaten Pemalang tahun 2023 adalah 0,3. Adapun capaian pada tahun 2024 adalah 1,83, hal tersebut menunjukkan tren positif sebagai buah upaya peningkatan kinerja melalui penerapan strategi dan kenijakan yang tepat. Untuk meningkatkan ROA pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Optimalisasi Penggunaan Aset. Pastikan aset yang dimiliki digunakan secara maksimal dan efisien. Identifikasi aset yang tidak produktif dan cari cara untuk meningkatkan produktivitasnya atau mempertimbangkan penjualan aset tersebut.
2. Efisiensi Operasional Tingkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya produksi dan operasional. Ini bisa dilakukan melalui automasi proses, peningkatan manajemen rantai pasokan, dan pengelolaan inventaris yang lebih baik.
3. Diversifikasi Produk dan Layanan.Perluas produk dan layanan yang ditawarkan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Diversifikasi bisa membuka peluang pasar baru dan meningkatkan utilisasi aset.
4. Pengelolaan Keuangan yang Ketat.Kontrol ketat terhadap pengeluaran dan pengelolaan arus kas sangat penting. Pastikan bahwa dana digunakan dengan bijaksana dan tidak ada pemborosan.
5. Peningkatan Kualitas SDM. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Karyawan yang terampil dan termotivasi dapat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

6. Inovasi dan Teknologi. Adopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan produk atau layanan baru. Inovasi dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membuka sumber pendapatan baru.
7. Strategi Pemasaran yang Efektif.Perkuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Ini termasuk penggunaan media sosial, pemasaran digital, dan kampanye promosi yang tepat sasaran.
8. Manajemen Risiko yang Baik.Identifikasi dan kelola risiko bisnis dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat melindungi perusahaan dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kinerja keuangan.
9. Pemantauan dan Evaluasi Berkala.Lakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa strategi yang diterapkan memberikan hasil yang diharapkan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, BUMD dapat meningkatkan efektivitas penggunaan asetnya dan pada akhirnya meningkatkan ROA.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, fungsi Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Daeah menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun gambaran layanan Sekretariat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel. 2.5 Gambaran Layanan Sekretariat Daerah

No	Aspek Layanan	Kondisi Capaian Saat ini	Faktor Penyebab		Permasalahan Layanan Perangkat Daerah (PD)
			Internal	Eksternal	
1.	Fasilitasi pelaksanaan kerjasama daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah belum bisa melakukan identifikasi potensi kerjasama dalam menunjang keberhasilan kinerjanya	Keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran	Kurangnya pemahaman potensi kerjasama dengan pihak lain	Kurangnya SDM pengelola, keterbatasan anggaran, perlunya peningkatan penggalian potensi kerjasama pada PD
2.	Fasilitasi pemberian bantuan/hibah keagamaan	Keterlambatan pencairan bantuan	Keterbatasan SDM, perlunya peningkatan pencermatan persyaratan administratif untuk pengusulan dan pencairan bantuan	Keterlambatan penyampaian usulan, kurang lengkapnya berkas administrasi, masih terdapat kesalahan dalam penyeunan berkas administrasi	Kurangnya SDM, Realisasi kinerja yang tidak sesuai rencana jadwal
3.	Fasilitasi Penyusunan Produk Perundangan Daerah	Proses penyelesaian dan penerbitan yang lama	Keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran	Dinamika perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat, terdapat mekanisme yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama	Kurangnya SDM pengelola yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian produk hukum daerah, masih rendahnya antisipasi Perangkat Daerah dalam menentukan kebutuhan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah
4.	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	Progres kinerja tidak sesuai rencana kinerja, Pemantauan baru sebatas pekerjaan fisik hasil tender	Kurangnya SDM, kurangnya sarana prasarana pendukung monev	Kurang cermatnya penentuan target kinerja oleh perangkat daerah, keterlambatan penyampaian pelaporan kinerja, tidak bisa mengemukakan	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam pengendalian pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek Layanan	Kondisi Capaian Saat ini	Faktor Penyebab		Permasalahan Layanan Perangkat Daerah (PD)
			Internal	Eksternal	
				permasalahan yang terjadi	
5.	Fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa	Masih terdapat perangkat daerah yang belum melengkapi persyaratan administratif pengadaan secara tepat waktu, perlunya peningkatan pemahaman dalam penggunaan produk TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kurangnya SDM	Perlunya peningkatan kompetensi tim pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah, Perlunya pemahaman terkait penggunaan produk sesuai peraturan TKDN	Keterbatasan SDM dan peningkatan kompetensi dalam hal pengadaan barang dan jasa yang berdampak pada belum optimalnya layanan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan barang produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
6.	Pengelolaan BUMD	Belum optimalnya kinerja BUMD dalam mendukung pembangunan daerah	Kurangnya SDM, perlunya peningkatan kompetensi SDM	Regulasi yang mengatur operasional bidang usaha yang dijalani oleh BUMD	Kurangnya SDM pengelola dan peningkatan kompetensi SDM
7.	Implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah	Belum optimalnya pelaksanaan implementasi RB pada perangkat daerah dan berdampak pada pencapaian RB tingkat Kabupaten	Kurangnya SDM pengelola	Perlunya peningkatan pemahaman pentingnya implementasi RB pada semua lini di perangkat daerah, perubahan tata cara penilaian implementasi RB, adanya aturan baru terkait RB Tematik yang belum dipahami suetuhnya oleh perangkat daerah pengampu	Belum optimalnya implementasi RB pada semua lini yang disebabkan oleh kurangnya SDM pengelola dan peningkatan kompetensi, tidak adanya nilai implementasi RB pada masing-masing perangkat daerah
8.	Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Perlunya peningkatan kualitas layanan keprotokolan dan	Kurangnya SDM pengelola, intensitas pekerjaan	Kurangnya pemahaman terkait aturan keprotokolan maupun	Kurang optimalnya layanan keprotokolan dan komunikasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek Layanan	Kondisi Capaian Saat ini	Faktor Penyebab		Permasalahan Layanan Perangkat Daerah (PD)
			Internal	Eksternal	
		komunikasi pimpinan	yang sangat tinggi, dan keterbatasan anggaran	komunikasi pimpinan	pimpinan karena keterbatasan SDM, sarpras, dan anggaran
9.	Fasilitasi kerjasama daerah	Kerja sama daerah belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan terkesan pelaksanaannya tanpa berlandaskan pada perencanaan yang matang	Keterbatasan SDM	Kurangnya pemahaman terkait alur porses kerja sama sesuai dengan ketentuan berlaku	Belum optimalnya pemanfaatan kerjasama dalam menunjang pembangunan daerah
		Adanya indikasi kerjasama yang diusulkan tidak dapat direalisasikan	Keterbatasan SDM	Kurangnya koordinasi dengan calon mitra kerja sama	

Terkait dengan hal-hal pencapaian kinerja tersebut diatas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum, dimana pada tahun 2024 terealisir sebesar 59,85 % dari target kinerja sebesar 58,37%. Peningkatan koordinasi di bidang administrasi umum sangat dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
- Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesejahteraan rakyat di tahun 2024, yaitu sebesar 94,69 % dari target 92,27%. Peran koordinasi di bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.
- Pentingnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan, pada tahun 2024 capaiannya 77,13% dari target kinerja sebesar 68,40%. Peran koordinasi di bidang perekonomian dan pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.
- Perlunya penambahan kuantitas dan peningkatan kompetensi SDM guna mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya layanan prima kepada *stake holder*.
- Belum optimalnya pemanfaatan Kerjasama/sinergi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang.
- Perlunya peningkatan jumlah pemilihan penyedia barang dan jasa melalui metode kompetitif yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta peningkatan pemanfaatan barang produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Perlunya peningkatan penggunaan E-Katalog lokal untuk bisa mendukung pertumbuhan UMKM lokal dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- Perlunya meningkatkan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk melakukan evaluasi penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Perlunya optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan layanan masyarakat yang efektif, efisien, dan bebas KKN, yang dicerminkan dalam dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Selain itu menjadi hal yang penting untuk mempertimbangkan dinamika kenijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait arah kebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian tujuan pembangunan. Efisiensi belanja pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang harus dipatuhi, sehingga memerlukan pencermatan yang baik terkait pelaksanaan kegiatan pada tahaun 2026. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.6 Analisa Kebutuhan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2026

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				58.227.175.588					50.980.686.946	
4	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Pemalang	Capaian Kinerja Bidang Administrasi umum	89,17	**38.050.556.188**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Pemalang	Capaian Kinerja Bidang Administrasi umum	89,17	**32.552.852.746**	
4	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Pemalang			**22.750.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**22.750.000**	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.750.000	
4	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**21.859.086.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23.349.961.000**	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	174 Orang/ bulan	21.823.401.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	174 Orang/ bulan	23.314.276.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.485.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.485.000	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.600.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.600.000	
4	1	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**5.500.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**5.500.000**	
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.500.000	
4	1	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**153.317.300**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**7.041.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	5.000.000	
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	4.625.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.891.000	
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	84.160.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	75.000	
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	13 Orang	14.532.300	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	13 Orang	75.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.602.134.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**591.816.000**	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	45.085.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	21.867.000	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	28.724.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	19.280.000	
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatanrumah tangga yang disediakan	12 Paket	239.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatanrumah tangga yang disediakan	12 Paket	7.250.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.230.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.710.000	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	88.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	62.135.000	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	9 Dokumen	88.375.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	9 Dokumen	51.324.000	
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	285.520.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	19.250.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	
4	1	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.569.428.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**9.377.800**	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1.750.500.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	150.000	
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	350.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	9.127.800	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	468.928.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	100.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.837.105.838**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.439.113.588**	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.240.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.220.000	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	1.109.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	1.100.000.000	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	39.948.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.455.265.838	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.283.945.588	
4	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.205.316.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**554.867.000**	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	228.655.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	91.340.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	661.745.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	159 Unit	308.660.000	
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Mebel yang dipelihara	50 Unit	64.750.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Mebel yang dipelihara	50 Unit	7.700.000	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.141.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	108.817.000	
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	175 Unit	108.286.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	147 Unit	38.350.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**1.035.318.000**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**2.072.426.858**	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	785.318.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.028.926.858	
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	200.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 ORANG	50.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 ORANG	3.500.000	
4	1	1	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**				**3.661.250.750**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**				**1.700.000.000**	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	1.911.250.750	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	800.000.000	
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 Paket	1.000.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 Paket	600.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	12 Paket	750.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	12 Paket	300.000.000	
4	1	1	2.13		**Penataan Organisasi**		**Indeks Organisasi**		**608.000.000**	**Penataan Organisasi**		**Indeks Organisasi**		**400.000.000**	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 Dokumen	303.004.220	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 Dokumen	100.000.000	
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	116.955.750	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	80.000.000	
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birkrasi	2 Dokumen	61.092.300	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birkrasi	2 Dokumen	80.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	46.752.700	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	50.000.000	
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	80.195.030	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	90.000.000	
4	1	1	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**491.350.000**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**399.999.500**	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	149.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	200.850.000	
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Laporan	69.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 Laporan	69.960.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 Laporan	273.350.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 Laporan	129.189.500	
4	1	3			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**1.368.080.200**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**1.162.177.000**	
4	1	3	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**				**362.029.000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**				**362.177.000**	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	6 Dokumen	65.930.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen	66.078.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	4 Laporan	210.109.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	4 Laporan	210.109.000	
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	85.990.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	85.990.000	
4	1	3	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**398.004.500**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**334.059.500**	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	307.142.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	258.197.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	64.320.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	57.855.000	
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 Dokumen	26.542.500	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 Dokumen	18.007.500	
4	1	3	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**				**76.934.500**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**				**65.940.500**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrnisasi, dan evaluasi kebijakan urusan kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	2 Dokumen	44.934.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrnisasi, dan evaluasi kebijakan urusan kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	2 Dokumen	44.934.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, ststistik, persandian	1 Dokumen	14.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, ststistik, persandian	1 Dokumen	6.506.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	2 Dokumen	18.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	2 Dokumen	14.500.000	
4	1	3	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**531.112.200**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**400.000.000**	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	55 Dokumen	129.760.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	55 Dokumen	131.144.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil layanan pengadaan secara elektronik	4 Dokumen	300.735.200	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil layanan pengadaan secara elektronik	4 Dokumen	215.650.000	
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pemalang	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	100.617.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pemalang	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	53.206.000	
4	1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**18.808.539.200**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**17.265.657.200**	
4	1	2	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**				**434.650.000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**				**310.000.000**	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil penataan administrasi pemerintahan	7 Dokumen	107.750.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil penataan administrasi pemerintahan	2 Dokumen	88.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2 Dokumen	36.900.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2 Dokumen	13.000.000	
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasiitasi pelaksanaan otonomi daerah	4 Dokumen	290.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasiitasi pelaksanaan otonomi daerah	3 Dokumen	209.000.000	
4	1	2	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**				**154.400.000**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**				**90.000.000**	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	10 Dokumen	112.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	10 Dokumen	75.000.000	
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	1 Dokumen	35.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	1 Dokumen	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	2 Laporan	7.400.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	2 Laporan	5.000.000	
4	1	2	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				**17.780.370.500**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				**16.426.538.500**	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	6 Dokumen	17.510.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	4 Dokumen	16.251.538.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	120.370.500	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	75.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
4	1	2	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**439.118.700**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**439.118.700**	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	162.553.250	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	162.553.250	
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pemalang	Jumlah Kasus yang yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	2 kasus	154.695.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pemalang	Jumlah Kasus yang yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	2 kasus	154.695.000	
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Pemalang	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	550 Dokumen	121.870.450	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Pemalang	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	550 Dokumen	121.870.450	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya pelaksanaan sinergi pembangunan dengan usulan masyarakat, Sekretariat Daerah mengakomodir usulan masyarakat baik secara laungsung melalui penyampaian usulan oleh lembaga, sebagai bentuk penerapan *bottom up planning*. Namun demikian usulan masyarakat tersebut masih dilakukan penyaringan dan verifikasi ulang untuk memastikan kesesuaian dengan isu penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Berikut ini adalah usulan masyarakat yang diperoleh melalui hasil reses dari Anggota DPRD yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Masjid Baiturrahman RT 01 RW 02 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	Renovasi Masjid Baiturrahman RT 01 RW 02 Desa Mojo Kecamatan Ulujami	150.000.000	
		Dkh Gumingsir RT 05 RW 04 Desa Limbangan Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas Timur Desa Limbangan.	200.000.000	
		Dsn Karangsembung RT 02 RW 07 Desa Jebed Selatan Kec. Taman, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Nurul Ibrahim (Nurul Ulum)	25.000.000	
		Dkh Nusa RT 14 RW 02 Desa Karangsari Kec. Pulosari, Kab. Pemalang	Renovasi Masjid Baetussomad Desa Karangsari	25.000.000	
		Dsn Sigedang RT 07 RW 05 Desa Mojo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	Rehabilitasi Masjid Al-Ikhlas Dsn Sigedang Desa Mojo	50.000.000	
		Perum Pemalang Indah Regency VI RW 18 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Pembangunan Musholla Miftakhul Barokah Kelurahan Bojongbata	25.000.000	
		Dusun Sipanjang RT 04 RW 01 Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	Rehabilitasi Musholla Baiturrohman desa Kuta	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		RT 06 RW 02 Desa Pedagung kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	Pembangunan Musholla Roudlotul Jannah Desa Pedagung	25.000.000	
		Dusun Harjomulyo, RT 01 RW 04 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Pembangunan/Rehab Musholla AL HIDAYAH, Dusun Harjomulyo, RT 01 RW 04 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang	10.000.000	
		Jl. Ir Sutami RT 001 RW 010, Kelurahan Bojongbata,, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Rehab TPQ Hikmatul Mukarromah. Jl. Ir Sutami RT 001 RW 010, Kelurahan Bojongbata,, Kecamatan Pemalang	10.000.000	
		Dusun Harjomulyo RT 02 RW 04 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Pembangunan Tempat Wudhu Mushola Baitul Aminin Desa Wanamulya	10.000.000	
		RT 07 RW 02 Desa Banglarangan Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	Pembangunan TPQ BAITUL MUTTAQIN, RT 07 RW 02 Desa Banglarangan Kec. Ampelgading	100.000.000	
		Dusun Slarang/Kedungsantri, Jalan Raya Slarang KM 10, RT 003 RW 006 Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Renovasi Lanjutan Masjid BAITUL KARIM Dusun Slarang/Kedungsantri, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang	100.000.000	
		MTs Daarussalaam Kuta, Jl. Lingkar Selatan Masjid Nurul Huda Dusun Kuta Lor, RT 006 RW 002, Desa Kuta Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Belajar Mengajar untuk MTs DAARUSSALAAM Kuta, Kecamatan Belik	100.000.000	
		RT 13 RW 04 Dusun Sirongge Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Rehab Gedung Ponpes AL-Ghozali, Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul	50.000.000	
		Dukuh Sirongge RT 16 RW 04 Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul, , Kab. Pemalang	Rehab Gedung Madrasah Diniyah Minhajutthullab 5 Tundagan	50.000.000	
		Dukuh Rejomulyo, RT 16 RW 04 Desa Tundagan Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang	Rehab Gedung TPQ AL-HIDAYAH, Dukuh Rejomulyo, Desa Tundagan Kec. Watukumpul	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Dusun Jaha RT 19 RW 05, Desa Tundagan Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang	Rehab Gedung Madrasah Diniyah MINHAJUTTHULLAB 3 Dusun Jaha Desa Tundagan Kec. Watukumpul	25.000.000	
		Dusun Sirongge RT 14 RW 04, Desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Sapras Jam"iyah Manaqib HUBUL WATHON Dusun Sirongge Desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul	25.000.000	
		RT 003 RW 001 desa Cikadu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Yayasan AMONG ROGO JATI Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul.	50.000.000	
		Dusun Kranding RT 028 RW 004 Desa Cibuyur, Kec. Warungpring, Kab. Pemalang	MI AL AMIN Cibuyur, Dusun Kranding RT 028 RW 004, Desa Cibuyur, Kec. Warungpring	100.000.000	
		jl.jend. A. Yani Gg. kenanga II No. 247 purwoharjo comal, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan PAC FATAYAT NU COMAL	25.000.000	
		Gang Kenanga 2 Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan MWC NU Kecamatan Comal	100.000.000	
		jl. Raya Desa Mojo RT002 RW 002Desa Mojo kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan PR Fatayat NU Desa MOJO	10.000.000	
		RT 01 RW 01 Desa babakan kec. bodeh kab. pemalang, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah mushola Al amin Desa babakan	15.000.000	
		DUSUN KARANG SARI DESA KETAPANG, KECAMATAN ULUJAMI	REHABILITASI MASJID AL -FALAH DUSUN KARANGSARI KETAPANG	50.000.000	
		RT 01 RW 02 Desa Gedangan, kelurahan purwoharjo kecamatan comal, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah Masjid Al hidayah Desa gedangan, purwoharjo kec, comal	25.000.000	
		RT 001 RW 003 DUKUH KEBUKURAN DESA KEBOJONGAN KECAMATAN COMAL	SARANA PRASARANA JAMIYAH AL IKHLAS PUTRA DESA KEBOJONGAN	15.000.000	
		Dukuh dua, RT 01 RW 02 desa ambowetan kec. ulujami , Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan PAC ANSOR kec. ulujami	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		jl. jend. A Yani Gg. Kenanga II nomor 247 Purwoharjo kec. comal, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan PAC Ansor Kec. comal	15.000.000	
		Jl. Pemuda No.51, Mulyoharjo, Kec. Pemalang	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung PC IPNU Kabupaten Pemalang	40.000.000	
		Jl. Sawo RT 02 RW 01 Desa Jraganan Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana rumah ibadah Mushola Al - Hidayah Desa Jraganan	10.000.000	
		Masjid Nurul Huda Dukuh Gantungan RT 02 RW 07 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Masjid butuh direhab	20.000.000	
		Yayasan Pondok Pesantren Al Hikam Dusun Sibulu Desa Gunungtiga Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	ponpes butuh pengembangan	20.000.000	
		Madrasah Miftahul Mualimin Dusun Penusupan Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Perlengkapan Madarasah perlu diperbaharui	10.000.000	
		Majlis Ta'lim Daaruttauhid Dusun Krajan Desa Gapura Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Gedung perlu direhab	15.000.000	
		Masjid Al Awwabin Dusun Kaliayur DesaMajalangu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Masjid perlu direhab	40.000.000	
		Taman Pendidikan Al Quran Miftahul Jannah Dusun Bungkus Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Bangunan perlu direhab	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Yayasan Ponpes Darunnajah Dusun Pandanwangi RT 52 RW 11 Desa Asemdoyong Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Pondok butuh pengembangan	20.000.000	
		Masjid jami Al Barokah Dusun Kalilingseng Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Masjid perlu direhab	25.000.000	
		PR Fatayat NU Desa Cawet Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Butuh biaya untuk operasional	15.000.000	
		Yayasan Jami Nurul Huda Desa Simpur Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	perlu dibangun tangga	20.000.000	
		TPQ Al Ikhlas Dusun Barong Desa Simpur Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	TPQ perlu direhab	15.000.000	
		Masjid At Taqwa Dusun Pandanwangi Desa Asemdoyong Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Masjid perlu direhab	20.000.000	
		Kelurahan Kebondalem, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Jamiyah AN-NUR Kelurahan Kebondalem	20.000.000	
		Desa Saradan, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) TPQ Darul Mutaqim Desa Saradan	15.000.000	
		Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Fattayat NU Kecamatan Pemalang	15.000.000	
		Griya Taman Mulia Jalan Anggrek No. 01 RT 002 RW 017 Desa Taman Kecamatan Taman	Pembangunan gedung pendidikan keagamaan Yayasan Kendra Utama Bahasa	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Kelurahan Kebondalem, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Jamiyah Yasin Tahlil Darrul Amin Kelurahan Kebondalem	10.000.000	
		Jalan Gurameh RT 01 / RW 05 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Pembangunan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Pembuatan Atap Galvalum di samping Gedung NU Sugihwaras	15.000.000	
		RT 03 / RW 02 Dusun Pelawangan, Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah berupa Mushola AL HIKMAH RT 03 /RW 02 Dusun Pelawangan , Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang	15.000.000	
		Taman Asri C.19 RT. 02 RW. 05 Taman Pemalang , Kab. Pemalang	Pengadaan alat praktik dan peraga KB Berbaur, Taman Asri C.19 RT. 02 RW. 05 Taman Pemalang	95.000.000	
		PAC GP Ansor Kecamatan Taman Pemalang, Dusun Sarwodadi RT. 01 RW. 01 Desa Cibelok Kec. Taman Pemalang , Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana PAC GP Ansor Kecamatan Taman Pemalang, Dusun Sarwodadi RT. 01 RW. 01 Desa Cibelok Kec. Taman Pemalang	15.000.000	
		TPQ Matholi'ul Ulum Asemdoyong, RT. 36 RW. 07 Asemdoyong Taman Pemalang , Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana TPQ Matholi'ul Ulum Asemdoyong, RT. 36 RW. 07 Asemdoyong Taman Pemalang	10.000.000	
		Desa Asemdoyong, RT. 19 RW. 03 Asemdoyong Taman Pemalang , Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana Kelompok Tani "Margasari Mandiri" Desa Asemdoyong, RT. 19 RW. 03 Asemdoyong Taman Pemalang	30.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Ponpes Darul Falah An Nahdliyyah Desa Kedungbanjar, RT. 01 RW. 03 Desa Kedungbanjar Taman Pemalang, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana Ponpes Darul Falah An Nahdliyyah Desa Kedungbanjar, RT. 01 RW. 03 Desa Kedungbanjar Taman Pemalang	10.000.000	
		Majelis Ta'lim NGAKHAQ (Ngaji Khatmil Qur'an), RT. 01 RW. 13 Kalibaros Taman Pemalang, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana Majelis Ta'lim NGAKHAQ (Ngaji Khatmil Qur'an), RT. 01 RW. 13 Kalibaros Taman Pemalang	10.000.000	
		Majelis Ta'lim Assyiefa, RT. 04 RW. 05 Desa Wanarejan Utara Taman Pemalang, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana Majelis Ta'lim Assyiefa, RT. 04 RW. 05 Desa Wanarejan Utara Taman Pemalang	10.000.000	
		Masjid Baitul Makmur Banjardawa, Jl. Banda Desa Banjardawa Taman Pemalang, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Baitul Makmur Banjardawa, Jl. Banda Desa Banjardawa Taman Pemalang	15.000.000	
		PR Fatayat NU Desa Cibelok, Desa Cibelok Kec. Taman Pemalang, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana PR Fatayat NU Desa Cibelok, Desa Cibelok Kec. Taman Pemalang	10.000.000	
		DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara Pemalang, Jl. Lombok RT 03 RW 06 Desa Kaligelang Kec. Taman Kab. Pemalang , Kab. Pemalang	DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara Pemalang, Jl. Lombok RT 03 RW 06 Desa Kaligelang Kec. Taman Kab. Pemalang	15.000.000	
		Ponpes Darul Falah Annahdliyah , RT 01 RW 03 Desa Kedungbanjar Kec Taman Pemalang, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana Ponpes Darul Falah Annahdliyah , RT 01 RW 03 Desa Kedungbanjar Kec Taman Pemalang	10.000.000	
		Majelis Taklim NOOR UMAH, Jl. Wahid Hasyim RT 04 RW 04 Desa Kaligelang, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana Majelis Taklim NOOR UMAH, Jl. Wahid Hasyim RT 04 RW 04 Desa Kaligelang	10.000.000	
		Pengadaan Sarana Prasarana Majelis Taklim NUR QOLBU, Jl. Dr. Waihidin Sudirohusodo Desa Kaligelang Kecamatan Taman , Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana Prasarana Majelis Taklim NUR QOLBU, Jl. Dr. Waihidin Sudirohusodo Desa Kaligelang Kecamatan Taman	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		TPQ An Nadyatudz Dzikro Warungpring, RT. 003 RW. 001 Dusun Bengkeng Utara Desa Warungpring Kab. Pemalang , Kab. Pemalang	Rehab TPQ An Nadyatudz Dzikro Warungpring, RT. 003 RW. 001 Dusun Bengkeng Utara Desa Warungpring Kab. Pemalang	15.000.000	
		TPQ "Roudlotul Jannah" Desa Kaligelang, Jl. Sumbodo No. 62 RT. 01 RW. 03 Desa Kaligelang Taman Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	Pengadaan sarana prasarana TPQ "Roudlotul Jannah" Desa Kaligelang, Jl. Sumbodo No. 62 RT. 01 RW. 03 Desa Kaligelang Taman Kab. Pemalang	10.000.000	
		TPQ Nurul Ulum Desa Jebed Selatan, Dusun Karangsembung RT. 07 RW. 02 Desa Jebed Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	Pengadaan sarana prasarana TPQ Nurul Ulum Desa Jebed Selatan, Dusun Karangsembung RT. 07 RW. 02 Desa Jebed Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang	10.000.000	
		TPQ Al-Ihsan Jl. Lombok RT 01 RW 05 Dea Kaligelang, Jl. Lombok RT 01 RW 05 Desa Kaligelang , Kab. Pemalang	TPQ Al-Ihsan Jl. Lombok RT 01 RW 05 Dea Kaligelang, Jl. Lombok RT 01 RW 05 Desa Kaligelang	10.000.000	
		Madrasah diniyah Baiturrahman Desa Serang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	PENGADAAN SARANA PRASARANA	35.000.000	
		Dusun Kepuh RT.002 RW.005 Desa Wonogiri Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU TPQ HIDAYATULLAH DUSUN KEPUH DESA WONOGIRI KECAMATAN AMPELGADING	25.000.000	
		RT.003 RW.001Desa Cibiyuk Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	PERBAIKAN SARANA PRASARANA NURUL YAQIN Desa Cibiyuk Kecamatan Ampelgading	20.000.000	
		KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG, Kab. Pemalang	Sarana dan Prasarana PAC FATAYAT NU Ampelgading	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG, Kab. Pemalang	Pembelian Sarana dan Prasarana PAC MUSLIMAT NU Ampelgading	25.000.000	
		Dusun Kebagusan Pulo Desa KebagusanKecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	Pembelian Sarana dan Prasarana PR. ANSOR Kebagusan Pulo Kecamatan Ampelgading	15.000.000	
		Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul	Pembangunan gedung pendidikan keagamaan PR NU Desa Majalangu	50.000.000	
		Rt. 03 Rw. 03 Desa Kauman Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah Musholla Maunah Desa Kauman Comal	10.000.000	
		RT. 2 RW. 13 Sirandu Desa Purwosari Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Pembangunan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) TPQ Hidayatul Qur'an Sirandu Desa Purwosari Comal	10.000.000	
		Rt. 31 Rw. 06 Dukuh Bengkelung Desa Sarwodadi Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Madin Nurrohmah Desa Bengkelung Kecamatan Comal	23.000.000	
		Rt 9 rw 3 Desa Geged Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/pemeliharaan rumah ibadah mushola al huda desa gedeg comal	10.000.000	
		Jalan Irigasi Timur Desa Gintung Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Pembangunan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) TPQ & MADIN Bani Yasir Pecangakan comal	10.000.000	
		Rt 3 rw 5 desa kauman kecamatan comal, Kab. Pemalang	Pembangunan rumah ibadah masjid al ikhlas prompong desa kauman kecamatan comal	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		TPQ HUSNUL KHOTIMAH DESA KANDANG RT 09 RW 02 KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) TPQ HUSNUL KHOIMAH DESA KANDANG KEC. COMAL	20.000.000	
		Rt 2 RW 5 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Pembangunan gedung pendidikan keagamaan TPQ Darussalam Susukan	10.000.000	
		Dukuh Sidodadi Desa Gombong Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Ponpes Dikrussholawat Assa'adah Binurillah Dukuh Sidodadi Desa Gombong	65.000.000	
		RT. 006 RW. 002 Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Ponpes Al Iman Putri Desa Cikadu	20.000.000	
		Dukuh Sipedang Desa Cawet Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan (TPQ, Majlis Taklim,Madrasah, Ponpes dll) Madrasah Diniyah An-Nur Dukuh Sipedang Desa Cawet	20.000.000	
		Jalan Raya Belik-Moga KM.01 Desa Belik Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Praktek dan Peraga (RA/MI/MTS) MTs Mambaul Ma'arif Belik	180.000.000	
		Jalan Raya Belik - Pemalang 52356 Desa Belik Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana dan Prasarana / rehab Bangunan Gedung kepada Lembaga / Organisasi Nirlaba yang telah berbadan hukum/Memilik surat keterangan Terdaftar yang bersifat Keagamaan MWCNU Kecamatan Belik	90.000.000	
		Masjid Al Falah, RT.04 RW. 02 Dukuh Bulu Desa Belik Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Pembangunan rumah ibadah Masjid Al Falah Dukuh Bulu Desa Belik	90.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Yayasan Nailul Ulum Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	pengembangan sarana prasrana yang tidak optimal	30.000.000	
		Mushola Nurul Huda Sarwodadi Desa Sarwodadi Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	Mushola perlu direhab	20.000.000	
		Madrasah Shibyanul Qur'an Ponpes Al-Muttaqin RT 08 RW 02 Purana	Pembangunan gedung Madrasah Shibyanul Qur'an Ponpes Al-Muttaqin	170.000.000	
		MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN BANTARBOLANG Jl. Karang Suru Gedung MWCNU Kecamatan Bantarbolang 52352, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana dan PrasaranaMWC NU Bantarbolang	30.000.000	
		Kec. Warungpring, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana dan Prasarana MWC NU Warungpring	30.000.000	
		Dsn Karangtengah RT 05 RW 04, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan TK Muslimat Salafiyah Dsn Karangtengah	25.000.000	
		RT 01 RW 01 Karanganyar, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	Pembangunan rumah ibadah Masjid Nurul Huda	30.000.000	
		Jl.Karangsuru Kelurahan Bantarbolang, Kab. Pemalang	Bantua n Sarana dan Prasarana Fatayat PAC Bantarbolang	50.000.000	
		Jalan Trans Kalimantan Dusun Kandang 2 Desa Kandang Kec Comal, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Darul Muttaqin Jalan Trans Kalimantan Dusun Kandang 2 Desa Kandang Kec Comal	100.000.000	
		Dusun Kapangsari Rt 7 Rw 6 Kelurahan Petarukan Kec Petarukan, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Nurul Huda Dusun Kapangsari Rt 7 Rw 6 Kelurahan Petarukan Kec Petarukan	20.000.000	
		Dukuh Krajan Barat Rt 4 Rw 6 Desa Sima Kec Moga, Kab. Pemalang	Pembangunan Gedung Pendidikan Keagamaan TPQ Nurul Muawanah Dukuh Krajan Barat Rt 4 Rw 6 Desa Sima Kec Moga	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Rt 02 Rw 3 Dusun Gombong Kerjan Desa Gombong, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana pendidikan keagamaan TPQ Roudhotul Jannah Rt 02 Rw 3 Dusun Gombong Kerjan Desa Gombong	25.000.000	
		Dusun Danayasa Rt 06 Rw 06 Desa Kaligelang Kec Taman, Kab. Pemalang	Rehab Madrasah Diniyah Takmiliyah Ar-Raudloh Dusun Danayasa Rt 06 Rw 06 Desa Kaligelang Kec Taman	50.000.000	
		Jalan Pancaniti Rt 10 Rw 01 Desa Jrakah Kec Taman, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Pagar Masjid Shirotul Jannah Jalan Pancaniti Rt 10 Rw 01 Desa Jrakah Kec Taman	50.000.000	
		Jalan Irian Rt 1 Rw 3 Dusun 1 desa Pedurungan Kec Taman, Kab. Pemalang	Rehab Menara Masjid Baitussalam Jalan Irian Rt 1 Rw 3 Dusun 1 desa Pedurungan Kec Taman	25.000.000	
		dusun pejalaran Rt 5 Rw 2 Desa Kendaldoyong Kec Petarukan, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana TPQ Al Hikmah dusun pejalaran Rt 5 Rw 2 Desa Kendaldoyong Kec Petarukan	15.000.000	
		Rt 21 Rw 4 Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Baitul Mu'minin Rt 21 Rw 4 Desa Tegalsari Timur Kec Ampelgading	15.000.000	
		Dukuh Gintung Rt. 04 Rw. 09 Desa Sima Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Masjid BAETUSSALAM Dukuh Gintung Rt. 04 Rw. 09 Desa Sima Kec Moga	15.000.000	
		Dk. Gintung Rt 01 Rw. 08 Desa Sima Kecamatan Moga , Kab. Pemalang	Rehab Mushola Al Ikhlas Dk. Gintung Rt 01 Rw. 08 Desa Sima Kecamatan Moga	15.000.000	
		Jalan bakung Rt 3 Rw 6 Desa Moga Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Baitul Latif Jalan bakung Rt 3 Rw 6 Desa Moga Kec Moga	20.000.000	
		Dukuh Tetep Desa Sima Kec. Moga, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Baitul Muttaqin Dukuh Tetep Desa Sima Kec. Moga	20.000.000	
		Dusun Benjaran Rt 18 Rw 3 Desa Plakaran Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Gedung Madrasah Diniyah Darul Ulum Dusun Benjaran Rt 18 Rw 3 Desa Plakaran Kec Moga	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Dukuh Pucung Rt 16 Rw 4 Desa Walangsanga Kec Moga, Kab. Pemalang	Pembangunan Gedung Majelis Ta'lim Matlaul Anwar Dukuh Pucung Rt 16 Rw 4 Desa Walangsanga Kec Moga	15.000.000	
		Desa Pulosari Dukuh Kerajan Rt 8 Rw 2 Kec Pulosari, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Majlis Zawwiyah Nusantara Joyokusumo Attohir Desa Pulosari Dukuh Kerajan Rt 8 Rw 2 Kec Pulosari	20.000.000	
		Rt 1 Rw 1 Desa Pepedan Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Sa'dul Falah Rt 1 Rw 1 Desa Pepedan Kec Moga	20.000.000	
		Rt 8 Rw 5 Desa Moga Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Attaqwa Moga Rt 8 Rw 5 Desa Moga Kec Moga	15.000.000	
		Jalan Raya Moga Rt 1 Rw 4 Desa Moga Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Anni'mah Jalan Raya Moga Rt 1 Rw 4 Desa Moga Kec Moga	15.000.000	
		Desa Moga Rt 3 Rw 7 Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Baitul Amin Desa Moga Rt 3 Rw 7 Kec Moga	15.000.000	
		Jalan seruni Rt 1 Rw 6 Desa Moga, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Baitul Karim Jalan seruni Rt 1 Rw 6 Desa Moga	15.000.000	
		Jalan Anggrek Rt 2 Rw 7 Desa Moga Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Baitussyarif Jalan Anggrek Rt 2 Rw 7 Desa Moga Kec Moga	15.000.000	
		Jalan Solasih Rt 2 Rw 8 Desa Moga Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Baiturokhim Jalan Solasih Rt 2 Rw 8 Desa Moga Kec Moga	15.000.000	
		Dukuh Krajan Desa Sima Kec Moga, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Masjid Baetul Chamid Dukuh Krajan Desa Sima Kec Moga	15.000.000	
		Jalan Manggar Rt 1 Rw 7 Desa Moga Kec Moga, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Al Mawardi Jalan Manggar Rt 1 Rw 7 Desa Moga Kec Moga	20.000.000	
		Jalan Kertadinata Rt 1 Rw 1 Desa Kalimas Kec Randudongkal, Kab. Pemalang	Rehab Gedung Madrasah Diniyah Takmiliyah Hidayatul Arifiyah Jalan Kertadinata Rt 1 Rw 1 Desa Kalimas Kec Randudongkal	25.000.000	
		Rt 4 Rw 2 Desa Mejagong Kec Randudongkal, Kab. Pemalang	Rehab Gedung TPQ Roudlotul Ilmi Rt 4 Rw 2 Desa Mejagong Kec Randudongkal	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	MI MA'ARIF NU BOJONGBATA	50.000.000	
		Jl. Lumba-lumba No. 98 A Kelurahan Sugihwaras Kec. pemalang / Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MTs MATHLA'UL ANWAR	50.000.000	
		Jalan Raya Randudongkal – Moga Km 3 Rt 003/003 Desa Mejagong Kec. Randudongkal , Kab. Pemalang	MI NURUL HUDA MEJAGONG	40.000.000	
		Jalan Warungpring – Pakembaran Km 2 Dusun Gombong Desa Warungpring Rt 09/02 Kec. Warungpring Kab Pemalang, Kab. Pemalang	MI SALAFIYAH GOMBONG	40.000.000	
		Jl. Beringin Indah Dukuh Sukria Rt 58 Rw 06 Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MI TAHFIDZUL QUR'AN AL HIDAYAH	40.000.000	
		Jl. Pucung Jaya No. 114 Desa Mereng Kec. Warungpring Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MI NURUL HUDA (02) MERENG	40.000.000	
		Jl. Fajar Dk. Kertadita Desa Kalimas Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MI SALAFIYAH 03 KALIMAS	40.000.000	
		Jl. Tengah Rt 19 Rw 04 Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab, Pemalang, Kab. Pemalang	MI NURUL HIDAYAH TANAHBAYA	40.000.000	
		Desa Wanarata Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MI NURUL SALAM WANARATA	40.000.000	
		Dk. Kaliruyung Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MI AL MUNAWAROH	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Jl. Dahlia Rt 10 Rw 06 Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MI RIYADLUL ULUM BANTARBOLANG	40.000.000	
		Desa Sumurkidang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	MI AL FUTUHIYYAH SUMURKIDANG	40.000.000	
		Jl. Pramuka Rt 07 Rw 01 Desa Kalimas Desa Kec. Randudongkal Pemalang, Kab. Pemalang	MI SALAFIYAH 02 KALIMAS	40.000.000	
		Desa Danasari RT 014 RW 006 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	Mushola Baitussalam	40.000.000	
		JI.Raya Slarang KM IO. RT 003/006 Surajaya, Kecamatan Pemalang , Kab. Pemalang	Masjid Baitul Karim	40.000.000	
		Desa Saradan RT 00 l RW 002 Kecamatan Pemalang , Kab. Pemalang	MUSHOLA BAITUL BAROKAH	40.000.000	
		Dusun Grogol Desa Wanamulya Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	MASJID AL IMAN	50.000.000	
		Dusun Kecepit Desa Banjarmulya Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	MASJID BAITUROHIM	50.000.000	
		Dukuh Lobongkok RT 002 Rw 002 Desa Banjarmulya Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	Madrasah Nurul Huda	50.000.000	
		DUSUN MENGONENG RT 03 RW 04 KELURAHAN BOJONGBATA KEC. PEMALANG , Kab. Pemalang	MUSHOLA BAITIL KHAMID	50.000.000	
		RT 01 RW 03 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	MUSHOLA BAITUS SYAKUR	40.000.000	
		Dukuh Kecepit RT 002 RW 01 l Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang , Kab. Pemalang	MUSHOLA NURUL HUDA	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Perumahan Green Sabana Desa Kaligelang Kec Teman, Kab. Pemalang	TPQ SABANA	50.000.000	
		Jl. Merbabu Rt.02 Rw.13 Kelurahan Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	Mushola Nurul Huda Dan TPQ Nurul Huda	50.000.000	
		Desa Banyu mudal Rt 006 Rw 006 Kec Moga, Kab. Pemalang	Musholah Baitul Mutakin	30.000.000	
		Desa Cikadu Rt 003 Rw 001 Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang	Musholah Al Huda	30.000.000	
		Desa Batursari Rt 002 Rw 001 Kec. Pulosari, Kab. Pemalang	Mushola Baitul Mustagfirin	30.000.000	
		Belik Krajan Rt 09 Rw 07, Desa Belik Kec. Belik, Kab. Pemalang	Mushola Baetussa'id	35.000.000	
		Dusun 05 RT o4 RW 05 Desa Banjaran Taman, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	Mushola Nurul Hasanah	50.000.000	
		Dusun Karangtalun RT 02 RW 01 Desa Jebed Selatan, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	TPQ AZZAHRO	50.000.000	
		Desa Sungapan Taman, Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	TPQ	50.000.000	
		Dusun Sumurgesing RT 01 RW 01 Desa Jebed Utara Kec. Taman, Kab. Pemalang	MASJID ZAENAB MADINA	50.000.000	
		Desa Jatirejo Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, Kab. Pemalang	Yayasan pondok Pesantren Moderen Khafidul Qur'an	800.000.000	
		Dukuh senteran, RT 01,RW 03 Desa Babakan Kec Bodeh, Kab. Pemalang	Musholah Nurul Huda	26.555.000	
		Dukuh Jatiroyom RT 09 RW 03. Desa Jatiroyom Kec. Bodeh. , Kab. Pemalang	Masjid At Taqwa	35.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Dkh. Kebaderan, Desa Jatiroyom RT02, RW01, Nomor 54, Kecamatan Bodeh, , Kab. Pemalang	Pembanguanan MASJID AL HIDAYAH	35.000.000	
		Desa Cangak Rt 02 RW 02 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	MUSHOLAH BAITUS SA'ADAH	25.000.000	
		Desa Kebandungan RT 01 RW 01 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	Rehab MASJID NURUL HUDA	50.020.000	
		Jln raya Bodeh No.20 Bodeh Kec. Bodeh Kab. Pemalang	PAC Gerakan Pemuda Ansor(Banser)	30.000.000	
		Desa Cangak Rt04/Rw01 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	Musholah Jamiatul'muslimin	20.000.000	
		DUKUH KEDUNGGONG RT 01 RW 01 DESA KWASEN KECAMATAN BODEH, Kab. Pemalang	MADRASAH DINIY AH TAKMILIYAH NAILUL BAROKAH	15.000.000	
		JI. Dukuh Kalimati Desa Kesesirejo Rt/Rw. 04104 Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	MAJLIS AL-MAHABBAH	24.000.000	
		Dukuh Jaidan RT 02 Rw 06 Desa Kesesirejo Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	Sarana prasarana (PR. FATAYAT NU)	15.627.500	
		JI. Kyai Juned Dk. Karangasem Desa. Kesesirejo Rt. 08/01 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	MDT Hidayatul Athfal	35.000.000	
		Desa Bodeh Rt. 04 Rw. 02 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	Pembanguan Gedung Kelas (MADRASAH DINIYAH ANNIDZOMIYAH)	27.440.000	
		Desa Kebandungan Kec. Bodeh , Kab. Pemalang	Pembangunan Gedung Dapur Mushola Al Mukaromah	21.146.000	
		Desa Gunungbatu Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	Musholah Al Ikhlas	35.750.000	
		Desa Longkeyang Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	Belum ada Pagar Halaman (Mushola Nurul Falah)	70.000.000	
		Desa Rowosarii Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Belum ada sarana Laptop (KB Permata Hati)	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Desa Botekan kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Belum memiliki Sound system (Jam'iyah Baiturrohim)	20.000.000	
		Desa Ketapang Kec. ulujami, Kab. Pemalang	Belum ada Fasilitas Toilet (TPQ Al Hikmah)	25.000.000	
		Desa Gandu Kec. Comal, Kab. Pemalang	Belum tersedia tempat parkir (TPQ Nurul fatah)	25.000.000	
		Desa wonokromo Ke. Comal, Kab. Pemalang	Belum ada Atap halaman (Musholah Miftakhul Jannah)	20.000.000	
		Desa Sidorejo kec. Comal, Kab. Pemalang	Mushola At Taqwa	22.000.000	
		Desa Ambokulon Kec. Comal, Kab. Pemalang	Mushola Darussalam	21.000.000	
		TPQ ALHIKMAH Desa Pecangakan RT.05 RW.04 Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana TPQ ALHIKMAH Desa Pecangakan RT.05 RW.04 Kecamatan Comal	50.000.000	
		Musholla Raoudlotul Mawardi RT 11 RW 11 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Musholla Raoudlotul Mawardi RT 11 RW 11 Kelurahan Petarukan	100.000.000	
		MAJELIS TAKLIM "ROYADUL JINAN" Dusun Keboijo RT. 11 RW. 11 Kelurahan Petarukan Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana MAJELIS TAKLIM "ROYADUL JINAN" Dusun Keboijo RT. 11 RW. 11 Kelurahan Petarukan Kec. Petarukan	100.000.000	
		Majlis taklim Nurul Huda RT 01 RW 02 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasaranan Majlis taklim Nurul Huda RT 01 RW 02 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang	10.000.000	
		Majlis taklim Aminul Fatta Attsani RT 06 RW 02 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana prasaranan Majlis taklim Aminul Fatta Attsani RT 06 RW 02 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang	10.000.000	
		Majlis Taklim Nurul Iman Rt 01 Rw 05 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Bantuan sara prasarana Majlis Taklim Nurul Iman Rt 01 Rw 05 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang	10.000.000	
		Majlis taklim Al Istiqomah Rw 05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Majlis taklim Al Istiqomah Rw 05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Jl. Kol Sugiono RT. 02 Rw. 02 Desa Taman Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Mushola Choirul Amien Alamat : Jl. Kol Sugiono RT. 02 Rw. 02 Desa Taman Kecamatan Taman	10.000.000	
		Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Roudhotul Ulum Alamat : RT. 06 Rw. 06 Desa Kaligelang Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Roudhotul Ulum Alamat : RT. 06 Rw. 06 Desa Kaligelang Kecamatan Taman	10.000.000	
		Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Darussalam Alamat : Jl. Abiyasa RT. 04 Rw. 07 Dk. Bandelan Tarub Desa Taman Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Darussalam Alamat : Jl. Abiyasa RT. 04 Rw. 07 Dk. Bandelan Tarub Desa Taman Kecamatan Taman	50.000.000	
		Mushola Al Mubarok Alamat : Jl. Anyelir Gg. Pepaya Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Beji Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Mushola Al Mubarok Alamat : Jl. Anyelir Gg. Pepaya Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Beji Kecamatan Taman	30.000.000	
		Jl. Manggar No. 9 Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	PC GMPI Kabupaten Pemalang	50.000.000	
		Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Majlis Taklim Mar'atussholihah Kecamatan Taman	50.000.000	
		Musholla Alfauzan Rt 05/05.Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	Rehab Musholla Alfauzan Rt 05/05.Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami	50.000.000	
		Masjid Baituttaqwa Desa Samong Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	Bantuan dana Rehab Masjid Baituttaqwa Desa Samong Rt 01 Rw 03 Kecamatan Ulujami	100.000.000	
		MI Mardzotillah Desa Sukorejo Rt 03. Rw. 05 Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	Pengadaan sarana dan prasarana, MI Mardzotillah Desa Sukorejo Rt 03. Rw. 05 Kecamatan Ulujami	50.000.000	
		TPQ Al hidayah. Rt 06/05.Desa Rowosari Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana TPQ Al hidayah. Rt 06/05.Desa Rowosari Kecamatan Ulujami	70.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Musholla Nurusulthon Dk. Pegirikan Rt. 04 Rw. 05 Desa Samong Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Musholla Nurusulthon Dk. Pegirikan Rt. 04 Rw. 05 Desa Samong Kecamatan Ulujami	30.000.000	
		Yayasan Wanita Persatuan Mandiri Desa Pagenteran Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Yayasan Wanita Persatuan Mandiri Desa Pagenteran Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Pulosari	100.000.000	
		Jl. Raya Warungpring - Pemalang Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana MWC NU Warungpring	50.000.000	
		Majelis Ta'lim Nur Muhammad Dusun Bungkus Rt. 01 Rw. 06Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Majelis Ta'lim Nur Muhammad	30.000.000	
		MI Daarun Nadwah Sodong. (Jl. Raya Randudongkal - Belik Km. 4,5 Sodong Basari Kecamatan Belik), Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana MI Daarun Nadwah Sodong	80.000.000	
		Pengurus Mushola Nurul Huda Dk. Kukusan Utara Rt. 06 Rw. 04 Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Pengurus Mushola Nurul Huda	25.000.000	
		Masjid Baitul Mukharom Jl. Raya Siremeng Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Masjid Baitul Mukharom (Jl. Raya Siremeng Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Pulosari)	30.000.000	
		Pondok Pesantren Salafiyah Putra-Putri API KUNTA DAWAA (Dukuh Tumanggal Desa Banyumudal Kecamatan Moga), Kab. Pemalang	Bantuan Sarana prasarana Pondok Pesantren Salafiyah Putra-Putri API KUNTA DAWAA (Dukuh Tumanggal Desa Banyumudal Kecamatan Moga)	200.000.000	
		Masjid AT-TAQWA Dusun Situmpeng Rt. 02 Rw. 06 Desa Badak Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana dan prasarana Masjid AT-TAQWA Dusun Situmpeng Rt. 02 Rw. 06 Desa Badak Kecamatan Belik	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Masjid Raudhatul Muttaqin Jl. Kemuning Rt. 10 Rw. 01 Desa Gendoang Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana dan Prasarana Masjid Raudhatul Muttaqin Jl. Kemuning Rt. 10 Rw. 01 Desa Gendoang Kecamatan Moga	30.000.000	
		TPQ Nurul Muawanah (Dk. Krajan Barat Rt. 04 Rw. 06 Desa Sima Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana TPQ Nurul Muawanah (Dk. Krajan Barat Rt. 04 Rw. 06 Desa Sima Kecamatan Moga	25.000.000	
		PAC Fatayat NU Moga Dk. Gintung Desa Sima Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	Bantuan Prasarana PAC Fatayat NU Moga Dk. Gintung Desa Sima Kecamatan Moga	20.000.000	
		MUSHOLLA ISTIQLALUL MUBAROK JALAN DESA AMBOWETAN RT 01 RW 01 KECAMATAN ULUJAMI, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana prasarana MUSHOLLA ISTIQLALUL MUBAROK (JALAN DESA AMBOWETAN RT 01 RW 01 KECAMATAN ULUJAMI)	30.000.000	
		TK NUR ISLAMI RT 01/05 Desa Sima Kec. Moga, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana TK NUR ISLAMI RT 01/05 Desa Sima Kec. Moga	75.000.000	
		Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Roudlotul Falah Dk. Karanganyar Rt. 09 Rw. 01 Desa Gendowang Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Roudlotul Falah Dk. Karanganyar Rt. 09 Rw. 01 Desa Gendowang Kecamatan Moga	40.000.000	
		Madrasah Diniyah Nurul Islam Desa Pepedan Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Madrasah Diniyah Nurul Islam Desa Pepedan Kecamatan Moga	20.000.000	
		Madin Hidayatul Mubtadi'in Dusun Kepetek Desa Gendowang Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasarana Madin Hidayatul Mubtadi'in Dusun Kepetek Desa Gendowang Kecamatan Moga	15.000.000	
		TPQ NASIYATUT TUKO Dukuh Tretep Desa Sima Kec. Moga, Kab. Pemalang	Bantuan Sarana Prasaranan TPQ NASIYATUT TUKO Dukuh Tretep Desa Sima Kec. Moga	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Musholla Al-Ikhlas Dk. Karang Rt. 03 Rw. 08 Desa Bulakan Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Musholla Al-Ikhlas Dk. Karang Rt. 03 Rw. 08 Desa Bulakan Kecamatan Belik	30.000.000	
		Madrasah Diniyah Takmiliyah "Sabilunnajah" Rt. 08 Rw. 02 Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	Madrasah Diniyah Takmiliyah "Sabilunnajah" Rt. 08 Rw. 02 Desa Pakembaran Kecamatan Warungpring	50.000.000	
		Majlis Taklim "Fathul Huda" Rt. 03 Rw. 01 Dusun Krajan Desa Datar Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	Majlis Taklim "Fathul Huda" Rt. 03 Rw. 01 Dusun Krajan Desa Datar Kecamatan Warungpring	50.000.000	
		TPQ Nurul Hikmah Rt. 004 Rw. 002 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	TPQ Nurul Hikmah Rt. 004 Rw. 002 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang	50.000.000	
		Kelurahan Mulyoharjo Rt. 02 Rw. 19 Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Bantuan sarana prasarana Al-Barokah Kelurahan Mulyoharjo	50.000.000	
		RT 04 RW 14 Kelurahan Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	Pembangunan Mushola Baitussholihin RT 04 RW 14	25.000.000	
		RT 01 RW 17 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	Rehab tempat wudhu Masjid Al Ukhuwah RT 01 RW 17 Kelurahan Bojongbata	25.000.000	
		Perum Bhayangkara Residence RT 17 RW 04 Kelurahan Beji Kec. Taman, Kab. Pemalang	Pembangunan Mushola Royyanul Muqiimiin Kelurahan Beji	20.000.000	
		RT 06 RW 02 Sikuang Desa Kendalsari Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Rehab Mushola Nurus Salam	200.000.000	
		RT 04 RW 02 Sikuang Desa Kendalsari Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Majelis Taklim Dusun 2 Desa Kendalsari	50.000.000	
		RT 11 RW 02 Dukusali Desa Karangasem Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Baitul Makmur Desa Karangasem	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		RT 01 RW 06 Dusun Tegalsari Desa Tegalsari Barat Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	Rehab Masjid At taqwa Desa Tegalsari Barat	100.000.000	
		RT 04 RW 03 Dusun Suwuk Desa Kuta Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Nurul Janah	110.000.000	
		Dusun Madugowong Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	Rehab Masjid Darussalam Dusun Madugowong Desa Karanganyar	100.000.000	
		RT 01 RW 01 Desa Karangmoncol Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	Rehab Mushola Baitul Mahmudah	10.000.000	
		Dusun Clapar RT 01 RW 05 Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	Jam'iyah Ibu ibu	80.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah mendesain RAPBN tahun anggaran 2026 untuk mewujudkan delapan agenda pembangunan (Asta Cita) melalui berbagai kebijakan fiskal menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan mengusung tema "**Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi**", strategi kebijakan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, yaitu:

Prioritas anggaran **bidang ketahanan pangan** akan diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/ perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional; (2) menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif; dan (3) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.

Prioritas **bidang ketahanan energi** dengan arah kebijakan dalam mencapai prioritas tersebut antara lain untuk: (1) peningkatan lifting migas; (2) program energi hijau melalui antara lain Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Pengembangan Program Biodiesel dalam rangka Mendukung Energi Hijau; dan (3) Subsidi Energi dan Kompensasi Lebih Tepat Sasaran.

Makan Bergizi Gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Makanan yang disajikan dalam program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal. dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan.

Kerja sama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien.

Prioritas **bidang Pendidikan** dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp757,8 triliun, dan diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan akses Pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG); (5)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

Prioritas **bidang Kesehatan** dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp244,0 triliun akan diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan; (2) peningkatan cakupan CKG; (3) percepatan penuntasan tuberkulosis; (4) peningkatan kuantitas dan kualitas FKTP dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah; (5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting.

Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM dengan arah kebijakan pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM; (3) penguatan sistem pengawasan; (4) perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi koperasi dan UMKM; (5) mendorong peningkatan mutu produk; (6) penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif; (7) inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (8) pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha; dan (9) integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM.

Pertahanan Semesta tahun 2026 direncanakan antara lain untuk: (1) Bidang Pertahanan, antara lain (a) pengadaan/harwat alutsista strategis; (b) pengadaan/harwat/peningkatan non-alutsista; (c) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan; dan (d) penguatan kapasitas industri pertahanan; dan (e) penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah Militer (Kodam). (2) Bidang Ketertiban dan Keamanan, antara lain melalui: (a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan; (b) sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan (d) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional. Dan (3) Bidang Hukum, antara lain melalui: (a) pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas; (b) penindakan pidana narkotika dan obat terlarang; dan (c) penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.

Percepatan Investasi dan Perdaganan Global, kebijakan percepatan investasi dan perdagangan global saat ini telah memandatkan bahwa Danantara menjadi driver pendorong investasi produktif dengan terus memperkuat peran Indonesia dalam global value chain. Kebijakan ini

https://jdih.pemalangkab.go.id/

juga didukung dengan peningkatan peran K/L strategis untuk mendorong penguatan kebijakan tersebut.

Prioritas **Perlindungan Sosial** akan dimanfaatkan antara lain untuk: (1) meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN; (2) penyaluran bansos yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha dan kemitraan; serta (4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

Prioritas **Swasembada Air** dengan kebijakan yang diarahkan diarahkan untuk meningkatkan akses air minum rumah tangga yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat. TKD juga turut mendukung swasembada air melalui DAK Fisik bidang air minum yang dimanfaatkan antara lain untuk perluasan, peningkatan, dan pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan.

Selain kebijakan pembangunan nasional, Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pemalang juga mengacu kepada arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Arah kebijakan Pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Seperti yang termuat dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah diarahkan pada tema yaitu "**Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**". Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

a. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
b. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
c. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
e. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
f. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
g. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
h. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk "**Penguatan Landasan Pembangunan Daerah**" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diukur dengan 8 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan (%) sebesar 8,70-8,53
2. Indeks Reformasi Birokrasi (angka) 92,00
3. Indeks Integritas Nasional (angka) 81,78
4. Indeks Demokrasi Indonesia (angka) 86,46 - 89,50
5. Otonomi Fiskal Daerah (%) 65,72
6. Pertumbuhan Ekonomi (%)5,00-6,00
7. Indeks Modal Manusia (angka) 0,61
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,71 - 4,27

3.2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang

Mendasarkan pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada :

1. Prioritas Pembangunan Nasional yang dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029;
2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam konsep Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
3. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang 2025-2045;
4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2025;
5. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pemalang pada penyusunan RKPD Tahun 2026;
6. Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Tahun 2024;
7. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2024;
8. Komitmen nasional untuk mencapai target Sustainable Development Goal (SDG's);
9. Hasil capaian penanggulangan kemiskinan

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Pemalang dengan mengusung tema pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

“Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan”, dengan prioritas pembangunan pada:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter;
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak;
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Untuk mencapai efisiensi pelaksanaan pembangunan, maka arah pembangunan pada tahun 2026 ada pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dukungan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM berkualitas;
2. Penurunan prevalensi stunting menjadi 9%;
3. Pencegahan, penanggulangan dan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan peran BUMD yang lebih progresif, realistis serta kondusif;
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didekatkan kepada masyarakat;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah;
7. Pembangunan infrastruktur.

Adapun isu strategis pada pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2026, sebagai upaya strategis dalam menghadapi dinamika global, nasional, maupun regional dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota berkualitas
3. Perkuatan fondasi ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana
4. Sumberdaya Manusia yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter
5. Akselerasi penguatan kemiskinan
6. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. Penguatan ketahanan budaya masyarakat

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mendasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan dengan Tujuan Kabupaten Pemalang kedua yaitu "**Meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel".** Keterkaitan tersebut berlandaskan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sbb. :

Tujuan :

Mendasarkan pada Rencana Strategis Setda Kabupaten Pemalang 2025-2029, tujuan dari Setda Kabupaten Pemalang adalah **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.**

Sasaran :

Mendasarkan tujuan yang dipilih, sasaran Setda Kabupaten Pemalang dirumuskan sebagai berikut:

1 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan bidang Administrasi Umum.

3.4. Program dan kegiatan

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah, akan dibantu oleh Program dan Kegiatan. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program berperan dalam dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang memiliki tiga program yang dipilih sesuai dengan regulasi yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ada. Selain Proram terdapat Kegiatan yaitu serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Terdapat sepuluh kegiatan yang diharapkan bisa mendukung pencapaian program yang telah dipilih dalam pencapaian tujuan perangkat daerah.

Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah serta RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 50.980.686.946,00 (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 8 (delapan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

   Program ini dipilih sebagai sarana dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Umum, yang diimplementasikan melalui mekanisme koordinatif dan evaluatif dalam tataran pelaksanaan kebijakan perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum. Target Kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 89.17%. Pencapaian kinerja akan didukung melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusnan DPA
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

k. Penataan Organisasi
   - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
   - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   - Fasilitasi Keprotokolan
   - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2) **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Program ini dipilih sebagai sarana dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang diimplementasikan melalui mekanisme koordinatif dan evaluatif dalam tataran pelaksanaan kebijakan perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Target Kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 96.50%. Pencapaian kinerja akan didukung melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut:

a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
   - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

b. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
   - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
   - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

d. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

3) **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Program ini dipilih sebagai sarana dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelaskanaan kebijiakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang diimplementasikan melalui mekanisme koordinatif dan evaluatif dalam tataran pelaksanaan kebijakan perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat. Target Kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 82.50%. Pencapaian kinerja akan didukung melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut:

a. Administrasi Tata Pemerintahan
- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

c. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

d. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Adapun rencana pendanaan tahun 2026 dan prakiraan maju anggaran tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	1				SEKRETARIAT DAERAH		Kab. Pemalang		50.980.686.946				50.980.686.946
4	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Kab. Pemalang		**32.552.852.746**				**32.552.852.746**
4	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Kab. Pemalang	100%	**22.750.000**				**22.750.000**
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	3 Dokumen	22.750.000			3 Dokumen	22.750.000
4	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Kab. Pemalang	100%	**23.349.961.000**				**23.349.961.000**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pemalang	174 Orang/ bulan	23.314.276.000			174 Orang/ bulan	23.314.276.000
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang	12 Dokumen	24.485.000			12 Dokumen	24.485.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	1 Laporan	6.600.000			1 Laporan	6.600.000
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Kab. Pemalang	1 Laporan	4.600.000			1 Laporan	4.600.000
4	1	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Kab. Pemalang	100%	**5.500.000**				**5.500.000**
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang	2 Laporan	5.500.000			2 Laporan	5.500.000
4	1	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Kab. Pemalang	100%	**7.041.000**				**7.041.000**
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Pemalang	4 Paket	5.000.000			4 Paket	5.000.000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	2 Dokumen	1.891.000			2 Dokumen	1.891.000
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			75 Orang	75.000			75 Orang	75.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
						Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang						
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang	13 Orang	75.000			13 Orang	75.000
4	1	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Kab. Pemalang	100%	**591.816.000**				**591.816.000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Pemalang	4 Paket	21.867.000			4 Paket	21.867.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	19.280.000			12 Paket	19.280.000
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatanrumah tangga yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	7.250.000			12 Paket	7.250.000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	10.710.000			12 Paket	10.710.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	62.135.000			12 Paket	62.135.000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Pemalang	9 Dokumen	51.324.000			9 Dokumen	51.324.000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Pemalang	12 Laporan	19.250.000			12 Laporan	19.250.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	12 Laporan	400.000.000			12 Laporan	400.000.000
4	1	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Pemalang	100%	**9.377.800**				**9.377.800**
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pemalang	0 unit	150.000			0 unit	150.000
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pemalang	50 Unit	9.127.800			50 Unit	9.127.800
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Pemalang	0 Unit	100.000			0 Unit	100.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4	1	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pemalang	100%	**3.439.113.588**				**3.439.113.588**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	12 Laporan	15.220.000			12 Laporan	15.220.000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Laporan	1.100.000.000			12 Laporan	1.100.000.000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Laporan	39.948.000			12 Laporan	39.948.000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Laporan	2.283.945.588			12 Laporan	2.283.945.588
4	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab. Pemalang	100%	**554.867.000**				**554.867.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pemalang	6 Unit	91.340.000			6 Unit	91.340.000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pemalang	159 Unit	308.660.000			159 Unit	308.660.000
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel			50 Unit	7.700.000			50 Unit	7.700.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
						Jumlah Mebel yang dipelihara	Kab. Pemalang						
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pemalang	4 Unit	108.817.000			4 Unit	108.817.000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Pemalang	147 Unit	38.350.000			147 Unit	38.350.000
4	1	1	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		Kab. Pemalang	100%	**2.072.426.858**				**2.072.426.858**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	2 Orang/Bulan	2.028.926.858			2 Orang/Bulan	2.028.926.858
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	40.000.000			12 Paket	40.000.000
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	2 ORANG	3.500.000			2 ORANG	3.500.000
4	1	1	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		Kab. Pemalang	100%	**1.700.000.000**				**1.700.000.000**
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	800.000.000			12 Paket	800.000.000
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	600.000.000			12 Paket	600.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Kab. Pemalang	12 Paket	300.000.000			12 Paket	300.000.000
4	1	1	2.13		**Penataan Organisasi**	**Indeks Organisasi**	Kab. Pemalang	100%	**400.000.000**				**400.000.000**
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kab. Pemalang	2 Dokumen	100.000.000			2 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	2 Laporan	80.000.000			2 Laporan	80.000.000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birkrasi	Kab. Pemalang	2 Dokumen	80.000.000			2 Dokumen	80.000.000
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	2 Dokumen	50.000.000			2 Dokumen	50.000.000
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang	1 Dokumen	90.000.000			1 Dokumen	90.000.000
4	1	1	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		Kab. Pemalang	100%	**399.999.500**				**399.999.500**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pemalang	12 Laporan	200.850.000			12 Laporan	200.850.000
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Pemalang	12 Laporan	69.960.000			12 Laporan	69.960.000
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Kab. Pemalang	12 Laporan	129.189.500			12 Laporan	129.189.500
4	1	3			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pemalang		**1.162.177.000**				**1.162.177.000**
4	1	3	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		Kab. Pemalang		**362.177.000**				**362.177.000**
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Kab. Pemalang	6 Dokumen	66.078.000			6 Dokumen	66.078.000
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kab. Pemalang	4 Laporan	210.109.000			4 Laporan	210.109.000
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Kab. Pemalang	4 Laporan	85.990.000			4 Laporan	85.990.000
4	1	3	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Kab. Pemalang		**334.059.500**				**334.059.500**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pemalang	3 Dokumen	258.197.000			3 Dokumen	258.197.000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pemalang	4 Laporan	57.855.000			4 Laporan	57.855.000
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Kab. Pemalang	1 Dokumen	18.007.500			1 Dokumen	18.007.500
4	1	3	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		Kab. Pemalang		**65.940.500**				**65.940.500**
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrnisasi, dan evaluasi kebijakan urusan kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Kab. Pemalang	2 Dokumen	44.934.500			2 Dokumen	44.934.500
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan	Kab. Pemalang	1 Dokumen	6.506.000			1 Dokumen	6.506.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
						pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, ststistik, persandian							
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	Kab. Pemalang	2 Dokumen	14.500.000			2 Dokumen	14.500.000
4	1	3	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		Kab. Pemalang		**400.000.000**				**400.000.000**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kab. Pemalang	55 Dokumen	131.144.000			55 Dokumen	131.144.000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan pengadaan secara elektronik	Kab. Pemalang	4 Dokumen	215.650.000			4 Dokumen	215.650.000
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pemalang	20 Orang	53.206.000			20 Orang	53.206.000
4	1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Kab. Pemalang		**17.265.657.200**				**17.265.657.200**
4	1	2	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**		Kab. Pemalang		**310.000.000**				**310.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil penataan administrasi pemerintahan	Kab. Pemalang	2 Dokumen	88.000.000			2 Dokumen	88.000.000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Kab. Pemalang	2 Dokumen	13.000.000			2 Dokumen	13.000.000
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil fasiitasi pelaksanaan otonomi daerah	Kab. Pemalang	3 Dokumen	209.000.000			3 Dokumen	209.000.000
4	1	2	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		Kab. Pemalang		**90.000.000**				**90.000.000**
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	Kab. Pemalang	10 Dokumen	75.000.000			10 Dokumen	75.000.000
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	Kab. Pemalang	1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Kab. Pemalang	2 Laporan	5.000.000			2 Laporan	5.000.000
4	1	2	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		Kab. Pemalang		**16.426.538.500**				**16.426.538.500**
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kab. Pemalang	4 Dokumen	16.251.538.500			4 Dokumen	16.251.538.500
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang	Kab. Pemalang	2 Dokumen	100.000.000			2 Dokumen	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					RENCANA TAHUN 2026						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU UNDIKATIF
						Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Pemalang	1 Dokumen	75.000.000			1 Dokumen	75.000.000
4	1	2	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Kab. Pemalang		**439.118.700**				**439.118.700**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Pemalang	550 Dokumen	162.553.250			550 Dokumen	162.553.250
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kab. Pemalang	2 kasus	154.695.000			2 kasus	154.695.000
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Kab. Pemalang	550 Dokumen	121.870.450			550 Dokumen	121.870.450

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi target kinerja, Perangkat Daerah membutuhkan rencana kerja dan rencana pendanaan. Rencana kerja digunakan sebagai pedoman dan menjaga agar organisasi tetap berjalan sebagimana tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dan pendanaan timbul sebagai dampak atas dilaksanakannya kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berikut ini akan diasjikan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah untuk Tahun 2026. Penyusunan rencana kerja berdasarkan target capaian Indikator Kinerja Utama Setda Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2025

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				50.980.686.946
4	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**32.552.852.746**
4	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**22.750.000**
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.750.000
4	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**23.349.961.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	174 Orang/ bulan	23.314.276.000
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.485.000
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.600.000
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.600.000
4	1	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**5.500.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.500.000
4	1	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**7.041.000**
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	5.000.000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.891.000
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	75.000
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	13 Orang	75.000
4	1	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**591.816.000**
4	1	1	2.06	1		Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	21.867.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang disediakan		
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	19.280.000
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatanrumah tangga yang disediakan	12 Paket	7.250.000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.710.000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	62.135.000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	9 Dokumen	51.324.000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	19.250.000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	400.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
							Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
4	1	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**9.377.800**
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	150.000
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	9.127.800
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	100.000
4	1	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3.439.113.588**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.220.000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
							Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan		
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	39.948.000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.283.945.588
4	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**554.867.000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	91.340.000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	308.660.000
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel			50 Unit	7.700.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
						Kab. Pemalang	Jumlah Mebel yang dipelihara		
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	108.817.000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	175 Unit	38.350.000
4	1	1	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				**2.072.426.858**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.028.926.858
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	40.000.000
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	2 ORANG	3.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
							Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
4	1	1	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**				**1.700.000.000**
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	800.000.000
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 Paket	600.000.000
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	12 Paket	300.000.000
4	1	1	2.13		**Penataan Organisasi**		**Indeks Organisasi**		**400.000.000**
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	2 Dokumen	100.000.000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	80.000.000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birkrasi	2 Dokumen	80.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	50.000.000
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	90.000.000
4	1	1	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				**399.999.500**
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	200.850.000
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Laporan	69.960.000
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 Laporan	129.189.500
4	1	3			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**1.162.177.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4	1	3	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**				**362.177.000**
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	6 Dokumen	66.078.000
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	4 Laporan	210.109.000
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	85.990.000
4	1	3	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**334.059.500**
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	258.197.000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi	4 Laporan	57.855.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
							Perekonomian		
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 Dokumen	18.007.500
4	1	3	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**				**65.940.500**
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkrnisasi, dan evaluasi kebijakan urusan kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	2 Dokumen	44.934.500
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, ststistik, persandian	1 Dokumen	6.506.000
4	1	3	2.04	3				2 Dokumen	14.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan		
4	1	3	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**400.000.000**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	55 Dokumen	131.144.000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil layanan pengadaan secara elektronik	4 Dokumen	215.650.000
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pemalang	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Orang	53.206.000
4	1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**17.265.657.200**
4	1	2	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**				**310.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil penataan administrasi pemerintahan	7 Dokumen	88.000.000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2 Dokumen	13.000.000
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasiitasi pelaksanaan otonomi daerah	4 Dokumen	209.000.000
4	1	2	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**				**90.000.000**
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	10 Dokumen	75.000.000
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi kerjasama luar negeri	1 Dokumen	10.000.000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	2 Laporan	5.000.000
4	1	2	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				**16.426.538.500**
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	6 Dokumen	16.251.538.500
4	1	2	2.02	2				2 Dokumen	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	75.000.000
4	1	2	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				**439.118.700**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	162.553.250
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pemalang		2 kasus	154.695.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
							Jumlah Kasus yang yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum		
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Pemalang	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	550 Dokumen	121.870.450

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran.Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019, Sekretariat Daerah memiliki fungsi utama melaksanakan koordinatif dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, menjadikannya sebuah institusi strategis dalam mengendalikan jalannya pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, sebagai dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memerlukan dukungan anggaran pendanaan yang memadai. Dokumen Renja ini menjadi hal yang sangat penting, sebagai acuan dan pedoman dalam implementasi kinerja perangkat daerah yang dituangkan dalam dokuman RKA maupun DPA, mengingat didalamya tercantum serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut masih bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Selain itu, konsistensi penerapan indicator juga harus tetap dijaga sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Renstra, sehingga keterukuran kinerja dapat terlihat jelas sebagai tolok ukur kunci keberhasilan pencapaian maupun evaluasi kinerja organisasi pada masa mendatang.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026. Upaya antisipatif dan mengatasi permasalahan lainnya dilakukan dengan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas anggaran dengan tetap mengedepankan pencapaian output maupun *outcome* dari setiap program dan kegiatan. Selain itu, upaya pemilihan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan juga menjadi bagian dari strategi penyelesaian apabila terjadi ketidakcukupan penyediaan anggaran. Koordinasi lintas sektoral merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan tujuan organisasi,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus tetap mengedepankan hal tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini masih belum sempurna. Sehingga kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

HERIYANTO, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199103 1 014

https://jdih.pemalangkab.go.id/

B. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mengingat :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada bidang administrasi kependudukan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Bagian dan Subbagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

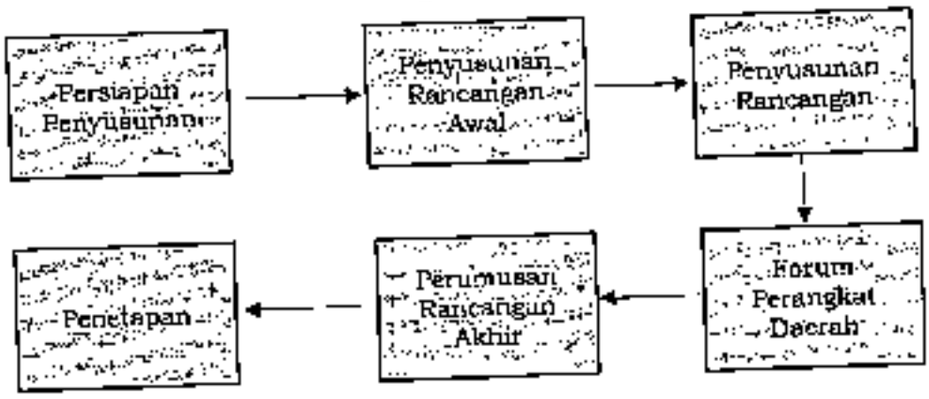

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

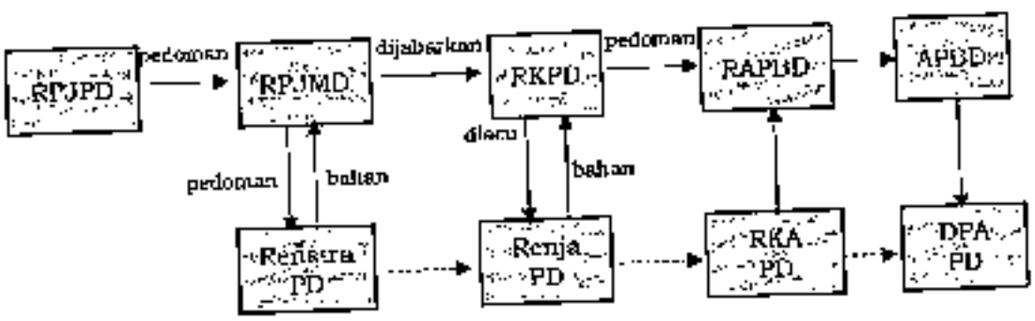

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir pelaksanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2024 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, berisi tentang kerangka pendanaan tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan schubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebesar Rp 62.017.772.400,00 yang terbagi dalam 2 program, 16 kegiatan dan 69 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp57.481.717.823,00 atau 92,69%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran (setelah perubahan) tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebesar Rp72.886.015.835,00 yang terbagi dalam 2 program, 16 kegiatan dan 70 sub kegiatan. Anggaran yang sudah terealisasi (s/d September 2025) sebesar Rp49.211.157.850,00 sebesar 67,52%.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi capaiannya melebihi target, sesuai target dan tidak memenuhi dari target yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Dari 2 program yang ada, realisasi kedua program sesuai dengan target.
b. Dari 16 kegiatan yang ada, 10 kegiatan yang realisasinya tidak sesuai target. dan 6 kegiatan yang realisasinya sesuai target
c. Dari 72 sub kegiatan yang ada, terdapat 58 sub kegiatan yang realisasinya sesuai target, 14 kegiatan yang realisasinya kurang dari target.
d. Tidak terdapat sub kegiatan yang capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target.

Adapun secara rinci realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Melebihi target

Tidak terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya *melebihi target*.

Memenuhi target

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Mebel

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
   - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

i. Layanan Administrasi DPRD
   - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
   - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
   - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
      - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
      - Pembahasan Rancangan Perda
      - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
      - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

   b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
      - Pembahasan KUA dan PPAS
      - Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Pengawasan Penggunaan Anggaran
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyusunan Program Kerja DPRD

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-pokok pikiran
- Pelaksanaan reses

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

g. Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

Tidak memenuhi

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dikarenakan terdapat harga di lapangan/pasar lebih rendah.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu pada :
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan terdapat rekening belanja yang tidak dibelanjakan akibat Rumdin belum dimanfaatkan secara optimal.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dikarenakan terdapat kegiatan koordinasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yang tidak dapat diikuti karena kegiatan yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan kegiatan lain.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dikarenakan terdapat barang yang tidak dapat dibeli karena kendala TKDN.
d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu pada sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dikarenakan relatif masih banyak mebel yang layak pakai sehingga belum memerlukan pemeliharaan yang berat
e. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yaitu pada :
   - Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dikarenakan terdapat salah satu Pimpinan (Ketua DPRD) yang purna tugas karena meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan jabatan Pimpinan DPRD.
   - Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, dikarenakan tidak semua Anggota DPRD bersedia mengikuti kegiatan tersebut dengan pertimbangan ketakutan terhadap penyakit yang nantinya akan diketahui lebih lanjut serta padatnya jadwal kegiatan.
f. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD yaitu pada sub kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD dikarenakan belum optimalnya rapat fraksi.
g. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yaitu pada sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara bersamaan sehingga Pimpinan dan Anggota tidak dapat membahas penyusunan dokumen tersebut.

h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yaitu pada :
   - Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, dikarenakan terdapat fraksi yang tidak menyelenggarakan bimbingan teknis bagi anggotanya.
   - Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dikarenakan sub kegiatan ini merupakan anggaran antisipatif yang akan digunakan ketika pimpinan ataupun anggota memerlukan pendampingan/bantuan hukum, serta penyusunan Legal Opinion terhadap isu-isu yang strategis.
   - Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dikarenakan terdapat kekosongan penyediaan tenaga ahli fraksi selama 1 (satu) bulan akibat peralihan masa keanggotaan DPRD

i. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yaitu pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja dalam daerah, dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara bersamaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

j. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yaitu pada sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara bersamaan sehingga Pimpinan dan Anggota tidak dapat membahas penyusunan dokumen tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat capaian program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2024 maupun Renstra 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan:

1. Komitmen dan kerjasama yang baik antara pemimpin dan seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. Sarana prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang relatif memadai mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Koordinasi yang intens antar Bagian, sehingga terciptanya komitmen dan sinergitas pimpinan dan seluruh pegawai yang tinggi dan konsisten dalam melaksanakan tupoksi secara optimal;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Meningkatkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat peraturan perundang-undangan yang sering berubah dengan cepat.
4. Menjaga konsistensi dalam mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi, monitoring dan pengendalian kegiatan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait dan masyarakat.
6. Meningkatkan disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat meminimalisir capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pemalang

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kelompok Kegiatan PD Tahun (n-2)/2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (n-1)/ 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun (n-1)/2025		catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan										
	SEKRETARIAT DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	85,07	Nilai	90,25	84,87	94,04	84,97	84,97	100	
		Cakupan layanan Sekretariat DPRD	80,17	%	80,97	79,52	98,21	82,33	82,33	100	
		IKM	85,07	Nilai	90,25	84,87	94,04	84,97	84,97	100	
		SAKIP	62,62	Nilai	60,02	60,62	100	68,21	68,21	100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	52,4	Indeks	52,75	-	-	-	-	-	- untuk OPD tidak dilakukan penilaian - indikator lama

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	44,99	Nilai	60	60,62	101,03	68,21	68,21	100	indikator lama
		Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia (%)	100	%	100	96,14	96,14	100	100	100	indikator lama
		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	100	%				100	100	100	indikator baru
		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	100	%				100	100	100	indikator baru
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	dokumen	9	9	100	13	13	100	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	dokumen	2	2	100	3	100	100	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1	dokumen	1	1	100	1	100	100	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	dokumen	2	2	100 -	2	2	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	1	dokumen	1	1	100	4	4	100	
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	15	dokumen	611	611	100	612	612	100	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50	orang/bulan	574	574	100	587	587	100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	dokumen	24	24	100	12	12	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun an laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semester an SKPD dan laporan koordinasi penyusun an laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	12	dokumen	12	12	100	12	12	100	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	-	dokumen	0	0	0	0	0	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	unit	0	0	0	0	0	0	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	unit	0	0	0	0	0	0	
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1	unit	0	0	0	0	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	32	dokumen	29	29	100	9	9	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12	paket	12	10	83,33	9	9	100	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	dokumen	0	0	0	0	0	0	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	orang	0	0	0	0	0	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	orang	0	0	0	0	0	0	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	17	orang	17	17	100	0	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	27.080	dokumen	38.979	38.910	99,82	42.160	42.160	100	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	paket	12	12	100	12	12	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	paket	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	paket	239	171	71,55	138	138	100	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	paket	12	12	100	12	12	100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket	12	12	100	1,303	1,303	100	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Per undang-undangan yang disediakan	27.612	dokumen	38.650	38.650	100	40,611	40,611	100	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	12	12	100	12	12	100	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	30	29	96,67	60	60	100	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	dokumen	12	12	100	12	12	100	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	dokumen	0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	42	unit	49	48	97,96	95	94	98,95	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	unit	0	0	0	5	4	80	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	unit	0	0	0	2	2	100	
	Pengadaan Alat Angkutan Berat	Jumlah unit Alat berat yang disediakan	2	unit	0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	unit	43	43	100	4	4	100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	unit	5	5	83,33	84	84	100	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	48	dokumen	36	36	100	36	36	100	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	12	12	100	12	12	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	12	100	12	12	100	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	0	0	0	12	12	100	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	12	12	100	12	12	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	91	unit	52	60	96,15	59	59	100	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	unit	10	10	100	8	8	100	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44	unit	32	32	100	44	44	100	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1	unit	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1	unit	2	1	50	2	1	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	unit	5	4	100	4	4	100	
	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1	unit	0	0	0	0	0	0	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	unit	0	0	0	2	2	100	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	unit	3	3	100	0	0	0	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah dokumen keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersedia	900	dokumen	881	853	96,82	904	904	100	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	700	orang/bulan	700	691	98,71	700	700	100	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	150	paket	131	131	100	154	154	100	
	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	50	orang	50	31	62,00	50	50	100	
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi DPRD	30	dokumen	22	21	95,45	30	30	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	4	dokumen	4	4	100	4	4	100	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	laporan	2	1	50,00	12	12	100	
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2	laporan	4	4	100	2	2	100	
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	paket	12	12	100	12	12	100	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	80,15	%	76,65	75,38	98,34	78,15	78,15	100	Indikator lama
		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	89,15	%	88,05	68,11	77,36	88,05	88,05	100	Indikator lama
		Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas	100	%				100	100	100	Indikator baru
		Persentase dokumen daerah yang dibahas	100	%				100	100	100	Indikator baru
		Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	%				100	100	100	Indikator baru

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20	dokumen	13	12	92,31	15	15	100	
	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7	dokumen	5	5	100	4	4	100	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7	dokumen	3	3	100	7	7	100	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian Perundang-Undangan	1	dokumen	2	2	100	2	2	100	
	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2	dokumen	2	2	96,00	1	1	100	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	dokumen	1	0	0	1	1	100	
	Pembahasan Kebijakan anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	6	dokumen	5	5	100	5	5	100	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan semesteran	1	dokumen	0	0	0	0	0	100	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	68	laporan	54	54	100	53	53	100	
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12	laporan	12	12	100	12	12	100	
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang infrastruktur	12	laporan	12	12	100	12	12	100	
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12	laporan	12	12	100	12	12	100	
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian	12	laporan	12	12	100	12	12	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	laporan	0	0	0	0	0	0	
	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Jumlah laporan hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tersusun	1	laporan	0	0	0	1	1	100	
	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah laporan hasil pengawasan penggunaan anggaran yang tersusun	6	laporan	5	5	100	4	4	100	
	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tersusun	1	laporan	1	1	100	1	1	100	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas anggota	117	dokumen	116	106	91,38	117	117	100	
	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil orientasi DPRD	18	dokumen	1	1	100	0	0	0	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	18	dokumen	17	16	94,12	18	18	100	
	Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	9	orang	9	6	66,67	9	9	100	
	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	72	orang	72	66	91,67	72	72	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	dokumen	12	12	100	12	12	100	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen hasil penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	4	dokumen	4	4	100	4	4	100	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	19	dokumen	43	17	39,53	34	34	100	
	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	15	dokumen	40	14	35,00	30	30	100	
	Penyusunan pokok-pokok pikiran	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Pelaksanaan reses	Jumlah dokumen hasil reses	3	dokumen	2	2	100	3	3	100	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	7	dokumen	6	5	83,33	5	5	100	
	Penyusunan kode etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD yang tersusun	1	dokumen	1	0	0	1	1	100	
	Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik	6	dokumen	5	5	100	4	4	100	
	Pembahasan kerjasama daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan kerjasama daerah	2	dokumen	0	0	0	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	1	dokumen	0	0	0	0	0	0	
	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah dokumen penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	1	dokumen	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	108	dokumen	107	107	100	101	101	100	
	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	72	dokumen	72	72	100	72	72	100	
	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelangkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	dokumen	1	1	100	1	1	100	
	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	dokumen	5	5	96,43	4	4	100	
	Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	29	dokumen	29	29	93,33	24	24	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2026 dan 2027, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2026	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan	%	-	V	-	87,25	90,25	92,25	92,25	89,87	47,34	92,25	92,25	
2	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	-	V	-	79,38	80,97	82,33	83,82	79,52	72,33	83,82	83,82	
3	SAKIP	Nilai		V	-	44,85	45,10	45,85	46,00	60,02	68,21	68,21	68,21	
4	IRB	Indeks	-	V		52,2	-	-	-	-	-	-	-	
5	Persentase peningkatan dukungan layanan kepada DPRD	%	-	-	V	100	100	100	100	95,14	71,62	100	100	
6	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	%	-	-	V	75,45	76,65	78,15	80,15	75,38	71,09	80,15	-	
7	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	%	-	-	V	87,45	88,05	88,68	89,15	68,11	74,33	89,15	-	
8	Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas	%	-	-	-	-	-	100	100	-	60,00	100	100	
9.	Persentase dokumen daerah yang dibahas	%	-	-	-	-	-	100	100	-	65,19	100	100	
10.	Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	-	-	-	-	-	100	100	-	75,33	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

Sekretariat DPRD merupakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebagai berikut :

a. Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD (skor)
b. Cakupan layanan Sekretariat DPRD (%)
c. SAKIP
d. Persentase peningkatan dukungan layanan kepada DPRD (%)
e. Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD (%)
f. Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD (%)

Pada tahun 2024, Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD sebesar 84,87 (kategori baik). Walaupun sudah dinilai baik, kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang harus terus ditingkatkan. Sedangkan Cakupan layanan Sekretariat DPRD sebesar 79,52%.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Persentase dukungan layanan kepada DPRD yang tersedia, pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mendapat nilai SAKIP sebesar 60,02 (kategori B) dan Persentase dukungan layanan kepada DPRD yang tersedia sebesar 96,14%. Capaian indikator Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD pada tahun 2024 sebesar 75,38% sedangkan Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD sebesar 68,11%, hal ini dikarenakan terdapat sub kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan padatnya kegiatan yang harus dilaksanakan serta jadwal kegiatan yang bersamaan antar kegiatan serta penyediaan kelompok pakar/tim ahli yang merupakan kegiatan antisipatif.

Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang adalah :

a. Perlu adanya *reward* dan *punishment* sebagai stimulan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan berubah secara cepat dan dinamis guna meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran, sebagaimana di bawah ini :

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- belum optimalnya dukungan layanan kepada DPRD
- belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD
- belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD
- belum optimalnya akuntabilitas kinerja

Hal-hal yang menjadi *penghambat* yaitu :

- makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi dukungan layanan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD
- cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat serta kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter
- kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dapat dikerjasamakan
- Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Faktor *pendorong* antara lain :

- Adanya dukungan kebijakan, tersedianya anggaran dan tingginya komitmen organisasi dalam menyediakan dukungan layanan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD
- Terbukanya peluang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dapat dikerjasamakan
- Adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar dan staf sekretariat fraksi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD
- Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat, BPKAD dll)

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang justru

https://jdih.pemalangkab.go.id/

harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

"Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, dan Mulya"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bersih

Mengandung arti bahwa Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Cakap

Memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal

Dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

Mulya

Dimaknai kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 atau yang sering disebut dengan **Rhapsodi,** sebagai berikut :

1. Resik : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih;
2. Hijau : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dannyaman melalui industry hijau yang berkelanjutan;
3. Apik : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera;
5. Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
6. Digitalisasi : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar;
7. Ikhlas : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:
Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) program unggulan, yaitu :

1. Seragam sekolah dan LKS gratis
2. Jalan halus merata
3. Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM
6. WIFI gratis tiap desa
7. Satu ambulance, satu desa
8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
10. Insentif untuk guru honorer, TPQ, Madin dan Marbot
11. Santunan kematian Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mendukung visi misi kesatu yaitu : **"Bersih dan Handal"** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi, yang akan dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatkan reformasi birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Serta sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang adalah :

1. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
   - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
   - Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur secara spesifik mengenai PPPK paruh waktu.
   - Peraturan Gubernur (Pergub) Jateng tentang UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) tahun 2025 adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024.
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi dan kabupaten sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing pengampu sub kegiatan/kegiatan; Standarisa
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan kompetensi SDM agar optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berubah sangat cepat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan OPD yang memberikan pelayanan kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat, tentunya keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada anggota DPRD, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi dukungan layanan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD;
2. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat serta kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter;
3. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dapat dikerjasamakan;
4. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
5. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan, tersedianya anggaran dan tingginya komitmen organisasi dalam menyediakan dukungan layanan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD;
2. Adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar dan staf sekretariat fraksi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD;
3. Terbukanya peluang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dapat dikerjasamakan;
4. Adanya pendampingan dari PD terkait evaluasi SAKIP (Bagian Organisasi, Bappeda, Inspektorat);
5. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yaitu *"Perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD."*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
										71.060.450.400
	SEKRETARIAT DPRD				71.060.450.400	SEKRETARIAT DPRD				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.041.787.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.041.787.650
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	23.256.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	23.256.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	5.290.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	5.290.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.371.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.371.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.230.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.230.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.590.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.590.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	2.226.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen 2.226.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	dokumen	5.494.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen 5.494.500
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terwujud	4	dokumen	4.047.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terwujud	4 dokumen 4.047.500
2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	37	dokumen	6.477.112.500	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	37 dokumen 6.477.112.500
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	orang/ bulan	6.466.655.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/ bulan 6.466.655.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12	dokumen	4.950.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen 4.950.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	dokumen	2.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen 2.160.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan lapor an koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	12	dokumen	3.347.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan lapor an koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	12 dokumen	3.347.500
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	unit	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 unit	0
		Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	unit	0	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 unit	0
		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1	unit	0	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 unit	0
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	32	dokumen	81.315.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	32 dokumen	81.315.000
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12	paket	30.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelungkapan	12 paket	30.000.000
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	dokumen	1.316.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	1.316.000
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	orang	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 orang	0
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17	orang	40.999.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	17 orang	40.999.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	27.720	dokumen	2.250.236.875	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	27.720 dokumen	2.250.236.875
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	paket	49.956.550	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	49.956.550
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	0
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	paket	28.682.500	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	28.682.500
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	paket	1.593.799.825	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	1.593.799.825
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket	99.247.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	99.247.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Per undang-undangan yang disediakan	14 dokumen	147.330.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Per undang-undangan yang disediakan	14 dokumen	147.330.000
	Pelaksanaan kunjungan tamu	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan pelaksanaan kunjungan tamu	12 laporan	25.000.000	Pelaksanaan kunjungan tamu	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan pelaksanaan kunjungan tamu	12 laporan	25.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	300.415.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	300.415.000
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	5.764.000,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	5.764.000,00
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	0	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	0
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	31 unit	3.322.333.150	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	31 unit	3.322.333.150
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6 unit	3.087.445.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	06 unit	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 unit	3.087.445.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengadaan Alat Angkutan Berat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Alat berat yang disediakan	2	unit	0	Pengadaan Alat Angkutan Berat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit Alat berat yang disediakan	2	unit	
	Pengadaan mebel	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	unit	91.623.860	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	unit	91.623.860
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	143.266.200	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	143.266.200
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	0	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit	0
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	48	laporan	1.474.532.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	48	laporan	1.474.532.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	21.698.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	21.698.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	775.950.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	775.950.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	0
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	676.884.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	676.884.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91	unit	1.343.951.685	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91	unit	1.343.951.685
	Penyediaan jasa jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	unit	365.065.950	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	unit	365.065.950
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44	unit	345.322.300	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44	unit	345.322.300
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan alat besar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1	unit	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan alat besar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1	unit	0
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah mebel yang dipelihara	1	unit	39.987.375	Pemeliharaan Mebel	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah mebel yang dipelihara	1	unit	39.987.375
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	unit	379.687.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	unit	379.687.000

https://jdih.pemalangkab.go.id

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
	Pemeliharaan aset tak berwujud	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1	unit	0	Pemeliharaan aset tak berwujud	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1	unit	0
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	unit	213.989.060	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	unit	213.989.060
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	unit	0	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	unit	0
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersedia	900	dokumen	35.458.247.00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen keuangan dan kesejahteraan DPRD yang tersedia	900	Dokumen	35,458,247.00
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	700	orang/ bulan	35.011.296.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	700	orang/ bulan	35.011.296.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	150	paket	371.896.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	150	paket	371.896.000
	Pelaksanaan medical check up DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	50	orang	76.055.000	Pelaksanaan medical check up DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	50	orang	76.055.000
10	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi DPRD	30	dokumen	610.801.440	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi DPRD	30	dokumen	610.801.440

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	4	dokumen	16.147.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	4	dokumen	16.147.000
	Fasilitasi Prokal DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Prokal DPRD	12	laporan	10.495.000	Fasilitasi Prokal DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Prokal DPRD	12	laporan	10.495.000
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2	laporan	351.690.000	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2	laporan	351.690.000
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	paket	232.469.440	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	paket	232.469.440
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					20.010.662.750	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					20.010.662.750
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20	dokumen	2.156.142.850	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20	dokumen	2.156.142.850
	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7	dokumen	554.719.200	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7	dokumen	554.719.200
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7	dokumen	1.203.101.800	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7	dokumen	1.203.101.800
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen kajian Perundang-Undangan	1	dokumen	115.091.500	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen kajian Perundang-Undangan	1	dokumen	115.091.500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2	dokumen	225.941.500	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2	dokumen	225.941.500
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	dokumen	57.288.850	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	dokumen	57.288.850
B	Pembahasan Kebijakan anggaran	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	6	dokumen	192.016.800	Pembahasan Kebijakan anggaran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	6	dokumen	192.016.800
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	29.050.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1	dokumen	29.050.000
	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1	dokumen	29.050.000	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1	dokumen	29.050.000
	Pembahasan APBD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	dokumen	40.165.400	Pembahasan APBD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	dokumen	40.165.400
	Pembahasan Perubahan APBD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	dokumen	47.540.000	Pembahasan Perubahan APBD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	dokumen	47.540.000
	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan semesteran	1	dokumen	0	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan semesteran	1	dokumen	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	dokumen	46,191,400,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	46.191.400,00
13		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	68	laporan	1.442.598.900	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	68	laporan	1.442.598.900
		Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12	laporan	28.451.200,00	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12	laporan	28.451.200,00
		Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang infrastruktur	12	laporan	28.451.200,00	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang infrastruktur	12	laporan	28.451.200,00
		Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12	laporan	28.451.200	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12	laporan	28.451.200
		Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian	12	laporan	28.946.200	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian	12	laporan	28.946.200
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	12	laporan	0	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12	laporan	0
		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tersusun	1	laporan	16.850.000	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tersusun	1	laporan	16.850.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengawasan penggunaan anggaran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penggunaan anggaran yang tersusun	6	laporan	700.884.500	Pengawasan penggunaan Anggaran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan penggunaan anggaran yang tersusun	6	laporan	700.884.500
	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tersusun	1	laporan	610.564.600	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tersusun	1	laporan	610.564.600
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas anggota	56	dokumen	3.447.471.900	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas anggota	56	dokumen	3.447.471.900
	Orientasi DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil orientasi DPRD	0	dokumen	0	Orientasi DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil orientasi DPRD	0	dokumen	0
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	18	dokumen	2.356.820.500	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	18	dokumen	2.356.820.500
	Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	9	orang	40.000.000	Penyediaan kelompok pakar dan Tim Ahli	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	9	orang	40.000.000
	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tenaga ahli fraksi	72	orang	220.722.000	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tenaga ahli fraksi	72	orang	220.722.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	dokumen	29.990.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	dokumen	29.990.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1	dokumen	3.481.500	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	1	dokumen	3.481.500
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	4	dokumen	504.457.900	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	4	dokumen	504.457.900
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	19	dokumen	3.652.504.650	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	19	dokumen	3.652.504.650
	Kunjungan kerja dalam daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	15	dokumen	34.500.000	Kunjungan kerja dalam daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	15	dokumen	34.500.000
	Penyusunan pokok-pokok pikiran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1	dokumen	6.880.000	Penyusunan pokok-pokok pikiran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1	dokumen	6.880.000
	Pelaksanaan reses	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil reses	3	dokumen	3.611.124.650	Pelaksanaan reses	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil reses	3	dokumen	3.611.124.650
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	7	dokumen	379.465.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	7	dokumen	379.465.000
	Penyusunan kode etik DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD yang tersusun	1	dokumen	11.004.500	Penyusunan Kode etik DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD yang tersusun	1	dokumen	11.004.500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengawasan kode etik DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik	6	dokumen	368.460.500	Pengawasan kode etik DPRD	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik	6 dokumen	368.460.500
16	Pembahasan kerjasama daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan kerjasama daerah	2	dokumen	0	Pembahasan kerjasama daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen hasil pembahasan kerjasama daerah	2 dokumen	0
	Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama Daerah	1	dokumen	0	Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	1 dokumen	0
	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	1	dokumen	0	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	1 dokumen	0
17	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	108	dokumen	8.748.462.650	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	108 dokumen	8.748.462.650
	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	72	dokumen	6.907.012.650	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	72 dokumen	6.907.012.650
	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1	dokumen	5.145.000	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 dokumen	5.145.000
	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	dokumen	1.101.095.600	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 dokumen	1.101.095.600

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Pasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	29	dokumen	735.209.400	Pasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Pasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	29	dokumen	735.209.400

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Dalam pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, menjadi tugas Sekretariat DPRD dengan memfasilitasi pelaksanaan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menegaskan peran DPRD sebagai representasi rakyat. Dengan landasan hukum yang kuat dan mekanisme yang terstruktur, Pokok-pokok pikiran memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, keberhasilan implementasi Pokok-pokok pikiran memerlukan sinergi yang baik antara DPRD, OPD, dan masyarakat. Pokok-pokok pikiran dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mekanisme Pokok-pokok pikiran DPRD adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat, yang kemudian menjadi usulan pembangunan oleh anggota DPRD untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui sistem elektronik seperti SIPD. Proses ini melibatkan pengumpulan aspirasi melalui reses dan rapat, penelaahan internal DPRD, penyampaian usulan ke Bappeda dan OPD terkait untuk validasi, hingga masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (APBD). Adapun mekanisme penyusunan Pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Penjaringan Aspirasi (Reses):

   Anggota DPRD melakukan reses di daerah pemilihannya untuk menyerap berbagai usulan dan permasalahan dari masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Penginputan Data:

   Usulan Pokir yang dikumpulkan dari reses kemudian diinput oleh masing-masing anggota DPRD ke dalam aplikasi SIPD melalui akun pribadi mereka.

3. Validasi oleh BAPPEDA:

   Usulan Pokir yang sudah diinput akan divalidasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaian dengan Kamus Usulan Aspirasi yang telah disepakati.

4. Sinkronisasi dengan OPD:

   Selanjutnya, usulan tersebut akan divalidasi oleh Perangkat Daerah (OPD) tujuan untuk disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan.

5. Finalisasi oleh TAPD:

   - Setelah melalui beberapa tahap validasi, usulan Pokir DPRD akan diajukan kepada TAPD untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dalam pembahasan anggaran.
   - Pokok-pokok pikiran kemudian diintegrasikan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian diajukan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD.

Pentingnya Mekanisme Pokok-pokok pikiran :

- Mengakomodasi aspirasi masyarakat dan memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terakomodasi dalam program pembangunan daerah.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- Membantu kepala daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan dacrah secara lebih partisipatif.

Sedangkan Reses DPRD adalah kegiatan masa istirahat Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang dilakukan di luar masa persidangan untuk bertemu langsung dengan konstituen atau masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) mereka. Tujuan utama reses adalah menjaring, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat, yang kemudian akan dilaporkan kepada pemerintah sebagai pokok-pokok pikiran untuk menjadi program pembangunan daerah.

Proses dan Pelaksanaan:

- **Waktu Pelaksanaan:**

  Reses dilaksanakan di luar masa sidang dan biasanya dilakukan beberapa kali dalam setahun.

- **Kunjungan ke Dapil:**

  Anggota dewan wajib mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing untuk bertemu masyarakat secara langsung.

- **Penyampaian Laporan:**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hasil dari kegiatan reses berupa aspirasi dan pokok-pokok pikiran masyarakat akan disampaikan dalam rapat paripurna untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

- **Dukungan Sekretariat DPRD:**

  Sekretariat DPRD bertugas memfasilitasi kegiatan reses, termasuk aspek administrasi dan keuangan agar kegiatan tersebut dapat berjalan tertib dan akuntabel.

Untuk tahun 2026 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/kegiatan/sub kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dalam RPJMN 2025-2045 diterjemahkan dalam 8 (delapan) agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah "Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan". RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 menyinergikan 8 Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta arah kebijakan pembangunan provinsi. Kebijakan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di seluruh daerah ditekankan pada : Pertumbuhan berkelanjutan; Penurunan kemiskinan; dan SDM berkualitas.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan kepada :

a. Dukungan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM berkualitas;
b. Penurunan prevalensi stunting menjadi 9%;
c. Pencegahan, penanggulangan dan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
d. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan peran BUMD yang lebih progresif, realistis serta kondusif;
e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didekatkan kepada masyarakat;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

f. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah;
g. Pembangunan infrastruktur.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2026 Kabupaten Pemalang tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mendukung agenda "Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didekatkan kepada masyarakat".

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang prima

A. Tujuan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan yang akan dicapai pada tahun 2026, yaitu "*Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD*" yang diukur dengan indikator *Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD* yang merupakan hasil survei kepuasan DPRD.

B. Sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mempunyai sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026, yaitu :

1. Sasaran 1 : *"Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD"* yang diukur dengan indikator *Cakupan layanan Sekretariat DPRD* dengan rumusan rerata dari persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas, persentase dokumen daerah yang dibahas, dan persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas.
2. Sasaran 2 : *"Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah"* yang diukur dengan indikator *IKM* dengan rumusan *hasil survei kepuasan masyarakat* dan *Nilai SAKIP* dengan rumusan penilaian dari Inspektorat

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks	85,07
		1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	1.1.1 Cakupan layanan sekretariat DPRD	Indeks	81,52
		1.2 Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	1.2.1 IKM	Indeks	85,07
			1.2.2 Nilai SAKIP	Nilai	62,62

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 2 program, 18 kegiatan dan 86 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp71.060.450.400 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, (sasaran : *Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota*), dengan 3 (tiga) indikator yaitu :
   - Persentase peraturan daerah dan DPRD yang dibahas, dengan target capaian sebesar 100%.
   - Persentase dokumen daerah yang dibahas, dengan target capaian sebesar 100%
   - Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas, dengan target capaian sebesar 100%

   Program ini meliputi 10 kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7 sub kegiatan);
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (5 sub kegiatan);
   - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (3 sub kegiatan);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4 sub kegiatan);
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (10 sub kegiatan);
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6 sub kegiatan);
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 sub kegiatan);
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6 sub kegiatan);
- Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (3 sub kegiatan);
- Kegiatan Layanan Administrasi DPRD (4 sub kegiatan).

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (sasaran : *Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD),* dengan 2 (dua) indikator yaitu :
   - Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi, dengan target capaian sebesar 100%
   - Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi, dengan target capaian sebesar 100%

   Program ini meliputi 8 kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (5 sub kegiatan);
   - Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran (5 sub kegiatan);
   - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (8 sub kegiatan);
   - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (6 sub kegiatan);
   - Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (3 sub kegiatan)
   - Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (2 sub kegiatan);
   - Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah (2 sub kegiatan);
   - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD (4 sub kegiatan);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
   e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah;
   c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   c. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi Kepegawaian;
   d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
j. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Pengadaan Mebel;
   d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
   e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Pemeliharaan Mebel;
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
   a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
   b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
   c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

10. Layanan Administrasi DPRD
    a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
    b. Fasilitasi Fraksi DPRD;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
d. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
   a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
   b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
   c. Pembahasan APBD;
   d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
   e. Penyusunan Tata Tertib DPRD;
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
   a. Pembahasan KUA dan PPAS;
   b. Pembahasan APBD;
   c. Pembahasan APBD Perubahan;
   d. Pembahasan Laporan Semester;
   e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
   b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
   c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
   d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
   e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
   f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
   g. Pengawasan Penggunaan Anggaran;
   h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
   a. Pendalaman DPRD;
   b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
   c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
   d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
   e. Penyusunan Program Kerja DPRD;
   f. Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
   a. Kunjungan Kerja dalam Daerah;
   b. Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD;
   c. Pelaksanaan Reses.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
   a. Penyusunan Kode Etik DPRD;
   b. Pengawasan Kode Etik DPRD.
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
   a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

8. Fasilitasi Tugas DPRD
   a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
   b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
   c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
   d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	SINERGITAS -				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SEKRETARIAT DPRD						71.060.450.400,00								71.769.097.097,00	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						71.060.450.400,00								71.769.097.097,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						51.041.787.650,00								52.715.067.923,00	
I.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														52.715.067.923,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota]	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja sesuai Regulasi	100	98,13	100	100	51.041.787.650,00	-	-	-	-		-	-	52.715.067.923,00	-
			Pemenuhan Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	100	99,81	100	100	51.041.787.650,00	-	-	-	-		-	-	52.715.067.923,00	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	23.258.000,00			-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamisiil Pd. Paning kupan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan strategis dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperceper distribusi barang dan jasa	-	-	39.657.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

https://jdih.pemalangkab.go.id

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisasi P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an, Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-		8.562.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.371.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisasi P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-		4.396.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.230.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisasi P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-		4.199.000,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MASUK RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.590.000,00	Seluruh Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Dinamisasi P4. Prioritas kesatu infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan dan Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka efisiensi distribusi barang dan jasa	-		3.256.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.226.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Dinamisasi P4. Prioritas kesatu infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan dan Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka efisiensi distribusi barang dan jasa	-		3.693.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.494.500,00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Dan Dinamisasi P4. Prioritas kesatu infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan dan Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka efisiensi distribusi barang dan jasa	-		9.281.200,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.9.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.047.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Landasan Pemerintahan Yang Sederhana Saling Terkaitan, Dan Berkelanjutan P4. Penting ketersediaan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka arus mperancar distribusi barang dan jasa	-		6.859.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.477.112.500,00			-		-	-	6.423.583.300,00	SEKRETARIAT DPRD
												Pengadaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlanggsung Dan Dinamis/ P4. Penting ketersediaan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka arus mperancar distribusi barang dan jasa				
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45/114 Orang/ Bulan	6.466.655.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlanggsung Dan Dinamis/ P4. Penting ketersediaan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka arus mperancar distribusi barang dan jasa	-		6.399.577.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.9.02.0005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KONDISI CAPAIAN KINERJA LRD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	TOLOK UKUR INDIKATIF Teks	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF Rp	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis/ P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan masuk dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoleh distribusi barang dan jasa	-		14.962.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	2.160.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis/ P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan masuk dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoleh distribusi barang dan jasa	-		3.214.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	3.347.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis/ P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan masuk dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoleh distribusi barang dan jasa	-		3.736.800,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT/KRO / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	KRAJIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEDOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengawasan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Beriteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	-	2,000,000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Pengusulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab Pemala ng, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengawasan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Beriteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	-	2,000,000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	81,315,000,00			-	Pengawasan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Beriteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	-	118,199,200,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAKRO RENCANA TAHUN 2027		INDIKATOR DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET RPJMD	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	80.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan ADD, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis dan Produktif P4. Paling ketan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		80,555,700.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.310.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis dan Produktif P4. Paling ketan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis dan Produktif P4. Paling ketan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	1.22.15.2.05.0013	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	KINERJA	BELANJA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											PENDUKUNG					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	49.999.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Lanskap Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisitif Pd. Pening katan infrastruktur yang mampu menggerangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoopat distribusi barang dan jasa	-		81.143,500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.260.336.675,00			-		-	-	2.445.839.358,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	49.936.550,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Lanskap Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisitif Pd. Pening katan infrastruktur yang mampu menggerangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoopat distribusi barang dan jasa	-		54.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PENURUTAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Otonomi P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	28.682.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Otonomi P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		32.385.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.953.799.835,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Otonomi P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		1.697.004.600,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN KAPD KEGIATAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PERKIRAAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											RUPIAH	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	99,247,000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an. Beriteg nitas Dan Dinamisitif Pl. Penting kanan infrastruktur yang mampu menguranngi kesenjangan dan mendorong pemerintah pembangunan an; Jalan tuntap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoopat distribusi barang dan jasa	-		149,837,100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Rahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Rahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				27612 Dokumen	147,330,000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an. Beriteg nitas Dan Dinamisitif Pl. Penting kanan infrastruktur yang mampu menguranngi kesenjangan dan mendorong pemerintah pembangunan an; Jalan tuntap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoopat distribusi barang dan jasa	-		155,000,000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	25,000,000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an. Beriteg nitas Dan Dinamisitif Pl. Penting kanan infrastruktur yang mampu menguranngi kesenjangan dan mendorong pemerintah pembangunan an; Jalan tuntap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperoopat distribusi barang dan jasa	-		26,250,000,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0020	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	380.415.000,00	Kab. Pemalang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisasif P4. Perning katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendukung pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperingkat distribusi barang dan jasa	-		319.614.458,00	SEKRETARIA DPRD
	4.02.01.2.06.0050	Pemanfaatan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	9.764.000,00	Kab Pemalang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisasif P4. Perning katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendukung pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperingkat distribusi barang dan jasa	-		9.748.200,00	SEKRETARIA DPRD
	4.02.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	3.322.333.150,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisasif P4. Perning katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendukung pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperingkat distribusi barang dan jasa	-	-	3.429.909.738,00	SEKRETARIA DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KUALITAS CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGTAM			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	3.087.445.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Demokratis P4. Prioritas kawan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan ini; Jalan usaha dan keterkaitan antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ate mpercepat distribusi barang dan jasa	-		3.080.637.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Demokratis P4. Prioritas kawan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan ini; Jalan usaha dan keterkaitan antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ate mpercepat distribusi barang dan jasa	-		72.129.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Demokratis P4. Prioritas kawan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan ini; Jalan usaha dan keterkaitan antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ate mpercepat distribusi barang dan jasa	-		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel./ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Dan Dicerminkan P4, Pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ase diperkuat dan/atau tarung dan jasa	-		47,380,000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	91.621.860,00	Kab. Pemalang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel./ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Dan Dicerminkan P4, Pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ase diperkuat dan/atau tarung dan jasa	-		226.611.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel./ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Dan Dicerminkan P4, Pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ase diperkuat dan/atau tarung dan jasa	-		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	143.268.290,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Nilai Dasar Eksekutif P4, Penyediaan infrastruktur yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemancangan Urusan Pemerintahan Daerah					-	1,474,532.000,00			-	Pengadaan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Nilai Dasar Eksekutif P4, Penyediaan infrastruktur yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	1.396.950.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	21.698.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Nilai Dasar Eksekutif P4, Penyediaan infrastruktur yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		41.937.525,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG-GUNG-JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	975.951.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Langganan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(LPSE, Pengadaan Infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan meredam pertentangan pembangunan ant, Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	824.747.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	976.524.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Langganan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(LPSE, Pengadaan Infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan meredam pertentangan pembangunan ant, Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	940.208.575,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	1.343.951.685,00			-	Pengadaan Langganan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(LPSE, Pengadaan Infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan meredam pertentangan pembangunan ant, Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	1.020.240.165,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAAD RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	365.065.950,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlangsung nya Dan Dimanfaat Pe. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka yang mempercepat distribusi barang dan jasa	-		315.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	345.322.300,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlangsung nya Dan Dimanfaat Pe. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka yang mempercepat distribusi barang dan jasa	-		315.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat														
			Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlangsung nya Dan Dimanfaat Pe. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka yang mempercepat distribusi barang dan jasa	-		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN SPM/SK OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI PENGELOLAAN KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDICATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perawatannya				1 Unit	0,00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Nilai Data Dinamis/ P4. Paling kurus infrastruktur yang mampu mengurang kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan an; Jalan mantap dan kelancaran antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ini diperoleh distribusi barang dan jasa	-		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	39.987.875,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Nilai Data Dinamis/ P4. Paling kurus infrastruktur yang mampu mengurang kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ini diperoleh distribusi barang dan jasa	-		31.486.555,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	379.667.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis nilai Data Dinamis/ P4. Paling kurus infrastruktur yang mampu mengurang kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ini diperoleh distribusi barang dan jasa	-		309.699.600,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KEMENTERIAN	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Lahan dan Tata Kelola Pemerintah ya Bersih dan Akuntabel (4). Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung kesenjangan dan pemerataan pembangunan wil; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam mengelo ne seperempat distribusi barang dan jasa	-		1.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				13 Unit	210.899.060,00	Kab. Pemalang - Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Lahan dan Tata Kelola Pemerintah an Bersih dan Akuntabel (4). Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung kesenjangan dan pemerataan pembangunan wil; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam mengelo ne seperempat distribusi barang dan jasa	-		648.904.010,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.07.01.2.15	Layanan Kesangan dan Kesejahteraan DPRD					-	35.458.247.000,00			-	Pengadaan Lahan dan Tata Kelola Pemerintah an Bersih dan Akuntabel (4). Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung kesenjangan dan pemerataan pembangunan wil; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam mengelo ne seperempat distribusi barang dan jasa	-	-	35.454.250.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.08.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KEDAERAH TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER	SUMBER DANA	PROVINSI	KABUPATEN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											KEMENDAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				12 Orang/Bulan	35.011.295.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlinteg ritas Dan Dinamisdf Pd. Pening katan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan, transpo dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me ngoptimal distribusi barang dan jasa	-		35.000.937.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				12 Paket	371.896.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlinteg ritas Dan Dinamisdf Pd. Pening katan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan, transpo dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me ngoptimal distribusi barang dan jasa	-		364.505.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				12 Orang	75.055.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlinteg ritas Dan Dinamisdf Pd. Pening katan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan, transpo dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me ngoptimal distribusi barang dan jasa	-		78.807.750,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	PERSIAN / SUMBER URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KUALIFASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MASA RANCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-		-		610.801.440,00			-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlandaskan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Elektronik (SPBE), Peningkatan infrastruktur yang mampu mengantisipasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ata terpenuhi distribusi barang dan jasa	-	-	791.135.662,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Kesanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Kesanggotaan DPRD				12 Dokumen	16.147.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Elektronik (SPBE), Peningkatan infrastruktur yang mampu mengantisipasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ata terpenuhi distribusi barang dan jasa	-		20.989.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	10.495.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berbasis Elektronik (SPBE), Peningkatan infrastruktur yang mampu mengantisipasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ata terpenuhi distribusi barang dan jasa	-		13.744.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENSTRA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	351.690.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tindakan Tata Kelola Pemerintah an Belmeg rhan Dan Birokratisi Pe, Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me operasikan distribusi barang dan jasa	-		553.108.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	232.469.440,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tindakan Tata Kelola Pemerintah an Belmeg rhan Dan Birokratisi Pe, Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me operasikan distribusi barang dan jasa	-		191.593.912,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-			-	20.018.662.750,00						-	19.054.029.174,00	
		[Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD]	Persentase anggota DPRD yang mengikuti pengikatan kepentin	100	100	100	100	20.018.662.750,00	-	-	-	-		-	19.054.029.174,00	-
			Persentase dokumen daerah yang dibahas	100	66.67	100	100	20.018.662.750,00	-	-	-	-		-	19.054.029.174,00	-
			Persentase penetapan daerah dan DPRD yang dibahas	100	88.67	100	100	20.018.662.750,00	-	-	-	-		-	19.054.029.174,00	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE KEMENTRIAN OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-		-		2.156.142.950,00			-	Pengadaan Lanjutan Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Dan Dinamis/ Pl. Peling kupi infrastruktur yang mampu mengurangi kemacetan dan mendorong pertumbuh an pembangun an; Jalan nantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkuat distribusi barang dan jasa	-	-	2.560.630.224,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Perahturan Daerah				7 Dokumen	554.719.200,00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Lanjutan Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Dan Dinamis/ Pl. Peling kupi infrastruktur yang mampu mengurangi kemacetan dan mendorong pertumbuh an pembangun an; Jalan nantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkuat distribusi barang dan jasa	-	-	902.671.739,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	1.203.101.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengadaan Lanjutan Tata Kelola Pemerintah an Berorientasi Dan Dinamis/ Pl. Peling kupi infrastruktur yang mampu mengurangi kemacetan dan mendorong pertumbuh an pembangun an; Jalan nantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkuat distribusi barang dan jasa	-	-	1.259.720.543,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perencanaan/Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan/Undangan				3 Dokumen	115.091.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		120.846.075,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	225.941.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		237.238.575,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	57.288.550,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mendukung kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas Antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		60.153.293,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkabgo.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RELEVANSI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MASA MENCAPAI TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.02	Pembelanjaan Kelebihan Anggaran	-	-			-	182.010.930,00				Pengelolaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Demokratis PM. Penting kanan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesenjangan d. dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkecil disparitas harga dan jasa		-	201.618.430,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	29.050.000,00	Kab. Pemalang. Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Demokratis PM. Penting kanan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesenjangan d. dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkecil disparitas harga dan jasa	-	-	30.502.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	29.050.000,00	Kab. Pemalang. Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Demokratis PM. Penting kanan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesenjangan d. dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkecil disparitas harga dan jasa	-	-	30.502.500,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	TARGET CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.09.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	46.195.400,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengurusan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berjung nilai Dan Dinamis(ti Pd, Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mengoptimalkan distribusi barang dan jasa	-		42.194.010,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	47.540.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengurusan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berjung nilai Dan Dinamis(ti Pd, Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mengoptimalkan distribusi barang dan jasa	-		49.917.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				12 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengurusan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berjung nilai Dan Dinamis(ti Pd, Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mengoptimalkan distribusi barang dan jasa	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	46.191.400,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyusunan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(DH, Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam mengka sir mpornya distribusi barang dan jasa	-		48.500.970,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	1.442.598.900,00			-	Penyusunan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis(DH, Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam mengka sir mpornya distribusi barang dan jasa	-	-	1.053.899.745,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0013	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	28.451.200,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penyusunan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis(DH, Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam mengka sir mpornya distribusi barang dan jasa	-		29.873.760,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PENANGGAT JAWAB RENJA OPD
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRAM			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.03.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	28.451.200,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengawasan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berdasarkan Pasa Dan Dinamikat P4. Penting kalan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerintah pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkecil disparitas harga dan jasa	-		29.873.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.04.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	29.451.200,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengantar Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berdasarkan Pasa Dan Dinamikat P4. Penting kalan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerintah pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkecil disparitas harga dan jasa	-		29.873.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.11.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	28.946.200,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengantar Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berdasarkan Pasa Dan Dinamikat P4. Penting kalan infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerintah pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperkecil disparitas harga dan jasa	-		30.393.510,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KEGIATAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				12 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis#I P4. Penting Jalan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan & dan memfokuskan pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	16.850.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis#I P4. Penting Jalan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan & dan memfokuskan pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		17.692.500,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	URUSAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											BARIDAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				6 Dokumen	700.684.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisti P4, Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperce pat distribusi barang dan jasa	-		1.178.099.625,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	610.364.600,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisti P4, Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperce pat distribusi barang dan jasa	-		641.092.830,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / SUB URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET OPD 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	3.447.471.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisitif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	2.947.601.895,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04 .0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisitif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokument Hasil Pendalaman Tugas DPRD				28 Dokumen	2.558.820.500,00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegrasi dan Dat Dinamis(if P4. Pembg kalwa infrastruktur yang mampu mengurang kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-		2.371.719.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				9 Orang	40.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegrasi dan Dinamis(if P4. Pembg kalwa infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-		42.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.07.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				22 Orang	220,722,000.00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlandas rkan Dan Dinamis P4. Perlu katan Infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an, Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa			231,758,100.00	SEKRETARIAT DPRD
	4.07.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	29,998,000.00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berlandas rkan Dan Dinamis P4. Perlu katan Infrastruktur yang mampu mendorong kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa			31,480,900.00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BELANJA	PERKIRAAN MAJU KEDEPAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET AKHIR 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	3.181.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengutan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisdf Pd. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		8.704.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				4 Dokumen	564.457.900,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengutan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamisdf Pd. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		361.930.795,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	16	17
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	3.652.504.650,00			-	Pengutaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamisasi P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengwadahi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ma mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	2.572.970.890,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05 .0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				48 Laporan	34.900.000,00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengutaan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamisasi P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengwadahi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka ma mempercepat distribusi barang dan jasa	-	-	36.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05 .0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG-GUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROMOTIF				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dimiliki				1 Dokumen	6.880.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berimeg ritas Dan Demokratif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu menggantigi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka pe mperkopat distribusi barang dan jasa	-		7.224.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3.611.194.650,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berimeg ritas Dan Demokratif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu menggantigi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka pe mperkopat distribusi barang dan jasa	-		2.526.82 1.930,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN AWAL CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	379.465.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Bersinerg nitas Dan Dinamisitif P4: Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperpendek distribusi barang dan jasa	-	-	412.854.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD													
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	11.084.500,00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Bersinerg nitas Dan Dinamisitif P4: Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperpendek distribusi barang dan jasa	-		11.584.725,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN KAJI RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Stik DPRD				6 Laporan	368.460.500,00	Kab. Pemalang, Secara Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengurusan Lembaran Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisdi Pd. Pening kasan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-	401.300.025,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	0,00			-		-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PERGUBAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				12 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pd. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperpendek distribusi barang dan jasa	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyelenggaraan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Pd. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mperpendek distribusi barang dan jasa	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KEMANGKUAN DAERAH PEMANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	8.748.462.650,00				Pengaturan Landaran Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisme P4, Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Dalam mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	-	8.405.153.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				56 Dokumen	6.909.012.650,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengaturan Landaran Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamisme P4, Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Dalam mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	-	6.522.109.125,00	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2024	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	5.145.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengutaan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisdf P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-		12.86 2,500, 00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				6 Dokumen	1.101.095.600,00	Kab Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengutaan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisdf P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-		1.156.377.600,0 0	SEKRETARIAT DPRD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KEADAAN TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				20 Dokumen	735.209.400,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengutuan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Bermanfaat dan Dapat Dinamistif P4 Pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemerataan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mat mpercepat distribusi barang dan jasa			713.803.965,00	SEKRETARIAT DPRD
		JUMLAH						71.060.450.400,00								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini adalah :

1. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra OPD dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretaris, Bagian-bagian, dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2026. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, September 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19720212 199203 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/kota : Sekretariat DPRD

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	v			
2.	Pengolahan data dan informasi.	v			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	v			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	v			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	v			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	v			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		v	Banyak kegiatan yang dilakukan pada waktu bersamaan	
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		v	Sering tidak mengampu program/kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	v			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	v			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		V	Tidak ada program dan kegiatan antar PD	
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

Pemalang, September 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19720212 199203 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor - 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan
b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG,

Drs. MULYANTO, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19720212 199203 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : / /TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2026

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Isnaeni, S.IP.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Rini Mulyani, S.H., M.Si.
9.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Moh. Imron, S.E.
10.	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	Kuskodir
11.	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	RIZKA ALFIANTO

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG,

Drs. MULYANTO, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19720212 199203 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Kinerja Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan suatu tahapan dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sera tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk pemenuhan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdapat dalam Pasal 74 dan Pasal 126 yang mengamanahkan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD terlebih dahulu diawali dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk itu Inspektorat Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Kerja untuk tahun 2025 mendatang. Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, dan selanjutnya bersama dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2026.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan dokumen lainnya dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja akan disinkronisasikan dengan Renstra dan dokumen lainnya. Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

nantinya digunakan sebagai tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 mendatang.

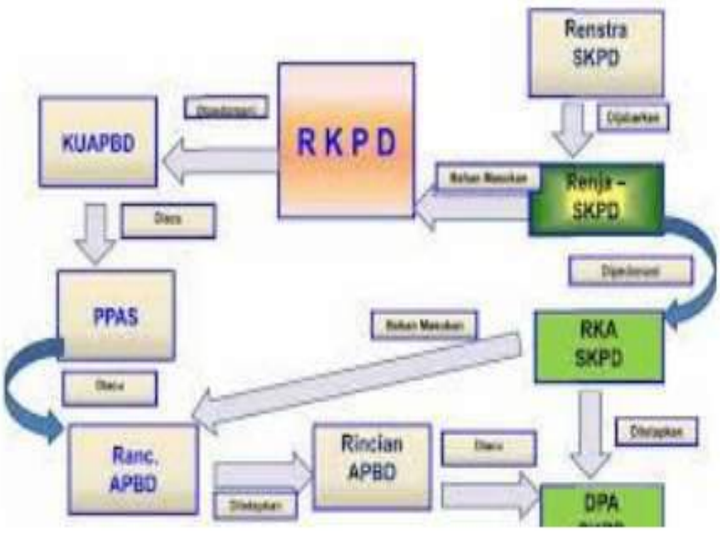

Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Renja-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tahapan proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yaitu :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Pemalang menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang. Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang, yang disusun berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026. RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu: **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"** yang dipertegas dengan **Misi 6 Organisatoris :** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi yang mengandung pengertian "Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Gotujuavernance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik" yang dicapai melalui tujuan daerah berupa "**Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel**" yang memiliki indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasiyang mendukung komitmen Bupati Pemalang dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor 000.7/2218/BAPPEDA/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 serta Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, maka pembangunan tahunan untuk tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan" dengan rencana capaian sebagai berikut :

a. Dukungan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM berkualitas;
b. Penurunan prevalensi stunting menjadi 9%;
c. Pencegahan, penanggulangan dan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
d. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan peran BUMD yang lebih progresif, realistis serta kondusif;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didekatkan kepada masyarakat;
f. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah;
g. Pembangunan infrastruktur.

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang, Inspektorat Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan RKA Inspektorat Kabupaten Pemalang
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja

Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan, meliputi penyusunan rancangan keputusan Inspektur tentang pembentukan tim penyusun Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang, orientasi mengenai Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal, meliputi tahap perumusan rancangan awal Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang dan tahap penyajian rancangan awal Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang.
3. Penyusunan rancangan, meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang, verifikasi dan penyelarasan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang.
5. Perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang menjadi rancangan akhir Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
6. Penetapan, meliputi kegiatan verifikasi rancangan akhir Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang yang selanjutnya bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang ini berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berke!anjutan;
g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
n. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang;
o. Peraturan Bupati Nomor XX Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari misi Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan mengacu pada program prioritas RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini yaitu:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang;
2. Menyediaakan dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Kabupaten Pemalang yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2026;
3. Dokumen Renja menjadi pedoman bagi Inspektorat dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir pelaksanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Inspektorat Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen, dan tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Tahun Lalu) dan Capaian Renstra Inspektorat.

Berisikan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 dan keterkaitannya dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Inspektorat berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para *stakeholders* yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

Disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir dan beserta penjelasan di luar tabel mengenai uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain meliputi :

- Jumlah Program dari jumlah kegiatan yang direncanakan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa perangkat daerah atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukurkan mendorong pencapaian target kinerja suatu instansi pemerintah. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal itu guna mengetahui sejauh mana tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2024

Tahun 2024 anggaran Inspektorat Kabupaten Pemalang terbagi kedalam 3 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Inspektorat pada awal penetapan APBD 2024 adalah sebesar Rp.15.882.193.000, namun kemudian mengalami pengurangan anggaran di perubahan menjadi Rp. 15.167.463.000. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 sejumlah Rp. 14.041.666.290 atau sebesar 92,58 % dari pagu anggaran. Adapun perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2024 serta estimasi tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Kode	Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERUBAHAN 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.167.463.000	14.041.666.290	19.960.740.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	15.167.463.000	14.041.666.290	19.960.740.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERUBAHAN 2025
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**12.515.834.765**	**11.807.769.967**	**16.640.509.000**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.000.000**	**26.311.000**	**15.166.000**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	8.488.000	3.625.000
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	1.385.000	1.775.000
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.328.000	1.754.000
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000	3.182.000	1.616.000
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000	1.541.000	1.824.000
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	5.766.000	2.647.000
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	1.621.000	1.925.000
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.524.211.250**	**7.309.269.912**	**10.864.346.000**
6.01.01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	7.517.463.000	7.305.389.380	10.860.740.000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.831.250	1.089.000	1.726.000
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.917.000	2.791.532	1.880.000
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**636.583.340**	**429.746.476**	**827.708.500**
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.333.500	115.830.448	702.708.500
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	356.249.840	313.916.028	125.000.000
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**971.000.000**	**922.905.876**	**770.909.500**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	34.862.590	15.000.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	356.000.000	353.104.866	365.783.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	79.665.600	35.175.000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	17.500.000	10.890.000	13.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	432.382.820	333.199.500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERUBAHAN 2025
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.500.000	12.000.000	8.752.000
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.523.710.225**	**1.427.115.525**	**2.135.197.000**
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	592.807.000	531.030.000	1.244.928.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	161.253.225	159.125.000	127.524.000
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	769.650.000	736.960.525	762.745.000
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**424.091.000**	**307.804.945**	**431.394.000**
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	12.124.266	15.000.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.000.000	128.621.094	165.000.000
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.780.000	72.926.100	22.070.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.311.000	94.133.485	229.324.000
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.394.238.950**	**1.384.616.233**	**1.595.788.000**
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.000.000	303.494.183	370.788.000
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.840.000	11.368.000	40.000.000
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.970.000	174.165.100	195.000.000
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	896.428.950	895.588.950	990.000.000
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.599.156.235**	**1.327.609.824**	**2.048.063.000**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.380.976.235**	**1.129.538.405**	**1.633.063.000**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	157.238.585	151.214.930	150.000.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120.000.000	102.712.500	170.000.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	35.000.000	31.971.000	200.000.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	171.250.000	146.334.472	200.000.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	348.477.600	176.525.388	400.000.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	420.000.000	399.849.329	404.900.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERUBAHAN 2025
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	129.010.050	120.930.786	108.163.000
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**218.180.000**	**198.071.419**	**415.000.000**
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	49.992.000	39.819.426	150.000.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	168.188.000	158.251.993	265.000.000
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.052.472.000**	**906.286.499**	**1.272.168.000**
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**161.952.000**	**131.730.000**	**72.168.000**
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	161.952.000	131.730.000	72.168.000
6.1.0.2.1	**Pendampingan dan Asistensi**	**890.520.000**	**774.556.499**	**1.200.000.000**
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000	187.961.904	300.000.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	289.370.000	261.107.395	300.000.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	150.150.000	127.786.000	300.000.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	201.000.000	197.701.200	300.000.000

Dari penyajian tabel diatas dapat diulas bahwa :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 7 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan memiliki pagu anggaran Rp. 12.515.834.765 dan terealisasi sebesar Rp. 11.807.769.967 atau 94,34 % dari total anggaran.
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 Kegiatan dan 9 Sub kegiatan memiliki pagu anggaran Rp. 1.599.156.235, terealisasi sebesar Rp. 1.327.609.824 atau 83,01 % dari total anggaran.
c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan 2 Kegiatan dan 5 Sub kegiatan memiliki pagu anggaran Rp. 1.052.472.000 dapat teralisasi sebesar Rp. 906.286.499 atau 86,11 % dari total anggaran.
d. Pagu indikatif 2025 mengalami penambahan belanja operasional dan belanja gaji dan tunjangan. Pada belanja operasional mengalami peningkatan sebesar

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rp. 1.450.000.000, dari sebesar Rp. 7.650.000.000 di tahun 2024 menjadi Rp. 9.100.000.000 di tahun 2025. Sedangkan belanja gaji dan tunjangan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.343.277.000 dari sebesar Rp. 7.517.463.000 di tahun 2024 menjadi Rp. 10.860.740.000 di tahun 2025. Sehingga total pagu 2025 adalah sebesar Rp. 19.960.740.000 atau bertambah sebesar Rp. 486.715.200 atau sebesar 18,95% dari anggaran 2024.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang

Target Program Prioritas Pengawasan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang yaitu :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan target 90 %, pada tahun 2024 hanya mampu terealisasi sebesar 83,02%. Hal tersebut disebabkan keterbatasan SDM yang menyebabkan kurang optimalnya penugasan di sub kegiatan Pengawasan Desa.
- Program Pendampingan, Asistensi dan Perumusan Kebijakan dengan target 90%, pada tahun 2024 mampu terealisasi melampaui target sebesar 106,33 %.

3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021-2026

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)*100%	10	11=(6+8)	12=(11/5)*100%
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks								
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai								
6.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	96	52	15	15	100	16	83	86
	Hasil	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	86	86
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	9	3	3	100	3	15	83

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	12	8	2	2	100	2	12	100
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6	3	1	1	100	1	5	83
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	12	8	2	2	100	2	12	100
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6	3	1	1	100	1	5	83
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	24	12	4	4	100	4	20	83
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	9	2	2	100	3	14	78
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Keluaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	124	62	62	62	100	62	126	102

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil	Persentase dokumen administrasi keuangani kinerja perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	50	50	50	100	50	90	170
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	66	11	11	11	100	11	33	50
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	dokumen	114	65	102	55	54	296	390	132

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	54	54	100	132	132
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	54	15	17	11	65	146	146	270
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	50	85	44	52	150	244	407
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	dokumen	72	36	12	12	100	12	12	100
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	72	36	12	12	100	12	60	83

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	unit	112	69	95	95	100	118	282	100
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	15	0	4	4	100	4	8	53
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	28	12	77	77	100	47	136	486
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	69	57	14	14	100	67	138	200
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	dokumen	72	36	12	12	100	12	12	100
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	dokumen	72	36	12	12	100	12	60	83

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	36	12	12	100	12	60	83
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	unit	1010	502	169	169	100	169	843	100
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	174	87	29	29	100	29	145	83
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	246	123	41	41	100	41	205	83
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	582	291	97	97	100	97	485	83

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	8	1	2	2	100	2	8	100
6.01.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	100		90	83	92	95	50	53
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang terselenggara	laporan	1262	230	112	100	89	82	387	31
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	%	100		100	89	89	100	31	31
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja PD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	Laporan	66	33	11	11	100	12	53	80
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan PD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	78	4	3	3	100	10	11	14
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja PD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	42	21	7	7	100	7	35	83
6.01.02.2.01.04	Reviu Keuangan PD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	Laporan	264	40	45	44	98	25	96	36

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	102	8	18	9	50	12	27	26
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasam Internal	Jumlah kegiatan Kerjasama APH yang dilaksanakan dalam pengawasan	Laporan	30	4	15	14	93	4	21	70
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	680	120	13	12	92	12	144	21
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselenggara	laporan	157	36	7	7	100	20	69	44
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	%	100	23	100	100	100	100	44	44
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	79	18	5	5	100	2	36	46
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	78	18	2	2	100	18	33	42
6.01.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	100		90	83	92	95	50	53

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.03.2.01	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah kebijakan teknis pengawasan yang terumuskan	kebijakan	18	12	3	3	100	3	3	17
	Hasil Kegiatan	Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	17	17
6.01.03.2.01.02	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Laporan	18	12	3	3	100	3	15	83
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Laporan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	laporan	617	128	90	86	96	65	193	31
	Hasil Kegiatan	Persentase pendampingan dan asistensi yang sesuai ketentuan (%)	%	100	100	100	100	100	100	31	31
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	246	41	6	5	83	3	48	20
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	246	42	29	26	90	9	76	31

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progr./ Keg./ Sub Keg. s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan	84	4	14	14	100	12	28	33
6.01.03.2.02.03	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	dokumen	41	41	41	41	100	41	41	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah anggaran Inspektorat pada awal penetapan APBD 2024 adalah sebesar Rp. 15.882.193.000, namun kemudian mengalami penambahan anggaran di APBD Perubahan menjadi Rp. 15.167.463.000. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2024 sejumlah Rp. 14.041.666.290 atau sebesar 92,58 % dari pagu anggaran. Sedangkan hasil evaluasi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Realisasi fisik program/kegiatan yang **belum memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Dari 43 sub kegiatan yang dikelola, tercatat 11 sub kegiatan yang memiliki penyerapan rendah, yaitu :

   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

     Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan pekerjaan lembur untuk non ASN tidak dilaksanakan. Namun secara kuantitas, target fisik tetap dapat terpenuhi sesuai target. Penyajian laporan dalam bentuk file pdf turut mendukung efisiensi belanja cetak dan belanja penggandaan.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan pekerjaan lembur untuk non ASN tidak dilaksanakan. Namun secara kuantitas, target fisik tetap dapat terpenuhi sesuai target. Penyajian laporan dalam bentuk file pdf turut mendukung efisiensi belanja cetak dan belanja penggandaan.
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

     Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan pekerjaan lembur untuk non ASN tidak dilaksanakan. Namun secara kuantitas, target fisik tetap dapat terpenuhi sesuai target. Penyajian laporan dalam bentuk file pdf turut mendukung efisiensi belanja cetak dan belanja penggandaan.
   - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan pekerjaan lembur untuk non ASN tidak dilaksanakan. Namun secara kuantitas, target fisik tetap dapat terpenuhi sesuai target. Penyajian laporan dalam bentuk file pdf turut mendukung efisiensi belanja cetak dan belanja penggandaan.

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan beberapa biaya diklat yang diikuti oleh APIP nilainya dibawah anggaran yang terpasang. Namun dari aspek kuantitas, jumlah APIP yang mengikuti diklat dapat sesuai dengan yang direncanakan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan pekerjaan lembur untuk non ASN tidak dilaksanakan. Namun secara kuantitas, target fisik tetap dapat terpenuhi sesuai target. Penyajian laporan dalam bentuk file pdf turut mendukung efisiensi belanja cetak dan belanja penggandaan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan pekerjaan lembur untuk non ASN tidak dilaksanakan. Namun secara kuantitas, target fisik tetap dapat terpenuhi sesuai target. Penyajian laporan dalam bentuk file pdf turut mendukung efisiensi belanja cetak dan belanja penggandaan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan. Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan karena tidak terlalu banyak judul literatur cetak yang dibeli. Di era digital seperti saat ini, banyak literatur yang bisa didapatkan dengan cara mengunduh dari website dan dapat disebarluaskan dengan cara berbagi di grup media sosial. Cara tersebut mampu mengoptimalkan efisiensi belanja cetak.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini tergantung pada pembelian kebutuhan kantor yang bersifat relatif, sehingga tidak semua item yang dianggarkan harus dibeli. Hal ini turut mendukung optimalnya efisiensi belanja keperluan rumah tangga kantor.
- Sub Kegiatan Pengawasan Desa.
  Rendahnya realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini disebabkan masih minimnya jumlah pemeriksa. SDM APIP pada 2024 lebih difokuskan pada kegiatan sosialisasi anti korupsi pada ranah pendidikan.
- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Dilihat dari output kegiatan, seluruh penugasan pengawasan yang masuk dalam lingkup sub kegiatan ini sudah terpenuhi. Namun dilihat dari sisa anggaran, penyerapan perjalanan dinas dalam kota terhitung rendah karena acara rapat koordinasi lebih sering diselenggarakan dilingkungan kantor Inspektorat, sehingga dapat mendukung efisiensi paket *meeting fullday*.

B. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   Belum ada program dan kegiatan yang melebihi target.

C. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada umumnya disebabkan pemenuhan kebutuhan rutin kantor yang tergantung pada kondisi dan rendahnya penyerapan pada belanja perjalanan dinas dalam daerah karena karena obyek reviu yang dilakukan tidak berlokasi di pelosok daerah dan aktivitas asistensi yang tidak terlalu sering.

2.3. Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang

Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu “Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel” yang diukur dengan indikator Maturitas SPIP berdasarkan evaluasi oleh BPKP. Sasaran Inspektorat Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemalang mempunyai 2 (dua) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu :

1. "Meningkatnya pelayanan kinerja Inspektorat" yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Inspektorat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada mitra Inspektorat (obyek pemeriksaan dan PD yang didampingi)

   Untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kinerja Inspektorat mempunyai 1 program yaitu Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan indikator program ada 2 yaitu :

   a. Nilai Sistem Akuntabilitas Intern Pemerintah (SAKIP) Inspektorat
   b. Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat
2. "Meningkatnya Peran APIP dalam pengawasan internal" yang diukur dengan indikator kapabilitas APIP yang merupakan hasil evaluasi oleh BPKP terhadap kualitas dari Sistem Pengendalian Intern Organisasi. Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

   Untuk sasaran Meningkatnya Peran APIP Dalam Pengawasan Internal mempunyai 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pemalang

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Birokrasi yang transparan dan akuntabel													
2	Maturitas SPIP	Skor		√	√	3,0390	3,0395	3,0405	3,0485	2,974	2,935	3,0405	2,980	
3	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Inspektorat													
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Inspektorat	Skor		√		80	81	82	83	79.00	82,20	82	83	
5	Program Penunjang Urusan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang/Kota													
6	Nilai SAKIP (skor)	Skor				61,07	61,68	62,29	62,92	64,85	65,49	64,90	71	
7	Nilai IRB (skor)	skor				40	41	44	47	68,97	77,16	48,50	78	
8	Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan internal													
9	Kapabilitas APIP	level		√	√	3	3	3	3	2	3	3	3	
10	Program Penyelenggaraaan Pengawasan													
11	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan (%)					85	90	95	100	81	83,02	82	100	
12	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
13	Persentase peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi (%)					85	90	95	100	89	86,11	90	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang.

1. Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Adapun isu strategis yang telah dirumuskan sebagai berikut :
   a. Belum optimalnya implementasi pengendalian internal.
      Implementasi maturitas SPIP dilaksanakan melalui pendampingan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah dan nilai maturitas SPIP tersebut merupakan nilai untuk SPIP Kabupaten Pemalang. Untuk Tahun 2024, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Pemalang mendapat Level 2 dengan score 2,935. Angka tersebut masih dibawah target Renstra Tahun 2024 sebesar 3,0405.
   b. Kuantitas, profesionalisme dan kompetensi APIP belum memadai.
      Dalam menjalankan fungsi peran APIP dalam pengawasan, baik yang tercantum dalam PKPT maupun permintaan Instansi luar, Inspektorat Kabupaten Pemalang dituntut untuk meningkatkan kuantitas, profesionalisme dan kompetensi SDM APIP untuk mendukung tercapainya *good government* pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
   c. Perlunya peningkatan pelayanan kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.
      Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran berupa nilai kepuasan masyarakat (IKM); akuntabilitas kinerja perangkat daerah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sangat mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai lembaga pengawasan.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat antara lain sebagai berikut :
   a. Belum optimalnya implementasi pengendalian internal pada OPD;
   b. Profesionalisme dan kompetensi APIP yang masih perlu ditingkatkan.
   c. Belum optimalnya pelayanan kinerja Inspektorat
3. Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) bebas dari korupsi, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain sehingga akan tercipta masyarakat yang aman, makmur dan sejahtera yang secara langsung berdampak pada Misi ke 2 Bupati Pemalang yaitu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

"Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih". Hal kritis yang terkait dengan pelayanan yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan, konsultasi dan evaluasi TLHP serta melakukan reviu terhadap laporan keuangan dan reviu terhadap dokumen perencanaan pembangunan.

4. **Tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada OPD antara lain, sebagai berikut :**
   a. Kurangnya kepatuhan obyek pemeriksaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kurang efektifnya sistem pengendalian internal;
   b. Adanya keinginan dari *stakeholder* bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi suatu permasalahan.

   Sedangkan untuk Peluang sebagai berikut :
   a. APIP mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan.
   b. APIP mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.
5. Dari isu-isu strategis tersebut maka tindak lanjut yang akan direncanakan untuk tahun 2026 agar dapat meningkatkan maturitas SPIP yaitu dengan dilakukan pendampingan dan asistensi ke desa maupun OPD terkait pelaksanaan kegiatan UPG, sosialisasi antikorupsi, benturan kepentingan, survey SPI, pendampingan SPIP dan dll, sedangkan untuk meningkatkan kompetensi dan kuantitas APIP untuk tahun mendatang Inspektorat Kabupaten Pemalang telah menganggarkan bimbingan teknis dan diklat untuk calon auditor, serta untuk pelayanan kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang telah merencanakan pengadaan aplikasi pengaduan ASN, tindak lanjut hasil temuan dan pembinaan pengawasan lainnya.

2.5. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil serta menghindari program dan kegiatan yang tidak dibutuhkan. Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan telah menyesuaikan dengan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Pemalang selalu melakukan analisis kebutuhan guna

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mengakomodasi semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Di dalam Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.3 dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 2.3

REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT				**16.729.304.000**	**INSPEKTORAT**				**17.939.304.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**14.204.304.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**14.509.304.000**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			12 bulan	**18.900.000**				12 bulan	**18.900.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah RKA-SKPD	2 Laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Laporan	2.200.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.200.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 laporan	2.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 laporan	2.200.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	3.800.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.500.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11.564.104.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11.564.104.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	12 Dokumen		Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	12 Dokumen		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	100%				Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	100%		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan (orang/bulan)	14 bln	11.561.104.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan (orang/bulan)	14 bln	11.561.104.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (dokumen)	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (dokumen)	1 Laporan	1.500.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD yang tersusun (dokumen)	14 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD yang tersusun (dokumen)	14 Laporan	1.500.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**700.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**780.220.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen				Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	100%				Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	100%		
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang/kali)	146 Orang	500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang/kali)	146 Orang	580.220.000	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang/kali)	150 Orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang/kali)	**150** Orang	200.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			12 bulan	**762.217.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			12 bulan	**776.397.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	dokumen				Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	dokumen		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	100%				Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	100%		
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	12 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	12 paket	15.000.000	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis/bulan)	12 paket	391.545.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis/bulan)	12 paket	395.225.000	
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	12 paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	12 paket	45.000.000	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	12 Dokumen	12.672.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	12 Dokumen	12.672.000	
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			yang terfasilitasi (kegiatan)					yang terfasilitasi (kegiatan)			
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata (dokumen)	12 dokumen	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat	Jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata (dokumen)	12 dokumen	8.500.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**171.614.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**215.624.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	74 unit				Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	74 unit		
	Hasil Kegiatan		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100 %				Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100 %		
19	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia (unit)	1 unit	39.514.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	40.254.000	
20	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah mebel yang tersedia (unit)	1 unit	9.000.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah mebel yang tersedia (unit)	1 unit	15.660.000	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya undangan	Inspektorat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia (unit)	6 unit	123.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya undangan	Inspektorat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia (unit)	6 unit	159.710.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**327.469.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**344.059.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4 layanan		Keluaran Kegiatan		Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	4 layanan		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	100 %		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	100 %		
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah surat dinas yang terkirim (surat)	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah surat dinas yang terkirim (surat)	12 Laporan	18.000.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (jenis/bulan)	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (jenis/bulan)	12 Laporan	150.000.000	
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (jenis/ bulan)	12 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	12 Laporan	22.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/ bulan)	12 Laporan	152.469.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/bulan)	12 Laporan	300.000.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**660.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**810.000.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	55 Unit		Keluaran Kegiatan		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	55 Unit		
	Hasil Kegiatan		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%		Hasil Kegiatan		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %		
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	33 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	45 Unit	350.000.000	
27	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah mebel kantor yang terpelihara	12 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah mebel kantor yang terpelihara	10 Unit	10.000.000	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	407 unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	60 unit	150.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang terpelihara	2 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang terpelihara	1 unit	300.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				**1.400.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**1.410.000.000**	
8	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**1.100.000.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**2.085.000.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan hasil pengawasan internal (Laporan)	54 Laporan		Keluaran Kegiatan	54 Laporan				
	Hasil Kegiatan		Persentase laporan hasil pengawasan internal (Laporan)	100%		Hasil Kegiatan		Persentase laporan hasil pengawasan internal (Laporan)	100%		
30	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah (Laporan)	12 Laporan	200.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah (Laporan)	12 Laporan	150.000.000	
31	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah (Laporan)	14 Laporan	200.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah (Laporan)	14 Laporan	200.000.000	
32	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	6 Laporan	150.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	6 Laporan	150.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
33	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan (Laporan)	17 Laporan	150.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan (Laporan)	17 laporan	150.000.000	
34	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan desa (Laporan)	5 Laporan	200.000.000	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan desa (Laporan)	5 laporan	1.210.000.000	
35	Kerjasama Pengawasam Internal	Inspektorat	Jumlah instansi APH yang bekerjasama dalam pengawasan internal (kegiatan)	2 kegiatan	100.000.000	Kerjasama Pengawasam Internal	Inspektorat	Jumlah instansi APH yang bekerjasama dalam pengawasan internal (Kegiatan)	2 kegiatan	100.000.000	
36	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah LHP/LHR/LHE yang ditindaklanjuti (dokumen)	30 dokumen	100.000.000	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah LHP/LHR/LHE yang ditindaklanjuti (dokumen)	30 dokumen	125.000.000	
9	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				**300.000.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu**			13 Laporan	**325.000.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan kasus/khusus pengawasan tujuan tertentu yang tersusun	5 dokumen		Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan kasus/khusus pengawasan tujuan tertentu yang tersusun	5 dokumen		
	Hasil Kegiatan		Prosentase laporan kasus/khusus pengawasan tujuan tententu yang terlaksana	%		Hasil Kegiatan		Prosentase laporan kasus/khusus pengawasan tujuan tententu yang terlaksana	%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATOR**	**PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
37	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan hasil audit kasus pengaduan masyarakat yang berpotensi kerugian negara/daerah (dokumen)	2 dokumen	150.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan hasil audit kasus pengaduan masyarakat yang berpotensi kerugian negara/daerah (dokumen)	2 dokumen	125.000.000	
38	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (dokumen)	3 dokumen	150.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (dokumen)	3 dokumen	200.000.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				**1.125.000.000**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**1.020.000.000**	
10	**Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**75.000.000**	**Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**75.000.000**	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah kebijakan teknis yang terumuskan	1 kebijakan		Keluaran Kegiatan		Jumlah kebijakan teknis yang terumuskan	1 kebijakan		
	Hasil Kegiatan		Persentase kebijakan teknis yang terumuskan	100%		Hasil Kegiatan		Persentase kebijakan teknis yang terumuskan	100%		
39	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah kebijakan teknis pengawasan yang terumuskan (kebijakan)		75.000.000	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah kebijakan teknis pengawasan yang terumuskan (kebijakan)		75.000.000	
11	**Pendampingan dan Asistensi**				**1.050.000.000**	**Pendampingan dan Asistensi**				**945.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keluaran Kegiatan		Jumlah Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi	64 Dokumen		Keluaran Kegiatan		Jumlah Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi	64 Dokumen		
	Hasil Kegiatan		Persentase hasil Pendampingan dan Asistensi	100 %		Hasil Kegiatan		Persentase hasil Pendampingan dan Asistensi	100 %		
40	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 Dokumen	250.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 Dokumen	250.000.000	
41	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	300.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	250.000.000	
42	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Dokumen	200.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Dokumen	220.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 Laporan	300.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14 Laporan	225.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pemalang tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Pemalang belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholders*.

Tabel 2.4

Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan assistensi/pendampingan serta bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (ayat (4)). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat akan mendukung keberhasilan Perpres tersebut.

Kebijakan ruang lingkup pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota terakhir dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pelaksanaan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2026 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
   a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau;
   b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
   a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah yaitu RKPD, Renja, KUA PPAS, RKA.
   b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
   c. Reviu Laporan Keuangan
   d. Kegiatan Pengawasan Lainnya yaitu Reviu LKPD, Probity audit, LPPD, penghitungan kerugian negara, PPRG, pengelolaan keuangan desa, dan SPM
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas seperti LHKPN/LHKASN, pengendalian gratifikasi, SPI, PMPRB, Korsupgah, saber pungli, pemeriksaan investigasi, monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah meliputi Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, penerapan Manajemen Resiko

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029, maka penyusunan Renja 2026 mengacu pada tujuan perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Pemalang yaitu **“meningkatnya kualitas integritas daerah”** yang diukur dengan indikator **Indeks Integritas Nasional** yang diperoleh berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel ditentukan sasaran daerah yaitu **"meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang baik"**. Mendasari sasaran daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Pemalang merumuskan 2 (dua) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **Meningkatnya Kapabiltas APIP** yang diukur dengan indikator nilai Kapabilitas APIP yang merupakan hasil evaluasi oleh BPKP terhadap kualitas kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
2. **Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas PD Indeks Kepuasan Masyarakat** yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Indikator Nilai SAKIP OPD berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi Sakip Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Sasaran Inspektorat Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2026
Meningkatnya kualitas integritas daerah		Indeks Integritas Nasional	Angka	71
	Meningkatnya Kapabiltas APIP	Kapabilitas APIP	Level	3
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas PD Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,25
		Nilai SAKIP OPD	Angka	72

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatkan pembinaan dalam pengawasan melalui kegiatan konsultasi, audit, reviu, evaluasi dan pendampingan agar dapat meningkatkan kinerja OPD yang berpengaruh pada nilai AKIP Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Meningkatkan kuantitas dengan *impassing* atau CPNS dan Kualitas SDM dengan keikutsertaan diklat, workshop atau pelatihan lainnya untuk meningkatkan kompetensi SDM;
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dengan pembinaan kepada Obrik tentang keuangan, kinerja, perundang-undangan, administrasi dan lain-lain agar proses tindak lanjut atas temuan dapat dilaksanakan dengan baik, dan temuan pun dapat berkurang.

Sedangkan indikator SDGs untuk Inspektorat Kabupaten Pemalang ditentukan dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah berupa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Perlu diketahui bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi adalah hasil survey yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Pemalang. IPAK merupakan *survey mandate* dari KPK untuk BPS daerah dengan tingkat penilaian secara nasional, bukan penilaian daerah. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Pemalang hanya mengambil hasil akhir nilainya saja dari BPS.

Untuk perolehan tahun 2024, SDGs Inspektorat Kabupaten Pemalang yaitu dengan skor 3,85.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2026, Inspektorat Kabupaten Pemalang merencanakan akan melaksanakan 3 (tiga) program 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang pelaksanaannya dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana rancangan akhir RKPD sebesar Rp. 16.729.304.000.

Adapun rincian usulan program dan kegiatan dalam Rancangan Awal Renja pada Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2026, sebagaimana uraian berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp.14.204.304.000, meliputi 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Sub kegiatan, yaitu
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan, yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan, yaitu :
   - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan, yaitu :
   - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub kegiatan Pengadaan Mebel
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan, yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan, yaitu :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000, meliputi 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Kegiatan Pengawasan Internal terdiri 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:
   - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
   - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
   - Sub Kegiatan Pengawasan Desa
   - Sub Kegiatan Kerjasama Daerah
   - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdiri 2 Sub Kegiatan yaitu :
   - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
   - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000 meliputi 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan terdiri 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu :
   - Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. Kegiatan Pendampingan dan asistensi terdiri 4 Sub Kegiatan yaitu
   - Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
   - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
   - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan terdiri dari 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 43 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - Sub kegiatan Pengadaan Mebel
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal
   a. Kegiatan Pengawasan Internal
      - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
      - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
      - Sub kegiatan Pengawasan Desa
      - Sub Kegiatan Kerjasama Daerah
      - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
      - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
      - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
      - Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

   b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
      - Sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
      - Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
      - Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rumusan Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Pemalang
Tahun 2026

Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Pemalang
Sub Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pemalang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					INSPEKTORAT													
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**16.729.304.000**					**17.452.400.000**
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**1.400.000.000**					**1.450.000.000**
6	**1**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**1.100.000.000**					**1.150.000.000**
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	11 Laporan	62 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	11 Laporan	200.000.000
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	13 Laporan	62 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	13 Laporan	200.000.000
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	5 Laporan	62 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	150.000.000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	16 Laporan	62 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan	200.000.000
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	17 Laporan	62 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	17 Laporan	200.000.000
6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	4 Kesepakatan	62 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	100.000.000
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	120 Dokumen	62 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	120 Dok umen	100.000.000
6	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**300.000.000**					**300.000.000**
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	20 Laporan	40 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20 Laporan	150.000.000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Laporan	20 Laporan	40 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	150.000.000
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1.125.000.000**					**1.200.000.000**
6	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								75.000.000					150.000.000
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
						Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah laporan kebijakan teknis pengawasan yang implementatif	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	undefined undefined	2 Rekomendasi	2 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	150.000.000
6	**1**	**3**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								1.050.000.000					1.050.000.000
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	41 perangkat daerah	88 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	250.000.000
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
						Cakupan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	42 perangkat daerah	88 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 perangkat daerah	300.000.000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
						Cakupan pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	4 Kegiatan	88 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	200.000.000
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamping an, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi	- Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	1	41 perangkat daerah	88 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pe ndampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 peran gkat daerah	300.000.000
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**14.204.304.000**					**14.802.400.000**
6	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**18.900.000**					**18.900.000**
					Indeks Kepuasan Masyarakat													
					Nilai SAKIP													
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamata n, Semua Kelurahan		3 Dokumen	32 dokumen	4.911.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	4.911.800
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamata n, Semua Kelurahan		2 Dokumen	32 dokumen	4.786.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.786.000
6	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	32 dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
6	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	32 dokumen	4.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.924.000
6	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	32 dokumen	5.196.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.196.700
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Laporan	32 dokumen	11.415.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	11.415.500
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan	32 dokumen	5.492.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.492.200
6	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11.564.104.000**					**12.003.000.000**
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 bulan	29 dokumen	11.561.104.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	12.000.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	29 dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Laporan	29 dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.500.000
6	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**700.000.000**					**700.000.000**
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		146 Orang	296 Laporan	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	146 Orang	500.000.000
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang	296 Orang/Hari	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	200.000.000
6	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**762.217.000**					**940.500.000**
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket	72 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket	72 dokumen	391.545.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	400.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Paket	72 dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen	72 dokumen	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Und angan yang Disediakan	12 Doku men	13.000.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	72 dokumen	420.911.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	425.000.000
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen	72 dokumen	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pe natausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Doku men	12.500.000
6	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**171.614.000**					**175.000.000**
6	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit	7 unit	39.514.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit	7 unit	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit	7 unit	123.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	125.000.000
6	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**327.469.000**					**305.000.000**
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	49 dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	49 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	49 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Laporan	49 dokumen	152.469.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	130.000.000
6	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**660.000.000**					**660.000.000**
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Unit	454 unit	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	300.000.000
6	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit	454 unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		407 Unit	454 unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	407 Unit	150.000.000
6	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit	454 unit	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	200.000.000
TOTAL																		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2026 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pemalang pada Tahun 2026 serta dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, maka langkah-langkah yang perlu di tindaklanjuti yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA tahun 2026.
2. Perlunya komitmen bersama antar pimpinan OPD dalam penegakan penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, bersih dan bebas KKN.
3. Melaksanakan pengendalian intern antara pimpinan dan staf di masing masing OPD (SPIP).
4. Meningkatkan kompetensi SDM di Inspektorat dengan penambahan anggaran untuk keikutsertaan dalam diklat, pelatihan, *workshop* atau PKS.
5. Perlunya kesadaran OPD dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan baik yang merugikan keuangan negara atau daerah dan lebih tertib dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dengan kewajiban setor kepada Negara atau daerah serta pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja lainnya.
6. Pelaksanaan pendampingan ke Desa tentang keuangan, perpajakan, perundang-undangan maupun pengawasan untuk meminalisir

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kesalahan dan penyimpangan dalam pengadministrasian dan juga pelaksanaan pembangunan desa.

Pemalang, 1 Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19771006 200501 1 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

D. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah."

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagai organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebudayaan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
25. Keputusan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Keputusam Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan dan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai jembatan penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam rencana operasional tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan.
2. Memelihara sinergi dan konsistensi antara tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
3. Menjadi pedoman atau acuan resmi dalam pengusulan dan pelaksanaan progaram dan kegiatan serta anggaran Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya, serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.
5. Mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib pendidikan dan Kebudayaan serta pencapaian target standar pelayanan minimum pendidikan dasar

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan DokumenRENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sitematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu berisi Evaluasi Hasil Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dan Capaian Restra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Review Terhadap

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pendidikan dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Secara Garis besar untuk Kegiatan Tahun 2026 melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun sebelumnya agar Tujuan Akhir RPJMD dapat tercapai.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja Tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

V. Penutup berisi kesimpulan atas Rencana Kerja yang akan dilaksankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Kebutuhan tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan pencapaian RENSTRA adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, yaitu meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah maka pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang focus pada pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan diharapkan Tahun 2026 Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP naik secara signifikan.

Pada tahun 2026 dialokasikan kembali pemberian seragam kepada anak-anak yang rentan putus sekolah di tingkat SD maupun SMP.

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2024, yang berpedoman pada RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

2.1 EVALUASI HASIL RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG DAN CAPAIAN RESTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

Evaluasi hasil RENJA ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang terbagi atas urusan Wajib Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Dari hasi evaluasi pencapaian target kinerja RENJA dan perkiraan capaian RENSTRA Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada RENJA tahun 2025 telah dilaksanakan ***2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang terdistribusi dalam 7 (Tujuh) program***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pendidikan dan kebudayaan, 18 (delapanbelas) kegiatan dan 63 (enampuluh tigan) sub kegiatan.

2. **Faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan urusan Wajib Pendidikan**

Dari hasil pelaksanaan progam dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran maka penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Dalam menyelesaikan program peningkatan infrastruktur pendidikan telah dilaksanakan pembangunan sarana prasarana pendidikan *yang bersumber dari DAU dan DAK.*

No	***Kegiatan***		Vol.	Satuan
1	***DAK Fisik 2024 SubBidang PAUD***			
	1	Pembangunan area bermain TKN Pembina Bantarbolang	1	Ruang
	2	Pembangunan ruang guru/KS TKN Pembina Bantarbolang	1	Ruang
	3	Pembangunan ruang kelas baru TKN Pembina Bantarbolang	1	Ruang
	4	Pembangunan ruang UKS TKN Pembina Bantarbolang	1	Ruang
	5	Pembangunan area bermain TKN Pembina Randudongkal	1	Ruang
	6	Pembangunan ruang kelas baru TKN Pembina Randudongkal	1	Ruang
	7	Pembangunan ruang UKS TKN Pembina Randudongkal	1	Ruang
	8	Pembangunan ruang kelas baru TK Mini Medici Pemalang	1	Ruang
	9	Pembangunan ruang UKS TK Mini Medici Pemalang	1	Ruang
	10	Pengadaan Mebeler Ruang Guru/KS, Mebeler Ruang Kelas Baru dan Mebeler Ruang UKS TK Negeri Pembina Bantarbolang (DAK 2024)	1	Paket
	11	Pengadaan Mebeler Ruang Kelas Baru dan Mebeler Ruang UKS TK Negeri Pembina Randudongkal (DAK 2024)	1	Paket
	12	Pengadaan Mebeler Ruang Kelas Baru dan Mebeler Ruang UKS TK Mini Medici Pemalang (DAK 2024)	1	Paket
	13	Pengadaan APE luar Ruangan TK Negeri Pembina Bantarbolang dan TK Negeri Pembina Randudongkal (DAK 2024)	1	Paket
	14	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran TK Negeri Pembina	1	Paket

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	*Kegiatan*		Vol.	Satuan
		Bantarbolang dan TK Negeri Randudongkal (DAK 2024)		
	15	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran TK Mini Medici Pemalang dan TK ABA Kendalsari (DAK 2024)	1	Paket
2	***DAK Fisik 2024 SubBidang SKB***			
	1	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya SKB Pemalang	1	Paket
	2	Pengadaan peralatan keterampilan SKB Pemalang	1	Paket
3	***DAK Fisik 2024 SubBidang SMP***			
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 3 Belik (DAK 2024)	1	Paket
		Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 6 Pemalang (DAK 2024)	1	Paket
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Belik (DAK 2024)	1	Paket
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Randudongkal (DAK 2024)	1	Paket
		Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Ulujami (DAK 2024), Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 2 Ulujami (DAK 2024),Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 2 Ulujami (DAK 2024)	1	Paket
		Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 3 Pulosari (DAK 2024)	1	Paket
		Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 6 Pemalang (DAK 2024)	1	Paket
		Pengadaan Mebeler SMP Negeri (DAK 2024)	1	Paket
		Pengadaan Alat Peraga Laboratorium IPA SMP (DAK 2024)	1	Paket
4	***DAK Fisik 2024 SubBidang SD***			
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 03 jatingarang (DAK 2024)	1	Paket
	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 02 Banjarasari (DAK 2024)	1	Paket
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 02 Wanarata (DAK 2024)	1	Paket
	4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 03 Ampelgading (DAK 2024)	1	Paket
	5	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 03 Sidokare (DAK 2024),Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas Sekolah SD Negeri 03 Sidokare (DAK 2024)	1	Paket
	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 04 Tegalsari (DAK 2024)	1	Paket
	7	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 02 Mojo (DAK 2024)	1	Paket

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	*Kegiatan*		Vol.	Satuan
	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 08 Wanarejan (DAK 2024)	1	Paket
	9	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas SDN 01 Wanamulya (DAK 2024), Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SDN 01 Wanamulya (DAK 2024)	1	Paket
	10	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri Purana (DAK 2024), Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri Purana (DAK 2024)	1	Paket
	11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 03 Pener (DAK 2024),Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 03 Pener (DAK 2024)	1	Paket
	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 02 Sidokare (DAK 2024)	1	Paket
	13	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 01 Pasir (DAK 2024), Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 01 Pasir (DAK 2024)	1	Paket
	14	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD (DAK 2024)	1	Paket
	15	Pengadaan Mebeler Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah (DAK 2024)	1	Paket

b. Terselenggaranya Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Proses pendataan yang dilakukan oleh setiap pendata yang ada di desa masing-masing telah menemukan Anak Tidak Sekolah mencapai 12.540 ATS di 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang. Pada pendataan di 14 kecamatan dapat disimpulkan bahwa, ada 12.540 anak tidak sekolah usia 4-6th dan 7-18th dan diatas 19th. Dimana jumlah keseluruhan ats usia 4-6th terdapat 3.417, ats usia 7-18th terdapat 8.951 dan ats usia diatas 19th terdapat 172. ATS yang kembali ke sekolah non-formal ada 6.403, dimana 4,713 masuk ke dalam DAPODIK dan 1.690 masih DILUAR DAPODIK.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Adapun permasalahan yang membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun mendatang adalah

No	Permasalahan / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut / Solusi
a.	Masih belum meratanya jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	- Pemetaan dan Redistribusi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
b.	Perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara serius dan mencegah meningkatnya jumlah ATS	-Memastikan program kegiatan yang dilaksanakan 2025 untuk menunjang pengentasan ATS
c.	Implementasi Kurikulum Merdeka sesuai Permendiknas Nomor 13 Tahun 2025	-Memastikan pelaksanaan kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan SD dan SMP secara berkelanjutan diimbaskan kepada semua satuan Pendidikan di Kabupaten Pemalang
d.	Pemenuhan Sarana dan prasarana sekolah Inklusi	Memastikan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana bagi sekolah inklusi mengingat daya tampung SLB yang masih kurang.
e.	Angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yang masih rendah	Memastikan dukungan bagi anak anak rentan putus sekolah sehingga diharapkan tidak putus sekolah dan menambah jumlah anak tidak sekolah.
f.	Pengelolaan BOSP dan BOP reguler dengan benar sesuai aturan yang berlaku	Melakukan sosialisasi, pendampingan dan monitoring serta evaluasi pengelolaan dana BOSP dan BOP regular

3. **Faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan urusan Wajib Kebudayaan**

Dari hasil pelaksanaan progam dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran maka penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Kabupaten Pemalang memiliki kekayaan nilai-nilai tradisi luhur, kekayaan Peninggalan Cagar Budaya dan identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakat;
b. Kabupaten Pemalang memiliki keragaman seni budaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, cerita rakyat, permainan tradisional, tekstil tradisional, pasar tradisional, dan upacara tradisional.
c. Dukungan dari masyarakat dan komunitas seni dalam pemberdayaan kelompok seni
d. Internalisasi kebudayaan daerah untuk generasi muda melalui program-program akademik dalam kurikulum ataupun kegiatan sekolah yang memuat pengetahuan tentang kebudayaan dan sejarah lokal ;
e. Pengakuan ragam warisan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang baik oleh daerah/provinsi dan K/L ataupun lembaga internasional yang berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan.

Adapun permasalahan pada urusan kebudayaan yang membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun mendatang adalah:

Permasalahan / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut / Solusi
Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Pemalang menjadi wisata Budaya Cagar Budaya yang dilestarikan.	Melakukan verifikasi dan validasi atas Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Pemalang Pengusulan kedalam long list usulan DAPOBUD
Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya serta	Melakukan verifikasi dan validasi kelompok kesenian yang aktif di Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Permasalahan / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut / Solusi
kegiatan kajian seni di Kabupaten Pemalang masih terbatas.	Pengembangan kegiatan tradisi melalui organisasi penggiat seni.
Belum optimalnya pembinaan sumberdaya manusia kesenian termasuk fasilitasi untuk memperoleh sertifikat HAKI, jumlah tradisi budaya yang telah mendapatkan sertifikasi HAKI baru 1 tradisi.	Melakukan pembinaan secara intens agar tradisi budaya yang ada memiliki sertifikat HAKI

4. Dari total pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayan di Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar Rp. 1.139.581.679.479,00 hingga triwulan IIII telah terealisasi sebesar Rp. 673.230.950.501,00 dengan persentase penyerapan sebesar 59,08%. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 s.d. TW III	SELISIH	PROSENTASE
1	Belanja Operasi	1.068.731.945.884	652.681.971.030	416.049.974.854	59,08%
2	Belanja Modal	70.849.733.595	20.548.979.471	50.300.754.124	61,07%
Belanja Daerah		1.139.581.679.479	673.230.950.501	466.350.728.978	29,00%

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Tahun 2024 dan perkiraan capaian target RENSTRA Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2025 triwulan IIII tersaji dalam berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 dokumen**	**3 dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	85 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	89 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**2 dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	7800 orang/bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	7800 Orang/bulan	7800 Orang/bulan	100%
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	348 laporan	79 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	65 Dokumen	35 Dokumen	50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		50%
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 Laporan	65 Dokumen	65 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100 dokumen**	**1 dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**100%**		**50%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	799 kantor/satdik	1 laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Laporan		50%
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**20 unit**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 kantor	1 laporan	3 paket	3 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	116 kantor/kali	1 paket	114 Unit	114 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	8 Paket	8 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	116 kantor/kali	1 paket	6 Paket	6 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	116 kantor/kali	1 paket	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	116 kantor/kali	1 dokumen	2440 Eks	2440 Eks	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4752 orang/kali	19 laporan	144 Laporan	144 Laporan	100%	60 Laporan	30 Laporan	50%
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**9 jasa**	**20 Unit**	**20 Unit**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 unit			100%			50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	22 unit	32 Unit	32 Unit	100%	20 Unit	10 Unit	50%
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**20 unit**	**9 Jasa**	**9 Jasa**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7822 surat	1 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1044 rekening/bulan	12 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 orang/bulan	1 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**20 unit**	**76 Unit**	**76 Unit**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 unit	56 unit	76 Unit	76 Unit	100%	56 Unit	26 Unit	50%
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	100 unit	20 Unit	20 Unit	100%	100 Unit	50 Unit	50%
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	85 unit	92 Unit	92 Unit	100%	85 Unit	45 Unit	50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	6 unit	11 Unit	11 Unit	100%	6 Unit	3 Unit	50%
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Sekolah Dasar**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		1 paket		6 Ruang	6 Ruang	100%			50%
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 paket	45 unit	8 Ruang	8 Ruang	100%	10 Unit	5 Unit	50%
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 paket	74 paket	28 Paket	28 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	212 peserta	1570 peserta didik	1570 peserta didik	1570 peserta didik	100%	785 Peserta Didik	785 Peserta Didik	100%
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	449 orang	7119 orang	7119 orang	7119 orang	100%	13544 Orang	13544 Orang	100%
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	747 sekolah	739 satuan pendidikan	738 Sekolah	738 Sekolah	100%	739 Satuan Pendidikan	739 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	747 sekolah	1495 orang	739 Orang	739 Orang	100%	738 Orang	738 Orang	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 paket	1 ruang	9 ruang	9 ruang	100%	3 Ruang	3 Ruang	100%
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	64 ruang	37 unit	30 Paket	30 Paket	100%	16 Unit	8 Unit	50%
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	23000 siswa	739 satuan pendiidikan	23000 Siswa	23000 Siswa	100%	738 Satuan Pendidikan	738 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	60 ruang	126 Ruang	126 Ruang	100%	20 Ruang	10 Ruang	50%
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1020 siswa	500 peserta didik	1300 SIswa 586 Sekolah	1300 SIswa 586 Sekolah	100%	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	100%
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	14 paket	19 paket	54 Paket	54 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 paket	19 unit	20 ruamg	20 ruamg	100%	13 Unit	7 Unit	50%
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 paket	46 unit	28 ruang 57 Paket	28 ruang 57 Paket	100%	47 Unit	27 Unit	50%
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 paket	96 paket	55 Paket	55 Paket	100%	11 Paket	6 Paket	50%
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	850 siswa	1250 peserta didik	850 Siswa 94 Sekolahj	850 Siswa 94 Sekolahj	100%	2900 Peserta Didik	2900 Peserta Didik	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3590 orang	3950 peserta didik	23200 Siswa	23200 Siswa	100%	1795 Peserta Didik	1795 Peserta Didik	100%
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	116 sekolah	132 orang	61 Sekolah	61 Sekolah	100%	118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	116 sekolah	23000 peserta didik	66 Sekolah	66 Sekolah	100%	118 Orang	118 Orang	100%
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	23200 siswa	66 satuan pendidikan	118 Sekolah	118 Sekolah	100%	2300 Satuan Pendidikan	2300 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 paket	6 paket	46 Paket	46 Paket	100%	5 Paket	3 Paket	50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**67 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 paket	10 unit	34 Unit	34 Unit	100%	12 Unit	6 Unit	50%
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 paket	85 unit	30 Unit	30 Unit	100%	10 Paket	5 Paket	50%
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	6 paket	95 paket	35 Paket	35 Paket	100%	30 Paket	15 Paket	50%
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 paket	202 paket	50 Unit 31 Orang	50 Unit 31 Orang	100%	806 Satuan Pendidikan	806 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1437 orang/bulan	806 satuan pendidkan	796 Satdik	796 Satdik	100%	792 Satuan Pendidikan	792 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.03.0045	02	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Na	792 satuan pendidikan	20 Paket	20 Paket	100%	26 Unit	13 Unit	50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1275229 orang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		1 satuan pendidikan	16 Lembaga	16 Lembaga	100%	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		16 satuan pendidikan	16 Satdik	16 Satdik	100%	16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	100%
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	16 satdik	17 satuan pendidikan	16 Lembaga	16 Lembaga	100%	2800 Peserta Didik	2800 Peserta Didik	100%
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Terlaksananya Pengembangan Kurikulum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	61 sekolah	400 orang	400 Orang/Guru	400 Orang/Guru	100%	400 Orang	400 Orang	100%
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Terlaksananya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**75 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 kasus	4 dokumen	20 Kasus	20 Kasus	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 SK	4 laporan	100 SK	100 SK	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100%**			**100%**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100%**			**100%**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**5 kegiatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		2 kegiatan				100%	1 Objek	1 Objek	100%
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3 kegiatan	205 orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	200 Orang	200 Orang	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**8 Kali**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 kali	27 objek	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			50%
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	2 kegiatan	4 laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Terlaksananya Program Pembinaan Sejarah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**75 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 kegiatan	500 orang			100%	200 Orang	200 Orang	100%
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Terlaksananya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**73 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 kajian	2 objek	1 Objek	1 Objek	100%	1 Objek	1 Objek	100%
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**73 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 kali	10 objek	1 Objek	1 Objek	100%	1 Objek	1 Objek	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

TUJUAN DAN SASARAN BIDANG PENDIDIKAN

TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 TW III			REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	%		
1	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	7,3	6,56	89,86	6,56	92,39
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,4	12,02	96,93	12,02	97,72
	Rata rata capaian tujuan			93,39%		

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN YANG BERDAYA SAING

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 TW III			REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	%		
1	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	7,3	6,56	89,86	6,56	92,39
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,4	12,02	96,93	12,02	97,72
	Rata rata capaian sasaran			93,39%		

Pencapaian hasill evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

   Pada tahun 2025 hingga triwulan IIII kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dari yang ditahun sebelumnya. Pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah terealisasi 6,56 yang belum mencapai target di angka 7,3 , sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) terealisasi 12,02 dari target 12,4. sehingga prosentase total capaian hanya 93,39%.

2. **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya**

   Bila dibandingkan tahun sebelumnya, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tidak terjadi penurunan maupun peningkatan. Capaian kinerja kedua indikator baik RLS atau HLS belum dapat mencapai target dikarenakan adanya beberapa penghambat.

3. **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra**

   Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2021-2026 secara umum berhasil dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

   Hingga tahun 2025 triwulan III Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 6,56 belum berhasil melebih target akhir Renstra sebesar 7,50. Begitu juga pada capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai sebesar 12,02 dan belum mendekati dari target akhir Renstra yaitu sebesar 12,50 di tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Apabila dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih lebih rendah. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang sebesar 6,56 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8,02 dan capaian Nasional sebesar 8,85. Hal ini juga terjadi pada kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS). Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,86 dan capaian Nasional sebesar 13,21 maka nilai Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang sebesar 12,01 masih lebih rendah. Untuk RPJMD yang akan datang kami usulkan untuk mengungkit melalui pendidikan kesetaraan mengingat dari segi pendidikan formal sudah tidak memungkinkan lagi.

TUJUAN DAN SASARAN BIDANG KEBUDAYAAN

TUJUAN : MENINGKATKAN PELESTARIAN BUDAYA

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 TW III			REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	%		
1	Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan	9,80	7,89	80,51	7,89	93,15
2	Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	100	100,00	100	100,00
	Rata rata capaian tujuan			90,25%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

SASARAN : MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 TW III			REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	%		
1	Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan	9,80	7,89	80,51	7,89	93,15
2	Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	100	100,00	100	100,00
	Rata rata capaian tujuan			90,25%		

Pencapaian hasill evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

   Pada tahun 2025 hingga triwulan III kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang kebudayaan diukur melalui Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan dan Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan.

   Capaian Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan belum berhasil melampaui target sebesar 9,80 karena realisasi hanya 7,89 dengan persentase sebesar 80,51%. Sedangkan untuk Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan berhasil mencapai dari target 100% terealisasi 100%.

2. **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya**

   Bila dibandingkan tahun sebeumnya, Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan tergolong stabil di angka 7,89. Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan 100% sama dengan realisasi tahun 2024.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra

Hingga tahun 2025 triwulan III Realisasi Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan sebesar 7,89 belum melebihi target akhir Renstra sebesar 9,80 di tahun 2026. Demikian juga dengan realisasi Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan telah mencapai sebesar 100% telah mencapai target akhir Renstra sebesar 100% di tahun 2026.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pelaksanaan Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan dan Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan belum ada standar nasional yang mengatur. Namun demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayan senantiasa mendukung Misi Kabupaten Pemalang dalam menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dankepribadian masyarakat serta mendukung pencapaian Misi Pembangunan Nasional yaitu Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

NO	INDIKATOR	SPM* NASIONAL	IKK (PP NO. / 2008)	SDGs	TARGET RENSTRA DINDIKBUD KABUPATEN PEMALANG				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALLISIS
					TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Angka Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	√	√	√	100	87,50	90,46	93,01	84,53	84,53	100%	100%	
2	Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SD/MI	√	√	√	100	99,18	99,32	99,45	94,49	94,49	100%	100%	
3	Angka Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SMP/MTs	√	√	√	100	90,44	92,04	93,63	83,58	83,58	100%	100%	
4	Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	√	√	√	100	20,61	24,71	28,81	16,51	16,51	100%	100%	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	INDIKATOR	SPM* NASIONAL	IKK (PP NO. / 2008)	SDGs	TARGET RENSTRA DINDIKBUD KABUPATEN PEMALANG				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALLISIS
					TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Sekolah terakreditrasi minimal B	√	√	√	100	100	100	100	96,49	96,49	100	100	
6	Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan	√	√	√	8,47	9,80	9,80	9,80	7,89	7,89	9,80	9,80	
7	Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan	√	√	√	100	100	100	100	100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.3.1 TINGKAT KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dapat dinilai berhasil. Hingga tahun 2025 triwulan III pelayanan public mendapat nilai atau skor akhir 86,06 Dibandingkan dengan tahun 2024 triwulan IV atau semester II yang mendapat skor 85,11 , dan pada tahun 2023 mendapat penghargaan penyelenggaran pelayanan public dengan skor 95,32 tergolong dalam kualitas tertinggi.
b. **Dalam bidang pendidikan** Capaian Angka Partisipasi PAUD 5-6 Tahun sebesar 84,53%, kemudian Angka Partisipasi Pendidikan Dasar 7-12 Tahun sebesar 95,75%, dan Angka Partisipasi Kesetaraan sebesar 16,51%.
c. **Sedangkan dalam bidang kebudayaan** sampai dengan tahun 2025 hingga triwulan III, Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan mencapai 7,89 dari target sebesar 9,80. Pada tahun 2025 hingga triwulan III, Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan mencapai 100%. Pada tahun 2021 kabupaten Pemalang berhasil memasukkan Nasi Grombyang sebagai warisan budaya pada situs kebudayaan kemdikbud ristek.

2.3.2 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

Permasalahan pokok pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pemalang antara lain sebagai berikut :

Bidang Pendidikan

a. Masih belum meratanya jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara serius dan mencegah meningkatnya jumlah ATS.
c. Implementasi Kurikulum Merdeka dan memaksimalkan peran Sekolah Penggerak
d. Pemenuhan Sarana dan prasarana sekolah Inklusi
e. Meningkatkan angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi
f. Pengelolaan BOSP dan BOP regular dengan benar sesuai aturan yang berlaku

Bidang Kebudayaan :

a. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Pemalang menjadi wisata Budaya Cagar Budaya yang dilestarikan.
b. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya serta kegiatan kajian seni di Kabupaten Pemalang masih terbatas.
c. Belum optimalnya pembinaan sumberdaya manusia kesenian termasuk fasilitasi untuk memperoleh sertifikat HAKI, jumlah tradisi budaya yang telah mendapatkan sertifikasi HAKI baru 1 tradisi.

2.3.3 DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI DAN PROGRAM NASIONAL

a. Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus mendukung Misi kedua “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak”. Capaian IPM Kabupaten Pemalang menunjukkan kearah positif setiap tahunnya.
b. Berdasarkan surat dari Mendikdasmen Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/kota maka target indikator

https://jdih.pemalangkab.go.id/

disesuaiakan dengan capaian masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2024, Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun telah tercapai 84,53%, Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun telah tercapai 95,75% dan Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Kesetaraan telah mencapai angka 16,51.

c. Penyelenggaraan bidang kebudayaan diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan indikator Persentase Warisan Budaya yang Ditetapkan mencapai 7,89 dari target sebesar 9,80, dan Cakupan Warisan Budaya yang Dilestarikan mencapai 100%.

2.3.4 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tantangan	Rencana Tindak Lanjut / Peluang
a.	Belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan serta masih rendahnya kapasitas para pendidik dan tenaga kependidikan	Pendataan dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
b.	Belum optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan Pendidikan	Mendorong Satuan Pendidikan untuk bisa mengoptimalkan penggunaan Dana BOS untuk kemajuan Pendidikan dasar
c.	Pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang rusak baik sedang maupun berat masih membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah.	Mendorong Satuan Pendidikan untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarananya. pengalokasian anggaran yang memadai untuk melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah
d.	Masih belum tercipta kesadaran pada sekolah bahwa data yang ada pada DAPODIK adalah sumber informasi yang valid yang akan dijadikan pedoman bagi Pusat untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk pemberian dana maupun berupa barang (alat peraga)	Sosialisasi kepada Kepala sekolah dan Pengawas atas pentingnya data yang valid
e.	kurikulum sekolah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka	Perlunya sosialisasi yang bersifat masiv dari Pemerintah daerah dalam mendukung kurikulum ini dan peningkatan kompetensi Guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum baru ini
f.	Kebijakan penetapan 13 Sekolah Penggerak yang dalam ketentuannya harus bisa dipenuhi sarana dan prasarananya	Perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk dapat menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana sekolah Penggerak
g.	Masih kurangnya Satuan Pendidikan yang dapat menampung anak-anak berkebutuhan khusus	Paradigma bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini justru membawa efek negative bagi satuan Pendidikan yang mau menampung mereka untuk bisa diminimalisir. Demikian juga denga kesediaan sarana dan prasarana bagi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		anak-anak ini di satuan Pendidikan yang menjadi sekolah insklusi
h.	Rendahnya IPM	Meningkatakan rata-rata lama sekolah dengan pengembalian ATS
1.	Guru Penggerak	Meningkatkan jumlah Guru Penggerak
j.	Belum optimalnya Pengembangan Budaya Asli Pemalang	Menumbuh kembangkan budaya asli Kabupaten Pemalang melalu berbagai bentuk ekspresi budaya
k.	Masih rendahnya jumlah budaya local yang diakui dalam dapobud	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk mendaftarkan tradisi budaya dan kesenian untuk memperoleh sertifikat HAKI

2.3.5 REKOMENDASI, CATATAN PENTING DAN TINDAK LANJUT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN PRIORITAS TAHUN YANG DIRENCANAKAN

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

a. Kualitas Pembangunan Manusia (yang diwakili oleh IPM) masih kurang. IPM Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 68,65 berada di kelompok bawah diantara kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Apabila dilihat dari komponen pembentuknya dapat dilihat pada Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang sebesar 6,56 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8,02 dan capaian Nasional sebesar 8,85. Hal ini juga terjadi pada kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS). Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,86 dan capaian Nasional sebesar 13,21 maka nilai Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pemalang sebesar 12,02 masih lebih rendah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Pada tahun berjalan 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan Kegiatan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) yang hingga saat ini sudah melibatkan seluruh Satuan Pendidikan dari tingkat PAUD, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, dari target 86 IKM mendapat skor 85,11 yang tergolong tinggi.

c. Peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan di semua jenjang melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, ketersediaan sarana prasarana pendukung sekolah seperti ruang kelas dengan kondisi baik, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan sarana pendukung lainnya

d. Penyelenggaraan Pendidikan yang murah dan berkualitas, dengan meningkatkan efektifitas penerapan manajemen berbasis sekolah dan efisien penggunaan dana BOS pada jenjang Pendidikan Dasar.

e. Menumbuh kembangkan budaya asli Kabupaten Pemalang melalu berbagai bentuk ekspresi budaya dan peningkatan pengetahuan tradisional seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, cerita rakyat, permainan tradisional, tekstil tradisional, pasar tradisional, dan upacara tradisional serta penyelenggaraan event-event seni budaya daerah yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni.

f. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk mendaftarkan tradisi budaya dan kesenian untuk memperoleh sertifikat HAKI. Diperlukan upaya dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten untuk mendaftarkan aktivitas kesenian untuk memperoleh sertfikat HAKI.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Untuk selanjutnya dalam mereview dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					1.144.717.900						1.139.581.679	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.140.172.900				1.135.221.868		1.140.393.088	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dindikbud		100	1.140.172.900	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dindikbud	1.140.393.088	100	1.140.393.088	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dindikbud	Persentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintah Daerah	100%	875.174.006	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dindikbud	861.413.888	100%	874.813.906	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dindikbud	Persentase perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	29.661	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dindikbud	29.661	100%	29.661	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dindikbud	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.548	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dindikbud	6.548	4 Dokumen	6.548	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dindikbud	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.203	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dindikbud	7.203	1 Dokumen	7.203	
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dindikbud	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.592	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dindikbud	7.592	1 Dokumen	7.592	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dindikbud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.317	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dindikbud	8.317	1 Laporan	8.317	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dindikbud**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**872.500.370**	**1.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dindikbud**	**859.100.352**	**100%**	**872.500.370**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dindikbud	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7800 Orang/bulan	872.464.236	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dindikbud	859.064.217	7800 Orang/bulan	872.464.236	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dindikbud	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65 Dokumen	22.600	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dindikbud	22.600	65 Dokumen	22.600	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dindikbud	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.062	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dindikbud	5.062	1 Laporan	5.062	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dindikbud	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	8.473	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dindikbud	8.473	1 Laporan	8.473	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dindikbud**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**236.063**	**1.01.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dindikbud**	**188.782**	**100%**	**194.182**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dindikbud	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	236.063	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dindikbud	188.782	1 Laporan	194.182	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dindikbud**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.394.543**	**1.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dindikbud**	**1.077.225**	**100%**	**1.076.325**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dindikbud	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.062	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dindikbud	25.062	1 Paket	25.062	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dindikbud	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.500	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dindikbud	17.500	1 Paket	17.500	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dindikbud	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.937	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dindikbud	41.437	1 Paket	39.937	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dindikbud	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.457	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dindikbud	183.253	1 Paket	183.253	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dindikbud	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.090	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dindikbud	30.068	1 Paket	30.068	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dindikbud	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	32.250	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dindikbud	31.650	1 Dokumen	32.250	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dindikbud	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.019.247	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dindikbud	748.255	60 Laporan	748.255	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dindikbud**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**281.076**	**1.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dindikbud**	**299.041**	**100%**	**281.076**	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dindikbud	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	281.076	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dindikbud	299.041	20 Unit	281.076	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dindikbud**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**368.204**	**1.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dindikbud**	**312.728**	**100%**	**368.204**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dindikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dindikbud	2.500	1 Laporan	2.500	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dindikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278.704	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dindikbud	278.704	12 Laporan	278.704	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dindikbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	87.000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dindikbud	31.524	1 Laporan	87.000	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dindikbud**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**364.090**	**1.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dindikbud**	**406.101**	**100%**	**364.090**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dindikbud	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit	143.450	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dindikbud	150.066	56 Unit	143.450	
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Dindikbud	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	20.000	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Dindikbud	25.000	100 Unit	20.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dindikbud	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	54.740	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dindikbud	67.970	85 Unit	54.740	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dindikbud	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	145.900	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dindikbud	163.065	6 Unit	145.900	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Dindikbud**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan**	**100%**	**264.158.894**	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Dindikbud**	**273.245.842**	**100%**	**265.017.044**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Dindikbud**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Sekolah Dasar**	**100%**	**150.464.805**	**1.01.02.2.01**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Dindikbud**	**154.096.303**	**100%**	**150.656.254**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2.000.000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	1.988.500	10 Unit	1.988.500	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Dindikbud	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	109.362	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Dindikbud	218.862	1 Paket	108.862	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dindikbud	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	785 Peserta Didik	250.000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dindikbud	222.200	785 Peserta Didik	222.200	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dindikbud	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	13544 Orang	18.660.000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dindikbud	17.746.167	13544 Orang	17.947.167	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dindikbud	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	739 Satuan Pendidikan	117.303.000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dindikbud	117.394.049	739 Satuan Pendidikan	117.303.000	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dindikbud	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	738 Orang	380.000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dindikbud	465.200	738 Orang	365.200	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dindikbud	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.014.995	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dindikbud	1.007.495	3 Ruang	1.007.495	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Unit	2.505.000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	3.555.023	16 Unit	3.555.023	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dindikbud	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	738 Satuan Pendidikan	150.000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dindikbud	139.250	738 Satuan Pendidikan	139.250	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dindikbud	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	7.250.000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dindikbud	10.569.000	20 Ruang	7.279.000	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Dasar	Dindikbud	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	500.000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Dasar	Dindikbud	498.233	5000 Peserta Didik	498.233	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dindikbud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	342.449	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dindikbud	292.325	2 Paket	242.325	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dindikbud**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100%**	**70.792.830**	**1.01.02.2.02**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Dindikbud**	**75.976.359**	**100%**	**72.110.636**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	3.197.500	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	3.147.500	13 Unit	3.147.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	47 Unit	6.017.710	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dindikbud	7.877.710	47 Unit	6.317.710	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Dindikbud	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	11 Paket	357.875	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Dindikbud	357.875	11 Paket	357.875	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2900 Peserta Didik	2.420.000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	5.620.636	2900 Peserta Didik	3.894.055	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dindikbud	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1795 Peserta Didik	500.000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dindikbud	741.000	1795 Peserta Didik	429.545	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	118 Satuan Pendidikan	57.126.600	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	57.071.323	118 Satuan Pendidikan	57.126.600	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	118 Orang	100.000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	172.706	118 Orang	72.706	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dindikbud	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2300 Satuan Pendidikan	450.000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dindikbud	614.464	2300 Satuan Pendidikan	391.500	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dindikbud	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	623.145	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dindikbud	373.145	5 Paket	373.145	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Dindikbud**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**100%**	**27.786.060**	**1.01.02.2.03**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Dindikbud**	**28.273.327**	**100%**	**27.445.301**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dindikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12 Unit	2.119.450	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dindikbud	2.086.521	12 Unit	1.932.995	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Dindikbud	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	373.600	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Dindikbud	102.585	10 Paket	102.585	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dindikbud	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	30 Paket	870.154	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dindikbud	644.179	30 Paket	469.179	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dindikbud	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	806 Satuan Pendidikan	2.200.000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dindikbud	1.880.713	806 Satuan Pendidikan	1.880.713	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dindikbud	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	792 Satuan Pendidikan	20.191.800	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dindikbud	20.191.800	792 Satuan Pendidikan	20.191.800	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.03.0045	02	Dindikbud	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Unit	2.031.056	1.01.02.2.03.0045	469179000	Dindikbud	3.367.529	26 Unit	2.868.029	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dindikbud**	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100%**	**15.115.200**	**1.01.02.2.04**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dindikbud**	**14.899.854**	**100%**	**14.804.854**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	4.500.000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	4.500.000	1 Satuan Pendidikan	4.500.000	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	7.990.200	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	7.990.200	16 Satuan Pendidikan	7.990.200	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dindikbud	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2800 Peserta Didik	2.625.000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Dindikbud	2.409.654	2800 Peserta Didik	2.314.654	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Dindikbud**	**Persentase Terlaksananya Pengembangan Kurikulum**	**100%**	**150.000**	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Dindikbud**	**132.075**	**100%**	**132.075**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dindikbud	Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	150.000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dindikbud	132.075	100%	132.075	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dindikbud	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	400 Orang	150.000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dindikbud	132.075	400 Orang	132.075	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dindikbud	Persentase Terlaksananya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	690.000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dindikbud	430.063	100%	430.063	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dindikbud	Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	690.000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dindikbud	430.063	100%	430.063	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	390.000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	237.179	4 Dokumen	237.179	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	300.000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	192.884	4 Laporan	192.884	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Dindikbud**			**4.545.000**	**2**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Dindikbud**	**4.359.812**		**4.324.812**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**Dindikbud**			**4.545.000**	**2.22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**Dindikbud**	**4.359.812**		**4.324.812**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dindikbud	Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan	100%	1.724.697	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dindikbud	1.617.570	100%	1.561.530	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dindikbud	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.324.697	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dindikbud	1.264.900	100%	1.214.585	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dindikbud		1 Objek	1.145.000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dindikbud	1.109.690	1 Objek	1.080.415	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dindikbud	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	179.697	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dindikbud	155.210	200 Orang	134.170	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dindikbud	Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	400.000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dindikbud	352.671	100%	346.946	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dindikbud	-	4 Laporan	400.000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dindikbud	352.671	4 Laporan	346.946	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Dindikbud**	**Persentase Terlaksananya Program Pembinaan Sejarah**	**100%**	**59.658**	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Dindikbud**	**52.364**	**100%**	**48.364**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dindikbud**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**59.658**	**2.22.04.2.01**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dindikbud**	**52.364**	**100%**	**48.364**	
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Dindikbud	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	59.658	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Dindikbud	52.364	200 Orang	48.364	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Dindikbud**	**Persentase Terlaksananya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**2.760.645**	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Dindikbud**	**2.689.877**	**100%**	**2.714.917**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Dindikbud**	**Persentase Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**159.800**	**2.22.05.2.01**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Dindikbud**	**154.302**	**100%**	**149.302**	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Dindikbud	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	159.800	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Dindikbud	154.302	1 Objek	149.302	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Dindikbud**	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**2.600.845**	**2.22.05.2.02**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Dindikbud**	**2.535.575**	**100%**	**2.565.615**	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Dindikbud	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	2.600.845	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Dindikbud	2.535.575	1 Objek	2.565.615	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan untuk Tahun 2025 berikut ini adalah usulan Prioritas Kegiatan untuk Tahun 2026

Tabel 2.4. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	PAUD MELATI Dusun Selatan Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	80,000,000
2	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompiok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	Seni karawitas Jawi Sabdo Laras, Dukuh Ringin No 57 Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik., Kab. Pemalang	-
3	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	SMPN 2 Watukumpul. Jalan Raya Cikadu RT 01 RW 01 Desa Cikadu Kec, Watukumpul, Kab. Pemalang	160,000,000
4	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	PAUD KB Hidayatul Mubtadiin Desa Gendowang Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	12,000,000
5	Pemeliharaan/rehabilitasi warisan budaya/makam leluhur yang berjasa di wilayah tersebut	RW 16 Krasak,Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	-
6	Pelatihan barista (pendidikan kesetaraan)	Jl.Jend.A.Yani Gg Kenanga 2 Purwoharjo-Comal 52363, Kab. Pemalang	8,000,000
7	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa Pamutih Kec Ulujami, Kab. Pemalang	80,000,000
8	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	JL. TANIMBAR RAYA RW 17 PERUMNAS BOJONGBATA Kec. PEMALANG, Kab. Pemalang	40,000,000
9	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa Belik Dukuh Bulu RT 006 Rw 002, Kab. Pemalang	40,000,000
10	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompiok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	Desa Belik Kec Belik, Kab. Pemalang	-
11	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	RT 05 RW 08 Desa Medayu Kec.Watukumpul, Kab. Pemalang	20,000,000
12	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Jln raya randudongkal Belik Km 1 Rt 07 Rw 05 Kec Belik, Kab. Pemalang	40,000,000
13	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa Kebandaran Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	120,000,000
14	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	DESA KESESIREJO RTB 02 RW 06 KEC. BODEH, Kab. Pemalang	22,009,600
15	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa Ketapang kec. Ulujami, Kab. Pemalang	16,000,000
16	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa Pagergunung kec. Ulujami, Kab. Pemalang	16,000,000
17	Pengadaan mebel (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa Gedeg Kec. Comal, Kab. Pemalang	20,000,000
18	Pelatihan rias pengantin	Desa Gedeg Kec. Comal, Kab. Pemalang	112,000,000
19	Pelatihan rias pengantin	Desa Sidorejo Kec. Comal, Kab. Pemalang	112,000,000
20	Pengadaan mebel (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Desa klegen Kec. Comal, Kab. Pemalang	56,000,000
21	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompiok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	Desa Cibuyur RT 03 RW 01 Kec. warungpring, Kab. Pemalang	-
22	Bantuan Peralatan Kesenian kepada Sanggar/Kelompiok Seni Yang Berprestasi/Berperan Aktif Dalam Melestarikan Budaya Daerah/Nasional	Sanggar Seni Tari Sekar Purbaya Rt 04 Rw 01 Desa Surajaya Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	-
23	Pemeliharaan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	Jl. Welut Putih No. 92 Pamulian Desa Warungpring Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	160,000,000
24	Pembangunan gedung bangunan satuan pendidikan (PAUD/SD/SMP/Kesetaraan)	RT 02 RW 02 Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	160,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 ayat 3 Bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat perioritas pembangunan, rancangan ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan *fiskal*, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayaha dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sejalan dengan hal tersebut arah kebijakan Pendidikan Nasional sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah.
b. Meningkatkan kualitas pembelajaran melaui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel.
c. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru.
d. Revitaslisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan.
e. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini.
f. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan ketrampilan kerja.
g. Meningkatkan kases, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.

Adapun Sasaran Pendidikan Nasional antara lain :

a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun;
b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B;
d. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B;
e. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B;
f. Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya;
g. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya;
h. Persentase Pendidikan menyenangkandan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment);
i. Kurikulum dan Proses pembelajaranyang progresif sesuai kebutuhan zaman;
j. Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.

Isu Strategi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan wilayah.
2. Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung.
5. Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam.
6. Kedaulatan pangan dan energi.
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merujuk pada tema **"Percepatan Pembangunan melalui kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah"**, yang berfokus pada :

1. Peningkatan implementasi Smart City
2. Peningkatan reformasi birokrasi
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis teknologi
4. Penguatan Fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Perlindungan, pelestarian, upaya pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing

Sejalan dengan Pembangunan Pendidikan di Tingkat Nasional, Pendidikan di Tingkat Provinsi, dan Kabupaten Pemalang dalam segi pendidikan akan **"Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong"** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Peningkatan akses dan mutu pendidikan**
   a) Meningkatkan pemerataan pendidikan melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk semua jenjang pendidikan dengan prioritas mulai dari tingkat Pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar dan Menengah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan;
   b) Penyelenggaraan Pendidikan yang murah dan berkualitas, dengan meningkatkan efektifitas penerapan manajemen berbasis sekolah dan efisien penggunaan dana BOS dan Beasiswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
   c) Memperluas kesempatan belajar bagi warga masyarakat melalui jalur Pendidikan Non Formal, seperti Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Pemberdayaan PKMB, kursus-kursus keterampilan, PAUD, Satuan PAUD Sejenis, TPA dan sejenisnya.
   d) Pemberantasan Buta Aksara, khususnya bagi penduduk usia 15 tahun sampai 24 tahun, dengan indikator capaian pada akhir tahun 2014 angka melek huruf tercapai sebesar 99%.
   e) Pemenuhan sarana prasarana sekolah inklusi baik jenjang SD maupun SMP.

b. Tenaga pendidik yang bersertifikasi
   a) Peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, melalui kegiatan workshop, MGMP, KKG semua jenis mata pelajaran yang diajarkan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b) Pemberian Beasiswa guru yang belum memenuhi kwalifikasi Guru S1/D IV semua jenjang;
c) Penilaian kemampuan dan kwalitas guru melalui progam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

c. Pengembangan relevansi kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang sesuai dengan pangsa pasar kerja.

a) Penyesuian kurikulum sesuai dengan kebutuhan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat secara umum dimasa sekarang dan yang akan datang, melalaui koordinasi dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dan instansi pemerintah;
b) Pegembangan kurikulum sesuai dengan kearifan dan potensi budaya local yang ada, agar lebih mengetahui budaya dan keterampilan yang ada di daerah
c) Meningkatkkan pembinaan generasi muda dan olah raga dengan meningkatkan pembinaan pemuda pelajar, organisasi pemuda dan pembibitan serta pembinaan atlet berbakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RENSTRA yang disusun dengan berpedoman pada Kebijakan dan Program Strategis Nasional serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pemalang adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 - 2030 dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkeadilan	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	1) Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	8,01
				Harapan lama Sekolah	Tahun	12,95
				Angka Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	%	90,46
				Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SD/MI	%	99,32
				Angka Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SMP/MTs	%	92,04
				Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	%	24,71
				Sekolah terakreditrasi minimal B	%	100
2	Meningkatkan nilai nilai agama, budaya, toleransi dan karakter bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	1) meningkatnya pelestarian dan pemajuan budaya	% budaya yang ditetapkan	%	9.80

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
				Cakupan Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100

Sumber Data :
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026–2030

Indikator Kerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Capaian 2026
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkeadilan	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	1) Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	1) rata-rata lama sekolah	Tahun	**8,01**
				2) Harapan lama sekolah	Tahun	**12,95**
2	Meningkatkan nilai nilai agama, budaya, toleransi dan karakter bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	1) meningkatnya pelestarian dan pemajuan budaya	% budaya yang dilestarikan	%	**9.80**

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam rumusan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program / kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang pada tahun 2026 tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 serta RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah sebanyak 7 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 18

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Urusan Penunjang	1	7	874.813.906.100,00
1	Pendidikan	3	6	265.579.181.900,00
2	Kebudayaan	3	5	4.324.811.850,00
TOTAL		**7**	**18**	**1.144.717.899.850,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel. 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkeadilan	1) Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing			Rata-rata lama Sekolah	7.9		8.01		
					Harapan lama Sekolah	12.8		12.95		
					Angka Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	90.46		93.01		
					Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SD/MI	99.32		99.45		
					Angka Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam SMP/MTs	92.04		93.63		
					Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	24.71		28.81		
					Sekolah terakreditrasi minimal B	100		100		
2	Meningkatkan nilai nilai agama, budaya, toleransi dan karakter bangsa	1) meningkatnya pelestarian dan pemajuan budaya			% budaya yang ditetapkan	9.8		9.8		
					Cakupan Warisan Budaya yang dilestarikan	100		100		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			1,139,581,679		1,144,897,900	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1,135,221,868		1,140,172,900	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	1,135,221,868	100	1,140,172,900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintah Daerah	100%	861,413,888	-	875,174,006	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	29,661	-	44,456	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,548	2 Dokumen	6,548	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	7,203	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	7,203	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,203	1 Dokumen	7,592	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,592	1 Dokumen	7,592	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8,317	3 Laporan	8,317	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**859,100,352**	**-**	**872,482,558**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7800 Orang/bulan	859,064,217	5000 Orang/bulan	872,446,424	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	65 Dokumen	22,600	65 Dokumen	22,600	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,062	1 Laporan	5,062	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8,473	1 Laporan	8,473	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**188,782**	**-**	**236,063**	
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	188,782	1 Laporan	236,063	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1,077,225**	**-**	**1,397,560**	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,062	1 Paket	25,062	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17,500	1 Paket	17,500	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41,437	1 Paket	39,937	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	183,253	1 Paket	220,457	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,068	1 Paket	40,090	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	31,650	1 Dokumen	32,250	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	748,255	60 Laporan	1,022,264	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**299,041**	**-**	**281,076**	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	299,041	20 Unit	281,076	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**312,728**	**-**	**368,204**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,500	1 Laporan	2,500	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	278,704	1 Laporan	278,704	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31,524	1 Laporan	87,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**406,101**	**-**	**364,090**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit	150,066	56 Unit	143,450	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	25,000	100 Unit	20,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	67,970	6 Unit	54,740	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	163,065	6 Unit	145,900	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan**	**100%**	**273,245,842**	**-**	**264,158,894**	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Sekolah Dasar**	**100%**	**154,096,303**	**-**	**150,464,805**	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	1,988,500	0 Unit	2,000,000	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	218,862	1 Paket	109,362	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	785 Peserta Didik	222,200	785 Peserta Didik	250,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	13544 Orang	17,746,167	13544 Orang	18,660,000	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	739 Satuan Pendidikan	117,394,049	739 Satuan Pendidikan	117,303,000	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	738 Orang	465,200	739 Orang	380,000	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1,007,495	3 Ruang	1,014,995	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Unit	3,555,023	10 Unit	2,505,000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	738 Satuan Pendidikan	139,250	739 Satuan Pendidikan	150,000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	10,569,000	20 Ruang	7,250,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	498,233	5000 Peserta Didik	500,000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	292,325	10 Paket	342,449	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100%**	**75,976,359**	**-**	**70,792,830**	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	3,147,500	19 Unit	3,197,500	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	47 Unit	7,877,710	40 Unit	6,017,710	
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	11 Paket	357,875	41 Paket	357,875	
			Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2900 Peserta Didik	5,620,636	2900 Peserta Didik	2,420,000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1795 Peserta Didik	741,000	1795 Peserta Didik	500,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	118 Satuan Pendidikan	57,071,323	121 Satuan Pendidikan	57,126,600	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	118 Orang	172,706	121 Orang	100,000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2300 Satuan Pendidikan	614,464	121 Satuan Pendidikan	450,000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	373,145	5 Paket	623,145	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**100%**	**28,273,327**	**-**	**27,786,060**	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12 Unit	2,086,521	10 Unit	2,119,450	
			Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	102,585	80 Paket	373,600	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	30 Paket	644,179	150 Paket	870,154	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	806 Satuan Pendidikan	1,880,713	806 Satuan Pendidikan	2,200,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	792 Satuan Pendidikan	20,191,800	792 Satuan Pendidikan	20,191,800	
			0	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Unit	3,367,529	80 Unit	2,031,056	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100%**	**14,899,854**	**-**	**15,115,200**	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	4,500,000	1 Satuan Pendidikan	4,500,000	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16 Satuan Pendidikan	7,990,200	16 Satuan Pendidikan	7,990,200	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2800 Peserta Didik	2,409,654	2800 Peserta Didik	2,625,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase Terlaksananya Pengembangan Kurikulum**	**100%**	**132,075**	**-**	**150,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**100%**	**132,075**	**-**	**150,000**	
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	400 Orang	132,075	400 Orang	150,000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Terlaksananya Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**100%**	**430,063**	**-**	**690,000**	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	**Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**100%**	**430,063**	**-**	**690,000**	
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	237,179	4 Dokumen	390,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	192,884	4 Laporan	300,000	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**4,359,812**		**4,725,000**	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**4,359,812**		**4,725,000**	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan**	**100%**	**1,617,570**	-	**1,904,697**	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1,264,900**	-	**1,324,697**	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		1 Objek	1,109,690	1 Objek	1,145,000	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya	200 Orang	155,210	20 Orang	179,697	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**352,671**	**-**	**580,000**	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	4 Laporan	352,671	-	400,000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase Terlaksananya Program Pembinaan Sejarah**	**100%**	**52,364**	**-**	**59,658**	
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**52,364**	**-**	**59,658**	
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	52,364	200 Orang	59,658	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Terlaksananya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100%**	**2,689,877**	**-**	**2,760,645**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	154,302	-	159,800	
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	154,302	1 Objek	159,800	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	2,535,575	-	2,600,845	
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	2,535,575	1 Objek	2,600,845	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda yang aktif			58.82	650,000,000	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan kader pemuda yang dilaksanakan			3	450,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota			1	200,000,000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda			7	50,000,000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam			18	100,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Tingkat Kabupaten/kota	Pengembangan Kepeloporan Pemuda					
			Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			1	100,000,000	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah organisasi pemuda yang terdaftar**			**10**	**200,000,000**	
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			1	200,000,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Cakupan Pembinaan Olahraga**			**57.89**	**3,703,776,877**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah atlet pelajar yang dibina**			**299**	**200,000,000**	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			1	200,000,000	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kejuaraan yang diselenggarakan dan diikuti**			**3**	**450,000,000**	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			3	250,000,000	
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota			210	200,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pekan dan kejuaraan olahraga						
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah pemusatan pelatihan**			**1**	**453,776,877**	
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga			35	100,000,000	
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)			1	200,000,000	
			Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			1	153,776,877	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah organisasi olahrga yang memiliki kerjasama**			**3**	**2,500,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Resntra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Rencana tahun 2025 2026				Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota			2	2,500,000,000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Jumlah pemasalasan olahraga rekreasi**			**1**	**100,000,000**	
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	-	1	100,000,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina**	**0**	**-**	**100**	**200,000,000**	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah organisasi kepramukaan di kab pemalang yang dibina**	**0**	**-**	**1**	**200,000,000**	
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	0	-	1	200,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahu 2021-2026 serta RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan. Dokumen RENJA ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

Keberhasilan pelaksanaan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang denga diiringi peran aktif *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Dengan disusunnya RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RENJA ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

ISMUN HADIYO, S.Pd.SD
NIP. 19710817 199303 1 008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Lampiran

TABEL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN YANG MENDUKUNG KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL

Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas Nasional	Dasar Hukum	Sub Kegiatan	Indikator	Catatan
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.	Pembinaan kelembagaan dan managemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Pemalang memastikan lembaga Paud merencanakan pemenuhan 8 indikator PAUD HI. adanya pengimbasan peningkatan kapasitas penyelenggaraan PAUD HI melalui gugus paud serta sosialisasi PAUD HI kepada bunda PAUD.
			Pengelolaan Dana BOP Paud	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan Pelaksanaan Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) di Daerah.	Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2019 tentag Hari Indonesis Menabung (HIM)	Pembinaan kelembagaan dan managemen PAUD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	Pemerintah Kabupaten Pemalang mendukung program kejar
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan terhadap proses transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD)	a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.	Pengelolaan dana BOS Paud	umlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Pemda Kab. pemalang mendukung Dalam upaya pencapaian angka partisipasi sekolah PAUD dan juga dalam upaya pemenuhan SPM Bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Pemalang meluncurkan kegiatan gerakan &GEMA PAUD (Gelem Maring Paud)&.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas Nasional	Dasar Hukum	Sub Kegiatan	Indikator	Catatan
			Pembinaan kelembagaan dan managemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak	a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak; c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran; d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.	Pengembangan karir pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pemda mendukung penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ tentang Dukungan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar	Pengembangan karir pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pemda mendukung pencapaian pendidikan numerasi sekolah dasar sebagai bentuk peningkatan kualitas proses pembelajaran siswa yang berdampak pada kualitas siswa yang lulus sekolah dan juga pemenuhan SPM Pendidikan
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
			Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
			Penyelenggaraan proses belajar bagi siswa didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas melalui: a) penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; b) penyediaan sarana dan prasarana; c) penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan d) penyediaan kurikulum	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.			
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN	Dukungan peningkatan daya saing bangsa serta mendukung	a. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan			Kewenangan Provinsi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas Nasional	Dasar Hukum	Sub Kegiatan	Indikator	Catatan
BIDANG PENDIDIKAN	pertumbuhan perekonomian nasional melalui Revitalisasi sekolah menengah kejuruan.	Vokasi; b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalm rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.			
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan pelaksanaan peningkatan pijar (Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja) di Daerah.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja.	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan Beasiswa bagi ATS (anak tidak sekolah) yang kembali kesekolah 5 M, biaya personil siswa miskin (Bosda) 15 M tahun 2023.
			Penyelenggaraan proses belajar bagi siswa didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	
			Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar		
			Pengembangan karir pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan terhadap revitalisasi bahasa daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahuun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
			Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas Nasional	Dasar Hukum	Sub Kegiatan	Indikator	Catatan
		tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.			
			Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah dibangun	
			Pengembangan karir pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter	Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Pemda mendukung dalam upaya penguatan pendidikan karakter melalui penerapan standar pendidikan sebagai bagian dari kurikulum mutan lokal disatuan pendidikan
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dukungan terhadap penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Pemda Kabupaten Pemalang mendukung kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi	Pemda Kabupaten Pemalang mendukung kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi
			Pembinaan kelembagaan dan managemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
			Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana Bos Sekolah menengah pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan (Inklusi)	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Pemkab sudah menerapkan sekolah inklusi bagi peserta didik disabilitas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Bidang Urusan	Kebijakan Prioritas Nasional	Dasar Hukum	Sub Kegiatan	Indikator	Catatan
			Pengembangan karir pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	

Pemalang, September 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG
Kabid PAUD dan DIKMAS

ISMUN HADIYO, S.Pd.SD
NIP. 19710817 199303 1 008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaranprioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Pemalang, September 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG
Kabid PAUD dan DIKMAS

ISMUN HADIYO, S.Pd.SD
NIP. 19710817 199303 1 008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

SK TIM PENYUSUN RENJA

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 209 /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan Pembangunan dan pelayanan Masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan
b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 1.01.01.2.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050/ 209 /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Ketua	-
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	FADJRIL Q.W, S.E, Ak, M.E
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

10	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
11	Kepala Seksi Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
12	Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
13	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
14	Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
15	Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
16	Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
17	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
18	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	-
19	Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	ASRI KUSUMANINGTYAS, S.E
20	Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	SRI YUNIASIH EDWINANI, S.AP.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

21	Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	Dra. MAGDALENA DWI HAJU APRIANI
22	Analis Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	ERI SULISWANTO

BUPATI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT

https://jdih.pemalangkab.go.id/

E. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026”

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan amanat yang lebih luas kepada Daerah untuk mengelola pembangunan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, mengembangkan kerjasama melalui tatakelola pemerintahan yang baik di daerah.

Pemberian kewenangan otonomi seluas-luasnya dimaksudkan agar Daerah dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan, serta demokratis yang didukung dengan transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi kalangan dunia usaha dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan secara terpadu atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat.

Sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) memuat rancangan kerangka kerja perangkat daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Program Prioritas Pembangunan di Provinsi, dan Program prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Kerja Perangkat Daerah turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, dimana dalam proses penyusunannya dalam masa transisi pergantian Kepala Daerah sekaligus penyusunan RPJMD periode 2025-2029. Mendasari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 tema yang diangkat dalam RKPD 2026 adalah "Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan". Berdasarkan penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 pembangunan juga diarahkan pada dukungan Kabupaten Pemalang terhadap prioritas dan target pembangunan nasional dalam RKP serta prioritas dan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026. Pembangunan di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di kawasan Provinsi Jawa Tengah utamanya kawasan BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan perangkat daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan menjadi tanggung jawab masing masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Pemalang 2026 disusun dengan tahapan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja. Meliputi: pembentukan Tim Penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Renja. Meliputi tahap perumusan rancangan awal Renja dan tahap penyajian rancangan awal Renja.
3. Penyusunan rancangan Renja. Meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
4. Perumusan rancangan akhir Renja.
5. Penetapan Renja Kabupaten Pemalang tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

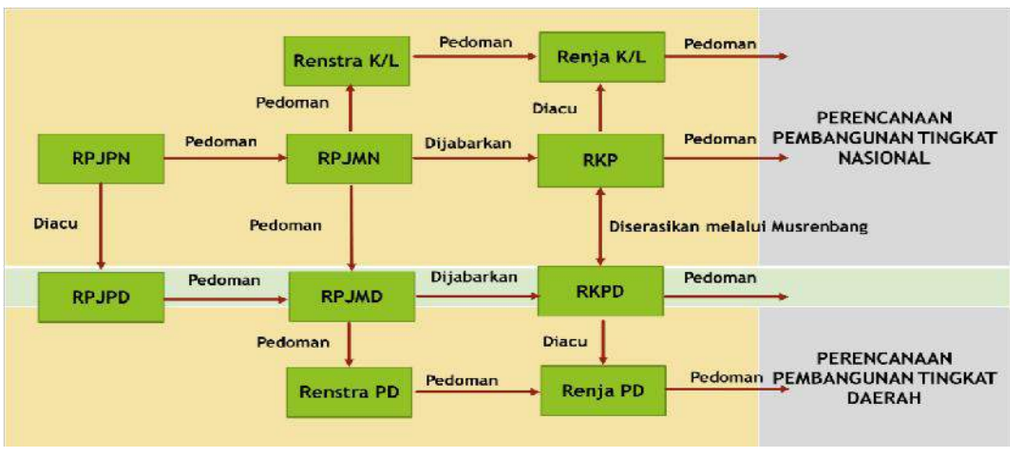

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 7)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2025;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang : Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
41. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah:

1. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021- 2026;
2. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2026 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemalang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Pemalang.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2026 meliputi 5 (lima) bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP
- 2.4. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, juga dapat digunakan sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya uraian evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan Rencana Capaian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 2.1

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAH					-				
	PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA					-				
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**90 %**	**90 %**	**90 %**	**0 %**	**0.00**	**90 %**	**180 %**	**200**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pemuda yang diberdayakan**	**2.07 %**	**2.07 %**	**2.07 %**	**0 %**	**0.00**	**2.07 %**	**4.14 %**	**200**
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	10 Orang	10 Orang	- Orang	0.00	10 Orang	20 Orang	200
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase organisasi kepemudaan yang didata**	**76.92 %**	**76.92 %**	**76.92 %**	**0 %**	**0.00**	**76.92 %**	**153.8 %**	**200**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Mningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	0 Organisasi	0.00	1 Organisasi	2 Organisasi	200
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Presentase atlet yang berprestasi**	**40 %**	**40 %**	**40 %**	**0 %**	**0.00**	**40 %**	**80 %**	**200**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase cabang Olahraga yang dikembangkan**	**60.61 %**	**60.61 %**	**60.61 %**	**0 %**	**0.00**	**60.61 %**	**121.2 %**	**200**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	300
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase event olahraga**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**0.00**	**100 %**	**200 %**	**200**
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	150 Orang	75.00	200 Orang	550 Orang	275
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase atlet dan pelatih yang dibina**	**70 %**	**70 %**	**70 %**	**0 %**	**0.00**	**70 %**	**140 %**	**200**
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Penerima Pengharagaan Olahraga	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0 Orang	0.00	20 Orang	40 Orang	200
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50 %**	**50.00**	**100 %**	**250 %**	**250**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keoalhragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	3 Dokumen	9 Dokumen	300
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Prosentase anggota pramuka yang aktif**	**46.43 %**	**46.43 %**	**46.43 %**	**0 %**	**0.00**	**46.43 %**	**92.86 %**	**200**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Prosentase organisasi kepramukaan yang dibina**	**46.43 %**	**46.43 %**	**46.43 %**	**0 %**	**0.00**	**46.43 %**	**92.86 %**	**200**
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Hibah kepada organisasi kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100.00	1 Organisasi	3 Organisasi	300
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase kunjungan wisata**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**45 %**	**45.00**	**100 %**	**245 %**	**245**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase fisik kawasan strategis pariwiswata Kab/Kota yang dikembangkan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**0 %**	**0.00**	**100 %**	**200 %**	**200**
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0.00	1 Unit	2 Unit	200
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase destinasi pariwisata kab/Kota yang dikembangkan**	**50 %**	**50 %**	**50 %**	**10 %**	**20.00**	**50 %**	**110 %**	**220**
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan Terpelihara								
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50.00	8 Laporan	20 Laporan	250
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi**	**15 %**	**15 %**	**15 %**	**0 %**	**0.00**	**15 %**	**30 %**	**200**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase kegiatan paningkatan SDM pariwsta dan Ekraf yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50 %**	**50.00**	**100 %**	**250 %**	**250**
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	280 Orang	280 Orang	280 Orang	40 Orang	14.29	280 Orang	600 Orang	214
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50.00	4 Laporan	10 Laporan	250

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pengembangan Kapsitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50 %**	**50.00**	**100 %**	**250 %**	**250**
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200 Orang	200 Orang	200 Orang	0 Orang	0.00	200 Orang	400 Orang	200
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Capaian Perencanaan dan Keuangan** **Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50 %**	**50.00**	**100 %**	**250 %**	**250**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**13 Dokumen**	**52.00**	**25 Dokumen**	**63 Dokumen**	**252**
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0.00	3 Dokumen	6 Dokumen	200
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00	2 Dokumen	5 Dokumen	250
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	300
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00	2 Dokumen	5 Dokumen	250

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perubahan DPA-SKPD								
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.00	3 Laporan	9 Laporan	300
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50.00	4 Laporan	10 Laporan	250

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100.00**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**300**
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 ASN	49 ASN	49 ASN	49 ASN	100.00	49 ASN	147 ASN	300
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	3 Laporan	300
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Meningkat Kapasitasnya**	**800 Orang**	**800 Orang**	**800 Orang**	**0 Orang**	**0.00**	**800 Orang**	**1600 Orang**	**200**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawain berdasarkan tugas dan fungsi	900 Orang	900 Orang	900 Orang	400 Orang	44.44	900 Orang	2200 Orang	244
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Kegiatan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**1 Paket**	**25.00**	**4 Paket**	**9 Paket**	**225**
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0.00	1 Paket	2 Paket	200
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50.00	12 Paket	30 Paket	250

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	2 Paket	50.00	4 Paket	10 Paket	250
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	28 Laporan	56.00	50 Laporan	128 Laporan	256
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Unit**	**2 Unit**	**2 Unit**	**0 Unit**	**0.00**	**2 Unit**	**4 Unit**	**200**
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	60 Unit	60 Unit	60 Unit	0 Unit	0.00	60 Unit	120 Unit	200
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0.00	2 Unit	4 Unit	200

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**2 Laporan**	**66.67**	**3 Laporan**	**8 Laporan**	**267**
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50.00	12 Laporan	30 Laporan	250
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50.00	12 Laporan	30 Laporan	250
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50.00	12 Laporan	30 Laporan	250

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30 Unit**	**30 Unit**	**30 Unit**	**7 Unit**	**23.33**	**30 Unit**	**67 Unit**	**223**
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	20 Unit	66.67	30 Unit	80 Unit	267
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pemalang secara umum menunjukkan perkembangan yang positif meskipun terdapat beberapa indikator yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor jadwal pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar direncanakan pada semester kedua, serta adanya penyesuaian anggaran melalui perubahan APBD.

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

   Realisasi kinerja masih relatif rendah karena sebagian besar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda baru akan dilaksanakan pada semester berikutnya. Dari indikator prosentase organisasi kepemudaan yang aktif dan pemuda yang diberdayakan, realisasi capaian masih 0%, sehingga tingkat capaian terhadap target tahunan belum menunjukkan perkembangan. Namun demikian, kegiatan koordinasi dengan organisasi kepemudaan telah dilakukan sebagai tahap persiapan menuju pelaksanaan kegiatan di Triwulan III–IV.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

   Realisasi program olahraga menunjukkan capaian yang cukup bervariasi. Beberapa kegiatan sudah terealisasi, seperti:

   - Koordinasi penyediaan prasarana olahraga dengan capaian 100% (1 unit sarana dan prasarana terealisasi dari target 1 unit).
   - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sudah mulai berjalan dengan realisasi 1 kegiatan multi/single event (100%), dengan jumlah peserta 150 orang dari target 200 (75%).
   - Pembinaan organisasi olahraga telah mencapai 50% dari target.

   Secara keseluruhan, program ini baru mencapai sekitar 30–40% realisasi rata-rata terhadap target tahunan, dan diharapkan meningkat signifikan pada semester kedua saat agenda kejuaraan olahraga daerah dan pembinaan atlet dilaksanakan lebih masif.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

   Capaian program kepramukaan sudah mulai terlihat melalui kegiatan hibah organisasi pramuka dengan realisasi 1 organisasi (100%) dari target tahunan. Indikator prosentase organisasi kepramukaan yang dibina masih 0%, karena kegiatan pembinaan dijadwalkan pada semester berikutnya.

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Realisasi pada program pariwisata sudah mulai berjalan meskipun masih terbatas. Beberapa capaian diantaranya:

- Kunjungan wisata baru mencapai 45% dari target tahunan.
- Pengelolaan destinasi wisata terealisasi 10% dari target, dengan 1 unit sarana prasarana pengelolaan destinasi terealisasi (100%).
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata terealisasi 4 laporan (50%) dari target 8 laporan.

Dengan capaian ini, tingkat realisasi program pariwisata rata-rata masih di bawah 50%, namun tren positif terlihat pada destinasi wisata yang mulai tumbuh dengan dukungan partisipasi masyarakat.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Realisasi program ini menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

   - Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekonomi Kreatif telah dilaksanakan kepada 40 orang (14,29%) dari target tahunan.
   - Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif sudah menghasilkan 2 laporan (50%) dari target 4 laporan.
   - Pelatihan ekonomi kreatif belum terlaksana pada semester I.

   Dengan demikian, capaian program ini baru sekitar 20–25% dari target tahunan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program penunjang yang mencakup perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum menunjukkan progres yang relatif lebih tinggi dibanding program utama. Beberapa capaian penting:

   - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah telah terealisasi sebagian, dengan rata-rata capaian 50–100% tergantung jenis dokumen.
   - Administrasi keuangan, termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sudah terealisasi penuh (100%).
   - Administrasi umum seperti logistik kantor, barang cetakan, rapat koordinasi, dan pemeliharaan gedung sudah berjalan dengan capaian 25–66%.

   Secara keseluruhan, program penunjang sudah mencapai rata-rata 40–60% realisasi terhadap target tahunan, sehingga mendukung kelancaran program utama.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Realisasi capaian kinerja Disparpora Kabupaten Pemalang s.d. Triwulan II Tahun 2025 rata-rata masih berada pada 20–40% dari target tahunan, dengan capaian tertinggi berada pada kegiatan penunjang (administrasi, keuangan, dan kepegawaian), serta beberapa kegiatan olahraga dan pariwisata yang sudah berjalan. Sebagian besar kegiatan strategis seperti pembinaan pemuda, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, dan pengembangan destinasi pariwisata masih akan terealisasi pada semester II. Oleh karena itu, capaian kinerja diharapkan meningkat signifikan pada TW III dan IV, sehingga target Renja PD Tahun 2025 dan target Renstra hingga tahun berjalan dapat tercapai dengan optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum/publik. Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “menjadi kewajiban negara untuk melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui pelayanan publik”. Selain itu, nasib sebuah pemerintah baik di pusat ataupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Pelayanan publik yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pelayanan publik yang baik hendaknya menempatkan pengguna layanan (masyarakat) sebagai pusat perhatian. Dalam paradigma *New Public Service*, pelayanan diberikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik terutama membangun mekanisme yang memberi kesempatan kepada masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Dengan menempatkan pelanggan sebagai titik sentral dalam pelayanan publik, akan membuat pelayanan lebih responsif, inovatif dan akuntabel.

Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan publik diukur dengan beberapa indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kebijakan yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk periode lima tahun sebagaimana tertera pada Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026, adalah **Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi dan organisasi sosial kemasyarakatan, Peningkatan prestasi olahraga, Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD, Peningkatan Kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan, Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota, dan Tingkat hunian akomodasi.**

Dalam upaya mengetahui capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melakukan survei kepuasan masyarakat melalui pembagian kuesioner secara online, sehingga dapat diperoleh rata-rata skor survei kepuasan masyarakat. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-	-	-	10	10	10	10	89.94	-24.20	0.78	10	10	
2	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	-	-	-	100	50	33.3	90,00	100	-16.67	90.00	90,00	50	
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	%	-	√	√	10	10	10	10,00	91.29	-24.20	0.78	10,00	10	
4	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	-	√	√	26.65	29.32	32.25	35,47	32.49	32.14	35.06	35,47	39.02	
5	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	-	√	√	0.50	0.55	0.6	0,66	0.45	0.31	0.35	0,66	0.73	
6	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	%	-	√	-	58.33	66.67	75	87,50	58.33	66.67	75.00	87,50	100.00	
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	-	√	0.04	0.07	0.08	0.09	0.05	0.02	0.03	0.09	0.11	
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	√	√	30.01	30.98	48.8	32.92	50.84	48.75	48.51	32.92	33.88	
9	Persentase wirausaha pemula	%	-	√		53.57	83.33	97.00	20,00	0.00	96.87	16.95	20,00	93.33	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	-	-	-	42.85	50.00	33.33	49,00	1500.00	0.00	22.92	49,00	20.00	
11	Jumlah perolehan medali pada even olahraga tingkat regional/nasional	Medali	-	√	√	10	15	49	60	48	48	59	60	30	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	-	√	-	72	75	85	86,00	73.9	79.39	85.06	86,00	87	
13	Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Skor	-	√	-	60	62.5	66	67,00	62.6	65.6	66.22	67,00	68	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Persentase pertumbuhan jumlah wisata merupakan kenaikan jumlah wisatawan dari suatu periode waktu ke periode waktu selanjutnya dalam bentuk angka persentase. Tingkat pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan tahunan dalam suatu variabel sebagai persentase, selain itu dapat digunakan untuk mengukur resesi atau ekspansi ekonomi. Yang artinya jika jumlah wisatawan suatu Negara menurun selama dua kuartal berturut-turut maka dianggap resesi, namun sebaliknya jika persentase jumlah wisatawan meningkat maka hal tersebut dianggap berkembang.

Dalam menghitung persentase pertumbuhan jumlah wisatawan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya daya tarik wisatawan seperti yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Jika daya tarik suatu wisata menarik bagi para wisatawan tentunya hal tersebut bisa membuat persentase pertumbuhan jumlah wisatawan meningkat, karena wisatawan merasa tertarik dengan apa yang ada di wisata tersebut. Selain itu ada pula faktor pendorong dan penghambat wisatawan yang datang ke tempat pariwisata.

Dalam pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan empat aspek utama yang harus diperhatikan. Empat aspek ini menjadi sangat penting, mengingat keberlangsungan suatu destinasi pariwisata akan menjadi fokus penting saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata telah menjadi maradona bagi masyarakat luas, utamanya adalah para pelaku didalamnya. Bagaimana tidak, saat ini manusia dihadapkan pada kebutuhan penting untuk berwisata. Sehingga, fenomena ini dijadikan oleh para pelaku wisata untuk mengembangan beragam atraksi pada destinasi wisata baik dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, swasta dan juga masyarakat pada umumnya bergegas dalam mengembangkan industri yang menjanjikan ini. Sehingga aspek yang harus diperhatikan antara lain ialah Attraction, Accessibility, Amenity dan Ancilliary.

Attraction merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan dalam hal ini suatu daerah akan menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Modal kepariwisataan dapat dikembangkan sehingga wisatawan dapat bertahan selama berhari-hari atau bahkan berkali-kali menikmati saat berkunjung di tempat yang sama. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata.

Accessibility merupakan hal yang penting dalam kegiatan pariwisata dimana segala macam transportasi menjadi akses dalam berpariwisata. Akses ini diidentifikasikan dengan transferabilitas yakni kemudahan dalam bergerak dari suatu daerah kedaerah lain. Jika suatu daerah tidak mempunyai aksesibilitas yang baik maka akan mempengaruhi perkembangan wisatawan mengakses pariwisata daerah tersebut. Saat suatu daerah memiliki potensi pariwisata maka sediakanlah aksesibilitas yang memadai agar wisata tersebut dapat dikunjungi.

Amenity merupakan segala macam sarana prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana sangatlah memiliki hubungan dalam pembangunan wisata. Sudah jelas bahwa pembangunan prasarana pada umumnya harus mendahului sarana. Namun ada saatnya prasarana dibangun bersama-sama dalam rangka pembangunan sarana wisata, dimana prasarana merupakan syarat untuk sarana, dan sebaliknya sarana dapat menyebabkan perbaikan prasarana.

Ancilliary (Pelayanan Tambahan) Pelayanan tambahan merupakan suatu tugas yang harus disediakan oleh pemda suatu daerah dengan tujuan agar wisata terlihat baik bagi wisatawan ataupun untuk pelaku pariwisata. Pelayanan yang disediakan termasuk pembangunan fisik (jalan rata, rel kereta api, dll), pemasaran serta mengkoordinasi segala macam aktivitas dengan segala peraturan perundang-undangan. Ancillary juga merupakan hal–hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, Tourist Information, Travel Agent dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan.

Salah satu tujuan Pembangunan Potensi Wisata Khususnya Wisata Alam adalah untuk menyediakan atraksi wisata yang dapat menarik minat wisatawan baik itu domestik (dalam wilayah Kabupaten Pemalang), regional atau bahkan mancanegara. Pengembangan potensi wisata baik alam maupun domestik, sangat erat kaitannya dengan pengembangan wilayah baik dari sisi perekonomian maupun sosial budaya. Dari segi ekonomi,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

peningkatan kunjungan wisatawan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan munculnya usaha masyarakat sekitar obyek wisata, baik itu jasa akomodasi (hotel, guest house, wisma dll) maupun jasa boga berupa warung makan, restoran maupun catering. Secara sosial budaya, pengembangan daya tarik wisata dapat menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal baik itu atraksi budaya maupun makanan khas daerah tersebut.

Indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan dengan rumus perhitungan : (Jumlah wisman tahun n-Jumlah wisman tahun (n-1))/(Jumlah wisman tahun (n-1)). Wisatawan mancanegara tahun 2022 yang berkunjung ke Kabupaten Pemalang sejumlah 12 orang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023 sejumlah 10 orang. Target Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan tahun 2023 50%, realisasi sebesar -16.67%, sehingga kinerja indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan sebesar -33,33%.

Indikator Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kab/Kota dengan rumus perhitungan : (Jumlah wisnus tahun n-Jumlah wisnus tahun (n-1))/(Jumlah wisnus tahun (n-1)) x100. Wisatawan nusantara tahun 2022 yang berkunjung ke Kabupaten Pemalang sejumlah 1.517.556 orang, sedangkan jumlah kunjungan nusantara mancanegara tahun 2023 sejumlah 1.150.268 orang. Target Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kab/Kota tahun 2023 10%, realisasi sebesar -24.20%, sehingga kinerja indikator Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kab/Kota sebesar -242%.

Pada Tahun 2024, Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan mencapai 90,00%, dengan persentase capaian sebesar 270,27%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Nilai 90,00% diperoleh dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2024 sebanyak 19 orang, sementara kunjungan wisman pada tahun 2023 sebanyak 10 orang.

Meskipun pencapaian ini menunjukkan hasil yang sangat baik, perlu adanya strategi yang lebih terencana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, seperti memperluas jaringan promosi pariwisata ke pasar internasional, mengoptimalkan kerja sama dengan agen

https://jdih.pemalangkab.go.id/

perjalanan internasional, serta menyediakan paket wisata yang lebih menarik dan terjangkau. Selain itu, peningkatan fasilitas dan aksesibilitas bagi wisatawan mancanegara, termasuk memperbaiki infrastruktur transportasi serta menyusun event internasional yang dapat menarik perhatian wisatawan asing, juga merupakan strategi penting.

Sedangkan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Tahun 2024 mencapai 0,78%, dengan persentase capaian sebesar 7,79%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Perlu Perbaikan. Angka 0,78% diperoleh dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2024 sebanyak 1.159.223, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.150.268.

Untuk meningkatkan kinerja ini, perlu adanya strategi yang lebih intensif dan terkoordinasi dalam memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pemalang kepada wisatawan nusantara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye promosi pariwisata secara masif, baik secara offline maupun online, memperluas jaringan dengan agen perjalanan wisata untuk menawarkan paket-paket wisata lokal, serta mengembangkan program-program wisata unggulan yang lebih menarik. Selain itu, peningkatan fasilitas pendukung pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, dan pelayanan wisata, perlu ditingkatkan agar pengalaman wisatawan menjadi lebih memuaskan dan mengundang lebih banyak kunjungan. Adanya event pariwisata atau festival lokal yang rutin diselenggarakan juga dapat menjadi daya tarik tambahan untuk menarik wisatawan nusantara.

Secara rinci, berikut data kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara tahun 2024 :

Tabel 2.3. Kunjungan Wisata di Kabupaten Pemalang Tahun 2024

DAYA TARIK WISATA			WISNUS	WISMAN
A.	**WISATA ALAM**			
	1	Taman Pesiar Pantai Widuri / Roadrace	239,526	2
	2	Benowo Park	22,714	10
	3	Pantai Joko Tingkir	31,721	
	4	Pantai Sumur Pandan	12,070	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

DAYA TARIK WISATA			WISNUS	WISMAN
	5	Pantai Muara Indah	27,211	
	6	Bendungan Mejagong	84,971	
	7	Gunung Gajah	9,364	
	8	WIPPAS	14,329	
	9	Curug Sibedil	41,030	
	10	Curug Sidok	15,282	
	11	Curug Bengkawah	10,568	
	12	Candi Batur	12,305	5
	13	Bukit Gambangan	14,339	
	14	Bukit Tangkeban	93,398	
	15	Bukit Mentek	26,184	
	16	Igir Kandang	14,544	
B.	**WISATA TIRTA**			
	1	Zatobay Waterboom	35,130	2
	2	Kolam Renang Bening	19,427	
	3	Pemandian Jambe Kembar	19,637	
	4	Kolam Renang Seruni Susukan	43,270	
	5	Kolam Renag Comal Baru	37,388	
	6	Kolam Renang GJ Kebanggan	34,347	
C.	**WISATA EDUKASI**			
	1	Gatra Kencana	109,935	
	2	Purana Farm Land	14,562	
D.	**AGROWISATA**			
	1	PTPN Semugih	14,040	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

DAYA TARIK WISATA			WISNUS	WISMAN
E.	**WISATA BUDAYA / RELIGI**			
	1	Makam Syekh Maulana Syamsudin	81,610	
	2	Makam Pandanjati	2,769	
F.	**WISATA MINAT KHUSUS**			
	1	Rainbow Rafting	11,005	
G	**EVENT/FESTIVAL**			
	1	Festival Wong Gunung	16,647	
	2	Festival Sarung Goyor	1,900	
	3	Festival Baritan Asemdoyong	17,000	
	4	Kirab Slumpring	28,000	
	5	Festival Kopi	3,000	
JUMLAH			1,159,223	19

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang, beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh, antara lain : Penggalian keberagaman potensi wisata, Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata, Mengembangkan industri pariwisata dengan mengembangkan iklim yang kondusif dan pertumbuhan wisata, identifikasi, inventarisasi dan penyusunan informasi pariwisata berbasis digital, penguatan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi, pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata, Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan kapasitas lembaga desa wisata, dan Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Persentase Tingkat hunian akomodasi

Persentase tingkat hunian akomodasi merupakan kenaikan jumlah penghunian atau kunjungan hunian akomodasi dari suatu periode waktu ke periode waktu selanjutnya dalam bentuk angka persentase.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Pengklasifikasian sebuah hotel di pemalang menggunakan sistem bintang mulai dari non bintang, hotel bintang satu hingga hotel bintang lima. Akomodasi menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa usaha akomodasi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan PDRB di daerah tersebut. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tingkat hunian kamar usaha akomodasi.

Semakin tinggi jumlah akomodasi hotel dan jumlah tamu yang menginap maka semakin tinggi pula PDRB di suatu daerah. Tingkat hunian kamar usaha akomodasi dapat ditingkatkan dengan memperhatikan pengembangan potensi daerah di sektor penyediaan akomodasi, seperti melalui peningkatan potensi wisata yang dimiliki. Data PDRB sendiri merupakan salah satu dari statistik pendapatan regional yang selalu dipublikasikan kepada umum oleh BPS setiap tahun. Tingkat hunian kamar adalah tolok ukur keberhasilan sebuah hotel, tingkat hunian kamar di suatu daerah dipengaruhi oleh potensi usaha akomodasi di daerah tersebut.

Target indikator tingkat hunian akomodasi tahun 2023 29,32%, realisasi 32,14% atau 109,62%. Pada tahun 2024, tingkat hunian akomodasi yang diukur dengan indikator Persentase tingkat hunian akomodasi mencapai 35,06%, dengan persentase capaian 108,70%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Angka jumlah kamar terjual atau kunjungan hotel sebanyak 104.664, sementara jumlah kamar yang tersedia sebanyak 818 kamar dikali 365 hari, yang menghasilkan total 298.570 kamar.

Meskipun capaian ini menunjukkan kinerja yang baik, perlu adanya strategi lebih lanjut untuk meningkatkan kunjungan hotel di Kabupaten Pemalang. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan promosi pariwisata dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, menyusun paket wisata terintegrasi yang menarik untuk wisatawan, serta menambah daya tarik wisata dengan mengadakan event-event khusus, seperti festival atau lomba, yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan hotel dan penyediaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

fasilitas yang lebih baik, serta kerja sama dengan agen perjalanan untuk menawarkan akomodasi yang lebih terjangkau, juga dapat mendorong lebih banyak wisatawan untuk menginap. Memperkenalkan program loyalitas atau diskon khusus bagi wisatawan yang menginap dalam waktu yang lebih lama atau datang dalam kelompok besar juga dapat meningkatkan tingkat hunian hotel. Berikut data Hotel di Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.4. Kunjungan Hotel di Kabupaten Pemalang Tahun 2024

NO	NAMA HUNIAN	JUMLAH KAMAR	JUMLAH KAMAR TERJUAL
1	Hotel Regina	126	7,596
2	Hotel Pemalang	53	3,915
3	Hotel Winner Premier	46	4,876
4	Hotel The Winner	39	5,370
5	Hotel Grand Royal	41	2,808
6	Hotel Dina	30	2,393
7	Hotel Sentana	18	6,054
8	Hotel Murni	46	3,273
9	Hotel Akasia Bugjed	36	7,264
10	Hotel Klasik	35	12,109
11	Hotel Gm Inn	18	7,286
12	Hotel Gm Wisma Pml	37	9,070
13	Hotel Podomoro	27	9,171
14	Hotel Panorama	41	4,578
15	Hotel Mutiara	15	2,243
16	Hotel Segoro	36	3,173
17	Hotel Benda Asri	15	3,946
18	Hotel Sb	33	2,108
19	Hotel Kencana	49	2,206
20	Wisma Paragon	30	4,049
21	Hotel Grand Wijaya	47	1176
22	Bukit Tangkeban	11	312
Jumlah		829	104,976

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

3. Meningkatnya Kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD

Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas kunjungan pariwisata dan pemakaian tempat-tempat wisata yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur, dengan demikian retribusi pariwisata merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum (Natalia 2015:36). Retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

https://jdih.pemalangkab.go.id/

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Maksud dari pungutan tersebut adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Dalam retribusi pariwisata terdapat timbal balik secara langsung yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Retribusi berbeda dengan pajak baik dari segi pengelolaannya ataupun pemungutannya, karena retribusi berkaitan dengan layanan tertentu setelah wajib retribusi memenuhi kewajibanya maka sudah sewajarnya jika kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Penerimaan retribusi pariwisata masih berpotensial untuk lebih ditingkatkan. Apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif perlu dilakukan evaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi.

Indikator Persentase Kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD rumus perhitungan : (Jumlah retribusi PAD sektor pariwisata)/(Jumlah PAD Kabupaten) X 100. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi yang dikelola Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2023, yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp 1.089.135.550,- Sedangkan realisasi PAD Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebesar Rp 355.910.600.224,- sehingga persentase Kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD pada tahun 2023 sebesar 0,31% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,55% sehingga kinerja sebesar 55,63%. Pada tahun 2024, kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD yang diukur dengan indikator Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD mencapai 0,35%, dengan persentase capaian sebesar 57,99%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam Perlu Perbaikan. Nilai 0,35% diperoleh dari jumlah PAD retribusi pariwisata tahun 2024 sebesar Rp 1.385.171.000, sementara total PAD di Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar Rp 398.082.274.722.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkontribusi langsung terhadap retribusi pariwisata, infrastruktur pariwisata yang belum memadai, kurangnya fasilitas pendukung yang dapat menarik lebih banyak wisatawan, serta minimnya event atau kegiatan pariwisata yang bisa mendongkrak

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pendapatan daerah juga turut mempengaruhi pencapaian target kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD.

Pengelolaan retribusi yang belum optimal dan belum adanya pengawasan yang ketat terhadap penerimaan retribusi juga menjadi faktor penghambat. Pengelolaan yang kurang efisien serta kurangnya pengawasan terhadap retribusi yang diterima dapat menyebabkan kehilangan potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, memperbaiki infrastruktur, mengadakan event pariwisata yang lebih menarik, serta menerapkan pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik terhadap retribusi pariwisata untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PAD. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

Tabel 2.5. Pandapatan Asli Daerah (PAD) pada Disparpora Kabupaten Pemalang

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	2,900,000,000	2,716,079,950	93.66
2	2017	3,200,000,000	3,293,021,500	102.91
3	2018	3,600,000,000	3,214,657,000	89.30
4	2019	3,800,000,000	2,799,187,100	73.66
5	2020	1,500,000,000	1,256,533,000	83.77
6	2021	1,000,000,000	812,055,000	81.21
7	2022	1,550,000,000	1,517,866,000	97.93
8	2023	3,050,000,000	1,088,935,550	35.70
9	2024	3,050,000,000	1,385,170,500	45.42

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

4. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

   Generasi pemuda merupakan aset pembangunan manusia yang sangat besar dan memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatakan pemuda merupakan warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Dengan demikian pemuda merupakan kelompok populasi terbesar dibandingkan anak-anak dan orang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tua, sehingga memiliki hak istimewa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda senantiasa harus dibimbing agar dapat memerankan peran aktifnya yaitu sebagai penggerak pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentunya dalam memaksimalkan peranan pemuda maka perlunya suatu pembinaan secara kelembagaan/keorganisasian, dimana lembaga tersebut dijadikan sebagai wadah perjuangan. Organisasi sebagai wadah berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan bersama dengan itu maka diharapkan dapat menciptakan konsep pembangunan yang luar biasa bagi kedepannya. melalui organisasi kepemudaan diharapkan mampu mendorong pemuda yang ada untuk meningkatkan jiwa nasionalismenya sehingga kesadaran mempertahankan dan mengisi kemerdekaan terus hadir dalam pikiran dan tindakannya.

Kedudukan organisasi kepemudaan sangat penting sebagai wadah berhimpunnya pemuda dalam upaya pelaksanaan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Peran organisasi kepemudaan dalam memberikan pemahaman dan implementasi wawasan nusantara dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup kehidupan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Dengan adanya organisasi kepemudaan, maka diharapkan pemuda dapat berkomunikasi dan berperan aktif mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun pemuda adalah bagian dari masyarakat yang potensinya dapat bermanfaat dalam mendukung kepentingan nasional.

Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 21 organisasi yang berdasarkan bidang kegiatannya bergerak dalam bidang sosial, bidang politik, dan bidang ekonomi. Adapun data organisasi kepemudaan di Kabupaten Pemalang beserta dengan jumlah anggotanya dan data jumlah pemuda per Kecamatan di Kabupaten Pemalang tahun 2024, sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.6. Organisasi Pemuda di Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Jenis Organisasi		Anggota Aktif (16-30 Tahun)	Keterangan
	Kepemudaan	Sosial Kemasyarakatan		
1	Pemuda Al-Irsyad Pemalang	-	200	L = 200 P = - Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
2	Pimpinan Cabang Fatayat NU Pemalang	-	7,302	L = - P = 7.302 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
3	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pemalang	-	128,844	L = 63.395 P = 65.449 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
4	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	-	27,768	L = 16.245 P = 11.523 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
5	Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	-	8	L = 4 P = 4 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
6	Pemuda Muhammadiyah	-	40	L = 40 P = - Daftar Terlampir dalam SK
7	Ikatan Pelajar Muhammadiyah	-	41	L = 22 P = 19 Daftar terlampir dalam SK
8	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA)	-	32	L = -P = 32Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
9	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)	-	2,500	L = 2.500 P = - Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
10	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	-	79	L = - P = 79 Daftar Terlampir dalam SK
11	PPI (Purna Paskibraka Indonesia)	-	875	L = 525 P = 350 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Organisasi		Anggota Aktif (16-30 Tahun)	Keterangan
	Kepemudaan	Sosial Kemasyarakatan		
12	Wanita Al-Irsyad	-	116	L = - P = 116 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
13	Perkumpulan Bhakti Praja	-	115	L = 98 P = 17 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
14	Gerakan Pemuda Anshor	-	15,000	L = 15.000 P = - Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
15	Komite Nasional Pemuda Indonesia	-	76	Daftar Terlampir dalam SK
16	GM. FKPPI	-	500	Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
17	Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan	-	8,877	L = 4.042 P = 4.835 Daftar anggota ada di masing-masing organisasi
Jumlah			**192,373**	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Tabel 2.7. Jumlah Pemuda usia 16 – 30 Tahun di Kabupaten Pemalang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH KESELURUHAN PEMUDA
1	MOGA	10,496	9,709	20,205
2	PULOSARI	7,653	7,548	15,201
3	BELIK	15,455	14,566	30,021
4	WATUKUMPUL	9,964	9,196	19,160
5	BODEH	7,861	7,467	15,328
6	BANTARBOLANG	10,657	10,130	20,787
7	RANDUDONGKAL	13,815	12,849	26,664
8	PEMALANG	25,571	23,735	49,306
9	TAMAN	23,820	22,363	46,183
10	PETARUKAN	21,597	19,982	41,579
11	AMPELGADING	9,533	9,071	18,604
12	COMAL	12,127	11,239	23,366
13	ULUJAMI	14,315	13,457	27,772
14	WARUNGPRING	5,955	5,494	11,449
JUMLAH		188,819	176,806	365,625

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sumber: Data Kependudukan, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan rumus perhitungan : (Jumlah pemuda (16-30 tahun) anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat)/(Total jumlah pemuda (16-30 tahun)) X 100. Pada tahun 2023 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun anggota aktif organisasi kepemudaan sebanyak 177.805 orang, Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Pemalang sebanyak 364.705 orang. Target indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebanyak 30,98% tercapai 48,75% sehingga kinerja sebesar 157,37%. diartikan melebihi target dikarenakan semakin banyak partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada tahun 2024, Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi dan organisasi sosial kemasyarakatan mencapai 48,51%, dengan persentase capaian sebesar 99,41%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Nilai 48,51% diperoleh dari jumlah pemuda yang aktif menjadi anggota organisasi di Kabupaten Pemalang sebanyak 177.373 orang, sementara jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Pemalang adalah 365.625 orang. Namun, untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan tingkat partisipasi ini, perlunya strategi yang lebih terarah untuk mengatasi kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi dengan pengurus organisasi dalam hal pembaruan data keanggotaan, serta mengoptimalkan upaya dalam melibatkan lebih banyak pemuda dalam kegiatan organisasi. Strategi yang dapat diterapkan antara lain penguatan peran organisasi kepemudaan, dukungan terhadap program-program yang dapat menarik minat pemuda, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperluas jangkauan dan dampak dari kegiatan-kegiatan organisasi yang ada.

5. Peningkatan prestasi olahraga

   Sebagai bangsa yang tergolong dalam kelompok negara berkembang, pertumbuhan olahraganya belum menggembirakan, karena penduduknya masih diliputi suasana meningkatkan pertumbuhan taraf hidup yang lebih baik. Sebagai akibatnya olah raga belum mendapat prioritas utama. Padahal, apabila melihat pentingnya dampak dari kegiatan olahraga, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di suatu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

daerah tidak terkecuali Kabupaten Pemalang. Perlunya pendayagunaan organisasi olah raga sebagai wadah atlit untuk berinteraksi (berlatih) dan berkompetisi dan adanya penambahan gedung-gedung olah raga serta lapangan olah raga sebagai salah satu media berlatih dan berkompetisi adalah indikator untuk melihat sejauh mana kegiatan olah raga telah melembaga dalam aktivitas masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan klub olah raga menjadi kata kunci dalam pembinaan prestasi olahraga. Salah satu bentuk peran aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan olah raga adalah komitmen terhadap pembangunan olah raga di dengan Penguatan Kelembagaan dan Kapabilitas Manajemen pada klub-klub olahraga.

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) merupakan salah satu momentum dalam menggali potensi atlet dari lembaga pendidikan. Hal tersebut dapat memberi peluang untuk memunculkan calon atlet pelajar yang berbakat atau bibit olahragawan berbakat yang dibutuhkan daerah untuk mendukung pengembangan olahraga prestasi. POPDA merupakan salah satu bagian kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraanya, hal tersebut sebagaimana dengan yang ada pada ketentuan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah melalui peraturan pemerintah No.17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga memberikan ketentuan- ketentuan dasar mengenai prose penyelenggaraan POPDA. Tujuan penyelenggaraan POPDA :

1. Meningkatkan prestasi olahraga
2. Menjaring bibit olahragawan nasional
3. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa POPDA

Jumlah Perolehan Medali pada event Popda tahun 2023 sebanyak 48 medali, 35 Medali dari event Popda Tingkat eks Karesidenan Pekalongan dan 13 Medali dari even Popda Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Target indikator Jumlah Perolehan Medali pada Even Olahraga Tingkat Regional/Nasional tahun 2023 sebesar 15 medali, realisasi 48 medali atau dengan kinerja sebesar 320%. Pada Tahun 2024, Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional mencapai 59 Medali dengan persentase capaian sebesar 120,41%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori Baik. Peningkatan prestasi olahraga dengan realisasi 59 medali, melampaui target 49 medali, disebabkan oleh beberapa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

faktor kunci, salah satunya adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang dilaksanakan dua kali. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi atlet untuk berkompetisi dan meraih medali. Selain itu, kontribusi dari pembinaan atlet yang lebih baik, peningkatan fasilitas latihan, dukungan pelatih profesional, serta seleksi dan persiapan yang lebih matang turut mendorong keberhasilan ini. Dukungan dari pemerintah daerah dan sinergi antara instansi terkait juga menjadi faktor penting dalam pencapaian prestasi ini.

6. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

   Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatakan pemuda merupakan warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Pemuda sendiri bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, akan tetapi pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini ataupun dimasa yang akan datang. Zaman yang akan datang akan dipenuhi dengan teknologi modern yang mana menuntut semua kalangan agar lebih tanggap beradaptasi dengan teknologi khususnya bagi para pemuda, perkembangan ilmu teknologi social bahkan ekonomi sangat menentukan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

   Generasi muda merupakan salah satu peran penting untuk mengurangi pengangguran agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan berwirausaha. Modal utama dalam berwirausaha adalah kemauan, keuletan, dan rasa percaya diri untuk bersungguh-sungguh menjalankan usaha. Kompetensi keterampilan serta pengetahuan merupakan bekal yang penting untuk berwirausaha, sebagai generasi muda tentunya harus memiliki bekal untuk memulai usaha tersebut. Berikut manfaat berwirausaha sejak dini untuk generasi muda :

   - Membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain
   - Memaksimalkan bakat dan potensi
   - Memanfaatkan waktu luang
   - Memperluas relasi
   - Menjadi pribadi yang percaya diri
   - Memahami perkembangan dan teknologi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Meraih kesuksesan dimasa muda

Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi rumus perhitungan : (Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha)/(Total jumlah pemuda (16-30 tahun)) X 100. Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Pemalang sebanyak 68 orang, jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Pemalang sebanyak 364.705 orang. Target Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri tahun 2023 0,07% realisasi 0,02% atau kinerja sebesar 27,14%. Pada Tahun 2024, jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Pemalang sebanyak 97 orang, sedangkan jumlah keseluruhan pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Pemalang mencapai 365.625 orang. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 hanya sebesar 0,03%. Rendahnya angka ini disebabkan oleh masih kurangnya kolaborasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta dinas-dinas lainnya yang berperan dalam pengembangan kewirausahaan. Kurangnya pelatihan, pembinaan, dan pendampingan kewirausahaan yang terstruktur bagi pemuda juga menjadi faktor utama rendahnya partisipasi tersebut. Selain itu, minimnya akses terhadap permodalan, informasi pasar, serta fasilitas inkubasi bisnis turut menjadi kendala dalam mendorong tumbuhnya semangat wirausaha di kalangan pemuda.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Variabel yang digunakan dalam SKM adalah:

1) Ketersediaan informasi pelayanan
2) Kemudahan prosedur pelayanan
3) Ketepatan waktu pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4) Kualitas petugas pelayanan
5) Perilaku petugas pelayanan
6) Informasi tentang Maklumat Pelayanan
7) Kesesuaian biaya pelayanan dengan ketentuan
8) Kesesuaian biaya pelayanan dengan mutu pelayanan
9) Ketersediaan sarana pengaduan
10) Kelengkapan sarana prarana pelayanan
11) Ketersediaan akun media sosial unit pelayanan

Dari 11 variabel tersebut nilai tertinggi pada variabel pertama yaitu Ketersediaan informasi pelayanan. Adapun nilai terendah pada variabel ke-10 yaitu Kelengkapan sarana prasarana pelayanan.

Tabel 2.8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Disparpora Kabupaten Pemalang

No	Unsur Layanan	2022 SMT I	2022 SMT II	2023 SMT I	2023 SMT II	2024 SMT I	2024 SMT II	2025 SMT I
1	Syarat	82,45	84.00	81,25	76.75	84,83	77,25	69,48
2	Prosedur	82,98	85.50	82,00	76.75	76,69	54,78	60,17
3	Waktu Pelayanan	78,67	81.25	78,75	77.25	80,62	85,96	84,88
4	Biaya/Tarif	73,67	80.00	80,25	79.00	76,12	91,01	88,95
5	Produk Spesfikasi dan Jenis Pelayanan	63,30	66.50	79,75	80.00	76,12	99,72	97,67
6	Kompetensi Pelaksana	71,54	73.75	79,25	81.00	81,18	98,60	96,22
7	Perilaku Pelaksana	70,21	70.00	80,75	81.00	78,09	91,29	88,66
8	Sarana dan Prasarana	55,32	59.75	73,00	80.75	79,21	91,29	97,38
9	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	61,70	65.00	55,25	82.75	88,76	67,98	91,86
IKM		**71,06**	**73.90**	**76,61**	**79.47**	**80,01**	**85,06**	**86,06**

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Disparpora Kabupaten Pemalang dalam periode semester I tahun 2022 sampai dengan semester I tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa unsur layanan.

Secara total, nilai IKM meningkat dari 71,06 pada semester I tahun 2022 menjadi 86,06 pada semester I tahun 2025, atau naik sekitar 15 poin dalam kurun tiga tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan yang signifikan.

Jika ditinjau per unsur:

- Syarat layanan cenderung mengalami penurunan pada 2025 (69,48) dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mencapai 84,83. Hal

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ini mengindikasikan perlunya penyederhanaan dan kejelasan persyaratan agar tidak menurunkan persepsi masyarakat.

- Prosedur layanan mengalami fluktuasi, sempat turun drastis pada 2024 semester II (54,78), namun mulai membaik kembali di 2025 semester I (60,17). Ini menunjukkan bahwa simplifikasi prosedur masih menjadi tantangan.
- Waktu pelayanan menunjukkan tren positif, dari 78,67 di 2022 semester I menjadi 84,88 di 2025 semester I, yang berarti pelayanan semakin cepat dan efisien.
- Biaya/tarif mengalami kenaikan signifikan, dari 73,67 di 2022 menjadi 88,95 di 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai transparansi dan keterjangkauan biaya semakin baik.
- Produk spesifikasi dan jenis pelayanan menjadi salah satu indikator dengan peningkatan paling tinggi, dari 63,30 di 2022 semester I melonjak menjadi 97,67 pada 2025 semester I. Hal ini menunjukkan inovasi dan variasi layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Kompetensi pelaksana juga meningkat signifikan, dari 71,54 (2022) menjadi 96,22 (2025). Artinya, kapasitas aparatur semakin dirasakan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

- Perilaku pelaksana naik dari 70,21 (2022) menjadi 88,66 (2025), menunjukkan peningkatan sikap ramah, sopan, dan profesional aparatur.
- Sarana dan prasarana menunjukkan lonjakan besar dari 55,32 (2022) menjadi 97,38 (2025), yang berarti adanya peningkatan fasilitas pendukung layanan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan sempat fluktuatif, turun hingga 55,25 pada 2023 semester I, namun meningkat tajam hingga mencapai 91,86 pada 2025 semester I. Hal ini menunjukkan perbaikan sistem pengaduan dan respon terhadap aspirasi masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa IKM Disparpora Kabupaten Pemalang berada dalam kategori “Baik” menuju “Sangat Baik” pada 2025. Tantangan utama yang masih perlu diperhatikan adalah unsur syarat dan prosedur layanan, yang nilainya menurun dibandingkan indikator lainnya.

8. Ekonomi Kreatif

   Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Terdapat 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif, antara lain :

   1. Aplikasi adalah perangkat program, prosedur dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem komputasi / komunikasi digital yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas Ekonomi Kreatif.
   2. Pengembangan Permainan adalah suatu media dan aktivitas yang memungkinkan Tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (objective) dan aturan (rules)
   3. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan.
   4. Desain Interior adalah kegiatan yang memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior; menyediakan layanan terkait ruang interior untuk meningkatkan kualitas hidup; dan memenuhi aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan public
   5. Desain Komunikasi Visual adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam disain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Desain Produk adalah layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem untuk keuntungan pengguna maupun pabrik.
7. Fashion adalah gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok.
8. Film adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audiovisual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah. Animasi adalah tampilan frame ke frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa. Video adalah sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam (Capture) atau membuat gambar bergerak, yang ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi
9. Fotografi adalah sebuah industri yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja.
10. Kerajinan (Kriya) adalah merupakan bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan disain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan dan juga dari tematik.
11. Kuliner adalah kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/ atau kearifan lokal; diakui oleh lembaga kuliner sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi.
12. Musik adalah segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

13. Penerbitan adalah proses mengolah daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media daring menggunakan perangkat elektronik, ataupun media baru untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang lebih
14. Periklanan adalah bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/atau merek kepada khalayak sasarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa.
15. Seni Pertunjukan adalah cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (Performers), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton (Audiences); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian; yang terjadi secara langsung (Live) di dalam ruang dan waktu yang sama,
16. Seni Rupa adalah penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan industri dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya.
17. Televisi adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan Radio adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

Berikut data pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9. Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pemalang

No	Nama Produk	Alamat	Klasifikasi
1	Gapit Wayang Kulit (Gapit Londo)	Jalan Banglarangan	Kriya
2	Maezurra Craft	Teglasari Timut, Rt.41/Rw.08, Ampelgading, Pemalang	Kriya
3	Apem Cita Rasa Wanarata	Wanarata Rt 32 Rw 08, Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang	Kuliner
4	Rengginang	Wanarata	Kuliner
5	Grup Rebana Sbm	Desa Kalisaleh	Seni

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama Produk	Alamat	Klasifikasi
	(Sababul Mustofa)		Pertunjukan
6	Calung Trubus Raga Jati	Desa Kalisaleh	Seni Pertunjukan
7	Gamelan Ngesti Laras	Desa Kalisaleh	Seni Pertunjukan
8	Banana Coklat Kelapa	Beluk	Kuliner
9	Sirup Nanas, Dodol Nanas	Desa Beluk	Kuliner
10	Minuman Marinas	Desa Beluk	Kuliner
11	Aneka Olahan Nanas Madu	Beluk	Kuliner
12	Sapu Glagah	Gembol	Kriya
13	Keripik Kenci Berseri	Karanganyar	Kuliner
14	Konveksi Baju	Karanganyar	Fesyen
15	Mebel Antik Randu Jajar	Duku Krajan Desa Sikasur	Desain Interior
16	Bangunan Dan Desain	Duku Krajan Desa Sikasur	Arsitektur
17	Wayang Fiber	Duku Krajan Desa Sikasur	Seni Rupa
18	Sinlung (Sintren Calung) Cipta Rasa	Duku Krajan Desa Sikasur	Seni Pertunjukan
19	Bros	Desa Gunungtiga	Fesyen
20	Keripik Bayam	Desa Gunungtiga	Kuliner
21	Lunas (Lumpia Nanas)	Dusun Sibulu	Kuliner
22	Balung Ketek	Dusun Sibulu	Kuliner
23	Tas Cantik Dari Limbah Plastik	Dusun Sibulu	Fesyen
24	Logan Jahe/ Sirup Jahe	Dusun Kandang Gotong	Kuliner
25	Kerajinan Sapu Rajung	Kandang Gotong	Kriya
26	Bellage Nanas	Dukuh Bulu	Kuliner
27	Dapoer Mamiku	Belik Rt 01 Rw 07 Desa Belik Kec Belik	Kuliner
28	Gula Aren	Sikasur Rt 01/01 Kec Belik Kab Pemalang	Kuliner
29	Dodo Ganas (Dodol Naga Nanas)	Beluk	Kuliner
30	Tas Dan Dopet Kulit Ular Suka Karya	Jalan Desa Gandu	Kriya
31	Friends Konveksi	Jl. Poncowati	Fashion
32	Artechno DIY	Jl.A.Yani Gg,Kenanga II Rt.7 RW.4 No.27 Balutan Purwoharjo Comal Pemalang	Kriya
33	Wakon	Puri Arta Residence B.9 Sidorejo Comal Pemalang Jawa Tengah	Fashion
34	Seni Kayu Simadu Craft	Jl. Pucuk Bharata	Kriya
35	Geger Pandawa	Desa Banyumudal	Kriya
36	Hero 284	Desa Banyumudal	Musik
37	Quinart_99	Jln. Balapulang Rt 07/05 Ds. Banyumudal Kab. Pemalang	Kriya
38	Seni Daur Ulang Dari Limbah	Jln Sungapan	Kriya
39	Radio Swara Widuri	Jl Gatot Subroto Bojongbata	Radio
40	Yon Kafri	Sarwodadi	Videography
41	Teater Tanam	Desa Bojongbata	Seni

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama Produk	Alamat	Klasifikasi
			Pertunjukan
42	Sanggar Tari Diwangkara	Kelurahan Kebondalem	Seni Pertunjukan
43	Jagadpro Management	Kelurahan Bojongbata	Radio
44	Yumna The Band	Kelurahan Mulyoharjo	Musik
45	Mendoone Production	Kelurahan Mulyoharjo	Videografi Dan Film
46	Al Furniture	Kebondalem Rt 01/02 Pemalang	Desain Interior
47	Bambu_Antik_Sgp	Desa Sungapan Rt 03/03 Pemalang	Kriya
48	Dapur Eco	Jl.Kemuning Utara 04b Gumelem Utara Rt 01 Rw 01 Kelurahan Mulyoharjo Pemalang	Fashion
49	Krulila Dan Nadulang	Jl.Anggur Perum Trans Quality 2 Blok D6 Bojongbata Pemalang	Kuliner
50	Pusere Clothes	Paduraksa Rt 02 Rw 06 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	Fashion
51	Sentana Bistro	Jl. Jend. Sudirman Timur No. 52-54 Mulyoharjo, Pemalang	Kuliner
52	Tasque Collection	Dukuh Caur Buyut Rt. 05/ Rw. 03 Desa Tambakrejo, Pemalang	Fashion
53	Jamu Ibu Murni	Dusun Wanasari Wanamulya	Kuliner
54	Olahan Buah	Dusun Karangsuci Penggarit	Kuliner
55	Tigatri Kacang Bawang	Btn Alam Widuri Asri Blok E.11 Rt 5 Rw 11 Widuri	Kuliner
56	Kerupuk Kulit Kodok	Dusun Sikentung	Kuliner
57	Sm Botoputih	Jl Raya Tegalmlati Rt 04 Rw 02 Kec Petarukan, Kab. Pemalang	Kriya
58	Galery Waroeng Kebon	Jl Raya Moga Pulosari	Kriya
59	Kuda Kepang	Desa Siremeng	Seni Pertunjukan
60	Kuli Media	Jl Moga Pulosari	Videografi Dan Film
61	Falyn Design	Kelurahan Siremeng	Kriya
62	Busana	Jl. Pulosari Belik	Fesyen
63	Dewanada Grup	Desa Siremeng	Seni Pertunjukan, Musik
64	Atira Farm	Moga	Kerajinan Kriya
65	Al Faiz Bambu	Desa Pagenteran	Seni Kriya
66	Kopi Sikoja	Dukuh Krajan RT 05/01 Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Pemalang	Kuliner
67	Berkah Jaya	Desa Lodaya	Fashion
68	Gurinyam	Randudongkal, Jl Sultan Agung No 53	Kuliner
69	Jasa Pembuatan Tas / La Brand	Jl. Bentana Umar 273 Rt. 39 Rw. 03 Kejene, Randudongkal, Pemalang	Fashion
70	Rimatex Putra Nusantara	Wanareja Utara	Textile

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama Produk	Alamat	Klasifikasi
71	Kipasan	Kaligawe	Kriya
72	Goyordress Dessyfa	Desa Pedurungan	Fesyen
73	Kabar Pemalang	Kelurahan Beji	Penerbitan Dan Periklanan
74	Ayam Geprek	Beji Rt 03 Rw 09 Kec Taman Kab Pemalang	Kuliner
75	Ayam Tulang Lunak Maju Kena Mundur	Desa Gondang Rt. 018 Rw. 004 Kec. Taman Kab. Pemalang	Fashion
76	Bang Jempol Snack	Jalan Seroja Rt 01 Rw 03 Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang	Kuliner
77	Bosse Coffee	Jl Pancaniti Rt 05 Rw 01 Jrakah Taman Pemalang	Kuliner
78	Cilok Kuah	Jl. Dr. Wahidin Sh Rt. 05/03 Kaligelang, Taman, Pemalang	Kuliner
79	Grha Baksya Art	Jalan Perintis Kemerdekaan Depan Honda Beji Taman	Kriya
80	Pengrajin Dan Penjual Tempe	Dusun Kebumen Rt 02 Rw 14 Desa Pedurungan Kec.Taman Kab.Pemalang	Kuliner
81	Puspitasari Putri	Jl Kulbanda Rt 01 Rw 05 Kel Beji Kec Taman Kab Pemalang	Kuliner
82	Tahu Hot Kriuk	Pemalang Taman Ds Kedungbanjar Rt4 Rw 3	Kuliner
83	Yame Dimsum	Perumahan Banjardawa Permai Gang Beringin Vii No 123 Banjardawa, Taman, Pemalang	Kuliner
84	Vibycraft	Desa Jebed Utara Rt 01 Rw 04 Kec Taman Pemalang	
85	Beecraftart	Perum Banjardawa Permai No 150 Desa Banjardawa	
86	Azzahra Handmade	Griya Taman Asri Blok B3 No 16 Desa Taman	
87	Cendol Kita	Jl. Wahid Hasyim No 60 Wanarejan Selatan	Kuliner
88	Aneka Olahan Ikan	Gang Kampung Arab	Kuliner
89	Konveksi Celana Cargo Fashion	Desa Samong Kec. Ulujami Kab. Pemalang	Fashion
90	Konveksi Celanan/Willbrind	Dsa. Samong Rt01/Rw02, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Fashion
91	Mawar Merah Ii	Desa Kaliprau Rt4/6 Kec. Ulujami	Kuliner
92	Zada	Ds Kaliprau Rt 02 Rw 06 Ulujami Pemalang	Fashion
93	Team Lugut	Dusun Kubang	Seni Kriya
94	Davied Axl	Desa Cibuyur	Fesyen
95	Sablon Plastisol	Jl. Lapangan Olahraga No. 2	Fesyen
96	Gypsum	Dusun Randu	Desain Interior
97	Ayu Syafa	Dusun Randu	Fesyen
98	Studio Web	Jl. Raya Gili Tugel	Aplikasi Dan Pengembangan Permainan
99	Cincin Dari Batok,	Jl. Kampung Durian	Kriya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama Produk	Alamat	Klasifikasi
	Resleting, Dan Kain		
100	Teater MA Salafiyah	Desa Warungpring	Seni Pertunjukan
101	Esteh Media Digital	Jl. Raya Jatinegara Warungpring Pemalang	Video
102	Kanaya Event Organizer & Tourism	Cibuyur Rt 20 Rw 3 Warungpring Pemalang	Photografi
103	Team Lugut	Dusun Kubang RT. 032/008 Desa Mereng, Warungpring, Pemalang	Kriya
104	Wajik Klethik Baper	Majalangu, Rt.5 Rw.7 Watukumpul 52357 Pemalang	Kuliner

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang menunjukkan keragaman subsektor yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Berdasarkan data inventarisasi, setidaknya terdapat lebih dari 100 pelaku ekonomi kreatif dengan jenis usaha yang meliputi kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, musik, seni rupa, desain interior, arsitektur, hingga subsektor modern seperti fotografi, videografi, radio, aplikasi, dan pengembangan permainan.

Subsektor kuliner mendominasi dengan variasi produk khas seperti apem cita rasa Wanarata, rengginang, olahan nanas (sirup, dodol, lumpia, dodo ganas, bellage nanas), keripik bayam, gula aren, tempe, hingga produk kuliner modern seperti ayam geprek, dimsum, hingga kafe dan bistro. Produk-produk kuliner ini tersebar luas dari wilayah pedesaan seperti Bantarbolang, Belik, Sikasur, hingga perkotaan Pemalang dan Kecamatan Taman, menunjukkan bahwa potensi kuliner menjadi salah satu penopang utama ekonomi kreatif masyarakat.

Pada subsektor kriya, terdapat banyak produk kerajinan berbasis bahan lokal seperti gapit wayang kulit, sapu glagah, mebel kayu antik, seni kayu, anyaman bambu, tas dari limbah plastik, hingga perhiasan dan aksesoris handmade. Kriya menjadi salah satu sektor yang tidak hanya mengandalkan keterampilan tangan, tetapi juga melestarikan tradisi dan mengangkat identitas lokal Pemalang.

Subsektor fesyen juga tumbuh dengan baik melalui berbagai usaha konveksi, busana, tas, dan produk pakaian modern yang tersebar di Kecamatan Karanganyar, Gunungtiga, Comal, hingga Ulujami. Kehadiran pelaku fesyen ini turut mendukung berkembangnya wirausaha baru yang mampu bersaing di pasar lokal maupun luar daerah.

Selain itu, subsektor seni pertunjukan dan musik tetap terjaga eksistensinya dengan hadirnya kelompok rebana, calung, gamelan, kuda

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kepang, teater, sanggar tari, hingga grup band modern. Keberadaan mereka tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian seni tradisional sekaligus ruang ekspresi generasi muda.

Menariknya, di Kabupaten Pemalang juga telah berkembang subsektor media kreatif seperti radio komunitas, manajemen event, videografi, fotografi, penerbitan, hingga pengembangan aplikasi digital. Kehadiran usaha-usaha ini menandakan bahwa ekosistem ekonomi kreatif Pemalang mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki potensi ekonomi kreatif yang komprehensif dan beragam, dengan kekuatan terbesar pada subsektor kuliner dan kriya, disusul fesyen serta seni pertunjukan. Jika potensi ini dikelola dengan baik melalui program pembinaan, promosi, dan fasilitasi, maka ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah serta memperkuat identitas budaya Pemalang.

9. Desa Wisata (DEWI)

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian kami dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata diwilayah masing-masing desa.

Selain itu tujuan dari pembentukan desa wisata ini adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata dan dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan didaerah membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh. Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi tempat sebagai tempat wisata. Desa Wisata di Kabupaten Pemalang saat ini berjumlah 36 Desa Wisata yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang nomor : 556 / 116/ Tahun 2023 perihal

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang pada tanggal 18 April 2023.

Adapun Tahap-tahap pengembangan Desa Wisata (DEWI) :

Tahap I

Rintisan

- Masih berupa potensi
- Sarana prasarana masih terbatas
- Kesadaran masyarakat belum tumbuh
- Sangat diperlukan pendampingan

Tahap 2

Berkembang

- Sudah mulai dikenal dan dikunjungi
- Ada pengembangan sarana prasarana
- Mulai tercipta lapangan pekerjaan
- Masih memerlukan pendampingan

Tahap 3

Maju

- Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi
- Sudah menjadi destinasi wisata
- Sarana prasarana memadai
- Mampu mengelola usaha pariwisata
- Mampu memanfaatkan dana desa

Tahap 4

Mandiri

- Ada inovasi pengembangan potensi dan menjadi unit usaha mandiri
- Sudah dikenal mancanegara dan menerapkan konsep berkelanjutan
- Standar internasional
- Kolaborasi pentahelix berjalanan dengan baik
- Dana desa memiliki peranan penting
- Memanfaatkan teknologi digital

Dalam rangka dukungan program unggulan Desa Wisata (DEWI) oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2023 telah di laksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 Kabupaten Pemalang telah melakukan penetapan dan evaluasi Desa Wisata sesuai SK tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Pemalang nomor 556/116/TAHUN 2023 dan SK tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Penetapan Kategori Desa Wisata Kabupaten Pemalang Tahun 2023 no 556/556.2/Disparpora;

2. Menginisiasi pembuatan Perda Pemberdayaan Desa Wisata, melakukan pendampingan Desa Wisata dengan peningkatan kapasitas pelaku Desa wisata melalui pelatihan pengelolaan desa wisata bagi Pokdarwis dan kepala desa wisata;
3. Pada bidang ekonomi kreatif menyelenggarakan pelatihan olahan makanan untuk pelaku ekonomi kreatif yang berada di desa wisata Surajaya. Tujuannya adalah warga lokal desa wisata dapat mengolah bahan baku unggulan desa menjadi produk unggulan desa wisata sehingga meningkatkan perekonomian warga desa wisata surajaya. Untuk mendukung program tersebut, desa wisata diberikan hibah alat pendukung produksi olahan singkong dan souvenir;
4. Pembuatan DED (Detail Engineering Design) daya tarik wisata di desa wisata watukumpul. dan memberikan hibah untuk pengadaan sarana dan prasarana sekretariat pengelola Desa Wisata banyumudal, mendelem, surajaya, bulakan, wisnu;
5. Promosi Desa Wisata melalui Website Wisata Pemalang, dan Instagram Wisata Pemalang, Promosi Touring Marketing Ke Kabupaten Semarang dengan Promosikan Destinasi Wisata Pemalang kepada Pelaku Jasa Usaha Pariwisata di Kab Semarang, Promosi Digital melalui Lomba APPI 2023 (Apresiasi Promosi Pariwisata Indonesia) dengan Tema Destinasi, Event Daerah, Adat/Budaya, dan Kuliner (Kab Pemalang masuk 10 besar), Promosi Digital melalui Lomba ABBWI (Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia) dengan Mengusulkan Destinasi di Kawasan Pulosari yaitu di Desa Wisata Jurangmangu dan Desa Di Wilayah Kecamatan Belik dengan Puncak Acara Festifal Wong Gunung (FWG) Tahun 2023, Promosi melalui Leafleat Destinasi Wisata Pemalang.

   Dalam rangka dukungan program unggulan Desa Wisata (DEWI) oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2024 telah di laksanakan kegiatan sebagai berikut :

   Pengembangan Desa Wisata (DEWI), merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

melakukan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dengan:

a. Menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola desa wisata sebanyak 217 peserta, yang dilaksanakan di:
    1) Desa Wisata Simpur yang diikuti oleh 35 orang pemandu ekowisata desa wisata;
    2) Desa Wisata Sikasur yang diikuti 36 orang pemandu ekowisata desa wisata
    3) Desa Wisata Sikasur yang diikuti 36 orang pemandu ekowisata desa wisata;
    4) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang yang diikuti oleh 36 orang pengelola desa wisata;
    5) Desa Wisata Nyalembeng Bukit Tangkeban yang diikuti oleh 64 pelaku usaha pariwisata homestay.
b. Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) paket wisata untuk desa wisata dan daya tarik wisata sebanyak 50 peserta.
c. Menyelenggarakan pembinaan dan rapat koordinasi (rakor) pariwisata sebanyak 36 desa wisata.
d. Menyelenggarakan forum komunikasi desa wisata tingkat Provinsi Jawa Tengah di Desa Sikasur sebanyak 170 peserta dari kota/kabupaten se-jawa tengah.
e. Menyelenggarakan forum komunikasi desa wisata tingkat Kabupaten Pemalang.

Selain itu, di Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pemalang juga berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan menyelenggarakan beberapa kegiatan yaitu:

a. Mengikuti jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kudus yang di wakili oleh Desa Wisata Sikasur.
b. Mengikuti gelar desa wisata di Kabupaten Purworejo diwakili oleh Desa Wisata Penggarit.
c. Berpartisipasi dalam pameran pada Festival Gunung Slamet di Desa Wisata Serang Kabupaten Purbalingga.
d. Menyelenggarakan Festival Wong Gunung di desa wisata kawasan Kecamatan Pulosari.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Melakukan pengambilan video / foto dalam rangka promosi pariwisata di desa wisata dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah bersama Panji Sang Petualang.

Melalui Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk pengembangan desa wisata yang disalurkan kepada Desa Wisata Penggarit dan Desa Wisata Majalangu.

Berikut data Desa Wisata (Dewi) di Kabupaten Pemalang :

Tabel 2.10. Desa Wisata (Dewi) di Kabupaten Pemalang

No	Nama Desa	Kategori
1	Desa Sikasur	Maju
2	Desa Penggarit	Maju
3	Desa Banyumudal	Maju
4	Desa Cikendung	Berkembang
5	Desa Gunungsari	Berkembang
6	Desa Clekatakan	Berkembang
7	Desa Jurangmangu	Berkembang
8	Desa Kaliprau	Berkembang
9	Desa Mojo	Berkembang
10	Desa Nyamplungsari	Berkembang
11	Desa Surajaya	Berkembang
12	Desa Karangsari	Rintisan
13	Desa Pulosari	Rintisan
14	Desa Gambuhan	Rintisan
15	Desa Nyalembeng	Rintisan
16	Desa Sima	Rintisan
17	Desa Mandiraja	Rintisan
18	Desa Kebanggan	Rintisan
19	Desa Wanarejan Utara	Rintisan
20	Desa Asemdoyong	Rintisan
21	Desa Gongseng	Rintisan
22	Desa Mejagong	Rintisan
23	Desa Kecepit	Rintisan
24	Desa Bulakan	Rintisan
25	Desa Mendelem	Rintisan
26	Desa Badak	Rintisan
27	Desa Simpur	Rintisan
28	Desa Cawet	Rintisan
29	Desa Wisnu	Rintisan
30	Desa Gapura	Rintisan
31	Desa Watukumpul	Rintisan
32	Desa Tundagan	Rintisan
33	Desa Jojogan	Rintisan
34	Desa Majalangu	Rintisan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama Desa	Kategori
35	Desa Susukan	Rintisan
36	Desa Sarwodadi	Rintisan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

10. Kewirausahaan Pemuda

Pemuda adalah potensi dan penerus perjuangan bangsa yang harus dipersiapkan sebagai kader masa depan. Kemajuan di berbagai bidang telah membawa dampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kepada pemuda sebagai penerus bangsa. Terlebih lagi di dalam perkembangan dunia yang semakin terhubung tanpa batas antara Negara yang satu dengan Negara yang lain, menuntut sikap pemuda yang memiliki karakteristik kebangsaan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam falsah hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

Derasnya arus globalisasi di satu sisi merupakan manfaat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk menempa diri sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik. Terbukanya arus informasi dewasa ini menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda untuk memotivasi dan menginspirasi diri untuk melakukan berbagai kegaitan dan akvititas yang bermanfaat, salah satunya adalah mengembangkan motivasi kewirausahaan. Namun di sisi yang lain, arus globalisasi telah mendorong sebagian generasi muda bersikap konsumerisme. Semakin banyaknya mall dan tempat-tempat hiburan, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga telah melanda kota-kota kecil telah mendorong konsumerisme di kalangan generasi muda. Apalagi arus informasi yang begitu cepat, sehingga generasi muda kita dicekoki dengan berbagai produk dan budaya serta gaya hidup yang seringkali tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang dan menjadi falsafah hidup bangsa ini.

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda meliputi tiga pilar program, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Ketiga pilar program tersebut merupakan program yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Program penyadaran dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan pemacu untuk tumbuh dan berkembangnya sikap mental, cara pandang (mindset) serta motivasi untuk berwirausaha. Program penyadaran ini ditujukan untuk menumbuhkan beberapa sikap mental yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Hal ini sangat penting

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dilaksanakan mengingat motivasi sebagian besar pemuda Indonesia untuk berwirausaha masih cukup rendah.

Program pemberdayaan pemuda dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha. Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setalah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diberikan harus melalui tahap anisis kebutuhan sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran. Beberapa fasilitasi kewirausahaan pemuda, antara lain :

1. PELATIHAN

   Pelatihan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap seseorang pemuda untuk menjadi wirausaha;

2. PEMAGANGAN

   Pemagangan adalah kegiatan memberikan pengenalan hingga pemahaman tentang usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan merasakan secara langsung dalam proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang atau jasa) pada sebuah usaha tertentu.

3. PEMBIMBINGAN

   Pembimbingan bagi wirausaha muda pemula adalah kegiatan membantu individu atau usaha pemuda agar dapat memaksimalkan potensinya dengan cara meneksplorasi kebutuhan, memotivasi, membangkitkan hasrat, meningkatkan ketrampilan dan proses berpikir guna membuat perubahan yang nyata dan berkesinambungan dalam usahanya.

4. PENDAMPINGAN

   Pendampingan wirausaha muda pemula adalah kegiatan pendampingan usaha oleh seseorang yang dipandang lebih berpengalaman dalam berwirausaha (mentor) kepada seorang atau beberapa orang wirausaha pemuda (mentee).

5. KEMITRAAN

   Kemitraan wirausaha muda pemula adalah jalinan kerjasama usaha antara wirausaha muda dengan usaha besar dan/atau sumberdaya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

usaha lainnya untuk meningkatkan kemampuan usaha pemuda agar menjadi tangguh dan mandiri.

6. PROMOSI

   Promosi kewirausahaan pemuda adalah kegiatan memberikan wadah dan sarana bagi wirausaha muda pemula untuk mempromosikan usahanya maupun produk usahanya.

7. BANTUAN AKSES PEMODALAN

   Bantuan akses permodalan bagi wirausaha muda pemula adalah kegiatan memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda

Pada saat ini, sebagai dukungan kewirausahaan pemuda, Disparpora hanya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan pengiriman pelatihan ke Provinsi karena keterbatasan anggaran. Berikut data Wirausaha Pemuda di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :

Tabel 2.11. Wirausaha Pemuda di Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir / Usia	Nama Usaha	Tahun Mulai Usaha	Alamat
1	Renji Dwi Yanuar	L	Pemalang, 29 Januari 2002	Basrengkuy _ Pemalang	2021	Desa Banjardawa RT 03/01 Taman Pemalang
2	Tiar Dwi Saputro	L	Pemalang, 27 November 1996	Mie Krangganan	2021	Jl. Melon RT 02/03 Dusun Krangganan Desa Sewaka
3	Febbi Ardiansyah	L	Pemalang, 16 Februari 2000	Hope Thai Tea	2020	Jl. Muktar (Depan SMAN 3 Pemalang)
4	Dwi Setyani	P	Pemalang, 13 Mei 1993	Zia Azella Loundry	2021	Jl. Serayu GOR Cisadane Kebondalem Pemalang
5	Melinda Gusti Ayu	P	Pemalang, 5 Januari 1996	Baju Daster	2018	Jl. Cimanuk RT 01/02 Kebondalem Pemalang
6	Tri Ningsih	P	Pemalang, 29 September 1993	Sardika Collection	2018	Dusun Pengadegan RT 04/05 Pener Pemalang
7	Wiharti Barokah	P	Lampung Utara, 8 Desember 1995	Atik ACC	2015	Jl. Asparagus Pakisaji RT 05/03 Wanarejan Utara
8	Widyaningsih	P	Pemalang, 31 Juli 1994	Hope Rumah Rahma	2017	Jl. Sonokeling RT 08/01 Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir / Usia	Nama Usaha	Tahun Mulai Usaha	Alamat
						Pemalang
9	Untung Slamet	L	Pemalang, 7 Maret 1996	Jamu Ibu Murni	2018	Desa Wanasari Wanamulya RT 02/02 Pemalang
10	Fina Risqiana Hanifah	P	Pemalang, 29 April 1996	Berkah Catering	2017	Jl. Citarum Gang Parkit 2, RT 01/RW 11
11	Siska Setianingrum	P	Pemalang, 22 September 1995	Kios Dek Ara Pasar	2021	Jl. Pergiwo RT 03/RW 03 Taman Klarasan Pemalang
12	Anisa Sahrha	P	Pemalang, 9 Juni 1993	bysahraa Koleksi Tas Lokal	2019	Gang Irawan Desa Ujunggede RT 05/RW 07 Ampelgading
13	Duta Diaristi P	P	Pekalongan, 28 Februari 1997	Mincuk Kuliner	2022	Griya Taman Asri 2 Blok D No. 2, Taman Pemalang
14	Puri Retno Yulianti	P	Pemalang, 28 Februari 1997	Agen Parfum Laundry BRM	2019	Jl. Pancabakti RT 03/RW 09 Beji
15	Rizqi Sulkhannudin	L	Pemalang, 25 Mei 1996	Bobaho	2020	Jl. Gatot Subroto Bojongbata Pemalang
16	Nur Haqi Inayati	P	Pemalang, 26 Juni 1996	Haqi-Shop dan Kaliya Snack	2019	Majalangu RT 02/RW 04 Watukumpul Pemalang
17	Amirul Ma'arif	L	Pemalang, 7 Agustus 1993	Amirul Collections Grosir Barnik	2016	Jl. Cempaka RT 04 RW 01 Desa Wanarejan Utara
18	Widyo Wati	P	Pemalang, 25 Mei 1996	Widhya Gold	2019	Jl. Jebed Utara RT01 RW 08 Taman Pemalang
19	Sakinah	P	Pemalang, 12 Maret 1997	Makriuk	2017	Desa Kebagusan RT 19 RW 03 Kecamatan Ampelgading
20	Sekar Ayuningtyas	P	Pemalang, 24 Juni 1997	Sweetella Snack and Dessert	2019	Jl. Gatot Subroto Gang Apel II Mengoneng Bojongbata
21	Agung Chandra Dinata	L	Pemalang, 11 Januari 1997	Njajan Teros	2020	Widodaren Pekandangan RT 43 RW 07 Petarukan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir / Usia	Nama Usaha	Tahun Mulai Usaha	Alamat
22	Muslim Maulana	L	Bekasi, 9 April 1993	Naimastra	2019	Ambowetan RT 05/RW 03 Ulujami
23	Asri Joyo Utomo	L	Pemalang, 18 Agustus 1997	Tailor Pemalang	2020	Bojongbata RT 01 RW 03 Pemalang
24	Tania Sabrina	P	Kuningan, 12 Juni 1999	Catering dan Snack	2017	Pemalang Indah Regency Bojongbata
25	Fauziyah Hanum	P	Pemalang, 19 Maret 1999	Siomay Bandung Pempek BOOM	2021	Jl. Porong No. 18 Kebondalem Pemalang
26	Andrian Nuari	L	Pemalang, 18 Januari 1994	Industri Furnitur	2021	Jl. Dr. Wahidin Kaligelang (Seberang TK Pertiwi Kaligelang)
27	Anishatul Khasanah	P	Pemalang, 11 November 1994	Industri Tekstil	2019	Jalan Raya Watukumpul RT 05 RW 05
28	Shintya Gita Novianti	P	Pemalang, 30 November 1996	Risol, Bolen Pastel	2018	Jl. Tiga Waja No. 15 RT 05 RW 09
29	Febiyani Rizki Amalia	P	Pemalang, 10 Februari 1999	Atfans Palm Sugar	2018	Jl. Raya Randudongkal KM 2 RT 01 RW 01 Sodong Belik
30	Hoti Hafibah	P	Pemalang, 28 Agustus 1996	Misha Chocoart	2020	Jl. Arkut Winong No. 4 RT 29 RW 04 Kreyo Randudongkal
31	Ahmad Ibnu Farizki	L	Pemalang, 29 Desember 1995	Gemilang Panca Usaha	2019	Jl. Warungpring - Cibuyur Krikil RT 20 RW 03
32	Mastaqomah	P	Pemalang, 20 April 1993	Sambal Ningrat	2017	Kejene RT 07 RW 01 Randudongkal
33	Tika Indriyani	P	Pemalang, 28 Desember 1995	Getuk Lindri Ma'iyah	2017	Kebagusan No. 26 RT 26 RW 05 Kec. Ampelgading
34	Izza Aufar Kusuma	L	Pemalang, 17 Januari 1998	Zavafa Madjadjaya	2022	Jl. Raya Desa Majalangu No 14 RT 04 RW 02
35	Rizka Rahmah Asaidah	P	Pemalang, 23 Januari 1997	Sada Kitchen	2023	Jl. Pungkuran 5 RT 02 RW 08 Kebondalem
36	Arsifi Amanah	P	Pemalang, 8 September 1999	Sifisang	2020	Jl. Raya Cikadu Watukumpul RT 19 RW 05 Jojogan
37	Alvin Arif Budiman	L	Pemalang, 18 Mei 1999	Saujana	2019	Danasari RT 07 RW 08 Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir / Usia	Nama Usaha	Tahun Mulai Usaha	Alamat
38	Herino Bagus P	L	Pemalang, 27 Mei 1998	Lesehan Ikan Bakar Cak Her	2020	Nyamplungsari RT 04 RW 03 Petarukan
39	Muhamad Nurul Fajri	L	Pemalang, 26 Oktober 2002	Gula Aren Serbuk "NUUN"	2020	Jl. Flamboyan No. 13 RT 19 RW 06 Banjaranyar - Randudongkal
40	M. Zunaedi Ade Saputra	L	30 tahun	Saputra Mandiri	2021	Desa Semaya 013/002 Randudongkal-Pemalang
41	Latifatus Sa'adah	P	23 tahun	Lala Snack	2021	Kepuh RT 005 RW 005 Desa Wonogiri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang
42	Leca Arindiani	P	24 tahun	Ayang Ngemil	2022	Dukuh Bulu Rt 002 Rw 002 Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
43	Chika Dwi Utami	P	23 tahun	Lintang Songo Market	2022	Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
44	Niken Larasati Octaviani	P	25 tahun	Jasa Design Grafis dan UI/UX Online	2021	Desa Cibelok RT 03 RW 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
45	Muhammad Ainul Yaqin	L	25 tahun	Gedang Crispy	2021	Jalan Serayu Barat RT 04 RW 03 Kebondalem Pemalang
46	Showfatun Nisa	P	26 tahun	Kripik Tempe Bu Ida	2021	Desa Banjardawa RT 001 RW 005 Kecamatan Taman
47	Pratama Aziz Pangestu	L	23 tahun	Bonitu Kembar	2022	Jalan Serayu No. 12 Kec. Pemalang
48	Zilmi Kurniasari	P	26 tahun	Aulia Store Pemalang	2019	Dusun Gombong RT 07 RW 02, Karangtuan Warungpring
49	Riris Afifa	P	25 tahun	Dapur Yiyis	2018	Desa Banjardawa RT 002 RW 008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir / Usia	Nama Usaha	Tahun Mulai Usaha	Alamat
						Kecamatan Taman
50	Aufa Zaini	L	22 tahun	Fas Design Printing	2019	Desa Kalirandu RT 06 RW 04 Kec. Petarukan Kab. Pemalang
51	Rismawati	P	23 tahun	RiChips	2019	Desa Sikayu RT 03 RW 04 Kec. Comal Kab. Pemalang
52	Elok Faekhoh	P	21 tahun	EL CELL	2021	Desa Sikayu RT 03 RW 04 Kec. Comal Kab. Pemalang
53	Ainur Mufid Pradana	L	19 tahun	Abra Collection	2015	Gedeg RT.04 RW.01 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
54	Reval Izqulkina	L	20 tahun	Alpukat Kocok	2022	Desa Gedeg Kec. Comal
55	Wahadi Widodo	L	23 tahun	Sindeng Snack Produksi Kripik Tempe Bulat	2020	Jebed Utara 001/002 Kec. Taman, Kab. Pemalang
56	Deliana Tiyas Pradita	P	21 tahun	Raden Crofle	2021	Desa Pecangakan, Kec. Comal
57	Asrul Muazam	L	26 tahun	Auliya Beauty	2018	Jalan Brantas RT 001 RW 001 Kebondalem
58	Salman Alfarisi	L	22 tahun	Sarung Goyor	2020	Jalan Asparagus RT 02 Rw 04 Dusun Gembyang Wanarejan Utara
59	Regilsa Fariz	L	24 tahun	Klareyan Expres	2022	Desa Klareyan Rt 006 Rw 003 Kecamatan Petarukan
60	Rosyi Alfiani	P	25 tahun	Rosyi Snack	2022	Desa Klareyan RT 005 Rw 002 Kecamatan Petarukan
61	Haryuni	P	29 tahun	Haryuni Food	2020	Desa Klareyan Rt 005 Rw 003 Kecamatan Petarukan
62	Ivan Zakaria	L	24 tahun	Warung Ayam Geprek	2020	Jl. Brantas RT 01/RW 01 Kelurahan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir / Usia	Nama Usaha	Tahun Mulai Usaha	Alamat
				Derma		Kebondalem, Kec. Pemalang
63	Tomi Adam	L	24 tahun	Kedai Mbako Klaras	2022	Desa Mandiraja RT 06 RW 01 Kec. Moga
64	Andi Arizqi	L	22 tahun	Kopi Cipulang	2021	Dusun Krajan RT 016/RW 002 Desa Cikendung Kec. Pulosari
65	Muhammad Aji Saputro	L	29 tahun	Warung Pecak "Bisoho Rumongso"	2022	Desa Kalirandu RT 02 RW 03 Kec. Petarukan Kab. Pemalang
66	Winda Putri D	P	25 tahun	WD Food Sibolang	2022	Desa Bantarbolang RT 05 RW 04 Kec. Bantarbolang
67	Kholisul Hamam	L	24 tahun	KHMDSN (Percetakan)	2022	Dukuh Lumpang RT 04 RW 06 Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang
68	Yusuf Setiaji	L	21 tahun	Filosofi Kopi Project (Fotografi)	2020	Desa Bantarbolang RT 04 RW 01 Kec. Bantarbolang
69	Rizki Nurul	L	06 Desember 1999	Jual kerupuk	-	-
70	Gladys Mutiara Safitri	P	20 Desember 2001	Ngemiloverz	-	-
71	Dewi Khoerunisah	P	30 April 1997	Es teh	-	-
72	Bazi Sultoni	L	13 Maret 1997	RN Printing	-	-
73	Maya lestari	P	05 Agustus 1997	Jahit	-	-
74	Adnan Muharrom	L	16 Desember 1999	Ganci Akrelik	-	-
75	Bagus Marsono	L	15 September 1999	Ayam bangkok	-	-
76	Dian Anggriani	P	29 Juli 1988	Aneka kue basah dan catering	-	-
77	Intan Maelanijmah	P	31 Mei 1998	Kantin dan ketering	-	-
78	RIRIS ADI PRASETIYO	P	01 Oktober 2000	Sayuran	-	-
79	ADETIA	L	11 Agustus 1998	Combro	-	-
80	Yuliani Lestari	P	12 Juli 1994	Dagang Sembako	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir / Usia	Nama Usaha	Tahun Mulai Usaha	Alamat
81	Erlangga Girindra Buana	L	30 September 1996	Toko Oleh Oleh Sempulur	-	-
82	Suswanti	P	14 Oktober 1994	Bimbel	-	-
83	Eka Amelia	P	13 Mei 1998	Tisu	-	-
84	Mohamad Abdul Aziz	L	27 Maret 2001	Kue pancong	-	-
85	Resti Aulia sari	P	13 Maret 2006	usaha sembako	-	-
86	Karista	P	18 Juni 2006	online shop	-	-
87	Indah septiyaningrum	P	02 September 2002	BLAK-SEBLAK (PENGABDI SEBLAK)	-	-
88	Novi Mustafia	P	23 April 1998	Sablon dan kuliner	-	-
89	SURYATI	P	06 April 2000	Kedai Online by:Mamaati	-	-
90	Desi Ayu Anisah	P	25 Desember 1994	Usaha tempe kering mba ayu	-	-
91	Sintia Lu'lu Adabiah	P	08 Juni 2002	Catering	-	-
92	Feronika Mai Anggara	P	11 Mei 2006	Jualan jajanan ringan	-	-
93	Rizki Nurasfandi	L	30 April 2000	Briket arang batok	-	-
94	IKHROM KHOERUDIN	L	10 Mei 1996	PERTANIAN	-	-
95	Vidiyantika	P	07 Juni 1995	Snack (Kue Basah dan Kering)	-	-
96	Awal Kurnia	L	02 Agustus 1996	Kurnia Jaya Sport	-	-
97	Hanim Firda Salsabila	P	26 Februari 2002	Sweetie Cake	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

2.3. Hasil Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kinerjanya sebagiamana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP);
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tabel 2.12. Hasil Evaluasi SAKIP pada Disparpora Kabupaten Pemalang

NO	URAIAN	BOBOT	LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) INSPEKTORAT							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Nomor : 700 / 53 / VII / TIM.I / RB.III / 2019 Tanggal : 3 Juli 2019	Nomor : 700 / 53 / VII / TIM.I / RB.III / 2019 Tanggal : 3 Juli 2019	Nomor : 700 / 166 / IV / 2020 Tanggal : 30 April 2020	Nomor : 700 / 52 / EVS / 2021 Tanggal : 6 Agustus 2021	Nomor : 700 / 15 / EVS / 2022 Tanggal: 6 Juli 2022	Nomor : 700 / 027 / EVS / VI / 2023 Tanggal 19 JUNI 2023	Nomor : 700 / 205 / EVS. / VI / 2024 Tanggal 13 Juni 2024	Nomor : 700. 1.2. 1 /0507/ 2025 Tanggal 28 Mei 2025
:1	Perencanaan Kinerja	30	10.22	19.65	20.94	21,90	23,10	24	23,22	23,73
2	Pengukuran Kinerja	25	5.63	4.69	9.06	10,31	17,40	18	19,65	20,75
3	Pelaporan Kinerja	15	6.21	8.10	8.37	8,45	9,60	9,6	9,30	10,50
4	Evaluasi Kinerja	10	1.00	4.67	4.24	4,49	12,50	14	14,05	15,33
5	Capian Kinerja	20	9.38	13.18	12.44	12,92	Tidak termasuk komponen SAKIP, sesuai dengan permenpanrb no 8 th 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP, sesuai dengan permenpanrb no 8 th 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP, sesuai dengan permenpanrb no 8 th 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP, sesuai dengan permenpanrb no 8 th 2021
	Total	100	32.43	50.28	55.05	58,07	62,60	65,6	66,22	70,31

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang pada periode tahun 2018–2025, terlihat adanya tren peningkatan skor secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, skor total SAKIP masih berada di angka 32,43, kemudian meningkat signifikan menjadi 50,28 di tahun 2019, dan terus bertambah hingga mencapai 70,31 pada tahun 2025.

Dari aspek perencanaan kinerja dengan bobot 30%, terjadi peningkatan yang stabil. Skor tahun 2018 yang baru mencapai 10,22 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 23,73 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang semakin selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Komponen pengukuran kinerja dengan bobot 25% juga mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 2018, nilainya masih rendah di

https://jdih.pemalangkab.go.id/

angka 5,63, namun meningkat tajam hingga 20,75 di tahun 2025. Kenaikan ini menggambarkan peningkatan kualitas dalam menetapkan indikator, mengukur capaian, serta memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada komponen pelaporan kinerja (bobot 15%), capaian relatif lebih stabil, namun tetap menunjukkan tren peningkatan. Dari skor 6,21 pada tahun 2018 naik menjadi 10,50 di tahun 2025. Perbaikan ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang semakin akuntabel dan sesuai standar.

Sementara itu, komponen evaluasi kinerja (bobot 10%) menjadi salah satu indikator dengan lonjakan paling tinggi. Jika pada tahun 2018 baru mencapai skor 1,00, maka pada tahun 2025 nilainya sudah mencapai 15,33. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi internal maupun tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi semakin terstruktur dan berjalan efektif.

Untuk komponen capaian kinerja (bobot 20%), penilaian hanya berlangsung hingga tahun 2020. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021, aspek ini tidak lagi termasuk dalam komponen penilaian SAKIP. Namun demikian, sebelum dikeluarkan, capaian kinerja Disparpora masih menunjukkan peningkatan, yaitu dari 9,38 pada 2018 menjadi 12,92 pada 2021.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi SAKIP Disparpora Kabupaten Pemalang dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan tren perbaikan yang signifikan dan konsisten. Dari kategori kurang pada 2018, kini berhasil meningkat hingga mendekati kategori baik dengan skor 70,31 pada 2025. Capaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.1. Permasalahan

a. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang pada tahun 2024. Persentase retribusi pariwisata hanya mencapai 0,35%, jauh di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 0,6%, Ketimpangan ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan potensi wisata daerah, baik dari sisi promosi, pengembangan destinasi, maupun pengelolaan retribusi secara

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sistematis. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan strategis guna mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata yang seharusnya memiliki potensi besar bagi pembangunan ekonomi lokal.

b. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke 2024, peningkatannya tergolong sangat kecil, yakni hanya sebesar 0,78%. diperlukan langkah strategis dan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek pengembangan pariwisata. Salah satu kunci utama adalah perbaikan infrastruktur, terutama akses menuju destinasi wisata yang masih terbatas. Jalan yang layak, transportasi umum yang memadai, serta fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir, dan pusat informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan.
c. Kabupaten Pemalang memiliki 36 desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah, mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan potensi lokal yang luar biasa. Namun sayangnya, dari jumlah tersebut, desa wisata yang benar-benar aktif dan berkembang hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari. Minimnya aktivitas dan kunjungan di sebagian besar desa wisata menunjukkan bahwa potensi besar tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
d. Sampai saat ini, pengelolaan retribusi parkir di Objek Wisata (OW) Widuri belum sepenuhnya tertib. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang retribusi, praktik di lapangan masih menunjukkan bahwa pengelolaan parkir dilakukan oleh paguyuban setempat secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan potensi pendapatan daerah dari sektor parkir belum bisa dimaksimalkan, dan rawan menimbulkan ketidaktertiban dalam pengelolaan serta pelaporan. Diperlukan langkah tegas dan koordinasi lintas sektor untuk menertibkan sistem retribusi sesuai dengan regulasi yang berlaku, demi transparansi dan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
e. Angka wirausaha pemuda di Kabupaten Pemalang masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, dari 177 pemuda yang telah mengikuti pelatihan, hanya 30 orang yang benar-benar menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong lahirnya wirausahawan muda.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik dalam hal pendampingan, akses permodalan, maupun tindak lanjut pascapelatihan. Tanpa sinergi yang kuat, potensi pemuda yang sebenarnya besar tidak akan berkembang secara maksimal.

f. Meskipun perolehan medali Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, namun secara peringkat di tingkat Provinsi Jawa Tengah, posisi Pemalang masih cukup tertinggal, yakni berada di peringkat ke-20 dari total 35 kabupaten/kota.

2.4.2 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB maka diperlukan percepatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mengintegrasikan TPB ke dalam rencana pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana dimandatkan oleh Perpres. RAD TPB merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan TPB antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari ketujuh belas tujuan TPB tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dalam pencapaian pada tujuan 8 yaitu, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua dengan indikator kinerja jumlah wisatawan mancanegara tahun 2023 tercapai sebanyak 10 orang. Indikator kinerja jumlah wisatawan nusantara, tahun 2023 tercapai sebanyak 1.517.556 orang, sedangkan pada tahun 2024 kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang baik wisatawan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

nusantara dan mancanegara adalah 1,159,242 orang. Berikut tabel SDGs pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang :

Tabel 2.13. Sustainable Development Goals (SDG's) Disparpora Kabupaten Pemalang

TUJUAN	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs Kabupaten	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Jumlah Wisatawan mancanegara	Jumlah Wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikembangkan
				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata Kab/kota yang di kembangkan
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata Kab/kota yang termonitoring
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase fisik kawasan strategis pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan
				Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan pembangunan pada kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Pemalang
				Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota yang di kembangkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TUJUAN	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs Kabupaten	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis Kab/kota
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota yang termonitoring
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan destinasi pariwisata Kab/kota
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan destinasi pariwisata Kab/kota
				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata milik pemerintah daerah yang dikelola

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TUJUAN	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs Kabupaten	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwsata Kab/kota yang termonitoring
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata dan kelompok masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi jasa usaha pariwisata yang berstandarisasi
				Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah jasa usaha pariwisata yang mengikuti bimtek
					Jumlah pengelola objek wisata yang mengikuti bimtek (Obyek Wisata)
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase objek wisata yang dipromosikan
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bahan promosi melalui media elektronik dan konvensional
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TUJUAN	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs Kabupaten	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
					Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data yang dihasilkan untuk menyusun database kepariwisataan
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama/ kemitraan dibidang pariwisata yang dilaksanakan dengan pihak lain
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase sarana dan prasarana Ekraf yang dimanfaatkan
				Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana Ekraf yang tersedia
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana yang di bangun/perbaiki guna pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TUJUAN	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	INDIKATOR SDGs Kabupaten	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan Ekraf yang ter-registrasi
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase kegiatan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf yang terlaksana
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan dan bintek pada sub sektor ekonomi kreatif
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah duta wisata yang terseleksi di tk. Kabupaten dan dikirim ke tk. Provinsi
				Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah peserta yang bersertifikat
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta kompetensi SDM ekonomi kreatif

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui mekanisme *bottom up* maupun *top down*. Mekanisme *bottom up*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan mekanisme *top down* dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah (forum PD) dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga RKPD mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 3 (tiga) Program urusan kepemudaan dan olahraga, 4 (empat) Program urusan pariwisata, dan 1 (satu) program rutin urusan penunjang. Adapun Program tersebut adalah sebagai berikut :

I. Urusan Kepemudaan dan Olahraga :
   1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
   2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
   3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

II. Urusan Pariwisata
   1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
   2. Program pemasaran pariwisata
   3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
   4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

III. Urusan Penunjang :
   1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.14 di bawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.14. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA				**16,867,674,550**	**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**				**16,867,674,550**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4,219,396,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4,219,396,000**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**4,219,396,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**4,219,396,000**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Kabupaten Pemalang	-	-	**853,907,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Kabupaten Pemalang	-	-	**853,907,000**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**353,820,000**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**353,820,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1,000,000	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	348,820,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	348,820,000	
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kabupaten Pemalang	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	1,000,000	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kabupaten Pemalang	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	20 Orang	1,000,000	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	20 Orang	1,000,000	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	1,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	1,000,000	
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1,000,000	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**500,087,000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**500,087,000**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	499,087,000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	499,087,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	1,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	1,000,000	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Kabupaten Pemalang	-	-	**2,908,489,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Kabupaten Pemalang	-	-	**2,908,489,000**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**327,000,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**327,000,000**	
2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	1,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	325,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	325,000,000	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Pemalang	0	1 0	1,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Pemalang	0	1 0	1,000,000	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**776,000,000**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**776,000,000**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	0	1 0	775,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	0	1 0	775,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kabupaten Pemalang	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	1,000,000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kabupaten Pemalang	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	1,000,000	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Kabupaten Pemalang	-	-	**703,000,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Kabupaten Pemalang	-	-	**703,000,000**	
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10 Orang	1,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10 Orang	1,000,000	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kabupaten Pemalang	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	200,000,000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kabupaten Pemalang	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	200,000,000	
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kabupaten Pemalang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 Pelatda	1,000,000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kabupaten Pemalang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 Pelatda	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20 Orang	500,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20 Orang	500,000,000	
2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	1,000,000	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	1,000,000	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Kabupaten Pemalang	-	-	**898,489,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Kabupaten Pemalang	-	-	**898,489,000**	
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	1,000,000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	1,000,000	
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	897,489,000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	897,489,000	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Kabupaten Pemalang	-	-	**204,000,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Kabupaten Pemalang	-	-	**204,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1,000,000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1,000,000	
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	1,000,000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	1,000,000	
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	200,000,000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	200,000,000	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Kabupaten Pemalang	-	-	**457,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Kabupaten Pemalang	-	-	**457,000,000**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Kabupaten Pemalang	-	-	**457,000,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Kabupaten Pemalang	-	-	**457,000,000**	
2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kabupaten Pemalang	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kabupaten Pemalang	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,000,000	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	450,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	450,000,000	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	1,000,000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 Unit	1,000,000	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 Unit	1,000,000	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1,000,000	
2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000	
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000	
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1,000,000	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Kabupaten Pemalang			**12,648,278,550**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	Kabupaten Pemalang			**12,648,278,550**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	Kabupaten Pemalang			**12,648,278,550**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	Kabupaten Pemalang			**12,648,278,550**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Pemalang	-	-	**9,645,278,550**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Pemalang	-	-	**9,645,278,550**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**59,954,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**59,954,000**	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000	
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 Dokumen	5,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
			RKA-SKPD					RKA-SKPD			
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,240,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,240,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8,434,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8,434,000	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	32,280,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	32,280,000	
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**7,010,203,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**7,010,203,000**	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ bulan	6,999,833,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ bulan	6,999,833,000	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9,370,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9,370,000	
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,000,000**	
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1,000,000	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**312,261,550**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**312,261,550**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85,379,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85,379,100	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,370,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,370,000	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	201,512,450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	201,512,450	
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**24,350,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**24,350,000**	
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	19,500,000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	19,500,000	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,850,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,850,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**2,094,385,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**2,094,385,000**	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	620,658,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	620,658,000	
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39,400,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39,400,000	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,434,327,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,434,327,000	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**143,125,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Pemalang	-	-	**143,125,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	94,625,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	94,625,000	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48,500,000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,329,356,000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,329,356,000**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**5,000,000**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**5,000,000**	
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1,000,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1,000,000	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1,000,000	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000	
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	1 Orang	1,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	1 Orang	1,000,000	
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**6,000,000**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**6,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	1,000,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	1,000,000	
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Lokasi	1,000,000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Lokasi	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Orang	1,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Orang	1,000,000	
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,311,356,000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,311,356,000**	
3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	1,000,000	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	200,000,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	200,000,000	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,105,356,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,105,356,000	
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1,000,000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	1 Dokumen	1,000,000	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000	
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**7,000,000**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**7,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	1 Usaha Pariwisata	1,000,000	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	1 Usaha Pariwisata	1,000,000	
3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	1 Usaha	1,000,000	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	1 Usaha	1,000,000	
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	1 Dokumen	1,000,000	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	1 Usaha	1,000,000	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	1 Usaha	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	1,000,000	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	1,000,000	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan	1,000,000	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan	1,000,000	
3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Kabupaten Pemalang	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	1 Unit Usaha	1,000,000	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Kabupaten Pemalang	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	1 Unit Usaha	1,000,000	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kabupaten Pemalang	-	-	**5,000,000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Kabupaten Pemalang	-	-	**5,000,000**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**5,000,000**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**5,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	1,000,000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1,000,000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1,000,000	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Kabupaten Pemalang	-	-	**15,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Kabupaten Pemalang	-	-	**15,000,000**	
3.26.04.2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,000,000**	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,000,000**	
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	1,000,000	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	1,000,000	
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Kabupaten Pemalang	-	-	**14,000,000**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Kabupaten Pemalang	-	-	**14,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	1,000,000	Pengembangan Pendidikan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000	
3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur	Kabupaten Pemalang	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1 Unit	1,000,000	Penyediaan Infrastruktur	Kabupaten Pemalang	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1 Unit	1,000,000	
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1,000,000	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Insentif yang Diberikan	1 Pelaku Usaha	1,000,000	Fasilitasi pemberian insentif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Insentif yang Diberikan	1 Pelaku Usaha	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	1,000,000	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	1,000,000	
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kabupaten Pemalang	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	1,000,000	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kabupaten Pemalang	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	1,000,000	
3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	1,000,000	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	1,000,000	
3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	1,000,000	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	1,000,000	
3.26.04.2.02.0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah	Kabupaten Pemal	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	1 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Skema Insentif Daerah	Kabupaten Pemal	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	1 Dokumen	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
		ang					ang				
3.26.04.2.02.0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	1 Kebijakan	1,000,000	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	1 Kebijakan	1,000,000	
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,653,644,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,653,644,000**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,313,529,000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Kabupaten Pemalang	-	-	**1,313,529,000**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,134,935,000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,134,935,000	
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	10 Orang	1,000,000	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Pemalang	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	10 Orang	1,000,000	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Pemalang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	10 Orang	1,000,000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Pemalang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	10 Orang	1,000,000	
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	1,000,000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	174,594,000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	174,594,000	
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Kabupaten Pemalang	-	-	**340,115,000**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Kabupaten Pemalang	-	-	**340,115,000**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang	335,115,000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang	335,115,000	
3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	1,000,000	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	1,000,000	
3.26.05.2.02.0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan	1 Lembaga	1,000,000	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan	1 Lembaga	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
				Target	Rp.				Target	Rp.	
			legal					legal			
3.26.05.2.02.0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000	
3.26.05.2.02.0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000	
3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Mekanisme ini di tempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat dengan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.

Berdasarakan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak ada yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Pemalang.

Adapun Pokok – Pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pemalang yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Pemalang untuk tahun 2026 tertuang dalam tabel 2.16. dibawah ini.

Tabel 2.15. Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Komunitas Sosial Bhakti Masyarakat Desa Beluk, Kec. Belik , Kab. Pemalang	25,000,000
2	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Desa Sodong, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	60,000,000
3	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	26,000,000
4	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Rt. 04 Rw. 05 Dusun Kedawung Desa Sidorejo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	26,000,000
5	Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	Bukit Tangkeban Desa Nyalembeng Kec. Pulosari, Kab. Pemalang	200,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
6	Penyelenggaraan Event Olahraga-Futsal	Jl. Raya Sidorejo Km 03 Kab. Pemalang (Gor Smk Islam Nusantara Comal), Kab. Pemalang	15,000,000
7	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Kebagusan Kec. Ampelgading	35,000,000
8	Pelatihan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	21,000,000
9	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	25,000,000
10	Pelatihan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	21,000,000
11	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Pedurungan Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	25,000,000
12	Pelatihan Olahraga Prestasi	Kelurahan Kebondalem, Kab. Pemalang	50,000,000
13	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	25,000,000
14	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Sidorejo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	25,000,000
15	Penyelenggaraan Event Olahraga-Futsal	Turnamen Futsal Dan Volley Rt 001 Rw 001 Kel. Petarukan Kec. Petarukan Pemalang , Kab. Pemalang	100,000,000
16	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	25,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
17	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	25,000,000
18	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	25,000,000
19	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	25,000,000
20	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	25,000,000
21	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	25,000,000
22	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Dusun 03 Rt.002 Rw.003 Desa Ampelgading, Kab. Pemalang	35,000,000
23	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Gedung Mwc Nu Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	21,000,000
24	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	25,000,000
25	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	25,000,000
26	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Se Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	25,000,000
27	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Se Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	25,000,000
28	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kec. Moga, Kab. Pemalang	25,000,000
29	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Randudongkal, Kab. Pemalang	25,000,000
30	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Se Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	25,000,000
31	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Se Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	25,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berikut hasil Musrenbang atau Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Pemalang untuk tahun 2026 tertuang dalam tabel 2.17. dibawah ini.

Tabel 2.16. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN
1	Belik	Sikasur	Pelatihan Keolahragaan (Pembinaan/pelatihan Sepak Bola)	Desa Sikasur	1 Paket	30,000,000.00
2	Warungpring	Datar	Pelatihan Kerajinan Pembuatan Parsel dan Buket	Desa Datar	1 Paket	30,000,000.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila, dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 (sertaus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045.

Berdaulat, pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Maju, pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sesoail bagi selutuh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan, sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikanyang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran :

1. Sasaran pertama, Pendapat per Kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US$23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasisi inovasi secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen;

2. Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5 – 0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,377 – 0, 320. Sementara itu, ketimpsangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen;
3. Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkab penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Gloobal Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia;
4. Sasaran keempat adalah meningkatkatnmya daya saing suber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatiha, dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi, dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index)* menjadi 0,73 pada tahun 2045;
5. Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditujukan oleh menurunnya Intensitas Emini GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Gambaran cita-cita besar yang terdapat di dalam RPJPN 2025-2045, antara lain target pendapatan setara negara maju, kemiskinan 0 persen, ketimpangan yang berkurang, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), hingga nol emisi karbon (Net Zero Emission) menjadi pedoman untuk menyusun RPJMN 2025-2029. Pada tahap pertama RPJPN 2025-2045 atau periode RPJMN 2025-2029, akan dilakukan penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua dan ketiga ialah akselerasi transformasi, serta tahap ekspansi global. Upaya melalui berbagai tahapan tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja. Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil. Adapun dua poin penting lainnya berkaitan dengan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi. Untuk agenda penyusunan RPJMN 2025-2029, Bappenas sudah masuk bagian Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi yang ada di dalam RPJPN 2025-2045. Setelah memasuki bagian ini, Rancangan Teknokratik RPJMN akan diramu kembali ke dalam Rancangan Awal RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMN.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 difokuskan pada tujuh prioritas utama berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
   Pembangunan SDM menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan masa depan seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika global. Fokus diarahkan pada:
   - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.
   - Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
   - Percepatan penurunan prevalensi stunting dan peningkatan layanan kesehatan dasar.
   - Pengembangan talenta digital dan kepemudaan untuk menyambut bonus demografi.
2. Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi Industri
   Indonesia berupaya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) melalui transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan diversifikasi sumber pertumbuhan:
   - Penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif.
   - Pengembangan industri hilir untuk komoditas unggulan nasional (nikel, sawit, hasil laut, dan lainnya).
   - Peningkatan produktivitas UMKM dan integrasinya ke dalam rantai nilai global.
   - Penguatan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi digital.
3. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
   Pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membawa visi pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan:
   - Pengembangan IKN sebagai kota pintar dan ramah lingkungan.
   - Penguatan konektivitas antarwilayah, khususnya Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Peningkatan kualitas SDM lokal dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

4. Penguatan Ketahanan Iklim dan Transisi Energi
   Dalam menghadapi perubahan iklim global, arah kebijakan nasional mendorong pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan:
   - Peningkatan bauran energi terbarukan dan efisiensi energi.
   - Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan.
   - Restorasi lahan kritis, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
   - Peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana alam dan iklim ekstrem.
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
   Infrastruktur menjadi enabler utama pembangunan ekonomi dan pemerataan akses layanan publik:
   - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi).
   - Perluasan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi digital nasional.
   - Pengembangan transportasi multimoda dan logistik terpadu.
   - Akselerasi konektivitas desa, kawasan tertinggal, dan perbatasan.
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
   untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, reformasi birokrasi diarahkan pada:
   - Penyederhanaan struktur organisasi dan proses layanan publik.
   - Digitalisasi pemerintahan (e-government) dan integrasi sistem informasi lintas sektor.
   - Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja berbasis kinerja.
   - Penguatan pengawasan dan akuntabilitas publik.
7. Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
   Penguatan sistem perlindungan sosial menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial:
   - Perluasan cakupan dan efektivitas bantuan sosial adaptif dan berbasis data.
   - Pengembangan sistem jaminan sosial yang inklusif.
   - Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok rentan.
   - Peningkatan peran pemuda dan masyarakat sipil dalam pembangunan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kebijakan nasional yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, penguatan infrastruktur digital, dan pembangunan berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Disparpora perlu mengambil peran strategis dalam menyelaraskan program-program sektoral dengan prioritas nasional.

A. Bidang Pariwisata
   1. Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan
      - Menindaklanjuti arahan transformasi ekonomi dan transisi energi, Disparpora Pemalang dapat memperkuat pengembangan desa wisata, ekowisata, dan wisata berbasis budaya lokal.
      - Fokus pada pelestarian alam, pemanfaatan energi terbarukan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.
   2. Digitalisasi Promosi dan Layanan Pariwisata
      - Mendukung kebijakan infrastruktur digital dan reformasi birokrasi, Disparpora perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam promosi destinasi wisata, pemesanan layanan, dan pembuatan konten digital untuk memperluas jangkauan wisatawan.
   3. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata
      - Sejalan dengan arah kebijakan peningkatan SDM, pelatihan bagi pelaku usaha wisata, pemandu wisata, dan pengelola destinasi menjadi sangat penting, termasuk pelatihan hospitality, manajemen destinasi, dan keamanan wisata.

B. Bidang Kepemudaan
   1. Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Pemuda
      - Mendukung arah hilirisasi ekonomi dan ketahanan sosial-ekonomi, Disparpora dapat mendorong inkubasi bisnis kreatif, UMKM berbasis digital, dan pelatihan enterpreneurship untuk pemuda di berbagai sektor seperti kuliner, fesyen, dan konten digital.
   2. Pemberdayaan Organisasi dan Komunitas Kepemudaan
      - Memfasilitasi kegiatan positif dan produktif organisasi kepemudaan dalam pengembangan karakter, kepemimpinan, serta kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan lingkungan.
   3. Literasi Digital dan Talenta Muda
      - Menyesuaikan arah pengembangan talenta digital, program pelatihan digital marketing, desain grafis, produksi konten media sosial, dan literasi teknologi bagi pemuda perlu diperluas secara inklusif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

C. Bidang Olahraga

1. Pengembangan Sport Tourism dan Event Lokal
   - Sesuai dengan transformasi ekonomi dan penguatan pariwisata, Disparpora dapat mengembangkan kegiatan sport tourism seperti lomba lari, balap sepeda, atau kejuaraan daerah yang menarik wisatawan sekaligus membangkitkan ekonomi lokal.
2. Pembinaan Atlet Usia Dini dan Sekolah Olahraga
   - Mendukung pembangunan SDM unggul dengan melahirkan atlet-atlet berbakat melalui pelatihan, kejuaraan, dan peningkatan kualitas sarana olahraga di sekolah dan masyarakat.
3. Revitalisasi dan Penataan Sarana Olahraga Berbasis Lingkungan
   - Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan membangun sarana olahraga yang inklusif, ramah lingkungan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Melalui integrasi arah kebijakan nasional ke dalam strategi dan program kerja Disparpora Kabupaten Pemalang, diharapkan pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga tidak hanya berdampak lokal tetapi juga turut menyumbang pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan potensi daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat akan menjadi kunci dalam membangun Pemalang yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan visi besar: “Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang maju, untuk Menuju Indonesia Emas 2045.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Provinsi Jawa Tengah menetapkan 6 misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Misi 1: Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan SDM yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global.
2. Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.
3. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
4. Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Misi 5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal serta perlindungan hak dan kesejahteraan warga.
6. Misi 6: Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif serta mendorong pembiayaan pembangunan yang partisipatif.

Selanjutnya, dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, arah kebijakan dititikberatkan pada: "Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis."

Implementasi dan Kontribusi Disparpora Kabupaten Pemalang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut, Disparpora Kabupaten Pemalang mengambil peran strategis dalam memperkuat sektor-sektor pembangunan daerah melalui program dan kegiatan berbasis:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar (Selaras dengan Misi 1)
   - Pelatihan kepemudaan dan keolahragaan untuk membentuk generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
   - Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata melalui pelatihan hospitality, pengelolaan destinasi, dan pemanduan wisata.
2. Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pariwisata dan Ekraf (Selaras dengan Misi 2)
   - Mendorong pertumbuhan desa wisata berbasis potensi lokal dan budaya daerah.
   - Mengadakan event pariwisata dan olahraga sebagai penggerak ekonomi lokal, termasuk sport tourism dan festival budaya.
   - Fasilitasi promosi UMKM dan produk kreatif lokal yang mendukung sektor pariwisata.
3. Penguatan Tata Kelola dan Layanan Publik (Selaras dengan Misi 3)
   - Penerapan sistem digital untuk pelayanan publik, termasuk promosi wisata dan pendaftaran kegiatan.
   - Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program melalui kolaborasi lintas sektor.
4. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Wisata dan Olahraga (Selaras dengan Misi 4)
   - Pembangunan dan rehabilitasi sarana olahraga, taman publik, dan destinasi wisata berbasis komunitas.
   - Penataan kawasan wisata agar lebih representatif, aman, dan inklusif bagi wisatawan dan masyarakat.
5. Penguatan Budaya Lokal dan Stabilitas Sosial (Selaras dengan Misi 5)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Pelestarian seni dan budaya lokal melalui kegiatan festival dan pertunjukan budaya yang rutin.
- Meningkatkan peran pemuda sebagai agen pembangunan yang mempromosikan nilai toleransi dan kearifan lokal.

6. Mendorong Kolaborasi dan Iklim Usaha Sektor Pariwisata (Selaras dengan Misi 6)
   - Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dan komunitas dalam pengembangan destinasi dan promosi wisata.
   - Mendorong investasi swasta di sektor pariwisata lokal yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Dengan menyelaraskan seluruh program dan kebijakan dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dan RKPD 2026, Disparpora Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya melalui sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Peran ini diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Jawa Tengah sebagai provinsi yang maju dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

3.3. Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan turunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang mana menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Kebijakan dalam dokumen RKPD 2026 juga berpedoman pada kebijakan tahap I periode RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 yaitu “Pemalang BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”, yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Bersih: Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. Cakap: dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. Handal: dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh

https://jdih.pemalangkab.go.id/

unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. Mulya: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan misi "RHAPSODI" (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas) yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Resik : Mewujudkan lingkungan Hidup yang lestari didukung pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
2. HIJAU: Mewujudkan Pembangunan ekonomi hijau yang tangguh dan mandiri berbasis potensi lokal;
3. APIK: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan;
4. PEDULI: Memperkuat Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing;
5. SILATURAHMI: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang guyub, rukun, berkeadilan berlandaskan gotong royong dan toleransi;
6. ORGANISATORIS: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, mengayomi dan akuntabel;
7. DIGITALISASI: Mewujudkan transformasi digital dalaM rangka memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar;
8. IKHLAS: Mewujudkan kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan;

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Pemalang yang diarahkan untuk "Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia", yang di prioritaskan pada:

1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia;
2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan;
3. Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa;
5. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya pada pengelolaan sumberdaya air dan ke PU an.
6. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pemberian insentif pada pemilik sawah melalui akses pupuk murah, bibit berkualitas dan pendampingan untuk pasca panen.
7. Penguatan koperasi merah putih yang mampu menjadi mitra petani.
8. Mendorong BUMDES dan BUMDEsma dalam penguatan kemandirian pangan
9. Penguatan cadangan pangan dan penguatan keaneragaman bahan serta keamanan pangan.
10. Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.
11. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan kolaborasi pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana.
12. eningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pilah sampah dan pengelolaan kontrol landfiil TPA. Peningkatan pilah sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta, penguatan bank sampah
13. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang mudah diakses masyarakat, persiapan sekolah rakyat, sekolah garuda, memperkuat sekolah inklusi dan kesetaraan dalam mendorong harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah. Penyediaan lokasi untuk pembangunan SMA/SMK dalam rangka mengurangi blankspot (wilayah tanpa SMA/SMK).
14. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Program Makan Bergizi pada anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada penyakit tidak menular. Penyediaan ambulan gratis dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal. Peningkatan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan tingkat kelahiran yang direncanakan, usia perkawinan yang semakin matang.
15. Peningkatan budaya masyarakat yang berkolaborasi dengan pariwisata mampu mendorong perekonomian daerah. Penguatan dan pemberdayaan kelompok kelompok seni dan budaya serta pelestarian cagar budaya.
16. Peningkatan perlindungan sosial pada PPKS terutama pada PPKS yang terlantar, penguatan rumah singgah dalam penanganan PPKS. Penguatan data penduduk miskin sehingga

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mampu menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan.

17. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government, peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan budaya kerja.

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar pelaksanaan Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 sekaligus menjadi awal implementasi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Perubahan nomenklatur dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) membawa implikasi pada pergeseran urusan pemerintahan yang ditangani. Jika sebelumnya mencakup urusan pariwisata, pemuda, dan olahraga, maka mulai tahun 2025 urusan pemuda dan olahraga beralih, sedangkan Disparbud fokus pada urusan pariwisata dan kebudayaan.

Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 masih mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Renstra Disparpora Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026, sembari menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Hal ini dikarenakan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 dan Renstra Disparbud Tahun 2025–2029 belum disahkan pada saat penyusunan Renja Tahun 2026. Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun dengan tetap memperhatikan isu strategis, tantangan, serta potensi pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pemalang.

Adapun tujuan dan sasaran yang menjadi acuan penyusunan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kunjungan wisatawan		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10
2.		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	50
3.			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	%	10
4.		Meningkatnya tingkat hunian akomodasi	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	39,02
5.		Meningkatnya kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	0,73
6.		Meningkatnya perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	%	100
7.	Meningkatkan karakter dan kualitas pemuda yang berdaya saing		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,11
8.		Meningkatnya jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	33,88
9.		Meningkatnya jumlah pemuda yang menjadi wiirausaha pemula	Persentase wirausaha pemula	%	93,33
10.	Meningkatkan kualitas kesehatan, kebugaran dan prestasi pada bidang olahraga		Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	20,00
11.		Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada even	Medali	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
			olahraga tingkat regional/nasional		

Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2024

Dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 yang akan memasuki periode baru melalui dokumen RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Rencana penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Penyusunan dokumen RPJPD ini bertujuan untuk menghadirkan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah 20 tahun mendatang.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 serta memedomani dan memerhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2045;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan juga adalah dalam rangka menghadapi dinamika global dan nasional yang berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Pemalang tahun-tahun sebelumnya. Dinamika tersebut terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Hal tersebut menuntut respon mitigasi dan adaptasi yang cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini diperlukan percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan. Transformasi untuk merespon dinamika harus juga diseimbangkan dengan ketahanan sumber daya dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang. visi jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu ´“PEMALANG MULYA (MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)” dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Maju

   Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Kabupaten yang maju diartikan sebagai daerah yang berhasil mencapai tujuan pembangunan dilihat dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan dan menjadi tempat yang ideal bagi masyarakatnya untuk hidup serta pelayanan fasilitas publik yang baik, pelayanan pendidikan serta fasilitas kesehatan yang sudah sangat memadai. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang maju dimana hal ini akan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan inovasi.

B. Unggul

   Masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi, visioner serta memiliki pemikiran maju, optimistis, didukung semangat belajar dan berprestasi yang tinggi. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang unggul dimana hal ini akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

C. Lestari

   Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tamping lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten yang lestari merupakan komitmen untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan keunggulan dari sisi komoditas pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata, produk UMKM hingga inovasi. Prinsip yang ada berupa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dalam perwujudan pokok visi ini, Kabupaten Pemalang berkontribusi nyata pada target nasional untuk menarik investasi berkualitas ramah lingkungan, ramah sosial untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru, serta mencegah resiko kebencanaan dan krisis iklim. Selain itu, beberapa upaya lain untuk mewujudkan Pemalang yang lestari adalah dengan bergotong royong dengan para pihak lintas sektor dan lintas latar belakang untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab ekosistem penting yang ada di Kabupaten Pemalang. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang lestari dimana hal ini akan fokus pada pembangunan berwawasan lingkungan.

D. Berbudaya

Masyarakat Kabupaten Pemalang di tahun 2045 diharapkan merupakan Masyarakat yang berbudaya. Makna dari Masyarakat berbudaya antara lain, Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, tata kelola pemerintahan yang baik, bertindak terpuji, tidak melakukan kerusakan serta memegang teguh nilai-nilai agama, tradisi, kearifan dan budaya lokal. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi Kabupaten yang berbudaya dimana hal ini akan fokus pada pengembangan budaya, agama dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Pemalang. Pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pemerataan infrastruktur dan SDM yang Unggul serta pemantapan stabilitas ekonomi agro industri serta agro bisnis berbasis pengembangan Kawasan yang inovatif dan produktif menjadi core bisnis Kabupaten Pemalang di tahun 2025-2045.

Kabupaten Pemalang memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting sebagai bentuk upaya mewujudkan ekonomi Kabupaten Pemalang yang berdaya saing. Arah kebijakan Pembangunan pariwisata Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

antara lain meliputi: 1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, 2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital, 3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata, 4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas,dan olahraga berbasis digital, 5) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, 6) penguatan integrasi antardestinasi wisata, 7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, serta 8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, antara lain :

Tabel 3.2 Tabel Realisasi dan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045

No	Indikator Sasaran Pokok / Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi				Target Kabupaten			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Baseline 2025 Kab	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	%	-	12	10	13	15	20	22	24
2	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	84.856	177.321	84.069	88.559	101.843	122.212	134.433	147.876

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 (dua) Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah. Rumus perhitungan : Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Pemalang, di targetkan di periode I tahun 2025-2029 sebanyak 15 orang, periode II tahun 2030-2034 sebanyak 20 orang, periode III tahun 2035-2039 sebanyak 22 orang, periode IV tahun 2040-2045 sebanyak 24 orang.

Jumlah Pengunjung Tempat Bersejaran atau Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Seperti: museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya (ini DO jumlah pengunjung tempat bersejarah), dengan rumus perhitungan : Jumlah Pengunjung

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tempat Bersejaran di Kabupaten Pemalang. Dasar perhitungan berdasarkan pendekatan pertahapan pembangunan 5 tahun. Dengan data baseline tahun 2025 diproyeksikan sebesar 5% dari realisasi tahun 2023 lokus atau tempat bersejarah di Kabupaten Pemalang, antara lain : Situs Plawangan; Situs Watu Tumpeng; Ndalem Notonegoro; Makam Syech Maulana Samsudin; Makam Syech Pandan Jati; Makam Pangeran Benowo; Situs Watulumpang). 5 tahun pertama pengembangan sebesar 15%, 5 tahun kedua percepatan sebesar 20%, 5 tahun ketiga pemantauan sebesar 10%, 5 tahun keempat perwujudkan sebesar 10%. Dalam merumuskan indikator Jumlah Pengunjung Tempat Bersejaran, Disparpora bekerjasama dengan Dindikbud Kabupaten Pemalang.

Sejumlah strategi pengembangan destinasi pariwisata terus diimplementasikan, di antaranya pengembangan perwilayahan, atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, masyarakat, dan investasi. untuk mempermudah pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas berupa prasarana transportasi, sarana transportasi, dan sistem transportasi. Pada pengembangan amenitas destinasi pariwisata, diperlukan pembangunan prasarana umum, penyediaan fasilitas umum, dan pembangunan fasilitas pariwisata. Bukan hanya fasilitas dan aksesibilitas, pengembangan masyarakat juga dianggap penting dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata. Pengembangan masyarakat tersebut meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang .

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiananya akan dijabarkan pada program, kegiatan. Program kegiatan prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung dalam capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

I. Urusan Kepemudaan dan Olahraga :
   1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
   2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
   3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

II. Urusan Pariwisata
   1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
   2. Program pemasaran pariwisata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

III. Urusan Penunjang :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA					100 %	**16,867,674,550**	DAU				**16,867,674,550**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					100 %	**4,219,396,000**	DAU				**4,219,396,000**
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			Kabupaten Pemalang		100 %	**4,219,396,000**	DAU				**4,219,396,000**
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**853,907,000**	DAU		-	-	**853,907,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**353,820,000**	DAU		-	-	**353,820,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	348,820,000	DAU		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 Orang	348,820,000
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kabupaten Pemalang	20 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	20 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	20 Orang	1,000,000
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	20 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1,000,000
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**500,087,000**	DAU		-	-	**500,087,000**
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	1 Organisasi	100 %	499,087,000	DAU		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	499,087,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	20 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	1,000,000
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**2,908,489,000**	DAU		-	-	**2,908,489,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**327,000,000**	DAU		-	-	**327,000,000**
2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	325,000,000	DAU		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	325,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Pemalang	1 0	100 %	1,000,000	DAU		0	1 0	1,000,000
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**776,000,000**	DAU		-	-	**776,000,000**
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 0	100 %	775,000,000	DAU		0	1 0	775,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10 Orang	1,000,000
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**703,000,000**	DAU		-	-	**703,000,000**
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10 Orang	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Terlaksananya Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kabupaten Pemalang	20 Orang	100 %	200,000,000	DAU		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	200,000,000
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kabupaten Pemalang	10 Pelatda	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 Pelatda	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	20 Orang	100 %	500,000,000	DAU		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20 Orang	500,000,000
2.19.03.2.03.0010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Terlaksananya pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	1,000,000
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**-**		Kabupaten Pemalang	**-**	100 %	**898,489,000**	DAU		**-**	**-**	**898,489,000**
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar	Terlaksananya Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
		nasional								nasional		
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	897,489,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	897,489,000
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**-**		Kabupaten Pemalang	**-**	100 %	**204,000,000**	DAU		**-**	**-**	**204,000,000**
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan	Terlaksananya Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan	1 Laporan	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
		Olahraga Rekreasi								Olahraga Rekreasi		
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	1,000,000
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kabupaten Pemalang	1 Lembaga	100 %	200,000,000	DAU		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	200,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**457,000,000**	DAU		-	-	**457,000,000**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**457,000,000**	DAU		-	-	**457,000,000**
2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1,000,000
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	1 Organisasi	100 %	450,000,000	DAU		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	450,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	1,000,000
2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Terlaksananya Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 Unit	1,000,000
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1,000,000
2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatk	Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatk	1 Unit	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
		an								an		
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1,000,000
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kabupaten Pemalang	1 Organisasi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1,000,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			Kabupaten Pemal		100 %	**12,648,278,550**	DAU				**12,648,278,550**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
				ang								
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			Kabupaten Pemalang		100 %	**12,648,278,550**	DAU				**12,648,278,550**
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**9,645,278,550**	DAU		-	-	**9,645,278,550**
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**59,954,000**	DAU		-	-	**59,954,000**
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	2 Dokumen	100 %	5,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	5,000,000	DAU		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	2 Dokumen	100 %	5,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	2,000,000	DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	2 Dokumen	100 %	2,240,000	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,240,000
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pemalang	3 Laporan	100 %	8,434,000	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8,434,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	4 Laporan	100 %	32,280,000	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	32,280,000
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**7,010,203,000**	DAU		-	-	**7,010,203,000**
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pemalang	49 Orang /bulan	100 %	6,999,833,000	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang /bulan	6,999,833,000
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	9,370,000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9,370,000
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**1,000,000**	DAU		-	-	**1,000,000**
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**312,261,550**	DAU		-	-	**312,261,550**
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	1 Paket	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	12 Paket	100 %	85,379,100	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85,379,100
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	4 Paket	100 %	24,370,000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,370,000
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pemalang	50 Laporan	100 %	201,512,450	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	201,512,450

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
		SKPD								SKPD		
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**		Kabupaten Pemalang	**-**	100 %	**24,350,000**	DAU		**-**	**-**	**24,350,000**
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kabupaten Pemalang	60 Unit	100 %	19,500,000	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	19,500,000
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	2 Unit	100 %	4,850,000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4,850,000
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**		Kabupaten Pemalang	**-**	100 %	**2,094,385,000**	DAU		**-**	**-**	**2,094,385,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pemalang	12 Laporan	100 %	620,658,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	620,658,000
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pemalang	12 Laporan	100 %	39,400,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39,400,000
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pemalang	12 Laporan	100 %	1,434,327,000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,434,327,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**143,125,000**	DAU		-	-	**143,125,000**
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pemalang	30 Unit	100 %	94,625,000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	94,625,000
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	48,500,000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48,500,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**1,329,356,000**	DAU		-	-	**1,329,356,000**
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**5,000,000**	DAU		-	-	**5,000,000**
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Lokasi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1,000,000
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Lokasi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	1 Orang	1,000,000
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**6,000,000**	DAU		-	-	**6,000,000**
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	1,000,000
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Lokasi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Orang	1,000,000
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**1,311,356,000**	DAU		-	-	**1,311,356,000**
3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Lokasi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,000,000
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	200,000,000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	200,000,000
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,105,356,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,105,356,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Lokasi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1,000,000
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	1,000,000
3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**7,000,000**	DAU		-	-	**7,000,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Kabupaten Pemalang	1 Usaha Pariwisata	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	1 Usaha Pariwisata	1,000,000
3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Kabupaten Pemalang	1 Usaha	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	1 Usaha	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	1 Dokumen	1,000,000
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Terlaksananya Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kabupaten Pemalang	1 Usaha	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	1 Usaha	1,000,000
3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Terlaksananya Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan	1,000,000
3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Kabupaten Pemalang	1 Unit Usaha	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	1 Unit Usaha	1,000,000
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**5,000,000**	DAU		-	-	**5,000,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**5,000,000**	DAU		-	-	**5,000,000**
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1,000,000
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pemalang	1 Kegiatan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	1,000,000
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pemalang	1 Promosi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**15,000,000**	DAU		-	-	**15,000,000**
3.26.04.2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**1,000,000**	DAU		-	-	**1,000,000**
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Terlaksananya Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**14,000,000**	DAU		-	-	**14,000,000**
3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	1,000,000
3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000
3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur	Kabupaten Pemalang	1 Unit	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	1 Unit	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1,000,000
3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1,000,000
3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Terlaksananya Fasilitasi pemberian insentif	Kabupaten Pemalang	1 Pelaku Usaha	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Insentif yang Diberikan	1 Pelaku Usaha	1,000,000
3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Pemalang	1 Lembaga	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Terlaksananya Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kabupaten Pemalang	1 Kegiatan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	1,000,000
3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	1,000,000
3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Terlaksananya Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	1 Promosi	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi	1,000,000
3.26.04.2.02.0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	Terlaksananya Penyusunan Skema Insentif Daerah	Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	100 %	1,000,000	DAU		Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	1 Dokumen	1,000,000
3.26.04.2.02.0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Terlaksananya Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Pemalang	1 Kebijakan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	1 Kebijakan	1,000,000
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**1,653,644,000**	DAU		-	-	**1,653,644,000**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**1,313,529,000**	DAU		-	-	**1,313,529,000**
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,134,935,000	DAU		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,134,935,000
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	10 Orang	1,000,000
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	10 Orang	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	1,000,000
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	174,594,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	174,594,000
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	-		Kabupaten Pemalang	-	100 %	**340,115,000**	DAU		-	-	**340,115,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	335,115,000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang	335,115,000
3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kabupaten Pemalang	1 Laporan	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	1,000,000
3.26.05.2.02.0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah	Terlaksananya Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	1 Lembaga	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah	1 Lembaga	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
		dan legal								dan legal		
3.26.05.2.02.0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Tolok Ukur	Target	
3.26.05.2.02.0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000
3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pemalang	10 Orang	100 %	1,000,000	DAU		Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Selain itu Renja Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran maka akan dilakukan penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 juga merupakan alat perencanaan untuk melakukan:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi daerah;
2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian

https://jdih.pemalangkab.go.id/

prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026, yang lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinegis dan berkelanjutan sekaligus mencapai Visi Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2025-2029 yaitu: ***"Pemalang BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"***.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.

Pemalang, 4 September 2025
KEPALA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

DIAN IKA SISWANTI, S.Si.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750227 199903 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun."

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Proses penyusunan renja perangkat daerah dimulai dengan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah hingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan dari review

https://jdih.pemalangkab.go.id/

hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu dan Renstra perangkat daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra perangkat daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja perangkat daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. Untuk diketahui bahwa Rencana Kerja Dinas kesehatan Tahun 2026 merupakan tahun pertama penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Selain itu Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk program prioritas dan target pembangunan nasional dan program prioritas dan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 disusun berdasarkan kerangka kebijakan guna mewujudkan Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD yaitu: "**Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya**". Arah pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 yaitu "Peduli" meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat", yang tujuan terkait urusan kesehatan adalah meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Mendasari RPJMD Kabupaten Pemalang 2025-2029 tema yang diangkat dalam RKPD 2026 adalah **" Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia"**.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagai perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sesuai arah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan ini akan menjadi dasar dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berlandaskan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 2);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk tahun 2026 yang disusun mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (didalam Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk jangka waktu lima tahun ke depan). Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Kesehatan dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Atas dasar itu maka Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang ke dalam rencana operasional tahunan yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Memelihara sinergi dan konsistensi antara tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
3. Menjadi pedoman atau acuan resmi dalam pengusulan dan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya, serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
5. Mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib kesehatan serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimum Kesehatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika dokumen Renja sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
   Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
   Bab ini memuat evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
   Bab ini berisi tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
   Bab ini memuat kerangka pendanaan tahun 2026 disertai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Bab V Penutup

   Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut perangkat daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebanyak 3 sasaran, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan dan meningkatnya kualitas kinerja dan urusan pemerintahan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dilakukan dengan pengukuran kinerja sasaran strategis dan program Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Untuk pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi dasar pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Uraian pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,80	74,23	100,58

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	45	49,96	89
		Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	6	5,94	101
		Persentase Balita Stunting (%)	8	10,33	70,87
		Indeks Keluarga Sehat (Indeks)	0,23	0,24	104,35
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89	89,09	100,10
		Nilai Sakip Dinkes (Nilai)	63	63,61	100,97

Dari tabel di atas terlihat, 3 sasaran strategis diukur dengan 7 indikator kinerja. Untuk capaian Tahun 2024 terdapat 5 indikator kinerja dengan realisasi melampaui target dengan capaian ≥100%, yaitu Usia Harapan Hidup (100,58%), Angka Kematian Bayi (101%), Indeks Keluarga Sehat (104,35%), Indeks Kepuasan Masyarakat (100,1%) dan Nilai Sakip Dinkes (100,97%). Sedangkan 2 indikator kinerja lainnya dengan realisasi dibawah target dengan capain <100%, yaitu Angka Kematian Ibu (89%) dan Persentase Balita Stunting (70,87%).

Guna mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang maka diperlukan pelaksanaan program-program yang sudah ditentukan untuk mendukung pencapaian target. Program-program tersebut dilaksanakan oleh jajaran sekretariat, bidang, unit pelaksana teknis dan unit organisasi yang ada pada dinas Kesehatan. Adapun program-program yang diselenggarakan adalah:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan;
3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman;
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, ke-5 program tersebut yang diukur dengan 18 indikator kinerja program. Pengukuran capaian kinerja program dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit (per 1.000 penduduk)	0,77	0,73	94,81
		Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama (%)	40	100	250
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)	100	99,96	99,96
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	96,15	96,15
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	98,23	98,23
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	99,82	99,82
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	98,28	98,28
		Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Persentase orang terduga tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	100	94,55	94,55
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk)	198	326	164,65
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian, alkes dan PIRT yang memenuhi standar (%)	78	100	128,21
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Dinas Kesehatan (nilai)	63	63,61	100,97

Dari tabel di atas terlihat, 5 program yang mendukung urusan Kesehatan diukur dengan 18 indikator kinerja. Untuk capaian Tahun 2024, terdapat 10 indikator kinerja program dengan persentase capaiannya ≥100%, antara lain Persentase rumah sakit rujukan yg terakreditasi minimal strata utama (250%), Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (100%), Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (100%), Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (100%), Persentase penderita diabetes melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (100%), Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (100%), Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (100%), Rasio tenaga kesehatan (164,65%), Persentase sarana kefarmasian, alkes dan PIRT yang memenuhi standar (128,21%), Cakupan Desa Siaga Aktif (100%) dan Nilai Sakip Dinas Kesehatan (100,97%).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dan 8 indikator kinerja program lainnya <100%, yaitu Rasio daya tampung rumah sakit (94,81%), Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (99,96%), Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (96,15%), Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (98,23%), Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (99,82%), Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (98,28%) dan Persentase orang terduga tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (94,55%)

Dalam upaya untuk evaluasi kinerja keuangan selanjutnya dilakukan penilaian pengukuran kinerja keuangan. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan realisasi/ penyerapan dengan pagu anggarannya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat penyerapan/ realisasi anggaran dari masing-masing capaian sasaran dan program.

Berikut ini adalah capaian kinerja keuangan berupa target dan realisasi anggaran Tahun 2024 berdasarkan program sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2024 berdasarkan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Program	Tahun 2024		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	410.662.001.180	375.077.496.170	91,33
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.952.297.500	1.753.243.678	89,80
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	515.631.000	501.246.320	97,21
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.672.749.000	441.394.756	26,39
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	125.494.638.233	114.274.974.193	91,06
	JUMLAH	**540.297.316.913**	**492.048.355.117**	**91,07**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari tabel diatas terlihat, capaian kinerja keuangan/ tingkat penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 berdasarkan program sebesar 91,07%. Terkait evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	DINAS KESEHATAN KAB. PEMALANG									
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai Sakip Dinas Kesehatan (nilai)**	**59**	**61.70**	**58**	**63**	**109**	**59**	**0**	**0**
2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	2	2	100	3	0	0
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	2	3	3	100	2	0	0
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	2	0	0	0	2	0	0
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun-an Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	2	3	3	100	2	1	50
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	2	2	2	2	100	2	1	50
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	1	1	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**20**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1450	1450	1450	1450	100	1450	1450	50
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	2	2	2	2	100	2	0	0
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	19	19	19	19	100	19	9	50
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**0**
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	2	2	2	100	2	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1	**1**	1	1	100	1	0	0
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4	4	4	4	100	4	0	0
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	2	2	100	2	0	0
07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	2	1	2	2	100	2	0	0
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah urusan perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan (unit)	1	1	0	0	100	1	0	0
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1	1	1	1	100	2	0	0
2.08	**KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	**1**	1	1	100	1	0	0
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	**1**	1	1	100	1	0	0
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	**1**	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
01	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	7	7	7	7	100	7	0	0
02	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	5	5	5	5	100	5	0	0
05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	10	10	0	0	100	1	0	0
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	35	8	8	100	1	0	0
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	1	1	1	100	1	0	0
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	1	1	1	100	1	0	0
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)**	**100**	**93,84**	**100**	**99,96**	**99,96**	**100**	**64,98**	**64,98**
		Persentase ibu bersalin mendapa-kan pelayanan persalinan (%)	**100**	**99,45**	**100**	**96,15**	**96,15**	**100**	**46,86**	**46,86**
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	**100**	**111,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,09**	**50,09**
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	**100**	**110,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**41,96**	**41,96**
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	**100**	**83,57**	**100**	**100**	**100**	**100**	**41,42**	**41,42**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	92,46	100	98,23	98,23	100	48,08	48,08
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrin-ing kesehatan sesuai standar (%)	100	60,01	100	99,82	99,82	100	50,00	50,00
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	93,08	100	98,28	98,28	100	49,69	49,69
		Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	96,04	100	100	100	100	50,93	50,93
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	94,13	100	100	100	100	76,01	76,01
		Persentase orang terduga tuberkulosis (TB) mendapat kan pelayanan TB sesuai standar (%)	100	72,86	100	100	100	100	50,26	50,26
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat kan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	99,16	100	100	100	100	45,16	45,16
		Rasio daya tampung rumah sakit (per 1.000 penduduk)	0.78	0,77	0.77	0,73	95	0.78	0.73	94
		Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama (%)	50	88,89	40	100	250	40	100	250
2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasyankes pemerintah sesuai standar (%)	80	82	80	82	105	80	0	0
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (%)	100	100	100	100	100	100	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	0	1	1	100	1	0	0
08	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar (unit)	1	0	0	0	0	1	0	0
09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (unit)	1	2	2	2	100	0	0	0
10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (unit)	1	0	0	0	0	1	0	0
16	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (paket)	1	0	10	10	100	20	0	0
18	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (paket)	150	0	150	150	100	150	0	0
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan keluarga (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan gizi (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lingkungan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan kerja dan olah raga (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan promosi kesehatan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM (%)	**31**	**27**	**29**	**53**	**183**	**31**	**53**	**171**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan keswa (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan surveilans kesehatan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan imunisasi (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/ kelurahan yang ditanggulangi <24 jam (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Cakupan desa /kelurahan Universal Child Immunization (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan perorangan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan tradisional komplementer (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan matra dan gawat darurat (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	**87**	**97**	**87**	**99**	**114**	**88**	**100**	**100**
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi (%)	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
		Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi (%)	**100**	**100**	**88**	**100**	**114**	**88**	**100**	**100**
		Persentase Tingkat Keterisian Tempat Tidur / BOR RSUD (%)	**62**	**64**	**65**	**67**	**103**	**66**	**0**	**0**
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	21654	24461	21757	21.748	99,96	21654	14.070	64,98
02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	20669	21980	20768	19.969	96,15	20669	9.685	46,86
03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	19685	22157	19779	19.779	100,00	19685	9.861	50,09
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	96189	106791	96539	77.639	100,00	96189	40.361	41,96
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	193587	179536	196463	195.700	99,61	193587	80.184	41,42
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	804093	746442	805811	791.633	98,23	804093	386.623	48,08
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	190516	197967	185231	184.889	99,82	190516	95.258	50,00
08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	138,847	128280	138359	135.979	98,28	138,847	68.997	49,69
09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	18,699	17826	18633	18.633	100,00	18,699	9.523	50,93
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	1,159	1090	1158	1.158	100,00	1,159	881	76,01

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	15,960	11790	15958	15.089	94,55	15,960	8.021	50,26
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	33,403	31516	33333	28.860	86,58	33,403	15.085	45,16
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	100	100	100	100	100	100	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	1	0	0
24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (orang)	100	100	100	100	100	100	0	0
28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (paket)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kab/Kota (unit)	12	12	12	12	100	25	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan RS Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (unit)	1	1	1	1	100	1	1	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1	0	1	1	100	1	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4300	0	4300	4300	100	4308	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	0	100	100	100	100	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3	0	3	3	100	3	0	0
2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan informasi kesehatan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dokumen)		1	1	1	100	1	0	0
2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota**	**Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (unit)	12	12	12	12	100	12	0	0
02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (unit)	5	5	5	5	100	5	0	0
03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (unit)	2	2	2	2	100	2	0	0
04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
1.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk)**	**200**	**290**	**198**	**326**	**165**	**199**	**0**	**0**
2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan di fasyankes yang memenuhi persyaratan peizinan praktik Tenaga Kesehatan (%)**	**100**	**96**	**97**	**97**	**100**	**98**	**0**	**0**
01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Nakes serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendaya gunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/ Kota**	**Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)**	**100**	**100**	**95**	**95**	**100**	**100**	**0**	**0**
01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (orang)	10	10	10	10	100	10	0	0
03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/ Kota**	**Persentase tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi (%)**	**90**	**86**	**88**	**88**	**100**	**90**	**0**	**0**
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompe-tensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (orang)	10	10	10	10	100	10	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
1.02.04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase sarana kefarmasian, alkes dan PIRT yang memenuhi standar (%)**	**80**	**100**	**80**	**100**	**125**	**80**	**100**	**0**
2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase sarana apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Peng awasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehat an, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.03	**Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomo P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase sarana PIRT memenuhi syarat keamanan pangan (%)**	**70**	**66**	**68**	**68**	**100**	**70**	**0**	**0**
01	Pengendalian dan Pengawas an serta Tindak Lanjut Peng awasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yg dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.06	**Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase produk makanan minuman PIRT yang diperiksa memenuhi syarat keamanan pangan (%)**	**80**	**100**	**80**	**100**	**125**	**80**	**0**	**0**
01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (unit)	12	12	12	12	100	12	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
1.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Cakupan Desa Siaga Aktif (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk kesehatan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (dokumen)	1		1	1	100	1	0	0
2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)**	**80**	**67**	**70**	**70**	**100**	**75**	**0**	**0**
01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Posyandu aktif (%)**	**65**	**55**	**55**	**55**	**100**	**60**	**0**	**0**
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	1	1	100	1	0	0
	RSUD dr. M. ASHARI									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**									
06	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1	0	0	0	0	1	0	0
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (unit)	10	10	11	11	100	10	0	0
18	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan(paket)	5	**5**	5	5	100	5	0	0
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS BANYUMUDAL									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1082	1082	1082	1404	129	1072	509	49
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	9853	9853	9853	9318	94	9579	958	10
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	39955	39955	39955	32546	81	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	8905	8905	8905	8905	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	57	57	57	80	140	57	28	49
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	793	793	793	1099	138	790	388	48
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	0	0	0	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	10	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	5	0	0	0	0	5	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
45	Pengelolaan pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen Pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS WARUNGPRING									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	657	657	657	722	110	651	342	49
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	2348	2348	2348	3090	132	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	5982	5982	5982	7395	124	5817	2953	49
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	24256	24256	24256	21891	90	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5406	5406	5406	5406	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
		Standar (orang)								
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	35	35	35	133	380	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	481	481	481	251	52	480	238	48
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	919	919	919	919	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	0	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	10	10	10	100	10	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS PULOSARI									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1055	1055	941	1055	112	933	470	49
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	9267	9267	8575	9267	108	8339	4291	48
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	31434	31434	34774	31434	90	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7750	7750	7750	7750	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	120	120	50	120	240	0	0	0
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1234	1234	1234	1234	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
24	Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1	0	0	0	0	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	0	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	10	10	10	100	10	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS BELIK									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1774	1774	1774	1805	102	1758	895	48
02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1678	1678	1678	1684	101	1678	873	47
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	16162	16162	16162	15289	95	15715	8531	50
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	14606	14606	14606	14606	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	94	94	94	42	45	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1300	1300	1300	409	32	1296	648	49
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	2342	2342	2342	2342	100	2343	1156	48
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	10	10	100	10	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS WATUKUMPUL									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	497	497	497	691	139	497	249	49
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1778	1778	1778	2335	131	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4528	4528	4528	4761	105	4402	2264	50
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	18363	18363	18363	15211	83	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4092	4092	4092	4092	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	26	26	26	48	185	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	364	364	364	39	11	363	180	49
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	804	804	804	804	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	0	0	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	10	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	0	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS CIKADU									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	605	605	605	748	124	599	302	50
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	2162	2162	2162	3385	156	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	5508	5508	5508	5054	92	5356	2741	49
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	22335	22335	22335	18763	84	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4978	4978	4978	4978	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	32	32	32	21	66	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	443	443	443	163	37	441	221	49
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	808	808	808	808	100	0	0	0
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelol-aan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	10	10	10	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	0	0	0	100	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS KEBANDARAN									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	472	472	472	495	105	472	434	49
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1689	1689	1689	2229	132	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	4303	4303	4303	3542	82	4303	2284	52

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
		Standar (orang)								
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	17450	17450	17450	12342	71	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3889	3889	3889	3889	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	25	25	25	46	184	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	346	346	346	108	32	354	173	50
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	0	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	0	0	0	100	0	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS JATIROYOM									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	447	447	447	493	110	447	224	50

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1598	1598	1598	2006	126	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4070	4070	4070	3512	86	4070	2030	50
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	16505	16505	16505	15502	94	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3678	3678	3678	3678	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	24	24	24	51	212	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	327	327	327	291	89	327	614	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	752	752	752	752	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	10	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	0	0	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS BANTARBOLANG									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1212	1212	1212	1333	110	1201	660	50
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4334	4334	4334	6161	142	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	11042	11042	11042	9954	90	10738	6210	52
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	44778	44778	44778	42772	96	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	9979	9979	9979	9979	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	64	64	64	42	66	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	888	888	888	362	22	885	434	49
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1687	1687	1687	1687	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	0	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	0	0	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS RANDUDONGKAL									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	898	898	898	862	96	890	410	48
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3211	3211	3211	3666	114	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	8179	8179	8179	6252	76	7955	4087	49
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	33168	33168	33168	7392	22	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7392	7392	7392	7392	100	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	658	658	658	594	90	656	329	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1312	1312	1312	1312	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	0	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	0	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	0	0	0	100	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	0	0	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS KALIMAS									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	744	744	744	779	105	737	382	51
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	6778	6778	6778	5841	86	6592	3342	48
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	6125	6125	6125	6125	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	39	39	39	65	167	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	545	545	545	122	22	543	301	53
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1122	1122	1122	1122	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	1	10	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	1	0	0	0	0	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS PADURAKSA									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	804	804	804	826	103	796	402	50
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	2874	2874	2874	3422	119	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7321	7321	7321	6744	92	7117	4037	52
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	29687	29687	29687	29687	100	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	6616	6616	6616	6616	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	43	43	43	94	219	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	589	589	589	223	38	58	244	48
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1242	1242	1242	1242	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	10	10	100	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
	PUSKESMAS MULYOHARJO									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1244	1244	1244	1180	95	1232	620	49
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4446	4446	4446	4448	100	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	11327	11327	11327	12684	112	11013	5584	48

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	45933	45933	45933	42321	90	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	10237	10237	10237	10237	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	66	66	66	42	92	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	911	911	911	1508	166	908	459	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1741	1741	1741	1741	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	1	10	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	0	0	0	100	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS KEBONDALEM									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	947	947	947	1237	131	938	5114	51
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3387	3387	3387	4792	141	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	8628	8628	8628	8317	96	8389	8314	50
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	34989	34989	34989	33521	96	34845	1774	49
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7798	7798	7798	7798	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	50	50	50	274	548	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	694	694	694	1785	257	692	351	51
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	1401	1401	1401	1401	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	Risiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar (orang)								
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
	PUSKESMAS BANJARDAWA									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	777	777	777	812	105	777	355	49
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	2777	2777	2777	4197	151	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7075	7075	7075	8531	121	7075	3505	49
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	28689	28689	28689	27535	96	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	6394	6394	6394	6394	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	41	41	41	226	551	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	569	569	569	1651	290	569	301	52
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1204	1204	1204	1204	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (dokumen)	1	0	0	0	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	10	10	100	10	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	1	0	0	0	0	1	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS KABUNAN									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	848	848	848	1015	120	840	424	50
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3030	3030	3030	5236	173	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7720	7720	7720	6463	84	7507	3556	48
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	31306	31306	31306	29653	95	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	6977	6977	6977	6977	100	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	621	621	621	320	52	619	310	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1277	1277	1277	1277	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	Kesehatan	Promosi Kesehatan (dokumen)								
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	1	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	1	10	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS JEBED									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1106	1106	1106	1212	110	1096	541	49
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3955	3955	3955	5727	145	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	10075	10075	10075	8619	95	9795	5109	52
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	40855	40855	40855	40410	99	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	9105	9105	9105	9105	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	59	59	59	226	383	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	811	811	811	274	34	808	406	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1593	1593	1593	1593	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	1	1	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS PETARUKAN									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	819	819	819	954	116	811	409	50
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	2928	2928	2928	4085	139	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7460	7460	7460	6488	87	7253	3832	50
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	30249	30249	30249	28621	95	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	6741	6741	6741	6741	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	43	43	43	188	157	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	600	600	600	84	14	598	299	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1243	1243	1243	1243	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelol-aan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	1	1	10	10	100	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	1	0	0	0	0	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
	PUSKESMAS KARANGASEM									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	621	621	621	1284	200	615	310	50
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	5652	5652	5652	8463	149	5496	2826	50
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	22920	22920	22920	36721	160	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	5108	5108	5108	5108	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	33	33	33	154	466	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	455	455	455	180	40	45	530	51
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	umlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1006	1006	1006	1006	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	10	0	0	0	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS KLAREYAN									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1046	1046	1046	954	91	1037	5230	50
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3741	3741	3741	4150	111	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	9531	9531	9531	5817	61	9267	8642	48
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	55	55	55	78	142	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	767	767	767	286	37	764	364	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1489	1489	1489	1489	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	1	0	0	0	0	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	1	0	0	0	0	0	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS LOSARI									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1119	1119	1119	1081	97	1109	5610	50
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4002	4002	4002	5081	127	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	10197	10197	10197	10197	100	9915	5204	51
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	41348	41348	41348	39879	96	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	9215	9215	9215	9215	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	59	59	59	229	388	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	820	820	820	464	56	817	410	50
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	0	0	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	0	0	0	100	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
	PUSKESMAS PURWOHARJO									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	938	938	938	888	95	929	465	49
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	3352	3352	3352	3952	85	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	8540	8540	8540	7211	84	8303	4290	51

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	34632	34632	34632	29876	86	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	7718	7718	7718	7718	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	50	50	50	358	716	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	687	687	687	377	55	685	344	50
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1405	1405	1405	1405	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	0	0	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	1	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	0	0	0	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS SARWODADI									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	561	561	561	521	92	555	282	50
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	5106	5106	5106	3881	76	4965	2618	52
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	20706	20706	20706	18547	90	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4615	4615	4615	4615	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	30	30	30	30	100	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	411	411	411	273	66	411	206	50
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (orang)	10	10	0	0	0	0	0	0
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan kesehatan malaria (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS ROWOSARI									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	456	456	456	501	109	553	273	49
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	5088	5088	5088	3898	76	4947	2544	5
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	20632	20632	20632	19421	89	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4598	4598	4598	4598	100	0	0	0
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	30	30	30	82	273	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	409	409	409	451	110	408	206	50
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (orang)	1	1	1	1	100	0	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
39	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan (paket)	1	1	1	1	100	0	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	10	10	100	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
44	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
	PUSKESMAS MOJO									
1.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**									
2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1141	1141	1141	1499	131	1130	0	0
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	4080	4080	4080	4533	111	0	0	0
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	10394	10394	10394	4619	44	10106	5142	48
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	42147	42147	42147	41362	98	0	0	0
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	9393	9393	9393	9393	100	0	0	0
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	836	836	836	271	32	0	0	0
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	1524	1524	1524	1524	100	0	0	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)=(7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(10/4)*
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (dokumen)	1	1	1	1	100	1	0	0
41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10	10	10	10	100	0	0	0
43	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (dokumen)	1	0	0	0	0	1	0	0
2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dokumen)	1	1	1	1	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang didasarkan atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja program yang didalamnya mencakup indikator kinerja kunci bidang kesehatan sebagai berikut:

2.2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Definisi operasional Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun hidup yang akan dijalani/ ditempuh oleh seseorang sejak lahir sampai pada waktu tertentu saat ia meninggal. Untuk diketahui bahwa Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang & sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Upaya peningkatan Usia Harapan Hidup di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Merujuk data BPS Provinsi Jawa Tengah merujuk metode baru terkait data UHH di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah sebesar 74,23 Tahun.

Gambar 2.1 Usia Harapan Hidup
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

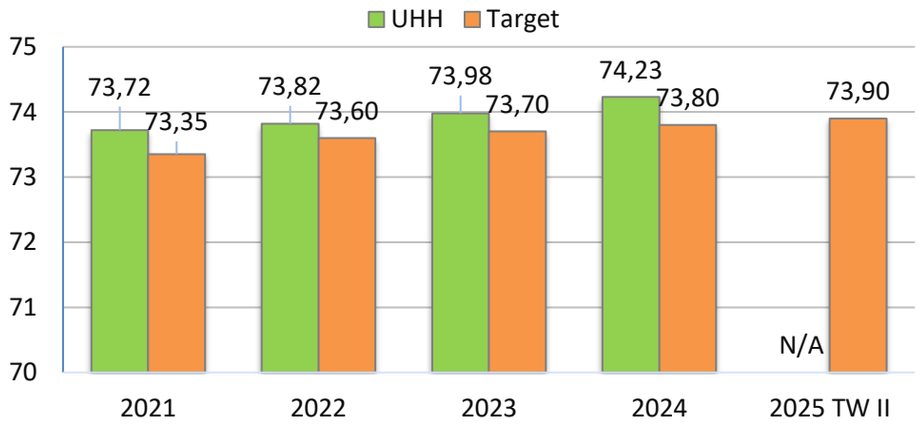

Jika dibandingkan dengan data terakhir UHH Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang dikeluarkan BPS sebesar 74,23 Tahun, maka angka UHH ini meningkat dan juga melampaui Target UHH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 73,80 Tahun. Secara garis besar usia harapan hidup Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan seperti terlihat gambar grafik diatas. Untuk Tahun 2025 Triwulan II belum ada data rilis dari BPS sehingga UHH belum ada.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan indikator kinerja sasaran strategis dalam rangka meningkatnya pelayanan kesehatan ibu. Angka kematian Ibu Maternal mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Kejadian meninggalnya ibu maternal biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang mana dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri, yaitu terlalu tua (>35 tahun) dan terlalu muda (<20 tahun) pada saat melahirkan, terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun). Permasalahan tersebut diatas diakibatkan kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang perawatan kehamilan dan faktor risiko yang terjadi saat kondisi ibu hamil. Bersalin dan nifas.

Angka Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 49,95 per 100.000 kelahiran hidup (jumlah kematian ibu maternal tahun 2024 tercatat sebanyak 10 kasus). Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 45,14 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target AKI Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar 57 per 100.000 kelahiran hidup maka AKI Kabupaten Pemalang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada gambar grafik dibawah ini terlihat, capaian Kabupaten Pemalang AKI turun naik. Untuk Tahun 2024 Triwulan II belum ada nilai angka kematian ibu sebab penghitungan komulatif AKI dilakukan di akhir tahun.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan AKI adalah upaya peningkatan pengetahuan ibu hamil dan keluarga melalui kegiatan kelas ibu hamil, memfasilitasi rumah tunggu kelahiran, melakukan kegiatan kunjungan rumah ibu hamil, kegiatan pemantauan dan pendampingan ibu hamil risti oleh masyarakat dan kader, pembinaan kader dan dukun bayi, peningkatan kompetensi bidan dalam penanganan ibu hamil dan pelayanan rujukan ibu hamil risiko tinggi serta kerjasama lintas sektoral dan pembinaan desa siaga. Selain itu juga melakukan Audit Maternal Perinatal untuk setiap adanya kasus kematian, memberikan pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedik di tingkat pelayanan dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan KIA dan implementasi juknis pelayanan KIA.

Gambar 2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

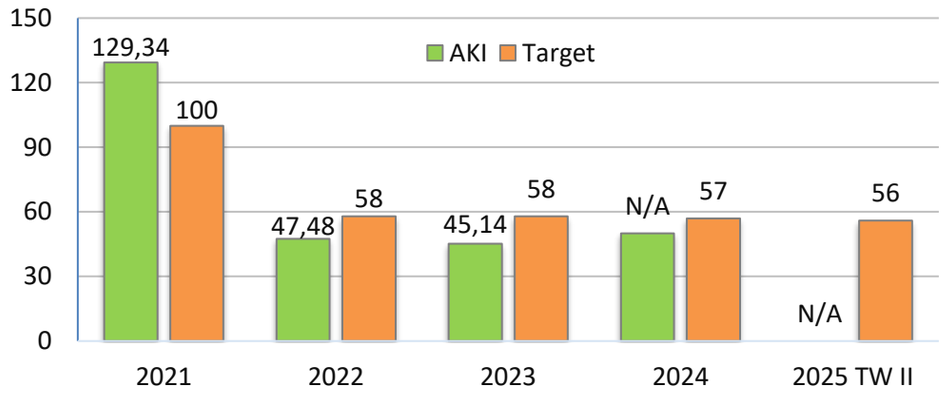

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Beberapa penyebab terbanyak kematian bayi di Kabupaten Pemalang adalah Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan penyakit Infeksi yang diderita oleh bayi. Permasalahan ini diakibatkan kurangnya informasi orangtua mengenai perawatan bayi, tumbuh kembang balita dan upaya pencegahan penyakit serta kondisi sanitasi tempat tinggal yang tidak sehat. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKB adalah melalui peningkatan pengetahuan orang tua melalui kelas ibu balita, revitalisasi posyandu, pembinaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kader, sosialisasi dan Kerjasama lintas sektoral, peningkatan kompetensi nakes dalam manajemen terpadu balita sakit, peningkatan pelayanan kesehatan neonatal dan bayi, pemberian imunisasi lengkap, penanganan bayi dengan BBLR sesuai standar.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 5,94 per 1.000 kelahiran hidup (jumlah kematian bayi tahun 2024 tercatat sebanyak 123 kasus). Angka ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 6,18 per 1.000 kelahiran hidup. Bila ditilik dari target AKB Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar 4,9 per 1.000 kelahiran hidup maka angka capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan. Pada gambar grafik dibawah terlihat sedikit penurunan AKB di Kabupaten Pemalang, hal ini disebabkan masih tingginya kasus kematian bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) meningkat akibat kondisi ibu maternal kekurangan energi kronis (KEK) di masa kehamilannya. Untuk Tahun 2025 Triwulan II juga belum ada nilai angka kematian bayi sebab penghitungan komulatif AKB dilakukan di akhir tahun.

Gambar 2.3 Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

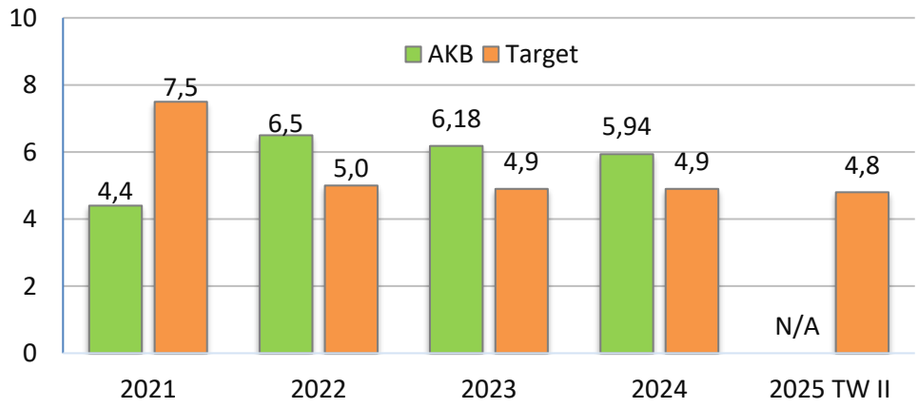

4) Persentase Balita Stunting

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan dan kejadian penyakit infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, Stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena malnutrisi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan kearena penyebab stunting penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitive dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Integrasi penanganan balita stunting secara lintas sektoral perlu ditingkatkan frekuensi koordinasinya, pendampingan kegiatan di posyandu, kemampuan kader dalam penggunaan alat antropometri perlu ditingkatkan agar hasil pengukuran akurat. Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Pemalang menjadi perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan.

Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah pola asuh anak yang salah terutama diawal pemberian Makanan Pendamping ASI, kasus BBLR yang meningkat dan penyakit infeksi pada balita yang berulang. Upaya yang dilakukan dalam penurunan prevalensi stunting adalah dengan pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan angka BBLR dengan ANC terpadu, memberikan kelas ibu dan balita di tiap Puskesmas dan penguatan konvergensi penanganan balita stunting.

Persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang tahun 2024 tercatat sebesar 10,33% capaian ini menurun dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 8%. Bila dibandingkan dari target RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar 9,5% maka persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang masih dibawah target yang ditetapkan.

Gambar 2.4 Persentase Balita Stunting
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

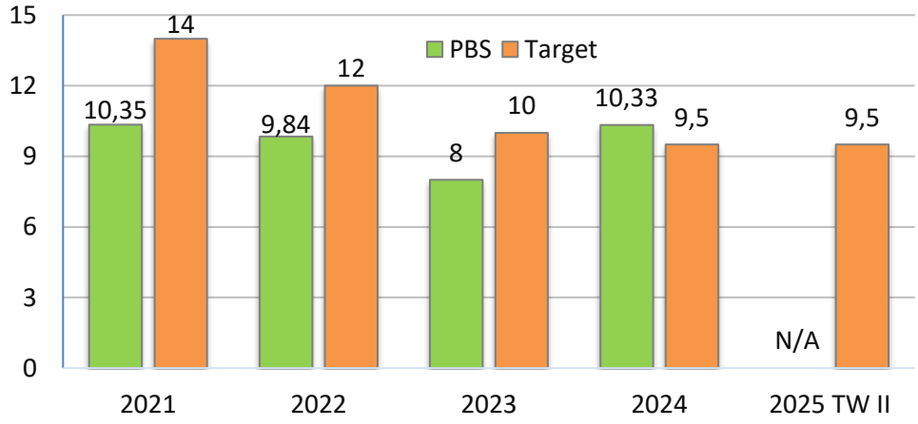

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pada gambar grafik diatas terlihat capaian balita stunting di Kabupaten Pemalang di menunjukkan penurunan ke arah fluktuatif turun naik. Untuk Tahun 2025 Triwulan II belum ada nilai persentase balita stunsing sebab penghitungan capaian dilakukan di akhir tahun.

5) Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di laksanakan untuk menunjang terlaksananya Program Indonesia Sehat khususnya pada seluruh keluarga. Kegiatannya dilaksanakan dengan cara mendatangi rumah atau kunjungan secara lansung dengan keluarga. Kunjungan rumah dilaksanakan untuk pegumpulan data, melakukan promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif, pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Program PIS-PK ini, dilakukan pengumpulan data menggunakan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:

a) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
c) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
d) bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
e) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
f) penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
g) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
h) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
i) anggota keluarga tidak ada yang merokok;
j) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
k) keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
l) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pengumpulan data dari 12 indikator tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui Indeks Keluarga Sehat (IKS) di suatu wilayah yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 dengan kategori sebagai berikut :

- Keluarga Sehat, jika nilai IKS >0,80
- Keluarga Pra Sehat, jika nilai IKS 0,50 - 0,80
- Keluarga Tidak Sehat, jika nilai IKS <0,500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil penghitungan IKS Kabupaten Pemalang tahun 2024 diperoleh hasil capaian IKS sebesar 0,24 dan angka IKS ini telah melebihi target IKS tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 0,19. Dengan angka IKS tahun 2024 sebesar 0,24 maka Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Pemalang masih masuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Namun bila angka IKS tahun 2024 dibandingkan dengan capaian IKS tahun 2023 sebesar 0,22 maka terlihat adanya sedikit peningkatan, hal ini dikarenakan di tahun 2024 sudah dilakukan kembali pengambilan data dan intervesi terhadap sasaran keluarga di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Untuk Tahun 2025 Triwulan II belum ada data rilis data Kemenkes sehingga nilai Indeks Keluarga Sehat belum ada.

Gambar 2.5 Indeks Keluarga Sehat
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

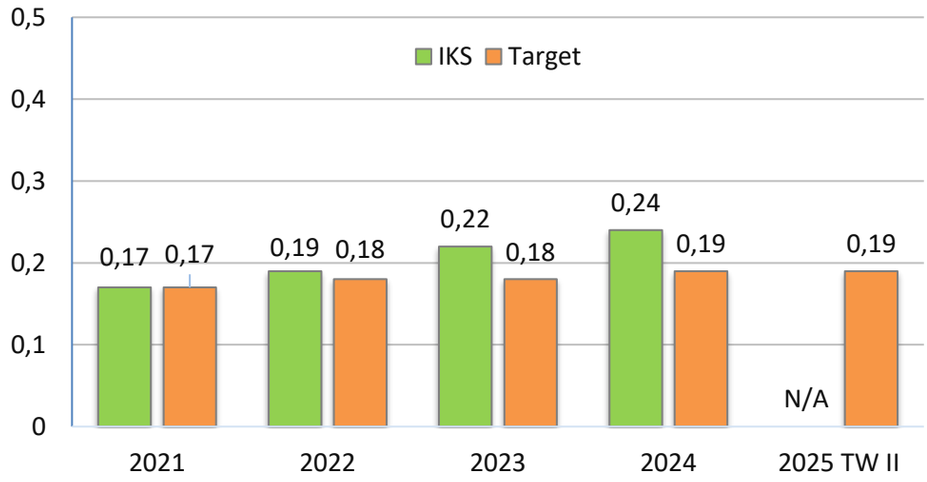

6) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Angka hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang diambil dari rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan pada semester 1 dan semester 2 tahun pelaksanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari hasil penilaian survei kepuasan masyarakat tahun 2024 diperoleh nilai IKM sebesar 89,09 dan capaian angka ini telah melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 83. Dan bila dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2023 sebesar 87,96, maka terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan pada tahun 2024. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I dan Semester 2 sehingga hasil nilainya belum dapat dirilis.

Gambar 2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 TW II

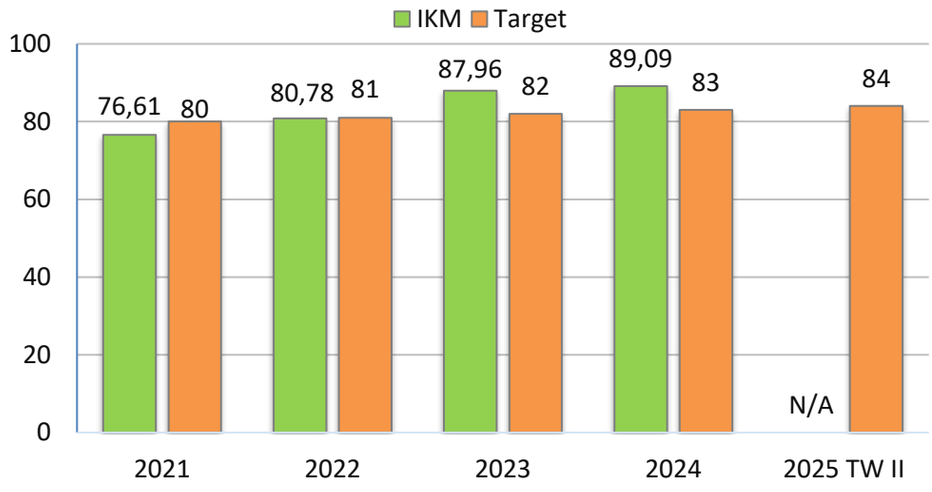

2.2.2 Indikator Kinerja Program

1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit

Rasio daya tampung rumah sakit mencerminkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit di suatu wilayah per 1.000 penduduk. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur, oleh karena itu angka rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tempat tidur rumah sakit di suatu wilayah sudah pada kondisi ideal atau belum.

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Pemalang dibandingkan per 1.000 penduduk di tahun 2024 diperoleh rasio daya tamping rumah sakit sebesar 0,73. Angka ini tentunya masih dibawah rasio ideal, dan menurun bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 0,77 erta dibawah target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II, rasio daya tampung rumah sakit diperoleh nilai sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 0,73 per 1.000 penduduk.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 2.7 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

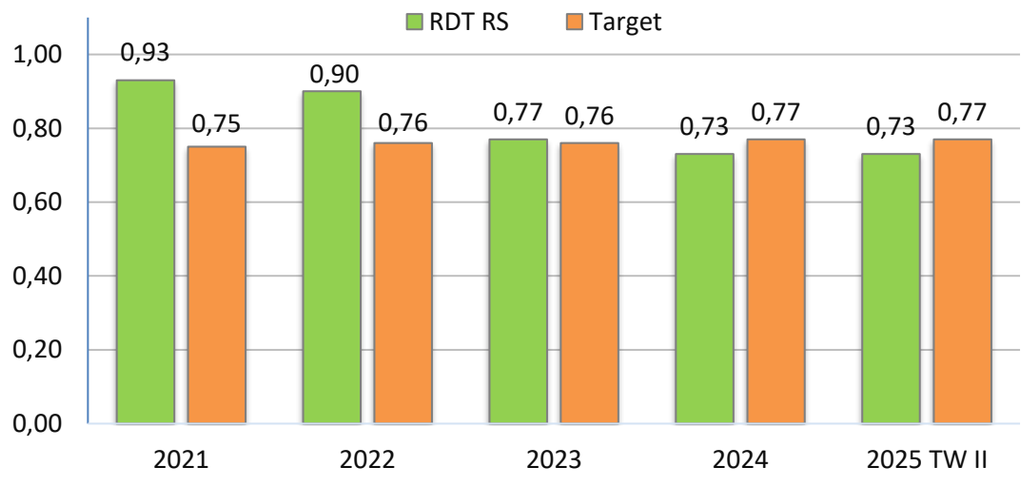

2) Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi Minimal Strata Utama

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Standar penilaian akreditasi rumah sakit menggunakan SNARS (standar nasional akkreditasi rumah sakit) yang telah disesuaikan dengan kondisi rumah sakit di Indonesia. Standar SNARS ini ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan mengacu pada beberapa pedoman yang terdiri dari konsep dan prosedur akreditasi internasional yang ditetapkan oleh ISQua atau The International Society for Quality in Health, perundang-undangan dan peraturan pemerintah, standar akreditasi rumah sakit KARS, serta mengacu pada kajian hasil survey standar dan element yang belum diterapkan di rumah sakit Indonesia, KARS kemudian menetapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa rumah sakit di Kabupaten Pemalang, di tahun 2024 jumlah rumah sakit yang ada berjumlah 9 rumah sakit, yang kesemuanya telah terakreditasi oleh KARS. Hasil dari akreditasi tersebut dapatkan 8 RS dengan strata paripurna dan 1 RS dengan strata utama. Dari data ini maka diperoleh persentase rumah sakit rujukan terakreditasi minimal utama di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 100%. Angka ini tentunya telah melampaui target tahun 2024 sebesar 40% dan meningkat bila dibandingkan dengan capian capaian tahun 2023 sebesar 88,89%. Untuk Tahun 2025 Triwulan II, jumlah RS yang mendapatkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sertifikat akreditasi RS sebanyak 8 RS dengan akreditasi strata paripurna dan 1 RS dengan akreditasi strata utama. Dari data tersebut diperoleh nilai persentase rumah sakit rujukan terakteditasi minimal stata utama di Kabupaten Pemalang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100%.

Gambar 2.8 Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi Minimal Strata Utama Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

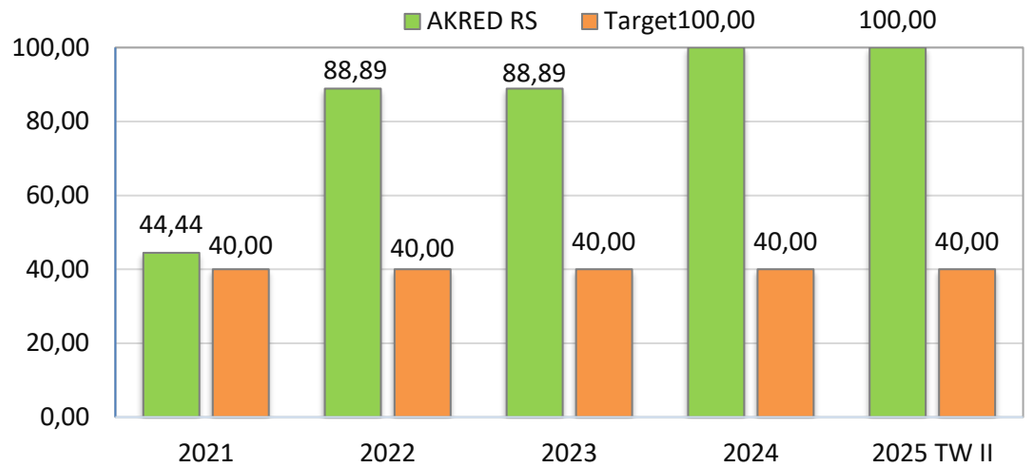

3) Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil/ antenatal sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Yang dimaksud dengan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Yang disebut dengan standar kualitas pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T, meliputi :

(1) Pengukuran berat badan dan tinggi badan;
(2) Pengukuran tekanan darah;
(3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
(4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
(5) Penentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
(6) Pemberian imunisasi sesuai status imunisas;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;

(8) Tes laboratorium;

(9) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;

(10) Temu wicara (konseling).

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 99,96% meningkat ila dibandingkan tahun 2023 sebesar 93,84%. Dan angka capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Untuk diketahui bahwa capaian ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Pemalang belum optimal karena masih ada masyarakat yang belum paham khususnya ibu hamil dan keluarganya untuk memeriksakan kehamilannya secara berkala dan rutin minimal sebanyak 6 kali oleh tenaga kesehatan. Namun pada grafik dibawah ini terlihat, arah capaian pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan tren fluktuatif naik turun. Untuk Tahun 2024 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 64,98%.

Gambar 2.9 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

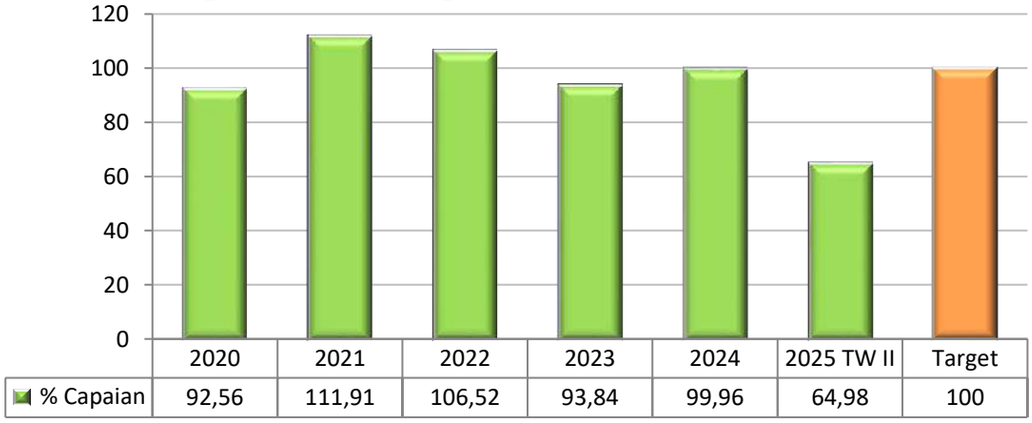

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	Target
% Capaian	92,56	111,91	106,52	93,84	99,96	64,98	100

4) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin/ pelayanan persalinan sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar yang dimaksud adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi : Polindes,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan. Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 96,15% menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 99,45%. Dan angka capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya pencapaian target kinerja pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan di tempat lain atau bukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan berkompetensi. Pada grafik di atas terlihat, arah capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 46,86%.

Gambar 2.10 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

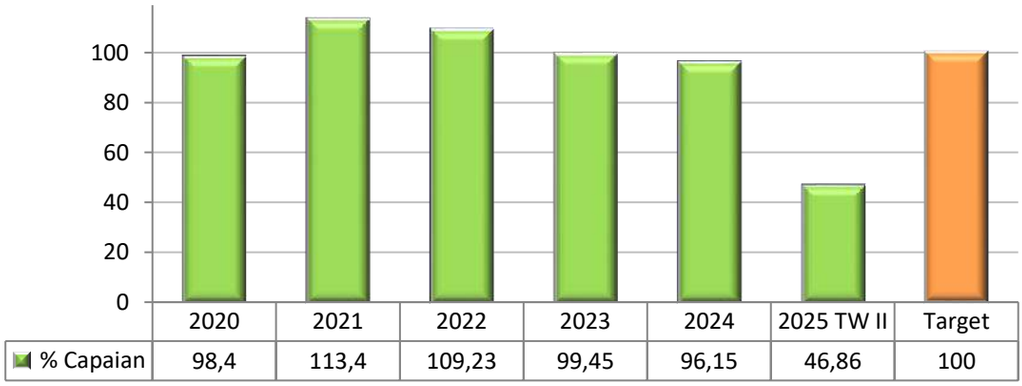

5) Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir/ Neonatal sesuai standar kepada semua bayi 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial baik standar kuantitas dan standar kualitas sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.

Standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir tersebut, meliputi:

(1) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, yaitu:
   a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
   b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
   c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

(2) Standar kualitas yang dimaksud adalah:
   a) Pelayanan Perawatan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam), meliputi:
      1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
      2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
      3) Injeksi vitamin K1.
      4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
      5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
   b) Pelayanan Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam-28 hari), meliputi:
      1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
      2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
      3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
      4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
      5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id/

adalah sebesar 100% menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 111,50%. Namun angka capaian ini telah menyamai target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kabupaten Pemalang karena pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir/ bayi neonatal merupakan pelayanan kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus, karena pada usia bayi baru lahir/ neonatal masih dalam kondisi rentan dan memerlukan penanganan kesehatan yang spesifik. Pada grafik diatas terlihat, arah pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kabupaten Pemalang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan namun tetap mencapai target. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 50,09%.

Gambar 2.11 Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

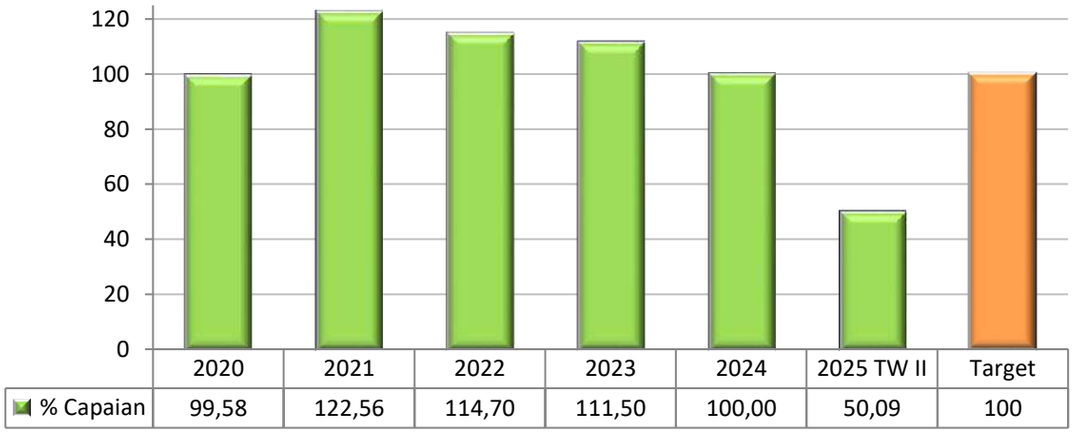

6) Persentase Balita Mendapat Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan balita sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita berusia 0-59 bulan meliputi pelayanan Kesehatan balita sehat maupun sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dan tenaga gizi) dan tenaga non kesehatan yag mempunyai kualifikasi tertentu (guru PAUD dan kader kesehatan).

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(1) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan :
   a) Penimbangan minimal 8 kali setahun;
   b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali / tahun;
   c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun;
   d) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun;
   e) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
(2) Pelayanan kesehatan balita 12-23 bulan:
   a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (min 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
   b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali / tahun;
   c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun;
   d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun;
   e) Pemberian imunisasi lanjutan.
(3) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan :
   a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (min 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
   b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali / tahun;
   c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun;
   d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun;
(4) Pemantauan perkembangan balita;
(5) Pemberian kapsul Vitamin A;
(6) Pemberian imunisasi dasar lengkap;
(7) Pemberian imunisasi lanjutan;
(8) Pengukuran berat badan dan Panjang/ tinggi badan;
(9) Edukasi dan informasi.

Sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan kesehatan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 100% menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 110,08%. Dan angka capaian ini telah menyamai target yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan peningkatan kesadaran keluarga untuk membawa anak balitanya di posyandu terdekat untuk dilakukan pemeriksaan deteksi dini dan tumbuh kembang balita. Pada grafik dibawah terlihat, arah pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Pemalang dalam empat tahun terakhir

https://jdih.pemalangkab.go.id/

menunjukkan tren fluktuatif naik turun namun tetap diatas target. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 41,96%.

Gambar 2.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

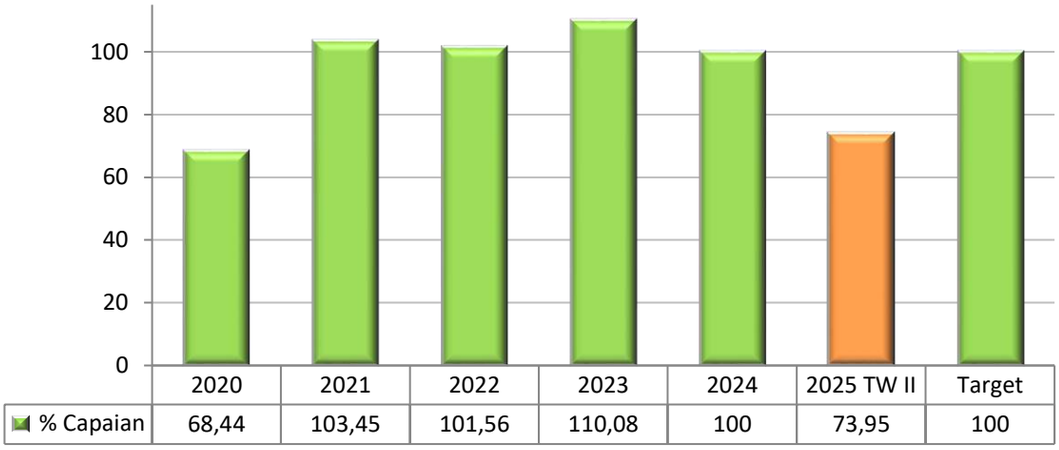

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	Target
% Capaian	68,44	103,45	101,56	110,08	100	73,95	100

7) Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjaringan kesehatan/ skrining kesehatan sesuai standar kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 s.d 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar ini dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter/ dokter gigi, bidan, perawat tenaga gizi dan tenaga kesehatan masyarakat) dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (guru PAUD dan kader kesehatan/ dokter kecil/ *peer conselor*).

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan lainnya. meliputi:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(1) Penilaian status gizi.
(2) Penilaian tanda vital.
(3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
(4) Penilaian ketajaman indera.

Sedangkan tindaklanjut hasil skrining Kesehatan, meliputi:

(1) Memberikan umpan balik hasil skrining Kesehatan.
(2) Melakukan rujukan jika diperlukan.
(3) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 83,57%. Dan angka capaian ini telah menyamai target yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan kegiatan penjaringan dan pemeriksaan kesehatan berkala anak didik usia pendidikan dasar dapat dilaksanakan dengan baik. Pada grafik dibawah terlihat, arah capaian pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 41,42%.

Gambar 2.13 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

8) Persentase Usia Produktif Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Sedangkan pelayanan skrining faktor resiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi :

(1) Pengukuran tinggi badan. berat badan dan lingkar perut.
(2) Pengukuran tekanan darah;
(3) Pemeriksaan gula darah;
(4) Anamnesa perilaku berisiko.

Untuk tindak lanjut hasil skrining kesehatan, meliputi:

(1) Melakukan rujukan jika diperlukan;
(2) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Keterangan: Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

Persentase orang usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 98,23% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 92,46%. Namun angka capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian skrining kesehatan penduduk usia 15-59 tahun (usia produktif) sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan kegiatan pelayanan skrining kesehatan di Posbindu pada masing-masing desa/ kelurahan belum berjalan baik, namun pada grafik dibawah terlihat, arah capaian pelayanan Kesehatan pada usia produktif dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 48,08%.

Gambar 2.14 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

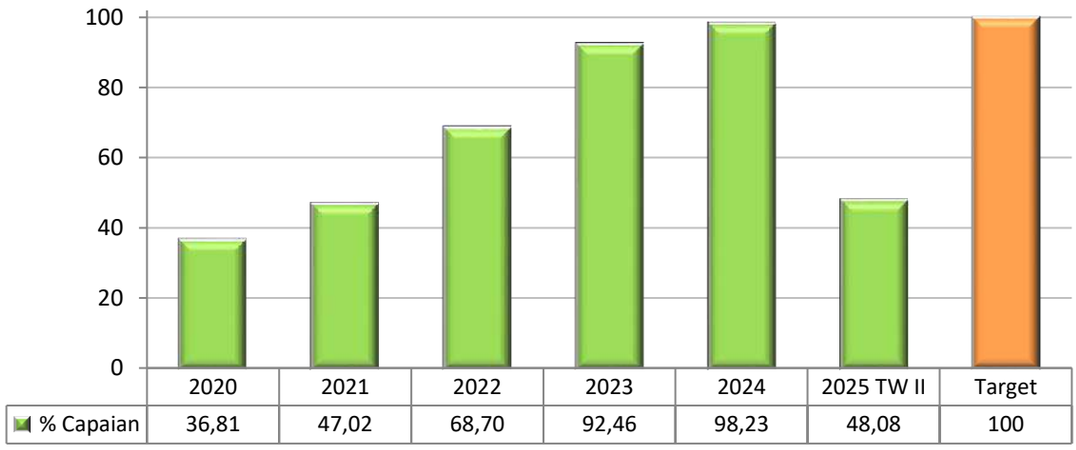

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9) Persentase Usia Lanjut Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ini dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat tenaga gizi dan tenaga kesehatan masyarakat) dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu (kader kesehatan terlatih).

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. Sedangkan pelayanan skrining faktor resiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi :

(1) Pengukuran tinggi badan. berat badan dan lingkar perut;
(2) Pengukuran tekanan darah;
(3) Pemeriksaan gula darah;
(4) Pemeriksaan gangguan mental;
(5) Pemeriksaan gangguan kognitif;
(6) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut;
(7) Anamnesa perilaku berisiko.

Untuk tindak lanjut hasil skrining kesehatan. meliputi:

(1) Melakukan rujukan jika diperlukan;
(2) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 99,82% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,01%. Namun angka capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%.

Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan beberapa lansia belum begitu antusias dalam mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut di posyandu lansia dan fasyankes. Namun pada grafik dibawah terlihat, arah capaian pelayanan Kesehatan pada usia lanjut pada empat tahun terakhir sudah menunjukkan peningkatan. Untuk Tahun 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 50%.

Gambar 2.15 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

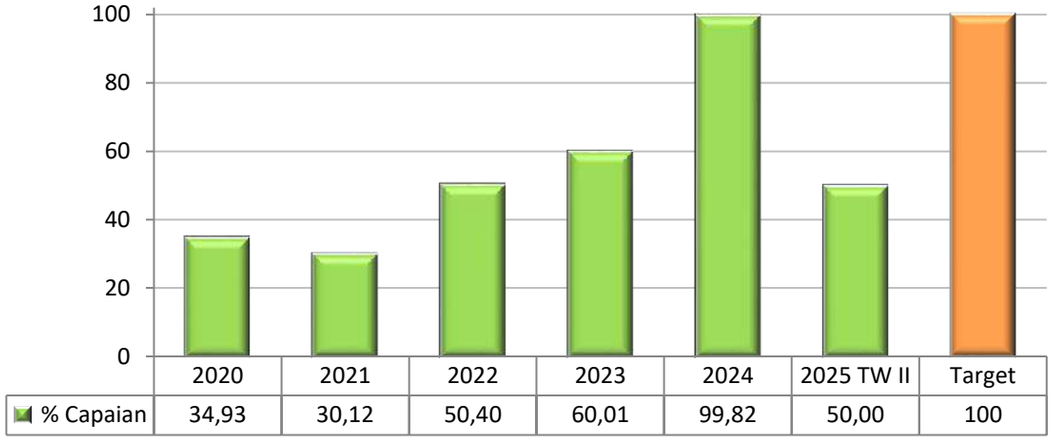

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	Target
% Capaian	34,93	30,12	50,40	60,01	99,82	50,00	100

10) Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar jumlah dan kualitasnya (dokter, bidan, perawat tenaga gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), meliputi :

(1) Pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes
(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
(3) Melakukan rujukan jika diperlukan bagi penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) .

Keterangan : untuk penderita hipertensi yang dilakukan tekanan darah sewaktu (TDS) dengan hasil lebih dari 140 mmHg maka harus ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 98,28% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 93,08%. Namun angka capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dikarenakan belum semua penderita hipertensi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin dan berkala di fasyankes. Pada grafik dibawah ini terlihat, arah capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 49,69%.

Gambar 2.16 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

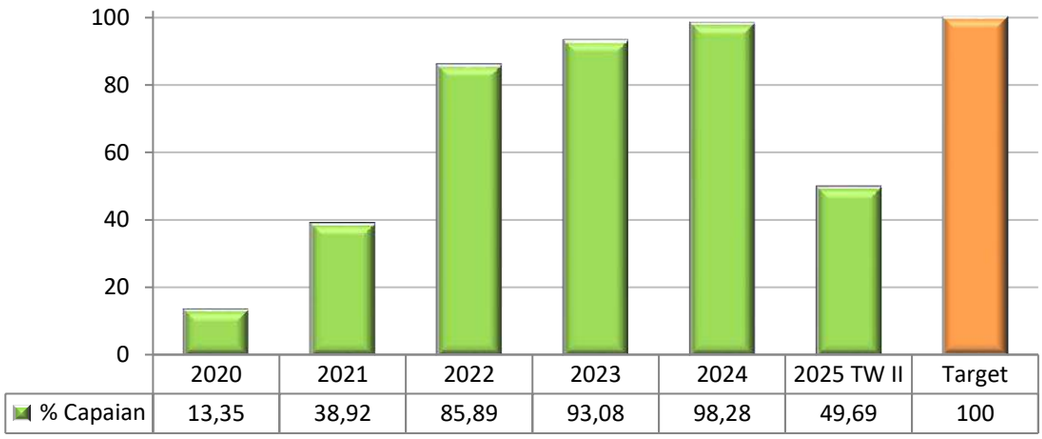

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	Target
% Capaian	13,35	38,92	85,89	93,08	98,28	49,69	100

11) Persentase Penderita Diabetes Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (dokter, bidan, perawat tenaga gizi dan tenaga kesehatan masyarakat), meliputi ;

(1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes
(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
(3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan: untuk penderita DM yang dilakukan pemeriksaan Gula darah sewaktu (GDS) bila hasil nya lebih dari 200 mg/dl maka harus ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Persentase penderita diabetus mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 96,04% dan angka capaian ini telah sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian penderita diabetus

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan kebutuhan dan kesadaran penderita DM dalam memeriksakan kesehatannya secara berkala dan rutin di fasyankes. Namun dilihat pada grafik dibawah ini, arah capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes Melitus dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 50,93%.

Gambar 2.17 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

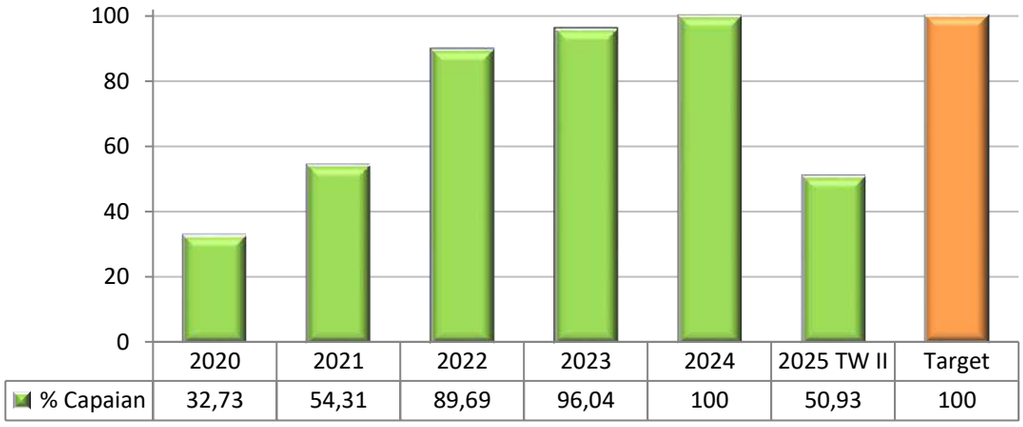

12) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar (dokter, perawat terlatih kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan terlatih), meliputi :

(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yaitu:
   a) Pemeriksaan status mental;
   b) Wawancara.
(2) Edukasi kepatuhan minum obat;
(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 94,13%. Angka capaian ini telah sesuai target

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai kebutuhan. Namun pada grafik dibawah ini terlihat, arah capaian pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif nail turun. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 76,01%.

Gambar 2.18 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

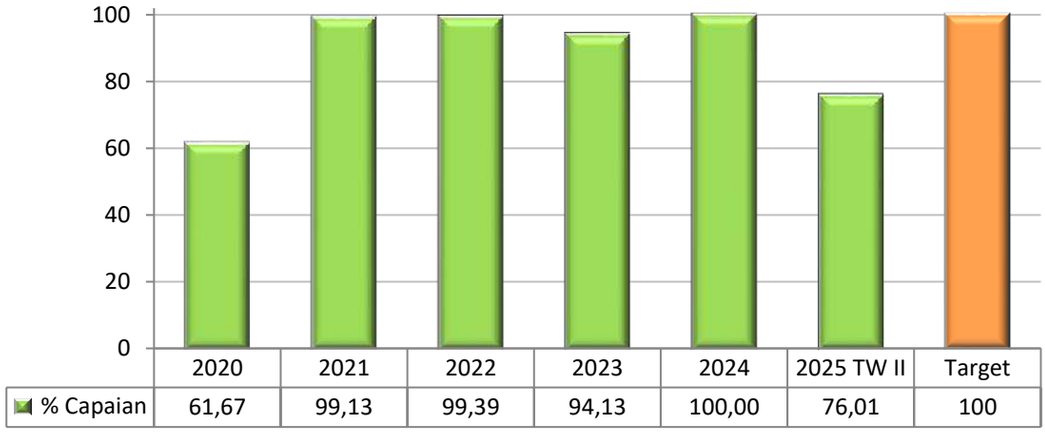

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	Target
% Capaian	61,67	99,13	99,39	94,13	100,00	76,01	100

13) Persentase Orang Terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TB di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TB sesuai standar, meliputi:

(1) Pemeriksaan klinis;

Pelayanan klinis terduga TB dilakukan minimal 1 kali dalam setahun adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

(2) Pemeriksaan penunjang;

Merupakan pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

(3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;

(4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Persentase orang terduga tuberkulosis (TB) yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 94,55% meningkat dibanding tahun 2023 sebasar 72,86%.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) sesuai standar di Kabupaten Pemalang kurang aktifnya masyarakat terutama kader kesehatan dalam membantu penemuan penderita TB dan orang terduga TB. Namun pada grafik dibawah ini terlihat, arah capaian pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 50,26%.

Gambar 2.19 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

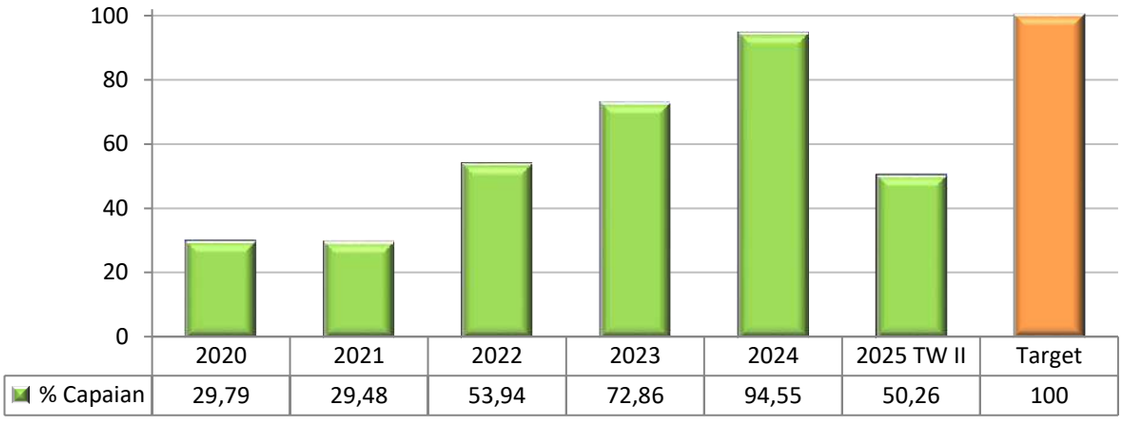

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	Target
% Capaian	29,79	29,48	53,94	72,86	94,55	50,26	100

14) Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TB, penderita IMS, penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) berorientasi heteroseksual, homoseksual atau biseksual, waria/transgender, pengguna napza, warga binaan lembaga pemasyarakatan dan ibu hamil).

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sesuai standar, meliputi:

(1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
(2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun;
(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 99,16% dan angka capain ini telah sesuai target SPM yang ditetapkan sebesar 100%. Peningkatan capaian pelayanan deteksi dini HIV pada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar di Kabupaten Pemalang dikarenakan sasaran masyarakat yang rentan dan berisiko terinfeksi HIV sadar telah dilakukan skrining/deteksi dini pemeriksaan HIV secara berkala dan rutin. Namun pada grafik dibawah terlihat, arah capaian pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II masih dalam proses pelaksanaan sehingga capaian masih sebesar 45,16%.

Gambar 2.20 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2025 Triwulan II

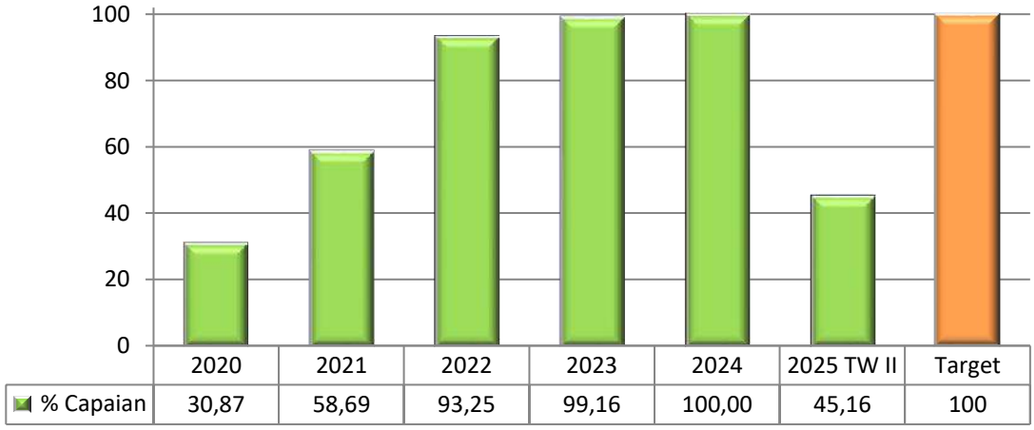

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	Target
% Capaian	30,87	58,69	93,25	99,16	100,00	45,16	100

15) Rasio Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan di suatu wilayah tertentu untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Rasio tenaga Kesehatan ini untuk menggambarkan perbandingan antara ketersediaan tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk dalam hal akses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data SISDMK, rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebesar 326 per 100.000 penduduk. Angka rasio ini meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 290, capaian ini tentunya telah melampaui target tahun 2024 sebesar 198. Peningkatan capaian rasio ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan praktik mandiri

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tenaga Kesehatan. Untuk Tahun 2025 Triwulan II belum dilakukan penghitungan sehingga belum didapatkan besaran rasio tenaga Kesehatan di Kabupaten Pemalang.

Gambar 2.21 Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

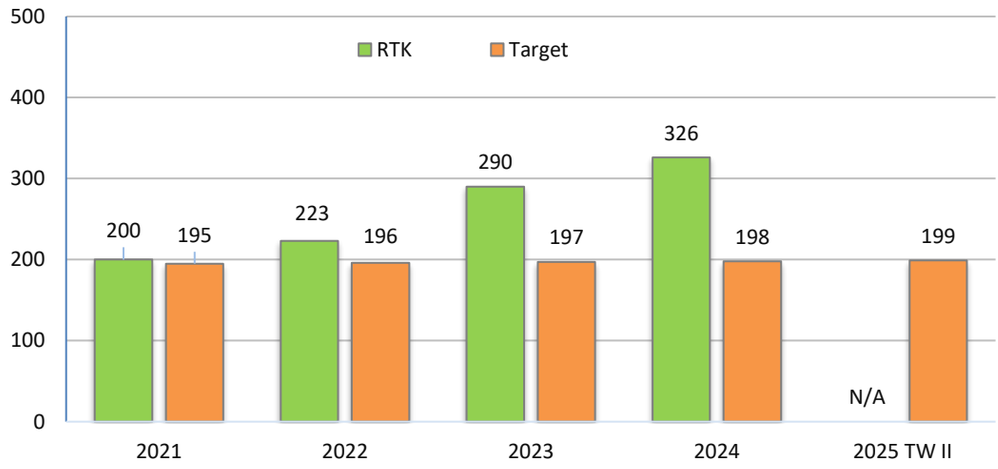

16) Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PIRT Memenuhi Standar

Sarana kefarmasian, sarana penyedia alat kesehatan dan produk industri rumah tangga menjadi ranah pembinaan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Untuk itu setiap sarana penyedia kefarmasian, alkes dan tempat produksi makanan minuman skala rumah tangga wajib memenuhi standar ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil dari pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, sarana penyedia alat kesehatan dan tempat-tempat PIRT selama tahun 2024, menunjukkan persenatase sarana kefarmasian, alkes dan PIRT yang memenuhi standar mencapai 100%. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 78% dan capain ini sama dengan bila dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan hasil kegiatan penyuluhan, pembinaan dan monitoring keamanan pangan di tempat-tempat produksi makanan minuman skala rumah tangga di Kabupaten Pemalang telah memenuhi standar ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Tahun 2025 Triwulan II belum dilakukan penghitungan sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PIRT yang Memenuhi Standar sehingga belum didapatkan nilai capaian persentasenya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 2.22 Capaian Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PIRT yang Memenuhi Standar Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024 Triwulan II

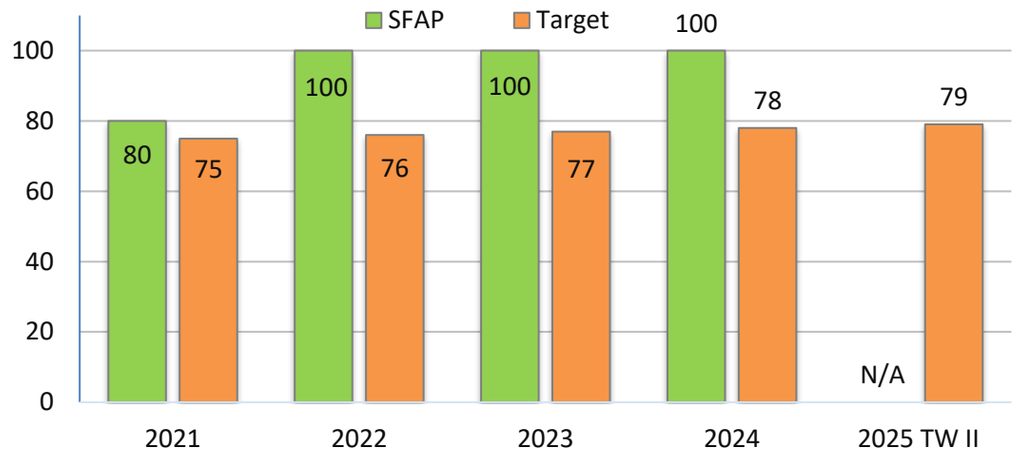

17) Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiri. Sasaran penting yang ingin dicapai dalam Desa Siaga Aktif yaitu mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat, sekaligus menjadikan desa atau kelurahan siaga aktif di bidang pelayanan Kesehatan. Inti dari Desa Siaga Aktif ini adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu mencegah serta mengatasi berbagai ancaman kesehatan dilingkungannya, seperti ancaman kekurangan gizi, penyakit menular, dan penyakit yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa serta masyarakat dapat memanfaatkan potensi setempat secara bergotong royong menuju terwujudnya desa sehat.

Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebesar 100%. Angka cakupan ini sama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua desa dan kelurahan di Kabupaten Pemalang telah memenuhi kriteria sebagai desa aktif dan berproses menuju desa sehat. Namun untuk Tahun 2025 Triwulan II belum dilakukan penilaian kriteria desa siaga aktif di Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 2.23 Cakupan Desa Siaga Aktif
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

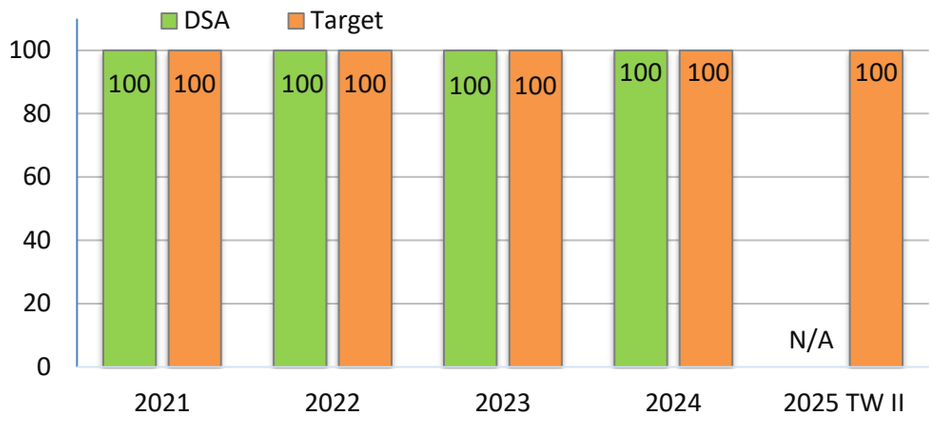

18) Indeks Sakip

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sedangkan Indeks Sakip adalah nilai indeks dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satusatunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Tujuan umum dari evaluasi atas implementasi SAKIP adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Nilai Indeks SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang didasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten. Dari LHE SAKIP tahun 2024, nilai Indeks SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebesar 63,61. Angka indeks ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 58 dan bila dibandingkan dengan capaian Indeks SAKIP tahun 2023 sebesar 62,150 maka terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan adanya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan akuntabilitas keuangan di internal Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Untuk Tahun 2025 Triwulan II belum ada hasil laporan resmi nilai dari Indeks Sakip dari Inspektorat.

Gambar 2.24 Capaian Indeks SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 Triwulan II

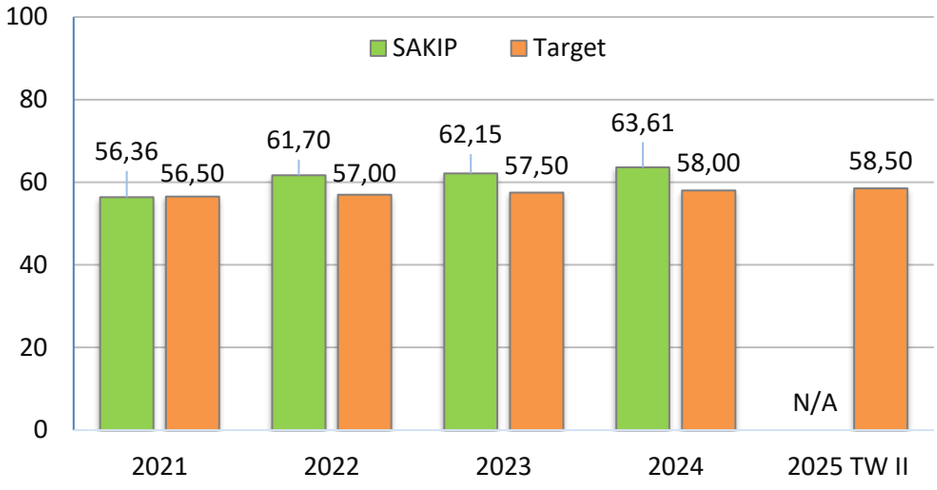

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Indikator		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM/ Nasional	IKK	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 TW II	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
I	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**											
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	V	-	73,7	73,8	73,9	74,00	74,23	N/A	73.9	74.00	
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	V	-	58	57	56	55	49,95	N/A	56	55	
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	V	-	4,9	4,9	4,8	4,8	5,94	N/A	4,8	4,8	
4	Persentase Balita Stunting	V	-	10	9.5	9.5	9	10,33	N/A	9.5	9	
5	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	V	-	0,18	0,19	0,19	0,20	0,24	N/A	0,19	0,20	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	V	-	82	83	84	85	89,09	N/A	84	85	
II	**Indikator Kinerja Program**											
1	Rasio daya tampung rumah sakit	-	V	0,76	0,77	0,77	0,78	0,73	0,73	0,77	0.78	
2	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	-	V	40	40	40	50	100	100	40	50	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	V	V	100	100	100	100	99,96	64,98	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	V	V	100	100	100	100	96,15	46,86	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	V	V	100	100	100	100	100	50,09	100	100	
6	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan balita sesuai standar	V	V	100	100	100	100	100	41,96	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Indikator Kinerja	Indikator		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM/ Nasional	IKK	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 TW II	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
7	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapat-kan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	100	41,42	100	100	
8	Persentase warga negara usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	98,23	48,08	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	99,82	50,00	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	98,28	49,69	100	100	
11	Persentase penyandang diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V	V	100	100	100	100	100	50,93	100	100	
12	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	V	V	100	100	100	100	100	76,01	100	100	
13	Persentase orang terduga tuberculosis mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	V	V	100	100	100	100	94,55	50,26	100	100	
14	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	V	V	100	100	100	100	100	45,16	100	100	
15	Rasio Tenaga Kesehatan	V	-	197	198	199	200	326	N/A	199	200	
16	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PIRT Memenuhi Standar	V	-	77	78	79	80	100	N/A	79	80	
17	Cakupan Desa Siaga Aktif	V	-	100	100	100	100	100	N/A	100	100	
18	Indeks Sakip Dinkes	V	-	57,50	58	58,50	59	63,61	N/A	58.50	59	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3 ISU - SU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tentunya dipengaruhi oleh permasalahan dan hambatan. Berikut ini hal-hal yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan tupoksi Dinas Kesehatan, meliputi :

1. Masih adanya kasus kematian ibu di Kabupaten Pemalang, dimana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 10 kasus kematian ibu atau dalam Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 49,9 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 45,13 per 100.000 kelahiran hidup;
2. Masih tingginya kasus kematian bayi di Kabupaten Pemalang, di tahun 2024 tercatat kasus kematian bayi sebanyak 119 kasus atau dalam Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 5,9 per 1.000 kelahiran hidup. Angka AKB ini menurun dibandingkan dengan AKB tahun 2023 sebesar 6,5 per 1.000 kelahiran hidup;
3. Masih ditemukannya kasus balita stunting dan balita gizi buruk di Kabupaten Pemalang, walaupun demikian pencegahan dan penanggulangan kasus balita gizi buruk dan stunting tetap dilakukan melalui perawatan sesuai standar pada balita gizi buruk yang ditemukan dan intervensi spesifik dan sensitive pada lokus perluasaan stunting. Capaian kinerja tahun 2024 dari hasil data ePPGBM menunjukkan persentase balita stunting di Kabupaten Pemalang meningkat menjadi sebesar 10,33%;
4. Masih adanya kasus penyakit menular yang dilaporkan terutama pada penyakit Tuberkulosis, ISPA/ Pneumonia, Diare, Kusta, Demam berdarah Dengue dan HIV/ AIDS;
5. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular, seperti penyakit Diabetes Melitus, Hipertensi, Kanker, Stroke, Decompensasi Cordis (Kegagalan Jantung) dan Psikosis (Gangguan Jiwa);
6. Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2024. Dari 12 jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan, hanya 6 capaian indikator kinerja SPM yang mencapai target 100%, sedangkan 6 indikator kinerja SPM lainnya masih dibawah 100%;
7. Belum meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan, hal ini tercermin dari masih adanya desa/ kelurahan dengan rumah dan jamban yang belum memenuhi syarat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kesehatan. Data data capaian tahun 2024 menunjukkan, 120 desa/ kelurahan yang dinyatakan sebagai desa/kelurahan 5 Pilar STBM (53,8%);

8. Belum semua warga pemalang menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional (peserta BPJS Kesehatan) sehingga capaian *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Pemalang Tahun 2024 tercatat sebesar 99,45% dan telah melampaui target nasional sebesar 98%. Namun persentase peserta aktif jaminan kesehatan nasional sampai dengan Tahun 2024 masih sebesar 75,07%.
9. Belum meratanya distribusi SDM Kesehatan terutama di puskesmas, dimana ada beberapa puskesmas yang belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia dalam menyelenggarakan pelayanana kesehatan dasar;
10. Belum optimalnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sebab masih terdapat beberapa puskesmas dan rumah sakit belum terakreditasi paripurna.

Dalam rangka pengembangan penyelenggaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka tantangan yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Upaya intensif dalam menurunkan kasus kematian ibu, kasus kematian bayi, kasus balita stunting, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar;
2. Kesenjangan sosial ekonomi mempengaruhi status kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, hal ini menuntut penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau, adil dan bermutu bagi seluruh masyarakat pada semua tingkatan sosial ekonomi dan perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional;
3. Ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan mutu SDM kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya di beberapa puskesmas yang sampai saat ini masih ada yang belum terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib tersedia dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar;
4. Implementasi transformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas aksesibilitas bagi masyarakat yang meliputi : Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan Dinas Kesehatan adalah :

1. Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terpilih terhadap urusan kesehatan sangat besar dan menjadi salah satu prioritas sektor pembangunan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang;
2. Dukungan pendanaan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik untuk meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan; operasional kesehatan; jaminan persalinan; pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; akreditasi fasyankes; sediaan farmasi, bahan medis habis pakan, alat kesehatan; dan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional;
3. Adanya komitmen Kepala Daerah Kabupaten Pemalang terkait implementasi kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) dan kemudahan akses pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit bagi warga Pemalang kurang mampu yang kepesertaan JKN-nya non aktif dan atau belum menjadi peserta JKN;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang, maka isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
   Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan pentingnya PHBS akan memiliki dampak pada penurunan kasus kematian, kasus stunting, kasus kesakitan penyakit menular dan tidak menular.
2. Peningkatan kualitas lingkungan sehat.
   Terciptanya lingkungan sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan akan memberikan dampak pada akses sanitasi yang layak bagi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

masyarakat sehingga meningkatkan status kesehatan masyarakat. Akses sanitasi yang layak tersebut meliputi: penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, pengelolaan limbah yang baik, pengendalian vektor penyakit seperti nyamuk dan lalat, serta penyediaan tempat fasilitas umum dan lingkungan yang bersih dan sehat.

3. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

   Mendorong peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya mendukung Universal Health Coverage yang memastikan setiap warga memiliki akses ke pelayanan kesehatan berkualitas baik dan biaya terjangkau tanpa mengalami kesulitan finansial. Selain itu usaha meningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk dalam hal ini peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar; ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, vaksin dan perbekalan kesehatan; serta pemerataan SDM Kesehatan yang kompeten yang memenuhi standar juga turut meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

   Pemerataan akses pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan; implementasi Program Cek Kesehatan Gratis untuk seluruh Warga Negara Indonesia; mendukung Program Makan Bergizi Gratis bagi Balita, Peserta Didik, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui; dan implementasi komitmen global dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG's) khususnya terkait urusan kesehatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2026 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran dan indikator program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan pada nomenklatur terbaru Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang direncanakan, dengan rincian sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**254.524.396.850,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**254.524.396.850,00**		
	1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**254.524.396.850,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**254.524.396.850,00**		
		DINAS KESEHATAN			**254.524.396.850,00**		**DINAS KESEHATAN**			**254.524.396.850,00**		
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**124.295.711.570,00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**124.295.711.570,00**		
	1.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**1.552.341.570,00**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**1.552.341.570,00**		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinkes	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3 Dokumen	1.377.341.570,00	Dinkes	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3 Dokumen	1.377.341.570,00	Dinkes	
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	3 Dokumen	85.000.000,00	Dinkes	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	3 Dokumen	85.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	40.000.000,00	Dinkes	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	40.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	-	**120.140.870.000,00**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	-	**120.140.870.000,00**		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1450 Orang/bulan	120.003.370.000,00	Dinkes	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1450 Orang/bulan	120.003.370.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinkes	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	2 Laporan	75.000.000,00	Dinkes	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	2 Laporan	75.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	2 Laporan	7.500.000,00	Dinkes	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	2 Laporan	7.500.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	5.000.000,00	Dinkes	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	5.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	**32.400.000,00**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	**32.400.000,00**		
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	32.400.000,00	Dinkes	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	32.400.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	**40.940.000,00**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	**40.940.000,00**		
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	40.940.000,00	Dinkes	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	40.940.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	**416.690.000,00**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	**416.690.000,00**		
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	29.000.000,00	Dinkes	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	29.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	12.000.000,00	Dinkes	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	12.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	5 Paket	163.690.000,00	Dinkes	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	5 Paket	163.690.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	47.000.000,00	Dinkes	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	47.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	15.000.000,00	Dinkes	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	15.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	10.000.000,00	Dinkes	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	10.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	140.000.000,00	Dinkes	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	140.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**124.010.000,00**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**124.010.000,00**		
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	30.500.000,00	Dinkes	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	30.500.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	93.510.000,00	Dinkes	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	93.510.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.503.790.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.503.790.000,00**		
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3000 Laporan	7.000.000,00	Dinkes	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3000 Laporan	7.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	720.000.000,00	Dinkes	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	720.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	776.790.000,00	Dinkes	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	776.790.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**484.670.000,00**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**484.670.000,00**		
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	79.160.000,00	Dinkes	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	79.160.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	25 Unit	143.360.000,00	Dinkes	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	25 Unit	143.360.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	1 Unit	5.000.000,00	Dinkes	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	1 Unit	5.000.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	55.680.000,00	Dinkes	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	55.680.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	194.470.000,00	Dinkes	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	194.470.000,00	Dinkes	
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	7.000.000,00	Dinkes	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	7.000.000,00	Dinkes	
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**127.518.891.780,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**127.518.891.780,00**		
	1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**38.431.394.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**38.431.394.000,00**		
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	1 Unit	26.000.000.000,00	Dinkes	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	1 Unit	26.000.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	2.000.000.000,00	Dinkes	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	2.000.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Unit	438.885.000,00	Dinkes	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Unit	438.885.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	100 Paket	9.875.525.000,00	Dinkes	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	100 Paket	9.875.525.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	10 Paket	116.984.000,00	Dinkes	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	10 Paket	116.984.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**88.232.992.980,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**88.232.992.980,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	21858 Orang	80.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	21858 Orang	80.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	20865 Orang	60.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	20865 Orang	60.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	19871 Orang	100.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	19871 Orang	100.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	78149 Orang	110.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	78149 Orang	110.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	199294 Orang	70.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	199294 Orang	70.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	807347 Orang	580.258.020,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	807347 Orang	580.258.020,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	179928 Orang	85.161.880,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	179928 Orang	85.161.880,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	137824 Orang	150.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	137824 Orang	150.000.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	18561 Orang	191.478.180,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	18561 Orang	191.478.180,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1158 Orang	150.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	1158 Orang	150.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	16019 Orang	1.498.065.100,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	16019 Orang	1.498.065.100,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	31784 Orang	364.274.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	31784 Orang	364.274.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	1 Dokumen	218.562.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	1 Dokumen	218.562.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	1 Dokumen	236.451.500,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	1 Dokumen	236.451.500,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	470.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	470.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	100.120.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	100.120.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	370.669.500,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	370.669.500,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	811.448.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	811.448.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	1 Dokumen	175.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	1 Dokumen	175.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	573.340.000,00	Dinkes	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	573.340.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	100 Orang	15.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	100 Orang	15.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	10.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	10.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan*	1 Dokumen	69.720.500,00	Dinkes	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan*	1 Dokumen	69.720.500,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	535.000.000,00	Dinkes	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	535.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	1 Dokumen	79.510.296.400,00	Dinkes	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	1 Dokumen	79.510.296.400,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	100 Orang	15.000.000,00	Dinkes	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	100 Orang	15.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	100 Paket	108.686.000,00	Dinkes	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	100 Paket	108.686.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	167.000.000,00	Dinkes	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	167.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	25.929.000,00	Dinkes	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	25.929.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	5 Unit	107.045.000,00	Dinkes	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	5 Unit	107.045.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	13.723.000,00	Dinkes	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	13.723.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	1 Dokumen	14.300.000,00	Dinkes	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	1 Dokumen	14.300.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	70.000.000,00	Dinkes	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	70.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	10 Orang	127.210.900,00	Dinkes	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	10 Orang	127.210.900,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	10 Orang	149.490.000,00	Dinkes	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	10 Orang	149.490.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	5 Orang	30.960.000,00	Dinkes	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	5 Orang	30.960.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	868.804.000,00	Dinkes	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	868.804.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	**350.000.000,00**		**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	**350.000.000,00**		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	350.000.000,00	Dinkes	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	1 Dokumen	350.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**504.504.800,00**		**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**504.504.800,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*	1 Unit	4.999.800,00	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*	1 Unit	4.999.800,00	Dinkes	
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*	1 Unit	20.000.000,00	Dinkes	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*	1 Unit	20.000.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	1 Unit	54.505.000,00	Dinkes	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	1 Unit	54.505.000,00	Dinkes	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	1 Dokumen	425.000.000,00	Dinkes	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	1 Dokumen	425.000.000,00	Dinkes	
3	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**1.942.784.000,00**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**1.942.784.000,00**		
	1.02.03.2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**120.000.000,00**		**Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**120.000.000,00**		
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinkes	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinkes	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	20.000.000,00	Dinkes	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	20.000.000,00	Dinkes	
	1.02.03.2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**86.250.000,00**		**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**86.250.000,00**		
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	65.000.000,00	Dinkes	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	65.000.000,00	Dinkes	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	10 Orang	5.000.000,00	Dinkes	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	10 Orang	5.000.000,00	Dinkes	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	16.250.000,00	Dinkes	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	16.250.000,00	Dinkes	
	1.02.03.2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	-	**1.736.534.000,00**		**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	-	**1.736.534.000,00**		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	100 Orang	1.736.534.000,00	Dinkes	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	100 Orang	1.736.534.000,00	Dinkes	
4	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**494.291.000,00**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**494.291.000,00**		
	1.02.04.2.01	**Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**-**	-	**97.280.800,00**		**Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**-**	-	**97.280.800,00**		
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	1 Dokumen	97.280.800,00	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	1 Dokumen	97.280.800,00	Dinkes	
	1.02.04.2.03	**Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**-**	-	**155.148.500,00**		**Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**-**	-	**155.148.500,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	1 Dokumen	155.148.500,00	Dinkes	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	1 Dokumen	155.148.500,00	Dinkes	
	1.02.04.2.06	**Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**-**	**-**	**241.861.700,00**		**Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**-**	**-**	**241.861.700,00**		
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	25 Unit	241.861.700,00	Dinkes	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	25 Unit	241.861.700,00	Dinkes	
5	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**272.718.500,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**272.718.500,00**		
	1.02.05.2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**56.584.500,00**		**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**56.584.500,00**		
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1 Dokumen	56.584.500,00	Dinkes	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1 Dokumen	56.584.500,00	Dinkes	
	1.02.05.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**110.790.000,00**		**Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**110.790.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	1 Dokumen	110.790.000,00	Dinkes	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	1 Dokumen	110.790.000,00	Dinkes	
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**105.344.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**105.344.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	105.344.000,00	Dinkes	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	105.344.000,00	Dinkes	
		RSUD DR. M. ASHARI			**134.500.000.000,00**		**RSUD DR. M. ASHARI**			**134.500.000.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**134.500.000.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**134.500.000.000,00**		
	1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**9.500.000.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**9.500.000.000,00**		
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	1 Unit	2.000.000.000,00	RSUD	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	1 Unit	2.000.000.000,00	RSUD	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	100 Unit	2.500.000.000,00	RSUD	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	100 Unit	2.500.000.000,00	RSUD	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	100 Paket	5.000.000.000,00	RSUD	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	100 Paket	5.000.000.000,00	RSUD	
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**125.000.000.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	**125.000.000.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	125.000.000.000,00	RSUD	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	125.000.000.000,00	RSUD	
		PUSKESMAS BANYUMUDAL			**5.007.021.000,00**		**PUSKESMAS BANYUMUDAL**			**5.007.021.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.003.209.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.003.209.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.003.209.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.003.209.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	68.640.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	68.640.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	50.375.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	50.375.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	2 Orang	8.190.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	2 Orang	8.190.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	14.836.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	14.836.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	244.233.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	244.233.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	260.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	260.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.815.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.815.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	20.898.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	20.898.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	2 Orang	7.540.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	2 Orang	7.540.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	138.410.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	138.410.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.433.906.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.433.906.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	1.300.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	1.300.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.206.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.206.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	2 Dokumen	1.170.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	2 Dokumen	1.170.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1.430.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1.430.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.812.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.812.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.812.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.812.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.812.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.812.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS WARUNGPRING			**3.128.180.000,00**		**PUSKESMAS WARUNGPRING**			**3.128.180.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.124.918.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.124.918.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.124.918.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.124.918.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	93.600.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	93.600.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	46.670.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	46.670.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	25.090.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	25.090.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	222.188.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	222.188.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	4.172.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	4.172.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	9.875.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	9.875.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	2 Orang	3.900.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	2 Orang	3.900.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	103.675.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	103.675.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.612.876.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.612.876.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.390.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.390.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	482.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	482.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.262.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.262.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.262.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.262.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.262.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.262.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS PULOSARI			**4.962.905.900,00**		**PUSKESMAS PULOSARI**			**4.962.905.900,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.962.905.900,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.962.905.900,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.962.905.900,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.962.905.900,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	116.160.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	116.160.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	33.930.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	33.930.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	253.841.500,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	253.841.500,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	4.160.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	4.160.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.149.400,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.149.400,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	140.550.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	140.550.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.295.000.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.295.000.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	2.600.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	2.600.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	108.515.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	108.515.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS BELIK			**7.682.019.000,00**		**PUSKESMAS BELIK**			**7.682.019.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.678.269.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**7.678.269.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**7.678.269.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**7.678.269.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	90.100.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	90.100.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	2.845.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	2.845.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	39.325.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	39.325.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	2 Orang	8.450.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	2 Orang	8.450.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	2 Orang	2.340.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	2 Orang	2.340.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	193.596.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	193.596.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.369.800,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.369.800,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.107.200,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.107.200,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	116.285.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	116.285.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	7.191.422.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	7.191.422.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	2.340.000,00	Puskesmas	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	2.340.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	7.800.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	7.800.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4.599.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	4.599.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.690.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.690.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.750.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.750.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.750.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.750.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.750.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.750.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS WATUKUMPUL			**3.866.558.000,00**		**PUSKESMAS WATUKUMPUL**			**3.866.558.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.861.591.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.861.591.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.861.591.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.861.591.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	132.800.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	132.800.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	15.990.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	15.990.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	4.290.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	4.290.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	262.625.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	262.625.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.020.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.020.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.992.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.992.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	61.465.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	61.465.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.365.101.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.365.101.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.260.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.260.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.048.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.048.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.967.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.967.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.967.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.967.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.967.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.967.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS KEBANDARAN			**4.198.844.000,00**		**PUSKESMAS KEBANDARAN**			**4.198.844.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.194.374.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.194.374.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.194.374.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.194.374.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	130.800.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	130.800.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	31.265.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	31.265.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	3.510.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	3.510.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	290.417.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	290.417.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	11.328.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	11.328.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	10.845.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	10.845.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	117.820.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	117.820.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.595.289.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.595.289.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	3.100.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	3.100.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.470.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.470.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.470.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.470.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.470.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.470.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS BANTARBOLANG			**6.390.773.000,00**		**PUSKESMAS BANTARBOLANG**			**6.390.773.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.385.632.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**6.385.632.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6.385.632.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6.385.632.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	119.070.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	119.070.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	58.240.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	58.240.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	20.410.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	20.410.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	340.415.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	340.415.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	19.630.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	19.630.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	20.443.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	20.443.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	153.396.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	153.396.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	5.650.000.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	5.650.000.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.160.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.160.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.868.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.868.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.141.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.141.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.141.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.141.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.141.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.141.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS RANDUDONGKAL			**4.513.731.000,00**		**PUSKESMAS RANDUDONGKAL**			**4.513.731.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.507.101.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.507.101.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.507.101.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.507.101.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	166.000.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	166.000.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	52.130.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	52.130.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	7.345.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	7.345.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	122.377.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	122.377.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	10.436.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	10.436.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	9.382.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	9.382.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	106.900.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	106.900.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.029.073.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.029.073.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.288.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.288.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.170.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.170.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.630.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.630.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6.630.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6.630.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	6.630.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	6.630.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS KALIMAS			**3.264.300.000,00**		**PUSKESMAS KALIMAS**			**3.264.300.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.260.280.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.260.280.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.260.280.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.260.280.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	39.000.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	39.000.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	13.130.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	13.130.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	9.360.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	9.360.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	254.161.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	254.161.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	13.455.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	13.455.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	14.268.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	14.268.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	98.617.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	98.617.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.724.999.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.724.999.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	2.990.000,00	Puskesmas	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	2.990.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	90.300.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	90.300.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.020.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.020.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.020.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.020.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.020.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.020.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS PADURAKSA			**4.279.847.000,00**		**PUSKESMAS PADURAKSA**			**4.279.847.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.245.761.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.245.761.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.245.761.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.245.761.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	10.792.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	10.792.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	36.280.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	36.280.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	28.490.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	28.490.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	230.457.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	230.457.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	15.338.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	15.338.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	23.603.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	23.603.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	91.122.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	91.122.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.734.207.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.734.207.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	15.210.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	15.210.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	455.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	455.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	19.516.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	19.516.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	40.291.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	40.291.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**34.086.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**34.086.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**34.086.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**34.086.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	34.086.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	34.086.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS MULYOHARJO			**4.528.227.000,00**		**PUSKESMAS MULYOHARJO**			**4.528.227.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.524.165.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.524.165.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.524.165.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.524.165.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	95.040.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	95.040.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	59.540.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	59.540.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	17.160.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	17.160.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	193.685.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	193.685.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	17.550.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	17.550.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	33.360.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	33.360.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	144.345.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	144.345.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.933.266.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.933.266.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	5.152.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	5.152.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	25.067.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	25.067.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.062.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.062.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.062.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.062.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.062.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.062.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS KEBONDALEM			**4.434.811.000,00**		**PUSKESMAS KEBONDALEM**			**4.434.811.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.434.811.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.434.811.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.434.811.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.434.811.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	35.280.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	35.280.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	36.595.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	36.595.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	2.460.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5 Orang	2.460.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	10.920.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	10.920.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	284.522.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	284.522.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	12.610.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	12.610.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	5.460.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	5.460.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	73.077.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	73.077.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.957.267.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.957.267.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	780.000,00	Puskesmas	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	780.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	15.840.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	15.840.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS BANJARDAWA			**4.020.871.000,00**		**PUSKESMAS BANJARDAWA**			**4.020.871.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.963.680.500,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.963.680.500,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.963.680.500,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.963.680.500,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	26.400.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	26.400.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	52.845.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	52.845.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	2.600.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	2.600.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	112.239.500,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	112.239.500,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.490.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.490.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	5.005.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	5.005.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	71.295.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	71.295.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.586.786.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.586.786.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	5.150.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	5.150.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	2.600.000,00	Puskesmas	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	2.600.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	3.900.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	3.900.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	2.600.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1 Orang	2.600.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	7.615.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	7.615.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	75.155.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	75.155.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**57.190.500,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**57.190.500,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**57.190.500,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**57.190.500,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	57.190.500,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	57.190.500,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS KABUNAN			**3.370.814.000,00**		**PUSKESMAS KABUNAN**			**3.370.814.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.364.292.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.364.292.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.364.292.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.364.292.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	74.800.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	74.800.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	9.933.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	9.933.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	8.450.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	8.450.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	69.002.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	69.002.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	8.580.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	8.580.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	27.270.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	27.270.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	81.497.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	81.497.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.070.638.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.070.638.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	3.342.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	3.342.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	9.740.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	9.740.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.040.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.040.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.522.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**6.522.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6.522.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**6.522.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	6.522.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	6.522.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS JEBED			**4.494.794.000,00**		**PUSKESMAS JEBED**			**4.494.794.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.490.426.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.490.426.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.490.426.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.490.426.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	133.320.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	133.320.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	60.580.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	60.580.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	10.010.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	10.010.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	531.097.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	531.097.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	10.010.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	10.010.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	11.890.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	11.890.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	159.655.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	159.655.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.440.994.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.440.994.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	131.310.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	131.310.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.560.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.560.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.368.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.368.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.368.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.368.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.368.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.368.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS PETARUKAN			**5.119.380.000,00**		**PUSKESMAS PETARUKAN**			**5.119.380.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.119.380.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.119.380.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.119.380.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.119.380.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	100.870.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	100.870.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	50.310.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	50.310.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	5.460.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	5.460.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	339.900.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	339.900.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.800.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	7.800.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	9.290.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	9.290.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	108.220.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	108.220.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.497.530.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.497.530.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS KLAREYAN			**4.878.391.000,00**		**PUSKESMAS KLAREYAN**			**4.878.391.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.874.231.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.874.231.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.874.231.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.874.231.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	30.797.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	30.797.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	38.805.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	38.805.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	9.295.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	9.295.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	119.835.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	119.835.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	18.070.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	18.070.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	19.913.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	19.913.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	95.260.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	95.260.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.541.996.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.541.996.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	260.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	260.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.160.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.160.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.160.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.160.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.160.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.160.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS LOSARI			**5.657.737.000,00**		**PUSKESMAS LOSARI**			**5.657.737.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.651.880.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.651.880.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.651.880.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.651.880.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	99.330.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	99.330.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	51.025.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	51.025.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	17.550.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	17.550.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	304.267.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	304.267.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	12.545.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	12.545.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	40.272.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	40.272.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	192.575.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	192.575.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.932.396.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	4.932.396.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	880.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	880.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.040.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.040.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.857.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.857.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.857.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.857.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.857.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	5.857.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS PURWOHARJO			**5.832.523.000,00**		**PUSKESMAS PURWOHARJO**			**5.832.523.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.828.316.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**5.828.316.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.828.316.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**5.828.316.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	241.170.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	241.170.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	20.410.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	20.410.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	7.800.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	7.800.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	208.732.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	208.732.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	13.656.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	13.656.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	31.104.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	31.104.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	78.070.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	78.070.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	5.216.822.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	5.216.822.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	5.894.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	5.894.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	650.000,00	Puskesmas	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	650.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.318.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.318.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.690.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.690.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.207.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.207.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.207.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.207.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.207.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.207.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS SARWODADI			**3.155.866.000,00**		**PUSKESMAS SARWODADI**			**3.155.866.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.151.843.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.151.843.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.151.843.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.151.843.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	75.955.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	75.955.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	41.557.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	41.557.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	10.400.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	10.400.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	124.283.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	124.283.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	11.700.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	11.700.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	20.692.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	20.692.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	154.455.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	154.455.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.709.231.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.709.231.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.790.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.790.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	780.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	780.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.023.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.023.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.023.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.023.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.023.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.023.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS ROWOSARI			**2.947.885.000,00**		**PUSKESMAS ROWOSARI**			**2.947.885.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.926.544.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.926.544.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2.926.544.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2.926.544.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	75.238.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	75.238.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	31.071.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	31.071.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	5.696.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	5.696.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	171.293.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	171.293.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	11.485.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	11.485.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	23.451.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	23.451.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	89.828.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	89.828.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.486.374.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.486.374.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	29.779.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	29.779.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	2.329.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	2.329.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.341.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.341.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21.341.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21.341.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	21.341.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	21.341.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS MOJO			**4.655.229.000,00**		**PUSKESMAS MOJO**			**4.655.229.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.655.229.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**4.655.229.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.655.229.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.655.229.000,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	120.120.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	120.120.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	37.570.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	37.570.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	294.786.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	294.786.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	29.398.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	29.398.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	42.208.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	42.208.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	173.684.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	173.684.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.923.034.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	3.923.034.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	31.070.000,00	Puskesmas	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	2 Orang	31.070.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	3.359.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	3.359.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS CIKADU			**3.139.802.000,00**		**PUSKESMAS CIKADU**			**3.139.802.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.136.682.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.136.682.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.136.682.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.136.682.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	115.920.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	115.920.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	16.510.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	16.510.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	7.670.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	7.670.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	259.643.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	259.643.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.750.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	9.750.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.296.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	8.296.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	107.874.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	107.874.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.607.758.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.607.758.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.481.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.481.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	780.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	780.000,00	Puskesmas	
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.120.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.120.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.120.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.120.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.120.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	3.120.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		PUSKESMAS JATIROYOM			**2.979.189.000,00**		**PUSKESMAS JATIROYOM**			**2.979.189.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.974.719.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**2.974.719.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2.974.719.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**2.974.719.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	116.772.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	116.772.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	31.720.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	31.720.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	18.525.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	18.525.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	243.593.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	243.593.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	17.680.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	17.680.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.635.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	12.635.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	92.960.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	92.960.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.436.784.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.436.784.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.490.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	2.490.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.560.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1.560.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.470.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.470.000,00**		
	1.02.05.2.03	**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.470.000,00**		**Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.470.000,00**		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.470.000,00	Puskesmas	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	4.470.000,00	Puskesmas	
		PUSKESMAS KARANGASEM			**3.474.305.000,00**		**PUSKESMAS KARANGASEM**			**3.474.305.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.474.305.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**3.474.305.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.474.305.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.474.305.000,00**		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	124.520.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100 Orang	124.520.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	44.720.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	10 Orang	44.720.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	4.680.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5 Orang	4.680.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	346.939.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	346.939.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	15.633.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	15.633.000,00	Puskesmas	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	28.488.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	28.488.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	104.225.000,00	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	104.225.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.792.975.000,00	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	2.792.975.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	11.410.000,00	Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	11.410.000,00	Puskesmas	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	715.000,00	Puskesmas	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	715.000,00	Puskesmas	
		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			**350.000.000,00**		**LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**			**350.000.000,00**		
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**350.000.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**350.000.000,00**		
	1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**350.000.000,00**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**350.000.000,00**		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	350.000.000,00	Labkesda	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	350.000.000,00	Labkesda	
	J U M L A H				**499.358.399.750,00**					**499.358.399.750,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam penyusunan Renja ini berdasarkan rekap usulan prioritas kegiatan non fisik dari hasil rekap pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan hasil rekap usulan-usulan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pemalang Tahun 2025, maka diperoleh usulan prioritas kegiatan masyarakat untuk tahun 2026 yang berkaitan dengan tupoksi urusan kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Usulan Prioritas Kegiatan dari Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Nama OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Pengusul	Jenis Usulan	Deskripsi Usulan	Volume	Anggaran (Rp.)	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Linda Dwi Bhuana Putri, SH. (Pokir Fraksi PDIP)	Non Fisik	Pemetaan resiko penyakit infeksi emerging dan pembuatan dokumen rekomendasi	1 Kegiatan	75.000.000	Kec. Belik
		Non Fisik	Penanganan stunting, gizi buruk, dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	1 Kegiatan	50.000.000	Desa Sikasur
		Non Fisik	Penanganan stunting, gizi buruk, dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	1 Kegiatan	50.000.000	Desa Mendelem
2	Dwi Laksari, S.Pd. (Pokir Fraksi PDIP)	Non Fisik	Sosialisasi program imunisasi bayi dan baduta bagi kader kesehatan	1 Kegiatan	60.000.000	Kec. Randudongkal
		Non Fisik	Penanganan stunting, gizi buruk, dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)	1 Kegiatan	50.000.000	Kec. Randudongkal
		Non Fisik	Sosialisasi implementasi Germas di masyarakat	1 Kegiatan	58.000.000	Kec. Randudongkal
3	Ma'mun Riyad, S.Sos (Pokir Fraksi PKB)	Non Fisik	Sosialisasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	1 Kegiatan	11.000.000	Kec. Watukumpul
4	Kel. Petarukan Kec. Petarukan	Non Fisik	Pelayanan Posyandu (Remaja, Bumil, Lansia): Stik Gula, Kolesterol, Asam Urat, Tensimeter Digital	1 Paket	31.405.000	Kel. Petarukan
				Jumlah	**385.405.000**	

Dari usulan prioritas kegiatan diatas maka dilakukan sinkronisasi ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2026 sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Nama OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sikasur, Mendelem, Kec. Randudongkal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Kegiatan	Penanganan stunting, gizi buruk, dan ibu hamil KEK
2)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kec. Watukumpul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Kegiatan	Sosialisasi STBM
3)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kec. Belik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Kegiatan	Pemetaan resiko penyakit infeksi emerging dan pembuatan dokumen rekomendasi
4)	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kel. Petarukan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	Pelayanan Posyandu
5)	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kec. Randudongkal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Kegiatan	Sosialisasi program imunisasi bayi dan baduta bagi kader kesehatan
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keehatan				
1	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Randudongkal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Kegiatan	Sosialisasi implementasi Germas di masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pemalang adalah :

"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"

Visi ini memiliki pembentuk kata dengan makna sebagai berikut:

1. Bersih, dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. Cakap, dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. Mulya, Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang disampaikan secara jelas sebagai arahan dalam merumusakan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah dan pedoman stakeholder terkait untuk dirumuskan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi 1 Resik, menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. Misi 2 Hijau, meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. Misi 3 Apik, meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
4. Misi 4 Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. Misi 5 Silaturahmi, meningkatkan masyarakat rukun, guyup, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. Misi 6 Organisatoris, meningkatkan pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Gotujuavernance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Misi 7 Digitalisasi, memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. Misi 8 Ikhlas, menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pemalang, fokus pada Misi Ke-empat yaitu Peduli, meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Tujuan dari RPJMD Kabupaten Pemalang terkait urusan kesehatan adalah meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diperlukan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan oleh Dinas Kesehatan Kabupeten Pemalang.

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh organisasi perangkat daearah di masa mendatang dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang maka Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja tujuan adalah Usia Harapan Hidup (UHH).

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara nyata oleh organisasi perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam menetapkan sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana target tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud maka dalam rangka pencapaian tujuan ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran :
   1) Jumlah Kematian Ibu;
   2) Jumlah Kematian Balita;
   3) Persentase Stunting;
   4) Angka Populasi Bebas Penyakit Menular;
   5) Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular; dan
   6) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja sasaran :
   1) Indeks Kepuasan Masyarakat;
   2) Nilao Sakip Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang serta Indikator dan Target didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah. Adapun target indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,75
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	10
		Jumlah Kematian Balita	Kasus	118
		Persentase Stunting	%	18,75
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	%	32
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	%	64
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	59,5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,2
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	66

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai sasaran Kabupaten Pemalang yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan kesehatan Kabupaten Pemalang di Tahun 2026 untuk mendukung Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026, yaitu Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan kesehatan; Pelaksanaan Program Makan Bergizi pada anak sekolah; Pemeriksaan kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada penyakit tidak menular; Penyediaan ambulan gratis dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal; Peningkatan pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

keluarga yang berkualitas dengan tingkat kelahiran yang direncanakan dengan usia perkawinan yang semakin matang.

Dalam merumuskan Renja Tahun 2026 beserta pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian, antara lain :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang;
2. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 serta Renstra Dinkes Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
4. Ketersediaan data dan informasi sebagai kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan bidang kesehatan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang beserta unit kerjanya di Tahun 2026 sebanyak 5 program, 21 kegiatan dan 94 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

   Program ini diarahkan pada peningkatan cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 40%; cakupan imunisasi bayi lengkap sebesar 98%; cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional sebesar 74%; angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis sebesar 93%; persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%; persentase orang dengan HIV mendapat pengobatan antiretroviral (ARV) sebesar 70%; indeks SPM kesehatan keluarga sebesar 99,45; persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat sebesar 59%; persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sebesar 70%; persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar sebesar 86%; Net Death Rate (NDR) RSUD sebesar 20,2 Permil; dan Bed Occupation Rate (BOR) RSUD sebesar 83,5%, dengan didukung kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
   (2) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas;
   (3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
   (4) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit;
   (5) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   (6) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;
   (7) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan.
2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
   (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
   (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
   (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
   (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
   (6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
   (7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
   (8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
   (9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
(11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
(12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
(13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
(14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
(15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
(16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
(17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
(18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
(19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya;
(20) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
(21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
(22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
(23) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan;
(24) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
(25) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
(26) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah;
(27) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional;
(28) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
(29) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;
(30) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;
(31) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
(32) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(33) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
(34) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
(35) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
(36) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis;
(37) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV);
(38) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria;
(39) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
(40) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak;
(41) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan.

3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
   (2) Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
   (3) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
   (4) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan untuk peningkatan rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi sebesar 1,77 per 1.000 penduduk, dengan didukung kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
   (2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
(2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar;
(3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sebesar 100%; dan persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan sebesar 69%, dengan didukung kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
(1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
(1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

3) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan untuk peningkatan proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup sebesar 50%, dengan didukung kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   (1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat sebesar 89,2; dan nilai Sakip perangkat daerah sebesar 66 dengan didukung kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   (4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
(1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
(3) Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga;
(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
(5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
(6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material;
(7) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
(8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
(2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
(4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
(5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
(6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Besaran kebutuhan pagu anggaran/ indikatif untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 633.228.516.000,- yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan berdasarkan program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pagu Anggaran Berdasarkan Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Program	Pagu Indikatif (Rp)	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	501.298.566.500	79,17
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.942.784.000	0,31
3	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	494.291.000	0,08
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	272.718.500	0,04
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	129.220.156.000	20,41
	JUMLAH	**633.228.516.000**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, maka dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai indikator kinerja guna mendukung mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan mengacu pada nomenklatur terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjabaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang beserta unit kerjanya disertai indikator kinerja dan pendanaannya beserta perkiraan maju Tahun 2027 dapat dilihat per unit kerja secara rinci pada tabel berikut ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**316.794.513.100,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**316.794.513.100,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**316.794.513.100,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**129.220.156.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	265.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	126.357.656.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1450 Orang/bulan	126.220.156.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	12.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	32.400.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	32.400.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	40.940.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	40.940.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	411.690.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	163.690.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	47.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	135.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	124.010.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	30.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	93.510.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.503.790.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3000 Laporan	7.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	720.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	776.790.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	484.670.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	79.160.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	143.360.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	55.680.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	194.470.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**184.864.563.600,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	71.431.394.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	59.000.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	438.885.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100 Paket	9.875.525.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				10 Paket	116.984.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	112.578.664.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21858 Orang	80.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20865 Orang	60.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19871 Orang	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				78149 Orang	110.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				199294 Orang	70.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				807347 Orang	580.258.020,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				179928 Orang	85.161.880,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137824 Orang	150.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18561 Orang	191.478.180,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1158 Orang	150.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16019 Orang	1.498.065.100,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				31784 Orang	364.274.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	218.562.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	236.451.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	470.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	100.120.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	370.669.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	811.448.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	573.340.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	69.720.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	535.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	103.855.968.220,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				100 Orang	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	108.686.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	167.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	25.929.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				5 Unit	107.045.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	13.723.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	70.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	127.210.900,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	149.490.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	30.960.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	868.804.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	350.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	504.504.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	4.999.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	54.505.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	425.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**1.942.784.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	86.250.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	16.250.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.736.534.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	1.736.534.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**494.291.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	97.280.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	97.280.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	155.148.500,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	155.148.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	241.861.700,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 Unit	241.861.700,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**272.718.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	56.584.500,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	56.584.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	110.790.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	110.790.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	105.344.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	105.344.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD DR. M. ASHARI						**206.000.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**206.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**206.000.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**206.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	81.000.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	RSUD DR. M. ASHARI
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	81.000.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	RSUD DR. M. ASHARI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	RSUD DR. M. ASHARI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	RSUD DR. M. ASHARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	125.000.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	RSUD DR. M. ASHARI
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	125.000.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	RSUD DR. M. ASHARI
		PUSKESMAS BANYUMUDAL						**5.007.021.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.007.021.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.007.021.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.007.021.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.007.021.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	5.007.021.000,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANYUMUDAL
		PUSKESMAS WARUNGPRING						**3.128.180.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.128.180.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.128.180.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.128.180.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.128.180.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			0				0 0	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3.128.180.000,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Warungpring, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WARUNGPRING
		PUSKESMAS PULOSARI						**4.962.905.900,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.962.905.900,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.962.905.900,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.962.905.900,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.962.905.900,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.962.905.900,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PULOSARI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pulosari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PULOSARI
		PUSKESMAS BELIK						**7.682.019.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.682.019.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**7.682.019.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**7.682.019.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.682.019.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7.682.019.000,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BELIK
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BELIK
		PUSKESMAS WATUKUMPUL						**3.866.558.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.866.558.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.866.558.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.866.558.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.866.558.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3.866.558.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS WATUKUMPUL
		PUSKESMAS KEBANDARAN						**4.198.844.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.198.844.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.198.844.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.198.844.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.198.844.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			0				0 0	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.198.844.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBANDARAN
		PUSKESMAS BANTARBOLANG						**6.390.773.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.390.773.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**6.390.773.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**6.390.773.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.390.773.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	6.390.773.000,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANTARBOLANG
		PUSKESMAS RANDUDONGKAL						**4.513.731.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.513.731.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.513.731.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.513.731.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.513.731.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.513.731.000,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS RANDUDONGKAL
		PUSKESMAS KALIMAS						**3.264.300.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.264.300.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.264.300.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.264.300.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.264.300.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3.264.300.000,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KALIMAS
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KALIMAS
		PUSKESMAS PADURAKSA						**4.279.847.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.279.847.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.279.847.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.279.847.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.279.847.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.279.847.000,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PADURAKSA
		PUSKESMAS MULYOHARJO						**4.528.227.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.528.227.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.528.227.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.528.227.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.528.227.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.528.227.000,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MULYOHARJO
		PUSKESMAS KEBONDALEM						**4.434.811.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.434.811.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.434.811.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.434.811.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.434.811.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.434.811.000,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KEBONDALEM
		PUSKESMAS BANJARDAWA						**4.020.871.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.020.871.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.020.871.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.020.871.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.020.871.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.020.871.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.020.871.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS BANJARDAWA
		PUSKESMAS KABUNAN						**3.370.814.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.370.814.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.370.814.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.370.814.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.370.814.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3.370.814.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KABUNAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KABUNAN
		PUSKESMAS JEBED						**4.494.794.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.494.794.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.494.794.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.494.794.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.494.794.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.494.794.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS JEBED
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JEBED
		PUSKESMAS PETARUKAN						**5.119.380.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.119.380.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.119.380.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.119.380.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.119.380.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	5.119.380.000,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PETARUKAN
		PUSKESMAS KLAREYAN						**4.878.391.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.878.391.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.878.391.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.878.391.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.878.391.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.878.391.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.878.391.000,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KLAREYAN
		PUSKESMAS LOSARI						**5.657.737.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.657.737.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.657.737.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.657.737.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.657.737.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	5.657.737.000,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS LOSARI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS LOSARI
		PUSKESMAS PURWOHARJO						**5.832.523.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.832.523.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.832.523.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.832.523.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.832.523.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	5.832.523.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS PURWOHARJO
		PUSKESMAS SARWODADI						**3.155.866.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.155.866.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.155.866.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.155.866.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.155.866.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3.155.866.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS SARWODADI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS SARWODADI
		PUSKESMAS ROWOSARI						**2.947.885.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.947.885.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.947.885.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2.947.885.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.947.885.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2.947.885.000,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS ROWOSARI
		PUSKESMAS MOJO						**4.655.229.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.655.229.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.655.229.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**4.655.229.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.655.229.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4.655.229.000,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS MOJO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Ulujami, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS MOJO
		PUSKESMAS CIKADU						**3.139.802.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.139.802.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.139.802.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.139.802.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.139.802.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3.139.802.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS CIKADU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS CIKADU
		PUSKESMAS JATIROYOM						**2.979.189.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.979.189.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.979.189.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2.979.189.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.979.189.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2.979.189.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS JATIROYOM
		PUSKESMAS KARANGASEM						**3.474.305.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.474.305.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.474.305.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.474.305.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.474.305.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	3.474.305.000,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Petarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	PUSKESMAS KARANGASEM
		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						**450.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**450.000.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**450.000.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**450.000.000,00**						**-**	**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		0,00	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	J U M L A H							**633.228.516.000,00**							**0,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikatornya, berikut program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja termasuk pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaan, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang beserta unit kerja dan seluruh aparaturnya secara bersama-sama melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu untuk menjaga konsistensi dan efektifitas pelaksanaanya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini, maka dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2026. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, dituntut kerja keras dan keterpaduan dari aparatur dinas kesehatan dan peran aktif steakholder terkait dalam pembangunan kesehatan yang lebih efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang. Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini diharapkan ada keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan, sekaligus untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 akan Saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG

dr. YULIES NURAYA
Pembina Tingkat I
NIP. 19680715 200212 2 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS KESEHATAN KAB. PEMALANG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota.		V	Belum Dilaksanakan	Dilaksanakan Tahun Depan
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dankegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/ wali kota.	V			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaranprioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang telah disahkan.	V			

Pemalang, September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG

dr. YULIES NURAYA
Pembina Tingkat I
NIP. 19680715 200212 2 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 100.3/ 24/ DINKES
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pmbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana kerja;
b. Merumuskan dan Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan rencana perangkat daerah;
c. Melakukan penyesuaian dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2026;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Februari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG

dr. YULIES NURAYA
Pembina Tingkat I
NIP 19680715 200212 2 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 100.3/ 24/ DINKES
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
7.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
9.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Wahyudi, SKM, MPH)	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Riyanto, SE)	Anggota
11.	Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Yudi Susanto, A.Md)	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEMALANG

dr. YULIES NURAYA
Pembina Tingkat I
NIP. 19680715 200212 2 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun 2 (dua) Dokumen Perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja PD merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah *menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah*.

Sebagai dokumen perencananaan tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang *secara substansial penerjemahan* dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;
c. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2025, penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada rencana kerja Kementerian Sosial, BKKBN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dimana isu-isu strategis yang ada dalam dokumen perencanaan 3 (tiga) kementerian dan pemerintah provinsi dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Telahaan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan dibidang sosial tahun 2025 diarahkan pada Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, dengan prioritas pada:

a. Penataan asistensi sosial: KIS,KIP dan KKS; dan
b. Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH.

Kebijakan yang ditempuh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka mempercepat pembangunan Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk, adalah dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan kesehatan reproduksi yang berkualitas, penyediaan sarana prasarana dan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan penggunaan MKJP dan pengurangan drop out, peningatan jumlah dan kapasitas PKB/PLKB, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga didukung dengan penataan kelembagaan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan KB. Sedangkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional sesuai dengan kebijakan pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk traficking, meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan dan rehabiltasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas sejalan dengan Tujuan Misi Bupati Pemalang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Visi Ke-**4 "Mulya"** sedangkan untuk misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung **Misi ke-5 "Silaturahmi"** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah:

1. Tujuan ke-3 **"Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan"**
2. Tujuan ke-4 **"Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat"**

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 20256 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2026; dan/atau
Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi pengeluaran dalam APBD mengalami atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.
Dengan kata lain renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.
Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. menentukan arah pelaksanaan pembangunan, prioritas program dan kegiatan dan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025- 2029.
2. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2026.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur selama 1 tahun.

4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam 1 tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah :

1. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
2. Menciptakan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya, serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja;
4. Mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pencapaian target standar pelayanan minimum sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja serta Sistematika Penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tujuan dan sasaran Renja serta program, kegiatan, subkegiatan tahun 2026. Antara lain memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang pada tahun 2024, tahun 2025 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebesar Rp. **39.287.701.036,00** yang terbagi dalam 16 program dan 39 kegiatan 134 Sub Kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2021 mengalami refokusing anggaran (pengurangan anggaran) dari 16 Sub Kegiatan sebesar **Rp 5.855.922.000,00**, dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp **37.972.973.376,00** atau sebesar **96,65%.**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**39.287.701.036,00**	**37.972.973.376,00**	**96,65**	**31.100.819.840,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**37.408.846.716,00**	**36.457.110.916,00**	**97,46**	**29.633.526.840,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	4.872.786.000,00	4.602.685.826,00	94,46	4.028.366.576,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.297.580.716,00	25.951.477.090,00	98,68	20.122.256.264,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.238.480.000,00	5.902.948.000,00	94,62	5.482.904.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**37.408.846.716,00**	**36.457.110.916,00**	**97,46**	**29.633.526.840,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.878.854.320,00**	**1.515.862.460,00**	**80,68**	**1.467.293.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.854.320,00	193.258.460,00	94,80	1.467.293.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.675.000.000,00	1.322.604.000,00	78,96	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**1.878.854.320,00**	**1.515.862.460,00**	**80,68**	**1.467.293.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**39.287.701.036,00**	**37.972.973.376,00**	**96,65**	**31.100.819.840,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(39.287.701.036,00)**	**(37.972.973.376,00)**	**96,65**	**(31.100.819.840,00)**

Tahun Anggaran 2025 (Tahun Berjalan)

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran dengan rincian belanja sebagai berikut :

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN PENETAPAN JUMLAH (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN JUMLAH (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp.)
5			**BELANJA DAERAH**				
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**31.917.168.685,00**	**34.822.138.985,00**	**35.640.417.985,00**	**3.423.249.300,00**
5	1	01	Belanja Pegawai	5.442.248.000,00	5.442.248.000,00	5.471.581.000,00	29.333.000,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.220.685,00	28.305.190.985,00	27.690.466.985,00	2.290.246.300,00
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.074.700.000,00	1.074.700.000,00	2.478.370.000,00	1.403.670.000,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**323.868.115,00**	**323.868.115,00**	**337.922.115,00**	**14.054.000,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	323.868.115,00	323.868.115,00	337.922.115,00	14.054.000,00
			Jumlah	**32.241.036.800,00**	**35.146.007.100,00**	**35.978.340.100,00**	**3.737.303.300,00**

Jumlah anggaran penetapan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebesar **Rp**. **32.241.036.800,00** pada Perubahan anggaran menjadi **Rp. 35.978.340.100,00** terbagi dalam 16 Program, 36 Kegiatan, 143 Sub Kegiatan. Dalam Pergeseran Anggaran DinsosKBPP Kabupaten Pemalang mendapat tambahan anggaran DBHCHT Sebesar **Rp. 3.523.540.800,00** dan potongan anggaran (Recofusing) sebesar **Rp. 618.570.500,00.** Kemudian pada momen Perubahan Anggaran DinsosKBPP Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 832.333.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 29.333.000,00
- Kegiatan Sosialisasi Rp. 48.000.000,00
- Kegiatan GOW Rp. 50.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung Rp. 300.000.000,00
- Penyusunan Perbub Santunan Kematian Rp. 15.000.000,00
- Listrik Rp. 50.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

➢ Sarpras Rumah Singgah	Rp. 40.000.000,00
➢ Dana Insentif Fiskal	Rp. 300.000.000,00
Jumlah	Rp. 832.333.000,00

Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah dan sedang berjalan dapat dijelaskan bahwa capaian untuk triwulan II secara umum kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dikarenakan adanya kebijakan untuk menyesuaikan kegiatan dengan pergeseran anggaran maupun perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan pada awal tahun sehingga baik kinerja maupun progress capaian keuangan yang masih rendah.

Untuk mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendapatkan anggaran perubahan untuk melaksanakan Kegiatan Prioritas Santunan Kematian, yaitu penyusunan Peraturan Bupati sebagai regulasi dan percepatan pelayanan penyaluran Santunan Kematian kepada masyarakat.

Berdasarkan Inpres No 4 Tahun 2025 (Perintah Presiden untuk membangun basis data tunggal sosial dan ekonomi nasional) dan Permensos No 3 Tahun 2025 (Peraturan Menteri Sosial yang menjadi dasar hukum perubahan dan pemberlakuan DTSEN). DTSEN secara resmi menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi basis data utama untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan sosial diberlakukan mulai tanggal 5 Februari 2025. DTSEN adalah basis data tunggal yang baru dan menggantikan DTKS, yang sebelumnya digunakan. Penyaluran bansos berdasarkan DTSEN dimulai pada akhir Maret 2025. Data untuk DTSEN akan diperbarui setiap tiga bulan sekali untuk menjaga keakuratan dan relevansinya, yang akan melibatkan pendamping sosial, BPS, dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Peran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yaitu fokus untuk kategori miskin dan sekitarnya untuk penyaluran dana sosial. Proses seleksi penerima bantuan di DTSEN ada 2, yaitu usulan ke Pemerintah Daerah setempat (Desa/Kelurahan/nama lain), dan usul sanggah. Kedua proses tersebut akan dilakukan groundchek oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dilakukan persetujuan. Dengan kata lain, peran Dinas Sosial dalam seleksi, pengecekan lapangan, dan penyaluran bantuan berbasis DTSEN. Penggabungan 3 basis sumber data yang berasal dari DTKS, Regsosek, P3KE dan kemudian dipadankan baik secara individu maupun keluarga dengan basis data NIK. DTSEN digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yang terukur dan berkelanjutan, Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga (SK Mensos No 79 Tahun 2025) sebagai berikut :

PKH	BPNT/Sembako	PBI JKN	Asistensi Rehabsos	Program Kemensos Lainnya
Desil 1–4	Desil 1 – 5			

Penerima Program dinyatakan tidak layak jika :

- Alamat tidak ditemukan
- Individu tidak ditemukan
- Meninggal dunia
- Memiliki pekerjaan sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD/Pejabat negara
- Anggota keluarga ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD/Pejabat negara

Data DTSEN Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Desil	Jumlah
1	Desil 1	251,965
2	Desil 2	209,411
3	Desil 3	148,194
4	Desil 4	133,595
5	Desil 5	131,861
6	Desil 6	112,882
7	Desil 7	125,010
8	Desil 8	122,601
9	Desil 9	159,252
10	Desil 10	166,823
11	Belum di rangking	30,696
Total		**1,592,290**

Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KABUPATEN PEMALANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.2.08.2.14.01.0000	**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
01.06	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1.06 . 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah dan ketepatan laporan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
		SAKIP	**Nilai**	**65,00**	**63,15**	**65,00**	**65,36**	**100,55**	**61,20**	**65,36**	**106,80**
		IRB	**Nilai**	**61,30**	**-**	**61,30**	**-**	**-**	**61,30**	**61,30**	**100,00**
1.06 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	**100,00**	6	6	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	**100,00**	2	2	**100,00**
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	12	3	3	3	**100,00**	3	3	**100,00**
1.06 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	27	30	28	**93,33**	30	34	**113,33**
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	-	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	6	6	6	**100,00**	6	6	**100,00**
1.06 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya**	**%**	**100**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06 . 01 . 2.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	-	**50**	50	**100,00**	**50**	**50**	**100,00**
1.06 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan/pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-	-	1	1	**100,00**
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Julah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	250	250	250	**100,00**	250	250	**100,00**
1.06 . 01 . 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel			3				-	**1**	6	**200,00**
1.06 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1		**0**	0	-	**1**	**1**	**100,00**
1.06 . 01 . 2.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1		**1**	1			**1**	**100,00**
1.06 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	**100,00**	12	12	**100,00**
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	**100,00**	12	12	**100,00**
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100**	**100,00**
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	85	99	99	**100,00**	99	99	**100,00**
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	**100,00**	2	2	**100,00**
1.06 . 02	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase psks yang diberdayakan**	**%**	**40,13**	**6,62**	**32,11**	**32,11**	**100,00**	**36,12**	**36,12**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06 . 02 . 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**%**	**40,13**	**6,62**	**32,11**	**32,11**	**100,00**	**36,12**	**36,12**	**100,00**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	372	432,00	10	10	**100,00**	332	332	**100,00**
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	14	14	14	**100,00**	14	14	**100,00**
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	40	40	200	200	**100,00**	250	250	**100,00**
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	20	10	10	**100,00**	65	65	**100,00**
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	13	10	10	10	**100,00**	15	15	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06 . 03	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani**	**%**	**100**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06 . 03 . 2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Presentase pemulangan warga negara migran yang tertangani**	**%**	**100**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	5	5	-	-	-	**15**	**15**	**100,00**
1.06 . 04	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**%**	**100,00**	**100,00**	**68,00**	**100,00**	**147,06**	**85,00**	**70,00**	**82,35**
1.06 . 04 . 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**Orang**	**239**	**1.435**	**10.062**	**10.062**	**100,00**	**3.350**	**2.989**	**89,22**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1408	1.473	58	58	**100,00**	180	150	**83,33**
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1408	568	30	30	**100,00**	100	90	**90,00**
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	274	43	43	**100,00**	20	20	**100,00**
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	90	10	10	**100,00**	29	29	**100,00**
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	165	1196	1196	**100,00**	815	750	**92,02**
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	190	3630	3630	**100,00**	1816	1650	**90,86**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	110	30	30	**100,00**	75	75	**100,00**
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	145	5000	800	**16,00**	136	75	**55,15**
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	168	-	-	-	50	**35**	**70,00**
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	152	50	50	**100,00**	16	12	**75,00**
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	20	-	-	-	30	**30**	**100,00**
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	60	15	15	**100,00**	83	73	**87,95**
1.06 . 04 . 2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**Orang**	**12**	**122**	**4.083**	**4.083**	**100,00**	**1.189**	**1.128**	**94,87**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	110	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12		-	-	-	100	**85**	**85,00**
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12		604	604	**100,00**	56	56	**100,00**
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12		4373	4373	**100,00**	1031	985	**95,54**
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10		140	140	**100,00**	-	-	-
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	-	-	-	2	**2**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06 . 05	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase Pemberian Jaminan Perlindungan Sosial pada Penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan satu dan dua**	**%**	**28,51**	**27,53**	**28,49**	**28,49**	**100,00**	**28,50**	**0,00**	**0,00**
1.06 . 05 . 2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**Orang**	**10**	**120,00**	**5**	**5**	**100,00**	**130**	**130**	**100,00**
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10,00	5	5	**100,00**	5	5	**100,00**
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10,00	5	5	**100,00**	5	5	**100,00**
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100,00	5	5	**100,00**	120	120	**100,00**
1.06 . 05 . 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terupdatenya Data Fakir miskin**	**Dokumen**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100,00**	**12**	**12**	**100,00**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	1010996	1.010.996	1.010.996	1.010.996	**100,00**	45.000	28.500	**63,33**
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	210589	210.589	210.589	210.589	**100,00**	45.000	28.500	**63,33**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	210.589	2.914	2936	2936	**100,00**	2693	2693	**100,00**
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3	1	1	**100,00**	10	10	**100,00**
1.06 . 06	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**0,00**
1.06 . 06 . 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	50	20	20	**100,00**	225	100	**44,44**
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	25	20	20	**100,00**	225	100	**44,44**
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	3	3	3	**100,00**	3	-	**0,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	10	5	5	**100,00**	35	-	**0,00**
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	5	5	**100,00**	40	-	**0,00**
1.06 . 06 . 2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiap siagakan bencana**	**desa**	**24**	**12**	**4**	**1**	**25,00**	**1**	**1**	**100,00**
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	6	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37	37	37	37	**100,00**	40	30	**75,00**
1.06 . 07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.06 . 07 . 2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	**100,00**	-	-	-
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2.08	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
2.08 . 02	**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**	**%**	**5,6**	**2,73**	**5,40**	**5,24**	**97,04**	**5,6**	-	-
2.08 . 02 . 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang melaksanaan pengarusutama an gender**	**%**	**100**	**85,00**	**90,00**	**90,00**	**100,00**	**95**	**95**	**100,00**
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkroninasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38	38	41	41	**100,00**	-	-	-
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40	40	41	41		-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan PUG di Tingkat Kabupaten/Kota	Kebijakan			1	1		1	1	**100,00**
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	orang			70	70		50	50	**100,00**
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan			1	1		1	1	**100,00**
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	orang			40	40		50	50	**100,00**
2.08 . 02 . 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**%**	**0,075**	**0,060**	**0,065**	**0,065**	**100,00**	**0,070**	**-**	**0,00**
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	**1**		1	1		1	-	**0,00**
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	5	5	35	35	**100,00**	30	30	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08 . 02 . 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**67,00**	**52,00**	**57,00**	**57,00**	**100,00**	**62,00**	**-**	**-**
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	**35**		35	35	**100,00**	35	35	**100,00**
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	70	400	400	**100,00**	350	350	**100,00**
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	3		1	1	**100,00**	1	-	**-**
2.08 . 03	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif**	**%**	**100**	**51,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**	**-**	**-**
2.08 . 03 . 2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/ 100.000)**	**%**	**7,3**	**-**	**7,5**	**7,5**	**100,00**	**7,4**	**-**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangakt Daereh yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40	-	41	41	**100,00**	20	-	-
2.08 . 03 . 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	-	-
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	100	50	22	22	**100,00**	2	2	**100,00**
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8	10	8	8	**100,00**	11	1	**9,09**
2.08 . 03 . 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**100**	**84,27**	**90,39**	**84,27**	**93,23**	**96,50**	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasaran Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	-	-
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50		30	20	**66,67**	30	-	-
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	50	15	5	5	**100,00**	12	-	-
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumaen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1	1	**100,00**	1	-	-
2.08 . 04	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase pernikahan usia anak**	**%**	**4,00**	**2,45**	**4,50**	**2,45**	**54,44**	**4,50**	**0,00**	**0,00**
2.08 . 04 . 2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	20	30	50	50	**100,00**	65	65	**100,00**
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08 . 04 . 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	50	100	100	**100,00**	100	100	**100,00**
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08 . 04 . 2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**%**	**38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	15	1	**1**	1	**100,00**	**1**	**1**	**100,00**
2.08 . 05	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak**	**%**	**92,59**	**66,63**	**85,18**	**85,18**	**100,00**	**88,88**	**-**	**-**
2.08 . 05 . 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan data gender dan anak**	**%**	**75,00**	**37,50**	**50,00**	**50,00**	**100,00**	**62,50**	**-**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	3	3	**100,00**	1	-	-
2.08 . 06	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak**	**%**	**45,95**	**22,59**	**33,33**	**33,33**	**100,00**	**39,64**	-	-
2.08 . 06 . 2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA**	**%**	**88,33**	**63,33**	**78,66**	**78,66**	**100,00**	**80,00**	-	-
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha	Organisasi	25	25	25	25	**100,00**	25	25	**100,00**
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08 . 06 . 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**70,19**	**52,43**	**58,35**	**58,35**	**100,00**	**64,27**	**64,27**	**100,00**
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	35	25	25	**100,00**	25	25	**100,00**
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejarinng Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	**100,00**	1	1	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08 . 07	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif**	**%**	**100**	**48,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**
2.08 . 07 . 2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina**	**%**	**100**	**30,00**	**40,00**	**40,00**	**100,00**	**50,00**	**-**	**-**
2.08.07.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenanngan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	5	40	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100	1	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu	Kegiatan	1		3	3	**100,00**	3	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Orang			100	100	**100,00**	100	-	-
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota	Dokumen			1	1	**100,00**	1	-	-
2.08 . 07 . 2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif**	**%**	**66,15**	**43,08**	**50,77**	**50,77**	**100,00**	**58,46**	-	-
2.08.07.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15,00	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	50	15,00	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.07.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2,00	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1,00	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	15		15	15	100,00	20	-	-
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan	Orang	30	480,00	20	20	100,00	80	35	**43,75**
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	88,33		**71,66**	**71,66**	**100,00**	**80**	-	-
2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Lembaga	2		2	2	100,00	2	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	1		1	1	100,00	1	-	-
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Orang	25		30	30	100,00	30	-	-
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	2		1	1	100,00	1	-	-
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memeperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang	25		2	2	100,00	2	-	-
2.14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
2.14 . 02	**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun**	**%**	**33,00**	**21,80**	**34,00**	**21,20**	**137,65**	**34,00**	**-**	**-**
2.14 . 02 . 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pen gawasan serta pelaporan KKBP**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2.14 . 03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Angka Prevalensi Modern CPRm**	**%**	**24,00**	**70,29**	**23,30**	**71,05**	**304,94**	**70,75**	**-**	**-**
2.14 . 03 . 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Prosentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1	**100,00**
2.14 . 03 . 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KB**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14 . 03 . 2.02 . 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,Pergerakan,Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana)untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana(PKB/PLKB)	Laporan	1	1	-	-	-			-
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil PenguatanPelaksanaan Penyuluhan,Penggerakan, Pelayanan danPengembangan Program BanggaKencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan KeluargaBerencana) untuk PetugasKeluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana(PKB/PLKB)	Laporan	1	1	1	1	100,00	1	-	-
2.14 . 03 . 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB**	**%**	**70,56**	**70,36**	**70,36**	**70,36**	**100,00**	**70,46**	-	-
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	Laporan	6	6	4	4	100,00	6	6	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	550	5	10	10	100,00	304	-	-
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Pengunaan MKJP	Laporan	1	1	1	1	100,00	1	-	-
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	1	1	100,00	2	-	-
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	14	14	14	14	100,00	10	-	-
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Aksektor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	80	600	350	350	100,00	1470	-	-
2.14 . 03 . 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Prosentase organisasi kemasyarakat an peduli KB**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	2	**2**	**2**	100,00	**2**	**2**	**100,00**
2.14.03.2.04.0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Kb yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan,dan Keluarga Berencana)di Kampung KB	Kampung								
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	237	51	237	237	100,00	-	-	-
2.14 . 04	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan**	**%**	**86,14**	**71,03**	**85,94**	**85,94**	**100,00**	**86,00**	-	-
2.14 . 04 . 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.04.2.01.0001	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	51	51	51	51	100,00	-	-	-
2.14.04.2.01.0002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	1	32	32	32	100,00	15	-	-
2.14.04.2.01.0003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2	2	5	5	100,00	4	4	100,00
2.14.04.2.01.0004	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	138	840	4.188	4.188	100,00	222	222	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.04.2.01.0005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	224	224	222	222	100,00	223	223	100,00
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1	1	1	1	100,00	-	-	-
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	1	32	32	32	100,00	15	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	138	840	4.188	4.188	100,00	222	222	100,00
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	2	2	5	5	100,00	4	4	100,00
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	224	224	222	222	100,00	223	223	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	51	51	51	51	100,00	-	-	-
2.14 . 04 . 2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persetase Kecamatam ng di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum**	**%**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2.14.04.2.02.0001	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	1	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaia Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100)
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan			1	1	**100,00**	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa terhadap indikator kinerja aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, maka capaiannya dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diwajibkan mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD yaitu urusan sosial yang masuk dalam kategori urusan pemerintah wajib pelayanan dasar serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang masuk dalam kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Pada tahun 2025 pencapaian indikator kinerja target akhir periode RPJMD dari ketiga urusan tersebut yaitu sebanyak 25 indikator, hamper semuanya telah memenuhi target.

Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 2.2.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KABUPATEN PEMALANG

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase PPKS yang ditangani	%	√	√		20,42	68	70	72	66,6	-	70	72	
2	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks		√		100	100	100	100	100	-	100	100	
3	% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%		√		-	100	100	100	100	-	100	100	
4	IKM	Nilai		√		85,00	86,1	86,15	86,2	86	-	86,15	86,2	
5	SAKIP	Nilai		√		61,00	65,1	65,15	65,2	65	-	65,15	65,2	
6	IPG	Indeks		√		86,23	87,45	87,5	87,55	87,37	-	87,5	87,55	
7	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks		√		0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	-	0,39	0,38	
8	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai		√		Nindya	Nindya	Nindya (780)	Utama (820)	Nindya	-	Nindya (780)	Utama (820)	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%		√		-	1,23	1,22	1,21	1,25	-	1,22	1,21	
10	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa		√		2,47	2,12	2,11	2,1	2,18	-	2,11	2,1	
11	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka		√		-	63,60-64,81	64,29-64,32	65,05-65,10	62,77	-	64,29-64,32	65,05-65,10	
12	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka		√		-	65,1	65,9	66,7	64,3	-	65,9	66,7	
13	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			√	100	100	100	100	100		100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%			√	100	100	100	100	100		100	100	
15	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%			√	5,4	4,2	4,3	4,5	5,4		4,3	4,5	
16	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	%			√	100	100	100	100	100		100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 pddk prpuan			√	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		0,02	0,02	
18	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa			√	2,18	2,12	2,11	2,1	2,18		2,11	2,1	
19	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%			√	70,75	70,75	70,85	70,95	70,75		70,85	70,95	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%			√	9,78	9,68	9,58	9,48	9,78		9,58	9,48	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Pemalang, maka perlu upaya penanganan yang optimal terhadap PPKS dengan mensinergikan berbagai sumber daya dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga upaya pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Masih rendahnya cakupan penanganan PPKS di Kabupaten Pemalang antara lain disebabkan karena belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS. Jumlah PSKS di Kabupaten Pemalang tiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

Sedangkan pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditemui masalah adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu posisi Indek Pembangunan Gender di Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan daerah sekitar pada posisi paling rendah sehingga terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, beberapa permasalahan yang ada antara lain anggaran yang ada dalam kegiatan keluarga berencana semakin berkurang, sehingga akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi yang murah juga rendah. Disamping itu keterbatasan jumlah petugas penyuluh belum bisa mencapai 1 desa 1 petugas sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

2.3.1 Beberapa isu permasalahan penting dalam bidang sosial, antara lain :

a. Belum optimalnya tingkat pemberdayaan PPKS
b. Masih belum optimalnya penanganan PPKS sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
c. Verifikasi dan Validasi Data PPKS di kabupaten pemalang belum Optimal, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya tim Ferval secara terpadu;
d. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai rumah singgah untuk penampungan dan penanganan PPKS

Dari beberapa isu tersebut diatas apabila tidak diantisipasi maka dampak yang ditimbulkan antara lain masih belum meningkatnya kesejahteraan sosial melalui penanganan PPKS dan pemberdayaan PSKS.

2.3.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan anak dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini

https://jdih.pemalangkab.go.id/

terlihat dari nilai IDG Kabupaten Pemalang yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasioanal walaupun capaian persentase keterwakilan di instansi pemerintah dan posisi perempuan sebagai tenaga manajer, administrasi dan teknisi di Kabupaten Pemalang sudah cukup tinggi yaitu 62,76%;

b. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak karena adanya keterbatasan SDM dan sarpras UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) yang terdapat di desa;
c. Kurangnya peran perempuan dalam peningkatan pendapatan rumah tangga;
d. Belum optimlanya perencanaan dan penganggaran responsive gender

Dari beberapa isu diatas makan dampak yang dimungkinkan timbul antara lain semakin belum meratanya hasil pembangunan yang dirasakan perempuan dan makin belum terlindunginya perempuan dan anak dari berbagai kemungkinan kekerasan sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang tidak mungkin dibendung di masyarakat.

2.3.3 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Masih rendahnya partisipasi peserta KB aktif dan pengendalian penduduk
b. Meningkatnya angka kelahiran remaja
c. Masih tingginya unmeet need dan DO dalam ber KB
d. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB, ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alat kontrasepsi MOP, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang MOP
e. Masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB, prasarana dan sarana pelayanan KB. Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 222 kelurahan/ desa yang ditangani oleh 74 orang PLKB sehingga ratio PLKB 1:3, artinya 1 orang PLKB melayani 3 desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisa terhadap rancangan awal diperoleh informasi bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, diakomodir dalam 16 (enam belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) sub kegiatan. Apabila dilihat dari sisi penganggaran indikatif semua sub kegiatan sudah sesuai antara indikasi anggaran dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan indikatif pada Rencana Kerja yang ada.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KABUPATEN PEMALANG

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG					32.241.036.800					32.652.200.000	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase PPKS yang ditangani	70,00	12.864.725.800	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase PPKS yang ditangani	70,00	13.088.000.000	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS		Indeks pencapaian SPM Sosial	100,00		Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS		Indeks pencapaian SPM Sosial	100,00		
			% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00				% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah					2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah					
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,15				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,15		
			SAKIP	65,15				SAKIP	65,15		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.370.250.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.492.000.000	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	100,00	5.742.248.000			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	100,00	5.817.000.000	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	100,00	1.628.002.000			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	100,00	1.675.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**100,00**	**225.803.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**100,00**	**235.000.000**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	107.346.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	190.000.000,00	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.457.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	105.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.000.000,00	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100,00**	**5.516.445.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100,00**	**5.582.000.000**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.442.248.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.500.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	45.539.500,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.295.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.000.000,00	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	22.362.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	25.000.000,00	
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**100,00**	**31.756.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**100,00**	**32.000.000**	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	31.756.400,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	32.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**100,00**	**336.102.565**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**100,00**	**354.500.000**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.098.480,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	91.176.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.000.000,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.689.585,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.000.000,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.051.900,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	16.240.600,00	Penyediaan Barang Cetakan	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	18.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan , Semua Kel/Desa	Penggandaan yang Disediakan			dan Penggandaan	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penggandaan yang Disediakan			
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	13.500.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	153.446.000,00	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	160.000.000,00	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100,00**	**98.582.115**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100,00**	**105.000.000**	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.342.115,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	55.000.000,00	
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	48.240.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000,00						
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**893.669.930**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**908.500.000**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45.000.930,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	47.000.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.101.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.040.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.500.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	699.528.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	710.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**100,00**	**266.890.990**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**100,00**	**275.000.000**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99 Unit	138.970.990,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99 Unit	145.000.000,00	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	127.920.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000.000,00	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase PSKS yang dibina**	**100,00**	**296.978.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase PSKS yang dibina**	**100,00**	**310.500.000**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**40,00**	**296.978.000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**40,00**	**310.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Keluarga	45.075.500,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Keluarga	50.000.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Lembaga	12.376.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Lembaga	15.000.000,00	
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2.314.000,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2.500.000,00	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	16.604.500,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang	30 Orang	18.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Meningkat Kapasitasnya			
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	14 orang	220.608.000,00	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	14 orang	225.000.000,00	
1.06.03.2	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**		**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial**	**100,00**	**11.925.000**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**		**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial**	**100,00**	**15.000.000**	
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		**Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**	**100,00**	**11.925.000**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		**Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**	**100,00**	**15.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	11.925.000,00	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15.000.000,00	
1.06.04.2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100,00**	**4.483.177.800**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100,00**	**4.545.000.000**	
			Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	**68,00**				**Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani**	**68,00**		
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan**		**Persentase Fasilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**	**100,00**	**4.176.200.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta**		**Persentase Fasilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**	**100,00**	**4.220.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengemis di Luar Panti Sosial		**Sosial yang direhabilitasi**			**Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Sosial yang direhabilitasi**			
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	277.709.000,00	Penyediaan Permakanan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	280.000.000,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	84.150.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	85.000.000,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	22.870.700,00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	25.000.000,00	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	30.922.100,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	35.000.000,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	815 Orang	298.880.800,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	815 Orang	300.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Semua Kel/Desa	Kewenangan Kabupaten/Kota			Spiritual, dan Sosial	Semua Kel/Desa	Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1819 Orang	2.684.325.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1819 Orang	2.700.000.000,00	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	324.812.100,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	325.000.000,00	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	146.108.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	150.000.000,00	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	87.813.200,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	90.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	3.980.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	5.000.000,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	165.207.100,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang	170.000.000,00	
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	49.422.000,00	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	55.000.000,00	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS**		**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**100,00**	**306.977.800**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban**		**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**100,00**	**325.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan NAPZA di Luar Panti Sosial					**HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**					
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	37.852.800,00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	40.000.000,00	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Orang	21.400.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Orang	25.000.000,00	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1031 Orang	91.725.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1031 Orang	100.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	1.000.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	1.000.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	154.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	160.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.05.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan**	**100,00**	**437.395.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan**	**100,00**	**449.000.000**	
			Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**100,00**				**Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100,00**		
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**120**	**42.297.200**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**120**	**45.500.000**	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	2.675.000,00	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3.000.000,00	
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6.180.500,00	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000,00	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	33.441.700,00	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	35.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terupdatenya Data Fakir miskin**	**12**	**395.097.800**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terupdatenya Data Fakir miskin**	**12**	**403.500.000**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1010996 Orang	310.025.300,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1010996 Orang	315.000.000,00	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.131.000,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.500.000,00	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	42.941.700,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	45.000.000,00	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	210589 Usulan	39.999.800,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	210589 Usulan	41.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.06.2	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**100,00**	**250.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**100,00**	**259.000.000**	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	**100,00**				**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100,00**		
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi**	**100,00**	**178.382.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi**	**100,00**	**184.000.000**	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	51.450.000,00	Penyediaan Makanan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	53.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	98.550.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	100.000.000,00	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	9.864.400,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.500.000,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		13.931.600,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		15.000.000,00	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	4.586.000,00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	5.500.000,00	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**100,00**	**71.618.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**		**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**100,00**	**75.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	44.108.100,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	45.000.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	27.509.900,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	30.000.000,00	
1.06.07.2	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**100,00**	**15.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**100,00**	**17.500.000**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik**	**100,00**	**15.000.000**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik**	**100,00**	**17.500.000**	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	7.235.000,00	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	10.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nasional Kabupaten/Kota			Nasional Kabupaten/Kota		Nasional Kabupaten/Kota			
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	6.765.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	7.500.000,00	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	1.000.000,00	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		**IPG**	**87,50**	**1.128.660.000**	**Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**IPG**	**87,50**	**1.224.800.000**	
	Sasaran : Meningkatnya kualtas		**IKG (indek ketimpangan gender)**	**0,38**		**Sasaran : Meningkatnya kualtas**		**IKG (indek ketimpangan gender)**	**0,38**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak					pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak					
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nindya (780)				Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nindya (780)		
2.08.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.02.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,30	117.500.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,30	142.000.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	100,00	50.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	100,00	63.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	7.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	10.000.000,00	
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	10.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraa n PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	12.000.000,00	
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	10.000.000,00	Pendampingan Penyelenggaraa n PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	11.000.000,00	
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	7.500.000,00	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraa n PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	10.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	7.500.000,00	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 Orang	10.000.000,00	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**0,072**	**22.500.000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**0,072**	**30.000.000**	
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	15.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	30 Lembaga	20.000.000,00	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	10 orang	7.500.000,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	10 orang	10.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**67,00**	**45.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**67,00**	**49.000.000**	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	35 Lembaga	10.000.000,00	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	35 Lembaga	11.000.000,00	
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	20.000.000,00	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	21.000.000,00	
2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	1 laporan	15.000.000,00	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	1 laporan	17.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**0,02**	**444.850.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**0,02**	**468.000.000**	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	**100,00**				**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100,00**		
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**7,30**	**124.250.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**7,30**	**135.000.000**	
2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	25.000.000,00	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	26.000.000,00	
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	26.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Lembaga	54.250.000,00	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Lembaga	58.000.000,00	
2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	20.000.000,00	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	25.000.000,00	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif**	**100,00**	**223.334.000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan**		**Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif**	**100,00**	**230.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kabupaten/Kota					
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	214.924.800,00	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	220.000.000,00	
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	8.409.200,00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	10.000.000,00	
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**100,00**	**97.266.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**100,00**	**103.000.000**	
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	1 Lembaga	5.000.000,00	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	1 Lembaga	6.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)			Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)			
2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Orang	8.496.000,00	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Orang	9.000.000,00	
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30 orang	71.270.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	30 orang	73.000.000,00	
2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	12.500.000,00	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	15.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.04.2	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya**	**40**	**210.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya**	**40**	**224.000.000**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**100,00**	**72.000.000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**100,00**	**81.000.000**	
2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	5.000.000,00	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	6.000.000,00	
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	47.000.000,00	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.					Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota ten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.					
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	20.000.000,00	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	25.000.000,00	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**		**Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan**	**100,00**	**133.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan**		**Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan**	**100,00**	**137.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**kesetaraan gender dan hak anak**			**Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**kesetaraan gender dan hak anak**			
2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	10.000.000,00	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	11.000.000,00	
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Lembaga	96.000.000,00	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Lembaga	98.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	27.000.000,00	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	28.000.000,00	
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**100,00**	**5.000.000**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**100,00**	**6.000.000**	
2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000,00	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang	6.000.000,00	
2.08.05.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**% OPD yang memiliki data gender**	**92,59**	**20.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**% OPD yang memiliki data gender**	**92,59**	**22.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak**	**65**	**20.000.000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak**	**65**	**22.000.000**	
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	11.000.000,00	
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	1 Lembaga	10.000.000,00	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	1 Lembaga	11.000.000,00	
2.08.06.2	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak**	**48,87**	**168.500.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak**	**48,87**	**181.000.000**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA**	**82,95**	**152.500.000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah , dan Dunia Usaha**		**Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA**	**82,95**	**162.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	25.000.000,00	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	26.000.000,00	
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	55.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga	52.500.000,00	Pendampingan Penyelenggaraa n Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga	55.000.000,00	
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	26.000.000,00	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**		**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**67,26**	**16.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan**		**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**67,26**	**19.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewenangan Kabupaten/Kota					**Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**					
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	25 Orang	7.000.000,00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	25 Orang	8.000.000,00	
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.500.000,00	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.000.000,00	
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	3.000.000,00	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	3.500.000,00	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	4.000.000,00	
2.08.07.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**	**100**	**167.810.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**	**100**	**187.800.000**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina**	**60,00**	**23.000.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina**	**60,00**	**28.000.000**	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi	1 Kegiatan	15.000.000,00	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan	1 Kegiatan	17.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	, Semua Kel/Desa	dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota			pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota			
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	6.000.000,00	
2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	1 Kebijakan	3.000.000,00	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	1 Kebijakan	5.000.000,00	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif**	**100,00**	**123.310.000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif**	**100,00**	**130.000.000**	
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	3.000.000,00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban	20 Orang	5.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tingkat Kabupaten/Kota		Tingkat Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	119.310.000,00	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	125.000.000,00	
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	1.000.000,00	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan**	**83,33**	**21.500.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan**	**83,33**	**29.800.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak	1 Dokumen	3.000.000,00	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak	1 Dokumen	5.000.000,00	
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	5.500.000,00	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	8.000.000,00	
2.08.07.2.03.0012	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.500.000,00	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2 Orang	2.500.000,00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2 Orang	2.800.000,00	
2.08.07.2.03.0014	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	3.000.000,00	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	4.000.000,00	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,		**LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)**	**1,22**	**18.247.651.000**	**Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**		**LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)**	**1,22**	**18.339.400.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,16		Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk		TFR (Angka Kelahiran Total)	2,16		
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	64,29				Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	64,29		
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	66,30				IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	66,30		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,50	9.554.057.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,50	9.600.000.000	
			Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	100,00				Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	100,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP**	**100,00**	**9.554.057.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP**	**100,00**	**9.600.000.000**	
2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	9.554.057.000,00	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	9.600.000.000,00	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR**	**70,85**	**7.819.654.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR**	**70,85**	**7.851.900.000**	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	**9,58**				**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**9,58**		
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK**	**100,00**	**200.000.000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK**	**100,00**	**203.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	203.500.000,00	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100,00**	**119.700.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100,00**	**125.000.000**	
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	119.700.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	125.000.000,00	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan**		**Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB**	**70,50**	**6.185.554.000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat**		**Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB**	**70,50**	**6.203.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					**Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**					
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	15.000.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	20.000.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10 Orang	108.456.000,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10 Orang	110.000.000,00	
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	17.000.000,00	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	20.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	130.000.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	135.000.000,00	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	14 Laporan	5.719.654.000,00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	14 Laporan	5.720.000.000,00	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	350 Orang	195.444.000,00	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	350 Orang	198.000.000,00	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB**	**100,00**	**1.314.400.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan**		**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB**	**100,00**	**1.320.400.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kampung	1.314.400.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kampung	1.320.400.000,00	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Pesentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif**	**100,00**	**873.940.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Pesentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif**	**100,00**	**887.500.000**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Persesntase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif**	**100,00**	**872.940.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Persesntase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif**	**100,00**	**887.500.000**	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	25 Unit	195.000.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	25 Unit	200.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4188 Orang	222.000.000,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4188 Orang	225.000.000,00	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan	423.940.000,00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan	430.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	222 Orang	31.000.000,00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	222 Orang	32.500.000,00	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	0 Kelompok	1.000.000,00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting**	**100**	**1.000.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting**	**100**	**-**	
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	0 Kelompok	1.000.000,00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) ,	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui top-down saja tetapi juga harus secara bottom-up. Mekanisme secara top down yaitu melalui Forum Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja OPD, sedangkan mekanisme secara bottom up yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan reses. Untuk perencanaan tahun 2026, dalam forum-forum tersebut tidak ada usulan khusus untuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.4

Daftar Usulan Program dan Kegiatan dari Para PemangkuKepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah **"PEMALANG BERCAHAYA (Bersih, Cakap, Handal dan Mulya)"**.

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapain visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya, Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi, berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau,Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan
3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
5. **Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera
6. **Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7. **Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
8. **Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Visi Ke-**2 "Cakap"** dan Visi Ke-**4 "Mulya"** sedangkan untuk misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung **Misi ke-4 "Peduli"** dan **Misi ke-5 "Silaturahmi"** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah:

1. Tujuan ke-3 **"Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan"**
2. Tujuan ke-4 **"Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat"**

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai Sasaran diperlukan strategi-strategi, Kabupaten Pemalang membagi dalam penahapan pembangunan RPJMD di tiap tahun, sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pentahapan pada tahun 2026 bertemakan "Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia" dengan Prioritas pembangunan dimana khusus pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Pembangunan Sekolah Rakyat (Sekolah Unggulan)
2. Peningkatan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan tingkat kelahiran yang direncanakan, usia perkawinan yang semakin matang.
3. Peningkatan perlindungan sosial pada PPKS terutama pada PPKS yang terlantar, penguatan rumah singgah dalam penanganan PPKS. Penguatan data penduduk miskin sehingga mampu menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government, peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan budaya kerja.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai 4 (empat) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS ”** yang diukur dengan indikator Persentase PPKS yang ditangani, merupakan ukuran pencapaian SPM Sosial dan KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang merupakan hasil dari bentuk Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang kepada masyarakat penerima manfaat.
2. **“Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak**” yang diukur dengan indikator sebagai berikut :
   - **IKG (indek ketimpangan gender)** dan **Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dimana IKG (indek ketimpangan gender)** merupakan ukuran yang mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.
   - **Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)** adalah penilaian yang mengacu pada sistem pembangunan berbasis hak anak, yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. KLA dinilai berdasarkan 31 indikator yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Bahwa setiap anak di suatu wilayah mendapatkan hak-haknya terpenuhi, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
3. **“Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk”** yang diukur dengan indikator sebagai berikut :
   - **TFR (Angka Kelahiran Total)**, **Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)** dan **IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)**, dimana **TFR** merupakan indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya usia 15-49 tahun) jika ia hidup hingga akhir masa subur dan mengikuti pola kelahiran saat ini. TFR yang tinggi dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang pesat, sedangkan TFR yang rendah dapat menunjukkan pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan penurunan.
   - **IBangga** merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini mengukur tiga dimensi utama yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang masing-masing diwakili oleh beberapa indikator dan variabel.
   - **IPBK** adalah indeks komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah telah memperhatikan aspek kependudukan. IPBK menjadi indikator untuk melihat integrasi isu kependudukan, seperti pertumbuhan, persebaran, kualitas, dan mobilitas penduduk, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kata lain,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

IPBK mencerminkan bagaimana penduduk menjadi fokus utama, baik sebagai subjek maupun objek, dalam proses pembangunan. IPBK mengukur lima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu:

a. Partisipasi: Seberapa besar penduduk terlibat dalam proses pembangunan.
b. Keberlanjutan: Sejauh mana pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya kependudukan.
c. Pemihakan: Seberapa besar pembangunan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
d. Integrasi: Sejauh mana isu kependudukan terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan.
e. Kesetaraan: Sejauh mana pembangunan memberikan kesempatan yang sama bagi semua penduduk.

IPBK juga berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPBK, yang berarti pembangunan yang lebih berwawasan kependudukan, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan IPM, yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan.

4. "**Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan**" yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

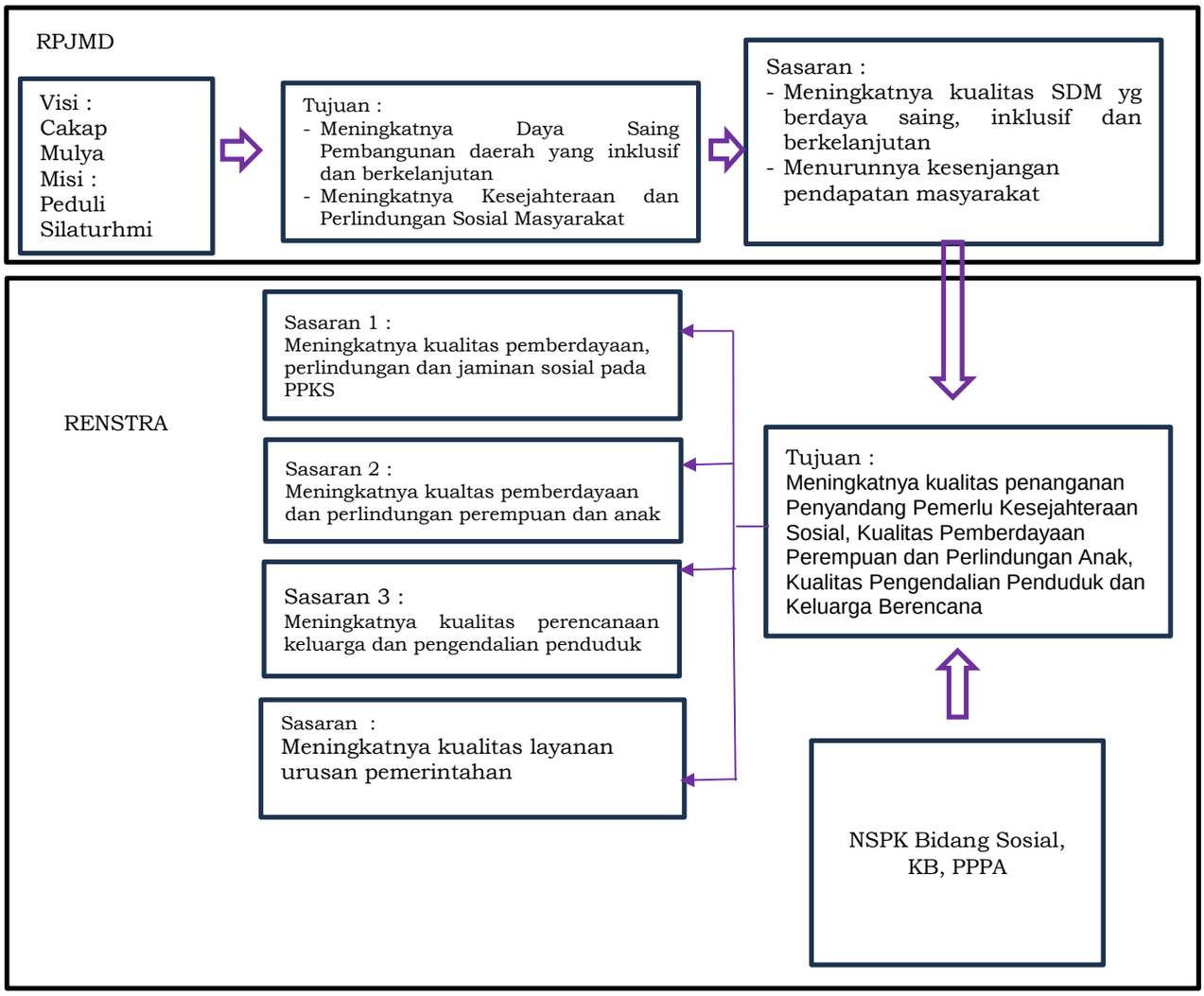

Gambar 3.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		% PPKS yang ditangani	%	70
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100
			% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,05
Maningkatnya kualitas SDM yg berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		IPG	Indeks	87,5
		Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0,390
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya (780)
	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,22

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAGET 2026
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,11
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	64
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	65,9

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.3 Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam memanajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
   b. Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan;
   b. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus;
   c. Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang;
   d. Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
   e. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
   f. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;
   g. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
   h. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
   a. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Selanjutnya pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kesadaran pentingnya pencegahan perkawinan anak/perkawinan minimal 19 tahun serta edukasi kepada Calon Pengantin (Catin)	Mendorong Komitmen Kabupaten dalam Implementasi Kecamatan Berdaya, Kampung KB Mandiri dan berkelanjutan serta bersinergi dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Peningkatan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Terwujudnya Kualitas Penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar

https://jdih.pemalangkab.go.id/

lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENJA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja 2. Advokasi dan penggerakan program KB kepada masyarakat 3. Standar pelayanan KB yang berkualitas 4. Pembinaan terhadap peserta KB 5. Pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program KB 6. Penyuluhan dan Penggerakan 7. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera	1. Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun) 2. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi) 3. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan 4. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga 5. Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENJA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1. Pedoman pelaksanaan perlindungan anak 2. Pemberdayaan Perempuan 3. Pengarusutamaan Gender 4. Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Penguatan Kelembagaan	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengaurusutamaan gender	1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak 2. Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan 3. Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender) 4. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis 5. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan 6. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENJA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan 7. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor	
3	1. Penyusunan SOP Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan korban penyalahgunaan narkoba 2. Penyusunan SOP pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Penyusunan SOP Pelayanan sosial, baik di dalam maupun di luar panti, untuk lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas	Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS 2. Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder 3. Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant 4. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, sistematis dan terstandar 5. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENJA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS 6. Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan 7. Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 8. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN) 9. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel 10. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	a. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE); b. Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.	a. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS b. Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder c. Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant d. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, sistematis dan terstandar e. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS f. Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan g. Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial h. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN) i. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel j. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas
	Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	a. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan; b. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus; c. Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang; d. Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta	a. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak b. Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan c. Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender) d. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis e. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan f. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan g. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan; e. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; f. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO; g. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor; h. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	a. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand	a. Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun) b. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL	adan ditunda dan tidak ingin anak lagi) c. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan d. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga e. Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga
	Meningkatnya kualitas layanan Urusan Pemerintahan	a. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.	a. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel b. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja serta pendanaannya untuk lima tahun mendatang melalui pentahapan setiap tahunnya. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja serta pendanaannya untuk tahun 2026 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat diuraikan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG								30.085.131.582							36.754.505.538
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase PPKS yang ditangani	%	70,00	66,60	68,00	70,00	11.296.571.580						72,00	21.459.995.888
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00	
		% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00							100,00	
	2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,15	86,00	86,10	86,15							86,20	
		SAKIP	Nilai	65,15	65,00	65,10	65,15							65,20	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.465.894.980	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah an Kabupaten/ Kota		8.194.792.148
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.752.248.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang		100,00	6.243.561.568

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												kuat serta daya saing sumber daya manusia			
		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.713.646.980	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		100,00	1.951.230.580
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	235.803.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	100,00	276.457.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6	6	2	67.346.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	100.000.000
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	-	1	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	27.000.000
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	-	-	2	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	27.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	-	-	1	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	27.000.000
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	-	-	2	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	27.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2	23.457.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	23.457.000
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3	3	5	45.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	45.000.000
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5.516.445.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**100,00**	**5.967.104.568**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	**lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	34	30	29	34	5.442.248.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	34	5.892.907.568
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	-	1	1	25.539.500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	1	25.539.500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	26.295.500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	26.295.500
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	6	6	17	22.362.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	22.362.000
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**	**4.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan**	**Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi**	**100,00**	**4.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		tersusun sesuai regulasi									**milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-		1	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalia n Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2.000.000
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-		1	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**%**	**100,00**	**-**	**100,00**	**100,00**	**57.756.400**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**100,00**	**57.756.400**
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	-		1	1.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1.000.000
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	-	50	35	31.756.400	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	31.756.400

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	-		35	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang-Undangan	35	25.000.000
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**262.810.065**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanan ya Fasilitasi Administrati f Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanaka n sesuai regulasi**	**100,00**	**290.364.065**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	14.098.480	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	14.098.480
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	1	1	26.176.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	26.176.000
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	15.689.585	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	15.689.585

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	50.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	50.000.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	6.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaa n	1	10.000.000
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	1	1	1	1	12.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	12.400.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Undangan yang Disediakan							atan, Semua Kel/Desa		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	-		1	12.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	12.000.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	250	250	12	126.446.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	150.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50.342.115**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**	**100,00**	**50.342.115**
1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		-				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		-	4		50.342.115	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Mebel		50.342.115
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		-				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**899.528.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**899.528.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	**lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	25.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	25.000.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	165.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	165.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	10.000.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	699.528.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	699.528.000
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**439.210.400**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**649.240.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	**lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	99	-	-	99	114.050.400	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99	200.000.000
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	99	99	99	150.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99	150.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	-	-	1	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	1	10.000.000
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	-	-	1	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	20.000.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	2	3	75.920.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	-	3	3	69.240.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	69.240.000
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang dibina**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**59.998.500**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya kualitas PSKS dalam pemberdaya an PPKS**	**100,00**	**282.349.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**%**	**40,00**	**32,11**	**36,12**	**40,00**	**59.998.500**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Kapasitas potensi sumber kesejahtera an sosial daerah kabupaten/ kota yang meningkat kapasitas/p otensinya**	**45,00**	**182.349.000**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	10	30	-	-	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	-	14	14	-	-	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Terlaksanan ya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kewenangan Kabupaten/Kota									dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	30	200	250	30	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	250	54.973.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	50	10	20	50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya Kapasitas Lembaga Kesejahteraa n Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	37.376.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	5	-	-	5	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	**20**	**20.000.000**
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	20	-	-	20	3.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	**20**	**5.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	10	15	20	4.998.500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15	20.000.000
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga	1	-	-	1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	**7**	**10.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	-	-	30	7.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**20**	**5.000.000**
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang (1 KUBE 10 orang)	5	-	-	5	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	**20**	**20.000.000**
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	1	-	-	1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	**1**	**5.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang	14	-	-	14	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	**20**	**5.000.000**
1.06.02.3.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya**	**%**	**100,00**			**100,00**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial Daerah**	**100,00**	**30.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.3.03.0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga		-	-			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	50	30.000.000
1.06.02.3.04	**Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Data SDM Kesejahteraan Sosial yang terupdate**	**%**	**100,00**			**100,00**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial**	**100,00**	**5.000.000**
1.06.02.3.04.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang		-	-			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	0	5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	DaerahKabupaten/Kota		
1.06.02.3.05	**Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Persentase Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terupdate**	**%**	**100,00**			**100,00**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terupdateny a Data Lembaga Kesejahteraan Sosial**	**100,00**	**5.000.000**
1.06.02.3.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga		-	-			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanany a Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota.	**20**	**5.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.4.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya**	**%**	**100,00**			**100,00**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**	**100,00**	**50.000.000**
1.06.02.4.03.0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga						**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	50	**30.000.000**
1.06.02.4.03.0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan						**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	1	**5.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.02.4.03.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang						Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	20	15.000.000
1.06.02.4.04	**Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial**	**Updating data SDM Kesejahteraan Sosial**	**Dokumen**	**1**	**1**		**1**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terupdaten ya Data SDM Kesejahtera an Sosial**	**1**	**10.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.02.4.04.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang						**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	20	**5.000.000**
1.06.02.4.05	**Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Updating data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**		**1**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah**	**1**	**5.000.000**
1.06.02.4.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga						**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	20	**5.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.03.2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial	%	100,00		100,00	100,00	150.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100,00	11.232.300
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100,00		100,00	100,00	150.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya penanganan an Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00	3.232.300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	#VALUE!		2	5	150.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terfasilitasin ya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelura han Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	3.232.300
1.06.03.3.02	**Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	**Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial**	**%**	**100,00**			**100,00**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri**	**100,00**	**8.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.03.3.02.0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang	5			5	-	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	5	8.000.000
1.06.04.2	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100,00**	**3.475.522.786**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayanana n Kesejahtara an Sosial (PPKS)**	**100,00**	**4.201.811.840**
		Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	**%**	**68,00**	**66,60**	**67,00**	**68,00**		**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan**		**69,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Fasilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100,00**	**2.978.222.786**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Fasilitasi Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi**	**100,00**	**3.523.575.925**
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	#VALUE!	58	280	294	289.200.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhiny a Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	309	300.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	30	100	100	85.200.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	90.000.000
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	43	20	20	30.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	34.000.000
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	44	10	44	44	33.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	44	35.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	815	1196	815	815	215.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	815	330.000.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Orang	2.179	3630	1.867	2.179	1.494.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2179	1.644.903.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kabupaten/Kota											Kewenangan Kabupaten/ Kota		
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		30	150			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota		
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Orang	#VALUE!	5000	180	189	141.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	198	358.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kabupaten/Kota									pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	#VALUE!	-	76	80	153.522.786	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	84	161.198.925
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	#VALUE!	50	22	23	92.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	24	97.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	#VALUE!	-	30	36	36.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42	43.800.000
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	15	83	85	168.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanannya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	87	171.000.000
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Orang	150	-		150	52.900.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	157	55.545.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota									pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota		
1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	15	-		15	45.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberdaya an dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	15	45.000.000
1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan	Orang	20	-		20	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya	Terlaksanan ya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/ Kota	28	28.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kabupaten/Kota										saing sumber daya manusia			
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	-		15	18.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	21	25.129.000
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	50	-		50	105.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaanya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	50	105.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**orang**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**497.300.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi**	**100,00**	**678.235.915**
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	-		20	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	25	12.535.840
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	-		20	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Terlaksanan ya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	25	12.500.075

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-		50	12.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhiny a Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	15.000.000
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-		50	12.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	-		20	50.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	50.000.000
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	-	12	13	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	14	10.500.000
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	604	100	100	22.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksanannya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	23.700.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	3439	1.031	100	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlakasanana nya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	100.000.000
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah	Orang	70	-		70	41.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhiny a Orang yang Membutuhk an Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi	70	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota											Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/ Kota		
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	40		100	100.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	100.000.000
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	-		10	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												saing sumber daya manusia			
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	-		10	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhiny a Orang yang Mendapatka n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10	20.000.000
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	-		10	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	2	3	163.800.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3	172.000.000
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	-		20	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	20	50.000.000
1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta	Orang	200	-		200	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah,	Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu	200	10.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya							Kel/Desa		(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya		
1.06.04.2.02.0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Aduan	15	-		15	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberdaya an dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS) Lainnya	21	31.500.000
1.06.05.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**130.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya kualitas perlindunga n dan pemberian jaminan sosial**	**100,00**	**8.530.457.700**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	**%**	**100,00**	**28,49**	**100,00**	**100,00**		**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**		**100,00**	
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**orang**	**120**	**5**	**5**	**120**	**49.311.700**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**	**120**	**202.414.500**
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	5	5	10	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah,	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/ Kota	120	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	5	5	10	9.870.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/ Kota	120	50.000.000
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	5	120	120	33.441.700	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaa n Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/ Kota	120	52.414.500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	1	-		1	1.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	5	50.000.000
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terupdatenya Data Fakir miskin**	**Dokumen**	**12**	**12**	**12**	**12**	**75.688.300**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanaya Updating Data Fakir miskin**	**12**	**8.328.043.200**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	45.000	1.010.996	45.000	45.000	26.655.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Terlaksanaya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	45000	310.025.300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga		210.589	45.000			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga		5	30			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Orang	10	0	10	10	2.805.000	Kab. Pemalang, Semua Kecam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	10	2.093.500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							atan, Semua Kel/Desa		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10	5		10	7.674.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhiny a Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30	1.444.866.800
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	45.000	210.589		45.000	24.190.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	45000	60.528.800

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	-		5	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	500	6.410.528.800
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	5	-		5	9.364.300	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanannya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	20	100.000.000
1.06.05.3.03	**Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP**	**Persentase Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertak**	**%**	**100,00**			**100,00**	**5.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Meningkatnya Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		an OAP yang tersusun									**generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
1.06.05.3.03.0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Dokumen	1	-		1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial		
1.06.06.2	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**150.003.814**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya kualitas penanganan an korban bencana pada pasca bencana**	**100,00**	**224.352.900**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		korban bencana kabupaten/kota													
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		100,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	65.003.814	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih,	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100,00	94.102.900

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	20	225	250	20.003.814	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250	39.102.900
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	20	225	250	15.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250	25.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit		3	3			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi		
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	5	35	100	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	10.000.000
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	5	40	100	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	-		20	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	10.000.000
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**77.500.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiaga an Bencana**	**100,00**	**120.250.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	1	1	2	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	5.000.000
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	37	40	50	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50	5.250.000
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	50	-	-	50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	50	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	30	-	-	30	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	30	15.000.000
1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/ Kelurahan	2	-	-	2	15.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terfasilitasin ya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	2	20.000.000
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	50	-	-	50	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat	Meningkatn ya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	50	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Semua Kel/Desa		gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
1.06.06.2.02.0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga	250	-	-	250	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	250	15.000.000
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	500	-	-	500	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Sosialisasi dan Edukasi penanggulan gan Bencana pada Anak Usia Sekolah	500	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.06.2.02.0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	2	-	-	2	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	2	10.000.000
1.06.06.2.02.0010	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	223	-	-	223	2.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	223	5.000.000
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait	Orang	1.000	-	-	1.000	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana	1000	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan									pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	pada masyarakat di lokasi rawan bencana		
1.06.06.4.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/ Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**%**	**100,00**			**100,00**	**7.500.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiaga an Bencana**	**100,00**	**10.000.000**
1.06.06.4.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	50	-	-	50	7.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	50	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.07.2	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**15.001.500**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan**	**100,00**	**15.000.000**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**15.001.500**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**100,00**	**15.000.000**
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam	Dokumen	1	1	1	1	7.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah,	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	1	5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							Kel/Desa		(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Kabupaten/ Kota		
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1	1	1	8.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1	5.000.000
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	1		1	500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pengamana n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	1	500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	1			1	500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	163	1.000.000
1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	1	-		1	500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	20	3.500.000
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan	**IPG**	**Indeks**	**88**	**87,37**	**87**	**88**	**897.660.002**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**		**87,55**	**1.046.858.650**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
	Sasaran : Meningkatnya kualtas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0	0,380	0	0		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		0,380	
		Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya (780)			Nindya (780)		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		Utama (820)	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.02.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4	5,40	4	4	112.800.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kuaitass PUG dan pemberdayaan perempuan	4,50	117.925.000
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	100,00	90,00	100,00	100,00	37.425.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100,00	41.940.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		**pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusta maan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	6.625.000
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		38				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		26				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	orang		50	50			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	1	1	1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	1	5.450.000
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	orang		50	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	1	1	1	1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	1	7.440.000
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	41	-		41	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	-		1	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1	2.000.000
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	50	-		50	7.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50	7.000.000
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	41	-		41	8.425.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	41	8.425.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**%**	**0**	**0,065**	**0**	**0**	**46.375.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Perempuan yang diberdayaka n di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarak atan**	**0,075**	**46.985.000**
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	36	30	36	36	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya advokasi kebijakan dan pendamping an bagi organisasi kemasyarak atan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	36	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	36	-		36	12.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	36	12.000.000
2.08.02.2.02.0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	36	-		36	5.875.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	36	5.875.000
2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	1	-		1	1.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1	1.610.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	orang	50	1	1	50	7.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya sosialisasi pemberdaya an perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	7.500.000
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	50	-		50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya peningkatan kapasitas SDM pemberdaya an perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**67**	**57,00**	**62**	**67**	**29.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an Perempuan yang dikuatkan dan dikembangk an**	**72,00**	**29.000.000**
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga		35	35			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanan ya Advokasi Kebijakan dan Pendamping an kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot	Orang		350	350			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksanan ya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdaya an		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							**Kel/Desa**		**pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanan ya Pengemban gan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdaya an Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	20	-		20	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya pendamping an penguatan dan pengemban gan lembaga penyedia layanan pemberdaya an perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	20	5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen	1	-		1	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1	2.000.000
2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	1	-		1	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1	2.000.000
2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	50	-		50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Terlaksanaya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	50	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	kewenangan provinsi		
2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	25	-		25	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengemban gan lembaga penyedia layanan pemberdaya an perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	25	10.000.000
2.08.03.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**%**	**0**	**0,02**	**0**	**0**	**312.641.002**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	**Meningkatn ya kualitas perlindunga n perempuan**	**0,02**	**416.378.650**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		100,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	%	7,30	7,50	7,40	7,30	102.280.002	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	7,20	121.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangakt Daereh yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		20	50			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan	laporan	1	-		1	40.000.002	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	59.220.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kabupaten/Kota							Kel/Desa		pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-		1	15.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	15.000.000
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang	15	-		15	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	15	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	30	-		30	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	30	20.000.000
2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kebijakan	1	-		1	7.280.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	7.280.000
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**136.620.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Meningkatn ya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**100,00**	**218.978.650**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		50	2			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		8	11			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03.2.02.0003	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang	14	-		14	7.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	14	14.000.000
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatataten/Kota	Orang	4	-		4	12.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4	24.000.000
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang	29	-		29	43.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Tersedianya layanan pendamping an tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	29	43.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	6	-		6	2.700.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	6	27.000.000
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	35	-		35	12.250.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/ Kota	35	27.308.650

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	55	-		55	47.170.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	55	47.170.000
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	60	-		60	12.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	60	36.000.000
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**100,00**	**90,39**	**100,00**	**100,00**	**73.741.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan**	**100,00**	**75.900.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasaran Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		30	30			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya	Terlaksanan ya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												saing sumber daya manusia			
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		5	12			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumaen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga n Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	10	-		10	4.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	4.400.000
2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan	1	-		1	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1	20.000.000
2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang	15	-		15	6.200.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah,	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	15	8.359.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kewenangan Kabupaten/Kota								Kel/Desa		(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	223	-		223	40.620.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga n Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	223	40.620.000
2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	2	-		2	2.521.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga n Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	2.521.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.04.2	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya**	**%**	**40**	**30,00**	**35**	**40**	**125.160.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**	**45,00**	**203.302.000**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**37.700.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak**	**100,00**	**68.302.000**
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan	Perangkat Daerah		50	65			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Kel/Desa		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Kabupaten/ Kota		
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindunga n Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pengemban gan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	100	-		100	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	100	10.000.000
2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	100	-		100	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300	30.000.000
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan	Orang	100	-		100	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	200	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota		
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota , sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang	Dokumen	35	-		35	7.700.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudka n KG dan Perlindunga n Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	35	8.302.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ditetapkan oleh pemerintah.													
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**52.460.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangk an dalam mewujudka n kesetaraan gender dan hak anak**	**100,00**	**75.000.000**
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat	Lembaga		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan**	Terlaksanan ya Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Advokasi dan Pendampingan									milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100	115			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya	Terlaksanan ya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												saing sumber daya manusia			
2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	-		50	7.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	10.000.000
2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	45	-		45	15.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	100	-		100	10.460.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	20.000.000
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	100	-		100	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	100	20.000.000
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	40	-		40	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	40	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota									pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Kabupaten/ Kota		
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**35.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**100,00**	**60.000.000**
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanan ya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehens if bagi Keluarga dalam Mewujudka n KG dan Perlindunga n Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	50	-		50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	50	15.000.000
2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	50	-		50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	50	15.000.000
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	-		25	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	25	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	-		25	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudka n KG dan PA Lingkup Kabupaten/ Kota	25	10.000.000
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	-		25	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudka n KG dan PA Lingkup Kabupaten/ Kota	25	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.05.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**% OPD yang memiliki data gender**	**%**	**92,59**	**85,18**	**88,88**	**92,59**	**5.330.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya kualitas data pilah gender**	**95,77**	**13.733.000**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak**	**%**	**65**	**50,00**	**60,00**	**65**	**5.330.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak**	**70,00**	**13.733.000**
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		1	2			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		**pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanan ya Penyajian dan Pemanfaata n Data Gender dan Anak dalam Kelembagaa n Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	30	-		30	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota	30	2.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga	35	-		35	2.330.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	35	2.000.000
2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	1	-		1	1.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1	9.733.000
2.08.06.2	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak**	**%**	**48,87**	**44,39**	**46,63**	**48,87**	**141.400.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Meningkatn ya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak**	**51,12**	**131.572.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA**	**%**	**82,95**	**78,66**	**80,71**	**82,95**	**100.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaa n PHA**	**85,20**	**100.000.000**
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	Organisasi		25	25			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya**	Terlaksanan ya Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha										**saing sumber daya manusia**	Kabupaten/ Kota		
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanan ya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaa n Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan	Lembaga	25	-		25	50.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya	Terlaksanan ya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	25	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										saing sumber daya manusia	Kabupaten/ Kota		
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	-		50	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaan ya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	25	-		25	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25	20.000.000
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	-		1	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**67,26**	**58,35**	**64,27**	**67,26**	**41.400.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan**	**69,50**	**31.572.000**
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		25	25			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dokumen		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kewenangan Kabupaten/Kota							Kel/Desa		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pengemban gan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejarinng Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya	Terlaksanan ya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												saing sumber daya manusia			
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	-		50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	10.000.000
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-		1	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	5	-		5	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	5.000.000
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	-		1	11.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	1.572.000
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot	Lembaga	50	-		50	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan	Terlaksanaya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	50	5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		a yang mendapatkan pendampingan							Kel/Desa		pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		
2.08.07.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**200.329.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya kualitas pelayanan dalam perlindunga n khusus anak**	**100,00**	**163.948.000**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina**	**%**	**60,00**	**40,00**	**50,00**	**60,00**	**35.334.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya lembaga perlindunga n khusus anak yang di bina**	**70,00**	**35.334.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu	Kegiatan		3	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanaan ya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA		
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Progr am dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Orang		100	20			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanaan ya Advokasi dan pendamping an Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota	Dokumen		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksanaan ya Penyusunan kebijakan perlindunga n khusus anak kewenangan kab/ kota		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		**pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	-		1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1	5.000.000
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	2	-		2	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	2	2.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Laporan	1	-		1	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2.000.000
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Dokumen	1	-		1	5.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.000.000
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	50	-		50	11.334.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	50	11.334.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kebijakan	1	-		1	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	10.000.000
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif**	**%**	**100,00**	**50,77**	**58,46**	**100,00**	**128.995.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatn ya fasilitasi anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehens if**	**100,00**	**92.614.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		15	20			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan	Orang		20	80			Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	41	-		41	17.795.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	41	18.314.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	90	-		90	18.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan pendamping an tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	45	9.000.000
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	60	-		60	22.800.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	30	11.400.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	6	-		6	18.100.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6	18.100.000
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	8	-		8	4.800.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	8	4.800.000
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	90	-		90	18.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	45	9.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	14	-		14	7.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	14	7.000.000
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	30	-		30	22.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BANTUAN BLPS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	20	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan**	**%**	**83,33**	**71,66**	**80,00**	**83,33**	**36.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**85,41**	**36.000.000**
2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Lembaga		2	2			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota		
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan		1	1			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa**	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		**pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	daerah kabupaten/kota		
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Orang		30	30			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanan ya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindunga n dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Komunikasi,Info rmasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	3	1	1	3	3.000.000	Kab. Pemala ng, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pengemban gan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindunga n khusus anak tingkat daerah kabupaten/k ota	3	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memeperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang		2	2			**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	Terlaksanaan ya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	-		1	3.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaan ya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindunga n khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	-		1	6.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	6.000.000
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	5	-		5	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	2.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07.2.03.0012	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-		1	2.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	2.000.000
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	-		50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	10.000.000
2.08.07.2.03.0014	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	Lembaga	50	-		50	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindunga	50	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		mendapatkan pendampingan									pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	n Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)**	**%**	**1,22**	**1,25**	**1,23**	**1,22**	**17.890.900.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**		**1,21**	**14.247.651.000**
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	**TFR (Angka Kelahiran Total)**	**Jiwa**	**2,16**	**2,18**	**2,12**	**2,11**		**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**		**2,10**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	64,29	62,77	63,60	64,29		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		65,05	
		IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	66,30	64,30	65,30	66,30		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		67,30	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kel/Desa		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	16,50	17,50	17,20	16,50	9.031.852.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatn ya kualitas pengendalia n penduduk	16,10	5.554.057.000
		Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Persentase pemetaan dan pengelolaan data pengendalia n penduduk, yang mencakup pencatatan, pengumpula n, pengolahan, dan pelaporan data secara menyeluruh di wilayah kabupaten/ kota	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat**	**%**	**100,00**			**100,00**	**100.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanaan ya Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalia n Kuantitas Penduduk**	**100,00**	**50.000.000**
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	1	0	-	1	50.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Rapat Pengendalia n Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana)	3	50.000.000
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	-	1	50.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas	Terlaksanan ya Penyusunan Grand Design Pembangun an Kependuduk an (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	0	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8.931.852.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanan ya Pemetaan Perkiraan Pengendalia n Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100,00**	**5.504.057.000**
2.14.02.2.02.002 5	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	1	1	1	1	8.931.852.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalia n penduduk dan KB	1	5.504.057.000
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR**	**%**	**70,85**	**70,75**	**70,75**	**70,85**	**6.610.808.000**	**Kab. Pemalang, Semua**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya**	**Meningkatn ya kualitas pembinaan keluarga berencana**	**70,95**	**7.819.654.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,58	9,78	9,68	9,58	-	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia		9,48	-
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	250.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang	Terlaksanan ya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalia n Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,00	250.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	250.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	250.000.000
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Pendayagunaa n Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**150.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanny a Pendayagun aan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100,00**	**150.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	1	1	1	150.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan , Pelayanan dan Pengemban gan Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/P enyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	150.000.000
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB**	**%**	**70,50**	**70,36**	**70,43**	**70,50**	**6.060.808.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanan ya Pengendalia n dan Pendistribus ian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**71,07**	**7.269.654.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	4	6	4	18.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pengendalia n Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	21.600.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	10	10	304	10	130.147.200	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terwujudny a Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10	156.176.640
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	1	1	1	20.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	24.480.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pen yandang disabilitas.	bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	2	1	156.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	187.200.000
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	14	14	10	14	5.501.728.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	14	6.598.758.000
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	14	350	1.470	14	234.532.800	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	14	281.439.360

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Semua Kel/Desa		gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	4	0	-	4	150.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pendamping an Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4	150.000.000
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**-**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**	**Terlaksanan ya Pemberdaya an dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**100,00**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	-	2	5	-	-	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	-
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung						Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas		
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Pesentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.248.240.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat**	**Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera**	**100,00**	**873.940.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Semua Kel/Desa		gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia			
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persesntase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.248.240.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pelaksanaan Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga	**100,00**	**873.940.000**
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Laporan		1				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusia an serta Pengelolaan		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengelolaan Keuangan Keluarga)											Keuangan Keluarga)		
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan	2	-	-	2	60.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	2	20.000.000
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	14	-	-	14	98.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	14	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	-	-	1	120.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	20.000.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	20	25	15	20	195.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30	195.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	223	4188	222	223	320.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	223	222.000.000
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	100	-	-	100	20.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	4	5	4	4	425.940.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaan ya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	4	215.940.000
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	225	222	223	225	74.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	225	31.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	1	-	-	1	30.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	10.000.000
2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1	-	-	1	120.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok		51				Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya Pembentuka n Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) , Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL) , Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdaya an Ekonomi Keluarga)		
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting**	**%**	**100**	**100,00**	**-**	**100**	**654.800.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya**	**Terlaksanan ya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan**	**100,00**	**95.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												saing sumber daya manusia	dan Kesejahteraan Keluarga		
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	222	-	-	222	77.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	223	15.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	-	-	1	442.400.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	60.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	-	-	1	60.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1	10.000.000
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1		1	75.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanaanya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1	10.000.000
2.14.04.3.03	**Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)**	**Persentase remaja yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR**	**%**	**100,00**			**100,00**	**130.000.000**	**Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan**	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas**	**Terlaksanaanya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)**	**100,00**	**20.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF
				KINERJA	KINERJA	KINERJA	KINERJA	Rp.			NASIONAL	DAERAH		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	**lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia**			
2.14.04.3.03.0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan	223			223	130.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P1. Mempe rkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia	Terlaksanan ya orientasi Perencanaa n menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	223	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang tahun 2026 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan. Renja ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang, RKPD Tahun 2026, serta hasil Musrenbang dan forum konsultasi publik lainnya. Dengan memperhatikan prinsip partisipatif, teknokratik, politis, top-down dan bottom-up, dokumen ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun perencanaan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam situasi terbatasnya sumber daya dan dinamika kebijakan:

1. Keterbatasan anggaran
   a. Diperlukan penajaman prioritas agar kegiatan yang paling strategis dan berdampak langsung tetap dapat dilaksanakan.
   b. Perlu mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan dan menjajaki alternatif pembiayaan melalui kerjasama dengan sektor swasta, lembaga donor, maupun sumber pendanaan lain yang sah.
   c. Penting untuk membangun kolaborasi antarperangkat daerah untuk memaksimalkan sinergi pendanaan dan pelaksanaan program.
2. Kesiapan SDM dan teknologi pendukung
   Perlu penguatan kapasitas SDM serta optimalisasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan kegiatan lebih adaptif, akurat, dan efisien.
3. Perubahan kebijakan nasional dan daerah
   Perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang perlu sigapdalam menyesuaikan arah kebijakan tanpa mengganggu pencapaian target pembangunan.
4. Komitmen bersama dan integritas pelaksanaan
   Keberhasilan Renja ini sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, integritas aparatur, serta sinergi antarpihak. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak dalam setiap tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dalam Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2026 akan dijalankan dengan mengedepankan kaidah-kaidah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Efisiensi dan efektivitas.
   Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output dan outcome yang terukur dan bernilai guna tinggi.
2. Akuntabilitas dan transparansi.
   Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Partisipatif dan kolaboratif.
   Mendorong pelibatan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Berorientasi pada hasil (result-oriented).
   Fokus utama diarahkan pada pencapaian indikator kinerja dan sasaran pembangunan daerah.
5. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
   Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan arah kebijakan daerah serta mendukung target strategis RPJMD Kabupaten Pemalang.

Untuk memastikan implementasi Renja ini berjalan sesuai rencana, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan Renja sebagai dasar penyusunan RKA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, dengan menyesuaikan pagu indikatif dan kebijakan fiskal daerah.
2. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah untuk mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mencegah tumpang tindih kebijakan.
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, serta melakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan kinerja ke depan.
4. Menyediakan ruang untuk adaptasi terhadap kebijakan baru, kondisi darurat, maupun perubahan strategis lainnya yang memerlukan respons cepat dan terukur.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai penguatan komitmen terhadap implementasi Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah menuju Pemalang yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

KEPALA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

Drs. MU'MINUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680526 199403 1 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten/kota : Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		V		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaranprioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

Pemalang, September 2025

Kepala
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Drs. MU'MINUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680526 199403 1 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

H. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun". Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja PD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD dengan mempedomani Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan memperhatikan kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Renja PD menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan akhir RKPD. Renja PD dan dokumen RKPD serta Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,karena Renja PD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wajib menyusun Renja. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, indikator kinerja, volue ,satuan, lokasi dan pagu indikatif Tahun 2026 serta perkiraan maju anggaran tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang merupakan penjabaran Visi Pembangunan daerah yaitu Pemalang **Bercahaya-Bersih-Cakap-Handal-Mulya.** RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Mendasari Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 tema yang diangkat dalam RKPD 2026 adalah “ Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa tengah dengan kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

lingkungan yang bersih, infrasturktur yang kuat serta daya saing Sumber Daya Manusia"

Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Disdukcatpil Kabupaten Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada bidang administrasi kependudukan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcapil Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026
2. Penyusunan agenda kerja
3. Pengumpuan data dan informasi
4. Perumusan rancangan awal Renja
5. Penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan akhir Renja PD
6. Verifikasi rancangan akhir Renja oleh Bappeda
7. Revisi Rancangan akhir Renja PD berdasarkan hasil verifikasi
8. Penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang

Tahun 2026

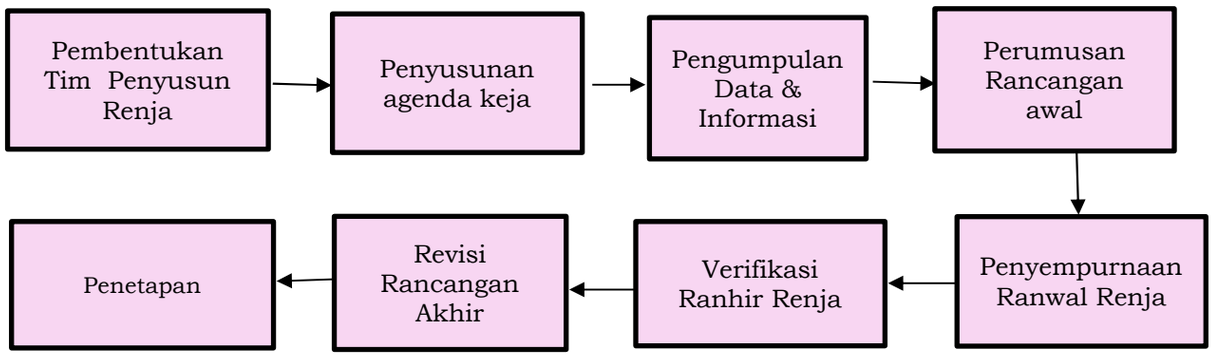

Selanjutnya Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disdukcapil Pemalang Tahun 2026 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Pemalang Tahun 2026

Gambar 1.2

Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

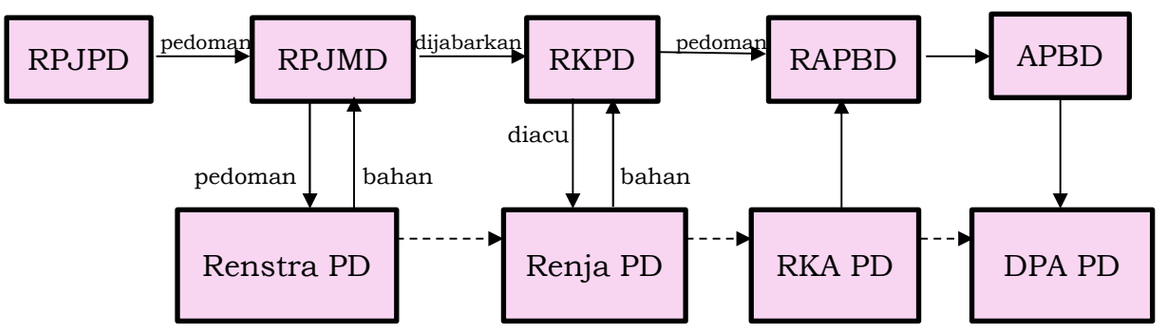

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repbublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara ;Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Disdukcatpil Kabupaten Pemalang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun lalu, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan capaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang, analisis kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Pemalang, penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kabupaten Pemalang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Disdukcapil Kabupaten Pemalang, berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcapil Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Disdukcapil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 dan estimasi Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 mendapatkan Alokasi Anggaran setelah perubahan sebesar Rp 9.085.544.800,00 dengan melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan, realisasi keuangan Tahun 2024, sebesar Rp 7.741.884.967 ,00 atau sebesar 85,21%

Tahun Anggaran 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025 mendapatkan Alokasi Anggaran APBD Penetapan Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Anggaran 2025 sebesar Rp.8.656.857.000,- untuk melaksanakan 5 Program, 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dan pada Pergeseran 1 (satu) yang disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.428.218.000, sementara realisasi keuangan sampai triwulan II Tahun 2025, sebesar Rp 3.669.929.886,00. atau sebesar 43,54 %

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, Disdukcapil Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program yang berjumlah 5 (lima),15 (lima belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Adapun realisasi kineja secara terperinci sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**IKM**	**indeks**	**83**	**87,06**	**81**	**92,64**	**114,37**	**82**	**90,22**	**108**	
		Cakupan layanan administrasi kependudukan	**%**	**94,66**	**84,92**	**86,20**	**88,82**	**103,04**	**90,75**	**91,43**	**96,58**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											
		Nilai SAKIP	**skor**	**63**	**63,70**	**59,00**	**65,47**	**110,97**	**63**	**70,05**	**111,19**	
		Nilai IRB	**skor**	**80**	**0,00**	**76,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
	Keluaran	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**dokumen**	**66**	**34**	**11**	**11**	**100**	**9**	**54**	**100**	
	Hasil	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	12	7	2	2	100	3	12	83,33	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	83,33	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	15	9	2	2	100	2	15	100,00	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											
	Keluaran	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**dokumen**	**84**	**28**	**22**	**28**	**100**	**28**	**84**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	84	42	14	14	100	14	70	100,00	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	dokumen	60	36	12	12	100	14	60	100,00	
2.12.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											
	Keluaran	**Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya**	**orang**	**650**	**144**	**84**	**84**	**100**	**109**	**337**	**51,85**	
	Hasil	**Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya**	**%**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100,00**	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	orang	650	144	84	84	100	109	337	51,85	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											
	Keluaran	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket**	**563**	**374**	**118**	**118**	**100**	**71**	**563**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase ketersediaan layanan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	35	25	7	7	100	3	35	100,00	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	36	13	13	100	1	50	83,33	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	36	23	8	8	100	5	36	100,00	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	65	39	13	13	100	13	65	100,00	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	50	30	10	10	100	10	50	100,00	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10	6	2	2	100	2	10	100,00	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	160	96	32	32	100	28	156	97,50	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
	Keluaran	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**unit**	**200**	**126**	**33**	**33**	**100**	**23**	**152**	**91,00**	
	Hasil	**Persentase barang milik daerah yang tersedia tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**91,00**	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	120	72	24	24	100	-	96	80,00	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	75	45	7	7	100	23	75	100,00	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	15	9	2	2	100	-	11	73,33	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
	Keluaran	**Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**Laporan**	**324**	**180**	**72**	**72**	**100**	**72**	**324**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	204	108	48	48	100	48	204	100,00	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100,00	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											
	Keluaran	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**unit**	**681**	**430**	**120**	**120**	**100**	**131**	**681**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara.**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	180	111	36	36	100	33	180	100,00	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	11	10	1	1	100	0	11	100,00	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	416	268	65	65	100	83	416	100,00	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yng dipelihara/direhabilitasi	unit	14	5	6	6	100	3	14	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	60	36	12	12	100	12	6	100,00	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**	**%**	**82,88**	**83,75**	**79,50**	**86,75**	**109,12**	**81,19**	89.20	**104,70**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											
	Keluaran	**Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan**	**dokumen**	**347.060**	**193.236**	**64.412**	**64.412**	**100**	**89.412**	**347.060**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	dokumen	275.000	150.000	50.000	50.000	100	75.000	275.000	100,00	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100,00	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	dokumen	72.000	43.200	14.400	14.400	100	14.400	72.000	100,00	
2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
	Keluaran	**Jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk yang disediakan**	**dokumen**	**5**	**3**	**1**	**1**	**100**	**1**	**5**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase dokumen penataan pendaftaran penduduk yang disediakantepat waktu dan sesuai ketentuan.**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain Blangko KTP-EL, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**											
	Keluaran	**Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang diterbitkan.**	**Dokumen**	**27.000**	**16.200**	**5.400**	**5.400**	**100**	**5.400**	**27.000**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersedia.**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	27.000	16.200	5.400	5.400	100	5.400	27.000	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**%**	**98,75**	**99,53**	**98,50**	**99,77**	**101,29**	**98,75**	**99,69**	**101**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**											
	Keluaran	**Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan**	**dokumen**	**160.010**	**96.006**	**32.002**	**32.002**	**100**	**32.002**	**160.010**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dokumen	160.000	96.000	32.000	32.000	100,00	32.000	160.000	100,00	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	10	6	2	2	100	2	10	100,00	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**%**	**100**	**56,41**	**71,79**	**71,79**	**100**	**87,18**	**76,92**	**76,92**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
	Keluaran	**Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang disusun.**	**dokumen**	**72**	**36**	**18**	**18**	**100**	**18**	**72**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	60	36	12	12	100	12	60	100,00	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	dokumen	39	18	6	6	100	6	30	76,92	
2.12.04.2.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											
	Keluaran	**Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun.**	**dokumen**	**5**	**3**	**1**	**1**	**100**	**1**	**5**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase peraturan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang implementatif**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen tata cara perencanaan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											
	Keluaran	**Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun.**	**Laporan**	**160**	**96**	**32**	**32**	**100,00**	**32**	**160**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase jenis data kependudukan yang dikelola sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah dikabupaten/kota dalam penerbitan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	39	21	6	6	100	6	30	100	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisasi capaian	Perkiraan tingkat capaian (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100,00	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Laporan	10	6	2	2	100	2	10	100,00	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Data Kependudukan yang mutakhir**	**%**	**97**	**100**	**95**	**100**	**106,38**	**96**	**100**	**100**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**											
	Keluaran	**Jumlah dokumen profil kependudukan yang tersusun**	**dokumen**	**10**	**6**	**2**	**2**	**100**	**2**	**10**	**100,00**	
	Hasil	**Persentase dokumen profil kepe ndudukan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan.**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data kependudukan kabupaten/kota	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasar tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Program Tahun 2024 sudah sesuai target seperti yang tertuang/ ditentukan dalam Renja 2024 maupun Renstra 2021-2026 yang berarti realisasinya sudah di atas 100 % dengan status Sangat Tinggi (ST). Lima program yang sudah dilaksanakan melebihi target atau di atas 100 % yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator SAKIP, Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, Program Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator Persentase Data Kependudukan yang mutakhir. Demikian juga untuk tingkat capaian realisasi 15 (Lima belas) kegiatan dan 43 (Empat puluh tiga) sub kegiatan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang kesemuanya sudah memenuhi target yang ditentukan sehingga bisa mencapai 100 % dengan status Sangat Tinggi (ST). Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan, Program Pengelolaan dan Profil Kependudukan juga telah mecapai target(100%)

Tercapainya realisasi kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Disdukcapil Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. Adanya dukungan masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan.
3. Pendekatan layanan berbasis online melaui inovasi LAKONE yang merupakan aplikasi yang bisa di akses warga/penduduk Pemalang dimana saja dan kapan saja
4. Pendekatan layanan di tingkat desa dengan inovasi pelanduk desa yaitu pelayanan adminduk di tingkat desa melalui fasilitator Adminduk di Desa /Kelurahan (FAD/FAK),
5. Pelayanan jemput bola melalui home visit, CFD
6. Layanan Kerjasama Faskes (inovasi 3 in one)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Disdukcapil bekerjasama dengan fasilitasi kesehatan(faskes) memberikan layanan Kerjasama FASKES untuk memudahkan penerbitan dokumen kependudukan KK, KIA dan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir sehingga langsung memiliki identitas resmi setelah kelahiran.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya/melebihi target kinerja realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- Adanya kebijakan efisiensi belanja daerah untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dilakukan penghematan anggaran yang berdampak pada pengurangan pelaksanaan beberapa kegiatan Disdukcapil
- Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- Minimnya proses evaluasi yang untuk penyiapan dokumen dan perlaksanaan rencana perubahan pelaksanaan anggaran bagi sub-sub kegiatan yang dapat dinilai mengalami surplus anggaran.

Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra

- Efisiensi anggaran dan rasionalisasi belanja menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program strategis, yang berdampak pada kemungkinan terjadinya deviasi antara target tahunan dengan realisasi capaian. target dalam renja Disdukcapil akan disesuaikan dengan kebutuhan kinerja agar tetap realistis dan kontekstual dengan kondisi fiskal tahun berjalan
- Adanya sinkronisasi pada dokumen perencanaan yang berpengaruh terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 mengharuskan adanya konsistensi antara dokumen Renstra perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang baru.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah :

- Perbaikan pemahaman, pemetaan, dan korelasi atas sasaran, tujuan, indeks kinerja, dan program Pemerintah Kabupaten dengan visi, misi, indeks kinerja umum maupun indeks kinerja individu, sasaran,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tujuan, serta hasil kegiatan/sub kegiatan, sehingga diperoleh proses cascading kegiatan/sub kegiatan yang terarah, sinergis, dan optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

- Perbaikan perencanaan dan penyesuaian alokasi anggaran dalam penyusunan RKA sehingga mampu memaksimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin
- Mengoptimalkan pengendalian secara berkala melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran maupun capaian kinerja pegawai.
- Memaksimalkan pelaksanaan koordinasi internal di dalam membangun komunikasi, menyelaraskan langkah realisasi kegiatan, maupun penyerapan anggaran dan peningkatan efektifitas dan efesiensi kinerja.
- Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejalan dengan instruksi dan arahan dari pemerintah daerah
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui keterlibatan aktif dalam mengikuti diklat maupun bimtek untuk menghadapi tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dan indikator pelayanan lainnya. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sesuai Renstra Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan (IKM), yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat dan Cakupan layanan administrasi kependudukan yang diukur dari rerata dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan, persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil, persentase OPD yang yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama, persentase peningkatan kualitas informasi kependudukan.

Sedangkan IKU Disdukcapil sesuai Renstra tahun 2025-2029 adalah Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta,KTP,KK,KIA), IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Nilai SAKIP OPD.

Capaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan 2027, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
(Renstra 2021-2026)

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Penerbitan akta perkawinan	%	-	-	√	100	100	100	100	100	100	
2	Penerbitan akta perceraian	%	-	-	√	100	100	100	100	100	100	
3	Penerbitan akta kematian	%	-	-	√	100	100	100	100	100	100	
4	Penyajian data kependudukan	%	-	-	√	100	100	100	100	100	100	
5	Perekaman KTP-el	%	-	-	√	99,91	99,92	99,93	99,5	99.98	99,98	
6	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	%	-	-	√	40	60	62	60,88	67,80	67,80	
7	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	-	-	√	94	99.10	99,20	99.69	98,74	98,74	
8	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	-	-	√	71.79	73	77	71,79	76,92	76,92	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9	Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	-	-	-	98.60	98,65	99,53	99,51	99,53	99,53	
10	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	-	√	-	81	82	83	92,64	90,22	90.22	
11	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	-	√	-	86,20	90.75	94,66	88,82	91.43	91,43	
12	SAKIP	Nilai	-	-	-	59	61	63	65,47	70,05	70.05	
13	IRB	Indeks	-	-	-	76	78	80				
14	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	-	-	-	79,50	81,19	82.88	86,75	89,10	89,10	
15	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	-	-	-	98,50	98,63	98.75	99,77	99,69	99,69	
16	Persentase data kependudukan yang mutakhir	%	-	-	-	95	96	97	100	100	100	

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

(Renstra 2025-2029)

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Perekaman KTP-el	%	-	-	√		99,90	99,91	99,92	99,95	99,98	99,91	99,93	
2	Persentase cakupan anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	%	-	-	√		60	62	64	60,88	67.80	67,98	64	
3	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	-	-	√		99,52	99,53	99,54	99,51	99,53	99,54	99,54	
4	Kepemilikan Identitas Kependudukan (IKD)						10	15	20	5,56	6,1	10	15	
5	Kepemilikan Akta kelahiran	%	-	-	-		99,10	99,20	99,30	99,69	98,74	98,95	99,30	
6	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%					100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaorkan	%					100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%					100	100	100	100	100	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data keendudukan berdasarkan kerjasama	%			√		73	77	80	71,76	76,92	76,95	77	
10	Persentase data profil kependudukan yang disusun	%	-		-		100	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan Layanan Adminduk	%		√			90,75	91	91,5	88.82	91.43	91,44	91,5	
12	Indk Kepuasan Masyarakat	%		√			92	92.75	92,85	92,64	90,22	92,75	92,85	
13	Nilai SAKIP	%		√			70	70.05	71	65,47	70.05	70,5	71	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Pemalang

Disdukcapil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. Disdukcapil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan yang terdiri dari: (1) Sub Urusan Pendaftaran Penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk; (2) Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu pelayanan pencatatan sipil; (3) Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah; dan (4) Sub Urusan Profile Kependudukan yaitu penyusunan profile kependudukan daerah. Sedangkan fungsi Disdukcatpil adalah (1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran kependudukan, pelayanan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; (4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tidak lepas dari isu-isu yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

berkembang secara dinamis baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelengaraan pelayanan tugas dan fungsi Disdukcapil maupun isu -isu yang bersifat eksternal.

Evaluasi penilaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang berdasar Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan
b. Cakupan layanan administrasi kependudukan
c. SAKIP
d. IRB
e. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan
f. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
g. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
h. Persentase data kependudukan yang mutakhir

Pada Tahun 2024, IKM terhadap layanan administrasi kependudukan sebesar 92,64 kategori A (Sangat baik) yang dicapai dari rerata nilai Semester I yaitu 92,60 % dan Semester II 92,68 %. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Semester I dilaksanakan pada Bulan Mei dan Juni, sedangkan untuk Semester II dilaksanakan pada Bulan Nopember dan Desember Tahun 2024. Walaupun sudah dinilai baik, kualitas pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang harus terus ditingkatkan. Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Pemalang berupa layanan dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, penyediaan data serta informasi kependudukan. Adapun untuk capaian cakupan layanan administrasi kependudukan tersebut sebesar 88,82 Layanan yang masih harus diperhatikan adalah layanan dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan. Dokumen kependudukan yang wajib dimiliki adalah KTP, KK dan KIA. Kepemilikan KIA sudah mencapai target yang ditentukan dari 40 menjadi 60,88 % dengan capaian diatas 100% sedangkan target nasional 50%, hal ini dikarenakan adanya kerja sama dengan sekolah-sekolah dari tingkat pendidikan TK sampai dengan SLTA dan layanan jemput bola.. Kepemilikan akte kelahiran target nasional 98% realisasi 99,69%. Persentase OPD yang telah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sudah mencapai 100 % dari target Tahun 2024 sebesar 71,79. Bagi OPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama akan diberikan hak akses, karena harus memenuhi persyaratan, meliputi tersedianya jaringan tertutup (VPN). Tahun 2024 OPD yang telah melakukan kerjasama sebanyak 30 (Tiga puluh) melebihi target nasional sebanyak 15 (lima belas). Adapun OPD yang telah melakukan kerjasama yaitu Diskominfo, BKD, Bapenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayan, Dinas Kesehatan, Dinsos KBPP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappeda, Kecamatan Pemalang, Diskoperindag, Dinas Tenaga Kerja, Kesbangpol, Kecamatan Taman, RSU M Ashari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, DPU TR, Satpol PP, Dinpusarda, BPBD, BPKAD, Dinpusarda, DPMPTSP, Dinas Perhubungan,Kecamatan Bodeh, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Belik, Kecamatan Warungpring.

Pada Tahun 2024, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mendapat nilai SAKIP sebesar 65,47 (kategori B), sedangkan IRB sebesar 0 % (tahun 2024 tidak mengeluarkan IRB).

Capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 semester I untuk IKM terhadap layanan administrasi kependudukan sebesar 90,22 dengan kategori Sangat baik, Nilai SAKIP OPD sebesar 70,05 kategori Baik dengan predikat BB , cakupan layanan adminduk sebesar 91,43 ,Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang merupakan rerata dari persentase kepemilikan KTP,KK dan KIA sebesar 89,10 . Pesentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang merupakan rerata persentase kepemilikan akta nikah,akta cerai,akta kelahiran dan akte kematian sebesar 99,69%. Sedangkan capaian OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama sebesar 76,92%.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Disdukcapil Kabupaten Pemalang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029, Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum tercapaianya kepemilikan dokumen kependudukan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Pemanfaatan Data Kependudukan belum maksimal
3. Belum tercapainya target kepemilikan Identitas kependudukan digital (IKD)
4. Kurangnya kapasitas dan kecakapan petugas pelaksana Pelayanan Adminduk

Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah sbb :

1. Belum semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan. Pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya sejak dini masih kurang dan kecendurungan masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat akan diperlukan.
2. Belum semua masyarakat mengunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Disdukcapil
3. Belum Optimalnya layanan aktivasi Identitas Kependudukan digital (IKD) dan belum semua lembaga pengguna menerapkan secara implementatif dalam pelayanan publik.

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Disdukcapil Kabupaten Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah: Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**. Visi ini memiliki pembentuk kata:

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu **RHAPSODI (Resik,Hijau,Apik,Peduli,Silaturahmi,Organisatoris,Digitalisasi dan Ikhlas**) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

5. **Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

6. **Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. **Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

8. **Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung visi **Bersih dan Handal** dan **Misi Organisatoris** (meningkatkan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan) serta **Misi Digitalisasi** (memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi) dengan pelayanan adminduk secara Online melaui aplikasi LAKONE dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang selanjutnya dicapai melalui tujuan daerah **Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel** serta sasaran daerah **Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik.**

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, Disdukcapil Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu "**Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA). Adapun sasaran yang akan dicapai serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang adalah "**Meningkatnya kualitas Pelayanan adminduk**" dengan indiktor Cakupan Layanan adminduk yang merupakan rerata dari pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pengelolan profil kependudukan. **Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah** yaitu IKM dan Nilai SAKIP OPD.

Adapun tema, prioritas dan fokus Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan untuk "**Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Infrastruktur, Sumber Daya Manusia serta Tata Kelola Pemerintahan**". Kebijakan pembangunan tersebut di prioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan:

1. **Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan,** dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, Pengawasan kualitas udara dan air;
   b. Peningkatan pengelolaan sampah melalui implementasi metode 3R (reuse, reduce dan recycle), peningkatan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir, penguatan kelembagaan pengelola sampah, peningkatan sarana prasara pengelolaan sampah, serta penanganan limbah B3 (penyimpanan sementara);
   c. Pengawasan usaha/kegiatan lingkungan sesuai dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan;
   d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah;
   e. Peningkatan institusi/perkantoran/sekolah bebas sampah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. **Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata,** dengan fokus pada:
   a. Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan perda RTRW dan peningkatan informasi tata ruang dan pola ruang;
   b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
   c. Pengurangan kesenjangan antar desa dan kecamatan;
   d. Peningkatan konektivitas melalui Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata;
   e. Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;
   f. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai;
   g. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan;
   h. Peningkatan pelayanan dan penambahan pos pemadam kebakaran
   i. Penyediaan *Early Warning System* (EWS);
   j. Pembentukan Desa tangguh Bencana (Destana);
   k. Peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM;

3. **Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter,** dengan fokus pada:
   a. Pencegahan radikalisme dan terorisme;
   b. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
   c. Mewujudkan kondusivitas dan kestabilan politik di masyarakat;
   d. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia guna memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan narkoba;
   e. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   f. Implementasi kualitas perencanaan responsive gender,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penyediaan data gender dan anak serta Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;

g. Penguatan kelembagaan dan layanan UPTD PPPA dalam upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak;
h. Peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (ePemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca serta pengelolaan arsip;
i. Mendukung pembangunan kebudayaan;
j. Percepatan implementasi wajib belajar 13 tahun, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, penyediaan fasilitas pendidikan bagi siswa; peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi;
k. Peningkatan budaya literasi dan pendidikan budi pekerti;
l. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat melalui optimalisasi pencegahan dan penanggulanan kasus balita gizi buruk dan stunting, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan (SDK);
m. Pengendalian pembangunan kependudukan dan keluarga berencana melaui peningkatan kualitas dan menekan jumah penduduk serta peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR);
n. Peningkatan partisipasi dan kualitas serta daya saing pemuda dalam pembangunan dan olahraga;
o. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui Peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kualitas BLK;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

p. Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjaringan minat transmigrasi;
q. Mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui program jambanisasi, penanganan kawasan kumuh, penyediaan sumber air bersih dan sanitasi, penanganan RTLH;
r. Pengurangan beban hidup masyarakat melalui penanganan anak tidak sekolah, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, Optimalisasi layanan UHC, Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin, pemberian jaminan dan perlindungan sosial;
s. Pembinaan kelembagaan masyarakat (posyandu, PKK, RT, RW, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa);

4. **Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak,** dengan fokus pada:
   a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Manajemen Risiko;
   b. Peningkatan Pelayanan, pembinaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan SDM pelayanan Pajak & Retribusi;
   c. Peningkatan kualitas data daerah;
   d. Peningkatan publikasi data serta layanan masyarakat yang efektif dan efisien menuju desa mandiri.
   e. Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
   f. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat;
   g. peningkatan pengambilan kebijakan berbasis bukti melalui kajian;
   h. peningkatan indeks kapabilitas inovasi melalui pendaftaran kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
   i. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berinovasi pada pengembangan potensi yang ada di lingkungannya;
   j. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
   k. Peningkatan kapasitas perangkat desa;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. **Peningkatan produktivitas ekonomi,** dengan fokus pada:
   a. Pengembangan Pariwisata berbasis potensi lokal (Destinasi Wisata, Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif);
   b. Membuat paket wisata, event-event wisata dan Ekonomi Kreatif serta digitaslisasi promosi;
   c. Peningkatan Kapasitas SDM pelaku usaha wisata dan ekraf;
   d. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya benda dan tak benda;
   e. Fasilitasi publikasi Promosi wisata dan Event lainnya melalui media publikasi Pemkab. Pemalang (online dan off line);
   f. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan melalui Peningkatan kapasitas industri kecil, Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industry, dan Penguatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta peningkatan penggunaan produk dengan spesifikasi TKDN;
   g. Peningkatan dan penguatan peran Koperasi dalam mendorong produktivitas pelaku usaha (IKM & UMKM);
   h. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan;
   i. Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veterineer;
   j. Peningkatan kapasitas SDM Pertanian (Penyuluh, petani, petugas informasi harga, juru sembeli, veteriner, penyelenggaraan sekolah lapang pertanian dan lain-lain);
   k. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah ingkungan) dan produksi perikanan budidaya;
   l. Peningkatan hasil usaha produk olahan perikanan;
   m. Peningkatan peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor serta peningkatan perlindungan konsumen;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

n. peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal;
o. Peningkatan fasilitasi digitalisasi pemasaran produk IKM dan UMKM secara online;
p. Pembinaan dan Pendampingan SDM Pelaku Usaha Pertaian;
q. Pembinaan dan pendampingan SDM pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil usaha perikanan;
r. Pengembangan potensi ekonomi melalui kerjasama desa baik kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, peningkatan kawasan perdesaan dan Pengembangan Bumdes;
s. Pembinaan dan pendampingan SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
t. Pembinaan dan Pendampingan UMKM (Peningkatan Kapasitas, Akses Permodalan dan Pemasaran) serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mendukung program prioritas ke-4 yaitu **Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak,** dengan fokus pada :

- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Manajemen Risiko;
- Peningkatan kualitas data daerah;
- Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Pemalang adalah :

1. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Terbitnya peraturan baru terkait administrasi kependudukan :
   1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring ;
   2) Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
   3) Permendari Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
   4) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
   5) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
   6) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
   7) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Pemalang

   Mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Pemalang ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan kompetensi SDM agar optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
4. Meningkatkan Layanan online adminduk.

Disdukcapil Kabupaten Pemalang merupakan OPD pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta lembaga/instansi lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, BPJS, Perbankan dan sebagainya. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan adminduk adalah sebagai berikut :

1) Pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya sejak dini masih kurang dan kecendurungan masyarakat akan mengurus dokumen kependudukan hanya pada saat akan diperlukan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2) Pelayanan administrasi kependudukan yang belum terjangkau semua masyarakat
3) Kebijakan pemanfaatan dokumen digital oleh lembaga pengguna belum diterapkan secara implementatif dalam pelayanan publik.
4) Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pemenuhan kelengkapan data dukung profil kependudukan
5) Dinamika data kependudukan yang terus berubah setiap waktu (seperti lahir,mati,cerai,pindah,datang, dan perubahan elemen data lainnya) sehingga diperlukan upaya maksimal agar data kependudukan terus ter update.
6) Pemanfaatan data kependudukan belum maksimal
   Pengguna akses data diwajibkan mengunakan ISO 27001 ISO terkait manajemen keamanan data)

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan kependudukan yang adaptif terhadap perkembangan tuntutan masyarakat;
2. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terhadap Identitas Kependudukan yang bisa digunakan untuk layanan kepentingan lainnya.
3. Adanya inovasi layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat
4. Pelayanan secara online
5. Pelaksanaan Rapat Koordinasi secara intensif.
6. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kepentingan layanan publik

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan **isu-isu strategis** Disdukcapil Kabupaten Pemalang yaitu

1. **Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil** yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:

- Mendekatkan dan memudahkan Pelayanan Kepada Masyarakat
- Pelaksanaan Pelanduk Desa aktif disemua desa/kelurahan
- Pelaksanaan Pelayanan online melaui aplikasi LAKONE
- Peningkatan layanan dengan Inovasi Layanan Adminduk
- Pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur

2. Semua Penduduk wajib memliliki dokumen kependudukan

Semua Penduduk tercatat atau teregristrasi dalam database kependudukan

Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Lembaga/ OPD yang menggunakan hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan/ melakukan kerjasama mempunyai standar ISO 27001.
2. Sosialisasi dan implementasi pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD), sehingga IKD tidak hanya menjadi alat administrasi tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi digital
3. Inovasi layanan
4. Setiap desa/ kelurahan/ tempat pemakaman umum mempunyai Buku Pokok Kematian.

2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan angka kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Disdukcapil Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Disdukcapil Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**8.656.857.000**					**7.301.639.000**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		% dokumen perencanaan,keuangan dan evakuasi kinerja sesuai regulasi	**100%**	**7.000.720.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		% dokumen perencanaan,keuangan dan evakuasi kinerja sesuai regulasi	**100**	**5.017.425.000**	
							%layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	**100%**				%layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	**100**	**1.650.506.000**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**14**	**10.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**14**	**10.500.000**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	3.500.000	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.000.000	
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.500.000	
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,500,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1.000.000	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1.000.000	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**		**4.743.313.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**		**5.006.925.000**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36/12	**4.740.313.000**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36/12	**5.004.880.000**	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	1.000.000	
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya**		**21.010.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya**		**21.010.000**	
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109	**21.010.000**	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84 orang	**21.010.000**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**		**483.390.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**		**268.786.000**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	7.255.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2.575.000	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	10.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	3.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kantor yang Disediakan					yang Disediakan			
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	1.830.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	1.000.000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	278.529.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	165.093.000	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	14.206.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	7.281.000	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.000.000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	168.070.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	86.337.000	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**		**68.440.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Pemalang	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**		**68.440.000**	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	21.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	12.000.000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	283.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	48.440.000	
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	21.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	8.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Disediakan								
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.230.420.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.193.720.000**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4,994,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4,000,000	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	244.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	208.000.000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	981.426.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	981.720.000	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah barang milik daerah yang penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara**		**187.087.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah barang milik daerah yang penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara**		**98.650.000**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	77.975.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	37.400.000	
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	3	2.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Pemalang	Jumlah mebel yang dipelihara	3	7.500.000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	54.360.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	23.750.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	47.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	25.000.000	
	12	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	5.000.000	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	4.752.000						
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**69,11**	**954.456.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**69,11**	**186.300.000**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan**		**803.456.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan**		**126.300.000**	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	75.000	9.644.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	75.000	5.000.000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	760.627.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	112.800.000	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	14.400	33.185.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	14.400	8.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kependudukan					Kependudukan			
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang disediakan**	**1**	**11,000,000**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang disediakan**	**1**	**10,000,000**	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		umlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	1	11,000,000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kabupaten Pemalang	umlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	1	10,000,000	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang disediakan**		**140.000.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang disediakan**		**50.000.000**	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3.000	140.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3.000	50.000	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**99.80**	**104.061.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**99.80**	**48.790.000**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan**		**104.061.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Masyarakat Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan**		**48.790.000**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	32.000	22.864.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	32.000	16.455.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pelaporan Peristiwa Penting					Peristiwa Penting			
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	81.197.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	32.335.000	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**77**	**54.417.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**77**	**386.118.000**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**		**37.467.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Perangkat Daerah Kab. Pemalang**	**Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**		**17.463.000**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	22.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	8.360.000	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	15.467.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	9.103.000	
2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun**		**7,500,000**	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Perangkat Daerah Kab. Pemalang**	**Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun**		**4,500,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	7,500,000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	4,500,000	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun**		**504.450.000**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun**		**364.155.000**	
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	13.038.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5	8.055.000	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		umlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	316.737.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Perangkat Daerah Kab. Pemalang	umlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	308.000.000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi	8	167.175.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	8	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Administrasi Kependudukan					Kependudukan			
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	7,500,000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	7,500,000	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Persentase Data Kependudukan yang mutakhir**		**48.203.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Persentase Data Kependudukan yang mutakhir**		**12.400.000**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**		**Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun**	**2 dokumen**	**48,203,000**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Masyarakat Kabupaten Pemalang**	**Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun**	**2 dokumen**	**12,400,000**	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	42.560.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	9.400.000	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	1	5.643.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Masyarakat Kabupaten Pemalang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	1	3.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tidak mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga, agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Disdukcapil dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang produktif dan Inklusif"**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"** yang menjadi landasan untuk mendukung program-program Prioritas Nasional yang selaras dengan Asta Cita **.**

1. Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mensinergikan program pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program Asta Cita sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dan juga isu nasional maupun global yang berkembang terkait tata kelola dan pendayagunaan data kependudukan, utamanya Asta Cita Keempat yaitu "**Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas"** dan astacita keenam yaitu **" Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan**" serta astacita ketujuh yaitu **"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba"** dan isu nasional dan global yang berkembang terkait dengan tata kelola dan pendayagunaan data kependudukan berbasis digital. Implementasi nyata Asta Cita, berkaitan dengan upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi untuk Indonesia maju, terutama membangun infrastruktur digital yang tidak hanya sebatas penyediaan teknologi, tetapi juga mampu menghadirkan pemeratan pelayanan publik sampai ke desa dan transformasi digital yang inklusif, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat luas. Dukcapil menyediakan infrastruktur data yang memungkinkan pemerintah untuk menjalankan misi membangun dari desa dengan efektif, memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam upaya mencapai kemakmuran yang merata.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan Nasional Disdukcapil mendukung Prioritas Nasional yaitu memperkuat Reformasi Politik,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hukum dan Birokrasi serta memeperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, judi dan Penyelundupan, Prioritas Provinsi Jawa Tengah Penguatan Landasan tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis, dan Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 Disdukcapil Kabupaten Pemalang mendukung prioritas ke 7 yaitu Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang mampu menciptakan *Good & Clean Government*, peningkatan kualitas pelayanan public yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme ASN , peningkatan budaya kerja

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang

Disdukcapil Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang administrasi kependudukan, maka Disdukcapil Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang prima.

A. Tujuan

Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mempunyai tujuan jangka menengah yang akan dicapai yaitu "**Meningkatknya pelayanan administrasi kependudukan yang prima**"

B. Sasaran

Disdukcatpil Kabupaten Pemalang mempunyai sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu "**Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kependudukan** yang diukur dengan indikator cakupan layanan adminduk dan "**Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah"** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai SAKIP OPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima		% penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil (Akta,KK,KTP,KIA)	%	93,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	91
		Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92,75
			Nilai SAKIP OPD	%	70,5

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pencapaian target kinerja dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Tahun 2026 Disdukcapil Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 5 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Disdukcapil Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 7.301.639.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam ratus Tiga Puluh Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
   Program ini memiliki indikator Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi dan Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi, dengan target 100%. Program ini dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
   1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini memiliki indikator Perekaman KTP el dengan Target 99,91 % Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA target 62 , Cakupan penerbitan Kartu Keluarga target 99,53% Kepemilikan identitas kependudukan digital target 15, terdiri dari :

2.1 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2.2 Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

a. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

a.Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

Program ini memiliki indikator Indikator : Persentase kepemilikan akta kelahiran target 99,2 %,Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan target 100%,Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan target 100%, Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan target 100%, yang terdiri dari

3.1 Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program dengan Indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama ,target 77% yang dilaksanakan melalui :

4.1 Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

4.2 Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini dengan indikator Persentase data profil kependudukan yang disusun, target 100%

5.1 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
b. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027sebagi berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**7.301.639.000**				**9,408,699,303**
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**6,668,031,000**				**7,967,132,303**
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai regulasi Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi		100					
2 12 01 2.01	**Prencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**10.500.000**				**19.000.000**
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 dokumen	3,500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	5.000.000
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1,500,000
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1,500,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	1,000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1.500.000
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 laporan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	2.500.000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	2,500,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	3.000.000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5,006,880,000**				**5,507,880,000**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	, Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	36/ perbulan	5,004.925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36/12	5,504,880,000
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 laporan	1.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		2	1.500,000
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 laporan	1.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	1.500,000
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**21.010,000**				**42,020,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	109 orang	21.010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		110	42,020,000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**268,786,000**				**612,599,000**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4paket	2,575,,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		4	2,575,,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 paket	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		3	10,500,000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 paket	1,000,,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		4	1,000,000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	10 paket	162,093,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)		10	412,093,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6 paket	7,281,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	7,281,000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3,000,000
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 laporan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3,000.,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	32 laporan	86,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36	173,150,000
2	**1**	**01**	**2.07**	**2**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**68,440,000**				**280,200,000**
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional apangan	Jumlah unit kendaraan Dians operasional atau lapanganyang disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum -		1	25,000,000
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 unit	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	30,000,000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 unit	48,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9	217,200,000
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 unit	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11	8,000,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah**				**1,193,720,000**				**1,335,238,303**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang Semua Kecamatan	12 laporan	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	5,044,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan	48 laporan	208,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48	248,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan	12 laporan	981,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	1,083,283,303
2	**12**	**01**	**2.08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**				**170.150.000**				**170,150,000**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	33 unit	37,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33	67,400.000
2	12	01	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 unit	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	7,500,000
2	12	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 unit	23,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35	35,250,000
2	12	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 unit	25.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	55,000,000
2	12	01	2.08	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 unit	5,000,000			1	5,000,000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**186,300,000**				**833,257,000**
						Perekaman KTP el, Persentase ana usia 0-17 th kurang dr 1 hari yg memiliki KIA, cakuan penerbitan KK, Kepemilikan IKD		**99,91**				**99,92**	
						Persentase anak usia 0-17 thnkurang dr 1hari yang memiliki KIA		**62**				**64**	
						Cakupan penerbitan KK		**99,58**				**99,54**	
						Kepemilikan IKD		**15**				**20**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**126,300,000**				**743,257,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan Semua Kelurahan	75.000 dokumen	5.000.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75.000	9.500.000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 laporan	112.800.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	720,257,000
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	14.400 dokumen	8.500.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14.400	13,500.000
2	**1**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**				**10,000,000**				**20,000,000**
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	10.000.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	20,000,000
2	**1**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				**50,000,,000**				**70,000,000**
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3000 dokumen	50.000.000			4000	70,000,000
2	**1**	**03**	**2**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**48,790,000**				**80,996,000**
						1. .Kepemilikan akta kelahiran 2. Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan 3. Persentase alta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 4. Persentase perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		**99,3** **100** **100** **100**					
2	**1**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**				**48,790,000**				**80,996,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	32.000 dokumen	16,455,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36.000	26,455,000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 layanan	32,335,000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	54,541,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**386,118,000**				**493,612,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**				**17,463,000**				**27,463,000**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah OPD pemanfaat data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 dokumen	8.360.000	Dana Dana Transfer **Umum-Dana Alokasi Umum**		12	13,360.000
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD pemanfaat data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 dokumen	9.103.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	14.103.000
2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**4,500,000**				**7.500,000**
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	4.500.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	7.500.000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**				**364,155,000**				**458,658,000**
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6 laporan	8.655.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana		6	13.055.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub Kegoatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Kependudukan					Alokasi Umum			
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	15 laporan	308.000.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15	358.103.000
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	8 laporan	40.000.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8	80.000.000
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Keluraha	2 laporan	7.500.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	7.500.000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**12,400,000**				**33.693,000**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**				**12.400,000**				**33.693,000**
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	10.000.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	.30.000.000
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	Kab. Pemalang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	2.400.000	Dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	3.693.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL KABUPATEN PEMALANG

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk Tahun 2026. Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Program ini diarahkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk mencatat dan mendata penduduk serta menerbitkan dokumen kependudukan yang dilaksanakan melaui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   a. Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk mencatat dan mengelola data kependudukan serta peristiwa penting dalam kehidupan penduduk,yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
   b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

program ini untuk mengelola, memproses, dan menyajikan data kependudukan secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
   a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
   b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
b. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
c. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
   b. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Tabel 4.1

Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**7.301.639.000**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	% dokumen perencanaan,keuangan dan evakuasi kinerja sesuai regulasi	**100**	**5.017.425.000**
						% layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	**100**	**1.650.506.000**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**14**	**10.500.000**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	3.500.000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.000.000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1.000.000
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.500.000
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,500,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1.000.000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1,000,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**		**5.007.425.000**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36/12	5.004.925.000
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.500.000
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	1.000.000
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya**		**14.225.000**
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	109	14.225.000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**		**202.599.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2.575.000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3.500.000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	1.000.000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	162.093.000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	7.281.000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	3.000.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	73.150.000
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**		**78.660.000**
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	6.000.000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	72.660.000
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.233.720.000**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	248.000.000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	981.720.000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara**		**120.902.000**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	67.400.000
2	12	01	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		
2	12	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	23.750.000
2	12	01	2.08	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	29.752.000
2	12	01	2.08	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**69,11**	**186.300.000**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan**		**133.300.000**
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	75.000	9.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	110.300.000
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	14.400	13.500.000
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang disediakan**	**1**	**3,000,000**
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	umlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	1	3,000,000
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang disediakan**		**50.000.000**
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3.000	50.000.000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**99.80**	**48.790.000**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan**		**48.790.000**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32.000	16.455.000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	32.335.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**77**	**386.118.000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah dokumen pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**		**27.463.000**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	13.360.000
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	14.103.000
2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun**		**7,500,000**
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	7,500,000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun**		**351.155.000**
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		13.055.000
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	umlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi	12	300.600.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
						Kependudukan		
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8	30.000.000
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	7,500,000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Data Kependudukan yang mutakhir**		**12.400.000**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun**	**2 dokumen**	**12,400,000**
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	10.000.000
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	1	2.400.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/ anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra OPD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Disdukcapil Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Drs. Hendro Susilo, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681227 199001 1 002

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja PD merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Tengah

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Mendasari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 tema yang diangkat dalam RKPD 2026 adalah **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**.

Renja Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berdasarkan kerangka kebijakan guna mewujudkan Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD yaitu : **"Pemalang Bercahaya - Bersih, Cakap, Handal, Mulya"**. Arah pembangunan Dinpermasdes diprioritaskan untuk mendukung pencapaian visi Cakap, dimana visi ini mendukung misi Hijau, Apik dan Peduli.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Keterkaitan Renja Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional dan Perencanaan Pembangunan Tingkat Daerah sesuai tupoksi Dinpermasdes adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dari Kemendagri yang terkait dengan tupoksi Dinpermasdes Kabupaten Pemalang adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa dan penanganan sampah.
2. Sasaran dari Kemendes yang terkait dengan tupoksi Dinpermasdes Kabupaten Pemalang yaitu : pendamping desa dan pencegahan stunting;
3. Sasaran dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi Dinpermasdes Kabupaten Pemalang adalah meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah dengan indikator sasaran berupa persentase peningkatan Desa Mandiri.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan hukum antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;

22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029;

23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045;

18) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;

19) Peratuan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

20) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Guna mewujudkan pengawasan terpadu serta memperhatikan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul dan untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang maka perlu dirumuskan **Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026.**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2026.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinpermasdes agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa Subbab meliputi :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas mengenai Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjut dalam Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2/Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1/ Tahun 2025) mengacu pada APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Menyajikan evaluasi pelaksanaan Renja bentuk tabel seperti Lampiran III tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Dalam bab ini juga memuat indikator kinerja dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Kerja PD Tahun (n-2). Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing..

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinpermasdes dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinpermasdes; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dipermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dengan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinpermasdes;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan *Suistanable Development Goals* (SDGs);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinpermasdes; dan
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
d. Sajikan hasil pengerjaan dalam bentuk tabel Lampiran III tabel 2.4.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian tentang;

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para pemangku kepentingan disajikan dalam Lampiran III tabel 2.5.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermasdes.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermasdes yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermasdes.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan,
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinpermades Tahun 2026

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam Lampiran III tabel 4.1.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa:

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan;

5.3 Rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINPERMASDES TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinpermasdes.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukurkan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal itu guna mengetahui sejauh mana tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Pada tahun 2024 jumlah total anggaran penetapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar **Rp. 11.776.280.500,00** yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 59 sub kegiatan, dengan rincian :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. **4.665.291.000,00**
- BPJS Kesehatan Kades & Perangkat : Rp. **2.770.197.000,00**
- Operasional penunjang kegiatan : Rp. **4.340.792.500,00**

Hasil evaluasi RKPD Dinpermasdes sampai dengan Triwulan 4 dengan rincian :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. **3.935.797.166,00 (84,36%)**
- BPJS Kesehatan Kades & Perangkat : Rp. **2.737.971.080,00 (98,84%)**
- Operasional penunjang kegiatan : Rp. **4.236.390.673,00 (99,90%)**

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dilakukan dengan pengukuran kinerja sasaran strategis dan program Dinpermasdes Kabupaten Pemalang. Untuk pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi dasar pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Uraian pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis Dinpermasdes Tahun 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dilihat pada Tabel. 2.1.1 berikut:

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah Desa Berdaya	15	15	100	Sangat Tinggi	Laporan TW4
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	79.14	80.02	101.1	Sangat Tinggi	Laporan TW4
		Nilai SAKIP	66	66.93	101.4	Sangat Tinggi	Laporan TW4

Dari tabel di atas terlihat, 2 sasaran strategis diukur dengan 3 indikator kinerja. Untuk capaian Tahun 2024 dengan realisasi melampaui target dengan capaian ≥100%. Guna mewujudkan sasaran strategis Dinpermasdes Kabupaten Pemalang maka diperlukan pelaksanaan program-program yang sudah ditentukan untuk mendukung pencapaian target. Program-program tersebut dilaksanakan oleh jajaran sekretariat dan bidang yang ada pada Dinpermasdes. Adapun program-program yang diselenggarakan adalah:

1) Program Penataan Desa;
2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, ke 5 program tersebut yang diukur dengan 6 indikator kinerja program. Pengukuran capaian kinerja program dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Program Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Sakip	66.00	66.93	101.41
		IKM	79.14	81.75	103.30
2	Program Penataan Desa	Persentase desa tertata (%)	23.58	23.58	100
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa	63.98	63.98	100
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa Baik	23.58	23.58	100
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif	34.83	34.83	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari tabel diatas terlihat, dari 5 program yang mendukung urusan Dinpermasdes diukur dengan 6 indikator kinerja. Untuk capaian kinerja tahun 2024 dari 6 indikator dengan capaian 100%.

Dalam upaya untuk evaluasi kinerja keuangan selanjutnya dilakukan penilaian pengukuran kinerja keuangan. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan realisasi/penyerapan dengan pagu anggarannya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat penyerapan/realisasi anggaran dari masing-masing capaian sasaran dan program. Berikut ini adalah capaian kinerja keuangan berupa target dan realisasi anggaran Tahun 2024 berdasarkan program sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Realisasi Keuangan berdasarkan Program Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	5,555,533,200	4,810,865,211	86.60
2	Program Penataan Desa	1,600,784,000	1,599,567,722	99.92
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	97,497,000	89,086,950	91.37
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,376,157,000	3,324,361,036	98.47
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	1,146,309,300	1,086,278,000	94.76

Dari tabel diatas terlihat, capaian kinerja keuangan/ tingkat penyerapan anggaran Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2024 berdasarkan program sebesar 92,65%. Terkait evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 2.1.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurahan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	67.18	65.85	66.00	66.93	101.41	67.18	0	-
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	13	11	13	13	100	13	7	53.85
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	3	3	3	100	3	2	66.67
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100.00
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	-	-
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100.00
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	-	-
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	1	50.00
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	2	4	4	100	4	2	50.00
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah aktivitas administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	40	30	30	30	100	41	22	53.66
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	8	57.14
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	3	3	3	100	12	6	50.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	-	-
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	1	1	1	100	2	2	100.00
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12	11	11	11	100	12	6	50.00
2.13.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah aktivitas administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**14**	**4**	**8**	**8**	**100**	**14**	**4**	28.57
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2	2	2	2	100	2	1	50.00
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	2	6	6	100	12	3	25.00
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah aktivitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**120**	**40**	**40**	**40**	**100**	**0**	**0**	#DIV/0!
2.13.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80	40	40	40	100	0	-	100.00
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah aktivitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**67**	**112**	**21**	**21**	**100**	**67**	**33**	49.25
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket/komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	4	4	4	100	12	6	50.00
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	3	3	3	100	4	2	50.00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	3	3	3	100	12	6	50.00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	3	3	100	3	1	33.33
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	4	2	2	100	12	6	50.00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	83	3	3	100	12	6	50.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12	12	3	3	100	12	6	50.00
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	5	3	3	3	100	5	0	-
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	3	3	3	100	5	0	-
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aktivitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	240	144	48	48	100	48	24	50.00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	36	12	12	100	12	6	50.00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	36	12	12	100	12	6	50.00
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	36	12	12	100	12	6	50.00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	36	12	12	100	12	6	50.00
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aktivitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	43	43	43	43	100	43	21	48.84
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26	26	26	26	100	26	13	50.00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14	14	14	14	100	14	7	50.00
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang terpelihara/rehabilitasi	3	3	3	3	100	3	1	33.33

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase desa tertata (%)**	**100**	**51.90**	**23.58**	**23.58**	**100**	**35.38**	**28.3**	**79.99**
2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah aktivitas penataan desa yang diselenggarakan**	**307**	**211**	**212**	**212**	**100**	**307**	**79**	**25.73**
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	307	211	212	212	100	307	79	25.73
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa**	100	48.34	63.98	63.98	**100**	**72.04**	51.46	**71.43**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Jumlah aktivitas fasilitasi kerjasama antar desa yang dilaksanakan	19	23	21	21	**100**	19	19	100
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	14	14	14	14	100	14	14	100
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	2	6	2	2	100	2	2	100
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	3	3	5	5	100	3	3	100
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa Baik**	**100**	**51.93**	**23.58**	**23.58**	**100**	**35.38**	**28.3**	**79.99**
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah aktivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan**	67	759	471	471	100	67	13	19.40
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	13	13	13	13	100	13	6	46.15
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	9	13	7	7	100	9	4	44.44

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencaan pembangunan desa	1	3	4	4	100	1	0	-
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan desa	6	4	5	5	100	6	3	50.00
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	1	1	2	2	100	1	0	-
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah laporan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	2	41	1	1	100	2	0	-
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	1	211	1	1	100	1	0	-
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	1	211	4	4	100	1	0	-
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	1	14	1	1	100	1	0	-
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	25	25	424	424	100	25	0	-
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	5	10	4	4	100	5	0	-
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil pembinaan laporan kepala desa	1	211	4	4	100	1	0	-
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1	2	1	1	100	1	0	-
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif**	**100**	**23.38**	**34.83**	**34.83**	**100**	**41.33**	**26.49**	**84.70**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d TW 2 Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah aktivitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**39**	**508**	**78**	**78**	**100**	**39**	**27**	**69.23**
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	4	4	4	100	2	0	-
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	3	446	3	3	100	3	0	-
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	27	27	27	100	4	0	-
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	2	2	2	100	2	0	-
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	2	1	1	100	1	0	-
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	27	27	41	41	100	27	27	100.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari capaian realisasi anggaran maupun hasil evaluasi Renja Dinpermasdes Tahun 2024, sebagaimana dipaparkan dalam tabel 2.1 di atas, secara umum dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan dari 5 program telah mencapai 100% dari rencana target ditetapkan pada rencana kerja (Renja).

b. Faktor-faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan, diantaranya adalah :

   1. Adanya regulasi beserta turunannya yang menjadi landasan pelaksanaan program/ kegiatan
   2. Adanya ketersediaan anggaran sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana waktu dan target.
   3. Adanya disposisi pimpinan yang tepat waktu.
   4. Terjalinnya komunikasi antar Bidang dengan baik.
   5. Terkoordinasinya komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait secara baik.
   6. Kualitas SDM Dinpermasdes dan aparatur pemerintahan desa yang relative lebih baik dari tahun ke tahun
   7. Adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan program/ kegiatan yang semakin baik dan terjadual secara gradual.
   8. Peran aktif pemerintah desa dalam menunjang pelaksanaan fasilitasi program/kegiatan

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

   Terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung terhadap capaian program dan target yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

   Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta estimasi capaian Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran 2025, maka dengan ini perlu mengindentifikasikan berbagai permasalahan yang dihadapi serta mendiskripsikan permasalahan tersebut dengan tujuan dapat menjadi evaluasi dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa terhadap indikator kinerja aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, maka capaiannya dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang melaksanakan 1 (satu) urusan. Pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan 4 rata rata pencapaian indikator dari urusan tersebut adalah 100% sebagaimana table 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2027	Th 2024	Th 2025 TW II	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Desa Membangun		√		0,7878	0,8089	0,8289	N/A	0,7716	N/A	0,8289	N/A	
2	Indeks Desa		√		N/A	69,5	71,24	72,97	N/A	75,41	71,24	72,97	
3	Jumlah Desa Berdaya		√		15	23	31	N/A	15	11	31	N/A	
4	Persentase Desa Mandiri		√		14,69	18,48	21,32	26.07	24.52	32,55	32,55	32,55	
5	Persentase peningkatan status desa mandiri			√	34,78	25,81	15,39		100	N/A	25,81	15,38	
6	Persentase Desa Mandiri		√		14,69	18,48	18,48	21,32	14,69	N/A	18,48	21,32	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes		√		79,14	79,74	79,74	80,24	79,14	N/A	79,74	80,24	
8	SAKIP				61,92	62,82	62,82	63,72	61,92	N/A	62,82	63,72	
9	Persentase desa tertata				23,58	35,38	50,47	N/A	23,58	28,30	50,47		
10	Indeks infrastruktur Desa					3,13	3,34	3,56		3,40	3,40	3,56	
11	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa				63,98	72,04	72,04	77,73	63,98	N/A	72,04	77,73	
12	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa					0,27	0,57	0,87		0,27	0,57	0,87	
13	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik				23,58	35,38	35,38	50,47	23,58	N/A	35,38	50,47	
14	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa					8,76	8,98	9,19		10,23	10,23	10,23	
15	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya				34,83	41,33	41,33	48,59	34,83	N/A	41,33	48,59	
16	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)					6,56	6,72	6,89		7,28	7,28	7,28	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indikator pelayanan pada Dinpermasdes sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dari 10 indikator pelayanan ada 7 indikator telah realisasinya sesuai target (100%).
2. Terdapat 1 indikator yang tidak tercapai sesuai target yaitu Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dari target (0,7878) hanya terealisasi (0,7716) atau capaian hanya 97,94%, hal ini disebabkan :
   - Adanya sarana prasarana desa yang masih memerlukan perbaikan
   - Bertambahnya masyarakat miskin dan pengangguran, serta kenaikan pengeluaran bruto akibat kenaikan harga
   - Banyaknya warga yang menunggak pembayaran BPJS kesehatan
   - Pendidikan non formal yang jumlahnya masih kurang
   - Ketersediaan sarana prasarana akses distribusi logistik seperti kantor pos
   - Masalah sampah yang masih menjadi permasalahan di desa sehingga diperlukan penanganan yang urgen baik dari segi sarana prasarana maupun melalui kampanye tentang sampah
3. Terdapat 2 indikator yang realisasinya melebihi target yaitu : capaian nilai SAKIP dari target 66 dapat tercapai 66,93 (101,41%) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinpermasdes dari target 79,14 dapat terealisasi 81,73 (103,3%) hal ini dapat tercapai karena adanya kerja sama yang baik dari semua komponen yang ada di Dinpermasdes.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Keberhasilan capaian kinerja pelayanan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dipengaruhi permasalahan dan hambatan. Berikut ini hal-hal yang menjadi permaslahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan tupoksi Dinpermasdes, meliputi :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam menata wilayah dan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;
2. Masih rendahnya kemampuan desa dalam mengidentifikasikan potensi yang dimiliki untuk dikerjasamakan;
3. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa;
4. Masih rendahnya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di desa;
5. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
6. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pelayanan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, maka tantangan yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinpermasdes adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa adalah tantangan dan peluang penting yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang lebih baik, antara lain :
   - Infrastruktur dan Prasarana :
     Kurangnya sarana dan prasarana dasar seperti kantor desa yang memadai, serta infrastruktur pelayanan publik yang belum optimal.
   - Sumber Daya Manusia :
     Kualitas sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat) yang masih rendah, serta pembinaan administrasi yang belum rapi.
   - Tata Kelola Keuangan :
     Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang dapat menyebabkan potensi korupsi.
   - Aset Desa :
     Pengelolaan aset desa yang kurang maksimal dan belum terinventarisasi dengan baik.
   - Tata Ruang :
     Belum tersusunnya tata ruang desa yang jelas, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan.
   - Partisipasi Masyarakat :
     Kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa belum maksimal, sehingga program pembangunan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat.
   - Kolaborasi multi pihak
     Masih belum optimalnya kolaborasi multi pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan dan kemandirian desa.
2. Perlu ditingkatkannya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Dinpermasdes Kabupaten Pemalang adalah karena rendahnya kualitas dan efektivitas pelayanan publik dan belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan Dinpermades adalah :

1. Adanya dana untuk pembangunan sarpras desa dan adanya regulasi yang mengatur tentang kewenangan desa, penataan wilayah serta pengelolaan pembangunan sarana prasarana di desa;
2. Adanya Badan Kerjasama Desa (BKD) dan adanya regulasi yang mengatur tentang kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
3. Adanya sistem informasi desa (SID) yang mampumengefisiensikan administrasi pemerintahan desa;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Secara kelembagaan ada LKD dan LEM sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa;
5. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
6. Adanya regulasi dan turunannya sebagai acuan pelaksanaan tugas.

Dengan memperhatikan permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang, maka isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dalam perumusan program dan prioritas tahun 2026 yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu adanya Penyusunan Perubahan Perda dan Perbup terhadap : Kedudukan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penyesuaian masa jabatan Kepala desa dan Keanggotaan BPD, Hak Keuangan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa dan anggota BPD serta Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Perlunya Peningkatan kapasitas kelembagaan dan asistensi pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, pelaksanaan pembangunan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga;
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa;
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, tim pelaksana kegiatan dan aparatur Kecamatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan APBDes.
5. Perlu adanya fasilitasi pengajuan BKKD secara elektronik melalui aplikasi (SIDEKEM) / email;
6. Perlu adanya fasilitasi kerjasama antar desa dan kabupaten, serta fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga guna meningkatkan PADes;
7. Perlu adanya evaluasi dan pengembangan kawasan perdesaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan diversifikasi produk unggulan kawasan perdesaan;
8. Perlunya Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat di desa;
9. Fasilitasi penandatanganan nota kesepahaman antara Pemda Kabupaten Pemalang dengan Badan Informasi Geospasial, perlu kolaborasi dan sinergi dengan Bagian Tapem, Disperkim dan terkait lainnya guna penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan melalui penetapan peraturan Bupati tentang batas desa/kelurahan guna kepastian hukum administrasi suatu desa/kelurahan;
10. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pemerataan pembangunan, jalan mantap dan koneksi antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa, akses pendidikan, akses kesehatan masyarakat di desa;

11. Mendorong BUMDes dan BUMDesMa dalam penguatan kemandirian pangan.
12. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui PKK dan RT RW untuk memilah sampah dari rumah dan pengelolaan kontrol landfiil TPA. Peningkatan pilah sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta dan penguatan bank sampah.
13. Meningkatnya pembangunan desa dengan terpenuhinya Sarana dan prasarana Desa sesuai dokumen perencanaan Desa sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam menata desa melalui Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
14. Fasilitasi pemilihan kepala desa di 173 desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15. Fasilitasi penyusunan regulasi yang mengatur desa, antara lain :
    - Perbub pakaian dinas pemerintah desa
    - Perbub Tata naskah dinas pemerintah desa
    - Perbub pedoman penyusunan APBDes Tahun 2027
    - Perbub juklak 3 Perda :
        1. Perda Kepala Desa
        2. Perda Perangkat Desa
        3. Perda BPD
    - Perbup Standar Pelayanan Minimal (SPN) Desa

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2026 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinpermasdes dalam rangka mencapai tujuan, indikator Sasaran dan indikator program yang tertuang dalam RPJMD Kabuapten Pemalang Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan pada nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Analisa terhadap rancangan awal diperolch informasi bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Perangkat Daerah namun apabila dilihat dari sisi penganggaran indikatif maka ada perbedaan antara indikasi anggaran dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan indikatif pada Rencana Kerja yang ada. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4.1 Usulan Rancangan Awal RKPD Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Pemalang**	SAKIP IKM	67,68 82,25	**4,821,226,000** **787,941,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Pemalang**	SAKIP IKM	67,68 82,25	**4,599,994,200** **1,197,229,100**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Pemalang			7,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang			13,250,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,250,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,250,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,250,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,250,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,250,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,500,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3,500,000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pemalang**			**4,814,226,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pemalang**			**4,586,744,200**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,811,226,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,582,510,000
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7,500,000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2,400,000
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1,500,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Rancangan Awal EKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Pemalang	Jumlah aktivitas administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		**1.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Pemalang	Jumlah aktivitas administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		**1.000.000**
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pemalang**			**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pemalang**			**0**
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pemalang**			**248.999.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pemalang**			**5.140.000**
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.000.000
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	56.099.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230,000,000
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	6.000.000
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	25,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	75,000,000
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Pemalang	**Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia**		**29,300,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pemalang**	**Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia**		**161,584,860**
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	4 Unit	29,300,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	14 Unit	161.584.860
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Pemalang			**394,660,800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pemalang**			**342,754,000**
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,000,000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138,920,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126,348,000
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,140,800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,500,000
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	249,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	204,600,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pemalang			**103,980,500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Pemalang			**314,511,340**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	71,920,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	94,121,540
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2,060,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7,160,500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	213,229,800
PROGRAM PENATAAN DESA	Kab. Pemalang		**5,61**	**140,000,000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Kab. Pemalang			266,332,100
Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Pemalang		**353 Desa**	**140,000,000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Kab. Pemalang			266,332,100
Fasilitasi Kewenangan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	3 Desa	5,000,000	Fasilitasi Kewenangan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangan nya	3 desa	10,000,000
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	350 unit	135,000,000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	350 Unit	410,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab. Pemalang		17,95	40,000,000	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Kab. Pemalang			119,956,000
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Pemalang		18 Dokumen	40,000,000	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Kab. Pemalang			119,956,000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	14 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	14 Dokumen	35,000,000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
33	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	20,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	100,000,000
D	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Pemalang		5.61	3,079,629,000	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Pemalang			6.156.248.700
XI	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab. Pemalang		212 Desa	3,079,629,000	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Kab. Pemalang			6.156.248.700
34	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Dokumen	2,822,865,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2,822,865,000
35	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	200,000,000
36	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	4,890,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen	5,000,000
37	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 Dokumen	40,524,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen	194,000,000
38	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80 orang	40,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		47,000,000
39	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	173 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	173 Laporan	2,527,303,700
40	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Laporan	10,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
41	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	10,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	20,030,000
42	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	45,000,000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	3 Dokumen	110,000,000
43	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	20,000,000
44	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Pemalang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	10,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Pemalang	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	2,000,000
45	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	11 Desa	10,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	11 Desa	10,000,000
46	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	6,350,000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	5,000,000
47	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	10,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	183,050,000
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Kab. Pemalang	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif**	6,56	779,575,000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Kab. Pemalang	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang produktif**	6,56	918,95,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
XII	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Pemalang	**Jumlah aktivitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	41 aktivitas	779,975,000	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Pemalang	**Jumlah aktivitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	41 aktivitas	918,920,000
48	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	70,000,000
49	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga	40,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga	42,445,000
50	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	167,275,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)
51	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	29,975,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	33,750,000
52	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	5,450,000
53	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	28 Dokumen	600,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	28 Dokumen	600,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari tabel 2.4.1 di atas terlihat bahwa antara program/kegiatan dan pagu indikatif yang ada di rancangan awal RKPD dan program/kegiatan dan kebutuhan dana yang ada di Rencana Kerja SKPD, dapat direview/dianalisis sebagai berikut :

- Secara keseluruhan, dilihat dari analisis kebutuhan, pagu indikatif yang tercantum pada rancangan awal jauh dibawah analisis dana yang dibutuhankan dan ada beberapa sub kegiatan yang tidak terdanai. Rekapitulasi rancangan awal dan analisis kebutuhan menurut program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2
Rekapitulasi rancangan awal dan analisis kebutuhan menurut program pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No.	Program /Kegiatan	Pagu Indikatif pada Rancangan Awal RKPD (Rp)	Analisis Dana yang dibutuhan (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,609,167,000	5.797,223,300	(188,056,300)
2	PROGRAM PENATAAN DESA	140,000,000	410,000,000	(127,000,000)
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	40,000,000	119,956,000	(79,956,000)
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,079,629,000	6,156,248,700	(3.076.619.700)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	779,975,000	918,920,000	(138,945.000)

- Dari sisi anggaran, masih terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara jumlah pagu indikatif di rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang tercantum di Renja, yaitu kekurangan dana sebesar Rp. 3.610.576.700,-

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Hasil Musrenbang Kabupaten Pemalang tahun 2025, Dinpermasdes tidak mendapatkan usulan sebagai program kegiatan prioritas kebutuhan masyarakat pada tahun anggaran 2026.

Tabel 2.4.3
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Pemalang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	NIHIL	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional, Kementerian maupun Provinsi Jawa Tengah.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Dinpermasdes Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Visi RPJMN 2025-2029 yaitu "***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***". Yang mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara Negara maju di Tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025:

1. Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama: terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun keterkaitan Misi Asta Cita dengan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang adalah : Asta Cita 4 dan Asta Cita 6, dimana Dinpermasdes melalui kebijakan implementasi Dana Desa pada alokasi kegiatan ketahanan pangan dengan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Ma) untuk penyediaan / sebagai pemasok bahan baku segar dan berkualitas untuk program MBG, sehingga memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kualitas gizi Masyarakat dan melalui koperasi desa berperan sebagai lembaga strategis yang dapat mengelola, mengolah, dan mendistribusikan hasil pangan dari petani maupun nelayan, sehingga memotong rantai pasok yang panjang, menurunkan harga, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan sehingga pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Tema daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan pada Rantekno RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada Tema "***Penguatan Landasan Transformasi***". Tahap pertama ini diarahkan pada kebijakan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan. Keterkaitan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dengan visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah berperan dalam mewujudkan visi, khususnya dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju dan berdaya. Salah satu upaya untuk mewujudkannya visi tersebut adalah mendukung penyusunan program "Kecamatan Berdaya", dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran sentral dalam pembentukan Kecamatan Berdaya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kecamatan Berdaya, sebagai wilayah yang menjadi fokus pemberdayaan, mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengembangan ekonomi desa, serta pemberdayaan lembaga-lembaga desa.

Kebijaksanaan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 berdasarkan RPJMD 2025-2029 adalah "***Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan***" diarahkan untuk akselerasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pencapaian sasaran pembangunan daerah diantaranya pada :

1) Dukungan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM berkualitas
2) Penurunan prevalensi stunting menjadi 9%
3) Pencegahan, penanggulangan dan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan
4) Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan peran BUMD yang lebih progresif, realistis serta kondusif
5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didekatkan kepada masyarakat
6) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah
7) Pembangunan infrastruktur

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pemalang adalah : **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

4. Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

5. Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

6. Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Digitalisasi : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang sesuai dengan tugas dan fungsinya DINPERMASDES Kabupaten Pemalang mendukung **Frasa Cakap**, dengan tujuan yang akan dicapai adalah "**Meningkatkan kemandirian desa**". Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai tahun 2025 telah menetapkan Indikator Indeks Desa (ID) sesuai dengan Permendes Nomor 9 Tahun 2024 sebagai indikator untuk mengukur capaian pembangunan/kemandirian desa, dengan indikator komposit terdiri dari 6 dimensi yaitu Dimensi Layanan Dasar

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Kesehatan, Pendidikan, Utilitas Dasar), Dimensi Sosial (Aktifitas, Fasilitas Masyarakat), Dimensi Ekonomi (Produksi Desa, Fasilitas Pendukung Ekonomi), Dimensi Lingkungan (Pengelolaan Lingkungan, Penanggulangan Bencana), Dimensi Aksesibilitas (Kondisi Akses Jalan, Kemudahan Akses), Dimensi Tata Kelola Desa (Kelembagaan dan Pelayanan Desa, Tata Kelola Keuangan Desa).

B. SASARAN

DINPERMASDES Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa mempunyai sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. **"Meningkatnya Capaian Desa Mandiri"** yang diukur dengan indikator Persentase Desa Mandiri yang formula perhitungannya adalah membandingkan jumlah desa yang berstatus mandiri berdasarkan Indeks Desa dengan jumlah seluruh desa.
2. **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"** yang diukur dengan :
   - Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DINPERMASDES** yang diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
   - Indikator **Nilai SAKIP** merupakan hasil evaluasi penilaian atas akuntabilitas Kinerja DINPERMASDES oleh Inspektorat .

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka rumusan tujuan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 relevan dengan kondisi yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran DINPERMASDES Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	8
1	Meningkatkan Kemandirian Desa		Indeks Desa	%	71.24
		Meningkatnya Capaian Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	25.47
		Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82.25
			Nilai SAKIP	Nilai	67.68

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Pada Tahun 2026, Dispermades Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Desa dengan target 0,57%. Capaian pada program ini adalah Jumlah dokumen Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi dengan target 14 dokumen, Jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi dengan target 2 dokumen dan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan target 2 dokumen. Program Peningkatan Kerjasama Desa mendukung program prioritas misi ke 2 yang didukung oleh:

- Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa dengan target 8,98%. Capaian pada program ini adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan target 12 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan target 2 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan target 7 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 dokumen, Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas dengan target 80 orang, Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan target 1 laporan, Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dengan target 4 dokumen, Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan target 1 laporan, Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa tersusun dengan target 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan target 1 dokumen, Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas dengan target 25 orang, Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa denga target 11 desa, Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan target 1 laporan. Program Administrasi Pemerintahan Desa mendukung program prioritas misi ke 7 yang didukung oleh :

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan target 6,72%. Capaian pada program ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat denga target 4 dokumen, Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada dengan target 4 lembaga, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan target 1 dokumen, Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan target 1 laporan, Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan hakti Gotong Royong Masyarakat dengan target 1 laporan, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan target 28 dokumen. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mendukung program prioritas misi 1 sampai dengan 7 yang didukung oleh :

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 82,00 dan Nilai SAKIP dengan target 67,18. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di dukung oleh :

➢ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➢ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub KegiatanPelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

➢ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

➢ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

➢ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

➢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➢ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemelihraan, biaya pemelihraan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mendasari dari indikator sasaran Dinpermasdes Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Renstra Dinpermasdes tahun 2025-2029, Rencana Kerja Dinpermasdes tahun 2026 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Adapun Rencana programnya adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penataan Desa
1. Penyelenggara Penataan Desa
    a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
    b. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
    c. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
    d. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
    e. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

C. Program Kerjasama Desa
1. Fasilitasi Kerjasama Desa
    a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
    b. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
    c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa
1. Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemdes
    a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
    b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
    c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
    d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
    e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
    f. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
    g. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
    h. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
    i. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
    j. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
    k. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
    l. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
    m. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

n. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
o. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
p. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
q. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
r. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa
   a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
   b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
   c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
   d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
   e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
   f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
   g. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
   h. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2026

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Indikator	Satuan	Target	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
											Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
												Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Indeks Inflasi desa	%	5.61				Rp. 410.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 410.000.000,00	Rp. 410.000.000,00
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Pemdesan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pemdesan Desanya	Desa	57				Rp. 410.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 410.000.000,00	Rp. 410.000.000,00
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Pemdesan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pemdesan Kewenangan lain	Desa	5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	%	0,57				Rp. 119.956.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 119.956.000,00	Rp. 205.000.000,00
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dokumen Kerja Sama Antar Desa yang terfasilitasi	Dokumen	18				Rp. 119.956.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 119.956.000,00	Rp. 205.000.000,00
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama Antar Desa dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi	Dokumen	14	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.021.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.021.000,00	Rp. 35.000.000,00
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota yang terfasilitasi	Dokumen	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.935.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.935.000,00	Rp. 25.000.000,00
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 145.000.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	%	**8,00**				Rp. 6.156.248.700,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.156.248.700,00	Rp. 3.860.000.000,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Desa yang terbina dalamAdministrasi Pemerintahan Desanya**	Dokumen	212				Rp. 6.156.248.700,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.156.248.700,00	Rp. 3.860.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 250.000.000
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.890.000				Rp. 4.890.000	Rp. 15.000.000
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.524.000				Rp. 40.524.000	Rp. 100.000.000
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 75.000.000
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 175.000.000
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 50.000.000
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 50.000.000
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 35.000.000
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 50.000.000
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.350.000				Rp. 6.350.000	Rp. 10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Indikator	Satuan	Target	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
											Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
												Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.822.865.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.822.865.000,00	Rp. 3.000.000.000,00
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	7	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 194.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 194.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 47.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.000.000,00	Rp. 75.000.000,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.527.103.780,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.527.103.780,00	Rp. 175.000.000,00
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.030.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.030.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa tersusun	Dokumen	3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 110.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 110.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	25	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	11	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemaparan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 183.050.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 183.050.000,00	Rp. 20.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Indikator	Satuan	Target	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
											Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
												Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	6,72				Rp. 918.920.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 918.920.000,00	Rp. 875.000.000,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina		4				Rp. 918.920.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 918.920.000,00	Rp. 875.000.000,00
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.000.000,00	Rp. 80.000.000,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat/Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.445.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.445.000,00	Rp. 60.000.000,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 167.275.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 167.275.000,00	Rp. 80.000.000,00
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Mega, Semua Kel/Desa		Rp. 33.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.750.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Balai Ekoki Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Balai Ekoki Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.450.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.450.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	28	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 600.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 600.000.000,00	Rp. 650.000.000,00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Nilai SAKIP	Nilai Nilai	82,00 67,68				Rp. 5.640.123.440,00	Rp. 4.657.099.860,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.297.223.300,00	Rp. 11.912.223.200,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Indikator	Satuan	Target	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
											Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
												Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel**	**dokumen**	23				Rp. 13.250.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.250.000,00	Rp. 68.506.000,00
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.250.000,00	Rp. 3.906.000,00
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.250.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.250.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.250.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.250.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.500.000,00	Rp. 45.000.000,00
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	14	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.02		Administasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**%**	**31**				Rp. 4.407.410.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.407.410.000,00	Rp. 5.586.744.200,00
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.582.910.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.582.910.000,00	Rp. 5.967.244.200,00
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.500.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.400.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen hasil tanggapan pemeriksaan yang disusun	Dokumen	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan semesteran SKPD	Dokumen	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.500.000,00	Rp. 7.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Indikator	Satuan	Target	Sumber Data	Lokasi	Jumlah						
											Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
												Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	%	2				Rp. 1.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	%	48				Rp. 366.713.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 366.713.100,00	Rp. 514.000.000,00
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.636.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.636.000,00	Rp. 85.000.000,00
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Paket	3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.875.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.875.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.900.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 224.302.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 224.302.100,00	Rp. 230.000.000,00
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinas pada SKPD	Dokumen	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	%	8				Rp. 14.985.000,00	Rp. 4.646.599.860,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.661.584.860,00	Rp. 5.070.000.000,00
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	unit	3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.985.000,00	Rp. 146.599.860,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 161.584.860,00	Rp. 70.000.000,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	200				Rp. 332.254.000,00	Rp. 10.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 342.754.000,00	Rp. 460.978.000,00
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Indikator	Satuan	Target	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
											Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
												Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	%	2				Rp. 1.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
2	13	01	2.06		Administasi Umum Perangkat Daerah	**Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	%	48				Rp. 366.713.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 366.713.100,00	Rp. 514.000.000,00
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	6	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.656.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.656.000,00	Rp. 85.000.000,00
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Paket	8	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.875.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.875.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.900.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.900.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 224.302.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 224.302.100,00	Rp. 230.000.000,00
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinsi pada SKPD	Dokumen	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.000.000,00	Rp. 160.000.000,00
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	%	8				Rp. 14.985.000,00	Rp. 4.646.599.860,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.661.584.860,00	Rp. 5.070.000.000,00
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Penunjang Dinas atau	unit	3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.985.000,00	Rp. 146.599.860,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 161.584.860,00	Rp. 70.000.000,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100				Rp. 332.354.000,00	Rp. 10.580.008,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 342.754.000,00	Rp. 468.978.000,00
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target tahun 2026.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang tahun 2026 mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu :

1. Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun;
2. Menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. Merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2026 telah tertuang dalam target kinerja program / kegiatan/sub kegiatan dalam Renja Tahun 2026. Sedangkan pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam penjabarannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang tahun 2026 ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat dan pelayanan Dinpermasdes yang semakin baik. Guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh sumber daya manusia di lingkungan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan ***good governance*** bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang

Pemalang, 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pemalang

Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770412 199511 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	☑			
2.	Pengolahan data dan informasi.	☑			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	☑			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	☑			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	☑			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	☑			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	☑			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	☑			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	☑			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	☑			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	☑			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	☑			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	☑			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	☑			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	☑			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	☑			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	☑			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	☑			

Pemalang, 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang,

Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770412 199511 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 100.3.3.2 / 419 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan
b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 03 Juni 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG,

Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770412 199511 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 419 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang	Ketua
2.	Sekretaris Dinpermasdes Kabupaten Pemalang	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerja Sama Desa pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang	Anggota
8.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang (Budi Winoto, S.T.)	Anggota
9.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang (Junaedi Abdillah, S.IP.)	Anggota
10.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang (Isti Wahyuningrum, S.STP., M.M.)	Anggota
11.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinpermasdes Kabupaten Pemalang (Winarto, S.IP, MM)	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG,

Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770412 199511 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 29, Bojongbata, Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 323828 Laman dinpermasdes.pemalangkab.go.id
Pos-el. dinpermasdes.pml@gmail.com

Pemalang, 14 Oktober 2025

Nomor : B/000.6.5.1/703 /Dinpermasdes/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -,-
Hal : Undangan

Yth.

Daftar nama terlampir

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang akan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah. Sehubungan hal itu, mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada Kegiatan yang diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : KAMIS, 16 Oktober 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s,d selesai
Tempat : Ruang Aula Berdaya Bersama Dinpermasdes Kab. Pemalang
Acara : Forum Perangkat Daerah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang,

Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO, AP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770412 199511 1 001

Tembusan :
1. Bapak Bupati Pemalang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
3. Kasubag Umum & Kepegawaian Dinpermasdes Kab. Pemalang.

Lampiran :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Lampiran :
Surat Kepala Dinpermsdes Kab. Pemalang
Nomor : B/000.6.5.1/ /Dinpermasdes/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

Daftar Undangan :

1. Kepala Bappeda Kab. Pemalang
2. Kepala DLH Kab. Pemalang
3. Kepala BPKAD Kab. Pemalang
4. Inspektur Kab. Pemalang
5. Kepala Dinkes Kab. Pemalang
6. Kepala Dindikbud Kab. Pemalang
7. Kepala Disperkim Kab. Pemalang
8. Kepala Dispertan Kab. Pemalang
9. Kepala Diskoperindag Kab. Pemalang
10. Kepala Disdukcatpil Kab. Pemalang
11. Kepala Dinpusarda Kab. Pemalang
12. Kepala Dinsoskbpp Kab. Pemalang
13. Kepala Disnaker Kab. Pemalang
14. Kepala Disdukcatpil Kab. Pemalang
15. Kepala Disparpora Kab. Pemalang
16. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pemalang
17. Camat Bantarbolang
18. Camat Pemalang
19. Camat Taman
20. Camat Comal
21. Kepala Desa Wanarata
22. Kepala Desa Danasari
23. Kepala Desa Kaligelang
24. Kepala Desa Purwosari

https://jdih.pemalangkab.go.id/

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Oktober 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula Berdaya Dinpermasdes Kab. Pemalang
Acara : Forum Perangkat Daerah

NO	NAMA	UNSUR/DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2	Alvin Aji R.	Diskoucr	2
3	Devi S	BPBD	3
4	Heroes Hercules	Dinporaus Jateng	4
5	Yunita Wellyana .w	Disparpora	5
6			6
7	Rupanto	Dinsosnaker	7
8	A. Nur Alfiladli	Diskominfo	8
9	Muhanto	KADES	9
10	Arvita. W	Kec. Comi / PMD	10
11	Novita Umi N	Kec. Comal	11
12	Nurul Huda	Dinporapsda	12
13	Adji N	Inspektorat	13
14	Lamzi Kaesar	Inspektorat	14
15	Handini . K	Bappeda	15
16	Anggitarina Fiyar	Bag. Hukum	16
17	Ufan Jauhari	Jogja Jateng	17
18	Dynna Barliana	Bank Jateng	18
19	Lyah Ariantoro	"	19
20	Anastasia Putra W.	Bagian Tapem	20
21	Emy S.	Kec. pne	21
22	Fabian Lusa	Kec. Bantarbolang	22
23	Yulius Lemon	Mesa Nasional	23
24	Suryan	Perkim	24
25	Henry	"	25

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Pemalang

Pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan forum perangkat daerah yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi tentang perencanaan

   Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada ***"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"***, dengan memperhatikan gejolak ekonomi global yang berdampak pada sektor perekonomian, sosial, kesehatan dan pendidikan dengan melibatkan masyarakat secara aktif serta dinamika kebijakan pembangunan nasional dan regional.

   Sedangkan keterkaitan visi RPJMN dengan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang antara lain program ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dinpermasdes sangat terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kebijakan implementasi Dana Desa pada alokasi kegiatan ketahanan pangan dengan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Ma) untuk penyediaan / sebagai pemasok bahan baku segar dan berkualitas untuk program MBG, sehingga memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kualitas gizi Masyarakat dan melalui koperasi desa berperan sebagai lembaga strategis yang dapat mengelola, mengolah, dan mendistribusikan hasil pangan dari petani maupun nelayan, sehingga memotong rantai pasok yang panjang, menurunkan harga, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan sehingga pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat desa. Keterkaitan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dengan visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah berperan dalam mewujudkan visi, khususnya dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju dan berdaya. Salah satu upaya untuk mewujudkannya visi tersebut adalah mendukung penyusunan program "Kecamatan Berdaya", dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran sentral dalam pembentukan Kecamatan Berdaya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kecamatan Berdaya, sebagai wilayah yang menjadi fokus pemberdayaan, mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengembangan ekonomi desa, serta pemberdayaan lembaga-lembaga desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Target tujuan dan Sasaran Dinpermasdesa Tahun 2026 adalah :

Tujuan :

Meningkatkan Kemandirian Desa dengan Indikator Indeks Desa target 71,24 %

Sasaran :

- Meningkatnya capaian Desa Mandiri dengan indikator Persentase Desa Mandiri target 25,47%
- Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 82,25 (nilai) dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP dengan target 67,68 (nilai).

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 Dinpermasdes telah disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi Bupati / Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsinya DINPERMASDES Kabupaten Pemalang mendukung **Frasa Cakap**, dengan tujuan yang akan dicapai adalah "**Meningkatkan kemandirian desa**", yang didukung 5 program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran Rp 10,297,223,300,-
  Aktifitas belanja kegiatan rutin dan gaji
- Program Penataan Desa dengan anggaran Rp 410,000,000,-
  Aktifitas Upacara pembukaan & penutupan TMMD, fasilitasi Pencairan & LPJ BKKD
- Program Fasilitasi Kerjasama Desa anggaran Rp 119,956,00,-
  Aktifitas Kerjasama antar desa, kota, Bumdesma dan pengembangan kawasan
- Program Administrasi Pemerintahan Desa anggaran Rp 6,156,248,700,-
  Aktifitas Pembuatan Produk Hukum, Pengelolaan keuangan desa, membinaan dan fasilitasi pemdes, Profdeskel, Epdeskel
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat anggaran Rp 918,557,000
  Aktifitas Penataan & Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan BUMDes, TTG, BBGRM

2. Tanggapan dan saran dari peserta forum perangkat daerah terhadap terhadap materi yang di paparkan :
   - Terkait Indeks Desa dimana salah satu dari indikatornya adalah penanganan bencana, mohon dukungan Dinpermasdes dalam pembentukan desa tangguh bencana yang salah satu kegiatannya adalah peningkatan kapasitas penanganan bencana bagi desa (saran masukan dari BPBD Kabupaten Pemalang

   Tanggapan :
   - Anggaran berkaitan dengan penanganan becana dapat dilaksanakan melalui dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 16 Oktober 2025
Jam	:	Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat	:	Aula Dinpermasdes

Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang

MENYEPAKATI

KESATU	:	Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
KEDUA	:	Menyepakati rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
KETIGA	:	Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan forum perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
KEEMPAT	:	Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang; dan
KELIMA	:	Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Pemalang, 16 Oktober 2025

Pimpinan Rapat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang

AHMADY SIAWAN WIDATMOJO, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770412 199511 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Tahun 2025

Pemalang, 16 Oktober 2025

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Adji N	Inspektorat	1.
2.	Handini . K	Bappeda	2.
3	Edy Siswanto	Kades Kamaro	3.
4	Dyna Bantarum	Bank Jateng	4.
5	Emy sri K	Kec. pml	5.
6	Ufan Jandhi	Jaga Jateng	6.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang

Drs. AHMADY STIAWAN WIDATMOJO,AP.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19770412 199511 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

J. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dokumen tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu menjembatani antara perencanan jangka menengah dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemalang secara subtansial menjabarkan visi dan misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun terahir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang diselaraskan dengan perencanan dan sasaran pembangunan Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan melakukan Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standat Pelayanan Minimal;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

31. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161)
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
35. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2025;
42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 nomor 27);
43. Peraturan Bupati Pemalang nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 Nomor 23)
44. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
45. Peraturan Bupati Pemalang nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2034 (Berita daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx)
46. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2026 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 yang disusun melalui prioritas program

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas program kegiatan dan sub kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2026 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

1. Maksud

   Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

   a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2026.

   b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 dapat tercapai.

   c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

   d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2026.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

   a. Memberikan acuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 guna menunjang pelaksanaan tugas.

   b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2026 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

   c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2026 guna mencapai tujuan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.3 Inovasi dan Hasil Evaluasi SAKIP, RB
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.5 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dalam Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke-sembilan berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan sebesar Rp.5.923.537.400. Sedangkan pada perubahan anggaran mendapatkan tambahan sebesar Rp. 482.593.000., sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.406.130.400, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Operasi	Rp.	6.019.130.400
• Belanja Modal	Rp.	387.000.000 +
Total	Rp.	6.406.130.400

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaiana kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
Bidang Penanaman Modal										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Perencanaan, Pengangggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	6	2	2	100	2	10	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
	Dokumen Perubahan DPASKPD									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	3	1	1	100	1	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	6	2	2	100	2	10	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	126	74	26	26	100	26	126	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	5	3	1	1	100	1	5	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	6	2	2	100	2	10	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	60	36	12	12	100	12	60	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	36	12	12	100	12	60	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.071	561	255	255	100	255	1071	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	980	588	210	90	42,8	210	888	90,6
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
	Daerah									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	109	77	24	40	166,6	24	141	129,3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	36	12	12	100	12	60	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	51	21	26	123,8	21	98	116,6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	36	12	12	100	12	60	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	2	1	1	100	1	4	100
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	132	79	33	0	0	33	99	75
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	**Persentase Peningkatan**	**%**	**18,45**	**9**	**3,10**	**-25,64**	**-827**	**3.15**	**-13,49**	**-73,1**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
	jumlah investor									
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	8	6	1	1	100	1	8	100
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	0	0	0	1	1	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Program Promosi penanaman Modal	**Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah nilai investasi**	**Rupiah**	**892.996 .004.082**	**516.343. 904.081**	**205.038 .302.261**	**220,159 .341.867**	**107,3**	**246.578 462.891**	**983.081 .708.839**	**110**
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	3	1	1	100	1	5	100
Program pelayanan Penanaman Modal	**Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal**	**%**	**479**	**286**	**96**	**100**	**104**	**97**	**483**	**100,8**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	**Persentase perijinan yang**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**disetujui**									
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	27.500	16.500	15.000	13,465	89,7	6000	35.965	130,7
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	1.200	720	55	72	130	240	621,6	86

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
penyediaan Pelayanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	120	12	5	8	160	5	25	20,8
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu**	**%**	**220**	**126**	**46**	**100**	**227,2**	**48**	**228**	**1124,5**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	96	66	22	22	100	22	110	114,5
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	45	27	9	9	100	9	45	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	66	39	13	13	100	13	66	100
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Persentase realisasi perijinan**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	**Persentase tersusunnya Data/**	**%**	**100**	**60**	**20**	**20**	**100**	**20**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11= (10/4*100%)*
Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Informasi Pelayanan Perizinan**									
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	*Dokumen*	5	3	1	1	100	1	5	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari tabel kinerja tahun 2024 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari 6 program yang ada, sebanyak 2 program mencapai kinerja 100%, dan ada 2 program yang capaianya melebihi 100%. Capaian Kinerja yang kurang baik bisa dilihat pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dikarnakan realisasi investor hanya berjumlah 29 investor dari target sebanyak 38 investor. Walaupun demikian capaian realisasi investasi meningkat 11,67% dibandingkan dengan capaian realisasi investasi tahun lalu.

Untuk capaian kinerja dibawah 85% ada di sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan capaian 83%.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar 94,38%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pemalang menangani perijinan non berusaha sebanyak 21 jenis ijin. Sedangkan untuk perijinan berusaha menggunakan system OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024 Sebagaimana tabel II.3

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.3
Realiasasi Pelayanan Perizinan Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Ijin	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Izin teraftar Pengobat Tradisional (STPT)	6	4	0	25	21	0
2	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	13	9	0	12	9	0
3	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	2	2	0	5	4	
4	Izin Reklame						
	a. Izin Penyelenggaraan Reklame	471	471	0	471	471	0
	b. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	14	11	0	13	9	0
5	Izin operasional Lembaga kesejahteraan social (LKS)/ Panti	10	4	0	4	5	0
6	Izin Pemakaman	25	24	0	17	17	0
7	Izin Krematorium	20	19	0	12	12	0
8	Izin operasional penyelenggaraaan satuan pendidikan	4	4	0	6	4	0
9	Izin operasional penyelenggaraaan satuan Pendidikan Non Formal	1	0	0	3	2	0
10	Izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	6	4	0	3	3	0
11	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0	0	0	0
12	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0
13	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
14	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan						
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	166	165	0	0	0	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	7	7	0	0	0	0
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	295	264	0	206	195	
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	461	453	0	315	313	
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	97	101	0	38	36	
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	51	52	0	16	17	
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	6	4	0	4	6	
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	10	10	0	11	12	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	8	8	0	9	9	
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	3	3	0	1	1	
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	4	4	0	1	1	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	6	6	0	4	4	
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	194	200	0	139	139	
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	26	27	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Perekam Medis	27	27	0	0	0	0
	-Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	2	2	0	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Ijin	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
	-Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	1	1	0	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIPTW) /SIKTW	1	1	0	0	0	0
	-Surat izin praktik psikolog Klinis (SIPPK)	0	0	0	0	0	0
	-Surat Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi	0	0	0	56	56	0
15	-Surat Izin Tukang Gigi	0	0	0			
16	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	51	51	0	30	25	
17	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0
18	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
19	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	
20	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	13365	13365	0	12972	12973	
21	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0
22	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	147	149	0	92	74	0
23	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	15	9	0	12	13	
24	Izin Operasional Klinik	4	0	0	0	0	0
25	Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	2	2	0	0	0	0
26	Izin operasional Laboraturium Klink pratama	1	1	0	0	0	0
	JUMLAH	**15.522**	**15.464**	**0**	**14.537**	**14.489**	**0**

Capaian realisasi perijinan Non OSS pada Tahun 2024 cukup baik dengan realisasi sebanyak 14.489 izin terbit. Izin paling banyak terbit terdapat pada izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro yang mencapai 12.973 Izin terbit.

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Salah satu indikator kinerjanya adalah terkait peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2024 target investasi sebesar Rp.205.038.302.261 dengan realisasi investasi sebesar Rp.220.159.341.867 atau capaianya sebesar 107,3%. Sedangkan untuk realisasi nilai SKM sangat baik karna dapat memperoleh nilai 89,70 dari target 88,95.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berikut adalah realisasi atau capaian kinerja Tahun 2024 berdasarkan target RPJMD, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM* nasional	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)		Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	3%	10%	12%	13%	9,73	11,67	12%	13%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	84,0	88,95	89,80	89,85	88,93	89,70	89,80	89,85	
3	Persentase peningkatan jumlah investor			3,05	3,10	3,15	3,20	5,41	-25,64	3,15	3,20	
4	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal			96	96	97	97	99,89	100	97	97	
6	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu			44	46	48	50	100	100	48	50	
7	Persentase realisasi perizinan			100	100	100	100	156,92	89,77	100	100	
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			37	38	39	40	39	29	39	40	
9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			176.666.093.083	205.038.302.261	246.578.462.891	278.633.663.066	197.152.213.713	220.159.341.867	246.578.462.891	278.633.663.066	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3 Inovasi dan Hasil evaluasi SAKIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memiliki beberapa inovasi guna meningkatkan kemudahan terhadap pelayanan perizinan berusaha dan Non Berusaha. Dengan adanya inovasi ini yang sebelumnya pemohon harus datang langsung ke kantor untuk mengetahui syarat – syarat pengajuan ijin, sekarang bisa melalui online sehingga masyarakat dapat menghemat banyak waktu. Ada 3 Inovasi yang dimikili yaitu :

1. Aplikasi SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu), yaitu aplikasi perizinan Non berusaha secara Online. Dapat di akses pada laman “izinonline.pemalangkab.go.id”.
2. Gerai Ivestasi (investasi.pemalangkab.go.id), Adalah sebuah web site yang berisi Sektor sektor potensi investasi beserta komoditas unggulan Kabupaten Pemalang.
3. Aplikasi Aduan Berbasis Elektronik “SAMBATSUNG”, merupakan aplikasi pengaduan pelayanan perizinan berbasis website.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024, Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja tahun 2024 dan tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai skor 69,46 dengan kategori B (Baik). Penilaian tersebut menunjukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai B merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.5
Hasil Evaluasi SAKIP

Komponen SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Pemalang	
	No: 700/183/EVS/V/2024 Tgl: 27 Mei 2024	No.700.1.2.1/0442/2025 Tgl:30 April 2025
	2024	**2025**
Perencanaan Kinerja	21,07	22,47
Pengukuran Kinerja	19	21,75
Pelaporan Kinerja	9,87	9,91
Evaluasi Internal	13,90	15,33
Capaian Kinerja	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021
Nilai SAKIP	**63,84**	**69,46**

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

2.4.1 Permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai satu urusan yaitu Penanaman Modal. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dihadapi adalah :

1. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat (MPP belum mengakomodir seluruh instansi yang ada).
2. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam peralihan sistem dari OSS v.1.1. menjadi OSS-RBA.
4. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri.
6. Adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mempengaruhi proses inevstasi yang akan masuk di Kab. Pemalang.
7. Terhambatnya proses perijinan melalui OSS RBA karena sampai saat ini belum tersusunnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) akibat adanya kebijakan LSD.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang periode Tahun 2021 – 2026.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka peluang investor untuk masuk ke Kabupaten Pemalang semakin terbuka lebar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap Investor.

Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instasi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaanya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Tujuan Penanaman Modal adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kepastian dan kemampuan tehnologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kebijakan Dasar Penanaman Modal

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Promosi Penanaman Modal
3. Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal
5. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, dan
6. Pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdampak positif untuk ikut meningkatkan kemakmuran /kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pemalang terkait investasi yaitu harus siap untuk menghadapi persaingan global dalam usaha menarik investor untuk berinvestasi. Isu strategis pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu perlu untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan investasi maka perlu adanya langkah-langkah yang kongkrit/nyata.

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor :

   Didukung 2 program

   a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

      Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

   b) Program Promosi Penanaman Modal

      Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya :

   Didukung 1 Program

   a) Program Promosi Penanaman Modal

      Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

3. Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri:

   Didukung 1 program

   a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

      Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat

   Didukung 2 program

   a) Program Pelayanan Penanaman Modal

      Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

   b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

      Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

2.4.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dengan di keluarkanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuat dan mengatur proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat maka di harapkan akan memberikan dampak yang siginfikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Kabupaten Pemalang.

Isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengharuskan setiap Kabupaten/Kota mempunyai Mal Pelayanan Publik Digital. MPP Digital menjadi bagian dari Portal Nasional Pelayanan Publik yang terdiri atas : Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan Lembaga, dan Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi tersebut. Saat ini terdapat 17 instansi pemerintah baik vertikal maupun horsontal yang telah berpartisipasi menempatkan petugasnya dalam MPP Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel. II.7

Analisis SWOT

ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGHT) 1. Potensi peluang investasi di berbagai sektor dan daya dukung investasi di Kabupaten Pemalang 2. Ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri melalui Perda Kabupaten Pemalang No 1 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 3. Tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Investasi (Gerai Investasi)	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal 2. Upaya meningkatkan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya 3. Belum optimalnya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik
PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Dukungan Pemerintah melalui terbitnya UU Cipta Kerja 2. Pengembangan Mall Pelayanan Publik 3. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat sebagai media promosi Penanaman Modal	STRATEGI SO 1. Peningkatan Promosi Penanaman Modal 2. Peningkatan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	STRATEGI WO 1. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 2. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
TANTANGAN (THREAT) 1. Masih adanya konflik kepentingan baik social ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal 2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya 3. Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri	STRATEGI ST 1. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	STRATEGI WT

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu :

Visi : " TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI"

Misi ada 6 yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan Berkesinambungan.

Sejalan visi dan misi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati ke 2 yaitu " **MAKMUR** " dan Misi ke 5 yaitu **"Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Lokal"**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2026 keterkaitan Isu Strategis , prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada **" Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia"**

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tehnologi melalui Peningkatan layanan kemudahan investasi (regulasi insentif pelaku usaha, peta potensi investasi, Mal Pelayanan Publik Digital, Rencana Umum Penanaman Modal.

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun program, Kegiatan dan sub kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun 2025.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5.246.483.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5.246.483.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Perencanaan,Pengangggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**59.690.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Perencanaan,Penganggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**59.690.500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	3.696.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	3.696.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2.381.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2.381.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD			SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**100%**	**4.228.946.500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**100%**	**4.228.946.500**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	4.225.567.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	4.225.567.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.861.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.861.000	
	Penyusunan Pelaporan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	2 Dokumen	1.518.500	Penyusunan Pelaporan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	2 Dokumen	1.518.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Realisasi Anggaran			dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Prognosis Realisasi Anggaran			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**186.249.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**186.249.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan**	**100%**	**644.872.000**	**enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan**	**100%**	**644.872.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Daerah		**pemerintah daerah**			**Daerah**		**pemerintah daerah**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah**	**100%**	**126.725.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah**	**100%**	**126.725.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	55.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	
	Pemeliharaan/	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabil	Dinas	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PMPTSP	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase peningkatan jumlah investor**	**3,20%**	**11.096.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL enetapan Pemberian**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase peningkatan jumlah investor**	**3,20%**	**11.096.600**	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal**	**100%**	**5.548.300**	**Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal**	**100%**	**5.548.300**	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		**Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi**	**100%**	**5.548.300**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi**	**100%**	**5.548.300**	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.548.300	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	5.548.300	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**26.473.400**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**26.473.400**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Jumlah nilai investasi**	**276.784.324.595**	**26.473.400**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Jumlah nilai investasi**	**276.784.324.595**	**26.473.400**	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal**	**97%**	**75.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal**	**97%**	**75.000.000**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	**Dinas PMPTSP**	**Persentase perijinan yang disetujui**	**100%**	**75.000.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase perijinan yang disetujui**	**100%**	**75.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Keg Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Keg Usaha	15.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu**	**50%**	**62.430.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu**	**50%**	**62.430.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**62.430.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**62.430.000**	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase realisasi perijinan**	**100%**	**25.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase realisasi perijinan**	**100%**	**25.000.000**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan**	**100%**	**25.000.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan**	**100%**	**25.000.000**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	
JUMLAH TOTAL					**5.446.493.000**					**5.446.493.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dengan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan admmistrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berasal dari 2 item, yang pertama dari tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan yang kedua dari hasil pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Survei Kepuasan Masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 :

a. Survei Kepuasan Masyarakat :
    1. Kurangnya sosialisasi prosedur perizinan
    2. Kurangnya pemahaman pemohon terhadap prosedur perizinan
b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 :

    Facus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Renja tahun 2026 tidak dilaksanakan karna adanya efisiensi anggaran.

Dari hasil usulan masyarakat diatas maka tidak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan malakukan peningkatan kualitas pelayanan yang akan di akomodir pada Sub Kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Visi Presiden 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun 2026 yaitu **"Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".**

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan visi besar: "*Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang maju, untuk Menuju Indonesia Emas 2045*" Untuk mewujudkan visi tersebut, Provinsi Jawa Tengah menetapkan 6 misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Misi 1: Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan SDM yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global.
2. Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.
3. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
4. Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
5. Misi 5: Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal serta perlindungan hak dan kesejahteraan warga.
6. Misi 6: Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif serta mendorong pembiayaan pembangunan yang partisipatif.

Selanjutnya, dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, arah kebijakan dititikberatkan pada: "Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis."

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 jika dikaitkan dengan kewenangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif serta mendorong pembiayaan pembangunan yang partisipatif melalui Peningkatan layanan kemudahan investasi (regulasi insentif pelaku usaha, peta potensi investasi, Mal Pelayanan Publik Digital, Rencana Umum Penanaman Modal.

3. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan tahun terahir pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Pemalang yang diarahkan untuk "Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia", yang di prioritaskan pada:

1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia;
2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan;
3. Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern.
4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.
5. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya pada pengelolaan sumberdaya air dan ke PU an.
6. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pemberian insentif pada pemilik sawah melalui akses pupuk murah, bibit berkualitas dan pendampingan untuk pasca panen.
7. Penguatan koperasi merah putih yang mampu menjadi mitra petani.
8. Mendorong BUMDES dan BUMDEsma dalam penguatan kemandirian pangan.
9. Penguatan cadangan pangan dan penguatan keaneragaman bahan serta keamanan pangan.
10. Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2026, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian hukum dan transparansi proses perizinan serta Implementasi pemberian insentif penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pemalang.
3. Pemutahiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang dan daya dukung investasi serta informasi terkait dengan perijinan dan non perijinan.
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah.
5. Meningkatkan promosi potensi unggulan di Kabupaten Pemalang dan produk – produk UMKM dengan melakukan pameran, promosi melalui website gerai investasi dan media sosial lainnya.
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM.
7. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati Pemalang. Perwujudan Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi ke 3 yaitu "*APIK: Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah* " Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2026 adalah Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif serta mendorong pembiayaan pembangunan yang partisipatif melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, seperti diuraikan pada Tabel III.1 dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Investasi (PMA dan PMDN)	%	12,25
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,85

Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045

RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2045;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

visi jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu ´“PEMALANG MULYA (MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)” dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Maju

Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten yang maju diartikan sebagai daerah yang berhasil mencapai tujuan pembangunan dilihat dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan dan menjadi tempat yang ideal bagi masyarakatnya untuk hidup serta pelayanan fasilitas publik yang baik, pelayanan pendidikan serta fasilitas kesehatan yang sudah sangat memadai. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang maju dimana hal ini akan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan inovasi.

B. Unggul

Masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi, visioner serta memiliki pemikiran maju, optimistis, didukung semangat belajar dan berprestasi yang tinggi. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang unggul dimana hal ini akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

C. Lestari

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tamping lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten yang lestari merupakan komitmen untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan keunggulan dari sisi komoditas pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata, produk UMKM hingga inovasi. Prinsip yang ada berupa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dalam perwujudan pokok visi ini, Kabupaten Pemalang berkontribusi nyata pada target nasional untuk menarik investasi berkualitas ramah lingkungan, ramah sosial untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru, serta mencegah resiko kebencanaan dan krisis iklim. Selain itu, beberapa upaya lain untuk mewujudkan Pemalang yang lestari adalah dengan bergotong royong dengan para pihak lintas sektor dan lintas latar belakang untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab ekosistem penting yang ada di Kabupaten Pemalang. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang lestari dimana hal ini akan fokus pada pembangunan berwawasan lingkungan.

D. Berbudaya

Masyarakat Kabupaten Pemalang di tahun 2045 diharapkan merupakan Masyarakat yang berbudaya. Makna dari Masyarakat berbudaya antara lain, Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, tata kelola pemerintahan yang baik, bertindak terpuji,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tidak melakukan kerusakan serta memegang teguh nilai-nilai agama, tradisi, kearifan dan budaya lokal. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi Kabupaten yang berbudaya dimana hal ini akan fokus pada pengembangan budaya, agama dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, antara lain :

Tabel III.2 Tabel Realisasi dan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP)

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045

No	Indikator Sasaran Pokok / Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi				Target Kabupaten			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Baseline 2025 Kab	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	14,27	13,39	13,17	12,15	12,38	12,63	12,76	12,91

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang juga mendukung prioritas daerah dalam peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah melalui program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan informasi tentang peta potensi penanaman modal di kabupaten pemalang.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan Pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, dan 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan yang terdiri dari 14 Kecamatan, dan 1 (satu) unsur Pemerintahan umum. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2026 yaitu mengampu **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal.**

Rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
  2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
  3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
3) Pengawasan Penanaman Modal

f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
MATRIK RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5.246.483.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**5.246.483.000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Perencanaan,Pengangggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**59.690.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Perencanaan,Penganggaran,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**59.690.500**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.350.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	2.826.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	3.696.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	3.696.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
							RKASKPD			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	2.381.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	2.381.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.456.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**100%**	**4.228.946.500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan**	**100%**	**4.228.946.500**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	4.225.567.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	4.225.567.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.861.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	1.861.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
							Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.518.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.518.500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**186.249.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**186.249.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.883.250	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.930.750	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.804.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	71.616.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**644.872.000**	**enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**644.872.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	499.272.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah**	**100%**	**126.725.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah**	**100%**	**126.725.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	29 Unit	55.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					atau Lapangan		Perizinannya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	61.725.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase peningkatan jumlah investor**	**3,20%**	**11.096.600**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL enetapan Pemberian**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase peningkatan jumlah investor**	**3,20%**	**11.096.600**	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal**	**100%**	**5.548.300**	**Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal**	**100%**	**5.548.300**	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5.548.300	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
					Modal					
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		**Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi**	**100%**	**5.548.300**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi**	**100%**	**5.548.300**	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.548.300	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	5.548.300	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**26.473.400**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal**	**100%**	**26.473.400**	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Jumlah nilai investasi**	**276.784.324.595**	**26.473.400**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Jumlah nilai investasi**	**276.784.324.595**	**26.473.400**	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.115.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	5.358.400	
PROGRAM	**Dinas**	**Persentase**	**97%**	**75.000.000**	**PROGRAM**	**Dinas**	**Persentase**	**97%**	**75.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**PMPTSP**	**terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal**			**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**PMPTSP**	**terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal**			
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Persentase perijinan yang disetujui**	**100%**	**75.000.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase perijinan yang disetujui**	**100%**	**75.000.000**	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan	130 Keg Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,	130 Keg Usaha	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
bidang perizinan berusaha berbasis risiko		pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			bidang perizinan berusaha berbasis risiko		evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu**	**50%**	**62.430.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu**	**50%**	**62.430.000**	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**62.430.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**62.430.000**	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan	9 Pelaku Usaha	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	55.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Dinas PMPTSP**	**Persentase realisasi perijinan**	**100%**	**25.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase realisasi perijinan**	**100%**	**25.000.000**	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan**	**100%**	**25.000.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas PMPTSP**	**Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan**	**100%**	**25.000.000**	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah,	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	1 Dokumen	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Tahun 2026					Perkiraan Maju Tahun 2027					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Dikaji dan Dimanfaatkan			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
				5.446.493.000					**5.446.493.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2026 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menunjang Tugas dan Fungsinya serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Pemalang serta target dari tujuan dan sasaran Pemangunan Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, September 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG

KHAERON, S.H, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680323 199003 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id/

K. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah penjabaran tahun kedua dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Disusun berdasarkan kerangka kebijakan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati dan Wakil Bupati yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Menuju Masyarakat Pemalang Mulya) Maju, Unggul, Lestari, Berbudaya".***

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis. Langkah-langkah penyusunan yang ditempuh yaitu pertama menyusun usulan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan potensi sumber daya masing-masing urusan dan perkembangan masyarakat Kabupaten Pemalang. Kedua usulan tersebut di selaraskan dengan daftar program/kegiatan usulan masyarakat

Perekonomian Indonesia 2026 diperkirakan akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan, digambarkan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan selain ekspor dari hilirisasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten Pemalang sebagai Kabupaten yang sedang berkembang dengan dinamika pembangunan yang dinamis terus berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kunci peningkatan dan pencapaiannya terletak dari sistem perencanaan yang handal. Pelaksanaan pembangunan akan sesuai harapan apabila melalui perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pemerintah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang sebagai Unit Organisasi yang bertanggung jawab di bidang Pembinaan dan Pengembangan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan di Kabupaten Pemalang perlu melakukan penyesuaian dan penajaman kebijakan pembangunan serta optimalisasi kinerja penyelenggaraan peemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang ini telah mendasari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang kedepan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat menyiapkan UMKM yang handal, sehingga mampu menciptakan wirausaha baru yang dapat bersaing menghadapi era digitalisasi. Serta mampu meningkatkan kinerja SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang koperasi, industri dan perdagangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Mekanisme penyusunan renja dapat dilihat pada gambar berikut :

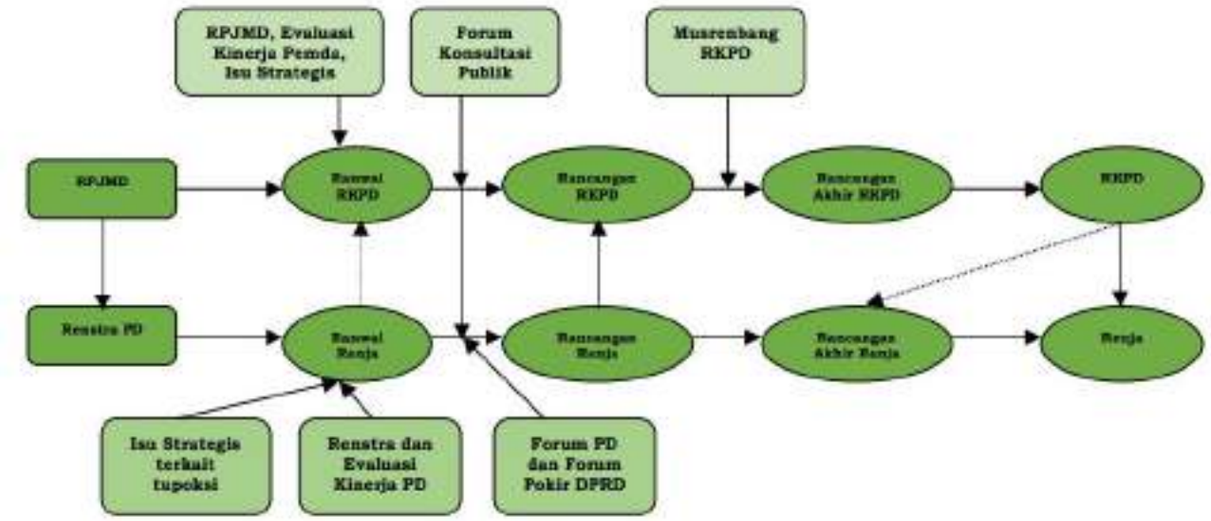

Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang disinkronkan dengan hasil Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Forum Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan RKPD Tahun 2026. Selanjutnya, Rancangan RKPD Tahun 2026 dibahas dalam Musrenbang RKPD dan disepakati sehingga menjadi RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangakat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemlanag Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah kabupaten pemalang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2029;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang No 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang 2026 ini sebagai dasar rencana implementasi dan operasionalisasi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Secara khusus, penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang agar lebih terstruktur, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah; menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah; menjadi dasar penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026; serta mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan, serta pemberdayaan kepada masyarakat pelaku usaha.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui penjabaran sasaran dan arah kebijakan pembangunan ke dalam rencana tahunan yang dapat diimplementasikan secara nyata; penetapan prioritas pembangunan yang relevan dengan isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta potensi daerah; serta penyusunan program dan kegiatan yang realistis dengan indikator kinerja dan target yang jelas.

Selain itu, Rencana Kerja ini bertujuan untuk mendorong terciptanya koordinasi dan sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, serta menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja pembangunan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan mampu memastikan setiap langkah pembangunan di bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pencapaian visi pembangunan Kabupaten Pemalang.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 memiliki fungsi sebagai pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id/

menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini berfungsi sebagai instrumen penyelarasan kebijakan pembangunan antar level pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun daerah, sehingga terdapat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Rencana Kerja juga berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD), sehingga kebutuhan pendanaan dapat dirumuskan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan. Rencana Kerja juga memiliki fungsi sebagai alat pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan pada tahun berjalan.

Manfaat utama dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang komprehensif, terarah, dan akuntabel, yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan. Rencana Kerja ini memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Di samping itu, Rencana Kerja juga bermanfaat dalam menciptakan sinergi antar program dan kegiatan, baik di tingkat internal perangkat daerah maupun antar sektor pembangunan, sehingga perencanaan yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Penyusunan Rencana Kerja ini juga menjadi sarana untuk mendorong pemberdayaan koperasi, UMKM, pelaku industri, dan perdagangan, agar semakin produktif, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih jauh, Rencana Kerja ini juga memberikan manfaat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, karena seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Dengan demikian, penyusunan Renja Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangakat Daerah menjadi rancangan akhir Rencan Kerja Perangkat Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- 2.3 Hasil Evaluasi Sakip
- 2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

2.1.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang melaksanakan 15 Program 24 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan untuk mencapai 4 sasaran dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB

Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDRB pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 1,13% pada tahun 2019 menjadi 0,74% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 – 2022 mengalami kenaikan dan tahun 2023 turun kembali menjadi 1,41% dari 1,58% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan masih terdapat koperasi yang kondisinya tidak sehat/ tidak ada aktivias usahanya sedangkan pada tahun 2024 capaian rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 1,56% Hal ini disebabkan terdapat regulasi terbaru yang syaratnya membatasi perluasan jaringan pelayanan. Koperasi sebagai

https://jdih.pemalangkab.go.id/

lembaga ekonomi rakyat yang paling ideal, harus terus didorong menuju koperasi yang mandiri dan memiliki daya saing usaha, diantaranya melalui penguatan kelembagaan koperasi berbasis kewirausahaan dan teknologi serta inovasi. Indikator ini merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Pemalang.

2. Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang juga telah dilakukan namun masih belum optimal mengingat masih rendahnya kinerja UMKM. Pada tahun 2024, kinerja UMKM mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk persentase usaha mikro yang berijin hanya tercapai 22,31%. Sedangkan untuk usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil hanya mencapai angka 0,17%. Peningkatan hanya ada pada indikator pertumbuhan usaha mikro yang mencapai 3**,**15% pada tahun 2023 namun menurun menjadi 69,5% pada tahun 2024. Penurunan kinerja UMKM tersebut disebabkan karena hasil dari pendataan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UMKM terdapat 71.932 pelaku usaha yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil 71.742 pelaku usaha dan sisanya merupakan usaha menengah.

3. Nilai Ekspor

Untuk indikator pertumbuhan nilai eksport mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 335,7352 juta US Dolar, ini disebabkan adanya:

- Peningkatan volume produksi komoditas ekspor unggulan seperti nanas madu belik, rajungan, kepiting soka, udang windu, dan sarungg goyor;
- Masuknya pasar ekspor baru / peningkatan permintaan luar negeri;
- dan peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar ekspor.

4. Persentase pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada urusan perindustrian memiliki fokus kinerja untuk meningkatkan dan mengembangkan industri dengan skala kecil dan menengah. Pada industri kecil menengah (IKM) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,175% kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,3%,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

namun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,5%. Hal tersebut disebabkan karena banyak industri kecil yang gulung tikar akibat kekurangan modal untuk produksi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kembali IKM tersebut adalah dengan memberikan fasilitasi akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM IKM dan fasilitasi pemasaran produk IKM. Hasilnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 6,43.

2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

Pada Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 28.405.054.474,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus lima juta lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah),

Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2025 sebesar 58,79% atau 16.560.092.359 (Enam belas juta lima ratus enam puluh juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Berikut realisasi pendapatan dari tahun 2024 s/d Agustus 2025

Jenis Retribusi	Target Tahun 2024	Pendapatan Tahun 2024	Target Tahun 2025	Pendapatan Tahun 2025 s/d Agustus
Retribusi Pelayanan Pasar	11.000.000.000	9.340.818.702	11.000.000.000	6.510.019.482
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	60.000.000	157.110.000	75.000.000	32.500.000
Jumlah	11.060.000.000	9.497.928.702	11.075.000.000	6.542.519.482

Sampai dengan bulan Agustus 2025 relalisasi pendapatan Rp 6.542.519.482 (Enam milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) atau 51,95% dari target Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah)

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dapat dilihat pada Tabel. 2.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1 :

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.493.840.860	25.241.873.141	23.090.401.503	24.579.554.262	24.579.554.262	27.037.509.688	21.358.037.145	22.947.157.401	20.991.274.094	22.345.049.329	97	94	96	93
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	88.322.245	244.068.550	178.805.000	251.994.600	251.994.600	277.194.060	80.292.950	221.880.500	162.550.000	229.086.000	98	100	100	99
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	98.450.000	10.242.650	65.447.800	22.341.550	22.341.550	24.575.705	89.500.000	9.311.500	59.498.000	20.310.500	99	100	99	100
4	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	107.811.000	802.945.550	281.663.250	316.413.900	316.413.900	348.055.290	98.010.000	729.950.500	256.057.500	287.649.000	99	99	100	100
5	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	198.192.830	237.596.150	41.107.000	81.364.767	81.364.767	89.501.244	180.175.300	215.996.500	37.370.000	73.967.970	99	100	100	97
6	Program Pengembangan UMKM	1.523.499.890	2.160.587.000	1.407.019.350	1.838.697.300	1.838.697.300	2.022.567.030	1.384.999.900	1.964.170.000	1.279.108.500	1.671.543.000	100	100	100	97
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	22.377.300	169.206.400	3.300.000	11.000.000	11.000.000	12.100.000	20.343.000	153.824.000	3.000.000	10.000.000	99	99	100	100
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.863.221.358	5.523.793.953	3.223.646.247	1.563.819.187	1.563.819.187	1.720.201.105	4.421.110.325	5.021.630.866	2.930.587.497	1.421.653.806	99	62	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	522.863.965	484.134.461	1.947.322.300	351.978.550	351.978.550	387.176.405	475.330.877	440.122.237	1.770.293.000	319.980.500	99	99	100	100
10	Program Pengembangan Ekspor	74.751.820	356.394.394	186.755.580	273.782.378	273.782.378	301.160.616	67.956.200	323.994.904	169.777.800	248.893.071	99	100	100	100
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	327.590.437	133.184.549	76.913.273	75.415.726	75.415.726	82.957.299	297.809.488	121.076.863	69.921.157	68.559.751	99	99	100	99
12	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri	422.872.483	110.766.920	300.037.652	142.950.500	142.950.500	157.245.550	384.429.530	100.697.200	272.761.502	129.955.000	99	100	100	100
13	Program Perencanaan Pembangunan Industri	756.213.700	1.004.978.150	1.088.451.949	1.314.396.163	1.314.396.163	1.445.835.780	687.467.000	913.616.500	989.501.772	1.194.905.603	92	98	100	96
14	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	84.896.471	54.890.000	74.212.662	123.209.560	123.209.560	135.530.516	77.178.610	49.900.000	67.466.056	112.008.691	88	99	100	86
15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	97.341.200	40.700.000	72.839.903	122.647.234	122.647.234	134.911.957	88.492.000	37.000.000	66.218.094	111.497.485	95	91	98	89
	TOTAL	21.874.300.000	37.489.823.000	30.115.740.000	29.947.720.000	31.069.565.677	34.176.522.244	29.711.282.325	33.250.329.021	29.125.384.972	28.245.059.706	**97**	**88**	**97**	**94**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pertumbuhan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2020- 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-0,5	0,93	0,28	-0,04	0,2	-0,07	-0,72	-1,04	-0,8	-1,72
2	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,35	2,43	2,41	2,13	2,41	1,43	1,41	1,13	1,41	0,41
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,58	17,07	16,99	17,07	17,08	16,07	15,99	16,07	16,08	14,99
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	21,94	21,96	21,99	22,38	22,51	20,96	20,99	21,38	21,51	19,99

Dari tabel di atas, rata-rata pertumbuhan kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar -1,72 %;
2) Rasio Kewirausahaan Daerah rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar minus 0,41 %;
3) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar 14,99 %;
4) Rasio PDRB Industri Pengolahan rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar 19,99%;

2.3 Hasil Evaluasi SAKIP dan RB

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007). Sistem

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ini dibutuhkan dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai paradigma pengelolaan keuangan paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi. SAKIP mencoba mengintegrasikan berbagai sistem dalam manajemen pemerintahan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan, sampai dengan sistem evaluasi.

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang memperoleh nilai **68,98** dari nilai hasil evaluasi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori penilaian **"BAIK" (B)** dengan interpretasi Baik bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 2.3 Perbandingan hasil SAKIP tahun 2022 - 2024

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	**Perencanaan Kinerja** • Peningkatan kualitas indikator tujuan maupun sasaran agar memenuhi kriteria SMART dan Penetapan Target Kinerja agar didasarkan pada penghitungan dan basis data yang memadai	30	22,50	21	21,67
2	**Pengukuran Kinerja** • Peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan tindak lanjut atas permasalahn yang menghambat capaian kinerja	25	18,90	16,80	20,87
3	**Pelaporan Kinerja** • Perbaikan kualitas penyajian informasi dalam LKJiP	15	10,50	10,20	10,21
4	**Evaluasi Internal** • Evaluasi Internal belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi secara tertib	10	8,50	13,75	16,23
5	**Capaian Kinerja** • Sebagian besar capaian target barasal dari indikator yang bersifat *Output* bukan *Outcame*	20	Tidak termasuk komponen SAKIP, sesuai dengan permenpanrb no 8 th 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP, sesuai dengan permenpanrb no 8 th 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP, sesuai dengan permenpanrb no 8 th 2021
	Jumlah	100	60,40	61,75	68,98

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4 Rekomendasi LHE SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, Evalutor merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

1. Memperbaiki pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 89 Tahun 2021.Menyusun Pedoman Pelaksaan.

   Tindak lanjutnya Pohon Kinerja sudah disesuaikan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 89 Tahun 21. Bab II ayat 2.e. Menerjemahkan Pohon Kinerja ke dalam komponen Perencanaan dan Kinerja Jabatan.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja pada aplikasi e-sakip untuk melihat perkembangan pencapaian target secara triwulanan apakah masih on the right track atau sudah tercapai dengan baik sesuai dengan jalur atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Mendokumentasikan manajemen resiko sampai dengan sub kegiatan.

   Tindak lanjutnya Sudah mendokumentasikan manajemen resiko sampai dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, berupa pengadaan AC, Laptop dan printer.
4. Melakukan perbaikan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang memberikan Gambaran Langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

   Tindak lanjutnya Membuat Rencana Tindak Lanjut berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

Identifikasi permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, dipengaruhi oleh faktor internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3.1 Penentu Isu – isu Strategis

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam tabel 2.4 di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

No	Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1	2	3	4	5	6	7
1	**KOPERASI**	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi sehat	Belum optimalnya koperasi aktif dan sehat	Lemahnya Tata Kelola dan Manajemen Koperasi	Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lemah
							Kurangnya Pendidikan Perkoperasian
							Pengawasan dan Regulasi yang Belum Optimal
							Akses Pembiayaan Terbatas
							Kurang Inovatif dan Tidak Adaptif
2	**UMKM**	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	Usaha Mikro yang tidak bisa berkembang dan Belum optimalnya pertumbuhan UMKM	Rendahnya Kapasitas SDM dan Manajemen	Lemahnya akses permodalan
							rendahnya kapasitas SDM dan Kurangnya pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan
							terbatasnya akses pasar dan Produk belum memiliki daya saing (kemasan, kualitas, atau sertifikasi)
							minimnya adopsi teknologi dan Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan operasional
3	PERDAGANGAN	Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal dan Nasional	Tidak optimalnya perkembangan pelaku usaha untuk menjadi potensi eksport.	Kurangnya Pengetahuan dan Literasi Ekspor	Banyak pelaku usaha belum memahami prosedur ekspor, regulasi negara tujuan, serta mekanisme logistik dan pembiayaan ekspor.
							Produk usaha kecil dan menengah belum memenuhi standar kualitas, kontinuitas, dan legalitas untuk pasar ekspor.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	1	2	3	4	5	6	7
							Usaha belum mampu menjalin jejaring atau memanfaatkan platform ekspor digital/global marketplace.
4	**Perindustrian**	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.	a. Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang diterbitkan per tahun. b. Persentase pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang telah memiliki IUI. c. Jumlah pelatihan/sosialisasi terkait IUI yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Belum optimalnya pertumbuhan IKM, perkembangan klaster atau perkembangan sentra.	Belum Terbangunnya Ekosistem Industri yang Terintegrasi	Klaster dan sentra belum saling terhubung antara pelaku usaha, pemasok, pasar, dan lembaga pendukung.
							Banyak IKM belum memiliki teknologi, SDM, dan kapasitas produksi yang mampu bersaing di pasar.
							Fasilitas seperti akses jalan, listrik, air, dan tempat produksi belum memadai di banyak sentra.
							Minimnya inkubator bisnis atau pusat inovasi di daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dinamika masyarakat dengan tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah antar ruang antar waktu antar proses perencanaan yang terintegrasi yaitu memadu serasikan antara program pemerintah pusat, provinsi, sasaran RPJMD Kabupaten, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang maupun usulan program /kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, hasil Musrenbang, Forum PD, Konsultasi publik, Reses anggota dewan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Dinas/instansi terkait yang diarahkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, hal ini dilakukan agar proses pembangunan bisa berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan kehendak rakyat. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang maupun usulan dari pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Usulan Pokir dan PIWK 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

POKIR			PIWK		
	Kegiatan	Pagu		Kegiatan	Pagu
1	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi pelaku Usaha Desa Pedurungan, Kec. Taman	50.000.000	1	Pelatihan Koperasi Perdagangan	20.000.000
2	Pelatihan Healthy Food Pedagang Pasar Desa Kabunan, Kecamatan Taman	50.000.000	2	Pelatihan Tata Boga (Pengolahan Makanan)	50.000.000
3	Pelatihan E-Comerce Kecamatan Taman	75.000.000	3	Pelatihan Tataboga 20 Peserta	30.000.000
4	Pelatihan Digital Marketing Komunitas Pemuda Sadar Digital Desa Kabunan, Kecamatan Taman.	50.000.000	4	Pelatihan Handycraft/Kerajinan Tangan 30 Orang	30.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

POKIR			PIWK		
	Kegiatan	Pagu		Kegiatan	Pagu
5	Pelatihan Digital Marketing bagi pelaku usaha Kecamatan Belik	55.000.000	5	Pelatihan Handycraft / Kerajinan Tangan (Membatik, Tas Rajut, Sovenir)	31.622.000
6	Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha Desa Cibuyur Kec. Warungpring dan Desa Gembyang Kec. Randudongkal	50.000.000	6	Pelatihan Pengolahan Makanan / Tata Boga	30.000.000
7	Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Usaha di wilayah desa Kreyo, desa Rembul, desa Mereng, desa Warungpring	50.000.000	7	Pelatihan Membuat Garnis Buah / Sayuran Hiasan dalam Makanan	40.000.000
8	Pelatihan digital marketing bagi UMKM, RT. 01 RW. 01 Kel. Petarukan Kec. Petarukan Pemalang	50.000.000	8	Pelatihan Kerajinan Tangan	40.000.000
9	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi UMKM, RT. 01 RW. 01 Kel. Petarukan Kec. Petarukan Pemalang	50.000.000	9	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	30.000.000
10	Pembinaan UMKM, Desa Taman RT. 02 RW. 05 Kec. Taman Pemalan	50.000.000	10	Pelatihan Menjahit untuk Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000
11	Marketing UMKM	100.000.000	11	Pelatihan mekanik mesin	30.000.000
12	Manajemen Kewirausahaan	90.000.000	12	Pelatihan Menjahit	30.000.000
13	Pelatihan Ketrampilan Menjahit di Desa Banjardawa Kec. Taman	75.000.000	13	Pelatihan Menjahit	30.000.000
14	Pelatihan Barista Coffe, Desa Cibelok, Kec. Taman	50.000.000	14	Pelatihan Menjahit	40.000.000
15	Pelatihan Barista Kopi, Komunitas Barista Kopi Desa Banjardawa, Kecamatan Taman	75.000.000			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJPN) 2025 - 2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan. RPJPN 2025 - 2045 disusun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu "Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".

Visi Indonesia Emas 2045 dimaknai sebagai Indonesia yang memiliki:

- Kedaulatan, yaitu kemampuan untuk menentukan arah pembangunan nasional dan mengendalikan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- Kemajuan, yaitu kemampuan untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.
- Keberkelanjutan, yaitu kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

RPJPN 2025 - 2045 memuat 8 agenda pembangunan, yaitu:

1). Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2). Pembangunan Infrastruktur;
3). Pembangunan Ekonomi;
4). Pembangunan Iptek dan Inovasi;
5). Pembangunan Lingkungan Hidup;
6). Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7). Pembangunan Pertahanan dan Keamanan;
8). Pembangunan Tata Kelola.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPN 2025 - 2045 memuat 17 arah pembangunan, yaitu:

1). Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat;
2). Membangun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;
4). Mengembangkan iptek dan inovasi;
5). Melindungi lingkungan hidup;
6). Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan;
7). Meningkatkan peran perempuan dan pemuda;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8). Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9). Meningkatkan daya saing bangsa;
10). Meningkatkan ketahanan nasional;
11). Meningkatkan peran Indonesia di dunia;
12). Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien;
13). Membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipasi, dan inklusif;
14). Membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil;
15). Membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
16). Membangun tata kelola pemerintahan yang transparan;
17). Membangun tata kelola pemerintahan yang responsif;

RPJPN 2025 - 2045 akan menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan nasional. Implementasi RPJPN 2025 - 2045 diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada tahun 2045.

1.1.2. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kementerian Industri dan Kementerian Perdagangan.

- *Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 urusan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah*
  - ➔ RPJMN 2025 - 2045 urusan Koperasi dan UMKM memuat 3 agenda pembangunan, yaitu:
    1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Koperasi dan UMKM;
    2) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM;
    3) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
  - ➔ Untuk mewujudkan ketiga agenda pembangunan tersebut, RPJMN 2025 - 2045 urusan Koperasi dan UMKM memuat 10 sasaran pembangunan, yaitu:
    1). Tingkat partisipasi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional mencapai 60%;
    2). Tingkat kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDB nasional mencapai 70%;
    3). Tingkat produktivitas koperasi dan UMKM mencapai 1,5% per tahun;
    4). Tingkat daya saing koperasi dan UMKM mencapai 75%;
    5). Jumlah koperasi yang sehat mencapai 80%;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6). Jumlah UMKM yang naik kelas mencapai 50%;

7). Tingkat kewirausahaan masyarakat mencapai 50%;

8). Tingkat akses koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan mencapai 80%;

9). Tingkat akses koperasi dan UMKM terhadap pasar mencapai 90%;

10). Tingkat akses koperasi dan UMKM terhadap teknologi mencapai 85%;

➔ Peningkatan pertumbuhan ekonomi koperasi dan UMKM akan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM;
- Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan;
- Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap pasar;
- Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap teknologi.

➔ Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM akan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Peningkatan kualitas produk dan jasa koperasi dan UMKM;
- Peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran koperasi dan UMKM;
- Peningkatan inovasi dan kreativitas koperasi dan UMKM;
- Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

➔ Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia koperasi dan UMKM;
- Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap informasi dan sumber daya;
- Peningkatan partisipasi koperasi dan UMKM dalam pembangunan nasional.

➔ Implementasi RPJMN 2025 - 2045 urusan Koperasi dan UMKM akan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa kebijakan, regulasi, dan pembiayaan. Masyarakat dan dunia usaha akan berperan sebagai pelaku utama pembangunan koperasi dan UMKM.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 urusan Industri**

  ➔ Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia menetapkan lima kelompok industri prioritas sebagai arah pembangunan industri dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Kelima kelompok industri tersebut adalah:

  1). Industri berbasis sumber daya alam, meliputi industri berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan), industri berbasis hilirisasi tambang, serta industri berbasis sumber daya laut.
  2). Industri manufaktur berteknologi tinggi, meliputi industri elektronika, otomotif, kedirgantaraan, dan industri pertahanan.
  3). Industri kreatif dan budaya, meliputi industri musik, film, animasi, desain, dan pariwisata.
  4). Industri jasa, meliputi industri keuangan, logistik, transportasi, dan telekomunikasi.
  5). Industri berbasis pengetahuan, meliputi industri bioteknologi, farmasi, dan energi terbarukan.

  ➔ Pemerintah menargetkan bahwa industri akan menjadi salah satu sektor penggerak utama perekonomian Indonesia. Pada tahun 2045, kontribusi industri terhadap PDB diharapkan mencapai 45%, dengan porsi manufaktur sebesar 25%. Selain itu, industri diharapkan dapat menyerap 25 juta tenaga kerja.

  - Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya, antara lain:
    - Meningkatkan produktivitas industri melalui penerapan teknologi dan inovasi.
    - Mengembangkan ekosistem industri yang kondusif, termasuk penyediaan infrastruktur dan insentif.
    - Meningkatkan daya saing industri di pasar global.

  ➔ Pembangunan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan makmur pada tahun 2045.

  - Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing kelompok industri prioritas:
    - ***Industri berbasis sumber daya alam***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Industri berbasis sumber daya alam merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Indonesia. Industri ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.

Pemerintah akan fokus pada pengembangan industri hilirisasi tambang, industri berbasis agro, dan industri berbasis sumber daya laut. Industri hilirisasi tambang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Industri berbasis agro akan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Industri berbasis sumber daya laut akan dikembangkan untuk memanfaatkan potensi laut Indonesia, seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari.

- ***Industri manufaktur berteknologi tinggi***

  Industri manufaktur berteknologi tinggi merupakan sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Industri ini membutuhkan investasi yang besar dalam hal teknologi dan sumber daya manusia.

  Pemerintah akan fokus pada pengembangan industri elektronika, otomotif, kedirgantaraan, dan industri pertahanan. Industri elektronika akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Industri otomotif akan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia di pasar global. Industri kedirgantaraan akan dikembangkan untuk mendukung sektor pertahanan dan pariwisata. Industri pertahanan akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan nasional.

- ***Industri kreatif dan budaya***

  Industri kreatif dan budaya merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sektor ini memiliki daya saing yang tinggi di pasar global.

  Pemerintah akan fokus pada pengembangan industri musik, film, animasi, desain, dan pariwisata. Industri musik akan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing musik Indonesia di pasar global. Industri film akan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing industri perfilman Indonesia di

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pasar global. Industri animasi akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar animasi global. Industri desain akan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing industri desain Indonesia di pasar global. Industri pariwisata akan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

- ***Industri jasa***

  Industri jasa merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki potensi untuk terus tumbuh, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya permintaan jasa.

  Pemerintah akan fokus pada pengembangan industri keuangan, logistik, transportasi, dan telekomunikasi. Industri keuangan akan dikembangkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Industri logistik akan dikembangkan untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa. Industri transportasi akan dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Industri telekomunikasi akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi yang berkualitas.

- ***Industri berbasis pengetahuan***

  Industri berbasis pengetahuan merupakan sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Sektor ini membutuhkan investasi yang besar dalam hal penelitian dan pengembangan.

  Pemerintah akan fokus pada pengembangan industri bioteknologi, farmasi, dan energi terbarukan. Industri bioteknologi akan dikembangkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia. Industri farmasi akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan domestik dan ekspor. Industri energi terbarukan akan dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 urusan Perdagangan**

  ➔ Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia menetapkan lima sasaran strategis dalam urusan perdagangan, yaitu:

  - Meningkatkan nilai ekspor, dari Rp2.200 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp10.000 triliun pada tahun 2045.
  - Meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar global, dengan indeks daya saing global (Global Competitiveness Index) Indonesia berada di peringkat 30 pada tahun 2045.
  - Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap PDB, dari 24% pada tahun 2023 menjadi 35% pada tahun 2045.
  - Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari sektor perdagangan, dari 27 juta orang pada tahun 2023 menjadi 40 juta orang pada tahun 2045.
  - Meningkatnya kemandirian ekonomi nasional, melalui peningkatan ekspor dan diversifikasi produk ekspor.

  ➔ Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya, antara lain:

  - Meningkatkan daya saing produk Indonesia, melalui penerapan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  - Membuka akses pasar global, melalui kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral.
  - Meningkatkan infrastruktur perdagangan, untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa.
  - Meningkatkan promosi perdagangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk Indonesia.

  ➔ Pemerintah juga akan mendorong pengembangan industri yang memiliki potensi ekspor, seperti industri manufaktur, industri berbasis sumber daya alam, dan industri kreatif. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan perdagangan, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perdagangan.

  ➔ Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing sasaran strategis:

  - ***Meningkatkan nilai ekspor***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemerintah menargetkan nilai ekspor Indonesia akan meningkat dari Rp2.200 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp10.000 triliun pada tahun 2045. Peningkatan nilai ekspor ini akan didukung oleh peningkatan daya saing produk Indonesia, pembukaan akses pasar global, dan peningkatan infrastruktur perdagangan.

- ***Meningkatnya daya saing produk Indonesia***

  Pemerintah akan meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui penerapan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penerapan teknologi dan inovasi akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

- ***Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap PDB***

  Pemerintah menargetkan kontribusi perdagangan terhadap PDB akan meningkat dari 24% pada tahun 2023 menjadi 35% pada tahun 2045. Peningkatan kontribusi perdagangan ini akan didukung oleh peningkatan nilai ekspor dan diversifikasi produk ekspor.

- ***Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari sektor perdagangan***

  Pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja dari sektor perdagangan akan meningkat dari 27 juta orang pada tahun 2023 menjadi 40 juta orang pada tahun 2045. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini akan didukung oleh peningkatan nilai ekspor dan diversifikasi produk ekspor.

- ***Meningkatnya kemandirian ekonomi nasional***

  Pemerintah menargetkan kemandirian ekonomi nasional akan meningkat melalui peningkatan ekspor dan diversifikasi produk ekspor. Peningkatan ekspor akan meningkatkan penerimaan devisa, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Diversifikasi produk ekspor akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap satu atau dua produk ekspor tertentu.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- **Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026**

A. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 menyoroti pengembangan bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu fokus utamanya. Berikut adalah beberapa poin utama terkait rencana tersebut:

1). Penguatan Koperasi:

- Pemprov Jawa Tengah berencana untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola koperasi. Langkah ini termasuk pelatihan dan pendampingan kepada pengurus koperasi untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola organisasi.
- Koperasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

2). Pengembangan UMKM:

- Program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM akan terus ditingkatkan, mencakup peningkatan kualitas produk, inovasi, dan akses pasar. Misalnya, melalui kegiatan magang untuk peningkatan kapasitas produksi UKM (Dinkop UMKM Jawa Tengah).
- Fasilitasi akses pembiayaan dan kredit usaha bagi UMKM menjadi prioritas, dengan berbagai skema pembiayaan yang akan disediakan untuk memastikan UMKM dapat berkembang dan bersaing.

3). Digitalisasi dan Inovasi:

- Salah satu strategi penting adalah mendorong digitalisasi UMKM, termasuk melalui pelatihan penggunaan teknologi digital dan pemasaran online. Ini diharapkan dapat membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Inovasi produk dan layanan UMKM juga didorong, dengan memberikan akses ke pusat-pusat inovasi dan teknologi, serta fasilitas penelitian dan pengembangan.

4). Kolaborasi dan Kemitraan:

- Pemprov Jawa Tengah berencana untuk meningkatkan kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM.
- Program kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan pelatihan juga akan ditingkatkan untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

5). Regulasi dan Kebijakan Pendukung

- Penerapan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi dan UMKM akan terus diperbaiki. Ini termasuk penyederhanaan perizinan, penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, serta insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor UMKM.

Dengan implementasi rencana pembangunan ini, Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat sektor koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

B. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 urusan Perindustrian

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 dalam bidang perindustrian bertujuan untuk memperkuat sektor industri sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam rencana ini adalah:

1). Penguatan Infrastruktur Industri:

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung industri, termasuk pembangunan kawasan industri baru dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2). Pengembangan Industri Manufaktur:

- Salah satu fokus utama adalah mendorong pertumbuhan industri manufaktur. Hal ini termasuk upaya mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan mengembangkan sumber bahan baku lokal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri lokal dan mengurangi biaya produksi.

3). Diversifikasi Produk Industri:

- Jawa Tengah akan mendorong diversifikasi produk industri untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka pasar ekspor baru. Produk unggulan Jawa Tengah saat ini masih terfokus pada beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, dan Jepang. Diversifikasi ini diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan mengurangi risiko ketergantungan pada beberapa negara saja.

4). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM juga menjadi prioritas, dengan fokus pada pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini akan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri modern.

5). Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif:

- Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor, termasuk memberikan insentif dan kemudahan dalam perizinan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan investasi swasta di sektor industri, yang pada gilirannya akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

6). Peningkatan Daya Saing Ekonomi:

- Selain meningkatkan infrastruktur dan kualitas SDM, rencana pembangunan juga mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan ekonomi dan regulasi yang mendukung daya saing industri Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional.

Melalui berbagai langkah strategis ini, Provinsi Jawa Tengah berharap dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada

https://jdih.pemalangkab.go.id/

periode 2024-2026, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan industri yang berkelanjutan di masa depan.

C. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 urusan Perdagangan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 memiliki beberapa fokus utama dalam bidang perdagangan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait urusan perdagangan dalam RPD tersebut:

1). Peningkatan Infrastruktur Perdagangan:

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pasar tradisional dan modern untuk mendukung aktivitas perdagangan. Hal ini termasuk renovasi pasar tradisional serta pengembangan pusat distribusi dan pergudangan yang lebih efisien).

2). Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Perdagangan:

- Mendorong adopsi teknologi digital dalam kegiatan perdagangan. Ini mencakup pengembangan platform e-commerce lokal untuk mendukung pedagang kecil dan menengah serta pelatihan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital).

3). Pengembangan Ekspor dan Pasar Global:

- Memfasilitasi peningkatan kualitas produk lokal agar memenuhi standar ekspor. Ini juga termasuk penyediaan informasi pasar global serta dukungan logistik untuk meningkatkan akses ke pasar internasional.

4). Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik:

- Optimalisasi rantai pasok dan distribusi barang agar lebih efisien. Pemerintah berencana untuk membangun atau memperbarui pusat distribusi dan logistik serta meningkatkan konektivitas transportasi antar daerah.

5). Peningkatan Daya Saing Produk Lokal:

- Melalui program pelatihan dan pendampingan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas produk UMKM sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun global. Ini juga mencakup promosi produk unggulan daerah ke pasar yang lebih luas.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6). Pengembangan Pasar Lokal:

- Mengadakan program-program untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pasar lokal, termasuk pasar malam dan bazar yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan aktivitas perdagangan yang lebih modern, efisien, dan kompetitif. Pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, dalam pelaksanaan program-program ini.

1.1.3. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dari Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 - 2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Menuju Masyarakat Pemalang Mulya) Maju, Unggul, Lestari, Berbudaya".*** Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (Delapan) misi Rhapsodi : Resik hijau apik peduli silahturahmi organisatoris digitalisasi dan ikhlas, yaitu:

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotongroyong, tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Gotujuavernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi

8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Dalam rangka Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang mengampu 1 misi yaitu Misi **"Silaturahmi"** yang dicanangkan Bupati Pemalang menekankan pentingnya membangun masyarakat yang rukun, guyub, dan saling mendukung dalam semangat kebersamaan. Nilai ini sejalan dengan tugas **Dinas Koperasi dan Usaha mikro kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pemalang** yang berperan sebagai fasilitator dalam memperkuat jejaring ekonomi masyarakat.

Melalui **pembinaan koperasi** dan **penguatan UMKM**, Diskoperindag mendorong terciptanya ikatan kerja sama yang harmonis antar pelaku usaha, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Program peningkatan kualitas koperasi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa solidaritas, gotong royong, dan saling percaya antar anggota.

Selain itu, pengembangan **sentra industri kecil dan perdagangan rakyat**, termasuk pasar tradisional, menjadi sarana silaturahmi antarwarga. Pasar bukan hanya pusat transaksi, melainkan juga ruang sosial tempat masyarakat saling berinteraksi, mempererat hubungan, dan menjaga kerukunan.

Dengan demikian, misi **"Silaturahmi"** dapat diwujudkan melalui peran Diskoperindag dalam memperkuat jaringan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada nilai kebersamaan, kebersahajaan, dan kepedulian sosial, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kesejahteraan material, tetapi juga memperkokoh persatuan masyarakat Pemalang.

1.1.4. Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2026

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada tahun kedua penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur", dengan prioritas pada :

1. Satu Data Indonesia sebagai Fondasi Perencanaan
   Mengutamakan penggunaan data yang akurat, interoperabel, standarisasi, dan metadata yang jelas agar perencanaan dan program pembangunan lebih tepat sasaran dan efektif;
2. Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program Perangkat Daerah
   Program kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) disusun lebih terintegrasi dan konsisten dengan visi-misi RPJMD, serta anggaran/jangka waktu indikatif 5 tahun;
3. Ketahanan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemberdayaan UMKM/Koperasi
   Komitmen untuk mengatasi kemiskinan, memperkuat koperasi, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal, dan menciptakan ekonomi yang inklusif;

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan dukungan pada terlaksananya:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM
   - Mendukung program pemerintah pusat dalam pemberdayaan koperasi modern dan UMKM naik kelas.
   - Sinkron dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah terkait *penguatan daya saing UMKM berbasis digital* dan *hilirisasi produk lokal*.
   - Sejalan dengan misi Bupati Pemalang dalam pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Pengembangan Industri Daerah yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan
   - Mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor, ramah lingkungan, dan berbasis potensi lokal.
   - Mendukung kebijakan provinsi dalam pengembangan *industri hijau* dan *perdagangan antarwilayah*.
   - Menjadi bagian dari misi Pemalang "Hijau" dan "Apik" melalui penciptaan kawasan industri yang tertata dan lestari.
3. Peningkatan Akses dan Daya Saing Perdagangan
   - Penguatan pasar rakyat, revitalisasi sarana perdagangan, serta perluasan akses pemasaran produk lokal.
   - Selaras dengan kebijakan nasional terkait *digitalisasi perdagangan* serta program provinsi dalam *revitalisasi pasar tradisional*.
   - Mendukung pencapaian visi "Pemalang Bercahaya" melalui terciptanya pusat perdagangan yang modern, bersih, dan berdaya saing
4. Digitalisasi dan Inovasi Layanan
   - Memperkuat sistem layanan berbasis digital bagi koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan.
   - Menyokong kebijakan *reformasi birokrasi digital* baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah

3.2 Strategi Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran dan tujuan

Strategi berisi rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap Desa;
   1) Latar belakang dan tujuan
      - Pemerintah meluncurkan program ini melalui Inpres No. 9/2025

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dengan ambisi membentuk 70.000-80.000 koperasi di seluruh desa/kelurahan Indonesia, dan Kabupaten Pemalang menargetkan terbentuknya Koperasi Merah Putih sejumlah 223 Koperasi sesuai jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang;

- Fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan, entri rantai distribusi, dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat desa;
- Diharapkan menjadi alternatif dari jeratan rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online yang membebani masyarakat.

2) Model Pembentukan

Ada tiga strategi penerapan, disesuaikan kondisi desa masing-masing:

- Mendirikan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi;
- Merevitalisasi koperasi lama, meningkatkan legalitas dan tata kelolanya;
- Mengembangkan koperasi yang sudah ada agar menjadi entitas yang lebih besar dan multifungsi.

3) Struktur Organisasi

- Pengurus minimal terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua Bidang Usaha, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Sekretaris, Bendahara — dengan keterwakilan perempuan;
- Pengawas senantiasa berjumlah ganjil (minimal 3 orang) — Ketua dan dua anggota, dengan juga memperhatikan keterwakilan perempuan;
- Pengurus tidak boleh memiliki hubungan keluarga dekat satu sama lain atau dengan pengawas, untuk menghindari konflik kepentingan.

4) Entitas Bisnis & Unit Usaha

Setiap koperasi dilengkapi beberapa unit usaha pokok, antara lain:

- Gerai sembako;
- Simpanan dan pinjaman (SP) sebagai embrio Bank Desa;
- Klinik desa & apotek;
- Pergudangan dan cold storage;
- Logistik desa;
- Gerai kantor koperasi dan pendistribusian bantuan pemerintah.

5) Pendanaan & Dukungan

- Anggaran berasal dari dana APBD untuk pendampingan koperasi merah putih sebesar Rp 606.049.800,- Sedangkan anggaran yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

berasal dari APBN, dialokasikan selama beberapa tahun, estimasi Rp 3–5 miliar per koperasi;

- Perbankan BUMN (Himbara) turut menyediakan fasilitas kredit jangka panjang 3–5 tahun;
- Kementerian Sosial siap mengalokasikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Bansos sebagai anggota, serta menjadi pemasok produk lokal .

6) Manfaat Bagi Desa

- Memperpendek rantai pasok sembako & pupuk langsung dari produsen, sehingga harga lebih terjangkau;
- Meningkatkan akses permodalan kredit bunga rendah, mengurangi ketergantungan pada rentenir & pinjol;
- Menyediakan layanan kesehatan dasar, gudang simpanan, dan logistik untuk menunjang produktivitas desa;
- Mendorong pemberdayaan masyarakat, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja lokal

➔ Koperasi Desa Merah Putih adalah fondasi baru ekonomi desa berorientasi mandiri, transparan, dan produktif. Dengan dukungan kebijakan, pendanaan, dan partisipasi aktif warga, program ini memiliki potensi besar meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi pedesaan di Indonesia.

b. Mempermudah akses permodalan seperti kredit usaha mikro, *venture capital* atau hibah dari pemerintah dan swasta; .
c. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi perdagangan agar pelaku usaha lebih mudah berkembang;
d. Mendorong inovasi produk dan ekspansi ke pasar Insternasional untuk meningkatkan daya saing;
e. Penerapan Manajemen Risiko.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro
b. Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro
c. Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro
d. Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UMKM sebagai bentuk

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penyesuaian strategi usaha di era normal baru

e. Penguatan basis data UMKM
f. Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan usaha UMKM
g. Peningkatan perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri serta mendorong peningkatan ekspor
h. Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
i. Optimalisasi pemanfaatan pusat perdagangan
j. Peningkatan perlindungan konsumen dan kemetrologian
k. Penataan pedagang pasar tradisional dan PKL
l. Fasilitasi partisipasi dalam pameran dagang dan forum bisnis internasional.
m. Optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk ekspansi pasar global.
n. Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan
o. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri
p. Peningkatan standardisasi produk
q. Melaksanakan penilaian risiko dan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitas mitigasi atas risikonya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		Strategi	Kebijakan	
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik (S2.2)	Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal	1	Meningkatnya volume usaha koperasi terhadap PDRB	Meningkatkan kualitas kelembagaan serta produktivitas koperasi dan usaha mikro	1	Penguatan kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Mempermudah akses permodalan seperti kredit usaha mikro, venture capital, atau hibah dari pemerintah dan swasta	2	Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal (S3.3);					3	Peningkatan nilai produk dan jangkauan pemasaran koperasi dan usaha mikro
Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting (S3.6)					4	Fasilitasi pelatihan Digital Marketing bagi UMKM sebagai bentuk penyesuaian strategi usaha di era normal baru
					5	Penguatan basis data UMKM
					6	Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dalam penyaluran bantuan usaha UMKM
		3	Meningkatnya nilai ekspor	Mendorong inovasi produk dan ekspansi ke pasar internasional untuk meningkatkan daya saing	1	Peningkatan perdagangan dan pengembangan pasar dalam negeri serta mendorong peningkatan ekspor
					2	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat
					3	Optimalisasi pemanfaatan pusat perdagangan
					4	Peningkatan perlindungan konsumen dan kemetrologian
					5	Penataan pedagang pasar tradisional dan PKL
					6	Fasilitasi partisipasi dalam pameran dagang dan forum bisnis internasional.
					7	Optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk ekspansi pasar global.
		4	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Menyederhanakan birokrasi dan regulasi perdagangan agar pelaku usaha lebih mudah berkembang	1	Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan
					2	Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri
					3	Peningkatan standardisasi produk
		5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Penerapan Manajemen Risiko	1	Melaksanakan penilaian risiko dan melakukan monitoring secara berkala untuk memastika efektivitas mitigasi atas risikonya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, melalui program-program sebagai berikut :

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pencapaian cakupan prosentase koperasi aktif dan patuh sebesar 80% dengan tujuan Meningkatnya kwalitas kelembagaan koperasi mempunyai 1 kegiatan berupa; Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota sebanyak 6 kali kegiatan dan hanya memiliki 2 sub kegiatan yaitu :

- Pengawasan kekuasaan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah koperasi yang diawasi sebanyak 40 koperasi;
- Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang – Undangan kewenangan kabupaten/kota yang difokuskan kepada kegiatan monitoring koperasi yang melakukan RAT, kegiatan fasilitasi pendirian koperasi, kegiatan pendataan KUD, kegiatan usulan pembubaran koperasi tidak aktif.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi.

Program ini diarahkan pada pencapaian prosentase – prosentase ksp / usp sehat sebesar 45% dengan fokus pada meningkatnya koperasi sehat, program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu : Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota dengan indikator jumlah kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan KSP / USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya sebanyak 40 Koperasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah koperasi yang dilakukan pemeringkatan sebanyak koperasi;

c. Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada pencapaian target prosentase pertumbuhan usaha mikro sebesar 7,75%. Program ini mempunyai tujuan untuk Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan memiliki 4 sub kegiatan:

- Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dengan indikator jumlah kegiatan kerja sama / kemitraan antara UMKM dengan pihak ketiga.
- Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro dengan indikator jumlah lokasin pendataan UMKM sebanyak 14 kecamatan
- Fasilitasi kemudahan perizinan usaha usaha mikro dengan dengan indikator jumlah peserta yang sosialisasi perizinan usaha mikro sebanyak 50 orang
- Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan indikator jumlah kegiatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha

d. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pencapaian prosentasi – prosentasi UMKM yang dibina sebesar 1,3% dengan fokus pada meningkatnya – meningkatnya kualitas pelaku UMKM, Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu : Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha dengan indikator jumlah aktivitas pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan target 4 kali kegiatan, kegiatan ini mempunyai satu sub kegiatan berupa;

- Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan fokus kegiatan pelatihan bagi UMKM, kegiatan fasilitas kemasan produk pangan, UMKM yang terfasilitasi uji nutrisi, kelompok UMKM yang mendapatkan hibah permodalan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada tercapainya indikator Prosentasi UKM yang difasilitasi pemasarannya sebesar 0,4% dan memiliki 1 kegiatan. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan target 3 kegiatan kegiatan ini mempunyai satu sub kegiatan berupa;

- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Ditingkat Kabupaten/Kota dengan indikator kelompok pedagang kaki lima yang dibina, UMKM yang terfasilitasi pemasaran secara online, pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya di GCC

f. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada tercapainya indikator Meningkatnya daya saing produk unggulan ekspor dengan target 30 juta US$ dengan hanya memiliki satu kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah kegiatan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan sebanyak 3 kegiatan memiliki 3 sub kegiatan :

- Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah pelaku usaha potensi ekspor yang difasilitasi pengembangan usahanya sebanyak 25 pelaku usaha
- Pameran dagang nasional dengan indikator jumlah pameran dagang yang diikuti dengan target 5 kegiatan
- Pembinaan pelaku usaha ekspor dengan jumlah pelaku ekspor yang dibina dengan target 10 pelaku usaha.

g. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada tercapainya indikator Prosentase Pasar Rakyat yang memenuhi Kriteria Pasar Sehat sebesar 100%. Memiliki 2 kegiatan yaitu :

1). Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar yang memenuhi kriteria pasar sehat sebanyak 1 pasar daerah dan memiliki 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah sarana prasarana pasar daerah yang bersih, sehat, aman, nyaman bagi pedagang, pembeli dan pengunjung sebanyak 2 pasar daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2). Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dengan indikator jenis aktivitas pembinaan pengelolaan pasar daerah dan memiliki 1 sub kegiatan:

- Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator jumlah pasar daerah yang terbina sebanyak 17 pasar daerah.

h. Program Perencanaan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada tercapainya indikator persentase – persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK sebesar 100% didukung oleh kegiatan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah aktifitas penyusunan dan evaluasi rencana pembangunanindustri Kabupaten/Kota dengan memiliki 3 sub kegiatan berupa

- Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri dengan berfokus pada kajian pengembangan perwilayahan industri, FGD tentang pengembangan dan pengutan klaster, buku saku dan Leaflet industri yang tersedia
- Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan indikator jumlah buku profil industri yang diterbitkan
- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan indikator jumlah monev pengembangan dan penguatan industri.

3.5 Sasaran Pokok Kabupaten Pemalang 2025-2045

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan.

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 ditetapkan 7 (tujuh) sasaran pokok. Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah Kabupaten Pemalang dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar global maupun nasional. Peningkatan produktivitas salah satunya dengan mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau.

Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar pada perekonomian Kabupaten Pemalang. Untuk itu,dalam dua puluh tahun ke depan kebijakan peningkatan produktivitas sektor ini menjadi penting dalam Upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah yang memiliki daya saing global maupun nasional. Arah kebijakan peningkatan produktivitas industri pengolahan di Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi:

1) Penguatan industri kecil dan menengah agar memiliki nilai tambah tinggi;
2) Pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan *(green investment*);
3) Pengembangan industri bahan baku lokal;
4) Penguatan integrasi rantai;
5) Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan;
6) Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif;
7) Digitalisasi industri pengolahan;
8) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan;
9) Peningkatan penumbuhan kawasan industri/Kawasan peruntukan industri baru.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Perdagangan

Salah satu sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian daerah Kabupaten Pemalang adalah sektor perdagangan. Kebijakan penguatan sektor perdagangan Kabupaten Pemalang dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada :

1) Penguatan ekspor produk unggulan daerah;
2) Pengurangan ketergantungan impor;
3) Penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional;
4) Pengendalian harga dalam Upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat;
5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional;
6) Penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah;
7) Penguatan sistem distribusi produk perdagangan, serta
8) Penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha,termasuk kelembagaan persaingan usaha.

UMKM dan Koperasi

Perekonomian Kabupaten Pemalang mampu tumbuh dan berkembang salah satunya ditopang oleh sektor UMKM dan koperasi yang dinilai mampu menghadapi goncangan pasar global dan nasional maupun dinamika global lainnya. Sektor ini juga mampu banyak menyerap tenaga kerja yang baik yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Untuk itu, agar sektor ini ke depan tetap mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian daerah didorong untuk lebih meningkatkan produktivitas agar memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara global dan nasional. Arah Kebijakan yang diterapkan untuk penguatan sektor UMKM dan koperasi dalam jangka panjang antara lain meliputi:

1) Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi;
2) Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha;
3) Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM yang memiliki standar pasar,berbasis riset,inovasi,dan teknologi;
5) Pengembangan wirausaha baru;
6) Penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil;
7) Perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, dan
8) Peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Baseline (2025)	Target			
				TAHAP I 2025-2029	TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2045
Terwujudnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah	PM 1. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Ratio PDRB Industri Pengolahan	28,28	24,28	25,78	26,78	27,79
		Ratio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	5,76	6,76	8,16	8,76	9,23
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	18	15	20	22	24
		Return on Aset (ROA) BUMD	1,49	2,39	3,59	4,00	4,41
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	22,55-22,70	42,55 - 61,85	82,55 - 101,85	95,05 - 118,85	107,78-126,58
		Ratio kewirausahaan daerah	7,47	9,47	11,97	13,67	15,44
		Ratio volume usaha koperasi terhadap PDRB	4,19	6,19	8,69	10,49	12,29
		Kapabilitas inovasi	2,22	2,30	2,40	2,50	2,62
	PM 2. Penerapan Ekonomi Hijau	Persentase Desa Mandiri	14,76	24,76	37,26	49,76	64,76
	PM 3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	13,68	13,67	13,71	13,75	13,79
		Disparitas Harga	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
	PM 4. Stabilitas Ekonomi Makro	Ratio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,71	0,78	0,77	0,79	0,81
		Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	11,55	11,75	12,05	12,3	12,6
		Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota Per PDRB	11,55	11,75	12,25	12,5	12,8

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan penjabaran Renstra 2025 – 2029 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dan Nasional baik jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5/1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2025 mengampu 15 program, 24 kegiatan dan 48 sub kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Secara khusus Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang telah merencanakan program untuk mendukung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 :

1. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
   - Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi menuju koperasi modern.
   - Fasilitasi permodalan, pendampingan manajemen usaha, serta peningkatan daya saing UMKM.
   - Digitalisasi UMKM melalui pelatihan pemasaran online dan integrasi dengan marketplace.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
   - Pembinaan sentra industri berbasis potensi lokal (batik, olahan pangan, kerajinan, logam, dll).
   - Dukungan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Pengembangan industri hijau yang ramah lingkungan sesuai misi “Hijau” dalam RPJMD.

3. Program Penguatan Perdagangan dan Pasar Rakyat
   - Revitalisasi pasar tradisional agar lebih bersih, tertata, dan berdaya saing.
   - Fasilitasi promosi produk unggulan daerah melalui pameran, expo, dan jejaring antar daerah.
   - Peningkatan infrastruktur distribusi perdagangan untuk memperluas akses pasar.
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Inovasi Daerah
   - Peningkatan kapasitas wirausaha baru melalui pelatihan, inkubasi bisnis, dan akses teknologi.
   - Sinergi dengan dunia pendidikan, komunitas kreatif, serta lembaga keuangan untuk mencetak wirausaha muda.
5. Program Transformasi Digital dan Reformasi Layanan
   - Digitalisasi pelayanan perizinan usaha dan kemudahan akses informasi.
   - Penerapan sistem data terintegrasi (*satu data*) untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Rumusan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Rumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT		**22.163.812.000**	**22.103.842.820**	**21.908.657.020**
02.17.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**22.163.812.000**	**22.103.842.820**	**21.908.657.020**
2.17.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	46.660.900	43.400.400	43.400.400
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.556.000	28.723.340	28.723.340
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyususnan dokumen RKA-SKPD	2.588.700	2.146.260	2.146.260
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi Peyususnan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.620.500	2.248.800	2.248.800
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyususnan dokumen DPA-SKPD	2.378.800	1.866.760	1.866.760
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi Peyususnan dokumen perubahan DPA-SKPD	2.664.000	2.059.800	2.059.800
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.202.500	3.793.060	3.793.060
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.650.400	2.562.380	2.562.380
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
2.17.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	-	-	-
2.17.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	-	-
2.17.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	-	-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.912.343.000	18.911.630.520	18.695.515.520

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	18.906.113.000	18.906.113.000	18.689.998.000
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.058.600	1.773.600	1.773.600
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.814.900	2.589.900	2.589.900
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.356.500	1.154.020	1.154.020
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.024.900	1.945.400	1.945.400
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.024.900	1.945.400	1.945.400
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.950.658	166.808.958	**194.397.966**
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.064.000	16.064.000	18.249.000
2.17.01.2.06.0002	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-
2.17.01.2.06.0003	Penyedia peralatan rumah tangga	-	-	-
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.482.250	32.804.850	32.804.850
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.004.408	47.454.408	57.558.416
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.400.000	70.485.700	85.785.700
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.742.550	97.742.550	**114.242.550**
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	-
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	-	-	16.500.000
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.742.550	97.742.550	97.742.550
2.17.01.2.07.0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya	-	-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.797.000.000	2.791.000.000	**2.744.805.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	503.370.000	497.370.000	509.170.000
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.010.000	10.010.000	10.010.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.283.620.000	2.283.620.000	2.225.625.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.089.992	91.314.992	**113.814.984**
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.589.992	39.339.992	57.844.984
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.500.000	51.975.000	55.970.000
2.17.01.2.09.0011	Pemelihara/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainya	-	-	-
KOPERASI		**354.496.000**	**1.263.980.800**	**1.053.080.800**
02.17.03	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**102.389.000**	**1.083.471.600**	**735.971.600**
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota	102.389.000	1.083.471.600	**735.971.600**
2.17.03.2.01.0001	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
2.17.03.2.01.0002	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/ kota	-	-	-
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	55.000.000	3.640.000	103.640.000
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	47.389.000	1.079.831.600	632.331.600
02.17.04	**Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi**	**15.000.000**	**14.855.600**	**14.855.600**
2.17.04.2.01	Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.855.600	14.855.600

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
2.17.04.2.01.0002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola,Profil Resiko,Kinerja Keuangan,dan Permodalan	15.000.000	14.855.600	14.855.600
02.17.05	**Program Pendidikan dan latihan perkoperasian**	**237.107.000**	**165.653.600**	**302.253.600**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	237.107.000	165.653.600	**302.253.600**
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	237.107.000	165.653.600	302.253.600
UMKM		**1.481.700.000**	**1.394.783.920**	**1.541.946.540**
02.17.07	**Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)**	**166.700.000**	**143.210.100**	**156.616.900**
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	166.700.000	143.210.100	**156.616.900**
2.17.07.2.01.0001	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	-	-	-
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	-	-	-
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	-	-	-
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	-	-	-
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	166.700.000	143.210.100	156.616.900
02.17.08	**Program Pengembangan UMKM**	**1.315.000.000**	**1.251.573.820**	**1.385.329.640**
2.17.08.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha	1.315.000.000	1.251.573.820	**1.385.329.640**
2.17.08.2.01.0001	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan usaha mikro	1.315.000.000	1.251.573.820	1.385.329.640
PERDAGANGAN		**2.307.613.000**	**2.421.760.060**	**2.791.472.140**
03.30.02	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**10.000.000**	**6.301.000**	**6.301.000**
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasandan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000	6.301.000	6.301.000
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10.000.000	6.301.000	6.301.000
03.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.095.000.000**	**1.049.300.060**	**1.209.300.060**
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	735.000.000	725.455.320	725.455.320
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	735.000.000	725.455.320	725.455.320
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	360.000.000	323.844.740	**483.844.740**
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	360.000.000	323.844.740	483.844.740
03.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**515.000.000**	**790.136.000**	**1.041.992.000**
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.000	3.205.000	3.205.000
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5.000.000	3.205.000	3.205.000
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	505.000.000	784.303.000	**1.036.159.000**
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.000	167.219.500	167.219.500

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	475.000.000	617.083.500	868.939.500
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	2.628.000	2.628.000
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.000.000	2.628.000	2.628.000
03.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**	**207.000.000**	**168.713.300**	**168.713.300**
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.000.000	168.713.300	168.713.300
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	117.000.000	87.450.000	87.450.000
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	85.000.000	78.378.300	78.378.300
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	5.000.000	2.885.000	2.885.000
3.30.05.2.01.0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	-	-	-
03.30.06	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**42.000.000**	**24.110.000**	**24.110.000**
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	42.000.000	24.110.000	24.110.000
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	38.000.000	21.964.000	21.964.000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	4.000.000	2.146.000	2.146.000
03.30.07	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negri**	**438.613.000**	**383.199.700**	**341.055.780**
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	438.613.000	383.199.700	341.055.780
3.30.07.2.01.0002	Pameran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	
3.30.07.2.01.0003	Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan	-	-	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	438.613.000	383.199.700	341.055.780
PERINDUSTRIAN		**786.800.000**	**984.711.320**	**1.055.433.174**
03.31.02	**Program Perencanaan Pembangunan Industri**	**626.600.000**	**892.390.320**	**980.389.174**
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	626.600.000	892.390.320	**980.389.174**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	48.500.000	39.839.000	37.284.000
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	84.600.000	51.287.800	53.003.800
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	-
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	493.500.000	801.263.520	890.101.374
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-
3.31.02.2.01.0010	Rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	-	-	-
03.31.03	**Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**67.200.000**	**37.673.000**	**15.325.000**
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	67.200.000	37.673.000	**15.325.000**
3.31.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	28.400.000	16.167.000	0
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	38.800.000	21.506.000	15.325.000
03.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**93.000.000**	**54.648.000**	**59.719.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN 2	PERUBAHAN
1	2	3	4	5
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	93.000.000	54.648.000	**59.719.000**
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	93.000.000	54.648.000	59.719.000
3.31.04.2.01.0002	Deseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kab./kota melalui SINas	-	-	-
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	-	-	-
JUMLAH		**27.094.421.000**	**28.169.078.920**	**28.350.054.474**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Penyusunan Renja ini merupakan tindak lanjut dari dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini berperan penting sebagai instrumen penghubung antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan daya saing industri, serta penguatan sektor perdagangan.

Melalui Rencana Kerja ini, diharapkan tercipta arah yang jelas, terukur, dan sistematis dalam mendukung peningkatan kemandirian ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal. Namun demikian, perlu disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, melainkan juga memerlukan koordinasi, sinergi, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini, diharapkan menjadi pedoman yang dapat dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, serta adaptif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan daerah. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

L. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan sebagai proses awal dari tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan mensyarakatkan adanya perumusan alternatif keputusan yang cepat, tepat dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi proses yang dibutuhkan karena keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung kepada kualitas konsep perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian sejauh mana ketersediaan sumber dana dan sumber daya aparatur dapat digunakan dalam mendukung program dan kegiatan dapat diprediksikan melalui asumsi yang mendasari konsepsi perencanaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Tatacara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Rencana Kerja (Renja) SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 273 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja OPD merupakan salah satu tahapan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan konsepsi perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Renstra OPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah .

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Adapun visi dan misi Bupati Pemalang Visi Bupati Pemalang adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGEN (AMAN)"

Sedangkan Misi Bupati Pemalang antara lain :

a. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih
c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong
d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
e. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal
f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pegadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodefikasi, klasifikasi dan Nomemklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemlang Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Renja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk:

1. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

2. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur selama 1 tahun.

4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam 1 tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

berisi tentang :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3. Evaluasi Hasil Penilaian SAKIP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.6. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN dan SASARAN

berisi tentang :

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,

3.3. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024, merupakan evaluasi terhadap capaian Rencana Kerja tahun 2024 (tahun n-2) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada urusan wajib non pelayanan dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian, dan realisasi program/kegiatan tahun 2024 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026, bahwa pada Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 11.485.074.350-. yang terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 45 sub kegiatan.

Pada tahun 2024 dari jumlah anggaran realisasi telah terserap sampai dengan akhir Deseember 2024 sebesar Rp.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

10.617.391.767 (92,45%) sisa Rp. 867.682.583,- berupa sisa perhitungan gaji dan efisensi anggaran.

Capaian sebesar 92,45 % tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pilihan ketransmigrasian telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

No.	Nama Program	%Realisasi Capaian kinerjja dan anggaran RKPD tahun 2024	
1	2	5	
		K	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	87,67
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	123,93	98,62
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	121,59	97,52
4.	Program Hubungan Industrial	115,23	97,40
5.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	66,67	70,18

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG
S/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

EVALUASI HASIL RKPD

PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

Periode Triwulan IV Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PENETAPAN TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN I TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA OPD (TH.2024) (%)	
2	3	4		5		6		7		8	
		INDIKATOR	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Dinas Tenaga Kerja			**339,65**	**10.788.381.350**	**339,65**	**11.578.709**	**359,65**	**11.485.074.350**	164,38%	**92,45%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.02	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	**%**	**80**	**200.000**	**80**	**200**	**0**	**-**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja yang telah disusun sesuai Pedoman	Kegiatan	2	200.000	2	200	0	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun	Dokumen	1	100.000	1	100	0	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	1	100.000	1	100	0	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi.**	%	4,43	3.013.000.000	4,43	3.803.329	4,43	3.887.520.000	123,93%	**98,62%**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Prosentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis Kompetensi	%	78,66	3.013.000.000	78,66	3.803.329	78,66	3.887.520.000	105,67%	**98,62%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.03.2.01,0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	368	1.413.000.000	560	2.203.329	576	2.287.520.000	100,00%	**99,55%**
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	388	1.600.000.000	388	1.600.000	388	1.600.000.000	100,00%	**97,29%**
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**Prosentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	%	43,43	**55.000.000**	43,43	**55.000**	43,43	**54.500.000**	176,08%	**89,96%**
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Prosentase lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi**	%	100	50.000.000	100	50.000	100	50.000.000	100,00%	**90,26%**
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Lembaga	41	50.000.000	41	50.000	41	50.000.000	100,00%	**90,26%**
2.07.03.2.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Prosentase lembaga pelatihan kerja yang berijin**	%	100	4.500.000	100	4.500	100	4.500.000	100,00%	**86,67%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Perizinan	6	4.500.000	6	4.500	6	4.500.000	100,00%	**86,67%**
2.07.03.2.04	**Konsultasi Produtivitas pada Perusahaan Kecil**	**Prosentase Perusahaan kecil/UMKM yang meningkat produktivitasnya**	%	100	500.000	100	500	0	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat kosultasi Peningkatan Produktivitas	Persh	3	500.000	3	500	0	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja wilayah Kab/Kota**	%	59	685.700.000	59	685.700	59	1.010.100.000	121,59%	**97,52%**
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan**	Orang	8000	593.200.000	8000	593.200	8000	681.000.000	111,04%	**99,24%**
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	7500	82.000.000	7500	82.000	7500	82.000.000	112,97%	**99,47%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	25	100.000	25	100	0	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabiitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	5	100.000	5	100	0	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	160	511.000.000	160	511.000	180	599.000.000	100,00%	**99,21%**
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja	Pencaker	100	500.000	100	500	100	200.100.000	100,00%	**94,55%**
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	100	500.000	100	500	100	200.100.000	100,00%	**94,55%**
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota**	Prosentaae Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi	%	100	92.000.000	100	92.000	100	129.000.000	100,00%	**93,01%**
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	20	92.000.000	20	92.000	50	129.000.000	100,00%	**93,01%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Indonesia (PMI)										
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	**Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Sruktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	%	22,79	531.518.000	22,79	531.518	22,79	546.518.000	115,23%	**97,41%**
2.07.05 .2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Perusahaan yang mamatuhi peraturan ketenagakerjaan**	%	100	46.000.000	100	46.000	100	46.000.000	100,00%	**97,40%**
2.07.05 .2.01.0 001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan ang terkait dengan hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Persh	10	46.000.000	10	46.000	10	46.000.000	100,00%	**97,40%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial**	%	100	485.518.000	100	485.518	100	500.518.000	100,00%	**97,41%**
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	5	25.000.000	5	25.000	5	25.000.000	100,00%	**91,94%**
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi & Serikat Pekerja	15	10.000.000	15	10.000	15	10.000.000	100,00%	**99,80%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Lembaga	4	62.500.000	4	62.500	4	77.500.000	100,00%	**95,88%**
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Keejahteraan Pekerja	Orang	51.439	388.018.000	51.439	388.018	50.375	388.018.000	100,00%	**98,00%**
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD**	%	100	6.427.463.350	100	6.427.462	100	5.809.836.350	100,00%	**87,67%**
		Prosentase Ketercapaian Pelaanan Umum dan Kepeg. PD	%	100		100		100		100,00%	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelanaran tugas dan fungsi OPD**	%	100	117.588.000	100	117.588	100	129.356.000	100,00%	**99,63%**
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	103.018.000	6	103.018	6	114.786.000	100,00%	**99,61%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.510.000	1	1.510	1	1.510.000	100,00%	**99,34%**
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan SKPD	Dokumen	1	3.020.000	1	3.020	2	3.020.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.000.000	1	1.000	1	1.000.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000	2	2.000.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	3.040.000	12	3.040	12	3.040.000	100,00%	**99,21%**
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4.000.000	4	4.000	4	4.000.000	100,00%	**100,00%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel**	%	100	5.078.187.000	100	5.078.187	100	4.360.360.000	100,00%	**84,37%**
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12/32	5.050.866.000	12/32	5.050.866	12/26	4.333.039.000	100,00%	**84,27%**
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.106.000	1	2.106	1	2.106.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	25.215.000	12	25.215	12	25.215.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang meningkat kapasitasnya**	%	100	34.994.000	100	34.994	100	34.994.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	35	34.994.000	35	34.994	100	34.994.000	100,00%	**100,00%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas**	%	100	349.439.150	100	349.438	100	368.681.150	100,00%	**98,08%**
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10	9.992.000	10	9.992	10	9.992.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	30	10.749.400	30	10.749	35	12.626.400	100,00%	**99,93%**
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	25	101.294.500	25	101.294	35	114.518.500	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	10	20.000.000	10	20.000	12	23.400.000	100,00%	**98,12%**
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	7.500.000	1	7.500	1	7.500.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat KoordinasI dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	199.903.250	70	199.903	75	200.644.250	100,00%	**96,70%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	%	100	71.635.200	100	71.635	100	106.755.200	100,00%	**94,92%**
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	0	-	0	-	4	5.000.000	100,00%	**100,00%**
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	14	71.635.200	14	71.635	26	101.755.200	100,00%	**94,67%**
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	%	100	548.375.000	100	548.375	100	561.736.000	100,00%	**96,33%**
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	152.525.000	12	152.525	12	196.110.000	100,00%	**89,90%**
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	395.850.000	12	395.850	12	365.626.000	100,00%	**99,78%**
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**	%	100	227.245.000	100	227.245	100	247.954.000	100,00%	**99,39%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	96.305.000	31	96.305	31	113.005.000	100,00%	**98,69%**
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	50	35.274.000	50	35.274	50	35.274.000	100,00%	**99,92%**
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rahabiliasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	Unit	3	95.666.000	3	95.666	3	99.675.000	100,00%	**100,00%**
3.32.03	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Prosentase Transmigran yang ditempatkan**	%	30	75.500.000	30	75.500	30	176.600.000	66,67%	**70,18%**
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah transmigran yang ditempatkan**	%	100	75.500.000	100	75.500	100	176.600.000	100,00%	**70,18%**
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Laporan	2	75.000.000	2	75.000	2	75.000.000	100,00%	**80,62%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	10	500.000	10	500	1	101.600.000	100,00%	**62,47%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum terhadap pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2026 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pemalang

NO	Indikator	SPM / standar nasional/IKU	IKK	Renstra SKPD Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025 (triwulan 1)	Tahun 2026	Tahun 2027	
				(thn n-2)	(tnn n-1)	(thn n)	N+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8		9	10	11	12	13
1.	Persentase tingkat pengangguran terbuka			6,89	6,75	6,13-6,07	6,07-6,01	6,63		6,13-6,07	6,07-6,01	
2.	Persentase pengangguran yang ditangani	IKU		13,62	13,93	-	-	16,90		-	-	
3.	Indeks Ketenagakerjaan	IKU		30,85	33,16	-	-	34,50		-	-	
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		IKK	80	80	100	100	100		100	100	
5.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi		IKK	5,45	6,61	2.03	2,78	5,49		2,03	2,78	
6.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		IKK	45,78	48,36	27,85	27,92	76,47		45,78	48,36	
7.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS		IKK	23,09	23,86	100	100	26,26		27,85	27,92	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Indikator	SPM / standar nasional/IKU	IKK	Renstra SKPD Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025 (triwulan 1)	Tahun 2026	Tahun 2027	
				(thn n-2)	(tnn n-1)	(thn n)	N+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8		9	10	11	12	13
	Ketenagakerjaan											
8.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota		IKK	59	64	73,13	73,83	71,74		73,13	73,83	
9.	Persentase transmigran yang ditempatkan		IKK	30	30	11,43	14,3	0	0	11,43	14,3	

2.3. Indikator Utama Pembangunan untuk Tahun 2025-2045 Dinas Tenaga Kerja Kab. Pemalang

INDIKATOR SASARAN POKOK/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Satuan	Realisasi 2023	PENETAPAN TARGET PROV		TARGET KABUPATEN					Asumsi	Indikator yang digunakan	Penjelasan
			Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025 Kab	PERIODE I 2025-2029	PERIODE II 2030-2034	PERIODE III 2035-2039	PERIODE IV 2040-2045			
Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15	%	6,55	6,19-5,89	3,21-2,91	6,19-5,89	5,69 - 5,39	4,89 - 4,59	4,05 - 3,75	3,21-2,91	Asumsi berdasarkan tema pembangunan 5 tahunan Periode I dan II masih dalam konstruksi investasi yang telah masuk sehingga pengurangan TPT	Pakai Prov	Seiring dengan perkembangan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang terus naik, diharapkan dapat mengatasi pengangguran di Kab.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.										kisaran 0,5 - 0,8 poin Periode III dan IV diperkirakan sudah banyak tenaga kerja yang terserap sehingga pengurangan TPT kisaran 0,8 poin		Pemalang. Target akhir RPJPD tahun 2045 ini dapat diartikan pengangguran yang ada merupakan angkatan kerja yang baru saja menamatkan jenjang pendidikan yang ditempuh dan diharapkan pada tahun yang sama mereka dapat memperoleh pekerjaan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan : adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	%	52,33	58,19	74,22	58,19	62,19	68,19	71,19	74,22	Asumsi berdasarkan tema pembangunan 5 tahunan Periode I tambah 4 poin dari baseline Periode II tambah 6 poin dari periode sebelumnya Periode III tambah 3 poin dari periode sebelumnya Periode IV tambah 3 poin dari periode seblumnya	Pakai Prov	Peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga menjadi penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya di keluarganya. Hal ini selaras dengan harapan semakin berkurangnya jumlah pengangguran. Diharapkan pada akhir tahun RPJPD lebih dari 74% angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pemalang telah memiliki pekerjaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	%	Pada saat perhitungan proyeksi langsung menggunakan data proyeksi dari RTKD			56,03	58,58	64,1	70,14	78,15	Asumsi perhitungan 5 tahun terakhir yang capaiannya fluktuatif berdasarkan asumsi industrialisasi 20 tahun ke depan lebih meningkat dengan perhitungannya pertahapan 5 tahun yaitu : 5 tahun pertama pengembangan sebesar 2,55% 5 tahun kedua percepatan sebesar 5,52% 5 tahun ketiga pemantapan sebesar 6,04% 5 tahun keempat perwujudan sebesar8,01%	Pakai Kab	Dalam hal perlindungan sosial tenaga kerja (jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian tenaga kerja), masih banyak perusahaan di Kab. Pemalang yang belum memberikan jaminan tersebut kepada pekerja. Diharapkan pada akhir periode RPJPD lebih dari 75% masyarakat yang bekerja memiliki jaminan sosial tenaga kerja tersebut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Dengana terpilihnya

Indeks Ketenagakerjaan yang diperoleh dari Prosentase jumlah pelatihan bersertifikat Kompetensi + prosentase jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan + prosentase jumlah Hubungan Industrial dibagi dengan realisasi capaian 3 program. Capaian indikator ini didukung oleh 3 program yaitu program Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial. Tahun 2024 Disnaker Kabupaten Pemalang menargetkan indeks ketenagakerjaan sebesar 31% tercapai 34,50% (111,3%) yang merupakan hasil dari prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 5,49 %, prosentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota sebesar 71,74% dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 26,26%.

Prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi diperoleh dari Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (1.564 orang) dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan (28.478 orang).

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota diperoleh dari Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan (8.883 orang) dibandingkan dengan Jumlah pencaker yang terdaftar (12.381 orang)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) diperoleh dari Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (120 perusahaan) dibanding jumlah perusahaan Jumlah Perusahaan (457 perusahaan). Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja guna mengurangi angka pengangguran serta perlindungan tenaga kerja adalah sebesar 26,26%.

Indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja,, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk Indikator Sasaran Pemerintah Daerah persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 sebesar 6,63 mengalami kenaikan 0,08%. Jumlah penganggur sebesar 57.020 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebesar 859.852 orang, hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi adalah :

1. Rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja
2. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat kebutuhan pasar kerja;
   - Sebagian besar perusahaan di Pemalang bergerak dibidang garment yang membutuhkan skill sewing/menjahit sedangkan pencari kerja rata2/sebagian besar tidak menguasai ketrampilan tersebut.
   - Jurusan /program studi pada SMK di Kabupaten Pemalang yang ada Jurusan Tata Busana, yang mencetak Calon TK berketrampilan sewing/menjahit;
   - Keinginan/minat pencari kerja yang cenderung bekerja di Jabodetabek.
3. Semua perusahaan sudah menerapkan UMK tetapi standar upah rendah sehingga banyak pekerja yang pindah ke daerah yang UMK.nya tinggi;
4. Aturan Ketenagakerjaan belum diterapkan secara optimal,

<u>Solusi</u>

1. Peningkatan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
2. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja mengadakan kegiatan job fair, job canvasing dan Kerjasama dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja;
3. Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan monev;
4. Berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi, maka tenaga pelatih/instruktur yang dibutuhkan oleh BLK adalah instriktur yang memiliki kompetensi metodologi dan kompetensi teknis.

5. mengadakan pendekatan dengan dunia usaha/industry (perusahaan) di Kabupaten Pemalang melalui perjanjian kerjasama supaya terbangun link dan match antara dunia pelatihan dan dunia kerja dan mengadakan kunjungan ke perusahaan khusunya garmen dalam rangka sinkronisasi kurikulum dan kompetensi bagi peserta pelatihan.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis didukung dengan pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis maka perlu ditindak lanjuti dengan suatu rencana tindak lanjut berupa program dan kegiatan yang nyata yang didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan disusunlah program-program sebagai berikut :

1. **Program Perencanaan Tenaga Kerja**
2. **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
3. **Rogram Penempatan Tenaga Kerja**
4. **Program Hubungan Industrial**
5. **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

2.5.Review terhadap Rancangan awal RKPD

Tahun 2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, diharapkan adanya konsistensi antar semua dokumen perencanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah tertampung dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk usulan kegiatan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan hanya tidak semua program dan kegiatan dapat terdanai sesuai dengan usulan yang ada dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, ada beberapa program prioritas dari Kepala Daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.. Untuk Review Rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel 2.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Pemalang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**9.994.483**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				12.219.700.000,0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi**	**70,61**	**5.762.883**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi**	**70,61**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**	**100**	32.486.3	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**	**100**	**188.500**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	9.930.,5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	1.999,25	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	5.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3.999,5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	10.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.999.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.942,8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	3,999,8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	5.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	7,615,25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	8.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu**		**5,762.883**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu**		**5.233.500**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.875.483	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.200.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.981,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	3.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	30.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan**		**100**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan**		**80.000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	100	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	80.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	100		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**		**412.500**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	6.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	20.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	6.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	17.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	50.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	110.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	15.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	25.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 tahun	6.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 tahun	10.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 kali	50.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 kali	230.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 unit	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 unit	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran**	100	**46.600**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran**		**105.000**	
	Pengadaan Mebel	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	21.600	Pengadaan Mebel	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 unit	30.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	25.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	75.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 jenis/ buah	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 jenis/ buah	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terbangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker Kab. Pemalang	**Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor**	100	**529.980,6**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor**		**570.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	198.147	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	170.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 orang /bulan	331.833,6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 orang /bulan	400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	100	**137.951,6**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara**		**315.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 jenis/ unit	75.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 jenis/ unit	125.000	
	Pemeliharaan Mebel	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah mebel yang terpelihara dengan baik			Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 jenis/ unit	22.949,76	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	40.001,76	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	150.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 jenis/ unit		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**80%**	**200**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**80%**	**200**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun sesuai pedoman		**200**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun sesuai pedoman		**200**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 dokumen	100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	100	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 dokumen	100	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	1 orang	100	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5,45	**790.100**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,61	**3.500.000**	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		747.000	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		**3.250.000**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	220 orang	746.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	268orang	1.500.000	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 kali	0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 kali	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 paket	1.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 paket	1.750.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi		**20.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi		**100.000**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 LPKS	20.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 LPKS	100.000	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin		**3.000**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin		**30.000**	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	7 perzinan	3.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	40 LPKS	30.000	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan kecil/UMKM yang meningkat produktifitasnya		**100**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		Prosentase perusahaan kecil/UMKM yang meningkat produktifitasnya		**20.000**	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	1 prusahaan /UMKM	100	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 prusahaan /UMKM	20.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas		**20.000**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas		**100.000**	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 peserta	20.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 peserta	100.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota**		**796.100**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah**		**1.095.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
								kabupaten / kota			
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		**796.100**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		**720.000**	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	12 bulan	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	12 bulan	0	
	Pelayanan antar Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	8.500 orang	40.000	Pelayanan antar Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	15.000 orang	100.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	25orang	100	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 orang	20.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2340 orang	40.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	5 orang	50.000	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1056 HOK	701.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 orang	550.000	
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik		**0**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik		**0**	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	20 orang	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	20 orang	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 kali	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 kali	0	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja		**10.000**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja		**200.000**	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	1 kegiatan		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	1 kegiatan	0	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem *Online* (Karir Hub)	1 paket	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem *Online* (Karir Hub)	1 paket	0	
	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui *Job Fair* /Bursa Kerja	1 kegiatan	10.000	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui *Job Fair* /Bursa Kerja	1 kegiatan	200.000	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi		**10.000**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi		**175.000**	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	5.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	175.000	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1 kali	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1 kali	0	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	3 Perusahaan	**0**	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	3 Perusahaan	**0**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing	10 kali	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing	10 kali	0	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker Kab. Pemalang	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	**23,09**	**2.625.200**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	**23,86**	**370.000**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan		**46.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan		**50.000**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP *Online*	12 perusahaan	46.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP *Online*	12 perusahaan	50.000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 dokumen		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 dokumen		
		Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	30 orang				Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	30 orang		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 perusahaan	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 perusahaan	0	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan penetapan upah minimum kabupaten	1 Kegiatan				Jumlah pelaksanaan kegiatan penetapan upah minimum kabupaten	1 Kegiatan		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Prosenatse perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan social		**2.579.200**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		Prosenatse perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan social		**320.000**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 kasus		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 kasus	0	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 kasus	25.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 perkara	40.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 organisasi	10.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 organisasi	20.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 lembaga	75.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	16 kali	200.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas KesejahteraanPekerja	Disnaker Kab. Pemalang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 org	2.469.200	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas KesejahteraanPekerja	Disnaker Kab. Pemalang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	30 org	60.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Disnaker Kab. Pemalang				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase transmigran yang ditempatkan**	**30**	**20.000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Persentase transmigran yang ditempatkan**	**40%**	**350.000**	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah transmigran yang ditempatkan			**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah transmigran yang ditempatkan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	10.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	100.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 KK	10.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	25 KK	250.000	
	Penyuluhan Transmigrasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 orang	0	Penyuluhan Transmigrasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 orang	0	
	Pelatihan Transmigrasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 peserta	0	Pelatihan Transmigrasi	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 peserta	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6.Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah adalah melalui Forum SKPD . Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil musrenbang Kecamatan dengan rencana kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi semua persoalan di semua sektor. Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah pembangunan daerah terdiri dari prioritas I dan 2 serta pokok pikiran DPRD. Prioritas 1 merupakan kegiatan hasil musrenbang yang jelas terdanai. Matriks Kegiatan Hasil Musrenbang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 5.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4
Usulan Para Pemangku Kepentingan/SKPD/Unit Kerja Tahun 2026
Kabupaten Pemalang

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

1. Hasil Musrebang Kecamatan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN SUMBER DAYA		
						APBN	APBD PROV	APBD KAB
1	Pulosari	Clekatakan	Pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit	Desa Clekatakan	16 Orang			73.000.000,00
2	Bodeh	Pendowo	Pelatihan Perbengkelan 16 Peserta Rp.69.000.000		**16 Peserta**			69.000.000,00
3	Pemalang	Kebondalem	Pelatihan Tata Boga (Pemuatan Kue Kering)		20 Orang			50.000.000,00
4	Pemalang	Lawangrejo	Pelatihan Tata Boga (Memasak)		30 Orang			50.000.000,00
	TOTAL							**242.000.000**

NO	USULAN AKHIR			OPD	Nama dan Kode Program	Nama dan kode Kegiatan	Nama dan kode Subkegiatan
	NAMA USULAN	VOLUME	ANGGARAN				
1	Pelatihan Menjahit Desa Jebed Utara Kec. Taman	20 Orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
2	Pelatihan Otomotif Kendaraan Bermotor Desa Gunungsari Kec. Pulosari	16 Orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					(2.07.04)	(2.07.04.2.01)	

2. Hasil Pokir DPRD

NO	PENGUSUL	FRAKSI	MASALAH	USULAN	LOKASI	MURNI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pelatihan membuat batik ecoprint desa Sikasur, Kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	60.000.000
2	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pemberdayaan Perempuan melalui pelatihan pembuatan kue kering Desa Belik, Kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Belik, Kecamatan Belik , Kab. Pemalang	60.000.000
3	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pelatihan membuat Batik ecoprint Desa Bulakan Kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	60.000.000
4	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pelatihan membuat kue kering Desa Sikasur kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	60.000.000
5	DWI LAKSARI, S.Pd.	PDIP	Pelatihan menjahit untuk masyarakat desa Kejene, kec. Randudongkal	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Kejene, kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	78.000.000
6	DWI LAKSARI, S.Pd.	PDIP	Pelatihan Perbengkelan las/las listrik fabrikasi untuk masyarakat Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	79.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	DWI LAKSARI, S.Pd.	PDIP	Pelatihan berbasis kewirausahaan (tata boga)di Desa Kejene, wilayah kecamatan Randudongkal	Perluasan Kesempatan kerja (Pelatihan berbasis kewirausahaan)	Desa kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	58.000.000
8	SUBANDI SYUHADA	PKB	Perluasan Kesempatan kerja (Pelatihan berbasis kewirausahaan), Pelatihan penggunaan Alat Tangkap Ikan untuk pekerja migran indonsia	Perluasan Kesempatan kerja (Pelatihan berbasis kewirausahaan)	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	150.000.000
9	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	GOLKAR	Pelatihan Kerja (perbengkelan las/Las Listrik)	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Kec. warungpring, Kab. Pemalang	100.000.000
						Rp 705.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
3. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023/RPD Prov.Jawa Tengah Tahun 2024-2026**
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024/RPJMN

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten Pemalang.

Adapun tema dan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2025 adalah ***"Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia"***

Target sasaran makro pembangunan Tahun 2025 pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, meliputi:

1. Angka kriminalitas sebanyak 185 kasus;
2. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 136;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 68,09;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,75;
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,33;
6. Indeks Kebudayaan sebesar 57,00;
7. Indeks kerukunan umat beragama sebesar 70,88;
8. Angka kemiskinan sebesar 14,97 persen;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,89 persen;
10. Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,8089;
11. Indeks ketimpangan antar wilayah sebesar 0,37400;
12. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,00 persen;
13. Laju Inflasi sebesar 2,36 persen;
14. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 71,28;
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebesar 69,67;

Dari prioritas tersebut dapat dicapai dengan sinergitas pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten serta masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau pada saat masa Renstra PD ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk mencapai Misi yang ke 3 Bupati " Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong yaitu dengan :

1. Tujuan : Mengurangi jumlah pengangguran
   Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

No.	Permasalahan /Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

I.	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena : 1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja 2. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat kebutuhan pasar kerja; 3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan 4. Tahun 2020 belum semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek; 5. Masih terdapat calon transmigran yang tidak/belum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi karena terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi.	1. Mengurangi jumlah pengangguran	Meningkatnya kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;** **Kegiatan :** 1. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; **Sub Kegiatan :** a. Perencanaan,Penganggara,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; **Sub Kegiatan :** a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :** a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah **Sub Kegiatan :** a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; **Sub Kegiatan :** a. Pengadaan Mebel; b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :** a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

				Pemerintahan Daerah **Sub Kegiatan :** a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

2. Tujuan : Mengurangi jumlah pengangguran

   Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran

No.	Permasalahan /Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
I.	Urusan Tenaga Kerja			
	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena : 1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja sampai dengan Tahun 2020 pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sebesar 73,39%; 2. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi	Mengurangi jumlah pengangguran	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran dan perlindungan tenaga kerja	**I. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** **1.** Pelayanan Antar Kerja di DaerahKabupaten /Kota; **Sub Kegiatan:** a. Pelayanan Antar Kerja; b. Penyuluhan dan bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja; c. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan; d. Perluasan Kesempatan Kerja 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; **Sub Kegiatan :** a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	syarat kebutuhan pasar kerja; 3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan tahun 2020 baru sebesar 19,04%; 4. Tahun 2020 belum semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek; 5. Masih terdapat calon transmigran yang tidak/belum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi karena terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi.			Informasi Pasar Kerja Online; b. Job Fair/Bursa Kerja 3. Perlindungan PMI (pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
				II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
				III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

				Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi; 4. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
				IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

				yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi c. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota; d. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
				V. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

3.3 Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang diarahkan untuk peningkatan derajat sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang sejahtera, maka program dan kegiatan prioritas daerah selain dijabarkan ke dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pelaksanaan urusan pemerintah juga ditekankan pada upaya-upaya antara lain : Peningkatan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, penempatan tenaga kerja , peningkatan sarana BLK dan bursa kerja.

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ada perubahan pada nomenkatur program dan kegiatan.

Rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ;

- **Urusan Tenaga Kerja:**

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;**
   a. Pengadaan Mebel;
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

1. **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**
   a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
   b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
   a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
   b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
2. **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

3. **Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**
   a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi;
4. **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**
   a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
5. **Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja.**
   a. Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

IV. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. **Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Pelayanan antar Kerja
   b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
   c. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
   d. Perluasan Kesempatan Kerja
2. **Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
3. **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
   a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
   b. Job Fair/Bursa Kerja
4. **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
5. **Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

V. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2. **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
c. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
d. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

VI. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran serta prakiraan maju untuk tahun selanjutnya sebagaimana dalam tabel.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel. 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Pemalang

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

NO	TUJUAN Renstra	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
					2026		2027		
					Target	Rp	Target	Rp	
	(1)	(3)	(6)	(7)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	Mengurangi jumlah pengangguran	Meningkatnya kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip/Indeks RB**	70,61	5.762.883		70,61	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100		**100**	87.500	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	9.930,5	4 dokumen	60.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	3 dokumen	1.999.9	3 dokumen	2.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	3 dokumen	3,999,5	3 dokumen	5.000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.999,5	1 dokumen	2.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	2,942,8	1 dokumen	4.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan	3,999,8	19 laporan	5.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	7,615,25	5 laporan	8.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**5.016.826,74**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.875.483	12 bulan	4.999.326,74	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Keuanagan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.981,5	1 laporan	2.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	12 laporan	10.000	12 laporan	15.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	**100**		**100.000**	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kegt	100	40 orang	100.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		100			354.500	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	6.000	6 paket	12.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	6.000	10 paket	15.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 paket	50.000	10 paket	75.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang dan cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	15.000	6 paket	15.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	6.300	1 dokumen	7.500	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	50.000	1 kegt	200.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.600	100	135.000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang terpenuhi	13 unit	21.600	8 paket	60.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi	1 unit	25.000	25 paket	75.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			529.980,6		**625.000**	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	198,147	12 laporan	245.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan	331.833,6	12 laporan	380.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

				kantor yang disediakan					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**137.951,6**		**230.352**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinan	29 jenis/unit	75.000	29 jenis/unit	100.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 jenis/unit	22,949,76	10 jenis/unit	30.352	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	40.001,76	3 unit	100.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau banagunana lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	0	3 unit	0	
2	Mengurangi jumlah pengangguran	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja guna menguranggi angka	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang tersusun dengan baik**	**80%**	**200**	**100%**	**170**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		penganggu ran serta perlindung an tenaga kerja							
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	2 dokumen	100	2 dokumen	100	
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	1 orang	100	1 dokumen	70	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	**2,03%**	790.100	**2,78%**	**1.499.010,51**	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	78,66	747.000	78,66	1.478.310,16	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi pada Tahun n	220 orang	747.000	220 orang	1.391.319,16	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan Sarana Pelatihan	1 unit	1.000	1 paket	87.000	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			**20.000**		**17.466.73**	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaa pelatihan kerja swasta yang dibina	30 LPKS	20.000	40 LPKS	**17.466.73**	
			Perizinan dan Pendaftaran			**3.000**		**3.024**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Lembaga Pelatihan Kerja						
			Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	40 LPKS	3.000	40 LPKS	3.024	
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			**100**		**100**	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan /UMKM	100	40 perusahaan /UMKM	100	
			Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas	40 peserta	20.000	40 peserta	20.000	
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang dilatih pengukuran produktivitas				20.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota**	**64%**	**796.100**	**69%**	**2.000.131.93**	
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan		**796.100**		**1.421.803,93**	
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	8.500 orang	40.000	7.500 orang	57,636	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan	2340 orang	40.000	2340 orang	65.376,3	
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendpatkan fasilitasi Layanan ULD	5 Orang	100	20 Orang	40.759,52	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	701.000	280 org	1.258,031,51	
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja				**378.328**	
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	3 dokumen		1 kegiatan	0	
			Job. Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	1 kegiatan	10.000	1 kegiatan	308.328	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pekerja migran Indonesia yang dilindungi				**130.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	1 kegiatan	5.000	1 kegiatan	130.000	
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing				**0**	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Prosentase Terbinanya Sarana Hubungan Industri, Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan Fasilitasi Perselisihan Hubungan Industri**	**23,09%**	**2.625,2**	**23,86%**	**2.961.595,7**	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang mematuhi peratutan ketenagakerjaan		**46.000**		**96.000**	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial yang terdaftar di WLKP Online	12 perusahaan	46.000	12 perusahaan	96.000	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan					**2.896.739,320**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	40.000	6 kasus	25.324,36	
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	15 organisasi	10.000	15 organisasi	7.541,54	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan	16 kali	75.000	16 kali	143.429,78	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananaya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasiitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	2.469.200	160 orang	2.720.443,74	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Presentase Transmigran yang Ditempatkan**	**30%**	20.000	**40%**	**20.000**	
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama	1 laporan	10.000	2 kegiatan	10.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Kabupaten/Kota	Pembanagunan Transmigrasi yang berasala dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK	10.000	25 KK	10.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Sesuai dengan pasal 273 (3) Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2026 melaksanakan 1 (satu) urusan wajib tenaga kerja dan satu urusan pilihan transmigrasi yang terdiri dari program 6 program dan 19 kegiatan, sub kegiatan 45 sub kegiatan aktivitas yg akan dilakukan;

Rencana Aktifitas Tahun 2026 :

NO.	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Pemenuhan Kebutuhan Rutin Sekretariat :	
	➢ Gaji/Tunjangan/TPP	4.875.483.000
	➢ Pembayaran Honor non ASN dan iuran BPJS non ASN	331.833.600
	➢ Listrik,air, telp;	198.147.000
	➢ Kebutuhan Rutin dan Pemeliharaan	377.619.400
4.	Pembinaan LPKS	20.000.000
5.	Konsultasi produkstifitas	30.000.000
6.	Pengukuran Produktifitas	20.000.000
7.	Pelaksanaan pelatihan berbasis kewirausahaan (Pokir dan PIWK)	441.000.000
8.	Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi	747.000.000
9.	Pelayanan Antar Kerja (pelayanan Kartu kuning)	40.000.000
10.	Kegiatan bimbingan penyuluhan jabatan	40.000.000
10.	Koordinasi Transmigrasi	20.000.000
11.	Pelaksanaan May Day (hari buruh), dewan pengupahan, Penyelesaian perselisihan perburuhan, LKS tripartite, sosialisasi peraturan ketenagakerjaan dan monev ke perusahaan, pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk usia 55-65 thn sebanayak 12.088 orang)	2.625.200.200

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana tabel terlampir:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel. 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS TENAGA KERJA KAB. PEMALANG TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	8	9	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA				**9.994.483.000,00**		**10.135.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.974.483.000,00**		**9.920.500.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**9.974.483.000,00**		**9.920.500.000,00**	
1,	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**5.762.883.000,00**	**-**	**6.194.500.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**5.762.883.000,00**	-	**6.194.500.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	32.486.300,00	-	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	9.930.500,00		7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1.999.250,00		2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	3.999.500,00		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1.999.500,00		2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	2.942.500,00		4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	3.999.800,00		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	7.615.250,00		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		-	**-**	**-**	**-**	**5.762.883.000,00**	-	**6.194.500.000,00**	-
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.887.464.500,00	-	4.767.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		39 Orang/bulan	4.875.483.000,00		4.750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.981.500,00		2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	10.000.000,00		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	100.000,00	-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	100.000,00		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	128.300.000,00	-	367.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	6.000.000,00		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10 Paket	6.000.000,00		12.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	50.000.000,00		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	10.000.000,00		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	6.300.000,00		7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 Laporan	50.000.000,00		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	46.600.000,00	-	90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		25 Unit	21.600.000,00		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	25.000.000,00		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	529.980.600,00	-	625.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	198.147.000,00		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	331.833.600,00		375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	137.951.600,00	-	210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		39 Unit	75.000.000,00		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	22.949.760,00		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	40.001.840,00		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2,	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**	**-**	**200.000,00**	**-**	**65.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	-	200.000,00	-	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro							
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	100.000,00		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro							
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		2 Orang	100.000,00		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**	**-**	**790.100.000,00**	**-**	**1.446.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-	747.000.000,00	-	1.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		356 Orang	746.000.000,00		1.250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota							
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		25 Unit	1.000.000,00		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	-	20.000.000,00	-	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		30 Lembaga	20.000.000,00		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	3.000.000,00	-	6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		7 Perizinan	3.000.000,00		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-	-	100.000,00	-	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil							
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		1 Perusahaan	100.000,00		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1 Dokumen	20.000.000,00		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4,	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**	**-**	**796.100.000,00**	**-**	**1.840.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	781.100.000,00	-	1.440.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja							
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		8500 Orang	40.000.000,00		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja							
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		300 Orang	40.000.000,00		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan							
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		15 Orang	100.000,00		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja							
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		190 Orang	701.000.000,00		1.250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	-	10.000.000,00	-	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja							
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		400 Orang	10.000.000,00		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.000.000,00	-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		20 Orang	5.000.000,00		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**	**-**	**2.625.200.000,00**	**-**	**375.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	46.000.000,00	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan							
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		10 Perusahaan	46.000.000,00		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.579.200.000,00	-	325.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		10 Perkara	25.000.000,00		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000,00		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		5 Lembaga	75.000.000,00		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		120 Orang	2.469.200.000,00		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**20.000.000,00**		**215.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**20.000.000,00**		**215.000.000,00**	
1,	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	**-**	**215.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.000.000,00	-	215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	10.000.000,00		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		3 Kepala Keluarga	10.000.000,00		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H					**9.994.483.000,00**		**10.135.500.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2026.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian Kinerja dalam Rencana Kerja 2026 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja (Rencana Kerja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.
3. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan yang ada dalam Renja.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja 2026 yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang 2026.

Pemalang,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG

UMRONI,S.H.M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19701224 199603 1 007

https://jdih.pemalangkab.go.id/

M. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja menjadi pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, pengalokasian anggaran, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang bertujuan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Diskominfo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu penyusunan Renja Diskominfo dapat dikerjakan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Diskominfo, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

Gambar I.1 : Keterkaitan antar Dokumen perencanaan

Dengan demikian Renja (PD) pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra (PD) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja (PD) dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. .

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Diskominfo adalah Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam anggaran perubahan Tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang bertujuan :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA, sehingga Renja berperan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen penganggaran Pembangunan komunikasi dan informatika.
4. Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja, dengan menetapkan indikator, target, serta capaian yang dapat diukur dan dievaluasi setiap tahun.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan, karena Renja Diskominfo disusun dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, berbasis data, dan mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Bab II **Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap rancangan awal RKPD.

Bab III **Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi tujuan dan sasaran Renja serta program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2026. Antara lain memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

Bab IV **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kabupaten Pemalang

Bab V **Penutup**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan angaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat diketahui melalui laporan kinerja dan laporan keuangan.

Renja Diskominfo Kabupaten Pemalang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Diskominfo tahun 2024. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 (lima) program, 11 kegiatan (sebelas) dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari APBD Penetapan Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 11.847.462.600,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) kemudian terdapat pengurangan anggaran / efisiensi anggaran yaitu pada belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan belanja makanan minuman sebesar Rp. 469.173.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menjadi sebesar Rp. 11,378,289,600,- (sebelas miluyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 2,295,240,000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian anggaran yaitu penambahan pokok-pokok pikiran sebesar Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), penambahan DBHCHT sebesar Rp. 245.240.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan penambahan untuk mendukung program prioritas sebesar Rp. 1.917.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah), sehinggan pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025 jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Adalah sebesar Rp. 13,673,529,600,- (tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Seiring berjalannya waktu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan tambahan anggaran Kembali yaitu untuk Publikasi Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selain hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang juga mendapatkan tambahan anggaran dari Silpa DBHCHT Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 23.863.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), serta pengurangan pada belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 67,869,000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 13,789,523,600,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu Pengelolaan Informasi melalui penayangan media dan kerjasama publikasi Pemerintah Daerah dengan media sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

puluh lima juta rupiah), Pelatihan TIK di SMK 1 Petarukan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Pelatihan TIK di Bulakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Pelatihan pada Jaringan Rakyat Nusantara Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga total anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 14,674,523,600,- (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Adapun realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
    - Target Keuangan : Rp 5,941,090,985,-
    - Realisasi Keuangan : Rp 4,903,347,510,-
    - Target Fisik : 6,881 kegiatan
    - Realisasi Fisik : 6,372 kegiatan
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
    - Target Keuangan : Rp 1,422,661,100,-
    - Realisasi Keuangan : Rp 919,944,963,-
    - Target Fisik : 1,695 kegiatan
    - Realisasi Fisik : 2,104 kegiatan
3. Program Aplikasi Informatika
    - Target Keuangan : Rp 2,314,365,735,-
    - Realisasi Keuangan : Rp 1,349,063,882,-
    - Target Fisik : 125 kegiatan
    - Realisasi Fisik : 127 kegiatan
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    - Target Keuangan : Rp 130,263,000,-
    - Realisasi Keuangan : Rp 64,873,700,-
    - Target Fisik : 266 kegiatan
    - Realisasi Fisik : 266 kegiatan
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
    - Target Keuangan : Rp 168,960,600,-
    - Realisasi Keuangan : Rp 148,751,000,-
    - Target Fisik : 43 kegiatan
    - Realisasi Fisik : 43 kegiatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperoleh bahwa realiasasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar Rp. 7.385.981.055,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) atau sebesar 54,55 %. Sedangkan untuk realisasi kinerja per sub kegiatan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

REALISASI KINERJA FISIK T.A 2020
DISKOMINFO
BULAN AGUSTUS

Kode Rekening	Nama Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran (Rp)	Indikator	Output	Perkembangan Fisik				
						Target	%Target	Realisasi	% Realisasi	Deviasi
	BELANJA DAERAH									
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**		13,540,529,600		9348	9,010	96.38%	8,912	95.34%	-1.05%
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		13,053,635,300	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	9035	8,701	96.30%	8,603	95.22%	-1.08%
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG**		8,131,350,415	Jumlah Kegiatan yang	6965	6,881	98.08%	6,372	91.73%	-7.33%
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat D**		104,171,430	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun	17	17	100.00%	14	82.35%	-17.65%
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	23,009,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100.00%	3	60.00%	-40.00%
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	5,457,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	2,726,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4	100.00%	3	75.00%	-25.00%
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	HESTI NURTIANA	72,979,030	Jumlah Laporan Evaluasi	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan**		5,595,071,940		1236	1,216	98.38%	1,232	99.68%	1.29%
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	HESTI NURTIANA	5,578,748,000	Jumlah Orang yang	14	10	71.43%	10	71.43%	0.00%
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	HESTI NURTIANA SUSMAYANTI,S.IP,M.Si	6,259,860	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1216	1,200	98.68%	1216	100.00%	1.32%
2.16.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI NURTIANA	4,916,340	Jumlah Laporan Keuangan	2	2	100.00%	2	100.00%	0.00%
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI NURTIANA	5,147,800	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian**		388,468,400		501	471	94.01%	410	81.84%	-12.18%
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-	HELIN YULIASIH, SH	388,130,000	Jumlah Orang yang	500	470	94.00%	410	82.00%	-12.00%
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	HELIN YULIASIH, SH	338,400	Jumlah Orang yang	1	1	100.00%	-	0.00%	-100.00%
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat**		161,313,590		73	72	98.63%	66	90.41%	-8.22%
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	HELIN YULIASIH, SH	2,897,500	Jumlah Paket Komponen	2	2	100.00%	1	50.00%	-50.00%
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	HELIN YULIASIH, SH	13,390,000	Jumlah Paket Peralatan	7	7	100.00%	6	85.71%	-14.29%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	HELIN YULIASIH, SH	23,180,000	Jumlah Paket Bahan	22	21	95.45%	21	95.45%	0.00%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	HELIN YULIASIH, SH	11,988,000	Jumlah Paket Barang	15	15	100.00%	12	80.00%	-20.00%
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	HELIN YULIASIH, SH	30,469,900	Jumlah Paket	4	4	100.00%	3	75.00%	-25.00%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.16.01.2.06.0005	Fasilitasi Kunjungan Tamu	HELIN YULIASIH, SH	2,110,000	Jumlah Laporan Fasilitasi	3	3	100.00%	3	100.00%	0.00%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	HELIN YULIASIH, SH	81,258,190	Jumlah Laporan	20	20	100.00%	20	100.00%	0.00%
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**		118,222,500		10	10	100.00%	10	100.00%	0.00%
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	HELIN YULIASIH, SH	118,222,500	Jumlah Unit Peralatan dan	10	10	100.00%	10	100.00%	0.00%
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**		1,529,219,425		5034	5,025	99.82%	4,590	91.18%	-8.64%
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HELIN YULIASIH, SH	20,000,000	Jumlah Laporan	5000	5,000	100.00%	4,565	91.30%	-8.70%
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	HELIN YULIASIH, SH	328,190,000	Jumlah Laporan	12	8	66.67%	8	66.67%	0.00%
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	HELIN YULIASIH, SH	24,892,000	Jumlah Laporan	10	9	90.00%	9	90.00%	0.00%
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	HELIN YULIASIH, SH	1,156,137,425	Jumlah Laporan	12	8	66.67%	8	66.67%	0.00%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik**		235,063,130		74	70	94.59%	50	67.57%	-27.03%
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	HELIN YULIASIH, SH	108,580,130	Jumlah Kendaraan Dinas	23	19	82.61%	18	78.26%	-4.35%
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	HELIN YULIASIH, SH	10,000,000	Jumlah Mebel yang	15	15	100.00%	-	0.00%	-100.00%
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	HELIN YULIASIH, SH	36,355,000	Jumlah Peralatan dan	35	35	100.00%	31	88.57%	-11.43%
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	HELIN YULIASIH, SH	83,128,000	Jumlah Sarana dan	1	1	100.00%	1	100.00%	0.00%
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN**		1,464,013,200		1963	1,695	86.35%	2,184	107.18%	30.84%
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan**		1,464,013,200		1963	1,695	86.35%	2,184	107.18%	30.84%
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	KUSNIASIH PUJI	433,850,550	Jumlah aktivitas relasi	22	22	100.00%	22	100.00%	0.00%
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan	KUSNIASIH PUJI	44,112,600	Jumlah Komunitas	5	5	100.00%	3	60.00%	-40.00%
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	KUSNIASIH PUJI	85,015,800	Jumlah permohonan	12	12	100.00%	15	125.00%	25.00%
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan,	KUSNIASIH PUJI	149,837,100	Jumlah rekomendasi	8	7	87.50%	5	62.50%	-25.00%
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi	KUSNIASIH PUJI	628,801,150	Jumlah media komunikasi	4	4	100.00%	4	100.00%	0.00%
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	KUSNIASIH PUJI MAHAYU, S.Kom., M.M	100,383,000	Jumlah Konten Informasi Publik	1812	1,548	85.26%	1953	107.89%	22.63%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber	KUSNIASIH PUJI	32,313,000	Jumlah ASN bidang	100	100	100.00%	100	100.00%	0.00%
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN**		3,458,061,685		127	125	98.43%	127	100.00%	1.57%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di**		3,458,061,685		127	125	98.43%	127	100.00%	1.57%
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE	EDI SUTISYONO,	16,428,525	Jumlah laporan hasil	2	1	50.00%	2	100.00%	50.00%
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	EDI SUTISYONO, SE.,M.Si	6,600,000	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data	1	1	100.00%	-	0.00%	-100.00%
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau	EDI SUTISYONO,	5,600,000	Jumlah dokumen arsitektur	2	1	50.00%	1	50.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau	EDI SUTISYONO,	235,200,000	Jumlah aplikasi khusus	1	1	100.00%	1	100.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi	EDI SUTISYONO,	146,717,160	Jumlah perangkat daerah	40	40	100.00%	41	102.50%	2.50%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra	EDI SUTISYONO,	407,305,000	Jumlah perangkat daerah di	40	40	100.00%	41	102.50%	2.50%
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	EDI SUTISYONO, SE.,M.Si	2,640,100,000	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses Internet yang disediakan	41	41	100.00%	41	100.00%	0.00%
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN**		133,113,700		267	266	99.63%	266	99.63%	0.00%
2.20.02	**PROGRAM**		133,113,700		267	266	99.63%	266	99.63%	0.00%
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik**		133,113,700		267	266	99.63%	266	99.63%	0.00%
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas	TITI RESMIYATI, S.Sos	43,387,700	Jumlah pegawai yang	240	240	100.00%	240	100.00%	0.00%
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik	TITI RESMIYATI, S.Sos	89,726,000	Jumlah kegiatan statistik sel	27	26	96.30%	26	96.30%	0.00%
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN**		353,790,600		46	43	93.48%	43	93.48%	0.00%
2.21.02	**PROGRAM**		353,790,600		46	43	93.48%	43	93.48%	0.00%
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian**		353,790,600		46	43	93.48%	43	93.48%	0.00%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi	TITI RESMIYATI, S.Sos	312,000,000	Jumlah Laporan	5	2	40.00%	2	-60.00%	0.00%
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan	TITI RESMIYATI, S.Sos	41,790,600	Jumlah Perangkat Daerah	41	41	100.00%	41	100.00%	0.00%
			Rp 13,540,529,600							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2
REALISASI KEUANGAN T.A 2025

Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran (Rp)	Indikator	Output	Perkembangan Keuangan									
						Target Keuangan		Realisasi (SP2D)		Deviasi (Rp)		% Realisasi	2025%
	BELANJA DAERAH												
2.16.2.20.2.21.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**		13,540,529,000		9345	Rp	9,977,341,430	Rp	7,385,981,065	-Rp	2,591,360,365	74.03%	54.55%
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		13,053,635,300	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	9835	Rp	9,078,117,620	Rp	7,172,356,155	-Rp	2,905,761,465	74.11%	54.99%
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG**		8,131,550,415	Jumlah kegiatan yang	6945	Rp	5,941,060,985	Rp	4,903,347,510	-Rp	1,037,713,475	82.53%	60.30%
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**		104,171,439	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun	17	Rp	104,414,300	Rp	32,912,300	-Rp	71,502,000	31.52%	31.59%
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HESTI SURYANA SUSMIYANTI, S.ST,M.Si	23,009,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp	23,009,400	Rp	20,512,300	-Rp	2,497,100	89.15%	89.15%
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	HESTI SURYANA SUSMIYANTI, S.ST,M.Si	5,457,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Rp	5,457,000	Rp	4,800,000	-Rp	657,000	87.96%	87.96%
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	HESTI SURYANA SUSMIYANTI, S.ST,M.Si	2,726,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Rp	2,726,000	Rp	2,000,000	-Rp	726,000	73.37%	73.37%
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	HESTI SURYANA	72,979,039	Jumlah Laporan Evaluasi	4	Rp	73,221,900	Rp	5,600,000	-Rp	67,621,900	7.65%	7.67%
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan**		5,266,971,940		1236	Rp	3,941,637,049	Rp	3,326,477,161	-Rp	415,160,479	89.47%	63.09%
2.16.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan	HESTI SURYANA	5,578,748,000	Jumlah Orang yang	14	Rp	3,925,381,500	Rp	3,512,559,411	-Rp	412,821,989	89.48%	62.96%
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	HESTI SURYANA SUSMIYANTI, S.ST,M.Si	6,259,800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1216	Rp	6,193,000	Rp	6,259,750	Rp	66,750	101.08%	100.00%
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI SURYANA	4,916,340	Jumlah Laporan Keuangan	3	Rp	4,916,340	Rp	3,622,000	-Rp	1,294,340	73.67%	73.67%
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	HESTI SURYANA	5,147,800	Jumlah Laporan Keuangan	4	Rp	5,147,800	Rp	4,036,000	-Rp	1,111,800	78.40%	78.40%
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian**		398,448,400		501	Rp	364,151,400	Rp	135,669,401	-Rp	205,438,999	43.78%	40.87%
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	HELIN YULIANTI, SH	398,130,000	Jumlah Orang yang	500	Rp	363,793,000	Rp	135,669,401	-Rp	205,109,999	43.62%	40.85%
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	HELIN YULIANTI, SH	318,400	Jumlah Orang yang	1	Rp	358,400	Rp	-	-Rp	358,400	0.00%	0.00%
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat**		161,313,090		73	Rp	159,913,590	Rp	114,954,078	-Rp	44,959,512	71.89%	71.26%
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	HELIN YULIANTI, SH	2,897,500	Jumlah Paket Komponen	2	Rp	2,897,500	Rp	565,000	-Rp	2,332,500	19.50%	19.50%
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Kantor	HELIN YULIANTI, SH	12,390,000	Jumlah Paket Peralatan	2	Rp	13,390,000	Rp	5,245,000	-Rp	8,145,000	39.17%	39.17%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	HELIN YULIANTI, SH	40,180,000	Jumlah Paket Bahan	12	Rp	21,780,000	Rp	19,180,200	-Rp	2,599,800	88.06%	47.74%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	HELIN YULIANTI, SH	11,998,000	Jumlah Paket Barang	12	Rp	11,998,000	Rp	4,862,850	-Rp	7,135,150	40.53%	40.53%
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	HELIN YULIANTI, SH	36,480,900	Jumlah Paket	6	Rp	36,480,900	Rp	9,740,000	-Rp	16,739,900	46.81%	46.81%
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	HELIN YULIANTI, SH	2,110,000	Jumlah Laporan Fasilitasi	3	Rp	2,110,000	Rp	1,485,000	-Rp	625,000	70.38%	70.38%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	HELIN YULIANTI, SH	81,256,190	Jumlah Laporan	30	Rp	81,256,190	Rp	73,872,928	-Rp	7,383,262	90.91%	90.91%
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**		116,222,500		10	Rp	116,222,500	Rp	116,570,000	-Rp	1,647,500	98.61%	98.61%
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	HELIN YULIANTI, SH	116,222,500	Jumlah Unit Peralatan dan	10	Rp	116,222,500	Rp	116,570,000	-Rp	1,647,500	98.61%	98.61%
2.16.01.2.08	**Pengadaan Jasa Penunjang**		1,529,419,875		5934	Rp	1,037,666,425	Rp	818,117,128	-Rp	200,562,997	78.84%	53.50%
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HELIN YULIANTI, SH	30,000,000	Jumlah Laporan	5000	Rp	30,000,000	Rp	9,030,000	-Rp	10,961,000	63.26%	63.26%
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	HELIN YULIANTI, SH	328,190,000	Jumlah Laporan	12	Rp	218,627,000	Rp	169,145,901	-Rp	49,481,099	77.37%	51.54%
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	HELIN YULIANTI, SH	24,892,000	Jumlah Laporan	10	Rp	21,892,000	Rp	13,392,000	-Rp	8,500,000	61.17%	53.80%
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	HELIN YULIANTI, SH	1,156,137,475	Jumlah Laporan	12	Rp	777,107,425	Rp	636,040,227	-Rp	141,127,198	81.84%	55.02%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik**		236,093,130		74	Rp	219,093,130	Rp	139,617,442	-Rp	79,475,688	63.73%	57.95%
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	HELIN YULIANTI, SH	105,580,130	Jumlah Kendaraan Dinas	23	Rp	85,580,130	Rp	55,456,842	-Rp	30,123,288	64.80%	52.53%
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	HELIN YULIANTI, SH	10,000,000	Jumlah Mebel yang	15	Rp	10,000,000	Rp	-	-Rp	10,000,000	0.00%	0.00%
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	HELIN YULIANTI, SH	36,355,000	Jumlah Peralatan dan	15	Rp	36,355,000	Rp	22,125,600	-Rp	14,229,400	60.86%	60.86%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	[illegible]	83,128,000	Jumlah Sarana dan	1	Rp 83,128,000	Rp 58,035,000	-Rp 25,093,000	69.81%	69.81%
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN**		1,464,013,200		1963	Rp 1,422,661,100	Rp 919,944,963	-Rp 502,716,137	64.66%	62.64%
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan**		1,464,013,200		1963	Rp 1,422,661,100	Rp 919,944,963	-Rp 502,716,137	64.66%	62.64%
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	KUMBIASIH PUJI	423,850,550	Jumlah aktivitas relasi	22	Rp 423,850,550	Rp 214,939,200	-Rp 208,911,350	50.71%	50.71%
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan	KUMBIASIH PUJI	44,112,600	Jumlah Komunitas	5	Rp 44,112,600	Rp 3,494,000	-Rp 40,618,600	7.92%	7.92%
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	KUMBIASIH PUJI	85,015,800	Jumlah permohonan	12	Rp 85,015,800	Rp 34,463,000	-Rp 50,552,800	40.54%	40.54%
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan,	KUMBIASIH PUJI	149,817,100	Jumlah rekomendasi	8	Rp 123,150,700	Rp 60,488,177	-Rp 62,662,323	49.12%	40.37%
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi	KUMBIASIH PUJI	628,601,150	Jumlah media komunikasi	4	Rp 628,601,150	Rp 300,748,336	-Rp 127,852,294	70.66%	70.66%
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	KUMBIASIH PUJI RAHAYU, S.Kom, M.M	100,383,000	Jumlah Konten Informasi Publik	1812	Rp 85,717,500	Rp 78,111,230	-Rp 7,606,270	91.13%	77.81%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber	KUMBIASIH PUJI	32,213,000	Jumlah ASN bidang	100	Rp 32,213,000	Rp 27,701,000	-Rp 4,512,000	85.99%	85.99%
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN**		3,458,061,685		127	Rp 2,314,365,735	Rp 1,349,063,882	-Rp 965,301,853	58.29%	39.01%
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di**		3,458,061,685		127	Rp 2,314,365,735	Rp 1,349,063,882	-Rp 965,301,853	58.29%	39.01%
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE	EDI SUTRISNO,	16,428,525	Jumlah laporan hasil	2	Rp 14,948,573	Rp 13,526,210	-Rp 1,422,363	90.48%	82.33%
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	EDI SUTRISNO, SE., M.Si	6,009,000	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data	1	Rp 5,769,000	Rp -	-Rp 5,769,000	0.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau	EDI SUTRISNO,	5,000,000	Jumlah dokumen arsitektur	2	Rp 4,000,000	Rp -	-Rp 4,000,000	0.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau	EDI SUTRISNO,	235,200,000	Jumlah aplikasi khusus	1	Rp 235,200,000	Rp -	-Rp 235,200,000	0.00%	0.00%
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi	EDI SUTRISNO,	149,717,160	Jumlah perangkat daerah	40	Rp 140,885,160	Rp 130,659,380	-Rp 10,225,780	92.74%	87.29%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra	EDI SUTRISNO,	407,308,000	Jumlah perangkat daerah di	40	Rp 407,308,000	Rp 126,991,500	-Rp 280,006,500	31.03%	31.03%
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	EDI SUTRISNO, SE., M.Si.	2,649,199,000	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan	41	Rp 1,306,255,000	Rp 1,078,476,792	-Rp 427,778,208	71.60%	40.83%
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN**		133,113,700		267	Rp 130,263,000	Rp 64,873,700	-Rp 65,389,300	49.80%	48.74%
2.20.02	**PROGRAM**		133,113,700		267	Rp 130,263,000	Rp 64,873,700	-Rp 65,389,300	49.80%	48.74%
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik**		133,113,700		267	Rp 130,263,000	Rp 64,873,700	-Rp 65,389,300	49.80%	48.74%
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas	TITI RISMIYATI, S.Sos	43,387,700	Jumlah pegawai yang	240	Rp 43,387,700	Rp 30,240,700	-Rp 13,147,000	69.70%	69.70%
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik	TITI RISMIYATI, S.Sos	89,726,000	Jumlah kegiatan statistik sel	27	Rp 86,875,300	Rp 34,633,000	-Rp 52,242,300	39.87%	38.60%
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN**		353,790,600		46	Rp 168,960,600	Rp 148,751,000	-Rp 20,209,600	88.04%	42.04%
2.21.02	**PROGRAM**		353,790,600		46	Rp 168,960,600	Rp 148,751,000	-Rp 20,209,600	88.04%	42.04%
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian**		353,790,600		46	Rp 168,960,600	Rp 148,751,000	-Rp 20,209,600	88.04%	42.04%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi	TITI RISMIYATI, S.Sos	312,000,000	Jumlah Laporan	5	Rp 127,170,000	Rp 123,474,500	-Rp 3,695,500	97.09%	39.58%
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan	TITI RISMIYATI, S.Sos	41,790,600	Jumlah Perangkat Daerah	41	Rp 41,790,000	Rp 25,276,500	-Rp 16,514,100	60.48%	60.48%
			Rp 13,540,529,600				**Rp 7,385,981,055**			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan serta Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Capaian kinerja pelayanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik dapat Adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Tahun 2017-2025

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase ketersediaan informasi publik	Indeks	Na	Na	Na	66,00	70	74	80	88	88
2.	Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	%	Na	Na	Na	1	5,00	15	28	78,8	-
3.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	%	Na	Na	Na	66,00	41,18	75	80	100	100
4.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	Na	Na	Na	27,00	51,30	79	80	80	-
5.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	Na	Na	Na	40,00	50	50	100	100	100
6.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	Na	Na	Na	30,00	40	70	91	100	100
7.	Persentase *Network* terintegrasi	%	20	25	30	70,73	70,73	72	73	88	-
8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Na	Na	Na	70,73	70,73	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2025

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	%	0	0	2	22	31	32	32	-
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Na	Na	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Na	Na	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2025

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	%	Na	0,85	20	41	40	96,3	100	100
2.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Na	Na	20	20	40	32,5	34	-

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2025

2.3 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga merupakan indikator tolak ukur terkait akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 70,60 sehingga mendapat penilaian dengan kategori BB (Sangat Baik), Capaian pada tahun 2024 berhasil menaikkan nilai sebesar 4,35 dengan interpretasi mengoptimalkan menggunakan aplikasi manajemen kinerja, membuat peta proses bisnis dan manajemen risiko serta meningkatkan pencapaian pada seluruh target kinerja.

Nilai pada tahun 2024 tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.6
Evaluasi SAKIP Diskominfo

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	21
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4.	Evaluasi Internal	25	17,50
Jumlah		**100**	**70,60**

Sedangkan untuk Capaian Kinerja Program Prioritas Bupati Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program Internet Gratis Desa Wujud Nyata Visi Misi Bupati Pemalang Menuju Digitalisasi Desa

a) Latar belakang

Kabupaten Pemalang sedang menapaki era transformasi digital yang signifikan. Salah satu bukti nyatanya adalah program Internet Gratis Desa, yang merupakan amanah dari visi misi Bupati Pemalang. Program strategis ini dirancang untuk memutus kesenjangan digital dan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, khususnya yang berada di pelosok desa.

Internet telah berubah dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Akses internet yang cepat dan terjangkau adalah kunci untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pemerintahan yang modern. Namun, tidak semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan pelosok di Pemalang, memiliki akses yang merata ke dunia digital.

Kesenjangan digital ini menghambat potensi pertumbuhan desa. Pelajar kesulitan mengakses materi belajar online, pelaku UMKM terkendala memasarkan produknya secara digital, dan layanan pemerintahan desa pun belum sepenuhnya terintegrasi secara online. Berangkat dari permasalahan inilah, Bupati Pemalang menjadikan Internet Gratis Desa sebagai salah satu program unggulan dalam visi misinya, dengan tujuan menciptakan Pemalang Bercahaya : Bersih, Cakap, Handal dan Mulyayang Maju.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b) Perencanaan

Program Internet Gratis Desa dirancang dengan matang dan terstruktur untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Beberapa aspek perencanaannya meliputi:

1. Pemetaan Daerah: Dilakukan identifikasi terhadap desa-desa yang ada di Kabupetan Pemalang.
2. Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan penyedia layanan internet (ISP) tepercaya untuk memasang alat di titik akses (access point) di lokasi-lokasi strategis.
3. Penganggaran: Mengalokasikan dana APBD yang cukup untuk pembangunan infrastruktur dan biaya operasional selama periode program berjalan.
4. Skema Pelaksanaan Bertahap: Program ini dilaksanakan dalam dua tahap untuk memastikan kualitas dan coverage yang maksimal:

   Tahap Pertama: Menjangkau 93 desa yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Desember 2025.

   Tahap Kedua: Menjangkau 119 desa lainnya dan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Desember 2025.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan program berjalan sesuai dengan skema bertahap yang telah direncanakan :

1. Tahap Pertama (93 Desa dalam 7 Bulan): Tahap ini difokuskan pada desa-desa yang terdekat dari Kantor Kecamatan yang telah tersedia jaringan Fiber Optik untuk memastikan ketepatan waktu dalam memenuhi program 100 Hari Kinerja Bupati Pemalang. Prosesnya meliputi penarikan kabel fiber optik, pemasangan perangkat WiFi di Fasilitas Umum seperti sekolah, Polindes, dan tempat publik lainnya. Masyarakat sudah dapat menikmati akses internet gratis dengan kualitas yang memadai dengan kapasitas bandwith 50 Mbps broadband untuk kegiatan belajar, berusaha, dan berkomunikasi.
2. Tahap Kedua (119 Desa dalam 3 Bulan): Dengan pembelajaran dari tahap pertama, tahap kedua dilaksanakan dengan lebih efisien untuk memperluas jangkauan ke lebih banyak desa. Dalam waktu yang relatif singkat, 3 bulan, tambahan 119 desa memastikan 212 desa terlayani dengan jaringan internet gratis. Keberhasilan dua tahap ini berarti seluruh desa di Kabupaten Pemalang telah merasakan manfaat dari program ini.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tidak hanya sekadar menyediakan akses, program ini diharapkan dapat mengintervensi pasar internet di desa agar lebih berkualitas dan terjangkau oleh Masyarakat, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan internet untuk hal-hal yang produktif dan edukatif agar pembentukan ekosistem digital di desa berkontribusi terhadapa peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa.

d) Penutup

Keberhasilan program Internet Gratis Desa merupakan langkah penting bagi transformasi digital desa di Kabupaten Pemalang. Program ini bukan hanya tentang memberikan fasilitas internet secara cuma-cuma, tetapi lebih tentang membangun jalan digital yang memungkinkan setiap warga, di mana pun berada, untuk bersaing dan berkembang di panggung global.

Program ini adalah wujud nyata dari komitmen Bupati Pemalang dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Dengan terhubungnya seluruh desa, diharapkan dapat memicu gelombang inovasi baru, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Internet Gratis Desa telah menjadi fondasi kokoh di dunia digital.

2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

1) Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai PPID utama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengupayakan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dapat berjalan dengan baik,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

permasalahan yang timbul dalam implementasi UU Keterbukaan informasi publik adalah kesiapan seluruh badan publik untuk menyediakan seluruh layanan informasi publik yang belum menyeluruh, belum semua badan publik termasuk dalam kategori informatif. Hal ini bisa sebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang UU KIP, hingga implementasi yang belum efektif di berbagai badan publik. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagai leading sektor layanan pengaduan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang senantiasa memberikan respon dan tanggapan yang cepat pada aduan yang masuk. Namun pada penyelesaian aduan yang melibatkan OPD lain terkadang masih ada beberapa respon yang lambat dari pengelola aduan di masing-masing OPD sehingga perlu lebih ditingkatkan komitmen dari seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan dukungan pada pengeloaan dan penyelesaian aduan.

2) Permasalahan Pengembangan SPBE

Pelaksanaan SPBE memerlukan fondasi dan regulasi yang kuat dan menyeluruh agar dapat berjalan dengan konsisten, terukur, dan berkelanjutan di instansi pemerintahan. Namun hingaa saat ini ketersediaan regulasi terkait pelaksanaan SPBE belum semua dapat terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan SPBE banyak menghadapi berbagai permasalahan seperti mengintegrasikan berbagai sistem digital yang berjalan secara terpisah, masih terjadinya tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, adanya duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, standardisasi TIK yang belum optimal, pemanfaatan data dan informasi yang bisa dibagai pakai yang belum maksimal sehingga arsitektur SPBE yang tepat dan terarah memberikan peluang untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan terintegrasi dengan baik dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dengan adanya arsitektur yang terintegrasi, data dapat diakses dan dianalisis dengan lebih cepat, yang pada akhirnya akan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diperlukan kolaborasi/cross cutting dengan beberapa perangkat daerah dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan dan implementasi SPBE. Sementara itu, pengembangan SPBE dalam aspek infrastuktur telematika, masalah yang terjadi adalah perkembangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

teknologi menuntut penyesuaian peningkatan keterampilan SDM pengelola, meningkatnya ancaman keamanan siber, ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu perencanaan penganggaran terkait infrastruktur jaringan, perkembangan kebutuhan data dan informasi yang meningkat membutuhkan penyesuaian kemampuan kapasitas infrastruktur jaringan, perlunya peremajaan perangkat jaringan yang usia pemakaiannya sudah melebihi standar, ketergantungan kinerja organisasi pada teknologi digital menuntut penanganan kendala pada infrastruktur jaringan yang lebih cepat serta perubahan regulasi menuntut adanya penyesuaian terhadap pengelolaan infrastruktur jaringan.

3) Permasalahan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam upaya peningkatan pembangunan statistik di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan statistik sektoral yaitu pengelolaan data statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna menghasilkan data statistik yang berkualitas belum dilaksanakan pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai standar. Nilai rata-rata Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pemalang saat ini adalah 2,59 masih dalam kategori cukup, yaitu proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Perangkat daerah masih kesulitan dalam mengidentifikasi kegiatan statistik yang dilakukan. Pembinaan dalam hal identifikasi kegiatan statistik bersama dengan BPS Kabupaten Pemalang kepada seluruh perangkat daerah sudah mulai dilakukan pada tahun 2025 tetapi masih perlu dilakukan pembinaan secara intens kepada masing-masing perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan statistik.

4) Permasalahan Peningkatan Keamanan Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin kompleks. Menjaga keamanan data dan melindungi privasi pengguna adalah tugas krusial, dan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

inovatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengupayakan dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, memitigasi risiko terkait keamanan data dan privasi pengguna, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah risiko keamanan informasi yakni ancaman yang terkait dengan informasi yang disimpan, diolah, dan dipertukarkan oleh sebuah organisasi atau individu. Informasi ini dapat berupa data sensitif seperti informasi keuangan, informasi pribadi, informasi kesehatan, dan informasi rahasia lainnya. Ancaman keamanan informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti *hacker*, virus komputer, kegagalan sistem, kejahatan siber, dan insiden keamanan lainnya. Oleh karena itu, risiko keamanan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan individu. Permasalahan selanjutnya adalah kesadaran keamanan informasi (IT *security awareness*) yang belum menyeluruh pada aparatur di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kesadaran kemananan informasi adalah kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mengenali risiko keamanan informasi serta melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Kesadaran keamanan informasi penting karena dapat membantu organisasi dan individu untuk menghindari serangan siber dan kehilangan data yang sensitif.

2.4.1 Isu strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis berdasarkan tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah. Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah **belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga masih perlu ditingkatkan, termasuk aspek keamanan data yang menjadi landasan penting dalam era digital saat ini. Kurangnya optimalisasi ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan literasi digital di lingkungan pemerintah, serta memastikan perlindungan data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai.

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dijelaskan sesuai tabel berikut ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2026

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Komunikasi dan Informatika														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Rp. 1.428.220.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.719.620.000,00	Rp. 0,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.428.220.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.719.620.000,00	Rp. 0,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 180.620.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 180.620.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 110.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 437.600.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 729.000.000,00	Rp. 0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				Rp. 3.726.600.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.600.000,00	Rp. 0,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 3.726.600.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.600.000,00	Rp. 0,00
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 195.715.000,00	Rp. 47.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 242.715.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.100.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.100.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 79.735.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 79.735.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.955.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 97.955.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 173.952.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 173.952.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 538.120.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 538.120.000,00	Rp. 0
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.818.286.000,00	Rp. 97.870.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.916.900.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.560.491.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.560.491.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 253.429.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 253.429.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.992.310,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.992.310,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.845.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.845.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.950.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.950.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.005.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.005.250,00	Rp. 0
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.250.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 185.306.432,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 185.306.432,00	Rp. 0
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0,00
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.100.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.100.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 331.220.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 331.220.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.501.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.501.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.225.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.225.200.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 182.905.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 182.905.000,00	Rp. 0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 137.995.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 137.995.000,00	Rp. 0
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0
2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.818.280.000,00	Rp. 97.070.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.915.980.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01		Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Rp. 370.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 370.000.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 370.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 370.000.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 308.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 308.000.000,00	Rp. 250.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
2	21	03	3.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Pengendalian Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.000.000,00	Rp. 120.000.000,00
Jumlah									Rp. 12.605.616.000,00	Rp. 448.070.000,00			Rp. 13.053.686.000,00	Rp. 270.000.000,00

Kab. Pemalang,.....
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

JOKO NGATMO, S.E., M.Si.
NIP. 19690825199003 1004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Tujuan

Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Pemalang yaitu "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA" dengan mendukung misi ke 7 (tujuh) Digitalisasi yaitu : Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi

Untuk mengukur keberhasilan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang diatas ditetapkan indikator kinerja Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dengan perhitungan sebagai berikut

No	Nama Perangkat Daerah	Tujuan	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

3.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Sasaran yang akan dicapai Dinas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah tahun 2025-2029 pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dapat dirinci pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi		Indeks Pemerintahan Digital (SPBE)	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Nilai Domain Layanan	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,59	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	
			Nilai Domain Tata Kelola	2,4	3	3,2	3,4	3,6	3,8	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dan sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan Rencana Pendanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1
Rencana Pendanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2026

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Komunikasi dan Informatika														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Rp. 1.428.220.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.719.620.000,00	Rp. 0,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.428.220.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.719.620.000,00	Rp. 0,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 180.620.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 180.620.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0018	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 110.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 437.600.000,00	Rp. 291.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 729.000.000,00	Rp. 0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				Rp. 3.726.600.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.600.000,00	Rp. 0,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 3.726.600.000,00	Rp. 59.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.785.600.000,00	Rp. 0,00
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 195.715.000,00	Rp. 47.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 242.715.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang pasca dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta penerapan Aplikasi Umum SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.100.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.100.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.735.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.735.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.965.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 97.965.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.511.957.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 173.952.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 173.952.000,00	Rp. 0
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 638.128.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 638.128.000,00	Rp. 0
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.818.296.000,00	Rp. 97.870.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.916.966.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 137.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 137.000.000,00	Rp. 0
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	02	2.01	0020	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0
2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.818.280.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.915.950.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01		Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00
2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Rp. 370.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 370.300.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 370.300.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 370.300.000,00	Rp. 370.000.000,00
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 300.300.000,00	Rp. 250.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.575.491.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.560.491.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.560.491.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 253.429.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 253.429.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.992.310,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.992.310,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.845.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.845.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.09	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.950.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.950.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.09	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.005.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.005.250,00	Rp. 0
2	16	01	2.09	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.250.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.250.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.09	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 185.395.432,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 185.395.432,00	Rp. 0
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.320.000,00	Rp. 97.670.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.990.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.584.081.000,00	Rp. 0,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.100.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.100.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 331.220.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 331.220.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.501.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.501.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.225.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.225.200.000,00	Rp. 0
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 182.985.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 182.985.000,00	Rp. 0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	21	03	3.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Pengendalian Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.000.000,00	Rp. 120.000.000,00
Jumlah									Rp. 12.605.696.000,00	Rp. 660.070.000,00			Rp. 13.053.696.000,00	Rp. 370.000.000,00

Kab. Pemalang.....
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

JOKO NGATIMO, S.E., M.Si.
NIP. 196808251998031004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026, sebagai evaluasi atas Rencana Kerja Triwulan III pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidang dan tugas fungsinya, serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026, yang lebih terkoordinasi, sekaligus mencapai Visi Kabupaten Pemalang yaitu:

“ Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan dengan Misi RHAPSODI – Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas “.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2026, kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat kekurangan, Oleh sebab itu diperlukan masukan dan saran dari semua pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang

JOKO NGATMO, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680825 199303 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

N. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun ke depan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan pendanaan program, kegiatan, sub kegiatan untuk satu tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD.
Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Tengah. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025, DPUTR selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPU TR.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

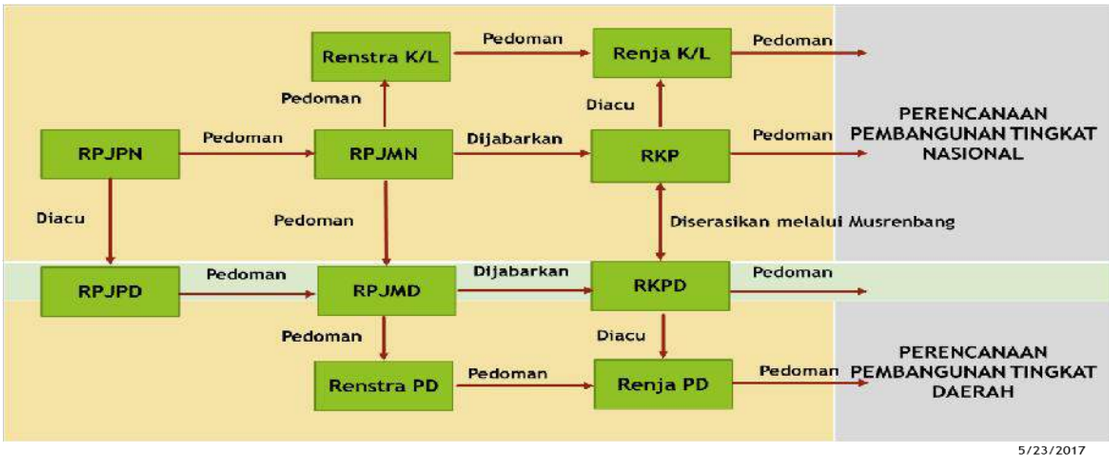

1.2. Landasan Hukum

Renja DPUTR Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPUTR Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 Nomor 93);
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada DPUTR Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 83);
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada DPUTR Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 41);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
29. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Nomor 050/ /Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi sekarang dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
2. Menjadi satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja DPUTR Kabupaten Pemalang;
3. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 dengan Renstra DPUTR Tahun 2021-2026;
4. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkungan DPUTR Kabupaten Pemalang untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renja Pemerintah Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra DPUTR Kab. Pemalang
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
3.2. Tujuan dan sasaran Renja DPU TR Kab. Pemalang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu (2024) dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran kinerja DPUTR disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan – kegiatan dengan uraian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Rencana Capaian Tahun 2025 dapat dilihat pada table II.1.

Pada Tahun 2024 DPUTR mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 149.124.092.264,00** (*Seratus empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) dan realisasinya sebesar **Rp. 142.607.265.023,00** *(Seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah*) atau sebesar 95,63%, sedangkan capaian kinerjanya sebesar 100%. Sehingga terdapat Silpa **Rp. 6.516.827.241,00** (*Enam milyar lima ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*).

Pada Tahun 2025 DPUTR mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 193.579.048.611,-** (*Seratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah*) dan realisasinya sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp. 19.661.428.614,-** *(Sembilan belas milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah*) atau sebesar 12,76% sedangkan capaian kinerjanya sebesar 12,27%.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.1 :
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPUTR DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPUTR s/d TAHUN 2024 DAN TRIWULAN II TAHUN KABUPATEN PEMALANG

Nama Perangkat Daerah: DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran							
		Indeks Reformasi Birokrasi	44,65	44,15					
1.03		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	61,25	60,75		65,60			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
		Instansi Pemerintah (SAKIP)							
III1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	3 dokumen	37,50%
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 ob 12 bulan	130 orang/bulan	130 orang/bulan	100%	14 bulan	8 bulan	57,14%
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	261 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	-	-
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	100 orang	0	0
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	7 paket	7 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	4 paket	4 paket	100%	9 paket	4 paket	44,44%
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	-	-	-	4 paket	2 paket	50%
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	7 paket	7 paket	100%	7 paket	4 paket	57,14%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3240 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=(6/5*100 %)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4*100 %)**
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605 laporan	150 laporan	150 laporan	100%	150 laporan	35 laporan	29,17%
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	29 unit	29 unit	100%	55 unit	0 unit	0
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	3 unit	3 unit	100%	4 unit	4 unit	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	12 laporan	50%
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				100%	164 unit	75 unit	45,73%
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	18 unit	18 unit	18 unit	100%	23 unit	8 unit	34,78%
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 unit	60 unit	60 unit	100%	60 unit	30 unit	50%
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	100%	1 unit	1unit	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**PERSENTASE JARINGAN SUMBER DAYA AIR DALAM KONDISI BAIK**	**68%**				**6339**		
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola**	**30%**	**30%**			**6152**		
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	1,04 km	1,04 km	100%	-	0,65 km	100%
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi	km	3,45 km	3,45 km	100%	0,60 km	0,40 km	66,67%
1.03.02.2.01.103	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	km	0,25 km	0,25 km	100%	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.02.2.01.109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1100 km	0,72 km	0,72 km	100%	1,80 km	0	0
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi		1 unit	1 unit	100%	0,34 km	0	0
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Jaringan Irigasi Yang Dikelola**	**90%**	**70%**			**70%**		
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	4,23 km	4,23 km	100%	0,74 km	0	0%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	1,18 km	1,18 km	100%	O,16 km	0,16 km	10O%
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun	dok	5 dok	5 dok	100%	2 dok	0	0
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM LAYAK BAGI MASYARAKAT DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN**	**92%**	**87%**			**88%**		
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem**	**Cakupan rumah tangga yang mendapatkan**	**17.879 SR**				**4126 SR**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)**							
1.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang ditingkatkan	Liter/dtk	2,5 ltr/dtk	2,5 ltr/dtk	100%	27,5 liteer/detik	0	0
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun	Liter/dtk	37,5 ltr/dtk	37,5 ltr/dtk	100%	-	-	-
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**PERSENTASE SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN SESUAI STANDAR**	**55%**						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi**	**46%**						
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	66	66	100%	233,08	0	0
1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan system pengelolaan persampahan	JUmlah msayarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan system pengelolaan persampahan	orang	50	50	100%	-	-	-
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari	6	6	100%	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK**	**97%**	**91,7**					
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**49%**	**91,7**			**93%**	**-**	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) terpusat skala permukiman yang dibangun	m2/hari	2.235 m2/hari	2.235 m2/hari	100%	1.080 m3/hari	0	0
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan Sistem	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem	orang	50 org	50 org	100%	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**PERSENTASE JARINGAN DRAINASE DALAM KONDISI BAIK**	**82%**	**75%**	**75,20%**	**104,44**	**74%**		
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi**		**75%**	**75,20%**	**104,44**	**74%**		
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	Sistem drainase	4 Sistem drainase	4 Sistem drainase	100%	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH DALAM KONDISI BAIK SESUAI TERTIB ADMINISTRASI TATA BANGUNAN**							
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**	**dokumen**	**145 dokumen**	**145 dokumen**	**100%**			
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan Gedung	Jumlah bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Kabupaten/Kota yang	Gedung	7 gedung	7 gedung	100%	3 gedung	1	33,33%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
	untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten/Kota	dipellihara, dirawat dan diperiksa berkala							
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti KepemilikanBangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA),Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	dokumen	200 dokumen	200 dokumen	100%	150 dok	145 dok	96,67%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**PERSENTASE KESESUAIN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DENGAN PERATURAN DAN PERENCANAAN TATA BANGUNAN**	**20%**	**20%**					
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kawasan yang dibangun/ditata**	**9 kawasan**	**3 kawasan**	**3 kawasan**	**100%**			
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan LingkunganKawasan Cagar Budaya, KawasanPariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem PerkotaanNasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
	Kawasan Strategis Lainnya								
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PERSENTASE PANJANG JARINGAN DALAM KONDISI MANTAP**	**78,4%**	**72,52%**	**75,05%**	**107,27%**			
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap**	**78,4%**	**72,52%**	**75,05%**	**107,27%**			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis PengembanganJaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	dokumen	33 dokumen	33 dokumen	100%	28 dok	16 dok	57,14%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	km	13,43 km	13,43 km	100%	18,93 km	0	0
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan berkala jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	km	1,22 km	1,22 km	100%	5,93 km	0	0
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	km	4,46 km	4,46 km	100%	8,60 km	0	0
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	jembatan	9 jembatan	9 jembatan	100%	9 jembatan	0	0
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	jembatan	1 jembatan	1 jembatan	100%	1 jembatan	0	0
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan/jembatan yang disurvey kondisinya	km	765,72 km	765,72 km	100%	765,72 km	0	0
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	km	58 km	58 km	100%	38,70 km	7,64 km	19,74%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**PERSENTASE PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI**	**10%**	**10%**	**9%**	**90%**			
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**	**Rasio tenaga operator/teknis/analis is yang memiliki sertifikat standar kompetensi**	**%**	**1,52%**	**1,52%**	**100%**			
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	0	0
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan**	**Jumlah jenis informasi Tingkat kabupaten pasa Sistem Informasi**							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
	daerah Kabupaten/kota	**Jasa Konstruksi (SIPJAKI)**							
1.03.11.2.02.0013	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dok	0	0
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah**	**100%**	**100%**	**100%**				
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Persentase Peraturan rencana detail tata ruang yang diterbitkan**	**100%**						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dok	1 dok	33,33%
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun**	**100%**						
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RTRW KAB/KOTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RTRW kab/kota		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dok	0	0
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR KAB/KOTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RRTR kab/kota		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dok	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100 %)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100 %)
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	2 dok	0	0
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	5 dok	0	0
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersusunnya dokumen pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang**	**100%**						
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 Dok	1 dok	33,33%

Sumber : DPUTR Kab. Pemalang Th. 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dari capaian realisasi anggaran maupun hasil evaluasi renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagaimana dipaparkan dalam tabel II.1 di atas secara umum dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 DPUTR Kabupaten Pemalang terdiri dari 11 program, 21 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan (sudah termasuk sub kegiatan yang dilaksanakan oleh UPJI). Sedangkan hasil evaluasi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   Dari sisi kinerja program/kegiatan yang telah direncanakan, keseluruhannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana kerja (renja perubahan).
b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target hasil/keluaran yang direncanakan :
   Dari hasil evaluasi program/kegiatan, pada saat pertengahan tahun terdapat beberapa kali pergeseran anggaran, hal ini dapat mempengaruhi capaian kinerja, seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah direncanakan.
c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
   Dari evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, meskipun secara target kinerja semua kegiatan sudah memenuhi target, tapi sebenarnya masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah :
   1. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.
   2. Anggaran yang tidak mencukupi atau pembiayaan yang terlambat bisa menghambat pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
   3. Penggunaan teknologi yang usang atau peralatan yang tidak memadai dapat mengurangi produktivitas dan kualitas kerja
   4. Cuaca buruk, seperti hujan deras dan banjir, dapat menghambat pelaksanaan proyek konstruksi dan menyebabkan keterlambatan.
   5. Perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak terduga bisa mempengaruhi jalannya proyek dan memerlukan penyesuaian yang memakan waktu.
d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
   Terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung terhadap capaian program dan target yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penggangaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :
   1. Peningkatan Kapasitas Perencanaan
   2. Manajemen Risiko yang Proaktif
   3. Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif
   4. Perencanaan yang Fleksibel
   5. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Pemalang saat ini sedang menyusun Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Sesuai dengan amanat dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, terdapat 56 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Adapun Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Tahun 2025-2045 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL II.2
REALISASI DAN TARGET INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)
RPJPD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2045

No	INDIKATOR SASARAN POKOK/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Satuan	REALISASI					TARGET KABUPATEN					Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Baseline 2025 Kab	PERIODE I	PERIODE II	PERIODE III	PERIODE IV		
									2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	
36	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	75,6	68,66	68,28	73	69,43	70	74	79	84	90	Sedang	Realisasi target kemantapan jalan dipengaruhi oleh kemampuan pengalokasian APBD Kabupaten Pemalang pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan rencana kebutuhan per tahun
38	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	47,02	48,65	50,37	52,45	53,95	50,29	51,29	52,54	53,79	55,29	Optimis	Kebutuhan anggaran terpenuhi sesuai dengan rencana target yang ditelah buat
39	Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	NA	46	52,32	53,06	52,97	54	58,48	66,8	72,00	74,83	Sedang	di tahun ini ada Rehab DI walaupun belum memenuhi tapi dapat meningkatkan nilai IKSI
43	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	15,46	18,37	19,63	21,95	23,66	28,51	34,51	42,01	49,51	58,51	Optimis	Kebutuhan anggaran terpenuhi sesuai dengan rencana target yang ditelah buat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPUTR

Kinerja DPUTR dalam memberikan pelayanan publik diukur dengan beberapa indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Perumusan indikator kinerja utama yang digunakan pengukur kinerja DPU TR berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026.

Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan DPUTR untuk periode lima tahun sebagaimana tertera pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 serta Renstra DPUTR tahun 2021-2026, adalah: Persentase bangunan Gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan; Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan; Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik; Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar; Persentase drainase dalam kondisi baik; Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah, Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik+sedang); Indeks Kinerja Sistem Irigasi dan Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah sesuai RTRW.

Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUTR tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra DPUTR ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DPUTR dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DPUTR, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Tahun 2024 sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL II.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPUTR KABUPATEN PEMALANG TH. 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	SPM	IKU	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		
						2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	CATATAN ANALISIS
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%		V		1,76	2,56	3,36	4,16	1,81	4,04	4,99	4,99	
2	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	V	V	V	87	88	89	90	88,01	90,05	88,48	91	
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestic	%	V	V	V	91,7	93	94	95	99,49	95,72	93,99	96	
4	Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%		V		20	22,5	25	35	20,02	25	25	45	
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	%		V		72	74	76	78	76,06	76,55	76,62	80	
6	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	%		V		93,7	94,28	95,77	97,27	96,98	97,04	97,42	98,74	
7	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%		V	V	63,65	66,64	69,53	72,52	73	69,43	75,05	75,41	
8	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%		V		48	50	52	53	53,06	52,97	51,77	55	
9	Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah	%		V		100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : DPUTR Kab. Pemalang Th. 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Penjelasan pencapaian kinerja DPUTR Kab. Pemalang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. ***Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan***

   Indikator kinerja ***Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan*** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Jumlah total bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik ÷ total bangunan gedung pemerintahan) x 100%.** Di tahun 2024 realisasi bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan sebesar 4,99%. Realisasi ini diperoleh dari pembagian bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sebanyak 314 unit dan jumlah total bangunan gedung pemerintahan sebanyak 6292 unit.

   Adapun keberhasilan kinerja dalam hal pelaksanaan pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan oleh DPUTR Kab. Pemalang adalah terpenuhinya target waktu/time line pengadaan sesuai rencana, tidak terdapat gagal tender/pengulangan dalam pengadaan, serta maksimalisasi perencanaan pembangunan dan pengawasan konstruksi agar tepat waktu, tepat mutu.

   Hal yang masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten dalam hal pencapaian sasaran kinerja adalah pembangunan gedung kantor yang menjadi objek sasaran pencapaian tidak secara khusus dilaksanakan oleh DPUTR selaku dinas teknis, namun di tiap OPD non teknis juga melakukan pembangunan gedung kantor. Adapun salah satu kendala adalah pendataan bangunan gedung kantor untuk keseluruhan gedung kantor yang tercatat menjadi milik Pemda Pemalang.

2. ***Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan***

   Indikator kinerja ***Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan*** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Jumlah penduduk terlayani akses air bersih ÷ Jumlah penduduk Pemalang) x 100%.** Di tahun 2024 realisasi Cakupan Penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum sebesar 88,48 persen. Realisasi ini diperoleh dari pembagian Jumlah penduduk terlayani akses air bersih sebesar 1.382.493 Jiwa dan Jumlah penduduk Pemalang sebesar 1.562.558 jiwa.

   Penurunan Realisasi Cakupan Penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum pada tahun 2024, dari 90,05% pada tahun 2023 menjadi 88,48% di tahun 2024. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh kendala operasional pada sistem penyediaan air minum, keterbatasan kapasitas Infrastruktur yang tersedia, dan Keterbatasan Anggaran Penyediaan Air

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Minum, serta meningkatnya Jumlah Penduduk yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh Jaringan pelayanan Air Minum yang ada

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa prosentase laju pertumbuhan jumlah penduduk (jiwa) sangat berpengaruh pada pencapaian akses air minum, sehingga pada saat perencanaan penganggaran juga perlu memperhitungkan laju perumbuhan penduduk tersebut agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja sesuai target. Hal yang telah dilakukan antara lain dengan keterbatasan anggaran yang ada tetap dioptimalkan secara bertahap untuk pencapaian target output, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi/lainnya untuk dapat ikut mengintervensi akses air minum, dan mendorong pemicuan dan pemacuan kepada masyarakat maupun KPSPAMS di perdesaan agar ikut serta mengembangkan akses air minum dari sarana dan prasarana yang telah disediakan.

3. ***Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik***

   Indikator kinerja ***Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik*** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Jumlah rumah tangga yg terlayani akses air limbah domestik ÷ Jumlah penduduk Pemalang) x 100%.** Di tahun 2024 realisasi rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air limbah sebesar 93,99 persen. Realisasi ini diperoleh dari pembagian Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 489.531 KK dengan Jumlah Rumah Tangga/KK Pemalang sebesar 520.853 KK. Realisasi di tahun 2024 tersebut lebih rendah daripada realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 sebesar 95,72 persen.

   Penurunan kinerja layanan pengelolaan air limbah domestik disebabkan oleh terbatasnya cakupan infrastruktur pengolahan limbah yang tersedia hal tersebut relevan dengan Porsi Anggaran yang kurang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah, serta kendala operasional seperti kurangnya perawatan berkala pada sistem sanitasi. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk/Rumah Tangga/KK dan pemukiman baru yang belum sepenuhnya terlayani turut memberikan tekanan terhadap kapasitas layanan yang ada.

4. ***Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar***

   Indikator kinerja ***Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar*** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Jumlah sarana persampahan (TPA/TPS/TPST/TPS3R) yang terbangun ÷ Jumlah total kebutuhan ideal sarpras persampahan) x 100%.** Pada tahun 2024, realisasi indicator *Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar* sebesar 25 persen, dengan target 25%.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Realisasi ini diperoleh dari pembagian jumlah sarana persampahan sebesar 167 unit dan jumlah total kebutuhan ideal sarpras persampahan sebesar 669 unit. Persentase sarana dan prasarana persampahan dan memenuhi target, di tahun 2024 sama dengan capaian Tahun 2023 yaitu 25 persen.

5. ***Persentase drainase dalam kondisi baik***

   Indikator kinerja ***Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik*** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Panjang drainase dalam kondisi baik ÷ Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan) x 100%.** Di tahun 2024 realisasi drainase dalam kondisi baik sebesar 76,62 persen. Realisasi ini diperoleh pembagian dari panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 339.579 meter dan panjang drainase keseluruhan sebesar 443.173 meter.

   Apabila dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2023 menunjukkan peningkatan positif. Drainase dalam kondisi baik di tahun 2021 mencapai 75,20 persen. Sedangkan realisasi di tahun 2022 sebesar 76,06 persen. Kegiatan yang dilakukan merupakan normalisasi saluran drainase sesuai ketersediaan anggaran dan kebutuhan penanganan darurat.

6. ***Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah***

   Indikator kinerja ***Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah*** dihitung dengan menggunakan rumus = **(Panjang jalan kabupaten yang terkoneksi ÷ Panjang jalan kabupaten) x 100%.**

   Pada tahun 2024, realisasi indikator *Panjang jalan kabupaten yang terkoneksi* sebesar 97,42 persen atau sepanjang 745,96 Km, diperoleh dari panjang jalan kabupaten yang terkoneksi sepanjang 745,96 km dibagi panjang jalan kabupaten yaitu 765,72 km dikalikan 100%. Sehingga mencapai target konektivitas 97,27%.

   Peningkatan Konektivitas antar wilayah dapat terealisasi karena adanya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan penyelenggaran jalan dan juga memperhatikan skala prioritas ruas jalan yang akan ditangani untuk tujuan konektivitas antar wilayah.

7. ***Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)***

   Indikator kinerja *Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi mantap (baik+sedang)* dihitung dengan menggunakan rumus = **(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ÷ Panjang seluruh jalan kabupaten) x 100%.** Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/648/Tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Pemalang, dengan Panjang jalan kabupaten sepanjang 765,72 Km.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pada tahun 2024, realisasi indikator *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap* sebesar 75,05 persen atau sepanjang 574,52 Km, dengan target kondisi jalan mantap sebesar 72,52%.

Jalan Mantap adalah Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Target kinerja Kemantapan Jalan dapat terealisasi karena adanya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan perbaikan jalan, perencanaan jenis penanganan perbaikan jalan yang sesuai dengan kondisi tingkat kerusakan jalan, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga, untuk penanganan cepat pemeliharaan rutin dilaksanakan dengan cara swakelola.

8. ***Indeks Kinerja Sistem Irigasi***

Pencapaian IKSI per Daerah Irigasi dihitung dengan rumus =**(Penjumlahan dari prosentase Aspek Kondisi Prasarana Fisik (45%) + Aspek Produktivitas Pertanian (15%) + Aspek Sarana Penunjang (10%) + Aspek Organisasi Personalia (15%) + Aspek Dokumentasi (5%) + Aspek Kondisi P3A (10%).**

Pada tahun 2024 ada 36 (tiga puluh enam) Daerah Irigasi (DI) yang dilakukan pembaruan nilai iksi yaitu D.I. Welutputih, D.I. Rowokajar, D.I. Lenggerong, D.I. Simpur 2, D.I. Surajaya, D.I. Wregu, D.I. Curugwatang, D.I. Wadasminah, D.I. Siebeg, D.I. Rengas, D.I. Sidok, D.I. Nambo, D.I. Rejasa, D.I. Lanjiladang, D.I. Munding, D.I. Balaikambang, D.I. Glandang, D.I. Badak, D.I. Curug Duwur, D.I. Genting, D.I. Jatiyem, D.I. Kedunggong, D.I. Kenyere, D.I. Kramat Bawah, D.I. Pagedangan, D.I. Plakran I, D.I. Plakaran II, D.I. Rembul, D.I. Sinini, D.I. Sulang, D.I. Tandon, D.I. Tengkolo, D.I. Tracak, D.I. Wanalaya, dan D.I. Winong. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- ***Daerah Irigasi Balaikambang***

  D.I. Balaikambang memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **54,53%** ,dengan rincian :

  1. Prasarana fisik = 17,61 % dari kondisi maksimal 45%
     - kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang, serta pintu air yang mengalami kerusakan
     - Kondisi saluran pembawa kurang mencakup kapasitas air karena terdapat sedimentasi
     - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi
- Akses jalan masuk ke Bendung Balaikambang harus melewati pemukiman jalan desa
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Bendung Balaikambang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas

2. Produktifitas tanam = 12,97% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.2, MT.3 tersedia air
   - Produktifitas padi sebesar 4 ton/ha
3. Sarana penunjang = 5,24% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,70% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,98 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 7,03 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Rowokajar***

D.I. Rowokajar memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **61,50 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 23,33 % dari kondisi maksimal 45%
   - kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air sudah dipasang,
   - Kondisi saluran pembawa sudah mencakup kapasitas air karena telah dilakukan rehabilitasi saluran sekunder
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa sudah dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan pengatur muka air, kondisi bangunan sudah direhabilitasi.
   - Terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi
   - Akses jalan masuk ke Bendung Rowokajar sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati pematang sawah
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Bendung Rowokajar.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas

2. Produktifitas tanam = 10,97% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi sebesar 4 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,58 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 10,77 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang dimaksimalkan
5. Dokumentasi = 3,18 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 6,68 % dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang dimaksimalkan

- ***Daerah Irigasi Kedungbelis***

D.I. Kedungbelis memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar 58,81 **%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 23,16 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung sudah dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, serta pintu air telah diperbaiki,
   - Kondisi saluran pembawa sudah mencakup kapasitas air karena telah dilakukan rehabilitasi saluran sekunder,
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air, kondisi bangunan telah direhabilitasi pada tahun 2022, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi
   - Akses jalan masuk ke Bendung Kedungbelis telah diperbaiki karena menuju tempat wisata Curug Bengkawah
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Bendung Kedungbelis. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas
2. Produktifitas tanam = 12,79 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi sebesar 4,00 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,03 % dari kondisi maksimal 10%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

4. Organisasi personalia = 8,77 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,9 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 5,16 % dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Welut Putih***

D.I. Welut Putih memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **59,72 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 22,25 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang, serta pintu air yang mengalami kerusakan
   - Kondisi saluran pembawa kurang mencakup kapasitas air karena terdapat sedimentasi
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasitersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi
   - Akses jalan masuk ke Bendung Welut Putih harus melewati jalan desa dan hanya ada 1 akses jalan masuk.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Bendung Welut Putih. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas
2. Produktifitas tanam = 13,36% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi sebesar 4,2 ton/ha
3. Sarana penunjang = 5,79 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 9,07 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,9 % dari kondisi maksimal 5%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kurang lengkap data dokumentasi

6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 6,35 % dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Lenggerong***

D.I. Lenggerong memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **48,56 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 17,43% dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bangunan pompa belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang, serta pengoperasian mesin pompa yang tidak sesuai dengan Pedoman Tata Tanam yang disepakati oleh Pemerintah.
   - Kondisi saluran pembawa kurang mencakup kapasitas air karena terdapat sedimentasi.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
   - Akses jalan masuk ke pompa lenggerong berada dipinggir jalan nasional.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi Pompa Lenggerong. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 13,98 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5 ton/ha
3. Sarana penunjang = 5,5 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 7,14% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 1,5% dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- ***Daerah Irigasi Simpur II***

  D.I. Simpur II memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **42,58%** ,dengan rincian :

  1. Prasarana fisik = 12,33 % dari kondisi maksimal 45%
     - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
     - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
     - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
     - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
     - Akses jalan masuk ke Bendung simpur II sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
     - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Simpur II. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
  2. Produktifitas tanam = 13,28% dari kondisi maksimal 15%
     - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
     - Produktifitas padi rata- rata sebesar 4,00 ton/ha
  3. Sarana penunjang = 5,6% dari kondisi maksimal 10%
     - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
  4. Organisasi personalia = 6,86% dari kondisi maksimal 15%
     - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
  5. Dokumentasi = 1,5% dari kondisi maksimal 5%
     - Kurang lengkap data dokumentasi
  6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
     - Perkumpulan petani kurang memadai

- ***Daerah Irigasi Surajaya***

  D.I. Surajaya memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **54,60 %** ,dengan rincian :

  1. Prasarana fisik = 24,61% dari kondisi maksimal 45%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Surajaya masuk areal wisata WIPPAS Kabupaten Pemalang.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Surajaya. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 14,39% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,00 ton/ha
3. Sarana penunjang = 4,6% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 6,5% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 1,5% dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Wregu***

D.I. Wregu memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **54,25 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 20,01 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Wregu sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Wregu. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 12,45% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 (masa tanam) sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,20 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,8% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,5% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,5% dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Curugwatang***

D.I. Curugwatang memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **60,57 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 20,19% dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Akses jalan masuk ke Bendung Curugwatang sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Curugwatang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 13,98% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 3 ton/ha
3. Sarana penunjang = 7% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 10,50% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 1,9% dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 7% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Wadasminah***

D.I. Wadasminah memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **66,22%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 24,28% dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
   - Akses jalan masuk ke Bendung Wadasminah sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Wadasminah. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Produktifitas tanam = 12,19% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 3 ton/ha
3. Sarana penunjang = 7,6% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 11,15% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,65% dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 7,36% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

- ***Daerah Irigasi Siebeg***

  D.I. Siebeg memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **59,32%**, dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 17,34% dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
   - Akses jalan masuk ke Bendung Siebeg sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Siebeg. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 13,98% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 3 ton/ha
3. Sarana penunjang = 7% dari kondisi maksimal 10%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

4. Organisasi personalia = 10,50% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,5% dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 7% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Rengas***

D.I. Rengas memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **47,13%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 18,74% dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
   - Akses jalan masuk ke Bendung Rengas sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Rengas. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 4,67% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,50 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,2% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 10,18% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,9% dari kondisi maksimal 5%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kurang lengkap data dokumentasi

6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 4,44% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Sidok***

D.I. Sidok memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **36,52%** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 12,25% dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
   - Akses jalan masuk ke Bendung Sidok sangat jauh dari jalan terdekat serta melewati saluran sekunder.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Sidok. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 3,27% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,73 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,4% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,10% dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3% dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- ***Daerah Irigasi Nambo***

  D.I. Nambo memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **57,44 %** ,dengan rincian :

  1. Prasarana fisik = 24,83 % dari kondisi maksimal 45%
     - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
     - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
     - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
     - Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
     - Akses jalan masuk ke Bendung Nambo berada di jalan kabupaten lintas kecamatan.
     - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung nambo. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
  2. Produktifitas tanam = 13,20% dari kondisi maksimal 15%
     - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
     - Produktifitas padi rata- rata sebesar 4,71 ton/ha
  3. Sarana penunjang = 5,90% dari kondisi maksimal 10%
     - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
  4. Organisasi personalia = 6,00% dari kondisi maksimal 15%
     - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
  5. Dokumentasi = 3,3% dari kondisi maksimal 5%
     - Kurang lengkap data dokumentasi
  6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 4,2% dari kondisi maksimal 10%
     - Perkumpulan petani kurang memadai

- ***Daerah Irigasi Rejasa***

  D.I. Rejasa memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **55,11 %** ,dengan rincian :

  1. Prasarana fisik = 19,65 % dari kondisi maksimal 45%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat saluran pembuang pada jaringan irigasi.
- Akses jalan masuk ke Bendung Nambo berada di jalan kabupaten lintas kecamatan.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung nambo. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 13,68% dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 6,11 ton/ha
3. Sarana penunjang = 5,34% dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,94% dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,90 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 4,60 % dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Lanjiladang***

D.I. Lanjiladang memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **58,45 %**, dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 22,30 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 12,22 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 4,10 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,54 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,45 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 5,14 % dari kondisi maksimal 10%
   - Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Munding***

D.I. Munding memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **55,78 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 16,70 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung belum dilengkapi dengan keamanan bendung, pemantauan tinggi muka air yang akurat, pemeliharaan yang kurang.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Produktifitas tanam = 13,66 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 4,00 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,96 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 9,41 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,25 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 5,80 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Glandang***

D.I. Glandang memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **29,71 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 5,54 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 0,00 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi tidak terpenuhi karena mesin pompa tidak beroperasi
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 0,00 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,09 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Organisasi personalia = 9,73 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,70 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 5,64 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Badak***

D.I. Badak memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **50,05 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 13,48 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 14,37 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,88 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,90 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- ***Daerah Irigasi Curug Duwur***

D.I. Curug Duwur memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **46,25 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 12,95 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 11,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,74 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

- ***Daerah Irigasi Genting***

D.I. Genting memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **48,52 %**, dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 20,83 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 6,49 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,00 ton/ha
3. Sarana penunjang = 7,00 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,70 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Jatiyem***

D.I. Jatiyem memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **48,82 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 13,89 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 13,13 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,73 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Kedunggong***

D.I. Kedunggong memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **47,74 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 13,84 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 14,84 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,64 ton/ha

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Sarana penunjang = 6,14 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,42 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 1,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Kenyere***

D.I. Kenyere memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **50,14 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 13,65 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 14,89 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,80 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,20 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,90 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Kramat Bawah***

D.I. Kramat Bawah memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **45,75 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 11,23 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 13,52 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,71 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,20 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,30 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Pagedangan***

D.I. Pagedangan memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **47,29 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 14,61 % dari kondisi maksimal 45%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 12,04 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,20 ton/ha
3. Sarana penunjang = 5,19 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,95 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Plakaran I***

D.I. Plakaran I memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **44,48 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 9,93 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 12,95 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,73 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,30 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Plakaran II***

D.I. Plakaran II memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **46,62 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 9,95 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Produktifitas tanam = 14,87 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,73 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Rembul***

D.I. Rembul memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **41,80 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 14,46 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 6,14 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,88 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,20 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Sinini***

D.I. Sinini memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **54,37 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 19,52 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 12,89 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,73 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,66 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- ***Daerah Irigasi Sulang***

D.I. Sulang memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **33,14 %**, dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 9,50 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 1,84 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,63 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

- ***Daerah Irigasi Tandon***

D.I. Tandon memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **48,08 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 13,59 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
- Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 12,69 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,20 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***<u>Daerah Irigasi Tengkolo</u>***

D.I. Tengkolo memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **52,74 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 19,07 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.

2. Produktifitas tanam = 11,88 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,80 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Tracak***

D.I. Tracak memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **49,96 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 17,03 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 11,12 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,20 ton/ha

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%

- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Wanalaya***

D.I. Wanalaya memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **50,10 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 13,47 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 14,84 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,63 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,80 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,50 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 3,50 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

➢ ***Daerah Irigasi Winong***

D.I. Winong memiliki besaran Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar **45,78 %** ,dengan rincian :

1. Prasarana fisik = 13,25 % dari kondisi maksimal 45%
   - Kondisi bangunan utama bendung hancur, suplay air irigasi dibantu dengan pompa. Namun saat ini kondisi pompa sudah tidak dapat digunakan karena baling - baling mesin penyedot rusak.
   - Kondisi saluran pembawa cukup mencakup kapasitas air namun banyak bobolan air untuk petak sawah sehingga banyak terjadi keruntuhan dinding saluran.
   - Kondisi bangunan pada saluran pembawa tidak dilengkapi dengan pintu pengatur air dan papan operasi tersier, kondisi bangunan mengalami kerusakan, serta kegiatan pemeliharaan tidak rutin.
   - Tidak terdapat rumah jaga bendung di lokasi, serta kantor UPJI yang berlokasi agak jauh dari lokasi bendung Lanjiladang. Disamping itu kelengkapan untuk pemeliharaan sangat kurang dan SDM terbatas.
2. Produktifitas tanam = 12,29 % dari kondisi maksimal 15%
   - Pemenuhan air irigasi untuk kebutuhan sawah terpenuhi dalam kondisi MT. 1 sampai MT.3
   - Produktifitas padi rata- rata sebesar 5,64 ton/ha
3. Sarana penunjang = 6,20 % dari kondisi maksimal 10%
   - Tidak lengkap peralatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, transportasi kurang memadai, serta alat komunikasi yang kurang
4. Organisasi personalia = 8,34 % dari kondisi maksimal 15%
   - Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
5. Dokumentasi = 2,70 % dari kondisi maksimal 5%
   - Kurang lengkap data dokumentasi
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) = 3,00 % dari kondisi maksimal 10%
- Perkumpulan petani kurang memadai

Sehingga realisasi indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Tahun 2024 sebesar **55,33 %.** Diperoleh dari rata - rata dari hasil pencapaian dari 36 (tiga puluh enam) D.I. tersebut diatas.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi pada tahun 2023 adalah **52,97%** sedangkan pada tahun 2022 adalah 53,06%. Dari angka tersebut ada kenaikan sebesar 2,36 %, dikarenakan pekerjaan fisik yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 (dua) lokasi dengan nilai Rp 10.878.068.000,-

Indeks Kinerja Sistem Irigasi merupakan penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015, tentang Penilaian Indeks Kinerja Daerah Irigasi. Bila dikatakan Kondisi Daerah Irigasi bagus apabila mencapai angka minimal 70 % sesuai Peraturan Mentri PUPR.
Hal yang masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten adalah upaya menjadikan indeks kinerja sistem irigasi menjadi baik, selain kegiatan rehabilitasi pemerintah dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air juga memperhatikan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, dimana kegiatan O&P sangat penting untuk dilaksanakan setelah pekerjaan rehabilitasi ataupun pembangunan Jaringan Irigasi.

9. *Persentase pemanfaatan tata ruang wilayah*

Meningkatnya kebutuhan ruang di Kabupaten Pemalang sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, disisi lain keberadaan lahan tetap dan terbatas. Sebagai bentuk upaya penataan pada ruang agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang seimbang antara kepentingan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kegiatan investasi.
Kegiatan pembangunan yang memanfaatakan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Kegiatan yang sesuai dengan penataan ruang diharapkan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun lingkungan. Penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketaatan terhadap RTRW adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\ \%$$

Dalam proses pemberian izin usaha di Kabupaten Pemalang salah satu pertimbangan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang ada sehingga tingkat ketaatan terhadap RTR di Kabupaten Pemalang sudah 100% karena jika tidak sesuai dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

peruntukan dalam Tata Ruang tidak akan mendapatkan izin yang dibutuhkan. Hal yang masih menjadi tantangan Pemerintah kabupaten adalah upaya lebih menyadarkan lagi pada masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan memang diakui Pemerintah, namun penggunaannya yang diatur untuk keserasian fungsi kawasan lindung dan budidaya. Selama ini, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa lahan milik mereka akan bebas untuk digunakan apa saja, tidak peduli arahan fungsi ruangnya sebagai kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Sebagai acuan dalam pemberian Informasi Tata Ruang sebelum tahun 2018 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2031, sedangkan pada tahun 2018 hingga sekarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038.

Kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2018 – 2038 yang menjadi dasar dalam proses perizinan di Kabupaten Pemalang. Tingkat ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Pemalang telah diupayakan melalui pengoptimalan proses pengendalian pemanfaatan ruang dalam perizinan, berdasarkan data pengajuan Informasi Tata Ruang (ITR) yang dikelola oleh DPU TR untuk proses perizinan dapat diketahui bahwa pemanfaatan lahan yang diajukan melalui izin seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam RTRW :

Tabel Kesesuaian RTRW

No	Indikator	Kesesuaian dengan RTRW													
		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai	Sesuai RTRW	Tidak sesuai
1.	Jumlah Permohonan ITR	498	0	441	0	407	0	371	0	449	0	560 Ha	0	360 Ha	0
2.	Luasan lahan permohonan ITR (Ha)	730	0	665	0	155	0	463	0	582	0	3277,94 Ha	0	1.267,69 Ha	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan jumlah permohonan ITR di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang sesuai dengan RTRW, yaitu sebanyak 360 permohonan dengan total luasan lahan yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dimohonkan seluas ± 1.267,69 Hektar. Prosentase pemohon yang mengajukan permohonan ITR mengalami penurunan sebesar 39 % dari Tahun 2023. Hal ini dikarenakan untuk proses perizinan berusaha sudah menggunakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) melalui sistem OSS – RBA.

Namun terkait kesesuaian permohonan dengan RTRW pada Tahun 2024 adalah 100 %. Hal tersebut dikarenakan permohonan pemanfaatan tanah yang diajukan sesuai dengan RTRW serta ketentuan-ketentuan terbaru lainnya yang berlaku seperti Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penerbitan dokumen Informasi Tata Ruang (ITR) dikeluarkan apabila lokasi lahan sudah sesuai dengan struktur dan pola ruang RTRW Kabupaten Pemalang, Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk meminimalisir penyalahgunaan terhadap dokumen ITR tersebut.

Dalam proses pemberian izin usaha dan non-berusaha di Kabupaten Pemalang salah satu pertimbangan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang ada, sehingga tingkat ketaatan terhadap RTR di Kabupaten Pemalang sudah 100% karena jika tidak sesuai dengan peruntukan dalam Tata Ruang tidak akan mendapatkan izin yang dibutuhkan. Ketentuan RTR yang tersedia saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038. Namun RTRW belum dapat dijadikan acuan detail sebagai perangkat operasional terhadap kesesuaian tata ruang, karena RTRW menggunakan tingkat kedetailan peta yaitu 1:50.000, sehingga perlu adanya pendetailan peta 1:5.000 yang termuat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam RTRW terdapat 5 amanat untuk menyusun RDTR Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Pemalang, Kawasan Perkotaan Comal, Kawasan Perkotaan Randudongkal, Kawasan Perkotaan Moga, dan Kawasan Perkotaan Belik. Mendasari hal tersebut, telah dilakukan proses penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pemalang.

Hal yang masih menjadi tantangan pemerintah kabupaten adalah upaya lebih menyadarkan lagi pada masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan memang diakui Pemerintah, namun penggunaannya yang diatur untuk keserasian fungsi kawasan lindung dan budidaya. Selama ini, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa lahan milik mereka akan bebas untuk digunakan apa saja, tidak peduli arahan fungsi ruangnya sebagai kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hasil Evaluasi SAKIP

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007). Sistem ini dibutuhkan dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai paradigma pengelolaan keuangan paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi. SAKIP mencoba mengintegrasikan berbagai sistem dalam manajemen pemerintahan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan, sampai dengan sistem evaluasi.

Pada tahun 2024 DPUTR memperoleh nilai B (66) dari hasil evaluasi SAKIP DPUTR masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Sistem AKIP, diantaranya terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Tabel II.4
Perbandingan hasil SAKIP Tahun 2020-2024

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
1	**Perencanaan Kinerja** • Peningkatan kualitas indikator tujuan maupun sasaran agar memenuhi kriteria SMART dan Penetapan Target Kinerja agar didasarkan pada penghitungan dan basis data yang memadai	19,15	21	21,6	21,17	21,95
2	**Pengukuran Kinerja** • Peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan tindak lanjut atas permasalahn yang menghambat capaian kinerja	11,25	18,30	21	20,05	20,55
3	**Pelaporan Kinerja** • Perbaikan kualitas penyajian informasi dalam LKJiP	10,97	10,05	9,75	10,03	10,50
4	**Evaluasi Internal** • Evaluasi Internal belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi secara tertib	4,91	12,50	13,25	14,75	17,10

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
5	**Capaian Kinerja** • Sebagian besar capaian target barasal dari indikator yang bersifat *Output* bukan *Outcame*	12,88	-	-	-	-
	Jumlah	**59,16**	**61,85**	**65,60**	**66,00**	**70,10**

Sumber : DPUTR Kab. Pemalang

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUTR Kabupaten Pemalang.

Tugas Pokok dan Fungsi DPUTR Kabupaten Pemalang Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUTR Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa DPUTR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPUTR Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud DPUTR Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga serta Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga serta Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang
c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga serta Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja renstra sebelumnya masih diketemukan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.5
Pemetaan Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUTR Kabupaten Pemalang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah Pelayanan yang belum optimal	Kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor	Percepatan pembangunan jalan tembus / jalan baru yang masih kurang
		Waktu tempuh yang cukup lama	Pertumbuhan kendaraan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan kapasitas jalan
2.	Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal	Kondisi topografi Kabupaten Pemalang	Banyaknya sungai dan sumber daya air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor
		Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan	Banyaknya lokasi jaringan irigasi yang mengalami bencana /longsor
			perubahan fungsi lahan
3.	Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang belum optimal	Belum semua masyarakat terlayani akses terhadap Air Minum	kapasitas kelembagaan pengelola pengembangan Air Minum Non PDAM di masyarakat belum maksimal
			Kurangnya peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat pengelolaan air minum Non PDAM
			Kondisi lahan cenderung berkontur, sehingga kendala dalam pemasangan perpipaan Sambungan Rumah
			Kesadaran akan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Minum Non PDAM yang telah terbangun masih belum maksimal
		Belum semua masyarakat terlayani sarpras air limbah	Cakupan layanan sanitasi masih rendah
			rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas
			kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ketentuan teknis pembangunan infrastruktur;
		Belum semua lingkungan pemukiman didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai	Kondisi jalan lingkungan pada perumahan terstruktur yang belum mantap
			Lokasi rawan longsor di pemukiman
			Kondisi jembatan lingkungan yang mantap
			Kondisi saluran pembuangan air hujan perumahan terstruktur yang masih belum berfungsi maksimal
4.	Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi	Alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang	Harmonisasi perizinan dengan Penataan Ruang

Sumber : DPUTR Kab. Pemalang

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian program Ekonomi Berkeadilan, serta mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah, maka tantangan yang dihadapi adalah :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial

Selanjutnya ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Untuk menindaklanjuti penerapan SPM tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar beserta indicator kinerja bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi oleh pemeritah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang layanan pengolahan air limbah domestic yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan dan pendataan secara berkala;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu melakukan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang untuk pemenuhan pelayanan dasar.
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, yaitu menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD dan RKPD;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang telah dituangkan dalam komen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.

Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan sasaran TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2O2O-2O24.

TPB bertujuan untuk :

a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana dimandatkan oleh Perpres. RAD TPB merupakan dokumen Renja 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.6
MATRIKS SDG'S YANG MENUNJANG PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

Dari ketujuh belas tujuan TPB tersebut, DPUTR bertanggung jawab dalam pencapaian 3 (tiga) tujuan yaitu Tujuan 1 (satu), 6 (enam) dan 9 (sembilan).

MATRIK I METADATA I : INDIKATOR TPB/SDGs KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	SUMBER DATA	SATUAN	2023		2024		STATUS CAPAIAN	SUMBER DATA
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Tujuan 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan										
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro										
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	DPUTR	%	89	90,05	90	88,48	Tidak Tercapai	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DPUTR	%	94	95,72	95	93,99	Tidak Tercapai	
Tujuan 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA										
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yg memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	DPUTR	%	89	90,05	90	88,48	Tidak Tercapai	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	cakupan Pelayanan Sanitasi (SPALD)	DPUTR	%	94	95,72	95	93,99	Tidak Tercapai	
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	NA	DPUTR	Bukan Kewenangan	NA	NA				
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (IPALD Permukiman)	DPUTR	Bukan Kewenangan	NA	1950				
Tujuan 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI										
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua										
9.1.1.(a)	Kondisi Jalan Baik	Kondisi jalan baik (Mantap)	DPUTR	%	69,53	69,43	72,52	75,05	Tercapai	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Pencapaian prioritas pembangunan nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh pemangku kepentingan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Adapun 7 (tujuh) Prioritas nasional tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM; peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Dalam pencapaian prioritas nasional tersebut, DPUTR berupaya mendukung prioritas nasional yang ke-5 yaitu penguatan infrastruktur.

Peluang yang ada dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah:

1. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam peningkatan konektivitas antar wilayah serta pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur kabupaten;
2. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan;
3. Perkembangan teknologi;
4. Dukungan peraturan, perundang-undangan terkait pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
5. Kebutuhan infrastruktur kabupaten.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari Renstra DPUTR dan RPJMD pada tahun perencanaan, hal ini dilakukan agar target dan indikator capaian serta kebutuhan pendanaan dapat terealisasi sesuai yang telah ditetapkan, disamping itu juga harus mempertimbangkan beberapa usulan yang berkembang dari

https://jdih.pemalangkab.go.id/

masyarakat dan hal-hal mendesak yang muncul dalam proses perencanaan.

Review terhadap renja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak berbeda.
2. Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dirancangan akhir RKPD Tahun 2026 atau program dan kegiatan sebesar Rp. 193.579.048.611. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel II.7

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026
DPUTR Kab. Pemalang

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DPUTR				**193.579.048.611**					**133.204.572.900**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPUTR**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**21.171.952.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPUTR**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**20.900.564.000**	
I.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPUTR**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu**		**68.045.900**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**DPUTR**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu**	**100%**	**65.000.000**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUTR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	68.045.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUTR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	65.000.000	
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPUTR**	**Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu**		**16.352.299.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**DPUTR**	**Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**17.229.805.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPU TR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	16.352.299.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPU TR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 orang/ bulan	17.229.805.000	
III.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPU TR**	**Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi**		**100.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPU TR**	**Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi**	**100%**	**1.500.000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1.500.000	
IV.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPU TR**	**Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi**		**507.974.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPU TR**	**Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi**	**100%**	**406.349.000**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPU TR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.004.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPU TR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	6.400.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPU TR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	155.262.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPU TR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	14.000.000	
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	80.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	70.699.000	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPU TR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	48.380.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPU TR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	45.500.000	
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPU TR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	64.088.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPU TR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	60.060.000	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	DPU TR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	DPU TR	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	65.000.000	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	DPU TR	Jumlah Laporan	150 laporan	145.240.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	DPU TR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	150 laporan	144.690.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
V.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPU TR**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**		**739.732.000**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**DPU TR**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**100%**	**104.500.000**	
1.	Pengadaan kendaraan dinas		Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 unit	310.732.000	Pengadaan kendaraan dinas		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	35.000.000	
2.	Pengadaan Mebel	DPU TR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 unit	29.000.000	Pengadaan Mebel	DPU TR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 unit	34.500.000	
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPU TR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	400.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPU TR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	35.000.000	
VI.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	DPU TR	**Persentase Jasa Penunjang Urusan**		**2.866.855.720**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	DPU TR	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**2.571.050.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah		**Pemerintahan Daerah yang tersedia**			**Pemerintahan Daerah**		**Daerah yang tersedia**			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPU TR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	384.950.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPU TR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	385.050.000	
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPU TR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 laporan	79.536.620	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPU TR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 laporan	80.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPU TR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.402.369.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPU TR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.106.000.000	
VII.	**Pemeliharaan Barang Milik**	**DPU TR**	**Persentase barang milik**		**537.044.880.000**	**Pemeliharaan Barang Milik**	**DPU TR**	**Persentase barang milik**	**100%**	**522.360.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**daerah yang dipelihara**			**Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**daerah yang dipelihara**			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPU TR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164 unit	244.015.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPU TR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164 unit	229.320.000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DPU TR	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	23 unit	100.009.880	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DPU TR	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	23 unit	100.000.000	
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPU TR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	130.520.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPU TR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	130.540.000	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	DPU TR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	62.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	DPU TR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	62.500.000,	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bangunan Lainnya		yang dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		yang dipelihara/Direhabilitasi			
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**DPUTR**	**Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik**	**68**	**10.863.684.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**DPUTR**	**Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik**	**68%**	**909.200.000**	
I.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola**	**7,19**	**5.735.000.000**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola**	**30%**	**907.120.000**	
2.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	DPUTR	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,65 km	650.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	DPUTR	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,65 km	800.000.000	
4.	Normalisasi/Restorasi Sungai	DPUTR	Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi	0,60 km	1.200.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	DPUTR	Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi	0,6 km	104.000.000	
6.	Peningkatan Tanggul Sungai	DPUTR	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	1,8 km	3.335.000.000	Peningkatan Tanggul Sungai	DPUTR	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1,8 km	1.040.000	
						Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,34 KM	1.040.000	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 dokumen	1.040.000	
8.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	DPU TR	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,34 km	550.000.000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	DPU TR	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			
II.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi**	**DPU TR**	**Capaian Jaringan**	**7,19**	**5.128.684.000**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi**	**DPU TR**	**Persentase Jaringan sumber**	**68%**	**2.080.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Irigasi Yang Dikelola**			**Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**daya air dalam kondisi baik**			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUTR	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,03 km	4.828.684.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUTR	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,03 km	1.040.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUTR	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,16 km	150.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUTR	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,16 KM	1.040.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	DPUTR	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 dok	150.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	DPUTR	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**DPUTR**	**Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan**	**92**	**3.155.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**DPUTR**	**Persentase penduduk yang memiliki akses air minum Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota**	**90%**	**4.800.000.000**	
I.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/K**		**3.155.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)**	**25 ltr/dtk**	**4.800.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ota yang Dilaksanakan								
1.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPU TR	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	25 ltr/dtk	3.155.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPU TR	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	25 Liter/ Detik	4.800.000.000	
D.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**DPU TR**	**Persentase sarana prasarana persampahan sesuai standar**	**55**	**4.760.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**DPU TR**	**Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar**	**45%**	**100.000.000**	
I.	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi**		**4.760.000.000**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi**	**45%**	**100.000.000**	
1.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	DPU TR	Kapasitas TPA/TPST/SP	233,08 Ton/hari	4.760.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	DPU TR	Kapasitas	233,08 Ton/hari	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			A/TPS-3R/TPS yang dibangun					TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			
E.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**DPUTR**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik**	**97**	**2.100.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**DPUTR**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**95%**	**640.420.900**	
I.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**2.285**	**2.100.000.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**		**640.420.900**	
1.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUTR	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1.080 m3/hari	2.100.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUTR	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1080 M^3/Hari	640.420.900	
F.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**DPUTR**	**Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik**	**82**	**0**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**DPUTR**	**Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik**	**80%**	**2.080.000,**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi**	**0**	**0**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi**	**3650 m**	**2.080.000**	
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*		1.040.000	
1.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	DPU TR	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	DPU TR	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Dipelihara		1.040.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
G.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**DPU TR**	**Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan**	**50%**	**3.925.000.000**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**DPU TR**	**Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan**	**50%**	**101.040.000**	
I.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**DPU TR**	**Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan SLF**		**3.925.000.000**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**DPU TR**	**Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan SLF**	**50%**	**101.040.000**	
1.	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala BangunanGedung untuk Kepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota	DPU TR	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan	3 gedung	3.548.500.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunanan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kbupaten / Kota	DPU TR	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dipelihara, Dirawat, dan	3 bangunan gedung	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Diperiksa Berkala					Diperikasa Berkala			
2.	Penyelenggaraan PenerbitanPersetujuan Bangunan Gedung (PBG),Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG), Rencana TeknisPembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), TimPenilai Teknis (TPT), Penilik, danPendataan Bangunan Gedung melaluiSIMBG	DPU TR	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA),Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 dok	376.500.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikiat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Banguan Gedung melalui SIMBG	DPU TR	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikiat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Banguan Gedung melalui SIMBG	150 dokumen	1.040.000	
H.	**PROGRAM PENATAAN**	**DPU TR**	**Persentase kesesuaian bangunan dan**		**0**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN**	**DPU TR**	**Persentase kesesuaian bangunan dan**	**-**	**130.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		**lingkunganny a dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan**			**LINGKUNGANNY A**		**lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan**			
I.	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Jumlah 102awasan yang dibangun/dita ta**	**0**	**0**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Jumlah kawasan yang dibangun/ditata**	**-**	**130.000.000**	
1.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	DPU TR	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem PerkotaanNasi onal dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		0	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwiwsata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasioanal dan Kawasan Strategis Lainnya	DPU TR	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata	-	130.000.000	
I.	**PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN**	**DPU TR**	**Persentase 102anjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**	**78,40**	**146.468.412.611**	**PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN**	**DPU TR**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**	**75,41 %**	**105.113.263.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Prosentase Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap**	**78,40**	**146.468.412.611**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase**	**DPU TR**	**Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan jalan**	**75,41 %**	**105.113.263.000**	
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DPU TR	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	26 dok	3.000.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DPU TR	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	15 Dokumen	1.365.000	
2.	Rekonstruksi Jalan	DPU TR	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	29,07 km	69.713.153.000	Rekonstruksi Jalan	DPU TR	Panjang Jalan yang direkontruksi	31,74 km	105.105.000.000	
3.	Pemeliharaan Berkala Jalan	DPU TR	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3,43 km	20.717.468.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	DPU TR	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,5 km	1.000.000	
4.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPU TR	Panjang Jalan yang	4,18 km	14.085.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPU TR	Panjang Jalan yang Dilakukan	4,16 km	1.449.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dilebarkan Menuju Standar					Pelebaran Menuju Standar			
5.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	DPU TR	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	8 jembatan	1.498.459.611	Pemeliharaan Rutin Jembatan	DPU TR	Jumlah Jembatan yang dipelihara Secara Rutin	11 Jembatan	1.449.000	
6.	Pembangunan Jembatan	DPU TR	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 jembatan	480.000.000	Pembangunan Jembatan	DPU TR	Jumlah jembatan yang dibangun	3 jembatan	1.000.000	
7.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	DPU TR	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	765,72 km	850.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	DPU TR	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey Kondisinya	765,72 km	1.000.000	
8.	Pemeliharaan Rutin Jalan	DPU TR	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	54,51 km	36.124.332.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	DPU TR	Panjang Jalan yang dipelihar Secara Rutin	18 km	1.000.000	
J.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**DPU TR**	**Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi**	**10**	**160.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**DPU TR**	**Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi**	**10%**	**125.000.000**	
I.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**DPU TR**	**Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki**	**1,52**	**20.000.000**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**DPU TR**	**Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki**	**1,52%**	**21.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sertifikat kompetensi					**sertifikat kompetensi**			
1.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operatordan Teknisi atau Analis	DPU TR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 orang	20.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisis	DPU TR	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	200 Orang	21.000.000	
II.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)**		**140.000.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)**	**1 Dokumen**	**104.000.000**	
1.	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	DPU TR	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 dok	140.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi cakupan Kabupaten/Kota	DPU TR	Jumlah Dokumen Data dan Informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten/Kota yang disediakan	1 dokumen	104.000.000	
K.	**PROGRAM PENYELENGGAR**	**DPU TR**	**Persentase pemanfaatan**		**975.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGAR**	**DPU TR**	**Persentase pemanfaatan**	**100%**	**383.005.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	AAN PENATAAN RUANG		**tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah**			**AAN PENATAAN RUANG**		**tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah**			
I.	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana RinciTata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana RinciTata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**70.000.000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Peraturan rencana detail tata ruang yang diterbitkan**	1 buah	**70.005.000**	
1.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	DPU TR	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 dok	70.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	DPU TR	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 dok	70.005.000	
II.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun**		**705.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**DPU TR**	**Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun**	**100%**	**208.000.000**	
1.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	DPU TR	Jumlah materi teknis dan Ranperkarda	2 dok	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan	DPU TR	Jumlah Dokumen Koordinasi dan		104.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			RDTR Kabupaten/Kota yang disusun			RTRW kabupaten/Kota		Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	DPUTR	Jumlah materi teknis dan Ranperkarda RTRWKabupaten/Kota yang disusun	5 dok	605.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	5 dok	104.000.000	
IV.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Persentase tersusunnya dokumen pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang**		**200.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**DPUTR**	**Persentase tersusunnya dokumen pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang**	**100%**	**105.000.000**	
1.	Koord. Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dok. Koord.pelaks. penataan ruang		200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	DPUTR	Jml Dok. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 dok	105.000.000	

Sumber: hasil analisis Penyusun, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam hal tersebut DPUTR menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan musrenbang kota dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Inventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan.
4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dilakukan DPUTR dapat dilihat dalam Tabel 2.8 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.8 :

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Pemalang Tahun 2026

LAPORAN REKAPITULASI HASIL USULAN FISIK PIWK

DPU TR

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN SUMBER DAYA		
						APBN	APBD PROV	APBD KAB
1	Moga	Gendoang	Pelebaran Jembatan Kali Kerep	Gendoang	12 m x 5 m			125.000.000,00
2	Warungpring	Datar	Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih/ Pembuatan Sumur Bor dan Bak Penampung di Dusun Cilincing Desa Datar	Dusun Cilincing Desa Datar	1 Paket dengan Bak Penampuangan 5 x 5 m			53.897.900,00
3	Warungpring	Warungpring	Pelebaran Jalan Antar Kecamatan Warungpring - Moga (Dusun Pamulian - tegalharja Warungpring)	Dusun Pamulihan - Tegalharja Desa Warungpring	P : 275 m L : 3 m			450.000.000,00
4	Warungpring	Mereng	Pengaspalan Jalan Mereng-Kreyo Kec. Randudongkal	Dusun Kubang Desa Mereng	P : 450 m L = 4 M			225.000.000,00
	TOTAL							**853.897.900,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II.9
Usulan berdasarkan Pokok-pokok pikiran

Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi
1135629	11/02/2025	INDIANTO, S.H.	Pengadaan sarana prasarana air bersih, Kelompok Air Bersih Tirta Mangiras, Desa Beluk, Kec. Belik	Sumur dangkal dan pompa/ jaringan air minum	Kelompok Air Bersih Tirta Mangiras, Desa Beluk, Kec. Belik, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1142717	11/02/2025	AGUS MU' TASHIM BILLAH, S.Pd.	Sender kalibaros, Dusun Kalibaros Desa Taman Kecamatan Taman	Senderan/ bronjong/ talud sungai	Kalibaros, Dusun Kalibaros Desa Taman Kecamatan Taman, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1146418	14/02/2025	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	Pengaspalan jalan	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Desa Cibuyur Dan Desa Datar, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1151289	13/02/2025	Hj. YANINGSIH, S.H.	Pemeliharaan jalan Kabupaten berupa Rabat Beton Jalan Batursari - Pulosari Rt. 1. Rw 1.	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Batursari - Pulosari Rt. 1. Rw 1. Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1151448	13/02/2025	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.	Pemeliharaan jalan Arbei Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Arbei Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1151453	13/02/2025	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.	Pemeliharaan Jalan Sukun Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Sukun Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1151458	13/02/2025	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.	Pemeliharaan Jalan Sindoro Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Sindoro Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi
1152475	13/02/2025	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.	Pemeliharaan jalan Gunung Gede	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Gunung Gedekelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1160854	13/02/2025	ADI WIRARSO	Pengaspalan jalan kabupaten Ruas Jalan Desa Pagergunung Kec Ulujami	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Desa Pagergunung Kec Ulujami, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1165405	14/02/2025	ARIS ISMAIL, A.Md.	Pengaspalan jalan	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jl. Sriti Dukuh bungin Desa Danasari Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1169854	14/02/2025	FAHMI HAKIM, S.H., M.M.	Sender jalan usaha tani Desa Jatirejo	Senderan/ bronjong/ talud sungai	Sender jalan usaha tani Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1169868	14/02/2025	FAHMI HAKIM, S.H., M.M.	sender jalan Raden Saleh Petarukan – Tegalmlati	Senderan jalan kabupaten	sender jalan Raden Saleh Petarukan – Tegalmlati Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1172184	14/02/2025	H.M. WARDOYO, S.E.	Pengaspalan Jalan Kabupaten Ruas Desa Pesantren Ke Desa Kandang	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten Ruas Desa Pesantren Ke Desa Kandang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1428031	11/03/2025	Drs. H. MARTONO, M.A.	Pembangunan Drainase Desa Susukan	Drainase jalan kabupaten	Dusun Tengah RT 02, 03, dan 04 RW 04 Desa Susukan Kecamatan Comal, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1433773	12/03/2025	Drs. H. MARTONO, M.A.	Pmbuatan Drainase jalan kabupaten Desa Mojo	Drainase jalan kabupaten	Ruas Jalan Mojo RT 01 RW 04 Desa Mojo Kecamatan Ulujami , Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi
1436292	12/03/2025	ARIS ISMAIL, A.Md.	Belum AdaJembatan Penghubung antar RW	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan kabupaten	Dusu Cokrah RW 09 Kelurahan Sugihwaras Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1440496	16/03/2025	H.M. WARDOYO, S.E.	Pengaspalan Jalan Ruas Desa Pesantren Dukuh Sidomulyo	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Desa Pesantren Dukuh Sidomulyo, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1440502	16/03/2025	H.M. WARDOYO, S.E.	Pengaspalan Jalan Ruas Desa Sidorejo Ke Desa Sikayu	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Ruas Desa Sidorejo Ke Desa Sikayu , Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1440505	16/03/2025	H.M. WARDOYO, S.E.	Pengaspalan Jalan Ruas Lingkar Kota Comal	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan Ruas Lingkar Kota Comal , Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1456913	14/03/2025	SISWANTO	PENGASPALAN JALAN	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Jalan utama Desa Cangak Kec. Bodeh, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1476604	17/03/2025	H.M. WARDOYO, S.E.	Pengaspalan jalan kabupaten ruas jalan Desa Pamutih ke Desa Padek	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Kabupaten Desa Pamutih ke Desa Padek, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1476637	17/03/2025	H.M. WARDOYO, S.E.	Pengaspalan jalan kabupaten ruas jalan Desa Ambowetan ke Desa Tumbal	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Desa Ambowetan ke Desa Tumbal, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1476662	17/03/2025	H.M. WARDOYO, S.E.	Pengaspalan jalan kabupaten ruas jalan desa kendaldoyong ke desa kandang	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Ruas jalan Desa Kendaldoyong ke Desa Kandang, Kab. Pemalang, ,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Adapun keempat pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga;

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dari keempat pilar tersebut diatas diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 7 (tujuh) agenda pembangunan dimaksud, diantaranya:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Dari ketujuh agenda pembangunan tersebut diatas serta sesuai periode pembangunan yang keempat dalam RPJMD Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2021-2026, tema yang diambil pada tahun 2021 dari RPJMD adalah "Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Pemalang Sejahtera", maka DPUTR Kabupaten Pemalang akan menfokuskan pada agenda pembangunan sebagaimana adalah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Pemalang.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

1.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Lintas Sektor

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain :

(i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa),

(ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat–pusat pertumbuhan wilayah,

(iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah,

(iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana wilayah menjadi basis pembangunan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, dimana strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi:

(1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG;

(2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR;

(3) Peningkatan pelaksanaan "infrastructure for all" yang memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), dengan memperhatikan aspek

https://jdih.pemalangkab.go.id/

keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan" bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil;

(4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan Focal Point) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (Gender Analysist Pathway/GAP) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak;

(5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan

(6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi:

(1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK);

(2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;

(3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);

(4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompak kerja (POKJA) dan Focal Point, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah;

(5) Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain;

(6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan;

(7) Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaam infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui:

(1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan;

(2) Menerapkan SNI/uniform building code keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori safety critical objective yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik;

(3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi hazard dan karakteristik wilayah rawan bencana;

(4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami);

(5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana:

(6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS);

(7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat;

(8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana;

(9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

(10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR;

(11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
(13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelasian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

1.2.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Utama

1. ***Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan***

   Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah.

2. ***Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan***

   Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024.

   Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

3. ***Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman***

   Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

   Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

   a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
c. Menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:
    a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
    b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
    c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;
b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:
    a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
    b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
    c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
    d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
    e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
    f. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:
    i. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
    ii. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
    iii. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
    iv. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
    v. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
c. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;
d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:
a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
c. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:
a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (circular economy) dalam pengelolaan sanitasi;
b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
c. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi

B. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Propinsi Jawa Tengah

Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah :
a. Melaksanakan peningkatan jalan dan pembangunan jalan serta penggantian jembatan utamanya pada ruas jalan alih status jalan Kab/Kota. Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan akses dan penghubung antar obyek pariwisata, Jalan penghubung antar Pengembangan Wilayah, Jalan akses menuju kawasan industri terpadu dan perbatasan antar provinsi.
b. Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan agar tetap dalam kondisi permukaan baik dan pemeliharaan rutin jembatan dalam kondisi baik;
c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong, Wososukas dan Keburejo) secara bertahap;
d. Melakukan pendekatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS;
e. Melakukan dukungan untuk pembangunan system pengelolaan air limbah domestik;
f. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD);
g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Strategi

Untuk melaksanakan strategi tersebut perlu didukung kebijakan yang bertujuan menunjang pencapaian visi dan misi Gubernur yakni dengan :

a. Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan konstruksi beton, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran, perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal serta penanganan pelebaran jembatan dengan tidak menutup pengembangan teknologi dan inovasi;
b. Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan;
c. Membangun sistem layanan aman air minum perkotaan dan sanitasi dengan pendekatan regional;
d. Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan;
e. Mendukung system layanan sanitasi layak;
f. Membangun system layanan persampahan dengan pendekatan regional;
g. Melakukan bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah;
h. Pembinaan dan pelatihan teknis pelaku jasa konstruksi.

C. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (DPUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi merupakan kebijakan Pengelolaan SDA dan Penataan Ruang sebagai arahan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Meningkatkan kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatkan layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Meningkatkan fungsi dan kondisi baik sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Menciptakan tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Strategi

Strategi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang meliputi :

1. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi, air baku, sungai dan pantai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja dan kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi, air baku, sungai dan pantai;
3. Kerjasama dan manajemen aset dalam pengelolaan SDA;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi, air baku Balai PSDA;
5. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air baku Balai PSDA;
6. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA Bodri Kuto dan Pemali Comal;
7. Pengendalian banjir dan pengelolaan peralatan;
8. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA;
9. Penanganan banjir Balai PSDA;
10. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPUTR Kabupaten Pemalang

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni".*** Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (Enam) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Dalam rangka Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam hal ini DPUTR mengampu dua Misi yaitu:

- **Misi ke-4 (empat) Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan dan**
- **Misi ke-6 (enam) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.**

❖ **Misi ke 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI).

Misi ke – 4 (empat) ini memiliki indikator tujuan yaitu :

1) Indeks Desa Membangun
2) Indeks ketimpangan antar wilayah

Dengan sasaran terwujudnya pengembangan kota.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu Pendataan Bangunan dan Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi sesusai dengan program usulan daerah dan program yang tertuang dalam Renja.

- **Misi ke 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

  Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

  Misi ke-6 (enam) ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), dengan sasarannya yaitu :

  1) Meningkatnya cakupan universal akses
  2) Meningkatnya konektivitas antar wilayah
  3) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
  4) Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

a. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum.
b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air limbah, sarana prasarana persampahan dan drainase perkotaan.
c. Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi
d. Melaksanakan kegiatan peningkatan / rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan
e. Penataan sumber daya manusia bidang SDA
f. Modernisasi pengelolaan sistem data dan informasi Sumber Daya air
g. Perencanaan berbasis spasial dan intergratif
h. Optimalisasi organisasi Pengelola Jaringan Sumber Daya Air
i. Pengembangan Pusat Pelayanan Guna Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Perkembangan wilayah yang sesuai dengan Perda RTRW
j. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Tabel. III.1.
Tujuan dan Sasaran DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya pengembangan Kota		Persentase Kecamatan yang memiliki infrastruktur lengkap		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
		Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	5,76
2	Meningkatkan cakupan universal akses air minum		Capaian universal akses air minum		
		Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	92
3	Meningkatkan sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat		Capaian akses sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik)		
		Meningkatnya akses sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	97
			Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	55
			Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	82
4	Meningkatkan konektivitas jaringan jalan kabupaten		Rasio Konektifitas		
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase terhubungnya konektivitas antar wilayah	%	100
		Meningkatnya kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan kondisi mantap	%	78,40
5	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air		Indeks Kinerja Sistem Irigasi		
		Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	55

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
6	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW		
		Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang wiayah sesuai RTRW	%	100

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2024 maka diperlukan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dalam merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

a) Keserasian dan keterpaduan pembangunan infrastuktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021– 2026.
b) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelatihan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Secara garis besar program dan kegiatan Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur.
2) Jumlah program yang dilaksanakan pada usulan tahun 2026 adalah sebanyak 9 program, 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan.
3) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebesar **Rp. 193.579.048.611,--** terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar **Rp. 172.407.096.611,--** dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan **Rp. 21.171.952.000,--**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.1. Program dan Kegiatan

Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan penjabaran Renstra 2021 – 2026 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dan Nasional baik jangka menengah ataupun jangka panjang. Renja ini memuat tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUTR Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhiran pada SIPD RI, DPUTR Tahun 2025 sebanyak 9 program, 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi dari DPUTR Kabupaten Pemalang.

Rumusan Renja dan pendanaan DPUTR Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.1 RENJA DAN PENDANAAN DPUTR KABUPATEN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PEMALANG
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**123.204.572.900,00**							**188.929.048.611,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**123.204.572.900,00**							**188.929.048.611,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**123.204.572.900,00**							**188.929.048.611,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**20.900.564.000,00**						**-**	**21.171.952.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**20.900.564.000,00**	-	-	-	-	-	-	**21.171.952.000,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	68.045.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		68.045.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.229.805.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	16.352.299.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				121orang/ 12 bulan Orang/bulan	17.229.805.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		16.352.299.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	1.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	406.349.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	507.974.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.400.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		5.004.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	14.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		155.262.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	70.699.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	45.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		48.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	60.060.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		64.088.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	144.690.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		145.240.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	104.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	739.732.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		310.732.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	34.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		29.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.571.050.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	2.866.855.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	385.050.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		384.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		79.536.620,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.106.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		2.402.369.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	522.360.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	537.044.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				164 Unit	229.320.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		244.015.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				23 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		100.009.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	130.540.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		130.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	62.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		62.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**909.200.000,00**						**-**	**10.863.684.000,00**	
		[Meningkatnya pengelolaan sumber daya air]	**Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota** **Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik** **Rasio luas daerah irigasi k ewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi** **Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota** **Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota**	**1** **17.5** **30.67** **59.60** **73.5**	**0.45** **14.93** **28.74** **51.77** **70.84**	**0.5** **15** **28.83** **54.00** **71**	**0.6** **15.5** **29.20** **55.12** **71.5**	**909.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.863.684.000,00**	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	907.120.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	5.885.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,65 KM	800.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,6 KM	104.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**909.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.863.684.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				1,8 KM	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.335.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya pengelolaan sumber daya air]	**Indeks kinerja sistem irigasi (IKSI) kewenangan Kabupaten/Kota** **Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik** **Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi** **Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota** **Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota**	**1** **17.5** **30.67** **59.60** **73.5**	**0.45** **14.93** **28.74** **51.77** **70.84**	**0.5** **15** **28.83** **54.00** **71**	**0.6** **15.5** **29.20** **55.12** **71.5**	**909.200.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.863.684.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0,34 KM	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.080.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	4.978.684.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,03 KM	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		4.828.684.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,16 KM	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**4.800.000.000,00**						**-**	**3.155.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan** **Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**46.02** **91.50**	**23.95** **88.48**	**28.51** **88.80**	**32.01** **89.32**	**4.800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.155.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.800.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	3.155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				25 Liter/Detik	4.800.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan persampahan regional]	**Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar**	**43.16**	**25**	**31.58**	**33.89**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				233,08 Ton/hari	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**640.420.900,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik** **Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	**100** **62.77**	**54.13** **97.27**	**55.77** **97.50**	**57.17** **98.00**	**640.420.900,00**	-	-	-	-	-	-	**2.100.000.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	640.420.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				1080 M³/Hari	640.420.900,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**2.080.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	**Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik**	**76.97**	**76.62**	**76.62**	**76.69**	**2.080.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.080.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				0 Sistem Drainase Perkotaan	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Sistem Drainase Perkotaan	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**101.040.000,00**						**-**	**3.925.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik** **Rasio Kepatuhan PBG**	**83** **91.43**	**71.43** **78**	**74.29** **78.27**	**79** **80**	**101.040.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.925.000.000,00**	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	101.040.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	3.925.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.548.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				150 Dokumen	1.040.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		376.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**130.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**100**	**48**	**50**	**60**	**130.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	130.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				0 Kawasan	130.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**95.113.263.000,00**						**-**	**146.468.412.611,00**	
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota**	**84.79**	**75.05**	**77.29**	**78.79**	**95.113.263.000,00**	-	-	-	-	-	-	**146.468.412.611,00**	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	95.113.263.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	146.468.412.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				26 Dokumen	1.365.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				765,72 KM	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				54,51 KM	10.001.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		36.124.332.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3,43 KM	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		20.717.468.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				29,07 KM	85.105.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		69.713.153.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				8 Jembatan	1.449.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		1.498.459.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				4,18 KM	1.449.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		14.085.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				1 Meter	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**125.000.000,00**						**-**	**160.000.000,00**	
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**35**	**1.32**	**16**	**18**	**125.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**160.000.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	21.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	21.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	104.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**383.005.000,00**						**-**	**975.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**383.005.000,00**	-	-	-	-	-	-	**975.000.000,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	70.005.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	70.005.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	208.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	705.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	104.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				5 Dokumen	104.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	105.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				3 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							**123.204.572.900,00**							**188.929.048.611,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja DPUTR Kabupaten Pemalang selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DPUTR Kabupaten Pemalang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang nantinya akan ditetapkan dalam Renja DPUTR Kabupaten Pemalang tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja DPUTR Kabupaten Pemalang akan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja DPUTR Kabupaten Pemalang tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanannya, sebagai berikut :

a. DPUTR Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja DPUTR Tahun 2026 setelah diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026.
b. DPUTR Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPUTR Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Kepala DPUTR Kabupaten Pemalang wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut disusunnya Renja DPUTR Kabupaten Pemalang Tahun 2026, maka :

a. Koordinasi yang intensif antara unsur eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan agar perencanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

b. Demi kesempurnaan dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2026.

Kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

JOKO TRI ASMORO, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760606 200501 1 021

https://jdih.pemalangkab.go.id/

O. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup sesuai dengan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Tahap perumusan rancangan Renja;
b. Tahap penyajian rancangan Renja;
c. Persiapan penyusunan;
d. Penyusunan rancangan awal;
e. Penyusunan rancangan;
f. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
g. Perumusan rancangan; dan
h. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2026, disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Sedangkan Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasinal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6)
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun xxx Nomor xxx)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Sususn Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 80);
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 77);
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xxx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan satu tahunan untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dan yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja yang dapat dituangkan ke dalam Renja dan RKA PD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupa-ten Pemalang;
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan);
3. Memberikan gambaran Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang untuk mencapai target pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pada Tahun 2026 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
2.2. Landasan Hukum
3.3. Maksud dan Tujuan
4.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang RPJMD 2025-2029.

Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu: **"PEMALANG BERCAHAYA - Bersih, Cakap, Handal, Mulya"**. Visi ini memiliki pembentuk kata:

Bersih, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Cakap, dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislative bersama unsur masyarakatnya.

Mulya, Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religious.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi sebagai berikut:

MISI 1 "RESIK"

Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik

https://jdih.pemalangkab.go.id/

MISI 2 “HIJAU”

Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM di masyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

MISI 3 “APIK”

Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

MISI 4 “PEDULI”

Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

MISI 5 “SILATURAHMI”

Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara gotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

MISI 6 “ORGANISATORIS”

Meningkatkan Pemerintah yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

MISI 7 “DIGITALISASI”

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi

MISI 8 "IKHLAS"

Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang. Pelayanan Disperkim dominan terdapat dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 2 : Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif ,efisien, dengan pelayanan publik yang baik.Pencapaian sasaran ini apabila dikaitkan dengan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan peningkatan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, kinerja dan pelaporan. Sasaran ini juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mempercepat keberhasilan reformasi birokrasi. Sementara peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kelompok sasaran pelayanan Disperkim seperti pemilik rumah, pengembang perumahan, masyarakat yang membutuhkan infrastruktur dan fasilitas umum dan pihak yang terkait dengan pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah dengan mengimplementasikan SOP dan SPP, mewujudkan pelayanan berbasis digital, mudah dan murah.

Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pencapaian sasaran ini apabila dikaitkan dengan pelayanan Disperkim diarahkan pada penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan relokasi program pemerintah.

Pada tahun 2024 Disperkim Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.47.836.303.000,- (Empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 46.109.536.306,- (Empat puluh enam milyar seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah),- atau sebesar 96,39% (Sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan persen). Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.726.766.694,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Berdasarkan Renstra Disperkim Pemalang Tahun 2025-2029, Disperkim Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 melaksanakan 2 Urusan, 8 Program, 21 Kegiatan, dan meliputi 44 Sub Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan Disperkim Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
   a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   b) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   c) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   d) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
   e) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   f) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
   g) Penertiban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
2. Program Kawasan Permukiman
   a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukian
   b) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
   c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
   a) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas dan Umum
   a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a) Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat kemampuan Kecil

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
   a) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penatagunaan Tanah
   a) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disperkim Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 5 sasaran strategis dengan 2 sasaran strategis tercapai dan 3 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Sasaran strategis yang tercapai adalah Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan dan Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan.
3. Sasaran strategis yang tidak tercapai adalah Meningkatnya penanganan Rumah Tidak layak huni (RTLH), Berkurangnya sengketa tanah garapan dan Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah.
4. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah komunikasi dan koordinasi di dalam organisasi perangkat daerah, antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang lain tidak berjalan lancar. Kebijakan penganggaran juga menjadi faktor penghambat lainnya.

Pencapaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2024 dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2025) dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 Dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman s/d Tahun 2023

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+	11=(10/4)
I.	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1.	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**				100 %			100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah		6 dok	6 dok	100 %	6 dok	6 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		3 dok	3 dok	100 %	3 dok	3 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4 dok	4 dok	100 %	4 dok	4 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4 dok	4 dok	100 %	4 dok	4 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 dok	12 dok	100 %	12 dok	12 dok	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 dok	12 dok	100 %	12 dok	12 dok	100 %
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat**							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji (bulan)	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100 %	14 bulan	14 bulan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/ semester SKPD		12 lap	12 lap	100 %	12 lap	12 lap	100 %
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi		1 lap	1 lap	100 %	1 lap	1 lap	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
4.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100 %
5.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		280 orang	280 orang	100 %	280 orang	280 orang	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
6.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
7.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin		1 Paket	1 Paket	100 %			
8.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Lapora	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Lapora	100 %
9.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		43 Unit	43 Unit	100 %	43 Unit	43 Unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya		4 Unit	4 Unit	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	jumlah pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga		66 Unit	66 Unit	100 %	66 Unit	66 Unit	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
10.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi**								
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					1 Dok	1 Dok	100 %
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Calon penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program KaBupaten/Kota Yang Terverifikasi		1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100 %
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			100 orang	100 orang		50 Orang	50 Orang	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme akses perumahan KPR-FLPP		50 orang	50 orang	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi		15 Rumah	15 Rumah	100 %	15 Rumah	15 Rumah	100 %
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
No.	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)**	**Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir**	**Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)**			**Target Program/ Kegiatan Renja Tahun**	**Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			periode Renstra)	Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)	Berjalan (Th 2025/ n-1)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	100 %
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Khusus		12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang?Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		15 Dokumen	15 Dokumen	100 %	15 dok	15 dok	100 %
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		1 laporan	1 Laporan	100%			

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah rumah tidak layak huni yang							
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak	jumlah dokumen kesepakatan kerja							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan					12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan Kualitas Permukiman	Jumlah Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan		57 Unit	57 Unit	100 %			
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah BSPS dan Bankeu		109 Rumah	109 Rumah	100 %	45 Rumah	45 Rumah	100 %
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman					12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
No.	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)**	**Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)**	**Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)**			**Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)**	**Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan**	
				Target Renja Th 2024	**Realisasi Renja Th 2024**	**Tingkat Realisasi (%)**		**Realisasi Capaian**	**Tingkat Capaian (%)**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana,sarana dan utilitas umum yang menunjang		45 Lokasi	45 Lokasi	100 %	40 Lokasi	40 Lokasi	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan		10 Laporan	10 laporan	100 %	10 laporan	10 laporan	100 %
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah PSU yang diserahterimakan		6 Perumahan	6 Perumahan	100 %	6 Perumahan	6 Perumahan	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN								
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Regsitrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		10 Laporan	10 Lapran	100 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota		4 Berita Acara	4 Berita Acara	100 %	4 BA	4 BA	100 %
No.	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)**	**Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)**	**Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)**			**Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)**	**Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan**	
				Target Renja Th 2024	**Realisasi Renja Th 2024**	**Tingkat Realisasi (%)**		**Realisasi Capaian**	**Tingkat Capaian (%)**
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah laporan koordinasi dan sinkronikasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota		4 laporan	4 laporan	100 %	4 laporan	4 laporan	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang menyelenggarakan 2 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan. Urusan ini dilaksanakan melalui 8 Program, 21 Kegiatan dan meliputi 44 Sub Kegiatan.

Perumusan indikator kinerja utama yang digunakan untuk pengukuran kinerja Disperkim Kabupaten Pemalang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kunci, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2022 mengacu pada SPM, IKU dan IKK berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang 2025 – 2029.

Dalam menentukan tolak ukur dan Indikator Kinerja Disperkim, selalu mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai Bupati, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV.

Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Disperkim Kabupaten Pemalang untuk periode lima tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021, serta Renstra Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tertangani, Persentase Kawasan Kumuh Tertangani, Persentase Konflik Tanah Garapan Tertangani, dan Persentase Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Terfasilitasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	SPM	IKU	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi tahun		Catatan Analisis
					(n-2) 2021	(n-1) 2022	(n) 2023	(n+1) 2024	(n-2) 2023	(n-1) 2024	(n) 2023	(n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Persentase Cakupan Wilayah Kumuh di Bawah 10 Ha.			IKK	1,3	1,0	0,5	0,4	30,85	31,20			
2.	Persentase Kawasan Kumuh tertangani		IKU	IKK	53,5	63,5	73,5	83,5	69,15	68,80			
3.	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki PSU dalam Kondisi baik.			IKK	50	60	70	80	26,61	27,52	32,30	34,40	
4.	Persentase RTLH yang tertangani		IKU	IKK	25	29	33	37	30,66	32,13	92,91	86,84	
5.	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	SPM		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program	SPM		IKK	100	100	100	100					

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator	SPM	IKU	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi tahun		Catatan Analisis
					(n-2) 2021	(n-1) 2022	(n) 2023	(n+1) 2024	(n-2) 2023	(n-1) 2024	(n) 2023	(n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.	Persentase tanah garapan tertangani		IKU	IKK	30	40	60	70					
8.	Persentase sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang terfasilitasi		IKU	IKK	60	85	95	100					

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Tujuan dilakukannya evaluasi tersebut adalah untuk :

- Memperoleh informasi tentang implentasi Sistem SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Evaluasi dilakukan melalui 5 Komponen manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan Inspektorat, nilai yang didapatkan Disperkim Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	21,36
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	20,15
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	16,40
	Jumlah	100 %	68,41

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukimman Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Bupati tentang penjabaran tugas dan fungsi masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana bidang-bidang tersebut berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

Isu Strategis Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang cukup tinggi;
2. Pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang:
   a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
   b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Prgram Pemerintah Kabupaten/Kota.
   c. Penanganan permukiman dan kawasan kumuh secara tematik/terintegrasi.
   d. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan dan Kawasan Permukiman;
   e. Serah Terima akses prasarana sarana utilitas (PSU) Perumahan;
   f. Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-100 yaitu 100 % akses air bersih, 0 % dan Kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Isu Strategis Bidang Pertanahan :

1. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Pemalang;
2. Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap).
3. Tata cara pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
4. Tata cara ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan umum.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang terkait erat dengan pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pemalang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Disperkim**	**Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pertanahan**	**100 %**	**7.654.181.451**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Disperkim**	**Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan**	**100 %**	**25.615.181.451**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**		**225.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**		**225.000.000**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperkim	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperkim	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok	35.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dok	7.500.000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	7.500.000	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperkim	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	7.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperkim	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperkim	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	30.000.000	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperkim	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	130.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperkim	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	130.000.000	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah**		**4.787.542.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah**		**6.163.163.000**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperkim	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	14 bulan	4.762.542.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperkim	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	14 bulan	4.762.542.000	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperkim	jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperkim	jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disperkim	Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disperkim	Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Laporan	5,000,000	
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disperkim	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	7,500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disperkim	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	5.000,000	
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**		**5.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**		**2.000.000**	
3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Disperkim	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang	1 Laporan	1.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Dokumen	2.000.000	
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2.000.000	
4.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**5.000.000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**5.000.000**	
4.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.000.000	
4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Disperkim	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DOkumen	4.000.000	
5.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**2.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**406.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
5.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disperkim	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Disperkim	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.000.000	
5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperkim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disperkim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30.000.000	
5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Orang	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1300 Orang	300.000.000	
5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Orang	175.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperkim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	80 Orang	75.000.000	
6.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**335.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Disperkim**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**320.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperkim	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperkim	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	1 Paket	15.000.000	
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	1 Paket	30.000.000	
6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperkim	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan	1 Paket	25.000.000	
6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperkim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperkim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperkim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperkim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	20.000.000	
6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperkim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperkim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
6.7	Penyediaan Bahan/Material	Disperkim	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Disperkim	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan	1 Paket	30.000.000	
6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperkim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	200.000.000	
7.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disperkim**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**75.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disperkim**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**75.000.000**	
7.1	Pengadaan Mebel	Disperkim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Disperkim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25.000.000	
7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	- Unit	25.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	25.000.000	
7.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	- Unit	25.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
7.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	
8.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disperkim**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.531.639.451**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disperkim**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**19.526.639.451**	
8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.639.451	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.639.451	
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	18.250.000.000	
8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.275.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperkim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.275.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
9.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disperkim**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**275.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Disperkim**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**275.000.000**	
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperkim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Disperkim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50.000.000	
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperkim	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Disperkim	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit	50.000.000	
9.3	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Disperkim	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	50 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Disperkim	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	50 Unit		
9.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperkim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperkim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperkim	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitas	2 Unit	50.000.000	
9.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/ direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
9.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disperkim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili		25.000.000	
B.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Disperkim**	**Persentase RTLH yang tertangani**	**41 %**	**200.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Disperkim**	**Persentase RTLH yang tertangani**	**41 %**	**670.000.000**	
10.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**25.000.000**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**110.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
10.1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota	1 Dokumen	15.000.000	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/ kota	1 Dokumen	100.000.000	
10.2	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota yang terverifikasi	1 Dokumen	10.000.000	
11.	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**		**7.000.000**	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**		**25.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
11.1	Sosialisasi Standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Kab. Pemalang	Jumlah Orang peserta Sosialisasi Standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	1000 Orang	5.000.000	Sosialisasi Standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Kab. Pemalang	Jumlah Orang Sosialisasi Standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	100 Orang	15.000.000	
11.2	Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Akses Pembiayaan Perumahan	1000 Orang	2.000.000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Akses Pembiayaan Perumahan	100 Orang	10.000.000	
12.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**143.000.000**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**		**300.000.000**	
12.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pemalang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	15 Unit Rumah	140.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pemalang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	15 Unit Rumah	300.000.000	
12.2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun atau relokasi program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	3.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
13.	**Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	Disperkim	**Persentase terlaksananya kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program**		**10.000.000**	**Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota**	Disperkim	**Persentase terlaksananya kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi**		**15.000.000**	
13.1	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota	Disperkim	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota		5.000.000	Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabuapten/ kota	Disperkim	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota		10.000.000	
13.2	Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Disperkim	Jumlah rumah tangga terdampak bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitasi bantunan penyediaan rumah		5.000.000	Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/ kota	Disperkim	Jumlah rumah tangga terdampak bencana kabupaten/ kota yang mendapatkan fasilitasi bantunan penyediaan rumah		5.000.000	
14.	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Disperkim	**Terlakssananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		**10.000.000**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Disperkim	**Terlakssananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		**200.000.000**	
14.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	5.000.000	**F**asilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
14.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Disperkim	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Khusus	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Disperkim	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Khusus	1 Dokumen	150.000.000	
15.	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Disperkim**	**Terlaksananya Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan secara Elektronik**		**5.000.000**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Disperkim**	**Terlaksananya Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan secara Elektronik**		**20.000.000**	
15.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Disperkim	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang?Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegritas Secara Elektronik	15 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Disperkim	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang?Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegritas Secara Elektronik	15 Dokumen	20.000.000	
C.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Disperkim**	**Persentase Kawasan Kumuh Tertangani**	**0,65 %**	**15.000.000**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Disperkim**	**Persentase Kawasan Kumuh Tertangani**	**0,65 %**	**26.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
16.	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Disperkim**	**Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**			**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Disperkim**	**Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha ersentase kawasan kumuh**			
16.1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Disperkim	Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	- Laporan	0	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Disperkim	Jumlah laporan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	1 Laporan		
16.2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Disperkim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	15 Laporan		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Disperkim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	15 Laporan		
17.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Disperkim**	**Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani**		**15.000.000**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Disperkim**	**Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani**		**26.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
17.1	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	Disperkim	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan	- Unit Rumah	5.000.000	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni	Disperkim	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam	100 Unit Rumah	1.000.000	
17.2	Koordinasi dan sinkronsisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	Disperkim	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	- Unit Rumah	10.000.000	Koordinasi dan sinkronsisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	Disperkim	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	10 Unit Rumah	25.000.000	
D.	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Disperkim**	**Persentase RTLH yang tertangani**	**41 %**	**5.000.000**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Disperkim**	**Persentase RTLH yang tertangani**	**41 %**	**1.000.000.000**	
18.	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Disperkim**	**Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**		**5.000.000**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Disperkim**	**Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota**		**1.000.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
18.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Disperkim	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	55 Unit Rumah	5.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Disperkim	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	102 Unit Rumah	1.000.000.000	
E.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Disperkim**	**Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik**	**42,00 %**	**23.190.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Disperkim**	**Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik**	**42,00 %**	**4.890.618.514**	
19.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Disperkim**	**Terlaksananya urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**23.190.000.000**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Disperkim**	**Terlaksananya urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**4.890.618.514**	
19.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Disperkim	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	50.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Disperkim	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
19.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Disperkim	Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	22 Lokasi	23.080.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Disperkim	Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	22 Lokasi	4.780.618.514	
19.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Disperkim	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	10 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Disperkim	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	10 Laporan	10.000.000	
19.4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Disperkim	Jumlah dokumen kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan	5 Dokumen	50.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Disperkim	Jumlah dokumen kerjasama penyediaan/ pengelolaan PSU perumahan	5 Dokumen	50.000.000	
19.5	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Disperkim	Jumlah Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Disperkim	Jumlah Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	- Dokumen		
F.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,**	**Kab.Pemalang**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan**		**50.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,**	**Kab.Pemalang**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi,**		**10.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
21.	**Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan**	**Kab.Pemalang**	**Persentase terlaksananya kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan**		**50.000.000**	**Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan**	**Kab.Pemalang**	**Persentase terlaksananya kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan**		**10.000.000**	
21.1	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi	Kab.Pemalang	Jumlah lapran hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi	Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi	Kab.Pemalang	Jumlah lapran hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi		10.000.000	
II.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
G.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Kab. Pemalang**	**Persentase tanah garapan yang tertangani**	**80,00 %**	**100.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Kab. Pemalang**	**Persentase tanah garapan yang tertangani**	**80,00 %**	**100.757.500**	
22.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Penyelessaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100.000.000**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Penyelessaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**100.757.500**	
22.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	4 Berita Acara	100.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	4 Berita Acara	100.757.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
H.	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Kab. Pemalang**	**Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi**	**100,00 %**	**100.000.000**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Kab. Pemalang**	**Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi**	**95,00 %**	**2.000.394.300**	
23.	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah/ Kota**		**100.000.000**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pemalang**	**Terlaksananya Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah/ Kota**		**2.000.394.300**	
23.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pemalang	jumlah laporan koordinasi dan sinkronikasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota	15 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pemalang	jumlah laporan koordinasi dan sinkronikasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota	15 Laporan	2.000.394.300	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam hal tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menginventarisasi program dan kegiatan masyarakat melalui melalui kegiatan musrenbang kota dengan langkah-langkah

1) Inventarisasi permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan.
4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dilakukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			
1.	**Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten /kota**	**Sangat Rendah**		
a.	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	Kecamatan Ulujami	20 Unit rumah @ Rp. 20 Juta = Rp. 400 Juta	Desa sementara tidak bisa disebutkan karena masih menunggu usulan dan atau hasil cek lapangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b.	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	Kecamatan Ulujami	20 Unit rumah @ Rp. 50 Juta = Rp. 1 Miliar	Desa sementara tidak bisa disebutkan karena masih menunggu usulan dan atau hasil cek lapangan
B.	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			
1.	**Kegiatan :Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**			
a.	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Pemalang	50 Unit rumah @ Rp. 20 Juta = Rp. 1 Miliar	Desa sementara tidak bisa disebutkan karena masih menunggu usulan dan atau hasil cek lapangan
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN			
C.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			
1	**KEGIATAN : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			
a.	Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Untuk Kegiatan PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan) dan Mediasi Ex. Lahan PT Estu Subur	Kecamatan Moga, Kecamatan Bantarbolang	600 Juta rupiah	
D.	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**			
1.	**Kegiatan : Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten**			
a.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			
	Pengadaan Tanah untuk kepentingan pendidikan	Kecamatan Warungpring	2 Milyar	
	Pengadaan Tanah untuk relokasi korban bencana	Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Pulosari	2 Milyar	
JUMLAH TOTAL		**Tinggi**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yaitu **Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang Berkualitas dan Merata**.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan merata dilakukan melalui penanganan kumuh dan penyediaan rumah layak huni sesuai standar pelayanan minimal pada korban bencana dan proyek untuk mendukung tujuan peningkatan daya saing daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan menuju tercapainya tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang . Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak berarti semakin banyak keluarga di Kabupaten Pemalang yang memiliki rumah atau tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Ini mencakup kriteria seperti kecukupan luas tempat tinggal, akses air bersih, sanitasi yang layak, dan kondisi bangunan yang aman.
2. Meningkatnya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Meningkatnya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berarti semakin banyak tanah yang dialokasikan atau dibebaskan untuk pembangunan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.2. Strategi Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Strategi dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya dan merealisasikan salah satu tujuan daerah yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Dengan demikian strategi ini merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Perumusan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang didasarkan pada kriteria :

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

Dari keempat strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Penahapan juga memfasilitasi evaluasi dan penyesuaian rencana pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan secara berkala, sehingga lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tahap I (Tahun 2026)

Pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata dilakukan dengan berbasis data yang valid dan up to date sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur yang ada.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahap II (Tahun 2027)

Penataan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata dilakukan melalui tata kelola infrastruktur dengan mengembangkan SOP yang efektif dan efisien untuk menciptakan pertumbuhan dan daya saing wilayah.

Tahap III (Tahun 2028)

Peningkatan dan pembaharuan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata dilakukan dengan pengembangan digitalisasi teknologi untuk mengoptimalkan berbagai aspek, mulai dari pemetaan, pengelolaan, hingga pelayanan terkait perumahan dan permukiman.

Tahap IV (Tahun 2029)

Tahap IV tahun 2029 merupakan tahap terakhir dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2025-2029 dimana pada tahap ini telah terwujud penguatan fondasi transformasi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata.

Tahap V (Tahun 2030)

Tahap V tahun 2030 merupakan awal tahun dimulainya Tahap II RPJPD tahun 2030-2034 yaitu dengan dimulainya akselerasi transformasi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata. Akselerasi transformasi ini adalah dengan menjaga momentum pembangunan guna memastikan kesinambungan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang lebih berkualitas dan merata.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian	Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
				2024	2026	2029
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata		Luasan kawasan kumuh	Ha	198,258	197,258	195,758
		Backlog rumah	Unit	17.174	16.450	15.364
	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	32,13	71,06	75,77
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	67,87	28,94	24,23
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	31,2	31,56	32,04
		Indeks Pencapaian SPM PRKP	Indeks	100	100	100
	Terlaksananya Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 maka diperlukan rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Dalam merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan, antara lain :

a) Keserasian dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
b) Adanya sumber-sumber pendanaan yang akan dipergunakan dalam membiayai pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Secara garis besar Program dan Kegiatan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
2. Jumlah Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebanyak 8 (Delapan) Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan, dan 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 34.312.951.765,- (Tiga puluh empat milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. Rencana Pendanaan

Disperkim pada Perubahan Renja Tahun 2025 mengajukan Usulan sebanyak 7 (Tujuh) Program dengan 18 (Delapan Belas) Kegiatan, dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 35.450.382.000,-(Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 33.950.382.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Adapun Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan(Output)	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Penetapan (Setelah Efisiensi)	Perubahan		
1,04	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**31.851.832.200**	**33.339.359.200**	**1.487.527.000**	
1,04,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai IKM**	**Nilai**	**81,00**	**81,00**	**6.712.213.687**	**6.525.745.687**	**(- 186.468.000)**	
		Nilai SAKIP	**Nilai**	**64,00**	**64,00**				
		Nilai IRB	**Nilai**	**67,00**	**67,00**				
1.04 . 1.04.01 . 01,01	**Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,pengendalian,laporan kinerja,keuangan,SDM yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi OPD	Dokumen	42	42	129.128.932	201.208.932		
1.04 . 1.04.01 . 01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	6	33.160.000	38.720.000	5.560.000	
1.04 . 1.04.01 . 01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	umlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	4.048.432	4.048.432		
1.04 . 1.04.01 . 01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	4	4.000.000	4.000.000		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.04 . 1.04.01 . 01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.000.000	2.375.000	(- 1.625.000)	
1.04 . 1.04.01 . 01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4	4	4.049.500	2.424.500	(- 1.625.000)	
1.04 . 1.04.01 . 01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12	12	12.279.000	12.279.000		
1.04 . 1.04.01 . 01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12	12	67.592.000	137.362.000	69.770.000	Penambahan anggaran untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2
1.04 . 1.04.01 . 01,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Darah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Darah**		28	28	4.770.779.619	4.386.177.619	(- 384.602.000)	
1.04 . 1.04.01 . 01,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayar	Bulan	14	14	4.762.542.000	4.377.940.000	- 384.602.000	
1.04 . 1.04.01 . 01,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah laporan akhir akhir Penyusunan tersusun	Laporan	1	1	2.485.500	2.485.500		
1.04 . 1.04.01 . 01,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.Tersusun	Laporan	12	12	3.545.000	3.545.000		
1.04 . 1.04.01 . 01,02,08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	dokumen	1	1	2.207.119	2.207.119		
1,04,1,04,01,01 ,03	**Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**	Laporan	**1**	**1**	**1.629.500**	**5.940.000**	**4.310.500**	
1,04,1,04,01,01, 03,06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1.629.500	5.940.000	4.310.500	Penambahan anggaran

https://jdih.pemalangkab.go.id/

									untuk Sosialisasi
1,04,01,2,04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaraanya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Laporan**	**12**	**12**	**2.465.200**	**2.465.200**		
1,04,01,2,04,07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	2.465.200	2.465.200		
1,04,1,04,01,01 , 05	**Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**		**280**	**280**	**91.200.200**	**205.000.000**	**113.799.800**	
1,04,1,04,01,01, 05,10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	280	280	91.200.200	205.000.000	113.799.800	Penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
1,04,1,04,01,01, 05,11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-					
1,04 ,1,04,01,01, 06	**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah**	**Paket**	**16**	**16**	**145.193.608**	**209.290.108**	**64.096.500**	
1,04 ,1,04,01,01, 16,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Paket	1	1	15.198.740	13.698.740	(- 1.500.000)	
1,04 ,1,04,01,01, 16,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	paket	1	1	20.930.000	26.930.000	6.000.000	
1,04 ,1,04,01,01, 06,03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang di Sediakan	paket	1	1	17.951.568	29.599.068	11.647.500	
1,04 ,1,04,01,01, 06,05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	1	7.408.300	12.408.300	5.000.000	
1,04 ,1,04,01,01, 06,07	Penyediaan Bahan/Material.	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan	paket	1	1	15.135.000	26.135.000	11.000.000	
1,04 ,1,04,01,01, 06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	68.570.000	100.519.000	31.949.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1,04,1,04,01,01, 07	**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**paket**						
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	paket						
1,04, 1,04,01,01, 08	**Penyediaan Jasa penunjang Urusan Daerah**	**Terlaksananya Jasa penunjang Urusan Daerah**	**Laporan**	**24**	**24**	**1.411.554.000**	**1.339.696.000**	**(- 71.858.000)**	
1,04, 1,04,01,01, 08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	151.989.000	153.989.000	2.000.000	
1,04, 1,04,01,01, 08,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	1.259.565.000	1.185.707.000	(- 73.858.000)	
1,04, 1,04,01,01, 09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**71**	**71**	**160.262.628**	**175.967.828**	**15.705.200**	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemelihaaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraaan perseorangandinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	43	43	50.000.000	62.000.000	12.000.000	
1,04, 1,04,01,01, 09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Unit	4	4	20.000.000	25.705.200	5.705.200	
1,04, 1,04,01,01, 09,06	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	66	66	45.002.628	42.002.628	(- 3.000.000)	
1,04, 1,04,01,01, 09,09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung yang terpelihara	Unit	1	1	25.260.000	25.260.000		
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	1	20.000.000	21.000.000	1.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1,04,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**	**%**	**100**	**100**	**742.013.590**	**796.508.540**	**54.494.950**	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	**%**	**100**	**100**				
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota		**100**	**100**				
1,04, 1,04,01,01, 15	**Pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota**	**Terlaksananya Pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota**	**Laporan**	**1**	**1**	**197.635.817**	**245.625.817**	**47.990.000**	
1.04.02.2.01.08	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi	dokumen	1	1	75.029.817	123.019.817	47.990.000	
1.04.02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	122.606.000	122.606.000	-	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**orang**	**150**	**150**	**133.620.150**	**136.620.100**	**2.999.950**	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	orang	50	50	16.455.000	15.955.000	(- 500.00)	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	orang	100	100	117.165.150	120.665.100	3.499.950	
1,04, 1,04,01,01, 17	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten /kota**	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten /kota**	Rumah,Dokumen	**15**	**15**	**173.030.850**	**176.525.850**	**3.495.000**	
1,04, 1,04,01,01, 17,01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana terrehabilitasi	Rumah	15	15	173.030.850	176.525.850	3.495.000	
1,04, 1,04,01,01, 19	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Laporan**	**12**	**12**	**81.036.773**	**81.036.773**		
1,04, 1,04,01,01, 19,01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	1	1	53.198.723	53.198.723		
1,04, 1,04,01,01, 19,02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terpelihara	Laporan	12	12	27.838.050	27.838.050		
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Terselenggaranya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Dokemen**	**15**	**15**	**156.690.000**	**156.700.000**	**10.000**	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elekronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegritas secara elektronik	dokumen	15	15	156.690.000	156.700.000	10.000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh**	**%**	**62,53**	**62,53**	**39.290.000**	**36.352.000**	**(- 2.938.000)**	
1,04, 1,04,03,2,02	**Penataan dan Peningkatan**	**Terselenggaranya Penataan dan**	**Laporan**						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**							
1,04, 1,04,03,2,02,12	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan						
1,04, 1,04,03,2,03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Unit**	**12**	**12**	**39.290.000**	**36.352.000**	**(- 2.938.000)**	
1,04, 1,04,03,2,03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit						
1,04, 1,04,03,2,03.12	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Unit			13.060.000	13.060.000		
1,04, 1,04,03,2,03.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan	12	12	23.092.000	23.092.000		
1,04, 1,04,03,2,03.12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit			3.138.000	200.000	(- 2.938.000)	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase RTLH yang tertangani**	**%**	**69,48**	**69,48**	**941.514.784**	**941.014.784**	**(- 500.000)**	
1,04, 1,04,01,01, 25	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	rumah	**12**	**12**	**941.514.784**	**941.014.784**	**(- 500.000)**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1,04, 1,04,01,01, 25,01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	rumah	45	45	926.229.984	925.729.984	(- 500.000)	
1,04, 1,04,01,01, 25,08	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kegiatan	12	12	15.284.800	15.284.800		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM (PSU)	**PERSENTASE PSU DALAM KONDISI BAIK**	**%**	**56**	**56**	**23.416.800.140**	**25.039.738.190**	**1.622.938.050**	
1,04, 1,04,01,01, 26	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terselenggaraan PSU Perumahan**	**Lokasi**	**56**	**56**	**23.416.800.140**	**25.039.738.190**	**1.622.938.050**	
1,04, 1,04,01,01, 26,01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	6	6	62.804.500	62.804.500		
1,04, 1,04,01,01, 26,02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana,sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	lokasi	40	40	23.171.111.180	24.694.049.230	1.522.938.050	
2 04 05 2.01 03	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana,sarana dan utilitas umum perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana,sarana dan utilitas umum perumahan	Laporan	10	10	17.599.460	17.599.460		
3 04 05 2.01 04	verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang	Jumlah hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	perumahan	6	6	165.285.000	265.285.000	100.000.000	
2.04.1.04.01	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG**	**TERWUJUDNYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN**				**1.519.151.800**	**2.111.022.800**	**591.871.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	PERTANAHAN PERTANAHAN								
2.04.1.04.01.01	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE SENGKETA TANAH YANG DITANGANI**	**berita acara**	**4**	**4**	**107.757.500**	**496.628.500**	**388.871.000**	
2,04, 1,04,01,01, 18	**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Sengketa Pertanahan yang dilakukan**	berita acara	**4**	**4**	**107.757.500**	**496.628.500**	**388.871.000**	
2,04, 1,04,01,01, 18,02	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	berita acara	4	4	107.757.500	496.628.500	388.871.000	Penambahan anggaran untuk PPTPKH
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase Fasilitasi Bidang tanah yang bersertifikat**	**%**	**95**	**95**	**1.411.394.300**	**1.614.394.300**	**203.000.000**	
2,04, 1,04,01,01, 26	**Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten**	**Terlaksanaya Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten**	**%**	**4**	**4**	**1.411.394.300**	**1.614.394.300**	**203.000.000**	
2,04, 1,04,01,01, 26,01	koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Laporan	4	4	1.411.394.300	1.614.394.300	203.000.000	Penambahan anggaran untuk pengadaan tanah
Jumlah						**33.370.984.000**	**35.450.382.000**	**2.079.398.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-1, berdasarkan Renstra Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan SKPD Tahun 2026.

Rencana Kerja Disperkim Kabupaten Pemalang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Kerja tahun lalu. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1) Disperkim Kabupaten Pemalang memiliki 2 (dua) Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan.
2) Program Kegiatan yang diusulkan lebih diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 yang diarahkan pada program-program yang bisa menunjang Penuntasan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang.
3) Perlu disiapkan secara komprehensip pranata hukum sebagai payung dalam pelaksanaan penyaluran bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten.
4) Pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan fasilitasi pembangunan perumahan baik rumah susun maupun rumah tinggal biasa dalam rangka pemenuhan backlog perumahan.
5) Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan kebijakan mekanisme penganggaran dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.
6) Menggali potensi pendanaan pelaksanaan kegiatan melalui CSR (*Coorporate Social Responsibility*) maupun dengan konsep padat karya, atau Kerja Sama Pemerintah Swasta (KSP).
7) Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan kebijakan mekanisme penganggaran dalam pelaksanaan dan pelayanan bidang pertanahan.

Dengan adanya Rencana Kerja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 maka penetapan prioritas pembangunan di Kabupaten Pemalang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesame OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Pemalang, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP.
Pembina Tk.I
NIP. 19690318 199803 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotayang telah disyahkan.		√		Menunggu Hasil Verifikasi dari Tim

Pemalang, 19 September 2025

Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19690318 199803 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050 / 2495 / DISPERKIM / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor xxx Tahun xxx tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx Tahun xxx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;

b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 1 September 2025

Pemalang, 1 September 2025
Plt.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19690318 199803 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050 / 2495 / DISPERKIM / 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Bina Program Dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan	Anggota	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang		
7.	Kepala UPT Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	
NO.	**JABATAN DALAM INSTANSI**	**KEDUDUKAN DALAM TIM**	**KETERANGAN**
8.	Penelaah Kebijakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	ADDIN WIDI WICAKSONO, S.T

Plt.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19690318 199803 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra (RENCANA STRATEGIS), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berikut tahapan perencanaan perangkat daerah :

Gambar 1.1
Tahapan Perencanaan Perangkat Daerah

Melalui APBD Kabupaten Pemalang dimana secara substansi diawali dengan kondisi umum yang menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025 secara singkat, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pada tahun 2026 termasuk isu-isu strategis. Berdasarkan cakupan tersebut, Rencana Kerja Dinas PerhubunganTahun 2026 diharapkan:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Lembaga lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai bagian dalam penyusunan APBD Kabupaten Pemalang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 antara lain adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2025
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGANTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas PerhubunganKab. Pemalang

2.2. Analisis Kinerja Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan / kegiatan / program / sasaran / tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbaikan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 dan estimasi Tahun 2025 dapat disampaikan pada tabel Indikator sasaran strategis yang hendak dicapai, sebagaimana tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu dan akuntabel**	100	100	100	100	100		50
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	3 Dokumen	60.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	1 Laporan	33.33
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	2 Laporan	1 Laporan	50.00
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prersentase administrasi keuangan daerah terpenuhi dalam satu tahun**	100	100	100	100	100		55.56
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468 Orang 14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100	14 Bulan	8 Bulan	57.14

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	55 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50.00
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah dalam satu tahun**	100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	0	0	0
2.15.01.2.02.007	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1 Orang	1 Orang	100
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar Pelaksanaan tugas**	100	100	100	100	100		61.67
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis 12 Bulan	3 Paket	3 Paket	100	1 Paket	0	0
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	3 Paket	100	2 Paket	1 Paket	50.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Jenis 12 Bulan	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	1 Paket	33.33
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis 12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	2 Paket	50.00
2.13..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Jenis 12 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	0	0	0
2.13..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Kegiatan	110 Laporan	110 Laporan	100	110 Laporan	70 Laporan	63.64
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase pengadaan barang milik daerah dalam satu tahun**	100	100	100	100	100		100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 Unit	4 Unit	4 Unit	100	25 Unit	25 Unit	100
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100	0	0	0
2.13.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	24 Unit	8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	8 Unit	100
2.15.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 Unit	1 Unit	100
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	100	100	100	100	100		50

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 Surat	1000 Surat	1000 Surat	100	0	0	0
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Jenis 12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50.00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	255 Orang 12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50.00
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan barang milik daerah dalam satu tahun**	100	100	100	100	100		43.55

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	8 Unit	8 Unit	100	4 Unit	2 Unit	50.00
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	4 Unit	4 Unit	100	7 Unit	0	0
2.13.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	5 Unit	5 Unit	100	16 Unit	8 Unit	50.00
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	0	0
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	85 Unit	3 Unit	3 Unit	100	34 Unit	16 Unit	47.06

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dipelihara / Direhabilitasi							
2.15.02	***PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)***								
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Prosentase wilayah yang telah di tetapkan rencana induk LLAJ**	100	100	100	100	100		0
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100 Laporan	0	0	0	0	-	-
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Presentase perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia**	100	100	100	100	100		59.38
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Terbangun	15 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	0	0
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang Tersedia	234 Unit	1 Unit	1 Unit	100	12 Unit	6	50.00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	190 Unit	11 Unit	11 Unit	100	8 Unit	5 Unit	62.50

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10822 Unit	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	8 Unit	72.73
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase terminal penumpang tipe C yang sesuai standar**	100	100	100	100	100		57.14
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	2 Unit	2 Unit	100	7 Unit	7 unit	57.14
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**	100	100	100	100	100		50.00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2500 Titik	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan diuji**	100	100	100	100	100		92.31
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	0 Unit	0
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33100 Unit	900 Dokumen	900 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200 0rang	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	55 Unit	9 Unit	9 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100.00
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Dokumen	0	0	100	0	-	-
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang menerima pengetahuan tentang lalu lintas**	100	100	100	100	100		54.55
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1750 Orang	5 Orang	5 Orang	100	4 Laporan	2 Laporan	50.00
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	4 Laporan	66.67
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten / Kota**	100	100	100	100	100		50.00
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis andalalin yang terawasi		30 Laporan	30 Laporan	100	30 Laporan	15 Laporan	50.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angktan teladan**	100	100	100	100	100		60.00
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	250 Kendaraan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0	0
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	10 Posko	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	2 Laporan	50.00
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase awak angkutan yang mengikuti pemilihan awak angkutan teladan**	100	100	100	100	100		50.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7000 Kendaraan	13 Laporan	13 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50.00
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penerbitan Izin Trayek Angkutan Perkotaan dan Pedesaan**	100	100	100	100	100		54.55

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	533 Kendaraan	10 Laporan	10 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	50.00
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	150 Kali	12 Laporan	12 Laporan	100	10 Laporan	6 Laporan	60.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Strategis PD) Tahun 2025-2029	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis PD s/d Tahun 2025	
				Target Rencana Kerja PD Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase ketersediaan Dokumen Evaluasi Jaringan Trayek**	100	100	100	100	100		0
2.15.02.2.14.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang

Dinas Perhubunganmemiliki beberapa indikator yang harus dicapai untuk mendukung realisasi Rencana Strategis. Indikator ini didasarkan dari target untuk mendukung capaian realisasi RPJMD Kabupaten Pemalang. Berikut capaian indikator kinerja utama dan perbandingan capaian dengan kabupaten lain :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Rencana Strategis Dinas Perhubungan					Realisasi Capaian %				Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IKM	Nilai		✓						82.00	78.40	78.70	77.71	81.97	82.00	-	-
SAKIP	Nilai		✓						69.00	58.61	61.55	65.66	69.02	69.00		
Level of Service	Rasio		✓	✓	0,44	0,44	0,43	0,43	0.36	0.34	0.36	0.36	0.38	0.36	-	-
Rasio Konektivitas	Indeks		✓	✓	86.60	86.65	87.10	87.35	76.50	87.30	87.30	87.30	71.42	76.50		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan tujuan :

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP
- Menilai akuntabilitas kinerja instasi pemerintah
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instasi

Evaluasi dinilai melalui 4 (empat) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Dari evaluasi yang dilakukan Inspektorat, nilai yang didapatkan yaitu :

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Sakip Dinas Perhubungan Tahun 2024

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	**Perencanaan Kinerja**	**30%**	**22.03**
2	**Pengukuran Kinerja**	**30%**	**20.04**
3	**Pelaporan Kinerja**	**15%**	**10.50**
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25%**	**16.45**
Jumlah		**100,00**	**69.02**

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 69.02 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori penilaian “B” (Baik) dengan interprestasi baik (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu penting penyelenggaraan akan membahas mengenai isu yang ada di Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang, visi misi Kabupaten Pemalang, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan telaah isu yang sesuai dengan permasalahan Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang.

Isu dan permasalahan yang mendesak saat ini berkenaan dengan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Isu dan Masalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sistem konektivitas	Kurangnya pelayanan	- Kurangnya pembinaan terhadap layanan angkutan umum

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	antar wilayah belum optimal	angkutan umum di Kab. Pemalang	- belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh - Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum - Minat Masyarakat yang tinggi terhadap Angkutan Online (Grab dan Gojek)
		Masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal	- Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal penumpang sesuai dengan standar Pelayanan - Belum ada terminal bongkar muat - Kurangnya kapasitas SDM pengelola terminal
		Belum adanya pelabuhan pengumpan lokal	- Belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan perijinan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
2	Potensi kemacetan di kawasan perkotaan	Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal	- Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal - Manajemen dan SDM pengelola parkir belum optimal - Banyaknya titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu - Adanya potensi gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan baru di Ruas Jalan Kabupaten
3	Tingginya potensi kecelakaan lalu lintas	Masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan uji berkala	- Tidak adanya sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala KBWU - Kurangnya pemahaman keselamatan transportasi
		Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan	- Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan - Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pemalang laporan RPJMD yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja juga mendasari pada Rencana Strategis yang telah disahkan. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2026 dimana besar anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan kinerja Dinas Perhubungandalam melayani urusan perhubungan di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Review yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
DINAS PERHUBUNGAN				**425**	**15.786.422.000**	**DINAS PERHUBUNGAN**				**425**	12.732.097.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				**278**	**12.228.193.500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**278**	11.788.103.800
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**10**	**76.307.720**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**10**	25.775.650
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	68.580.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	7.913.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	1.950.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1.079.500,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	1.615.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3.353.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	4.519.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	4.373.520	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	3.674.000,00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	1	3.525.150,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	1	3.525.150,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**27**	**8.956.071.400**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					8.918.476.500,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	8.947.639.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	8.910.754.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	5.589.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	5.119.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	12	2.842.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	12	2.603.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**10.839.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**0**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	1	10.839.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**120**	**288.271.380**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**120**	**210.779.650**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.166.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.171.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.068.080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.503.350

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2.528.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2.528.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	53.488.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	51.120.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	75.931.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	68.395.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	143.617.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	85.061.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**120.072.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**0**
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	40.805.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0
Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	8	50.392.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	28.875.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**2.536.072.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**2.539.672.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	282.024.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	285.624.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.254.048.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.254.048.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**240.560.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**93.400.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	108.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	88.610.000
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7	560.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	5.680.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Unit	1	118.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	4.790.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	34	7.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Unit	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					**3.558.228.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**943.993.200**
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					**99.644.000**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**					**0**
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	99.430.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	214.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					**1.786.192.900**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**					**181.301.200**
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	1.508.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	1.300.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	12	1.350.078.500	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	12	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	8	298.324.300	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	8	75.001.200
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	11	136.282.100	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	0	0
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					**276.976.120**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**					**100.000.000**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	276.976.120	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	100.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					**147.478.880**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**					**20.000.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	147.478.880	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	20.000.000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					**339.840.500**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**					**190.000.000**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	38.692.850	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	9.760.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	62.500.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	65.000.000
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar	Unit	1	2.890.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar	Unit	1	2.740.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	10	235.757.650	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	10	112.500.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					**551.848.700**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**					**306.202.500**
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	1	66.840.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	0	0
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	4	6.191.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	4	7.500.000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	6	478.817.700	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	6	298.702.500
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					**2.052.600**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**					**3.000.000**
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis	Laporan	30	2.052.600	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis	Laporan	30	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
		Andalalin yang terawasi						Andalalin yang terawasi			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					**116.000.000**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**					**15.000.000**
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	1	-
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	4	116.000.000	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	4	15.000.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**71.860.000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**75.000.000**
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	71.860.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	75.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**22**	**66.334.800**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**51.500.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Pagu Indikatif**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	65.230.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	50.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	10	1.104.800	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	10	1.500.000
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**1**	**100.000.000**	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**1.489.500**
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	**1.489.500**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 Penelaahan Usulan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan program/kegiatan di Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tidak melaksanakan program / kegiatan hasil Musrenbang yang telah diusulkan dari masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Untuk tahun 2026 Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang tidak ada usulan dari para peserta forum, untuk program kegiatan pada tahun 2026

Tabel 2.6
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan (Ranking)
	NIHIL				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Tujuan dan Sasaran Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah **"Meningkatnya Kinerja Transportasi"**. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud untuk mendukung visi misi Kabupaten Pemalang yang menfokuskan pada misi ke-3 Apik **"Meningkatkan Kabupaten Pemalang Sebagai Wilayah Yang dikelola dengan Baik dan Ramah"**.
2) Untuk mendukung tujuan Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang terdapat beberapa sasaran dan indikator yang dapat dilihat melalui tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas PerhubunganTahun 2025 Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	Persen	81.75
			Nilai Sakip	Persen	65.75
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas	Indeks	72.02

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas PerhubunganTahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Rencana program dan kegiatan Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang pada Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 menjelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025. Hal ini digunakan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungandalam mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perhubunganyaitu Misi 3 Apik **"Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai Wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah"** dengan tujuan **"Meningkatnya Kinerja Transportasi".**

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdapat sasaran yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kinerja Transportasi

Berikut rencana kerja dan pendanaan Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang tahun 2026 yang dijelaskan pada tabel 4.1 :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Perhubungan						12.732.097.000,00							4.390.907.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.732.097.000,00							4.390.907.000,00	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						12.732.097.000,00							4.390.907.000,00	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.788.103.800,00						-	110.000.000,00	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.775.650,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	20.000.000,00	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7.913.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

															modernisasi pertanian dan perikanan				
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	1.950.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	1.079.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	1.615.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4.519.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3.674.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	3.525.150,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.918.476.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	0,00	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1106/14 Orang/bulan	8.910.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.119.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.603.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	0,00	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	210.779.650,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	0,00	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.171.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.503.350,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.528.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	51.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	68.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	85.061.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	50.000.000,00	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.539.672.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	20.000.000,00	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	285.624.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.254.048.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	20.000.000,00	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	88.610.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.790.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	943.993.200,00							-	4.280.907.000,00	
					[Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)]	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota Persentase Kendaraan Yang Melakukan KIR Persentase tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C Rasio Izin Trayek	0.85 68.21 71 82	1 65.36 66.34 76.4	0.80 66 66.64 77	0.81 66.67 67 78	943.993.200,00							4.280.907.000,00	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota															
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota															

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		31.788.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
					-													
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	181.301.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	2.251.389.000,00	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1.300.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

														pertanian dan perikanan				
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Unit	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		1.420.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan													
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				8 Unit	75.001.200,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		194.757.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	100.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	180.330.000,00	
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	20.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	134.400.000,00	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	190.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	773.000.000,00	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	9.760.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		213.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	2.740.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	306.202.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	0,00	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	3.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	0,00	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	180.000.000,00	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota													
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C													
						Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	215.000.000,00	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi	-	-	190.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

														pertanian dan perikanan				
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.489.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	190.000.000,00	
J U M L A H											12.732.097.000,00						4.390.907.000,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Rencana Strategis dapat tercapai.

Dinas Perhubunganmelaksanakan satu urusan yaitu urusan perhubungan. Urusan perhubungan diprioritaskan pada peningkatan manajemen transportasi darat, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan, dan peningkatan pelayanan angkutan. Dalam hal ini terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Rencana Kerja tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

   Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik maka perlu kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan yaitu :

   a. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang harus mampu melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan yang ada didalam Rencana Kerja Dinas PerhubunganTahun 2026.
   b. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang Tahun 2026, Kepala Dinas harus mengawasi dan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun 2026.

2. Rencana Tindak Lanjut

   Adapun tindak lanjut yang perlu diperbaiki dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungantahun 2026, hal ini untuk menjadi perhatian yang diharapkan tidak terulang Kembali pada penyusunan Rencana Kerja di tahun selanjutnya :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Perlu adanya kerjasama yang baik antara unsur eksekutif dan legislatif dalam memberikan data maupun informasi yang diperlukan, agar dalam penyusunan Rencana Kerja dapat berjalan lancar.
b. Perlu adanya saran dan kritik yang membangun dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Perhubunganagar dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun selanjutnya dalam tercapai dengan baik.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksaan Rencana Kerja Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang Tahun 2026, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir.

Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas PerhubunganKabupaten Pemalang Tahun 2026, yang akan terwujud dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, September 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG

HERU WEWEG SEMBODO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740815 199303 1 002

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2026 ini merupakan penjabaran rencana strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan Renja, pengumpulan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renja, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan Renja, musyawarah perencanaan pembangunan RKPD, perumusan rancangan akhir Renja, dan penetapan Renja. Adapun dalam tahap penyusunan Renja ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan Renstra tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Pada rancangan akhir Renja ini telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Lingkungan Hidup, baik di Kabupaten Pemalang, tingkat provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang juga memuat usulan dari Pokok Pikiran, hasil Musrenbang di tingkat kecamatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja (PD) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja dan Dokumen Perencanaan lainnya

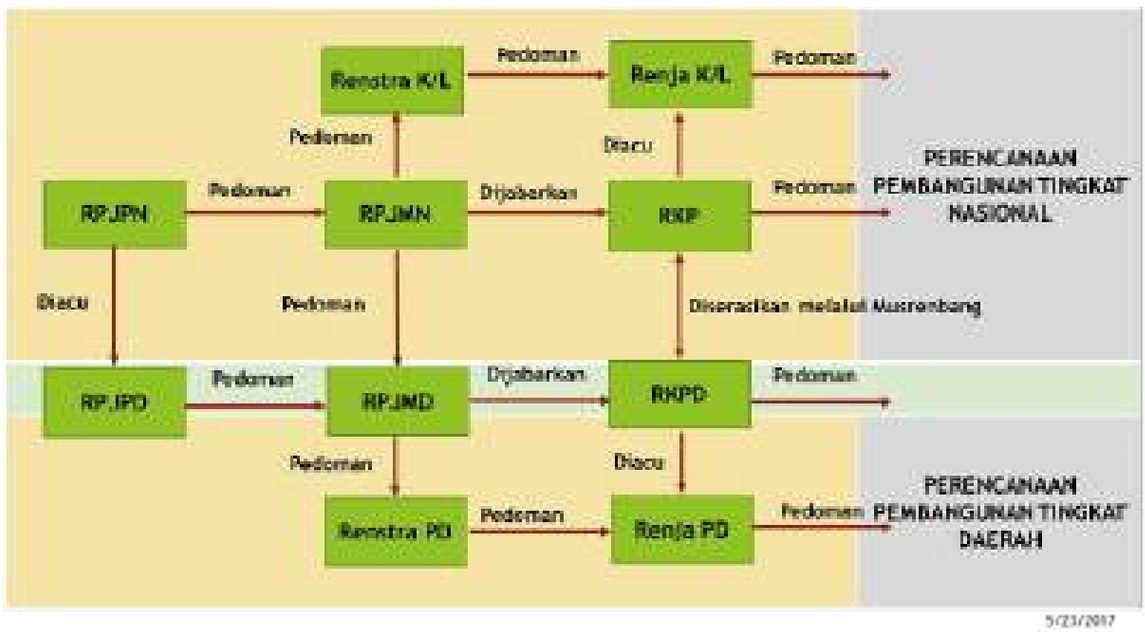

Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar Kabupaten berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jadi Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jadi Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jadi Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:
   1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah.
   2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi RPJMD serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami

https://jdih.pemalangkab.go.id/

perubahan sesuai sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja PD setiap tahunnya

3. Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah.

b) Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah ini adalah :

1. Mengevaluasi terhadap program, kegiatan, sub kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun yang akan datang;
2. Mengumpulkan rancangan atau usulan program serta kegiatan dari bidang dalam lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang;
3. Memilih, memilah dan menelaah rancangan atau usulan program serta kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Renja DLH Kabupaten Pemalang pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan untuk mengetahui kinerja yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang melaksanakan urusan lingkungan hidup sebanyak 10 Program, 17 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 29.028.583.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.374.894.903 (94,30 %). Secara detail pelaksanaan program DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 95,54 % (terealisasi sangat tinggi) dengan sisa anggaran terbesar berasal dari sisa penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 693.090.208,-
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   Program perencanaan lingkungan hidup mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 51,65 % (terealisasi rendah). Program ini berisi tentang penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sepeti Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terdapat 1 kegiatan yang terlaksana dengan capaian realisasi hanya 9,91 % yaitu penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota. Penyusunan KLHS Review Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) tidak bisa dilaksanakan karena peninjauan kembali RTRW oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum turun. Penyusunan KLHS Review RTRW Kabupaten Pemalang harus bersinergi atau bersamaan dengan penyusunan Dokumen Review RTRW yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 97,56 % (terealisasi sangat tinggi). Program tersebut berisi tentang pemantauan kualitas air dan udara, pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta pengelolaan laboratorium

https://jdih.pemalangkab.go.id/

lingkungan hidup. Adapun sisa anggaran terbesar pada program ini berasal dari sisa belanja bahan kimia pada subkegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   Program pengelolaan keanekaragaman hayati mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 89,66 % (terealisasi tinggi). Program tersebut berisi tentang peningkatan keanekaragaman hayati melalui penanaman bibit tanaman.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
   Program pengedalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) mencatat realisasi anggaran sebesar 95,96 % (terealisasi sangat tinggi).
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) mencatat realisasi anggaran sebesar 91,15 % (terealisasi sangat tinggi).
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
   Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 92,65 % (terealisasi sangat tinggi).
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
   Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 79,12 % (terealisasi tinggi).
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   Program penanganan pengaduan lingkungan hidup mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 40,01 % (terealisasi sangat rendah). Terdapat 5 pengaduan yang masuk dan diterima dari target 10 pengaduan pada tahun 2024.
10. Program Pengelolaan Persampahan.
    Program pengelolaan persampahan mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 93,01 % (terealisasi sangat tinggi).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra DLH Kabupaten Pemalang s/d Tahun 2024 DLH Kabupaten Pemalang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**SAKIP**	**nilai**	**66,01**	**63,25**	**64,01**	**64,44**	**100,69**	**64,01**	**69,19**	**108,09**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	7	8	8	100	8	8	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dukungan kelancaran administrasi keuangan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	1	100	1	1	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	2	1	1	1	100	1	1	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	1	2	2	100	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	-	1	1	1	100	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	2	-	-	-	-	1467	1400	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Administrasi Umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	4	6	6	100	2	2	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	2	14	14	100	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	2	2	2	100	1	1	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket/bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	4	12	12	100	6	6	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	2	2	2	100	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	150	100	100	100	200	200	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	13	13	47	47	100	15	15	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	16	5	18	18	100	4	4	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terselenggaranya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	6	6	100	20	20	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100	1	1	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	28	31	31	100	28	28	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12	7	10	10	100	-	-	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	3	3	3	100	3	3	100
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	12	10	9	9	100	3	3	100
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun**	**%**	**100**	**100**	**100**	**66,67**	**66,67**	**100**	**100**	**100**
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	**Persentase tersedianya Dokumen RPPLH**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen		2	2	2	100	3	3	100
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	**Terselenggaranya Dokumen KLHS**	**%**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	dokumen	1	1	1	0	0	1	1	100
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	**Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	**nilai**	**76,82**	**66,15**	**69,52**	**66,81**	**96,10**	**76,78**	**76,78**	**100**
	Indeks Kualitas Air	**nilai**	**75,95**	**53,33**	**47,59**	**48,33**	**101,55**	**75,85**	**75,85**	**100**
	Indeks Kualitas Udara	**nilai**	**84,93**	**85,49**	**89,53**	**92,83**	**103,69**	**84,92**	**84,92**	**100**
	Indeks Kualitas Lahan	**nilai**	**63,33**	**52,40**	**70,16**	**50,39**	**71,82**	**63,32**	**63,32**	**100**
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	**Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	2	2	2	100	2	2	100
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim	laporan	-	-	-	-	-	1	1	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	2	2	1	1	100	2	2	100
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	**Persentase Pengelolaan Kehati**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	**Persentase Pengelolaan Kehati**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	**Persentase Pengendalian B3 & LB3**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase Penyimpanan sementara LB3**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	100	25	20	20	100	1	1	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan	**Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**%**	**29**	**29**	**29**	**30**	**103,45**	**28**	**28**	**100**
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiataan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	60	25	25	25	100	20	20	100
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	8	4	6	6	100	6	6	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	-	-	150	150	100	410	410	100
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	4	4	6	6	100	4	4	100
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	pengaduan	15	10	10	5	50	10	10	100
Program Pengelolaan Persampahan	**Persentase sampah yang terangkut**	**%**	**85**	**83**	**83**	**82**	**97,65**	**82**	**82**	**100**
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	**%**	**77**	**76**	**76**	**75,46**	**98,70**	**75**	**75**	**100**
Pengelolaan Sampah	**Persentase sampah yang dikelola secara 3R**	**%**	**30**	**24**	**24**			**24**	**24**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tngkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	8	N/A	10	10	100	4	4	100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	249	185	316	315	99,68	5	5	100
Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2	1	1	1	100	2	2	100
Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	65000	80000	82000	76068	92,77	65000	65000	100
Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	ton	-	-	56982	52023	91,30	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan. Indikator kinerja beserta target dan capaian realisasinya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	11	12	13	13	14	15
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%				77,75	79	80	80	81	79	80	80	81	81	Proyeksi disamakan dengan target
2	Indeks kualitas udara	Indeks				89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	84,16	85,49	92,83	89,58	89,63	
3	Indeks kualitas air	Indeks				46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	48,33	53,33	48,33	47,83	48,24	
4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penyelesaian kasus lingkungan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%				20	20	40	60	100	40	60	60	100	100	
8	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%				43,074	43,078	43,083	43,092	43,096	43,078	43,078	43,083	43,092	43,096	
9	Persentase penanganan lahan kritis	%				0,0363	0,0463	0,0563	0,0663	0,0763	0,0463	0,0463	0,000154	0,0763	0,0863	
10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab.	%				97,93	98,80	98,77	98,84	100	85,38	84,84	85,97	100	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	11	12	13	13	14	15
11	Persentase Penanganan sampah	%				73,99	72,92	71,83	70,95	70,00	59,50	59,60	59,82	70,00	70,00	
12	Persentase pengurangan sampah	%				23,94	25,88	26,94	27,89	30,00	25,88	25,24	26,15	30,00	30,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hasil Evaluasi SAKIP

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan evaluasi akuntabilitas pada setiap perangkat daerah terhadap lima komponen besar kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2025, DLH Kabupaten Pemalang memperoleh nilai sebesar 69,19 dengan kategori B (Baik). Adapun dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, terdapat beberapa rekomendasi langkah langkah perbaikan yang harus dilaksanakan oleh DLH, antara lain :

1. Mengoptimalkan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021.
2. Menyusun crosscuting secara baik sampai pada program dan kegiatan.
3. Menyusun lebih optimal dalam penyusunan manajemen risiko sampai dengan sub kegiatan.

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi SAKIP DLH Kabupaten Pemalang

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	23,09
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	20,80
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,13
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	15,17
	Jumlah	100 %	69,19

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” dan “Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup” antara lain sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
   Seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian, pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan, serta pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan kegiatan industri, akan menimbulkan degradasi kualitas lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan produktivitas ekosistem.
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah
   Pengelolaan sampah menjadi masalah pokok di Kabupaten Pemalang. Pada Tahun 2024, jumlah timbulan sampah Kabupaten Pemalang mencapai 219.250 ton, dan total sampah yang dapat dikelola hanya sebesar 188.488 ton. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pemalang terus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta keterbatasan fasilitas pengolahan sampah menjadi tantangan utama Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Fenomena pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*)
   Pemanasana global dan perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat penggunaan bahan bakar minyak, pertanian yang tidak ramah lingkungan, pembakaran sampah dan aktivitas manusia lainnya baik forestry and other land use (FOLU). Perkembangan perkotaan secara tidak langsung juga berpengaruh pada perubahan iklim, disamping faktor utama yakni meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Perubahan tutupan lahan didaerah perkotaan mempengaruhi suhu udara secara mikro di perkotaan. Perubahan fungsi lahan yang terjadi dalam kurun 5 tahun terakhir di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari peningkatan luas lahan terbangun dan penurunan luas lahan terbuka (sawah, ruang terbuka, hijau, hutan dll).

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Pemalang tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, berikut hambatan dan permasalahan yang ada di kabupaten Pemalang :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Pemalang

Tusi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Tugas: 1. Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten; 2. Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten; 3. Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten; 4. Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 5. Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; 6. Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah; 7. Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah; 8. Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup; 9. Urusan Persampahan Fungsi: a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;	Permasalahan: 1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 2. Belum optimalnya pengelolaan sampah; 3. Fenomena pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*).	Faktor Penghambat: 1. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya; 2. Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan bidang lingkungan hidup; 3. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri; 4. Laju pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan upaya pengendalian dan pemulihan; 5. sarana prasarana labolatorium lingkungan dan SDM yang menguasai bidang labolatorium lingkungan; 6. Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai; 7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; 8. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 9. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Faktor Pendorong: 1. Tersedianya dana APBD dan APBN di bidang lingkungan hidup. 2. Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 3. Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang lingkungan hidup baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tusi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		4. Tersedianya PPLHD sebagai instrument pengawasan. 5. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, dll 6. Adanya sektor Dukungan penyelenggaraan pelatihan di bidang lingkungan hidup 7. Adanya program CSR perusahaan yang mendukung pengelolaan lingkungan

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas dirumuskan rekomendasi berupa solusi dan rencana tindak lanjut yang menjadi dasar dalam menentukan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas DLH Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
3. Meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
4. Meningkatkan kapasitas laboratorium lingkungan parameter kualitas air dan udara;
5. Meningkatkan pendampingan dan fasilitasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran udara;
7. Meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup guna meningkatkan kapasitas SDM masyarakat/lembaga pendidikan/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan.
8. Meningkatkan kolaborasi dengan para phak dalam pengelolaan lingkungan.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun melalui mekanisme bottom up maupun top down. Mekanisme bottom up dilaksanakan melalui Musrenbangdes, Musrenbangkec dan Musrenbangkab, sedangkan mekabisme top down dilaksanakan melalui Forum PD.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, DLH Kab. Pemalang melaksanakan 9 (Sembilan) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**19.053.511.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**19,437,640,000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**32.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**32,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.500.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.500.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**14.763.355.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14,397,272,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	14.755.745.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang / bulan	14,367,272,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem SKPD	3 Laporan	4.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**9,500,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**218,500,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	200,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	9.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**275.172.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**462,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	1 paket	4.622.000	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	10,000,000	Antisipasi naiknya SSH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penerangan Bangunan Kantor		Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			penyediaan komponen listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.550.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	10,000,000	Jumlah paket meningkat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	180,000,000	Antisipasi kenaikan SSH penyediaan logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	40,000,000	Kualitas cetak dan penggandaan meningkat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,000,000	Jumlah bacaan bertambah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	131.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lapora	200,000,000	Antisipasi naiknya SSH komponen rakor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**67.718.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**200,000,000**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	29.500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	60,0000,000	Jumlah unit bertambah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.218.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	40,000,000	Jumlah unit bertambah
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60,0000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	40,000,000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**3.727.301.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,960,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		JUmlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan	4.986.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		JUmlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	251.519.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.470.796.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,800,000,000	Peningkatan jumlah penyediaan jasa pelayanan umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**178.465.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**275,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	90.965.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	150,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	1.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	16.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	10,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	100,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	10,000,000	Kulitas pemeliharaan meningkat
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				**150.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				**315,000,000**	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan				**130.000.000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan**				**265,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					**Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**					
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	130.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	265,000,000	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				**20.000.000**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**				**50,000,000**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	20.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	50,000,000	Peningkatan kualitas dokumen pelaporan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				**746.387.200**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**1.220,000,000**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**746.387.200**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				**1.220,000,000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	240,000,000	Meningkatnya jumlah uji air tanah dan udara
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	73.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	250,000,000	Fasilitasi perubahan CA menjadi TWA
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	90.000.000	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	90.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	333.387.200	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	730,000,000	Peningkatan kapasitas operasional laboratorium
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				**50.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**200,000,000**	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				50.000.000	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**				**200,000,000**	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	200,000,000	Peningkatan kualitas data dan informasi terkait kehati
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				**15.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**				**50,000,000**	
	Penyimpanan sementara Limbah B3				**15.000.000**	**Penyimpanan sementara Limbah B3**				**50,000,000**	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 laporan	15.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 laporan	25,000,000	Peningkatan kualitas data dan pelaporan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				**25.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**30,000,000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau				**25.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau**				**30,000,000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 laporan	25.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Kota		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 laporan	30,000,000	Optimalnya pengawasan kepada pelaku usaha
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**212.188.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**400,000,000**	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**212.188.000**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**400,000,000**	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	103.188.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	250,000,000	Meningkatnya kualitas kompetensi SDM
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	500 Orang	45.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	500 Orang	45.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	64.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokume	150,000,000	Bertambahnya jumlah pendampingan dan pembinaan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**0**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**0**	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**0**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**0**	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		0	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		0	Peningkatan Jumlah lomba lomba lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				**5.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**50,000,000**	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				**5.000.000**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**				**50,000,000**	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	10 dokume	5.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	15 dokume	50,000,000	Pembuatan laporan akhir terkait pengaduan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				**5.582.380.200**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**8,400,000,000**	
	Pengelolaan Sampah				**5.582.380.200**	**Pengelolaan Sampah**				**8,400,000,000**	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan	15 Kelompok	468.354.200	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan	15 Kelompok	468.354.200	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Sampah Berbasis Masyarakat					Sampah Berbasis Masyarakat			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 dokumen	100,000,000	Review Jakstrada Pemalang
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 laporan	125.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 laporan	100,000,000	Menambah jumlah sosialisai 3R ke masyarakat
	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	85000 ton	3.967.866.000	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	85000 ton	8,000,000,000	Untuk menambah jumlah ritasi armada pengangkut sampah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	5 unit	1.021.160.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	200,000,000	Mengejar pemenuhan Sarpras yang belum ideal jumlahnya
					25.839.466.400					**80.924.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top down dan bottom up.

Berdasarkan kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah, usulan program/kegiatan dari masyarakat Tahun 2026 yang diampu oleh DLH Kabupaten Pemalang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 (Hasil Musrenbang)

No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan sarpras pengelolaan sampah	Dukuh Tangkeban RT.05 RW.03	Nyalembeng	Pulosari	1 Paket	Rp. 81.160.000
2	Sarpras Pendukung Pengolahan Sampah	RT 06 RW 2	Mangli	Randudongkal	1 Paket	Rp. 100.000.000
3	Pengadaan Alat Pengolah dan Pengelolaan Sampah (Insenerator)	Gondang	Gondang	Taman	1 Unit	Rp. 380.000.000
4	Pengadaan Incenerator	Petarukan	Petarukan	Petarukan	1 Unit	Rp. 380.000.000
5	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Belik	Belik	Belik	50 Orang	Rp. 26.907.700
6	Pelatihan Pengolahan Sampah	Wisnu	Wisnu	Watukumpul	50 Orang x 2 hari	Rp. 26.907.700
7	Pelatihan Pengolahan Sampah	Majalangu	Majalangu	Watukumpul	50 Orang x 2 hari	Rp. 26.907.700
8	Pelatihan pengolahan pupuk organik	Kuta	Kuta	Bantarbolang	1 Paket	Rp. 30.000.000
9	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Gembyang	Gembyang	Randudongkal	20 Orang	Rp. 20.000.000
10	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Kalitorong	Kalitorong	Randudongkal	20 Orang	Rp. 20.000.000
11	Pelatihan Pengolahan Sampah	Widuri	Widuri	Pemalang	50 Orang	Rp. 26.908.000
12	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Sokawati	Sokawati	Ampelgading	50 Orang	Rp. 40.000.000
13	Pelatihan Pengolahan Sampah	Purwosari	Purwosari	Comal	4 Kelompok	Rp. 35.000.000
14	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Sarwodadi	Sarwodadi	Comal	25 Peserta	Rp. 25.000.000
15	Pelatihan Pengolahan Sampah menjadi Pupuk Organik	Pakembaran	Pakembaran	Warungpring	1 Paket	Rp. 26.907.700

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Warungpring	Warungpring	Warungpring	1 Paket	Rp. 26.907.700
17	Pelatihan Pengolahan Sampah	Mereng	Mereng	Warungpring	1 Paket	Rp. 26.907.700

Adapun program/kegiatan dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 tersaji dalam tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Pengusul	Fraksi	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	PDIP	Pelatihan daur ulang sampah Komunitas Peduli Lingkungan, Desa Kabunan, Kec. Taman	Pelatihan pengolahan sampah	Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Rp. 75.000.000
2	MA' MUN RIYAD, S.Sos	PKB	Persoalan pengeloaan sampah yang belum terselesaikan	Pelatihan pengolahan sampah	Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	Rp. 35.000.000
3	FAHMIDH DHUHA, S.M, .M.M.	GERINDRA	Bantuan Kendaraan Angkut sampah roda 3 kepada Paguyuban Peduli Lingkungan Jalan Siwalan Rt 1 Rw 2 Desa Bojongnangka Kec Pemalang	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/SPA/TPST Kabupaten	Jalan Siwalan Rt 1 Rw 2 Desa Bojongnangka Kec Pemalang, Kab. Pemalang	Rp. 50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", arah kebijakan lingkungan hidup dalam RKP Tahun 2026 berfokus pada penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular untuk mendukung ekonomi hijau. Dalam RKP Tahun 2026, urusan lingkungan hidup diintegrasikan melalui pengurangan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 37,14% dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 76,67, dengan prioritas pengelolaan sampah dan air. RKP Tahun 2026 juga akan mendorong pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah dan memperkuat sistem pemantauan melalui pengumpulan data yang terintegrasi.

Fokus Utama Kebijakan Lingkungan Hidup pada RKP Tahun 2026 adalah Penguatan Ketahanan Lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan peningkatan ketahanan bencana dan iklim akan didorong melalui penguatan sistem ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana. Pembangunan rendah karbon diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.1.
Sasaran Utama Prioritas Nasional 2 Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau

No	Sasaran	Target Tahun 2026
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	76,67
2.	Indeks Ekonomi Hijau	71,01
3.	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	60,00
4.	Persentase penurunan intensitas emisi GRK Kumulatif (%)	19,07
5.	Persentase penurunan intensitas emisi GRK Tahunan (%)	27,35
6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaurulang)
7.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47

Mengacu pada prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2026 ditetapkan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Tema Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif .

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang untuk sektor lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

III.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan dan mengemban tugas pokok dan fungsinya harus mampu menerjemahkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yakni:

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni“

Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan 6 (enam) misi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berkontribusi pada **Misi ke 6 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Kuat dan Berkesinambungan”.** Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun yakni Tahun 2021-2026.

Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan”.

Rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2026
1	2	3	4	5
Meningkatkan konservasi serta pengendalian keurasakan dan pencemaran lingkungan hidup		Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	81
	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	75,95
	Meningkatnya Indeks Kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	84,93

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2026
	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
		Penyelesaian kasus lingkungan	%	100
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	100
	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,096
		Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0863
Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan		Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab. Pemalang	%	100
	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	70
		Persentase pengurangan sampah	%	30
Meningkatnya kinerja pelayanan dinas lingkungan hidup		Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	Indeks	81,07
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	66,01

III.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam Rencana Program dan Kegiatan 2026, DLH Kabupaten Pemalang direncanakan berjumlah 9 Program, 16 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**31.447.777.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**31.447.777.000**
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**% dokumen perencanaan LH yang disusun**	**100 %**	**400.000.000**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		**% tersedianya Dokumen RPPLH**	**100 %**	**300.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	200.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan		Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	1 dokumen	100.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			100 %	**100.000.000**
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	100.000.000
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase data kualitas udara yang memenuhi baku mutu**	**54,17**	**800.000.000**
			Persentase data kualitas air yang memenuhi baku mutu	**52,08**	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH**	**100 %**	**800.000.000**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	50.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	50.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 kegiatan	50.000.000
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK		Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	50.000.000
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 lokasi	200.000.000
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 laporan	100.000.000
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 dokumen	300.000.000
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase tutupan Lahan pendukung Indeks Tutupan Vegetasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota**	**43,096 %**	**200.000.000**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		**Persentase Pengelolaan Kehati**	**100 %**	**200.000.000**
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	100.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	48,053 Ha	100.000.000
4	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Persentase Keg/Usaha yang melakukan Pengelolaan Limbah B3**	**25 %**	**30.000.000**
	Penyimpanan sementara Limbah B3		**Persentase Pengendalian B3 & LB3**	**100 %**	**30.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3		Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	15 usaha	30.000.000
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**65 %**	**300.000.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina**	**100 %**	**300.000.000**
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 dokumen	50.000.000
	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5 orang	50.000.000
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	3 orang	50.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 usaha/kegiatan	50.000.000
	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup		Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	2 unit	100.000.000
6	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup**	**50 unit**	**250.000.000**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi**	**100 %**	**250.000.000**
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	100.000.000
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 orang	50.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	6 lembaga	150.000.000
7	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Pengaduan Masyarakat Terhadap Dugaan Pencemaran/ Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**40.000.000**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)**	**100 %**	**40.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 pengaduan	20.000.000
	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup		Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2 orang	20.000.000
8	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	**32,81 %**	**9.327.422.000**
	Pengelolaan Sampah		**Persentase sampah yang dikelola**	**86,47 %**	**9.327.422.000**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11 kelompok	300.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 unit	1.000.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	200.000.000
	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	54000 ton	5.627.422.000
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2880 ton	400.000.000
	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 laporan	100.000.000
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	54000 ton	1.000.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	5 unit	700.000.000
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100 %**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja disusun sesuai regulasi	**100 %**	**20.100.355**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi**	**16 Dokumen**	**32.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.500.000
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	9.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100 %**	**14.763.355.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 orang/bulan	14.755.745.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	4.110.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**100 %**	**431.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	350.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	1.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	50.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi**	**100 %**	**397.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	5.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	15.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	120.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	25.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	12.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	210.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**100 %**	**140.500.000**
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	29.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	38.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	73.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.915.000.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	255.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.655.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**100 %**	**421.500.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	100.000.000
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	1.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	300.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan dan subkegiatan beserta pagu indikatif, yang dirancang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sekaligus Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, arah kebijakan RPJPD, hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam menerjemahkan Visi dan Misi pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, maka dapat ditelaah dari Misi pada Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.

Selaku Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Pemalang melaksanakan Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yakni melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial.

Rencana kerja dan pendanaan DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026 untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**25.839.466.400,00**						**32.377.035.470**
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**25.839.466.400,00**						**32.377.035.470**
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**150.000.000,00**						**270.681.720**
2	**11**	**02**	**201**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**			**130.000.000,00**						**270.681.720**
2	11	02	201	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten /Kota	2 dokumen	130.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	180.454.480
2	11	02	201	0007	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	1 dokumen	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	90.000.000
2	**11**	**02**	**202**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**			**20.000.000,00**						**0**
2	11	02	202	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	20.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		0	00
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**746.387.200,00**						**784.784.550**
2	**11**	**03**	**201**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			**746.387.200,00**						**784.784.550**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	03	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	250.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 dokumen	30.000.000
2	11	03	201	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	73.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	30.000.000
2	11	03	201	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 kegiatan	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	30.000.000
2	11	03	201	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 dokumen	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	50.000.000
2	11	03	201	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 lokasi	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		10 lokasi	200.000.000
2	11	03	201	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	90.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 Laporan	130.000.000
2	11	03	201	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 dokumen	333.387.200,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang		250 dokumen	314.784.550

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
											kuat serta daya saing sumberdaya manusia			
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**50.000.000,00**						**84.455.000**
2	**11**	**04**	**201**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**			**50.000.000,00**						**84.455.000**
2	11	04	201	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	50.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	40.000.000
2	11	04	201	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	48,053 Ha	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		48,058 Ha	44.455.000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**15.000.000,00**						**21.023.100**
2	**11**	**05**	**201**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**			**15.000.000,00**						**21.023.100**
2	11	05	201	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	15 Usaha	15.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		17 usaha	21.023.100
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**25.000.000,00**						**330.000.000**
2	**11**	**06**	**201**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**25.000.000,00**						**330.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	06	201	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 dokumen	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		10 dokumen	50.000.000
2	11	06	201	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5 orang	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		5 orang	50.000.000
2	11	06	201	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang Ditingkatkan kapasitasnya	3 orang	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 orang	30.000.000
2	11	06	201	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Usaha/ Kegiatan	25.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		25 Usaha/ Kegiatan	50.000.000
2	11	06	201	0011	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	2 unit	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 unit	150.000.000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**212.188.000,00**						**297.373.100**
2	**11**	**08**	**201**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan**			**212.188.000,00**						**297.373.100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	11	08	201	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen	64.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		10 dokumen	90.000.000
2	11	08	201	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang	45.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		150 orang	57.373.100
2	11	08	201	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	6 lembaga	103.188.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		10 lembaga	150.000.000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**5.000.000,00**						**10.000.000**
2	**11**	**10**	**201**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**			**5.000.000,00**						**10.000.000**
2	11	10	201	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 aduan	5.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		12 aduan	10.000.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**5.582.380.200,00**						**9.650.000.000**
2	**11**	**11**	**201**		**Pengelolaan Sampah**			**5.582.380.200,00**						**9.650.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	11	201	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11 Kelompok	468.354.200,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		11 Kelompok	300.000.000
2	11	11	201	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	125.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	200.000.000
2	11	11	201	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	54000 ton	3.967.866.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		55000 ton	6.500.000.000
2	11	11	201	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan *peraturan perundangan*	2880 ton	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2900 ton	450.000.000
2	11	11	201	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 laporan	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 laporan	100.000.000
2	11	11	201	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	54000 ton	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		54000 ton	1.100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	11	201	0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	5 Unit	1.021.160.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		5 Unit	1.000.000.000
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.053.511.000,00**						**20.928.718.000**
2	**11**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**32.000.000,00**						**46.500.000**
2	11	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 Dokumen	15.000.000
2	11	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	4.000.000
2	11	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	3.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 dokumen	3.000.000
2	11	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 dokumen	3.000.000
2	11	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2 dokumen	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		4 laporan	5.000.000
2	11	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 Laporan	3.500.000
2	11	01	201	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 Berita Acara	10.000.000
2	**11**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**14.763.355.000,00**						**15.011.500.000**
2	11	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 orang/bulan	14.755.745.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		172 orang	15.000.000.000
2	11	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 Dokumen	1.500.000
2	11	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 Laporan	4.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	4.110.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 Laporan	6.000.000
2	**11**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**9.500.000,00**						**500.000.000**
2	11	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 paket	200.000.000
2	11	01	205	0005	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	9.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		100 Orang	300.000.000
2	**11**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**275.172.000,00**						**470.000.000**
2	11	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.622.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 paket	10.000.000
2	11	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.550.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 paket	15.000.000
2	11	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 paket	15.000.000
2	11	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	100.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang		1 paket	145.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
											kuat serta daya saing sumberdaya manusia			
2	11	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 paket	30.000.000
2	11	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 dokumen	15.000.000
2	11	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	0					1 laporan	10.000.000
2	11	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	131.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		200 laporan	230.000.000
2	**11**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**67.718.000,00**						**388.218.000**
2	11	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	29.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		10 Unit	50.000.000
2	11	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	38.218.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		5 unit	38.218.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		1 unit	300.000.000
2	**11**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.727.301.000,00**						**3.960.000.000**
2	11	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 laporan	4.986.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		2500 laporan	5.000.000
2	11	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	251.519.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		12 laporan	255.000.000
2	11	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.470.796.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		12 laporan	3.700.000.000
2	**11**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**178.465.000,00**						**552.500.000**
2	11	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	90.965.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		28 unit	90.000.000
2	11	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		4 Unit	2.500.000
2	11	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	16.500.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		9 unit	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	70.000.000,00			Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan P1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia		3 unit	300.000.000
2	11	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	0					3 unit	150.000.000
Jumlah								**25.839.466.400,00**						**32.377.035.470**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V PENUTUP

Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta menjadi acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada DLH dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang sebagai satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, dan misi Kabupaten Pemalang.

Renja DLH Kabupaten Pemalang selain sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

V.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut :

a. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026 setelah diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
b. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja DLH Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Kepala DLH Kabupaten Pemalang wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini, maka:

a. Koordinasi yang intensif antara unsur eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan agar perencanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat berjalan lancar.
b. Demi kesempurnaan dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan urusan lingkungan hidup tahun 2026.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
19700131 199303 2 003

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten /kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan - Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	✓			

Pemalang, September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk.I
NIP. 19700131 199303 2 003

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 28, Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 322121, Laman www.dlh.pemalangkab.go.id
Surel : klh_pemalangkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 600.4 /068 /DLH/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan

b. merumuskan dan Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 3 April

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk.I
NIP. 19700131 199303 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Yang bersangkutan untuk diketahui;
2. Arsip.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 600.4 /068 /DLH/2025
TANGGAL : 1 April 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
5.	Kasubag. Bina Program dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
7.	Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
8.	Kepala Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
9.	Kasubag. TU Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
10	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
11.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Umar Sidik, S.IP
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Inayati Ainah, S.Si
13.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Siamatun, S.H
14.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Agus Aribowo, S.T
15.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Riyani Anggarini, S.T
16.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Salasatun Atminingtyas, S.T

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
17.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Elvira Astriana Sari, S.T
18.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Redina Restiani, S.T
19.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Andika Bimaseta, S.T
20.	Pranata Komputer pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Fikfik Victor A, A.Md
21.	Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Koriyah, A.Md

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk.I
NIP. 19700131 199303 2 003

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor pertanian. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Pemalang yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada usaha tani, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan dan sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan lahan produktif, alih fungsi lahan, perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses petani terhadap modal, teknologi, dan pasar. Di samping itu, perubahan kebijakan nasional terkait pupuk bersubsidi, sistem distribusi pangan, dan tuntutan pasar global terhadap produk pertanian yang berkualitas, berdaya saing, serta ramah lingkungan menjadi faktor yang harus diantisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan pertanian.

Dalam konteks pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas pertanian, penguatan kelembagaan petani, pengembangan infrastruktur pertanian, serta pemanfaatan inovasi teknologi. Fokus kebijakan tersebut selaras dengan misi Bupati Pemalang dalam mewujudkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui pengembangan industri hijau yang

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 menjadi sangat penting sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Renja juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pemalang.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, sehingga keberadaannya memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis lima tahunan dengan perencanaan operasional tahunan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Renja sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun, dengan fungsi utama menjabarkan arah strategis ke dalam rencana tahunan yang lebih operasional dan terukur.

Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang sendiri merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam proses penyusunannya, Renja Dinas Pertanian mengacu pada kerangka arahan dalam rancangan awal RKPD dan dilakukan secara simultan dengan penyusunan RKPD. Proses ini diawali dengan pengkajian kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi capaian kinerja Renstra. Selanjutnya, rancangan akhir Renja ditetapkan melalui pengesahan Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran bersangkutan.

Adapun prinsip penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan penganggaran terpadu. Selain itu, Renja juga mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta mengacu pada urusan wajib sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah berdasarkan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

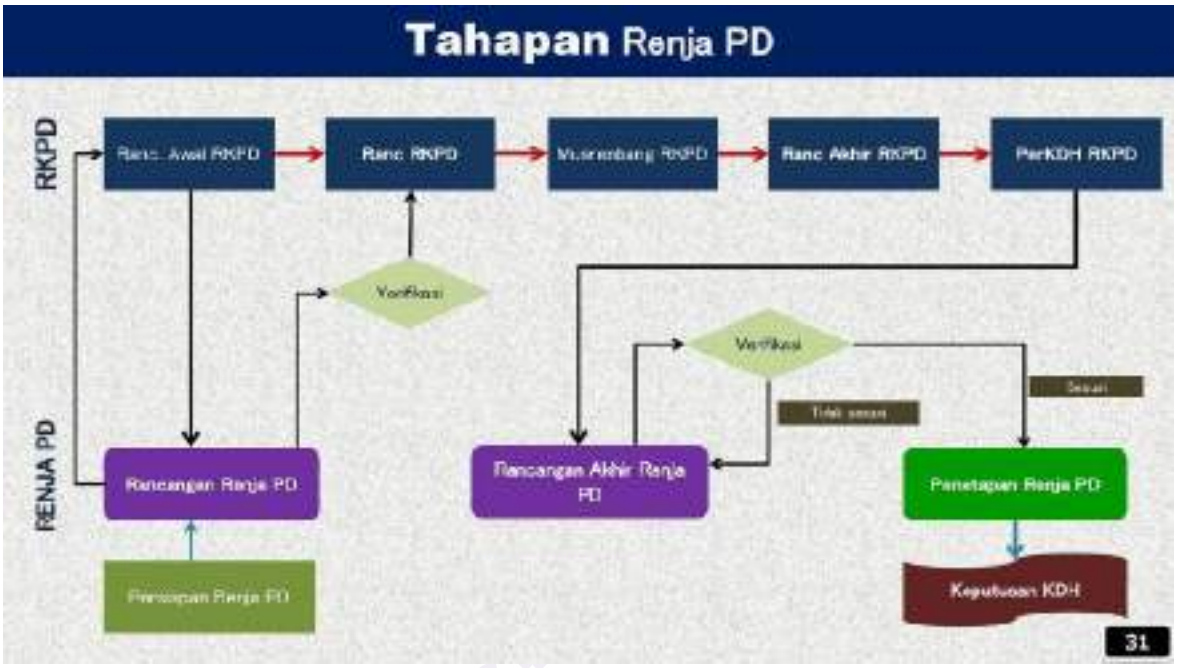

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 208);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor ..... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Pertanian jangka pendek 1 (satu) tahun.
2. Menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Dinas Pertanian, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Dinas Pertanian.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

I.3.2 TUJUAN

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Pertanian dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Pertanian tahun 2026;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Tahun 2026;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang;
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD;
1.3 Landasan Hukum;
1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispertan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian ;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian;
2.3 Evaluasi Hasil SAKIP;
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispertan;
2.5 Review Terhadap Ranwal RKPD;

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

1.2 Tujuan Dan Sasaran Renja.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang melaksanakan 10 program, 28 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33.625.978.050,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 33.034.849.934,- dan belanja modal sebesar Rp. 489.128.116,-. Realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2024 adalah Rp. 30.979.455.295,- atau 92,13 persen.

Sedangkan target pendapatan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebesar Rp. 375.000.000,- yang terdiri dari Lain-Lain PAD yang sah (Penyewaan Tanah) sebesar Rp. 200.000.000,-, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp. 75.000.000,- dan Retribusi Pemakaian Alat (Pelayanan Puskeswan) sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi sampai desember sebesar Rp 379.604.500,-.

2026 DISPERTAN PEMALANG

Tabel 2.1.1
Realisasiasi Pendapatan Dinas Pertanian Tahun 2024
Sampai Dengan Desember Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi S/D Desember (Rp)
4.1.02.02.01.0002	Lain-Lain PAD yang sah (Penyewaan Tanah)	200.000.000	202.546.500
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000	98.470.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat (Pelayanan Puskeswan)	100.000.000	78.588.000
Total		**375.000.000**	**379.604.500**

Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh progam, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dengan capaian memenuhi target dan tidak memenuhi target adalah:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   Capaian target program terealisasi terealisasi 100% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 5.000.000,-. Program tersebut berisi tentang monitoring lumbung pangan masyarakat.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Capaian target program terealisasi 98,28% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 459.050.000,- terealisasi Rp 451.143.200,-. Program tersebut berisi tentang pemantauan harga dan pasokan pangan, pengadaan cadangan pangan untuk masyarakat terdampak bencana dan pembinaan pemanfaatan kader pangan.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

   Capaian target program terealisasi 100% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 72.500.000,-. Program tersebut berisi kegiatan penyusunan peta kerawanan pangan dan bantuan subsidi pangan untuk masyarakat tidak mampu.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Capaian target program terealisasi 100% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 30.450.000,-. Program tersebut berisi kegiatan untuk pembinaan pelaku usaha yang mengajukan registrasi.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Capaian target program terealisasi 86,66% atau tinggi dari anggaran Rp 18.056.492.850,- terealisasi Rp 15.646.933.103,-.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Capaian target program terealisasi 96,88% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 1.291.672.200,- baru terealisasi Rp 1.271.065.000,-. Program tersebut berisi kegiatan penyediaan sarana berupa pupuk, alat mesin pertanian, penyediaan bibit buah, penyediaan ternak, pengolahan paka silase, dan penyediaan sarana lainnya.

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

   Capaian target program terealisasi 99,41% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 8.148.934.000,- terealisasi Rp 8.101.051.774,-. Program tersebut berisi kegiatan pembangunan/ rehabilitasi jaringan usaha tani, jalan usaha tani, damparit, Balai Penyuluh Pertanian dan prasarana lainnya.

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Capaian target program terealisasi 99,74% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 610.650.000,- terealisasi Rp 609.084.292,-. Program tersebut berisi kegiatan penyediaan obat dan peralatan obat, pelayanan RPH dan Puskeswan, pendampingan usaha ternak, pemeriksaan antemortem dan postmortem dan fasilitasi pameran untuk pelaku usaha peternakan.

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

   Capaian target program terealisasi 99,20% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 311.896.000,- terealisasi Rp 309.416.000,-. Program tersebut berisi kegiatan penyediaan obat dan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

10. Program Penyuluhan Pertanian

    Capaian target program terealisasi 97,10% atau sangat tinggi dari anggaran Rp 3.493.733.000,- terealisasi Rp 3.392.531.772,-. Program tersebut berisi kegiatan penyusunan dokumen programa, penyediaan bantuan operasional penyuluh, pelatihan penyuluh, sosialisasi dan pelatihan guna peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan Rencana Capaian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 2.1.

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERTANIAN

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai RB dan SAKIP	Nilai		0 dan 63,55	61 dan 62	0 dan 69,54	0 dan 104,18	62 dan 63	0 dan 69,54	110,38
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	5	100	5	15	100
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	3	100	3	9	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	2	2	100	2	6	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

RENJA 2026 DISPERTAN P

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	dilaksanakan									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	144	134	115	115	100	115	364	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9500	10000	4000	4000	100	4000	18000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	100	1	3	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	18	18	18	18	100	18	54	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100
Administrasi Barang Milik										

RENJA 2026 DISPERTAN P

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang mutakhir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase administrasi barang milik daerah yang mutakhir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	0	0	0	12	24	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Persentase administrasi barang milik daerah yang mutakhir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	30	0	0	0	0	1	1	3
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	tugas									
	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (lampu, saklar, stop kontak dan fitting plafon dan instalasi listrik)	paket	5	5	5	5	100	2	7	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laptop dan printer)	paket	3	2	2	2	100	8	11	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum, Kebersihan dan Bahan Komputer)	paket	3	4	4	4	100	4	11	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (spanduk)	paket	1	1	1	1	100	1	3	100

RENJA 2026 DISPERTAN PE

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4560	150	180	150	100	150	1200	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	500	220	200	220	100	150	640	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	100	12	36	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100	12	36	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	100	12	36	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	100	12	36	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	unit	270 unit	176 unit	176 unit	176 unit	100	176 unit	542 unit	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Operasional	perizinannya									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	16	16	16	16	100	16	48	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	38	25	20	20	100	20	65	100
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Presentase lumbung pangan aktif	Indeks		22,97%	22,97%	22,97%	100	25,22%	25,22%	100
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	Presentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	2%	2%	2%	2%	100	2%	6%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Presentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	2%	2%	2%	2%	100	2%	6%	100
Penyediaan Infrastruktur cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur cadangan pangan pemerintah KabupatenKota yang tersedia yang Tersedia	unit	1	0	1	1	0	0	1	100
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	1	0	0	0	0	2	2	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	laporan	1	0	0	0	0	1	1	100
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan pangan	ton	10	4 ton	20 ton	4 ton	20	20 ton	25 ton	100

RENJA 2026 DISPERTAN PE

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										
	Presentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya terkait ketersediaan dan kerawanan pangan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Presentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya terkait ketersediaan dan kerawanan pangan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/ Kota	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/ Kota	Laporan	12	12	12	12	100	12	33	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	3	2	2	2	100	2	7	100
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100

RENJA 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	unit	18	24	1	1	100	5	30	100
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										
	Presentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Presentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	20	4	15,72	15,72	100	4,48	24,2	100
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										
	Presentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Presentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	0	1	1	100	1	3	100
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	2	0	0	0	0	2	2	100
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase penurunan desa rawan pangan	%		34,28%	34,28%	34,28%	100	31,42%	31,42%	100
Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan										
	Presentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Presentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100

RENJA PERANGKAT

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman	%	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Penguatan Kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	dokumen	1	1	2	2	100	3	6	100
Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	dokumen	2	3	3	3	100	3	8	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian sesuai kebutuhan (prosentase bibit+pupuk+alsintan)	%	80%	80%	80%	80%	100	80%	160%	100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										
	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12	3	5	5	100	4	12	100
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5	2	3	3	100	4	9	100
Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan	0	0	0	0	0	2	2	100
Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	batang	0	0	0	0	0	5000	5000	100

RENJA 2026 DINAS PERTANIAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	batang	0	0	0	0	0	950	950	100
Pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapaen tanaman	laporan	0	0	0	0	0	1	1	100
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain										
	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain	ekor	1000	200	320	300	93,75	975	1475	100
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik = (rata-rata prosentase (jut dlm kondisi baik+irigasi+embung+sumur dalam)	%								
Pengembangan Prasarana Pertanian										
	Presentase Prasarana Pertanian yang berkembang	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Presentase Prasarana Pertanian yang berkembang	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	12	12	12	100	12	36	100
Pembangunan Prasarana Pertanian										
	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang terbangun	unit	8	9	24	24	100	15	48	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	15	3	18	18	100	10	31	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	4	0	2	2	100	1	3	75

RENJA 2026 DINAS PERTANIAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	8	3	7	7	100	0	10	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	2	0	1	1	100	5	6	100
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%								
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	laporan	1	1	1	1	100	1	3	100
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	laporan	12	12	12	12	100	12	36	100
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner di UPTD RPH dan Puskeswan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner di UPTD RPH dan Puskeswan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	12	12	12	12	100	12	36	100
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	1	1	1	1	100	1	3	100
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang diawasi terhadap Penerapan Cara yang baik	laporan	1	1	2	2	100	3	5	100
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan										
	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pendampingan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	unit	3000	3000	3000	3000	100	3000	9000	100
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%								
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										
	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Presentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	Ha	5000	2000	2000	2000	100	2500	6500	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Dikendalikan									
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	Ha	0	0	0	0	0	10	10	100
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani aktif	%								
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										
	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	14	14	14	14	100	14	42	100
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10	3	9	9	100	9	21	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	3	4	10	10	100	6	20	100
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0	0	0	0	66	66	100

RENJA 2026 DISPERTAN P

https://jdih.pemalangkab.go.id/

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) dan SPM (standar pelayanan minimal), maupun terhadap IKK (indikator kinerja kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Indikator kinerja sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Dinas Pertanian belum terumuskan. Dalam peraturan tersebut, hanya ada 6 (enam) pelayanan dasar yang SPM nya sudah diatur, yakni SPM Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial.

Adapun indikator kinerja yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Dinas Pertanian untuk periode lima tahun sebagaimana tertera pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 serta Renstra Dinas Pertanian tahun 2021-2026 adalah presentase ketersediaan pangan dan presentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Pemalang, tersaji dalam Tabel 2.2 berikut :

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERTANIAN

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Keterangan
				2021	2022	2024	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(11)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase persediaan pangan	--	--	100	25	75	75	25	20	75	25		
2.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	--	--	2,56	2,57	3,38	3,38	2,6	-	3,38	2,6		
3.	Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	--	--	18,46	20,72	18,47	18,47	27,47	18,47	18,47	27,47		
4.	Pola pangan harapan	--	--	93.1	93.6	95,49	95,49	95,2	96,3	95,49	95,2		
5.	Persentase tertanganinya kejadian	--	--	34.28	31,42	22,86	22,86	22,85	22,86	22,86	22,85		

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Keterangan
				2021	2022	2024	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(11)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kerawanan pangan												
6.	Produktivitas padi	--	--	57,71	57,73	62,09	62,09	57,79	62,31	62,09	57,79		
7.	Produktivitas kopi	--	--	848	871	763,74	763,74	948	624	763,74	948		
8.	Produksi daging dan telur	--	--	15.390.367	15.503.050	18.746.661	18.746.661	15.847.280	16.484.284	18.746.661	15.847.280		

Dari Tabel 2.2 di atas mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 secara keseluruhan sudah memenuhi target yang direncanakan.

RENJA 2026 DISPERTAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

II.3 HASIL EVALUASI SAKIP

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi akuntabilitas pada setiap OPD. Evaluasi dilakukan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Evaluator Inspektorat pada tahun 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar 69,41 dengan kategori B (baik) yang dapat diartikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja. Nilai ini meningkat 3,21 point dibanding tahun 2024 dengan skor 66,20 dengan kategori B.

Secara umum dapat dilihat penilaian hasil Evaluasi SAKIP yang diperoleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang lima tahun terakhir sejak tahun 2021 sebagai berikut :

2026 DISPERTAN PEMALANG

TABEL 2.3.1
HASIL EVALUASI SAKIP DISPERTAN

Komponen	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Pemalang				
	Nomor: 700/47/EVS/2021 Tanggal 4 Agustus 2021	Nomor: 700/18/EVS/2022 Tanggal 18 Juli 2022	Nomor: 700/023/EVS/VI/2023 Tanggal 14 Juni 2023	Nomor: 700/171/EVS/2024 Tanggal 27 Mei 2024	Nomor: 700.1.2.1/0357/2025 Tanggal 5 Mei 2025
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Perencanaan Kinerja	26,81	21,6	21,6	21,28	21,83
Pengukuran Kinerja	13,13	18,9	19,5	20,04	20,61
Pelaporan Kinerja	10,00	9,3	9,3	9,89	9,87
Evaluasi Internal	3,05	13,75	15	15,00	17,1
Capaian Kinerja	8,71	Tidak masuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah			
Nilai SAKIP Dispertan	**61,68**	**63,55**	**65,4**	**66,20**	**69,41**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

II.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Pertanian adalah perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta sarana prasarana pertanian dan pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Hingga saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang masih terkendala dalam mengaplikasikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Sedangkan di Kepmendagri 900.1.15.5-1317/2023 dan Permendagri 18/2020 untuk sub kegiatan sudah terbagi menjadi per masing-masing urusan. Sehingga, yang terjadi di Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang adalah satu sub kegiatan diampu oleh lebih dari satu seksi dan satu bidang.

Selain kendala krusial di atas, kendala umum yang juga masih menjadi permasalahan pangan dan pertanian di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Belum meratanya keterjangkauan pangan;
2. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan;
3. Masih terjadi kerawanan pangan di beberapa wilayah pedesaan dan perbatasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang;
4. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis kearifan pangan lokal;
5. Rendahnya regenerasi petani dikarenakan minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian mengalami penurunan;
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (Jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani, BPP, sarana klinik hewan, puskeswan, pengendalian OPT, dll).
7. Tingginya tingkat ketergantungan petani akan pupuk kimia. Pemupukan di lahan sawah dirasa belun sesuai dibandingkan kebiasaan pemupukan petani secara umum.
8. Berkurangya lahan pertanian yang produktif akibat alih fungsi lahan, bencana air rob, ataupun penurunan tingkat kesuburan tanah;
9. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani, Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi.
10. Masih rendahnya Pengembangan sentra produk pertanian dan penanganan pasca panen
11. Sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.
12. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), serta gangguan reproduksi ternak sehingga produktivitas ternak relatif masih rendah.
13. Belum maksimalnya penjaminan keamanan produk hewan dimana lima unit rumah potong hewan (RPH) yang ada di Kabupaten Pemalang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya, perlu diperhatikan ancaman dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian, yaitu sebagai berikut:

1. Ancaman (*threats*)
   - ✓ Berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja serta berusaha di bidang pertanian. Tingkat pendapatan petani yang masih rendah
   - ✓ Rendahnya cadangan pangan ketika terjadi bencana
   - ✓ Terbatasnya sarana dan prasana pertanian, jalan usaha tani serta jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan, terbatasnya alat dan mesin pertanian, pengendalian opt, pupuk, dll
   - ✓ Berkurangnya lahan pertanian produksi karena adanya alih fungsi lahan maupun bencana rob.
   - ✓ Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis.
   - ✓ Lemahnya posisi tawar petani dan penanganan pasca panen.
   - ✓ Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran.
   - ✓ Adanya impor produk pertanian.
   - ✓ Terbatasnya sumber pangan lokal, terutama sumber karbohidrat non beras terkait pola pangan harapan.
2. Peluang (*opportunities*)
   - ✓ Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian.
   - ✓ Tingginya kebutuhan dan permintaan terhadap komoditi pertanian sehingga masih terbuka kesempatan bagi petani untuk mengembangkan budidaya dan produksi komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomis dan daya jual tinggi.
   - ✓ Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi tanah dan air serta kelestarian lingkungan.
   - ✓ Masih adanya areal pertanian di Kabupaten Pemalang yang cukup luas;

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- ✓ Adanya kelembagaan tani yang perlu difasilitasi.
- ✓ Peluang pasar yang besar untuk komoditas pertanian.

Dari isu-isu strategis di atas, menjadi dasar acuan dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang untuk mengatasi isu-isu strategis guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang seperti tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Dinas Pertanian, antara lain:

1. Koordinasi multi stakeholder lintas fungsi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas produk pertanian dengan peningkatan budidaya dan pengolahan pasca panen, sehingga mampu tercipta sentra produk pertanian unggulan.
3. Menyediakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pertanian.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian.
5. Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produk unggulan lokal masih harus ditingkatkan.

Sedangkan program yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk setahun ke depan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan pada pencapaian terwujudnya Nilai Sakip dan RB dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 63/64.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   Program ini diarahkan pada pencapaian lumbung pangan aktif dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 29,72%.
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Program ini diarahkan pada pencapaian jumlah ketersediaan pangan dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 20 ton.

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

   Program ini diarahkan pada pencapaian penurunan desa rawan pangan dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 20%.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Program ini diarahkan pada pencapaian pangan segar yang aman dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 80%.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Program ini diarahkan pada pencapaian sarana pertanian sesuai kebutuhan (prosentase bibit+pupuk+alsintan) dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 80%.

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

   Program ini diarahkan pada pencapaian prasarana pertanian dalam kondisi baik = (rata-rata prosentase (jut dlm kondisi baik+irigasi+embung+sumur dalam) dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 20%.

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Program ini diarahkan pada pencapaian penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 10,96%.

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

   Program ini diarahkan pada pencapaian penurunan kejadian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 20%.

10. Program Penyuluhan Pertanian

    Program ini diarahkan pada pencapaian kelompok tani aktif dengan target capaian pada tahun 2026 sebesar 5%.

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

II.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui mekanisme *bottom up* maupun *top down*. Mekanisme *bottom up* dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan mekanisme *top down* dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah (forum PD) dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga RKPD mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian melaksanakan 10 (sepuluh) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
10. Program Penyuluhan Pertanian.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.5 di bawah ini:

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERTANIAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pangan					**Pangan**					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		**Prosentase lumbung pangan aktif**	**29,72%**	**306.000.000**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**		**Prosentase lumbung pangan aktif**	**29,72%**	**306.000.000**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100%**	**306.000.000**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**306.000.000**	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	300.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	300.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	6.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	6.000.000	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		**Ketersediaan pangan**	**20 ton**	**2.118.000.000**	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**		**Ketersediaan pangan**	**20 ton**	**2.118.000.000**	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga		**Prosentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya terkait ketersediaan dan kerawanan pangan (%)**	**100%**	**301.500.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga**		**Prosentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya terkait ketersediaan dan kerawanan pangan (%)**	**100%**	**301.500.000**	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pangan					**Pangan**					
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 laporan	30.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 laporan	30.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	260.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 laporan	260.000.000	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pemalang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	4dokumen	5.500.000	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pemalang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	4dokumen	5.500.000	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 unit	6.000.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 unit	6.000.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		**Prosentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota untuk cadangan pangan (%)**	**100%**	**1.500.000**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota untuk cadangan pangan (%)**	**100%**	**1.500.000**	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 ton	1.500.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 ton	1.500.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		**Prosentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (%)**	**100%**	**1.815.000.000**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**Prosentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (%)**	**100%**	**1.815.000.000**	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Pemalang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	115.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Pemalang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	115.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pemalang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 kelompok	1.700.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pemalang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 kelompok	1.700.000.000	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		**Prosentase penurunan desa rawan pangan**	**20 %**	**16.000.000**	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**		**Prosentase penurunan desa rawan pangan**	**20 %**	**16.000.000**	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**1 kali**	**6.500.000**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**1 kali**	**6.500.000**	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Pemalang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	6.500.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Pemalang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	6.500.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	**9.500.000**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	**9.500.000**	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.500.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.500.000	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		**Prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar**	**80%**	**15.000.000**	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**		**Prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar**	**80%**	**15.000.000**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	**Prosentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100%**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Pemalang	**Prosentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100%**	**15.000.000**	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 dokumen	8.500.000	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 dokumen	8.500.000	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 sertifikat	6.500.000	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	3 sertifikat	6.500.000	
	Urusan Pemerintah Pilihan					**Urusan Pemerintah Pilihan**					
	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian					**Urusan Pemerintah Bidang Pertanian**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai Sakip dan RB**		**19.238.627.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai Sakip dan RB**		**17.853.668.750**	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jenis aktivitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 jenis**	**75.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jenis aktivitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 jenis**	**75.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	22.330.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	22.330.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	4.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	8.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	8.625.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.900.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	4.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.625.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	10.395.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	10.395.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah laporan evaluasi renja triwulanan yang dibuat	2 laporan	15.225.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah laporan evaluasi renja triwulanan yang dibuat	2 laporan	15.225.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan**	**5 jenis**	**17.208.627.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan**	**5 jenis**	**17.208.627.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 orang	17.148.627.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 orang	17.148.627.000	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD"	10000 dokumen	21.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD"	10000 dokumen	21.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD"	1 laporan	31.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD"	1 laporan	31.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jenis aktivitas administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**12.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jenis aktivitas administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**12.000.000**	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jenis aktivitas administrasi kepegawaian Daerah yang dilaksanakan**	**0**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jenis aktivitas administrasi kepegawaian Daerah yang dilaksanakan**	**0**	**0**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pertanian	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Pertanian	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**6 jenis**	**321.067.160**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**6 jenis**	**453.342.750**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	11.901.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 paket	30.000.000	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

								Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laptop/printer)	2 paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laptop/printer)	2 paket	47.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan & Minum, dan kebersihan)	4 paket	105.974.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan & Minum, dan kebersihan)	4 paket	100.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pertanian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 dokumen	5.842.750	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	260.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**3 jenis**	**5.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**3 jenis**	**5.000.000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah alat elektronik yang dibeli	1 unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah alat elektronik yang dibeli (AC,TV dan Sound System,dispenser)	1 unit	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**4 jenis**	**1.461.048.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**4 jenis**	**1.461.048.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pertanian	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4500 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pertanian	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4500 laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (komputer/laptop	12 laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.000.000	

RENJA 2026 DISPERTANPEM ARSIP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			yang terpelihara)					(komputer/laptop yang terpelihara)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.288.050.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Pertanian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.288.050.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**3 jenis**	**160.884.840**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	**3 jenis**	**160.884.840**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	176 unit	98.450.340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Pertanian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	176 unit	98.450.340	
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Pertanian	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara (meja dan kursi)	0	0	Pemeliharaan Mebel	Dinas Pertanian	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara (meja dan kursi)	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	50.844.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	50.844.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (AC, dll)	25 unit	11.590.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (AC, dll)	25 unit	11.590.000	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		**Prosentase sarana pertanian sesuai kebutuhan (prosentase bibit+pupuk+alsintan)**	**80%**	**3.977.000.000**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**Prosentase sarana pertanian sesuai kebutuhan (prosentase bibit+pupuk+alsintan)**	**80%**	**3.977.000.000**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		**Prosentase pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)**	**100%**	**2.392.000.000**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Prosentase pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)**	**100%**	**2.392.000.000**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pemalang	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 laporan	1.255.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pemalang	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 laporan	1.255.000.000	

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pemalang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 laporan	60.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pemalang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 laporan	60.000.000	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Pemalang	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10 ton	535.020.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kab. Pemalang	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10 ton	535.020.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Pemalang	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	45.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Pemalang	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	45.000.000	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Kab. Pemalang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1000 batang	182.000.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Kab. Pemalang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1000 batang	182.000.000	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Pemalang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (durian, alpukat, mangga, rambutan, sawo)	5000 batang	314.980.000	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Kab. Pemalang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (durian, alpukat, mangga, rambutan, sawo)	5000 batang	314.980.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**Prosentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (%)**	**100%**	**430.000.000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (%)**	**100%**	**430.000.000**	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pemalang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	430.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pemalang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	430.000.000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		**Prosentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**100%**	**1.155.000.000**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		**Prosentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**100%**	**1.155.000.000**	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pemalang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	1.155.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pemalang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (4 komoditas buah & 1 kopi arabika)	ekor	1.155.000.000	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		**Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik = (rata-rata prosentase (jut dlm kondisi baik+irigasi+embung+sumur dalam)**	**20%**	**3.993.699.500**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik = (rata-rata prosentase (jut dlm kondisi baik+irigasi+embung+sumur dalam)**	**20%**	**3.993.699.500**	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		**Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (%)**	**100%**	**1.776.000.000**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (%)**	**100%**	**1.776.000.000**	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 dokumen	80.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	0	80.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 laporan	1.696.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 laporan	1.696.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		**Prosentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)**	**100%**	**2.217.699.500**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Prosentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)**	**100%**	**2.217.699.500**	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Pemalang	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 unit	1.200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 unit	1.200.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pemalang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 unit	1.017.699.500	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pemalang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 unit	1.017.699.500	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Pemalang	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Pemalang	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	0	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**10,96%**	**680.915.000**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**10,96%**	**680.915.000**	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMA

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**60.000.000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**60.000.000**	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	60.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 laporan	60.000.000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	**100%**	**30.000.000**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**	**100%**	**30.000.000**	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	30.000.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	30.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Prosentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner di UPTD RPH dan Puskeswan**	**100%**	**530.915.000**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner di UPTD RPH dan Puskeswan**	**100%**	**530.915.000**	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pemalang	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12 laporan	530.915.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Pemalang	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12 laporan	530.915.000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100%**	**30.000.000**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100%**	**30.000.000**	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	2 laporan	23.500.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	2 laporan	23.500.000	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Pemalang	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	3 laporan	6.500.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Pemalang	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	3 laporan	6.500.000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**100%**	**30.000.000**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**		**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**100%**	**30.000.000**	
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 laporan	30.000.000	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 laporan	30.000.000	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**20%**	**618.000.000**	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**20%**	**618.000.000**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		**Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**100%**	**618.000.000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**100%**	**618.000.000**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pemalang	Jumlah lokasi pengamatan, identifikasi, inventarisasi OPT tanaman pangan dan hortikultura	14 kecamatan	606.293.900	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pemalang	Jumlah lokasi pengamatan, identifikasi, inventarisasi OPT tanaman pangan dan hortikultura	14 kecamatan	606.293.900	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	5 Ha	11.706.100	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani	5 Ha	11.706.100	
	Program Penyuluhan Pertanian		**Prosentase kelompok tani aktif**	**5%**	**2.936.580.000**	**Program Penyuluhan Pertanian**		**Prosentase kelompok tani aktif**	**5%**	**2.936.580.000**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		**Prosentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**100%**	**2.936.580.000**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Prosentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**100%**	**2.936.580.000**	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 unit	2.449.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 unit	2.449.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 unit	177.500.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pemalang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 unit	177.500.000	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	10 unit	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	10 unit	0	

RENJA 2026 INSPEKTORAT PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyulu pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	66 orang	310.080.000	Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyulu pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	66 orang	310.080.000	

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

II.6 PENELAAHAN USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat, dengan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.

Berdasarkan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut, usulan program, kegiatan dari masyarakat dan usulan pokok – pokok pikiran DPRD yang diampu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang untuk tahun 2025 tertuang dalam tabel 2.4 dan 2.5 dibawah ini.

TABEL 2.4
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2025

No	Deskripsi Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan pembuatan pakan ternak kambing	Desa Batursari, Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Jumlah peserta pelatihan ternak kambing	30 orang	45.000.000
2	Pelatihan pengelolaan kopi dan alat	Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan kopi dan alat	25 orang	37.500.000
3	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	Jumlah peserta pembuatan pakan ternak	25 orang	37.500.000
4	Pelatihan Budidaya Jamur	Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	Jumlah Peserta pelatihan budidaya jamur	20 orang	20.000.000
5	Pelatihan Budidaya/Pembibitan Tanaman Buah	Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	Jumlah peserta pelatihan budidaya/ pembibitan tanaman buah	25 orang	37.500.000
TOTAL					**177.500.000**

RENJA 2026 DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5
Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

No	Deskripsi Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Dukuh Lobongkok Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah jalan usaha tani yang direhab/terbangun	46.000.000
2	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Dukuh Penuntun Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
3	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
4	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
5	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
6	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
7	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Jalan Anggur RT 03 RW 02 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
8	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Jl. Tentara Pelajar Dukuh Glintang, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah prasarana pertanian yang tersedia	46.000.000
9	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Jl. Ir Sutami No. 15 RT 01 RW 12 Kelurahan	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Deskripsi Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang		
10	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Jl. Siwalan II RT 03 RW 01 Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah jalan usaha tani yang direhab/terbangun	46.000.000
11	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	RT 03 RW 09, Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
12	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Bojongnangka Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
13	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	RT 05 RW 01, Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
14	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Surajaya Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah jalan usaha tani yang direhab/terbangun	46.000.000
15	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Surajaya Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
16	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	desa Surajaya kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
17	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
18	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
19	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kab.	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Deskripsi Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		Pemalang		
20	Pengadaan Pupuk Hayati Cair	desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	46.000.000
21	bantuan ternak kepada kelompok tani ternak	penggarit, Kab. Pemalang	Jumlah ternak yang tersedia	200.000.000
22	pembangunan irigasi tersier	desa pener, Kab. Pemalang	Jumlah jaringan irigasi tersier yang direhab/terbangun	100.000.000
23	bantuan prasarana pertanian (pompa,traktor,sumur bor) kepada kelompok tani	PENGGARIT, Kab. Pemalang	Jumlah prasarana pertanian yang tersedia	30.000.000
24	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Blok Guci Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang		50.000.000
25	Pembangunan jalan pertanian dengan makadam	Jalan Sawah Blok Sengon Utara Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang		140.000.000
26	Kambing PE Jantan Muda	RT 07 RW 02 Desa Bodeh, Kec. Bodeh,, Kab. Pemalang		70.000.000
27	Kambing Jawa Randu Betina Muda	RT 009 RT 010 RW 002 Desa Rembul Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang		70.000.000
28	Kambing Jawa Randu Betina	RT 01 RW 01 No. 14 Desa limbangn kec. Ulujami , Kab. Pemalang		100.000.000
29	Kambing Jawa Randu Betina	RT 02 RW 05 DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI		30.000.000
30	Kambing Jawa Randu Betina	RT 02 RW 06 DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI, Kab. Pemalang		50.000.000
31	Rehabilitasi Jaringan	RT 02 RW 03 Dusun		30.000.000

RENJA 2026 DISTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Deskripsi Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Irigasi Usaha	Kalilingseng Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang		
32	Kambing Jawa Randu Betina	Kelompok Tani Trubus RT 04 W 02 Desa Bongas Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang		150.000.000
33	bantuan traktor Roda 2, Roda besi standar	Paguyuban Petani Sejahtera Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang		50.000.000
34	Kambing Jawa Randu Betina	Kelompok Tani Subur IV Desa Mandiraja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang		100.000.000
35	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Desa Temureng RT.004 RW.002 Menghubungkan Desa Pegundan Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang		150.000.000
36	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha	Blok Subang Desa Banglarangan Kec Ampelgading, Kab. Pemalang		130.000.000
37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Pecangakan Ke Desa Tumbal, Kab. Pemalang		45.000.000
38	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Klegen sampai Desa Kandang		65.000.000
39	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Jalan pertanian Desa Klegen ke desa kebojongan, Kab. Pemalang		50.000.000
40	Domba Jantan Dewasa	Dusun Gunungsari Rt 05 Rw 03 Desa Clekatakan Kec		50.000.000

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Deskripsi Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		Pulosari, Kab. Pemalang		
41	Bantuan Ternak Kambing Kelompok Tani Plakaran 2 Dukuh Krajan Rt 7 Rw 2 Desa Plakaran Kec Pulosari	Dukuh Krajan Rt 7 Rw 2 Desa Plakaran Kec Pulosari, Kab. Pemalang		40.000.000
42	Bantuan Ternak Domba Kelompok Tani Ternak Medono Jaya Desa Bojongnangka Rt 03 Rw 03 Kec Pemalang	Desa Bojongnangka Rt 03 Rw 03 Kec Pemalang, Kab. Pemalang		175.000.000
43	Bantuan Traktor LKM Gapoktan Subur Makmur Jl Rajawali Rt 6 Rw 3 Dusun Danasari Desa Danasari Kec Pemalang	Jl Rajawali Rt 6 Rw 3 Dusun Danasari Desa Danasari Kec Pemalang, Kab. Pemalang		35.000.000
44	Bantuan Ternak Kelompok Tani Nuju Hasil Desa Loning Kec Petarukan	Jalan Raya Desa Loning Kec Petarukan, Kab. Pemalang		40.000.000
45	Bantuan Ternak Kelompok Tani Ternak Mulyo Aji Desa Pakembaran Rt 04 Rw 1 Kec Warungpring	Desa Pakembaran Rt 04 Rw 1 Kec Warungpring, Kab. Pemalang		50.000.000
46	Pembuatan jalan di Area Pertanian	Dusun penyawungan- Kopi Jemi Desa gunung jaya, Kab. Pemalang		100.000.000
47	Kelompok Tani Ternak Minda Sae(DOMBA)	Desa Beluk RT 034 RW 08 Kec. Belik, Kab. Pemalang		30.000.000
48	Kelompok Tani Ternak Bisma Muda (Domba Perah jantan)	Desa Beluk RT 037 RW 008 Kec. Belik, Kab. Pemalang		30.000.000
49	Kelompok Tani Ternak Dusun Tampol (Domba Jawa Randu)	RT 01 RW 09 Desa Mendelem Kec. Belik, Kab. Pemalang		30.000.000
50	Pembangunan jalan pertanian dengan makadam	Dukuh Jaidan Desa kesesirejo - Desa Karangbrai RT 02		137.699.500

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Deskripsi Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
		RW 06, Kab. Pemalang		
51	Pembangunan jalan pertanian dengan rabat beton	Jalan Kulbanda Gg. Guntur rw 03 dan rw 04 Kelurahan Beji Kecamatan Taman, Kab. Pemalang		200.000.000
52	Bantuan Ternak Sapi Kepada Kelompok Tani Ternak	Kelompok Tani Ternak "Rumah Hewan Farm" Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang		130.000.000
TOTAL				**3.577.699.500**

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

III.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional, Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan pertanian Kabupaten Pemalang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," dengan memperhatikan 5 (lima) Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional dalam konsep RPJMN Tekhnokratik 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial; Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial.
2. Transformasi Ekonomi; Hilirisasi SDA serta penguatan Riset Inovasi dan Produktifitas Tenaga Kerja.
3. Transformasi Tata Kelola; Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; Memperkuat supremasi hokum dan stabilitas, serta membangun

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan sosial Budaya dan Ekologi; Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

III.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025. RKPD Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari penjabaran pelaksanaan kebijakan RPD Tahun 2024 - 2026 yang proses penyusunannya dilakukan secara paralel diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari", termasuk rencana pengembangan kewilayahan BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang). Sasaran pembangunan daerah dalam RPD Provinsi Jawa tengah tahun 2024-2026 meliputi:

1. Meningkatnya Perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM} yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.
3. Meningkatnya Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dengan Prioritas Pembangunan diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan diukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, adfaptif secara inklusif dan merata.
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

III.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Mendasari RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 tema yang diangkat dalam RKPD Tahun 2025 adalah "Percepatan Pembangunan yang berdaya saing dengan fokus inovasi dan penerapan teknologi yang didukung dengan infrastruktur yang kuat."

Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan Kabupaten Pemalang terhadap prioritas dan target pembangunan nasional dalam RKP serta prioritas dan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada RKPD Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat mendukung realisasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga- Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang serta mendukung proses pembangunan di kawasan Provinsi Jawa Tengah utamanya kawasan BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang).

Pemerintah Kabupaten Pemalang saat ini sedang menyusun Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045. Sesuai dengan amanat dalam surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tengah Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota dengan Rencana Pembangunan Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045, terdapat 56 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045.

Adapun Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Tahun 2025 – 2045 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

No	INDIKATOR SASARAN POKOK/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	Satuan	REALISASI					TARGET KAB				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Baseline 2025 Kab	PERIODE I	PERIODE II	PERIODE III	PERIODE IV
									2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
32	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	10,06	10,26	10,59	11,54	9,47	8,95	7,95	6,45	4,46	2,27
42	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	76,87	79,19	78,35	78,51	80,84	81,49	83,13	84,17	85,23	86,52

RENJA 2026 DISPERTA PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang adalah mendukung pencapaian misi ketiga yaitu mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong serta misi kelima yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi local, terjabarkan seperti di bawah ini:

a. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, sasarannya:
   a.1 Meningkatnya sumberdaya ekonomi dan kemandirian pangan.
   a.2 Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
   a.3 Meningkatnya keamanan dan kerawanan pangan.
b. Meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal, sasarannya:
   b.1 Meningkatnya produktivitas sub sektor pertanian.
   b.2 Meningkatnya produksi sub sektor perkebunan.
   b.3 Meningkatnya produksi sub sektor peternakan.

III.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah berdimensi waktu satu tahun.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - Pangan
  1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
     - 1.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
       - 1.1.1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
       - 1.1.2 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
       - 1.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
  2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
     - 2.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
       - 2.1.1 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
       - 2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
       - 2.1.3 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
       - 2.1.4 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
       - 2.1.5 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
       - 2.1.6 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
       - 2.1.7 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
       - 2.1.8 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.1.9 Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.1.10 Pemantauan Stok Pangan

2.1.11 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota

2.1.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

2.1.13 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

2.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.2.1 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2.2 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

2.2.3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2.4 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemeritah Kabupaten/Kota

2.2.5 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

2.3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.3.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

3.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

3.1.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

3.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

3.2.2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.2.3 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaa Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

4.1.2 Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

4.1.3 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaen/Kota

4.1.4 Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

- Urusan Pilihan - Pertanian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD

1.2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.2 Pengadaan Mebel

1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Pemeliharaan Mebel

1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9 Penataan Organisasi

1.9.1 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

2.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

2.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

2.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2.1.3 Perbanyakan Benih Bersertifikata Perebunan Berbentuk Batang

2.1.4 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang

2.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2.1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

2.2.2 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

2.3 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

2.3.1 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

2.4 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.4.1 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak

2.5 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

2.5.1 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

2.5.2 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3,1, Pengembangan Prasarana Pertanian

3.1.1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten/Kota

3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

3.1.3 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

3.2 Pembangunan Prasarana Pertanian

3.2.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

3.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

3.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

3.2.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

3.2.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

3.2.6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan

3.2.7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

3.2.8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3.2.9 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskeswan

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

4.3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4.3.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4.4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

4.4.1 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

4.4.2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

4.5 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

4.5.1 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha

5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

5.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

5.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penyusunan laporan keuangan semesteran

6. Program Penyuluhan Pertanian

6,1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

6.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

6.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

6.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

6.1.4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran serta prakiraan maju untuk tahun selanjutnya sebagaimana dalam tabel 3.1

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERTANIAN

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegaiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**								
2.09			**Pangan**								
2.09.02			**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	**Prosentase lumbung pangan aktif**		**29,72%**	**306.000.000**			**29,72%**	**306.000.000**
2.09.02	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)**		**2%**	**306.000.000**			**2%**	**306.000.000**
2.09.02	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		2 unit	300.000.000	DAK		2 unit	300.000.000
2.09.02	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		1 laporan	6.000.000	APBD		1 laporan	6.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.09.03			**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Jumlah ketersediaan pangan**		**20 ton**	**2.118.000.000**			**20 ton**	**2.118.000.000**
2.09.03	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Prosentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya terkait ketersediaan dan kerawanan pangan (%)**		**100%**	**301.500.000**			**100%**	**301.500.000**
2.09.03	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	12 laporan	30.000.000	APBD		12 laporan	30.000.000
2.09.03	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pemalang	2 laporan	260.000.000	APBD		2 laporan	260.000.000
2.09.03	2.01	15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pemalang	4 dokumen	5.500.000	APBD		4 dokumen	5.500.000
2.09.03	2.01	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Pemalang	1 unit	6.000.000	APBD		1 unit	6.000.000
2.09.03	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota untuk cadangan pangan (%)**		**100%**	**1.500.000**			**100%**	**1.500.000**
2.09.03	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	ton	1.500.000	APBD		ton	1.500.000
2.09.03	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Prosentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (%)**		**100%**	**1.815.000.000**			**100%**	**1.815.000.000**
2.09.03	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pemalang	1 dokumen	115.000.000	APBD		1 dokumen	115.000.000

RENJA DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.09.03	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pemalang	1 kegiatan	1.700.000.000	DAK Non Fisik		1 kegiatan	1.700.000.000
2.09.04			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Prosentase penurunan desa rawan pangan**		**20%**	**16.000.000**			**20%**	**16.000.000**
2.09.04	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Presentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**100%**	**6.500.000**	**APBD**		**100%**	**6.500.000**
2.09.04	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Pemalang	1 dokumen	6.500.000	APBD		1 dokumen	6.500.000
2.09.04	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**100%**	**9.500.000**	**APBD**		**100%**	**9.500.000**
2.09.04	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	1 dokumen	9.500.000	APBD		1 dokumen	9.500.000
2.09.05			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Prosentase pangan segar yang aman**		**80%**	**15.000.000**	**APBD**		**80%**	**15.000.000**
2.09.05	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (%)**	Kab. Pemalang	**100%**	**15.000.000**	**APBD**		**100%**	**15.000.000**
2.09.05	2.01	1	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pemalang	1 dokumen	8.500.000	APBD		1 dokumen	8.500.000
2.09.05	2.01	2	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pemalang	1 dokumen	6.500.000	APBD		1 dokumen	6.500.000
3			**Urusan Pemerintah Pilihan**								
3.27			**Urusan Pemerintah Bidang Pertanian**								

PENJABAT DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**19.238.627.000**			**100%**	**19.238.627.000**
3.27.01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**7 jenis**	**75.000.000**			**7 jenis**	**75.000.000**
3.27.01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dinas Pertanian	5 dokumen	22.330.000	APBD		5 dokumen	22.330.000
3.27.01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Pertanian	1 dokumen	4.900.000	APBD		1 dokumen	4.900.000
3.27.01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan 2023 yang tersusun	Dinas Pertanian	1 dokumen	8.625.000	APBD		1 dokumen	8.625.000
3.27.01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA 2023 yang tersusun	Dinas Pertanian	1 dokumen	4.900.000	APBD		1 dokumen	4.900.000
3.27.01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA 2023 yang tersusun	Dinas Pertanian	1 dokumen	8.625.000	APBD		1 dokumen	8.625.000
3.27.01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian	3 dokumen	10.395.000	APBD		3 dokumen	10.395.000
3.27.01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	2 laporan	15.225.000	APBD		2 laporan	15.225.000
3.27.01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan**		**5 jenis**	**17.208.627.000**			**5 jenis**	**17.208.627.000**
3.27.01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	112 orang	17.148.627.000	APBD		112 orang	17.148.627.000
3.27.01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanian	10000 dokumen	21.000.000	APBD		10000 dokumen	21.000.000

RENJA DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	1 laporan	3.000.000	APBD		1 laporan	3.000.000
3.27.01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	1 laporan	31.000.000	APBD		1 laporan	31.000.000
3.27.01	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.000.000
3.27.01	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**		**1 jenis**	**12.000.000**			**1 jenis**	**12.000.000**
3.27.01	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pertanian	1 laporan	12.000.000	APBD		12 laporan	12.000.000
3.27.01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**6 jenis**	**321.067.160**			**6 jenis**	**321.067.160**
3.27.01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	1 paket	11.901.500	APBD		1 paket	11.901.500
3.27.01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laptop/printer)	Dinas Pertanian	2 paket	12.191.160	APBD		2 paket	12.191.160

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan & Minum, bahan computer dan kebersihan)	Dinas Pertanian	4 paket	105.926.500	APBD		4 paket	105.926.500
3.27.01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Pertanian	1 paket	15.000.000	APBD		1 paket	15.000.000
3.27.01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Pertanian	150 dokumen	6.048.000	APBD		150 dokumen	6.048.000
3.27.01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	150 laporan	170.000.000	APBD		150 laporan	170.000.000
3.27.01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**		**1 jenis**	**5.000.000**			**1 jenis**	**5.000.000**
3.27.01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat elektronik yang dibeli (AC,TV dan So und System,dispenser)		1 unit	5.000.000	APBD		1 unit	5.000.000
3.27.01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**		**4 jenis**	**1.461.048.000**			**4 jenis**	**1.461.048.000**
3.27.01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		4500 laporan	6.000.000	APBD		4500 laporan	6.000.000
3.27.01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	150.000.000	APBD		12 laporan	150.000.000
3.27.01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (komputer/laptop yang terpelihara)		12 laporan	16.998.000	APBD		12 laporan	16.998.000
3.27.01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	1.288.050.000	APBD		12 laporan	1.288.050.000

RENJA DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**		**3 jenis**	**160.884.840**			**3 jenis**	**160.884.840**
3.27.01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		176 unit	98.450.340	APBD		176 unit	98.450.340
3.27.01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		16 unit	50.844.500	APBD		10 unit	50.844.500
3.27.01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (AC, dll)		20 unit	11.590.000	APBD		25 unit	11.590.000
3.27.02			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Prosentase sarana pertanian sesuai kebutuhan (prosentase bibit+pupuk+alsintan)**		**80%**	**3.977.000.000**			**80%**	**3.977.000.000**
3.27.02	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Prosentase pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)**		**100%**	**2.392.000.000**	**APBD**		**100%**	**2.392.000.000**
3.27.02	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pemalang	12 laporan	1.255.000.000	APBD		12 laporan	1.255.000.000
3.27.02	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pemalang	2 laporan	60.000.000	APBD		2 laporan	60.000.000
3.27.02	2.01	3	Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/ benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Kab. Pemalang	Ton	535.020.000	APBD		Ton	535.020.000
3.27.02	2.01	7	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Kab. Pemalang	1 Laporan	45.000.000	APBD		1 Laporan	45.000.000
3.27.02	2.01	8	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersetifikat perkebunanberbentuk batang	Kab. Pemalang	100 batang	182.000.000	APBD		100 batang	182.000.000

RENJA DINAS INSPEKTORAT PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.02	2.01	9	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak	Kab. Pemalang	1000 batang	314.980.000	APBD		1000 batang	314.980.000
3.27.02	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (%)**		**100%**	**430.000.000**			**100%**	**430.000.000**
3.27.02	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pemalang	1 dokumen	430.000.000	APBD		1 dokumen	430.000.000
3.27.02	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Prosentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**		**100%**	**1.155.000.000**			**100%**	**1.155.000.000**
3.27.02	2.06	1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (4 komoditas buah & 1 kopi arabika)	Kab. Pemalang	320 ekor	1.155.000.000	APBD		320 ekor	1.155.000.000
3.27.03			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik = (rata-rata prosentase (jut dlm kondisi baik+irigasi+embung+sumur dalam)**		**20%**	**3.993.699.500**			**20%**	**3.993.699.500**
3.27.03	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (%)**		**100%**	**1.776.000.000**			**100%**	**1.776.000.000**
3.27.03	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pemalang	12 laporan	1.696.000.000	APBD		12 laporan	1.696.000.000
3.27.03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola		1 Ha	80.000.000	APBD		1 Ha	80.000.000
3.27.03	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)**		**100%**	**2.217.699.500**			**100%**	**2.217.699.500**

RENJA 2026 DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.03	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani yang terbangun	Kab. Pemalang	3 unit	1.200.000.000	APBD		0 unit	1.200.000.000
3.27.03	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pemalang	15 unit	1.017.699.500	APBD / DAK Fisik		0 unit	1.017.699.500
3.27.04			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**		**10,96%**	**680.915.000**			**10,96%**	**680.915.000**
3.27.04	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**60.000.000**			**100%**	**60.000.000**
3.27.04	2.01	1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Pemalang	1 laporan	60.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000
3.27.04	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**		**100%**	**30.000.000**			**100%**	**30.000.000**
3.27.04	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Pemalang	12 laporan	30.000.000	APBD		12 laporan	30.000.000
3.27.04	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner di UPTD RPH dan Puskeswan**		**100%**	**530.915.000**			**100%**	**530.915.000**
3.27.04	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Kab. Pemalang	12 laporan	530.915.000	APBD		12 laporan	530.915.000
3.27.04	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**100%**	**30.000.000**			**100%**	**30.000.000**

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.04	2.04	1	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Kab. Pemalang	3 unit usaha	23.500.000	APBD		1 laporan	23.500.000
3.27.04	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Kab. Pemalang	1 laporan	6.500.000	APBD		1 laporan	6.500.000
3.27.04	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**		**100%**	**30.000.000**	**APBD**		**100%**	**30.000.000**
3.27.04	2.05	1	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Pemalang	3000 unit	30.000.000	APBD		3000 unit	30.000.000
3.27.05			**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**		**20%**	**618.000.000**			**20%**	**618.000.000**
3.27.05	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**100%**	**618.000.000**			**100%**	**618.000.000**
3.27.05	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Pemalang	5000 Ha	606.293.900	APBD		5000 Ha	606.293.900
3.27.05	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		2 ha	11.706.100			2 ha	11.706.100
3.27.07			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase kelompok tani aktif**		**5%**	**2.936.580.000**			**5%**	**2.936.580.000**
3.27.07	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**100%**	**2.936.580.000**			**100%**	**2.936.580.000**
3.27.07	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pemalang	14 unit	2.449.000.000	APBD / DAK Non Fisik		14 unit	2.449.000.000

RENJA DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.07	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pemalang	16 unit	177.500.000	APBD		16 unit	177.500.000
3.27.07	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Pemalang	0 unit	0	APBD		0 unit	0
3.27.07	2.01	2	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Pemalang	66 orang	310.080.000	APBD		66 orang	310.080.000

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Renja Dinas Pertanian tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu 1 (satu) tahun.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

i. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - Pangan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
   - 1.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
     - 1.1.1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
     - 1.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   - 2.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
     - 2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
     - 2.1.2 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
     - 2.1.3 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
     - 2.1.4 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
   - 2.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
     - 2.2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
   - 2.3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
     - 2.3.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
     - 2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
   - 3.1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.1.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

3.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

4.1.2 Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

ii. Urusan Pilihan - Pertanian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.2 Pengadaan Mebel

1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.8.2 Pemeliharaan Mebel

1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

2.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

2.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

2.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2.1.3 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk

2.1.4 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura

2.1.5 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

2.1.4 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang

2.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2.1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

2.3 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

2.3.1 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3.1 Pengembangan Prasarana Pertanian

3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

3.1.2 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

3.2 Pembangunan Prasarana Pertanian

1.2.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

1.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
1.2.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
1.2.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan
1.2.6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
1.2.7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
1.2.8 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Operasionalisasi Puskeswan

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   4.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
      4.1.1 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   4.2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
      4.2.1 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
   4.3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
      4.3.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
   4.4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
      4.4.1 Pengawasa Unit Usaha Produk Hewan
      4.4.2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
   4.5 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
      4.5.1 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   5.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penyusunan laporan keuangan semesteran

5.1.2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

6. Program Penyuluhan Pertanian

6.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

6.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

6.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

6.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

6.1.4 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

6.1.5 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegaiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**								
2.09			**Pangan**								
2.09.02			**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	**Prosentase lumbung pangan aktif**		**29,72%**	**306.000.000**			**29,72%**	**306.000.000**
2.09.02	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)**		**2%**	**306.000.000**			**2%**	**306.000.000**
2.09.02	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		2 unit	300.000.000	DAK		2 unit	300.000.000
2.09.02	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		1 laporan	6.000.000	APBD		1 laporan	6.000.000
2.09.03			**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Jumlah ketersediaan pangan**		**20 ton**	**2.118.000.000**			**20 ton**	**2.118.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.09.03	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Prosentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya terkait ketersediaan dan kerawanan pangan (%)**		**100%**	**301.500.000**			**100%**	**301.500.000**
2.09.03	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	12 laporan	30.000.000	APBD		12 laporan	30.000.000
2.09.03	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Pemalang	2 laporan	260.000.000	APBD		2 laporan	260.000.000
2.09.03	2.01	15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Pemalang	4 dokumen	5.500.000	APBD		4 dokumen	5.500.000
2.09.03	2.01	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Pemalang	1 unit	6.000.000	APBD		1 unit	6.000.000
2.09.03	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota untuk cadangan pangan (%)**		**100%**	**1.500.000**			**100%**	**1.500.000**
2.09.03	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	ton	1.500.000	APBD		ton	1.500.000
2.09.03	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Prosentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (%)**		**100%**	**1.815.000.000**			**100%**	**1.815.000.000**
2.09.03	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Pemalang	1 dokumen	115.000.000	APBD		1 dokumen	115.000.000
2.09.03	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pemalang	1 kegiatan	1.700.000.000	DAK Non Fisik		1 kegiatan	1.700.000.000

RENJA DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.09.04			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Prosentase penurunan desa rawan pangan**		**20%**	**16.000.000**			**20%**	**16.000.000**
2.09.04	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Presentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**100%**	**6.500.000**	**APBD**		**100%**	**6.500.000**
2.09.04	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Pemalang	1 dokumen	6.500.000	APBD		1 dokumen	6.500.000
2.09.04	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**100%**	**9.500.000**	**APBD**		**100%**	**9.500.000**
2.09.04	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang	1 dokumen	9.500.000	APBD		1 dokumen	9.500.000
2.09.05			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Prosentase pangan segar yang aman**		**80%**	**15.000.000**	**APBD**		**80%**	**15.000.000**
2.09.05	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (%)**	Kab. Pemalang	**100%**	**15.000.000**	**APBD**		**100%**	**15.000.000**
2.09.05	2.01	1	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pemalang	1 dokumen	8.500.000	APBD		1 dokumen	8.500.000
2.09.05	2.01	2	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kab. Pemalang	1 dokumen	6.500.000	APBD		1 dokumen	6.500.000
3			**Urusan Pemerintah Pilihan**								
3.27			**Urusan Pemerintah Bidang Pertanian**								
3.27.01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100%**	**19.238.627.000**			**100%**	**19.238.627.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**7 jenis**	**75.000.000**			**7 jenis**	**75.000.000**
3.27.01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dinas Pertanian	5 dokumen	22.330.000	APBD		5 dokumen	22.330.000
3.27.01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Pertanian	1 dokumen	4.900.000	APBD		1 dokumen	4.900.000
3.27.01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan 2023 yang tersusun	Dinas Pertanian	1 dokumen	8.625.000	APBD		1 dokumen	8.625.000
3.27.01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA 2023 yang tersusun	Dinas Pertanian	1 dokumen	4.900.000	APBD		1 dokumen	4.900.000
3.27.01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA 2023 yang tersusun	Dinas Pertanian	1 dokumen	8.625.000	APBD		1 dokumen	8.625.000
3.27.01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanian	3 dokumen	10.395.000	APBD		3 dokumen	10.395.000
3.27.01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	2 laporan	15.225.000	APBD		2 laporan	15.225.000
3.27.01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan**		**5 jenis**	**17.208.627.000**			**5 jenis**	**17.208.627.000**
3.27.01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	112 orang	17.148.627.000	APBD		112 orang	17.148.627.000
3.27.01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Pertanian	10000 dokumen	21.000.000	APBD		10000 dokumen	21.000.000

RENJA 2025 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Pertanian	1 laporan	3.000.000	APBD		1 laporan	3.000.000
3.27.01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Pertanian	1 laporan	31.000.000	APBD		1 laporan	31.000.000
3.27.01	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pertanian	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.000.000
3.27.01	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**		**1 jenis**	**12.000.000**			**1 jenis**	**12.000.000**
3.27.01	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pertanian	1 laporan	12.000.000	APBD		12 laporan	12.000.000
3.27.01	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**6 jenis**	**321.067.160**			**6 jenis**	**321.067.160**
3.27.01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	1 paket	11.901.500	APBD		1 paket	11.901.500
3.27.01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laptop/printer)	Dinas Pertanian	2 paket	12.191.160	APBD		2 paket	12.191.160

RENJA 2025 DISNERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Makan & Minum, bahan computer dan kebersihan)	Dinas Pertanian	4 paket	105.926.500	APBD		4 paket	105.926.500
3.27.01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Pertanian	1 paket	15.000.000	APBD		1 paket	15.000.000
3.27.01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Pertanian	150 dokumen	6.048.000	APBD		150 dokumen	6.048.000
3.27.01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	150 laporan	170.000.000	APBD		150 laporan	170.000.000
3.27.01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**		**1 jenis**	**5.000.000**			**1 jenis**	**5.000.000**
3.27.01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat elektronik yang dibeli (AC,TV dan So und System,dispenser)		1 unit	5.000.000	APBD		1 unit	5.000.000
3.27.01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**		**4 jenis**	**1.461.048.000**			**4 jenis**	**1.461.048.000**
3.27.01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		4500 laporan	6.000.000	APBD		4500 laporan	6.000.000
3.27.01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	150.000.000	APBD		12 laporan	150.000.000
3.27.01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (komputer/laptop yang terpelihara)		12 laporan	16.998.000	APBD		12 laporan	16.998.000

RENJA DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	1.288.050.000	APBD		12 laporan	1.288.050.000
3.27.01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**		**3 jenis**	**160.884.840**			**3 jenis**	**160.884.840**
3.27.01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		176 unit	98.450.340	APBD		176 unit	98.450.340
3.27.01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		16 unit	50.844.500	APBD		10 unit	50.844.500
3.27.01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (AC, dll)		20 unit	11.590.000	APBD		25 unit	11.590.000
3.27.02			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Prosentase sarana pertanian sesuai kebutuhan (prosentase bibit+pupuk+alsintan)**		**80%**	**3.977.000.000**			**80%**	**3.977.000.000**
3.27.02	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Prosentase pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)**		**100%**	**2.392.000.000**	**APBD**		**100%**	**2.392.000.000**
3.27.02	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pemalang	12 laporan	1.255.000.000	APBD		12 laporan	1.255.000.000
3.27.02	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pemalang	2 laporan	60.000.000	APBD		2 laporan	60.000.000
3.27.02	2.01	3	Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/ benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Kab. Pemalang	Ton	535.020.000	APBD		Ton	535.020.000

RENJA 2026 DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.02	2.01	7	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Kab. Pemalang	1 Laporan	45.000.000	APBD		1 Laporan	45.000.000
3.27.02	2.01	8	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersetifikat perkebunanberbentuk batang	Kab. Pemalang	100 batang	182.000.000	APBD		100 batang	182.000.000
3.27.02	2.01	9	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak	Kab. Pemalang	1000 batang	314.980.000	APBD		1000 batang	314.980.000
3.27.02	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (%)**		**100%**	**430.000.000**			**100%**	**430.000.000**
3.27.02	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pemalang	1 dokumen	430.000.000	APBD		1 dokumen	430.000.000
3.27.02	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Prosentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**		**100%**	**1.155.000.000**			**100%**	**1.155.000.000**
3.27.02	2.06	1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (4 komoditas buah & 1 kopi arabika)	Kab. Pemalang	320 ekor	1.155.000.000	APBD		320 ekor	1.155.000.000
3.27.03			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik = (rata-rata prosentase (jut dlm kondisi baik+irigasi+embung+sumur dalam)**		**20%**	**3.993.699.500**			**20%**	**3.993.699.500**
3.27.03	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (%)**		**100%**	**1.776.000.000**			**100%**	**1.776.000.000**

RENJA DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.03	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pemalang	12 laporan	1.696.000.000	APBD		12 laporan	1.696.000.000
3.27.03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola		1 Ha	80.000.000	APBD		1 Ha	80.000.000
3.27.03	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Prosentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)**		**100%**	**2.217.699.500**			**100%**	**2.217.699.500**
3.27.03	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani yang terbangun	Kab. Pemalang	3 unit	1.200.000.000	APBD		0 unit	1.200.000.000
3.27.03	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Pemalang	15 unit	1.017.699.500	APBD / DAK Fisik		0 unit	1.017.699.500
3.27.04			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**		**10,96%**	**680.915.000**			**10,96%**	**680.915.000**
3.27.04	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**60.000.000**			**100%**	**60.000.000**
3.27.04	2.01	1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Pemalang	1 laporan	60.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000
3.27.04	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan**		**100%**	**30.000.000**			**100%**	**30.000.000**

RENJA DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.04	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Pemalang	12 laporan	30.000.000	APBD		12 laporan	30.000.000
3.27.04	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner di UPTD RPH dan Puskeswan**		**100%**	**530.915.000**			**100%**	**530.915.000**
3.27.04	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Kab. Pemalang	12 laporan	530.915.000	APBD		12 laporan	530.915.000
3.27.04	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**100%**	**30.000.000**			**100%**	**30.000.000**
3.27.04	2.04	1	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Kab. Pemalang	3 unit usaha	23.500.000	APBD		1 laporan	23.500.000
3.27.04	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Kab. Pemalang	1 laporan	6.500.000	APBD		1 laporan	6.500.000
3.27.04	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Prosentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**		**100%**	**30.000.000**	**APBD**		**100%**	**30.000.000**
3.27.04	2.05	1	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Pemalang	3000 unit	30.000.000	APBD		3000 unit	30.000.000
3.27.05			**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**		**20%**	**618.000.000**			**20%**	**618.000.000**
3.27.05	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**100%**	**618.000.000**			**100%**	**618.000.000**

RENJA DINAS PERTANIAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.27.05	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Pemalang	5000 Ha	606.293.900	APBD		5000 Ha	606.293.900
3.27.05	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		2 ha	11.706.100			2 ha	11.706.100
3.27.07			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase kelompok tani aktif**		**5%**	**2.936.580.000**			**5%**	**2.936.580.000**
3.27.07	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Prosentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**100%**	**2.936.580.000**			**100%**	**2.936.580.000**
3.27.07	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pemalang	14 unit	2.449.000.000	APBD / DAK Non Fisik		14 unit	2.449.000.000
3.27.07	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pemalang	16 unit	177.500.000	APBD		16 unit	177.500.000
3.27.07	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Pemalang	0 unit	0	APBD		0 unit	0
3.27.07	2.01	2	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Pemalang	66 orang	310.080.000	APBD		66 orang	310.080.000

RENJA 2026 DISPERTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanian ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program beserta indikatornya pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja 2026. Adapun pada level kegiatan dan subkegiatan, tidak semua kegiatan maupun subkegiatan yang ada pada Renstra untuk tahun 2025 termuat dalam Renja 2026. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran subkegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian.
3. Indikator output/keluaran pada subkegiatan selain mengacu pada indikator yang terdapat dalam Renstra Tahun 2021-2026 juga mengacu pada indikator output yang dibakukan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026.
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pemalang.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2026 untuk setiap triwulannya.

Pemalang, 19 September 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pemalang

PRAYITNO, S.Hut, M.M
Pembina
NIP. 19720711 200501 1 009

RENJA 2026 DISTAN PEMALANG

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem- bangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pem- bangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Renja Disperik mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, dengan mengingat beberapa hal yakni sebagai berikut :

1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program kerja Pemerintah Daerah;
2) Perangkat Daerah sebagimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
3) Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
4) Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Pemerintah Daerah.

Mengingat arti strategis Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Disperik mengikuti tata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2) Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026;
3) Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah.

Bagan alir tahapan penyusunan Renja sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

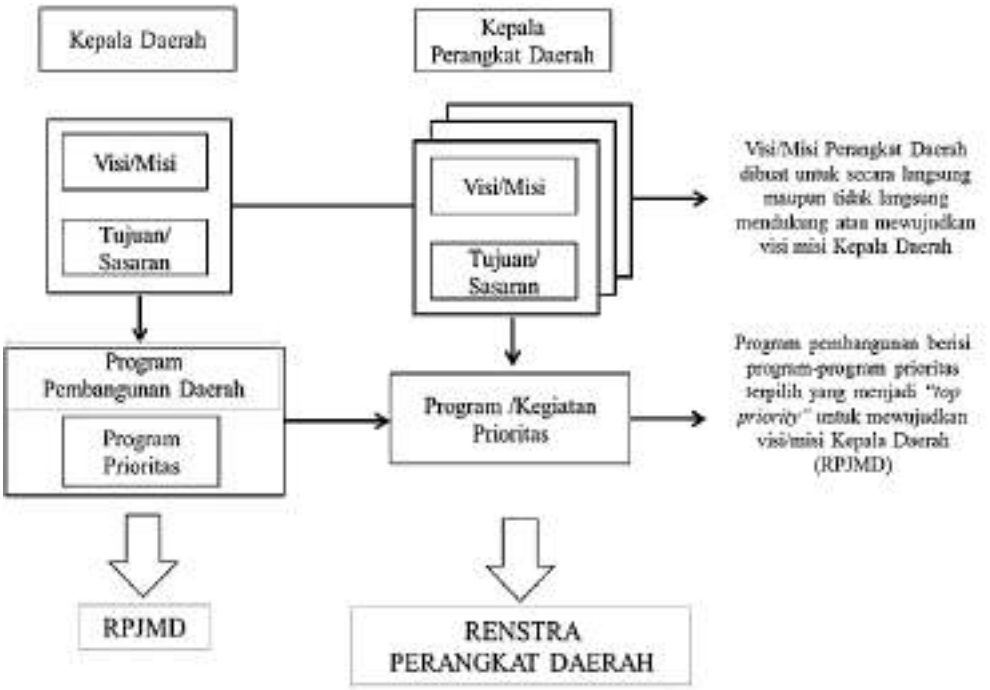

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

Dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Permendagri diatas bahwa perangkat daerah menyusun rancangan rencana kerja perangkat daerah berpedoman pada rancangan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah kabupaten.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Disperik Tahun 2026 disusun sebagai upaya untuk menjawab dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan potensi perikanan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Penyesuaian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2026 mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sedangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKPD tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten1ang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang T ahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pem alang T ahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Disperik Tahun 2026 adalah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Renja Disperik Tahun 2025 melalui upaya peningkatan kinerja program, kegiatan dan anggaran. Secara lebih rinci maksud penyusunan Renja ini adalah sebagai :

1) landasan kebijakan operasional bagi seluruh Aparat Sipil Negara di lingkungan Dinas Perikanan, baik jajaran struktural maupun fungsional dalam kinerjanya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang berpedoman kepada RKPD Tahun 2025, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026; dan
2) penjabaran dari RKPD Tahun 2025, serta tindak lanjut hasil evaluasi realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Disperik Tahun 2026 adalah untuk :

1) menciptakan keselarasan atas perubahan kerangka pembangunan ekonomi bidang kelutan dan perikanan sehingga tercipta sinergi dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan efisiensi alokasi sumber daya;
2) memberikan gambaran tentang target capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2025; dan
3) referensi arah dan pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Disperik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Hasil Evaluasi SAKIP
2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penentuan Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.6. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
3.2. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja
4.2. Pendanaan
BAB IV. PENUTUP
LAMPIRAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Kegiatan *review* pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan III tahun 2025 dan pencapaian kinerja renstra perangkat daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Perikanan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan 5 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan sebesar Rp. 10.307.928.608,-, yang terdiri atas : Belanja Operasi sebesar Rp. 10.224.975.947,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 82.952.661,-.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Perikanan sampai dengan triwulan III tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Kode Rekening					Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Perubahan		Realisasi								Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (%) (12 = 11/6*100)		Status Capaian	
										TW I		TW II		TW III		TW IV		Total (13 = 9+10+11+12)					
						4		8		9		10		11		12		13		14		15	
2					3	Indikator	Satuan	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Indeks SAKIP = 51**	**100,00**	**10.307.928.608,00**	**16,10**	**1.659.299.216,00**	**20,94**	**2.158.641.925,00**	**23,44**	**2.416.618.955,00**	**-**	**-**	**60,48**	**6.234.560.096,00**	**71,95**	**60,48**	**T**	**R**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai evaluasi SAKIP, indeks reformasi dan birokasi, indeks kepuasan masyarakat**	**%**	**51,00**	**7.294.343.796,50**	**11,00**	**1.572.750.116,00**	**10,32**	**1.475.682.242,00**	**12,12**	**1.733.413.364,00**	**0,00**	**-**	**33,43**	**4.781.845.722,00**	**78,74**	**65,56**	**ST**	**S**
3	**25**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD**	**dokumen**	**9**	**27.003.361,00**	**2**	**2.870.800,00**	**0**	**525.000,00**	**7**	**20.752.400,00**	**0**	**-**	**9**	**24.148.200,00**	**94,17**	**89,43**	**ST**	**ST**
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	17.654.000,00	0	-	0	-	3	17.174.000,00	0	-	3	17.174.000,00	100,00	97,28	**ST**	**ST**
3	25	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	1	2.279.800,00	1	1.729.800,00	0	-	0	-	0	-	1	1.729.800,00	100,00	75,88	**ST**	**ST**
3	25	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	dokumen	1	1.060.000,00	0	-	0	150.000,00	1	660.000,00	0	-	1	810.000,00	100,00	76,42	**ST**	**ST**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	25	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	dokumen	1	1.891.000,00	1	1.141.000,00	0	-	0	-	0	-	1	1.141.000,00	65,00	60,34	S	R
3	25	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	dokumen	1	2.153.961,00	0	-	0	375.000,00	1	953.800,00	0	-	1	1.328.800,00	100,00	61,69	ST	S
3	25	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	2	1.964.600,00	0	-	0	-	2	1.964.600,00	0	-	2	1.964.600,00	100,00	100,00	ST	ST
3	**25**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah**	**laporan**	**4**	**5.714.651.800,00**	**4**	**1.345.995.016,00**	**4**	**1.208.912.742,00**	**4**	**1.237.427.711,00**	**0**	**-**	**4**	**3.792.335.469,00**	**88,89**	**66,36**	**ST**	**S**
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	33	5.711.635.000,00	8	1.345.995.016,00	7	1.208.912.742,00	7	1.234.910.911,00	0	-	22	3.789.818.669,00	66,67	66,35	S	S
3	25	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	1.510.000,00	0	-	0	-	1	1.010.000,00	0	-	1	1.010.000,00	100,00	66,89	ST	S
3	25	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteranSKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	laporan	2	1.506.800,00	0	-	0	-	2	1.506.800,00	0	-	2	1.506.800,00	100,00	100,00	ST	ST
3	**25**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi barang milik daerah**	**laporan**	**2**	**1.200.000,00**	**0**	**-**	**1**	**900.000,00**	**1**	**300.000,00**	**0**	**-**	**2**	**1.200.000,00**	**100,00**	**100,00**	**ST**	**ST**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	25	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	laporan	2	1.200.000,00	0	-	1	900.000,00	1	300.000,00	0	-	2	1.200.000,00	100,00	100,00	ST	ST
3	**25**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**kegiatan**	**1**	**10.290.000,00**	**0**	**-**	**3**	**940.000,00**	**27**	**9.150.000,00**	**0**	**-**	**30**	**10.090.000,00**	**100,00**	**98,06**	**ST**	**ST**
3	25	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	30	10.290.000,00	0	-	3	940.000,00	27	9.150.000,00	0	-	30	10.090.000,00	100,00	98,06	ST	ST
3	**25**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah**	**kegiatan**	**6**	**544.954.835,50**	**6**	**39.563.300,00**	**6**	**54.381.600,00**	**6**	**237.400.850,00**	**0**	**-**	**6**	**331.345.750,00**	**72,63**	**60,80**	**T**	**R**
3	25	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	8.047.500,00	0	830.500,00	0	1.551.000,00	1	2.830.500,00	0	-	1	5.212.000,00	100,00	64,77	ST	S
3	25	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	paket	1	4.327.360,00	0	776.600,00	0	655.000,00	1	997.850,00	0	-	1	2.429.450,00	60,00	56,14	R	R
3	25	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	38	111.532.520,80	4	13.037.900,00	10	26.118.000,00	6	17.522.700,00	0	-	20	56.678.600,00	52,63	50,82	R	SR
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	298.866.167,00	0	1.585.800,00	0	6.007.600,00	1	198.294.300,00	0	-	1	205.887.700,00	100,00	68,89	ST	T

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	25	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	dokumen	4	6.120.000,00	1	1.240.000,00	1	1.820.000,00	0	510.000,00	0	-	2	3.570.000,00	57,50	58,33	R	R
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	99	116.061.287,70	20	22.092.500,00	25	18.230.000,00	20	17.245.500,00	0	-	65	57.568.000,00	65,66	49,60	S	SR
3	**25**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Unit**	**4**	**56.980.000,00**	**0**	**-**	**0**	**-**	**4**	**27.300.000,00**	**0**	**-**	**4**	**27.300.000,00**	**50,00**	**47,91**	**SR**	**SR**
3	25	01	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	56.980.000,00	0	-	0	-	4	27.300.000,00	0	-	4	27.300.000,00	50,00	47,91	SR	SR
3	**25**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**laporan**	**17**	**812.446.505,00**	**5**	**180.131.500,00**	**5**	**189.931.400,00**	**5**	**188.775.903,00**	**0**	**-**	**15**	**558.838.803,00**	**83,33**	**68,78**	**ST**	**T**
3	25	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	3	7.777.500,00	1	1.631.200,00	1	2.900.000,00	1	1.600.000,00	0	-	3	6.131.200,00	100,00	78,83	ST	ST
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	4	130.089.005,00	1	30.022.200,00	1	27.433.300,00	1	29.193.889,00	0	-	3	86.649.389,00	75,00	66,61	ST	S
3	25	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (29 Non ASN)	laporan	12	674.580.000,00	3	148.478.100,00	3	159.598.100,00	3	157.982.014,00	0	-	9	466.058.214,00	75,00	69,09	ST	T

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	**25**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**laporan**	**3**	**126.817.295,00**	**3**	**4.189.500,00**	**3**	**20.091.500,00**	**3**	**12.306.500,00**	**0**	**-**	**3**	**36.587.500,00**	**40,86**	**28,85**	**SR**	**SR**
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	54	72.951.996,00	3	4.189.500,00	9	12.701.000,00	2	2.252.000,00	0	-	14	19.142.500,00	25,93	26,24	**SR**	**SR**
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	6	24.400.000,00	0	-	2	5.340.000,00	2	1.560.000,00	0	-	4	6.900.000,00	66,67	28,28	**S**	**SR**
3	25	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	29.465.299,00	0	-	0	2.050.500,00	1	8.494.500,00	0	-	1	10.545.000,00	30,00	35,79	**SR**	**SR**
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase TPI yang memenuhi standar**	**%**	**84,00**	**1.359.479.466,50**	**1,81**	**29.258.600,00**	**26,74**	**432.725.698,00**	**14,51**	**234.852.122,00**	**0,00**	**-**	**43,06**	**696.836.420,00**	**79,08**	**51,26**	**ST**	**SR**
3	**25**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah data sumber daya ikan yang tersedia, serta fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang tertangani**	**kegiatan**	**2**	**838.149.094,50**	**2**	**5.650.000,00**	**2**	**84.385.198,00**	**2**	**131.845.722,00**	**0**	**-**	**2**	**221.880.920,00**	**78,57**	**26,47**	**ST**	**SR**
3	25	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan diperairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	dokumen	2	10.600.000,00	0	3.000.000,00	1	4.800.000,00	1	200.000,00	0	-	2	8.000.000,00	100,00	75,47	**ST**	**ST**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	25	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	unit	7	827.549.094,50	1	2.650.000,00	1	79.585.198,00	2	131.645.722,00	0	-	4	213.880.920,00	57,14	25,85	R	SR
3	**25**	**03**	**2,02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana**	**kegiatan**	**2**	**330.000.000,00**	**2**	**11.858.600,00**	**2**	**258.664.000,00**	**2**	**40.588.000,00**	**0**	**-**	**2**	**311.110.600,00**	**94,00**	**94,28**	**ST**	**ST**
3	25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya	orang	50	330.000.000,00	2	11.858.600,00	39	258.664.000,00	6	40.588.000,00	0	-	47	311.110.600,00	94,00	94,28	ST	ST
3	**25**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan TPI yang terselenggara**	**kegiatan**	**2**	**183.144.335,00**	**2**	**10.000.000,00**	**2**	**86.476.500,00**	**2**	**62.418.400,00**	**2**	**-**	**2**	**158.894.900,00**	**83,75**	**86,76**	**ST**	**ST**
3	25	03	2,03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	dokumen	5	73.723.335,00	1	8.503.600,00	1	21.976.200,00	2	26.491.000,00	0	-	4	56.970.800,00	80,00	77,28	ST	ST
3	25	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	layanan	8	109.421.000,00	1	1.496.400,00	3	64.500.300,00	3	35.927.400,00	0	-	7	101.924.100,00	87,50	93,15	ST	ST
3	**25**	**03**	**2,04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal**	**kegiatan**	**1**	**8.186.037,00**	**1**	**1.750.000,00**	**1**	**3.200.000,00**	**1**	**-**	**0**	**-**	**1**	**4.950.000,00**	**60,00**	**60,47**	**R**	**R**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	25	03	2,04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	rekomendasi	100	8.186.037,00	21	1.750.000,00	39	3.200.000,00	0	-	0	-	60	4.950.000,00	60,00	60,47	R	R
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase sarana dan prasarana yang tertangani**	**%**	**30,00**	**1.311.440.565,00**	**0,62**	**26.945.300,00**	**3,77**	**164.722.235,00**	**8,04**	**351.343.969,00**	**0,00**	**-**	**12,42**	**543.011.504,00**	**75,08**	**41,41**	**ST**	**SR**
3	**25**	**04**	**2,02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas**	**kegiatan**	**4**	**572.029.408,00**	**4**	**13.650.000,00**	**4**	**102.877.485,00**	**4**	**231.503.096,00**	**0**	**-**	**4**	**348.030.581,00**	**84,00**	**60,84**	**ST**	**R**
3	25	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	kelompok	1	104.722.058,00	0	-	0	13.000.400,00	1	86.937.196,00	0	-	1	99.937.596,00	100,00	95,43	ST	ST
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	kelompok	3	10.200.000,00	2	8.550.000,00	0	-	1	600.000,00	0	-	3	9.150.000,00	100,00	89,71	ST	ST
3	25	04	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya	kelompok	5	160.390.732,00	1	600.000,00	3	89.877.085,00	1	34.966.000,00	0	-	5	125.443.085,00	100,00	78,21	ST	ST
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	kelompok	5	296.716.618,00	0	4.500.000,00	0	-	2	108.999.900,00	0	-	2	113.499.900,00	36,00	38,25	SR	SR

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	**25**	**04**	**2,04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan**	**kegiatan**	**5**	**739.411.157,00**	**5**	**13.295.300,00**	**5**	**61.844.750,00**	**5**	**119.840.873,00**	**0**	**-**	**5**	**194.980.923,00**	**66,17**	**26,37**	**S**	**SR**
3	25	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	dokumen	12	9.999.500,00	0	-	9	7.749.300,00	1	450.200,00	0	-	10	8.199.500,00	83,33	82,00	**ST**	**ST**
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	unit	6	617.112.400,00	1	4.200.000,00	1	2.750.000,00	1	87.917.320,00	0	-	3	94.867.320,00	50,00	15,37	**SR**	**SR**
3	25	4	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/ Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	unit	5	83.129.257,00	2	3.350.000,00	2	49.240.750,00	1	25.173.353,00	0	-	5	77.764.103,00	100,00	93,55	**ST**	**ST**
3	25	4	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	dokumen	34	9.670.000,00	10	2.745.300,00	2	604.700,00	5	1.350.000,00	0	-	17	4.700.000,00	50,00	48,60	**SR**	**SR**
3	25	04	2,04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	ha	12	19.500.000,00	2	3.000.000,00	1	1.500.000,00	3	4.950.000,00	0	-	6	9.450.000,00	47,50	48,46	**SR**	**SR**
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Terpeliharanya Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Darat**	**%**	**4,00**	**60.186.780,00**	**0,36**	**5.345.200,00**	**0,70**	**10.511.750,00**	**1,11**	**16.679.500,00**	**0,00**	**-**	**2,16**	**32.536.450,00**	**54,00**	**54,06**	**R**	**R**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	**25**	**05**	**2,01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan**	**dokumen**	**1**	**60.186.780,00**	**1**	**5.345.200,00**	**1**	**10.511.750,00**	**1**	**16.679.500,00**	**0**	**-**	**1**	**32.536.450,00**	**54,00**	**54,06**	**R**	**R**
3	25	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota	pelaku usaha	50	60.186.780,00	4	5.345.200,00	9	10.511.750,00	14	16.679.500,00	0	-	27	32.536.450,00	54,00	54,06	**R**	**R**
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan**	**%**	**73,87**	**282.478.000,00**	**6,54**	**25.000.000,00**	**19,61**	**75.000.000,00**	**21,01**	**80.330.000,00**	**0,00**	**-**	**47,16**	**180.330.000,00**	**72,86**	**63,84**	**T**	**S**
3	**25**	**06**	**2,01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia**	**dokumen**	**2**	**11.172.000,00**	**2**	**1.591.100,00**	**2**	**5.154.400,00**	**2**	**1.600.000,00**	**0**	**-**	**2**	**8.345.500,00**	**100,00**	**74,70**	**ST**	**ST**
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	dokumen	2	11.172.000,00	0	1.591.100,00	1	5.154.400,00	1	1.600.000,00	0	-	2	8.345.500,00	100,00	74,70	**ST**	**ST**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	**25**	**06**	**2,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana**	**kegiatan**	**1**	**89.092.600,00**	**1**	**951.300,00**	**1**	**24.572.000,00**	**1**	**9.855.000,00**	**1**	**-**	**1**	**35.378.300,00**	**40,00**	**39,71**	**SR**	**SR**
3	25	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	unit usaha	5	89.092.600,00	0	951.300,00	1	24.572.000,00	1	9.855.000,00	0	-	2	35.378.300,00	40,00	39,71	**SR**	**SR**
3	**25**	**06**	**2,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang terlaksana**	**kegiatan**	**2**	**182.213.400,00**	**2**	**22.457.600,00**	**2**	**45.273.600,00**	**2**	**68.875.000,00**	**0**	**-**	**2**	**136.606.200,00**	**78,58**	**74,97**	**ST**	**ST**
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ton	1938	149.238.400,00	22	1.657.600,00	574	44.173.600,00	822	63.330.000,00	0	-	1418	109.161.200,00	73,17	73,15	**T**	**T**
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	pelaku usaha	50	32.975.000,00	32	20.800.000,00	2	1.100.000,00	8	5.545.000,00	0	-	42	27.445.000,00	84,00	83,23	**ST**	**ST**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penyerapan anggaran Dinas Perikanan sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.234.560.096,- (60,48%) dengan kategori rendah. Hal ini disebabkan belanja kegiatan pengadaan fisik ditargetkan terlaksana pada triwulan IV.

Berkaitan dengan realisasi penyerapan anggaran pada 5 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Sekretariatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.781.845.722,- (65,56%) kategori sedang, dari total anggaran sebesar Rp. 7.294.343.797,-. Keterkaitan realisasi tersebut, beberapa subkegiatan yang harus ditingkatkan kinerja keuangannya diantaranya; belanja penyediaan bahan logistik, penyelenggaraan rakor dan konsultasi, pengadaan BMD, dan pemeliharaan BMD;
2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 696.836.420,- (51,26%) kategori sangat rendah, dari total anggaran sebesar Rp. 1.359.479.467,-. Keterkaitan realisasi tersebut, subkegiatan yang harus ditingkatkan kinerja keuangannya yaitu Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
   Sedangkan pada Unit Pelelangan Ikan (UPI) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 158.894.900,- (86,76%) kategori sangat tinggi, dari total anggaran sebesar Rp. 183.144.335,-.
3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 543.011.504,- (41,41%) kategori sangat rendah, dari total anggaran sebesar Rp. 1.311.440.565,-. Keterkaitan realisasi tersebut, subkegiatan yang harus ditingkatkan kinerja keuangannya diantaranya; Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota serta perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sedangkan pada Unit Budidaya Ikan Air Tawar (UBIAT) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.764.103,- (93,55%) kategori sangat tinggi, dari total anggaran sebesar Rp. 83.129.257,-.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026, serta Renja Disperik Tahun 2025.

Program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan dengan mengacu pada target-target kinerja yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan pada tahun 2025 dijabarkan kedalam 5 program dan 18 kegiatan, serta dirinci kedalam 44 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya meliputi :
   1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
   2) Administrasi keuangan perangkat daerah.
   3) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
   4) Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
   5) Administrasi umum perangkat daerah.
   6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
   7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kegiatannya meliputi :
   1) Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
   2) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.
   3) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4) Penerbitan Tanda Daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, kegiatannya meliputi :
   1) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil.
   2) Pengelolaan Pembudidaya ikan.
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, kegiatannya meliputi :
   1) Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air.
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, kegiatannya meliputi :
   1) Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
   2) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
   3) Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota.

Adapun capaian kinerja program-program sampai dengan triwulan III tahun 2025 yang telah dilaksanakan dan dianggarkan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2.
Pencapaian Program Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp.,-)	Realisasi (Rp.,-)	Capaian (%)	
				Fisik	Keuangan
3. 25. 01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	6.236.622.640	4.754.545.722	78,74	65,56
3. 25. 03	Program pengelolaan perikanan tangkap	1.359.479.467	696.836.420	79,08	51,26
3. 25. 04	Program pengelolaan perikanan budidaya	1.311.440.565	543.011.504	75,08	41,41
3. 25. 05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	60.186.780	32.536.450	54,00	54,06
3. 25. 06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	282.478.000	180.330.000	72,86	63,84

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	19.588.646	13.349.077	68,15	1.419.666.247	729.372.870	52,66
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	20.447.276	15.202.367	74,35	1.311.440.565	543.011.504	41,41
Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	12.542.892	9.837.745	78,43	884.000.000	882.672.700	63,84

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan tabel diatas, bahwa capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan merupakan hasil dari pencapaian kinerja program-program yang telah dilaksanakan. Gambaran pencapaian kinerja program-program dan penganggarannya sampai dengan triwulan III tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indikator kinerja sasaran, capaian kinerja produksi perikanan tangkap sebesar 68,15%, yakni melalui program pengelolaan perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan kegiatan yang mendorong kinerja pelayanan diantaranya; pengerukan muara sungai alur pelayaran nelayan kecil, sertifikasi kecakapan nelayan, dan rehab. tempat pelelangan ikan;
2) Indikator kinerja sasaran, capaian kinerja produksi perikanan budidaya sebesar 74,35%, yakni melalui program pengelolaan perikanan budidaya, pelaksanaan kegiatan yang mendorong kinerja pelayanan diantaranya; jalan produksi kawasan budidaya, CBIB, PITAP, dan rehab. UBIAT;
3) Indikator kinerja sasaran, capaian kinerja produksi hasil olahan perikanan sebesar 78,43%, yakni melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelaksanaan kegiatan yang mendorong kinerja pelayanan diantaranya; Uji Mutu produk olahan, Sertifikasi Halal, SKP, Gemarikan dan Pasar Murah.

Faktor pendorong capaian target produksi sampai dengan triwulan III tahun 2025, diantaranya; fasilitasi PAS KECIL, BBM Bersubsidi, pengerukan muara sungai alur pelayaran nelayan, bantuan waring untuk pembudidaya terdampak banjir rob, Gemarikan, dan Pasar Murah.

Secara detail pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dari tahun 2023 sampai dengan triwulan III tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun			Realisasi Tahun		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025 (TW-3)
1	Produksi perikanan tangkap	Kg	18.827.995	19.204.555	19.588.646	22.366.854	21.009.034	13.349.077
2	Produksi perikanan budidaya	Kg	19.273.519	19.851.724	20.447.276	19.274.111	19.924.806	15.202.367
3	Produksi hasil olahan perikanan	Kg	12.005.837	12.296.953	12.542.892	12.346.255	13.212.545	9.837.745

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pencapaian kinerja pelayanan lainnya pada Dinas Perikanan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD sampai dengan triwulan III tahun 2025, dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

Uraian PAD	Target Perubahan (Rp)	Realisasi SD. TW-3 (Rp)	Capaian (%)
Retribusi Penyewaan Bangunan	30.000.000	-	0,00%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000	17.335.000	86,68%
Penyediaan Fasilitas Tempat Pelelangan	4.000.000.000	2.266.493.662	56,66%
Jumlah	**4.050.000.000**	**2.283.828.662**	**56,39%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sektor perikanan merupakan sektor yang komoditas hasil perikanannya sangat bergantung dengan alam dan dominan diusahakan didaerah pantai. Oleh sebab itu, kinerja pelayanan Dinas Perikanan sangat terkait dengan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sektor perikanan tersebut, sehingga untuk dapat dikembangkan, dijaga kelestariannya dan berkelanjut pembangunannya. Salah satu mandatori kegiatan yang sejalan dengan hal tersebut adalah Pembangunan SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambingan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selaras dengan Pemerintah Daerah, upaya pencapaian target TPB/SDGs juga telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sektor perikanan oleh Dinas Perikanan. Target-target TPB/SDGs Dinas Perikanan telah menjadi bagian dari program, kegiatan dan indikator yang terukur dan didukung penganggaran sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Capaian target-target TPB/SDGs Dinas Perikanan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.6.
Capaian Program dan Kegiatan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					SATUAN	2024				SUMBER PENDANAAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	KETERANGAN (Diisi Aktivitas Riil)
							Target (Fisik, Unit, dsb)	Realisasi (Fisik, Unit, dsb)	Alokasi Anggaran (Rp. 000)	Realisasi Anggaran (Rp. 000)				
(0)	(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Target 14.1 . Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.													
	14.1.1.(a)	Persentase sampah yang dibuang di perairan												
	Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk													
	14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan												
	03:25:03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan	orang	50	50	599.999	598.476	APBD	Desa Potensi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pemalang	DINAS PERIKANAN	Pelatihan SKN (sertifikasi kecapan nelayan)
	03:25:04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya											DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	3.25.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Dinas Perikanan) Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	3	3	6.000	6.000	APBD, APBN (DAU Terarah, DAK)	Desa Potensi perikanan budidaya	DINAS PERIKANAN	Pelatihan budidaya perikanan terkait CBIB dan CPIB
	03:25:06	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan											DINAS PERIKANAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah unit usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	unit usaha	3	3	625.000	624.194	APBD, APBN (DAK)	Desa Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Pemalang	DINAS PERIKANAN	rehab unit pengolahan ikan, pembinaan poklahsar, pengujian terhadap produk hasil perikanan
	Target 14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia														
	14.5.1*	Jumlah kawasan dan luas konservasi yang dikelola													
	03:25:03	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											DINAS PERIKANAN		
	3.25.05.2.01	Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/Kota	3.25.05.2.01.01	Sub kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	1	1	134.952	134.952	APBD	Desa Potensi Perikanan Peraian Umum di Kabupaten Pemalang	DINAS PERIKANAN	Melakukan restocking dan penanaman cemara laut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Target 14.6 Pada tahun 2030, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporka												
	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha yang diawasi/diperiksa											
	Target 14.b Menyediakakn akses untuk nelayan skala kecil (small scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar												
	14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
	03:25:03	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										DINAS PERIKANAN	
	3.25.05.2.01	Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kab/Kota	3.25.05.2.01.01	Sub kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dok	1	1	134.952	134.952	APBD	Desa Potensi Perikanan Peraian Umum di Kabupaten Pemalang	DINAS PERIKANAN	Melakukan restocking dan penanaman cemara laut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dinas Perikanan berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan dari tahun ketahun sebagaimana RPJMD 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan 2021-2026. Oleh sebab itu, Dinas Perikanan melakukan penerapan kebijakan uji parameter capaian kinerja pelayanan. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja yang dicapai dengan capaian kinerja pelayanan kabupaten terdekat yang mana menggunakan definisi dan klasifikasi indikator kinerja yang sederajat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data uji tersebut ditampilkan dalam bentuk perbandingan kinerja pelayanan produksi perikanan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.7.
Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Produksi Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2024
Terhadap Kabupaten Terdekat Tahun 2024

No	OPD/Kabupaten	Klasifikasi Produksi	Tahun 2024	OPD/Kabupaten/ Kota	Tahun 2024	Persentase (%)
1	Kab. Tegal	Perikanan Tangkap (Kg)	5.820.304	Kabupaten Pemalang	21.009.034	3,61
		Perikanan Budidaya (Kg)	2.861.551		19.924.806	6,96
3	Kab. Pekalongan	Perikanan Tangkap (Kg)	4.546.110			4,62
		Perikanan Budidaya (Kg)	8.921.000			2,23
4	Kab. Brebes	Perikanan Tangkap (Kg)	7.392.836			2,84
		Perikanan Budidaya (Kg)	3.296.879			6,04

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa secara umum capaian kinerja pelayanan produksi perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dapat dikatakan lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pelayanan produksi perikanan oleh Kabupaten terdekat. Namun, capaian ini perlu ditingkatkan pertumbuhannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan tata kelola usaha perikanan yang ramah lingkungan sehingga sumber daya ikan dapat terus terpelihara tingkat produktivitasnya

2.3. Hasil Evaluasi SAKIP

Penilaian capaian kinerja yang baik juga ditunjukkan Dinas Perikanan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian evaluator SAKIP pemerintah daerah, capaikan SAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.8.
Pengukuran Kinerja Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No	Komponen	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan kinerja (30%)	19,21	13,76	18,98	21,60	21,00	21,26
2	Pengukuran kinerja (25%)	11,88	10,00	11,56	17,10	18,60	19,14
3	Pelaporan kinerja (15%)	9,06	9,05	9,31	9,75	9,75	9,76
4	Evaluasi internal (10%)	1,75	2,83	2,92	12,50	13,75	14,93
5	Capaian kinerja (20%)	9,07	5,50	8,83	Tidak masuk komponen evaluasi AKIP Tahun 2022 (Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP	Tidak masuk komponen evaluasi AKIP Tahun 2022 (Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP	Tidak masuk komponen evaluasi AKIP Tahun 2022 (Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP
Jumlah		**50,97**	**41,14**	**51,60**	**60,95**	**63,10**	**65,09**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana tabel diatas merupakan bentuk capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang terhadap keberhasilan penerapan sistem SMART dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rencana kerja anggaran dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut :

1) identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya.

Hasil *review* sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.9.
Hasil *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Analisis Kebutuhan Dana**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disperik	Nilai evaluasi SAKIP, indeks reformasi dan birokasi, indeks kepuasan masyarakat	65	7.277.174.529	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disperik	Nilai evaluasi SAKIP, indeks reformasi dan birokasi, indeks kepuasan masyarakat	65	7.277.174.529	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperik	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		35.093.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperik	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		35.093.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	2 Dokumen	1.654.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	2 Dokumen	1.654.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.279.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.279.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.060.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.891.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.891.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	2.243.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	2.243.800	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
			dokumen perubahan DPA SKPD					dokumen perubahan DPA SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperik	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	1.964.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperik	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	1.964.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		5.677.615.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		5.677.615.800	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	5.674.599.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	5.674.599.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.510.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.510.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	12 Laporan	1.506.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	12 Laporan	1.506.800	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperik	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah		2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperik	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah		2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperik	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperik	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperik	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		101.399.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperik	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		101.399.200	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	100 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	100 Orang	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	1.399.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	1.399.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah		517.174.825	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah		517.174.825	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6.090.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6.090.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperik	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1.658.610	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperik	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1.658.610	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	81.936.390	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	81.936.390	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	304.221.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	304.221.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.650.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.650.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	120.618.625	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	120.618.625	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperik	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia		27.900.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		27.900.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah dan Jenis Peralatan Mesin Lainnya Yang Dibeli	4 Unit	27.900.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	27.900.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		811.727.019	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		811.727.019	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12.798.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12.798.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	150.489.019	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	150.489.019	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	649.688.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	649.688.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disperik	Terpeliharanya barang milik daerah		104.264.485	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disperik	Terpeliharanya barang milik daerah		104.264.485	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Daerah					Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Disperik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53 Unit	56.231.994	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Disperik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53 Unit	56.231.994	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	22.570.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	22.570.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	25.462.491	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	25.462.491	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Disperik	Persentase TPI yang memenuhi standar (%)	79%	896.208.841	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Disperik	Persentase TPI yang memenuhi standar (%)	79%	896.208.841	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data sumber daya ikan yang tersedia, serta fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang tertangani		455.853.536	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data sumber daya ikan yang tersedia, serta fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang tertangani		455.853.536	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Disperik	Jumlah data dan informasi SDI di Perairan Darat dalam 1 Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	16.550.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Disperik	Jumlah data dan informasi SDI di Perairan Darat dalam 1 Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	16.550.000	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	10 Unit	289.303.536	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	10 Unit	289.303.536	
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	150.000.000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	150.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana		330.000.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana		330.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya	50 Orang	250.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya	50 Orang	250.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	50.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	50.000.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan,	1 Unit	30.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan,	1 Unit	30.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
			Kemitraan Usaha					Kemitraan Usaha			
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan TPI yang terselenggara		96.657.004	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan TPI yang terselenggara		96.657.004	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	2 Dokumen	85.298.004	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	2 Dokumen	85.298.004	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI	14 Layanan	11.359.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI	14 Layanan	11.359.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai,	Disperik	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal		13.698.301	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai,	Disperik	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal		13.698.301	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Disperik	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	100 Rekomendasi	13.698.301	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Disperik	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	100 Rekomendasi	13.698.301	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Disperik	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani (%)	21%	1.074.452.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Disperik	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani (%)	21%	1.074.452.000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi		474.351.100	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi		474.351.100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
			bantuan pendanaan dan pemberian kemudahan akses IPTEK serta pendidikan dan pelatihan					bantuan pendanaan dan pemberian kemudahan akses IPTEK serta pendidikan dan pelatihan			
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	1 Kelompok	600	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	1 Kelompok	600	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	3 Kelompok	10.200.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	3 Kelompok	10.200.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan,	4 Kelompok	132.090.732	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan,	4 Kelompok	132.090.732	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
			kemitraan usaha					kemitraan usaha			
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan , kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknolohi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5 Kelompok	332.059.768	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan , kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknolohi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5 Kelompok	332.059.768	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Disperik	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan		600.100.900	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Disperik	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan		600.100.900	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota	12 Dokumen	9.999.500	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota	12 Dokumen	9.999.500	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Disperik	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam1	5 Unit	219.700.400	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Disperik	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam1	5 Unit	219.700.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota		(satu) daerah kabupaten atau kota			(satu) Daerah Kabupaten/ Kota		(satu) daerah kabupaten atau kota			
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota	5 Unit	91.231.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota	5 Unit	91.231.000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1(satu) daerah Kabupaten atau Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	4 Dokumen	9.670.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1(satu) daerah Kabupaten atau Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	4 Dokumen	9.670.000	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	2 Unit	100.000.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	2 Unit	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangka, dimanfaatkan dan dilindungi	12 Dokumen	19.500.000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidaya ikan	12 Dokumen	19.500.000	
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Disperik	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	2 Unit	150.000.000	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Disperik	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	2 Unit	150.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disperik	Persentase peningkatan pengawasan Perikanan Umum Darat (PUD) (%)	4%	120.636.780	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disperik	Persentase peningkatan pengawasan Perikanan Umum Darat (PUD) (%)	4%	120.636.780	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Disperik	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan		120.636.780	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Disperik	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan		120.636.780	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota					
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	30.000.000	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	30.000.000	
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha	30.000.000	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha	30.000.000	
	Pengawasan usaha penangkapan		Jumlah pelaku usaha penangkapan	20 Pelaku Usaha	60.636.780	Pengawasan usaha penangkapan	Disperik	Jumlah pelaku usaha penangkapan	20 Pelaku Usaha	60.636.780	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
	ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota		ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kab/kota			
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Disperik	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan (%)	63,87%	307.443.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Disperik	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan (%)	63,87%	307.443.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia		27.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia		27.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha	5 dokumen	27.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha	5 dokumen	27.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
			dan resiko					dan resiko			
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana		114.170.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana		114.170.000	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemsaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	3 unit usaha	114.170.000	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Disperik	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan	3 unit usaha	114.170.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
								risiko			
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang terlaksana		166.273.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang terlaksana		166.273.000	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten atau Kota	1548 Ton	133.473.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten atau Kota	1548 Ton	133.473.000	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	50 pelaku usaha	32.800.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Disperik	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	50 pelaku usaha	32.800.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Analisis Kebutuhan Dana	
			ta (Dinas Perikanan) yang terfasilitasi			Kota		ta (Dinas Perikanan) yang terfasilitasi			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat disimpulkan hasil identifikasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1) terdapat kegiatan hanya mengalokasikan untuk belanja perjalanan dinas yakni pada subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil ;
2) terdapat penambahan 8 subkegiatan baru yakni pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sejumlah 1 subkegiatan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sejumlah 3 subkegiatan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sejumlah 2 subkegiatan, dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sejumlah 2 subkegiatan.

2.5. Penentuan Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penelaahan isu-isu penting merupakan bentuk inventarisasi permasalahan aktual dan krusial terkait dengan pelaksananaan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Upaya ini dilakukan guna efisiensi dan efektivitas penyelesaian pokok permasalahan sehingga diharapkan solusinya dapat tepat guna dan sasaran sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Berikut isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.10.
Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Solusi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	1) Pendangkalan muara alur pelayaran nelayan, dan kurang tersedianya sarana dan prasarana pelelangan ikan yang memadai 2) Semakin menurunnya produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan	1) Fasilitasi normalisasi muara alur pelayaran nelayan, khususnya alur pelayaran menuju TPI (Tanjungsari, Asemdoyong, Nyamplungsari, Mojo, dan Ketapang) 2) Penyediaan sarana dan prasarana pelelangan ikan yang memadai melalui pengadaan baru maupun penggantian, diantaranya timbangan, basket ikan 3) Fasilitasi pengawasan kegiatan usaha perikanan	1) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap 2) Pengembangan kapasitas nelayan kecil 3) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
2	1) Pencemaran limbah budidaya 2) Sedimentasi pada saluran tambak 3) Kerusakan sarpras tambak budidaya akibat banjir rob 4) Kurang tercukupinya benih dan pakan yang berkualitas dan obat-obatan untuk penyakit ikan 5) Kurang tersedianya sarana	1) Fasilitasi monitoring dan pengawasan IPAL sederhana di lingkungan tambak udang vanamae 2) Fasilitasi pembangunan tanggul penahan banjir rob 3) Pembinaan pelatihan CBIB bagi pembudidaya ikan 4) Normalisasi saluran tambak yang terdampak banjir rob 5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung	1) Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil 2) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 3) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4) Penyediaan Prasarana	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Permasalahan	Solusi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	dan prasarana pembenihan di UBIAT	tambak pembudidaya terutama yang terdampak abrasi banjir rob, diantaranya jalan produksi, khususnya di wilayah kecamatan ulujami 6) Memfasilitasi penggadaan benih yang (*restocking*) 7) Meningkatkan sarana dan prasarana *hatchery* di UBIAT	Pembudidayaan Ikan 5) Penyediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan 6) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	
3	1) Kurangnya fasilitasi pemasaran 2) Kurangnya fasilitasi usaha diversifikasi usaha olahan di dalam daerah 3) Kurangnya pembinaan pelatihan mutu olahan	1) Meningkatkan Gemarikan 2) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan *value added* serta fasilitasi pasar murah dan pameran bagi poklahsar 3) Meningkatkan fasilitasi uji bahan *additive* berbahaya pada olahan hasil perikanan, pembinaan dan pelatihan bagi poklahsar yang terindikasi menggunakan bahan *additive* berbahaya, serta fasilitasi sertifikasi produk olahan hasil perikanan yang aman pangan, diantaranya HALAL, SKP diutamakan untuk poklahsar yang berhasil menerapkan aman pangan setelah terindikasi menggunakan bahan *additive*	1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan KecilPelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 2) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan didasari pada upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Jaring aspirasi masyarakat dimaksud berasal dari nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, koperasi nelayan, koperasi perairan darat, kelompok masyarakat tertentu, stakeholder, akademisi serta pihak-pihak terkait dan pemerhati perkembangan kemajuan perikanan di Kabupaten Pemalang.

Media jejaring aspirasi masyarakat yaitu melalui penyelenggaraan musrenbang, Forum Perangkat Daerah (FPD) serta fasilitasi layanan lainnya yang dapat diakses masyarakat. Hasil penelaahan sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.11.
Penelaahan Usulan Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2026

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
FORUM PD						
FISIK						
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (3.25.03)/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.03.2.01)/ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.2.01.02)	Wilayah TPI Tanjungsari, TPI Nyamplungsari, TPI Mojo, TPI Ketapang	Pengadaan Suar Navigasi	4 Paket	Rp. 120.000.000,-	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (3.25.03)/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.03.2.01)/ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.2.01.02)	Wilayah TPI Tanjungsari	Pembangunan Kolam Labuh	1 Paket	Rp. 20.000.000.000,-	
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (3.25.03)/ Pengelolaan	TPI Tanjungsari, TPI Nyamplungsari, TPI	Basket Ikan	1 Paket	Rp. 1.500.000.000,-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
	Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.03.2.01)/ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.2.01.02)	Asemdoyong, TPI Mojo, TPI Ketapang				
4.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (3.25.03)/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.03.2.01)/ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.2.01.02)	TPI Tanjungsari, TPI Nyamplungsari, TPI Asemdoyong, TPI Mojo, TPI Ketapang	Timbangan	1 Paket	Rp. 3.000.000,-	
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (3.25.03)/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.03.2.01)/ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.2.01.02)	TPI Ketapang	Mesin Docking Kapal Kayu Nelayan Kecil	1 Paket	Rp. 130.000.000,-	
6.	Program Pengelolaan Budfidaya Perikanan (3.25.04)/ Pengelolaan	Area Tambak Terdampak Rob Sepanjang	Jalan Produksi	8 Paket	Rp. 1.600.000.000,-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
	Pembudidayaan Ikan (3.25.04.2.04)/ Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (3.25.04.2.04.02)	Kecamatan Ulujami				
7.	Program Pengelolaan Budfidaya Perikanan (3.25.04)/ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (3.25.04.2.04)/ Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (3.25.04.2.04.02)	Pesantren, Mojo, Tasikrejo	Rehab. TPHT	3 Paket	Rp. 600.000.000,-	
8.	Program Pengelolaan Budfidaya Perikanan (3.25.04)/ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (3.25.04.2.04)/ Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan (3.25.04.2.04.02)	Area Tambak Terdampak Rob Sepanjang Kecamatan Ulujami	Rehab Saluran Irigasi Tambak	7 Paket	Rp. 1.260.000.000,-	
NON FISIK						
9.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan (3.25.05)/ Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil/ Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang	Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan Untuk Meningkatkan Gizi pada Anak Usia Sekolah Dasar	30 Orang	Rp. 50.000.000,-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Output	Volume	Anggaran	Keterangan
HASIL MUSRENBANG TAHUN 2025						
NON FISIK						
1	-	-	-	-	-	-
POKIR TAHUN 2025						
NON FISIK						
1	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu.

Diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Keterkaitan dengan hal tersebut menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**",

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 untuk sektor perikanan diarahkan peningkatan produksi perikanan yang ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak menuju swasembada garam, serta penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan melalui fasilitasi sarana dan keterampilan.

Sedangkan, untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026 pada sektor perikanan, maka prioritas nasional mencakup penguatan ketahanan pangan akuatik, perbaikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta penguatan keberlanjutan ekosistem laut.

Program utamanya meliputi; pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, percepatan pembangunan pergaraman nasional (termasuk revitalisasi tambak), modernisasi kapal perikanan, dan peningkatan mutu benih ikan dan udang melalui hatchery swasta, serta Ratifikasi Konvensi ILO 188: Penguatan perlindungan dan tata kelola perikanan tangkap melalui ratifikasi Konvensi Perikanan ILO No. 188.

Untuk mendukung Indonesia Emas 2045, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 Kebijakan Ekonomi Biru, sebagai berikut:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Pembangunan budidaya laut pesisir dan darat berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2026 untuk sektor perikanan dan ekonomi biru. Hal ini dikarenakan sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dalam Renstra Tahun 2021-2026 yaitu : meningkatnya produksi sektor perikanan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari, dengan empat sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan,
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif,
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Sasaran tersebut diatas, dirumuskan lebih lanjut kedalam arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah pada sektor perikanan yakni meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan. Strategi yang ditetapkan, yaitu: memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
2. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan, dan perikanan berbasis kelembagaan korporasi;

Tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yaitu: "**Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan**", dan misi terkait pembangunan sektor perikanan yaitu: "**Transformasi Ekonomi**", dengan landasan tranformasi, sebagai berikut:

1. Riset, Inovasi, Produktivitas;
2. Ekonomi Hijau;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Transformasi Digital;
4. Integrasi Ekonomi;
5. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru.

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yaitu: "**Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan**", dengan arah kebijakan, yaitu:

1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
2. Penerapan Ekonomi Hijau;
3. Transformasi Digital;
4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, Sasaran strategis pembangunan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, yaitu;

1. Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan, indikator sasaran: Produksi Perikanan (ton/tahun), Tingkat Konsumsi Ikan, Produksi Garam, Nilai Tukar Nelayan;
2. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikananyang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%)

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa sasaran pembangunan perikanan pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu : meningkatnya produksi sektor perikanan, mendukung capaian sasaran pembangunan daerah dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

3.1.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi jangka menengah Kabupaten Pemalang yaitu "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni (AMAN)".

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut telah dirumuskan 6 misi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal, dengan penjelasan bahwa : misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. Dengan Program Unggulan yaitu DEWI = Desa Wisata. Indikator sasaran RPJMD dari misi kelima ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang terkait dengan Dinas Perikanan yakni **“pemantapan pembangunan ekonomi dengan fokus perwujudan pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kualitas SDM dengan infrastruktur yang mantap dengan infrastruktur yang kuat”**. Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang terkait dengan Dinas Perikanan yakni **“pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas”**.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Dinas Perikanan menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana sasaran daerah yaitu meningkatkan produksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal, dengan sasaran perangkat daerah yaitu :

1) Meningkatnya produksi perikanan tangkap;
2) Meningkatnya produksi perikanan budidaya;
3) Meningkatnya produksi hasil olahan perikanan.

Pada tahun 2026, ditetapkan target sasaran-sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, dengan indikator kinerja; jumlah produksi perikanan tangkap. Target produksi sebesar 19.980.419 kg;
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan indikator kinerja; jumlah produksi perikanan budidaya. Target produksi sebesar 21.060.694 kg;
3. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan, dengan indikator kinerja; jumlah produksi olahan hasil perikanan. Target produksi sebesar 12.793.750 kg.

3.2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, pada dasarnya kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang terpilih tahun 2021–2026, maka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2026 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Pemalang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan
Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						**9.675.915.150,00**							**11.332.435.614,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.675.915.150,00**							**11.332.435.614,00**	
	3,25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**9.675.915.150,00**							**11.332.435.614,00**	
1,	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP***	**-**			**65 Nilai**	**7.277.174.529,00**						**-**	**7.610.464.988,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evatuasi kinerja yang mendukung ketinca-ran tugas dan fungsi OPD*	-			100 %	35.093.200,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	62.270.960,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.654.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.279.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		2.963.740,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.060.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		1.378.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.891.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		2.458.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.243.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		2.916.940,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.964.600,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		2.553.980,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	24.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dukungan terhadap ke[ancaran administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	5.677.615.800,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	5.678.520.840,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	5.674.599.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		5.674.599.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.510.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		1.963.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.506.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		1.958.840,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersetenggaranya administrasi barang mitik daerah*	-			100 %	2.000.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	2.600.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		2.600.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tersetenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	101.399.200,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	162.218.960,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	1.399.200,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		12.218.960,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	517.174.825,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	672.327.273,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.090.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		7.917.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.658.610,00	Kab. Pemalang, Ampelgading, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		2.156.193,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	81.936.390,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		106.517.307,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	304.221.200,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		395.487.560,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.650.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		3.445.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	120.618.625,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		156.804.213,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	27.900.000,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	36.270.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0006															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	27.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		36.270.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpetiharanya barang mitik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	811.727.019,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	860.713.125,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.798.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		16.637.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	150.489.019,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		195.635.725,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	648.440.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		648.440.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpetiharanya barang mitik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	104.264.485,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	135.543.830,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0001															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				53 Unit	56.231.994,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		73.101.592,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	22.570.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		29.341.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	25.462.491,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		33.101.238,00	DINAS PERIKANAN
2,	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Persentase TPI yang memenuhi standar***	**-**			**79 %**	**896.208.841,00**						**-**	**1.466.975.392,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Pesentasi TPI yang tertangani*	-			100 %	455.853.536,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	870.609.597,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten /Kota yang Tersedia				2 Dokumen	16.550.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		21.515.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				10 Unit	289.303.536,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		649.094.597,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pembinaan Dan Pelatihan Kelompok Nelayan Yang Terlaksana*	-			2 kegiatan	330.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	378.260.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	250.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		13.260.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Prosedur Tetap Dan Pembinaan Masyarakat Dalam Pengelolaan TPI Yang Terselenggara*	-			2 kegiatan	96.657.004,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	200.298.004,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				5 Dokumen	85.298.004,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		85.298.004,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				8 Layanan	11.359.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		115.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1	*Jumlah Jenis Pelayanan Perijinan Dokumen Kapal*	-			2 dok	13.698.301,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	17.807.791,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				100 Rekomendasi	13.698.301,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		17.807.791,00	DINAS PERIKANAN
3,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase Sarpras Budidaya yang Tertangani***	**-**			**21 %**	**1.074.452.000,00**						**-**	**1.753.527.420,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembudidaya Ikan Melalui Peningkatan Kapasitas*	-			140 orang	474.351.100,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	623.396.250,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				1 Kelompok	600,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				3 Kelompok	10.200.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				4 Kelompok	132.090.732,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		171.717.952,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	332.059.768,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		431.677.698,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Aktivitas Pengelolaan Pembudidaya Ikan*	-			3 aktivitas	600.100.900,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	1.130.131.170,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				12 Dokumen	9.999.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		12.999.350,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				5 Unit	219.700.400,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		610.610.520,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	9.670.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		12.571.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				5 Unit	91.231.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		118.600.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				12 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		25.350.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4,	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase Pengawasan PUD***	**-**			**4 %**	**120.636.780,00**						**-**	**173.827.814,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	*Jumlah Peraturan Pengelolaan Perikanan Yang Terbentuk*	-			1 dokumen	120.636.780,00			-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-	-	173.827.814,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten /kota				5 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten /kota				2 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan produktivitas ekonomi	-		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten /kota				20 Pelaku Usaha	60.636.780,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		78.827.814,00	DINAS PERIKANAN
5,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Persentase Unit Pengolahan dan Pemasaran yang Aman Pangan***	**-**			**63,87 %**	**307.443.000,00**						**-**	**327.640.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Data dan Informasi Pengolah dan Pemasar yang Tersedia*	-			3 data	27.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				5 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Bimbingan dan Pelatihan bagi Poklahsar yang Terlaksana*	-			1 kegiatan	114.170.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				3 Unit Usaha	114.170.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS PERIKANAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Terlaksana*	-			3 kegiatan	166.273.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	177.640.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota				1548 Ton	133.473.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		135.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Terfasilitasi				50 Pelaku Usaha	32.800.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		42.640.000,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H							**9.675.915.150,00**							**11.332.435.614,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Pemalang, pada dasarnya kegiatan Dinas Perikanan adalah sebagai "pengarah" setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Dinas Perikanan menjalankan satu urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan bidang kelautan dan perikanan. Strategi arah kebijakan Dinas Perikanan adalah "Peningkatan Produksi Perikanan". Sejalan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang terpilih tahun 2021–2026, maka penyusunan kinerja Dinas Perikanan dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Pemalang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran sebagaimana Renstra 2021-2026 pada tahun 2026 adalah melalui program dan kegiatan, yakni 5 program, 18 kegiatan dan 52 sub kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya meliputi :
   1] Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
   2] Administrasi keuangan perangkat daerah.
   3] Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
   4] Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
   5] Administrasi umum perangkat daerah.
   6] Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   7] Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
   8] Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, kegiatannya meliputi :
   1] Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
   2] Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.
   3] Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
   4] Penerbitan Tanda Daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, kegiatannya meliputi :
   1] Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil.
   2] Pengelolaan Pembudidaya ikan.
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, kegiatannya meliputi :
   1] Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air.
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, kegiatannya meliputi :
   1] Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
   2] Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
   3] Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota.

Dinas Perikanan mendapatkan alokasi anggaran tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebesar Rp. 9.675.915.150,-. Adapun penggunaan anggaran, meliputi : ketahanan pangan, penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, pasar murah, gemarikan, dan jaminan perlindungan usaha nelayan dan pembudidaya skala kecil. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan sebagaimana tercantum tabel dibawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Disperik	Nilai evaluasi SAKIP, indeks reformasi dan birokasi, indeks kepuasan masyarakat	Indeks SAKIP 65	7.277.174.529
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperik	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		35.093.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah musrenbang perikanan yang dilaksanakan	2 Dokumen	1.654.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.279.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.060.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.891.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperik	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	2.243.800

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperik	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	1.964.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		5.677.615.800
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	5.674.599.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.510.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperik	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	12 Laporan	1.506.800
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperik	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah		2.000.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperik	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperik	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-		101.399.200

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
			undangan		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	100 Orang	100.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disperik	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	1.399.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum perangkat daerah		517.174.825
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6.090.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperik	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1.658.610
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	81.936.390
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disperik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	304.221.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.650.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	120.618.625
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperik	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		27.900.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	27.900.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		811.727.019
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12.798.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	150.489.019
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	649.688.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperik	Terpeliharanya barang milik daerah		104.264.485
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Disperik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53 Unit	56.231.994
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	22.570.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 Unit	25.462.491
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Disperik	Persentase TPI yang memenuhi standar (%)	79%	896.208.841
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data sumber daya ikan yang tersedia, serta fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang tertangani		455.853.536
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Disperik	Jumlah data dan informasi SDI di Perairan Darat dalam 1 Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	16.550.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	10 Unit	289.303.536
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Disperik	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	150.000.000
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan dan hari nusantara yang terlaksana		330.000.000
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya	50 Orang	250.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Disperik	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	50.000.000
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit	30.000.000
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah prosedur tetap dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan TPI yang terselenggara		96.657.004
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	2 Dokumen	85.298.004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Disperik	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI	14 Layanan	11.359.000
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah jenis pelayanan perijinan dokumen kapal		13.698.301
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Disperik	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	100 Rekomendasi	13.698.301
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Disperik	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani (%)	21%	1.074.452.000
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi bantuan pendanaan dan pemberian kemudahan akses IPTEK serta pendidikan dan pelatihan		474.351.100
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	1 Kelompok	600
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	3 Kelompok	10.200.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Disperik	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi, bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	4 Kelompok	132.090.732
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknolohi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5 Kelompok	332.059.768
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Disperik	Jumlah aktivitas pengelolaan pembudidaya ikan		600.100.900
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota	12 Dokumen	9.999.500
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam1 (satu) daerah kabupaten atau kota	5 Unit	219.700.400
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten atau kota	5 Unit	91.231.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1(satu) daerah Kabupaten atau Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	4 Dokumen	9.670.000
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	2 Unit	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Disperik	Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidaya ikan	12 Dokumen	19.500.000
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Disperik	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	2 Unit	150.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disperik	Persentase peningkatan pengawasan Perikanan Umum Darat (PUD) (%)	4%	120.636.780
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Disperik	Terbentuknya peraturan pengelolaan perikanan		120.636.780
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	30.000.000
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha	30.000.000
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan	Disperik	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai	20 Pelaku Usaha	60.636.780

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	sesuai kewenangan kab/kota		kewenangan kab/kota		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Disperik	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan (%)	63,87%	307.443.000
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah data dan informasi pengolah dan pemasar yang tersedia		27.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	5 dokumen	27.000.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik	Jumlah bimbingan dan pelatihan bagi Poklahsar yang terlaksana		114.170.000
	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Disperik	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	3 unit usaha	114.170.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang terlaksana		166.273.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten atau Kota	1548 Ton	133.473.000
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Disperik	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan) yang terfasilitasi	50 pelaku usaha	32.800.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya manakala dapat menjabarkan berbagai persoalan kinerja daerah sehubungan dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai ke bawah (*trickle down effect*) (masyarakat).

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2026 didasarkan pada kondisi dan potensi sumberdaya perikanan serta tingkat perkembangan yang ingin dicapai pada tahun 2026. Rencana Kerja ini merupakan bahan (modal) pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2026. Rencana Kerja ini memberikan bahan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 ini dijadikan sebagai arah, pedoman dan landasan Dinas Perikanan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan. Selain daripada itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara optimal berkelanjutan, dalam rangka terwujudnya masyarakat perikanan Kabupaten Pemalang yang sejahtera dan berdaya saing.

Pemalang, 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pemalang

ERA SRINAENI, S.Pi., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730502 199903 2 006

https://jdih.pemalangkab.go.id/

T. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RKPD. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan; meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, orientasi mengenai Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal; meliputi tahap perumusan rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tahap penyajian rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Penyusunan rancangan; meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, verifikasi dan penyelarasan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Perumusan rancangan akhir; merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi rancangan akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
6. Penetapan; meliputi kegiatan verifikasi rancangan akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renja Dinpusarda Tahun 2026

Renja Dinpusarda Tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Dinpusarda tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang 2025-2045.

Gambar 1.2

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 7);
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026.
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A.	Lembar Pernyataan Kepala PD	:	Lembar Pernyataan Kepala PD berisi pernyataan bahwa Renja PD yang disusun menjadi tanggung jawab Kepala PD untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, guna pencapaian target kinerja baik PD maupun kinerja daerah.
B.	BAB I Pendahuluan	:	Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
C.	BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	:	Pada bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
D	BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	:	Bab ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
E	BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	:	Bab ini menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator. Target dan pagu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD
F	BAB V Penutup	:	Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Renstra Perangkat Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran penetapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 8.502.657.000 yang terbagi dalam 6 program, 16 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.900.666.007 (92,92%)

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang realisasi capaiannya memenuhi target yang ditetapkan dan melebihi target yang ditetapkan yaitu:

a. Terdapat beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan, diantaranya yaitu:
   1) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dengan target kinerja sebesar 55,45 dan realisasinya sebesar 65,25;
   2) Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan dengan target kinerja sebesar 55,5 dan realisasinya sebesar 55,5;
   3) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dengan target kinerja sebesar 17,70 dan realisasinya sebesar 88,85;
   4) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dengan target kinerja sebesar 7,48 dan realisasinya sebesar 33,34.
b. Terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :
   1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target 53 indeks dan realisasinya 45,12 indeks;
   2) Indeks Kearsipan dengan target 57,92% dan realisasinya 50,94%.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Dari 16 (Enam belas) kegiatan yang ada semua kegiatan telah mencapai atau memenuhi dari target yang ditetapkan sehingga mendapat status capaian sangat tinggi.
d. Dari 45 (Empat puluh lima) sub kegiatan yang ada telah mencapai target baik fisik maupun keuangannya

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
   a. Pengelolaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
      2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Darah Kabupaten/Kota
      3) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
      4) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
      5) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      6) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
      7) Pengembangan Bahan Pustaka
      8) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaa, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
      2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
      4) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
   a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Pengelolaan Arsip
a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
3) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

c. Pengelolaan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
a. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
1) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Perizinan dan Penggunaan Arsip
a. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
1) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui faktor – faktor penyebab realisasi baik belum sesuai, sesuai maupun melebihi target. Hal ini dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. SDM dan sarana prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen;
4. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait, kecamatan, pemerintahan desa dan masyarakat.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinpusarda Kabupaten Pemalang adalah Program dan Kegiatan dalam Renja Dinpusarda Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpusarda Kabupaten Pemalang.

Masih terdapat capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga ke depan pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu ditingkatkan.

Adapun Langkah – Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan layanan perpustakaan elektronik/digital melalui aplikasi iPemalang dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling ke sekolah dan masyarakat desa
3. Menambah khasanah koleksi bahan perpustakaan baik cetak maupun digital.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11) = (10/5)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	Skor	48,68	63,6	63,89	100,46	64	48,66	99,95	
2	23	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	15	10	10	100	11	9	60	
					Hasil Kegiatan	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	82	82	
2	23	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	2	2	100	3	3	150	
2	23	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	100	1	1	100	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	23	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	100	1	1	100	
2	23	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	100	1	1	100	
2	23	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	100	1	1	100	
2	23	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	3	3	3	100	3	3	100	
2	23	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	1	1	100	4	4	100	
2	23	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	6	2	2	100	6	5	83,33	
					Hasil Kegiatan	Presentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100	100	100	100	83	83,33	
2	23	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	21	20	18	90	19	24	114	
2	23	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	1	1	100	1	1	100	
2	23	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	-	-	-	4	3	75	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	23	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	dokumen	1	1	1	100	1	1	100	
2	23	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	50	41	44	107,32	1	0	0	
					Hasil Kegiatan	persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	107,32	107,32	100	0	0	
2	23	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	orang	50	41	44	44	1	0	0	
2	23	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	8	6	6	100	8	8	100	
					Hasil Kegiatan	Presentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	23	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	8	12	12	100	12	9	113	
2	23	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	12	12	100	12	9	180	
2	23	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	5	12	12	100	12	9	180	
2	23	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	paket	7	12	12	100	12	9	129	
2	23	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen		12	12	100	12	9		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	orang	10	0	0	0	12	9	90	
2	23	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	laporan	50	12	12	100	12	9	18	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	23	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah	unit	21	2	2	100	0	0	0	
					Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	0	0	0	
2	23	1	02.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	6	2	2	100	0	0	0	
2	23	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	jasa	4	3	3	100	3	3	75	
					Hasil Kegiatan	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	23	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	12	12	100	12	9	75	
2	23	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	12	100	12	9	75	
2	23	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	12	100	12	9	75	
2	23	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	71	34	34	100	3	26	37	
					Hasil Kegiatan	Presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	39	39	
2	23	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	26	26	26	100	1	20	77	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	23	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dipelihara	unit	23	6	6	100	1	5	22	
2	23	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	unit	2	2	2	100	1	1	50	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor	55,55	55,5	65,25	117,57	65,40	0	0	
						Persentase Perpustakaan Terstandarisasi	%	5,66	3,97	5,96	150,13	100	0	0	
2	23	2	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah perpustakaan tingkat daerah yang tersedia	unit	1	1	1	100	1	2	200	
					Hasil Kegiatan	Presentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	%	100	100	100	100	100	187	187	
2	23	2	02.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	1	1	1	100	2	1	100	
2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan	20	15	15	100	15	5	25	
2	23	2	02.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	15	15	15	100	15	24	160	
2	23	2	02.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	15	10	10	100	10	5	33	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	23	2	02.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	40	120	120	100	40	40	100	
2	23	2	02.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	layanan	9	4	4	100	5	3	33	
2	23	2	02.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	eksemplar	1900	2.800	2.800	100	1.500	1.848	97	
2	23	2	02.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5	5	5	100	5	3	60	
2	23	2	02.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah aktivitas pembudayaan gemar membaca	kegiatan	5	4	4	100	5	5	100	
					Hasil Kegiatan	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	23	2	02.02	6	Pemilihan Duta Baca tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	orang	2	0	0	0	1	1	50	
2	23	2	02.02	7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan	2	2	2	100	4	4	200	
2	23	2	02.02	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	1	1	1	100	2	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	23	2	02.02	9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	orang	18	18	18	100	170	145	806	
2	23	2	02.02	10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	2	1	1	100	1	1	50	
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	%		55,5	55,5	100	2	0	0	
2	23	3	02.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	eksemplar	9	4	4	100	1	1	11	
					Hasil Kegiatan	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	23	3	02.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	orang	50	0	0	0	2	10	20	
2	23	3	02.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	eksemplar	4	4	4	100	0	0	0	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				14.245	14.691	103,13	11.503	0	0	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	17,7	64,5	67,82	105,15	70,44	0	0	
2	24	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip dinamis yang terkelola	berkas	10.000	9.241	9791	105,95	7.501	5.501	55	
					Hasil Kegiatan	Presentase arsip dinamis yang terkelola	%	100	100	105,95	105,95	100	73	73	
2	24	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	2.000	1.200	1.750	145,83	1	1	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	8.000	8.000	8000	100	7.500	5.500	69	
2	24	2	02.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Laporan	10	41	41	100	41	41	410	
2	24	2	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip statis yang terkelola	Berkas	3.000	3.000	3.372	112,4	3.000	2.100	70	
					Hasil Kegiatan	Presentase arsip statis yang terkelola	%	100	100	112,4	112,4	100	70	70	
2	24	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Arsip	3.000	3.000	3.327	112,4	3.000	2.100	70	
2	24	2	02.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										
					Keluaran Kegiatan	Jumlah aktivitas pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	kegiatan	2	2	2	2	2	2	100	
					Hasil Kegiatan	Presentase aktivitas pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	24	2	02.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Pengguna	10	5	5	100	10	5	50	
2	24	2	02.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Laporan	2	1	1	100	2	0	0	
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	7,74	33	33	100	16,67	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	24	3	02.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun									
					Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	Arsip	1.500	1.500	1.526	101,03	1.000	1.067	71
					Hasil Kegiatan	Presentase arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	%	100	100	101,73	101,73	100	107	107
2	24	3	02.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Arsip	1.500	1.500	1.526	101,73	1.000	1.000	67
2	24	3	02.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan									
					Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip yang terselamatkan	Arsip	600	500	611	122,2	0	0	0
					Hasil Kegiatan	Persentase arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran kecamatan/desa yang terselamatkan	%	100	100	122,2	122,2	0	0	0
2	24	3	02.03	4	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan	Arsip	500	500	611	122,2	0	0	0
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN DAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip	%	0	100	100	100	0	0	0
2	24	4	02.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								0	0
					Keluaran Kegiatan	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai SOP	berkas	0	2	2	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					Hasil Kegiatan	Persentase capaian penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup dibanding target yang ditentukan pada tahun berkenaan	%	0	100	100	100	0	0	0	
2	24	4	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	SOP	0	2	2	100	0	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pemalang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
			NSPK	IKK		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	6	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
	PERPUSTAKAAN																
1	Nilai budaya literasi	%			✔	23,46	24,5	30	35	22,38	28,98	35,05	35,86	95,40	118,29	116,83	102,46
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka		✔		8,5	15	52,05	53	9,96	15,47	14,7	45,12	117,18	103,13	28,24	85,13
3	Persentase perpustakaan terstandarisasi	%				1,43	2,28	3,13	5	1,69	2,03	0,76	5,96	118,18	89,04	24,28	119,20
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%		✔		55,33	55,35	55,45	55,5	54,32	49,68	55,55	65,25	98,17	89,76	100,18	117,57
5	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan	%				2	4	4	10	2,24	4,85	2,4	10,2	112,00	121,25	60,00	102,00
6	Persentase koleksi perpustakaan yang tersedia	%				68	70	70	70	69,11	71,21	17,32	18,4	101,63	101,73	24,74	26,29
7	Peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital iPemalang	%				1,5	3	1	1	1,7	3,5	1,076	1,043	113,33	116,67	107,60	104,30
8	Persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan	%				NA	55,5	55,5	55,5	0	61,11	61,11	0	0,00	110,11	110,11	0,00
	KEARSIPAN																
9	Indeks kearsipan	Nilai				55,12	56,32	57,12	57,92	38,88	19,31	53,42	50,94	70,54	34,29	93,52	87,95
10	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%		✔		64,5	75	75,5	76	74	70,44	88,85	67,82	114,73	93,92	117,68	89,24
11	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%		✔		4	33	33,33	33,33	4,16	33,33	33,33	33,34	104,00	101,00	100,00	100,03
12	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%				60	70	74	100	60,98	77,08	74,07	100	101,63	110,11	100,09	100,00
13	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup	%				NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2 memuat informasi mengenai capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021–2024. Indikator-indikator tersebut merupakan representasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam dua urusan pemerintahan, yakni urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan yang positif dan mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. Meskipun demikian, diperlukan upaya perbaikan pada aspek-aspek tertentu, khususnya dalam hal penguatan sarana prasarana, peningkatan literasi digital, pelestarian budaya lokal, serta optimalisasi pengelolaan arsip secara berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya (teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya (pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya (penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya (koordinasi dan fasilitasi di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pemalang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan evaluasi penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Nilai budaya literasi
b. IKM kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
c. Indeks pembangunan literasi masyarakat
d. Nilai SAKIP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Persentase perpustakaan terstandarisasi
f. Nilai tingkat kegemaran membaca mayarakat
g. Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan
h. Indeks kearsipan
i. Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik
j. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja
k. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
l. Persentase penerbitan izin penggunaan arsip tertutup

Isu – isu strategis yang terdapat pada penyelenggaraan tugas dan fungsi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Pemalang antara lain:

1. Masih kurangnya minat kegemaran dan budaya baca serta literasi masyarakat;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bersifat edukatif dan pelibatan masyarakat;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan arsiparis;
4. Kurangnya kesadaran tertib arsip bagi OPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Dinpusarda Kabupaten Pemalang. Renja Dinpusarda Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Dinpusarda Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Dinpusarda Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			8.146.164.700	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			5.936.129.700	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			7.872.724.700	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			5.762.429.700	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			4.532.772.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			4.448.729.700	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**31.594.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**22.219.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**6.563.000**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	3.709.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**1 Dokumen**	**2.758.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**1 Dokumen**	2.058.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**1 Dokumen**	**2.818.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**1 Dokumen**	2.518.750	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**1 Dokumen**	**2.880.000**	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**	**1 Dokumen**	**2.080.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	**1 Dokumen**	**3.190.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD**	**1 Dokumen**	**2.950.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5 Laporan**	**4.215.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5 Laporan**	**3.403.000**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**4.870.000**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**3.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**1 Berita Acara**	**4.300.000**	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**1 Berita Acara**	**2.500.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**3.698.814.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**3.593.779.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**24/14 orang/bulan**	**3.692.033.000**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**24/14 orang/bulan**	**3.588.998.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1 Laporan**	**2.280.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**1 Laporan**	**2.280.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**3 Laporan**	**4.501.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**3 Laporan**	**2.501.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**500.000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan**	**40 Orang**	**500.000**	**Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan**	**40 Orang**	**500.000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**136.747.566**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**151.184.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**8.000.000**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**5.000.000**	
	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**13.185.066**	**Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**14.202.866**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**12 Laporan**	**10.500.000**	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**12 Laporan**	**11.500.000**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**9.000.000**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**7.500.000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**12 Laporan**	**10.062.500**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**12 Laporan**	**15.981.134**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**12 Laporan**	**5.000.000**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**12 Laporan**	**3.500.000**	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**12 Laporan**	**1.000.000**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**12 Laporan**	**500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD**	**12 Laporan**	**80.000.000**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD**	**12 Laporan**	**93.000.000**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**14.889.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**0**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**1 Unit**	**14.889.800**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**0 Unit**	**0**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**524.225.700**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**562.547.700**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12 Laporan**	**2.000.000**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**12 Laporan**	**2.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12 Laporan**	**220.047.700**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12 Laporan**	**220.047.700**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**302.178.000**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**12 Laporan**	**340.500.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**126.001.334**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**118.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya**	**25 Unit**	**60.000.000**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya**	**25 Unit**	**50.000.000**	
	Pemeliharaan Mebel	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Mebel yang dipelihara**	**20 unit**	**3.580.000**	**Pemeliharaan Mebel**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Mebel yang dipelihara**	**20 unit**	**3.500.000**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara**	**50 Unit**	**12.421.334**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara**	**50 Unit**	**15.000.000**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainya yang Dipelihara**	**2 Unit**	**50.000.000**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainya yang Dipelihara**	**2 Unit**	**50.000.000**	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**3.279.952.300**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**1.260.780.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**1.762.990.870**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**545.134.120**	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	**Perpustakaan Sekolah Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan**	**15 Perpustakaan**	**19.000.000**	**Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan**	**Perpustakaan Sekolah Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan**	**0 Perpustakaan**	**0**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Perpustakaan di wilayah Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanganny a**	**15 Perpustak aan**	**89.201.000**	**Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Perpustaka an di wilayah Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kot a Sesuai Kewenanganny a**	**15 Perpustak aan**	**58.076.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	**Desa dan Sekolah yang ada di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Warungpring, Watukumpul, Randudongkal, Pulosari, Moga, Belik dan Bantar Bolang**	**Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi**	**5 Layanan**	**880.090.900**	**Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Desa dan Sekolah yang ada di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Warungpring, Watukumpul, Randudongkal, Pulosari, Moga, Belik dan Bantar Bolang**	**Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi**	**5 Layanan**	**105.842.120**	
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	**Pepustakaan Umum dan Khusus di Kabupaten Pemalang**	**Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan**	**15 Perpustakaan**	**72.333.000**	**Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pepustakaan Umum dan Khusus di Kabupaten Pemalang**	**Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan**	**15 Perpustakaan**	**8.650.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan**	**200 Orang**	**347.570.970**	**Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan**	**200 Orang**	**233.756.000**	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Data dan informasi Perpustakaan**	**5 Dokumen**	**35.000.000**	**Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Data dan informasi Perpustakaan**	**5 Dokumen**	**35.250.000**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	**Perpustakaan Umum Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan**	**2000 eksemplar**	**252.495.000**	**Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan**	**Perpustakaan Umum Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan**	**2000 eksemplar**	**102.100.000**	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK**	**1 Perpustakaan**	**67.300.000**	**Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK**	**1 Perpustakaan**	**1.460.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pemberdayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**1.516.961.430**	**Pemberdayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**715.645.880**	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya**	**15 Orang**	**51.490.000**	**Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya**	**0 Orang**	**0**	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan**	**5 Perpustakaan**	**130.050.000**	**Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan**	**5 Perpustakaan**	**67.615.880**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Perpustakaan**	**907.637.000**	**Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Perpustakaan**	**300.000.000**	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota**	**50 Orang**	**263.475.650**	**Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota**	**50 Orang**	**188.000.000**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat**	**1 Lokus**	**164.308.780**	**Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat**	**1 Lokus**	**160.030.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**60.000.000**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**52.920.000**	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**60.000.000**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**52.920.000**	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno**	**25 orang**	**40.000.000**	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno**	**0 orang**	**0**	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan**	**25 Eksemplar**	**20.000.000**	**Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan**	**25 Eksemplar**	**52.920.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**273.440.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**173.700.000**	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**249.935.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**155.993.595**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**157.334.500**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**100.762.595**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan**	**1 Berkas**	**17.111.600**	**Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan**	**0 Berkas**	**0**	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan**	**7500 Berkas**	**59.614.000**	**Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan**	**7500 Berkas**	**34.439.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Hasil Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan**	**42 Laporan**	0	**Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Hasil Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan**	**42 Laporan**	**0**	
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan**	**40 Lembaga**	**39.805.400**	**Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan**	**40 Lembaga**	**37.526.750**	
	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis**	**41 Instansi**	**40.803.500**	**Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis**	**41 Instansi**	**28.796.845**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**92.601.000**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**55.231.000**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten/Kota Melalui JIKN**	**10 Pengguna**	**27.906.000**	**Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten/Kota Melalui JIKN**	**10 Pengguna**	**33.856.000**	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Laporan**	**64.695.000**	**Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 Laporan**	**21.375.000**	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**23.504.500**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**17.706.405**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**5.738.000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**5.736.405**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**1000 Arsip**	**5.738.000**	**Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**1000 Arsip**	**5.736.405**	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**13.091.500**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**6.990.000**	
	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana**	**500 arsip**	**13.091.500**	**Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana**	**500 arsip**	**6.990.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**4.675.000**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**			**4.980.000**	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan**	**1 Daftar**	**4.675.000**	**Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang**	**Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan**	**1 Daftar**	**4.980.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Usulan	Keterangan
1	**Pembinaan Perpustakaan**			
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah			
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinpusarda	mengadakan pelatihan untuk pendidik terkait kegiatan perpustakaan seperti mendongeng agar dapat meningkatkan kompetensi guru TK dan PAUD dan beberapa lomba dengan atau tanpa alat peraga mendongeng agar dapat meningkatkan literasi anak di TK dan PAUD	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Perpustakaan Umum Kab. Pemalang	mengundang siswa agar dapat memperkenalkan dan menumbuhkan minat ke perpustakaan, serta menambahkan beberapa kegiatan yang dapat membuat perpustakaan sekolah terus berkembang.	
		Dinpusarda	kunjungan ke layanan perpustakaan dapat menambahkan beberapa kegiatan yang menyenangkan seperti fun game atau game literasi untuk mengenalkan anak tentang huruf atau	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			kata ataupun dengan menggunakan pesan berantai	
		Dinsos	difasilitasi ruang pelayanan pojok baca buku sembari menunggu antrian di Pelayanan Dinas Sosial	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Sekolah	memfasilitasi pelatihan khusus untuk Kepala Perpustakaan dan Teknisnya.	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Sekolah	meningkatkan marketing untuk perpustakaan online. – pengembangan layanan elektronik	
		Sekolah	meningkatkan sosialisasi mengenai Perpustakaan Digital	
2	**Pengelolaan Arsip**			
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dinpusarda	Aplikasi Srikandi belum update dan maksimal dalam penggunaaan.	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema Kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif serta inklusif. Terdapat 5 (lima) arah kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2026 :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing Daerah
   Pemerintah menekankan penguatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Daerah didorong meningkatkan daya saingnya melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi;
2. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
   Reformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital pelayanan publik menjadi arah penting agar pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif.;
3. Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan
   Salah satu fokus utama: memperkuat ketahanan nasional lewat pangan, energi, air, pengelolaan sampah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif
   Pembangunan tidak hanya bertumbuh tinggi, tapi juga inklusif (masuk ke semua lapisan masyarakat) dan berkelanjutan/ramah lingkungan. Ini meliputi ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya, pengembangan inovasi dan teknologi.
5. Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan
   Mendorong pembangunan di semua wilayah, termasuk kawasan tertinggal atau wilayah timur Indonesia. Kesenjangan antar-wilayah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

harus diperkecil melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan sinergi pusat-daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis. Terdapat 4 (Empat) arah kebijakan prioritas RKP Provinsi Tahun 2026 :

1. Peningkatan Kapasitas Perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu **"Penguatan ekonomi yang berdaya saing, infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan pariwisata yang mampu mendukung perekonomian daerah
2. Meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa
3. Perwujudan masyarakat yang kondusif, harmoni dan kohesif melalui peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berakhlak
4. Pengembangan kebijakan daerah yang berperspektif gender dan ramah anak
5. Perlindungan, pelestarian, upaya pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah
6. Pengembangan SDM berkualitas dan berkarakter
7. Pengembangan riset dan inovasi daerah
8. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berbasis potensi lokal
9. Pemantapan infrastruktur daerah yang mantap dan berkelanjutan
10. Penanganan kemiskinan terintegrasi
11. Peningkatan pembangunan daerah yang tahan terhadap bencana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

12. Peningkatan pengelolaan persampahan

13. Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2026 Kabupaten Pemalang tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mendukung prioritas ke-3 dan ke-6 yaitu Perwujudan masyarakat yang kondusif, harmoni dan kohesif melalui peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berakhlak dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang perpustakaan dan kearsipan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang berakhlak dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

A. Tujuan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mempunyai 1 (satu) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu **“Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan”** yang diukur dengan indikator **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** dan **Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah** Rumus perhitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembaginya yaitu komponen Aspek Masyarakat. Hasil

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah yang merupakan penilaian dari ANRI meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal.

B. Sasaran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **"Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan"** yang diukur dengan indikator **Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan** dengan rumusan Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan perhari dalam setahun baik on site maupun online dibagi jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun tahun yang sama x 100%. Serta **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat** yang diukur menggunakan survey/kajian kegemaran membaca masyarakat.
2. **"Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah"** yang diukur dengan indicator **IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)** dan **Nilai SAKIP** yang diperoleh berdasarkan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat.
3. **"Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah"** yang diukur dengan indikator **Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B** dengan rumus Jumlah OPD yang memiliki predikat pengelolaan minimal B dibagi total OPD dikali 100%.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan		Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	60,7

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	pengelolaan kearsipan				
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	%	34,14
2	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	54,4
		Meningkatnya kualitas perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	2,88
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	IKM	%	85,3

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan faktor – faktor perumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan diantaranya adalah :

1. Menjabarkan/melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara sinergis dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang tertuang dalam program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Digital (Dedi), Desa Sinergi (Desi) dan Kota Industri (Koin).
3. Melaksanakan inovasi pelayanan publik di bidang Perpustakaan dalam rangka mendukung peningkatan SDM pada umumnya, serta mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengentasan kemiskinan melalui Fasilitasi Pasca Baca yang terdapat pada sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
4. Pembangunan SDM yang berkarakter budaya unggul.
5. Peningkatan pengelolaan arsip untuk menuju penataan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governence).*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pada tahun 2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 5 program, 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp 8.146.164.700 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Program yang akan dilaksanakan Dinpusarda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

f) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pembinaan Perpustakaan

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
b) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
d) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
e) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
f) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
g) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
h) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
c) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
d) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
e) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

C. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
b) Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan

D. Program Pengelolaan Arsip

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
c) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
e) Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. **Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**
   a) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2. **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**
   a) Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
3. **Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**
   a) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Dinpusarda telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPUSARDA KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpusarda Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pembinaan Perpustakaan

1. **Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
   a) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
   b) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   d) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   e) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   f) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   g) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
   h) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. **Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
   a) Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
   c) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   d) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

C. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

b) Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan

D. Program Pengelolaan Arsip

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

c) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

e) Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

a) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

a) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Prrogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinpusarda Kabupaten Pemalang dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINPUSARDA						8.146.164.700,00							12.886.883.000,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						8.146.164.700,00							12.886.883.000,00	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						7.872.724.700,00							12.454.458.000,00	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	-	-			-	4.532.772.400,00						-	9.253.458.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		DAERAH KABUPATEN /KOTA														
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	-			100 %	31.594.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda	-	50.670.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pe rangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.563.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.758.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.818.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3.190.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	4.215.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											dan penyandang disabilitas.					
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.870.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.23.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	4.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		5.670.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.698.814.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan	-	-	8.002.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/14 Orang/bulan	3.692.033.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		4.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.280.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		4.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.501.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											budidaya modern				
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	500.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	20.000.000,00	
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	136.747.566,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	225.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	13.185.066,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							12 Paket	9.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.062.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												budidaya modern				
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												budidaya modern				
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.889.800,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	25.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	14.889.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	524.225.700,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	605.788.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	220.047.700,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	302.178.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya	-		300.788.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			yang Disediakan									Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	126.001.334,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	325.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				25 Unit	60.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya	-		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					n, Semua Kel/Desa			Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			20 Unit	3.580.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	12.421.334,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												budidaya modern				
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	-	-			-	3.279.952.300,00						-	3.111.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.762.990.870,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	1.286.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	19.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				15 Perpustakaan	89.201.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												budidaya modern				
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				5 Layanan	880.090.900,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		396.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam				15 Perpustakaan	72.333.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan								Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200 Orang	347.570.970,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				5 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	252.495.000,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												budidaya modern				
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	67.300.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.516.961.430,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian	-	-	1.825.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												dan perikanan budidaya modern				
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				15 Orang	51.490.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah				5 Perpustakaan	130.050.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia	-		105.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Kabupaten/Kota yang dikembangkan									Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern				
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	907.637.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		1.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				50 Orang	263.475.650,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		430.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat													
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	164.308.780,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												budidaya modern				
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	-	-			-	60.000.000,00						-	90.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	90.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				25 Orang	40.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan													
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				25 Eksemplar	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												budidaya modern				
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						273.440.000,00							432.425.000,00	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	-	-			-	249.935.500,00						-	410.425.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	157.334.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka	-	-	245.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	17.111.600,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				7500 Berkas	59.614.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipa n yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				40 Lembaga	39.805.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kab upaten/Kota														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				41 Instansi	40.803.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan	-	-	50.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3000 Arsip	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	92.601.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi	-	-	115.425.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	27.906.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	64.695.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap	-		85.425.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	-	-			-	23.504.500,00						-	22.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	5.738.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap	-	-	10.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	5.738.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-			-	13.091.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka	-	-	7.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												mempercepat distribusi barang dan jasa				
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				500 Arsip	13.091.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi	-		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												barang dan jasa				
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-			-	4.675.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi	-	-	5.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												barang dan jasa				
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	4.675.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												rangka mempercepat distribusi barang dan jasa				
	J U M L A H							**8.146.164.700,00**							**12.886.883.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra OPD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini merupakan acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan forum perangkat daerah yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi tentang perencanaan

   Prioritas pembangunan ke-3 dan ke-6, prioritas pembangunan ke-3 yaitu perwujudan masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif melalui peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berakhlak dan prioritas pembangunan ke-6 yaitu tentang pembangunan SDM berkualitas dan berkarakter. Berdasarkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut, maka tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang adalah “Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah”.

   Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan. Pengawasan Kearsipan di lingkup pemerintah daerah juga merupakan bagian penting dalam menjamin terciptanya tata kelola kearsipan yang tertib, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Tanggapan dan saran dari peserta forum perangkat daerah terhadap materi yang di paparkan,

   - Saran dari perwakilan SMP Islam Terpadu Samrotul Fuad diharapkan mengundang siswa agar dapat memperkenalkan dan menumbuhkan minat ke perpustakaan, serta menambahkan beberapa kegiatan yang dapat membuat perpustakaan sekolah terus berkembang.
   - Perwakilan dari IGTKI Kabupaten Pemalang dan HIMPAUDI Kabupaten Pemalang memberikan saran agar mengadakan pelatihan untuk pendidik terkait kegiatan perpustakaan seperti mendongeng agar dapat meningkatkan kompetensi guru TK dan PAUD dan beberapa lomba dengan atau tanpa alat peraga mendongeng agar dapat meningkatkan literasi anak di TK dan PAUD. Serta diharapkan ketika kunjungan ke layanan perpustakaan dapat menambahkan beberapa kegiatan yang menyenangkan seperti fun game atau

https://jdih.pemalangkab.go.id/

game literasi untuk mengenalkan anak tentang huruf atau kata ataupun dengan menggunakan pesan berantai.

- Saran dari perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang supaya difasilitasi ruang pelayanan pojok baca buku sembari menunggu antrian di Pelayanan Dinas Sosial serta diharapkan kedepannya untuk lomba literasi agar lebih mengkategorikan sendiri-sendiri dan marketing agar ditingkatkan lagi dan merata.
- Saran dari perwakilan SD Pius agar menghadirkan pendongeng ketika layanan kunjungan perpustakaan keliling ke sekolah dan lebih meningkatkan marketing untuk perpustakaan online.
- Saran dari Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia (FPSMI) untuk mengadakan ajang untuk menghasilkan Duta Literasi.
- Saran dari perwakilan SDN 02 Kebondalem agar memfasilitasi pelatihan khusus untuk Kepala Perpustakaan dan Teknisnya.
- Saran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan sosialisasi mengenai Perpustakaan Digital.
- Saran dari Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, terkait Aplikasi Srikandi yaitu belum update dan maksimal dalam penggunaaan.
- Apresiasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Forum Konsultasi Publik (FKP). Bappeda juga menyarankan agar kegiatan literasi ke masyarakat harus di support dan berapapun anggarannya semua tergantung TAPD.
- Tanggapan dari Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang untuk beberapa saran dan masukkan, untuk pelatihan mendongeng akan diupayakan karena bergantung pada anggaran dan sarana prasarana. Mengenai permintaan pojok baca, OPD/Kecamatan harus memiliki tempat sarana dan prasarana serta koleksi buku untuk pojok baca, karena sampai sekarang buku belum dapat di hibahkan, namun Dinpusarda memiliki silang layan yang bisa meminjamkan buku sampai 300 buku serta melihat kemampuan buku di perpustakaan, karena yang terpenting buku dikelola dengan baik. Untuk tahun depan akan dicari banyak volounter dan pegiat literasi untuk ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan perpustakaan.

  Perpustakaan online sudah ada sejak tahun 2018 namun memang kurangnya sosialisasi karena keterbatasan anggaran, namun di dalam perpustakaan online atau i-Pemalang sudah memiliki 1500 judul, ditambah 600 judul lagi untuk tahun ini.

  Perihal Duta Literasi untuk saat ini memang belum ada karena kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada di Provinsi dan Kabupaten hanya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

memiliki tugas untuk pembinaan. Namun nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut dan bersama-sama perihal Duta Literasi tingkat Kabupaten.

sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 18 September 2025
Jam	:	Pukul 08.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Forum Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

MENYEPAKATI

KESATU	:	Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
KEDUA	:	Menyepakati rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
KETIGA	:	Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan forum perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
KEEMPAT	:	Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang; dan
KELIMA	:	Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Pemalang, 18 September 2025

Pimpinan Rapat
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pemalang

TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700322 199403 2 003

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	[illegible]	Dinpusarda		1.
2.	[illegible]	Bappeda		2.
3.	[illegible]	Dindikbud	Pemalang	3.
4.		BPKAD		4.
5.	Nurul Hidayah	Dinpermasdes	Pemalang	5.
6.	Ida Susanti	DinsosKBPP	Pemalang	6.
7.	Castrena Ayu	Disparpora	Pelutan	7.
8.		Bagian Organisasi		8.
19.	Hor Budi Susilo	Kecamatan Randudongkal	Widuri	9.
10.		Kecamatan Pulosari		10.
11.	Upik susanto	Kelurahan Kebondalem		11.
12.		Desa Jatirejo		12.
13.		Desa Banjardawa		13.
14.		INSIP Pemalang		14.
15.		ITB Adias Pemalang		15.
16.	Dhesi A.	SD Pius Pemalang		16.
17.		SMPN 2 Pemalang		17.
18.	Surahman	SMP IT Samrotul Fuad	Saradan	18.
19.	Dika yanuar putra k.	SDN 2 Kebondalem	Pemalang	19.
20.	Dwi Ura Haryanti	IGTKI Pemalang	Pemalang	20.
21.	Tri Nur Hikmah	HIMPAUDI Pemalang	Pemalang	21.
22.	Nurjanah	FPSMI Pemalang	Pemalang	22.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR : B/000.6.5.1/220/Dinpusarda/2025
LAMPIRAN : 18 September 2025

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG

Kabupaten : Pemalang
Tanggal : 18 September 2024
Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & No Telp.	Tanda Tangan
1	Dwi Uni' H	IGTKI Kab. Pml	082327045005	1
2	Her Budi S	Kec. Randudongkal	082135283571	2
3	Suraemah	SMP IT Islam Tj	083894145425	3
4	Dhesi A.	SD PLUS	087885574070	4
5	Castrena Ayu	DISPARPORA	081234824910	5
6	Citra P. Utami	"	082250031011	6
7	Upih Suryanto	Kebondalem	082228210879	7
8	Nurul Hidayah	Dinpermasdes	085742443204	8
9	Nur Intan Permata Hati	"	089669311653	9
10	Sumarni	SMA N 1 Comal	0821 0000 [illegible]	10
11	Agarno	Dinkkbud	08595124 0361	11
12	Ida Susanti	Dinas Sosial	085726884884	12
13	Tri Nurhasanah	Humas Kab. Pml	085290677462	13
14	Nurjanah	FPSMI	0812.2556.2303	14
15	Retno Prihertini	Dinpusarda	085226731582	15

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id/

16	Kristina Mayasari	Dinpusarda	081901041974	16
17	Yuhdi Noor M	Dinpusarda	082322610529	17
18	Dika yanuar putra k	SDN 02 Kebondalem	0857-4117-9550	18
19	A. Prayugo	Dinpusarda		19
20	Nurhayu	Bpp	087830208047	20
21	Sakti Aji	Dinpusarda		21
22	Laili Khaimi	Dinpusarda		22
23	Endah Tri y.	"		23
24	Anik Eliyani H	Dinpusarda		24
25	Amanna Filzah Z	Dinpusarda	0812 2542 6090	25
26	Ima, Aprilia	— " —	0857 [illegible]	26
27	Mustika	Dinpusarda		27
28	[illegible] SOFYAN	DINPUSARDA		28
29	Endang Sujiati	"	085726218413	29
30	Fatma Esti R	Dinpusarda		30
31	Sbandiyah	Dinpusarda		31
32	Agus Sunarto	Dinpusarda		32
33	Dewi Sulistyoh	Dinpusarda		33
34	Novelis Oktafianti	"		34
35	Lakatur R	Dinpusarda		35
36	Linda Juliana.	Dinpusarda		36
37	Supriyono	Dinpusarda		37

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id/

38	Rostiana P	Dinpusarda		38
39	Utrwatun H	Dinpusarda		39
40	Rieni	Dinpusarda		40

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG

TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700322 199403 2 003

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
LAMPIRAN : 18 September 2025

DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur-naan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur-naan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Pemalang, September 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TATTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah;

e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;

f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Keschatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelernggaraan *E-Government*	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelernggaraan *E-Government*
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksan
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabaat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Satuan Polisi Pamong Praja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang disusun berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan RKPD. Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan; meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja, orientasi mengenai Renja Satuan Polisi Pamong Praja, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal; meliputi tahap perumusan rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan tahap penyajian rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyusunan rancangan; meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja, verifikasi dan penyelarasan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Perumusan rancangan akhir; merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi rancangan akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
6. Penetapan; meliputi kegiatan verifikasi rancangan akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Gambar 1.2

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

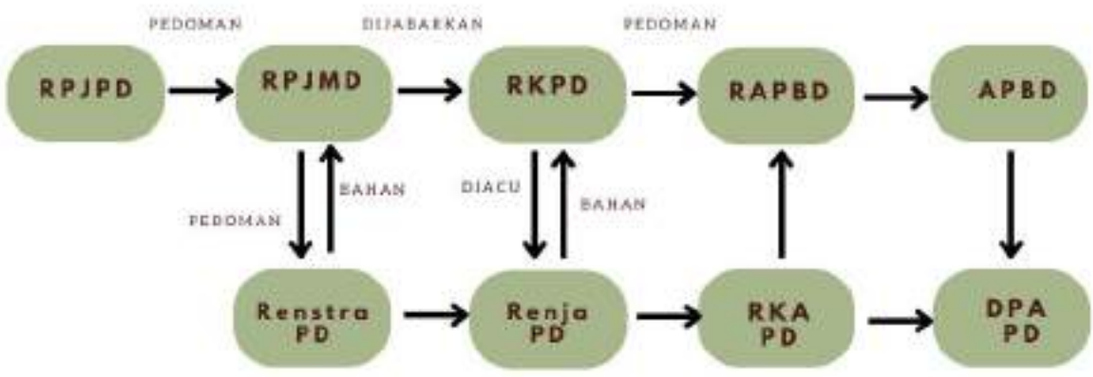

Renja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun RKA Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Adapun tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026.
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

B.	BAB I Pendahuluan	:	Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
C.	BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	:	Pada bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
D	BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	:	Bab ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
E	BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	:	Bab ini menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator. Target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD
F	BAB V Penutup	:	Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/ kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2025

Jumlah anggaran penetapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang sebesar Rp.16.635.252.000 yang terbagi dalam 3 program, 11 kegiatan dan 49 sub kegiatan, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran pada perubahan menjadi Rp.17.112.195.000 Dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 8.489.039.409 (49,88 %)

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang realisasi capaiannya memenuhi target yang ditetapkan dan melebihi target yang ditetapkan yaitu:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Terdapat beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan, diantaranya yaitu:
   1) Presentase adanya gangguan Ketentraman dan ketertiban umum dengan target kinerja sebesar 96 dan realisasinya sebesar 100;
   2) Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum dengan target kinerja sebesar 7,14 dan realisasinya sebesar 14,29;
   3) Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP dengan target kinerja sebesar 85,89 dan realisasinya sebesar 83;
   4) Rasio kejadian kebakaran dengan target sebesar 84 dengan realisasi sebesar 60
   5) Cakupan pelayanan kebakaran dengan target kinerja sebesar 35 dan realisasinya sebesar 19,62.
b. Terdapat indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu, persentase rasio kebakaran dengan target kinerja 84 dan realisasinya hanya 60, cakupan pelayanan kebakaran dengan target 35 dan dengan realisasi sebesar 19,62 serta indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap kinerja Satpol PP dengan target kinerja 85,89 realisasi sebesar 83.
c. Dari 11 (sepuluh) kegiatan yang ada semua kegiatan telah mencapai atau memenuhi dari target yang ditetapkan sehingga mendapat status capaian sangat tinggi.
d. Dari 49 (Empat puluh satu) sub kegiatan yang ada telah mencapai target baik fisik maupun keuangannya

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kaupaten/Kota
      1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota;
4) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

2. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
3) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
6) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2) Penyediaan peralatan rumah tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran
a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
4) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
5) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
3) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui faktor – faktor penyebab realisasi baik, belum sesuai, sesuai maupun melebihi target. Hal ini dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. Pengoptimalan SDM dan sarana prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait, kecamatan, pemerintahan desa dan masyarakat.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang adalah Program dan Kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

Masih terdapat capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga ke depan pelayanan Trantibumlinmas dan Pemadaman Kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan.

Adapun Langkah – Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peran dan Kerja Cepat dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Mengoptimalkan Media Sosial Instagram, Facebook, dan SMS Centre dalam Aduan Masyarakat terkait penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk pengaduan masyarakat adanya Whatsapp La – Lisa;
3. Menambah jangkauan pelaksanaan Patroli wilayah di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang untuk peningkatan ketentraman, ketertiban dan Keamanan wilayah;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Sosialisasi dan edukasi tentang Perda dan Perkada;
5. Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satlinmas dan Aparatur Pemadam Kebakaran;
6. Penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan membangun Pos Damkar di Wilayah Kecamatan sehingga tingkat waktu tanggap (respon time rate) pemadaman kebakaran lebih cepat;
7. Pembentukan Relawan Kebakaran di setiap Desa / Kelurahan atau Kecamatan dibawah binaan Pemadam Kebakaran;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Adanya Dukungan sarana prasarana kebakaran dengan penambahan armada yang volumenya kecil untuk bisa menjangkau wilayah yang susah dilalui kendaraan besar, sarana dan prasarana pendukung seperti baju tahan api, dll serta penambahan SDM untuk pemadam kebakaran.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Table 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasasi Capaian s/d TW II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Nilai IRB	51,23 61,80	61,90 -	48,23 58,05	61,9 -	128,34 -	49,23 59,21	61,90 -	51,23 61,80
1	05	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja peringkat daerah	130		11	11	100	9 Dok	5 Dok	55,55%
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	2	2	100	2 Dok	2 Dok	100%
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan lap hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1	1	1	1	100	1 Dok	1 Dok	100%
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1	1	1	1	100	1 Dok	1 Dok	100%
				04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	1	1	1	100	1 Dok	1 Dok	100%
				05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1	1	1	1	100	1 Dok	1 Dok	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						dokumen perubahan DPA SKPD								
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2	2	2	2	100	2 Laporan	2 Laporan	100%
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		84	84				68 lsporan	57 Laporan	83,82%
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	66	66	63/9	63/9	100	56	52	92,86%
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	6	1	1	1	1 Laporan	0	0%
				07	Koordinasii dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunanlaporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	72	72	11	11	100	10 Laporan	5 Laporan	50%
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100	1 Dok	0	0%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aktifitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1	1	100%
				02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian DInas beserta Atribut Kelengkapannya			1	1	100	1 Paket	1 Paket	100%
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10	10	100	4 orang	0	0%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang tersedia	10	10				96 laporan	52	54,17%
				01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	30		2	2	100	4 Paket	2 Paket	50%
				03	Penyediaan peralatan rumah	Jumlah paket peralatan rumah	108		3	3	100	2 Paket	2 Paket	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					tangga	tangga yang disediakan								
				04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	18		9	9	100	6 Paket	3 paket	50%
				05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48		2	2	100	2 Paket	1	50%
				06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12		12	9	75	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
				09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1.200		150	150	100	80 Laporan	43 Laporan	53,75%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aktifitas Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	1	100	1 unit	1 unit	100%
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kapangan yang disesuaikan			1	1	100	1 unit	1 unit	100%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29 Laporan	14	48,28%
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			8	8	100	2 Laporan	1 Laporan	50%
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			48	36	75	12 Laporan	6 Laporan	50%
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang disediakan						3 Laporan	1 Laporan	33,33%
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			145/12	145/9	75	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							46 Unit	30	65,22%
				02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya			31	28	90,32	34 Unit	22	64,71%
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			4	4	100	3 Unit	2	66,67%
				09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			2	2	100	3 Unit	3 Unit	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

				0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedun Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lannnya yang Dipelihara/DIrehailitasi						6 Unit	3 Unit	50%
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan						173	116	67,05%
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus pelanggaran dan penaduan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani						159	104	65,41%
				03	Koordinasi Penyelenggaraaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentera man dan ketertiban umu dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / kota			5	4	80	6 Dok	4 Dok	66,67%
				04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum			3	3	100	2 Dok	1 Dok	50%
				05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			19	19	100	40 Orang	27 orang	67,50%
				06	Kerjasama antar lembaga dan kemitaan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan			3	2	66,67	3 Dok	2 Dok	66,67%
				08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan						1 Dok	0	0%
				15	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan						92 Laporan	65 Laporan	70,65%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

				16	Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan						10 Laporan	5 Laporan	50%
				17	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan perkada	Jumlah laporan penyediaan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani			1	1	100	5 Laporan	0	0%
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupat i/ walikota							13 Peraturan	12	92,31%
				01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat /pelaku usaha			10	10	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
				02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati /walikota			12	12	100	10 Laporan	10	100%
				03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah lapran pelaksanaan penanganan atas pelanggaraan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota yang dapat ditangani sesuai SOP			160	108	67,50	2 Laporan	1	50%
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							1 orang	0	0%
				01	Pengembangan Ka[asitas dan Karier PPNS				1	1	100	1 Laporan	0	0%
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						1.516	222	14,64%
1	05	04	2.01		Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan	Jumlah Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang						114	110	96,49%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	ditangani								
				01	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya			2	2	100	1 Dokumen	1	100%
				02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota			70	70	100	90 Laporan	90	100%
				03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan / evakuasi saat penanggulangan kebakaran fan non kebakaran			10	10	100	10 Dok	10	100%
				07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran			10	10	100	1 orang	0	0%
				09	Penyelenggaraan Kerjasama dan coordinator antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran			5	0	0	3 Dokumen	0	0%
1	05	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah desa yang mempunyai relawan kebakaran						497	112	22,53%
				01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya			290	290	100	495 orang	110	22,22%
				02	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup 18ystem ketahanan			1	1	100	1 Desa/Kelurahan	1	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya								
				03	Dukungan pemberdayaan masyarakat / relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/kelurahan yang telah tersedia dukungan sarpras Damkar			1	1	100	1 Dokumen	1	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Pemalang yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai denga Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan derah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana strategis Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati melaksanankan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, Sub Urusan Kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat,

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bapak Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang didukung dengan sumber daya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

manusia menurut jenis golongan, pendidikan dan tenaga non ASN. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Satpol PP juga didukung SDM Satlinmas dan Relawan Kebakaran, adapun data kami sajikan dalam tabel, dibawah ini :

1. SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2.a
Pegawai Satpol PP Kabupaten Pemalang

No	Uraian	L	P	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	2	1	-	-	3	-	3
4	Kasi/ Kasubag	5	-			-	5	5
5	JFU	71	10	-	51	30		81
6	JFT	5	4	-	4	1	-	9
7	Non ASN	124	15	139				139
Jumlah ASN dan Non ASN		**209**	**30**	**139**	**56**	**35**	**5**	**239**

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP 2025

Berdasarkan tabel 2.1, jumlah pegawai golongan IV berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah pegawai golongan III berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Jumlah pegawai golongan II sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, golongan I sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dominan pegawai Non ASN sebanyak 58,15%. Hal ini terjadi karena untuk mencukupi kebutuhan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak dapat dicukupi dari pegawai ASN.

Berdasarkan gender atau jenis kelamin, jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja jenis kelamin laki-laki sebanyak 209 (dua ratus sembilan) orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin belum seimbang secara gender karena menyesuaikan tugas lapangan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja.

2. SDM Berdasarkan Tenaga Non ASN

Tabel 2.b
Tenaga Non ASN menurut Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah menurut Gender		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	S-2	-	-	-	
2.	S-1	26	5	31	
3.	D -3/4	3	2	5	
4.	SMA	96	12	108	
5.	SMP	1	-	1	
6.	SD	-	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Jumlah	126	19	145	0,13

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP 2025

3. SDM Satlinmas

Tabel 2.c
Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per Kecamatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender

No.	Kecamatan	Jml Desa	Jumlah Linmas	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	perempuan
1.	Ulujami	18	793	768	25
2.	Comal	18	989	968	21
3.	Ampelgading	16	803	794	9
4.	Bodeh	19	726	721	5
5.	Petarukan	20	1.224	1.220	4
6.	Taman	21	1.326	1.303	23
7.	Pemalang	20	986	977	9
8.	Bantarbolang	17	739	734	5
9.	Randudongkal	18	587	575	12
10.	Moga	10	334	330	4
11.	Warungpring	6	224	220	4
12.	Pulosari	12	280	276	4
13.	Belik	12	698	698	0
14.	Watukumpul	15	688	686	2
	Jumlah	222	10.397	10.270	127

Sumber data : Bidang Linmas Satpol PP Tahun 2025

4. SDM Relawan Kebakaran

Tabel 2.d
Data Relawan Kebakaran dalam Binaan Satpol PP
Desa/Kelurahan Per Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jml Desa	Jumlah Redkar	Keterangan
1.	Ulujami	-	-	-
2.	Comal	-	-	-
3.	Ampelgading	1	15	Desa Tegalsari Barat
4.	Bodeh	-	-	-
5.	Petarukan	-	-	-
6.	Taman	-	-	-
7.	Pemalang	1	10	Desa Pegongsoran
8.	Bantarbolang	-	-	
9.	Randudongkal	-	-	
10.	Moga	1	15	Desa Gendowang
11.	Warungpring	-	-	-
12.	Pulosari	4	40	Desa Penakir, Ds. Karang sari, Ds.Gunungsari dan Ds. Nyalembeng
13.	Belik	-	-	
14.	Watukumpul	-	-	
	Jumlah	7	80	

Sumber data : Damkar Satpol PP 2025

5. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan sarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.e
Inventaris Aset Satpol PP

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	01		Tanah			
		01	Tanah	595 m2	892.500.000	
			Jumlah KIB A		*892.500.000*	
2	01		Peralatan dan Mesin			
		02	Alat-alat Besar	3	10.000.000	
		03	Alat-alat Angkutan	33	6.061.956.223	
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	6.000.000	
		05	Alat Pertanian	1	8.339.000	
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	321	873.101.472	
		07	Alat Studio & Alat Komunikasi	39	120.566.560	
		08	Alat-alat Kedokteran	6	12.891.060	
		09	Alat Laboratorium	0	0	
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan	20	12.000.000	
			Jumlah KIB B		*7.104.854.315*	
3	03		Gedung dan Bangunan			
		11	Bangunan Gedung	637.6	756.590.000	
		12	Monumen		0	
			Jumlah KIB C		*756.590.000*	
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	
		13	Jalan & Jembatan	0	0	
		14	Bangunan Air/Irigasi	0	0	
		15	Instalasi	0	0	
		16	Jaringan		0	
			Jumlah KIB D		*0*	
5	05		Aset Tetap Lainnya			
		17	Buku dan Perpustakaan	28	1.040.000	
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	83	230.960.000	
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman			
			Jumlah KIB E		*232.000.000*	
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	
			Jumlah KIB F		*0*	

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Satpol PP Kabupaten Pemalang

6. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Tabel 2.f
Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Induk Pemalang

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Kondisi	
				BAIK	RUSAK
1	APD (Jaket Tahan Panas)	warna merah	1	baik	
		warna orange	6	baik	
		warna cream	9	baik	
2	APD (Jaket Tahan Api)	warna silver	2	baik	
3	APD (rescue)	warna orange	1	baik	
4	Nozzle	gun/tembak ukuran 1,5	1	Baik	
		gun/tembak ukuran 2,5	1	Baik	
		variable ukuran 1,5	2	Baik	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		variable ukuran 2,5	4	2 baik	2 rusak
		Foam	1		rusak
5	Hose/Selang	rubber ukuran 1,5 inc	2	baik	
		rubber ukuran 2,5 inc	1	baik	
		kanvas ukuran 1,5 inc	2	baik	
		kanvas ukuran 2,5 inc	3	baik	
6	Y-Connection	warna merah 2,5 x 1,5 x 1,5	1	baik	
7	Sepatu Boot	warna kuning	6	baik	
		warna hitam	13	baik	
8	Safety Helm	warna merah	13	baik	
		warna hitam	1	baik	
9	Mesin Gerinda Cincin	warna hijau	1	Baik	
10	Linggis (Crowbar)	warna hitam	1	Baik	
11	Sekop (Shovel)	warna abu - abu	1	Baik	
12	Tang Besi	warna hijau	1	Baik	
13	Kapak (Fire Axe)	warna merah	3	1 baik	2 rusak
14	Kunci Hydrant (Hydrant Wrench)	warna merah	2	Baik	
15	Penjepit Ular (Snake Grip)	warna biru	2	Baik	
16	HT	warna hitam	2	Baik	
17	Alcon/Pompa Air	warna hitam 2,5 inc	1	Baik	
18	Palu	waarna coklat	1	baik	
19	Tangga	warna silver	1	baik	
20	Suction hose/selang penghisap	warna kuning ukuran 3,5 inc	3	baik	
21	Dongkrak	warna merah	1	baik	
22	Pengganjal ban	warna hitam	2	baik	
23	Tombak	warna silver	1	baik	
24	Senter	warna hitam	2	baik	
25	SCBA	warna hitam	4	3 baik	1 rusak
26	Alat peraga sosialisasi (wajan,kompor,selang,regulator,gas)	warna biru dan hitam	1 set	baik	
27	Portable blower/alat penghisap asap	warna kuning	1	baik	
28	Alat evakuasi tawon	warna kuning	1 set	baik	
29	APAR	Powder 3kg	6 (1 di unit)	baik	
		Powder 5kg	11	baik	
		Powder 9kg	4	3 baik	1 rusak
		CO2	5	baik	
30	Cairan foam		1	baik	
31	Tali webbing	warna hitam	2	baik	
32	Tali karmantel	warna hijau	1	baik	
33	Carabiner	warna hitam	4	baik	
34	Figure of eight	warna hitam	4	baik	
35	Pelampung	warna orange	2	baik	
36	Pompa Apung/water rose	warna merah	1	Baik	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sarana dan Prasarana Damkar Pos Comal

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Kondisi
1	Pompa Apung	warna merah silver	1	Rusak
2	Mesin Tempel	warna hitam	1	Rusak
3	Alkon/pompa air	warna abu abu 2,5 inc	2	Baik
4	Gerinda Cincin	warna hijau	1	Baik
5	Nozzle	variable 1,5 inc	1	Baik
		variable 2,5 inc	1	Baik
6	Hose/selang	kanvas 1,5 inc	2	Baik
		kanvas 2,5 inc	3	Baik
7	Y-Connection	warna merah ukuran 2,5 x 1,5 x 1,5 inc	1	Baik
8	Linggis	warna hitam	1	Baik
9	Kapak	warna merah	1	Baik
10	Cangkul	warna merah	1	Baik
11	Apar	powder 5kg	1	Baik
12	Penjepit Ular (Snake grip)	warna silver	2	Baik
13	Safety helmet	warna merah	11	Baik
14	APD (Jaket tahan panas)	warna merah	6	Baik
15	APD (Jaket tahan api)	warna abu - abu	2	Baik
16	APD evakuasi tawon (rescue)	warna orange	2	Baik
17	Sepatu boot	warna hitam	1	Baik
		warna kuning	6	Baik
18	Alat evakuasi tawon	warna coklat	4	Baik
19	Karung goni	warna coklat	1	Baik
20	Sarung tangan	warna orange	2	Baik
21	HT	warna hitam	2	Baik

Sarana dan Prasarana Pos Damkar Randudongkal

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Kondisi
1	Alkon/pompa air	warna abu - abu 2,5 inc	1	Baik
2	Gerinda cincin	warna hijau	1	Baik
3	Nozzle	variable 1,5 inc	1	Baik
		variable 2,5 inc	2	Baik
		foam 2,5 inc	1	Baik
4	Hose/selang	kanvas 1,5 inc	1	Baik
		kanvas 2,5 inc	4	Baik
		rubber 2,5 inc	1	Baik
5	Y-connection	warna merah 2,5 x 1,5 x 1,5 inc	1	Baik
6	Linggis	warna hitam	1	Baik
7	Kapak	warna merah	1	Baik
8	Cangkul	warna abu abu	1	Baik
9	Sabit(cengkrong)	warna abu abu	1	Baik
10	Tangga	warna abu abu	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11	Apar	powder 3kg	1	Baik
12	Penjepit ular (snake grip)	warna silver	1	Baik
13	Safety helmet	warna merah	1	Baik
		warna hitam	2	
14	APD (jaket tahan panas)	warna merah	7	Baik
15	APD (jaket tahan api)	warna abu - abu	2	Baik
16	APD (rescue)	warna orange	2	Baik
17	Sepatu boot	warna kuning	1	
		warna orange	5	
		warna hitam	2	Baik
18	Alat evakuasi tawon	warna coklat	3	Baik
19	Karung goni	warna coklat	1	Baik
20	HT	warna hitam	2	Baik
21	Sarung tangan	warna orange	1	Baik

Sarana dan Prasarana Pos Damkar Belik

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Kondisi
1	Nozzle	variable 1,5	1	Baik
		variable 2,5	2	Baik
2	Selang/Hose	rubber ukuran 1,5 inch	1	Baik
		rubber ukuran 2,5 inch	3	Baik
3	Y-Connection	warna merah 2,5 x 1,5 x 1,5 inc	1	Baik
4	Apar	powder 5 kg	1	Baik
5	Linggis (Crowbar)	warna kuning	1	Baik
6	Safety helmet	warna merah	3	Baik
7	APD (Jaket Tahan Panas)	warna cream	3	Baik
8	APD (rescue)	warna orange	1	Baik
9	Kapak (Fire Axe)	warna orange	1	Baik
10	Kunci Hydrant (Hydrant Wrench)	warna merah	1	Baik
11	Penjepit Ular (Snake Grip)	warna biru	2	Baik
12	HT (Handy Talkie)	warna hitam	1	Baik
13	Sepatu Boot	warna hitam	2	
		warna kuning	2	Baik
14	Mesin Gerinda Cincin	warna hijau	1	Baik
15	Sarung Tangan	warna navy	2	Baik
16	Dongkrak	warna merah	1	Baik
17	Ganjal Truk	warna merah	2	Baik
18	Tombak	warna abu - abu	1	Baik
19	Selang Hisap (Suction Hose)	warna abu - abu 3,5 inc	2	Baik
20	Tangga	warna abu - abu	1	Baik
21	Set Kunci Ban	warna abu - abu	2	Baik
22	Alat evakuasi tawon	warna coklat	1	Baik

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Saptol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi	
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	Orang	V	-	-	21	23	25	5	5	25	
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	V	-	-	3.200	3.300	3.400	1.260	1.200	3.400	
3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	-	V	V	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	-	V	V	65	70	75	100	100	75	
5.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	-	V	V	70	75	80	93,65		80	
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	-	V	V	67,5	68,5	69,5	66,66	76,13	69.5	
7.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	kasus	-	-	V	85	90	95	102	84	95	
8.	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	-	-	V	6.162	6.744	7.325	0	1.959	7.325	
9.	Jumlah Perda dan perkada yang ditegakkan	Perda/ perbub	-	-	V	16	17	18	14	17	18	
10.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	orang	-	-	V	3	4	4	4	6	4	
11.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	-	-	V	13	14	15	12	10	15	
12.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	orang	-	-	V	340	350	360	488	509	360	
13.	Jumlah aparatur	orang	-	-	V	20	25	30	32	25	30	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	pemadam yang memenuhi standar kualifikasi pemadam											
14.	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan uptd damkar	orang	-	-	V	90	90	90	40		90	
15.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	orang	-	-	V	20	25	30	10	5	30	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

2.3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Pemalang

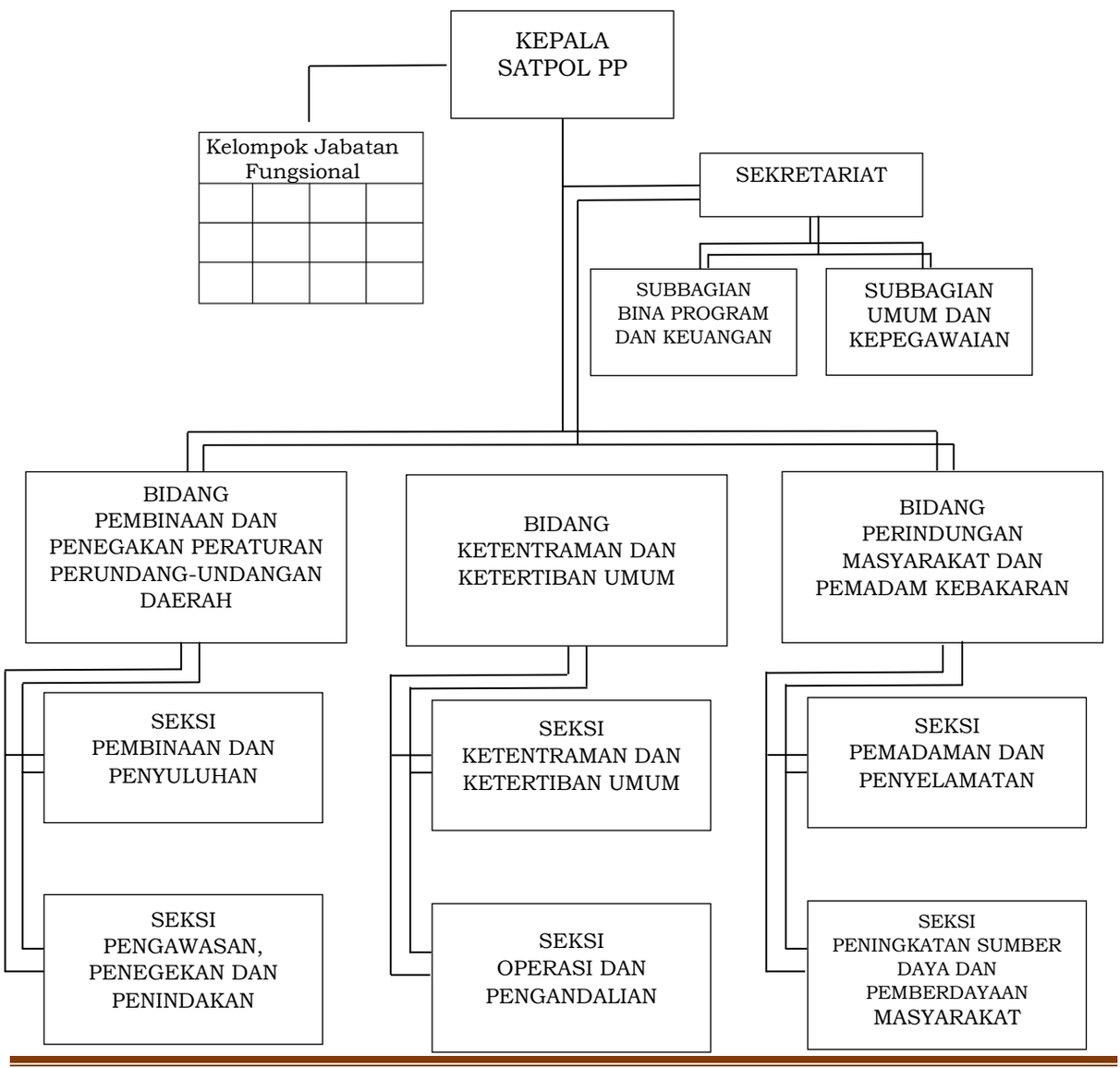

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah *membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi : sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat.*

Adapun fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Kepala Daerah
c. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksana kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanakoordinas penegakan perda dan perkada , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepela daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 2.2
Infografis Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang

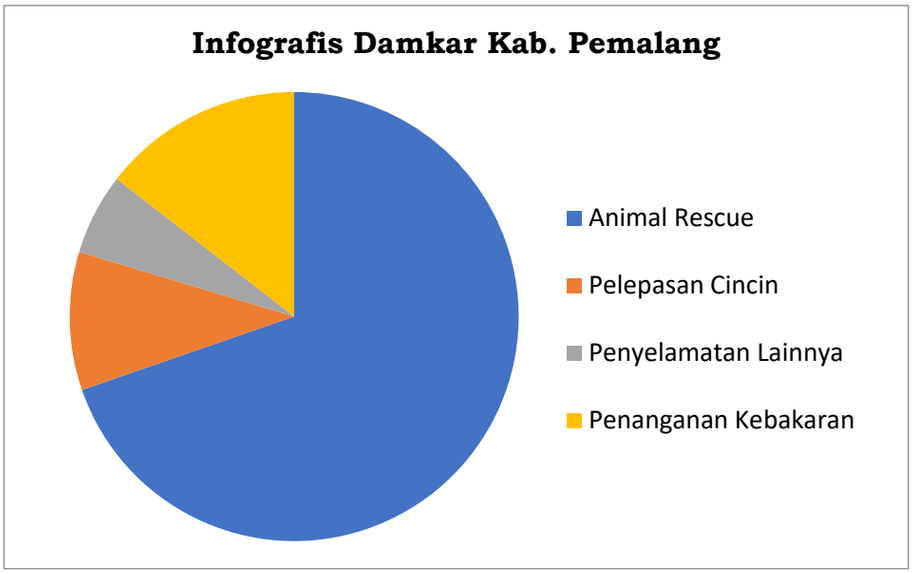

Pada bulan Januari sampai dengan Oktober 2025, Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang telah melaksanakan 669 kegiatan Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemadaman Kebakaran : 84 kejadian;
2. Pemberdayaan masyarakat : 76 kegiatan;
3. Animal Rescue : 432 kejadian;
4. Pelepasan cincin : 53 kejadian;
5. Penyelamatan lainnya : 24 kejadian.

2.3.2 Analisis Isu-Isu Strategis Satpol PP Kabupaten Pemalang

Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pemalang, sebagaimana uraian berikut :

1. Masih adanya gangguan ketentraman dan keteriban umum serta masih rendahnya cakupan pelayanan kebakaran;
2. Penegakan Perda/Perkada masih belum Optimal sehingga masyarakat, aparatur, atau badan hukum kurang mematuhi dan mentaati Perda/Perkada;
3. Belum Optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Belum Optimalnya koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
5. Kurangnya Jumlah Aparatur/Personil Satpol PP dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP;
6. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih rendah;
7. Belum optimlnya penanganan gangguan trantibum;
8. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
9. Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran
10. Masih kurangnya peningkatan Kapasitas bagi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
11. Masih kurangnya Sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP Kabupaten Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan erwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalang

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Satpol PP Kabupaten Pemalang mendukung visi **Handal** dan misi **Silaturahmi** yaitu **meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi local.**

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera, Satpol PP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten Pemalnag merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025-2029, yaitu **Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran.** Tujuan tersebut diukur dengan indikator **Presentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum**, yang merupakan Jumlah Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan kebakaran (n) dibagi jumlah kasus yang tertangani (n) dikali 100% serta **Jumlah kasus kebakaran** diukur dengan Kejadian kebakaran di wilayah kab. pemalang di tahun N.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 adalah “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional” maka tema, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada “Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan”,

Kebijakan pembangunan tersebut di prioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, Pengawasan kualitas udara dan air;
    b. Peningkatan pengelolaan sampah melalui implementasi metode 3R (reuse, reduce dan recycle), peningkatan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir, penguatan kelembagaan pengelola sampah, peningkatan sarana prasara pengelolaan sampah, serta penanganan limbah B3 penyimpanan sementara);
    c. Pengawasan usaha/kegiatan lingkungan sesuai dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan;
    d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah;
    e. Peningkatan institusi/perkantoran/sekolah bebas sampah;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata, dengan focus pada:
    a. Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan perda RTRW dan peningkatan informasi tata ruang dan pola ruang;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP;
c. Pengurangan kesenjangan antar desa dan kecamatan;
d. Peningkatan konektivitas pemeliharaan dan rehab melalui Pembangunan, jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata;
e. Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;
f. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai;
g. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan;
h. Peningkatan pelayanan dan penambahan pos pemadam kebakaran;
i. Penyediaan Early Warning System (EWS);
j. Pembentukan Desa tangguh Bencana (Destana);
k. Peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM.

3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter, dengan fokus pada :
   a. Pencegahan radikalisme dan terorisme;
   b. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
   c. Mewujudkan kondusivitas dan kestabilan politik di masyarakat;
   d. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia guna memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan narkoba;
   e. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   f. Implementasi kualitas perencanaan responsive gender, penyediaan data gender dan anak serta Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
   g. Penguatan kelembagaan dan layanan UPTD PPPA dalam upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak;
   h. Peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (ePemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca serta pengelolaan arsip;

i. Mendukung pembangunan kebudayaan;
j. Percepatan implementasi wajib belajar 13 tahun, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, penyediaan fasilitas pendidikan bagi siswa; peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi;
k. Peningkatan budaya literasi dan pendidikan budi pekerti;
l. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat melalui optimalisasi pencegahan dan penanggulanan kasus balita gizi buruk dan stunting, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan (SDK);
m. Pengendalian pembangunan kependudukan dan keluarga berencana melaui peningkatan kualitas dan menekan jumah penduduk serta Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR);
n. Peningkatan partisipasi dan kualitas serta daya saing pemuda dalam pembangunan dan olahraga;
o. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui Peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kualitas BLK;
p. Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjaringan minat transmigrasi;
q. Mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui program jambanisasi, penanganan kawasan kumuh, penyediaan sumber air bersih dan sanitasi, penanganan RTLH;
r. Pengurangan beban hidup masyarakat melalui penanganan anak tidak sekolah, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, Optimalisasi layanan UHC, Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin, pemberian jaminan dan perlindungan sosial;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

s. Pembinaan kelembagaan masyarakat (posyandu, PKK, RT, RW, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa);

4. Peningkatan impelemntasi transformasi birokrasi yang berdampak, dengan focus pada:
   a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Manajemen Risiko;
   b. Peningkatan Pelayanan, pembinaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan SDM pelayanan Pajak & Retribusi;
   c. Peningkatan kualitas data daerah;
   d. Peningkatan publikasi data serta layanan masyarakat yang efektif dan efisien menuju desa mandiri.
   e. Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
   f. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat;
   g. Peningkatan pengambilan kebijakan berbasis bukti melalui kajian;
   h. Peningkatan indeks kapabilitas inovasi melalui pendaftaran kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
   i. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berinovasi pada pengembangan potensi yang ada di lingkungannya;
   j. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
   k. Peningkatan kapasitas perangkat desa.
5. Peningkatan produktivitas ekonomi, dengan fokus pada:
   a. Pengembangan Pariwisata berbasis potensi lokal (Destinasi Wisata, Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif);
   b. Membuat paket wisata, event-event wisata dan Ekonomi Kreatif serta digitaslisasi promosi;
   c. Peningkatan Kapasitas SDM pelaku usaha wisata dan ekraf;
   d. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya benda dan tak benda;
   e. Fasilitasi publikasi Promosi wisata dan Event lainnya melalui media publikasi Pemkab. Pemalang (online dan off line);
   f. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan melalui Peningkatan kapasitas industri kecil, Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industry, dan Penguatan Sistem Informasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Industri Nasional (SIINAS) serta peningkatan penggunaan produk dengan spesifikasi TKDN;

g. Peningkatan dan penguatan peran Koperasi dalam mendorong produktivitas pelaku usaha (IKM & UMKM);
h. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan;
i. Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veterineer;
j. Peningkatan kapasitas SDM Pertanian (Penyuluh, petani, petugas informasi harga, juru sembeli, veteriner, penyelenggaraan sekolah lapang pertanian dan lain-lain);
k. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi perikanan budidaya;
l. Peningkatan hasil usaha produk olahan perikanan;
m. Peningkatan peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor serta peningkatan perlindungan konsumen;
n. Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal;
o. Peningkatan fasilitasi digitalisasi pemasaran produk IKM dan UMKM secara online;
p. Pembinaan dan Pendampingan SDM Pelaku Usaha Pertaian;
q. Pembinaan dan pendampingan SDM pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil usaha perikanan;
r. Pengembangan potensi ekonomi melalui kerjasama desa baik kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, peningkatan kawasan perdesaan dan Pengembangan Bumdes;
s. Pembinaan dan pendampingan SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
t. Pembinaan dan Pendampingan UMKM (Peningkatan Kapasitas, Akses Permodalan dan Pemasaran) serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga;

Satpol PP Kabupaten Pemalang mendukung prioritas pembangunan Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter, yaitu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dengan melaksanakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja Satpol PP Kabupate Pemalang , telaah visi, misi dan program unggulan Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan epluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Satpol PP Kabupaten Pemalang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Pemalang. Renja Satpol PP Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Satpol PP Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu Man (Manusia), Money (Dana), Machine (Sarpras), Methode (Tupoksi dan Tata Laksana), dan Matrial (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Satpol PP Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
	SATPOL PP KABUPATEN PEMALANG					**SATPOL PP KABUPATEN PEMALANG**				
	Tujuan : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran		**Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum**	**100**	**14.309.088.000**	**Tujuan : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran**		**Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum**	**100**	**18.546.236.000**
			Jumlah kasus kebakaran	**100**				**Jumlah kasus kebakaran**	**100**	
1.05	**BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemeritahan		Indeks Kepuasan Masyarakat		13.240.588.000	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemeritahan		Indeks Kepuasan Masyarakat		15.918.112.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP		13.240.588.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP		15.918.112.000
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	9 Dok	7.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	9 Dok	36.515.000
1.05.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.000.000	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	14.540.000
1.05.01.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.700.000
1.05.01.2.01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penysunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dok	1.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penysunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dok	4.675.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
1.05.01.2.01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3.075.000
1.05.01.2.01.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dok	1.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dok	4.150.000
1.05.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	1.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	2.200.000
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 Laporan	2.175.000
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun		10.312.088.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	68 Dok	10.170.061.000
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	98	10.309.088.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	56 orang	10.158.386.000
1.05.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0 Laporan	1.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.125.000
1.05.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semes	10 Laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semestera	10 Laporan	4.475.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
			teran SKPD					n SKPD		
1.05.01.2.02.0008	Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran		Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.000.000	Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran		Jumlah dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	3.075.000
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4.920.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101 Dok	150.249.000
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	150.249.000
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawaai berdasarkan tugas dan fungsi	0 orang	4.920.000	Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawaai berdasarkan tugas dan fungsi	0 orang	0
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	115.768.500	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	106 Dok	313.820.750
1.05.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	4 Paket	4.987.500	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	4 Paket	9.817.500
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	1.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	25.455.000
1.05.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.108.500	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	94.910.250
1.05.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.006.500	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
1.05.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	0	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	NA
1.05.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	84.666.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.638.000
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Unit	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	1.890.724.000
1.02.01.2.07.0002	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Unit	0	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	1.890.724.000
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	2.662.807.500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	29 Laporan	2.600.793.700
1.05.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.004.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.000.000
1.05.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.607.500	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.607.500,00
1.05.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	2.531.196.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.477.006.200,00
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	45 Laporan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	3 Laporan	22.180.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-	138.004.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	46 Unit	138.004.000
1.05.01.2.09.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	134.376.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	217.751.550
1.05.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.660.000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	77.479.000
1.05.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000
1.05.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya		Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi	50 Unit	968.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya		Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi	6 Unit	10.718.000
	Sasaran 2: Meningkatnya penegakan Perda/Perkada dan penanganan kebakaran		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			Sasaran 2: Meningkatnya penegakan Perda/Perkada dan penanganan kebakaran		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		418.500.000
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		561.580.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100	418.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100 persen	1.727.850.000
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantib yang ditangani	85 kasus	268.500.000	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantib yang ditangani	85 kasus	1.502.850.000
1.05.02.2.01.	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	6 Dok	37.125.000	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	6 Dok	1.034.600.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
0003	ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota		penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota			ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota		penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota		
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum		Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	2 Dok	81.375.0000	Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum		Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	2 Dok	120.000.000
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	0	0	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	40 orang	NA
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dok	8.658.000	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dok	165.330.000
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat		Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan	1 Dok	1.530.000	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat		Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan	1 Dok	1.400.000
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan		Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,patroli,penga	92 Laporan	129.396.000	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan		Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,patroli,pengamanan dan pengawalan	92 Laporan	156.410.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
	Pengawalan		manan dan pengawalan			Pengawalan				
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	10 Laporan	8.658.000	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	10 Laporan	23.400.000
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani	5 Laporan	1.758.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani	5 Laporan	1.710.000
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan	-	140.000.000	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan	13 Peraturan	205.000.000
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah	9 Laporan	40.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah	1 Laporan	93.000.000
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	10 Laporan	40.000.000	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	2 Laporan	51.500.000
1.05.02.2.02.	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan	24 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan	10 Laporan	60.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
0012	pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota			pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota		
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Laporan	10.000.000	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Laporan	20.000.000
1.05.02.2.03.0006	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)		Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	10.000.000	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)		Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	20.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Prosentase Penanganan kasus kebakaran:		650.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Prosentase Penanganan kasus kebakaran:		900.274.000
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani		149.800.000	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani		591.000.000
1.05.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya	1 Dok	25.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya	1 Dok	50.000.000
1.05.04.2.01.0002	Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman	90 Laporan	70.000.000	Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	90 Laporan	185.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
	Kabupaten/Kota		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1.05.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 Dok	26.050.000	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 Dok	170.000.000
1.05.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 orang	100.000	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 orang	16.000.000
1.05.04.2.01.0018	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	3 Dok	5.500.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	3 Dok	35.000.000
1.05.04.2.01.0017	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan		Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan	9 Unit	23.100.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan		Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan	9 Unit	135.000.000
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Relawan Kebakaran		500.200.000	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi		Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Relawan Kebakaran		309.274.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)		(3)	(9)	(10)	(2)		(3)	(9)	
						Masyarakat				
1.05.04.2.04.0001	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya	200 orang	500.000.00	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya	495 orang	111.000.000
1.05.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya	4 Desa	100.000	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya	Desa	187.249.000
1.05.04.2.04.0003	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar	1 Dok	100.000	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar	1 Dok	11.025.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Melalui pelaksanaan musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Secara umum semua kebutuhan masyarakat yang tertampung pada hasil musrenbang maupun melalui pokok pikiran Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) telah terrealisasi berdasarkan skala prioritas dan sudah diakomodir dalam Recana kerja.

Untuk tahun 2025 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4

Daftar Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat
Tahun 2026

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**, dengan prioritas pembangunan 2026 pada :

1. Ketahanan Pangan:
   Peningkatan produktifitas pertanian melalui pengembangan infrastruktur seperti jaringan irigasi dan bendungan, serta optimasi lahan.
2. Ketahanan Energi:
   Penguatan ketahanan energy nasional.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
   Program prioritas unggulan dengan target menjangkau jutaan siswa, ibu hamil, dan balita untuk menigkatkan gizi dan mengurangi stunting. Program ini juga bertujuan memberdayakan UMKM local.
4. Pendidikan Bermutu:
   Peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan.
5. Kesehatan Berkualitas:
   Peningkatan kualitas kesehatan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit di daerah.
6. Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM:
   Penguatan koperasi melalui program "Koperasi Merah Putih" dan pemberdayaan UMKM.
7. Pertahanan Semesta:
   Penguatan system pertahanan negara melalui moderenisasi alutsista dan pengembangan industry dalam negeri.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global:
   Peningkatan investasi dan perdagangan internasional sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumberdaya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata;
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter;
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak;
5. Peningkatan produktifitas ekonomi.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2026 Kabupaten Pemalang tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang mendukung prioritas ke-3 yaitu 3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang urusan wajib Pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Praja, Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong melalui peningkatan budaya literasi di masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan birokrasi yang akuntabel.

A. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang akan dicapai di tahun 2026, yaitu **"Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran".** Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi : sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat.. Tujuan tersebut diukur dengan indikator **Presentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum**, yang merupakan Jumlah Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan kebakaran (n) dibagi jumlah kasus yang tertangani (n) dikali 100% serta **Jumlah kasus kebakaran** diukur dengan Kejadian kebakaran di wilayah kab. pemalang di tahun N.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang mempunyai 2 (dua) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025-2029, yaitu :

1. "**Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Penanganan Kebakaran"**, yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu **"Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan"** yang merupakan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan DIBAGI Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi DIKALI 100%, serta **"Waktu tanggap (respone time) penanganan kebakaran"** yang merupakan Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** yang diukur dengan **“indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang telah dilaksanakan dan indikator **Nilai SAKIP OPD** yang merupakan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran		Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	100
			Jumlah kasus kebakaran	Kasus	100
2		Meningkatnya penegakan Perda/Perkada dan Penanganan Kebakaran	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
			Waktu tanggap (respone time) penanganan kebakaran	Menit	15
3		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,78
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	67,48

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Visi : Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya				
Misi : Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas				
-	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran.	1. Meningkatnya penegakan Perda/Perkada dan penanganan kebakaran.	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada pelaksanaan pelayanan yang HUMANIS dan sesuai SPM	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui operasi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; melalui operasi rutin, penegakkan perda / perbup; melalui operasi yustisi, menyediakan sarana dan prasarana serta mengembangkan kapasitas PPNS di Kabupaten Pemalang
			Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran difokuskan pada peningkatan jangkauan pelayanan kebakaran dan penanganan kedaruratan non kebakaran sesuai dengan SPM	Penyelenggaraan pelayanan kebakaran melalui peningkatan kapasitas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), meningkatkan SDM dan sarana prasarana, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membentuk dan memberdayakan relawan kebakaran

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Visi : Pemalang Bercahaya – Bersih, Cakap, Handal, Mulya				
Misi : Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas				
-	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja Satpol PP difokuskan pada peningkatan akuntabilitas kinerja	Pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan BMD dengan baik dan benar
			Perbaikan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat	1. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel
				2. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan faktor – faktor perumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan diantaranya adalah :

1. Menjabarkan/melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara sinergis dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang tertuang dalam program unggulan, yaitu :
   a. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan;
   b. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata;
   c. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter;
   d. Peningkatan impelemntasi transformasi birokrasi yang berdampak;
   e. Peningkatan produktivitas ekonomi.
3. Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang meliputi : sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 49 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 18.546.236.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Program yang akan dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2026 antara lain :

A. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD.
d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b. Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
d. Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya

B. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
b. Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum
c. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
d. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat
f. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan
g. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
h. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   b. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   c. Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. **Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota**
   a. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. **Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
   d. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
   e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan
2. **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**
   a. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
c. Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya disajikan pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Kabupaten Pemalang
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	SATPOL PP KABUPATEN PEMALANG							
	Tujuan : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran	Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	Nilai	100	18.546.236.000	100	19.175.794.745	
		Jumlah kasus kebakaran	Kasus	100		98		
1.05	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemeritahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	15.918.112.000	100	17.529.558.995	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	Nilai	100	15.918.112.000	100	17.529.558.995	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	9	36.515.000	9	48.000.000	
1.05.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	14.540.000	2	30.000.000	
1.05.01.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.700.000	1	2.000.000	
1.05.01.2.01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penysunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	4.675.000	1	2.000.000	
1.05.01.2.01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.075.000	1	2.000.000	
1.05.01.2.01.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen perubahan DPA	Dokumen	1	4.150.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD						
1.05.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	2	2.200.000	2	5.000.000	
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Laporan	1	2.175.000	1	5.000.000	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	68	10.170.061.000	68	9.944.356.000	
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Bulan	56	10.158.386.000	56	9.935.856.000	
1.05.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	4.125.000	1	3.000.000	
1.05.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Laporan	10	4.475.000	10	4.000.000	
1.05.01.2.02.0008	Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3.075.000	1	1.500.000	
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	101	150.249.000	101	261.535.000	
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas	Jumlah paket pakaian dinas beserta	Paket	1	150.249.000	1	161.535.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	beserta Atribut Kelengkapannya	atribut kelengkapannya						
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawaai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0	0	100	100.000.000	
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	106	313.820.750	106	152.084.394	
1.05.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Paket	4	9.817.500	4	10.000.000	
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	25.455.000	2	1.145.395	
1.05.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	94.910.250	16	27.439.000	
1.05.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	33.000.000	2	8.500.000	
1.05.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	NA	2	5.000.000	
1.05.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	150.638.000	80	100.000.000	
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1.890.724.000	1	3.771.753.600	
1.02.01.2.07.0002	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1.890.724.000	1	3.771.753.600	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah laporan penyediaan jasa	Laporan	29	2.600.793.700	29	2.767.613.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah						
1.05.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	11.000.000	2	1.500.000	
1.05.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.607.500,00	12	168.173.000	
1.05.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.477.006.200,00	12	2.594.940.000	
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Laporan	3	22.180.000,00	3	3.000.000	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	46	138.004.000	46	584.217.000	
1.05.01.2.09.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34	217.751.550	34	281.217.000	
1.05.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	77.479.000	3	3.000.000	
1.05.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	450.000.000	3	250.000.000	
1.05.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi	Unit	6	10.718.000	6	50.000.000	
	Sasaran 2:	Persentase Perda dan Perkada yang	Persen	173	418.500.000	173	1.034.594.650	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	Meningkatnya penegakan Perda/Perkada dan penanganan kebakaran	ditegakkan						
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	1516	561.580.000	1520	611.641.100	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	173	1.727.850.000	173	1.034.594.650	
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantib yang ditangani	Kasus	159	1.502.850.000	159	481.585.450	
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	Dokumen	6	1.034.600.000	6	36.379.850	
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	Dokumen	2	120.000.000	2	70.948.800	
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	Orang	40	NA	40	28.804.000	
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	165.330.000	3	15.810.200	
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan	Dokumen	1	1.400.000	1	1.450.200	
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	laporan	92	156.410.000	92	262.665.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	yang dicegah melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,patroli,pengamanan dan pengawalan						
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	laporan	10	23.400.000	10	21.514.000	
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani	Laporan	5	1.710.000	5	44.013.400	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan	Peraturan	13	205.000.000	13	552.270.000	
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah	Laporan	1	93.000.000	1	112.102.000	
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	Laporan	2	51.500.000	2	397.419.600	
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan	Laporan	10	60.500.000	10	42.748.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
		peraturan Bupati/Wali kota						
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Laporan	1	20.000.000	1	739.200	
1.05.02.2.03.0006	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	20.000.000	1	739.200	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase Penanganan kasus kebakaran:	Persen	1516	900.274.000	1520	611.641.100	
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani	Kasus	114	591.000.000	114	111.557.100	
1.05.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya	Dokumen	1	50.000.000	1	4.986.200	
1.05.04.2.01.0002	Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	90	185.000.000	90	39.977.200	
1.05.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	10	170.000.000	10	15.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja	Rp (000)	Target Capaian Kinerja	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
1.05.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	1	16.000.000	1	42.000	
1.05.04.2.01.0018	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	3	35.000.000	3	1.626.000	
1.05.04.2.01.0017	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan	Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan	Unit	9	135.000.000	9	49.925.700	
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Relawan Kebakaran	Desa	1.402	309.274.000	1.402	500.084.000	
1.05.04.2.04.0001	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya	Orang	1.400	111.000.000	1.400	500.000.000	
1.05.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya	Desa/kel	1	187.249.000	1	42.000	
1.05.04.2.04.0003	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar	Dokumen	1	11.025.000	1	42.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      d) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian beserta kelengkapannya
      b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    e) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
    f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
c) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dab Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
d) Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
e) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
f) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
g) Sub Kegiatan Penidakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
h) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampk Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
   a) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   b) Sub Kegiatan Penangana Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   c) Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
   a) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

C. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota
   b) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
   c) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
   d) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
   e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
   f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalm Pencegahan Kebakaran
   a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
   b) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
   c) Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	SATPOL PP KABUPATEN PEMALANG							
	Tujuan : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan pelayanan kebakaran	Presentase Penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum	Nilai	100	18.546.236.000	100	19.175.794.745	
		Jumlah kasus kebakaran	Kasus	100		98		
1.05	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemeritahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	15.918.112.000	100	17.529.558.995	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	Nilai	100	15.918.112.000	100	17.529.558.995	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	9	36.515.000	9	48.000.000	
1.05.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	14.540.000	2	30.000.000	
1.05.01.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.700.000	1	2.000.000	
1.05.01.2.01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penysunan dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	4.675.000	1	2.000.000	
1.05.01.2.01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.075.000	1	2.000.000	
1.05.01.2.01.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan	Dokumen	1	4.150.000	1	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
		DPA SKPD						
1.05.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	2	2.200.000	2	5.000.000	
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Laporan	1	2.175.000	1	5.000.000	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	68	10.170.061.000	68	9.944.356.000	
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Bulan	56	10.158.386.000	56	9.935.856.000	
1.05.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	4.125.000	1	3.000.000	
1.05.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Laporan	10	4.475.000	10	4.000.000	
1.05.01.2.02.0008	Sub kegiatan Penyusunan laporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	3.075.000	1	1.500.000	
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	101	150.249.000	101	261.535.000	
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1	150.249.000	1	161.535.000	
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawaai	Orang	0	0	100	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
		berdasarkan tugas dan fungsi						
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	106	313.820.750	106	152.084.394	
1.05.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Paket	4	9.817.500	4	10.000.000	
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	25.455.000	2	1.145.395	
1.05.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	94.910.250	16	27.439.000	
1.05.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	33.000.000	2	8.500.000	
1.05.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	NA	2	5.000.000	
1.05.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	150.638.000	80	100.000.000	
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1.890.724.000	1	3.771.753.600	
1.02.01.2.07.0002	Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1.890.724.000	1	3.771.753.600	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	29	2.600.793.700	29	2.767.613.000	
1.05.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	11.000.000	2	1.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
1.05.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	90.607.500,00	12	168.173.000	
1.05.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.477.006.200,00	12	2.594.940.000	
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Laporan	3	22.180.000,00	3	3.000.000	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	46	138.004.000	46	584.217.000	
1.05.01.2.09.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34	217.751.550	34	281.217.000	
1.05.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	77.479.000	3	3.000.000	
1.05.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	450.000.000	3	250.000.000	
1.05.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor lainya yang di pelihara/Rehabilitasi	Unit	6	10.718.000	6	50.000.000	
	Sasaran 2: Meningkatnya penegakan Perda/Perkada dan penanganan kebakaran	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	173	418.500.000	173	1.034.594.650	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	1516	561.580.000	1520	611.641.100	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	173	1.727.850.000	173	1.034.594.650	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantib yang ditangani	Kasus	159	1.502.850.000	159	481.585.450	
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	Dokumen	6	1.034.600.000	6	36.379.850	
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan kertiban umum	Dokumen	2	120.000.000	2	70.948.800	
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya	Orang	40	NA	40	28.804.000	
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3	165.330.000	3	15.810.200	
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Keteriban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah di buat dan dimutakhirkan	Dokumen	1	1.400.000	1	1.450.200	
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegh dini,pembinaan dan penyuluhan,patroli,pengamanan dan pengawalan	laporan	92	156.410.000	92	262.665.000	
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan	laporan	10	23.400.000	10	21.514.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan						
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayanijumalah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan pekada yang terlayani	Laporan	5	1.710.000	5	44.013.400	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda atau Perbup yang di tegakkan	Peraturan	13	205.000.000	13	552.270.000	
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan Peraturan daerah dan peraturan kepada daerah	Laporan	1	93.000.000	1	112.102.000	
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran pertauran daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	Laporan	2	51.500.000	2	397.419.600	
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota	Laporan	10	60.500.000	10	42.748.400	
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	Laporan	1	20.000.000	1	739.200	
1.05.02.2.03.0006	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS(Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	20.000.000	1	739.200	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase Penanganan kasus kebakaran:	Persen	1516	900.274.000	1520	611.641.100	
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang di tangani	Kasus	114	591.000.000	114	111.557.100	
1.05.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap Tahunnya	Dokumen	1	50.000.000	1	4.986.200	
1.05.04.2.01.0002	Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	90	185.000.000	90	39.977.200	
1.05.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	10	170.000.000	10	15.000.000	
1.05.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	1	16.000.000	1	42.000	
1.05.04.2.01.0018	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	jumlah dokumen hasil penyelnggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten /kota dalam pencegahan,penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	3	35.000.000	3	1.626.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				
				2026		2027		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)	(12)	(19)
1.05.04.2.01.0017	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perilindungan	Jumlah Sarana dan Prasana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan	Unit	9	135.000.000	9	49.925.700	
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Relawan Kebakaran	Desa	1.402	309.274.000	1.402	500.084.000	
1.05.04.2.04.0001	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaan setiap tahunnya	Orang	1.400	111.000.000	1.400	500.000.000	
1.05.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan Pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) tiap tahunnya	Desa/kel	1	187.249.000	1	42.000	
1.05.04.2.04.0003	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Klurahan yang telah tersedia dukungan sapras Damkar	Dokumen	1	11.025.000	1	42.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini adalah :

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini merupakan acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, 10 November 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PEMALANG

Drs. ACHMAD HIDAYAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19720407 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

V. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menjamin tercapainya sinergi antara pembangunan pusat dan daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis sebagai unsur pendukung kepala daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, mengintegrasikan, serta mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja menjadi pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, pengalokasian anggaran, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Proses penyusunan Renja Bappeda mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Bappeda mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Bappeda Kabupaten Pemalang, mengingat:

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Bappeda dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Bappeda untuk memasukkan program, kegiatan dan subkegiatan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; serta
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja
   a. Mengacu pada Rancangan Awal Renstra Bappeda Tahun 2025-2029;
   b. Menginventarisasi hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2024;
   c. Menyusun jadwal, tim penyusun, serta instrumen pengumpulan data dan informasi.

2. Pengumpulan Data dan Informasi
   a. Melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan.
   b. Mengidentifikasi isu strategis pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maupun RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

3. Penyusunan Rancangan Awal Renja
   a. Menyusun Rancangan Awal Renja Bappeda dengan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan;
   b. Rancangan Awal Renja harus konsisten dengan arah kebijakan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
   a. Menyelenggarakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk membahas rancangan awal Renja;
   b. Forum ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan Bappeda dengan perangkat daerah lain serta usulan masyarakat.

5. Penyusunan Rancangan Renja
   a. Menyempurnakan rancangan awal berdasarkan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, serta perkiraan pagu indikatif;

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
   a. Renja Bappeda diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan.
7. Perumusan Rancangan Akhir Renja
   a. Renja Bappeda difinalisasi setelah Musrenbang RKPD;
   b. Memuat hasil penyelarasan prioritas, serta menyesuaikan dengan pagu indikatif dan arah kebijakan pembangunan daerah.
8. Penetapan
   a. Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
   b. Menjadi dokumen resmi sebagai dasar penyusunan RKA Bappeda

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Renja

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Renja berfungsi sebagai instrumen operasional untuk memastikan arah kebijakan pembangunan dapat diwujudkan secara konsisten, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah. Renja Bappeda Tahun 2026 merupakan arahan dan pedoman bagi Bappeda untuk merumuskan program, kegiatan, subkegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Pemalang untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Menjadi dasar penyusunan RKA, sehingga Renja berperan penting dalam penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen penganggaran pembangunan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja, dengan menetapkan indikator, target, serta capaian yang dapat diukur dan dievaluasi setiap tahun.
7. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan, karena Renja Bappeda disusun dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, berbasis data, dan mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta review terhadap rancangan awal RKPD.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tujuan dan sasaran Renja serta program, kegiatan, subkegiatan tahun 2026. Antara lain memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Pemalang

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan angaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Bappeda Kabupaten Pemalang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappeda tahun 2024. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Pada tahun 2024, Bappeda melaksanakan 4 program, 15 kegiatan, dan 51 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp11.948.106.900,- dan bertambah saat perubahan menjadi Rp11.965.861.780,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp10.884.075.440,- (88,18%). Secara detil pelaksanaan program Bappeda tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Program ini merupakan program yang bersifat lintas sektor dan mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan di kabupaten/kota. Dalam bentuk dukungan manajerial, administratif, maupun operasional agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan efektif. Secara umum, ruang lingkup Program Penunjang meliputi aspek pengelolaan pemerintahan daerah, antara lain perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi pemerintahan dan tata usaha, pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan data dan informasi pembangunan, hingga penguatan kapasitas sumber daya aparatur. Dengan cakupan tersebut, program ini berfungsi sebagai “enabling program” yang memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat diimplementasikan secara tepat, transparan, dan akuntabel.

Signifikansi Program Penunjang terlihat dari perannya sebagai pondasi birokrasi daerah. Tanpa dukungan administrasi yang tertib, tata kelola keuangan yang baik, serta sistem informasi pembangunan yang akurat, maka mustahil program prioritas daerah dapat mencapai hasil

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yang diharapkan. Lebih jauh, program ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi **reformasi birokrasi**, khususnya melalui penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penerapan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, serta pelaksanaan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Penunjang indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Secara umum, realisasi kedua indikator sesuai dengan target. Capain tersebut merupakan hasil dari kebijakan pelaksanaan program yang diarahkan pada:

a. penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur melalui pelatihan, diklat, dan pembinaan;
b. digitalisasi tata kelola pemerintahan yang mendukung percepatan layanan, antara lain melalui implemetasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi);
c. integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi;
d. optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Namun demikian, pelaksanaan Program Penunjang di berbagai masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan umum yang muncul antara lain belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pengadaan barang/jasa; keterbatasan sarana dan prasarana kerja, terutama dalam mendukung digitalisasi birokrasi; masih terjadinya fragmentasi data pembangunan antar-organisasi perangkat daerah sehingga menghambat perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*); serta adanya regulasi yang kerap berubah dan menimbulkan kerancuan dalam implementasi administrasi pemerintahan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan salah satu program utama yang dilaksanakan oleh Bappeda, dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Program ini memiliki peran strategis karena menjadi dasar bagi seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari tahap penyusunan rencana, pengendalian pelaksanaan, hingga evaluasi atas hasil yang dicapai. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pelaksanaan program ini berlandaskan pada regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, perencanaan pembangunan daerah wajib disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, serta tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas melalui evaluasi kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan di periode berikutnya.

Ruang lingkup kegiatan dalam program ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, fasilitasi Musrenbang di berbagai tingkatan, pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam Evaluasi RKPD. Dengan adanya mekanisme tersebut, program ini menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana, terukur capaian kinerjanya, serta dapat dilakukan penyesuaian bila terdapat dinamika dan tantangan baru.

Signifikansi program ini sangat besar bagi efektivitas pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah daerah dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Melalui pengendalian, pemerintah daerah mampu memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi program/kegiatan di lapangan. Sedangkan melalui evaluasi, pemerintah daerah memperoleh umpan balik atas pelaksanaan pembangunan yang menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, siklus pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Pemalang diukur dengan indikator “Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD” yang secara umum tercapai sesuai dengan target di tahun 2024. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain masih adanya keterbatasan kualitas data dan informasi pembangunan, serta keterbatasan kapasitas SDM perencana di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan. Selain itu, perubahan regulasi yang cukup dinamis seringkali menimbulkan keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun evaluasi. Tantangan lainnya adalah memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran daerah, agar perencanaan tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang nyata.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah perlu difokuskan pada penguatan perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*), peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur perencana, pengembangan sistem informasi perencanaan daerah yang terintegrasi, serta peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan rencana pembangunan. Selain itu, pengendalian dan evaluasi pembangunan juga perlu diperkuat dengan pendekatan kinerja yang lebih terukur, sehingga pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana *output* dan *outcome* pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan penguatan program ini, diharapkan penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan yang terarah, pengendalian yang konsisten, serta evaluasi yang objektif akan menjadi kunci bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan Bappeda untuk memastikan adanya keselarasan, keterpaduan, dan konsistensi antara kebijakan pembangunan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Program ini menjadi wadah penting dalam mengharmoniskan arah kebijakan pembangunan agar sesuai dengan prioritas nasional, kebutuhan regional, serta aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, RKPD, dan RKP, serta Renja Perangkat Daerah.

Ruang lingkup kegiatan dalam program ini antara lain meliputi asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah, serta koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan rumpun Bidang di Bappeda. Oleh karena itu indikator kinerja untuk keberhasilan pelaksanaan program ini ada 3, yaitu:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alama dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
c. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, capaian ketiga indikator kinerja tersebut di tahun 2024 sesuai dengan target.

Meskipun demikian, pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan komunikasi antar-pemangku kepentingan, perbedaan prioritas antara pusat, provinsi, dan daerah, serta belum optimalnya integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa proses koordinasi hanya bersifat formalitas, sehingga hasil sinkronisasi belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan program ini perlu difokuskan pada penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang lebih efektif. Sinkronisasi juga perlu diperluas tidak hanya dalam hal dokumen, tetapi juga dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan program strategis yang berfungsi mendukung proses pengambilan kebijakan pembangunan melalui kajian ilmiah, riset, serta inovasi yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Program ini dilaksanakan oleh Bappeda dengan tujuan utama menghadirkan data, informasi, serta rekomendasi kebijakan yang akurat, relevan, dan aplikatif. Ruang lingkup Program Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaran pemerintahan dan pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangana bidang sosial dan kependudukan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah dapat memiliki instrumen analisis yang lebih tajam untuk memahami permasalahan pembangunan, merumuskan solusi yang efektif, serta mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diambil.

Signifikansi program ini terletak pada perannya dalam menyediakan dasar yang objektif dan ilmiah dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan adanya penelitian dan pengembangan yang memadai, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat *trial and error*, serta meningkatkan efektivitas program/kegiatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pembangunan. Selain itu, program ini juga mendorong lahirnya inovasi daerah yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. Keberhasilan pelaksanaan program ini pada Bappeda Kabupaten Pemalang diukur dengan dua indikator, yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan Indeks Inovasi Daerah, yang secara umum tercapai sesuai target di tahun 2024.

Namun demikian, pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia peneliti dan analis kebijakan, keterbatasan anggaran riset, serta masih rendahnya pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Di samping itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta komunitas inovasi di daerah belum optimal, sehingga potensi riset yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan program ini perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan Litbang daerah, peningkatan kompetensi aparatur dalam melakukan penelitian dan analisis kebijakan, serta pengembangan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang memastikan hasil penelitian benar-benar termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah. Dengan penguatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, diharapkan kebijakan pembangunan di kabupaten/kota dapat semakin berbasis bukti, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Pada akhirnya, program ini akan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya capaian evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2024 dan capaian Renstra Bappeda dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
	URUSAN PERENCANAAN										
05.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP**	**Skor**	**58,00**	**54,62**	**56,00**	**56,09**	**100,16**	**57,00**	**55,50**	**95,69**
		IRB	**Indeks**	**50,00**	**43,00**	**46,00**	**-**	**-**	**48,00**	**45,00**	**90,00**
5.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun*	*Dokumen*	*77*	*46*	*15*	*15*	*100*	*16*	*62*	*80,52*
	Hasil Kegiatan	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	12	7	2	2	100	3	10	83,33
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	30	1	5	5	100	6	30	100,00
5.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun*	*Dokumen*	*330*	*198*	*66*	*66*	*100*	*66*	*264*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	45/60	45/36	45/12	45/12	100	45/12	45/48	100,00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	300	180	60	60	100	60	240	80,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Laporan	5	3	1	1	100	1	5	100,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan SKPD yang tersusun	Laporan	15	9	3	3	100	3	12	80,00
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Dokumen	10	6	2	2	100	2	8	80,00
5.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersedia*	*Dokumen*	*20*	*12*	*4*	*4*	*100*	*4*	*16*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase ketersediaan dokkumen administrasi barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	Dokumen	10	6	2	2	100	2	8	80,00
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	Laporan	10	6	2	2	100	2	8	80,00
5.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia*	*Layanan/Bulan*	*10/60*	*30/36*	*10/12*	*10/12*	*100*	*10/12*	*40/48*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	6/60	6/36	6/12	6/12	100	6/12	6/48	80,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Paket	2/60	2/36	2/12	2/12	100	2/12	2/48	80,00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Paket	5/60	5/36	5/12	5/12	100	5/12	5/48	80,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Paket	3/60	3/36	3/12	3/12	100	3/12	3/48	80,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Paket	1/60	1/36	1/12	1/12	100	1/12	1/48	80,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Dokumen	2/60	2/36	2/12	2/12	100	2/12	2/60	80,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Laporan	60	36	12	12	100	12	48	80,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Laporan	500	300	100	100	100	100	400	80,00
5.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*	*Jenis/bulan*	*4/60*	*4/36*	*4/12*	*4/12*	*100*	*4/12*	*4/48*	80,00
	Hasil Kegiatan	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	80,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Laporan	60	36	12	12	100	12	48	80,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Laporan	4/60	4/36	4/12	4/12	100	4/12	4/48	80,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/ bulan	26/60	26/36	26/12	2612	100	26/12	26/48	80,00
5.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*	*Unit*	*98/5*	*98/3*	*98/1*	*98/1*	*100*	*98/1*	*98/4*	80,00
	Hasil Kegiatan	*Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	100,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	40/5	40/3	40/1	40/1	100	40/1	40/4	80,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	40/5	40/3	40/1	40/1	100	40/1	40/4	80,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	2/5	2/3	2/1	2/1	100	2/1	2/4	80,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
05.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
5.01.02.2.01	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan*	*Dokumen*	*12*	*7*	*2*	*2*	*100*	*3*	*10*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*80,00*
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara hasil konsultasi publik yang tersusun	Berita Acara	7	4	0	0	-	2	6	80,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan hasil forum SKPD yang tersusun	Dokumen	5	3	1	1	100	1	4	80,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang Kab/Kota yang tersusun	Dokumen	7	4	1	1	100	2	6	80,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Dokumen	12	7	4	4	100	3	10	80,00
5.01.02.2.02	*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah*	*Dokumen*	*15*	*9*	*3*	*3*	*100*	*3*	*12*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*-*	*100*	*100*	*100,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
		digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah									
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan database SIPD yang tersusun	Dokumen	10	6	2	2	100	2	8	80,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang tersusun	Buku	5	3	1	1	100	1	4	80,00
5.01.02.2.03	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah laporan evaluasi RKPD yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah*	*Dokumen*	*10*	*6*	*2*	*2*	*100*	*2*	*8*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase laporan evaluasi RKPD yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD yang tersusun	Dokumen	12	4	4	4	100	4	12	80,00
05.01.03	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**%**	**100**	**100**	**79**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100,00**
		Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**
		Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
		dokumen perencanaan pembangunan daerah									
5.01.03 .2.01	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Sosbud dan PMM yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah*	*Dokumen*	*280*	*168*	*56*	*56*	*100*	*56*	*224*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PMM yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.01.03 .2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Berita Acara hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang tersusun	Dokumen	660	396	132	132	100	132	528	80,00
5.01.03 .2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang tersusun	Laporan	440	264	88	-	-	88	352	80,00
5.01.03 .2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang tersusun	Laporan	20	12	4	4	100	4	16	80,00
5.01.03 .2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Berita Acara hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	Dokumen	120	72	24	24	100	24	96	80,00
5.01.03 .2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Berita Acara hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang	Dokumen	180	108	36	36	100	36	144	80,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia	pembangunan manusia yang tersusun (Renstra, Renja)									
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	Dokumen	120	72	24	24	100	24	96	80,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	Dokumen	20	12	4	4	100	4	16	80,00
5.01.03.2.02	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah*	*Dokumen*	*70*	*42*	*14*	*14*	*100*	*14*	*56*	*100,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Berita Acara hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang tersusun (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	80	48	16	16	100	16	64	80,00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang tersusun	Dokumen	10	6	2	2	100	2	8	80,00
5.01.03.2.03	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah*	*Dokumen*	*60*	*36*	*12*	*12*	*100*	*12*	*48*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Berita Acara hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang tersusun (Renstra, Renja)	Dokumen	180	108	36	36	100	36	144	80,00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun	Dokumen	20	12	4	4	100	4	16	80,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Berita Acara hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	120	72	24	24	100	24	96	80,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA yang tersusun	Dokumen	120	72	24	24	100	24	96	80,00
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
05.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan**	**%**	**86**	**83**	**84**	**84**	**100**	**85**	**84**	**97,67**
		Indeks Inovasi Daerah	**Indeks**	**30,6**	**30,45**	**30,50**	**30,50**	**100**	**30,55**	**30,5**	**99,67**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	12=11/5
5.05.02.2.03	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*			-			0				
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang tersusun*	*Dokumen*	*55*	*33*	*11*	*11*	*100*	*11*	*44*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang tersusun tepat waktu dan terpublikasi*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian bidang Lingkungan Hidup yang tersusun	Dokumen	5	3	1	1	100	1	4	80,00
5.05.02.2.04	*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*										
	Keluaran Kegiatan	*Jumlah dokumen hasil pengembangan inovasi dan teknologi*	*Unit*	*190*	*114*	*38*	*38*	*100*	*38*	*152*	*80,00*
	Hasil Kegiatan	*Persentase hasil inovasi dan teknologi yang terpublikasi*	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*80,00*
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan pengembangan dan perekayasa teknologi dan inovasi yang tersusun	Dokumen	10	6	2	2	100	2	8	80,00
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah kegiatan KKN yang terfasilitasi	Kegiatan	150	90	30	30	100	30	120	80,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	10	6	2	2	100	2	8	80,00
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	10	6	2	2	100	2	8	80,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta penyediaan kajian dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Sebagai institusi perencana, kinerja pelayanan Bappeda tidak hanya diukur dari output dokumen perencanaan yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas proses koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan dukungan teknis yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah. Secara umum, kinerja pelayanan Bappeda dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, kinerja perencanaan pembangunan daerah, yang terlihat dari tersusunnya dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat daerah yang sesuai regulasi, tepat waktu, serta konsisten dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen perencanaan tersebut juga semakin menunjukkan kualitasnya dengan adanya integrasi data dan *evidence-based policy*. Kedua, kinerja koordinasi dan sinkronisasi, di mana Bappeda berperan sebagai fasilitator utama dalam forum Musrenbang, forum perangkat daerah, hingga konsultasi publik. Tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam forum tersebut menjadi indikator penting keberhasilan pelayanan Bappeda dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ketiga, kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan, yang ditunjukkan melalui tersusunnya laporan kinerja pembangunan seperti evaluasi RKPD. Melalui instrumen ini, Bappeda berkontribusi dalam memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, sekaligus menyediakan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di periode berikutnya. Keempat, kinerja pelayanan penelitian, pengembangan, dan inovasi, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis kajian ilmiah. Kinerja ini dapat dilihat dari jumlah dan kualitas penelitian yang dilaksanakan, serta sejauh mana hasil kajian termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, kinerja pelayanan Bappeda diukur melalui pencapaian dua tujuan Bappeda yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan meningkatkan pelayanan kelitbangan yang prima, serta pencapaian dua sasaran, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah, dan meningkatnya kualitas pelayanan kelitbangan. Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.2.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14	15
1	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	-	v	-	100	100	100	-	100	-	100	-	-
2	Nilai SAKIP Kabupaten (komponen perencanaan)	Angka	-	v	-	22,30	22,32	22,34	-	22,35	-	22,34	-	-
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kelitbangan	Indeks	-	v	-	83,2	83,4	83,6	-	86,88	-	83,6	-	-
4	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik	%	-	v	-	41,46	48,78	56,09	-	63,40	-	56,09	-	-
5	Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	%	-	v	-	84	85	86	-	84	-	86	-	-
6	Nilai SAKIP	Angka	-	-	-	56,00	57,00	58,00	-	67,60	-	58,00	-	-
7	IRB	Indeks	-	-	-	46,00	48,00	50,00	-	68,97	-	50,00	-	-
8	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	-
9	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun	%	-	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14	15
	bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah													
10	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	100	100	100	-	100	-	100	-	-
11	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	%	-	-	-	84	85	86	-	75	-	86	-	-
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	-	-	30,5	30,55	30,6	-	48,61	-	30,6	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Penjelasan kinerja pelayanan Bappeda yang tertera pada tabel 2.2 di atas sebagai berikut:

1. Tingkat Keselarasan antara Program RKPD dengan RPJMD

Indikator Tingkat Keselarasan antara Program RKPD dengan RPJMD digunakan untuk mengukur konsistensi perencanaan pembangunan tahunan terhadap dokumen perencanaan jangka menengah daerah. RKPD disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari RPJMD, sehingga keselarasan di antara keduanya menjadi ukuran penting untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat keselarasan ini mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD benar-benar merupakan turunan langsung dari strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD. Semakin tinggi persentase keselarasan, semakin kuat konsistensi perencanaan daerah, sehingga pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan terhindar dari tumpang tindih maupun program yang tidak mendukung prioritas pembangunan jangka menengah.

Pada tahun 2024 realisasi indikator ini sebesar 100%, yang artinya bahwa program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 seluruhnya dijabarkan dalam RKPD tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil menjaga konsistensi arah pembangunan, meningkatkan akuntabilitas, dan menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

2. Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Perencanaan)

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menentukan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi tersebut. SAKIP terdiri dari 5 komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja.

Indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan kinerja pemerintah daerah. Komponen perencanaan dalam SAKIP menekankan pentingnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, hingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana proses perencanaan telah disusun secara terukur, konsisten, dan berbasis hasil (outcome). Perencanaan yang baik ditandai dengan adanya kejelasan sasaran strategis, indikator kinerja yang relevan, serta keterkaitan yang kuat antara RPJPD, RPJMD, hingga RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Dengan demikian, komponen perencanaan dalam SAKIP menjadi dasar penting bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Realiasasi Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 22,68, dimana angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 22,30. Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan, baik dari sisi keselarasan dengan tujuan pembangunan, konsistensi antar dokumen, maupun kemampuan menjawab permasalahan daerah.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kelitbangan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kelitbangan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga lainnya, terhadap kualitas layanan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan hasil litbang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. IKM pada layanan kelitbangan mencerminkan persepsi pengguna layanan terhadap aspek-aspek penting, seperti kemudahan akses layanan, ketepatan waktu, relevansi hasil kajian, kualitas data/informasi yang dihasilkan, kompetensi aparatur, serta manfaat hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai IKM, semakin menunjukkan bahwa layanan kelitbangan telah memberikan kepuasan kepada pengguna, baik dalam hal prosedur, proses, maupun hasil.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kelitbangan juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja Bappeda dalam melaksanakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar, yaitu penelitian dan pengembangan. Dengan adanya pengukuran IKM, Bappeda memperoleh umpan balik yang objektif dari pengguna layanan, sehingga dapat melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hasil litbang benar-benar termanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Realisasi indikator ini sebesar 83,35 di tahun 2024, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 83,2. Hal ini berarti layanan litbang cukup mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* serta berkontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

4. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik

Indikator *Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik* digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan OPD, seperti Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, merupakan turunan langsung dari RPJMD dan RKPD, sehingga kualitasnya sangat menentukan konsistensi serta keterpaduan perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Kategori perencanaan Perangkat Daerah yang Baik di sini dimaknai dengan OPD dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan > 21.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pada tahun 2024 realisasi indikator Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik mencapai 63,41%, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 41,46%. Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak perangkat daerah telah mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, sehingga arah pembangunan daerah lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

5. Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan

Indikator *Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan* digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, maupun inovasi daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan dan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program/kegiatan, maupun praktik pembangunan di lapangan. Indikator ini penting karena menunjukkan keberhasilan fungsi kelitbangan bukan hanya pada sisi produktivitas kajian, tetapi juga pada tingkat pemanfaatannya. Suatu hasil kelitbangan baru bernilai strategis apabila rekomendasinya diadopsi dalam kebijakan, mendukung penyelesaian permasalahan daerah, atau memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indikator *Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan* ini berfungsi ganda: pertama, sebagai ukuran efektivitas kinerja Bappeda dalam menghasilkan litbang yang bermanfaat; kedua, sebagai alat evaluasi sejauh mana hasil penelitian dan pengembangan mampu menjadi bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Realisasi indikator ini sebesar 90% di tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan yaitu 84%. Persentase yang tinggi menggambarkan bahwa hasil kajian litbang telah relevan, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga mendorong terwujudnya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Bappeda pada tahun 2024 tercapai sebesar 67,60 atau kategori Baik. Capaian ini lebih tinggi dari target, yaitu 56. Dengan kategori Baik, artinya sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan, dokumen perencanaan dan pelaporan sudah tersedia sesuai aturan, namun masih banyak fokus pada *output* dan belum sepenuhnya berbasis *outcome*.

7. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024, Bappeda memperoleh nilai 68,97 yang berada pada kategori B (Baik). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 46, dan menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Bappeda sudah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, penguatan akuntabilitas, serta penataan organisasi. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan ukuran penting untuk menilai sejauh mana konsistensi, keterpaduan, dan sinkronisasi antara rencana kerja perangkat daerah rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih makro, seperti RPJMD dan RKPD. Tanpa adanya keterpaduan, terdapat risiko terjadinya tumpang tindih program, inefisiensi pembiayaan, dan tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tingkat keselarasan diukur melalui analisis kesesuaian antara program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat keselarasan, semakin mencerminkan bahwa perangkat daerah telah menjalankan fungsi perencanaan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD serta prioritas tahunan dalam RKPD. Realisasi indikator *tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah* pada tahun 2024 sebesar 100%.

9. Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sama halnya indikator pada poin ke-8 di atas, indikator ini tidak hanya menggambarkan kualitas teknis perencanaan perangkat daerah, tetapi juga menunjukkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pembangunan. Hasil pengukuran indikator ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki proses perencanaan, memperkuat integrasi program, dan memastikan terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Realisasi indikator *tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah* pada tahun 2024 sebesar 100%.

10. Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa:

a. seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah rumpun pemerintahan dan pembangunan manusia sudah konsisten dengan RPJMD maupun RKPD.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. program dan kegiatan yang disusun telah sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga potensi terjadinya tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran dapat diminimalisir.
c. dampaknya, pembangunan infrastruktur berjalan lebih terarah, saling mendukung lintas sektor, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

11. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Indikator *Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan* merupakan ukuran penting untuk menilai sejauh mana hasil kajian, penelitian, dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak mitra benar-benar dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat keterpaduan antara fungsi kelitbangan dengan fungsi perencanaan. Semakin tinggi persentase pemanfaatan hasil litbang, semakin menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah berbasis bukti (*evidence-based planning*), sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih rasional, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian dan pengembangan yang dimaksud dapat berupa kajian tematik pembangunan, naskah akademik, hasil survei lapangan, analisis data sektoral, maupun rekomendasi kebijakan yang relevan dengan isu-isu strategis daerah. Pemanfaatan hasil litbang ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD, RKPD, maupun dokumen teknis lainnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menjawab permasalahan pembangunan daerah secara tepat sasaran.

Pada tahun 2024, realisasi indikator *Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan* sebesar 90%, lebih tinggi dari targetnya yaitu 84%. Tingginya nilai persentase menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjembatani kesenjangan antara hasil kajian dengan praktik kebijakan, sedangkan nilai yang rendah menjadi sinyal perlunya penguatan integrasi, koordinasi, dan internalisasi hasil litbang ke dalam proses perencanaan pembangunan.

12. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, capaian Kabupaten Pemalang sebesar 48,61 atau kategori "**inovatif".** Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah berhasil menerapkan pembaharuan (inovasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, atau urusan daerah lainnya, serta berhasil mendorong perubahan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur perencana pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, Bappeda menghadapi sejumlah isu penting yang perlu mendapatkan perhatian. Isu-isu tersebut berhubungan erat dengan dinamika pembangunan daerah, kompleksitas permasalahan lintas sektor, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Beberapa isu penting yang dimaksud antara lain:

1. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Potret perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang masih diwarnai dengan adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan implementasi di lapangan. Proses perencanaan juga belum sepenuhnya berbasis data, bukti, dan kajian mendalam (*evidence-based planning*). Dalam praktiknya, dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD terkadang belum sepenuhnya didukung data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi lintas sektor. Hal ini menyebabkan perencanaan berpotensi bias terhadap kepentingan sektoral atau hanya menekankan aspek prosedural. Dampaknya, beberapa program yang disusun kurang tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat maupun isu strategis pembangunan. Untuk itu, penguatan sistem data perencanaan daerah, integrasi dengan Satu Data Indonesia, serta penggunaan analisis berbasis teknologi (*big data analytics*) menjadi kunci agar arah pembangunan lebih presisi.

Kualitas perencanaan pembangunan ini juga tercermin dari Nilai SAKIP Kabupaten Pemalang pada Komponen Perencanaan, yang disandingkan dengan beberapa kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kabupaten Pemalang sebesar 22,35, lebih tinggi daripada Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Namun lebih rendah daripada realisasi Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, bahkan Provinsi Jawa Tengah yang nilainya mencapai 25,71. Perbandingan dengan daerah lain ini mengindikasikan terdapat gap kinerja dalam aspek perencanaan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas inidkator kinerja, integrasi dokumen perencanaan, pemanfaatan hasil evaluasi, serta penggunaan teknologi informasi. Selengkapnya perbandingan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan disajikan dalam Gambar 2.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 2.1.
Perbandingan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Tahun 2024

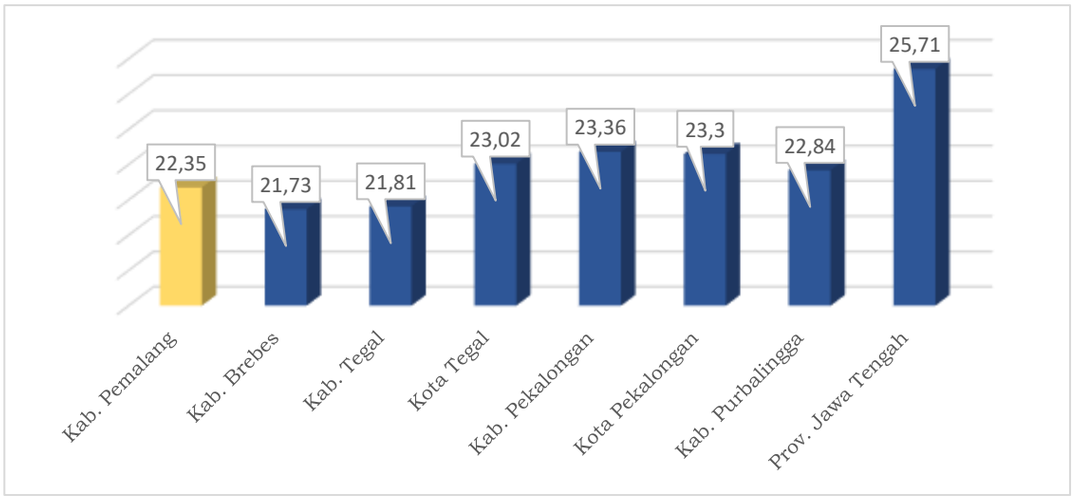

Sumber : Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 (Kementerian PAN RB)

Selain sebagai koordinator perencanaan pembangunan kabupaten, Bappeda sebagai perangkat daerah juga masih perlu ditingkatkan lagi kualitas perencanaannya. Posisi Bappeda relatif terhadap OPD lain ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Perbandingan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Tahun 2024 pada Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Terbaik di Kabupaten Pemalang

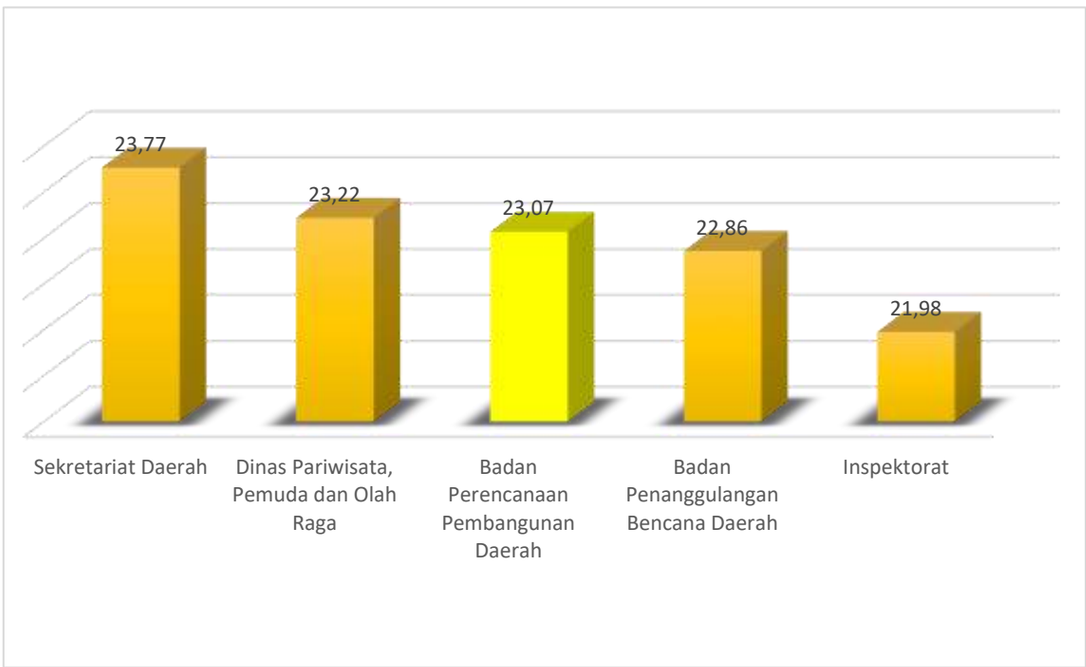

Sumber : Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Sinkronisasi Perencanaan Antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Hubungan perencanaan pembangunan antar level pemerintahan seringkali menghadapi masalah harmonisasi. Program pembangunan daerah belum sepenuhnya selaras dengan prioritas nasional maupun provinsi. Akibatnya, muncul risiko tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, hingga inefisiensi penggunaan anggaran. Contoh nyata adalah program infrastruktur yang tidak terintegrasi antara pusat dan daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan hasil pembangunan.

3. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Salah satu tantangan besar Bappeda adalah memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang ditetapkan. Namun, fungsi pengendalian dan evaluasi sering kali masih terbatas pada laporan administratif, belum sepenuhnya menjadi instrumen pengambil keputusan berbasis kinerja. Keterlambatan data, lemahnya indikator capaian, serta rendahnya pemanfaatan sistem elektronik dalam monev mengakibatkan umpan balik bagi perbaikan kebijakan tidak selalu tepat waktu. Jika tidak ditangani, hal ini dapat membuat pembangunan berjalan tanpa kontrol yang memadai.

4. Kapasitas dan Kualitas SDM Perencana dan Litbang

SDM perencana dan Litbang merupakan aset utama Bappeda dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah jumlah tenaga perencana dan juga Litbang yang terbatas serta belum merata kompetensinya. Banyak perencana yang belum memiliki keahlian atau keterampilan teknis dalam analisis data, evaluasi kebijakan, serta pemanfaatan teknologi digital. Dampaknya, kualitas perencanaan dan kajian yang dihasilkan belum maksimal. Hal ini diperparah dengan tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM. Sementara itu, SDM Litbang juga sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Saat ini Bappeda belum memiliki Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maupun Teknisi Penelitian dan Perekayasaan.

5. Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Fungsi litbang Bappeda seharusnya menjadi sumber utama ide, gagasan, dan bukti ilmiah untuk kebijakan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, hasil kajian litbang sering hanya berhenti pada laporan tanpa tindak lanjut yang nyata dalam dokumen perencanaan. Rendahnya pemanfaatan hasil litbang menyebabkan kebijakan pembangunan cenderung normatif dan kurang inovatif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Padahal, banyak permasalahan pembangunan memerlukan solusi berbasis riset dan inovasi.

6. Kualitas Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah menggambarkan tingkat kreativitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan terobosan baru. Nilai yang masih rendah menunjukkan bahwa budaya kerja inovatif belum sepenuhnya melekat pada organisasi pemerintah daerah, termasuk Bappeda. Dampaknya, pelayanan publik maupun perencanaan pembangunan berjalan secara konvensional dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Rendahnya inovasi juga berpengaruh pada daya saing daerah dalam menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Keterlibatan Publik dalam Proses Perencanaan

Partisipasi masyarakat merupakan roh dari perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, forum Musrenbang sering kali bersifat formalitas, hanya sebatas menampung usulan tanpa mekanisme tindak lanjut yang kuat. Keterlibatan masyarakat juga masih didominasi kelompok tertentu, sehingga representasi aspirasi publik kurang merata. Hal ini menimbulkan risiko rendahnya legitimasi kebijakan pembangunan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.

Isu-isu tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bappeda untuk memperkuat perannya dalam mengoordinasikan, menyinergikan, serta mengawal kualitas pembangunan daerah. Dengan penanganan yang tepat, Bappeda dapat semakin berperan strategis sebagai *think tank* pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah, diperlukan mekanisme penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dalam dokumen Renja diperlukan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah. Melalui review ini, rencana kerja dapat dikaji ulang agar lebih tajam, terukur, realistis, serta didukung pendanaan dan indikator kinerja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, Renja yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Selengkapnya hasil review disajikan pada tabel 2.3.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				**11.948.106.900,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**				**13.017.270.790,00**	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				**11.948.106.900,00**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				**13.017.270.790,00**	
	Perencanaan				**10.060.737.180,00**	**Perencanaan**				**11.742.270.790,00**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		1. Nilai Sakip; 2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	57 Nilai 48,00 Irb	7.865.432.680,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Nilai Sakip; 2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	57 Nilai 48,00 IRB	9.558.816.290,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	16 Dokumen	**19.855.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	16 Dokumen	14.930.830,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	11.728.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.478.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4.821.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	4.452.830,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi keuangan	34/12 Orang/Bulan	**5.732.346.080,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi keuangan	34/12 Orang/Bulan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34/12 Orang/bulan	5.718.264.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34/12 Orang/bulan	5.897.537.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	7.142.580,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	7.142.280,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.302.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.301.960,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.100.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.537.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.911.200,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	4 Dokumen	**1.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	4 Dokumen		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	500.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	554.400,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	500.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya	60 Orang	**226.228.800,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya	50 Orang		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	80.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	155.453.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	9/12 Layanan/ Bulan	**752.996.100,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	9/12 Layanan/ Bulan		
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 Paket	10.747.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 Paket	128.430.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	42.028.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	61.946.340,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	16.370.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	46.809.100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	200.340.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	271.700.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24.434.200,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	46.330.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	74.550.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	297.076.200,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	444.950.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan	4 Unit	**25.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan	4 Unit		
	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	106.157.500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	538.390.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3/12 Jasa/Bulan	**806.890.700,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3/12 Jasa/Bulan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.889.700,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.255.080,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.380.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240.379.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	564.621.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	567.612.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	90 Unit	**301.116.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	90 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	200.450.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	293.010.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	50.496.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	89.066.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.170.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	449.800.000,00	
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**		Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat keselarasan antara	**100%**	**1.035.050.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**		Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat keselarasan antara	**100%**	750.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEMBANGUNAN DAERAH		program RKPD dengan RPJMD			**PEMBANGUNAN DAERAH**		program RKPD dengan RPJMD			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	3 Dokumen	**848.900.000,00**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	3 Dokumen		
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	32.650.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	50.000.000,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	40.900.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	150.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	775.350.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	550.000.000,00	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	**145.000.000,00**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen		
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	85.000.000,00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	80.000.000,00	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	60.000.000,00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	50.000.000,00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan evaluasi RKPD yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	**41.150.000,00**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**		Jumlah laporan evaluasi RKPD yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembangunan Daerah					
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	41.150.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	50.000.000,00	
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	**1.160.254.500,00**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerahmbangunan daerah	100%	**566.454.500,00**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Sosbud dan PMM yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daera	162 Dokumen	**626.454.500,00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Sosbud dan PMM yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daera	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66 Dokumen	78.279.500,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81 Dokumen	171.249.500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	64.762.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	54 Dokumen / Laporan	150.844.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	66 Laporan	115.098.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Dokumen / Laporan	244.361.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	48 Dokumen	**293.300.000,00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	98.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	64 Dokumen	80.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	64 Laporan	80.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	64 Laporan	80.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	60 Laporan	195.300.000,00	Koordinasi Pelaksanaan	Kab. Pemalang, Semua	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	24 Laporan	160.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kecamatan, Semua Kel/Desa	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kecamatan, Semua Kel/Desa	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	36 Dokumen	**240.500.000,00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18 Laporan	41.680.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18 Laporan	150.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	18 Laporan	41.820.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	18 Laporan	60.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	70.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	70.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	24 Laporan	87.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	24 Laporan	87.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**1.887.369.720,00**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				1.275.000.000,00	
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**1.887.369.720,00**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				1.275.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				**150.000.000,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**				230.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				**460.000.000,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**					
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	150.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	120.000.000,00	
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	130.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	110.000.000,00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				**527.369.720,00**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**					
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	200.000.000,00	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	250.000.000,00	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	20 Laporan	50.000.000,00	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	20 Laporan	175.000.000,00	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	4 Laporan	70.000.000,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	4 Laporan	35.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Daerah yang Bersifat Inovatif		Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	70.000.000,00	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	60.000.000,00	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 Laporan	137.369.720,00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 Laporan	525.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja OPD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan reses. Untuk perencanaan tahun 2026, dalam forum-forum tersebut tidak ada usulan khusus untuk Bappeda (urusan perencanaan dan kelitbangan).

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional merupakan langkah penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Melalui telaahan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi isu strategis, program prioritas, serta target pembangunan nasional yang perlu ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga menjadi instrumen sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Telaahan ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dikenal dengan nama Asta Cita sebagaimana tertuang pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1.
Visi Misi Presiden

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Kedepalan Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.2.
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

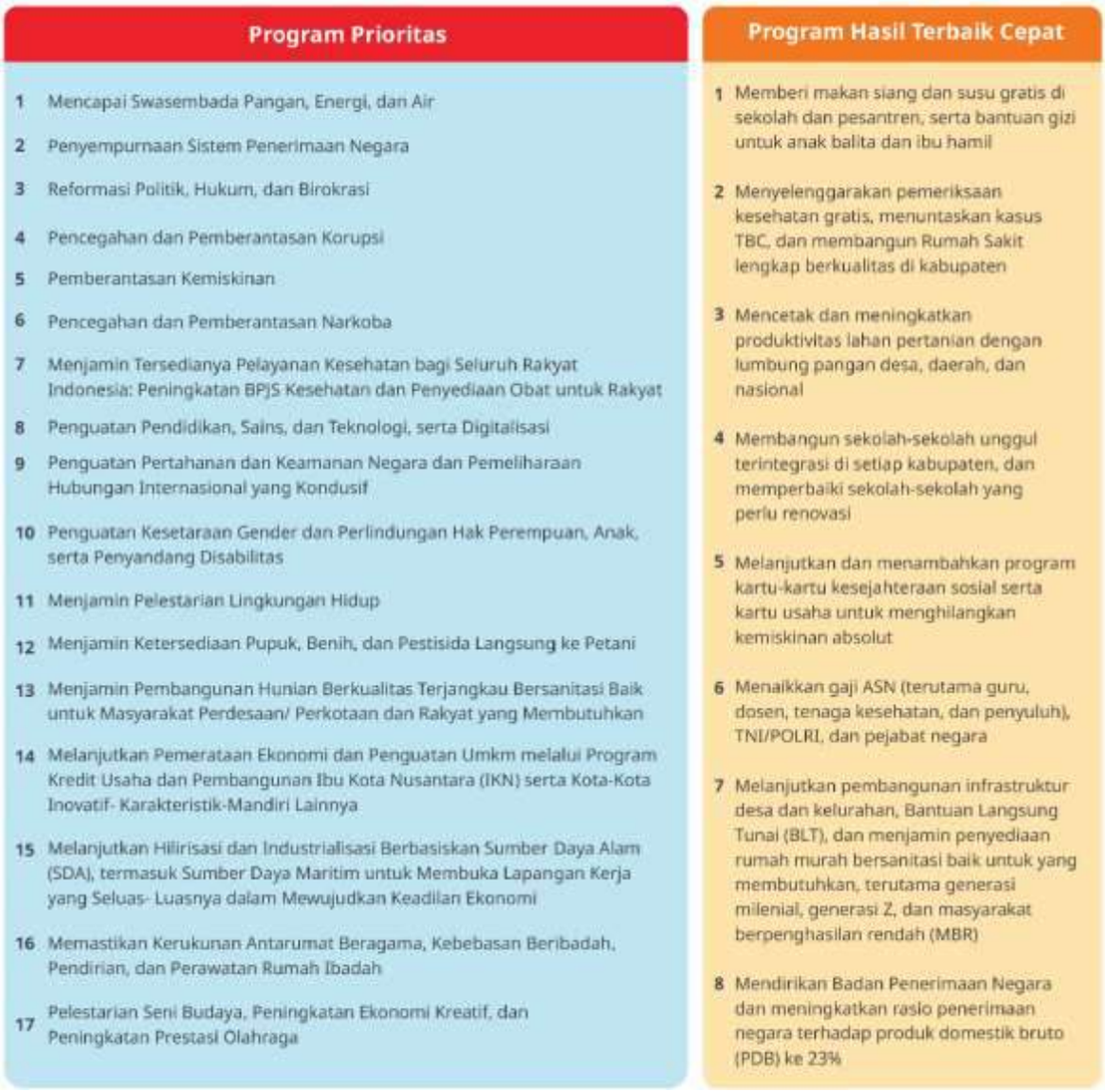

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Tema pembangunan nasional tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 adalah "*Kedaulatan Pangan dan energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Insklusif",* dengan prioritas seperti tercantum pada Gambar 3.3. Prioritas nasional tahun 2026 yang menjadi acuan bagi Bappeda untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan adalah ***Reformasi Birokrasi***. Dalam RKP 2026 reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk membentuk pemerintahan yang adaptif, melayani secara cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintahan yang efektif diharapkan mampu mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 3.3
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Kemen PPN/Bappenas

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, serta urusan penelitian dan pengembangan maka arah kebijakan dan prioritas Bappeda dirumuskan untuk mendukung pencapaian Asta Cita ke-7, yaitu *memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan,* serta dua program prioritas, yaitu: *Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi*; dan *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.*

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, Bappeda memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda **reformasi birokrasi** di daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi perencanaan, pengkajian, serta inovasi kebijakan yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam aspek perencanaan pembangunan, Bappeda memastikan terselenggaranya proses perencanaan yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Hal ini dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang konsisten dengan kerangka kebijakan nasional maupun daerah, penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan berbasis digital untuk meningkatkan akurasi data dan memperluas akses informasi publik. Sementara dalam aspek penelitian dan pengembangan (Litbang), Bappeda berperan menghasilkan kajian strategis, inovasi kebijakan, serta rekomendasi berbasis data yang mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih objektif. Melalui kegiatan Litbang, Bappeda dapat mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara mendalam, menyusun alternatif solusi, serta mendorong implementasi inovasi daerah yang mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi.

Bappeda memiliki peran strategis dalam mendukung upaya **pencegahan dan pemberantasan korupsi**. Peran tersebut tidak diwujudkan melalui fungsi penegakan hukum secara langsung, melainkan melalui

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penguatan tata kelola perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, antara lain:

1. Perencanaan yang transparan dan berbasis data.
   Menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terbuka, berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*), sehingga meminimalkan potensi manipulasi program dan kegiatan.
2. Integrasi dengan sistem pencegahan korupsi nasional.
   Mengintegrasikan kebijakan perencanaan daerah dengan agenda nasional, seperti *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)* KPK, yang menekankan pada akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
3. Penguatan SAKIP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
   Mendorong perangkat daerah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis kinerja, serta memperkuat manajemen risiko dalam pembangunan daerah.
4. Fasilitasi partisipasi publik dalam proses perencanaan.
   Menyelenggarakan forum perencanaan partisipatif (Musrenbang, konsultasi publik, forum perangkat daerah) yang memungkinkan masyarakat turut mengawasi prioritas pembangunan, sehingga memperkecil peluang praktik koruptif.
5. Mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
   Mengembangkan sistem informasi perencanaan yang terbuka, terintegrasi, dan dapat diakses publik, sebagai wujud keterbukaan informasi dan mekanisme pencegahan korupsi berbasis teknologi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Bappeda Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan inovasi dan teknologi.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, serta penguatan inovasi. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, Bappeda dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan kebijakan nasional, serta mampu menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Berdasarkan analisis terhadap Rancangan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran Renja Bappeda tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Daerah	Indeks	84,5645
	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan regulasi	%	100
	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional	%	100
	Meningkatnya implementasi riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53
	Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,48
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	69,40

Tahun 2026 adalah tahun pertama perencanaan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada **penataan sistem dan *baseline***. Tahun pertama ini merupakan landasan pijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, perlu memastikan sistem, data, dan SDM siap sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Penguatan regulasi dan tata kelola perencanaan, yaitu memastikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan memiliki dasar hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
b. Penyusunan *baseline* data dan indikator kinerja pembangunan. Menetapkan titik awal (*baseline*) untuk semua indikator Renstra dan RPJMD.
c. Penguatan kapasitas perencana, baik perencana di Bapperida maupun OPD.
d. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Strategi tersebut kemudian dioperasionalkan melalui beberapa arah kebijakan, yaitu

a. Menyusun pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
b. Menginventarisasi dan menetapkan *baseline* data indikator makro serta indikator sektoral.
c. Membangun/memperkuat database perencanaan daerah yang terintegrasi lintas OPD.
d. Melaksanakan pelatihan teknis perencanaan bagi pejabat fungsional perencana di Bapperida maupun OPD.
e. Mengoperasionalkan sistem informasi perencanaan (SIPD) secara konsisten dan terstandar.
f. Menetapkan *quick wins* awal (program percontohan) yang mudah diukur untuk memperlihatkan capaian.

Sejalan dengan tujuan dan target sasaran Rancangan Renstra untuk tahun 2026 tersebut, berdasarkan rumusan isu-isu penting pada bab sebelumnya, maka kegiatan Bappeda difokuskan untuk:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk memastikan arah pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan, penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi adaptif menjadi strategi kunci agar perencanaan benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

2. Sinkronisasi Perencanaan Antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras dan efisien. Upaya peningkatan sinkronisasi dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dan pedoman perencanaan, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital, optimalisasi forum koordinasi seperti Musrenbang, serta penyelarasan indikator kinerja pembangunan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kolaborasi SDM perencana juga menjadi kunci agar proses sinkronisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang terpadu, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih terarah, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Strategi yang dapat ditempuh meliputi penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi melalui e-monev terintegrasi, peningkatan kapasitas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

SDM perencana, serta penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, hasil evaluasi harus dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan kebijakan, sehingga pengendalian dan evaluasi tidak hanya menjadi mekanisme pelaporan, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan Litbang

SDM Perencana dan Litbang memiliki peran strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan yang berbasis data, kajian, dan inovasi. Untuk itu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM menjadi langkah penting yang harus ditempuh. Strateginya meliputi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguasaan teknologi informasi dan metode analisis modern, serta penguatan kapasitas dalam penelitian, pengembangan, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, penambahan jumlah SDM juga sangat dibutuhkan, terutama SDM Litbang. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta juga menjadi strategi penting untuk memperluas wawasan dan memperkaya kualitas hasil perencanaan dan Litbang. Dengan langkah-langkah tersebut, SDM perencana dan Litbang dapat berkembang menjadi lebih adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) sangat penting agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi yang dapat ditempuh antara lain memperkuat mekanisme *evidence-based policy* dengan mewajibkan kajian Litbang sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan, meningkatkan diseminasi hasil penelitian melalui forum kebijakan dan media publikasi, serta memperluas kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, dan komunitas. Selain itu, perlu dibangun sistem database hasil Litbang yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, serta mendorong monitoring atas implementasi rekomendasi yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil Litbang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inovatif, dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

Peningkatan kualitas inovasi daerah sangat penting untuk mendorong daya saing dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Strategi yang dapat ditempuh meliputi penguatan kapasitas SDM aparatur dan Litbang dalam mengembangkan ide serta solusi kreatif; penyediaan ekosistem inovasi yang kondusif melalui

https://jdih.pemalangkab.go.id/

regulasi, insentif, dan dukungan pendanaan; serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat perlu diperluas agar inovasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata. Diseminasi serta replikasi praktik inovasi yang berhasil juga menjadi langkah penting untuk memastikan inovasi tidak berhenti pada skala kecil, melainkan mampu memberi dampak luas bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

7. Meningkatkan Keterlibatan Publik dalam Proses Perencanaan

Keterlibatan publik dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Strategi yang dapat ditempuh antara lain memperkuat mekanisme partisipatif seperti Musrenbang dan forum konsultasi publik yang lebih inklusif; memanfaatkan teknologi digital melalui pengembangan aplikasi *e-musrenbang* atau platform aspirasi *online*; serta mendorong keterlibatan kelompok masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan komunitas lokal dalam setiap tahapan perencanaan. Selain itu, transparansi informasi dan penyediaan akses data pembangunan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih berkualitas. Dengan langkah-langkah tersebut, proses perencanaan akan lebih partisipatif, akuntabel, dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

3.3. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda dalam Renja disusun sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Bappeda juga merupakan instrumen operasional dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan. Melalui perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat, Bappeda diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong tercapainya kinerja pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel.

Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati yang dioperasionalkan ke dalam Rancangan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, dan perumusannya mendasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2026, Bappeda Kabupaten Pemalang merencanakan 4 program, 18 kegiatan dan 68 subkegiatan yang disajikan pada Tabel 3.2.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Bappeda Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01	**URUSAN PERENCANAAN**								
05.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai regulasi Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	-	100	7.846.11.000,00	-		-	8.187.384.660,00
5.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		-		9.691.500,00	-		-	15.242.580,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang,	7 Dokumen	3.874.000,00	DAU		-	8.142.580,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kel/Desa	9 Laporan	3.317.500,00	DAU		-	4.100.000,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Pemalang, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	2.500.000,00	DAU		-	3.000.000,00
5.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-	-	-	6.279.073.200,00	-	-	-	6.016.519.080,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang,	41/12 Orang/Bulan	6.272.864.000,00	DAU		-	6.000.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.025.000,00	DAU		-	8.142.580,00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.699.200,00	DAU		-	2.537.000,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.880.000,00	DAU		-	3.302.500,00
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	605.000,00	DAU		-	2.537.000,00
5.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-	-	-	713.000,00	-		-	5.074.000,00
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	363.000,00	DAU		-	2.537.000,00
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	350.000,00	DAU		-	2.537.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	-	-	*0,00*	-		-	*133.300.000,00*
5.01.01.2.5.10	Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 orang	-	DAU		-	133.300.000,00
5.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	-	-	*541.373.800,00*	-		-	*859.900.000,00*
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	11.915.000,00	DAU		-	70.000.000,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	38.411.300,00	DAU		-	45.900.000,00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	23.570.000,00	DAU		-	23.000.000,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang tersedia	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	163.700.000,00	DAU		-	200.000.000,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua	6 Paket	20.427.500,00	DAU		-	31.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12.000.000,00	DAU		-	19.000.000,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	52.500.000,00	DAU		-	57.000.000,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	216.850.000,00	DAU		-	304.000.000,00
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.000.000,00	DAU		-	3.000.000,00
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	-	DAU		-	107.000.000,00
5.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	-	-	19.600.000,00	-		-	34.728.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	12.000.000,00	DAU		-	12.728.000,00
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	7.600.000,00	DAU		-	22.000.000,00
5.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	-	715.154.500,00	-		-	821.001.000,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.027.500,00	DAU		-	2.000.000,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	228.007.000,00	DAU		-	247.380.000,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	486.120.000,00	DAU		-	571.621.000,00
5.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	-	-	280.509.000,00	-		-	301.620.000,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Kab. Pemalang,	40 Unit	227.675.000,00	DAU		-	207.450.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	38.994.000,00	DAU		-	57.000.000,00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	13.840.000,00	DAU		-	37.170.000,00
05.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**								
5.01.02.2.01	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	-	-	-	233.854.500,00	-		-	868.900.000,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	23.487.000,00	DAU		-	37.650.000,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	66.893.500,00	DAU		-	45.900.000,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	5 Dokumen	143.474.000,00	DAU		-	785.350.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
5.01.02.2.02	*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	-	-	-	29.520.000,00	-		-	165.000.000,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	19.520.000,00	DAU		-	95.000.000,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Buku	10.000.000,00	DAU		-	70.000.000,00
5.01.02.2.03	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	-	-	-	33.375.500,00	-		-	51.150.000,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil Evaluasi kinerja Pembangunan daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	33.375.500,00	DAU		-	51.150.000,00
05.01.03	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**				750.000.000,00	-		-	1.082.454.500,00
5.01.03.2.01	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	-	-	-	300.000.000,00	-		-	466.454.500,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Dokumen	68.854.000,00	DAU		-	142.250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91 Laporan	115.643.000,00	DAU		-	159.730.000,00
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	115.503.000,00	DAU		-	164.474.500,00
5.01.03.2.02	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)*	-	-	-	200.000.000,00	-		-	245.000.000,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	45.000.000,00	DAU		-	50.000.000,00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	60.000.000,00	DAU		-	70.000.000,00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 Laporan	95.000.000,00	DAU		-	125.000.000,00
5.01.03.2.03	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	-	-	-	250.000.000,00	-		-	371.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	30.000.000,00	DAU		-	35.000.000,00
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	30.000.000,00	DAU		-	36.713.000,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000,00	DAU		-	35.000.000,00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	80.000.000,00	DAU		-	62.720.000,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Dokumen	20.000.000,00	DAU		-	83.938.000,00
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	20.000.000,00	DAU		-	25.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Laporan	20.000.000,00	DAU		-	67.629.000,00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	20.000.000,00	DAU		-	25.000.000,00
5.05	**URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				250.000.000,00				1.905.000.000,00
05.05.02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**				0,00				1.100.000.000,00
5.05.02.2.02	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	-	-	-	0,00				200.000.000,00
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	DAU		-	100.000.000,00
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	DAU		-	100.000.000,00
5.05.02.2.04	*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-	-	-	0,00	-		-	900.000.000,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	0,00	DAU		-	300.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	0,00	DAU		-	200.000.000,00
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	DAU		-	0,00
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	0,00	DAU		-	400.000.000,00
5.05.03	**Program Riset dan Inovasi Daerah**	-	-	-	250.000.000,00	-		-	805.000.000,00
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	-	-	-	0,00	-		-	355.000.000,00
5.05.03.2.01.03	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	0,00	-		-	355.000.000,00
5.05.03.2.02	*Invensi dan Inovasi*	-	-	-	250.000.000,00	-		-	450.000.000,00
5.05.03.2.02.02	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	75.000.000,00	DAU		-	85.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.05.03.2.02.06	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlingdungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	15.000.000,00	DAU		-	85.000.000,00
5.05.03.2.02.07	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00	DAU		-	20.000.000,00
5.05.03.2.02.09	Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Lembaga/ Pusat/Organisasi Penelitian Lainnya di Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Kegiatan	75.000.000,00	DAU		-	80.000.000,00
5.05.03.2.02.10	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	20.000.000,00	DAU		-	30.000.000,00
5.05.03.2.02.13	Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sistem Informasi	0,00	DAU		-	100.000.000,00
5.05.03.2.02.16	Pemantauan dan Evaluasi Invensi dan Inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan,	2 Laporan	50.000.000,00	DAU		-	50.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Pemalang untuk tahun 2026, beserta kebutuhan pendanaannya. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini dilakukan berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana kerja disusun mengacu pada RPJMD Kebupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sekaligus Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, arah kebijakan RPJPD, hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda, terutama dalam fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

Pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun berdasarkan pagu indikatif, serta mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan konsistensi terhadap prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, Bappeda juga mengintegrasikan hasil forum lintas perangkat daerah, serta hasil Musrenbang sebagai bagian dari proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan yang tersusun dalam bab ini merupakan instrumen pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang holistik, terukur, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Selengkapnya rencana kerja dan pendanaan Bappeda disajikan pada Tabel 4.1.

.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**9.142.865.000,00**							**12.259.889.160,00**
		5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						**9.142.865.000,00**							**12.259.889.160,00**
	5.01	**PERENCANAAN**						**8.892.865.000,00**							**10.354.889.160,00**
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**-**	**-**			**-**	**7.846.115.000,00**						**-**	**8.187.384.660,00**
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi Persentase Layanan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.846.115.000,00**	-	-	-		-	-	**8.187.384.660,00**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi*	2	2	2	2	9.691.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Pemalang,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	2	15.242.580,00
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.874.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Pemalang,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	2 Dokumen	8.142.580,00
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.317.500,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	1 Laporan	4.100.000,00
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P17. Penin gkatan tata kelola pem erintahan yang mampu me nciptakan Good and Clean Gove rnment, pe ningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, p eningkatan profesionali sme ASN, peningkata n budaya kerja	-	4 Laporan	3.000.000,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi*	100	100	100	100	6.279.073.200,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	-	100	6.016.519.080,00
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32/12 Orang/bulan	32/12 Orang/bulan	41/12 Orang/bulan	41/12 Orang/bulan	6.272.864.000,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	-	41/12 Orang/bulan	6.000.000.000,00
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.025.000,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	12 Dokumen	8.142.580,00
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.699.200,00	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	1 Laporan	2.537.000,00
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.880.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	12 Laporan	3.302.500,00
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	605.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	2 Dokumen	2.537.000,00
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi*	100	100	100	100	713.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	100	5.074.000,00
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	363.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	1 Dokumen	2.537.000,00
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	350.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	2 Laporan	2.537.000,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi*	100	100	100	-	0			-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	-	100	133.300.000
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	-	70 Orang	133.300.000,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi*	100	100	100	100	541.373.800,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	100	859.900.000,00
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket		4 Paket	11.915.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	4 Paket	70.000.000,00
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	38.411.300,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	4 Paket	45.900.000,00
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	23.570.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	4 Paket	23.000.000,00
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	163.700.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	6 Paket	200.000.000,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.427.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	4 Paket	31.000.000,00
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	4 Dokumen	19.000.000,00
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	52.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	12 Laporan	57.000.000,00
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	216.850.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	12 Laporan	304.000.000,00
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P17. Penin gkatan tata kelola pem erintahan yang mampu me nciptakan Good and Clean Gove rnment, pe ningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, p eningkatan profesionali sme ASN, peningkata n budaya kerja	-	2 Dokumen	3.000.000,00
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	1 Dokumen	107.000.000,00
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*	100	100	100	100	19.600.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	100	34.728.000,00
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	22 Unit	40 Unit	12.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	40 Unit	12.728.000,00
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	40 Unit	7.600.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	40 Unit	22.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*	100	100	100	100	715.154.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	100	821.001.000,00
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.027.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	12 Laporan	2.000.000,00
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	228.007.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	12 Laporan	247.380.000,00
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	486.120.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	12 Laporan	571.621.000,00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	100	100	100	100	280.509.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	100	301.620.000,00
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	227.675.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	35 Unit	207.450.000,00
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	38.994.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	40 Unit	57.000.000,00
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	13.840.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis	-	2 Unit	37.170.000,00
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	-	-	-	-	-	**296.750.000,00**						-	**1.085.050.000,00**
		[Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah]	**Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang sesuai regulasi Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**296.750.000,00**	-	-	-		-	**100**	**1.085.050.000,00**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	233.854.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	2 Dokumen	868.900.000,00
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah													
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	3 Berita Acara	3 Berita Acara	3 Berita Acara	23.487.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	3 Berita Acara	37.650.000,00
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.893.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	1 Berita Acara	45.900.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	143.474.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	4 Dokumen	785.350.000,00
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan*	100	100	100	100	29.520.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	100	165.000.000,00
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	1 Dokumen	95.000.000,00
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	1 Buku	70.000.000,00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen evaluasi yang sesuai regulasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.375.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	1 Dokumen	51.150.000,00
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	33.375.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	4 Laporan	51.150.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**750.000.000,00**						**-**	**1.082.454.500,00**
		[Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah]	**Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200.000.000,00**	-	-	-		-	**100**	**245.000.000,00**
			Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**100**	**100**	**100**	**100**	**250.000.000,00**						**100**	**371.000.000,00**
			Persentase Keselarasan Program dengan Prioritas Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**100**	**100**	**100**	**100**	**300.000.000,00**						**100**	**466.454.500,00**
			Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat					**0,00**							**0,00**
			Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat					**0,00**							**0,00**
			Persentase Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Meningkat					**0,00**							**0,00**
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	100 Dokumen	466.454.500,00
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	68.854.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	2 Dokumen	142.250.000,00
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	115.643.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	16 Laporan	159.730.000,00
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	115.503.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	3 Laporan	164.474.500,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang Disusun*	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	100 Dokumen	245.000.000,00
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	2 Dokumen	50.000.000,00
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	12 Laporan	70.000.000,00
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	12 Laporan	125.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Disusun*	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	100 Dokumen	371.000.000,00
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	2 Dokumen	35.000.000,00
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	10 Laporan	36.713.000,00
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	4 Laporan	35.000.000,00
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	3 Laporan	62.720.000,00
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	2 Dokumen	83.938.000,00
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	28 Laporan	25.000.000,00
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	-	14 Laporan	67.629.000,00
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	1 Laporan	25.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**250.000.000,00**							**1.905.000.000,00**
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	-	-	-	-	-	**0**						-	**1.100.000.000**
		-	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-		-	-	**1.100.000.000**
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-	-	-	0			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	-	200.000.000
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	-	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P4. Pening katan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjanga n dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka me mpercepat distribusi barang dan jasa	-	-	100.000.000,00
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	100.000.000,00
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	900.000.000
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	300.000.000,00
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	200.000.000,00
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	0
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	400.000.000,00
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**250.000.000,00**						**-**	**805.000.000,00**
		[Meningkatnya riset dan inovasi daerah]	**Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-		-	-	**805.000.000,00**
			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	**100**	**100**	**100**	**100**	**250.000.000,00**	-	-	-	-			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Persentase fasilitasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	355.000.000
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	355.000.000,00
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Persentase fasilitasi kegiatan invensi dan inovasi*	100	100	100	-	250.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	100	450.000.000,00
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	2 Laporan	85.000.000,00
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	10 Laporan	85.000.000,00
	5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	3 Laporan	20.000.000,00
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	75.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	30 Laporan	80.000.000,00
	5.05.03.2.02.0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	10 Laporan	30.000.000,00
	5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah													
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	0	-	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	100.000.000,00
	5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi													
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P3.Pember dayaan petani milenial dalam peng elolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	2 Laporan	50.000.000,00
	J U M L A H							**9.142.865.000,00**							**12.259.889.160,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2026 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan. Renja ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang, RKPD Tahun 2026, serta hasil Musrenbang dan forum konsultasi publik lainnya. Dengan memperhatikan prinsip partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, dokumen ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun perencanaan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam situasi terbatasnya sumber daya dan dinamika kebijakan:

1. Keterbatasan anggaran
    a. Diperlukan penajaman prioritas agar kegiatan yang paling strategis dan berdampak langsung tetap dapat dilaksanakan.
    b. Perlu mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan dan menjajaki alternatif pembiayaan melalui kerjasama dengan sektor swasta, lembaga donor, maupun sumber pendanaan lain yang sah.
    c. Penting untuk membangun kolaborasi antarperangkat daerah untuk memaksimalkan sinergi pendanaan dan pelaksanaan program.
2. Kesiapan SDM dan teknologi pendukung
   Perlu penguatan kapasitas SDM serta optimalisasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan kegiatan lebih adaptif, akurat, dan efisien.
3. Perubahan kebijakan nasional dan daerah
   Perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, Bappeda perlu sigapdalam menyesuaikan arah kebijakan tanpa mengganggu pencapaian target pembangunan.
4. Komitmen bersama dan integritas pelaksanaan
   Keberhasilan Renja ini sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, integritas aparatur, serta sinergi antarpihak. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak dalam setiap tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dalam Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 akan dijalankan dengan mengedepankan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas.
   Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur dan bernilai guna tinggi.
2. Akuntabilitas dan transparansi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Partisipatif dan kolaboratif.
   Mendorong pelibatan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. Berorientasi pada hasil (*result-oriented*).
   Fokus utama diarahkan pada pencapaian indikator kinerja dan sasaran pembangunan daerah.
5. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
   Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan arah kebijakan daerah serta mendukung target strategis RPJMD Kabupaten Pemalang.

Untuk memastikan implementasi Renja ini berjalan sesuai rencana, Bappeda akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan Renja sebagai dasar penyusunan RKA Bappeda Tahun Anggaran 2026, dengan menyesuaikan pagu indikatif dan kebijakan fiskal daerah.
2. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah untuk mendukung keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mencegah tumpang tindih kebijakan.
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, serta melakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan kinerja ke depan.
4. Menyediakan ruang untuk adaptasi terhadap kebijakan baru, kondisi darurat, maupun perubahan strategis lainnya yang memerlukan respons cepat dan terukur.

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai penguatan komitmen terhadap implementasi Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah menuju Pemalang yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Pemalang, September 2025

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Pemalang

Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Lampiran I

Tabel
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda Kerja.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran .	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	V			
10.c.	Mensinkronisasikan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah	V			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan anatara Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	V			

Pemalang, September 2025
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG

Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 199303 1 003

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2026 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang harus dipenuhi BPKAD pada Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

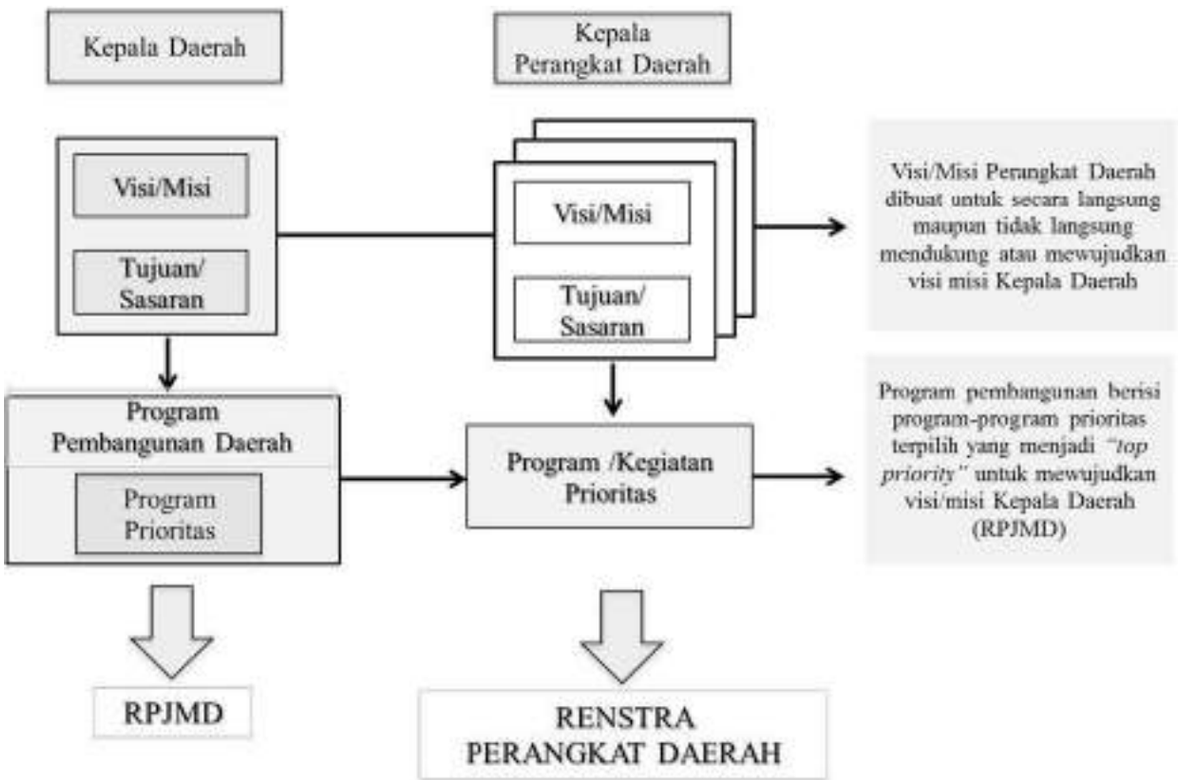

Sumber Gambar : Permendagri No 86 Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdapat 3 Program dengan 13 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Indikator Sub Kegiatan Tahun 2026 berpedoman pada Keputusan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang terkait dengan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai penjabaran atas Perda tersebut, telah disusun Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati nomor 26 tahun 2023 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selaku pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKAD melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh BPKAD adalah :

- Perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2026, senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan Visi **"PEMALANG BERCAHAYA – Bersih, Cakap, Handal dan Mulya".** Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2025-2029 telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelakasanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah :

a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,
b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pada seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Kegiatan dan Sub Kegiatan;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2024
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKAD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
2.3. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6. Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD
BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis BPKAD

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, BPKAD mengelola 3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp.454.344.118.887,00 yang meliputi :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp.9.167.974.887,00;

Program ini didukung 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.250.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1) 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.2.250.000,00
2) 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp.500.000,00
3) 01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp.2.250.000,00
4) 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp.2.250.000.00
5) 01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp.7.750.000,00
6) 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.2.250.000,00

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung 3 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp.6.292.646.000,00. Adapun rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

1) 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.6.250.396.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2) 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.41.500.000,00

3) 01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp.750.000,00

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang didukung 1 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.110.000.000,00. Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

1) 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.110.000.000,00

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung 7 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.688.698.462,00. Adapun rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

1) 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.50.002.000,00

2) 01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.50.022.958,00

3) 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.35.615.954,00

4) 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.3.000.000,00

5) 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp.125.628.750,00

6) 01.2.06.0009 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.412.428.800,00

7) 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp.12.000.000,00

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 3 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.946.916.625,00. Adapun rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

1) 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.577.204.000,00

2) 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Rp.22.000.000,00

3) 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.347.712.625,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 4 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp.778.544.800,00. Adapun rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1) 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.22.500.000,00
2) 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.450.750.000,00
3) 01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.4.360.000,00
4) 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.300.924.800,00

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 4 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp.333.919.000,00. Adapun rincian per sub kegiatan sebagai berikut :

1) 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.186.850.000,00
2) 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.45.000.000,00
3) 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Geudng Kantor dan Bangunan Lainnya Rp.85.069.000,00
4) 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.17.000.000,00

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total anggaran Rp.444.289.144.000,00

Program ini didukung 5 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan total alokasi anggaran Rp.1.310.000.000,00

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) 02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp.310.000.000,00
2) 02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Rp.173.000.000,00
3) 02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tentang Penjabaran APBD Rp.389.970.000,00

4) 02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp.437.030.000,00

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) 02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp.330.000.000,00
2) 02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp.165.000.000,00
3) 02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Rp.92.000.000,00
4) 02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.163.000.000,00

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan total alokasi anggaran Rp.595.000.000,00

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) 02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp.15.000.000,00
2) 02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan Laporan Keuangan Pemda Rp.215.000.000,00

3) 02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rp.303.531.000,00
4) 02.2.03.0007 Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian TP/TGR Rp.31.469.000,00
5) 02.2.03.0010 Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda Rp.30.000.000,00

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total alokasi anggaran Rp.441.434.144.000,00

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) 02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp.424.780.464.000,00
2) 02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp.1.972.500.000,00
3) 02.2.04.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Rp.14.681.180.000,00

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) 02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Rp.100.000.000,00
2) 02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.100.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan total alokasi anggaran Rp.887.000.000,00

Program ini didukung 1 Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengelolaan BMD dengan alokasi anggaran Rp.887.000.000,00

Kegiatan Pengelolaan BMD merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan yaitu :

1) 03.2.01.0007 Pengamanan BMD Rp.500.000.000,00
2) 03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD Rp.340.000.000,00
3) 03.2.01.0012 Penyusunan Laporan BMD Rp.47.000.000,00

Realisasi anggaran BPKAD pada Tahun 2024 sebesar Rp.452.733.739.623,00 dari target anggaran sebesar Rp.454.344.118.887,00 atau 99,65%. Dari 49 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hanya terdapat 1 Sub Kegiatan yang capaian realisasi anggarannya dibawah 85% yaitu sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak hanya terealisasi sebesar 64,21%.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

PENJELASAN SUB KEGIATAN PADA BPKAD YANG REALISASI ANGGARANNYA DI BAWAH 85%

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA TA 2024	%	
02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**				
02.2.04	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				
02.2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.972.500.000	1.266.502.459	64,21%	Pengajuan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat, Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta pengembalian pendapatan tahun lalu tidak sebesar target belanja tidak terduga yang ditetapkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Seluruh sub kegiatan pada BPKAD pada Tahun 2024 tercapai target outputnya. Sehingga efisiensi anggaran pada BPKAD telah tercapai.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Pengelolaan Uang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, telah disusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BMD sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

No	Aktivitas	Pengguna Anggaran/ KPA	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penata usahaan Barang				Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga	4 Minggu	Usulan RKBMD	Waktu sesuai kebutuhan
2	Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD				Usulan RKBMD	4 Minggu	Hasil Telaahan	Waktu sesuai kebutuhan
3	Pejabat Penatausahaan Barang mengembalikan hasil telaahan usulan RKBMD kepada Pengguna Barang				Hasil Telaahan	4 Minggu	Usulan RKBMD Hasil Telaahan	Waktu sesuai kebutuhan
4	Pengguna Barang mengirimkan usulan RKBMD hasil telaahan ke Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang				Usulan RKBMD Hasil Telaahan	4 Minggu	Draft SK Penetapan RKBMD	Waktu sesuai kebutuhan
5	Pengelola Barang menetapkan RKBMD				Draft SK Penetapan RKBMD	4 Minggu	SK Penetapan RKBMD	Waktu sesuai kebutuhan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BMD

No	Aktivitas	Sub.Bid Aset Daerah	Kabid. Aset Daerah	Sekretaris BPKAD	Kepala BPKAD	Bagian Hukum	Asisten Kesra dan Keu	Sekretaris Daerah	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun draft SK Bupati dan menyusun Nota Dinas Permohonan koreksi Tata Naskah tentang: 1. Penunjukan Pejabat Penjualan BMD; 2. Pembentukan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga Tanah/ Bangunan dan Inv Lainnya 3. Pensertifikan BMD; 4. Penyewaan aset milik Pemkab; 5. Penjualan BMD; 6. Penghapusan BMD;									Draft SK dan Nota Dinas	2 Minggu	Usulan Sub.Bid Aset	Waktu
2	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas									Draft SK dan Nota Dinas	1 Hari	Hasil koreksi	Waktu
3	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas									Draft SK dan Nota Dinas	1 Hari	Hasil kreksi	Waktu
4	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas									Draft SK dan Nota Dinas	2 Hari	Hasil koreksi	Waktu
5	Menyampaikan draft SK dan Nota Dinas Permohonan Koreksi Tata Nasakah SK ke Bagian Hukum									Draft SK dan Nota Dinas	4 Minggu	SK-Bupati	Waktu
6	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Asmanan SK dan SK Bupati yang telah dikoreksi di Bagian Hukum									SK Bupati	1 Hari	SK-Bupati	Waktu
7	Menyampaikan Permohonan Asmanan SK Bupati									SK Bupati	2 Hari	SK-Bupati	Waktu
8	Menyampaikan Permohonan Asmanan SK Bupati									SK Bupati	3 Hari	SK-Bupati	Waktu
9	Selesai									SK-Bupati	2 Minggu	SK-Bupati	Waktu

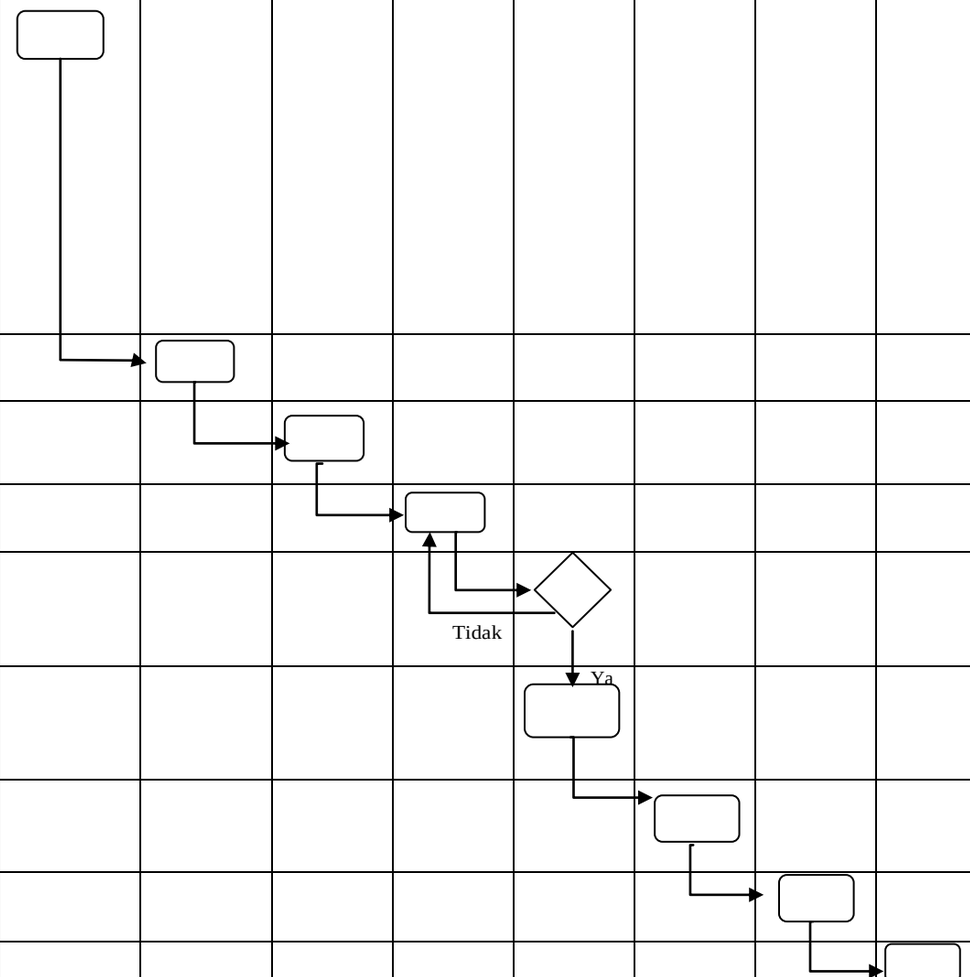

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. **STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH BUPATI**

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausaan Barang	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	Permohonan dilampiri : Untuk Bagunan : Fc. IMB Fc. Dok. Perolehan
2	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian/rekonsiliasi						Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	Untuk Tanah & Bagunan : Fc.Sertifikat FC.IMB Fc.Dok. Perolehan
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan						Disposisi	2 Hari	Draft Surat Keputusan	Selain Tanah: Fc.Dok Milik Fc.Dok. Perolehan
4	Menyusun Draft Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan disampaikan ke Bag. Hukum untuk dikoreksi dan Nota Dinas Permohonan koreksi tata naskah serta menyusun nota dinas permohonan asmanan Bupati.						Draft Surat Keputusan	30 Hari	SK Penetapan	BMD dari awal yang direncana kan untuk penyertaan Modal Daerah: Fc. DPA; Fc. Dok. Kepemilikan FC.IMB Fc.Dok. Perolehan Permohonan status BMD paling lambat pada akhur tahun berkenaan.
5	Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMD						Surat Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	Bupati menetapkan status penggunaan BMD setiap tahun
6	Selesai									Dokumen BMD selain tanah dan/atau bangunan : FC dok kepemilikan atau fc dok perolehan. Dok BMD dariawal utk penyertaan Modal: FC DPA FC dok kepemilikan berupa tanah FC IMB FC dok perolehan.

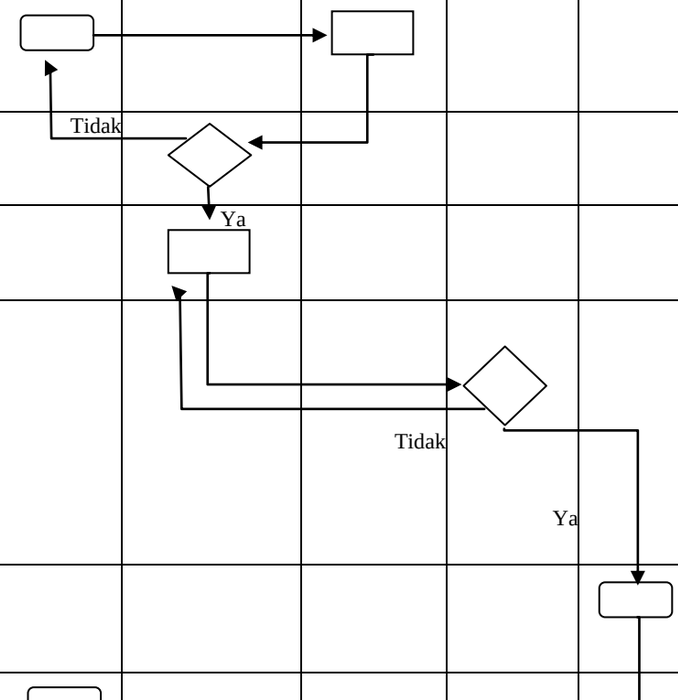

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH PENGELOLA BARANG

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausaan Barang	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	Diajukan pada akhir tahun berkenaan
2	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian	Tidak					Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan		Ya				Disposisi	2 Hari	Draft Surat Keputusan	
4	Menyampaikan nota dinas mohon koreksi draft Keputusan Bupati ttg penetapan status penggunaan dan Nota dinas asmanan Bupati,				Tidak / Ya		Koreksi Draft Surat Keputusan	30 Hari	SK Penetapan	
5	Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan						Draft Surat Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	
6	Selesai									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD ATAS INISIATIF BUPATI

No	Aktivitas	Pengguna Barang Lama	Pengguna Barang Baru/ lainnya	Pejabat Penatausaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bupati memberitahu kepada Pengguna Barang untuk pengalihan status BMD						Data BMD Calon Pengguna Barang Baru Penjelasa/pertimbangan	1 Hari	Surat Permohonan	Calon Pengguna Barang Baru Penjelasan/pertimbangan pengalihan status
2	Pengguna Barang Lama mengajukan permohonan kepada Bupati						Surat Permohonan			
3	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian			Tidak Ya			Und Rapat Lap Cek Lokasi	1 Hari	Disposisi	Meminta ketr tambahan jika diperlukan dan meminta konfirmas kepada penggua barang baru
4	Bupati memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD						Surat Persetujuan	7 Hari	Surat Persetujuan	Data BMD yang akan diserahkan Adanya Pengguna Barang Lama dan Baru Kewajiban Pengguna Barang Lama
5.	Pengguna Barang Lama melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang Baru dengan BAST						Disposisi	7 Hari		
6	Pengguna Barang Baru menerima serah terima BMD dari Pengguna Barang Lama						BAST			
7	Pengguna Barang Lama mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola BMD						BA Penghapusan	Paling lama 1 (satu) minggu	Draft Surat Keputusan Penghapusan	
8	Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMD pada Pengguna Barang Lama dilaporkan Bupati, tembusan Pengguna Barang Baru									
9	Pengguna Barang dalam penatausahaan BMD melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati,BAST dan Keputusan Penghapusan BMD.						BAST dan Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	

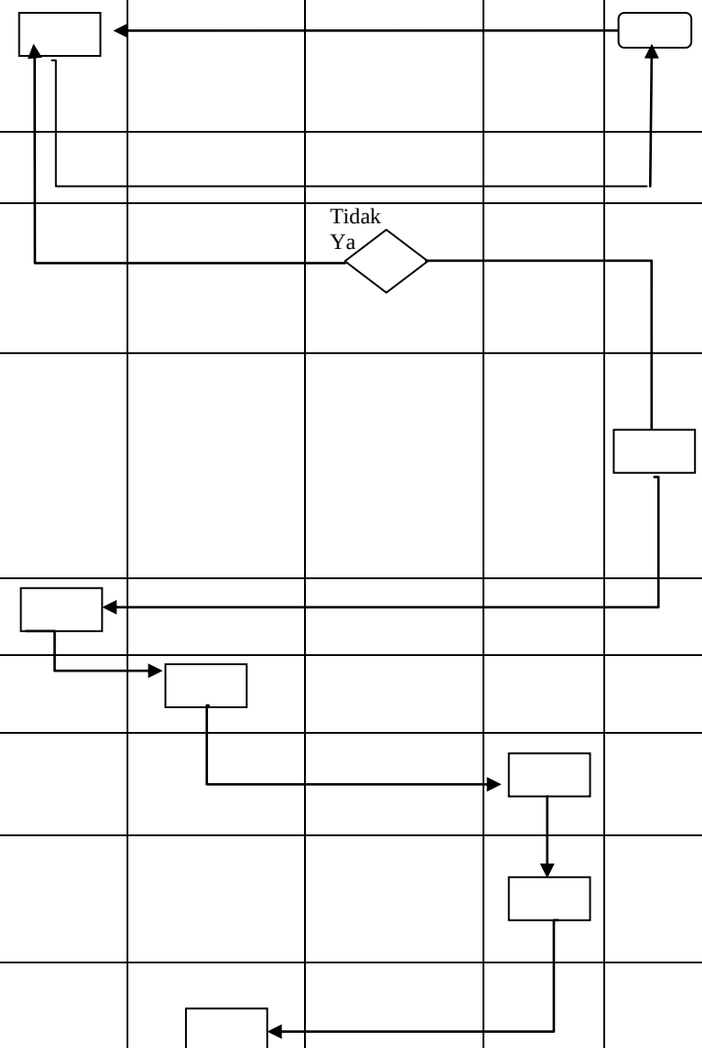

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD ATAS PERMOHONAN PENGGUNA BARANG LAMA

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausaan Barang	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	
2	Pengelola memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian	Tidak					Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan		Ya				Disposisi	2 Hari	Draft Surat Keputusan	
4.	Menyampaikan nota dinas mohon koreksi draft Keputusan Bupati ttg penetapan status penggunaan dan Nota dinas asmanan Bupati			Tidak	Ya		Draft Surat Keputusan	30 Hari	Draft Surat Keputusan	
5	Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan						Draft Surat Keputusan	7 Hari	SK Penetapan	
6	Selesai									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH PENGELOLA BARANG

No	Aktivitas	Pengelola Barang	Pejabat Penatausaan Barang	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola Barang mengajukan permohonan kepada Bupati						Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	
2	Bupati memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian						Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draft keputusan penetapan status penggunaan						Disposisi	1 Hari	Draft Surat Keputusan	
4	Menyampaikan nota dinas mohon koreksi draft Keputusan Bupati ttg penetapan status penggunaan dan Nota dinas asmanan SK-Bupati						Draft Surat Keputusan	30 Hari	Draft Surat Keputusan	
6	Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang						Surat Keputusan	14 Hari	SK Penetapan	
7	Selesai									

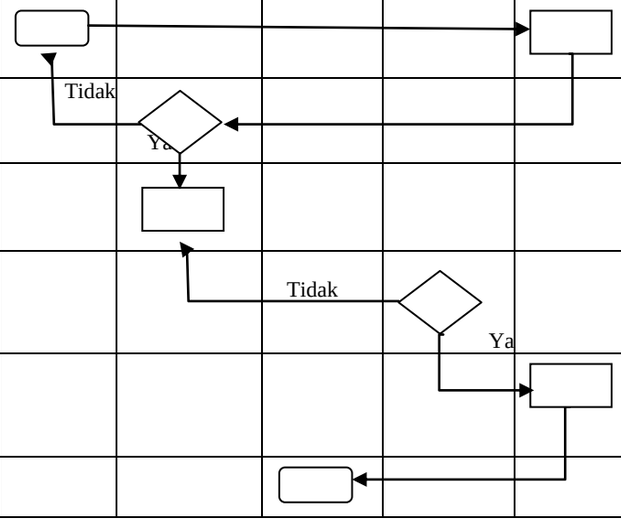

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SEMENTARA BMD

No	Aktivitas	Pengguna Barang lainnya	Pengguna Barang	Pejabat Penatausaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang Lainnya mengajukan permohonan penggunaan barang sementara kepada Bupati/Pengelola Barang						Surat Permohonan Und Rapat Data BMD Calon Pengguna Barang Baru Penjelasa/pertimbangan	3 Hari	Laporan hasil Rapat	Data BMD Pengguna Brg penjelasan dan pertimbangan penggunaan sementara
2	Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang sementara			Tidak		Ya	Hasil laporan penelitian	3 Hari		Dalam hal Bupati tidak setju,Bupati menerbitkan surat penolakan.
3	Bupati memberikan persetujuan kepada Pengguna Barang Lainnya untuk penggunaan Barang Sementara						Draft surat persetujuan	7 Hari	Disposisi	• Data BMD • Pengguna Brg • Kewjiban pengguna Brg sementara • Jangka Waktu • Biaya pemeliharaan • Kewajiban PB utk di TL
4	Penggunaan sementara dituangkan dalam surat perjanjian antar Pengguna Barang dengan Pengguna Barang Lainnya.						Surat Persetujuan	7 Hari	Surat Persetujuan	Data BMD yang akan diserahkan Adanya Pengguna Barang Lama dan Baru Kewajiban Pengguna Barang Lama
5.	Pengguna Barang Lainnya mengajukan permohonan kepada Pengguna Barang agar dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang Lainnya/Sementara dengan persetujuan Bupati dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun untuk tanah dan bangunan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun selain tanah dan/atau bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.						Disposisi	7 Hari		Pengguna Barang Lainnya dapat menggunakan BMD kurang dari 6 (enam) bulan tanpa persetujuan Bupati akan tetapi dengan persetujuan Pengelola Brg.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR STATUS PENGGUNAAN BMD OLEH PENGGUNA BARANG LAINNYA

No	Aktivitas	Pengguna Barang lainnya	Pengguna Barang	Pejabat Penatausaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang Lainnya mengajukan permohonan penggunaan barang sementara kepada Bupati/Pengelola Barang						Surat Permohonan Und Rapat Data BMD Calon Pengguna Barang Baru Penjelasan/pertimbangan	3 Hari	Laporan hasil Rapat	Data BMD Pengguna Brg penjelasan dan pertimbangan penggunaan sementara
2	Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan barang sementara			Tidak		Ya	Hasil laporan penelitian	3 Hari		Dalam hal Bupati tidak setju,Bupati menerbitkan surat penolakan.
3	Bupati memberikan persetujuan kepada Pengguna Barang Lainnya untuk penggunaan Barang Sementara						Draft surat persetujuan	7 Hari	Disposisi	• Data BMD • Pengguna Brg • Kewjiban pengguna Brg sementara • Jangka Waktu • Biaya pemeliharaan • Kewajiban PB utk di TL
4	Penggunaan sementara dituangkan dalam surat perjanjian antar Pengguna Barang dengan Pengguna Barang Lainnya.						Surat Persetujuan	7 Hari	Surat Persetujuan	Data BMD yang akan diserahkan Adanya Pengguna Barang Lama dan Baru Kewajiban Pengguna Barang Lama
5.	Pengguna Barang Lainnya mengajukan permohonan kepada Pengguna Barang agar dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang Lainnya/Sementara dengan persetujuan Bupati dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun untuk tanah dan bangunan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun selain tanah dan/atau bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.						Disposisi	7 Hari		Pengguna Barang Lainnya dapat menggunakan BMD kurang dari 6 (enam) bulan tanpa persetujuan Bupati akan tetapi dengan persetujuan Pengelola Brg.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

10. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN (SEWA PADA PENGELOLA BMD)

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausaan	Pengelola Barang	Bag. Hukum	Bupati/ Sekda	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan (sewa BMD)/perpanjangan kepada Bupati melalui Pengelola Barang							Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	Pemohon : 1. BUMN; 2. BUMD; 3. Swasta; 4. BH Lainny Peremndagri Psl.112-148.
2	Pejabat Penatausahaan menyampaikan undangan rapat pembahasan sewa BMD kepada Tim Peneliti							Nota Dinas	3 Hari	Draft Permohonan Persetujuan	
3	Pejabat Penatausahaan melakukan rapat penelitian dengan Tim/OPD terkait terhadap permohonan sewa dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan							Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
4	Pejabat Penatausahaan menyampaikan Nota Dinas hasil Rapat tentang Pemanfaatan BMD Kepada Bupati terhadap permohonan sewa BMD dan besaran sewa							Nota Dinas	1 Hari	Disposisi saran tindak	
5	Bupati menerbitkan surat penolakan/persetujuan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa BMD dengan menerbitkan surat penolakan/per setujuan sewa BMD							Surat	3 Hari	Surat Penolakan/ persetujuan	
6	Atas Peresetujuan Sewa BMD oleh Bupati selanjutnya Pengelola BMD menindaklanjuti dengan menyusun draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda ke Bag.Hukum							Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola/Pengguna BMD	1 Hari	Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola/Pengguna BMD	
7	Pengelola Barang menyampaikan draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda dan Nota Dinas mohon koreksi/mohon asmanan naskah kepada Bag.Hukum							Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola/Pengguna BMD	30 Hari	Hasil Koreksi Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola/Pengguna BMD	
8	Persetujuan Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa anatara Bupati dg Penyewa								7 Hari	SK- Bupati SK-Sekda Persetujuan Sewa, dan Perajanjian Sewa	
9	Selesai										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN (SEWA PADA PENGGUNA BMD)

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausaan	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati/ Sekda	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan (sewa BMD)/perpanjangan kepada Bupati melalui Pengguna Barang							Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	Pemohon : 1. BUMN; 2. BUMD; 3. Swasta; 4. BH Lainny Peremndagri Psl.112-148.
2	Pengguna Barang dengan OPD terkait melakukan rapat penelitian terhadap permohonan sewa dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan		Tidak Ya					Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
3	Pengguna Barang menyampaikan Nota Dinas hasil Rapat dengan OPD terkait tentang Pemanfaatan BMD Kepada Bupati melalui Pengelola Barang terhadap permohonan sewa BMD dan besaran sewa							Nota Dinas	1 Hari	Disposisi saran tindak	
4	Bupati menerbitkan surat penolakan/persetujuan kepada pihak yang mengajukan permohonan sewa BMD dengan menerbitkan surat penolakan/persetujuan sewa BMD					Tidak	Ya	Surat	3 Hari	Surat Penolakan/ persetujuan	
5	Atas Peresetujuan Sewa BMD oleh Bupati selanjutnya Pengelola BMD menindaklanjuti dengan menyusun draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda ke Bag.Hukum							Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola/Pengguna BMD	1 Hari	Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola BMD dan Penyewa	
6	Pengelola Barang menyampaikan draft Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Sekda dan Nota Dinas mohon koreksi/mohon asmanan naskah kepada Bag.Hukum					Tidak Ya		Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola BMD	30 Hari	Hasil Koreksi Draft Persetujuan Sekda, SK-Bupati, Perajanjian sewa Pengelola BMD dan Penyewa	
7	Persetujuan Sewa oleh Sekda/SK-Bupati ttg Besaran Sewa dan Surat Perjanjian Sewa oleh Kepala OPD dg Penyewa								7 Hari	SK-Sekda Persetujuan SK- Bupati Sewa,dan Perajanjian Sewa antara Sekda dan Penyewa	
8	Selesai										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

12. **STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN PINJAM PAKAI PADA PENGELOLA BMD**.

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausaan	Pengelola Barang	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan Pinjam Pakai/Perpanjangan Pinjam Pakai kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Barang								Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	
2	Pejabat Penatausahaan Barang menyususn draft SK Tim dan memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Pengelola Barang								Nota Dinas	3 Hari	Draft Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
3	Bupati menetapkan Tim Peneliti								Draft SK Tim Peneliti	3 Hari	SK Tim Peneliti	
4	Tim melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan								SK Tim Peneliti	5 Hari	BA Penelitian	
5	Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada permohon						Tidak	Ya	BA Penelitian	3 Hari	Surat Penolakan	
6	Apabila Bupati menyetujui permohonan, Bupati melalui Pjbt Penatausahaan menerbitkan surat pinjam pakai								BAST	3 Hari	Surat Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
	Pejabat Penatausahaan menyampaikan draft surat perjanjian pinjam pakai dan BAST bersama dg nota dinas permohonan koreksi ke Bag.Hukum					Tidak			Draft Surat Pinjam pakai danNota Dinas	30 hari	Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan BAST	
	Pejabat Penatausahaan menyampaikan surat pinjam pakai & BAST kepada Pemohon								Surat Pinjam Pakai dan BAST	1 hari		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

13. **STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN PINJAM PAKAI PADA PENGGUNA BMD**.

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausaan	Pengelola Barang	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Bupati								Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	Pinjam Pakai Pada Pengelola Ditandatangani antara Bupati & Peminjam Pakai
2	Bupati memerintah kepada Pengelola/Pengguna BMD untuk ditindaklanjuti											Pinjam Pakai Pada Pengelola Ditandatangani antara Sekda & Peminjam Pakai
3	Pengelola BMD memerintahkan Pejabat Penatausahaan BMD melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD/Tim terkait untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati								Nota Dinas	1 Hari	Draft Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
4	Tim melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan								Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
5	Hasil penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung disampaikan kepada Bupati/Pengelola BMD								SK Tim Peneliti	5 Hari	BA Penelitian	
5	Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada permohon						Tidak	Ya	BA Penelitian	3 Hari	Surat Penolakan	
6	Pejabat Penatausahaan menyusun dan menyampaikan draft surat pinjam pakai, BAST dan Nota Dinas permohonan koreksi ke Bag. Hukum						Tidak / Ya		Draft Surat Pinjam Pakai & BAST Pinjam Pakai	30 Hari	Surat Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
7	Pejabat Penatausahaan menyampaikan surat pinjam pakai & BAST kepada Pemohon								Surat Pinjam Pakai & BAST Pinjam Pakai	1 Hari	Surat Pinjam Pakai dan BAST Pinjam Pakai	
8	Selesai											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

14. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMANFAATAN (BGS/BSG PADA PENGGUNA BMD)

No	Aktivitas	Pengelola Barang	Pengguna Barang	Pejabat Penatausaan	Tim		Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
									Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang menyerahkan tanah/lahan yang akan di BGS/BSG kepada Bupati								Proposal Permohonan Pemanfaatan (dilampiri FC KTP/Identitas yang lain)	1 Hari	Nota Dinas	
2	BGS/BSG BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati								Nota Dinas	3 Hari	Draft Permohonan Persetujuan	
3	Pengelola Barang mengikutsertan Pengguna Barang dalam proses BGS/BSG dari proses persiapan,pelaksanaan dan penyerahan								Draft Permohonan Persetujuan	3 Hari	SK Tim Peneliti	
4	Tim melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung dalam rangka menguji kelayakan permohonan pemanfaatan								SK Tim Peneliti	5 Hari	BA Penelitian	
5	Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan pemanfaatan				Tidak			Ya	BA Penelitian	3 Hari	Surat Penolakan	
6	Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan								BA Penelitian	3 Hari	Surat Persetujuan	
	Selesai											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

15. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD

No.	Aktivitas	Pengguna BMD	DPUTR	BPKAD	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengguna Barang mengidentifikasi jenis pengamanan dan pemeliharaan BMD yang ada di Pengguna BMD	rutin					KIB, DPA/DPPA	5 Hari	Laporan Rekonsiliasasi Barang	
2.	Pengguna Barang melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang berada dalam penguasaannya, kecuali untuk pemeliharaan berat	Pemeliharaan berat gedung					Laporan Rekonsilisasi Barang	5 Hari	Surat Permohonan Pemeliharaan Berat	
3.	Pengguna Barang mengajukan permohonan pemeliharaan berat atas BMD jenis Gedung kepada DPUTR						Surat Permohonan Pemeliharaan Berat	30 Hari	Dokumen RKA	
4.	Pengguna Barang mengajukan permohonan pemeliharaan berat atas BMD jenis kendaraan dinas, mebeulair, peralatan kantor, dan mesin kepada BPKAD	Pemel berat kendaraan, meubelair, peralatan, mesin					Surat Permohonan Pemeliharaan Berat	30 Hari	Dokumen RKA	
5.	DPUTR melaksanakan pemeliharaan berat terhadap BMD jenis Gedung yang diajukan oleh Pengguna Barang						DPA/DPPA	30 Hari	Dokumen Pengadaan	
6.	BPKAD melaksanakan pemeliharaan berat terhadap BMD jenis kendaraan dinas, mebeulair, peralatan kantor, dan mesin yang diajukan oleh Pengguna Barang						DPA/DPPA	30 Hari	Dokumen Pengadaan	
7.	Pengguna Barang melaporkan pemeliharaan BMD dibawah penguasaannya						Laporan Pemeliharaan BMD	1 Hari	Arsip	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

16. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENILAIAN NERACA

No.	Aktivitas	Pengguna BMD	Tim Penilai	Pejabat Pentausahaan BMD	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengguna BMD mengajukan permohonan Penilaian BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang.						Data BMD	2 Hari	Surat Permohonan	
2.	Pengelola Barang memerintahkan Pejabat Penatausahaan Barang untuk melakukan penelaahan permohonan penilaian BMD.						Surat Permohonan	7 Hari	Hasil Telaah	
3.	Pejabat Penatausahaan Barang mengusulkan Tim Penilai kepada Bupati.						Hasil Telaah	2 Hari	Draft Tim Penilai	
4.	Bupati Menetapkan Tim Penilaian BMD.						Draft Tim Penilai	60 Hari	SK Tim Penilai	
5.	Hasil Penilaian disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan..						SK Tim Penilai	3 Hari	Laporan Penilaia	
6.	Hasil Penilaian disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.						Laporan Penilaia	3 Hari	SK Penetapan	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

17. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN

No	Aktivitas	Pejabat Penatausaan Barang	Tim Peneliti	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat Penatausahaan mengajukan usul pemindahtanganan kepada Bupati melalui Pengelola Barang kecuali pemindahtanganan berupa hibah kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pengguna Barang.					Data BMD	7 Hari	Surat Usulan	
2	Pengelola Barang memberikan pertimbanganatas surat permohonan pemindahtanganan kepada Bupati.					Surat Usulan	3 Hari	Nota Dinas	
3	Bupati menetapkan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian terhadapsurat usulan pemindahtanganan.					Nota Dinas	2 Hari	SK Tim	
4	Tim Peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai bahan pertimbanganpersetujuan pemindahtanganan.					SK Tim	5 Hari	Berita Acara Penelitian	
5	Bupati mengambil keputusan			ditolak	diterima	Berita Acara Penelitian	2 Hari	Draft Persetujuan	
6	Bupati menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan.					Draft Persetujuan	2 Hari	Surat Persetujuan	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

18. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN/PENJUALAN BMD

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
	Pengguna Barang mengajukan permohonan pemusnahan BMD kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Barang.					Data BMD	3 Hari	Surat Permohonan	
	Pejabat Penatausahaan Barang Melakukan penelaahan permoho nan pemusnahan BMD.					Surat Permohonan	5 Hari	Hasil Telaah	
	Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan yang sudah dilakukan penelaahaan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.					Hasil Telaah	2 Hari	Nota Dinas Hasil Telaah	
	Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan BMD.					Nota Dinas Hasil Telaah	2 Hari	Nota Dinas pertimbangan persetujuan	
	Bupati mengambil keputusan			ditolak	diterima	Nota Dinas pertimbangan persetujuan	2 Hari	Draft Persetujuan	
	Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan BMD.					Draft Persetujuan	2 Hari	Surat Persetujuan	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

19. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMUSNAHAN

No	Aktivitas	Pemohon	Tim Peneliti	Pejabat Penatausaan	Pengguna Barang	Bag. Hukum	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usul penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang berdasarkan							Data BMD	3 Hari	Surat Permohonan	
2	Pengelola Barang melakukan penelitian atas usul penghapusan dari Pejabat Penatausahaan Barang.							Surat Permohonan	2 Hari	Nota Dinas Hasil Penelitian	
3	Pengelolamengajukanpermohonan persetujuan penghapusan kepada Bupati.							Nota Dinas Hasil Penelitian	2 Hari	Nota Dinas Pertimbangan Persetujuan	
4	Bupati mengambil keputusan							Nota Dinas Pertimbangan Persetujuan	2 Hari	Draft Persetujuan dan SK Penghapusan	
5	Bupati menetapkan persetujuan dan menerbitkan keputusan penghapusan BMD							Draft Persetujuan dan SK Penghapusan	2 Hari	Surat Persetujuan dan SK Penghapusan	
6								Data BMD	3 Hari	Surat Permohonan	
7								Surat Permohonan	2 Hari	Nota Dinas Hasil Penelitian	

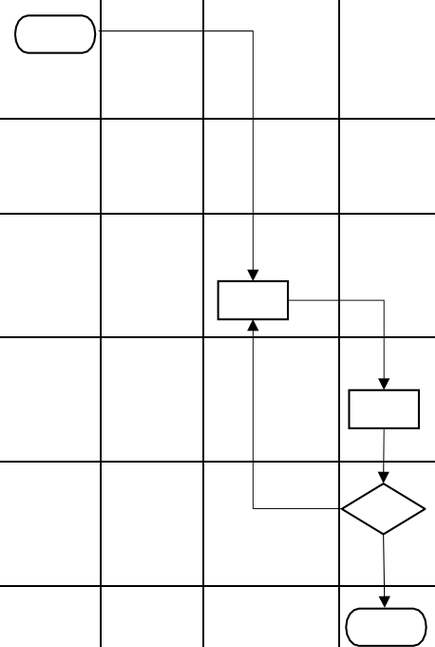

https://jdih.pemalangkab.go.id/

20.STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BMD

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Barang mengirim Laporan BMD kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang untuk dilakukan telaah.	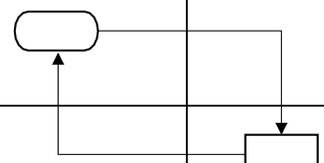		Kertas Kerja Rekonsiliasi Data	5 Hari	Draft Laporan BMD	
2	Laporan BMD yang telah ditelaah dikembalikan ke Pengguna Barang untuk dilakukan koreksi.			Draft Laporan BMD	5 Hari	Laporan BMD	
3	Pengguna Barang mengirim Laporan BMD yang telah dikoreksi kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.			Laporan BMD	2 Hari	Draft Laporan Rekapitulasi BMD	
4	Pejabat Penatausahaan Barang melakukan rekapitulasi Laporan BMD dari Pengguna Barang.			Draft Laporan Rekapitulasi BMD	10 Hari	Laporan Rekapitulasi BMD	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Ketercapaian target output sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat diilustrasikan pada tabel berikut ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel :2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Bidang Keuangan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPKAD	60,80	60,50	63,25	100%	70,05	70,05	100%
01.2.01	*Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	12 dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	49 dok	49 dok	49 dok	100%	46 dok	46 dok	100%
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	98 dok	98 dok	98 dok	100%	92 dok	92 dok	100%
01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	49 dok	49 dok	49 dok	100%	46 dok	46 dok	100%
01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	98 dok	98 dok	98 dok	100%	92 dok	92 dok	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
01.2.02	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 org	37 org	37 org	100%	37 org	37 org	100%
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%
01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	52 org	52 org	52 org	100%	52 org	52 org	100%
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantir yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	12 lap	12 lap	75%	12 lap	12 lap	100%
01.2.06.0009	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	19 unit	19 unit	19 unit	100%	19 unit	19 unit	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
		(Komputer dll)							
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 unit	23 unit	23 unit	100%	23 unit	23 unit	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60%	60%	72,02%	60%	60%	60%	100%
		Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%
02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
	dan PPAS	yang disusun							
02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%
02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%
02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%
02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%
02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 dok	24 dok	24 Dok	24 dok	24 dok	24 dok	100%
02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Pihak	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan poemerintah kabupaten/kota	82 org	82 org	82 org	100%	82 org	82 org	100%
02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 lap	18 Lap	18 Lap	100%	18 Lap	18 Lap	100%
02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	1 lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.04	*Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	90 lap	90%	99,81%	100%	90%	90%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kavbupaten/Kota	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah LingkupPengelolaan Keuangan Daerah	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	2 keg	100%
02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah	82 org	82 org	82 org	100%	82 org	82 org	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2025-2029)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2025	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2024	REALISASI RENJA BPKAD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = (6/5 x 100%)**	**8**	**9=(6+8)**	**10=(9/4 x 100%)**
		kabupaten pemalang							
3	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah**	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***
3.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
3.2.01.0007	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 lap	4 lap	4 lap	13,93%	4 lap	4 lap	100%
3.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
3.2.01.0012	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyusun Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Koordinator Pengelola Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disinkronkan dengan ketentuan pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
3. Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring Hibah dan Bantuan sosial.
4. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan pembayaran Non Tunai.
5. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
6. Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
8. Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
10. Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur penggunaan rekening pada perangkat daerah.
11. Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Dearah dan sistim akuntansi Pemerintah Daerah.
12. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Menyusun Keputusan Bupati yang menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Pembantu.
14. Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur tentang penunjukkan Bendahara BOS pada SMP dan SD.
15. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
16. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang Perangkat Daerah;
17. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pemalang;
18. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pemalang;
19. Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
20. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Konsolidasi untuk disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Konsolidasi sebagai dasar pencatatan aset daerah pada Laporan Keuangan Daerah.
21. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

22. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
23. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
24. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
25. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
26. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pemalang;
27. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pemalang melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
28. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
29. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
30. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
31. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
32. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas sesuai ketentuan yang berlaku;
33. Melaksanakan pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pemalang beserta tunjangan kinerjanya;
34. Melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan untuk ADD, Dana Desa, TMMD, Bantuan Keuangan khusus hasil Musrenbang dan aspirasi anggota DPRD (Pokir) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinator pemerintahan desa;
35. Melaksanakan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan;
36. Melaksanakan penyaluran Belanja Tidak Terduga berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pengelolaan bencana dan korban bencana serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinator pendapatan untuk merekomendasi pencairan kelebihan pendapatan tahun sebelumnya lewat Belanja Tidak Terduga.

37. Melaksanakan penyaluran pengeluaran pembiayaan berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi investasi dan pembinaan BUMD;
38. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas ketercapaian target lain-lain PAD yang sah. Pengelolaan Lain-lain PAD yang sah diharapkan dapat mendukung naiknya total PAD Kabupaten Pemalang secara signifikan.

Selain PAD terdapat Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tidak bertanggungjawab atas ketercapaian target dari kedua jenis pendapatan tersebut, karena Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah baik target maupun penyalurannya telah ditentukan dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Kebijakan penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan Kebijakan Penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur. Secara keseluruhan, pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. PAD
    1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
        1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
        1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
    1.2. Lain-Lain PAD yang Sah
        1.2.1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan
        1.2.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
        1.2.3. Jasa Giro
        1.2.4. Pendapatan Bunga
        1.2.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
        1.2.6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan
        1.2.7. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
        1.2.8. Pendapatan dari Pengembalian
2. Pendapatan Transfer
    2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
        2.1.1. Dana Perimbangan
            2.1.1.1. DTU-DBH
            2.1.1.2. DTU-DAU
            2.1.1.3. DTK-DAK Fisik
            2.1.1.4. DTK-DAK Non Fisik
        2.1.2. Dana Desa
        2.1.3. Insentif Fiskal
    2.2. Pendapatan Transfer antar Daerah
        2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil
        2.2.2. Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
    3.1. Pendapatan Hibah
        3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
        3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL 2.3
RINCIAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH YANG DIKELOLA BPKAD TAHUN 2022, 2023 DAN 2024

NAMA PENDAPATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TARGET TAHUN 2025
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	7.115.500.000	9.353.678.310	131,45%	10.000.000.000	15.852.518.432	158,53%	10.450.000.000	12.357.541.269	118,25%	12.700.000.000
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	380.000.000	146.977.249	38,68%	753.816.000	2.179.625.800	289,15%	750.610.000	1.218.076.333	162,28%	426.500.000
Hasil Penjualan Tanah	0	0	0%	0	1.325.314.300		0	0	0%	0
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	280.000.000	0	0%	723.000.000	789.296.500	109,17%	200.000.000	635.670.000	317,84%	391.500.000
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000	142.937.249	142,94%	26.816.000	55.716.000	207,77%	550.610.000	582.406.333	105,77%	35.000.000
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0	4.040.000	-	4.000.000	9.299.000	232,48%	0	0	0%	0
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	400.000.000	869.397.910	217,35%	2.300.000.000	2.568.904.715	111,69%	350.000.000	659.605.914	188,46%	140.000.000
Hasil Sewa BMD	400.000.000	869.397.910	217,35%	2.300.000.000	2.568.904.715	111,69%	350.000.000	659.605.914	188,46%	140.000.000
Jasa Giro	1.700.000.000	1.227.653.584	72,21%	700.000.000	962.968.844	137,57%	1.400.000.000	1.530.473.812	109,325	700.000.000
Jasa Giro Kasda	1.200.000.000	875.078.295	72,92%	525.000.000	772.109.340	147,07%	900.000.000	978.069.745	108,67%	600.000.000
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000	352.575.289	70,52%	175.000.000	190.859.504	109,06%	500.000.000	552.404.067	110,48%	100.000.000
Pendapatan Bunga	4.000.000.000	6.249.315.024	156,23%	3.481.060.000	7.199.857.759	206,83%	5.000.000.000	6.305.624.046	126,11%	3.660.000.000
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemda	4.000.000.000	6.249.315.024	156,23%	3.481.060.000	7.199.857.759	206,83%	5.000.000.000	6.305.624.046	126,11%	3.660.000.000
Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				43.034.000	68.544.121	159,28%	50.410.000	90.824.372	180,17%	35.000.000
Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				43.034.000	68.544.121	159,28%	50.410.000	90.824.372	180,17%	35.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NAMA PENDAPATAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TARGET TAHUN 2025
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan	0	7.584.595	-	41.491.000	146.747.389	353,68%	0	0	0%	0
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	0	7.584.595	-	41.491.000	146.747.389	353,68%	0	0	0%	0
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	85.500.000	190.499.999	222,81%	123.000.000	123.000.000	100,00%	0	0	0%	0
Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan	85.500.000	190.499.999	222,81%	123.000.000	123.000.000	100,00%	0	0	0%	0
Pendapatan dari Pengembalian	550.000.000	662.249.949	120,41%	2.557.599.000	2.602.869.804	101,77%	2.898.980.000	2.552.936.792	88,06%	7.738.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu *"Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang efektif dan Efisien"*. Sedangkan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah *"Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel"*. Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditentukan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu *"Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah"*. Untuk mendukung tujuan BPKAD tersebut, terdapat dua sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penetapan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada prinsip SMART (Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan) dan Time Bound (Berbatas Waktu)). Mengacu pada prinsip tersebut maka ditetapkan Indikator Tujuan BPKAD yaitu :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 80; dan
2. Persentase Pemanfaatan BMD dengan target 93%

Capaian Indikator Tujuan berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Hasil Pengukuran IPKD

Tahun Penilaian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hasil Pengukuran IPKD	68,7114	61,9133	65,0394	62,5009	65,7108	70,1277

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/39 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Pemalang menempati posisi ke-24 dari 25 Kabupaten se-Jawa Tengah yang masuk dalam klaster kemampuan keuangan rendah. Klaster Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam klaster kemampuan keuangan yang sama, sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5
Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2023
Dalam Klaster Kemampuan Keuangan Rendah
(Berdasarkan SK Gubernur No. 900/39 Tahun 2024)

NO	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	IPKD	NILAI
1	GROBOGAN	12,282	19,8276	14,4828	20	5,4281	15	87,0301	A
2	KUDUS	13,974	20	15	15	6,5522	15	85,5263	A
3	PURWOREJO	14,271	20	14,4828	15	5,0854	15	83,8395	A
4	SEMARANG	8,888	20	13,9655	20	5,9027	15	83,7562	A
5	BLORA	13,069	20	15	15	5,0487	15	83,1172	A
6	DEMAK	12,64	20	13,9655	15	5,9205	15	82,5258	A
7	KAB TEGAL	12,693	20	14,4828	15	4,9117	15	82,0875	A
8	WONOSOBO	12,399	14,6552	14,4828	20	4,5246	15	81,0614	A
9	MAGELANG	10,893	20	15	15	4,7409	15	80,6337	B
10	BOYOLALI	9,373	20	10,0862	20	5,8074	15	80,2666	B
11	BATANG	10,845	20	14,7414	15	4,5263	15	80,1129	B
12	KLATEN	9,610	20	14,7414	15	4,6348	15	78,9865	B
13	KARANGANYAR	5,430	19,8276	11,6379	20	6,5655	15	78,4614	B
14	WONOGIRI	12,517	15	15	15	4,1242	15	76,6408	B
15	JEPARA	10,654	15	14,4828	15	6,1096	15	76,2460	B
16	BANJARNEGARA	7,213	20	13,9655	15	4,8577	15	76,0363	B
17	PATI	10,769	15	13,9655	15	6,0964	15	75,8311	B

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	IPKD	NILAI
18	BANYUMAS	11,616	15	15	15	3,7305	15	75,3467	B
19	SRAGEN	14,455	15	10,8621	15	4,5896	15	74,9064	B
20	CILACAP	11,169	15	12,1552	15	5,7848	15	74,1090	B
21	TEMANGGUNG	10,675	15	14,7414	15	3,2468	15	73,6632	B
22	PEKALONGAN	9,484	14,8276	14,4828	15	4,4841	15	73,2789	B
23	KEBUMEN	12,587	15	15	10	4,6657	15	72,2530	B
24	PEMALANG	6,528	19,8276	14,7414	15	4,0260	10	70,1277	B
25	PURBALINGGA	9,370	15	5,9483	15	3,4029	15	63,7212	C

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Indikator tujuan BPKAD yang kedua adalah Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Indikator tujuan ini menghitung berapa besar BMD yang telah dimanfaatkan dengan sistim sewa dibandingkan dengan potensi BMD yang dapat disewakan. Pada Tahun 2024, terdapat potensi BMD yang dapat disewakan sebanyak 343 lokasi. Sedangkan BMD yang telah disewakan sebanyak 340 lokasi. Sehingga relisasi indikator tujuan tersebut sebesar (340/343 x 100%) = 99,13 %. Secara rinci capaian Persentase Pemanfaatan BMD sebagai berikut :

Tabel 2.6
Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah
(Berdasarkan Data Pemanfaatan BMD dari Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Pemalang)

Tahun	REALISASI			Target
	Jumlah Potensi BMD yang dapat dimanfaatkan	BMD yang telah dimanfaatkan	Persentase BMD yang dimanfaatkan	
2019	61 Lokasi	57 Lokasi	93,44%	90%
2020	43 Lokasi	39 Lokasi	90,70%	90%
2021	53 Lokasi	50 Lokasi	94,34%	93%
2022	71 Lokasi	68 Lokasi	95,77%	93%
2023	343 Lokasi	340 Lokasi	99,13%	93%
2024	343 Lokasi	340 Lokasi	99,13%	99,15%

Data Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang disewakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
DAFTAR POTENSI BARANG MILIK DAERAH YANG DAPAT DISEWAKAN TAHUN 2023

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
2	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
3	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
4	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	PADURAKSA		
5	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
6	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
7	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
8	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
9	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
10	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
11	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
12	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
13	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
14	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
15	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
16	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
17	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
18	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
19	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
20	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
21	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
22	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
23	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
24	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
25	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
26	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
27	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
28	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
29	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
30	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
31	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
32	Jl Urip Sumoharjo RT 001 Rw 008 Kel Pelutan / Stor sewa tanah di jl urip sumoharjo kel pelutan periode bln mei 2021 sd bln	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	april 2023		
33	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
34	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
35	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
36	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
37	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
38	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
39	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
40	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
41	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
42	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
43	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
44	Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
45	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
46	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
47	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
48	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	2022 sd Juni 2024		
49	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
50	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
51	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
52	Rt 007 / Rw 004 Kelurahan Mulyoharjo / sewa tanah diblok capit urang mulyoharjo periode agustus 2022 sd juli 2024	DISEWAKAN	
53	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
54	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
55	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
56	Jl Agung dalam rt 006 / rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
57	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
58	Mulyoharjo rt 006 / rw 005 Kel Mulyoharjo / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
59	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024		
60	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
61	Rt 007 / Rw 004 Kelurahan Mulyoharjo / sewa tanah diblok capit urang mulyoharjo periode agustus 2022 sd juli 2024	DISEWAKAN	
62	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
63	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
64	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
65	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
66	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
67	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
68	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
69	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
70	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
71	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
72	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
73	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
74	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
75	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
76	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
77	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
78	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
79	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
80	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
81	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
82	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
83	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
84	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
85	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
86	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
87	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
88	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
89	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
90	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
91	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
92	Kelurahan Mulyoharjo	DISEWAKAN	
93	Kelurahan Pelutan	DISEWAKAN	
94	Kelurahan Kebondalem	DISEWAKAN	
95	Kelurahan Sugihwaras	DISEWAKAN	
96	Kelurahan Beji	DISEWAKAN	
97	Kelurahan Petarukan	DISEWAKAN	
98	Kelurahan Purwoharjo	DISEWAKAN	
99	Kelurahan Bojongbata	DISEWAKAN	
100	Kelurahan Wanarejan Selatan	DISEWAKAN	
101	Kelurahan Mulyoharjo 001	DISEWAKAN	
102	Kelurahan Mulyoharjo 002	DISEWAKAN	
103	Kelurahan Mulyoharjo 003	DISEWAKAN	
104	Kelurahan Mulyoharjo 004	DISEWAKAN	
105	Kelurahan Mulyoharjo 005	DISEWAKAN	
106	Kelurahan Mulyoharjo 006	DISEWAKAN	
107	Kelurahan Mulyoharjo 007	DISEWAKAN	
108	Kelurahan Mulyoharjo 008	DISEWAKAN	
109	Kelurahan Mulyoharjo 009	DISEWAKAN	
110	Kelurahan Mulyoharjo 010	DISEWAKAN	
111	Kelurahan Beji 02	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
112	Kelurahan Beji 03	DISEWAKAN	
113	Kelurahan Beji 01	DISEWAKAN	
114	Kelurahan Kebondalem 01	DISEWAKAN	
115	Kelurahan Kebondalem 02	DISEWAKAN	
116	Kelurahan Kebondalem 03	DISEWAKAN	
117	Kelurahan Wanarejan Selatan 01	DISEWAKAN	
118	Kelurahan Wanarejan Selatan 02	DISEWAKAN	
119	Kelurahan Wanarejan Selatan 03	DISEWAKAN	
120	Kelurahan Pelutan 01	DISEWAKAN	
121	Kelurahan Pelutan 02	DISEWAKAN	
122	Kelurahan Pelutan 03	DISEWAKAN	
123	Kelurahan Pelutan 05	DISEWAKAN	
124	Kelurahan Pelutan 07	DISEWAKAN	
125	Taman Pemalang 002	DISEWAKAN	
126	Wanarejan Selatan 002	DISEWAKAN	
127	Wanarejan Utara 001	DISEWAKAN	
128	Wanarejan Utara 002	DISEWAKAN	
129	Kabunan 002	DISEWAKAN	
130	Wanarejan Selatan 003	DISEWAKAN	
131	Jl Kemuning no 39 Kelurahan Mulyuharjo / Sewa tanah di Terminal Belik, An. Irfan	DISEWAKAN	
132	Direktur Utaman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia / Pembayaran sewa PDAM Blok Sibanteng selama 3 tahun	DISEWAKAN	
133	Jl Jendral Sudirman No 78 Kecamatan Pemalang / Sewa tanah di halaman puskesmas rowosari kec. Ulujami periode maret 2022 sd maret 2025 3tahun	DISEWAKAN	
134	Rt 05 Rw 06 Widuri Asri Pemalang / stor sewa kios (30kios) yang terletak dikawasan objek wisata widuri selama 10 hari	DISEWAKAN	
135	Desa Purwosari Rt 02 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
136	Kelurahan Purwoharjo RT 09 Rw 04 Comal / Stor kios	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	dishub terminal comal selama 1 tahun		
137	Ds Gumawang Rt 12 Rw 04 Wiradesa / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
138	Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
139	Ds Gumawang Rt 12 Rw 04 Wiradesa / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
140	Dusun Kawedenan Desa Rowosari Rt 05 Rw 06 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
141	Sukorejo Rt 02 Rw 01 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
142	Dusun Slastri Rt 16 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
143	Dusun 4 Rowosari Rt 02 Rw 09 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
144	Dusun Situnggal sikayu Rt 03 Rw 01 Sikayu Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
145	Dusun 4 Purwosari Rt 02 Rw 09 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
146	Desa Sidorejo Rt 04 Rw 05 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
147	Desa Pendowo Rt 05 Rw 04 Bodeh / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
148	Desa Purwoharjo Rt 08 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
149	Desa Purwoharjo Rt 08 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
150	Desa Pesandangan Rt 01 Rw 07 Ujunggede / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
151	Dusun Balutan Rt 10 Rw 04 Purwosari / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
152	Dusun Balutan Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
153	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
154	Dusun Purwoharjo Rt 01 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
155	Desa Kauman Rt 04 Rw 01 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
156	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
157	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
158	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
159	Desa Padek RT 12 RW 04 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
160	Kelurahan Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
161	Desa Purwoharjo Rt 04 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
162	Dusun Pecangakan Rt02 Rw 05 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
163	Dusun Pecangakan Rt 08 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
164	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
165	KEL PURWOHARJO / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
166	Stor lahan di Jl Tangkuban Perahu Rt 003 Rw 007 Kel Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
167	Stor lahan di Jl Tangkuban Perahu Rt 003 Rw 007 Kel Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
168	Sewa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas di Jl Mandala 1 no 3 Kec Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
169	Sewa Tanah Milik Pemerintah Kab Pemalang di Jalan Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Kec Pemalang.	DISEWAKAN	
170	Sewa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banjaranyar Kec Randudongkal Milik Pemerintah Kab Pemalang Periode Mei 2022 sd Mei 2023	DISEWAKAN	
171	Eks Bioskop Sri Indra Mulyoharjo / Sewa menyewa tanah milik pemerintah kab. Pemalang di Eks Bioskop Sri Indah Kab Pemalang Periode Nov 2021 sd Oktober 2023	DISEWAKAN	
172	Rt 01 Rw 03 Mejagong Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
173	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
174	Rt 36 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
175	Rt 41 Rw 05 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
176	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
177	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
178	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
179	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
180	Rt 01 Rw 04 Kedungbanteng Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
181	Rt 01 Rw 04 Kedungbanteng Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
182	Rt 11 Rw 03 Karangmoncol Kec Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
183	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal/ Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
184	Rt 55 Rw 05 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
185	Rt 04 Rw 03 Pegiringan Bantarbolang / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
186	Rt 05 Rw 03 Kelurahan Rowokembu Pekalongan / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
187	RT 01 RW 02 KEL PECANGAKAN / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
188	KEL. PAMUTIH KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
189	DS. KEDUNGASARI KEC. AMPELGADING / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
190	KEL. PECANGAKAN KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
191	KEL. KAYU PUTIH KEC. PULOGADUNG / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
192	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
193	KEL. KRAWINGAN KEC. BODEH / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
194	KEL. LOWA KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
195	DS. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
196	KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
197	DS. WIYOROWETAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
198	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
199	DS. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Comal		
200	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
201	KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
202	KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
203	DS. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
204	KEL. SIDOREJO KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
205	KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
206	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
207	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
208	KEL. PECANGAKAN KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
209	KEL. PURWOSARI KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
210	KEL. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
211	DS. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
212	RT 02 RW 03 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Agustus 2023		
213	RT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
214	DS BANYUMUDAL KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
215	DS BANYUMUDAL KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
216	RT 03 RW 01 DS WANGKELANG KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
217	RT 03 RW 01 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
218	JL MAWAR RT 02 RW 01 MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
219	RT 03 RW 01 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
220	KRAJAN BARAT RT 04 RW 01 BANYUMUDAL / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
221	RT 01 RW 03 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023		
222	JL SOKA RT 01 RW 01 KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
223	DS PAMULIHAN RT 07 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
224	DS PAMULIHAN RT 10 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
225	DS PAMULIHAN RT 10 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
226	RT 01 RW 05 BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
227	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
228	RT 05 RW 04 BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
229	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
230	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	2022 sd 30 Agustus 2023		
231	RT 01 RW 08 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
232	RT 01 RW 04 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
233	RT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
234	sewa menyewa tanah milik pemerintah kab pemalang pada halaman DPMPTSP/ATM-BPD	DISEWAKAN	
235	Sewa menyewa tanah milik pemkab yang terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo, Kec Pemalang, Kab Pemalang Periode 1 th (21November22-21November23)	DISEWAKAN	
236	PTAU / Sewa menyewa tanah milik pemkab pemalang di Desa Nyamplungsari Kec Petarukan 5th (1januari 2023 - 31desember 2027)	DISEWAKAN	
237	Sewa menyewa tanah di belakang gedung kridanggo milik pemkab pml	DISEWAKAN	
238	Dukuh Krajan Wetan RT 09 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
239	RT 05 RW 01 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
240	Dukuh Karang Pule RT 01/RW 02 Mendelem Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
241	Dusun Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	TOKO Terminal Belik		
242	Dusun Krajan Timur RY 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
243	RT 03 RW 02 Beluk Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
244	Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
245	Dusun Penepen Karang Pule RT 03 RW 02 Mendelem Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
246	Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
247	Dukuh Rimpak RT 01/RW 06 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
248	RT 04/RW 01 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
249	Kuta Lor RT 43/RW 01 Kuta Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
250	Ketua Cabang Aisyiyah Kecamatan Pemalang / Pembayaran Sewa Tanah di Jalan Ir. Sutami Kel. Bojongbata	DISEWAKAN	
251	Jl Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Pemalang/ Perpanjangan sewa menyewa tanah di Jalan Tangkuban Perahu Kel Mulyoharjo Pemalang	DISEWAKAN	
252	RT 01 RW 01 Desa Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
253	Kel Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
254	Ds. Pamutih Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
255	Kel Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
256	Ds. Wiyorowetan Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	di Sub Terminal Grosir Comal		
257	SUGIHWARAS / Sewa menyewa tanah di Blok Pasar Sayur Kelurahan Mulyoharjo	DISEWAKAN	
258	PTAU / Perpanjangan sewa menyewa gedung serbaguna	DISEWAKAN	
259	Sewa Menyewa tanah dan bangunan di Jl Gatot Subroto depan taman kota comal	DISEWAKAN	
260	Perpanjangan sewa tanah di jalan Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Kec Pemalang	DISEWAKAN	
261	KONI / Perpanjangan sewa gedung kridanggo (KONI) 1th	DISEWAKAN	
262	YAYASAN MBAH JOKO RIPO / Perpanjangan sewa menyewa di Jl Kartini gang brantas 11 Rt 02 Rw 08 Kauman Petarukan	DISEWAKAN	
263	RT 01 RW 03 MEJAGONG RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
264	RT 36 RW 4 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
265	RT 55 RW 05 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
266	RT 50 RW 06 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
267	RT 50 RW 06 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
268	RT 55 RW 05 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
269	RT 10 RW 02 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
270	RT 09 RW 01 SEMINGKIR / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
271	RT 05 RW 01 PODOSUGIH PEKALONGAN / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
272	RT 30 RW 04 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
273	RT 54 RW 05 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
274	KARANGBULU RT 02 RW04 KEC MOGA / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
275	PDAM BLOK SIBANTENG / Perpanjangan sewa tanah milik Pemkab Blok Sibanteng belakang PDAM Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang	DISEWAKAN	
276	PDAM RANDUDONGKAL / Perpanjangan sewa tanah milik Pemkab Blok 36 persil 132 Desa Randudongkal Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	DISEWAKAN	
277	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI/ Sewa sebagian tanah milik Pemkab yang terletak di Rt 21 / Rw 06 Desa Banjaranyar Randudongkal	DISEWAKAN	
278	Sewa tanah milik pemkab yg terletak di Blok Sanggeman Desa Kalirandu Kec Petarukan Kab Pemalang	DISEWAKAN	
279	Sewa tanah milik pemkabb pemalang yang terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo Kec Pemalang (20 hari)	DISEWAKAN	
280	Perubahan besaran sewa sebagian tanah milik pemkab pml yg terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo (Prima Medika)	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
281	Pembayaran Sewa Tanah di Jalan Ir. Sutami Kel. Bojongbata Ketua Cabang Aisyiyah Kecamatan Pemalang	DISEWAKAN	
282	Sewa Tanah Milik Pemkab Pemalang yang terletak di Blok Siwareng Siwatu Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab Pemalang (PT HWA SEUNG)	DISEWAKAN	
283	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab di Blok Gempol Persil 84/S2 Kab. Pemalang	DISEWAKAN	
284	Sewa menyewa MCK di Terminal Randudongkal Milik Pemkab Pemalang	DISEWAKAN	
285	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Halaman Kec Pulosari (PT BPR BKK JATENG)	DISEWAKAN	
286	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 1	DISEWAKAN	
287	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 2	DISEWAKAN	
288	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 3	DISEWAKAN	
289	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 4	DISEWAKAN	
290	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 5	DISEWAKAN	
291	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Ruko 6		
292	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 7	DISEWAKAN	
293	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 8	DISEWAKAN	
294	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 9	DISEWAKAN	
295	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 10	DISEWAKAN	
296	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
297	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
298	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
299	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
300	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
301	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
302	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
303	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
304	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
305	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
306	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
307	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
308	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
309	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
310	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
311	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
312	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
313	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
314	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
315	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
316	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
317	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
318	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
319	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
320	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
321	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo		
322	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
323	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
324	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
325	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
326	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
327	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
328	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
329	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
330	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
331	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
332	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
333	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
334	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
335	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
336	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
337	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
338	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan	DISEWAKAN	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tangkupan Prahu Mulyoharjo		
339	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
340	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
341	Tanah di Desa Bantarbolang	BELUM DISEWAKAN	±60 Objek Sewa
342	Jl Kyai Makmur	BELUM DISEWAKAN	Belakang Kantor Wakil
343	Jl Ahmad Yani	BELUM DISEWAKAN	Ex Bioskop Indra

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan sistim sewa merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. BPKAD berupaya untuk meningkatkan potensi pendapatan sewa dengan meringkas mekanisme sewa, mempermudah persyaratan pengajuan sewa dan perpanjangannya serta mengelola sewa berbasis aplikasi untuk menghindari fraud dalam pengelolaan pendapatan sewa. Dengan Upaya tersebut diharapkan pendapatan sewa dapat direalisasikan dengan optimal.

Untuk mendukung tercapainya indikator tujuan maka ditetapkan indikator sasaran BPKAD. Terdapat 5 Indikator sasaran pada BPKAD yaitu :

Sasaran 1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator Sasaran 1	1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran 2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran 3. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah 4. Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki
Sasaran 2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Sasaran 2	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	2. Nilai SAKIP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melakukan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang diperiksa setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk menghasilkan opini BPK RI. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah meraih opini BPK RI atas LKD Kabupaten Pemalang dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali sejak Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 dan 2025. Sedangkan hasil opini BPK Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 menghasilkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian). Hasil opini BPK RI atas LKD Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 - 2023

Hasil Opini BPK	Tahun dikeluarkannya Opini BPK RI atas LKD Pemkab Pemalang								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 berupa **Wajar Dengan Pengecualian (WDP),** memacu dan pemicu Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembenahan dan perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring evaluasi dan pengawasannya. Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan penetapan kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan resiko maka Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai berupaya menggunakan management resiko saat melakukan desk RKA SKPD. Selain itu, implementasi transaksi keuangan non tunai pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 mulai di sosialisasikan untuk mendukung upaya pencegahan kebocoran anggaran belanja maupun anggaran pendapatan. Penerapan pembayaran retribusi dengan mekanisme *e*retribusi sangat didorong oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD, selain itu disusun pula peraturan Bupati tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari pelaksanaan transaksi non tunai. Penatausahaan Keuangan diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya fraud pada pelaksanaan APBD. Pemisahan fungsi pejabat pengelola keuangan pada SKPD juga telah diatur kewenangannya, agar tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab dan wewenang serta rangkap tugas yang menyalahi sistim pengendalian internal (SPI).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Thn 2024	SPM /Standar Nasional	Indikator Program/IKK/Indikator SDGs	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
						Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15	6,528		Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
					Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60%	60%	-	-	72,02%	-	-	-	
2.	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20	15		Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15	4,0260		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
					Persentase Penyampaian	100%	100%	-	-	100%	-	100%	100%	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan									
4.	Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki	60%	45,53 %		Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,08	86,63		Nilai SAKIP di BPKAD	60,50	70,05	75,00	75,00	64,15	70,05	71,00	71,50	
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD													
					Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan tenaga Kesehatan	13,15%	24,50%	24,25%	24,00%	24,94%	-	24,25%	24,00%	
					Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (Budget Execution)	-6,50%	-6,00%	-5,50%	-5,00%	-6,86%	-	-5,50%	-5,00%	
					Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya (Cash	11	10,50	10,00	9,50	11	-	10,00	9,50	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					Management)									
					Manajemen Aset (Semua kriteria dalam management aset terpenuhi = 100% , Hanya 3 kriteria = 75%, Hanya 2 kriteria = 50%, Hanya 1 kriteria = 25%, Semua Kriteria tidak terpenuhi = 0%) Kriteria : Apakah ada daftar aset tetap?	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					Apakah nilai aset tercantum dalam laporan keuangan?	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
					Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	86,47%	86,50%	87,00%	87,50%	86,47%	86,50%	87,00%	87,50%	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah dilakukan beberapa upaya inovasi untuk memangkas panjangnya rantai birokrasi dan percepatan pelayanan. Berikut history inovasi yang pernah dilaksanakan oleh BPKAD :

Pada Tahun 2018, BPKAD melaksanakan inovasi " NANAS MADU ONLINE " (Pelayanan Pencairan Dana dengan Sistem Manajemen Terpadu Online) yaitu berupa integrasi sistem pembayaran SP2D secara online. Sistem yang diintegrasikan adalah Customer Management Sistem (CMS) yang ada di Bank Jateng Cabang Pemalang dengan SIMDA Keuangan yang ada di BPKAD.

Inovasi ini berhasil mempersingkat proses pembayaran dana melalui SP2D yang semula dilakukan selama 3 hari menjadi beberapa menit saja, karena SP2D online ini tidak menunggu hardcopy saat transfer dana ke rekening penerima. Inovasi ini sejalan dengan salah sasaran BPKAD yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Transparansi tercapai karena transfer dana ke rekening penerima dapat diakses melalui Web www.pemalangkab.go.id/bpkad sehingga para calon penerima dana dapat menggunakan smartphone untuk memantau apakah dana yang diajukan sudah cair atau belum.

Pada Tahun 2019, Inovasi Nanas Madu Online disempurnakan. Pelayanan pencairan dana dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Customer Management System Bank Jateng Cabang Pemalang yang semula hanya mengakomodir pencairan belanja langsung atau dana operasional kegiatan saja tetapi pada Tahun 2019, sistem ini telah diupgrade untuk mengakomodir pencairan Gaji PNSD. Sebelum di upgrade, Gaji PNSD tidak dapat diambil pada tanggal 1 tiap bulannya apabila tanggal 1 adalah tanggal merah (libur). Tetapi saat ini, gaji dapat diambil tepat pada tanggal 1 walaupun tanggal 1 adalah tanggal merah (libur).

Pada Tahun 2021, Inovasi Nanas Madu Online sempat terhenti karena adanya kebijakan penggunaan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dirancang bangun oleh Kementrian Dalam Negeri. Pada saat itu, SIPD belum mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah khususnya belum dibangunnya link dengan CMS Bank Jateng. Konten SIPD yang belum mengakomodir Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, mengharuskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beralih ke Aplikasi SIMDA Keuangan untuk penatausahaan Keuangan Daerah. Sehingga pada Akhir Tahun 2021, Inovasi Nanas Madu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Online dapat dilaksanakan kembali walaupun tidak sesempurna sebelumnya karena akses Nanas Madu Online melalui Handphone belum dapat diakomodir menimbang sarana prasarana yang belum memadai.

Selain inovasi di atas, BPKAD berusaha melakukan penyederhanaan prosedur pemanfaatan aset daerah yang dilakukan dengan mekanisme sewa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merencanakan Inovasi Pemanfaatan Aset Daerah dengan Judul Inovasi “SI PAMAN SIWA” (Aplikasi Pemanfaatan Aset Daerah dengan Sistim Sewa) untuk Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahap persiapan, dokumentasi, inventarisasi, pemotretan kondisi eksisting, penetapan pihak pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan inovasi serta pemetaan tugas masing masing pihak. Apabila Inovasi ini terlaksana, diharapkan permohonan sewa aset daerah dari masyarakat dan verifikasi permohonan sewanya dapat dilakukan melalui aplikasi yang sederhana. Hal ini bertujuan menyederhanakan prosedur sewa aset dan mempercepat proses persetujuan sewa kepada masyarakat. Selain itu, Inovasi ini diharapkan dapat mendukung transparansi pengelolaan aset daerah dengan memberikan data dan informasi terkait potensi aset daerah yang dapat disewakan dan aset daerah yang telah disewa oleh masyarakat. Dengan penyederhanaan prosedur sewa dan kemudahan akses data aset daerah yang dapat disewakan diharapkan pemanfaatan aset daerah dapat menjadi komponen pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan.

Pada Tahun 2022, pembangunan aplikasi SI PAMAN SIWA telah dilakukan sampai tahap 75% dari ekspektasi sebelumnya. Data Pemanfaatan aset daerah telah dapat diakses lewat alamat sipamansiwa_bpkad.Pemalangkab.go.id. Tetapi pengajuan sewa aset dari calon penyewa belum bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Penyempurnaan aplikasi ini akan dilakukan pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, aplikasi SI PAMAN SIWA belum sempurna disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani aplikasi tersebut serta kurangnya ketersediaan anggaran.

Pada Tahun 2024, aplikasi SI PAMAN SIWA mengalami kondisi stagnan, tidak ada upgrade maupun penyempurnaan sistem karena keterbatasan sumber daya manusia.

Pada Tahun 2025, aplikasi SI PAMAN SIWA mendapat alokasi anggaran untuk penyempurnaan sistem tetapi sistem tersebut belum bisa digunakan karena belum melalui tahap trial eror dalam pemanfaatan BMD.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3. Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2024

Penguatan akuntabillitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dievaluasi setiap tahun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pemalang. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerjanya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Riwayat capaian nilai SAKIP BPKAD sebagai berikut :

- Pada Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/827/RHS/2019 tanggal 6 Mei 2019 adalah 56,84 dengan kategori CC.
- Pada Tahun 2020, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/194/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang naik menjadi 60,26 dengan kategori B (Baik).
- Pada Tahun 2021, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/56/EVS/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 61,92 dengan kategori B (Baik).
- Pada Tahun 2022, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/29/EVS/2022 tanggal 20 Juli 2022, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 62,15 dengan kategori B (Baik).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Pada Tahun 2023, berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/029/EVS/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 63,25 dengan kategori B (Baik).
- Pada Tahun 2024, berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/206/EVS/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 64,15 dengan kategori B (Baik).
- Pada Tahun 2025, berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700.1.2.1/0495/2025 tanggal 26 Mei 2025, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 70,05 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Pada Tahun 2025, kategori nilai SAKIP BPKAD mengalami peningkatan disbanding tahun-tahun sebelumnya yaitu dari B (Baik) menjadi BB (sangat Baik). Hal ini membuktikan keseriusan BPKAD dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Capaian nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel.2.10
Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2019 - 2025

Tahun Penilaian & Nomor LHE	KOMPONEN NILAI SAKIP					NILAI SAKIP BPKAD
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Capaian Kinerja	
Tahun 2019 Nomor : 700/827/RHS/2019 Tanggal : 6 Mei 2019	23,19	15,63	7,15	0,63	10,25	**56,84**
Tahun 2020 Nomor : 700/194/VI/2020 Tanggal : 10 Juni 2020	23,19	15,63	7,15	0,80	13,50	**60,26**
Tahun 2021 Nomor : 700/56/EVS/2021 Tanggal : 12 Agustus 2021	23,19	15,63	7,15	1,21	14,75	**61,93**
Tahun 2022 Nomor : 700/29/EVS/2022 Tanggal : 20 Juli 2022	21,60	18,00	10,05	12,50	-	**62,15**
Tahun 2023 Nomor : 700/029/EVS/VI/2023 Tanggal : 21 Juni 2023	21,00	19,50	9,75	13,00	-	**63,25**
Tahun 2024 Nomor : 700/206/EVS/VI/2024 Tanggal : 13 Juni 2024	21,00	19,83	9,82	13,50	-	**64,15**
Tahun 2025 Nomor : 700.1.2.1/0495/2025 Tanggal : 26 Mei 2025	21,21	21,00	10,34	17,50	-	**70,05**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2025 dibandingkan dengan hasil evaluasi Tahun 2024, mengalami lonjakan capaian sebesar 5,9 (dari 64,15 dengan kategori B menjadi 70,05 dengan kategori BB). Hal ini merupakan bukti keseriusan BPKAD dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP dari tahun ke tahun.

Rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Nomor : 700.1.2.1/0495/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan pembahasan kembali terhadap perencanaan kinerja, terutama pada indikator-indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, melalui penyusunan target yang lebih realistis dan strategis, peningkatan kualitas pengukuran kinerja serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Mempublikasikan secara berkala dokumen-dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui media yang mudah diakses publik dalam hal ini website https://esr.menpan.go.id/ . Adapun dokumen yang belum terpublikasi pada saat desk evaluasi yaitu rencana strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi (RA).
   - Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja OPD Pertriwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya;
   - Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja OPD pertriwulan berikutnya, yang disusun berdasarkan masalah/hambatan dalam upaya capaian kinerja OPD.
3. Mengelola website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang https://bpkad.pemalangkab.go.id secara berkala dan konsisten sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja instansi dengan mengupload dokumen yang belum terpublikasi pada saat desk evaluasi yaitu Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, Cascading, Laporan Capaian Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPKAD sebagai berikut :

1. BPKAD telah melaksanakan evaluasi atas capaian indikator kinerja pada renstra Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi ketercapaian kinerja ini menjadi dasar penetapan indikator kinerja pada Renstra Tahun 2025-2029. Evaluasi dan penetapan indikator kinerja dilakukan dengan menyandingkan capaian indikator lama, mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian kinerja serta mempedomani prinsip SMART C dalam menetapkan indikator dan target kinerja untuk periode renstra tahun 2025-2029. SMART C adalah :
   - S = Spesific (Indikator Kinerja harus spesifik dan tidak bermakna ganda);
   - M = Measurable (Indikator Kinerja harus dapat diukur);
   - A = Agreeable (Indikator Kinerja harus disepakati oleh pemilik IKU);
   - R = Realistic (Indikator Kinerja harus dapat dicapai namun tetap berkualitas dan menantang);
   - T = Time Bounded (Indikator Kinerja harus memiliki batas waktu pencapaian;
   - C = Continuously Improved (Kualitas dan target kinerja disesuaikan dengan perkembangan strategi dan kebijakan perangkat daerah serta selalu disempurnakan).

   Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka dapat disandingkan perbedaan penetapan indikator kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Renstra BPKAD

No	Target Renstra Tahun 2021-2026							Target Renstra Tahun 2025-2029					
	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Hasil Pengukuran IPKD	80	80	80	80	80	80	Hasil Pengukuran IPKD	75	75	75	75	75
2	Persentase Pemanfaatan BMD	93	93	93	93	93	93						
3	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15	15	15	15	15	15	Persentase Mandatory Spending yang terpenuhi sesuai ketentuan	70	70	70	70	70
4	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20	20	20	20	20	20						
5	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15	15	15	15	15	15						
6	Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki	35	40	45	50	55	60	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolan Aset Daerah (IPA)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,09	84,10	84,20	84,30	84,40,	84,50	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	88	88	88
8	Nilai SAKIP	60,10	60,20	60,30	60,40	60,50	60,60	Nilai SAKIP	75	75	75	75	75

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Selain evaluasi terhadap penetapan indikator kinerja utama dan targetnya, Pimpinan BPKAD telah melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana terkait.

2. BPKAD telah menindaklanjuti rekomendasi APIP terkait publikasi dokumen SAKIP ke website Kemenpan RB secara rutin dan berkala. Dokumen yang telah di upload adalah dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berupa Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Aksi (RA).
3. BPKAD telah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari tahun 2020-2024, Cascading, Laporan Capaian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 ke website BPKAD Kabupaten Pemalang (https://bpkad.pemalangkab.go.id)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib mempunyai SAKIP yang baik serta Reformasi Birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun 2023, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melakukan terobosan baru dengan dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (double track), yaitu penyelesaian fokus pada isu hulu atau yang disebut RB General dan penyelesaian fokus pada isu hilir atau disebut dengan RB Tematik. Berdasarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 3 Tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi 2 yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi General lebih mengupayakan penyelesaian masalah hulu yang fokus pada masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi pada internal birokrasi, yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah lainnya. Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang fokus pada penyeleaian masalah hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat yang terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang muncul sebagai akibat adanya masalah hulu yang tidak segera terselesaikan. Terdapat 4 Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu : Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Percepatan Prioritas aktual presiden

https://jdih.pemalangkab.go.id/

terdiri dari Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengendalian Inflasi.

Pembagian pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi 2 fokus tersebut menjawab ekspektasi presiden, masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan RB yang menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat dan tepat menyentuh permasalahan faktual.

Implementasi RB General dan RB Tematik pada Tahun 2023, berimplikasi pada tugas inspektorat yang tidak lagi melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah, karena penilaian Reformasi Birokrasi hanya dilakukan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut BPKAD mendukung RB General pada beberapa kegiatan utama yaitu :

1. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian
   Dengan Indikator Tingkat Maturitas SPIP
   Pada kegiatan utama ini, rencana aksi yang dilaksanakan oleh BPKAD adalah :
   - melaksanakan pembinaan pengelolaan aset daerah
   - melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
2. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   Dengan Indikator Opini BPK
   Pada kegiatan utama ini, rencana aksi yang dilaksanakan oleh BPKAD adalah :
   - menyusun surat edaran Bupati tentang penyampaian laporan keuangan SKPD;
   - melaksanakan desk penyusunan laporan BMD;
   - melaksanakan desk penyusunan laporan keuangan SKPD;
   - menyusun laporan keuangan Pemda (hasil konsolidasi laporan keuangan SKPD);
   - menyampaikan LKPD kepada Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk di reviu;
   - menyampaikan laporan keuangan Pemda unaudited setelah di reviu Inspektorat ke BPK RI.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, bidang perbendaharaan serta bidang akuntansi dan aset daerah;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Isu strategis tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai tinggi, belum sesuai ketentuan.**

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 146 ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (Tiga Puluh Persen) dari Total Belanja APBD. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (Tiga Puluh Persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangan pada tanggal 5 Januari 2022 sehingga porsi belanja pegawai sebesar 30% dari Total

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Belanja APBD harus terwujud paling lambat pada tanggal 5 Januari 2027. Pada Tahun 2023, Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Pemalang masih melebihi ketentuan tersebut yaitu kisaran 47%. Faktor yang mempengaruhi besarnya belanja pegawai adalah jumlah ASN dan besaran tunjangan. Kebijakan Pemerintah untuk mengangkat semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari urusan Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu faktor yang memicu kenaikan belanja pegawai. Selain itu, besarnya tunjangan kinerja berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS di Kabupaten Pemalang juga andil mempengaruhi tingginya alokasi belanja pegawai secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Pemalang harus fokus menekan tingginya belanja pegawai, agar ketentuan belanja pegawai 30% dari Total Belanja APBD dapat dipenuhi pada 5 Januari 2027.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan persentase belanja pegawai di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kompetensi ASN yang sudah ada agar dapat memperkecil kebutuhan CPNS;
2. Mengoptimalkan penilaian kinerja ASN yang dikaitkan dengan ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Pimpinan sampai dengan Indikator Kinerja masing-masing Individu, sehingga pemberian Tunjangan Kinerja tidak hanya berdasarkan output dari rutinitas kerja.
3. Menyusun peta kebutuhan ASN secara cermat, untuk menghindari penerimaan pegawai yang menumpuk pada beberapa urusan saja.
4. Penyederhanaan Struktur Organisasi dengan mekanisme miskin struktur kaya fungsi. Penyederhanaan SOTK akan berdampak pada efisiensi pembayaran belanja pegawai bagi pejabat struktural.

2. Belanja Infrastruktur pelayanan publik masih rendah.

Berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 5 Januari 2027. Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun Anggaran 2025, belanja infrastruktur pelayanan publik baru mencapai 37%. Pencapaian

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mandatory spending tersebut sangat membutuhkan komitmen dan konsistensi Kepala Daerah dan TAPD untuk mewujudkannya.

3. **PAD belum mendukung belanja daerah secara signifikan.**

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD. Pengelolaan PAD belum optimal, belum sepenuhnya pengelolaan PAD dilakukan berbasis digital sehingga kemungkinan terjadinya fraud (kebocoran PAD) masih besar.Penetapan target PAD belum mempertimbangkan penyelesaian piutang pajak daerah dan masih berpedoman pada realisasi tahun-tahun sebelumnya. Penggalian potensi PAD belum maksimal dimana pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD berjalan landai. Piutang pajak daerah yang meninggi tidak disertai dengan langkah-langkah penyelesaian piutang pajak daerah yang konkrit. Sehingga realisasi PAD belum mencerminkan PAD yang optimal karena tingginya piutang pajak tersebut. Peningkatan PAD sangat membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah, dimana PAD dapat diandalkan untuk memenuhi belanja daerah. Sehingga ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan menurun secara bertahap. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan supporting terbesar dalam memenuhi kebutuhan daerah.

4. **Kualitas Tata Kelola Aset Daerah belum optimal.**

   Pengelolaan Keuangan Daerah tidak lepas dari pengelolaan Aset Daerah, karena aset daerah menjadi komponen dalam Neraca. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengamanan, pemanfaatan, penatausahaan, penghapusan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan Aset yang baik dan sesuai ketentuan akan mendukung pengelolaan yang keuangan yang baik pula. Selain itu, pengelolaan aset yang baik dapat mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kualitas tata kelola aset daerah yang baik dapat didukung dengan tidak adanya aset daerah yang hilang atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, tersedianya data yang akurat tentang lokasi, kepemilikkan, bukti kepemilikkan, pemanfaatan serta informasi tentang kondisi fisik aset yang dikelolanya, pembayaran sewa aset daerah dilakukan secara non tunai, teradministrasinya penerimaan pemanfaatan aset daerah, terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan aset daerah serta akuntabilitas pelaporan Barang Milik Daerah. Selain itu, sangat perlu dilaksanakan Kerjasama dengan pihak APH dengan tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mengoptimalkan pendapatan sewa BMD. Sosialisasi terbuka kepada Masyarakat juga perlu dilakukan terkait mekanisme sewa BMD, syarat ketentuan yang harus dipenuhi serta sanksi-sanksi yang bisa dikenakan atas pelanggaran pada saat pelaksanaan sewa BMD.

5. **Pengamanan Barang Milik Daerah belum optimal.**

   Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah berupa Pengadaan patok dan pemasangan patok pada Tanah Milik Pemda, fasilitasi proses Sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang, fasilitasi proses asuransi Alat Berat dan Kendaraan Dinas Roda Empat serta Pengadaan dan Pemasangan Papan Identitas pada Tanah Milik Pemda. Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan upaya mendapatkan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dalam rangka meminimalkan kemungkinan barang milik daerah yang hilang karena belum dimilikinya bukti kepemilikan. Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat concern dan fokus pada upaya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pemalang. Sampai dengan Tahun 2024, jumlah Tanah Milik Pemkab Pemalang sebanyak 1.980 Bidang. Tanah milik Pemkab Pemalang yang telah bersertifikat sebanyak 1.004 Bidang atau 50,71%. Sebanyak 976 bidang tanah milik Pemda yang belum bersertifikat akan dilakukan pensertifikatan secara bertahap.

6. **Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal.**

   Pengelolaan keuangan daerah sangat membutuhkan teknologi informasi agar dapat menghasilkan data dan informasi yang transparan dan akuntabel. Transparansi pengelolaan keuangan didukung dengan pengelolaan website dan penggunaan sosial media yang masif, konsisten dan berkelanjutan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat membutuhkan sistem aplikasi yang memadai, mudah diakses dan sesuai dengan amanat regulasi pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan implementasi transaksi keuangan daerah non tunai pun memerlukan dukungan teknologi informasi dalam penerapannya. Tahapan Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah membutuhkan teknologi informasi yang handal agar dapat terwujud tata Kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

- Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain :
  a. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintah Daerah;
  g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

  dan masih banyak lagi regulasi pengelolaan keuangan yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pemalang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai salah satu yang menandatangani perjanjian kerja tersebut, bertanggungjawab atas ketercapaian output kinerja yang tela disepakati.;
- Motivasi, kemauan kerja yang tinggi serta kemampuan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk Masyarakat merupakan kekuatan untuk meningkatkan pelayanan pengelolan keuangan daerah.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Penempatan pegawai yang belum mempertimbangkan kompetensi, latar belakang Pendidikan dan kebutuhan organisasi;
- Belum terintegrasinya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
- Bukti kepemilikkan aset daerah belum optimal khususnya bukti kepemilikkan tanah Pemerintah daerah;
- Pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah belum seluruhnya berbasis teknologi informasi sehingga pengelolaannya belum optimal;
- Aset Pemerintah Daerah berupa tanah dan Gedung belum terinventarisasi optimal, sehingga terdapat aset daerah yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak;
- Pengelolaan Barang Milik Daerah belum menggunakan sistim aplikasi yang sesuai dengan ketentuan regulasi pengelolaan BMD yang berlaku dan terbaru.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Kepuasan stakeholder dan/atau pengguna layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Hasil opini BPK RI atas LKPD Pemalang. Pada Tahun 2023, Kabupaten Pemalang sempat mendapat opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) atas LKPD Tahun 2022. Tetapi hal tersebut merupakan tantangan untuk bangkit dan memperbaiki opini atas LKPD. Selanjutnya pada Tahun 2024 dan 2025, Kabupaten Pemalang berhasil mendapatkan opini WTP Kembali untuk LKPD Tahun 2023 dan LKPD Tahun 2024. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah agar selalu optimal, akuntabel, transparan dan berorientasi melayani Masyarakat
- Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik dengan pihak ketiga merupakan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Mitra kerja tersebut adalah :
  1 PT Bank Jateng Cabang Pemalang terkait dengan penempatan, penyimpanan dan pengelolaan uang daerah;
  2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Penerimaan Bagi Hasil BUMD;
  3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, pelaporan dana transfer pemerintah pusat serta monitoring pelaporan pajak;
  4 Kementrian Keuangan terkait dengan kebijakan Dana Perimbangan dan Belanja Transfer;
  5 Kementrian Dalam Negeri terkait Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah;
  6 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait monitoring implementasi amanat regulasi pengelolaan keuangan daerah;
  7 KPP Pratama Pekalongan terkait penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak;
  8 PT Taspen Persero terkait layanan pensiun;
  9 Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait layanan proses sertifikat tanah milik Pemda;
  10 Kejaksaan Negeri terkait pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi pendorong Pemerintah Daerah untuk berbenah dalam penyusunan APBD. Berdasarkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

regulasi tersebut, terdapat beberapa amanat yang harus dipatuhi dan segera ditindaklanjuti secepatnya. Amanat tersebut terkait alokasi belanja pegawai, belanja infrastruktur pelayanan publik, belanja yang bersumber dari pajak dan ketentuan pengelolaan keuangan lainnya yang sangat mempengaruhi postur APBD;

- Perubahan SOTK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 4 tahun 2025 mengharuskan penggabungan organisasi BPKAD dengan BAPENDA merupakan tantangan tersendiri dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Tugas dan fungsi yang sebelumnya diampu oleh 2 perangkat daerah digabung menjadi satu perangkat daerah saja. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang inovatif, berorientasi pelayanan tinggi, kompetensi yang cukup dan sarana prasarana yang sesuai kebutuhan.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah;
e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.13 ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.13
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**02**					**Urusan Penunjang Bidang Keuangan**				**496.427.072.400**					**496.427.072.400**	
5	**02**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP BPKAD	BPKAD	75,00	**13.443.469.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP BPKAD	BPKAD	75,00	**13.443.469.000**	
5	**02**	**01**	**2**	**01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	12 Dok	**12.740.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	12 Dok	**12.740.000**	
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	3 dok	2.520.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	3 dok	2.520.000	
5	02	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	46 dok	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	46 dok	700.000	
5	02	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	92 dok	2.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	92 dok	2.520.000	
5	02	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	46 dok	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	46 dok	1.400.000	
5	02	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	92 dok	4.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	92 dok	4.900.000	
5	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	BPKAD	5 Lap	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	BPKAD	5 Lap	700.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	16 Lap	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	16 Lap	0	
5	**02**	**01**	**2**	**02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	7 dok	**6.172.353.000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	7 dok	**6.172.353.000**	
5	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	43 org	6.141.519.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	43 org	6.141.519.000	
5	02	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/ Bendahara Keputusan BPKAD Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS, Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang dll)	BPKAD	20 dok	30.134.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/ Bendahara Keputusan BPKAD Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS, Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang dll)	BPKAD	20 dok	30.134.000	
5	02	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LKD, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah)	BPKAD	1 Lap	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LKD, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah)	BPKAD	1 Lap	700.000	
5	**02**	**01**	**2**	**05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian**	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	1 Jenis	**0**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian**	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	1 Jenis	**0**	
5	02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	56 org	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	56 org	0	
5	**02**	**01**	**2**	**06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	10 dok	**310.876.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	10 dok	**310.876.000**	
5	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPKAD	12 paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPKAD	12 paket	7.500.000	
5	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPKAD	1 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPKAD	1 paket	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD	1 Paket	30.000.000	
5	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD	12 Dok	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD	12 Dok	0	
5	02	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	20 Lap	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	20 Lap	5.000.000	
5	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	25 Lap	168.376.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	25 Lap	168.376.000	
5	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	4 Dok	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	4 Dok	0	
5	**02**	**01**	**2**	**07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	1 lap	**6.000.000.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	1 lap	**6.000.000.000**	
5	02	01	2	07	0025	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	1 unit	6.000.000.000					6.000.000.000	
5	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	BPKAD	1 paket	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	BPKAD	1 unit	0	
5	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	BPKAD	10 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	BPKAD	2 unit	0	
5	**02**	**01**	**2**	**08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	BPKAD		**812.500.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	BPKAD		**812.500.000**	
5	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	12 Lap	10.000.000	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	12 Lap	10.000.000	
5	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD	4 Lap	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD	4 Lap	450.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	2.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	2.500.000	
5	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD	2 Lap	350.000.000	
5	**02**	**01**	**2**	**09**		**Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	3 keg	**135.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	3 keg	**135.000.000**	
5	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	BPKAD	20 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	BPKAD	20 unit	100.000.000	
5	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPKAD	5 unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPKAD	5 unit	0	
5	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	2 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	2 unit	25.000.000	
5	02	01	2	09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1 Unit	10.000.000	
5	**02**	**02**				**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%	**482.615.873.400**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%	**482.615.873.400**	
							Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	BPKAD	60%			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	BPKAD	60%		
							Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	BPKAD	100%			Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	BPKAD	100%		
							Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%			Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%		
5	**02**	**02**	**2**	**01**		**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	BPKAD	7 dok	**961.500.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	BPKAD	7 dok	**961.500.000**	
5	02	02	2	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	211.435.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	211.435.000	
5	02	02	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	142.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	142.625.000	
5	02	02	2	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	BPKAD	2 dok	317.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	BPKAD	2 dok	317.720.000	
5	02	02	2	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	3 dok	289.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	3 dok	289.720.000	
5	**02**	**02**	**2**	**02**		**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	4 Jenis	**245.900.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	4 Jenis	**245.900.000**	
5	02	02	2	02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	24 dok	148.800.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	24 dok	148.800.000	
5	02	02	2	02	0007	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan	BPKAD	1.000 lap	34.820.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan	BPKAD	1.000 lap	34.820.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan 1Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan 1Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
5	02	02	2	02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	1 dok	28.200.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	1 dok	28.200.000	
5	02	02	2	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan poemerintah kabupaten/kota	BPKAD	95 org	34.080.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan poemerintah kabupaten/kota	BPKAD	95 org	34.080.000	
5	**02**	**02**	**2**	**03**		**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	6 dok	**235.970.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	6 dok	**235.970.000**	
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	18 Lap	5.225.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	18 Lap	5.225.000	
5	02	02	2	03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1 Lap	46.550.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1 Lap	46.550.000	
5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	BPKAD	2 dok	184.195.000	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	BPKAD	2 dok	184.195.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten				
5	02	02	2	03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	1 dok	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	1 dok	0	
5	02	02	2	03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	BPKAD	1 dok	0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	BPKAD	1 dok	0	
5	**02**	**02**	**2**	**04**		**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenagan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	BPKAD	90%	**480.902.553.400**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenagan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	BPKAD	90%	**480.902.553.400**	
5	02	02	2	04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keunagan	BPKAD	12 Lap	444.393.212.900	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keunagan	BPKAD	12 Lap	444.393.212.900	
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	50 Lap	9.663.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	50 Lap	9.663.000.000	
5	02	02	2	04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kavbupaten/Kota	BPKAD	12 Lap	26.846.340.500	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kavbupaten/Kota	BPKAD	12 Lap	26.846.340.500	
5	**02**	**02**	**2**	**05**		**Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah LingkupPengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 keg	**269.950.000**	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah LingkupPengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 keg	**269.950.000**	
5	02	02	2	05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	BPKAD	1 dok	247.050.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem	BPKAD	1 dok	247.050.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bidang Keuangan Daerah	Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				Bidang Keuangan Daerah	Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				
5	02	02	2	05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pemalang	BPKAD	75 Org	22.900.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pemalang	BPKAD	75 Org	22.900.000	
5	**02**	**03**				**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	***100%***	**367.730.000**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	***100%***	**367.730.000**	
5	**02**	**03**	**2**	**01**		**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Tersusunnya Dokumen Pengelolan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%	**367.730.000**	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Tersusunnya Dokumen Pengelolan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%	**367.730.000**	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan	BPKAD	2 dok	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan	BPKAD	2 dok	5.000.000	
5	02	03	2	01	0007	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	410 Lap	224.360.000	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	410 Lap	224.360.000	
5	02	03	2	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	115 Dok	121.620.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	115 Dok	121.620.000	
5	02	03	2	01	0012	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD	1 Lap	16.750.000	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD	1 Lap	16.750.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musrenbangdes/ Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/ musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 terdapat 110 usulan masyarakat yang diakomodir BPKAD melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Akun Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Adapun rincian usulan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.14
Daftar Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
yang dialokasikan pada APBD Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN		
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa		
1	Pelebaran Jalan Dusun Benjaran	Plakaran	110.000.000
2	Pelebaran Jalan Pertanian Penghubung Jalan Antar Desa Mandiraja-Gendoang	Mandiraja	100.000.000
3	Pembangunan Talud Jalan Kali Warman	Walangsanga	100.000.000
4	Pembangunan Jalan Aspal Dk. Krajan RT.03 RW.06	Sima	100.000.000
5	Pembangunan Drainase Jalan Brawijaya	Banyumudal	115.089.000
6	Pembangunan Jalan Aspal Tanjung Tembus Jalan Ambring	Moga	115.000.000
7	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Wangkelang	100.000.000
8	Pengaspalan Jl. Penghubung Antar Desa	Kebanggan	120.000.000
9	Pengaman Jalan Desa Volume	Pepedan	120.000.000
10	Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan	Banyumudal	100.000.000
11	Peningkatan jalan antar desa Pulosari ke Desa Cikedung Dukuh Krajan RT.07 RW.02	Pulosari	180.000.000
12	Pembangunan Rabat Beton antar Desa Gunungsari ke Desa Penakir dusun silegok RT.02 RW.04	Gunungsari	191.011.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
13	Pipanisasi 6 Dusun Karangsari Barat, Krajan dan Nusa ds Karangsari Kec Pulosari	Karangsari	175.000.000
14	Peningkatan jalan Rabat Beton Dusun Jawar ke Dusun Srawadadi	Clekatakan	200.000.000
15	Pembangunan Talud Jalan Dukuh Tundagan RT.04 RW.02	Batursari	200.000.000
16	Pembangunan Drainase RT.01-06 RW.02	Siremeng	200.000.000
17	Rabat Jalan Pertanian Dusun Kandang Gotong, RT.05 / RW.01, Desa Gombong	Gombong	110.500.000
18	Pengaspalan Jalan Dusun Rimpak, RT.03/RW.06, Desa Belik	Belik	106.000.000
19	Rabat Jalan Pertanian Dusun II, Dukuh Kenteng, RT.07/RW.03, Desa Gunungtiga	Gunungtiga	106.000.000
20	Telford Dukuh Gampeng, Dusun kuta Kidul, RT.17 / RW.04. Desa Kutha	Kuta	112.500.000
21	Rabat Jalan Pertanian Dusun Situmpeng, RT.04/RW.07, Desa Badak	Badak	112.500.000
22	Rabat Jalan Pertanian dukuh Kopijemi, Dusun Penyawungan, RT.02/RW.09, Desa Gunungjaya	Gunungjaya	106.000.000
23	Pengaspalan Jalan Poros Desa Dukuh Kalitengah - Pekutukan, RW.05-RW.06, Desa Beluk	Beluk	107.000.000
24	Rabat Beton Jalan Bodas - Mejingklak, RT.01/RW.11, Desa Mendelem	Mendelem	113.499.300
25	Rabat Beton Jalan Kalikeji, RT.03/RW.09, Desa Bulakan	Bulakan	106.500.000
26	Talud dan Pengurugan Badan Jalan Dusun Sodong Barat, RT.05/RW.01, Desa Sodong Basari	Sodong Basari	112.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
27	Talud Kalinanggung RT.02/RW.02, Desa Kalisaleh	Kalisaleh	112.200.000
28	Sarpras Wisata (Kios Semi Permanen UMKM) Telaga Silating, Desa Sikasur	Sikasur	106.000.000
29	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Dusun Barong - Krikil, Desa Simpur	Simpur	111.000.000
30	Pembangunan Jalan Dusun Jaha Desa Tundagan ke Desa Klesem Pekalongan Dusun Jaha, Desa Tundagan	Tundangan	196.179.600
31	Pembangunan Bronjong Pengaman Pemukiman Dusun Sirongge RT.13/RW.04 Desa Tundagan	Tundagan	200.000.000
32	Pembuatan rabat Beton Dusun Tembelang RT.12 RW.04 Desa Tlagasana ke Desa Karanggondang Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan	Tlagasana	162.500.000
33	Pembuatan Jalan Dusun Bantarsari ke TPST Desa Bongas	Bongas	162.500.000
34	Pengaspalan Jalan Pertanian Dusun Sipedang RT.20 RW.01 Desa Cawet	Cawet	162.500.000
35	Pengaspalan Jalan RT.06 RW.06 Dusun Playangan Desa Majalangu	Majalangu	162.500.000
36	Pengaspalan Jalan Gapura Bodas	Gapura	162.500.000
37	Pembuatan rabat Beton Dusun Celeleng Desa Majakerta ke Dusun Watucandi Desa Watukumpul	Majakerta	162.500.000
38	Pengaspalan Jalan Dusun Bentang Desa Tambi ke Desa Sanguwatang KarangJambu Purbalingga	Tambi	172.500.000
39	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Tellford) Jalan Penghubung Desa Babakan - Desa Jraganan	Babakan	186.000.000
40	Pembangunan Talud Jalan Tembus Kebandaran - Jraganan	Kebandaran	210.000.000
41	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) Jalan Penghubung Desa Jraganan - Desa Kesesirejo	Jraganan	175.000.000
42	Pembangunan Talud Jalan Tembus Karangbrai-Jraganan	Karangbrai	210.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
43	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) Jalan Penghubung Desa Kesesirejo-Desa Jraganan	Kesesirejo	175.000.000
44	Pembangunan Rabat Beton Penghubung Longkeyang-Pagilaran	Longkeyang	170.000.000
45	Pembangunan Gang Rabat Beton RT1 -RT-4	Gunungbatu	181.444.000
46	Bronjong Kali Comal	Suru	185.000.000
47	Aspal Jalan Desa Lenggerong - Desa Paguyangan	Lenggerong	185.000.000
48	Rabat Beton Jalan Poros Desa	Sumurkidang	185.000.000
49	Pembangunan Talud Jalan	Karanganyar	327.117.000
50	Pembangunan Talud	Pedagung	185.000.000
51	Aspal Jalan Desa Banjarsari	Banjarsari	185.000.000
52	Rabat Beton Jalan Desa Pabuaran - Parunggalih	Pabuaran	185.000.000
53	Pembangunan Saluran Irigasi	Lodaya	130.000.000
54	Pengaspalan Jalan Penghubung Rembul Lodaya Dusun Jambe Sewu	Rembul	154.000.000
55	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani	Semaya	133.000.000
56	Pembangunan Drainase Jalan Desa RT 05 RW 1	Semingkir	140.000.000
57	Pembangunan Jalan Baru untuk Sarpras Wisata RW 2	Kecepit	129.916.000
58	Pengaspalan Jalan Arah Lapangan Olahraga RT 02 RW 07	Gonseng	140.000.000
59	Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Buper RT 61,62 RW.06	Randudongkal	150.000.000
60	Pembangunan Jalan Karangmoncol-Randudongkal RT 12 RW 04	Karangmonsol	150.000.000
61	Peningkatan Jalan Mejagong Panusupan RT 3 RW 3	Mejagong	155.000.000
62	Normalisasi Kali Klepu Tambakrejo	Tambakrejo	199.545.000
63	Pembangunan Jogging Track Sungapan	Sungapan	175.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
64	Pengaspalan Jalan Surajaya - Karanggandul		200.000.000
65	Makadam Tanah Pertanian	Banjarmulya	160.000.000
66	Pengadaan Incenerator	Sewaka	380.000.000
67	Revitalisasi TPS3R: Mesin Pencacah dan Pemilah Kapasitas 4000 kg/Jam	Bojongnangka	81.160.000
68	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Milik Desa Dusun Mijen	Cibelok	190.000.000
69	Rabat Beton Jalan Pertanian Blok Sirayak	Jebed Utara	180.000.000
70	Talud Jalan Pertanian Dusun Silanjar	Jebed Selatan	180.000.000
71	Pembangunan Talud/Sender Dusun Kebandingan	Pener	180.000.000
72	Rabat Jalan Antar Desa Kabunan – Beji Dusun Gandulan	Kabunan	180.000.000
73	Talud Jalan Usaha Tani Jalan Ali Sadikin (Penggarit - Pener	Penggarot	180.000.000
74	Pembangunan Jalan Beton RT 06, 07 RW .05 Dusun Sigorok	Tegalmlati	146.421.000
75	Pembangunan Jalan Beton Jalan Tingkir Dusun 02	Nyamplungsari	146.421.000
76	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Garuda RT01,02,03 RW.07	Pegundan	146.421.000
77	Pembangunan Jalan Beton RT.08 RW.03 Dusun Sisumur	Pesucen	146.421.000
78	Pembangunan Jalan Beton RT.06 RW.06 Dusun Bronjong	Kendalsari	146.421.000
79	Pembangunan Jalan Beton RT.10 RW.02 Dusun Depok	Sirangkang	146.421.000
80	Pembangunan Jalan Beton Bertulang RT.36 RW.05 Dusun Kragilan	Widodaren	146.421.000
81	Rabat beton Makam Mbah Soleh penghubung Desa sidokare Kecamatan Ampelgading dan Desa Pesucen Kecamatan Petarukan Jln Makam Mbah Soleh RT 17 RW 03	Kebagusan	140.264.000
82	Pembangunan Talud Penghubung Desa Banglarangan dengan Desa Losari RT 04 RW 01	Banglarangan	140.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
83	Pembangunan Talud Jalan Pertanian RT 14 RW 4	Karangtengah	140.250.000
84	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Blok 9	Ampelgading	141.400.000
85	Rabat Beton Jalan Penghubung Antar Desa Antar Kecamatan (Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Dengan Desa Widodaren Kecamatan Petarukan) RT 1 RW 3	Blimbing	140.300.000
86	Pembangunan Jalan Makadam Jalan Pertanian Sawunggalih I	Wonogiri	135.000.000
87	Pembangunan Jalan Makadam Jalan Pertanian Penghubung Desa Sukawati dan Desa Tegalsari Barat	Sokawati	138.000.000
88	Pembangunan Rabat Beton Jalan Penghubung Desa Tegalsari Barat dan Desa Tegalsari Timur Dusun III RW 06	Tegalsari Barat	132.000.000
89	Rabat Beton RT 09 RW 04	Kelurahan Purwoharjo	195.572.000
90	Pembangunan Drainase Dusun Silayur RW 02	Tumbal	140.000.000
91	Pembangunan Rabat Beton Dusun III	Ambokulon	140.000.000
92	Talud Sungai Kebo Sasaran Usaha Pertanian RT 01 RW 01, 03	Gandu	140.000.000
93	Sender Saluran Irigasi RT 03 RW 01	Kebojongan	140.000.000
94	Talud Pertanian Desa Klegen	Klegen	140.000.000
95	Pembangunan Jembatan RT 4 RW 3	Susukan	140.000.000
96	Talud Sungai (kali klethek) RT 08 RW 03	Gedeg	110.000.000
97	Pembangunan Talud Blok 3 (Siwayan)	Sukorejo	75.000.000
98	Pembangunan/peningkatan jalan penghubung desa Botekan - Sukorejo - Sikayu	Botekan	75.000.000
99	Peningkatan Jalan Penghubung Samong-Rowosari (dk Kweden)	Rowosari	151.002.000
100	Rabat beton Jalan Lapangan RT.04 RW.01	Ambowetan	75.000.000
101	Pembangunan Talud Drainase Dusun 6 Pagergunung-Bumirejo	Pagergunung	75.000.000
102	Pembangunan Talud Gang Buntu – Pagergunung Desa Wiyorowetan	Wiyorowetan	75.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
103	Pembangunan jalan arah ke laut, dan menghubungkan desa Kaliprau Desa Tasikrejo	Tasikrejo	75.000.000
104	Pembangunan Talud Sungai pembuangan Bumirejo - Kertosari - Kaliprau (Lokasi Desa Kertosari) Desa Kertosari	Kaliprau	226.005.000
105	Pengaspalan Jalan Pamutih - Bumirejo Arah Pasar Sruwet RT.03 RW.01	Pamutih	75.000.000
106	Pengaspalan Jalan penghubung antar desa Padek - Mojo	Padek	75.000.000
107	Rabat beton jalan Dusun 3 RT.04 RW.06	Blendung	75.000.000
108	Rabat beton RW.04 RT.03 Ketapang	Ketapang	75.000.000
109	Rabat beton penghubung Mojo - Limbangan - Ketapang	Limbangan	75.000.000
110	Pengaspalan Jalan Pertanian Mojo - Pesantren RT.01 RW.01	Mojo	75.000.000
111	Pembangunan talud / sender menuju makam Syekh Maulana Maghribi Desa Pesantren	Pesantren	75.000.000
112	Pemeliharaan Talud Jalan Dusun Manis Desa Pakembaran	Pakembaran	73.092.300
113	Peningkatan Jalan (Makadam), dan Talud Jalan Desa Cibuyur- Gembyang Kec. Randudongkal Dusun Ca Desa Cibuyur	Cibuyur	132.907.700
Jumlah			16.339.900.900

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan mengakomodir semua Bantuan Keuangan Kepada Desa baik Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dalam hal ini ADD maupun Bantuan Keuangan kepada desa yang bersifat khusus seperti Bantuan Keuangan untuk TMMD (Baik Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dari APBD Kabupaten Pemalang), Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), Bantuan Keuangan untuk pelaksanaan hasil Musrenbang, Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Pokok Pikiran DPRD (POKIR).

Pokok Pikiran anggota DPRD harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, dimana usulan Pokok Pikiran DPRD harus di entri ke SIPD RI dan harus melalui tahapan verifikasi oleh perangkat daerah pengampu setelah persyaratan diupload ke SIPD. Pokok-Pokok Pikiran yang telah memenuhi syarat dan telah diverifikasi oleh perangkat daerah pengampu selanjutnya diteruskan ke Bappeda untuk direkap. Daftar rekap dari Bappeda sebagai dasar entri ke RKA BPKAD. Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD harus mendukung program-program nasional yang telah ditetapkan dan harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemda.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.15
Daftar Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang dialokasikan pada APBD Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN			
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa			
1	Rabat beton jalan gang RT 02 RW 01 Desa Gedeg, Kecamatan Comal	Desa Gedeg, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	50.000.000
2	Peningkatan jalan Rabat Beton jalan gang. Jalan Area tambak Desa Mojo, Kec. Ulujami	Desa Mojo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	200.000.000
3	Rabat beton jalan gang Desa Babakan RT 02 RW 04 Dukuh Kwaringan Desa Babakan Kecamatan Bodeh	Desa Babakan Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	100.000.000
4	Pembangunan jalan Rabat Beton RT 05 RW 007 dan RT 06 RW 08 Desa Limbangan kec. Ulujami	Desa Limbangan kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	100.000.000
5	Rabat Beton jalan Dukuh Sidomulyo RT 07 RW 07 Desa Pesantren, Kec. Ulujami	Desa Pesantren, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	200.000.000
6	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Kalimas	Dukuh Kertadita RT 33 RW 03 Desa Kalimas Kec, Randudongkal, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	100.000.000
7	Pembangunan Rabat Beton jalan Desa Limbangan	Dukuh Gumingsir RT 05 RW 04 Desa Limbangan Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	150.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
8	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Mojo	Sebelah timur KPD Mino Tulus RT 04-05 RW 08 Desa Mojo, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	150.000.000
9	Pembagunan talud Desa Kebagusan	RT 13 RW 02 Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. H. MARTONO, M.A.	100.000.000
10	Pengaspalan jalan /Rehabilitasi jalan Aspal RT 001 RW 007 Desa Banjardawa Kecamatan Taman	Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	100.000.000
11	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RW 04 Dusun Supenjol, Desa Kabunan, Kecamatan Taman	Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	100.000.000
12	Pembangunan Sender/Talud Buangan RT 04 RW 04 Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman	Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	100.000.000
13	Rehab Sender/Talud Lingkungan RT 001 RW 009 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman	Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	100.000.000
14	Rehab Gedung balai desa, Desa Pedurungan, Jl. Pancakarya, RT 003 RW 008 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman	Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	100.000.000
15	pengaspalan jalan Lingkungan RW 05 Dusun Cebong Desa Kabunan Kec. Taman	Desa Kabunan Kec. Taman, Kab. Pemalang	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	100.000.000
16	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 02 RW 06, Dusun Penuntun, Desa Banjarmulya, Kec. Pemalang	Desa Banjarmulya, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	H. AGUS SUKOCO, S.IP., M.Si.	200.000.000
17	Pengaspalan jalan Dusun Watgalih Utara RT 04 RW 07 Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman	Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
18	Pengaspalan jalan Wareh Prabowo RT 03 dan 05 RW 03, Dusun Capit Urang Desa Penggarit, Kecamatan Taman	Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
19	Pengaspalan jalan Perumahan Taman Asri, RT 02, 03, 04, 05, 06 RW 06 dan RT 02, 03, 04 RW 05 Desa Taman, Kecamatan Taman.	Desa Taman, Kecamatan Taman., Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
20	Pengaspalan jalan Benteng Bruk Kafe RT 03, 04 RW 08, Dusun Kuwungan, Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman	Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
21	Pengaspalan jalan gang Dusun Sokawangi RT 04, 05, 06 RW 05, Desa Sokawangi Kecamatan Taman	Desa Sokawangi Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
22	Pengaspalan jalan Mahesa Jati RT 05 dan 07 RW 02, dan RW 03, Desa Kejambon, Kecamatan Taman	Desa Kejambon, Kecamatan Taman, Kab. Pemala	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
23	Pengaspalan jalan lingkungan RW 04 Dusun Kebandingan Desa Pener Kecamatan Taman	Desa Pener Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
	Pengaspalan jalan RT 02 RW 03 Desa Cibelok Kecamatan Taman	Desa Cibelok Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
24	pengaspalan jalan Lingkungan RW 19 dan RW 20 Desa Kabunan Kecamatan Taman	Desa Kabunan Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
25	Pengaspalan jalan RT 01 02 RW 01 Desa Pedurungan kecamatan Taman	Desa Pedurungan kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
26	Pengaspalan jalan desa kedungbanjar RW 03 RW 04 Desa kedungbanjar kecamatan Taman	Desa kedungbanjar kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
27	Pengaspalan jalan permukiman RT 3-6, RW 003 Desa Jrakah Kecamatan Taman	Desa Jrakah Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	200.000.000
28	Talud jalan usaha tani Blok Sijenong 3 Desa Karangtalok Kec. Ampelgading	Desa Karangtalok Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
29	Pengaspalan jalan desa Dusun 2, RW I dan RW II, Desa Karangtengah, Kec. Ampelgading	Desa Karangtengah, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	100.000.000
30	Sender Sungai Simangu RW I dan RW III Desa Karangtengah, Kec. Ampelgading	Desa Karangtengah, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	100.000.000
31	Pembangunan jalan rabat beton ke TPS Desa Ujunggede. Blok Jati Desa Ujunggede. Kec Ampelgading	Desa Ujunggede. Kec Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	100.000.000
32	Pembangunan Rabat beton jalan RT 05 RW 06 Desa Ujunggede Kec. Ampelgading	Desa Ujunggede Kec, Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	75.000.000
33	Pengaspalan jalan, Jalan Wiryorejo RW 03 Desa Blimbing Kec. Ampelgading	Desa Blimbing Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	150.000.000
34	Pengaspalan jalan RT 02-04 RW 02 Desa Losari Kecamatan Ampelgading	Desa Losari Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	Drs. BAMBANG SETIJONO	125.000.000
35	Pengaspalan jalan Desa di RT 008 RW 001 Desa Kendaldoyong, Kec. Petarukan	Desa Kendaldoyong, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Hj. ELI RIYANTI	100.000.000
36	Pembangunan Drainase Desa Kendaldoyong, RT 008 RW 001 Kec. Petarukan	Desa Kendaldoyong, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Hj. ELI RIYANTI	100.000.000
37	Pembangunan Talud di RT 06 RW 01 (area Makam desa), Desa Klareyan, Kec. Petarukan	Desa Klareyan, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Hj. ELI RIYANTI	150.000.000
38	Pembangunan jalan desa, RT 07 RW 01 (Jalan ke arah Makam) dukuh Silumbu, Desa Pesucen, Kec. Petarukan.	Desa Pesucen, Kec. Petarukan, Kab. Pemalan	Hj. ELI RIYANTI	200.000.000
39	Pembangunan Jalan Desa (Rabat beton) Dusun Rowopanggang, RT 10 RW 04, Desa Iser Kec. Petarukan	Desa Iser, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	Hj. ELI RIYANTI	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
40	Pembangunan Talud Desa Banglarangan RT 01 RW 01 Desa Banglarangan, Kecamatan Ampelgading	Desa Banglarangan, Kecamatan Ampelgading, Kab. Pemalang	Hj. ELI RIYANTI	150.000.000
41	Pengaspalan jalan desa Wonokromo, RT 19, 20,21,22 RW 05 (Desa Wonokromo ke dukuh Bengkelung), Desa Wonokromo, Ke Comal	Desa Wonokromo, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	150.000.000
42	Pengaspalan jalan Desa, RT 03, RW 06 Dusun 5 Bejagan, Desa Purwosari Kecamatan Comal	Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	100.000.000
43	Pembangunan Talud Sungai Dusun 2, RT 001 RW 012 Desa Purwosari, Kecamatan Comal	Desa Purwosari, Kecamatan Comal., Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	100.000.000
44	Pembangunan jalan onderlag/makadam RT 01 RW 01 Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh.	Desa Kebandaran, Kecamatan Bodeh., Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	70.000.000
45	Pembangunan Jembatan RT 01 RW 01 Desa Kebandaran, Kecamatan Bodeh	Desa Kebandaran, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	50.000.000
46	Pengaspalan jalan desa Pasir, RT 09 RW 03, Desa Pasir Kecamatan Bodeh.	Desa Pasir Kecamatan Bodeh., Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	100.000.000
47	Pengaspalan jalan Desa RT. 04 RW 01 Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh	Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	100.000.000
48	Pengaspalan jalan Desa, RT 07 RW 02 Desa Bodeh Kecamatan Bodeh	Desa Bodeh Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	100.000.000
49	Rabat Beton Jalan RT 11 RW 03 Desa Wonokromo Kec, Comal	Desa Wonokromo Kec, Comal, Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	50.000.000
50	Pembangunan jalan Aspal RT 06 RW 02 Desa kebandaran Kecamatan Bodeh	Desa kebandaran Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	H. NURYANI, S.H., M.H.	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
51	Pengaspalan jalan lingkar Selatan Desa Kuta, RT 15-11 RW 03 Desa Kuta Kecamatan Belik	Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	INDIANTO, S.H.	200.000.000
52	Pengaspalan jalan lingkungan RT 24-22 RW 05 Desa Kuta, Kecamatan Belik	Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	INDIANTO, S.H.	200.000.000
53	Pengaspalan jalan lingkungan RT 02 RW 01 dusun Sibulu Dukuh, Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik.	Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik., Kab. Pemalang	INDIANTO, S.H.	200.000.000
54	Pengaspalan jalan Lingkungan desa Dusun Rimpak, RT 03 RW 06, Desa Belik, Kecamatan Belik	Desa Belik, Kecamatan Belik., Kab. Pemalang	INDIANTO, S.H.	100.000.000
55	Pengaspalan jalan Dukuh Planjan RT 03 RW 12, Desa Mendelem kecamatan Belik	Desa Mendelem kecamatan Belik, Kab. Pemalang	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	200.000.000
56	Pengaspalan jalan dukuh Karangmulya RT 01 RW 01 Desa Sikasur, Kecamatan Belik.	Desa Sikasur, Kecamatan Belik., Kab. Pemalang	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	200.000.000
57	Pembangunan Rabat Beton jalan Desa RT 13 RW 04 Desa Bodas Kecamatan Watukumpul	Desa Bodas Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	50.000.000
58	Pengaspalan jalan gang RT 015 RW 08 desa Pagelaran, Kecamatan Watukumpul	Desa Pagelaran, Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	75.000.000
59	Pembangunan Saluran air Desa Cikadu RT 09,11,12 RW 02 Dusun Krajan, Desa Cikadu Kec. Watukumpul	Desa Cikadu Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	100.000.000
60	Pembangunan Rabat beton jalan desa Majalangu RT 002 RW 008 Desa Majalangu, Kec. Watukumpul	Desa Majalangu, Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	75.000.000
61	Pengaspalan jalan Dusun Gantungan - Mandalika RT 022 RW 08 Desa Tlagasana Kec. Watukumpul	Desa Tlagasana Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
62	Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan RT 02-03 RW 02 Desa Majakerta Kec. Watukumpul	Desa Majakerta Kec. Watukumpul, Kab. Pemalang	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	75.000.000
63	Pembangunan Rabat beton jalan Dusun Kalipucung RT 05 RW 02 Desa Bongas Kecamatan Watukumpul	Desa Bongas Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	RIA KURNIAWAN, S.Pt.	75.000.000
64	Pengaspalan jalan penghubung Desa Cibuyur menuju desa Mereng Dusun Kranding barat RT 29 RW 04 sampai RT 12 RW 02 Dusun Randu desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring	Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li.	200.000.000
65	Pengaspalan jalan lingkar dalam blok Arkomma, RT 019-020 RW 03, Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal	Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li.	200.000.000
66	Pembangunan Talud jalan RT 18 RW 02, Desa Rembul, Kecamatan Randudongkal	Desa Rembul, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li.	30.000.000
67	Pengaspalan jalan RT 019 RW 002, Desa Rembul Kecamatan Randudongkal	Desa Rembul Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li.	120.000.000
68	Pengaspalan jalan Dusun Gombong RT 005 RW 002 sampai RT 003 RW 003 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring	Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li.	200.000.000
69	Pengaspalan jalan Desa di RT 16,19 dan 27 RW 02 (dari lapangan desa Kejene ke arah utara) Desa Kejene, Kec. Randudongkal.	Desa Kejene, Kec. Randudongkal., Kab. Pemalang	DWI LAKSARI, S.Pd.	200.000.000
70	Pengaspalan jalan Desa Kalimas, Jalan Sileis (jalan penghubung antar desa Kalimas - Kalitorong), Kec. Randudongkal.	Desa Kalimas, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	DWI LAKSARI, S.Pd.	100.000.000
71	Rabat Beton jalan RT 05 RW 03 Desa Mojo Kecamatan Ulujami	Desa Mojo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	100.000.000
72	Pengaspalan jalan RT 01,03 RW 05 Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh	Desa Kelangdepok, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	150.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
73	Rabat Beton jalan RT 02,04. RW 08 Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	200.000.000
74	Rabat Beton jalan RT 04,05. RW 01 Desa Gintung, Kecamatan Comal	Desa Gintung, Kec. Comal, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	200.000.000
75	Rabat Beton jalan RT 07,09 RW 01,02 Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal	Desa Sarwodadi, Kec. Comal, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	200.000.000
76	Rabat Beton jalan RT 01,02,03. RW 02 tunggul Desa susukan, Kecamatan Comal	Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	200.000.000
77	Rabat Beton jalan RT 01,02,03,04. RW 01 Dusun 1, Desa Kertosari.	Desa Kertosari, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	200.000.000
78	Pengaspalan jalan RT 02,03,04 RW 07 Karangsambung Desa Mojo Kecamatan Ulujami	Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	200.000.000
79	Pemeliharaan Jalan Desa Rabat Beton RT 09 RW 03 Desa Karangbrai - Bodeh	Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	150.000.000
80	Pengaspalan jalan RT 08,09,10. RW 03 Desa Wonokromo, Kecamatan Comal	Desa Wonokromo, Kec. Comal, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	150.000.000
81	Pembangunan Talud kewenangan Desa Pecangakan Kec. Comal	Desa Pecangakan, Kec. Comal, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	100.000.000
82	Rabat Beton jalan RT 07, RW 05 Desa Mojo, Kecamatan Ulujami	Desa Mojo, Kecamatan ulujami, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	200.000.000
83	Pembangunan Talud kewenangan Desa RT 01 RW 03 Desa Mojo	Desa Mojo, Kecamatan ulujami, Kab. Pemalang	SLAMET RAMUJI	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
84	Jalan rusak perlu perbaikan	RT 04 RW 04 Dusun Kaliayur, Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	MA' MUN RIYAD, S.Sos	100.000.000
85	Jalan desa rusak perlu perbaikan	RT 02 RW 03 Dusun Krajan Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	MA' MUN RIYAD, S.Sos	100.000.000
86	Jalan desa rusak perlu perbaikan	RT 09 RW 03 Desa Tundagan Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	MA' MUN RIYAD, S.Sos	100.000.000
87	jalan desa rusak perlu perbaikan	Dusun Ampelgading RT 10 RW 04 ke Dusun Tlaga RT 09 RW 03 Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	MA' MUN RIYAD, S.Sos	100.000.000
88	jalan perlu diberi talud agar tidak longsor	RT 03 RW 04 Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	MA' MUN RIYAD, S.Sos	100.000.000
89	Jalan desa rusak perlu diperbaiki	Dukuh Kalisambeng RT 009 RW 003 Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul, Kab. Pemalang	MA' MUN RIYAD, S.Sos	100.000.000
90	Pemeliharaan Gedung kewenangan pemerintah Desa Mengori	Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	HERU KUNDHIMIARSO	75.000.000
91	Pemeliharaan Gedung kewenangan pemerintah Desa Banjarmulya	Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	HERU KUNDHIMIARSO	85.000.000
92	Pemeliharaan Jalan wilayah kelurahan di Jalan Amalia Indah Gang Nila 4, 5, dan 6 RT 01 RW 02 Kelurahan Sugihwaras - Pemalang	Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	SUBANDI SYUHADA	150.000.000
93	Pembangunan Jalan Desa, di Wilayah RT 03 / RW 06 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang	Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	SUBANDI SYUHADA	160.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
94	Pemeliharaan jalan desa, Desa Taman RW. 05 Taman Pemalang	Desa Taman, Kecamatan Taman, Kab. Pemalang	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E., M.M.	200.000.000
95	Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa Gondang Kec. Taman Pemalang, Jl. Desa Gondang Kec. Taman Kab. Pemalang	Desa Gondang, Kec. Taman, Kab. Pemalang	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E., M.M.	50.000.000
96	Pemeliharaan Jalan	RT.022 RW.009 Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	AJENG TRIYANI, A.Md.	150.000.000
97	Rabat Beton	RT.028 RW.011 Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, Kab. Pemalang	AJENG TRIYANI, A.Md.	150.000.000
98	Pemeliharaan Jalan	Dusun Swahrejo Utara RT.031 RW.005 Desa Tegalsari Timur Kec.Ampelgading, Kab. Pemalang	AJENG TRIYANI, A.Md.	170.000.000
99	Pembangunan Jalan Desa Kendaldoyong (RT 10 RW 03)	Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	50.000.000
100	Pembangunan Jalan Desa Kendaldoyong RT 02-04 RW 02	Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	200.000.000
101	Pembangunan Jalan Desa Kendaldoyong RT 10-11 RW 03	Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	200.000.000
102	Pembangunan Jalan Desa Kendalrejo RT 05 RW 02	Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	200.000.000
103	Pembangunan Jalan Desa Kendaldoyong RT 04-05 RW 02	Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
104	Pemeliharaan Jalan Desa Purwosari Kecamatan Comal	RT 1 RW 5 Dusun 5 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	ABDUL MUHAIMIN	100.000.000
105	Pemeliharaan Jalan Desa Sikayu Kecamatan Comal	RT 3 RW 2 Dusun Setikung Desa Sikayu Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	ABDUL MUHAIMIN	100.000.000
106	Pemeliharaan Jalan Desa Sikayu Kecamatan Comal	RT 3 RW 3 Dusun Sikayu desa Sikayu Kecamatan Comal, Kab. Pemalang	ABDUL MUHAIMIN	100.000.000
107	Pemeliharaan Jalan Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami	RT 4 RW 1 Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	ABDUL MUHAIMIN	100.000.000
108	Pemeliharaan Jalan Desa Botekan Kecamatan Ulujami	RT 2 RW 1 Desa Botekan Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	ABDUL MUHAIMIN	100.000.000
109	Pemeliharaan Jalan Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami	RT 3 RW 9 Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	ABDUL MUHAIMIN	100.000.000
110	Pembangunan Talud kewenangan Desa Dusun Soyi RT.002 RW. 002 Desa Clekatakan	Desa Clekatakan, Kecamatan pulosari, Kab. Pemalang	SUBUR MUSHOLEH, S.Pd.I.	140.000.000
111	Pemeliharaan Jalan Desa jalan RT.004 RW.001 Ke Pasar Belik Desa Belik Kecamatan Belik	Desa Belik, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	SUBUR MUSHOLEH, S.Pd.I.	40.000.000
112	Pemeliharaan Jalan Desa Jalan Mendelem - Gunungjaya Desa mendelem Kecamatan Belik	RT.001 RW.007 s.d RT.001 RW.008 Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	SUBUR MUSHOLEH, S.Pd.I.	180.000.000
113	Jalan Desa rusak	RT 05 RW 02 Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	AZKA AMANAZAR, S.H.	100.000.000
114	perlu pengamanan jalan dan pemukiman	Jalan Pemuda RT 02,03,05,06 RW 05 Dukuh Tengah Desa	AZKA AMANAZAR, S.H.	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
		Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang		
115	Saluran Drainase desa perlu di rehabilitasi	RT 01 RW 01 Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	AZKA AMANAZAR, S.H.	100.000.000
116	Jalan rusak perlu perbaikan	RT 12, 14 RW 05 Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	AZKA AMANAZAR, S.H.	100.000.000
117	Jalan rusak perlu perbaikan	RT 05 RW 02 Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	AZKA AMANAZAR, S.H.	100.000.000
118	akses jalan ke tempat penampungan sampah perlu perbaikan	RT 09 RW 02 Desa Mangli Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	AZKA AMANAZAR, S.H.	100.000.000
119	Jalan Desa perlu diperbaiki karena rusak	RT 06 RW 02 Dusun Benteng Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	AZKA AMANAZAR, S.H.	100.000.000
120	Pembangunan Jalan Desa Pertigaan RT 08 sd Pertigaan 02, RW 02	Pertigaan RT 08 sd Petigaan 02, RW 02, Kab. Pemalang	H. MUKHTARUDIN	145.000.000
121	Pembangunan Irigasi Desa Sawah blok Calus-Warsa Ds Karanganyar Purana	Desa Sawah blok Calus-Warsa Ds Karanganyar Purana, Kab. Pemalang	H. MUKHTARUDIN	135.000.000
122	Pemeliharaan Jalan Desa Dukuh Karang Dawung RT 20 RW 05 Pedagung	Dukuh Karang Dawung Pedagung, Kab. Pemalang	H. MUKHTARUDIN	125.000.000
123	Pengaspalan jalan Desa RT 17 - 20 RW 3 Desa Muncang Kec Bodeh	Desa Muncang Kec Bodeh, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	150.000.000
124	Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Kaliwuluh Desa Jraganan	Dukuh Kaliwuluh Desa Jraganan, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	150.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
125	Rabat Beton Jalan Desa Sukorejo RT 6 RW 10 Kec. Ulujami	Desa Sukorejo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	150.000.000
126	Pengaspalan Jalan Desa Botekan RW 1 Dusun 01 Kec Ulujami	Desa Botekan, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	150.000.000
127	Pembangunan Talud Jalan Rt 02 Rw 02 Dusun Kebojongan (ex Rel Kereta) Desa Kebojongan, Kec. Comal	Desa Kebojongan, Kec. Comal, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	100.000.000
128	Pengaspalan Jalan Desa Jalan Sawo RT 4 RW 4 Desa Wiyoro Wetan Kec Ulujami	Desa Wiyoro Wetan, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	100.000.000
129	Normalisasi kali Rabin Dusun Sidomulyo Desa Pesantren Kec Ulujami	Desa Pesantren, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	150.000.000
130	Rabat Beton Jalan Dusun 2 Desa Blendung Kec Ulujami	Desa Blendung, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	200.000.000
131	Pengurugan Jalan Bantaran dan Gorong - gorong (Talud) Dusun 2 Desa Kandang Kec Comal	Desa Kandang, Kec. Comal, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	100.000.000
132	Pengaspalan jalan desa RT 2 RW 1 Dusun 1 Desa Purwosari	Desa Purwosari, Kec Comal, Kab. Pemalang	H.M. WARDOYO, S.E.	100.000.000
133	Pengaspalan Jalan desa Mandiraja Rt 01 - 10 Rw 4 Dukuh Patoman Glempang Kec. Moga	Dukuh Patoman Glempang, Kec. Moga, Kab. Pemalang	SUSI HERNINGTIAS	200.000.000
134	Pengaspalan Jalan Desa Mandiraja Rt 04, 05, 06, 08 Rw 01 Dukuh Krajan Barat Kec. Moga	Dukuh Krajan Barat, Kec. Moga, Kab. Pemalang	SUSI HERNINGTIAS	200.000.000
135	Pengaspalan Jalan Desa Mandiraja Rt 04, 06, 07 Rw 02 Dukuh Krajan Timur Kec. Moga	Dukuh Krajan Timur, Kec. Moga, Kab. Pemalang	SUSI HERNINGTIAS	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
136	Pengaspalan Jalan Desa karangsari RT 04, 05, 06 RW 01 Kec Pulosari	Desa karangsari, Kec. Pulosari, Kab. Pemalang	SUSI HERNINGTIAS	200.000.000
137	Pengaspalan Jalan Desa Nyalembeng RT 06 RW 03 Kec Pulosari	Desa Nyalembeng, Kec Pulosari, Kab. Pemalang	SUSI HERNINGTIAS	150.000.000
138	Pembangunan Talud / Senderan Desa Danasari Rw 08 Dukuh Pejarakan Kec Pemalang	Desa Danasari Dukuh Pejarakan Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	FAHMIDH DHUHA, S.M, M.M.	150.000.000
139	Pembangunan Talud / Senderan Lapangan Desa Danasari Dukuh Danasari RT 5 RW 3 Kec. Pemalang	Desa Danasari Dukuh Danasari Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	FAHMIDH DHUHA, S.M, M.M.	200.000.000
140	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dukuh Kembaran RT 2 RW 1 Desa Danasari Kec. Pemalang	Desa Danasari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	FAHMIDH DHUHA, S.M, M.M.	150.000.000
141	Pembangunan Drainase Dukuh Kamulyan RT 11 RW 5 Desa Danasari Kec Pemalang	Desa Danasari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	FAHMIDH DHUHA, S.M, M.M.	40.000.000
142	Pembangunan Drainase Dukuh Kembaran RT 2 RW 1 Desa Danasari Kec Pemalang	Desa Danasari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	FAHMIDH DHUHA, S.M, M.M.	40.000.000
143	Pengerasan Jalan (Rabat Beton) Dukuh Kembaran RT 1 RW 1 Desa Danasari Kec. Pemalang	Desa Danasari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	FAHMIDH DHUHA, S.M, M.M.	60.000.000
144	Pembangunan jaringan irigasi RT 5 RW 1 Desa Jrakah Kec. Taman	Desa Jrakah, Kec. Taman, Kab. Pemalang	SRI HARTATI	200.000.000
145	Pembangunan Talud jalan RT 3 RW 2 Desa Jrakah Kec Taman	Desa Jrakah, Kec. Taman, Kab. Pemalang	SRI HARTATI	200.000.000
146	Rehab jalan Gang Dusun Kaligawe RT 01 RW 03 Desa Kaligelang Kec Taman	Desa Kaligelang, Kec. Taman, Kab. Pemalang	SRI HARTATI	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
147	Rehab Saluran Drainase RT 01 RW 03 Desa Banjardawa Kec. Taman	Desa Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang	SRI HARTATI	125.000.000
148	Rehab Saluran Drainase RT 02 RW 03 Desa Banjardawa Kec. Taman	Desa Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang	SRI HARTATI	100.000.000
149	Rehab Gedung Kantor Kepala Desa Loning Jalan Raya Loning Kec Petarukan	Jalan Raya Loning Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	LULIT AGUSTI KURNIA	400.000.000
150	Pembangunan Talud Desa Blok 16 Desa Loning Kec Petarukan	Desa Loning, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	LULIT AGUSTI KURNIA	80.000.000
151	Pembangunan Gedung PKK Desa Kemuning Kec Ampelgading	Desa Kemuning, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang	LULIT AGUSTI KURNIA	150.000.000
152	Pembangunan Talud saluran buangan RT 3 RW 2 Desa Petanjungan Kec Petarukan	Desa Petanjungan, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	LULIT AGUSTI KURNIA	100.000.000
153	Pengaspalan Jalan Arumdalu RT 2 RW 9 Desa Moga Kec Moga	Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang	RIFATUR ROSIDAH	200.000.000
154	Pembangunan srana prasarana air bersih Dusun Benjaran RT 19 RW 3 Desa Plakaran Kec. Moga	Desa Plakaran Kec Moga, Kab. Pemalang	RIFATUR ROSIDAH	130.000.000
155	Pengaspalan Jalan Dukuh Tretep RW 12 Desa Sima Kec Moga	Desa Sima Kec Moga, Kab. Pemalang	RIFATUR ROSIDAH	200.000.000
156	Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Mulyoharjo RT 46 RW 11 Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang	Desa Wanarata, Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	IDA MULYANI, A.Md.	200.000.000
157	Pengaspalan Jalan Desa Wanarata RT 29, 30, 24, 25, 26 RW 6 dan 7 Dusun Krajan III Kec Bantarbolang	Desa Wanarata, Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	IDA MULYANI, A.Md.	200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
158	Pembangunan Saluran Irigasi Desa Penusupan RT 11 RW 1 Kec Randudongkal	Desa Penusupan, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	IDA MULYANI, A.Md.	200.000.000
159	Pengaspalan Jalan Desa Semingkir RT 7 RW 4 Kec Randudongkal	Desa Semingkir, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	IDA MULYANI, A.Md.	200.000.000
160	Pengaspalan Jalan Desa Dukuh Lenggak RT 32 RW 8 Desa Wanarata Kec. Bantarbolang	Desa Wanarata, Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	IDA MULYANI, A.Md.	150.000.000
161	Rabat Beton Jalan RT 13 RW 02 Desa Sarwodadi Kec. Comal	Desa Sarwodadi, Kec. Comal, Kab. Pemalang	ADI WIRARSO	150.000.000
162	Pengaspalan jalan Dukuh tengah RT 01 RW 04 Desa Pamutih Kec. Ulujami	Desa Pamutih, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang	ADI WIRARSO	150.000.000
163	Pengaspalan jalan RT 25 RW 2 Desa Muncang Kec Bodeh	Desa Muncang, Kec Bodeh, Kab. Pemalang	ADI WIRARSO	100.000.000
164	Pengaspalan Jalan Desa Babakan Dukuh Kwaring RT 1, 2, 3 RW 4 Kec Bodeh	Desa Babakan Dukuh Kwaring Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	ADI WIRARSO	100.000.000
165	Pengaspalan	Desa Banjarmulya RT 01, 02, 03 RW 04 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	ARIS ISMAIL, A.Md.	150.000.000
166	Talud	Desa Tambakrejo RT 003 RW 006 Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	ARIS ISMAIL, A.Md.	100.000.000
167	Pengaspalan jalan	Desa Surajaya, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang	ARIS ISMAIL, A.Md.	100.000.000
168	pengaspalan jalan	Desa Gunung jaya RT 002 RW 001, Kab. Pemalang	IMAM MUTAQIN AL-ALIMI, S.T.	200.000.000
169	Pengaspalan Jalan	Desa Beluk Dukuh Kasam RT	IMAM MUTAQIN AL-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
		029 RW 008, Kab. Pemalang	ALIMI, S.T.	200.000.000
170	Pembuatan jembatan penghubung Dukuh	Dusun Jingkang RT 003 RW 001 Desa Gunung Jaya, Kab. Pemalang	IMAM MUTAQIN AL-ALIMI, S.T.	100.000.000
171	Pengaspalan jalan	Desa Gununung jaya Dukuh Benda RT 02 RW 05 Kec. Belik, Kab. Pemalang	IMAM MUTAQIN AL-ALIMI, S.T.	200.000.000
172	Rabat Beton	Dusun Sumurgesing Desa Jebed Utara Taman, Kab. Pemalang	WANDIAS PURNOMO	200.000.000
173	Talud	Dusun Sumurgesing Desa Jebed Utara Taman, Kab. Pemalang	WANDIAS PURNOMO	200.000.000
174	Talud	Dusun Batan Desa Jebed Utara Kec. Taman, Kab. Pemalang	WANDIAS PURNOMO	200.000.000
175	Pengaspalan jalan (Jalan Lorong)	Dusun Jaidan RT 001 RW 006 Desa Kesesirejo Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	SISWANTO	150.000.000
176	Rabat Beton (Area Makam)	Rt 08 Rw 02 Desa Cangak Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	SISWANTO	50.000.000
177	Pelebaran dan peninggian (Jembatan)	Desa Payung Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	SISWANTO	50.000.000
178	Talud (Area Lapangan)	Desa Payung RT 08 RW 03 Kec. Bodeh, Kab. Pemalang	SISWANTO	25.000.000
179	Pengaspalan Jalan	Dusun Bagolan RT 013 RW 04 Desa Karangbrai Kec Bodeh, Kab. Pemalang	SISWANTO	100.000.000
180	Pavingisasi	Desa Pecangakan Kec. Comal, Kab. Pemalang	ANITA HANDAYANI, S.Pd.	33.125.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
181	Rabat Beton	Desa Blendung Kec. Ulujami RT 001 RW 001, Kab. Pemalang	ANITA HANDAYANI, S.Pd.	100.000.000
182	Pavingisasi jalan (Area Makam)	RT 002 RW 15 Dusun 3 Desa Purwosari kec. Comal, Kab. Pemalang	ANITA HANDAYANI, S.Pd.	33.125.000
183	Pengaspalan jalan	RT 07 RW 01 Desa Cibuyur - RT 41 Rw 04 Desa Warungpring	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	100.000.000
184	pengaspalan jalan desa	RT/RW 035/004 Desa Cibuyur Kec. Warungpring	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	100.000.000
185	Pengaspalan Jalan (Jalan Yang Sudah Rusak)	Desa Cibuyur RT 14 RW 02 dan RT 35 RW 04 Kec. warunpring, Kab. Pemalang	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	100.000.000
186	Pengaspalan Jalan	Dusun Clincing Desa Datar Kec. Warungpring, Kab. Pemalang	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	100.000.000
187	Pengaspalan Jalan rusak	Desa Warungpring Rt 01 Rw 06 Kec. Warungpring, Kab. Pemalang	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	150.000.000
188	Pengaspalan jalan desa dusun 01 RW 1 Desa Ampelgading Kec Ampelgading	Desa Ampelgading Kec.Ampelgading, Kab. Pemalang	FAHMI HAKIM, S.H., M.M.	200.000.000
189	Pembangunan talud di RT 005, 007 RW 002 Desa Klareyan Kec. Petarukan Kab. pemalang	RT 005, 007 RW 002 Desa Klareyan Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	FAHMI HAKIM, S.H., M.M.	150.000.000
190	Pembuatan jalan di wilayah RW 09 Dusun Tamansari Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang	Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.	50.000.000
191	Pembuatan jalan diwilayah RW 05 Dk. Kranggan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang	Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, S.E., M.Si.	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
192	Pembangunan Jalan dengan Rabat beton Gang musholla RT 01/02. Desa Samong Kecamatan Ulujami	Desa Samong Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	KASMINTO, S.H.	150.000.000
193	Pemeliharaan Jalan desa dengan rabat beton, Jalan panggang - Pejaten.Desa Rowosari Rt 2/4 Kecamatan Ulujami	Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	KASMINTO, S.H.	200.000.000
194	Pembangunan Jalan Desa berupa Rabat beton Jalan desa RT 05/08. Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami	Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	KASMINTO, S.H.	150.000.000
195	Kegiatan Bantuan untuk Pembangunan Talud Jalan RT 01/RW 02 Desa Tasikrejo	Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang	KASMINTO, S.H.	200.000.000
196	Pembangunan Jalan berupa rabat beton dusun jawar ke dusun Srawadadi RT 05 RW. 05 Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari	Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Hj. YANINGSIH, S.H.	200.000.000
197	Pengaspalan Jalan Watu Lawang RT 02 RW 01 Dk. kr dumadi Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari	Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Hj. YANINGSIH, S.H.	200.000.000
198	Pengaspalan Jalan RT 02 - 03 RW 04 Dusun Silegok Desa Gunungsari	Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang	Hj. YANINGSIH, S.H.	200.000.000
199	Rehab Kantor Balai Desa Wanarata Kec. Bantarbolang	Balai Desa Wanarata Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	KHODORI, S.Ag.	200.000.000
200	Rehab Kantor Balai Desa Banjaranyar Kec. Randudongkal	Balai Desa Banjaranyar Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	KHODORI, S.Ag.	200.000.000
201	Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu Desa Peguyangan	Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang, Kab. Pemalang	KHODORI, S.Ag.	75.000.000
202	Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu Desa Kalimas	Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	KHODORI, S.Ag.	75.000.000
203	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Penggarit - Desa	SOLICHIN, S.Ag.	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
		Kejambon RT 01 RW 01 Desa Penggarit, Kab. Pemalang		200.000.000
204	Pembangunan Jalan Rabat Beton	RT 02 RW 04 Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	SOLICHIN, S.Ag.	50.000.000
205	Pembangunan Jalan Rabat beton	Jalan Benteng RT 02 RW 05 Dusun Gedugan Desa Jebed Selatan kec. Taman, Kab. Pemalang	SOLICHIN, S.Ag.	150.000.000
206	Pengurugan/Pembuatan Badan Jalan Lingkar Timur	Jalan Lingkar Timur RT 02 RW 05 Dusun Karangsuci Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	SOLICHIN, S.Ag.	70.000.000
207	Pembangunan Jalan Rabat Beton	RT 03 - 07 Dusun Batarpanjang Desa Sokawangi Kec. Taman, Kab. Pemalang	SOLICHIN, S.Ag.	150.000.000
208	Pembangunan Talud Jalan Pertanian	Blok Siber RT.01 RW 04 Desa Penggarit Kec. Taman, Kab. Pemalang	SOLICHIN, S.Ag.	80.000.000
209	Pengaspalan Jalan	RT 02 RW 02 Sikuang Desa Kendalsari Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	DALIWAN, S.Pd.	75.000.000
210	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW 04 Kidul Kali Desa Kendalsari Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	DALIWAN, S.Pd.	100.000.000
211	Pengaspalan Jalan	RT 01 RW 03 Sikuang Desa Kendalsari Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	DALIWAN, S.Pd.	50.000.000
212	Pembangunan Jalan Rabat Beton	RT 09, 10, 16 dan RT 17 Dusun 2 Desa Petanjungan Kec. Petarukan, Kab. Pemalang	DALIWAN, S.Pd.	75.000.000
213	Pembangunan Jalan Rabat Beton	RT 02 RW 09 Desa Banyumudal Kecamatan Moga, Kab. Pemalang	apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	100.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
214	Pengaspalan Jalan	RT 04 RW 10 Desa Banyumudal Kec. Moga, Kab. Pemalang	apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	100.000.000
215	Pengaspalan Jalan	Dukuh Persil RW 08 Desa Banyumudal Kec. Moga, Kab. Pemalang	apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	200.000.000
216	Pengaspalan Jalan	RW 07 Simadu Desa Banyumudal Kec. Moga, Kab. Pemalang	apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	100.000.000
217	Pengaspalan Jalan	Jalan Bandawasa RT 06 RW 09 Desa Banyumudal Kec. Moga, Kab. Pemalang	apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	100.000.000
218	Pembangunan Drainase	RT 16, 17, 18, 19 Dusun Randugunting Desa Peguyangan Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	RINA TIYASTUTI	100.000.000
219	Pembangunan Talud	RT 09 RW 05 Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	RINA TIYASTUTI	100.000.000
220	Pembangunan Talud Jalan Dukuh Tengah	RT 02, 03, 05, 06, 07 Dukuh Tengah Desa Bantarbolang, Kab. Pemalang	RINA TIYASTUTI	100.000.000
221	Pembangunan Drainase	RT 01, 04 RW 01 Dusun Karanganyar Desa Karanganyar, Kab. Pemalang	RINA TIYASTUTI	100.000.000
222	Pengaspalan Jalan	RT 01, 02, 03 RW 03 Dusun Suwuk Desa Kuta Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	RINA TIYASTUTI	100.000.000
223	Pengaspalan Jalan	RT 03 RW 01 Dusun Arjasari Desa Pabuaran Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang	RINA TIYASTUTI	100.000.000
Jumlah				30.141.250.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun kedua dalam konteks yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menjadi dokumen panduan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPN 2025-2045. Semua unsur pemerintahan dan stakeholder diharapkan dapat melangkah bersama dan bergerak ke arah yang sama tanpa ragu ragu untuk mendukung visi ***Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan***.

- Negara Nusantara adalah Negara kepulauan yang meiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.
- Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
- Maju adalah Ekonomi Indonesia mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara, Indonesia menjadi negara berdaya, modern, Tangguh, inovatif dan adil.
- Berkelanjutan adalah Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Visi abadi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu Negara yang merdeka, Bersatu, berdaulat , adil dan Makmur. Visi abadi tersebut didukung dengan misi abadi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berpedoman pada visi dan misi abadi Indonesia tersebut, ditetapkanlah visi pada 100 Tahun Indonesia merdeka yaitu Indonesia Emas. Visi tersebut diharapkan dapat mengikat seluruh elemen bangsa untuk menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang. Indonesia harus bisa keluar sebagai Negara berpendapatan menengah *(Middle Income Trap).* Indonesia harus terbebas dari kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.

Pembangunan harus menggunakan paradigma baru. Reformasi Birokrasi saja tidak cukup. Tetapi pembangunan harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen dalam mendorong kemajuan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut ditetapkan 5 sasaran utama visi Indonesia, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan) dan 45 indikator utama pembangunan.

Adapun 5 sasaran utama visi Indonesia adalah :

1. Pendapatan Per Kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju Nol Persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*

Dalam upaya mendukung tercapainya sasaran utama visi Indonesia, telah ditetapkan 8 agenda pembangunan yaitu :

1. **Transformasi Sosial (Transformasi Indonesia)**;
   Untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing dengan pemenuhan pelayanan dasar, Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka transformasi sosial antara lain :
   a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
d. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama; Tuberkulosis dan Kusta);
e. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. **Transformasi Ekonomi (Transformasi Indonesia)**;

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, hilirisasi SDA dan produktifitas tenaga kerja. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka transformasi ekonomi sebagai berikut :

a. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi dan industri;
b. Industrialisasi; Hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat tehnologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transformasi hijau;
d. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f. Pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN).

3. **Transformasi Tata Kelola (Transformasi Indonesia)**;

Untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
b. Penguatan integritas partai politik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. **Supremasi Hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia (Landasan Transformasi)**;

   Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

   a. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advokasi general;
   b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi tehnologi dan penguatan value chain industri nasional;
   c. Reformasi perencanaan dan fiskal; perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan dan fiskal;
   d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Landasan Transformasi)**;

   Memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

   a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, energy, water).

6. **Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan (Kerangka Implementasi Transformasi)**;

   Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. **Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan (Kerangka Implementasi Transformasi)**;
   Menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan Pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas (Kerangka Implementasi Transformasi)**.
   Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan 8 Agenda tersebut, ditetapkan 17 arah pembangunan Indonesia yaitu :

1. Kesehatan untuk semua;
2. Pendidikan berkualitas yang merata;
3. Perlindungan sosial yang adaptif;
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan Demokrasi substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan;
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
14. Keluarga Berkualitas, kesetaraan Gender dan masyarakat inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Untuk mencapai 5 sasaran utama visi Indonesia, 8 Agenda Transformasi dan 17 arah tujuan pembangunan maka ditetapkan 45 Indikator dan target pada Tahun 2025 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,4	Tahun
		2	Kesehatan Ibu dan Anak :		
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	Orang
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13,5	%
		3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	orang
		4	Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98	%
2	Pendidikan Berkualitas yang merata	5	Hasil Pembelajaran : a) Rata-rata Nilai PISA a-i. Membaca a-ii Matematika a-iii Sains b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun c) Harapan Lama Sekolah	 396 404 416 9,46 13.37	 Nilai Nilai Nilai Tahun Tahun
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,94	%
		7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	61,87	%
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan	6,0-7,0	%
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	44,1	%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
		10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	20	%
4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi	11	Rasio PDB Industri Pengolahan	20,8	%
		12	Pengembangan Pariwisata :		
			a) Rasio PDB Pariwisata	4,5	%
			b) Devisa Pariwisata	18	Milyar USD
		13	Proporsi PDB ekonomi kreatif	7,9	%
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN : a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah b) Rasio Kewirausahaan c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB d) Return on Asset (ROA) BUMN	 1,3 2,9 1,1 3,4	 % % % %
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	%
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	55,4	%
		17	Tingkat Penguasaan IPTEK : a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi b) Peringkat Indeks Inovasi Global	 0,28 75	% PDB peringkat
5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau : a) Indeks Ekonomi Hijau b) Porsi EBT dalam bauran	 70,80 20	 Indeks %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
			Energi Primer		
6	Transformasi Digital	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	51	peringkat
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Biaya Logistik	16,9	% PDB
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,8	% PDB
		22	Ekspor Barang dan Jasa	26	% PDB
8	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	23	Kota maju, inklusif dan berkelanjutan: a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	44,58 64	% %
9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	24	Indeks Materi Hukum	0,25	Indeks
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	Indeks
		26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	Indeks
		27	Anti Korupsi : a) Indeks Integritas Nasional b) Indeks Persepsi Korupsi	71,94 34	Indeks Indeks
10	Hukum berkeadilan, keamanan nasional	28	Indeks Pembangunan Hukum	0,60	Indeks

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
	tangguh dan Demokrasi substansial				
		29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	62,8	%
		30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Indeks
11	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio pajak terhadap PDB	10-12	Rasio
		32	Tingkat Inflasi	2,5±1	%
		33	Pendalaman/Intermediasi sektor Keuangan : a) Aset Perbankan/PDB b) Aset Dana Pensiun/PDB c) Aset Asuransi/PDB d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB e) Total Kredit/PDB	 66,9 7,6 9,1 57,8 37,8	 % % % % %
		34	Inklusi Keuangan	91	%
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4	Indeks
		36	Asia Power Index (Military Capability)	14,6	Indeks
13	Beragama Maslahat dan berkebudayaan maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,57	IPK
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,19	IKUB
14	Keluarga	39	Indeks Pembangunan	58,49	Indeks

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
	Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif		Kualitas Keluarga		
		40	Indeks Ketimpangan Gender	0,458	IKG
15	Lingkunagn Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35	Indeks
		42	Kualitas Lingkungan Hidup : a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman c) Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah	72,42 12,5 15	Indeks % %
16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan : a) Ketahanan Energi - Indeks Ketahanan Energi b) Prevalensi ketidakcukupan pangan c) Ketahanan Air : - Kapasitas Tampungan Air - Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	6,61 6,2 63,45 39	Indeks % m3/kapita %
17	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB	0,14	%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025	SATUAN
		45	Persentase penurunan emisi GRK :		
			a) Kumulatif	28,12	%
			b) Tahunan	32,65	%

Beberapa Isu Pembangunan ke depan antara lain adalah :

1. *Rendahnya tingkat Produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;*

   Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.
2. *Deindustrialisasi dini dan produktivitas sector pertanian yang masih rendah;*

   Produktivitas sektor pertanian yang masih rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat ketrampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum dan semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.
3. *Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;*

   Hal ini disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah.
4. *Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan Nilai Tambah Ekonomi;*

   Hal ini disebabkan oleh sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low skilled workers*) dan juga banyak yang bergerak di sektor yang bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya partisispasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. *Belum Optimalnya pemanfataan potensi ekonomi laut;*

   Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industry dan emerging sektor lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan.

Regulasi terkait kebijakan Nasional yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemisinan Ekstrem.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan

Arah kebijakan Kementrian Keuangan Tahun 2026, fokus pada APBN yang ekspansif dengan tema "Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi untuk menciptakan Indonesia yang Tangguh, mandiri dan sejahtera". Tema tersebut didukung dengan pilar pertumbuhan berkelanjutan melalui pengutan sektor swasta, investasi bernilai tambah tinggi dan reformasi perijinan. Kebijakan Fiskal Tahun 2026, mengarahkan belanja untuk prioritas nasional seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, serta kesehatan, serta melanjutan reformasi subsidi dan perlindungan sosial. Pendapatan negara

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ditargetkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, optimalisasi PNBP, dan transformasi digital. Serta, terdapat fokus pada penguatan stabilitas fiskal dan ekonomi, termasuk pengelolaan risiko, serta peningkatan efisiensi dan kualitas belanja.

Fokus pengelolaan keuangan negara adalah :

1. Penguatan Stabilitas Fiskal dan Ekonomi;
   Penguatan stabilitas fiskal dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan dan pengelolaan resiko yang optimal.
2. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran;
   Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran bertujuan untuk mewujudkan APBN yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.
3. Peningkatan Kualitas SDM.
   Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan manajemen strategis di lingkungan kementrian keuangan.

Arah kebijakan belanja negara :

- **Optimalisasi Belanja Pegawai**;
  Optimalisasi belanja pegawai diarahkan untuk mendukung kualitas layanan publik yang efektif dan responsif.
- **Prioritas Belanja Barang**;
  Belanja barang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
- **Akselerasi Penurunan Kemiskinan**;
  Penurunan kemiskinan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
- **Penyempurnaan Subsidi dan Perlindungan Sosial**;
  Subsidi dan perlindungan sosial dilakukan agar lebih tepat sasaran dan adil.
- **Dukungan untuk Prioritas Nasional**.
  Prioritas nasional yang didukung dengan ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa-UMKM.

Selain arah kebijakan belanja negara, terdapat arah kebijakan pendapatan negara yaitu :

- **Perluasan Basis Perpajakan**;
  Perluasan basis perpajakan dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperkuat fiskal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- **Peningkatan Kepatuhan Pajak**;
  Peningkatan kepatuhan pajak dilakukan melalui teknologi informasi, sinergi, dan penegakan hukum.
- **Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang Lebih Optimal**;
  Optimalisasi Pemanfaatan SDA dengan penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan SDA.
- **Transformasi Digital**;
  Transformasi digital dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan negara.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut diturunkan dalam 5 (lima) program prioritas yaitu :

1. ***Program Perumusan Kebijakan Fiskal, sektor keuangan dan ekonomi.***
   Program perumusan kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola ekonomi global yang dilakukan dengan :
   a. Penyusunan Kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
   b. Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan.
   c. Perumusan Strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
   d. Penyusunan kebijakan pengembangan instrument-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.
   e. Peningkatan produktifitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
   f. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
   g. Pemberian insentif fiscal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.
   h. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementrian Keuangan atau dengan K/L Lainnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

i. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
j. Penguatan kebijakan sector keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat system keuangan.

2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara.

Program pengelolaan penerimaan negara menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP dengan dukungan transformasi digital yang dilakukan dengan :

a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
b. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui system elektronik (PMSE).
c. Pengembangan Layanan Pajak, Kepabean dan Cukai serta PNBP berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly.
d. Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai serta pemetaan potensi PNBP.
e. Modernisasi system administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP.
f. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
g. Penguatan kerja sama dengan Kementrian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
h. Penguatan Joint program penerimaan di lingkungan Kementrian Keuangan.
i. Peningkatan Kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan territorial.
j. Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-barang illegal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

k. Integrasi dan Konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L dan negara-negara mitra.
l. Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.

3. Program Pengelolaan Belanja Negara.

Program pengelolaan belanja negara berfokus pada peningkatan kualitas belanja yang adil, efektif, dan produktif, termasuk sinergi belanja pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis. Program ini dilakukan dengan :

a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untu pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien dan tetap akuntabel.
b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antar program maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektifitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
c. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.
d. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
e. Pemantapan penerapan penganggaran berbasisi kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, Outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta system pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

f. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (Integrated Funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
g. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar public dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antar daerah.
h. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan Sistem Insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
i. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
j. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
k. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
l. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
m. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan reward and punishment.

4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko.

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko diarahkan untuk mewujudkan APBN yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko yang lebih optimal dilakukan dengan :

a. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
c. Pengelolaan Pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. Program Dukungan Manajemen.

Program dukungan manajemen menekankan pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, serta peningkatan kualitas SDM keuangan negara, sehingga seluruh unit Kemenkeu dapat menjalankan tugas dengan efektif dilakukan dengan :

a. Organisasi dan SDM yang optimal
b. Sistim Informasi yang andal dan terintegrasi.
c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024. RPJPD Provinsi Jawa Tengah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Secara otomatis visi Provinsi Jawa Tengah pun diselaraskan dengan visi Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045. Untuk mendukung visi nasional tersebut maka ditetapkan visi Provinsi Jawa Tengah pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu ***"Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan"***

Visi Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan kelestarian yang ingin dicapai. Visi Provinsi Jawa Tengah tersebut mengandung makna pada masing-masing katanya. Adapun makna tersebut sebagai berikut :

1. **Penumpu Pangan dan Industri Nasional**.

   Maknanya adalah Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan memiliki kemampuan untuk tetap menjadi penumpu pangan nasional dengan didukung oleh modernisasi pertanian yang berdasarkan riset, teknologi, pengembangan inovasi, SDM dan kelembagaan pertanian yang semakin meningkat kapasitasnya,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

serta pengendalian alih fungsi lahan. Selain itu, pembangunan industri dalam dua puluh tahun ke depan fokus pada peningkatan nilai tambah secara signifikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Hilirisasi menjadi faktor kunci karena mampu memberikan peningkatan nilai tambah komoditas, memperkuat nilai ekspor, menciptakan perluasan penyediaan lapangan pekerjaan, serta multiplier effect yang lain.

2. **Maju**.

   Maknanya adalah Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta menjawab isu strategis daerah yaitu perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Jawa Tengah Maju akan menjadi Jawa Tengah yang memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif.

3. **Sejahtera.**

   Maknanya adalah kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga didukung dengan tersedianya prasarana sarana seperti perumahan, air bersih, prasarana sarana pelayanan publik, transportasi, dan teknologi, serta akses terhadap lingkungan hidup berkualitas dan sumber daya alam. Jawa Tengah Sejahtera juga dapat memberikan jaminan pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun nonfisik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, serta hubungan antarmasyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, dan tepo seliro.

4. **Berbudaya**

   Maknanya adalah adanya perasaan seorang individu sebagai bagian integral dari kebudayaan miliknya serta kemampuan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kebudayaan mendefinisikan dirinya sendiri sebagai sebuah sistem yang berbeda dengan kebudayaan yang lain. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua hal penting yang secara bersama-sama berperan bagi hadirnya identitas kebudayaan.

Pertama, kemampuan masyarakat mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari pola pikir, pola rasa dan tindakan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dirinya sebagai bagian dari kebudayaan tertentu.

Kedua, kemampuan suatu kebudayaan sebagai suatu obyek sekaligus subyek yang dinamis di tengah pergulatan interaksi kebudayaan. Hal terakhir ini dapat dilihat dari karakter, kekhasan dan atau ciri khusus di dalam aspek-aspek tertentu dari suatu kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai pembeda dengan ragam kebudayaan lain.

Kedua hal tersebut secara bersama sama menunjukkan karakteristik umum dan gagasan-gagasan yang dengan jelas menjadi penanda bagi munculnya identitas. Dari pemikiran tersebut dilihat dengan jelas bahwa apabila akan meneguhkan diri dengan identitas kebudayaan, maka mau tidak mau masyarakat harus mengaktualisasikan karakteristik umum bangsa Jawa dengan segenap nilai dan perwujudannya. Jawa Tengah berbudaya juga akan terintegrasi dalam pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam semua sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jawa Tengah yang berbudaya ini juga akan menjadi kendali akan kemajuan dan modernisasi yang tanpa batas pada semua sektor

5. Berkelanjutan

Maknanya adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan kearifan lokal, serta mempertimbangkan efek domino kerusakan lingkungan yang akan terjadi, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Jawa Tengah yang berkelanjutan akan menciptakan kualitas hidup

https://jdih.pemalangkab.go.id/

masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran air, udara, sampah, serta kondisi hutan dan lahan, sumber daya air baik air permukaan, air tanah, serta pesisir laut yang semakin terjaga dengan baik. Selain itu, Jawa Tengah berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dalam setiap proses pembangunan mengingat Jawa Tengah memiliki potensi dan keterpaparan jenis bencana alam yang beragam..

Dalam mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah tersebut, ditetapkan 8 misi yaitu :

1. **Misi 1. Transformasi Sosial**.

   Transformasi sosial diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Transformasi sosial dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif, terutama penyediaan akses pendidikan yang semakin inklusif, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial yang adaptif. Dengan transformasi sosial, pemerintah daerah menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dan inklusif dalam mendapatkan pelayanan dasar tanpa memandang latar belakang, identitas, dan status

2. **Misi 2 Transformasi Ekonomi**

   Transformasi ekonomi Jawa Tengah 2045 ditunjukkan dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakan sektor-sektor unggulan daerah. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia di tengah tantangan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif agar menjadi bonus/deviden demografi yang perlu prasyarat investasi yaitu dengan memasukan ilmu, pengetahuan dan vokasi/keterampilan ke dalam sumber daya pikir agar lebih kreatif, produktif dan inovatif sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar

https://jdih.pemalangkab.go.id/

global. Sektor unggulan daerah Jawa Tengah yang sampai saat ini memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Jawa Tengah yaitu sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut didorong melalui hilirisasi didukung digitalisasi ekonomi berbasis riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Transformasi ekonomi tersebut diarahkan dengan menerapkan ekonomi hijau yaitu model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (green investment), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (green jobs) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, transformasi ekonomi juga dilakukan melalui transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, serta pembedayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin.

3. Misi 3 Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih agile) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat. Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Hal tersebut didasari karena adanya dependensi antardaerah yang pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antardaerah, kolaborasi dengan pemangku RPJPD Tahun 2025-2045 / Bab IV - 10 kepentingan lainnya pun perlu semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

4. **Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.**

   Upaya perwujudan visi pembangunan daerah jangka panjang melalui transformasi akan dapat berjalan semakin optimal dengan didukung kondisi keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilnya ekonomi makro daerah. Keamanan daerah yang tangguh akan menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman, serta wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya, perwujudan demokrasi substansial akan mampu menghasilkan pemerintahan yang semakin efektif dan responsif. Sedangkan stabilnya kondisi ekonomi makro daerah akan mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan usaha kecil menengah dalam mengakses layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan terciptanya kondisi tersebut, diharapkan akan mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif

5. **Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**.

   Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id/

itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Salah satu yang menjadi penting dalam konteks membangun ketahanan budaya adalah dengan menempatkan peran dan fungsi agama secara kuat di masyarakat. Dengan menganut agama secara mendalam dan inklusif maka masyarakat diharapkan akan mempu melihat perubahan dan kemajuan yang terjadi di dunia secara jernih sekaligus dapat membentengi diri dari terjangan budaya asing yang banyak tidak sesuai dengan karakter dan budaya Jawa

6. **Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan.**

   Arah pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung, serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir. Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

7. **Misi 7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.**

   Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung upaya transformasi. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tersebut berkaitan dalam hal pergerakan orang, distribusi barang dan jasa (efisiensi biaya perjalanan dan logistik), serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Upaya yang dilakukan terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, pemerataan simpul dan jaringan transportasi, serta integrasi pelayanan transportasi umum. Sarana prasarana lainnya yang menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah adalah sarana prasarana sumber daya air terutama untuk penyediaan air baku, jaringan listrik, energi, komunikasi dan informasi. Penyediaan sarana prasarana bagi masyarakat juga menjadi salah satu prasyarat untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam penyediaan perumahan, permukiman, air minum aman, dan sanitasi aman. Pembangunan sarana prasarana tersebut tetap berprinsip pada sarana prasarana yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Untuk itu menjadi penting bahwa pembangunan sarana prasarana harus berpedoman pada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan agar kualitas ruang tetap terjaga dan lestari.

8. **Misi 8 Kesinambungan Pembangunan.**

   Kesinambungan pembangunan Jawa Tengah sampai dengan tahun 2045 didukung dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan merupakan norma yang mengatur mekanisme proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, sistem insentif, perubahan, dan komunikasi kepada publik. Selain itu, upaya perwujudan visi pembangunan Jawa Tengah 2045 agar tetap berkesinambungan akan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai dengan menciptakan lingkungan pembiayaan yang kondusif, dan pengembangan inovasi pembiayaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah 2025 -2045 tersebut didukung dengan arah kebijakan dan sasaran. Arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah per tahap periode sebagai berikut :

1. Periode 2025-2029

   Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **"Penguatan Landasan Transformasi"** yaitu penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

2. Periode 2030-2034

   Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **"Akselerasi Transformasi**" dilakukan dengan akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan akselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta akselerasi penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.

3. Periode 2035-2039

   Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **"Pemantapan Transformasi",** dilakukan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan pemantapan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pemantapan pembiayaan pembangunan.

4. Periode 2040-2045

   Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **"Perwujudan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan",** dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

disertai dengan perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang semakin merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pembiayaan pembangunan yang semakin menguat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah ditetapkan 6 (enam) sasaran pokok dengan 17 (tujuh belas) arah Pembangunan sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif;
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis;
4. Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial;
6. Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana.

1.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang tercantum pada Dokumen RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada : **“Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia”** Arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut mengacu pada arah kebijakan Pembangunan nasional dan provinsi, kebijakan dan program strategis pemerintah pusat di daerah untuk percepatan Pembangunan ekonomi serta amanat global dan nasional (TPB/SDG’s dan SPM). Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka target pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah :

1) Pertumbuhan Ekonomi;
2) Kemiskinan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3) PDRB Perkapita;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka;
5) Inflasi; dan
6) Indeks Pembangunan Manusia;

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang diselaraskan dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu dengan memperkuat desentralisasi fiskal melalui :

1. TKD berbasis kinerja antara lain penggunaan DBH yang diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dan memperhatikan kebutuhan daerah. serta pengalokasian DAU tidak hanya untuk memeratakan kemampuan keuangan namun juga memeratakan kualitas layanan publik di daerah;
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) antara lain adanya perubahan kebijakan PDRD diarahkan mendukung peningkatan pendapatan daerah namun tetap menjaga akses masyarakat atas layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. memperkenalkan skema Opsen PKB dan BBNKB untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota. dengan tidak menambah beban Wajib Pajak;
3. Peningkatan kualitas belanja daerah antara lain simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah. serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga. serta pengaturan batasan belanja pegawai sebesar maksimal 30% dan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40% dengan strategi implementasi masa transisi agar dimaksudkan APBD lebih condong kepada belanja pelayanan publik. sehingga memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat di daerah;
4. Pembiayaan utang daerah antara lain untuk mendorong akselerasi penyediaan infrastruktur. penyederhanaan mekanisme pembiayaan. seperti mengintegrasikan persetujuan DPRD dengan pembahasan APBD. dengan tetap menjaga prudentiality serta mendorong bentuk lain yang berbasis sinergi pendanaan dan kerjasama dengan pihak swasta. BUMN. BUMD. ataupun bersama pemerintah daerah yang lain;
5. Sinergi fiskal untuk kesinambungan fiskal antara lain penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. kebijakan penetapan batas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kumulatif defisit dan pembiayaan utang Daerah. dan sinergi bagan akun standar. Selain itu. tentunya didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan informasi keuangan pemerintahan secara nasional sesuai bagan akun standar yang tersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan keuangan tersebut didukung dengan arah kebijakan pendapatan yang fokus pada kemandirian daerah. Kemandirian daerah diraih dengan cara meningkatkan PAD melalui :

1. Ekstensifikasi Pajak Daerah melalui kegiatan pendataan dan pemutahiran basis data untuk mendapatkan data akurat dan terkini dari potensi pajak dan retribusi, termasuk pemetaan celah kesenjangan antara realisasi pendapatan dengan potensi yang seharusnya, melalui pemutahiran basis data objek maupun wajib pajak.
2. Penataan regulasi untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak dan retribusi. Strategi ini diarahkan untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak dan retribusi seperti penataan pengelolaan parkir, pengelolaan pasar, elektronifikasi/digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi.
3. Perbaikan dan inovasi tata kelola untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD. Pada sektor retribusi perbaikan tata kelola utamanya dilakukan pada beberapa obyek retribusi terbesar dan yang mendapatkan perhatian publik seperti: parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan serta retribusi tempat pariwisata/olahraga, hal ini juga perlu mendapat prioritas penganggaran untuk peningkatan pelayanan yang diberikan.
4. Peningkatan sinergi dan kolaborasi ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung peningkatan PAD seperti Konfirmasi Status Wajib Pajak (Tax Clearence) antara sistem perizinan dengan sistem pajak daerah termasuk penegakkannya oleh petugas penegak Peraturan Daerah.
5. Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
7. Peningkatan sinergitas dengan pemerintah Provinsi Terkait penarikan Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB dan Pajak Air Tanah melalui kegiatan pendataan dan pemungutan pajak daerah.

Selain didukung dengan arah kebijakan pendapatan, arah kebijakan keuangan Kabupaten Pemalang didukung pula dengan arah kebijakan Belanja sebagai berikut :

1. Belanja Kabupaten Pemalang fokus dan memprioritaskan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang meliputi:
   a. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia;
   b. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan;
   c. Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern.
   d. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.
   e. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya pada pengelolaan sumberdaya air dan ke PU an.
   f. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pemberian insentif pada pemilik sawah melalui akses pupuk murah, bibit berkualitas dan pendampingan untuk pasca panen.
   g. Penguatan koperasi merah putih yang mampu menjadi mitra petani.
   h. Mendorong BUMDES dan BUMDEsma dalam penguatan kemandirian pangan.
   i. Penguatan cadangan pangan dan penguatan keaneragaman bahan serta keamanan pangan.
   j. Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.
   k. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan kolaborasi pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana.
   l. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pilah sampah dan pengelolaan kontrol landfiil TPA. Peningkatan pilah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta, penguatan bank sampah.

m. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang mudah diakses masyarakat, persiapan sekolah rakyat, sekolah garuda, memperkuat sekolah inklusi dan kesetaraan dalam mendorong harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah. Penyediaan lokasi untuk pembangunan SMA/SMK dalam rangka mengurangi blankspot (wilayah tanpa SMA/SMK).

n. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Program Makan Bergizi pada anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada penyakit tidak menular. Penyediaan ambulan gratis dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal. Peningkatan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan tingkat kelahiran yang direncanakan, usia perkawinan yang semakin matang.

o. Peningkatan budaya masyarakat yang berkolaborasi dengan pariwisata mampu mendorong perekonomian daerah.

p. Peningkatan perlindungan sosial pada PPKS terutama pada PPKS yang terlantar, penguatan rumah singgah dalam penanganan PPKS. Penguatan data penduduk miskin sehingga mampu menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan.

q. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government, peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan budaya kerja.

2. Arah kebijakan belanja Kabupaten Pemalang memprioritaskan dukungan terhadap prioritas nasional tahun 2026 yang meliputi:

   a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia(HAM);

   b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dengan sasaran utama.

3. Pemenuhan mandatory spending berupa alokasi batas minimal dan maksimal yang harus dianggarkan pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
5. Mendanai kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) dan penurunan stunting.
6. Upaya meningkatkan kualitas penanganan bencana;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Selain arah kebijakan pendapatan dan arah kebijakan belanja, arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang didukung pula dengan arah kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan tahun 2026 dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Salah satu kebijakan pembiayaan tahun 2026 adalah pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan pinjaman ke PT Bank Jateng Cabang Pemalang untuk memenuhi kebutuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Langkah pinjaman tersebut dilakukan dipicu oleh turunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat sehingga alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik tidak mencukupi. Selain pinjaman, pembiayaan tahun 2026 juga mengalokasikan dana Cadangan untuk Pilkada Tahun 2029 serta penyertaan modal kepada BUMD. Penyertaan modal kepada BUMD dilakukan setelah adanya kajian analisis investasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi mengelola investasi. Investasi daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pemalang diharapkan dapat memberi manfaat berupa :

1. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.2.1 Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yaitu **"*Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah*".** Dalam mencapai tujuan tersebut didukung oleh 2 indikator yaitu :

- Hasil Pengukuran indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target 80 dan;
- Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan target 93 %.

Tujuan BPKAD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja BPKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima;
3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD.

3.2.2 Sasaran BPKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD terdapat 2 Sasaran yaitu:

Sasaran 1 : *"Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"*, dengan indikator sasaran :

- Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran dengan target bobot nilai 15;
- Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan target bobot nilai 20;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan target bobot nilai 15;
- Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki dengan target 50 %.

Sasaran 2 : "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik",dengan indikator sasarannya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84,08.

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, sehingga diharapkan semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran BPKAD tersebut.

Ada pun sasaran Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) "

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran bersangkutan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah		Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80
			Persentase Pemanfaatan BMD	%	93
1.1		Meningkatnya Transparansi dan Akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15
			Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20
			Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15
			Persentase Barang Milik Daerah yang dimilikki	%	60
1.2		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disusun berbasis kinerja dan money follow programme priority, memilikki output yang jelas dan terukur, terpadu lintas bidang serta melakukan terobosan baru dalam pencapaian target sasaran, penyelesaian masalah dan isu-isu strategis terkait fungsi BPKAD serta berprinsip Pembangunan berkelanjutan.

Pada Tahun 2026, Terdapat 3 Program, 13 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Pemalang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.1.2.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.1.3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.10.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.6.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.6.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.6.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.6.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.6.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.2. Pengadan Mebel

1.7.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1.8.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.9.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.9.6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.9.9. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya.

1.9.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

2.1.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

2.1.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.

2.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

2.2.3. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

2.2.4. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.3.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan/Triwulanan dan Semesteran.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2.4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

2.4.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

2.4.3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2.5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

2.5.1. Implementasi da Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerinta Daerah Bidang Keuangan Daerah.

2.5.2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2.1. Pengamanan Barang Milik Daerah.

3.2.2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtganganan, Pemusnahanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3.2.3. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kecuali untuk Kegiatan analisis Penyaluran Bantuan Keuangan khususnya untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan Tani Manunggal Mandiri Desa (TMMD), dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Dana Desa pada Bantuan Keuangan kepada Desa, sumber dananya adalah Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa.

Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah di Kantor BPKAD dan ditujukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi BPKAD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kecuali kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa atau Masyarakat Desa guna membantu pembangunan dan pemberdayaan di desa. Selain itu, BPKAD mengelola Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang merupakan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka menanggulangi bencana dan membantu korban bencana serta keadaan darurat lainnya. Belanja Tidak Terduga juga mengakomodir Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa santunan kematian dan bantuan terhadap orang terlantar. Selain itu, Belanja Tidak Terduga mengakomodir pengembalian pendapatan tahun sebelumnya, yang disalurkan dengan mekanisme LS.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Program dan Kegiatan pada Tahun 2026 merupakan kegiatan reguler yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, yang terdiri dari 3 Program 13 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan.

Sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDGs), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung Goal ke 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh. Indikator 16.6 Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di semua tingkat dengan indicator, 16.6.1 Proporsi Pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, 16.6.1.(a) Persentase Peningkatan Opini BPK WTP Kab/Kota. Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung indikator SDG's tersebut tercantum pada tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 YANG MENDUKUNG PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG's)

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN TAHUN 2026
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH				
Target 16.6. Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di semua tingkat				
Target 16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui				
Target 16.6.1.(a) Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	100	482.615.873.400
	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	60	
	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	
	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	%	100	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	Jenis	8	961.500.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah	Jenis	12	245.900.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jenis	6	235.970.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Desa, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	%	90	480.902.553.400
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis	1	269.950.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib administrasi Penatausahaan BMD	%	100	367.730.000
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jenis	8	367.730.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Terdapat 2 Program yang mendukung indikator 16.6.1.(a) yaitu Persentase peningkatan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua program tersebut memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan Keuangan Pemda yang transparan dan akuntabel dapat memberikan gambaran kondisi keuangan Pemda secara rinci dengan penjelasan penjelasan dan data yang valid, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Ketercapaian hasil opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Tujuan ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TUJUAN DAN INDIKATOR TPB
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh
16.6. Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat
16.6.1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
16.6.1.(a). Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TARGET DAN REALISASI HASIL OPINI BPK RI																	
2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.4

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02				**Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**		**BPKAD**				496.427.072.400	DAU				496.427.072.400
5	02				**Bidang Keuangan**		**BPKAD**				**496.427.072.400**	DAU				**496.427.072.400**
5	02	01			***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota***	***- Nilai SAKIP BPKAD***	**BPKAD**	***60,60***			**13.443.469.000**	DAU		**Nilai**	***60,70***	**13.443.469.000**
5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah**	**BPKAD**		**12 Dok**		**12.740.000**	DAU		Dok	**12**	**12.740.000**
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD			3 Dok	2.520.000	DAU		Dok	3	2.520.000
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD			46 Dok	700.000	DAU		Dok	46	700.000
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD			92 Dok	2.520.000	DAU		Dok	92	2.520.000
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	BPKAD			46 Dok	1.400.000	DAU		Dok	46	1.400.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	BPKAD			92 Dok	4.900.000	DAU		Dok	92	4.900.000
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD			5 Lap	700.000	DAU		Lap	5	700.000
5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BPKAD		**7 Jenis**		**6.172.353.000**	DAU		**Jenis**	**7**	**6.172.353.000**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BPKAD			40 Orang	6.141.519.000	DAU		org	40	6.141.519.000
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD			20 Dok	30.134.000	DAU		Dok	20	30.134.000
5	2	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD			1 Lap	700.000	DAU		Lap	1	700.000
5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM**	BPKAD		**1 Jenis**		**0**	DAU		**Jenis**	**1**	**0**
5	02	01	2.05	00010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD			55 Orang	0	DAU		Org	55	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah**	BPKAD		**10 Jenis**		**310.876.000**	DAU		**Jenis**	**10**	**310.876.000**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantior yang disediakan	BPKAD			12 Paket	7.500.000	DAU		Paket	12	7.500.000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	BPKAD			1 Paket	100.000.000	DAU		Paket	1	100.000.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD			1 Paket	30.000.000	DAU		Paket	1	30.000.000
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD				0	DAU		Dok	12	0
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD			20 Lap	5.000.000	DAU		Lap	20	5.000.000
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD			50 Lap	168.376.500	DAU		Lap	50	168.376.500
5	02	01	2.06	00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD			4 Dok	0	DAU		Dok	4	0
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan**	BPKAD		**4 Jenis**		**6.000.000.000**	DAU		**Jenis**	**4**	**6.000.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD				6.000.000.000	DAU		Unit	2	6.000.000.000
5	02	01	2.07	0005	Pengadan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	BPKAD			5 Unit	0	DAU		Unit	5	0
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	BPKAD			11 Unit	0	DAU		Unit	11	0
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya jasa yang menunjang operasional Perangkat Daerah**	BPKAD		**4 Jenis**		**812.500.000**	DAU		**Jenis**	**4**	**812.500.000**
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD			12 Lap	10.000.000	DAU		Lap	12	10.000.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD			4 Lap	450.000.000	DAU		Lap	4	450.000.000
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD			4 Lap	2.500.000	DAU		Lap	4	2.500.000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD			11 Lap	350.000.000	DAU		Lap	11	350.000.000
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah**	BPKAD	**4**	**4 Jenis**	**4**	**135.000.000**	DAU		**Jenis**	**4**	**135.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya.	BPKAD	30	30 Unit	30	100.000.000	DAU		Unit	30	100.000.000
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	BPKAD	10	10	10 Unit	25.000.000	DAU		Unit	10	25.000.000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	2	2	2 Unit	10.000.000	DAU		Unit	2	10.000.000
5	02	01	2.09	00010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1	1	1 Unit	0	DAU		Unit	1	0
5	02	02			***Program Pengelolaan Keuangan Daerah***	***- Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan***	**%**	***100***	***100***	***100***	**482.615.872.400**	DAU		**%**	***100***	**482.615.872.400**
						- Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	**%**	***60***	***60***	***60***		DAU		**%**	***60***	
						- Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	**%**	***100***	***100***	***100***		DAU		**%**	***100***	
						- Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	**%**	***100***	***100***	***100***		DAU		**%**	***100***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02				***- Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan***	***%***	***100***	***100***	***100***		DAU		***%***	***100***	
5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	BPKAD	**8**	**8 Jenis**	**8**	**961.500.000**	DAU		**Jenis**	**8**	**961.500.000**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang disusun	BPKAD	1	1	1 Dok	211.435.000	DAU		Dok	1	211.435.000
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang disusun	BPKAD	1	1	1 Dok	142.625.000	DAU		Dok	1	142.625.000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	BPKAD	2	2	2 Dok	317.720.000	DAU		Dok	2	317.720.000
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD	BPKAD	5	5	5 Dok	289.720.000	DAU		Dok	5	289.720.000
5	02	02	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah**	BPKAD	**12**	**12 Jenis**	**12**	**245.900.000**	DAU		**Jenis**	**12**	**245.900.000**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	12	12	12 Dok	148.800.000	DAU		Dok	12	148.800.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga	BPKAD	1.000	1.000	1000 Lap	34.820.000	DAU		Lap	1.000	34.820.000
5	02	02	2.02	00010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	2	2	2 Dok	28.200.000	DAU		Dok	2	28.200.000
5	02	02	2.02	00011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	BPKAD	95	95	95 Org	34.080.000	DAU		Org	95	34.080.000
5	02	02	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**	BPKAD		**6 Jenis**		**235.970.000**	DAU		**Jenis**	**6**	**235.970.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanngungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan semesteran	BPKAD	18	18	18 Dok	5.225.000	DAU		Lap	18	5.225.000
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD			1 Lap	0	DAU				0
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1	1	1 Lap	46.550.000	DAU		Lap	1	46.550.000
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	BPKAD	2	2	2 Dok	184.195.000	DAU		Dok	2	184.195.000
5	02	02	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**	BPKAD		**90%**		**480.902.553.400**	DAU		**%**	**90,00**	**480.902.553.400**
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD			12 Lap	444.393.212.900	DAU		Lap	12	444.393.212.900
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD			50 Lap	9.663.000.000	DAU		Lap	50	9.663.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.04	00010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten ke desa	BPKAD			12 Lap	26.846.340.500	DAU		Lap	12	26.846.340.500
5	02	02	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	BPKAD		**1 Jenis**		**269.950.000**	DAU		**Jenis**	**1**	**269.950.000**
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bisdang Keuangan Daerah	BPKAD			1 Dok	247.050.000	DAU		Dok	1	247.050.000
5	02	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten	BPKAD			75 Org	22.900.000	DAU		Org	75	22.900.000
5	02	03			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan BMD sesuai ketentuan**	**%**	**100%**			**367.730.000**	DAU		**%**	**100**	**367.730.000**
5	02	03	2.01		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Pengelolan BMD sesuai Ketentuan**	BPKAD		**8 Jenis**		**367.730.000**	DAU		**Jenis**	**100**	**367.730.000**
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	BPKAD			2 Dok	5.000.000	DAU		Dok	2	5.000.000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	BPKAD			530 Lap	224.360.000	DAU		Lap	530	224.360.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	00010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahbukuan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	BPKAD			115 Dok	121.620.000	DAU		Dok	115	121.620.000
5	02	03	2.01	00012	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD			1 Lap	16.750.000	DAU		Lap	1	16.750.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2026. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta visi misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026.

Renja Tahun 2026 memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan 2025. Pendanaan Renja BPKAD Tahun 2026 disesuaikan dengan total anggaran pada penetapan APBD Tahun 2025, memprioritaskan rencana aktivitas yang mendukung program unggulan serta mempertimbangkan kapasitas anggaran.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra serta sejalan dengan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, bersinergi, searah dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2021-2026.

Renja ini akan dilakukan perubahan apabila terdapat perubahan SOTK serta perubahan anggaran yang berdampak pada perubahan kebijakan serta tujuan dan sasaran organisasi.

Pemalang, 30 September 2025

KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMALANG

NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19720129 199803 1 010

https://jdih.pemalangkab.go.id/

X. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi diantaranya tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumber daya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untukjangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan rencana pendanaan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah penjabaran tahun kedua dari Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029. Disusun berdasarkan kerangka kebijakan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati dan Wakil Bupati yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Bercahaya (Bersih, Cakap, Handal, Menuju Masyarakat Pemalang Mulya) Maju, Unggul, Lestari, Berbudaya".***

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang ini telah mendasari Rencana Strategis

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang kedepan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dapat meningkatkan tata kelola pendapatan daerah dan mampu meningkatkan kinerja SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan. Mekanisme penyusunan renja dapat dilihat pada gambar berikut :

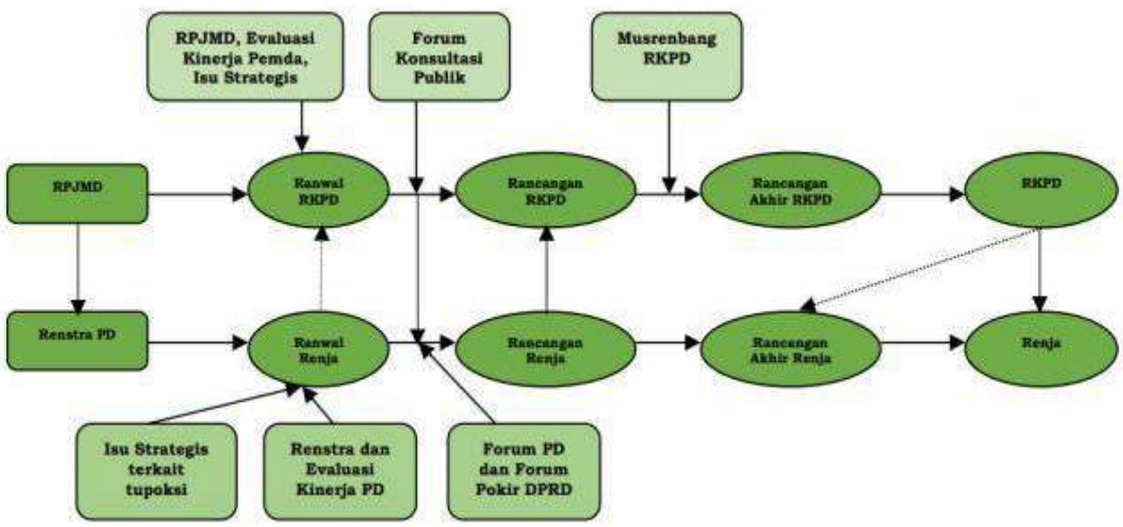

Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 yang disinkronkan dengan hasil Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Forum Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan RKPD Tahun 2026. Selanjutnya, Rancangan RKPD Tahun 2026 dibahas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dalam Musrenbang RKPD dan disepakati sehingga menjadi RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Secara rinci dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Perangakat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemlanag

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah kabupaten pemalang Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2029;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang No 41 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2026, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan Badan Pengelolaan PendapatanDaerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2026 guna mendukung kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

1. Memberikan pedoman bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua stakeholders pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2026 dapat tercapai.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan acuan bagi para stakeholders di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada tahun 2026 guna menunjang pencapaian tujuan.
2. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama tahun 2026 bagi para stakeholders Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah KabupatenPemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 guna mencapai tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.2 Latar Belakang;

Pada bagian ini menjelaskan alasan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional dan dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Pemalang terpilih, tujuan dan sasaran daerah dan OPD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 didasari oleh beberapa regulasi yang terkait yang dijelaskan dalam bagian ini.

1.4 Maksud dan Tujuan;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 memiliki maksud dan tujuan yang nantinya menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.5 Sistematika Penulisan.

Dalam bagian ini berisi mengenai sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dari pendahuluan sampai dengan penutup.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab II ini berisi penjelasan mengenai hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan capaian Renstra PD

Berisi tentang hasil Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini berisi tentang hasil analisis kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025

2.3. Hasil Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Pada bagian ini berisi tentang hasil Hasil Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025

2.4. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini berisi tentang Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Menjelaskan tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat

Menjelaskan tentang Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat di Kabupaten Pemalang Tahun 2026

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini berisi tentang uraian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang dikaitkan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

memuat tentang hasil telaahan keterkaitan tujuan sasaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terhadap kebijakan nasional yang ada.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Memuat tentang tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Menyampaikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian evaluasi dan harapan yang ingin dicapai berdasarkan dokumen renstra yang disusun.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Hasil Evaluasi Renja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 14.795.711.850,-. terealisasi sebesar Rp 13.983.333.284 atau 94,50 % efisiensi sebesar 5,50%, untuk membiayai 2 program , 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan, dengan perincian :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja atas Gaji dan Tunjangan PNS serta belanja barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Pada tahun anggaran 2024, Belanja Operasi untuk belanja pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 10,662,960,053 telah terealisasi sebesar Rp. 10.006.616.890. atau sebesar 93,84% dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 3,642,750,797,- dengan realisasi sebesar 96,36% atau sebesar Rp Rp. 3,510,237,394,-

2. Belanja Modal

Belanja modal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang berupa belanja modal peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pada tahun anggaran 2024, Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp.490,001,000,- terealisasi Rp 466,479,000 atau sebesar 95,19%.

Secara ringkas rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d TW 1 tahun 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEUANGAN								
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100		100%			100%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis aktivitas perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun		6	6				
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	3	2	100%	3	5	33%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1	1	100%	1	2	40%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1	1	100%	1	2	40%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1	1	100%	1	2	40%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1	1	100%	1	2	40%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan	6	6	100%	6	12	40%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%			100%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 orang/bulan	60	60	100%	60	120	40%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75 laporan	15	15	100%	15	30	40%
5.02.01.2.02.07	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 laporan	18	18	100%	18	36	40%
05.02.01.02.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jenis aktivitas peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan	2 jenis						
05.02.01.02.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	60	60	100%	0	60	20%
05.02.01.02.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	200 Orang	0	0	0%	0	0	0%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%			100%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1	1	100%	1	2	40%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	4	4	100%	4	8	40%
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	10	10	100%	10	20	40%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	3	3	100%	3	6	40%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1	1	100%	1	2	40%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	12	12	100%	12	24	40%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	24	24	100	24	48	30%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%			100%
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 unit	4	0	0%	0	4	20%
5.02.01.2.07.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	4	4	0%	8	12	60%
5.02.01.2.78.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 unit	13	13	0%	0	13	20%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis aktivitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%			100%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12	12	100%	12	24	40%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12	12	100%	12	24	40%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12	12	100%	12	24	40%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%			100%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	295 unit	59	59	100%	59	118	40%
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 unit	23	23	100%	23	46	40%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1	1	100%	1	2	40%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5	5	100%	5	10	40%
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	23	23	100%	23	23	100%
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	13,50%	13,50%	14,00	100%	13,50%	0	30%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jenis aktivitas Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	100%	0	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 dokumen	2	2	100%	2	4	40%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	24 dokumen	6	6	100%	3	9	37.5%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30 laporan	6	6	100%	6	12	40%
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 unit	2	2	100%	2	4	40%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	2	2	100%	2	4	40%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 laporan	2	2	100%	2	4	40%
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100 obyek pajak	20	20	100%	20	40	40%
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3.548.000 dokumen	700.000	700.000	100%	705.000	1.405.000	39%
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 layanan	12	12	100%	12	24	40%
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	250.000 dokumen	50.000	50.000	100%	50.000	100.000	40%
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60 dokumen	12	12	100%	12	24	40%
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	400 dokumen	80	80	100%	80	160	40%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60 kegiatan	12	12	100%	12	24	40%
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	20 laporan	4	4	100%	4	8	40%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 4 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13) dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Bapenda Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Misi kedua Bupati Pemalang yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2021-2025 serta merumuskan pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk merealisasikannya yaitu:

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel, dengan indikator tujuan : Rasio Peningkatan PAD

Sasaran :

Meningkatnya Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD, dengan indikator sasaran : Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah.
2. Pertumbuhan PAD

Adapun secara rinci gambaran Pencapaian Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (mulai 2021-2024)

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	TWII 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%		√		13,50 %	13,50 %	13,50 %	13,50 %	14,00 %	14.14%	14.16%	5.72%	
2	Pertumbuhan PAD	%		√		6,20 %	6,20 %	6,20 %	6,20 %	-4,47 %	4%	13.5%	4.41%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			√		79	79	79	79	81,52	81,52	81,52		
4	Nilai Sakip			√		55	55	64	70	63,05	64,57	69,14		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Capaian indikator kinerja utama Bapenda indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 14,14% dan 14,16% di atas target sebesar 13,50%. Peningkatan capaian di Tahun 2023 ini karena realisasi target untuk pendapatan hasil pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 104,19% walaupun retribusi daerah masih rendah dimana hasil retribusi daerah hanya terealisasi sebesar 73,26% dengan rincian Retribusi Jasa Umum sebesar 70,75% dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 62,88%. Namun demikian dalam perhitungan pertumbuhan Pajak Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya dan di bawah target sebesar 6,20% dengan realisasinya sebesar 4%. Hasil pencapaian ini bisa kita lihat pada data pajak daerah tahun 2023 telah terealisasi total pendapatan pajak daerah sebesar Rp 116.206.493.658,- atau sebesar 104,19% melebihi target pajak daerah yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan capaian kinerja di tahun 2024 dimana realisasi pajak daerah sebesar Rp 120.979.657.825, pertumbuhan PAD 13,5%, rasio PAD 14,16%. Surplus ini sangat erat kaitannya dengan pola pengelolaan pajak dan retribusi yang mulai efisien dan efektif.

2.3. Hasil Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

2.3.1 Evaluasi SAKIP

Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu nilai evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Evaluator Inspektorat Kabupaten Pemalang terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 memperoleh nilai atau skor sebesar 52,04 dengan kategori CC (Cukup), tahun 2020 mengalami peningkatan nilai sebesar 60,26 dengan kategori B (Baik), tahun 2021 memperoleh nilai 62,11 B (Baik), tahun 2022 memperoleh nilai 63,05 dan tahun 2023 serta tahun 2024 nilainya naik menjadi sebesar 64,57 dan 69,14 yang artinya bahwa akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sudah baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, berikut rincian hasil penilaian SAKIP empat tahun terakhir sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

TABEL. 2.3.2

Nilai SAKIP Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Komponen	Nilai Hasil Evaluasi 2020	Nilai Hasil Evaluasi 2021	Nilai Hasil Evaluasi 2022	Nilai Hasil Evaluasi 2023	Nilai Hasil Evaluasi 2024
1.	Perencanaan Kinerja	17,72	20,67	21,60	21,00	22,14
2.	Pengukuran Kinerja	16,56	16,96	17,40	20.55	20,55
3.	Pelaporan Kinerja	9,80	10,13	10,05	10,19	10,50
4.	Evaluasi internal	12,47	14,35	14,00	12,83	15,95
	Jumlah	60,26	62,11	63,05	64,57	69,14

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Merujuk pada tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025, yaitu:

“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”

Bapenda Kabupaten Pemalang sebagai OPD pengelola pendapatan Pajak daerah dan koordinator pengelola PAD Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang berkorelasi pada peningkatan perekonomian Kabupaten Pemalang tersebut. Menengok perjalanan kinerja Bapenda pada tahun sebelumnya dapat dilihat dari indikator Persentase wajib pajak tertagih yaitu persentase data pajak daerah yang ditetapkan PBB. Data lima tahun terakhir menunjukan bahwa rata-rata indikator tersebut masih sebesar 75,33% dengan tren semakin menurun di tahun 2022 sebesar 75,77% menurun di Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebesar 74,73% dan 71.68%, ini artinya masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak daerah khususnya PBB P2. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan yaitu data wajib pajak belum dimutahirkan, masih menggunakan data KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013, padahal data penduduk dan kepemilikan bumi dan bangunan itu kan dinamis. Hal ini berkorelasi dengan hasil reviu BPK di tahun 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id/

menyebutkan bahwa piutang pajak PBB P2 setiap tahun mengalami peningkatan karena kendala pemutakhiran data PBB P2 tersebut. Selanjutnya, kurangnya pemahaman pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. Sehingga, diperlukan upaya penyebarluasan informasi terkait dengan pembayaran pajak daerah. Informasi pajak daerah tidak hanya terkait dengan cara pembayarannya saja, masyarakat sangat perlu tahu tentang penghitungan pajak, waktu, akses, mekanisme pengajuan keberatan dan lain-lain. Untuk memudahkan itu semua diperlukan suatu program yang memudahkan wajib pajak dalam mengaksesnya.

Mendasari hal tersebut di atas, Bapenda Kabupaten Pemalang telah melakukan upaya digitalisasi pengelolaan pajak daerah dengan program-program seperti penerapan Layanan pajak daerah secara digital;

1. htpps://simpatda.pemalangkab.go.id untuk pajak non PBB dan BPHTB

2. https://bphtb.pemalangkab.go.id untuk BPHTB

3. htpps://esppt.pemalangkab.go.id untuk PBB p2

Layanan informasi publik

1. https://sipad.pemalangkab.go.id

2. https://elinkpajek.pemalangkab.go.id

Program Lapak Dedi yaitu aplikasi pelayanan pengajuan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara online yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk lebih memacu pelayanan Pajak daerah, tahun 2024, telah dilakukan penerapan billing center. Upaya pemanfaatan teknologi informatika ini mempunyai tujuan untuk memudahkan akses wajib pajak dalam membayar pajak, memutus rantai *fraud* yang sering terjadi dalam pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh oknum petugas pajak di desa. Sampel kasusnya seperti yang terjadi di tahun 2024 di desa Panjunan Kecamatan Petarukan. Upaya ini juga sekaligus sebagai upaya efisiensi sumber daya manusia pengelola pajak daerah karena keterbatasan pegawai yang ada di Bapenda Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Selanjutnya, Rasio PAD terhadap total pendapatan, dimana terjadi peningkatan dari sebesar 14,00% di tahun 2022 menjadi sebesar 14,14% di tahun 2023 dan 14,16 di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target APBD, persentase realisasi PAD terhadap target menurun yaitu sebesar 107,36% di tahun 2022 turun menjadi sebesar 90,72% di tahun 2023. Hal ini terjadi karena ada beberapa pendapatan dari penerimaan pajak daerah dan Retribusi daerah yang tidak mencapai target seperti Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha serta Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rasio pajak daerah terhadap PAD juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 29,21% di tahun 2022 menjadi 31,96 % pada tahun 2023. Angka - angka ini menunjukan bahwa secara makro pendapatan PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun pertumbuhannya tidak sejalan dengan hal tersebut. Hasil ini menunjukan bahwa koordinasi bagi OPD pengelola PAD harus dilakukan secara berkesinambungan agar dalam pencapaian targetnya sejalan sesuai yang diharapkan.

Selaras dengan penyusunan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045, urusan Keuangan mengampu satu IUP yaitu Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB. Pengertian Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2019 – 2020 capaian indikator ini mengalami penurunan karena terdampak Covid-19. Kemudian dari tahun 2020 – 2023 meningkat landai seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang pasca pandemi covid-19. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah terkendalanya ekstensifikasi pendapatan daerah oleh kewenangan dan kebijakan pusat.

Terkait dengan adanya kewenangan pusat tersebut, pada Bulan Maret 2024 telah terbit Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/0002596 tentang Pengalokasian Pendanaan untuk Kegiatan /Sub Kegiatan Pencapaian Opsen PKB dan BBNKB yang secara jelas menyebutkan bahwa adanya perubahan skema penerimaan bagi hasil pajak daerah opsen PKB dan BBNKB kepada kabupaten /Kota. Dan berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah bahwa Penetapan UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dibutuhkan persamaan persepsi serta koordinasi bersama antara Provinsi dengan kabupaten kota se Jawa Tengah agar pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah dapat berjalan secara optimal. Pemberlakuan UU HKPD membawa konsekuensi adanya peningkatan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota namun dengan tidak menambah beban wajib pajak. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan BBNKB diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan adanya isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Bapenda Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Potensi piutang pajak daerah yang terjadi setiap tahun meningkat dapat dilihat pada tahun 2022 sebesar Rp 64.403.690.571,- naik menjadi Rp 69.774.813.873,- karena belum semua data wajib pajak dimutahirkan, masih menggunakan data KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013.
2. Pelaksanaan intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data belum optimal.
3. Digitalisasi dan Elektronifikasi pelayanan pajak & retribusi belum optimal.
4. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak masih rendah.
5. Kualitas SDM pengelola pajak daerah masih terbatas dan belum kompeten.
6. sinergitas Provinsi dan Kabupaten ditingkatkan agar pemungutan pajak daerah opsen PKB dan BBNKB dapat berjalan secara optimal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Selanjutnya dari isu-isu strategis tersebut dapat disusun program strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Isu dan Program Strategis Tahun 2026

No.	Isu Strategis	Uraian	Program Strategis	Keterangan
1.	Piutang Pajak	Potensi piutang pajak daerah yang terjadi setiap tahun meningkat	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Rekomendasi BPK RI
2.	Instensifikasi Pajak	Pertumbuhan Wajib Pajak dan Objek Pajak baru masih belum optimal	1. Pendataan Potensi Pajak daerah 2. Pelayanan Wajib Pajak Jemput Bola	
3.	Perbaikan dan Inovasi tata kelola	Peningkatan pelayanan dan peningkatan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi system pemungutan pajak dan retribusi maka diperlukan nataan/perbaikan tata kelolanya secara menyeluruh	1. Digitalisasi perpajakan 2. Pemasangan tambahan alat monitor pajak daerah 3. Pengawasan dan pembinaan pengelolaan pajak daerah bersama stake holder terkait	
4.	Sumber daya manusia	Kualitas SDM pengelola pajak daerah masih terbatas dan belum kompeten.	Pelatihan perpajakan	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari isu-isu strategis dan permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut di atas, maka Bapenda Kabupaten Pemalang perlu memberikan perhatian dan prioritas dalam penyelesaiannya. Guna mendukung tercapainya prioritas penyelesaian isu – isu strategis dan permasalahan tersebut maka perlu disusun program dan kegiatan untuk merealisasikannya. Penyusunan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Pemalang tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2025 dan RKPD tahun 2025.

Review Rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 BAPENDA KABUPATEN PEMALANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BAPENDA				14.064.134					19.672.787	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemalang		12.557.771	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemalang		175.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun	Pemalang	6 Jenis	77.091	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun	Pemalang	6 jenis	42.339	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemalang	2 dokumen	23.583	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemalang	2 dokumen	20.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemalang	1 Dokumen	4.182	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemalang	1 dokumen	20.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemalang	1 Dokumen	4.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pemalang	1 dokumen	15.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pemalang	1 dokumen	5.275	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pemalang	1 dokumen	10.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pemalang	1 dokumen	5.596	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pemalang	1 dokumen	10.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemalang	5 laporan	35.210	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemalang	5 laporan	100.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan	Pemalang		11.562.837	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan	Pemalang		11.647.787	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pemalang	812 Orang/bulan	11.532.787	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pemalang	812 Orang/bulan	11.532.787	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemalang	15 Laporan	4.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemalang	15 laporan	15.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pemalang	18 Dokumen	25.100	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Pemalang	18 dokumen	100.000	
3	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya				0		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya			200.000	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		0	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		75	200.000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		50	0	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Pemalang		235.792	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Pemalang		431.210	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemalang	1 Paket	7.198	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemalang	1 paket	8.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemalang	3 Paket	3.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemalang	3 paket	12.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pemalang	1 paket	2.643	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pemalang	1 paket	30.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemalang	12 paket	80.073	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemalang	12 paket	158.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemalang	12 paket	18.015	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pemalang	12 paket	19.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pemalang	2 dokumen	2.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pemalang	2 dokumen	5.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemalang	50 laporan	122.463	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemalang	50 laporan	199.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Pemalang		0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Pemalang		2.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pemalang	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pemalang	0 unit	2.000.000	Mobil opsen PKB
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pemalang	0 unit	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pemalang	0 unit	0	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pemalang	0 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pemalang	0 unit	500.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Pemalang		573.432	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Pemalang		582.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemalang	12 laporan	2.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemalang	12 laporan	6.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemalang	12 laporan	155.182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemalang	12 laporan	156.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemalang	12 laporan	416.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemalang	12 laporan	420.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Pemalang		126.617	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Pemalang		387.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemalang	59 unit	77.413	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemalang	59 unit	146.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemalang	55 unit	29.280	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemalang	55 unit	100.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemalang	1 unit	11.931	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemalang	1 unit	121.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemalang	5 unit	3.177	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemalang	5 unit	20.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap total pendapatan	Pemalang	13.50	1.256.362	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap total pendapatan	Pemalang		3.950.000	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jenis Aktivitas Pengelolaan pendapatan Daerah	Pemalang		1.256.362	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jenis Aktivitas Pengelolaan pendapatan Daerah	Pemalang		3.950.000	
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemalang	2 dokumen	11.280	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemalang	2 dokumen	20.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Pemalang	3 dokumen	86.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Pemalang	3 dokumen	86.000	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemalang	2 laporan	223.300	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemalang	2 laporan	200.000	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemalang	2 unit	55.700	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemalang	2 unit	270.000	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pemalang	50 laporan	130.505	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pemalang	50 laporan	275.000	Opsen PKB 150.000
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemalang	4 Laporan	4.164	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemalang	4 laporan	1.400.000	Pemutakhiran basis data 1.250.000
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Pemalang	20 Obyek pajak	15.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Pemalang	20 Obyek pajak	12.000	
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Pemalang	710 000 dokumen	317.301	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Pemalang	710 000 dokumen	530.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemalang	2 Layanan	45.152	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemalang	2 layanan	425.000	Opsen PKB 375.000
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Pemalang	50 dokumen	30.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Pemalang	50 dokumen	35.000	
11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Pemalang	12 Dokumen	50.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Pemalang	12 dokumen	300.000	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pemalang	80 Dokumen	200.960	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pemalang	80 dokumen	215.000	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemalang	12 Dokumen	77.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemalang	12 dokumen	162.000	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pemalang	4 Laporan	10.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pemalang	4 laporan	20.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Dari Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang No. 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Kabupaten Pemalang. Tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah “membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah”.

Sesuai dengan tugas pokok tersebut maka OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tidak mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan atau menampung usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : BAPENDA Kabupaten Pemalang

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Arah Kabijakan Nasional

Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPN 2005-2025, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestic yang begitu tinggi. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi Negara maju masih besar.

RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan suatu proyeksi dan tantangan Indonesia Emas 2045 dimana pembangunan dalam 20 tahun mendatang harus menggunakan paradigma baru bahwa Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Pencapaian visi Indonesia Emas 2025 -2045 sebagai Negara Nusantara berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dituangkan dalam delapan misi agenda pembangunan yaitu: 1) transformasi social, 2) transformasi Ekonomi, 3) transformasi Tata Kelola, 4) Supremasi Hukum, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan 6) Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan serta 8) Kesinambungan Pembangunan

3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Rencana pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 ini diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, serta tantangan megatren yang saat ini memengaruhi dinamika pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah tersebut antara lain menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana; masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat; terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat; daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal yang ditunjukkan dengan belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan, rendahnya daya saing tenaga kerja, dan belum optimalnya riset dan inovasi; ketimpangan ekonomi antarwilayah; belum optimalnya kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

hidup dan daya saing sumber daya manusia; belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah; belum optimalnya kondusivitas wilayah; serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi termasuk penerapan demokrasi substansial.

RPJPD Tahun 2025-2045 juga disusun dalam rangka mendukung pencapaian citacita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selain itu, Jawa Tengah juga diberikan peran sebagai penumpu pangan dan industri nasional sampai dengan tahun 2045. Dalam rangka mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045 tersebut serta dalam upaya menjawab berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Jawa Tengah maka ditetapkan visi pembangunan Jawa Tengah 2025-2045 yaitu Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Pencapaian visi Jawa Tengah 2045 tersebut dilakukan melalui delapan misi pembangunan daerah, enam sasaran pokok, tujuh belas arah pembangunan, empat puluh lima indikator utama, dan dilaksanakan dalam empat tahapan pembangunan daerah.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang

Merujuk pada UU No. 25 Th 2004 SPPN, bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN dan menurut UU no 23 tahun 2014 ttg pemda Pasal 263 (2) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Mendasari peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyusun RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 dengan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pemalang Mulya (Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya) dengan misi 1).Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan, 4) Ketahanan SDA, Lingkungan Hidup dan Bencana, 5) Ketahanan Budaya, 6)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Sementara itu ada beberapa isu strategis pembangunan yang nantinya dapat menjadi arah bagi pembangunan Kabupaten Pemalang dalam 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas tahun 2045, yaitu :

1. Pemanfaatan Bonus Demografi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan adaptif
2. Akselerasi pengentasan kemiskinan
3. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
4. Penguatan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan
5. Stabilitas ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Antisipasi masuknya budaya asing yang merusak kearifan budaya lokal dan norma masyarakat, khususnya generasi muda
7. Pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan kota yang berkualitas

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sbb:

3.2.1 Tujuan

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel “.

Dengan indikator tujuan : Rasio Peningkatan PAD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah : Meningkatnya Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD dengan indikator sasaran : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah tata cara pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Transparan : Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan salah satu pelayanan umum atau pelayanan public guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat, yaitu dengan cara pemberian jasa kepada masyarakat dalam memenuhi tanggung jawabnya melakukan pembayaran pajak daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak memungut biaya kepada masyarakat dan seluruh pembayaran pajak langsung di setorkan ke Kas Daerah.

Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Persentase Kabijakan Pendapatan yang terselesaikan
2. Persentase Wajib Pajak Tertagih
3. Persentase Pajak Daerah terhadap PAD

Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu : akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai serta menetapkan target kinerja, tujuan dan sasaran yang terukur. Gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2021-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Realisasi			Ket
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel		1. Rasio Peningkatan PAD	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	-4,4%	4%	0,57%	
2		Meningkatnya Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD	2. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	14	14,14	14,16	
3			3. Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	75,77	76,28	71,68	
4.		Meningkatnya akurasi data pajak daerah	4. Persentase Waib Pajak tertagih (PBB)	78	78	78	78	78	100	100	100	
5		Meningkatnya pendapatan pajak daerah	5. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD (%)	25	25	25	25	25	29,21	31,96	31,47	
6			6. Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0.9	-9,28	**-7,87**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sejalan dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029. Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah.
3. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan.
5. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

Adapun salah satu tujuan daerah yang selaras dengan tugas Bapenda Kabupaten Pemalang yaitu **"**Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel**",** dengan indikator tujuan adalah **Indeks reformasi birokrasi**, Dengan tujuan Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran daerah adalah **"**Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik **"**, dengan indikator sasaran **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat sejalan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dengan visi dan misi Kabupaten Pemalang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Visi dan misi ini merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah "**PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**" . Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungandan bersih dalam tata kelola pemerintahan

2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. **MULYA**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Adapun misi Kabupaten Pemalang yang menjadi rujukan untuk tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 yaitu :

Tujuan Perangkat Daerah:

Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah yang efektif transparan dan akuntabel dengan indikator tujuan Rasio PAD.

Sasaran Perangkat Daerah

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD dengan indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
2. Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan dengan indikator Nilai IKM dan Nilai SAKIP.

Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator:

- Persentase pertumbuhan Wajib Pajak Baru (non PBB)
- Persentase Piutang yang terbayarkan
- Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah yang efektif transparan dan akuntabel		Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah total pendapatan pada APBD dikali 100%	%	14,166	18,909	20	20	20	20	20	20
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan PAD	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(Penerimaan pajak daerah / PDRB) x 100%	%	0,35	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7
		Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	Nilai SKM	Hasil Survei	Nilai	82,14	87,99	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
			Nilai SAKIP PD	Hasil Penilaian Inspektorat	Nilai	69,54	70	70	70	70	70	70	70

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana program yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Program ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD.

Kegiatan merupakan aktifitas sebagai penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdemensi 5 (lima) tahun.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 43 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan : 7
   Sub Kegiatan : 29
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   Kegiatan : 1
   Sub Kegiatan : 14

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2025-2029 telah menetapkan program dan kegiatan yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyusunan dokumen perencanaan PD
   2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   1) Sosialisasi peraturan peundang-undangan
   2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
   3) Koordinasi dan penyusunan laporan keunagan bulanan/ triwulanan/ semester
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   3) Pemeliharaan peralatan rumah tangga
   4) Penyediaan bahan logistik kantor
   5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   7) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
   2) Pengadaan mebeleur.
   3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah , dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan jasa surat menyurat.
   2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
   3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas, dan kendaraan dinas jabatan
2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4) Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
5) Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6) Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut

1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
3) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daearah.
4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
5) Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daearah
6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7) Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8) Penetapan wajib pajak daerah.
9) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
10) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
11) Penagihan pajak daerah.
12) Penyelesaian keberatan pajak daerah.
13) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.
14) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

4.2. Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana pada tabel di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2

Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026

Kabupaten Pemalang

Nama Perangkat Daerah : BAPENDA

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2025					Catatan Penting	Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	penetapan	efisisnsi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6		7	8	9	10
								15,688,166,685	**15,254,289,685**				**10,785,465,044**
5	**2**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah**			**13,183,442,250**	**13,116,423,050**				**10,709,965,044**
5	**2**	**1**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun**			**17,758,380**	**17,758,380**				**6,000,000**
5	2	1	02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	5,387,400	5,387,400	APBD		3 dokumen	1,000,000
5	2	1	02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	2,244,260	2,244,260	APBD		1 dokumen	1,000,000
5	2	1	02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	2,114,800	2,114,800	APBD		1 dokumen	1,000,000
5	2	1	02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	2,155,760	2,155,760	APBD		1 dokumen	1,000,000
5	2	1	02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	2,268,520	2,268,520	APBD		1 dokumen	1,000,000
5	2	1	02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		6 laporan	3,587,640	3,587,640	APBD		6	1,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

					Realisasi Kinerja SKPD							
5	**2**	**1**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan**			**11,339,269,560**	**11,339,269,560**	APBD			**10,081,564,752**
5	2	1	02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	11,335,013,100	11,335,013,100	APBD		12 bulan	10,079,564,752
5	2	1	02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15 laporan	1,708,760	1,708,760	APBD		15 bulan	1,000,000
5	2	1	02.02.07	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan	2,547,700	2,547,700	APBD		18 laporan	1,000,000
5	2	1	**2.04**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jenis aktivitas peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan**								
5	2	1	02.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Perundang-Undangan								
5	2	1	02.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Perundang-Undangan								
5	**2**	**1**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**			**328,512,710**	**263,892,810**				**100,400,000**
5	2	1	02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	7,198,000	7,198,000	APBD		1 paket	3,000,000
5	2	1	02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	3,000,000	3,000,000	APBD		4 unit	3,000,000
5	2	1	02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10 paket	3,704,250	3,704,250	APBD		10 unit	3,000,000
5	2	1	02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket	102,637,960	88,667,960	APBD		3 jenis	24,000,000
5	2	1	02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	18,015,000	13,410,000	APBD		1 paket	5,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5	2	1	02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	2,400,000	2,400,000	APBD		12 bulan	2,400,000
5	2	1	02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 laporan	191,557,500	145,512,600	APBD		24 kali	60,000,000
5	**2**	**1**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis aktivitas pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**			**751,884,000**	**751,884,000**				291.852
5	2	1	02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4 unit	721,884,000	721,884,000	APBD		4 unit	0
5	2	1	02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		8 unit	0	0	APBD		8 unit	0
5	2	1	02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 unit	30,000,000	30,000,000	APBD		13 unit	5000000
5	**2**	**1**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**			**617,400,000**	**617,400,000**				**617,400,000**
5	2	1	02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3500 laporan	2,000,000	2,000,000	APBD		3500 surat	2,000,000
5	2	1	02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	187,600,000	187,600,000	APBD		12 bulan	187,600,000
5	2	1	02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 laporan	427,800,000	427,800,000	APBD		24 orang	427,800,000
5	**2**	**1**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis aktivitas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**			**128,617,600**	**126,218,300**				**81,612,000**
5	2	1	02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		59 unit	77,413,150	75,013,850	APBD		59 unit	75,500,000
5	2	1	02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		55 unit	29,280,000	29,280,000	APBD		55 unit	2,000,000
5	2	1	02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit			APBD		1 unit	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5	2	1	02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 unit	11,931,000	11,931,000	APBD		5 unit	2,000,000
5	2	1	02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		23 unit	9,993,450	9,993,450	APBD		23 unit	2,112,000
5	**2**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio PAD terhadap total pendapatan**			**2,504,724,435**	**2,137,866,635**	APBD			**1,755,400,000**
5	**2**	**4**	**2.01**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jenis Aktivitas Pengelolaan pendapatan Daerah**			**2,504,724,435**	**2,137,866,635**	APBD			**1,755,400,000**
5	2	4	02.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 dokumen	9,157,500	4,625,000	APBD		2 dokumen	9,157,500
5	2	4	02.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		3 dokumen	248,870,750	227,907,750	APBD		6 dokumen	48,870,750
5	2	4	02.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		240 laporan	314,192,400	249,357,300	APBD		240 unit	163,000,000
5	2	4	02.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		2 unit	278,671,000	268,122,900	APBD		2 unit	253,895,000
5	2	4	02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		170 laporan	305,625,200	254,028,400	APBD		180 data	200,000,000
5	2	4	02.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		7.400 laporan	114,767,235	109,913,435	APBD		212.769 data	100,000,000
5	2	4	02.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		12 objek pajak	8,200,000	3,400,000	APBD		12 bulan	8,200,000
5	2	4	02.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		705 000 dokumen	325,921,000	317,361,800	APBD		710 000 data	317,971,000
5	2	4	02.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		12 layanan	246,665,400	215,650,400	APBD		12 bulan	125,000,000
5	2	4	02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		12 dokumen	23,608,250	18,751,450	APBD		12 bulan	25,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5	2	4	02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		12 dokumen	247,500,000	238,743,000	APBD		12 kegiatan	242,000,000
5	2	4	02.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		80 dokumen	127,434,700	86,660,700	APBD		80 permohonan	117,305,750.00
5	2	4	02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 dokumen	45,361,000	38,532,000	APBD		12 kegiatan	45,000,000
5	2	4	02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4 laporan	208,750,000	104,812,500	APBD		4 kegiatan	100,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2025 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

Pada Renja memuat sasaran, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Ada catatan penting yang harus mendapat perhatian khusus dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahwa dalam pemutakhiran data untuk mendukung peningkatan potensi pajak daerah diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga perlu dukungan dari semua pihak baik dukungan anggaran maupun dukungan dalam pelaksanaan. Namun demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut masih bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini masih belum sempurna. Sehingga kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

Pemalang, 19 September 2025

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ROSI KARTIKA DEWI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681118 199603 2 006

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Y. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026. Renja BKD Tahun 2026 disusun pada saat transisi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga proses penyusunan Renja BKD disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2026, BKPSDM Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja BKD Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam 1 (satu) tahun;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Secara normatif, menjadi acuan bagi BKPSDM Kabupaten Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja Tahun 2024, pengendalian kegiatan Tahun 2024, dan RKPD Tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Bidang dan UPT di BKPSDM Kabupaten Pemalang
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Kerja Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di BKPSDM Kabupaten Pemalang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : OPD di lingkungan Kabupaten Pemalang dan pemangku kepentingan yang terkait yang dilaksanakan bersamaan dengan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Kerja Penyusunn Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 serta mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

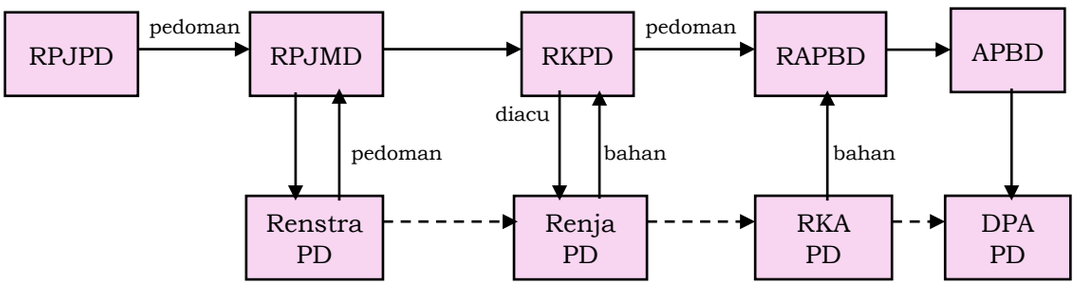

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di BKPSDM Kabupaten Pemalang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang, analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Pemalang, berisi tentang kerangka pendanaan Tahun 2026 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbaikan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang di tahun 2024 adalah:

A.Tujuan :

Meningkatnya profesionalitas ASN

B.Sasaran :

1.Meningkatnya kompetensi ASN
2.Meningkatnya kinerja ASN
3.Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN
4.Meningkatnya disiplin ASN
5.Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di BKPSDM Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 dan estimasi Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran BKPSDM Kabupaten Pemalang sebesar Rp14.948.977.450,00 yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp13.338.166.118,00 atau sebesar 89,22%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan BKPSDM Kabupaten Pemalang sebesar Rp13.458.659.450,00 yang terbagi dalam 2 program, 11 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Sampai dengan Juni, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp4.456.987.612,00 atau sebesar 33,12%.

Berdasar hasil evaluasi RKPD tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi capaiannya sebagai berikut :

a.Dari 7 indikator kinerja utama yang ada, terdapat 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu persentase tingkat kedisiplinan ASN, disebabkan di tahun 2024 sejumlah 12 ASN mendapat hukuman disiplin.

b.Dari 9 indikator program yang ada, terdapat 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu persentase nilai kinerja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

aparatur yang dievaluasi, disebabkan di tahun 2024 sejumlah 271 pegawai tidak melaporkan kinerjanya melalui e-Kinerja BKN.

c.Dari 17 indikator kegiatan yang ada, terdapat 1 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu jumlah dokumen administrasi kepegawaian bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur, disebabkan di tahun 2024 tidak ada pegawai yang mendapat tanda jasa satya lancana.

d.Dari 43 indikator sub kegiatan yang ada, terdapat 2 indikator yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :

1)Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi disebabkan di tahun 2024 tidak terdapat lembaga profesi ASN yang difasilitasi.

2)Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa, disebabkan di tahun 2024 tidak ada pegawai yang mendapat tanda jasa satya lancana.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**•Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan sebesar 100% sesuai target •Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra sesuai target yang ditetapkan**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 9 dokumen sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 9 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 1 dokumen sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sebanyak 1 dokumen sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan peserta sebanyak 45 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya administrasi umum perangkat daerah sebanyak 38 paket sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 24 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2 paket sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 4 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebanyak 13 unit sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya sebanyak 13 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 3 jasa selama 12 bulan sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah sebanyak 147 unit sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 36 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar sebanyak 1 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 108 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 2 unit sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian) tepat waktu sebesar 100% sesuai target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan**
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Terlaksananya penyusunan dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN sebanyak 668 dokumen melebihi target**	**Kegiatan terselesaikan melebihi target**
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebanyak 2 dokumen melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 2 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian sebanyak 664 dokumen melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya kualitas sistem informasi layanan kepegawaian yang terintegrasi sebesar 100% sesuai target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan**
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Terlaksananya pengelolaan sistem kepegawaian sebanyak 10 kegiatan sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya data kepegawaian sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 2 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya mutasi dan promosi ASN sesuai kinerjanya sebanyak 83,62% melebihi target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan**
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	**Terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN sebanyak 11 kegiatan sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya mutasi ASN yang meliputi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah sebanyak 6 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya pengelolaan pengembangan promosi ASN sebanyak 5 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) tepat waktu sebanyak 100% sesuai target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan**
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	**Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat) sebanyak 6 kegiatan sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebanyak 6 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya pengembangan kompetensi ASN sebanyak 84,31% melebihi target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan**
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN sebanyak 9137 orang melebihi target**	**Kegiatan terselesaikan melebihi target**
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya kapasitas ASN sebanyak 9137 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya assessment center sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat sebanyak 9137 dokumen melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pembinaan jabatan fungsional ASN	Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional ASN sebanyak 152 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya kualitas pendidikan ASN sesuai jabatannya sebanyak 2,56% melebihi target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan**
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**Terlaksananya kegiatan peningkatan kualifikasi pendidikan ASN sebanyak 149 orang melebihi target**	**Kegiatan terselesaikan melebihi target**
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya pengelolaan pendidikan lanjutan ASN sebanyak 149 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) tepat waktu sebanyak 100% sesuai target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra sesuai target yang ditetapkan**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian (sertifikasi, pengembangan karir jabatan fungsional) sebanyak 50 dokumen sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Meningkatnya karir ASN jabatan fungsional sebanyak 50 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya penilaian dan evaluasi kinerja ASN sebanyak 97,50% tidak mencapai target** **•Penyebab : di tahun 2024 sejumlah 271 pegawai tidak melaporkan kinerjanya melalui e-Kinerja BKN**	**Target Renstra tidak tercapai**
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja ASN sebanyak 4 dokumen sesuai target**	**Kegiatan terselesaikan sesuai target**
Sub Kegiatan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Tersusunnya kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 1 dokumen sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya layanan administrasi kepegawaian (penghargaan, tanda jasa, ijin perceraian) tepat waktu sebanyak 100% sesuai target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra sesuai target yang ditetapkan**
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian (penghargaan, tanda jasa, ijin perceraian) sebanyak 2329 orang tidak mencapai target**	**Kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan**
Sub Kegiatan Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN sebanyak 2306 orang sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa paratur	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target
Sub Kegiatan Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Terlaksananya pelayanan proses izin perceraian pegawai sebanyak 23 kegiatan melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Program Kepegawaian Daerah	**•Tercapainya kedisiplinan ASN sebanyak 99,89% melebihi target** **•Penyebab : Komitmen pimpinan BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada**	**Capaian Renstra melebihi target yang ditetapkan**
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan disiplin ASN sebanyak 12 kegiatan melebihi target**	**Kegiatan terselesaikan melebihi target**
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya disiplin ASN berupa pembinaan kepada 39 orang melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sebanyak 12 kegiatan melebihi target	Sub Kegiatan terselesaikan melebihi target
Sub Kegiatan Evaluasi disiplin ASN	Terlaksananya evaluasi disiplin ASN sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Sub Kegiatan terselesaikan sesuai target

Sumber : LkjIP BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasar tabel 2.1, terdapat capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2024 maupun Renstra 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di BKPSDM Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. SDM dan sarana prasarana di BKPSDM Kabupaten Pemalang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika 7embaga7nan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP;
4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait.

Masih terdapat capaian program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga kedepan harus lebih cermat dalam menentukan target dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang
dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5.03	**Kepegawaian**									
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian perencanaan dan keuangan (persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian (persen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)**	**41**	**16**	**9**	**9**	**100**	**16**	**41**	**100**
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	11	4	2	2	100	3	9	81,82
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	3	6	120
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	5	2	1	1	100	3	6	120
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	2	5	100
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	5	2	2	2	100	3	7	140

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (dokumen)**	**144**	**52**	**26**	**26**	**100**	**26**	**76**	**52,78**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan (dokumen)	4	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran (dokumen)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (dokumen)**	**5**	**2**	**1**	**1**	**100**	**1**	**4**	**80**
5.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (dokumen)**	**10**	**2**	**1**	**1**	**100**	**1**	**4**	**40**
5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan (orang)	3	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (orang)	4	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang/kegiatan)	350	135	45	45	100	385	565	161,43
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang/kegiatan)	280	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah (paket)**	**360**	**72**	**38**	**38**	**100**	**26**	**136**	**37,78**
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	60	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	60	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan (paket)	60	24	24	24	100	12	60	100
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	60	24	2	2	100	2	28	46,67
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	60	24	4	4	100	4	32	53,33
5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (paket)	60	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	60	24	4	4	100	4	32	53,33
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	20	0	0	0	100	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	16	0	0	0	0	4	4	25
5.03.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)**	**68**	**24**	**13**	**13**	**100**	**113**	**150**	**220.59**
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	8	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	10	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	15	24	13	13	100	113	150	1000
5.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan (unit)	25	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	10	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (laporan)**	**240**	**72**	**36**	**36**	**100**	**36**	**144**	**60**
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	60	0	0	0	0	0	0	0
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	60	24	12	12	100	12	48	80
5.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit/tahun)**	**595**	**380**	**147**	**147**	**100**	**86**	**613**	**103,02**
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit/tahun)	200	71	0	0	100	9	80	40

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit/tahun)	200	73	36	36	100	27	136	68
5.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (unit/tahun)	5	2	1	1	100	1	4	80
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit/tahun)	100	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit/tahun)	75	30	108	108	100	47	185	246,67
5.03.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit/tahun)	5	0	0	0	100	0	0	0
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit/tahun)	10	4	2	2	100	2	8	80
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya (%)**	**4**	**20,57**	**3,80**	**84,31**	**2.218**	**12,23**	**12,23**	**305,75**
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (%)	**2**	**1,19**	**1,80**	**2,56**	**142,22**	**3,65**	**3,65**	**182,5**
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi (%)	**100**	**100**	**100**	**97,50**	**97,50**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (%)	**2**	**21,65**	**1,80**	**83,62**	**4.645**	**7,22**	**7,22**	**361**
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)	**100**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan (%)	**100**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN (%)	**90**	**98,65**	**80**	**99,89**	**124,86**	**85**	**85**	**94,44**
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (pengadaan dan pemberhentian ASN) (dokumen)**	**2.040**	**428**	**616**	**668**	**108,44**	**517**	**1.613**	**79,07**
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan system dan data kepegawaian (dokumen)	**15**	**3**	**10**	**10**	**100**	**5**	**18**	**120**
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN (dokumen)	5	0	1	0	0	0	1	20

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN (dokumen)	5	1	1	2	200	2	5	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	10	2	2	2	100	2	6	60
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN (laporan)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian (dokumen)	2.000	425	610	664	108,85	515	1.604	80,2
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN (dokumen)	5	0	1	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (13embaga/tahun)	10	0	1	0	0	0	0	0
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian (dokumen)	5	1	4	4	100	4	9	180
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian (dokumen)	5	1	4	4	100	1	6	120
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (laporan)	5	1	2	2	100	2	5	100
5.03.02.2.02	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (dokumen)**	**25**	**5**	**8**	**11**	**137,50**	**5**	**21**	**84**
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat ASN) (dokumen)	**10**	**2**	**6**	**6**	**100**	**6**	**14**	**140**
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan jmutasi jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah (dokumen)	5	1	4	6	150	4	11	220
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN (dokumen)	10	2	6	6	100	6	14	140
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN (dokumen)	20	4	4	5	125	1	10	50

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensinya (orang)**	**600**	**173**	**200**	**9137**	**4.568**	**1.408**	**10.718**	**1.786**
		Jumlah ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (orang)	**750**	**122**	**75**	**149**	**198,67**	**125**	**396**	**52,8**
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (sertifikasi, diklat, pengembagangan karir jabatan fungsional) (dokumen)	**15**	**3**	**3**	**50**	**1.666,7**	**604**	**657**	**4.380**
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya (orang)	600	173	200	9137	4.568	1408	10.718	1.786
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center (dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan (orang)	750	122	75	149	198,67	125	396	52,8
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat (dokumen)	15	1	15	9137	60.913	3	9.141	60.940
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan (orang)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN (laporan)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional (orang)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat jabatan fungsional (dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitas sertifikasi jabatan fungsional ASN (orang)	75	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah dokumen hasil evaluasi diklat dan sertfikasi pejabat fungsional (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (dokumen)	20	0	0	0	0	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina (orang)	25	0	0	152	152	604	756	3.024
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir (orang)	20	0	40	50	125	0	50	250
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengembangan jabatan fungsional (dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0
5.03.02.2.04	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja ASN (dokumen)**	**75**	**8**	**5**	**4**	**80**	**4**	**16**	**21,33**
		Jumlah ASN yang mendapat layanan administrasi kepegawaian (tanda jasa, penghargaan, ijin cerai (orang)	**3622**	**1010**	**2346**	**2329**	**99,28**	**2556**	**5895**	**162,75**
		Jumlah dokumen pengelolaan disiplin ASN (dokumen)	**115**	**12**	**5**	**12**	**240**	**13**	**37**	**32,17**
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	5	0	0	1	100	0	1	20
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	65	8	4	4	100	4	16	24,61
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur (dokumen)	5	0	1	4	400	0	4	80
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan (orang)	3.000	947	2.306	2306	100	2477	5730	191
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa (orang)	500	50	20	0	0	59	109	21,8
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur (dokumen)	5	0	0	1	100	0	1	20
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan (orang)	150	34	36	39	108,33	200	273	182
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN (laporan)	100	12	4	12	300	13	37	37
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani (dokumen)	125	13	20	23	115	20	56	44,8
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN (laporan)	15	0	1	1	100	0	1	6,67

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang
(Renstra 2021-2026)

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Penting
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	V	-	65,10	65,34	65,59	78,28	78,30	78,32	
2	Persentase kompetensi ASN	%	-	V	-	57,80	58,10	58,40	68,00	68,10	68,20	
3	Persentase kinerja ASN	%	-	V	-	80,30	80,30	80,30	83,36	83,40	83,44	
4	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	-	V	-	51,60	52,10	52,60	84,46	84,50	84,54	
5	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	%	-	V	-	99,7	99,7	99,7	99,17	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	V	-	83,95	84,98	85,15	84,78	88,40	88,40	
7	Nilai SAKIP	Nilai	-	V	-	60,45	60,50	60,55	65,66	71,41	72,41	
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	51,45	51,80	51,90	-	-	-	Inspektorat tidak melaksnakan evaluasi
9	Persentase capaian perencanaan dan keuangan	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	-	-	-	3,80	3,90	4,00	84,31	3,20	4,00	
12	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	-	-	-	1,80	1,90	2,00	2,56	3,48	2,00	
13	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	%	-	-	-	100	100	100	97,50	100	100	
14	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	-	-	-	1,80	1,90	2,00	83,62	8,08	2,00	
15	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	%	-	-	-	80	85	90	99,89	85	90	
18	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	V	125	130	135	44,89	45,29	45,69	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Penting
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	V	8,00	9,00	10,00	13,67	14,17	14,67	
20	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	V	4,00	5,00	6,00	22,94	23,44	23,94	

Sumber : Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
LKjIP Kabupaten Pemalang Tahun 2024
LKPJ Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, khususnya di tahun 2021 adanya kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Dengan adanya kebijakan tersebut, daerah harus mampu merubah proses bisnis organisasi dari model lama yang sudah berjalan ke model baru namun tetap memperhatikan kinerja dan karir ASN serta tidak berdampak buruk bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 20 kinerja terdapat 16 kinerja telah mencapai target dan 4 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024, meliputi :
   a. Indeks Profesionalitas ASN
   b. Persentase kompetensi ASN
   c. Persentase kinerja ASN
   d. Persentase tingkat pendidikan ASN
   e. Indeks Kepuasan Masyarakat
   f. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
   g. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
   h. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
   i. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
   j. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
   k. Persentase layanan administrasi kepegawaian
   l. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

m.Persentase tingkat kedisiplinan ASN
n.Nilai SAKIP
o.Persentase capaian perencanaan dan keuangan
p.Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

a.SDM yang berkompeten;
b.Sarana dan prasarana yang relatif memadai;
c.Pelaksanaan upaya peningkatan IP ASN dengan meningkatkan fasilitasi tugas belajar, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan mensosialisasikan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang memuat bahwa pengembangan kompetensi pada ASN minimal 20 jam pelajaran per tahun, memberi punishment bagi ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi dan yang tidak melaporkan kinerjanya, serta meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN.
d.Kerjasama dengan pihak luar (BKPSDM Provinsi, BPSDMD Provinsi, BKN) dalam upaya transfer *knowledge* dan transfer informasi;
e.Komunikasi yang intens antar instansi.

2.Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :

a.Persentase tingkat kedisiplinan ASN tidak mencapai target disebabkan terdapat 0,83% ASN mendapat hukuman disiplin di tahun 2024. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN yang lebih intensif.
b.Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak mencapai target disebabkan saat penentuan target di RPJMD rumus yang digunakan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah dikali 100%. Namun untuk pengisian data LPPD sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 dihitung dengan rumus : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi seluruh jumlah pegawai. Untuk itu, di tahun mendatang perlu lebih cermat dalam penentuan target kinerja.
c.Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi tidak mencapai target disebabkan terdapat 2,5% ASN tidak melaporkan kinerjanya melalui e-kinerja BKN. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan monitoring dan evaluasi pengisian e-kinerja BKN secara lebih intensif dan perlu diberikan *punishment* kepada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.
d.Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tidak mencapai target disebabkan sampai dengan 31 Desember 2024 nilai IRB BKPSDM Kabupaten Pemalang hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang belum rilis.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 terdapat perubahan kinerja pelayanan, berupa :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang
(Renstra 2025-2029)

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	-	V	-	-	273,00	283,50	294,00	262,50	273,00	283,50	294,00	
2	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	-	V	-	-	88,67	88,92	89,17	88,42	88,67	88,92	89,17	
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	V	-	-	78,30	78,32	78,34	78,28	78,30	78,32	78,34	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	V	-	-	84,98	85,18	85,38	84,78	84,98	85,18	85,38	
5	Nilai SAKIP OPD	Nilai	-	V	-	-	71,41	72,41	73,41	65,66	71,41	72,41	73,41	
6	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase terpenuhinya ASN	Persen	-	-	-	-	71,31	74,43	77,39	64,51	71,31	74,43	77,39	
9	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	-	-	-	-	99,18	99,31	99,58	99,06	99,18	99,31	99,58	
10	Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	Nilai	-	-	-	-	21,14	21,16	21,18	21,12	21,14	21,16	21,18	
11	Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	Persen	-	-	-	-	18,69	19,19	20,69	17,19	18,69	19,19	20,69	
12	Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	Persen	-	-	-	-	94,83	94,85	94,87	94,81	94,83	94,85	94,87	
13	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persen	-	-	-	-	89,65	90,15	90,65	89,15	89,65	90,15	90,65	
14	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	-	-	-	-	27,40	27,60	27,80	27,20	27,40	27,60	27,80	

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang

BKPSDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. BKPSDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kegiatan yang dilakukan berupa : pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN; penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengembangan kompetensi teknis; serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Evaluasi penilaian kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari:

a.Indeks Profesionalitas ASN
b.Persentase kompetensi ASN
c.Persentase kinerja ASN
d.Persentase tingkat pendidikan ASN
e.Persentase tingkat kedisiplinan ASN
f.Indeks Kepuasan Masyarakat
g.Nilai SAKIP
h.Indeks Reformasi Birokrasi
i.Persentase capaian perencanaan dan keuangan
j.Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian
k.Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
l.Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
m.Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi
n.Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
o.Persentase layanan administrasi kepegawaian
p.Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
q.Persentase tingkat kedisiplinan ASN

BKD Kabupaten Pemalang harus berupaya meningkatkan kapabilitas birokrasi agar mencapai nilai optimal, dengan meningkatkan profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang. Tingkat profesionalitas ASN dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 78,28 melebihi target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 65,10 dan target Perjanjian Kinerja sebesar 75,00 sehingga tingkat capaiannya sebesar 104,38%.

Bila rata-rata IP ASN Kabupaten Pemalang tahun 2022-2024 dibandingkan dengan IP ASN Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang mempunyai rata-rata yang lebih rendah. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IP ASN Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Pada tahun 2022, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 51,63 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 46,66. Begitu pula di tahun 2023, IP ASN Kabupaten Pemalang sebesar 65,53 lebih tinggi dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar sebesar 64,84. Namun, di tahun 2024 IP ASN Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata IP ASN kabupaten sekitar. Perbandingan IP ASN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang dibanding Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar Tahun 2022-2024

No	Tahun	Indeks Profesionalitas ASN							
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang	Prov Jateng
1	2022	54,94	46,13	43,87	40,94	47,42	46,66	51,63	54,46
2	2023	72,64	70,34	67,35	65,91	47,98	64,84	65,53	61,46
3	2024	79,49	79,38	80,76	79,45	75,25	78,87	78,28	82,93
Rata-rata		69,02	65,28	63,99	62,10	56,88	63,46	65,15	66,28

Sumber: IP ASN BKN, 2022, 2023 dan 2024

Walaupun IP ASN Kabupaten Pemalang sudah melebihi target dan lebih tinggi daripada rata-rata IP ASN kabupaten sekitar, namun masih dalam kategori "sedang", sehingga perlu upaya untuk meningkatkan dimensi-dimensi Indeks Profesionalitas ASN yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi dan kedisiplinan.

Dimensi yang pertama yaitu Kompetensi yang diukur dengan indikator persentase kompetensi ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 68% mencapai target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 57,58% dan target Perjanjian Kinerja sebesar 65,00% sehingga tingkat capaiannya sebesar 104,61%. Namun, masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan masih kurangnya ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi atau sudah mengikuti namun bukti dukung tidak diupload di Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg). Untuk meningkatkan kompetensi ASN telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 84,31% ASN telah meningkat kompetensinya. Namun masih perlu ditingkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan perlu dilaksanakan sosialisasi upload bukti keikutsertaan kegiatan peningkatan kapasitas di Simpeg.

Dimensi kedua yaitu Kinerja yang diukur dengan indikator persentase kinerja ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 83,36% melebihi target Renstra dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 80,30% sehingga tingkat capaiannya sebesar 103,81%. Untuk meningkatkan kinerja ASN telah dilaksanakan evaluasi kinerja ASN melalui e-kinerja dengan capaian di tahun 2024 sebanyak 97,50% ASN telah mengisi e-kinerja dan telah dievaluasi kinerjanya. Selain mengevaluasi kinerja ASN dilaksanakan juga evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dengan capaian di tahun 2024 sebanyak 83,62% pejabat.

Dimensi ketiga yaitu Kualifikasi yang diukur dengan indikator persentase tingkat pendidikan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 84,46% melebihi target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 51,60% dan target Perjanjian Kinerja sebesar 80% sehingga tingkat capaiannya sebesar 105,56%. Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN telah dilaksanakan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 2,56% ASN telah meningkat kualifikasi pendidikannya.

Dimensi keempat yaitu Kedisiplinan yang diukur dengan indikator persentase tingkat kedisiplinan ASN. Realisasi indikator ini di tahun 2024 sebesar 99,17% tidak mencapai target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 99,7% dan target Penjanjian Kinerja sebesar 100% sehingga tingkat capaiannya sebesar 99,17%. Indikator ini diukur dari tingkat kehadiran berdasarkan absensi,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sedangkan apabila diukur dari jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sehingga mendapatkan hukuman disiplin, tingkat kedisiplinan ASN di tahun 2024 sebesar 99,89%.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKD Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya pelayanan pengadaan, pemberhentian, kenaikan pangkat, sertifikasi fungsional, diklat, pengembangan karir, pemberian tanda jasa, penghargaan dan ijin cerai. Capaian terhadap pelayanan administrasi kepegawaian di tahun 2024 sebesar 100%, pelayanan administrasi kepegawaian ini telah memanfaatkan digitalisasi sehingga hasil yang dicapai lebih efisien. Selanjutnya, dalam administrasi dan pengelolaan data kepegawaian telah digunakan sistem kepegawaian yang harus dimutakhirkan dan dikembangkan setiap saat. Di tahun 2024, capaian persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan sebesar 100% yaitu telah dikembangkannya SIMPEG sehingga dapat sinkron dengan SI ASN BKN.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai SAKIP, persentase capaian perencanaan dan keuangan, serta persentase capaian layanan umum dan kepegawaian. Pada tahun 2024, BKD Kabupaten Pemalang mendapat nilai IKM sebesar 84,78 melebihi target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 83,95 sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,99%. Selanjutnya, nilai SAKIP sebesar 65,66 (kategori Baik). Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai IKM dan SAKIP adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM BKD Kabupaten Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil IKM dan SAKIP sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN di Pemerintah Kabupaten Pemalang, BKPSDM Kabupaten Pemalang menerapkan sistem merit dan melaksanakan manajemen ASN sesuai dengan NSPK, dengan capaian selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	NA	122,5	NA	238,5	262,5
2.	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	NA	NA	NA	62,18	88,42

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Penilaian sistem merit di Kabupaten Pemalang dimulai di tahun 2021 dengan nilai sebesar 122,5 (kategori “BURUK”). Di tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian, namun berita acara hasil penilaian tidak terbit karena terjadi OTT KPK. Selanjutnya di tahun 2023 pelaksanaan sistem merit mendapat nilai sebesar 238,5 (kategori “KURANG”) dan di tahun 2024 mendapat nilai 262,5 dengan kategori “BAIK”. Hal ini merupakan capaian yang baik, dan menjadi bukti kongkrit jika Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu melaksanakan Manajemen ASN dengan baik sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Meskipun demikian, hal yang perlu diantisipasi adalah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ketersediaan SDM Kabupaten Pemalang yang semakin sedikit, baik karena distribusi ASN yang tidak merata di semua OPD, maupun karena tingginya angka pensiun dan tidak sebanding dengan SDM yang diterima dari mekanisme pengadaan murni. Pengadaan CASN yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya mengandalkan dari ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Pemalang yang jumlahnya tidak signifikan. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan distribusi ASN dalam Jabatan juga terpengaruh ketika pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional diterapkan, sehingga BKPSDM Kabupaten Pemalang harus segera menyesuaikan dan kembali melakukan penguatan Manajemen Talenta ASN. Pengisian PNS dalam jabatan harus tetap dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan secara adil dan wajar dalam kerangka Manajemen Talenta dengan berpedoman pada pola karir instansi dan nasional.

Sedangkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN merupakan aturan yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam mengelola ASN. Di tahun 2024, indeks NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 88,42 dengan kategori “Unggul”. Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang, akan dilakukan upaya berupa melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim penilai Sistem Merit dan NSPK dari BKN.

Selanjutnya capaian dalam pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM
BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Permasalahan
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93.602.000	91.252.500	97,49	-
2	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	325.678.400	283.882.840	87,17	-
3	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	354.309.500	306.413.665	86,48	-
4	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	1.325.755.200	1.243.815.910	93,82	-

Sumber : Evaluasi RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, BKPSDM Kabupaten Pemalang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.8
Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan
Tupoksi BKPSDM Kabupaten Pemalang

Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah	1)Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan	1)Kebijakan pengadaan pegawai ditentukan oleh Pemerintah Pusat	1)Adanya Aplikasi SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN dari BKN yang membantu penghitungan kebutuhan pegawai
	2)Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan	2)Data kinerja dan potensi pegawai belum tersedia untuk semua pegawai	2)Adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN yang memfasilitasi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen talenta ASN (Aparatur Sipil Negara)
	3)Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan	3)Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan	3)Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/ Kementerian/Lembaga
	4)Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan	4)Terbatasnya SDM dan sarpras untuk melaksanakan penilaian kompetensi ASN	4)Sudah terdapat UPT Penilaian Kompetensi yang dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri
	5)Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi	5)Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya	5)Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN
	6)Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	6)Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN	6)Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN
	7)Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	7)Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	7)Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD
	8)Kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten belum sesuai dengan kebutuhan	8)Adanya kebijakan yang dinamis	8)Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bapperida, BPKPAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2025

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi BKPSDM Kabupaten Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.**Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

3.**Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4.**Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1.Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.

2.Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3.Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

4.Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

6.Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7.Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

8.Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung visi **Handal** dan misi **Organisatoris** yaitu **meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa **meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel** dengan indikator tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Dalam meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel ditentukan sasaran daerah berupa **meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator sasaran **nilai SAKIP, maturitas SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik**. BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung sasaran daerah berupa **meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator kinerja **maturitas SPIP**.

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, BKPSDM Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu **terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN**, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator **nilai penerapan sistem merit** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**" dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 adalah **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"** maka tema, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**, Kebijakan pembangunan tersebut di prioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, Pengawasan kualitas udara dan air;
   b. Peningkatan pengelolaan sampah melalui implementasi metode 3R (reuse, reduce dan recycle), peningkatan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir, penguatan kelembagaan pengelola sampah, peningkatan sarana prasara pengelolaan sampah, serta penanganan limbah B3 (penyimpanan sementara);
   c. Pengawasan usaha/kegiatan lingkungan sesuai dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan;
   d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah;
   e. Peningkatan institusi/perkantoran/sekolah bebas sampah;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata, dengan fokus pada:
   a. Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan perda RTRW dan peningkatan informasi tata ruang dan pola ruang;
   b. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP);
   c. Pengurangan kesenjangan antar desa dan kecamatan;
   d. Peningkatan konektivitas pemeliharaan dan rehab melalui Pembangunan, jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata;
   e. Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;
   f. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai;
   g. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan;
   h. Peningkatan pelayanan dan penambahan pos pemadam kebakaran;
   i. Penyediaan Early Warning System (EWS);
   j. Pembentukan Desa tangguh Bencana (Destana);
   k. Peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter, dengan fokus pada:
a.Pencegahan radikalisme dan terorisme;
b.Mewujudkan kerukunan antar umat beragama;
c.Mewujudkan kondusivitas dan kestabilan politik di masyarakat;
d.Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia guna memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan narkoba;
e.Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
f.Implementasi kualitas perencanaan responsive gender, penyediaan data gender dan anak serta Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
g.Penguatan kelembagaan dan layanan UPTD PPPA dalam upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak;
h.Peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (ePemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca serta pengelolaan arsip;
i.Mendukung pembangunan kebudayaan;
j.Percepatan implementasi wajib belajar 13 tahun, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, penyediaan fasilitas pendidikan bagi siswa; peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi;
k.Peningkatan budaya literasi dan pendidikan budi pekerti;
l.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat melalui optimalisasi pencegahan dan penanggulanan kasus balita gizi buruk dan stunting, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan (SDK);
m.Pengendalian pembangunan kependudukan dan keluarga berencana melaui peningkatan kualitas dan menekan jumah penduduk serta Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR);
n.Peningkatan partisipasi dan kualitas serta daya saing pemuda dalam pembangunan dan olahraga;
o.Pengurangan jumlah pengangguran, melalui Peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kualitas BLK;
p.Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjaringan minat transmigrasi;
q.Mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui program jambanisasi, penanganan kawasan kumuh, penyediaan sumber air bersih dan sanitasi, penanganan RTLH;
r.Pengurangan beban hidup masyarakat melalui penanganan anak tidak sekolah, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, Optimalisasi layanan UHC, Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin, pemberian jaminan dan perlindungan sosial;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

s.Pembinaan kelembagaan masyarakat (posyandu, PKK, RT, RW, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa);

4.Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak, dengan fokus pada:

a.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Manajemen Risiko;

b.Peningkatan Pelayanan, pembinaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan SDM pelayanan Pajak & Retribusi;

c.Peningkatan kualitas data daerah;

d.Peningkatan publikasi data serta layanan masyarakat yang efektif dan efisien menuju desa mandiri.

e.Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

f.Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat;

g.Peningkatan pengambilan kebijakan berbasis bukti melalui kajian;

h.Peningkatan indeks kapabilitas inovasi melalui pendaftaran kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan daya saing daerah;

i.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berinovasi pada pengembangan potensi yang ada di lingkungannya;

j.Peningkatan kualitas pelayanan publik.

k.Peningkatan kapasitas perangkat desa;

5.Peningkatan produktivitas ekonomi, dengan fokus pada:

a.Pengembangan Pariwisata berbasis potensi lokal (Destinasi Wisata, Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif);

b.Membuat paket wisata, event-event wisata dan Ekonomi Kreatif serta digitaslisasi promosi;

c.Peningkatan Kapasitas SDM pelaku usaha wisata dan ekraf;

d.Mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya benda dan tak benda;

e.Fasilitasi publikasi Promosi wisata dan Event lainnya melalui media publikasi Pemkab. Pemalang (online dan off line);

f.Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan melalui Peningkatan kapasitas industri kecil, Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industry, dan Penguatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta peningkatan penggunaan produk dengan spesifikasi TKDN;

g.Peningkatan dan penguatan peran Koperasi dalam mendorong produktivitas pelaku usaha (IKM & UMKM);

h.Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan;

i.Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veterineer;

j.Peningkatan kapasitas SDM Pertanian (Penyuluh, petani, petugas informasi harga, juru sembeli, veteriner, penyelenggaraan sekolah lapang pertanian dan lain-lain);

k.Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah ingkungan) dan produksi perikanan budidaya;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

l.Peningkatan hasil usaha produk olahan perikanan;
m.Peningkatan peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor serta peningkatan perlindungan konsumen;
n.Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal;
o.Peningkatan fasilitasi digitalisasi pemasaran produk IKM dan UMKM secara online;
p.Pembinaan dan Pendampingan SDM Pelaku Usaha Pertaian;
q.Pembinaan dan pendampingan SDM pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil usaha perikanan;
r.Pengembangan potensi ekonomi melalui kerjasama desa baik kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga, peningkatan kawasan perdesaan dan Pengembangan Bumdes;
s.Pembinaan dan pendampingan SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
t.Pembinaan dan Pendampingan UMKM (Peningkatan Kapasitas, Akses Permodalan dan Pemasaran) serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga;

BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung prioritas pembangunan peningkatan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, yaitu dengan mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN sehingga ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah terbitnya peraturan baru terkait kepegawaian, diantaranya :

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang ke depan adalah:

1.Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi, kabupaten sehingga sinergitas dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2.Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait seperti perangkat daerah kabupaten, BKD Provinsi, BKN Kanreg I Yogyakarta, BKN Pusat Jakarta dan Kementerian sehingga memperlancar kegiatan kepegawaian;
3.Meningkatkan kompetensi SDM agar optimal dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan kegiatan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan mempunyai hubungan kerja dengan lembaga profesi ASN, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, BKD Provinsi Jawa Tengah, BKN Kanreg I Yogyakarta, BKN Pusat Jakarta dan Kementerian/Lembaga. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1.Kebijakan pengadaan pegawai ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
2.Data kinerja dan potensi pegawai belum tersedia untuk semua pegawai;
3.Masih rendahnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan;
4.Terbatasnya SDM dan sarpras untuk melaksanakan penilaian kompetensi ASN;
5.Masih ada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya;
6.Terdapat administrasi kepegawaian yang ditetapkan oleh Provinsi, Kementerian atau BKN;
7.Masih rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi;
8.Adanya kebijakan yang dinamis.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1.Adanya Aplikasi SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN dari BKN yang membantu penghitungan kebutuhan pegawai;
2.Adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN yang memfasilitasi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen talenta ASN (Aparatur Sipil Negara);
3.Adanya program beasiswa/tugas belajar dari Pemkab/ Kementerian/Lembaga;
4.Sudah terdapat UPT Penilaian Kompetensi yang dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri;
5.Adanya aplikasi e-kinerja BKN yang memudahkan monitoring kinerja ASN;
6.Adanya aplikasi yang melayani administrasi kepegawaian secara online dari Provinsi, Kementerian atau BKN;
7.Adanya kegiatan pengembangan kompetensi internal yang diadakan OPD;
8.Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bapperida, BPKPAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi)

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang, telaah visi, misi dan program unggulan Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang, yaitu pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.9
Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	1.Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1.Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun	1.Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK
			2.Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan *real time* sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi
			3.Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir
			4.Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal
		2.Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain	1.Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya
			2.Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif
			3.Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar
			4.Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		3.Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi	1.Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan
			2.Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi
			3.Penyusunan *Talent Pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja
			4.Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang kan pola karir instansi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			5.Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai
			6.Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN
			7.Peningkatan kompetensi melalui *coaching*, mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai
			8.Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal
		4.Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan objektif lainnya	1.Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN
			2.Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi
		5.Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya	1.Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis
			2.Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif
			3.Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
			4.Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi
			5.Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
		6.Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN	1.Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya
			2.Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi
			3.Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			4.Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan *data base* kepegawaian lainnya
		7.Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1.Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
			2.Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian
		8.Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian	1.Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
			2.Penerapan *e-performance*/e-kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online*
			3.Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
			4.Pembangunan dan penggunaan *asessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
	2.Meningkatnya profesionalitas ASN	1.Pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1.Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS
			2.Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan
	3.Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP	1.Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		2.Perbaikan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat	1.Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2025

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**13.458.659.450**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**10.215.832.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**13.458.659.450**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**10.215.832.000**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**10.859.715.750**	**KEPEGAWAIAN**				**9.740.832.000**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.551.730.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8.492.832.000**	
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**100 Persen**		**Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**100 Persen**	**7.417.784.000**	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	**100 Persen**				**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100 Persen**	**1.075.048.000**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**12 Dokumen**	**36.071.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**40 Dokumen**	**40.485.000**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	4.289.700	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.636.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.925.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.898.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	8.295.000	
5.03.01.2.01.0007						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	10.000.000	
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.908.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.900.300	
5.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	6.204.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun**	**2 Dokumen**	**6.938.675.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**2 Laporan**	**7.377.299.000**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46/12 Orang/bulan	6.935.011.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7.374.784.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.664.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2.515.000	
5.03.01.2.03						**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**3 Dokumen**	**4.000.000**	
5.03.01.2.03.0001						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
5.03.01.2.03.0006						Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah administrasi kepegawaian yang tersedia**	**1 Dokumen**	**103.134.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**2 Laporan**	**37.000.000**	
5.03.01.2.05.0002						Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**60 paket**	12.000.000	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	103.134.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	25.000.000	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah administrasi umum yang tersedia**	**36 Paket**	**551.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**9 Kegiatan**	**370.568.000**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
5.03.01.2.06.0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	165.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	129.563.000	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.000.000	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.005.000	
5.03.01.2.06.0010						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
5.03.01.2.06.0011						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.000.000	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah barang milik daerah yang dibeli**	**18 Unit**	**146.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**5 Unit**	**100.014.000**	
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	79.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	39.514.000	
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	47.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jasa penunjang yang tersedia**	**36 Paket**	**331.350.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Layanan**	**310.056.000**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.350.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.960.000	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126.096.000	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**164 Unit**	**445.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**62 Unit**	**253.410.000**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	123.410.000	
5.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Pemalang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Pemalang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	105.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**2.307.985.750**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**1.248.000.000**	
	Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan		**Persentase terpenuhinya ASN**	**74.43**		**Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan**		**Persentase terpenuhinya ASN**	**74,43**	**355.000.000**	
	Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi		**Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi**	**99.31**		**Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi**		**Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi**	**99,31**	**220.000.000**	
	Terpetakannya kompetensi ASN		**Terpetakannya kompetensi ASN**	**19.19**		**Terpetakannya kompetensi ASN**		**Terpetakannya kompetensi ASN**	**21,16**	**175.950.000**	
	Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan		**Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi**	**21.16**		**Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan**		**Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi**	**19,19**	**85.800.000**	
	Meningkatnya kualitas Kinerja ASN		**Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"**	**94.85**		**Meningkatnya kualitas Kinerja ASN**		**Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"**	**94,85**	**207.800.000**	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien**	**90.15**		**Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian**		**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien**	**90,15**	**203.450.000**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**840.084.200**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**503.450.000**	
			Persentase layanan administrasi kepegawaian yang menggunakan sistem informasi	**64 Persen**				**Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN**	**3 Laporan**	**355.000.000**	
			Persentase layanan administrasi pemberhentian tepat waktu	**100 persen**				**Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN**	**5980 Data**	**98.450.000**	
			Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	**100 persen**				**Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu**	**500 Dokumen**	**50.000.000**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	50.250.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	212.597.200	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	315.000.000	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	545 Dokumen	184.547.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 Dokumen	50.000.000	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	10.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	0	-	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	185.740.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75.000.000	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	196.950.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	23.450.000	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**				**592.240.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**				**270.000.000**	
			Persentase ketersediaan talent pool untuk semua rumpun jabatan	**14 Persen**				**Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN**	**180**	**220.000.000**	
			Persentase layanan administrasi kenaikan pangkat	**100 persen**				**Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu**	**1000**	**50.000.000**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	125 Dokumen	189.230.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	120	90.000.000	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	280.975.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	50.000.000	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	50 Dokumen	122.035.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	60	130.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**				**329.266.850**	**Pengembangan Kompetensi ASN**				**261.750.000**	
			Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	**84,50 Persen**	**329.266.850**			**Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	**1094 Orang**	**60.000.000**	
								Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**80 Orang**	**115.950.000**	
								Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	**1292 Orang**	**85.800.000**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	120 Dokumen	132.971.850	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	120	85.800.000	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	46.697.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	60.000.000	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	80 Orang	84.608.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	80	75.000.000	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40 Orang	64.990.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Pemalang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	5	40.950.000	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**546.394.700**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**212.800.000**	
			Persentase tingkat kedisiplinan ASN	**100 persen**				**Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN**	**10.720 Orang**	**70.000.000**	
			Persentase layanan administrasi izin perceraian	**100 persen**				**Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa**	**13 Orang**	**57.800.000**	
			Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	**100 persen**				**Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin**	**12 Orang**	**80.000.000**	
			Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	**100 persen**				**Jumlah izin perceraian yang terbit**	**23 Dokumen**	**5.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	94.617.600	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	70.000.000	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	210.215.100	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3	47.800.000	
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	10 Orang	43.798.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	10	10.000.000	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang	85.123.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120	50.000.000	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	85.623.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	30.000.000	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	27.018.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	23	5.000.000	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2.598.943.700**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**475.000.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**2.598.943.700**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**475.000.000**	
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan		**Nilai IP ASN dimensi kompetensi**	**27.6**	**2.598.943.700**	**Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan**		**Nilai IP ASN dimensi kompetensi**	**27,6**	**475.000.000**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**					**Pengembangan Kompetensi Teknis**				**155.000.000**	
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	**0,23 Persen**	**175.552.500**			**Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan**	**13 Orang**	**155.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan		51.990.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	1 dokumen	30.000.000	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	25 Orang	123.562.500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Pemalang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	13 Orang	125.000.000	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**					**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				**320.000.000**	
			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	**6,87 Persen**	**2.423.391.200**			**Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional**	**19 Orang**	**320.000.000**	
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	4 Dokumen	47.386.000	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen	45.000.000	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	53 Laporan	2.330.737.200	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	19 Laporan	250.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rekening	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	45.268.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	25.000.000	

Sumber : RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5.Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.11
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2025

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diupayakan pencapaiannya melalui Misi Asta Cita, meliputi :

1. Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Asta Cita 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan terutama pada sasaran utama “terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif melayani” melalui upaya mewujudkan meritokrasi dalam manajemen ASN.

Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**", dengan prioritas pembangunan 2026 pada:

1. Ketahanan Pangan:
   Peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan infrastruktur seperti jaringan irigasi dan bendungan, serta optimasi lahan.
2. Ketahanan Energi:
   Penguatan ketahanan energi nasional.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG):
   Program prioritas unggulan dengan target menjangkau jutaan siswa, ibu hamil, dan balita untuk meningkatkan gizi dan mengurangi stunting. Program ini juga bertujuan memberdayakan UMKM lokal.
4. Pendidikan Bermutu:
   Peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan.
5. Kesehatan Berkualitas:
   Peningkatan kualitas kesehatan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit di daerah.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM:
   Penguatan koperasi melalui program "Koperasi Merah Putih" dan pemberdayaan UMKM.
7. Pertahanan Semesta:
   Penguatan sistem pertahanan negara melalui modernisasi alutsista dan pengembangan industri dalam negeri.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global:
   Peningkatan investasi dan perdagangan internasional sebagai katalis pertumbuhan ekonomi

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **”Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan”** dengan prioritas sebagai berikut:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata.
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2026 Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung prioritas ke-4 yaitu peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak terutama pada pencapaian peningkatan profesionalitas ASN.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang

BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDM Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan SDM ASN.

A. Tujuan

Tujuan BKPSDM Kabupaten Pemalang yang akan dicapai di tahun 2026, yaitu **terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN**, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator **nilai penerapan sistem merit** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Meningkatnya kualitas manajemen ASN”** yang diukur dengan indikator **Indeks NSPK Manajemen ASN** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) adalah panduan atau aturan yang mengarahkan implementasi sistem merit dalam manajemen ASN untuk mencapai ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
2. “**Meningkatnya profesionalitas ASN**” yang diukur dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Peningkatan profesionalitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan meritokrasi yang kuat karena akan meningkatkan efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN.
3. “Meningkatnya **kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**” yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan dan indikator **Nilai SAKIP OPD** yang merupakan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang. Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang dalam hal ini adalah layanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta	Perbaikan manajemen ASN melalui penyediaan *database* manajemen talenta	Optimalisasi ASN kompeten melalui pengembangan kompetensi ASN	Peningkatan kualitas penataan ASN melalui penerapan sistem manajemen talenta	Mewujudkan ASN Profesional yang didukung sistem informasi kepegawaian terintegrasi

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran yang akan dicapai di tahun 2026 adalah **Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan yang berkoordinasi dengan Bagian Organisasi;
2. Penyusunan regulasi mengenai manajemen talenta;
3. Pembangunan sistem informasi manajemen talenta yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara;
4. Penyediaan sarana prasarana *assessment center*;
5. Pemenuhan sumber daya manusia *assessment center;*
6. Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian;
7. Peningkatan kinerja dan disiplin ASN;
8. Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN		Nilai Penerapan Sistem Merit (Nilai)	Indeks	283,50
2		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN (Indeks)	%	88,92
3		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	%	78,32
4		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	%	85,18
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	%	72,41

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati. Pada tahun 2026, BKPSDM Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 3 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah BKPSDM Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp10.215.832.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BKPSDM KABUPATEN PEMALANG									
	Tujuan : **Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN**	**Nilai penerapan sistem merit**	**Nilai**		**283,5**	**10.215.832.000**			**294**	**14.734.881.409**
5.03	**BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN**					**9.740.832.000**				**14.634.881.409**
	Sasaran 1 : **Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**		**85,18**	**1.075.048.000**			**85,38**	**1.938.000.000**
		Nilai SAKIP OPD	**Nilai**		**72,41**	**7.417.784.000**			**73,41**	**7.420.783.699**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**					**8.492.832.000**				**9.358.783.699**
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	**Persen**		**100**	**7.417.784.000**			**100**	**7.420.783.699**
		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	**Persen**		**100**	**1.075.048.000**			**100**	**1.938.000.000**
5.03.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**Dokumen**		**40**	**40.485.000**			**40**	**43.249.699**
5.03.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Pemalang	2	4.289.700	DAU		2	4.500.000
5.03.01.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	2	6.000.000	DAU		2	6.000.000
5.03.01.2.01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	2	6.000.000	DAU		2	6.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	Kab. Pemalang	19	8.295.000	DAU		19	9.000.000
5.03.01.2.01.0007	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kab. Pemalang	14	10.000.000	DAU		14	11.749.699
5.03.01.2.01.0010	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara	Kab. Pemalang	1	5.900.300	DAU		1	6.000.000
5.03.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**Laporan**		**2**	**7.377.299.000**			**2**	**7.377.534.000**
5.03.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kab. Pemalang	12	7.374.784.000	DAU		12	7.374.784.000
5.03.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kab. Pemalang	2	2.515.000	DAU		2	2.750.000
5.03.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**Dokumen**		**3**	**4.000.000**			**3**	**4.000.000**
5.03.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	1	2.000.000	DAU		1	2.000.000
5.03.01.2.03.0006	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kab. Pemalang	2	2.000.000	DAU		2	2.000.000
5.03.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Kegiatan**		**2**	**37.000.000**			**2**	**37.000.000**
5.03.01.2.05.0002	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kab. Pemalang	60	12.000.000	DAU		60	12.000.000
5.03.01.2.05.0010	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kab. Pemalang	60	25.000.000	DAU		60	25.000.000
5.03.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**Kegiatan**		**9**	**370.568.000**			**9**	**340.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	4	10.000.000	DAU		4	10.000.000
5.03.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	4	30.000.000	DAU		4	30.000.000
5.03.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	12	129.563.000	DAU		12	100.000.000
5.03.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Pemalang	2	20.000.000	DAU		2	20.000.000
5.03.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Pemalang	12	20.000.000	DAU		12	20.000.000
5.03.01.2.06.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kab. Pemalang	4	5.000.000	DAU		4	5.000.000
5.03.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Pemalang	12	151.005.000	DAU		12	150.000.000
5.03.01.2.06.0010	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	2	3.000.000	DAU		2	3.000.000
5.03.01.2.06.0011	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Kab. Pemalang	12	2.000.000	DAU		12	2.000.000
5.03.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Unit**		**5**	**100.014.000**			**4**	**70.000.000**
5.03.01.2.07.0001	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Kab. Pemalang	1	39.514.000	DAU		0	-
5.03.01.2.07.0005	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kab. Pemalang	2	20.000.000	DAU		2	20.000.000
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kab. Pemalang	2	40.500.000	DAU		2	50.000.000
5.03.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Layanan**	**Kab. Pemalang**	**3**	**310.056.000**	**DAU**		**3**	**322.000.000**
5.03.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Pemalang	12	2.000.000	DAU		12	2.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Pemalang	12	181.960.000	DAU		12	190.000.000
5.03.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Pemalang	12	126.096.000	DAU		12	130.000.000
5.03.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**Unit**		**62**	**253.410.000**			**59**	**1.165.000.000**
5.03.01.2.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kab. Pemalang	36	123.410.000	DAU		37	95.000.000
5.03.01.2.09.0005	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kab. Pemalang	10	30.000.000	DAU		10	30.000.000
5.03.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab. Pemalang	15	50.000.000	DAU		10	40.000.000
5.03.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Kab. Pemalang	1	50.000.000	DAU		2	1.000.000.000
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas manajemen ASN	**Indeks NSPK Manajemen ASN**	**Indeks**		**88,92**	**1.248.000.000**			**89,17**	**5.276.097.710**
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					**1.248.000.000**				**5.276.097.710**
		Persentase terpenuhinya ASN	**Persen**		**74,43**	**355.000.000**			**77,39**	**1.501.400.000**
		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	**Persen**		**99,31**	**220.000.000**			**99,58**	**930.100.000**
		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	**Nilai**		**21,16**	**175.950.000**			**21,18**	**743.800.000**
		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	**Persen**		**19,19**	**85.800.000**			**20,69**	**362.497.710**
		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	**Persen**		**94,85**	**207.800.000**			**94,87**	**878.400.000**
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	**Persen**		**90,15**	**203.450.000**			**90,65**	**859.900.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.01	**Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**									
		Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	**Laporan**		**3**	**355.000.000**			**4**	**1.501.400.000**
		Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN	**Data**		**5980**	**98.450.000**			**5930**	**449.900.000**
		Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu	**Dokumen**		**500**	**50.000.000**			**500**	**180.000.000**
5.03.02.2.01.0002	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Kab. Pemalang	2	40.000.000	DAU		2	501.400.000
5.03.02.2.01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Kab. Pemalang	1	315.000.000	DAU		2	1.000.000.000
5.03.02.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Kab. Pemalang	500	50.000.000	DAU		500	150.000.000
5.03.02.2.01.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Kab. Pemalang	0	-	DAU		1	30.000.000
5.03.02.2.01.0010	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Kab. Pemalang	1	75.000.000	DAU		1	249.900.000
5.03.02.2.01.0011	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Kab. Pemalang	2	23.450.000	DAU		2	200.000.000
5.03.02.2.02	**Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**									
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	**Dokumen**		**180**	**220.000.000**			**180**	**930.100.000**
		Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu	**Dokumen**		**1000**	**50.000.000**			**1000**	**200.000.000**
5.03.02.2.02.0001	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Kab. Pemalang	120	90.000.000	DAU		120	230.100.000
5.03.02.2.02.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	Kab. Pemalang	1000	50.000.000	DAU		1000	200.000.000
5.03.02.2.02.0003	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Kab. Pemalang	60	130.000.000	DAU		60	700.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.03	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**									
		Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Orang**		**1094**	**60.000.000**			**1104**	**200.000.000**
		Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Orang**		**80**	**115.950.000**			**85**	**543.800.000**
		Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	**Orang**		**1292**	**85.800.000**			**1412**	**362.497.710**
5.03.02.2.03.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Kab. Pemalang	120	85.800.000	DAU		120	362.497.710
5.03.02.2.03.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Kab. Pemalang	100	60.000.000	DAU		100	200.000.000
5.03.02.2.03.0013	Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	Kab. Pemalang	80	75.000.000	DAU		80	300.000.000
5.03.02.2.03.0014	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Kab. Pemalang	5	40.950.000	DAU		5	243.800.000
5.03.02.2.04	**Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**									
		Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN	**Orang**		**10720**	**70.000.000**			**10730**	**250.000.000**
		Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	**Orang**		**13**	**57.800.000**			**13**	**300.000.000**
		Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin	**Orang**		**12**	**80.000.000**			**12**	**328.400.000**
		Jumlah izin perceraian yang terbit	**Dokumen**		**23**	**5.000.000**			**23**	**30.000.000**
5.03.02.2.04.0002	Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Kab. Pemalang	4	70.000.000	DAU		4	250.000.000
5.03.02.2.04.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	Kab. Pemalang	3	47.800.000	DAU		3	250.000.000
5.03.02.2.04.0005	Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	Kab. Pemalang	10	10.000.000	DAU		10	50.000.000
5.03.02.2.04.0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Kab. Pemalang	120	50.000.000	DAU		120	228.400.000
5.03.02.2.04.0008	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Kab. Pemalang	12	30.000.000	DAU		12	100.000.000
5.03.02.2.04.0009	Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Kab. Pemalang	23	5.000.000	DAU		23	30.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas ASN	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks**		**78,32**	**475.000.000**			**78,34**	**100.000.000**
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**475.000.000**				**100.000.000**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai IP ASN dimensi kompetensi**	**Nilai**		**27,6**	**475.000.000**			**27,8**	**100.000.000**
5.04.02.2.01	**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultura**	**Orang**		**13**	**155.000.000**			**2**	**25.000.000**
5.04.02.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	Kab. Pemalang	1	30.000.000	DAU		1	10.000.000
5.04.02.2.01.0003	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	Kab. Pemalang	13	125.000.000	DAU		2	15.000.000
5.04.02.2.02	**Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional**	**Orang**		**19**	**320.000.000**			**2**	**75.000.000**
5.04.02.2.02.0005	Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	Kab. Pemalang	2	45.000.000	DAU		2	10.000.000
5.04.02.2.02.0007	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	Kab. Pemalang	19	250.000.000	DAU		2	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.04.02.2.02.0008	Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	Kab. Pemalang	1	25.000.000	DAU		1	15.000.000

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.4. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Kemudian untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan, sasaran dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dituangkan dalam tabel berikut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.4
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis dan Operasional
BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
I	**Risiko Strategis Perangkat Daerah**						
1	Adanya unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	8	Pengisian jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan PPK	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kepala BKPSDM	setiap ada pengisian jabatan
2	Aspek pemenuhan NSPK tidak dapat dinilai	8	Penilaian NSPK berdasar data real time tahun yang dinilai	Target kinerja indeks NSPK manajemen ASN tidak tercapai	Leadership yang kuat dalam memberikan penekanan dan penguatan pada seluruh pengampu kegiatan untuk mengoptimalkan implementasi NSPK	Kepala BKPSDM	31 Desember setiap tahun berjalan
3	Penilaian kinerja tidak obyektif	12	Ketidaktegasan pimpinan untuk menilai secara objektif	Demotivasi pegawai	- Penandatanganan Pakta Integritas	Kepala BKPSDM	TW I Tahun 2026
					- Penyusunan rancangan kebijakan terkait pengelolaan kinerja	Kepala BKPSDM	TW II Tahun 2026
II	**Risiko Operasional Perangkat Daerah**						
1	Mark Up anggaran penyediaan komponen listrik	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
2	Mark Up anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
3	Mark Up anggaran oenyediaan bahan logistik kantor	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
4	Mark Up anggaran penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
5	Mark Up anggaran penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
6	Mark Up anggaran pengadaan kendaraan dinas	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Mark Up anggaran pengadaan mebel	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
8	Mark Up anggaran pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4	Kurangnya integritas	Kerugian Daerah	Pengadaan melalui e-purchasing	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada pengadaan
9	Intervensi kepentingan non-teknis	8	Tekanan politik/birokrasi dalam menentukan formasi	Formasi tidak objektif, tidak sesuai kebutuhan organisasi, menurunkan kredibilitas instansi	Digitalisasi proses (paperless, jejak audit elektronik) untuk menutup celah intervensi manual.	Kabid PPIK	Setiap ada pengadaan CASN
10	Gangguan teknis sistem (server down, error, atau lambat)	8	Infrastruktur TI terbatas, kurang pemeliharaan sistem, beban akses tinggi	Akses informasi terganggu, pelayanan administrasi ASN terhambat	Melakukan pelatihan teknis dan simulasi insiden untuk tim IT secara rutin denga melibatkan Diksominfo	Kabid PPIK	Jika ada pelatihan dari Diskominfo
11	Keamanan data kepegawaian terancam (kebocoran/hack)	8	Sistem keamanan lemah, password sharing, tidak ada proteksi berlapis	Data pribadi ASN bocor, menurunkan kepercayaan, berpotensi masalah hukum	Akan dilakukan monitoring secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan hak akses pada aplikasi	Kabid PPIK	Setiap Semester
12	Adanya intervensi dari pihak lain dalam proses mutasi	12	Benturan Kepentingan dari luar	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kabid MP	Setiap ada mutasi / rotasi PNS
13	Adanya intervensi dari pihak lain dalam proses promosi	8	Benturan Kepentingan dari luar	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kabid MP	Setiap ada promosi PNS
14	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya terbatas	8	Jumlah asesor yang tidak memadai	Data kompetensi ASN tidak tersedia lengkap	- Melakukan coaching clinic internal untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaksana penkom - Melakukan uji coba aplikasi penilaian kompetensi	Ka UPT	Tahun 2026
15	Pengangkatan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	9	Adanya regulasi baru tentang Jabatan Fungsional	Karir Pejabat Fungsional tidak dapat berkembang, karena tidak bisa naik jenjang JF	- Memfasilitasi pengusulan formasi kebutuhan JF ke instansi Pembina - Menerima konsultasi permasalahan JF - Memberikan informasi terkait uji kompetensi JF	Kabid PSDM	Tahun 2026
16	Pelaporan kinerja tidak tepat waktu	8	Pegawai ASN melakukan pelaporan kinerja di akhir periode penilaian	Pemotongan TPP	- Sosialisasi kinerja	Kabid PEKA	Triwulan I, II, III, IV 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
17	Intervensi dari pimpinan terhadap pengusulan pegawai ASN Berprestasi	8	Pengusulan pegawai ASN berprestasi oleh unit kerja karena faktor kedekatan dengan pimpinan	Penetapan pegawai ASN Berprestasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan	- Penyusunan SOP - Sosialisasi tata cara pengusulan ASN Berprestasi	Kabid PEKA	Triwulan II 2026
18	Pembiaran dan pengabaian pelanggaran disiplin	12	Kurangnya pemahaman tentang displin ASN, kurangnya kesadaran dan tanggungjawab pelaksanaan ketentuan disiplin ASN	Tidak ada efek jera terhadap pelaku pelanggaran disiplin ASN	- Sosialisasi terkait regulasi Disiplin ASN - Pemberian sanksi yang tegas terhadap atasan langsung yang tidak melakukan penegakkan disiplin ASN	Kabid PEKA	Tahun 2026
19	Gugatan atas terbitnya penjatuhan hukuman disiplin	8	Ketidakpuasan atas hukuman disiplin, adanya ketentuan upaya hukum terhadap penjatuhan hukuman disiplin,	Keputusan hukuman disiplin bisa dianulir	- Pencarian informasi yang komprehensif terhadap obyek dan dokumen pemeriksaan sebelum dilakukan penjatuhan hukuman disiplin - Permohonan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin melalui i-mut	Kabid PEKA	Kasuistis
20	Tidak semua pegawai masuk dalam dokumen HCDP	8	Tidak ada usulan dari Perangkat Daerah	Tingginya GAP Kompetensi	membuat dasboard monitoring pengembangan SDM	Kabid PSDM	Triwulan I 2026
21	Minimnya minat diklat pegawai di lingkungan kabupaten pemalang	12	Kurangnya motivasi ASN terhadap peningkatan kapasitas diri	Target pengembangan kompetensi ASN tidak tercapai	melakukan sosialisasi pentingnya pengembangan kompetensi bagi ASN melalui surat edaran, forum internal, dan media komunikasi OPD.	Kabid PSDM	Semester 1 2026
22	Tidak terselenggaranya diklat di lingkungan kabupaten pemalang	8	Tidak adanya perencanaan kegiatan diklat dalam RKPD atau Rencana Pengembangan Kompetensi ASN	ASN tidak memperoleh peningkatan kompetensi sesuai tuntutan jabatan	Menyusun jadwal koordinasi rutin dengan lembaga penyelenggara diklat (LAN, BPSDM, atau lembaga pelatihan lainnya).	Kabid PSDM	Triwulan

Sumber : Manajemen Risiko Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi sebesar 100 persen dan persentase layanan umum dan pepegawaian yang terpenuhi sebesar 100 persen, program ini dilakukan melalui kegiatan :
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi sebanyak 40 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
      c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen
      d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 19 laporan
      e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 14 laporan
      f. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan sebanyak 1 berita acara
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah laporan/dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi sebanyak 2 laporan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 47 orang selama 12 bulan
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi sebanyak 3 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
      a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen
      b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 kegiatan
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi sebanyak 2 kegiatan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
      a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 60 paket

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan peserta 60 orang

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian jumlah fasilitasi administratif Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 paket
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 4 paket
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 paket
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 2 paket
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 dokumen
   f. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 4 kegiatan
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan
   h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 2 dokumen
   i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 12 dokumen
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target capaian jumlah barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sebanyak 5 unit, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit
   b. Pengadaan Mebel sebanyak 2 unit
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 2 unit
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian jumlah ketersediaan layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 3 layanan, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 12 bulan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian jumlah barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sebanyak 62 unit, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 36 unit
   b. Pemeliharaan Mebel sebanyak 10 unit
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 15 unit
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit

B. Program Kepegawaian Daerah dengan target capaian persentase terpenuhinya ASN sebesar 74,43 persen; persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi sebesar 99,31 persen; nilai IP ASN dimensi kualifikasi sebesar 21,16; persentase ASN yang terpetakan kompetensinya sebesar 19,19 persen; persentase ASN dengan SKP bernilai "Baik" sebesar 94,85 persen; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

persentase layanan administrasi kepegawaian yang efisien sebesar 90,15 persen. Program ini dilakukan melalui kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target capaian jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN sebanyak 3 laporan, jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN sebanyak 5980 data dan jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu sebanyak 500 dokumen. Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sebanyak 2 dokumen
   b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 1 kegiatan
   c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 500 dokumen
   d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 1 kegiatan
   e. Pengelolaan Data Kepegawaian sebanyak 2 kegiatan
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target capaian jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN sebanyak 180 dokumen dan jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu sebanyak 1000 dokumen. Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Pengelolaan Mutasi ASN sebanyak 120 dokumen
   b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 1000 dokumen
   c. Pengelolaan Promosi ASN sebanyak 60 dokumen
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan target capaian jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi ke atas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.094 orang, jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 80 orang dan jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya sebanyak 1.292 orang. Kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Pengelolaan Assessment Center sebanyak 120 dokumen
   b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebanyak 100 orang
   c. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN sebanyak 80 orang
   d. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sebanyak 5 orang
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target capaian jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN sebanyak 10.720 orang, jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa sebanyak 13 orang, jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin sebanyak 12 orang dan jumlah izin perceraian yang terbit sebanyak 23 dokumen, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 4 kegiatan
   b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai sebanyak 3 orang
   c. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai sebanyak 10 orang
   d. Pembinaan Disiplin ASN sebanyak 120 orang
   e. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 12 orang
   f. Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai sebanyak 23 orang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target capaian Nilai IP ASN dimensi kompetensi sebesar 27,6. Program ini dilakukan melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan target capaian jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural sebanyak 13 orang, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebanyak 1 dokumen.
   b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum untuk 13 orang.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan target capaian jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional sebanyak 19 orang, kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan :
   a. Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga sebanyak 2 kegiatan.
   b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan untuk 19 orang.
   c. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan sebanyak 1 kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BKPSDM KABUPATEN PEMALANG									
	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN			**Nilai Penerapan Sistem Merit**	**Nilai**	**283,5**	**10.215.832.000**	**294**	**14.734.881.409**	
5.03	**BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN**									
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**85,18**	**1.075.048.000**	**85,38**	**1.938.000.000**	
				Nilai SAKIP OPD	**Nilai**	**72,41**	**7.417.784.000**	**73,41**	**7.420.783.699**	
5.03.01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**Persen**	**100**	**7.417.784.000**	**100**	**7.420.783.699**	
				Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	**Persen**	**100**	**1.075.048.000**	**100**	**1.938.000.000**	
5.03.01.2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**Dokumen**	**40**	**40.485.000**	**40**	**43.249.699**	
5.03.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.289.700	2	4.500.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	6.000.000	2	6.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	6.000.000	2	6.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	19	8.295.000	19	9.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14	10.000.000	14	11.749.699	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.01.0010			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara	1	5.900.300	1	6.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**Laporan**	**2**	**7.377.299.000**	**2**	**7.377.534.000**	
5.03.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.515.000	2	2.750.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.03			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi**	**Dokumen**	**3**	**4.000.000**	**3**	**4.000.000**	
5.03.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2.000.000	2	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi**	**Kegiatan**	**2**	**37.000.000**	**2**	**37.000.000**	
5.03.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	12.000.000	60	12.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	25.000.000	60	25.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**Kegiatan**	**9**	**370.568.000**	**9**	**340.000.000**	
5.03.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.000.000	4	10.000.000	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	129.563.000	12	100.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000	4	5.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	151.005.000	12	150.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	3.000.000	2	3.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.07			**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Unit**	**5**	**100.014.000**	**4**	**70.000.000**	
5.03.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	39.514.000	0	-	Kab. Pemalang
5.03.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40.500.000	2	50.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Layanan**	**3**	**310.056.000**	**3**	**322.000.000**	
5.03.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	181.960.000	12	190.000.000	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	126.096.000	12	130.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**Unit**	**62**	**253.410.000**	**59**	**1.165.000.000**	
5.03.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	123.410.000	37	95.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09.0005			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	30.000.000	10	30.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	50.000.000	10	40.000.000	Kab. Pemalang
5.03.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50.000.000	2	1.000.000.000	Kab. Pemalang
		Meningkatkan kualitas manajemen ASN		**Indeks NSPK Manajemen ASN**	**Indeks**	**88,92**	**1.248.000.000**	**89,17**	**5.276.097.710**	
5.03.02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**1.248.000.000**		**5.276.097.710**	
				Persentase terpenuhinya ASN	**Persen**	**74,43**	**355.000.000**	**77,39**	**1.501.400.000**	
				Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	**Persen**	**99,31**	**220.000.000**	**99,58**	**930.100.000**	
				Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	**Nilai**	**21,16**	**175.950.000**	**21,18**	**743.800.000**	
				Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	**Persen**	**19,19**	**85.800.000**	**20,69**	**362.497.710**	
				Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	**Persen**	**94,85**	**207.800.000**	**94,87**	**878.400.000**	
				Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	**Persen**	**90,15**	**203.450.000**	**90,65**	**859.900.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.01			**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**							
				Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	**Laporan**	**3**	**355.000.000**	**4**	**1.501.400.000**	
				Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN	**Data**	**5980**	**98.450.000**	**5930**	**449.900.000**	
				Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu	**Dokumen**	**500**	**50.000.000**	**500**	**180.000.000**	
5.03.02.2.01.0002			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	40.000.000	2	501.400.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0003			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	315.000.000	2	1.000.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0006			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	500	50.000.000	500	150.000.000	
5.03.02.2.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	-	1	30.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	75.000.000	1	249.900.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	23.450.000	2	200.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.02			**Mutasi dan Promosi ASN**							
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	**Dokumen**	**180**	**220.000.000**	**180**	**930.100.000**	
				Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu	**Dokumen**	**1000**	**50.000.000**	**1000**	**200.000.000**	
5.03.02.2.02.0001			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	120	90.000.000	120	230.100.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.02.0002			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1000	50.000.000	1000	200.000.000	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.02.0003			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	60	130.000.000	60	700.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03			**Pengembangan Kompetensi ASN**							
				Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Orang**	**1094**	**60.000.000**	**1104**	**200.000.000**	
				Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**Orang**	**80**	**115.950.000**	**85**	**543.800.000**	
				Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	**Orang**	**1292**	**85.800.000**	**1412**	**362.497.710**	
5.03.02.2.03.0002			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	120	85.800.000	120	362.497.710	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03.0004			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	100	60.000.000	100	200.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03.0013			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	80	75.000.000	80	300.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	5	40.950.000	5	243.800.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04			**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**							
				Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN	**Orang**	**10720**	**70.000.000**	**10730**	**250.000.000**	
				Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	**Orang**	**13**	**57.800.000**	**13**	**300.000.000**	
				Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin	**Orang**	**12**	**80.000.000**	**12**	**328.400.000**	
				Jumlah izin perceraian yang terbit	**Dokumen**	**23**	**5.000.000**	**23**	**30.000.000**	
5.03.02.2.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	70.000.000	4	250.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0004			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	3	47.800.000	3	250.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0005			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	10	10.000.000	10	50.000.000	Kab. Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.03.02.2.04.0007			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	120	50.000.000	120	228.400.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	30.000.000	12	100.000.000	Kab. Pemalang
5.03.02.2.04.0009			Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	23	5.000.000	23	30.000.000	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN		**Indeks Profesionalitas ASN**	**Indeks**	**78,32**	**475.000.000**	**78,34**	**100.000.000**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
5.04.02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai IP ASN dimensi kompetensi**	**Nilai**	**27,6**	**475.000.000**	**27,8**	**100.000.000**	
5.04.02.2.01			**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural**	**Orang**	**13**	**155.000.000**	**2**	**25.000.000**	
5.04.02.2.01.0001			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	30.000.000	1	10.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.01.0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	13	125.000.000	2	15.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.02			**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional**	**Orang**	**19**	**320.000.000**	**2**	**75.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 dan 2027				Lokasi
						Tahun 2026		Tahun 2027		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.04.02.2.02.0005			Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	2	45.000.000	2	10.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.02.0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	19	250.000.000	2	50.000.000	Kab. Pemalang
5.04.02.2.02.0008			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1	25.000.000	1	15.000.000	Kab. Pemalang

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Adapun kegiatan pengembangan SDM yang direncanakan pada tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Aksi Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2026		
				Target	Anggaran (Rp)	Peserta
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	60	25.000.000	ASN BKD Kabupaten Pemalang
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	Pengembangan Kompetensi Teknis					
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	13	125.000.000	ASN Kabupaten Pemalang
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	19	250.000.000	ASN Kabupaten Pemalang

Sumber : RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja tahun 2026 ini adalah :

1. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026.
2. Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang, UPT dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2026.

Pemalang, 15 Oktober 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang

EKO ADI SANTOSO, S.H.,M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id/

"Z. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG"

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana proses penyusunannya melalui mekanisme *bottom up* dan *top down*. Proses bottom up dilaksanakan melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan mekanisme top down dilaksanakan melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga Renja Perangkat Daerah mengedepankan kesepakatan bersama dari elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 di tingkat Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.3 Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pembangunan yang muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026, maka disusunlah Rencana Kerja BPBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

1.4 Proses dan Sistematika

Adapun Rencana Kerja BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Proses dan Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD KABUPATEN PEMALANG TRIWULAN III TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pemalang
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pemalang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN PEMALANG
- 3.1 Tujuan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang
- 3.2 Sasaran Rencana Stategis BPBD Kabupaten Pemalang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1 Review Rencana Kerja dan Kebutuhan Pendanaan Anggaran 2026

BAB V PENUTUP
- 5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Rencana Tindak Lanjut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD KABUPATEN PEMALANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2025 Triwulan III dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 BPBD melaksanakan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi 2 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 7.085.466.600,00 (*tujuh milyar delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah*) dan mengalami pergeseran efisiensi anggaran menjadi Rp. 6.820.965.600 (*enam milyar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) dan ada penambahan pada perubahan anggaran sebesar Rp. 755.136.540 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh*) atau menjadi Rp. 7.738.503.140 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Seratus Empat Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a) belanja operasi sebesar Rp. 7.738.503.140 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Seratus Empat Puluh Rupiah*) terdiri dari :
   - ✓ Belanja Pegawai sebesar Rp 4.227.837.000,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
   - ✓ Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.386.864.140,00 (*dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*).

b) belanja modal sebesar Rp. 3.510.666.140,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) terdiri dari :
   - ✓ Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 181.233.460,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Dengan demikian, rincian realisasi belanja APBD secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d Tahun 2025 Triwulan III

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan III (2025)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan III	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9			10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah									
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	3	6	2	100	6	2	39,11
	Indeks laporan sakip yang tersusun dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indeks pelaksanaan reformasi perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	2	1	1	100	1	3	50.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198	66	33	33	100	33	99	45,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	2	1	1	100	1	3	69,30
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12	4	2	2	100	2	6	28,70

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan III (2025)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan III	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9			10	11
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	10	8	8	100	1	11	91,67
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2	0	0	0	0	2	16.67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	7	5	5	100	3	10	83,33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	8	5	5	100	5	13	72.22
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	15	9	9	100	9	24	50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18	6	3	3	100	3	9	50.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	350	100	100	100	100	450	30.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	2	1	1	100	1	3	50.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	2	1	1	100	1	3	50.00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan III (2025)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan III	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9			10	11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100	1	3	50.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	132	51	29	29	100	29	80	60.60
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	8	4	4	100	4	12	50.00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	10	5	5	100	5	15	50.00
Program Penanggulangan Bencana									
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa tangguh bencana	25	14	3	0	0	3	17	68,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana per jenis bencana	600	250	150	0	0	150	300	50,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan dini bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	18	8	4	0	0	4	10	55,55

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan III (2025)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan III	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9			10	11
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	600	300	300	270	90	300	300	50,00
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	180	90	60	0	0	30	120	66.67
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	6	3	1	1	100	2	5	83.33
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	750	207	200	100	50	158	365	48.67
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan Binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	5	3	1	1	100	1	3	60,00
Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor berdasarkan R3P provinsi yang dilegalkan	8	6	2	0	0	2	6	60,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	-	-	-	145	140	135	140	115,1	145	105,76	140	
2.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-	-	-	0,7	0,75	0,8	0,83	0,76	0,78	0,8	0,83	
3.	Cakupan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	-	-	95	96	97	98	100	100	100	98	
4.	Cakupan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	-	-	95	95	95	95	100	100	100	95	
5.	Cakupan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	-	-	100	100	100	100	99,95	100	100	100	
6.	Presentase layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam	%	-	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, indikator kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah untuk menurunkan Indeks Resiko Bencana pada tahun 2025 ditargetkan indeks sebesar 140, meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,83 dan capaian Cakupan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana sebesar 98%, capaian Cakupan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 95%, dan capaian Cakupan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 100% serta Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebesar 9,91%.

Indikator kinerja beserta target dan capaian realisasinya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2. di atas.

Kemudian ada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga merupakan indikator tolak ukur terkait akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 64,69 sehingga mendapat penilaian dengan kategori B (Baik), dengan interpretasi sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Capaian pada tahun 2024 berhasil menaikannya menjadi nilai sebesar 4,68 dengan penilaian kategori B (Baik).

Nilai pada tahun 2024 tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,86
2.	Pengukuran Kinerja	30%	19,66
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,04
4.	Evaluasi Internal	25%	12,64
Jumlah		**100%**	**64,69%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, dibentuk BPBD dengan klasifikasi Tipe A dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi

   Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Fungsi
   a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
   b. Pelaksanaan kebijakan, di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
   d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel 2.3.1 dan 2.3.2.

Tabel 2.3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih belum optimalnya ketangguhan daerah dalam	Penanggulangan bencana belum terarah, terpadu, dan menyeluruh.	Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
			Belum optimalnya penanganan tanggap

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	penanggulangan bencana.		darurat bencana.
			Belum optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
			Jumlah desa tangguh bencana (destana) masih sedikit.
			Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia bidang Penanggulangan Bencana.

Tabel 2.3.2.

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas (RHAPSODI)				
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat	1. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana	1. Belum adanya sistem penanggulangan bencana yang terpadu	1. Pengembangan teknologi yang mendukung penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien
		2. Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	2. Koordinasi antar stakeholder belum berjalan secara intensif	2. Dukungan anggaran dalam kegiatan penanggulangan bencana baik dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten
		3. Belum optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3. Intensitas dan kemampuan koordinasi penanganan darurat bencana antar pelaku dilingkungan BPBD belum intensif	3. Adanya program CSR dari badan usaha untuk bidang kebencanaan
		4. Jumlah desa tangguh bencana	4. Jejaring penanggulangan bencana	4. Destana yang sudah terbentuk

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
		(destana) masih sedikit	dengan kabupaten/ kota, provinsi, dan pusat belum ada	menjadi pendorong bagi desa/wilayah yang lain
		5. Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia bidang Penanggulangan Bencana	5. Ketersediaan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana	5. Program assessment kompetensi dan sertifikasi bidang penanggulangan bencana dari BNPB

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas maka isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Pemalang menjadi daerah yang rawan bencana. Letusan gunung api, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun

Bencana alam yang terus terjadi di Kabupaten Pemalang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cidera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
3. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian
4. Munculnya berbagai penyakit
5. Korban jiwa, cidera, cacat
6. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Kabupaten Pemalang untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

Isu - isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pemalang, adalah sebagai berikut:

1. Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024 yaitu 105,76.
2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 yaitu 0,8 dimana sudah memenuhi target yang ditentukan pada tahun 2024, tingkat ketahanan daerah dilevel sedang.
3. Jumlah Desa Tangguh Bencana relatif masih sedikit, dari 222 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang baru terbentuk 24 desa tangguh bencana (Destana).
4. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih terbatas.
5. Belum optimalnya koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam segi kualitas dan kompetensi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

3.1 Tujuan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode tahun 2025 – 2029 yaitu "PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA". Dari visi tersebut diterjemahkan kedalam misi yaitu Resik - Hijau - Apik – Peduli – Silaturahmi – Organisatoris – Digitalisasi – Ikhlas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu tugas Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki keterkaitan dengan Misi Silaturahmi dan Ikhlas yaitu Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.

Berdasarkan Visi Misi dan fokus kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang masuk kedalam logframe pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 Pemalang Bersih dan Handal dengan tujuan yang pertama yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dan sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan fungsi utama BPBD yaitu meningkatkan ketahanan daerah.

Tabel 3.1

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pemalang
Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Indikator	Target Tahun					Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
Meningkatkan ketahanan daerah	Indek Risiko Bencana	105,46	104,16	104,16	102,89	102,89	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.2 Sasaran Rencana Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada tujuan diatas, maka sasaran pada Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2026 adalah meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2026 merujuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan ketahanan daerah		Indek Risiko Bencana	Indeks	105,46	104,16	104,16	102,89	102,89
	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indek Ketahanan Daerah	Indeks	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

4.1. Review Rencana Kerja dan Kebutuhan Pendanaan Anggaran Tahun 2026

Secara terperinci Review Rencana Kerja dan Kebutuhan Pendanaan Anggaran 2026 jika dibandingkan dengan hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1 Review Rencana Kerja dan Kebutuhan Pendanaan Anggaran 2026

No	Rancangan Anggaran RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran 2027					Catatan Pentisg
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**5.956.340.000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**7.919.736.600**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**5.291.33.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.391.915.680**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**8.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**51.460.300**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	46.955.580	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	4.504.720	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.497.340.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.251.541.880**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	4.486.340.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	4.227.837.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	16 dokumen	17.885.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen laporan	2.627.360	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Anggaran RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La poran Koordinasi Penyusunan L aporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	18 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La poran Koordinasi Penyusunan L aporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	4 dokumen laporan	3.191.920	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**101.601.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**252.690.500**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	23.336.824	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.001.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 paket	3.326.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket paket	60.295.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 jenis paket	18.936.331	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	2.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan kegiatan	143.676.345	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**644.390.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**673.463.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.104.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	50 laporan	1.135.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	89.930.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Anggaran RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis laporan	14.900.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	536.286.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 orang/ bulan	567.498.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**40.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**162.760.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	84.760.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	35.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	43.000.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				**665.009.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**2.527.820.920**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				**50.009.000**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				**698.458.410**	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	2 dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	2 dokumen	175.773.550	
	Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)		Jumlah oaring yang mendapatkan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	300 orang	50.009.000	Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per		Jumlah oaring yang mendapatkan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota	180 orang	522.684.860	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Anggaran RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya			jenis bencana)		(per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				**250.000.000**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**299.373.700**	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	5 kawasan	200.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 kawasan	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara keluarga maupun petugas	1 unit	35.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara keluarga maupun petugas	3 unit	79.778.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana per jenis ancaman Kabupaten/Kota	300 orang	15.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah gladi kesiapsiagaan bencana	300 orang	19.595.700	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				**245.000.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**1.097.205.700**	
	Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dievakuasi per jenis kejadian bencana	200 orang	50.000.000	Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dievakuasi per jenis kejadian bencana	450 orang	249.130.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur dalam Penanganan keadaan darurat kabupaten/kota		Jumlah apartur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan	80 orang	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur dalam Penanganan keadaan darurat kabupaten/kota		Jumlah apartur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan	220 orang	218.839.700	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Anggaran RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran 2027					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			penanganan keadaan darurat dalam aspek managerial dan teknis					darurat dalam aspek managerial dan teknis			
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	250 orang	175.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah logistik dan peralatan bagi korban bencana	250 orang	629.236.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				**120.000.000**	**Penatsan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**432.783.110**	
	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan		Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	200 dokumen	20.000.000	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan		Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	200 dokumen	158.066.820	
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasrkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan	4 kegiatan	100.000.000	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penanganan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi/rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3 kegiatan dan 2 dokumen kegiatan	274.716.290	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang baik di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional. Perkembangan tersebut merupakan peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Permasalahan yang menjadi isu strategis baik tingkat daerah maupun tingkat nasional yang di hadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang seperti tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme, terganggunya kondusivitas wilayah Pemalang akibat konflik kepentingan. Terjadinya konflik sosial dan permasalahan toleransi didalam masyarakat yang pluralis serta menguatkan demokrasi berdasarkan pancasila dengan adaptif terhadap masa depan society 5.0 yang menempatkan dinamika global teknologi dan humanisme sebagai instrumen kemajuan peradaban. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

Renja Badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan; meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Badan tentang pembentukan tim penyusun Renja Badan Kesatuan bangsa dan politik, orientasi mengenai Renja Badan Kesatuan bangsa dan politik, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal; meliputi tahap perumusan rancangan awal Renja dan tahap penyajian rancangan awal Renja Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pemalang.
3. Penyusunan rancangan; meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal Renja, verifikasi dan penyelarasan rancangan Renja Badan Kesatuan bangsa dan politik kabupaten Pemalang.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan Renja Badan Kesatuan bangsa dan politik kabupaten Pemalang.
5. Perumusan rancangan akhir; merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja Badan Kesatuan bangsa dan politik kabupaten Pemalang.berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
6. Penetapan; meliputi kegiatan verifikasi rancangan akhir Renja yang selanjutnya bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 tahun 2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 mengacu pada Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Lembar pernyataan, Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistemtika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan evaluasi tahun berjalan, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2024 dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pemalang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, program dan kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berisi tentang kerangka pendanaan tahun 2026 serta rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
5. Bab V Penutup, berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dan rencana tindak lanjut.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bakesbangpol

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa perangkat daerah atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur mendorong pencapaian target kinerja suatu instansi pemerintah. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil /dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal itu guna mengetahui sejauh mana tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pemalang pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Pada tahun 2024 jumlah total anggaran Badan Kesatuan bangsa dan politik kabupaten Pemalang sebesar Rp. 75.070.585.200

Realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah Rp 74.552.914.705 atau sebesar 99,31 % dari pagu anggaran.

Tahun Anggaran 2025 (Tahun Berjalan)

Tahun 2025 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 10.978.368.887 yang terbagi dalam 6 Program, 13 kegiatan dan 40 Sug Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan memiliki realisasi kinerja sebesar 100, yang termasuk dalam kategori baik, Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena Nilai nilai pancasila adalah satu satunya cara untuk mencari solusi penyelesaian konflik, dengan nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan kesadaraan masyarakat akan persatuan sehingga meminimalisir konflik mengingat kemajemukan masyarakat kita yang terdiri dari suku, budaya dan agama tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah potensi konflik. Salah satu solusi penyelesaian konflik yaitu dengan mngedepankan nilai sila ke 4 yakni

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik memiliki realisasi kinerja sebesar 100, yang termasuk dalam kategori baik, Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Polarisasi politik ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan bersama, Polarisasi politik dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terhambatnya pembangunan. Upaya pencegahan dan penanggulangan polarisasi politik anatara lain: Meningkatkan pendidikan politik, Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, Menciptakan ruang dialog dan komunikasi.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat memiliki realisasi kinerja sebesar 100, yang termasuk dalam kategori baik, Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Organisasi masyarakat (ormas) dapat berperan dalam mencegah potensi konflik dengan mendorong sikap saling menghormati dan percaya antar anggota masyarakat, Ormas juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencegah konflik sosial.salah satunya keterlibatan dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari sosialisasi hingga pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial memiliki realisasi kinerja sebesar 100, yang termasuk dalam kategori baik, Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kewaspadaan dini masyarakat dalam mencegah potensi konflik adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah potensi konflik sebelum terjadi. Kewaspadaan dini ini dapat dilakukan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM merupakan organisasi yang mengumpulkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman yang mungkin terjadi. FKDM juga mengevaluasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki realisasi kinerja sebesar 100, yang termasuk dalam kategori baik, Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dalam hal pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya maka untuk mewujudkannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang sudah merencakanan kegiatan, fasilitasi FKUB dan sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dengan melibatkan BNN.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki realisasi kinerja sebesar 100, yang termasuk dalam kategori baik, Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk mencapai Nilai SAKIP komponen perencanaan yang baik perlu juga menyelaraskan antara program jangka pendek (RKPD) dengan Program jangka menengah (RPJMD) yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

turunannya nanti menjadi rencana bagi perangkat daerah dalam membantu mencapai target dan tujuan Pemerintah Daerah.

7. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD; Dikarenakan terdapat peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dimutahirkan melalui keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang kemudian disesuaikan kembali program kegiatan tersebut sesuai peraturan. Maka terjadi perubahan indikator kinerja dan target capaian program kegiatan renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.
8. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut adalah :
   - Penyesuaian target capaian pada tahun anggaran 2025
   - Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
   - Efisiensi alokasi belanja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Pemalang

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target capaian Program/Kegiatan/Sub kegiatan(Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2024			Target program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program/ Kegiatan/ Sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**40,02**	**68,97**	**37,35**	**68,97**	**184,65**	**37,35**	**175,29**	**438,225**
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Nilai**	**60,55**	**69,59**	**57,87**	**69,59**	**120,25**	**60,55**	**199,73**	**329,85**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen	13	14	14	14	100	13	41	3,15
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	**Dokumen**	**13**	**14**	**14**	**14**	**100**	**13**	**41**	**3,15**
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	110	100	100	100	100	310	3,1

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	**%**	**100**	**110**	**100**	**100**	**100**	**100**	**310**	**3,1**
8.01.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	100	2	6	3
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	**Dokumen**	**2**	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**6**	**3**
8.01.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		1	1	1	1	100	2	4	4
		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**	**2**	**4**	**4**
8.01.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1	-	1	1	100	1	2	2
		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	**Dokumen**	1	-	1	1	100	1	2	2
8.01.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1	-	1	1	100	1	2	2
		Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	**Dokumen**	**1**	-	1	1	100	1	2	2
8.01.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	-	1	1	100	1	2	2
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	**Dokumen**	**1**	-	1	1	100	1	2	2
8.01.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	7	2	2	100	2	11	5,5

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	**Dokumen**	**2**	7	2	2	100	2	11	5,5
8.01.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	-	4	4	100	4	8	2
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen**	4	-	4	4	100	4	8	2
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu (dokumen)	Dokumen	11	8	44	44	100	9	61	5,5
		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	**Dokumen**	**11**	8	44	44	100	9	61	5,5
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	73%	100	100	100	100	273	2,73
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	**%**	**100**	73%	100	100	100	100	273	2,73
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24 org/bln	23 0rg/bln	-	-	100	23 org/12 bln	46 org/24 bln	-
		Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	**Orang/Bulan**	24org/bln	23 org/bln	-	-	100	23 org/12 bln	46 org/12 bln	-
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang terfasilitasi (orang/bulan)	Orang/Bulan	17	-	30	30	100	10 org/12 bln	40	2,35
		Jumlah pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang terfasilitasi	**Orang/Bulan**	17	-	30	30	100	10 org/12 bln	40	2,35
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Dokumen	-	-	1	1	100	1	2	2
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	**Dokumen**	-	-	1	1	100	1	2	2

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Dokumen	11	11	11	11	100	6	28	2,5
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	**Dokumen**	11	11	11	11	100	6	28	2,5
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Dokumen	-	-	2	2	100	2	4	
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	**Dokumen**	-	-	2	2	100	2	4	1
8.01.01.2.07	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah SKPD yang teradministrasi dengan tertib dan sesuai ketentuan	Unit	-	-	3	3	100	3	6	1,5
		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	**Dokumen**	-	-	3	3	100	3	6	1,5
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang mutakhir		-	-	100	100	100	100	200	50
		Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang mutakhir	**%**	-	-	100	100	100	100	200	50
8.01.01.2.07.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	0,25
		-	**-**	-	-	-	-	-	1	1	0,25
8.01.01.2.07.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah pada SKPD yang terjaga keamanannya	Unit	-	-	1	1	100	1	2	0,5
		Jumlah barang milik daerah pada SKPD yang terjaga keamanannya	**Unit**	-	-	1	1	100	1	2	0,5
8.01.01.2.07.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	Dokumen	-	-	2	2	100	2	4	1
		-	**-**	-	-						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8.01.01.2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**	-						
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	-	-	50	50	100	20 org/keg	70	17,5
		Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	**Orang**	-	-	50	50	100	20 org/keg	70	17,5
	Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	-	-	100	100	100	100	200	50
		Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	**%**	-	-	100	100	100	100	200	50
8.01.01.2.04.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang tersedia	Unit	-	-	3	3	100	-	3	0,75
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**Unit**	**-**	**-**	3	3	100	-	3	0,75
8.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Stel	-	-	50	50	100	-	50	12,5
		Jumlah Paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**Paket**	-	**-**	**50**	50	100	-	50	12,5
8.01.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang/Kegiatan	-	-	15	15	100	10 org/keg	25	6,25
		Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**Orang**	-	**-**	**15**	15	100	10 org/keg	25	6,25
8.01.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang/Kegiatan	-	-	10	10	100	-	10	2,5
		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	**Orang**	-	-	10	10	100	-	10	2,5
8.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan	Orang/Kegiatan	-	-	10	10	100	10 org/keg	20	5

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Peraturan PerundangUndangan	Perundang-undangan									
		Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	**Orang**	-	-	10	10	100	10 org/keg	20	5
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang Tersedia	Layanan	7	11	50.074	50.074	100	7	50,092	7,14
		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang Tersedia	**Layanan**	**7**	11	50.074	50.074	100	7	50,092	7,14
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	93,59	100	100	100	100	293,59	293
		Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	**%**	**100**	93,59	100	100	100	100	293,59	293
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis/Bulan	10	5 jenis/bln	25	25	100	5 jenis/12 bln	35	3,5
		Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	**Paket**	10	5	25	25	100	5	35	3,5
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	-	-	18	18	100	-	18	4,5
		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	**Paket**	-	-	18	18	100	-	18	4,5
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis/Bln	-	-	10	10	100	4	14	3,5
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	**Paket**	-	-	10	10	100	4	14	3,5
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis/Bln	1	1	3	3	100	2	6	6
		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	**Paket**	1	1	3	3	100	2	6	6

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis/Bln	7	7	5	5	100	4	16	2,2
		Jumlah penggandaan yang tersedia	Lembar	-	50.000	50.000	50.000		2.000	102.000	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	**Paket**	7	-	5	5	100	4	9	1,2
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis/Bln	1	1	10	10	100	1	12	12
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia	Buku	1	1	3	3	100	1	5	5
		Jumlah dokumen surat kabar dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	**Dokumen**	1	1	-	-	-	1	2	2
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	18	23	120	120	100	50	193	10,7
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Laporan**	18	23	120	120	100	50	193	10,7
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	4	4	2	2	100	2	8	2
		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	**Unit**	4	4	2	2	100		8	2
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100		200	200
		Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	**%**	100	100	100	100	100		200	200
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	**Unit**	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	3	3	-	-	-	2	5	1,6
		Jumlah paket mebel yang disediakan	**Unit**	3	3					3	1
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	1	2	1	1	100	-	3	0,75
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	**Unit**	1	-	1	1	100	-	1	0,25
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor yang tersedia	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor yang disediakan	**Unit**	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-					-	-
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	3	1262	2.015	2.015	100	3	3280	820
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	-	100	100	100	100	200	50
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	1645	500	2000	2000	100	1000	3500	875
		Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	**Laporan**	-	-	2000	2000	100	1000	3000	750
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis/Bln	3	3	4	4	100	3	10	2,5
		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	**Laporan**	3	3	4	4	100	3	10	2,5
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis/Bln	3	-	3	3	100	-	3	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	**Laporan**	3	-	3	3	100	-	3	1
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/Bln	2	26	8	8	100	28	62	31

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	**Laporan**	2	26	8	8	100	28	62	31
8.01.01.2.08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang Terpelihara	Unit	24	23	32	32	100	31	86	3,5
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	92,44	32	32	100	100	224,4	2,24
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Unit	-	23	4	4	100	-	27	-
		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	**Unit**	-	23	4	4	100	-	27	-
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Unit	23	23	17	17	100	21	61	2,6
		Jumlah kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar Pajak dan Perizinannya	**Unit**	23	23	17	17	100	21	61	2,6
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang terpelihara	Unit	1	-	1	1	100	-	1	1
		Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	**Unit**	1	-	1	1	100	-	1	1
8.01.01.2.08.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	-	-	4	4	100	5	9	-
		Jumlah mebel yang dipelihara	**Unit**	-	-	4	4	100	5	9	-
8.01.01.2.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	-	-	1	1	100	8	9	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	**Unit**	-	-	1	1	100	8	9	-
8.01.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	1	1	100	1	3	3
		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	**Unit**	1	1				1	2	2
8.01.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	**Unit**	-	-				1	1	-
8.01.01.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang Terpelihara	Unit	-	-	-	-		1	1	-
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	**Unit**	-	-				1	1	-
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**%**	**90%**	**88%**	**88%**	**88%**	**100%**	**90%**	**266**	29,55
8 01 02 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	orang	1.175	180	180	180	100%	1.175	1.535	130,63
	Hasil Kegiatan	Persentase capaian masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibanding target pada tahun berkenaan	%	90	88	88	88	100%	90	266	29.55

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah program kerja bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang tersusun	Dokumen	3	4	2	4	93,06%	8	16	4
		Jumlah Dokumen program kerja bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di susun	**Dokumen**	3	4				8	12	3
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**Dokumen**	-	-				-	-	-
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Orang/Kegiatan	200 org/keg	100	100 org/1 keg	100 org/4 keg	96,14%	5	205	51,25
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**Orang**	200 org/keg	100				5	205	51,25
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran ebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	0,25

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah laporan pembinaan etnis yang tersusun	Dokumen	-	-				1	1	0,25
		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran ebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**Orang**	-	-				100	100	50
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang Tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**Laporan**	-	-				-	-	-
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase masyarakat yang paham politik**	**%**	**65**	**60%**	**60%**	**60%**	**100%**	**65%**	**185**	284,61
8 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham politik	Orang	225	300	228org	300org	99,67%	100/keg	700	175
	Hasil Kegiatan	Persentase capaian masyarakat yang paham politik dibanding target pada tahun berkenaan	%	75	133%			99,67	100	233	58,25
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah	Jumlah program kerja bidang politik yang tersusun	Dokumen	1	2	1	2	99,93%	24	28	7
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah	**Dokumen**	1	2				24	26	6,5
8 01 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah kebijakan teknis bidang politik yang tersusun	Dokumen	-	-				2	2	0,5
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	**Dokumen**	-	-				2	2	0,5

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah									
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Orang/Kegiatan	24	23	24	23 dok	99,95%	100	146	36,5
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	**Orang**	24	23				50	73	18,25
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan perkembangan politik yang tersusun	Dokumen	4	6	4	6	99,61%	5	17	4,25
		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	**Orang**	-	6				-	6	1,5

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Pemantauan Situasi Politik Di Daerah									
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi pelanggaran pemilu yang tersusun Jumlah laporan monitoring evaluasi pendataan Parpol yang tersusun	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	**Laporan**	-	-				1	1	0,5
8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan**	**%**	**80**	**80%**	**80%**	**80%**	**100%**	**80**	**240**	300
8 01 04 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial Kemasyarakatan	Lembaga	13	20 lembaga	23 lmbaga	20 lembaga	99,5%	3 lembaga	43	10,75
	Hasil Kegiatan	Persentase capaian organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan dibanding target pada tahun berkenaan	%	100	153%			99,5	100	253	63,25

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	Jumlah program kerja bidang organisasi kemasyarakatan yang Tersusun	Dokumen	2	2	2	2	97,84%	2	6	1,5
		Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	**Dokumen**	2	2				2	4	1
8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	2	2	0,5
		Jumlah kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	**Dokumen**	-	-				2	2	0,5
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah database organisasi kemasyarakatan yang tersusun	Dokumen	1	2	1 dok 10 dok	2 dok 10 dok	97,73%	1	5	1,25
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan untuk penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Lembaga	-	-				3	3	0,75
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**Orang**	-	-						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil desk dan verifikasi organisasi kemasyarakatan yang tersusun Jumlah laporan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang tersusun	Dokumen	10	12	10	12	99,94%	6	30	7,5
		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**Orang**	-	-				6	6	1,5
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporani dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang organisasi kemasyarakatan yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	222	222	55,5
		Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporani dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**Laporan**	-	-				222	222	55,5
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase masyarakat yang paham ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan**	**%**	**75%**	**70%**	**70%**	**70%**	**100%**	**75**	**195**	48,75
8 01 05 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	Orang	7	8	7 org	8 org	98,11%	100	116	29

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	Persentase capaian masyarakat yang paham Ketahanan Bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan dibanding target pada tahun berkenaan	%	75				98,11	100	100	25
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah program kerja bidang ketahanan bangsa, pencegahan Penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan peghayat kepercayaan yang tersusun	Dokumen	2	3	2	3	98,98%	2	8	2
		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di susun	**Dokumen**	2	3				2	2	0,5
8 01 05 2.01 02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan teknis bidang ketahanan bangsa, pencegahan Penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan peghayat kepercayaan yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-		-	-	-
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di susun	**Dokumen**	-	-						
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan bangsa	Orang/Kegiatan	-	-	-	--		50	50	12,5

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan Narkotika	Orang/Kegiatan	-	-				-	-	-
		Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	Orang/Kegiatan	-	-				-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	**Orang**	-	-				-	-	-
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang tersusun	Dokumen	15	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang tersusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**Orang**	-	-					-	-
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan peghayat kepercayaan yang tersusun	Dokumen	5	6	5	6	96,08%	-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**Laporan**		6						
8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial**	**%**	**55**	**64,94%**	**55%**	**64,94%**	**89,97%**	**65**	**194,88**	48,72
8 01 06 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini koflik sosial	Orang	17	24	17	24	89,97%		48	12
	Hasil Kegiatan	Persentase capaian masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini koflik sosial dibanding target pada tahun berkenaan	%	65	141%			89,97		-	-
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah program kerja bidang kewaspadaan nasional yang tersusun	Dokumen	-	-				-	-	-
		Jumlah Dokumen Program kerjadi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	**Dokumen**	-	-				-	-	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar	Orang/kegiatan	-	-				-	-	-
		Jumlah masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini	Orang	-	-				-	-	
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	**Orang**	-	-				-	-	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah	Jumlah laporan deteksi dini yang tersusun	Dokumen	3	6	3	6	86,72%	3	15	3,75
		Jumlah laporan penanganan potensi konflik sosial yang tersusun	Dokumen	-	-						
		Jumlah laporan pendampingan napiter yang tersusun	Dokumen	-	-						
		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	**Orang**	3	-						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah									
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi unjuk rasa yang tersusun	Dokumen	14	20	14	20	90,34%	-	40	10
		Jumlah laporan hasil monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**Laporan**	14	20				-	20	5
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi Forkopimda yang tersusun	Dokumen	-	-				1	1	0,25
		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen**	-	-				1	1	0,25

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan 2027, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Pemalang berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Bakesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(15)*
1	Angka Kriminalitas	Angka		√		190	185	-	-	193	104	-	-	Realisasi angka kriminalitas di tahun 2025 periode Januari-Juli sejumlah 104, Di tahun 2026-2029 angka kriminalitas bukan menjadi IKU Bakesbangpol lagi
2	Jumlah konflik sosial	Kasus		√		0	0	0	0	0	-	0	0	Indikator lama
3	Jumlah konflik agama	Kasus		√		0	0	0	0	0	-	0	0	Indikator lama
4	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%		√		100	100	100	100	100	-	100	100	Indikator lama
5	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%		√		100	100	100	100	100	-	100	100	Indikator lama

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks		√		82,19	87,3	87,50	87,90	87,10	-	87,50	87,90	Target Indikator IKM menyesuaikan Renstra 2025-2029
7	SAKIP	Skor		√		57,87	66	67	67,55	65,55	-	67	67,55	Target Indikator SAKIP menyesuaikan Renstra 2025-2029
8	IRB	Indeks				37,35	40,02	-	-	-	-	-	-	Indikator lama
9	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%				85	88	90	95	85	-	90	95	Indikator lama
10	Persentase masyarakat yang paham politik	%				55	60	65	70	55	-	65	70	Indikator lama
11	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan	%				80	80	80	100	80	-	80	100	Indikator lama
12	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial	%				65	70	75	80	65	-	75	80	Indikator lama
13	Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%				65	70	75	80	65	-	75	80	Indikator lama
14	Indeks Harmoni Indonesia	Angka		√		-	7,07	7,20	7,40	-	7,07	7,20	7,40	Indikator Baru Renstra 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id/

15	Konflik SARA	Kasus			√	NA	0	0	0	0	-	0	0	Indikator Baru Renstra 2025-2029
16	Persentase WNI yang mendapat wawasan bela negara	%		√		88	88,50	88,60	88,70	88	-	88,60	88,70	Indikator Baru Renstra 2025-2029
17	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka		√		NA	76,20	77	77,50	76,12	75,18	77	77,50	Indikator Baru Renstra 2025-2029
18	Indeks Kinerja Ormas	Angka		√		NA	72	72,30	72,50	NA	72,23	72,30	72,50	Indikator Baru Renstra 2025-2029
19	Indeks kerukunan umat beragama	Angka		√		69,91	75	75.50	76	74,78	-	75.50	76	IKUB 2025 dilaksanakan di TW 4, Proyeksi ditahun 2026-2027 menyesuaikan Renstra 2025-2029
20	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka		√		NA	7,10	7,30	7,50	NA	7,16	7,30	7,50	Indikator Baru Renstra 2025-2029

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3 Isu-isu penting dan aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan Tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Pemalang, yakni ***"Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia"***

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengidentifikasi beberapa isu penting dan aktual dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Perlu ditingkatkannya kondusivitas wilayah.
2. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara.
3. Perlu ditingkatkannya pengelolaan keberagaman dan toleransi
4. Perlu ditingkatkannya Penanganan Potensi konflik SARA
5. Perlu ditingkatkannya kesadaran demokrasi di masyarakat

Dari isu-isu penting dan aktual tersebut dapat di identifikasikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta tantangan dan peluang yang ada sebagai berikut :

1. Permasalahan dan Hambatan

   Selaras dengan isu strategis daerah Kabupaten Pemalang tahun 2026 tentang belum terwujudnya Ketahanan Pangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya memprioritaskan Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan

   Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mendukung visi **Cakap** dan misi **Silaturahmi** yaitu meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera.

   Misi meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera mempunyai tujuan daerah Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagamaan dalam masyarakat dengan indikator tujuan Indeks Harmoni Indonesia (IHAI). Dalam mencapai Tingkat Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan di masyarakat ditentukan sasaran daerah Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah konflik SARA.

2. Tantangan dan Peluang

   Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang tahun 2025 – 2029, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Menjaga stabilitas politik daerah, Menangkal radikalisme dan Mencegah konflik SARA agar tidak mengganggu pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan Bakesbangpol agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pelayanan publik berbasis teknologi;
3. Menemukan isu-isu strategis yang spesifik dan merumuskan kebijakan yang tepat guna

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan Bakesbangpol;
2. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah;
3. Membangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk mendukung tujuan pembangunan daerah jangka panjang;
4. Mampu menyusun dan melaksanakan program-program inovatif yang memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat;
5. Adanya dukungan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di setiap kecamatan;
6. Adanya dukungan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dari uraian diatas, dengan mengindentifikasikan permasalahan/hambatan, tantangan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang serta program nasional maupun program SDG's (Suistanable Development Goals) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, maka diperlukan adanya Rencana Kerja Tahunan sebagai landasan penetapan kebijakan program dan kegiatan di Badan Kesbangpol dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 2.3
Indikator TPB/SDGs Kabupaten Pemalang

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	SUMBER DATA	SATUAN	2024		2025		STATUS CAPAIAN	SUMBER DATA
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(14)	(15)
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Prevalensi pencegahan penyalahgunaan narkoba	BAKESBANGPOL	%	15	33	22	4		BNN
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	BAKESBANGPOL	Orang	10	25	25	0		BNN
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	BAKESBANGPOL	Orang	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	BNN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	standar pelayanan	sesuai standar pelayanan								
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan / dibantu	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan / dibantu	BAKESBANGPOL	Lembaga	2	2	2	2		BNN
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi pencegahan penyalahgunaan narkoba	BAKESBANGPOL	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidaak Ada	Tidak Ada		BNN

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu Man (Manusia), Money (Dana), Machine (Sarpras), Methode (Tupoksi dan Tata Laksana), dan Matrial (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sudah sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiata/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01 Unsur Pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				8.332.432.000					8.332.432.000	
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (skor)	87.50	4.028.916.000	**8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Badan Kesbangpol	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	87.50	4.028.916.000	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (skor)	67				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (skor)	67		
	8.01 .01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13	67.650.000	**8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13	67.650.000	
	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	5.900.000	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	5.900.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.000.000	
	8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	5.000.000	8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	5.000.000	
	8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5.000.000	
	8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	5.000.000	8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	14.250.000	8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	14.250.000	
	8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	17.500.000	8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	17.500.000	
	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	9	3.065.266.000	**8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	9	3.065.266.000	
	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 orang/bln	3.050.766.000	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 orang/bln	3.050.766.000	
	8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan (kali)	-	-	8.01 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan (kali)	-	-	
	8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah koordinasi akuntansi SKPD yang dilaksanakan (kali)	-	-	8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah koordinasi akuntansi SKPD yang dilaksanakan (kali)		-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
	8.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun (dokumen)	-	-	8.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun (dokumen)		-	
	8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	6 laporan	14.500.000	8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	6	14.500.000	
	8.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	8.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	
	8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	-	1.000.000	**8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	-	1.000.000	
	8.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	8.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan (kegiatan)	1	0	8.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan (kegiatan)	1	0	
	8.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah penilaian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan (kegiatan)			8.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah penilaian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan (kegiatan)			
	8.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan (kegiatan)			8.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan (kegiatan)			
	8.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang disusun (dokumen)			8.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang disusun (dokumen)			
	8.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1.000.000	8.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1.000.000	
	8.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang milik daerah SKPD yang dimanfaatkan (unit)			8.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang milik daerah SKPD yang dimanfaatkan (unit)			
	8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	20 org/keg	5.000.000	**8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	20 org/keg	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Randudongkal (Rainbow rafting)	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (orang)	45 org/Keg	5.000.000	8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Randudongkal (Rainbow rafting)	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (orang)	45 org/Keg	5.000.000	
	8.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	8.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1250	-	
	8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ngemplak, Yogyakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ngemplak, Yogyakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	-	133.000.000	**8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun		133.000.000	
	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000	
	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	
	8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	
	8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.000.000	8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.000.000	
			Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	2.000				Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	2.000		
	8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3.000.000	8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	3.000.000	
			Jenis surat kabar yang disediakan (jenis/bulan)	-				Jenis surat kabar yang disediakan (jenis/bulan)	-		
	8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	
	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	-	-	**8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	0	-	
	8.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dibeli (unit)	-	-	8.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dibeli (unit)	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli (unit)	-	-	8.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli (unit)	-	-	
	8.01.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Badan Kesbangpol	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dibeli (unit)	-	-	8.01.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Badan Kesbangpol	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dibeli (unit)	-	-	
	8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Mebel yang Dise diakan	-	-	8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
	8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	
	8.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dibeli (unit)			8.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dibeli (unit)			
	8.01 .01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan	-	-	8.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan	-	-	
	8.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	-	-	8.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	-	-	
	8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	
	8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	-	-	8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disedikan	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	-	587.000.000	**8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun		587.000.000	
	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.000.000	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.000.000	
	8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	
	8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514.000.000	8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514.000.000	
	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	-	170.000.000	**8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Badan Kesbangpol	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	-	170.000.000	
	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	100.000.000	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	100.000.000	
	8.01.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Badan Kesbangpol	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara (unit)	0	0	8.01.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Badan Kesbangpol	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara (unit)	0	0	
	8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	2 unit	20.000.000	8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Badan Kesbangpol	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	2	20.000.000	
	8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5 unit	50.000.000	8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5	50.000.000	
	8.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara (unit)	-	0	8.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara (unit)	-	0	
	8.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Kesbangpol	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)			8.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Kesbangpol	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)			
	8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)			8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)			
	8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	-	-	8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	1 unit	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	-	-	8.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	-	-	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesbangpol	Jumlah konflik sosial			**8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Badan Kesbangpol	Jumlah konflik sosial			
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol	Peningkatan revolusi mental (%)	85	611.675.000	**8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Badan Kesbangpol	Peningkatan revolusi mental (%)	85	611.675.000	
	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah aktivitas bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100 org/Keg	611.675.000	**8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Badan Kesbangpol	Jumlah aktivitas bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100 org/Keg	611.675.000	
	8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Program Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen)	1 Dokumen	100.000.000	8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Program Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen)	8	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan teknis Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen)	0	0	8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan teknis Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun (dokumen)	0	0	
	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 org	200.000.000	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5 org/keg	200.000.000	
	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		111.000.000	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		111.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Badan Kesbangpol	Jumlah Paskibraka	80 org	200.675.000	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Badan Kesbangpol	Jumlah Paskibraka	80 org	200.675.000	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesbangpol	Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat (%)	55	2.947.516.000	**8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Badan Kesbangpol	Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat (%)	55	2.947.516.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol	Jumlah aktivitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100/keg	2.947.516.000	**8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Badan Kesbangpol	Jumlah aktivitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100/keg	2.947.516.000	
	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah program kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen)	-	20.000.000	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah program kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen)	-	20.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen)	-	2.832.516.000	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan teknis Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen)	-	2.832.516.000	
	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Badan Kesbangpol	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	2000 org	-	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Badan Kesbangpol	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	2000	-	
			Jumlah pesrta pelatihan penatausahan bantuan keuangan parpol					Jumlah pesrta pelatihan penatausahan bantuan keuangan parpol			
			Jumlah rakor Forkompimda yang dilaksanakan (kegiatan)					Jumlah rakor Forkompimda yang dilaksanakan (kegiatan)			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Kabupaten (Kegiatan)			Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Kabupaten (Kegiatan)			
			Jumlah Bantuan keuangan Partai Politik (Kegiatan)					Jumlah Bantuan keuangan Partai Politik (Kegiatan)			
			Jumlah Partisipasi dan Pemetaan Kerawanan dan Politik masyarakat yang dikaji (Dokumen)					Jumlah Partisipasi dan Pemetaan Kerawanan dan Politik masyarakat yang dikaji (Dokumen)			
			Jumlah Seminar Politik yang dilaksanakan (Kegiatan)					Jumlah Seminar Politik yang dilaksanakan (Kegiatan)			
			Jumlah Pendidikan Politik yang dilaksanakan (Kegiatan)					Jumlah Pendidikan Politik yang dilaksanakan (Kegiatan)			
			Jumlah Diskusi Politik Pemula Bagi Pemuda / Pelajar yang dilaksanakan (Kegiatan)					Jumlah Diskusi Politik Pemula Bagi Pemuda / Pelajar yang dilaksanakan (Kegiatan)			
			Jumlah Tenaga Penyuluh yang terbayarkan (Kegiatan)					Jumlah Tenaga Penyuluh yang terbayarkan (Kegiatan)			
			Jumlah Pelatihan Tenaga penyuluh yang dilaksanakan (Kegiatan)					Jumlah Pelatihan Tenaga penyuluh yang dilaksanakan (Kegiatan)			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Pakaian Seragam Lapangan Pegawai (Unit)					Jumlah Pakaian Seragam Lapangan Pegawai (Unit)			
	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	2000 org	45.000.000	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	2000 org	45.000.000	
		Badan Kesbangpol	Jumlah laporan perkembangan politik yang tersusun (dokumen)				Badan Kesbangpol				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan monitoring evaluasi jumlah parpol yang tersususn (dokumen)		50.000.000	8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (dokumen)		50.000.000	
		Badan Kesbangpol	Jumlah laporan monitoring evaluasi pelanggaran pemilu yang tersussun (dokumen)	1			Badan Kesbangpol		1		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesbangpol	Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang berdaya (%)	-	225.000.000	**8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Badan Kesbangpol	Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang berdaya (%)	-	225.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah aktivitas bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	-	225.000.000	**8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		Jumlah aktivitas bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	-	225.000.000	
	8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah program kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	2	20.000.000	8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah program kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	2	20.000.000	
	8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	2	100.000.000	8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	2	100.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 org	50.000.000	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 org	50.000.000	
	8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah koordinasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	60 org	30.000.000	8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah koordinasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	60 org	30.000.000	
	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	12 Laporan	25.000.000	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun (dokumen)	12 Laporan	25.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesbangpol	Indeks kerukunan umat beragama (skor)	65	320.000.000	**8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Badan Kesbangpol	Indeks kerukunan umat beragama (skor)	65	320.000.000	
	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah aktivitas bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100 org	320.000.000	**8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		Jumlah aktivitas bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100 org	320.000.000	
	8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)	-	-	8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)	-	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)	-	-	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah kebijakan teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)	-	-	
	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 org	70.000.000			Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 org	70.000.000	
	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi		Jumlah laporan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan yang btersusun (dokumen)		200.000.000					200.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang dilaksanakan (kegiatan)			8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang dilaksanakan (kegiatan)			
	8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)		50.000.000	8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun (dokumen)		50.000.000	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesbangpol	Prosentase fasilitasi penanganan konflik sosial (%)	65	199.325.000	**8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Badan Kesbangpol	Prosentase fasilitasi penanganan konflik sosial (%)	65	199.325.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol	Jumlah aktivitas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100 org/keg	199.325.000	**8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Badan Kesbangpol	Jumlah aktivitas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dilaksanakan dengan mantap (kegiatan)	100 org/keg	199.325.000	
	8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah program kerja Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	0	0	8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah program kerja Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	0	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	-	-	8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	-	-	
	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Badan Kesbangpol	Jumlah napiter yang didampingi (orang)	0	0	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah napiter yang didampingi (orang)	0	0	
			Jumlah aparatur daerah yag ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar (orang)					Jumlah aparatur daerah yag ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar (orang)			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadan dan deteksi dini								
			Jumlah kerjasama intelijen yang dilaksanakan (kegiatan)					Jumlah kerjasama intelijen yang dilaksanakan (kegiatan)			
			Jumlah Pengamanan Hari Besar, Pelantikan Pemilu, Pengamanan Insidental (kegiatan)					Jumlah Pengamanan Hari Besar, Pelantikan Pemilu, Pengamanan Insidental (kegiatan)			
	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang dilaksanakan (kegiatan)	100 org	45.000.000	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang dilaksanakan (kegiatan)	100 org	45.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	0	65.000.000	8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan monitoring evaluasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik yang disusun (dokumen)	0	65.000.000	
	8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	89.325.000	8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	89.325.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan pelayanan penunjangan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai pokok dan fungsinya. Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku SKPD tidak menampung usulan dari masyarakat ke dalam program dan kegiatan.

Tabel 2.5

Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai **Asta Cita** dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat **17 Program Prioritas Presiden**, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik atau juga disebut sebagai urusan pemerintahan umum di daerah maka arah kebijakan dan prioritas Bakesbangpol dirumuskan untuk mendukung pencapaian Asta Cita ke-1 dan ke-8, yaitu memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta dua program prioritas, yaitu: pencegahan dan pemberantasan narkoba dan memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah.

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, Bakesbangpol memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan hari besar nasional, Sosialisasi terkait wawasan kebangsaan kepada Siswa sekolah, Perekrutan petugas PASKIBRA, pendidikan politik untuk pemilih pemula, fasilitasi FKUB, FKDM dan pelaksanaan survei IKUB.

Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba dan memastikan kerukunan antar umat beragama, peran tersebut di wujudkan melalui kegiatan sosialisasi bahaya narkoba kepada siswa siswi sekolah bekerja sama dengan BNN, Melalui FKUB, FKDM dan Wasdinda Bakesbangpol dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap potensi konflik agama yang terjadi sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun tujuannya yaitu :

Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan dalam masyarakat

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu :

Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)

Penghitungan indeks ini dilakukan dengan menggabungkan nilai dari berbagai indikator yang mencerminkan tiga dimensi utama: Persepsi masyarakat, Partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas terhadap layanan publik

3.2.2 Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang mempunyai 2 (dua) Sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat yang diukur dengan indikator Jumlah Konflik SARA
2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator nilai SAKIP dan IKM

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagamaan dalam masyarakat		Indeks Harmoni Indonnesia	Angka	7.20
		Menurunnya potensi dan kejadian konflik SARA serta meningkatnya toleransi antar kelompok masyarakat	Konflik SARA	Kasus	0
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	IKM	Nilai	87.50
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	67

Tahun 2026 adalah tahun pertama perencanaan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada **Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.** Tahun pertama ini merupakan landasan pijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, perlu memastikan sistem, data, dan SDM siap sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah
2. Peningkatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bersama BNN
3. Penguatan nilai nilai Budaya dan agama kepada generasi muda
4. Pembinaan dan pemberdayaan ormas dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan

Sejalan dengan tujuan dan target sasaran Rancangan Renstra untuk tahun 2026 tersebut, berdasarkan rumusan isu-isu penting pada bab sebelumnya, maka kegiatan Bakesbangpol difokuskan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat pada nilai nilai ideologi pancasila dan karakter bangsa

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan karakter bangsa adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasi dan diwujudkan dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Peningkatan pemahaman ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Pendidikan Formal: Integrasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
- Sosialisasi dan Kampanye: Mengadakan kampanye dan sosialisasi yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

efektif, termasuk melalui media sosial, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- Keteladanan: Peran aktif pemerintah dan tokoh masyarakat dalam memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
- Penguatan Komunitas Lokal: Mengaktifkan kembali kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

2. Meningkatkan demokrasi dan partisipasi politik di masyarakat

Meningkatkan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat berarti menciptakan sistem yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, mulai dari pemilihan pemimpin hingga mempengaruhi pembuatan kebijakan. Penjabaran utamanya meliputi pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat, penguatan institusi demokrasi yang transparan, dan penyediaan kanal partisipasi yang efektif agar aspirasi rakyat dapat tersalurkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah.

3. Meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan daerah

Meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan daerah berarti memberdayakan Organisasi Masyarakat (Ormas) agar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan daerah. Hal ini melibatkan partisipasi aktif Ormas dalam berbagai bidang seperti penyaluran aspirasi, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, kesejahteraan sosial, dan penguatan persatuan. Peningkatan ini juga mencakup penguatan kapasitas Ormas agar mereka dapat secara efektif menjadi motor penggerak yang kondusif dan berintegritas.

4. Meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini timbulnya konflik SARA

Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini timbulnya konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) adalah upaya proaktif untuk mengidentifikasi, memahami, dan menetralisir potensi ancaman atau gesekan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural. Upaya ini bisa dilakukan melalui:

- Pendidikan Multikultural dan Toleransi: Menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta memahami keberagaman sebagai kekayaan bangsa, melalui edukasi formal dan informal.
- Penguatan Nilai Persatuan: Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas nasional di atas identitas golongan.
- Literasi Media: Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, terutama di media sosial, untuk mengenali dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong (hoaks) atau ujaran kebencian yang bernuansa SARA.
- Dialog Antar Komponen Masyarakat: Mendorong komunikasi dan interaksi yang intensif antar tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda dari latar belakang berbeda untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan Bakesbangpol dalam Renja disusun sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Bakesbangpol juga merupakan instrumen operasional dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. Melalui perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat, Bakesbangpol diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya potensi konflik SARA, menjaga kondusivitas wilayah, serta mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama. Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati yang dioperasionalkan ke dalam Rancangan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 dan perumusannya mendasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang merencanakan program sebanyak 6 (enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 8.332.432.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang. Seperti dalam tabel 3.2 berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Bakesbangpol Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**Rp. 8.332.432.000**				**Rp. 8.332.432.000**
08.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai regulasi Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	-	100	4.028.916.000	-		-	4.028.916.000
8.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		-		Rp. 67.650.000				Rp. 67.650.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	Rp. 15.900.000	DAU			Rp. 15.900.000
8 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU			Rp. 5.000.000
8 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU			Rp. 5.000.000
8 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun		1 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU			Rp. 5.000.000
8 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun		1 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU			Rp. 5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	Rp. 14.250.000	DAU			Rp. 14.250.000
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		4 Dokumen	Rp. 17.500.000	DAU			Rp. 17.500.000
5.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			**Rp. 3.065.266.000**				**Rp. 3.065.266.000**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 Orang/Bula	Rp. 3.050.766.000	DAU			Rp. 3.050.766.000
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keu bulanan/triwulanan SKPD yang tersusun		6 Dokumen	Rp. 14.500.000	DAU			Rp. 14.500.000
8.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				**Rp. 1.000.000**				**Rp. 1.000.000**
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun		2 Dokumen	Rp. 1.000.000	DAU			Rp. 1.000.000
8.01.01.2.02.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000
8.01.01.2.02.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		45 Orang	Rp. 5.000.000	DAU			Rp. 5.000.000
8.01.01.2.02.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				Rp. 133.000.000				Rp. 133.000.000
8.01.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		4 Paket	Rp. 1.000.000	DAU			Rp. 1.000.000
8.01.01.2.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia		4 Paket	Rp. 5.000.000	DAU			Rp. 5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.02.06.04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jenis bahan logistik kantoryang tersedia		12 Paket	Rp. 40.000.000	DAU			Rp. 40.000.000
8.01.01.2.02.06.05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yangtersedia		12 Paket	Rp. 34.000.000	DAU			Rp. 34.000.000
8.01.01.2.02.06.06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis surat kabaryang tersedia		4 dokumen	Rp. 3.000.000	DAU			Rp. 3.000.000
8.01.01.2.02.06.09	PenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPDyang terfasilitasi		12 Laporan	Rp. 50.000.000	DAU			Rp. 50.000.000
8.01.01.2.02.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				**Rp. 587.000.000**				**Rp. 587.000.000**
8.01.01.2.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiapbulan		12 Laporan	Rp. 73.000.000	DAU			Rp. 73.000.000
8.01.01.2.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaganon ASN yang dibayar setiap bulan		12 Laporan	Rp. 514.000.000	DAU			Rp. 514.000.000
8.01.01.2.02.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				Rp. 170.000.000				Rp. 170.000.000
8.01.01.2.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraanperorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya		4 Unit	Rp. 100.000.000	DAU			Rp. 100.000.000
8.01.01.2.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara		2 Unit	Rp. 20.000.000	DAU			Rp. 20.000.000
8.01.01.2.02.09.05	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnyayang terpelihara		5 Unit	Rp. 50.000.000	DAU			Rp. 50.000.000
8.0102	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				**Rp. 611.675.000**				**Rp. 611.675.000**
8.01.02.2.1.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah program kerja bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yangtersusun		1 Dokumen	Rp. 100.000.000	DAU			Rp. 100.000.000
8.01.02.2.1.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Jumlah kebijakan teknis bidang ideologi Pancasiladan karakter		0 Dokumen	Rp. 200.000.000	DAU			Rp. 200.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kebangsaan yangtersusun							
8.01.02.2.1.003	Pelaksanaan Kebijakan di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasiladan karakter kebangsaan		100 orang/keg	Rp.111.000.000	DAU			Rp.111.000.000
8.01.02.2.1.008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra		80 orang	Rp. 200.675.000	DAU			Rp. 200.675.000
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**Rp. 2.947.516.000**				**Rp. 2.947.516.000**
8.01.03.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah	Jumlah programkerja bidang politik yang tersusun		24 Dokumen	Rp. 20.000.000	DAU			Rp. 20.000.000
8.01.03.2.01.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik Di Daerah	Jumlah kebijakanteknis bidang politik yang tersusun		2 Dokumen	Rp. 2.832.516.000	DAU			Rp. 2.832.516.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.03.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2000 Org	Rp. 45.000.000	DAU			Rp. 45.000.000
8.01.03.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah	Jumlah laporanmonitoring evaluasi pelanggaran pemilu yang tersusun Jumlah laporan monitoring evaluasi pendataan Parpolyang tersusun		0 Dokumen 0 Dokumen	Rp. 50.000.000	DAU			Rp. 50.000.000
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**Rp. 225.000.000**				**Rp. 225.000.000**
8.01.04.2.1.001	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah	Jumlah programkerja bidang organisasi kemasyarakatanyang tersusun		2 Dokumen	Rp. 20.000.000	DAU			Rp. 20.000.000
8.01.04.2.1.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	Jumlah kebijakan bidang organisasikemasyarakatan yang tersusun		2 Dokumen	Rp. 1000.000.000	DAU			Rp. 1000.000.000
8.01.04.2.1.003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,		100 Org	Rp. 50.000.000	DAU			Rp. 50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Daerah	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8.01.04.2.1.004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan pemberdayaan dan pengawasanorganisasi kemasyarakatan yang tersusun		60 Org	Rp. 30.000.000	DAU			Rp. 30.000.000
8.01.04.2.1.004	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DibidangPendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang organisasi kemasyarakatan yang tersusun		12 Laporan	Rp. 25.000.000	DAU			Rp. 25.000.000
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**Rp. 320.000.000**				**Rp. 320.000.000**
8.01.05.2.1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yangmengikuti fasilitasi pencegahan, penyalahgunaannarkotika		1 Dokumen	Rp. 70.000.000	DAU			Rp. 70.000.000
8.01.05.2.1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang tersusun		1000 Orang/Kegiatan	Rp. 200.000.000	DAU			Rp. 200.000.000
8.01.05.2.1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan peghayat kepercayaan yangtersusun		0 Dokumen	Rp. 50.000.000	DAU			Rp. 50.000.000
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**Rp. 199.325.000**				**Rp. 199.325.000**
8.01.06.2.1.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Agen Kewaspadaan Dini yang Aktif Jumlah laporan deteksi dini yang tersusun Jumlah LaporanPendampingan Napiter yang Tersusun		50 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen	Rp. 45.000.000	DAU			Rp. 45.000.000
8.01.06.2.1.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporanmonitoring evaluasi unjuk rasa yang tersusun		0 Dokumen	Rp. 65.000.000	DAU			Rp. 65.000.000
8.01.06.2.1.006	Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi Forkopimda yangtersusun		12 Dokumen	Rp. 89.325.000	DAU			Rp. 89.325.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang merencanakan program sebanyak 6 (enam) program dan 12 (Dua belas) kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 8.332.432.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang.

Adapun program yang direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang pada tahun 2026, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
6. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

B. Kegiatan

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Adapun kegiatan yang direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang pada tahun 2026, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Programpemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah

- Sub Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa organisasi kemasyarakatan, Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah

5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DaerahSub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bakesbangpol Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2025	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	**Unsur Pemerintahan Umuum**										
8.01	**Kesatuan bangsa dan Politik**						**Rp. 8.332.432.000**				**Rp. 8.332.432.000**
08.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**										
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai regulasi Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	100	100	-	100	4.028.916.000	-		100	4.028.916.000
8.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi*			-		Rp. 67.650.000				Rp. 67.650.000
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	Rp. 15.900.000	DAU		3 Dokumen	Rp. 15.900.000
8 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp. 5.000.000
8 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp. 5.000.000
8 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp. 5.000.000
8 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp. 5.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp. 5.000.000
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp. 14.250.000	DAU		2 Dokumen	Rp. 14.250.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2025	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	Rp. 17.500.000	DAU		4 Dokumen	Rp. 17.500.000
5.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi*					**Rp. 3.065.266.000**				**Rp. 3.065.266.000**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bula	15 Orang/Bula		15 Orang/Bula	Rp. 3.050.766.000	DAU		15 Orang/Bula	Rp. 3.050.766.000
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keu bulanan/triwulanan SKPD yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	Rp. 14.500.000	DAU		6 Dokumen	Rp. 14.500.000
8.01.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Regulasi*					**Rp. 1.000.000**				**Rp. 1.000.000**
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp. 1.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp. 1.000.000
8.01.01.2.02.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Regulasi*					Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000
8.01.01.2.02.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45 Orang	45 Orang		45 Orang	Rp. 5.000.000	DAU		45 Orang	Rp. 5.000.000
8.01.01.2.02.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi*					Rp. 133.000.000				Rp. 133.000.000
8.01.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang tersedia	4 Paket	4 Paket		4 Paket	Rp. 1.000.000	DAU		4 Paket	Rp. 1.000.000
8.01.01.2.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatanrumah tangga yang tersedia	4 Paket	4 Paket		4 Paket	Rp. 5.000.000	DAU		4 Paket	Rp. 5.000.000
8.01.01.2.02.06.04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jenis bahan logistik kantoryang tersedia	12 Paket	12 Paket		12 Paket	Rp. 40.000.000	DAU		12 Paket	Rp. 40.000.000
8.01.01.2.02.06.05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	12 Paket	12 Paket		12 Paket	Rp. 34.000.000	DAU		12 Paket	Rp. 34.000.000
8.01.01.2.02.06.06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis surat kabaryang tersedia	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	Rp. 3.000.000	DAU		4 dokumen	Rp. 3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2025	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.02.06.09	PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPDyang terfasilitasi	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	Rp. 50.000.000	DAU		12 Laporan	Rp. 50.000.000
8.01.01.2.02.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*					**Rp. 587.000.000**				**Rp. 587.000.000**
8.01.01.2.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber dayayang dibayar tiapbulan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	Rp. 73.000.000	DAU		12 Laporan	Rp. 73.000.000
8.01.01.2.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah tenaganon ASN yang dibayar setiap bulan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	Rp. 514.000.000	DAU		12 Laporan	Rp. 514.000.000
8.01.01.2.02.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*					Rp. 170.000.000				Rp. 170.000.000
8.01.01.2.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraanperorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan diperpanjangijinnya	4 Unit	4 Unit		4 Unit	Rp. 100.000.000	DAU		4 Unit	Rp. 100.000.000
8.01.01.2.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	2 Unit	2 Unit		2 Unit	Rp. 20.000.000	DAU		2 Unit	Rp. 20.000.000
8.01.01.2.02.09.05	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnyayang terpelihara	5 Unit	5 Unit		5 Unit	Rp. 50.000.000	DAU		5 Unit	Rp. 50.000.000
8.0102	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	*Persentase WNI yang mendapat wawasan bela negara*									
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						**Rp. 611.675.000**				**Rp. 611.675.000**
8.01.02.2.1.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah program kerja bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yangtersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp. 100.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp. 100.000.000
8.01.02.2.1.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis bidang ideologi Pancasiladan karakter kebangsaan yangtersusun	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	Rp. 200.000.000	DAU		0 Dokumen	Rp. 200.000.000
8.01.02.2.1.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasiladan karakter kebangsaan	100 orang/keg	100 orang/keg		100 orang/keg	Rp.111.000.000	DAU		100 orang/keg	Rp.111.000.000
8.01.02.2.1.008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	80 orang	80 orang		80 orang	Rp. 200.675.000	DAU		80 orang	Rp. 200.675.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2025	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	*Indeks Demokrasi Indonesia*									
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**						**Rp. 2.947.516.000**				**Rp. 2.947.516.000**
8.01.03.2.01.001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah programkerja bidang politik yang tersusun	24 Dokumen	24 Dokumen		24 Dokumen	Rp. 20.000.000	DAU		24 Dokumen	Rp. 20.000.000
8.01.03.2.01.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik Di Daerah	Jumlah kebijakanteknis bidang politik yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp. 2.832.516.000	DAU		2 Dokumen	Rp. 2.832.516.000
8.01.03.2.01.004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2000 Org	2000 Org		2000 Org	Rp. 45.000.000	DAU		2000 Org	Rp. 45.000.000
8.01.03.2.01.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah laporanmonitoring evaluasi pelanggaran pemilu yang tersusun Jumlah laporan monitoring evaluasi pendataan Parpolyang	0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen		0 Dokumen 0 Dokumen	Rp. 50.000.000	DAU		0 Dokumen 0 Dokumen	Rp. 50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2025	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	tersusun									
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	*Indeks Kinerja Ormas*									
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**						**Rp. 225.000.000**				**Rp. 225.000.000**
8.01.04.2.1.001	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	Jumlah programkerja bidang organisasi kemasyarakatan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp. 20.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp. 20.000.000
8.01.04.2.1.002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	Jumlah kebijakan bidang organisasikemasyarakatan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	Rp. 1000.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp. 1000.000.000
8.01.04.2.1.003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Org	100 Org		100 Org	Rp. 50.000.000	DAU		100 Org	Rp. 50.000.000
8.01.04.2.1.004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	Jumlah laporan pemberdayaan dan pengawasanorganisasi kemasyarakatan yang tersusun	60 Org	60 Org		60 Org	Rp. 30.000.000	DAU		60 Org	Rp. 30.000.000
8.01.04.2.1.004	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing diDaerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidangorganisasi kemasyarakatanyang tersusun	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	Rp. 25.000.000	DAU		12 Laporan	Rp. 25.000.000
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	*Indeks Kerukunan Umat Beragama*									
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan**						**Rp. 320.000.000**				**Rp. 320.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Akhir periode Renstra OPD	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2025	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Budaya										
8.01.05.2.1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi pencegahan, penyalahgunaannarkotika	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp. 70.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp. 70.000.000
8.01.05.2.1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan yang tersusun	1000 Orang/Kegiatan	1000 Orang/Kegiatan		1000 Orang/Kegiatan	Rp. 200.000.000	DAU		1000 Orang/Kegiatan	Rp. 200.000.000
8.01.05.2.1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi bidang ketahanan bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan peghayat kepercayaan yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	Rp. 50.000.000	DAU		0 Dokumen	Rp. 50.000.000
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	*Indeks Kewaspadaan Nasional*									
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**						**Rp. 199.325.000**				**Rp. 199.325.000**
8.01.06.2.1.004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan OrangAsing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah	Jumlah Agen Kewaspadaan Dini yang Aktif Jumlah laporan deteksi dini yangtersusun Jumlah LaporanPendampingan Napiter yang Tersusun	50 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen	50 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen		50 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp. 45.000.000	DAU		50 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp. 45.000.000
8.01.06.2.1.005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan OrangAsing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporanmonitoring evaluasi unjuk rasa yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	Rp. 65.000.000	DAU		0 Dokumen	Rp. 65.000.000
8.01.06.2.1.006	Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi Forkopimda yangtersusun	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp. 89.325.000	DAU		12 Dokumen	Rp. 89.325.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Deteksi dini terhadap potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan) keamanan wilayah masih menjadi perhatian yang besar di tahun 2026.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, 2 Bidang, 4 Pejabat Fungsional , 2 Sub Bagian dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat bergantung pada dedikasi dan komitmen semua pihak, bukan semata memanfaatkan sumber dana saja melainkan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada. Untuk itu dibutuhkan rencana tindak lanjut (follow up) terhadap Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang:

1. Mengkaji ulang hasil-hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang.
2. Memfokuskan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang prioritas ditahun 2026. seperti seleksi anggota PASKIBRAKA, Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang, Deteksi dini penanganan konflik SARA
3. Isu aktual dan Krusial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang masih terkait Kondusifitas wilayah dan pencegahan konflik SARA oleh karena itu deteksi dini terhadap potensi ATHG *(Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan)* keamanan wilayah masih menjadi perhatian yang besar di tahun 2026.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

Pemalang, September 2026

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG

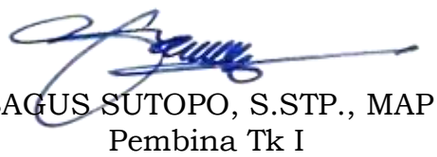

BAGUS SUTOPO, S.STP., MAP
Pembina Tk I
NIP. 19790711 199711 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√	Badan kesbangpol tidak menerima usulan masyarakat	-
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√	Tidak dilaksanakan karena sudah ada FGD	Akan dilaksanakan ditahun depan
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√	Bakesbangpol tidak ada Musrenbang	Adanya pelaksanaan FGD
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotayang telah disyahkan.	√			

Pemalang, September 2026

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG

BAGUS SUTOPO, S.STP., MAP
Pembina Tk I
NIP. 19790711 199711 1 001

Petunjuk Pengisian Formulir E.70 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BB**. RENCANA KERJA KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2026**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana kerja Kecamatan Pemalang tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pemalang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Rencana kerja Kecamatan Pemalang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pemalang. Kecamatan Pemalang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Pemalang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Pemalang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Pemalang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Pemalang tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Pemalang tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi dan Kelurahan se Kecamatan Pemalang
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Pemalang tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Pemalang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

   Melaksanakan FGD dengan mengundang : Puskesmas di Wilayah Kecamatan Pemalang, UPJI Wilayah 6 Pemalang, Kepolisian Sektor Kecamatan Pemalang, Koramil Kecamatan Pemalang, Kelurahan se Kecamatan Pemalang, Pemerintah Desa se Kecamatan Pemalang, LSM / Tokoh Masyarakat, Pengguna Layanan, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait

5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Pemalang tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Pemalang
Tahun 2026

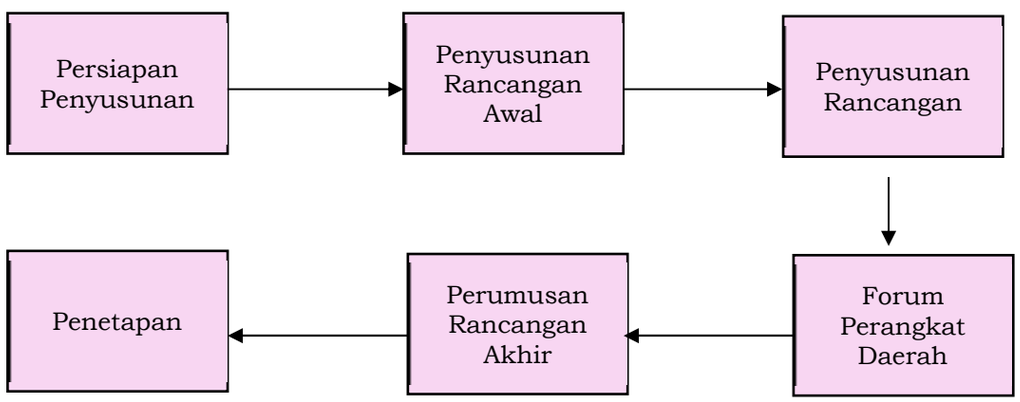

Rencana Kerja Kecamatan Pemalang tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Pemalang tahun 2025-2029. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

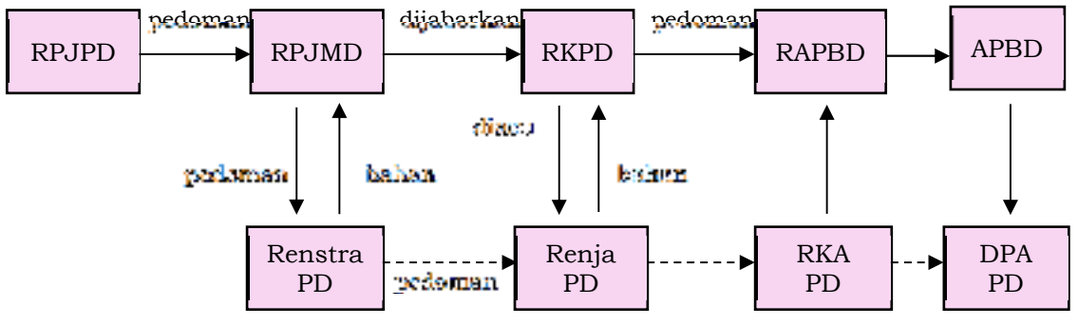

Rencana Kecamatan Pemalang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Pemalang tahun 2025, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pemalang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pemalang tahun 2025 - 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pemalang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Pemalang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Pemalang tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pemalang tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pemalang Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pemalang tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Pemalang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemalang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pemalang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pemalang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pemalang, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pemalang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pemalang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Pemalang pada tahun 2024 dan Pagu Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Pemalang sebesar Rp 17.176.679.146,00 yang terbagi dalam 6 program, 57 kegiatan dan 142 Subkegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 16.341.367.029,00 atau sebesar 96,92%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Pemalang sebesar Rp 16.564.304.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 57 kegiatan dan 142 sub kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Pemalang telah melaksanakan 96,92 % dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sangat tinggi.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pemalang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pemalang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pemalang s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan/ (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100)	10	11 (6+8+10)	12 (11/5*100)	14
7	Unsur Kewilayahan											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,09	68,97	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	Nilai	39,5	58,7	39,00	65,02	166,72	39,50	68,58	173,62	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Instansi Pemerintah										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Kecamatan Pemalang
	Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	72	43	14,00	14,00	100,00	15,00	72,00	100,00	
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Pemalang)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	14	9	2,00	2,00	100,00	3,00	14,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	19	11	4,00	4,00	100,00	4,00	19,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pemalang)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	19	11	4,00	4,00	100,00	4,00	19,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan yang tersusun**	**dokumen**	**8**	**4**	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**2,00**	**8,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	488	295	87,00	86,00	98,85	109,00	490,00	100,41	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun**	**dokumen**	**8**	**8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Kecamatan Pemalang)	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	4	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas**	**Orang**	**212**	**57**	**32,00**	**32,00**	**100,00**	**123,00**	**212,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	212	57	32,00	32,00	100,00	123,00	212,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**554**	**273**	**141,00**	**141,00**	**100,00**	**140,00**	**554,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pemalang)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kecamatan Pemalang
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor (Kecamatan Pemalang)	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	paket	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	19	3,00	3,00	100,00	2,00	24,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	6	2,00	2,00	100,00	2,00	10,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	328	128	100,00	100,00	100,00	100,00	328,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**unit**	**54**	**32**	**15,00**	**15,00**	**100,00**	**7,00**	**54,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	0	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	32	20	10,00	10,00	100,00	2,00	32,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20	12	4,00	4,00	100,00	4,00	20,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**laporan**	**125**	**75**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**25,00**	**125,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		yang tersedia										
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**unit**	**159**	**63**	**48,00**	**48,00**	**100,00**	**48,00**	**159,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	2	13,00	13,00	100,00	13,00	28,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel (Kecamatan Pemalang)	jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	32	2	15,00	15,00	100,00	15,00	32,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	93	55	19,00	19,00	100,00	19,00	93,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	4	1,00	1,00	100,00	1,00	6,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang tersedia**	**%**	**81,11**	**81,11**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	**100,00**	**100,00**	**123,29**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**dokumen**	**19**	**13**	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**4,00**	**19,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	19	13	2,00	2,00	100,00	4,00	19,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**Kecamatan Pemalang**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun**	**laporan**	**8**	**4**	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**2,00**	**8,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	4	2,00	2,00	100,00	2,00	8,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**laporan**	**40**	**36**	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**2,00**	**40,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		pelaksanaan tugas										
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	40	36	2,00	2,00	100,00	2,00	40,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun**	**Laporan**	**26**	**15**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**6,00**	**26,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**4,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	10	6	2,00	2,00	100,00	2,00	10,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	16	9	3,00	3,00	100,00	4,00	16,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Kecamatan Pemalang
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	laporan	6	2	3,00	3,00	100,00	1,00	6,00	100,00	
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	2	3,00	3,00	100,00	1,00	6,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**Kecamatan Pemalang**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**dokumen**	**17**	**8**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**6,00**	**17,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1650	400	750,00	750,00	100,00	500,00	1.650,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	14	8	2,00	2,00	100,00	4,00	14,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik**	**%**	**92,31**	**76,92**	**69,23**	**84,62**	**122,23**	**92,31**	**92,31**	**100,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**Kecamatan Pemalang**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**dokumen**	**392**	**240**	**84,00**	**82,00**	**97,62**	**67,00**	**389,00**	**99,23**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**97,65**	**97,65**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	65	39	13,00	13,00	100,00	13,00	65,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	65	39	13,00	13,00	100,00	13,00	65,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	65	39	13,00	13,00	100,00	13,00	65,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	26	18	3,00	1,00	33,33	4,00	23,00	88,46	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	86	46	20,00	20,00	100,00	20,00	86,00	100,00	Kecamatan Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	68	46	20,00	20,00	100,00	2,00	68,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kecamatan Pemalang)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	17	13	2,00	2,00	100,00	2,00	17,00	100,00	Kecamatan Pemalang
7.01	**KELURAHAN KEBONDALEM**											
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**68,09**	**68,97**	**58,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kelurahan Kebondalem**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**196**	**118**	**38,00**	**38,00**	**100,00**	**40,00**	**196,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	8	5	1,00	1,00	100,00	2,00	8,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Kebondalem

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	5	1,00	1,00	100,00	2,00	8,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**Kelurahan Kebondalem**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**unit**	**7**	**4**	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**1,00**	**7,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	7	4	2,00	2,00	100,00	1,00	7,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Kebondalem**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**Laporan**	**120**	**72**	**24,00**	**24,00**	**100,00**	**24,00**	**120,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Kebondalem

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Kebondalem**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**Unit**	**82**	**46**	**18,00**	**18,00**	**100,00**	**18,00**	**82,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	10	7,00	7,00	100,00	7,00	24,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	30	10,00	10,00	100,00	10,00	50,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	6	1,00	1,00	100,00	1,00	8,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang tersedia**	**%**	**81,11**	**81,11**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**Kelurahan Kebondalem**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun**	**Laporan**	**45**	**6**	**24,00**	**32,00**	**133,33**	**7,00**	**45,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**133,33**	**133,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	45	6	24,00	32,00	133,33	7,00	45,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**Kelurahan Kebondalem**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**kegiatan**	**61**	**34**	**10,00**	**10,00**	**100,00**	**17,00**	**61,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	25	15	5,00	5,00	100,00	5,00	25,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	19	8	2,00	2,00	100,00	9,00	19,00	100,00	Kelurahan Kebondalem

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	17	11	3,00	3,00	100,00	3,00	17,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum											
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	Laporan	**2**	**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas	%	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	100,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		yang tertangani										
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Kelurahan Kebondalem
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	Dokumen	5	1	1,00	1,00	100,00	3,00	5,00	100,00	
	Hasil Kegiatan	Persentase jumlah dokumen	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Kebondalem)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	709	100	500,00	500,00	100,00	109,00	709,00	100,00	Kelurahan Kebondalem
7.01	**KELURAHAN PELUTAN**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**68,09**	**68,97**	**58,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kelurahan Pelutan**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**159**	**80**	**40,00**	**40,00**	**100,00**	**39,00**	**159,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Pelutan)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	48	24	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	100,00	Kelurahan Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	48	24	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	48	24	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	4	2,00	2,00	100,00	1,00	7,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	2	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	100,00	Kelurahan Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**Kelurahan Pelutan**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**unit**	**5**	**2**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**2,00**	**5,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**0**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	2	1,00	1,00	100,00	2,00	5,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Pelutan**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**Laporan**	**100**	**50**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	4	2	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	24	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	24	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	100,00	Kelurahan Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Pelutan**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**unit**	**143**	**68**	**34,00**	**34,00**	**100,00**	**41,00**	**143,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	6	3,00	3,00	100,00	3,00	12,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel (Kelurahan Pelutan)	jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	56	24	12,00	12,00	100,00	20,00	56,00	100,00	Kelurahan Pelutan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	34	17,00	17,00	100,00	17,00	68,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	4	2,00	2,00	100,00	1,00	7,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang tersedia**	**%**	**81,11**	**81,11**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**Kelurahan Pelutan**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun**	**Laporan**	**84**	**48**	**24,00**	**24,00**	**100,00**	**12,00**	**84,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang Pelaksanaan Tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	84	48	24,00	24,00	100,00	12,00	84,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**Kelurahan Pelutan**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**kegiatan**	**12**	**6**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**12,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	14	6	3,00	3,00	100,00	5,00	14,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	18	4	2,00	2,00	100,00	12,00	18,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	20	10	5,00	5,00	100,00	5,00	20,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**Kelurahan Pelutan**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**laporan**	**20**	**10**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**20,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	10	5,00	5,00	100,00	5,00	20,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**Kelurahan Pelutan**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**Orang**	**4**	**2**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**4,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Pelutan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	2262	1380	690,00	690,00	100,00	192,00	2.262,00	100,00	Kelurahan Pelutan
7.01	**KELURAHAN PADURAKSA**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**68,09**	**68,97**	**58,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kelurahan Paduraksa**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**142**	**84**	**32,00**	**32,00**	**100,00**	**26,00**	**142,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	22	12	8,00	8,00	100,00	2,00	22,00	100,00	Kelurahan Paduraksa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Paduraksa**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**laporan**	**120**	**72**	**24,00**	**24,00**	**100,00**	**24,00**	**120,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Paduraksa**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**unit**	**49**	**25**	**15,00**	**15,00**	**100,00**	**9,00**	**49,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	9	3,00	3,00	100,00	3,00	15,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	16	12,00	12,00	100,00	6,00	34,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang tersedia**	**%**	**81,11**	**81,11**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**Kelurahan Paduraksa**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tersusun**	**laporan**	**78**	**67**	**6,00**	**6,00**	**100,00**	**5,00**	**78,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	78	67	6,00	6,00	100,00	5,00	78,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**Kelurahan Paduraksa**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**kegiatan**	**15**	**9**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**15,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	25	15	5,00	5,00	100,00	5,00	25,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	9	3	1,00	1,00	100,00	5,00	9,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	29	15	7,00	7,00	100,00	7,00	29,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**Kelurahan Paduraksa**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**Laporan**	**16**	**3**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**12,00**	**16,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	16	3	1,00	1,00	100,00	12,00	16,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**Kelurahan Paduraksa**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**Orang**	**8**	**3**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**4,00**	**8,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Paduraksa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1099	400	400,00	400,00	100,00	299,00	1.099,00	100,00	Kelurahan Paduraksa
7.01	**KELURAHAN SUGIHWARAS**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**68,09**	**68,97**	**58,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kelurahan Sugihwaras**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**169**	**105**	**32,00**	**32,00**	**100,00**	**32,00**	**169,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	40	28	6,00	6,00	100,00	6,00	40,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9	5	2,00	2,00	100,00	2,00	9,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Sugihwaras**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**laporan**	**125**	**75**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**25,00**	**125,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Sugihwaras**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**unit**	**64**	**34**	**15,00**	**15,00**	**100,00**	**15,00**	**64,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	7	2,00	2,00	100,00	2,00	11,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	46	24	11,00	11,00	100,00	11,00	46,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	3	2,00	2,00	100,00	2,00	7,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang tersedia**	**%**	**81,11**	**81,11**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	**81,11**	**100,00**	**123,29**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**Kelurahan Sugihwaras**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di**	**laporan**	**92**	**72**	**16,00**	**16,00**	**100,00**	**4,00**	**92,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Kecamatan yang tersusun										
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	72	16,00	16,00	100,00	4,00	92,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**Kelurahan Sugihwaras**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**kegiatan**	**15**	**9**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**15,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	25	15	5,00	5,00	100,00	5,00	25,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8	2	1,00	1,00	100,00	5,00	8,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	25	15	5,00	5,00	100,00	5,00	25,00	100,00	Kelurahan Sugihwaras
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Kelurahan Sugihwaras
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Dokumen	8	3	1,00	1,00	100,00	4,00	8,00	100,00	
	Hasil Kegiatan	persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Sugihwaras)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1079	265	690,00	578,00	83,77	124,00	967,00	89,62	Kelurahan Sugihwaras
7.01	**KELURAHAN MULYOHARJO**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks**	**68,09**	**68,97**	**58,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kelurahan Mulyoharjo**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**124**	**88**	**17,00**	**17,00**	**100,00**	**19,00**	**124,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	45	36	4,00	4,00	100,00	5,00	45,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	19	16	1,00	1,00	100,00	2,00	19,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Mulyoharjo**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**laporan**	**125**	**75**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**25,00**	**125,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		pelaksanaan tugas										
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Mulyoharjo**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**Unit**	**18**	**7**	**6,00**	**6,00**	**100,00**	**5,00**	**18,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	6	5,00	5,00	100,00	5,00	16,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1,00	1,00	100,00	0,00	2,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**Kelurahan Mulyoharjo**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**kegiatan**	**15**	**9**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**15,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	25	15	5,00	5,00	100,00	5,00	25,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	13	3	2,00	2,00	100,00	8,00	13,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	24	15	5,00	5,00	100,00	4,00	24,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Kelurahan Mulyoharjo
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Dokumen	8	3	1,00	1,00	100,00	4,00	8,00	100,00	
	Hasil Kegiatan	persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Mulyoharjo)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1287	550	575,00	575,00	100,00	162,00	1.287,00	100,00	Kelurahan Mulyoharjo
7.01	**KELURAHAN WIDURI**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**68,09**	**68,97**	**58,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kelurahan Widuri**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**166**	**110**	**28,00**	**28,00**	**100,00**	**28,00**	**166,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Widuri)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Widuri)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Widuri)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Widuri)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	6	2,00	2,00	100,00	2,00	10,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Widuri)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	31	29	1,00	1,00	100,00	1,00	31,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Widuri**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**laporan**	**125**	**75**	**25,00**	**25,00**	**100,00**	**25,00**	**125,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Widuri)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	5	3	1,00	1,00	100,00	1,00	5,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Widuri)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Widuri)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Widuri**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**Unit**	**35**	**19**	**7,00**	**7,00**	**100,00**	**9,00**	**35,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Widuri)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	7	2,00	2,00	100,00	2,00	11,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Widuri)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	12	5,00	5,00	100,00	7,00	24,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**Kelurahan Widuri**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**kegiatan**	**15**	**9**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**15,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Widuri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	20	12	4,00	4,00	100,00	4,00	20,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Widuri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	3	8,00	1,00	12,50	1,00	5,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Widuri)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	22	14	4,00	4,00	100,00	4,00	22,00	100,00	Kelurahan Widuri

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Kelurahan Widuri
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Dokumen	8	3	1,00	1,00	100,00	4,00	8,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	100	77,50	100,00	129,03	100,00	300,00	300,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Widuri)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1145	25	1.040,00	1.040,00	100,00	80,00	1.145,00	100,00	Kelurahan Widuri
7.01	**KELURAHAN BOJONGBATA**											

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**68,09**	**68,97**	**58,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**Kelurahan Bojongbata**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Paket, Dokumen, dan Laporan**	**232**	**121**	**56,00**	**56,00**	**100,00**	**55,00**	**232,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Bojongbata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	24	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	39	15	12,00	12,00	100,00	12,00	39,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	25	10	8,00	8,00	100,00	7,00	25,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**Kelurahan Bojongbata**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**unit**	**8**	**3**	**4,00**	**4,00**	**100,00**	**1,00**	**8,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**0**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	8	3	4,00	4,00	100,00	1,00	8,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**Kelurahan Bojongbata**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah lapora n penunjang urusan pemerintaha n daerah yang tersedia**	**Laporan**	**120**	**72**	**24,00**	**24,00**	**100,00**	**24,00**	**120,00**	**100,00**	
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan laporan penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlanca r pelaksanaan tugas**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	36	12,00	12,00	100,00	12,00	60,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**Kelurahan Bojongbata**
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahan**	**kegiatan**	**15**	**9**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**15,00**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	25	15	5,00	5,00	100,00	5,00	25,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	11	6	2,00	2,00	100,00	3,00	11,00	100,00	Kelurahan Bojongbata
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bojongbata)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	27	16	5,00	5,00	100,00	6,00	27,00	100,00	Kelurahan Bojongbata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Kelurahan Bojongbata
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Dokumen	5	0	560,00	560,00	100,00	25,00	585,00	11.700,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas	%	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bojongbata)	`	Orang	688	0	560,00	560,00	100,00	128,00	688,00	100,00	Kelurahan Bojongbata

erdasarkan tabel 2.1, capaian program/kegiatan Kecamatan Pemalang Tahun 2024 TW III sebagian besar telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2024 maupun Renstra 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan komitmen yang tinggi dari pemimpin dan seluruh pegawai di Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan tupoksinya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		83,5	83,55	83,60	83,65	84,39	86,39	83,60	83,65	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		88,53	90,07	90,07	91,61	88,53	96,92	90,07	91,61	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				58,6	0	0	0	56,74	0	0	0	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				38,5	39	39,5		54,17	65,02	39,5		
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				81,11	81,11	81,11	81,11	81,11	100	81,11	81,11	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				61,53	69,23	69,23	76,92	61,53	84,62	69,23	76,92	

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pemalang Tahun 2024 semua indikator realisasinya melebihi target, hal ini dapat dicapai oleh Kecamatan Pemalang karena adanya komitmen antara Camat dan seluruh Pegawai Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan kinerjanya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pemalang

Kecamatan Pemalang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Pemalang berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Cakupan layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
e. Persentase pelayanan publik yang tersedia

https://jdih.pemalangkab.go.id/

f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2025 IKM rata - rata semester I Kecamatan Pemalang sebesar 87,62 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Pemalang. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pemalang meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2025 TW III, cakupan layanan Kecamatan Pemalang tersebut mencapai 98,46% dimana indikator sudah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Pemalang meliputi Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Capaian kinerja persentase pelayanan public yang tersedia tahun 2025 TW III adalah 100%.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100%, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Pemalang.

Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 69,23 % yaitu sebanyak 9 desa dari 13 desa di Kecamatan Pemalang. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Pemalang.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2025, Kecamatan Pemalang mendapat nilai SAKIP sebesar 68,58 (kategori CC) dan IRB pada Tahun 2024 tidak ada penilaian untuk tingkat OPD. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Pemalang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Pemalang untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025 - 2029.

Isu – Isu Strategis Kecamatan Pemalang adalah sebagai Berikut :

1. Pelayanan Publik berbasis digital
2. Reformasi tata kelola pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Akuntabilitas kinerja yang semakin baik

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Pemerataan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pemalang sebagai akselerasi pengentasan kemiskinan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah :

"Pemalang Bercahaya – Bersih Cakap Handal Mulya"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

Resik

Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

Hijau

Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industry hijau yang berkelanjutan.

Apik

Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

Peduli

Meningkatkan Pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan masyarakat .

Silaturahmi

Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.

Organisatoris

Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur,sistematis, melayani dan mengayomi

Digitalisasi

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi yang menjadi generasi yang pintar.

Ikhlas

Menghadirkan Kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya local masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) program unggulan, yaitu :

1. Seragam sekolah dan LKS gratis
   Merupakan program pemberian seragam sekolah dan LKS gratis untuk siswa di tingkat PAUD, SD, dan SMP pada tahun ajaran baru dengan tujuan mengurangi pengeluaran biaya pendidikan.
2. Jalan halus dan merata
   Merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan kabupaten dan kelengkapannya yang memiliki banyak kerusakan agar menjadi halus dan pembangunannya merata di semua wilayah, sehingga nyaman dan aman untuk dilalui oleh pengguna jalan. Program ini dapat berbentuk

https://jdih.pemalangkab.go.id/

rekonstruksi, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin jalan.

3. Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir
   Merupakan program upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih yang tersedia bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari sumber air di hulu (mata air, sungai, danau hutan dll) hingga distribusi air di hilir (rumah tangga, industri, pertanian dll). Upaya tersebut meliputi beberapa aspek seperti perlindungan sumber air, pemeliharaan infrastruktur, pengawasan kualitas air, partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga serta penerapan teknologi dan inovasi.
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
   Merupakan strategi penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan sebagainya) melalui program pembangunan pemerintah daerah yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja sehingga tercapai penurunan pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Program pembangunan tersebut akan diarahkan pada proyek-proyek yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti: Pembangunan jalan/jembatan sederhana, revitalisasi saluran drainase, perbaikan saluran irigasi, bersih- bersih sungai/saluran irigasi dan kegiatan yang sejenisa lainnya.
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM
   Merupakan program dukungan yang diberikan pemerintah atau lembaga keuangan terkait kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Bantuan ini bisa berupa dana tunai, akses permodalan dengan bunga rendah, atau program pelatihan bisnis. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. WIFI gratis tiap desa
   Merupakan upaya pemerintah aerah dalam hal pemberian akses internet nirkabel yang disediakan secara gratis (tanpa biaya) kepada semua masyarakat perdesaan. Pada akhirnya seluruh desa terkoneksi jaringan internet, meningkatkan aksesibilitas internet dan mengurangi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
7. Satu ambulance, satu desa
   Merupakan program yang bertujuan untuk memastikan setiap desa/kelurahan memiliki fasilitas transportasi medis, dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. Program ini memiliki tujuan utama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan pelayanan publik di daerah perdesaan.
8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
   Merupakan strategi dalam mengukuhkan posisi Kabupaten Pemalang sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah dan menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Pemalang dengan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Jaminan ketersediaan bibit unggul tidak terikat hanya untuk komoditas padi tetapi juga untuk komoditas perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Sedangkan jaminan ketersediaan pupuk murah bertujuan untuk memastikan petani di Kabupaten Pemalang memiliki akses mudah dan murah terhadap pupuk yang berkualitas sesuai data Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).
9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
   Pemberian kendaraan operasional untuk pondok pesantren dalam mendukung berbagai aktivitas pendidikan, pengajaran, dakwah. Dimana keberadaan pondok pesantren ini memiliki peran penting dalam menjaga moral dan nilai-nilai di tengah masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

10. Insentif untuk guru, TPQ, Madin dan Marbot
    Pemberian insentif atau bantuan honorarium untuk guru di satuan pendidikan dasar serta guru di lingkungan TPQ, Madrasah Diniyah dan petugas di lingkungan Masjid (Marbot) dengan tujuan untuk memberikan tambahan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
11. Santuan kematian Rp 3.000.000
    Merupakan program pemberian bantuan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan akibat meninggalnya seseorang untuk meringankan beban finansial dan sosial yang ditimbulkan dari kematian tersebut. Bantuan ini dapat berupa uang tunai atau bentuk lain yang bermanfaat. Target utama program ini adalah masyarakat miskin yang terdata pada DTKS atau DTSEN serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Pekerja Rentan. Program ini akan melibatkan Dinas yang membidangi urusan Sosial terkait data DTKS atau DTSEN dan Dinas yang membidangi urusan Tenaga Kerja untuk MBR/Pekerja Rentan.
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka
    Program yang bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat dalam rangka membuka pintu tol baru yang ada di Kabupaten Pemalang sehingga semakin memudahkan akses menuju wilayah Kabupaten Pemalang serta meningkatkan peluang investasi dan perekonomian.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Pemalang mendukung misi keempat Peduli yaitu “Meningkatkan Pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan masyarakat” dan Misi ketujuh Organisatoris yaitu “Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur,sistematis, melayani dan mengayomi” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan public yang baik dengan indikator kinerja Nilai Sakip, Maturitas SPIP dan Indeks Pelayanan Publik. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan tersebut dengan melaksanakan program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Disesuaikan dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah **“Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan”** dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 adalah **“Penguatan ekonomi melalui ketahanan pangan nasional,Peningkatan kualitas sumber manusia (SDM)”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026, diarahkan pada **“Penguatan kualitas lingkungan lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan”**, dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Mewujudkan misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
b. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dab merata.
c. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
d. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
e. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Kecamatan Pemalang mendukung prioritas pembangunan penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan dengan menciptakan suasana kerja yang resik baik di lingkungan maupun di tata kelola pemerintahan, ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah, pembinaan PKK dan Posyandu, penurunan angka stunting, memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sumber daya manusia dan semakin meningkatkan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan di desa dan kelurahan.

Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Pemalang. Renja Kecamatan Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Pemalang.

TABEL 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				18.287.485.000					18.287.485.000	
7.01	KECAMATAN				18.287.485.000					18.287.485.000	
	Kecamatan Pemalang				13.607.653.684					13.607.653.684	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)	100,00	13.135.663.884	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)	100,00	13.135.663.884	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	100,00				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	100,00		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen)**	**28**	**34.875.500,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen)**	**28**	**34.875.500,00**	
7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	9.180.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	9.180.000,00	
7.01.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.520.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2.520.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.540.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.540.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.520.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2.520.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.790.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	3.790.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	18	5.785.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	18	5.785.000,00	
7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4	6.540.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4	6.540.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	500,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	500,00	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**12.322.117.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**12.322.117.000,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	110	12.320.347.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	110	12.320.347.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	-	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.770.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.770.000,00	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**1.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**1.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.03 .0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	500,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	500,00	
7.01.01.2.03 .0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	500,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	500,00	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**9.480.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**9.480.000,00**	
7.01.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	
7.01.01.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	32	9.480.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	32	9.480.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Peraturan Perundang-Undangan (Orang)					Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**171.315.444,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**171.315.444,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	4.141.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	4.141.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6.050.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6.050.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12	5.125.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12	5.125.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	90.449.444,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	90.449.444,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	9.923.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	9.923.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	4.680.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	4.680.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	50	50.946.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	50	50.946.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	500,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**108.470.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**108.470.500,00**	
7.01.01.2.07 .0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	39.514.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	39.514.000,00	
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	6.900.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pemalang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	6.900.000,00	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4	62.056.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4	62.056.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07 .0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	500,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**276.484.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**276.484.000,00**	
7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	9.440.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	9.440.000,00	
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	37.814.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	37.814.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	229.230.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	229.230.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**212.920.440,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**212.920.440,00**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	30.440.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	30.440.000,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pemalang	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	4.500.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pemalang	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	4.500.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	13.030.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	13.030.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	164.950.440,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	164.950.440,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**22.022.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**22.022.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**5.925.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**5.925.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	5.925.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	5.925.000,00	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**5**	**4.216.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**5**	**4.216.000,00**	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	500,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	4.215.000,00	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	4.215.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	500,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	500,00	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan)**	**5**	**11.881.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan)**	**5**	**11.881.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	11.880.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	11.880.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**274.829.800,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**274.829.800,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**7**	**274.828.800,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**7**	**274.828.800,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	3.005.000,00	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	3.005.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah	4	236.880.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	4	236.880.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)					Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)			
7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	34.943.800,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	34.943.800,00	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase kegiatan pemberdaya an di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**0**	**-**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Pemalang**	**Persentase kegiatan pemberdaya an di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**0**	**-**	
7.01.03.2.02 .0004	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	-	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**0**	**1.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**0**	**1.000,00**	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	1.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	1.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**5.890.500,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**5.890.500,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang**	**4**	**5.890.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang**	**4**	**5.890.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			tersusun (Laporan / Dokumen)					**tersusun (Laporan / Dokumen)**			
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	5.890.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	5.890.000,00	
7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	
7.01.04.2.02 .0001	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	500,00	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	100,00	33.676.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	100,00	33.676.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)	11	33.676.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pemalang	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)	11	33.676.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500	22.820.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500	22.820.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01 .0002	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	500,00	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	500,00	
7.01.05.2.01 .0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	4	500,00	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	4	500,00	
7.01.05.2.01 .0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	10.855.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	10.855.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**	**2,00**	**135.571.500,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**	**2,00**	**135.571.500,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**87**	**135.571.500,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Pemalang**	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**87**	**135.571.500,00**	
7.01.06.2.01 .0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	39	6.185.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	39	6.185.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	2.545.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	2.545.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	39	6.485.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	39	6.485.000,00	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	500,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12	103.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12	103.000.000,00	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	13	500,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	13	500,00	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	3.475.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	3.475.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	6.700.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3	6.700.000,00	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	500,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	500,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2	2.060.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2	2.060.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	3	5.120.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pemalang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	3	5.120.000,00	
	Kelurahan Bojongbata				**640.320.996,00**	**Kelurahan Bojongbata**				**640.320.996,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**302.485.233,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**302.485.233,00**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**91.930.733,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**91.930.733,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	6.491.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	6.491.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	7.296.200,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	7.296.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	55.730.033,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	55.730.033,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	9.513.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	9.513.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	8	12.900.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	8	12.900.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**14.290.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**14.290.000,00**	
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	-	Pengadaan Mebel	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	-	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4	14.290.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4	14.290.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**196.264.500,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**196.264.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	20.200.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	20.200.500,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	176.064.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	176.064.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**0**	**-**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**0**	**-**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Bojongbata	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	-	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Bojongbata	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**327.210.263,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**327.210.263,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**327.210.263,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**327.210.263,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	12.450.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	12.450.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	160.178.263,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	160.178.263,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	154.582.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	154.582.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**500,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	DAN KETERTIBAN UMUM		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			**KETERTIBAN UMUM**		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**10.625.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**10.625.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**10.625.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Bojongbata**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**10.625.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	91	10.625.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Bojongbata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	91	10.625.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	-	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	-	
	Kelurahan Kebondalem				**623.630.142,00**	**Kelurahan Kebondalem**				**623.630.142,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**322.731.142,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**322.731.142,00**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**38.015.142,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**38.015.142,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	4.726.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	4.726.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	-	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	3.400.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	3.400.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	21.202.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	21.202.500,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	6.190.642,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	6.190.642,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.496.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.496.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0	-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**77.182.600,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**77.182.600,00**	
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	15.500.000,00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	15.500.000,00	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	61.682.600,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	61.682.600,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**157.814.400,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**157.814.400,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	39.794.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	39.794.400,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	118.020.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	118.020.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**49.719.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**49.719.000,00**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	8.540.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	8.540.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Kebondalem	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	-	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Kebondalem	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10.430.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10.430.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	30.749.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	30.749.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**5.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**5.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**32**	**5.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**32**	**5.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	5.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	5.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**284.369.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**284.369.000,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**284.369.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Kebondalem**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**284.369.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	12.050.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	12.050.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	100.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	100.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	172.319.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	172.319.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**4.850.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**4.850.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	DAN KETERTIBAN UMUM		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			**KETERTIBAN UMUM**		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**4.850.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**4.850.000,00**	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	4.850.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	4.850.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**6.680.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**6.680.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**6.680.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Kebondalem**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**6.680.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	67	6.680.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	67	6.680.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	-	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Kebondalem	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	-	
	Kelurahan Mulyoharjo				**892.088.124,00**	**Kelurahan Mulyoharjo**				**892.088.124,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**371.864.124,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**371.864.124,00**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**121.081.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Fasilitasi Administrati f Perangkat Daerah yang Dilaksanaka n sesuai regulasi (%)**	**100**	**121.081.000,00**	
7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	2.565.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	2.565.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	99.814.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	99.814.500,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	3.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	3.500.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	15.200.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	15.200.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**22.390.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**22.390.500,00**	
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	500,00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	22.390.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	22.390.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**217.316.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**217.316.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	840.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	840.000,00	
7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	35.214.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	35.214.000,00	
7.01.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	9.380.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	9.380.000,00	
7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	171.882.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	171.882.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**11.076.124,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**11.076.124,00**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	1.074.124,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	1.074.124,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Mulyoharjo	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Mulyoharjo	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**513.123.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**513.123.000,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**513.123.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**513.123.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	10.175.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	10.175.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	265.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	265.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	237.948.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	237.948.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**900.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**900.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	DAN KETERTIBAN UMUM		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			**KETERTIBAN UMUM**		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**900.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**900.000,00**	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	450.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	450.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1	450.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1	450.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**6.200.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**6.200.500,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**6.200.500,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Mulyoharjo**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**6.200.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	74	6.200.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	74	6.200.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Mulyoharjo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	
	Kelurahan Paduraksa				**566.922.504,00**	**Kelurahan Paduraksa**				**566.922.504,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**256.794.004,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**256.794.004,00**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**76.239.844,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**76.239.844,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	2	943.530,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	2	943.530,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.490.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.490.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1.344.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1	1.344.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	43.948.314,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	43.948.314,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	4.513.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	4.513.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	500,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	5	15.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	5	15.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**33.501.160,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**33.501.160,00**	
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	7.220.000,00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	7.220.000,00	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	26.281.160,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	26.281.160,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**134.347.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**134.347.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0	500,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	17.850.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	17.850.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	500,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	500,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	116.496.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	116.496.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**12.705.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**12.705.500,00**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3.235.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3.235.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Paduraksa	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	520.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Paduraksa	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	520.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3.450.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3.450.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.500.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**42.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**42.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**4**	**42.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**4**	**42.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	42.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	42.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**251.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**251.000.000,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**251.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Paduraksa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**251.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	6.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	6.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	88.500.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	88.500.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	156.500.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	156.500.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**13.928.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**13.928.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	DAN KETERTIBAN UMUM		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			**KETERTIBAN UMUM**		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**12**	**13.928.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**12**	**13.928.000,00**	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	13.927.500,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	13.927.500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	500,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	500,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**3.200.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**3.200.500,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**3.200.500,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Paduraksa**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**3.200.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	3.200.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	3.200.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Paduraksa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	
	Kelurahan Pelutan				**743.916.096,00**	**Kelurahan Pelutan**				**743.916.096,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**422.399.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**422.399.000,00**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**0**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	
7.01.01.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**86.514.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Fasilitasi Administrati f Perangkat Daerah yang Dilaksanaka n sesuai regulasi (%)**	**100**	**86.514.000,00**	
7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	1.785.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	1.785.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.400.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.400.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12.495.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	12.495.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	8.034.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	8.034.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	52.800.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	52.800.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**77.280.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**77.280.500,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	500,00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Pelutan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	77.280.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	77.280.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**109.338.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**109.338.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	1.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	1.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	21.180.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	21.180.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	86.658.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	86.658.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**149.266.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**149.266.500,00**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	21.080.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	21.080.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pelutan	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	3.250.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Pelutan	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	3.250.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	124.936.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	124.936.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Pelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**22.500.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**22.500.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**24**	**22.500.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**24**	**22.500.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	22.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24	22.500.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**279.516.096,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**279.516.096,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**279.516.096,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Pelutan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**279.516.096,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	3	13.200.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	3	13.200.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	95.850.096,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	95.850.096,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	170.466.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	170.466.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**6.000.500,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**6.000.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	DAN KETERTIBAN UMUM		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			**KETERTIBAN UMUM**		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**5**	**6.000.500,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**5**	**6.000.500,00**	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	6.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	6.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	500,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	500,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**13.500.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**13.500.500,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**13.500.500,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Pelutan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**13.500.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Pelutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	150	13.500.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Pelutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	150	13.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Pelutan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	
	Kelurahan Sugihwaras				**617.481.276,00**	**Kelurahan Sugihwaras**				**617.481.276,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**279.796.776,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**279.796.776,00**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**38.957.276,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**38.957.276,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	6	1.501.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	6	1.501.500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2.221.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2.221.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	5	3.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	5	3.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	20.920.050,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	20.920.050,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	3.814.726,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	3.814.726,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	4.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	4.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**48.630.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**48.630.000,00**	
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	6.000.000,00	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	42.630.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	42.630.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**147.106.500,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**147.106.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	300.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	300.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	14.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	14.400.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	500,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	500,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	132.406.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	132.406.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**45.102.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**45.102.500,00**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	5.570.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	5.570.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Sugihwaras	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Sugihwaras	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	6.940.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	6.940.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	32.592.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	32.592.000,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**16.500.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**16.500.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**4**	**16.500.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**4**	**16.500.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	16.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	16.500.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**315.634.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**315.634.000,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**315.634.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**315.634.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	15.634.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	15.634.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	102.566.065,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	102.566.065,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	197.433.935,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	197.433.935,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**500,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	DAN KETERTIBAN UMUM		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			**KETERTIBAN UMUM**		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**5.550.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**5.550.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**3**	**5.550.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Sugihwaras**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**3**	**5.550.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200	4.650.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200	4.650.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	900.000,00	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	900.000,00	
	Kelurahan Widuri				**595.472.178,00**	**Kelurahan Widuri**				**595.472.178,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**326.700.178,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**326.700.178,00**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**		
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	-	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**70.170.678,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**70.170.678,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	2.142.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	2.142.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0	500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	59.649.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	59.649.700,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	2.209.978,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12	2.209.978,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.168.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3.168.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	3.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	3.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**66.056.500,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**66.056.500,00**	
7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	500,00	Pengadaan Mebel	Kelurahan Widuri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	66.056.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	66.056.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**176.721.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**176.721.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1	600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.615.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.615.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	160.506.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	160.506.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**13.751.500,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**13.751.500,00**	
7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	-	
7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	5.670.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	5.670.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Widuri	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Widuri	jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	8.080.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	8.080.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Widuri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	500,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**73,33**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**-**	
7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**261.370.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**261.370.000,00**	
			Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)	**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**65,00**		
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**261.370.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Widuri**	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**261.370.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Widuri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	4	11.370.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Widuri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	4	11.370.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Widuri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	81.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Widuri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	81.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Widuri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	169.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Widuri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	169.000.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**1.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**		**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100,00**	**1.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	DAN KETERTIBAN UMUM		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			**KETERTIBAN UMUM**		**ketertiban umum yang ditangani (%)**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**1.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**1.000,00**	
7.01.04.2.01 .0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01 .0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	500,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0	500,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**7.400.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**7.400.500,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**7.400.500,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Widuri**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**7.400.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Widuri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	96	7.400.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Widuri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	96	7.400.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Widuri	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Gedung Posyandu	Kelurahan Sugihwaras	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	9 m x 5 m	1
2	Normalisasi Kali Klepu	Desa Tambakrejo	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	975 m x 2 m	2
3	Pembangunan Joging Track	Desa Sungapan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	350 x 1 m	3
4	Pengaspalan Jalan Surajaya – Karangggandul	Desa Surajaya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2.500 x 3 m	4
5	Makadam tanah pertanian	Desa Banjarmulya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	2.400 m x 2 m	5
6	Pengadaan Incinerator	Desa Sewaka	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Paket	6
7	Revitalisasi TPS3R (incinerator)	Kelurahan Bojongbata	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 unit	7
8	Revitalisasi TPS3R	Desa Bojongnangka	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 paket	8
9	Pelatihan Tata Boga (Pembuatan Kue Kering)	Kelurahan Kebondalem	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	20 orang	1
10	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Kelurahan Widuri	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 Orang	2
11	Pelatihan Tata Boga (Memasak)	Desa Lawangrejo	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 orang	3

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Pemalang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Pemalang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Kecamatan Pemalang Tahun 2025 - 2029

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dab merata.
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pemalang

Kecamatan Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Pemalang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Pemalang tahun 2026 adalah **"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan".** Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pemalang sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator mandiri di Wilayah Kecamatan

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pemalang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pemalang tahun 2026, adalah "**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator IKM dan Nilai SAKIP OPD.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pemalang tahun 2025 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pemalang Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	76,92
2		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	Indeks	86,65
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	65,10

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Pemalang merencanakan sebanyak 6 program, 65 kegiatan dan 219 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp 18.287.485.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAU Terarah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEMALANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
      b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
      c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
   d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   i. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

https://jdih.pemalangkab.go.id/

j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pemalang Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2026					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					18.287.485.000,00					18.355.138.498,00
7.01	KECAMATAN					18.287.485.000,00					18.355.138.498,00
	Kecamatan Pemalang					13.607.653.684,00					13.807.058.398,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)				13.135.663.884,00			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)	100,00	13.288.877.958,00
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**0**	**34.875.500,00**	**DAU**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen)**	**5**	**17.748.200,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2 Dokumen		9.180.000,00	DAU		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2 Dokumen	2.818.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		2.520.000,00	DAU		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1.369.500,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		4.540.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1.679.700,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		2.520.000,00	DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1.553.700,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		3.790.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1.457.700,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	18 Dokumen		5.785.000,00	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	18 Dokumen	2.868.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4 Dokumen		6.540.000,00	DAU		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4	4.001.600,00
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0		500,00	DAU		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1 Dokumen	2.000.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**100**	**12.322.117.000,00**	**DAU**		**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**12.321.459.400,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	110 Orang		12.320.347.000,00	DAU		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	110 Orang	12.320.347.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0		-	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4 Dokumen	500.000,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan		1.770.000,00	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	612.400,00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**100**	**1.000,00**	**DAU**		**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**1.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**100**	**9.480.000,00**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**3.628.000,00**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	1.000.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	32 Orang		9.480.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	32 Orang	2.628.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**171.315.444,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**238.421.320,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		4.141.000,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	4.254.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket		6.050.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	1.500.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket		5.125.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	9.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		90.449.444,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	98.997.020,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		9.923.500,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	7.324.300,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen		4.680.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Laporan	4.020.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	50 Laporan		50.946.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	100 Laporan	112.826.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0		500,00	DAU		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**108.470.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**183.948.098,00**
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit		39.514.000,00	DAU		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	33.815.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit		6.900.000,00	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit	6.500.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit		62.056.000,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	9 Unit	121.120.000,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	22.513.098,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**276.484.000,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**294.076.000,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan		9.440.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	2.362.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		37.814.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	37.680.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		229.230.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	254.034.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**212.920.440,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**228.596.940,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	5.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14 Unit		30.440.000,00	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14 Unit	23.237.500,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15 Unit		4.500.000,00	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	4.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19 Unit		13.030.000,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19 Unit	13.030.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit		164.950.440,00	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	132.829.440,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	50.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**22.022.000,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**12.255.800,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**5.925.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**2.045.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen		5.925.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen	2.045.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**0**	**4.216.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**2.170.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1 Dokumen		500,00	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1 Dokumen	500.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan		4.215.000,00	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	1.170.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan		500,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**0**	**11.881.000,00**	**DAU**		**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan)**	**0**	**8.040.800,00**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4 Laporan		11.880.000,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4 Laporan	7.540.800,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1 Laporan		1.000,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**				**274.829.800,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**459.471.240,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)							**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**0**	**274.828.800,00**	**DAU**		**Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**458.471.240,00**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1 Lembaga		3.005.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1 Lembaga	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen		236.880.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen	432.920.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan		34.943.800,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	25.051.240,00
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**0**	**-**	**DAU**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**500.000,00**
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2 Laporan	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**0**	**1.000,00**			**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**4 Lembaga**	**500.000,00**
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		1.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4 Lembaga	500.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**		**100,00**		**5.890.500,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**2.130.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**0**	**5.890.000,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**1.880.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Laporan		5.890.000,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Laporan	1.630.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**		**0**	**500,00**	**DAU**		**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**250.000,00**
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1 Laporan	250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)				33.676.000,00			Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)	100,00	24.418.400,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)	11	DAU	33.676.000,00	DAU		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)	#VALUE!	24.418.400,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500 Orang		22.820.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500 Orang	16.063.400,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30 Orang		500,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30 Orang	500.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	4 Laporan		500,00	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	4 Laporan	500.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen		10.855.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4 Laporan	7.355.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**				**135.571.500,00**			**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**	**3,00**	**19.905.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**87**	**135.571.500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**87**	**19.905.000,00**
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	39 Dokumen		6.185.000,00	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	39 Dokumen	3.645.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13 Dokumen		2.545.000,00	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13 Dokumen	1.585.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	39 Dokumen		6.485.000,00	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	39 Dokumen	3.355.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2 Dokumen		500,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2 Dokumen	500.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12 Dokumen		103.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	500.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	13 Dokumen		500,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	0	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Permusyawaratan Desa (Dokumen)						Permusyawaratan Desa (Dokumen)		
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0		3.475.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	5 Dokumen	1.575.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3 Dokumen		6.700.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	3 Dokumen	3.510.000,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0		500,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1 Dokumen	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2 Dokumen		2.060.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2 Dokumen	1.435.000,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	3 Dokumen		5.120.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	3 Dokumen	2.800.000,00
	Kelurahan Bojongbata					**640.320.996,00**					**651.529.775,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**			**100,00**	**302.485.233,00**			**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**363.011.915,00**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)			**100,00**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**-**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**2.500.000,00**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	500.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		-	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	2.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**91.930.733,00**			**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**101.766.415,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		6.491.000,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	4.059.500,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket		7.296.200,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	7.410.950,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	500.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		55.730.033,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	53.187.165,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		9.513.500,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	1.978.800,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		-	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	8 Laporan		12.900.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	25 Laporan	34.130.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**14.290.000,00**			**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**59.175.000,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2 Unit	500.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit		14.290.000,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	7 Unit	58.675.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**196.264.500,00**			**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**147.570.500,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		20.200.500,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	18.650.500,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		176.064.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	127.920.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**0**	**-**			**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**52.000.000,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1 Unit	250.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0		-	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	50.250.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	250.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**		**73,33**	**-**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**-**			**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**250.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	250.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**0**	**-**			**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**250.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	250.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**				**327.210.263,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**285.066.260,00**
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)							**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**100**	**327.210.263,00**	**DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**285.066.260,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Unit		12.450.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Lembaga	10.350.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit		160.178.263,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit	128.800.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas		154.582.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas	145.916.260,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**			**100,00**	**500,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**500.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**0**	**500,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**500.000,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	250.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**			**100,00**	**10.625.000,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**2.451.600,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2**	**10.625.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**2.451.600,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	91 Orang		10.625.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	91 Orang	1.951.600,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2 Laporan	500.000,00
	Kelurahan Kebondalem					**623.630.142,00**					**654.131.625,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**				**322.731.142,00**			**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**377.999.350,00**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**-**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**2.500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	500.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		-	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	2.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**38.015.142,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**86.426.100,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Unit		4.726.000,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	4.228.500,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1 Unit		3.400.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	3.300.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Unit		21.202.500,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	46.555.600,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Unit		6.190.642,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	3.842.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Unit		2.496.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Paket	2.500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	25 Laporan	25.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**77.182.600,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**59.530.000,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit		15.500.000,00	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2 Unit		61.682.600,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	5 Unit	59.030.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**157.814.400,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**147.055.500,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		39.794.400,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	25.635.500,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		118.020.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	120.420.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**49.719.000,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**82.487.750,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	-	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7 Unit	7	8.540.000,00	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7 Unit	6.766.750,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	-	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	10	10.430.000,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	8.910.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	1	30.749.000,00	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	65.311.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	-	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**5.000.000,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**3.500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**-**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**250.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2 Dokumen	250.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**24**	**5.000.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**3.250.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24 Laporan		5.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	3.250.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**				**284.369.000,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**263.950.000,00**
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)							**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**100**	**284.369.000,00**	**DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**263.950.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Unit		12.050.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Unit	10.550.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit		100.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit	80.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3 Pokmas / Ormas		172.319.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3 Pokmas / Ormas	173.400.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**				**4.850.000,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**3.092.275,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**2**	**4.850.000,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**3.092.275,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan		4.850.000,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	2.592.275,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**				**6.680.000,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**5.590.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2**	**6.680.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**5.590.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	67 Orang		6.680.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	67 Orang	5.090.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2 Laporan	500.000,00
	Kelurahan Mulyoharjo					**892.088.124,00**					**767.217.350,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**				**371.864.124,00**			**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**402.172.550,00**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**100**	**500,00**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**2.500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	500.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		-	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	2.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**121.081.000,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**112.796.450,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket		2.565.000,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	952.500,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	500.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		99.814.500,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	78.093.150,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		3.500.000,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	500.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		500,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan		15.200.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	25 Laporan	31.750.800,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**22.390.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**51.000.000,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit		22.390.000,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	50.500.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**217.316.000,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**185.016.000,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan		840.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		35.214.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	33.714.000,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan		9.380.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	2.500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		171.882.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	148.302.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**11.076.124,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**50.860.100,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	100.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit		1.074.124,00	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5 Unit	360.100,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0		500,00	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	100.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 Unit	100.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit		10.000.000,00	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	50.100.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	100.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**500,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**-**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**250.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2 Dokumen	250.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**0**	**500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**250.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	250.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**			**100,00**	**513.123.000,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**361.684.800,00**
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)			**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**100**	**513.123.000,00**	**DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**361.684.800,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Unit		10.175.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Lembaga	8.630.400,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit		265.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit	115.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas		237.948.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas	238.054.400,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**				**900.000,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**500.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**2**	**900.000,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**500.000,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan		450.000,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan		450.000,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	250.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**				**6.200.500,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**2.360.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2**	**6.200.500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**2.360.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	74 Orang		6.200.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	74 Orang	1.860.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2 Laporan	500.000,00
	Kelurahan Paduraksa					**566.922.504,00**					**572.407.275,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**				**256.794.004,00**			**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**308.358.875,00**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**100**	**500,00**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**3.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	1.000.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		-	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	2.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**76.239.844,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**83.458.875,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket		943.530,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	500.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket		10.490.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	1.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1 Paket		1.344.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	1.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		43.948.314,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	52.458.875,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		4.513.500,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		500,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dokumen	500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	5 Laporan		15.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	25 Laporan	26.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**33.501.160,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**54.000.000,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit		7.220.000,00	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2 Unit		26.281.160,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	5 Unit	53.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**134.347.000,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**95.950.000,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		17.850.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	18.774.000,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		116.496.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	76.176.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**12.705.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**71.950.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3 Unit		3.235.000,00	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3 Unit	450.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5 Unit		520.000,00	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3 Unit		3.450.000,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3 Unit	1.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit		5.500.000,00	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	64.500.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	4.500.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**42.000.000,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**27.368.400,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**-**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**250.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2 Dokumen	250.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**4**	**42.000.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**27.118.400,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3 Laporan		42.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	27.118.400,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**				**251.000.000,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**228.730.000,00**
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)							**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**100**	**251.000.000,00**	**DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**228.730.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Unit		6.000.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Lembaga	4.730.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1 Unit		88.500.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1 Unit	80.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas / Ormas		156.500.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas / Ormas	144.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**				**13.928.000,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**7.260.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**12**	**13.928.000,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**13**	**7.260.000,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan		13.927.500,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	6.260.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	1.000.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**				**3.200.500,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**690.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2**	**3.200.500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**690.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100 Orang		3.200.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100 Orang	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2 Laporan	190.000,00
	Kelurahan Pelutan					**743.916.096,00**					**692.359.300,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**				**422.399.000,00**			**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**418.588.300,00**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**0**	**-**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**2.500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	500.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		-	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	2.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**86.514.000,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**136.769.300,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		1.785.000,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	2.192.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket		8.400.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	200.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	500.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		12.495.000,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	76.915.100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		8.034.000,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	3.362.200,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen		3.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	3.600.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan		52.800.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	25 Laporan	50.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**77.280.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**71.000.000,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1 Laporan		77.280.000,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	70.500.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**109.338.000,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**119.261.500,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan		1.500.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	767.500,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		21.180.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	12.790.000,00
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		86.658.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	105.204.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**149.266.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**89.057.500,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3 Unit		21.080.000,00	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3 Unit	4.660.500,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12 Unit		3.250.000,00	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12 Unit	4.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17 Unit	5.080.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit		124.936.000,00	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	74.317.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**22.500.000,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**4.561.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**-**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**250.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	250.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**24**	**22.500.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**4.311.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	24 Laporan		22.500.000,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	4.311.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**			**100,00**	**279.516.096,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**257.660.000,00**
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)			**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**100**	**279.516.096,00**	**DAU**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**257.660.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	3 Unit		13.200.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	3 Unit	6.660.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit		95.850.096,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2 Unit	72.700.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas		170.466.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas	178.300.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**				**6.000.500,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**3.600.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**5**	**6.000.500,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**6**	**3.600.000,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Laporan		6.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Laporan	3.100.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**				**13.500.500,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**7.950.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2**	**13.500.500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**7.950.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	150 Orang		13.500.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	150 Oarang	7.450.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2 Laporan	500.000,00
	Kelurahan Sugihwaras					**617.481.276,00**					**635.187.575,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**				**279.796.776,00**			**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**352.932.099,00**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**100**	**500,00**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**2.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	500.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		-	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	1.500.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**38.957.276,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**83.477.600,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	6 Paket		1.501.500,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	6 Paket	1.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket		2.221.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	5 Paket		3.500.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		20.920.050,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	42.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		3.814.726,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	1.797.600,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen		3.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	2.680.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan		4.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	25 Laporan	30.000.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**48.630.000,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**52.949.499,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2 Unit		6.000.000,00	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2 Unit	1.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit		42.630.000,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	51.949.499,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**147.106.500,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**131.865.000,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan		300.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	340.500,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		14.400.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	14.004.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	520.500,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		132.406.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	117.000.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**45.102.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**82.640.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	10.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit		5.570.000,00	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	5.570.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0		500,00	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	1.400.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11 Unit		6.940.000,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11 Unit	7.650.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	50.010.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit		32.592.000,00	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	18.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**16.500.000,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**16.140.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**		**0**	**-**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**250.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	-	-	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2 Dokumen	250.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**		**4**	**16.500.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**15.890.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Laporan		16.500.000,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	15.890.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**				**315.634.000,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**259.680.476,00**
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)							**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**100**	**315.634.000,00**	**DAU DAU Tambahan Dukungan Penda**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**259.680.476,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							naan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Lembaga		15.634.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5 Lembaga	11.080.040,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1 Unit		102.566.065,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1 Unit	81.223.936,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas		197.433.935,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5 Pokmas / Ormas	167.376.500,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**				**500,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**500.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**0**	**500,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	250.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	250.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**				**5.550.000,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**5.935.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**3**	**5.550.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**5.935.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200 Orang		4.650.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200 Orang	5.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1 Laporan		900.000,00	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2 Laporan	935.000,00
	Kelurahan Widuri					**595.472.178,00**					**575.247.200,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**				**326.700.178,00**			**Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)**	**100,00**	**341.122.200,00**
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)**	**100,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**100**	**500,00**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**2.800.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	800.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		-	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20 Orang	2.000.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**70.170.678,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**82.386.200,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1 paket		2.142.000,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	1.225.500,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	497.900,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	12 Paket	500.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		59.649.700,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	48.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		2.209.978,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	1.522.800,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Laporan		3.168.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen	2.640.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan		3.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	25 Laporan	28.000.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**66.056.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**58.000.000,00**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1 Unit	5.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1 Unit		66.056.000,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	53.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**176.721.000,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**123.726.000,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan		600.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		15.615.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	15.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan		160.506.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	107.226.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**13.751.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**74.210.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	500.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 unit		5.670.000,00	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 unit	4.150.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0		500,00	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	1.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5 unit		8.080.000,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	4.060.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	59.500.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		500,00	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	5.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**500,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**-**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**250.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		-	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2 Dokumen	250.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**0**	**500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**2**	**250.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	250.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**			**100,00**	**261.370.000,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**228.725.000,00**
		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)			**65,00**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**100**	**261.370.000,00**	**DAU DAU Tambahan Dukungan Penda**		**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan yang terlaksana sesuai ketentuan (%)**	**100**	**228.725.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							naan Kelurahan				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	4 Lembaga		11.370.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	4 Lembaga	4.725.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1 Unit		81.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1 Unit	82.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4 Pokmas/Ormas		169.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4 Pokmas / Ormass	141.500.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**			**100,00**	**1.000,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**500.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**0**	**1.000,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**2**	**500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	250.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	250.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**				**7.400.500,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**4.400.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2 dokumen**	**7.400.500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**4**	**4.400.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	96 Orang		7.400.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	96 Orang	4.200.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0		500,00	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1 Laporan	200.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025-2029.
2. Renja Kecamatan Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pemalang Tahun 2026 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pemalang Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Pemalang Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Pemalang Tahun 2026.

CAMAT PEMALANG

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19690318 199803 1 012

https://jdih.pemalangkab.go.id/

CC. RENCANA KERJA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Taman tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Taman yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Taman merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Taman yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Taman melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Taman dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Taman mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Taman mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Taman dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Kecamatan Taman tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
2. Penyusunan rancangan awal
   - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   - Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan 2
3. Hasil Perumusan rancangan awal
   - Pendahuluan
   - Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
   - Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
   - Rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah; dan
   - Penutup
4. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Taman tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Taman
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Taman tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Taman
Tahun 2026

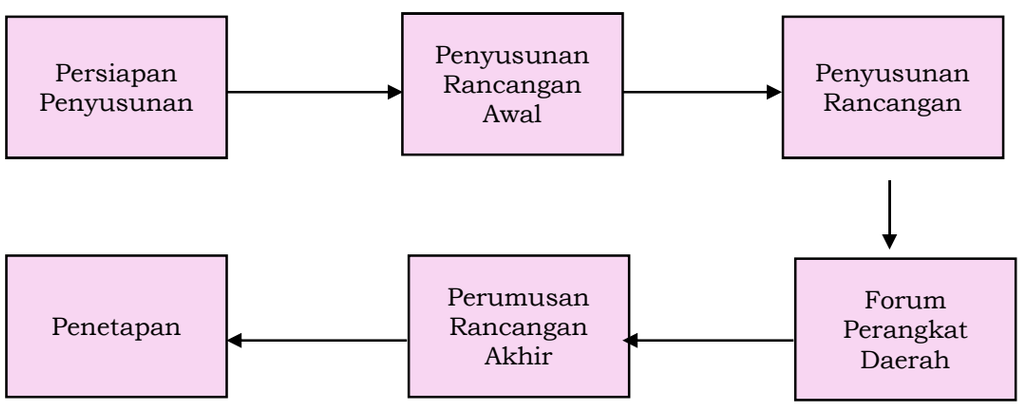

Renja Kecamatan Taman tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Taman tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

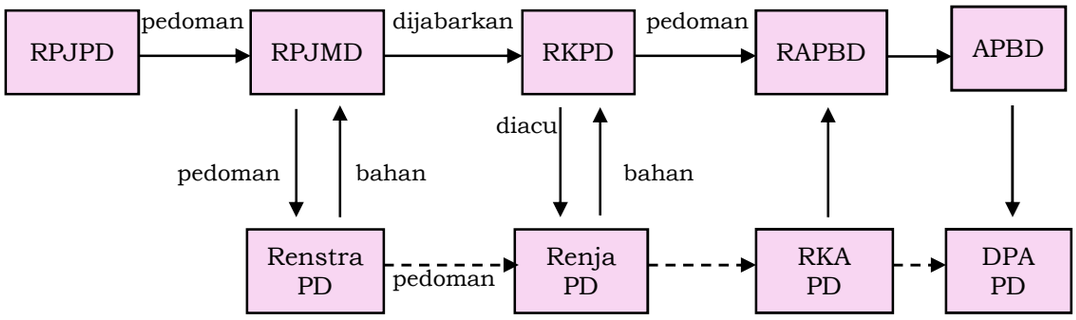

Renja Kecamatan Taman berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Taman tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Taman Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Taman adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Taman tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Taman sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Taman;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Taman tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Taman tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Taman Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Taman tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Taman, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Taman, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Taman, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Taman, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Taman, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Taman, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Taman.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Taman Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Taman

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Taman pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Taman sebesar Rp7.079.080.000 yang terbagi dalam 6 program, 18 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp7.157.695.085 atau sebesar 93,39%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Taman sebesar Rp6.784.325.500 yang terbagi dalam 6 program, 18 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 3.956.334.507 atau sebesar 58,32%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023, Kecamatan Taman telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan menyesuaikan kebutuhan

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Taman telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 18 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Tidak ada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Taman yaitu tercapai di tahun 2024;
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
   b. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Taman;
   c. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP ;
   d. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
   e. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Taman dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang sebagai berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Taman dan Pencapaian Renstra Kecamatan Taman s/d Tahun 2024
Kabupaten Pemalang

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program /Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
'7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	500	100	100	100	100	100	300	60
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	500	100	100	100	100	100	300	60
		Indeks Reformasi Birokrasi	*114,32*	*42,98*	*31,97*	*31,97*	*100*	*32,25*	*106,92*	*100*
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	*108,36*	*49,60*	*33,90*	*59,9*	*176,70*	*33,95*	*143,4*	*100*
7.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	***41***	***13***	***13***	***13***	***100***	***15***	***41***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*2*	*4*	*100*
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*2*	*4*	*100*
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*3*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*3*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*100*
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*3*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*100*
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*12*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*100*
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*12*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*100*
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**30**	**6**	**6**	**6**	**100**	**6**	**18**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	***30***	***6***	***6***	***6***	***100***	***7***	***19***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan keuangan tersusun sesuai regulasi**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175/60	45/12	40/12	40/12	100	30/12	115/36	65
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*145/48*	*45/12*	*45/12*	*45/12*	*100*	*40/12*	*130/48*	*90*
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*75*
7.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*12*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*100*
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai Regulasi**	**90**	**30**	**30**	**30**	**100**	**30**	**90**	**100**
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	***90***	***30***	***30***	***30***	***100***	***30***	***90***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai Regulasi**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90	30	30	30	100	30	90	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*90*	*30*	*30*	*30*	*100*	*30*	*90*	*100*
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksanakan**	**360**	**72**	**72**	**72**	**100**	**72**	**216**	**60**
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***288***	***72***	***72***	***72***	***100***	***72***	***216***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	*100*
7.01.01.2.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**17**	**6**	**2**	**2**	**100**	**7**	**15**	**88**
		Jumlah barang milik daerah penunjang	***10***	***6***	***2***	***2***	***100***	***2***	***10***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		urusan pemerintah yang tersedia								
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	6	2	2	100	7	15	88
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*10*	*6*	*2*	*2*	*100*	*2*	*10*	*100*
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	***180***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***60***
		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***144***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara**	**140**	**28**	**28**	**28**	**100**	**28**	**84**	**60**
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**310**	**63,33**	**63,33**	**63,33**	**100**	**63,33**	**190**	**60**
		Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	***261,12***	***87,78***	***85,56***	***87,78***	***100***	***85,56***	***261,12***	***100***
7.01.02.2.01	**Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**40**	**8**	**8**	**8**	**100**	**8**	**24**	**60**
		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	***32***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerinah dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerinah dan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jenis data pemerintahan yang tersedia	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 2.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**90**	**18**	**18**	**18**	**100**	**18**	**54**	**60**
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 2.2.02. 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 2.2.02. 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20	4	4	4	100	4	12	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**175**	**35**	**35**	**35**	**100**	**35**	**105**	**60**
		Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***140***	***35***	***35***	***35***	***100***	***35***	***105***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 2.2.04. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 2.2.04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**370**	**74**	**78**	**78**	**100**	**78**	**230**	**60**
		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	***246***	***100***	***82***	***100***	***100***	***83***	***246***	***100***
7.01.0 3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**105**	**21**	**21**	**21**	**100**	**21**	**63**	**60**
		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***128***	***32***	***32***	***32***	***100***	***32***	***96***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	95	19	19	19	100	19	57	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 3.2.01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*75*
7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang difasilitasi**								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang aktif	***9***	***3***	***3***	***3***	***100***	***3***	***9***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 4.2.01	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	***500***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***60***
		Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***48***	***12***	***12***	***12***	***100***	***12***	***36***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 4.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun**	**20**	**4**	**4**	**4**	**100**	**4**	**12**	**60**
		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***16***	***4***	***4***	***4***	***100***	***4***	***12***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 4.2.02. 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**65**	**13**	**13**	**13**	**100**	**13**	**39**	**60**
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***52***	***13***	***13***	***13***	***100***	***13***	***39***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	100	100	100	100	100	300	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	100	100	100	100	100	300	75
7.01.0 5.2.01. 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	30	30	30	100	30	90	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*120*	*30*	*30*	*30*	*100*	*30*	*90*	*75*
7.01.0 5.2.01. 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	4	4	4	100	4	12	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	4	4	4	100	4	12	75
7.01.0 5.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dsa yang naik statusnya**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	***126,3***	***47,36***	***26,32***	***47,36***	***179,93***	***31,58***	***126,3***	***100***
7.01.0 6.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**95**	**19**	**19**	**19**	**100**	**19**	**57**	**60**
		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***76***	***19***	***19***	***19***	***100***	***19***	***57***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 6.2.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	105	21	21	21	100	21	63	60
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*84*	*21*	*21*	*21*	*100*	*21*	*63*	*75*
7.01.0 6.2.01. 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	20	4	4	4	100	4	12	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Desa								
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 6.2.01. 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
KELURAHAN WANAREJAN SELATAN										
'7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Indeks Reformasi Birokrasi	***114,32***	***42,98***	***31,97***	***31,97***	***100***	***32,25***	***106,92***	***100***
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	***108,36***	***49,60***	***33,90***	***59,9***	***176,70***	***33,95***	***143,4***	***100***
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksanakan**	**250**	**50**	**50**	**50**	**100**	**50**	**150**	**60**
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***200***	***50***	***50***	***50***	***100***	***50***	***150***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*8*	*2*	*2*	*2*	*100*	*2*	*6*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	***180***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***60***
		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***144***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**140**	**28**	**28**	**28**	**100**	**28**	**84**	**60**
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**								
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	1	1	1	100	1	3	75
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**310**	**63,33**	**63,33**	**63,33**	**100**	**63,33**	**190**	**60**
		Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	***261,12***	***87,78***	***85,56***	***87,78***	***100***	***85,56***	***261,12***	***100***
7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	90	18	18	18	100	18	54	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	*112*	*28*	*28*	*28*	*100*	*28*	*84*	*75*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**370**	**74**	**78**	**78**	**100**	**78**	**230**	**60**
		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	***246***	***100***	***82***	***100***	***100***	***83***	***246***	***100***
7.01.0 3.2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**45**	**9**	**9**	**9**	**100**	**9**	**27**	**60**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	***36***	***9***	***8***	***8***	***100***	***9***	***26***	***72***
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*20*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*60*
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 3.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*8*	*2*	*1*	*1*	*100*	*2*	*5*	*62,5*
7.01.0 3.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 4.2.01	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	***500***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***60***
		Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan**	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		ketertiban umum yang tersusun								
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***48***	***12***	***12***	***12***	***100***	***12***	***36***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala**	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		daerah yang tersusun								
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	100	100	100	100	100	300	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*325*	*20*	*20*	*20*	*100*	*285*	*325*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KELURAHAN BEJI										
'7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksanakan**	**360**	**72**	**72**	**72**	**100**	**72**	**216**	**60**
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***360***	***72***	***72***	***72***	***100***	***72***	***216***	***60***
	Hasil Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*8*	*2*	*2*	*2*	*100*	*2*	*6*	*75*
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**17**	**6**	**2**	**2**	**100**	**7**	**15**	**88**
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***10***	***6***	***2***	***2***	***100***	***2***	***10***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	6	2	2	100	7	15	88
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*10*	*6*	*2*	*2*	*100*	*2*	*10*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	***180***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***60***
		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***144***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**140**	**28**	**28**	**28**	**100**	**28**	**84**	**60**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**								
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	1	1	1	100	1	3	75
7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**370**	**74**	**78**	**78**	**100**	**78**	**230**	**60**
		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	***246***	***100***	***82***	***100***	***100***	***83***	***246***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 3.2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**45**	**9**	**9**	**9**	**100**	**9**	**27**	**60**
		Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	***36***	***9***	***8***	***8***	***100***	***9***	***26***	***72***
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*20*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*60*
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 3.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*8*	*2*	*1*	*1*	*100*	*2*	*5*	*62,5*
7.01.0 3.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang difasilitasi**								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang aktif	***9***	***3***	***3***	***3***	***100***	***3***	***9***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.03. 02	Penyelenggaraa Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	100	100	100	100	100	300	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*325*	*20*	*20*	*20*	*100*	*285*	*325*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Taman Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan 2027, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%		√		21,05	21,05	21,05	26,31	21,05	21,05	21,05	26,31	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	*Indeks*		√		*83,5*	*85,5*	*87,5*	*87,5*	*85,025*	-	*87,5*	*87,5*	
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		85,025	86,60	86,65	86,70	85,025	86,60	86,65	86,70	
	Nilai SAKIP	Nilai		√		60,25	60,45	60,55	60,65	60,25	67,56	60,55	60,65	
	Cakupan layanan kecamatan	*%*		√		*80,23*	*80,43*	*82,73*	*82,73*	*87,03*	*87,03*	*82,73*	*82,73*	
3	Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Reformasi Birokrasi	*Indeks*				*32,25*	*33,00*	*33,55*	*33,55*	-	-	*33,55*	*33,55*	
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	*Nilai*				*33,95*	*34,00*	*34,04*	*34,04*	*60,25*	*67,56*	*34,04*	*34,04*	
4	Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%				63,33	63,33	66,66	66,66	63,33	63,33	66,66	66,66	
	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	*%*				*85,56*	*85,56*	*85,56*	*85,56*	*87,78*	*87,78*	*85,56*	*85,56*	
5	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%				78	78	78	80	78	78	78	80	
	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	*%*				*84*	*85*	*86*	*86*	*100*	*100*	*86*	*86*	
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	*%*				*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
7	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	*%*				*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
8	Jumlah desa yang naik statusnya	desa				4	4	4	5	4	4	4	5	
	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	*%*				*31,58*	*31,58*	*42,1*	*42,1*	*47,36*	-	*42,1*	*42,1*	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Taman

Kecamatan Taman adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Taman berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat dari :

a. Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan
b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi
e. Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja sesuai regulasi
f. Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun
g. Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif
h. Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)
i. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
j. Persentase konflik di masyarakat yang ditangani
k. Jumlah desa yang naik statusnya

Pada tahun 2024 persentase desa dengan status mandiri Kecamatan Taman sebesar 21,05 persentase tersebut sesuai dengan target 2024. IKM Kecamatan Taman sebesar 85,025 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Taman. Kemudian Nilai SAKIP Kecamatan Taman tercapai 60,25 dimana nilai tersebut setiap tahun terus meningkat.

Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi 100% dan persentase dokumen perencanaan,keuangan, dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100%. Untuk persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksnakan setiap tahun terlaksana 19 kewenangan dari total 30 Jenis kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 63,33%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100%, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Persentase sarana prasarana keluarahan dalam kondisi baik sudah 78%. Persentase jalan kewenanan kelurahan kondisi baik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan kelurahan sangat baik dalam menangani kerusakan pada jalan dan perlu ditingkatkan lagi meskipun sudah sesuai target.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang ditangani masing-masing tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Pada tahun 2021 - 2025 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Sedangkan untuk indikator persentase desa yang naik statusnya ada 4 desa. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Taman.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Taman perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Taman untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Taman yaitu :

a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
b. Personal/ petugas layanan yang memasuki masa pensiunsa serta pendampingan malam kurang memadai
c. Fasilitasi saat monitoring musdes dan monev pendampingan desa serta pendampingan malam kurang memadai
d. Pada Desa-desa yang ada pada Kecamatan Taman sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi
e. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
f. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Taman juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM di Kecamatan Taman
c. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan yang baik
e. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
f. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi ewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro

6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Taman mendukung Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Dicapai melalui tujuan meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dengan sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Taman sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

Tema daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan pada Rantekno RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada Tema **"Penguatan Landasan Transformasi"**. Tahap pertama ini diarahkan pada kebijakan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 di prioritaskan pada:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tema, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada "**Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**, Kebijakan pembangunan tersebut di prioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak
5. Peningkatan produktivitas ekonomi

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Taman tahun 2025, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Taman mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Taman adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Adanya peraturan terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

   Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Taman.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Taman ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Taman dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Sajikan hasil pengerjaan dalam bentuk tabel Lampiran III tabel 2.4.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
7.01	**KECAMATAN TAMAN**				**7.661.821.000**	**KECAMATAN TAMAN**				**7.056.378.000**	
	KECAMATAN	**Kecamatan Taman**			**5.825.953.700**	**KECAMATAN**	**Kecamatan Taman**			**5.895.028.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Taman**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**	**4.748.993.000 826.423.700**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Taman**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**	**4.876.500.000 801.528.000**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**100%**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**	**36.105.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**	**54.500.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.500.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	6.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.855.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	12.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase laporan dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**4.712.888.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase laporan dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**4.822.000.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/14bln	4.701.188.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/14bln	4.800.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	11.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	11.000.000	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase Pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi**	**100%**	**15.000.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase Pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi**	**100%**	**9.500.000**	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 orang	9.500.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksnakan sesuai regulasi**	**100%**	**306.317.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**271.000.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12.180.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	16.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	203.587.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	157.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Taman	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Taman	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	50.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	12 dokumen	11.550.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	13.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			disediakan								
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	27.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	28.000.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	6.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	7.000.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**100%**	**74.093.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**100%**	**45.000.000**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 unit	74.093.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1unit	45.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**315.228.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**344.028.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	31.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	60.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	61.840.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	224.388.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	251.188.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang**	**Kecamatan**	**Persentase barang**	**100%**	**115.785.000**	**Pemeliharaan Barang Milik**	**Kecamatan**	**Persentase barang milik**	**100%**	**132.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Taman**	**milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**			**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Taman**	**daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Taman	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit	18.940.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Taman	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit	32.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	36.220.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	35.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/ dipelihara	2 unit	60.625.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/ dipelihara	2 unit	65.000.000	
7.01.02	**PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Taman**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**66,66%**	**39.598.000**	**PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Taman**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**66,66%**	**44.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**2 dokumen**	**17.625.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**2 dokumen**	**14.500.000**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	8.675.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	8.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	8.950.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	6.500.000	
7.01.02.2.02	**Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**2 dokumen**	**17.471.000**	**Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**2 dokumen**	**20.000.000**	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan	9.425.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan	9.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	8.046.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	11.000.000	
7.01.02.2.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**19 kegiatan**	**4.502.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**19 kegiatan**	**10.000.000**	
7.01.02.2.02.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	4 dokumen	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	4 dokumen	10.000.000	
7.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	19 laporan	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	19 laporan	9.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kecamatan**	**Persentase kelembagaan desa**	**100%**	**58.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kecamatan**	**Persentase kelembagaan desa dan**	**100%**	**55.000.000**	

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Taman**	**dan kelurahan yang aktif**			**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Taman**	**kelurahan yang aktif**			
			Persentase sarana prasarana kelurahan dala kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**100%**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dala kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)**	**100%**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tersusun**	**22 dokumen**	**58.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**22 dokumen**	**55.000.000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 lembaga kemasyarakatan	4.000.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	38.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	35.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16.000.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**Kecamatan**	**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100%**	**19.925.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**Kecamatan**	**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100%**	**16.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KETERTIBAN UMUM	**Taman**	**ketertiban umum yang ditangani**			**KETERTIBAN UMUM**	**Taman**	**ketertiban umum yang ditangani**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	12 laporan	**10.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	12 laporan	**10.500.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.500.000	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun**	**4 laporan**	**9.925.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun**	**4 laporan**	**6.000.000**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	9.925.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	6.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kecamatan Taman**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**110.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Taman**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**51.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UMUM										
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**13 dokumen**	**110.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**13 dokumen**	**51.000.000**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	100.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	45.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	6.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	**2 desa**	**23.014.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	**2 desa**	**50.000.000**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**	**82 laporan**	**23.014.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**82 laporan**	**50.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintahan Desa		**dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**Pemerintahan Desa**		**Pengawasan Pemerintahan Desa**			
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	9.150.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	9.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 dokumen	8.250.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 dokumen	11.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 dokumen	8.950.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16 dokumen	234.600.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16 dokumen	55.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 dokumen	9.250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 dokumen	9.000.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Daerah	4 dokumen	8.750.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Daerah	4 dokumen	9.500.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	4 dokumen	9.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	4 dokumen	12.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Taman	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Taman	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 dokumen	9.870.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 dokumen	10.000.000	
7.01		**Kelurahan Wanarejan Selatan**			**780.032.000**	**KECAMATAN**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**			**519.000.000**	
7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**		
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**100%**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase Fasilitasi Adminutratif perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi**	**100%**	**31.487.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase Fasilitasi Adminutratif perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi**	**100%**	**33.320.000**	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	18.167.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	1.320.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			undangan yang disediakan					yang disediakan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	6.000.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**37.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**	**2 unit**	**55.000.000**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	37.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	55.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta**	**24 laporan**	**193.438.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta**	**24 laporan**	**220.000.000**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	16.094.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	20.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	177.344.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	200.000.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara**	**25 unit**	**5.550.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara**	**25 unit**	**3.355.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	5 unit	10.270.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	10.270.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Lapangan		dibayarkan pajaknya								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	10.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	10.950.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	63.535.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	90.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**100%**	**508.842.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**100%**	**251.000.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**508.842.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**251.000.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	300.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	100.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	201.842.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	240.000.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI**	**Kelurahan Wanarejan**	**Persentase Gangguan ketentraman dan**	**100%**	**11.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI**	**Kelurahan Wanarejan**	**Persentase Gangguan ketentraman dan**	**100%**	**11.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Selatan**	**ketertiban umum yang ditangani**			**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Selatan**	**ketertiban umum yang ditangani**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**12 laporan**	**11.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**12 laporan**	**11.500.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	11.550.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	11.500.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**7.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**7.000.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**7.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**7.000.000**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	100 orang	7.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	100 orang	7.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			
7.01	**KECAMATAN**	**Kelurahan Beji**			**616.021.300**	**KECAMATAN**	**Kelurahan Beji**			**642.350.000**	
7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelurahan Beji**				**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelurahan Beji**			**- 288.350.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28 paket**	**83.367.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28 paket**	**85.900.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	2.089.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	2.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	60.036.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	61.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Beji	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5.501.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Beji	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.200.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Beji	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Beji	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.200.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12.620.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	13.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**197.494.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**199.100.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	4.330.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	5.100.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	20.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	21.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	172.344.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	173.000.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara**	**11 unit**	**2.260.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah Barang milik Daerah yang terpelihara**	**10 unit**	**3.350.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Beji	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Beji	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	850.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Beji	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	1.460.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Beji	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	2.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa**	**100%**	**325.910.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kelurahan Beji**	**Persentase kelembagaan desa dan**	**100%**	**347.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Beji**	**dan kelurahan yang aktif**			**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**kelurahan yang aktif**			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Beji**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**305.910.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Beji**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**326.000.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan Beji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.910.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan Beji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	106.701.500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	110.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	193.298.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	210.000.000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Beji**	**jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi**	**1 Lembaga Kemasyarakatan**	**20.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Beji**	**jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi**	**1 Lembaga Kemasyarakatan**	**21.000.000**	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Beji	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Beji	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kelurahan Beji**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**6.990.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kelurahan Beji**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**7.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UMUM					**UMUM**					
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**6.990.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**7.000.000**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kelurahan Beji	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	100 orang	6.990.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kelurahan Beji	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	100 orang	7.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Desa	Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FISIK					
1	Cibelok	Rehabilitas/Peningkatan Jembatan Milik Desa	Dusun Mijen	P: 16 L: 4	190.000.000
2	Jebed Utara	Rabat Beton Jalan Pertanian	Block Sirayak	P: 400 L: 3	180.000.000
3	Jebed Selatan	Talud Penahan Jalan	Dusun Silanjar	650m	180.000.000
4	Pener	Pembangunan Talud/Sender	Dusun Kebandingan	P: 500 L: 1,5	180.000.000
5	Kabunan	Rabat Jalan Antar Desa Kabunan – Beji	Dusun Gandulan	261m	180.000.000
6	Penggarit	Talud Jalan Usaha Tani	Jalan Ali Sadikin (Penggarit-Pener)	400m	180.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	Gondang	Pengadaan Alat Pengolah dan Pengelolaan Sampah	Desa Gondang	1 unit	380.000.000
NON FISIK					
1	Jrakah	Pelatihan Setir Mobil	Desa Jrakah	30 Orang	30.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAMAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Taman Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Taman Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025 – 2029 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Penguatan Landasan Transformasi"**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diarahkan pada "**Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**, yang dijabarkan dalam lima prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata;
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter;
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak;
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun keempat RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan implementasi *Smart City;*
2. Peningkatan reformasi birokrasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis tehnologi;
4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa;
5. Perlindungan, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan;
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar;
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Taman

Kecamatan Taman dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Taman secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Taman tahun 2026 adalah "**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk **meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan** yaitu menciptakan wilayah kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, dengan mengurangi kemiskinan,kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa di kecamatan yang memiliki status mandiri/jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut dikali 100.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Taman dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Taman tahun 2026, adalah **"Meningkatnya**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah". Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Nilai SAKIP Kecamatan Taman.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Taman tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Taman Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	Angka	21,06
2		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	86,65
			Nilai SAKIP OPD	%	60,55

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Taman merencanakan sebanyak 6 program, 16 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Taman dengan kebutuhan dana sebesar Rp 7.661.821.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAMAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencana dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
      c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   f. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   g. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Taman Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN TAMAN						**5.864.256.300,00**							**5.980.528.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.864.256.300,00**							**5.980.528.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**5.864.256.300,00**							**5.980.528.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.589.180.000,00**						**-**	**5.678.028.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Taman)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**5.589.180.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.678.028.000,00**	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	54.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.765.287.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	4.822.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.745.287.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	30 Orang/bulan	4.800.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	2 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	30 Orang	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	278.410.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	271.000.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.360.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	6 Paket	16.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	185.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Paket	157.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	45.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	27.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	6 Laporan	28.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	42.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	45.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	42.400.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	323.508.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	344.028.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	31.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.840.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	61.840.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	232.668.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	251.188.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	132.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	18.940.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	14 Unit	32.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.010.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	10 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.625.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Unit	65.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**48.026.100,00**						**-**	**54.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Taman)]	**Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tah**	**70**	**63,33**	**63,33**	**66,66**	**48.026.100,00**	-	-	-	-	-	-	**54.000.000,00**	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	14.500.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	16.046.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	20.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.046.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	18.480.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	19.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	9.480.100,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**48.500.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Taman)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **88**	**100** **78**	**100** **78**	**100** **78**	**48.500.000,00**	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat	-	Kecamatan Taman	-	**55.000.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	48.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	55.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	19 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**15.000.000,00**						**-**	**16.500.000,00**	
	[Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Taman)]	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**16.500.000,00**	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	10.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	10.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**51.000.000,00**	
	[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Taman)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**51.000.000,00**	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	51.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	40.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	100 Orang	45.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**113.550.200,00**						**-**	**126.000.000,00**	
	[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Taman)]	**Jumlah Desa yang Naik Statusnya**	**6**	**4**	**4**	**4**	**113.550.200,00**	-	-	-	-	-	-	**126.000.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	113.550.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	126.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				19 Dokumen	9.150.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	19 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				16 Dokumen	50.000.200,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	16 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	9.400.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				19 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	19 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN						**674.072.400,00**							**793.040.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**674.072.400,00**							**793.040.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**674.072.400,00**							**793.040.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	-			-	**346.680.400,00**						-	**423.040.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Taman)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**346.680.400,00**	-	-	-	-	-	-	**423.040.000,00**	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31.487.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	33.320.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.167.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.320.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Dokumen	1.320.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	6.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	55.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	37.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Unit	55.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	pemerintahan				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	193.438.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	223.500.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	3.500.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.094.400,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	20.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	177.344.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.755.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	111.220.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10.270.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	10 Unit	10.270.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10.950.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	8 Unit	10.950.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	63.535.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	2 Unit	90.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**308.842.000,00**						**-**	**351.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Taman)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **88**	**100** **78**	**100** **78**	**100** **78**	**308.842.000,00**	-	-	-	-	-	-	**351.000.000,00**	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	308.842.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	351.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	3 Lembaga Kemasyara k atan	11.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	1 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	201.842.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**11.550.000,00**						**-**	**12.000.000,00**	
	[Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Taman)]	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.550.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.000.000,00**	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	11.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	12.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	11.550.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	12.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**7.000.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	
	[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Taman)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.000.000,00**	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	7.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	7.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	50 Orang	7.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
	KELURAHAN BEJI						**672.991.300,00**							**718.350.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**672.991.300,00**							**718.350.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**672.991.300,00**							**718.350.000,00**	
KODE	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
						TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
										NASIONAL	**DAERAH**				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**340.091.300,00**						**-**	**364.350.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Taman)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**340.091.300,00**	-	-	-	-	-	-	**364.350.000,00**	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	83.367.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	85.900.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.089.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.036.300,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Paket	61.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.501.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Paket	6.200.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.120.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Dokumen	3.200.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12.620.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Laporan	13.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.290.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14.290.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	2 Unit	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.494.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	199.100.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.330.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Laporan	5.100.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.820.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola	Kelurahan Beji	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	pemerintahan				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172.344.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Laporan	173.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	58.350.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	800.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	5 Unit	850.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.460.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	5 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42.680.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Unit	55.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**325.910.000,00**						**-**	**347.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Taman)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **88**	**100** **78**	**100** **78**	**100** **78**	**325.910.000,00**	-	-	-	-	-	-	**347.000.000,00**	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	305.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	-	-	326.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakat an	5.910.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	4 Lembaga Kemasyarakat an	6.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	106.701.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Unit	110.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	193.298.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	4 Pokmas / Ormas	210.000.000,00	KELURAHAN BEJI
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**325.910.000,00**	-	-	-	-	-	-	**347.000.000,00**	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakat an	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Lembaga Kemasyarakat an	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**6.990.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	
	[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Taman)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.990.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.000.000,00**	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	6.990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	7.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										dan penyelundupan					
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	6.990.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	50 Orang	7.000.000,00	KELURAHAN BEJI
J U M L A H							**7.211.320.000,00**							**7.491.918.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Taman merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Taman memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Taman secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Taman Tahun 2026.

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 61 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

CAMAT TAMAN KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan
b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Taman melalui Sekretaris Camat.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 61 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

No	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Camat Taman	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Taman	Anggota	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Taman	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Taman	Anggota	
6.	Kepala Seksi Trantibum pada Kecamatan Taman	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Taman	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Taman	Anggota	
9.	Staf pada Kecamatan Taman	Anggota	SHELA ROSALIA
10.	Staf pada Kecamatan Taman	Anggota	WARI RAHAYU
11.	Staf pada Kecamatan Taman	Anggota	CARINTO

CAMAT TAMAN

IRFAN SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

BERITA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TAMAN TAHUN 2026

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2025 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan Taman

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan hal berikut

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Tahun 2025 yang disampaikan Camat Taman (Drs. SUKISMAN, M.A).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2025 sebagaiman telah dirangkum menjadi keputusan maka pada

Hari dan Tanggal	Rabu, 23 Juni 2025
Jam	09.00 s/d selesai
Tempat	Pendopo Kecamatan Taman

Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026

MENYEPAKATI :

Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026 agar segera ditetapkan dan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Kecamatan Taman dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar capaian kinerjanya bias tercapai

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan sebagaimana mestinya

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Andi Susanto, S.IP	Sekertaris Camat	
2	Saryanto, S.E, M.Si	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan/ Plt. Kepala Seksi Pelayanan	
3	Moch. Teguh Arwibowo, S.M	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
4	Teguh Ambariyanto, S.KM	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	
5	A. Faozi, S.E	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	
6	Edi Siswanto, S.H	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	Wari Rahayu, A.Ma	Pelaksana	
8	Shela Rosalia, A. Md. Akun	Pelaksana	

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Kecamatan Taman
Kabupaten/kota:Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Taman, tanggal Oktober 2025

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, M.A

Pembina Tk.I

NIP.19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

CC. RENCANA KERJA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Taman tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Taman yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Taman merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Taman yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Taman melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Taman dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Taman mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Taman mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Taman dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Kecamatan Taman tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
2. Penyusunan rancangan awal
   - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   - Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan 2
3. Hasil Perumusan rancangan awal
   - Pendahuluan
   - Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
   - Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
   - Rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah; dan
   - Penutup
4. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Taman tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Taman
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Taman tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Taman
Tahun 2026

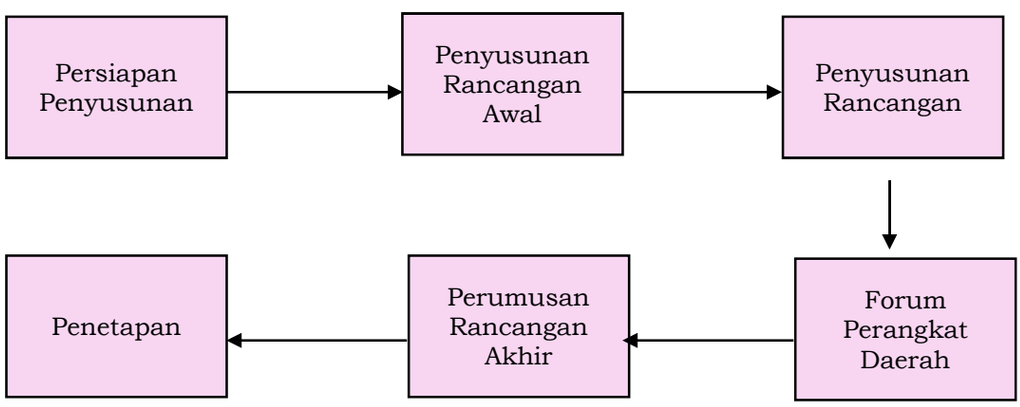

Renja Kecamatan Taman tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Taman tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

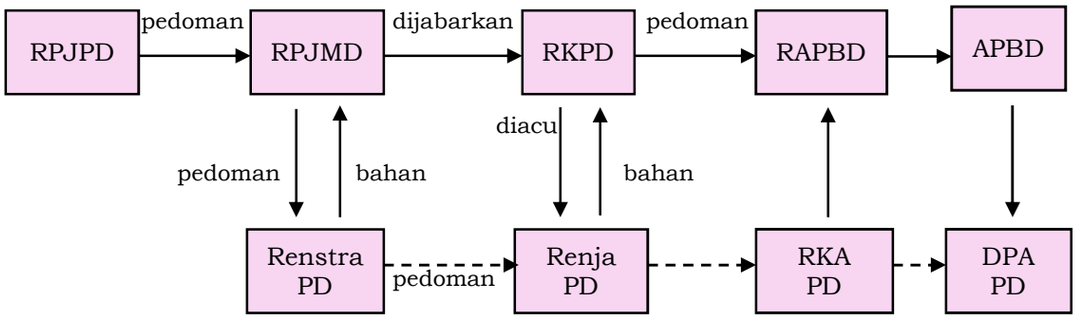

Renja Kecamatan Taman berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Taman tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Taman Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Taman adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Taman tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Taman sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Taman;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Taman tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Taman tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Taman Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Taman tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Taman, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Taman, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Taman, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Taman, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Taman, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Taman, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Taman.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Taman Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Taman

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Taman pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Taman sebesar Rp7.079.080.000 yang terbagi dalam 6 program, 18 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp7.157.695.085 atau sebesar 93,39%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Taman sebesar Rp6.784.325.500 yang terbagi dalam 6 program, 18 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 3.956.334.507 atau sebesar 58,32%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023, Kecamatan Taman telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan menyesuaikan kebutuhan

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Taman telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 18 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Tidak ada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Taman yaitu tercapai di tahun 2024;
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
   b. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Taman;
   c. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP ;
   d. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
   e. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Taman dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang sebagai berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Taman dan Pencapaian Renstra Kecamatan Taman s/d Tahun 2024
Kabupaten Pemalang

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program /Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
'7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	500	100	100	100	100	100	300	60
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	500	100	100	100	100	100	300	60
		Indeks Reformasi Birokrasi	*114,32*	*42,98*	*31,97*	*31,97*	*100*	*32,25*	*106,92*	*100*
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	*108,36*	*49,60*	*33,90*	*59,9*	*176,70*	*33,95*	*143,4*	*100*
7.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	***41***	***13***	***13***	***13***	***100***	***15***	***41***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*2*	*4*	*100*
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*2*	*4*	*100*
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*3*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*3*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*100*
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*3*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*100*
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*12*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*100*
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*12*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*100*
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**30**	**6**	**6**	**6**	**100**	**6**	**18**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	***30***	***6***	***6***	***6***	***100***	***7***	***19***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan keuangan tersusun sesuai regulasi**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175/60	45/12	40/12	40/12	100	30/12	115/36	65
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*145/48*	*45/12*	*45/12*	*45/12*	*100*	*40/12*	*130/48*	*90*
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*75*
7.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*12*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*100*
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai Regulasi**	**90**	**30**	**30**	**30**	**100**	**30**	**90**	**100**
		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	***90***	***30***	***30***	***30***	***100***	***30***	***90***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai Regulasi**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90	30	30	30	100	30	90	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*90*	*30*	*30*	*30*	*100*	*30*	*90*	*100*
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksanakan**	**360**	**72**	**72**	**72**	**100**	**72**	**216**	**60**
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***288***	***72***	***72***	***72***	***100***	***72***	***216***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	*100*
7.01.01.2.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**17**	**6**	**2**	**2**	**100**	**7**	**15**	**88**
		Jumlah barang milik daerah penunjang	***10***	***6***	***2***	***2***	***100***	***2***	***10***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		urusan pemerintah yang tersedia								
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	6	2	2	100	7	15	88
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*10*	*6*	*2*	*2*	*100*	*2*	*10*	*100*
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	***180***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***60***
		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***144***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara**	**140**	**28**	**28**	**28**	**100**	**28**	**84**	**60**
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang dipelihara**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**310**	**63,33**	**63,33**	**63,33**	**100**	**63,33**	**190**	**60**
		Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	***261,12***	***87,78***	***85,56***	***87,78***	***100***	***85,56***	***261,12***	***100***
7.01.02.2.01	**Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**40**	**8**	**8**	**8**	**100**	**8**	**24**	**60**
		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	***32***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerinah dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerinah dan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jenis data pemerintahan yang tersedia	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 2.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**90**	**18**	**18**	**18**	**100**	**18**	**54**	**60**
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 2.2.02. 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 2.2.02. 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20	4	4	4	100	4	12	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 2.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**175**	**35**	**35**	**35**	**100**	**35**	**105**	**60**
		Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***140***	***35***	***35***	***35***	***100***	***35***	***105***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 2.2.04. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 2.2.04. 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**370**	**74**	**78**	**78**	**100**	**78**	**230**	**60**
		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	***246***	***100***	***82***	***100***	***100***	***83***	***246***	***100***
7.01.0 3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**105**	**21**	**21**	**21**	**100**	**21**	**63**	**60**
		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***128***	***32***	***32***	***32***	***100***	***32***	***96***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	95	19	19	19	100	19	57	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Pembangunan di Desa								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 3.2.01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*4*	*1*	*1*	*1*	*100*	*1*	*3*	*75*
7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang difasilitasi**								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang aktif	***9***	***3***	***3***	***3***	***100***	***3***	***9***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 4.2.01	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	***500***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***60***
		Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***48***	***12***	***12***	***12***	***100***	***12***	***36***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 4.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun**	**20**	**4**	**4**	**4**	**100**	**4**	**12**	**60**
		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***16***	***4***	***4***	***4***	***100***	***4***	***12***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 4.2.02. 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**65**	**13**	**13**	**13**	**100**	**13**	**39**	**60**
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***52***	***13***	***13***	***13***	***100***	***13***	***39***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	100	100	100	100	100	300	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400	100	100	100	100	100	300	75
7.01.0 5.2.01. 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	30	30	30	100	30	90	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*120*	*30*	*30*	*30*	*100*	*30*	*90*	*75*
7.01.0 5.2.01. 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	4	4	4	100	4	12	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	4	4	4	100	4	12	75
7.01.0 5.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dsa yang naik statusnya**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	***126,3***	***47,36***	***26,32***	***47,36***	***179,93***	***31,58***	***126,3***	***100***
7.01.0 6.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**95**	**19**	**19**	**19**	**100**	**19**	**57**	**60**
		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***76***	***19***	***19***	***19***	***100***	***19***	***57***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 6.2.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	105	21	21	21	100	21	63	60
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*84*	*21*	*21*	*21*	*100*	*21*	*63*	*75*
7.01.0 6.2.01. 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
7.01.0 6.2.01. 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	20	4	4	4	100	4	12	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Desa								
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20	4	4	4	100	4	12	60
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 6.2.01. 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	95	19	19	19	100	19	57	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	*76*	*19*	*19*	*19*	*100*	*19*	*57*	*75*
KELURAHAN WANAREJAN SELATAN										
'7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Indeks Reformasi Birokrasi	***114,32***	***42,98***	***31,97***	***31,97***	***100***	***32,25***	***106,92***	***100***
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	***108,36***	***49,60***	***33,90***	***59,9***	***176,70***	***33,95***	***143,4***	***100***
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksanakan**	**250**	**50**	**50**	**50**	**100**	**50**	**150**	**60**
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***200***	***50***	***50***	***50***	***100***	***50***	***150***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*8*	*2*	*2*	*2*	*100*	*2*	*6*	*75*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	***180***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***60***
		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***144***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**140**	**28**	**28**	**28**	**100**	**28**	**84**	**60**
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**								
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	1	1	1	100	1	3	75
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**310**	**63,33**	**63,33**	**63,33**	**100**	**63,33**	**190**	**60**
		Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	***261,12***	***87,78***	***85,56***	***87,78***	***100***	***85,56***	***261,12***	***100***
7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	90	18	18	18	100	18	54	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	*112*	*28*	*28*	*28*	*100*	*28*	*84*	*75*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**370**	**74**	**78**	**78**	**100**	**78**	**230**	**60**
		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	***246***	***100***	***82***	***100***	***100***	***83***	***246***	***100***
7.01.0 3.2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**45**	**9**	**9**	**9**	**100**	**9**	**27**	**60**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	***36***	***9***	***8***	***8***	***100***	***9***	***26***	***72***
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*20*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*60*
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 3.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*8*	*2*	*1*	*1*	*100*	*2*	*5*	*62,5*
7.01.0 3.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 4.2.01	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	***500***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***60***
		Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 4.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan**	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		ketertiban umum yang tersusun								
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***48***	***12***	***12***	***12***	***100***	***12***	***36***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.0 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala**	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		daerah yang tersusun								
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	100	100	100	100	100	300	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*325*	*20*	*20*	*20*	*100*	*285*	*325*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KELURAHAN BEJI										
'7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Capaian Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksanakan**	**360**	**72**	**72**	**72**	**100**	**72**	**216**	**60**
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***360***	***72***	***72***	***72***	***100***	***72***	***216***	***60***
	Hasil Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*8*	*2*	*2*	*2*	*100*	*2*	*6*	*75*
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**17**	**6**	**2**	**2**	**100**	**7**	**15**	**88**
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***10***	***6***	***2***	***2***	***100***	***2***	***10***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	6	2	2	100	7	15	88
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*10*	*6*	*2*	*2*	*100*	*2*	*10*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	***180***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***60***
		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***144***	***36***	***36***	***36***	***100***	***36***	***108***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*48*	*12*	*12*	*12*	*100*	*12*	*36*	*75*
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**	**140**	**28**	**28**	**28**	**100**	**28**	**84**	**60**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***112***	***28***	***28***	***28***	***100***	***28***	***84***	***75***
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara**								
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	14	14	14	100	14	42	60
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*56*	*14*	*14*	*14*	*100*	*14*	*42*	*75*
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	1	1	1	100	1	3	75
7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**370**	**74**	**78**	**78**	**100**	**78**	**230**	**60**
		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	***246***	***100***	***82***	***100***	***100***	***83***	***246***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.0 3.2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**45**	**9**	**9**	**9**	**100**	**9**	**27**	**60**
		Jumlah kegiatan dari dana kelurahan	***36***	***9***	***8***	***8***	***100***	***9***	***26***	***72***
	Hasil Kegiatan	**Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahanyang terlaksana sesuai ketentuan	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*20*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*60*
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*16*	*4*	*4*	*4*	*100*	*4*	*12*	*75*
7.01.0 3.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10	2	2	2	100	2	6	60
		Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*8*	*2*	*1*	*1*	*100*	*2*	*5*	*62,5*
7.01.0 3.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Pokmas/Ormas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 3.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang difasilitasi**								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Lembaga Kemasyarakata n tingkat Kecamatan yang aktif	***9***	***3***	***3***	***3***	***100***	***3***	***9***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 3.2.03. 02	Penyelenggaraa Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	15	3	3	3	100	3	9	60
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*12*	*3*	*3*	*3*	*100*	*3*	*9*	*75*
7.01.0 5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**60**
		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***75***
7.01.0 5.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***24***	***8***	***8***	***8***	***100***	***8***	***24***	***100***
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	100	100	100	100	100	300	60
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*325*	*20*	*20*	*20*	*100*	*285*	*325*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Taman Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan 2027, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Taman

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%		√		21,05	21,05	21,05	26,31	21,05	21,05	21,05	26,31	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	*Indeks*		√		*83,5*	*85,5*	*87,5*	*87,5*	*85,025*	-	*87,5*	*87,5*	
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		85,025	86,60	86,65	86,70	85,025	86,60	86,65	86,70	
	Nilai SAKIP	Nilai		√		60,25	60,45	60,55	60,65	60,25	67,56	60,55	60,65	
	Cakupan layanan kecamatan	*%*		√		*80,23*	*80,43*	*82,73*	*82,73*	*87,03*	*87,03*	*82,73*	*82,73*	
3	Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Reformasi Birokrasi	*Indeks*				*32,25*	*33,00*	*33,55*	*33,55*	-	-	*33,55*	*33,55*	
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	*Nilai*				*33,95*	*34,00*	*34,04*	*34,04*	*60,25*	*67,56*	*34,04*	*34,04*	
4	Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%				63,33	63,33	66,66	66,66	63,33	63,33	66,66	66,66	
	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	*%*				*85,56*	*85,56*	*85,56*	*85,56*	*87,78*	*87,78*	*85,56*	*85,56*	
5	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	%				78	78	78	80	78	78	78	80	
	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	*%*				*84*	*85*	*86*	*86*	*100*	*100*	*86*	*86*	
6	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	*%*				*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
7	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	*%*				*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
8	Jumlah desa yang naik statusnya	desa				4	4	4	5	4	4	4	5	
	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	*%*				*31,58*	*31,58*	*42,1*	*42,1*	*47,36*	-	*42,1*	*42,1*	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Taman

Kecamatan Taman adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Taman berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat dari :

a. Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan
b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi
e. Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja sesuai regulasi
f. Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun
g. Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif
h. Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)
i. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
j. Persentase konflik di masyarakat yang ditangani
k. Jumlah desa yang naik statusnya

Pada tahun 2024 persentase desa dengan status mandiri Kecamatan Taman sebesar 21,05 persentase tersebut sesuai dengan target 2024. IKM Kecamatan Taman sebesar 85,025 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Taman. Kemudian Nilai SAKIP Kecamatan Taman tercapai 60,25 dimana nilai tersebut setiap tahun terus meningkat.

Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi 100% dan persentase dokumen perencanaan,keuangan, dan evaluasi kinerja sesuai regulasi 100%. Untuk persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksnakan setiap tahun terlaksana 19 kewenangan dari total 30 Jenis kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 63,33%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100%, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Persentase sarana prasarana keluarahan dalam kondisi baik sudah 78%. Persentase jalan kewenanan kelurahan kondisi baik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan kelurahan sangat baik dalam menangani kerusakan pada jalan dan perlu ditingkatkan lagi meskipun sudah sesuai target.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang ditangani masing-masing tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Pada tahun 2021 - 2025 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Sedangkan untuk indikator persentase desa yang naik statusnya ada 4 desa. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Taman.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Taman perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Taman untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Taman yaitu :

a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
b. Personal/ petugas layanan yang memasuki masa pensiunsa serta pendampingan malam kurang memadai
c. Fasilitasi saat monitoring musdes dan monev pendampingan desa serta pendampingan malam kurang memadai
d. Pada Desa-desa yang ada pada Kecamatan Taman sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi
e. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
f. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Taman juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM di Kecamatan Taman
c. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan yang baik
e. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
f. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi ewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro

6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Taman mendukung Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Dicapai melalui tujuan meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dengan sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Taman sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

Tema daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan pada Rantekno RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada Tema **"Penguatan Landasan Transformasi"**. Tahap pertama ini diarahkan pada kebijakan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 di prioritaskan pada:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tema, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 diarahkan pada "**Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**, Kebijakan pembangunan tersebut di prioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan:

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak
5. Peningkatan produktivitas ekonomi

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Taman tahun 2025, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Taman mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Taman adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Adanya peraturan terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

   Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Taman.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Taman ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Taman dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
4. Sajikan hasil pengerjaan dalam bentuk tabel Lampiran III tabel 2.4.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
7.01	**KECAMATAN TAMAN**				**7.661.821.000**	**KECAMATAN TAMAN**				**7.056.378.000**	
	KECAMATAN	**Kecamatan Taman**			**5.825.953.700**	**KECAMATAN**	**Kecamatan Taman**			**5.895.028.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Taman**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**	**4.748.993.000 826.423.700**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Taman**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**	**4.876.500.000 801.528.000**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**100%**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**		
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**	**36.105.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**	**54.500.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.500.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	6.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4.855.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	12.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	10.000.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase laporan dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**4.712.888.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase laporan dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100%**	**4.822.000.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/14bln	4.701.188.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/14bln	4.800.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	11.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan atau Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	11.000.000	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase Pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi**	**100%**	**15.000.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase Pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi**	**100%**	**9.500.000**	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 orang	9.500.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase fasilitasi administrative perangkat daerah yang dilaksnakan sesuai regulasi**	**100%**	**306.317.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**271.000.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12.180.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	16.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	203.587.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	157.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Taman	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Taman	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	50.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	12 dokumen	11.550.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	13.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			disediakan								
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	27.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	28.000.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	6.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	7.000.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**100%**	**74.093.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**100%**	**45.000.000**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 unit	74.093.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1unit	45.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**315.228.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**344.028.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	31.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	60.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	61.840.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	224.388.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	251.188.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang**	**Kecamatan**	**Persentase barang**	**100%**	**115.785.000**	**Pemeliharaan Barang Milik**	**Kecamatan**	**Persentase barang milik**	**100%**	**132.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Taman**	**milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**			**Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Taman**	**daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Taman	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit	18.940.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Taman	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit	32.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	36.220.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	35.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/ dipelihara	2 unit	60.625.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/ dipelihara	2 unit	65.000.000	
7.01.02	**PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Taman**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**66,66%**	**39.598.000**	**PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Taman**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**66,66%**	**44.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**2 dokumen**	**17.625.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**2 dokumen**	**14.500.000**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	8.675.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	8.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	8.950.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	6.500.000	
7.01.02.2.02	**Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**2 dokumen**	**17.471.000**	**Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**2 dokumen**	**20.000.000**	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan	9.425.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan	9.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	8.046.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	11.000.000	
7.01.02.2.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**19 kegiatan**	**4.502.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	**19 kegiatan**	**10.000.000**	
7.01.02.2.02.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	4 dokumen	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	4 dokumen	10.000.000	
7.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	19 laporan	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kecamatan Taman	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	19 laporan	9.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kecamatan**	**Persentase kelembagaan desa**	**100%**	**58.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kecamatan**	**Persentase kelembagaan desa dan**	**100%**	**55.000.000**	

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Taman**	**dan kelurahan yang aktif**			**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Taman**	**kelurahan yang aktif**			
			Persentase sarana prasarana kelurahan dala kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)	**100%**				**Persentase sarana prasarana kelurahan dala kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan)**	**100%**		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tersusun**	**22 dokumen**	**58.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**22 dokumen**	**55.000.000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 lembaga kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 lembaga kemasyarakatan	4.000.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	38.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	35.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16.000.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**Kecamatan**	**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100%**	**19.925.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**Kecamatan**	**Persentase gangguan ketentraman dan**	**100%**	**16.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KETERTIBAN UMUM	**Taman**	**ketertiban umum yang ditangani**			**KETERTIBAN UMUM**	**Taman**	**ketertiban umum yang ditangani**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	12 laporan	**10.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	12 laporan	**10.500.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.500.000	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun**	**4 laporan**	**9.925.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun**	**4 laporan**	**6.000.000**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	9.925.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	6.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kecamatan Taman**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**110.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Taman**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**51.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UMUM										
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**13 dokumen**	**110.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**13 dokumen**	**51.000.000**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	100.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	45.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	6.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	**2 desa**	**23.014.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	**2 desa**	**50.000.000**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**	**82 laporan**	**23.014.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	**82 laporan**	**50.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintahan Desa		**dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**Pemerintahan Desa**		**Pengawasan Pemerintahan Desa**			
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	9.150.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	9.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 dokumen	8.250.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 dokumen	11.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 dokumen	8.950.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16 dokumen	234.600.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Taman	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16 dokumen	55.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 dokumen	9.250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 dokumen	9.000.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Daerah	4 dokumen	8.750.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Daerah	4 dokumen	9.500.000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	4 dokumen	9.500.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	4 dokumen	12.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Taman	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Taman	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 dokumen	9.870.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 dokumen	10.000.000	
7.01		**Kelurahan Wanarejan Selatan**			**780.032.000**	**KECAMATAN**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**			**519.000.000**	
7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**		**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase capaian layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi**	**100%**		
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**100%**				**Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi**	**100%**		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase Fasilitasi Adminutratif perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi**	**100%**	**31.487.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase Fasilitasi Adminutratif perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi**	**100%**	**33.320.000**	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	18.167.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 dokumen	1.320.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	1.320.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			undangan yang disediakan					yang disediakan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	6.000.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**37.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia**	**2 unit**	**55.000.000**	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	37.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Taman	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	55.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta**	**24 laporan**	**193.438.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta**	**24 laporan**	**220.000.000**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	16.094.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	20.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	177.344.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	200.000.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara**	**25 unit**	**5.550.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara**	**25 unit**	**3.355.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	5 unit	10.270.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	10.270.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Lapangan		dibayarkan pajaknya								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	10.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	10.950.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	63.535.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	90.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**100%**	**508.842.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**100%**	**251.000.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**508.842.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**251.000.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	300.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	100.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	201.842.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	240.000.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI**	**Kelurahan Wanarejan**	**Persentase Gangguan ketentraman dan**	**100%**	**11.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI**	**Kelurahan Wanarejan**	**Persentase Gangguan ketentraman dan**	**100%**	**11.500.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Selatan**	**ketertiban umum yang ditangani**			**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Selatan**	**ketertiban umum yang ditangani**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**12 laporan**	**11.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Taman**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**12 laporan**	**11.500.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	11.550.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	11.500.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**7.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**7.000.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**7.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Wanarejan Selatan**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**7.000.000**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	100 orang	7.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kelurahan Wanarejan Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	100 orang	7.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			
7.01	**KECAMATAN**	**Kelurahan Beji**			**616.021.300**	**KECAMATAN**	**Kelurahan Beji**			**642.350.000**	
7.01.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelurahan Beji**				**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelurahan Beji**			**- 288.350.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28 paket**	**83.367.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28 paket**	**85.900.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	2.089.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	2.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	60.036.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	61.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Beji	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	5.501.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Beji	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.200.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Beji	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Beji	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3.200.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12.620.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	13.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**197.494.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**199.100.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	4.330.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	5.100.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	20.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	12 laporan	21.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	172.344.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Beji	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	173.000.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara**	**11 unit**	**2.260.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah Barang milik Daerah yang terpelihara**	**10 unit**	**3.350.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Beji	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Beji	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 unit	850.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Beji	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	1.460.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Beji	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	2.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kelurahan**	**Persentase kelembagaan desa**	**100%**	**325.910.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Kelurahan Beji**	**Persentase kelembagaan desa dan**	**100%**	**347.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Beji**	**dan kelurahan yang aktif**			**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**kelurahan yang aktif**			
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Beji**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**305.910.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kelurahan Beji**	**Persentase kegiatan pemberdayaan yang terlaksanana sesuai ketentuan**	**100%**	**326.000.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan Beji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.910.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kelurahan Beji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	106.701.500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 unit	110.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	193.298.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ ormas	210.000.000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Beji**	**jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi**	**1 Lembaga Kemasyarakatan**	**20.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kelurahan Beji**	**jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi**	**1 Lembaga Kemasyarakatan**	**21.000.000**	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Beji	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Beji	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	21.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kelurahan Beji**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**6.990.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kelurahan Beji**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani**	**100%**	**7.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UMUM					**UMUM**					
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**6.990.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kelurahan Beji**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100 orang**	**7.000.000**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kelurahan Beji	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	100 orang	6.990.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kelurahan Beji	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	100 orang	7.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Desa	Kegiatan	Lokasi	Besaran/ Volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FISIK					
1	Cibelok	Rehabilitas/Peningkatan Jembatan Milik Desa	Dusun Mijen	P: 16 L: 4	190.000.000
2	Jebed Utara	Rabat Beton Jalan Pertanian	Block Sirayak	P: 400 L: 3	180.000.000
3	Jebed Selatan	Talud Penahan Jalan	Dusun Silanjar	650m	180.000.000
4	Pener	Pembangunan Talud/Sender	Dusun Kebandingan	P: 500 L: 1,5	180.000.000
5	Kabunan	Rabat Jalan Antar Desa Kabunan – Beji	Dusun Gandulan	261m	180.000.000
6	Penggarit	Talud Jalan Usaha Tani	Jalan Ali Sadikin (Penggarit-Pener)	400m	180.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	Gondang	Pengadaan Alat Pengolah dan Pengelolaan Sampah	Desa Gondang	1 unit	380.000.000
NON FISIK					
1	Jrakah	Pelatihan Setir Mobil	Desa Jrakah	30 Orang	30.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAMAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Taman Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Taman Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025 – 2029 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Penguatan Landasan Transformasi"**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diarahkan pada "**Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**, yang dijabarkan dalam lima prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata;
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter;
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak;
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun keempat RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan implementasi *Smart City;*
2. Peningkatan reformasi birokrasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis tehnologi;
4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa;
5. Perlindungan, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan;
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar;
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Taman

Kecamatan Taman dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Taman secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Taman tahun 2026 adalah "**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk **meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan** yaitu menciptakan wilayah kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, dengan mengurangi kemiskinan,kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa di kecamatan yang memiliki status mandiri/jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut dikali 100.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Taman dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Taman tahun 2026, adalah **"Meningkatnya**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah". Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Nilai SAKIP Kecamatan Taman.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Taman tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Taman Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	Angka	21,06
2		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	86,65
			Nilai SAKIP OPD	%	60,55

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Taman merencanakan sebanyak 6 program, 16 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Taman dengan kebutuhan dana sebesar Rp 7.661.821.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAMAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Taman yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencana dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
      c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   f. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   g. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Taman Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN TAMAN						**5.864.256.300,00**							**5.980.528.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.864.256.300,00**							**5.980.528.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**5.864.256.300,00**							**5.980.528.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.589.180.000,00**						**-**	**5.678.028.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Taman)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**5.589.180.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.678.028.000,00**	-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	54.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.765.287.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	4.822.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.745.287.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	30 Orang/bulan	4.800.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	2 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	30 Orang	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	278.410.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	271.000.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.360.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	6 Paket	16.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	185.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Paket	157.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	45.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	27.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	6 Laporan	28.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	42.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	45.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	42.400.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	4 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	323.508.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	344.028.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	31.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.840.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	61.840.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	232.668.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	251.188.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	132.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	18.940.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	14 Unit	32.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	30.010.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	10 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.625.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Unit	65.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**48.026.100,00**						**-**	**54.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Taman)]	**Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tah**	**70**	**63,33**	**63,33**	**66,66**	**48.026.100,00**	-	-	-	-	-	-	**54.000.000,00**	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	14.500.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	16.046.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	20.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.046.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	18.480.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	19.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	9.480.100,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	12 Laporan	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**48.500.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Taman)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **88**	**100** **78**	**100** **78**	**100** **78**	**48.500.000,00**	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat	-	Kecamatan Taman	-	**55.000.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	48.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	55.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	19 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**15.000.000,00**						**-**	**16.500.000,00**	
	[Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Taman)]	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**16.500.000,00**	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	10.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	10.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**50.000.000,00**						**-**	**51.000.000,00**	
	[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Taman)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**51.000.000,00**	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	51.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	40.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	100 Orang	45.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**113.550.200,00**						**-**	**126.000.000,00**	
	[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Taman)]	**Jumlah Desa yang Naik Statusnya**	**6**	**4**	**4**	**4**	**113.550.200,00**	-	-	-	-	-	-	**126.000.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	113.550.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	-	126.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				19 Dokumen	9.150.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	19 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				16 Dokumen	50.000.200,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	16 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	9.400.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				19 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kecamatan Taman	19 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TAMAN
	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN						**674.072.400,00**							**793.040.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**674.072.400,00**							**793.040.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**674.072.400,00**							**793.040.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	-			-	**346.680.400,00**						-	**423.040.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Taman)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**346.680.400,00**	-	-	-	-	-	-	**423.040.000,00**	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	31.487.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	33.320.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.167.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Paket	6.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.320.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Dokumen	1.320.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	6.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	55.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	37.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Unit	55.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	pemerintahan				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	193.438.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	223.500.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	3.500.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.094.400,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	20.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	177.344.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.755.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	111.220.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10.270.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	10 Unit	10.270.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	10.950.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	8 Unit	10.950.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	63.535.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	2 Unit	90.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**308.842.000,00**						**-**	**351.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Taman)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **88**	**100** **78**	**100** **78**	**100** **78**	**308.842.000,00**	-	-	-	-	-	-	**351.000.000,00**	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	308.842.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	351.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarak atan	7.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	3 Lembaga Kemasyara k atan	11.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	1 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	201.842.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**11.550.000,00**						**-**	**12.000.000,00**	
	[Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Taman)]	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.550.000,00**	-	-	-	-	-	-	**12.000.000,00**	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	11.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	12.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	11.550.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	12 Laporan	12.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**7.000.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	
	[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Taman)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.000.000,00**	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	-	7.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	7.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Wanarejan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Wanarejan Selatan	50 Orang	7.000.000,00	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
	KELURAHAN BEJI						**672.991.300,00**							**718.350.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**672.991.300,00**							**718.350.000,00**	
7,01	**KECAMATAN**						**672.991.300,00**							**718.350.000,00**	
KODE	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
						TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
										NASIONAL	**DAERAH**				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**340.091.300,00**						**-**	**364.350.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Taman)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**100** **100**	**340.091.300,00**	-	-	-	-	-	-	**364.350.000,00**	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	83.367.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	85.900.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.089.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan					
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.036.300,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Paket	61.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.501.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Paket	6.200.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.120.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Dokumen	3.200.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12.620.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Laporan	13.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.290.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14.290.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	2 Unit	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.494.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	199.100.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.330.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Laporan	5.100.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20.820.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola	Kelurahan Beji	12 Laporan	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	pemerintahan				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172.344.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	12 Laporan	173.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	58.350.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	800.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	5 Unit	850.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1.460.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	5 Unit	2.500.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42.680.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Unit	55.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**325.910.000,00**						**-**	**347.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Taman)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **88**	**100** **78**	**100** **78**	**100** **78**	**325.910.000,00**	-	-	-	-	-	-	**347.000.000,00**	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	305.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	-	-	326.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakat an	5.910.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	4 Lembaga Kemasyarakat an	6.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	106.701.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Unit	110.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	193.298.500,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	4 Pokmas / Ormas	210.000.000,00	KELURAHAN BEJI
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**325.910.000,00**	-	-	-	-	-	-	**347.000.000,00**	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakat an	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	1 Lembaga Kemasyarakat an	21.000.000,00	KELURAHAN BEJI
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**6.990.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	
	[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Taman)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.990.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.000.000,00**	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	6.990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	-	7.000.000,00	KELURAHAN BEJI

https://jdih.pemalangkab.go.id/

										dan penyelundupan					
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	6.990.000,00	Kab. Pemalang, Taman, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan	Kelurahan Beji	50 Orang	7.000.000,00	KELURAHAN BEJI
J U M L A H							**7.211.320.000,00**							**7.491.918.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Taman merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Taman Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Taman memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Taman secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Taman Tahun 2026.

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 61 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

CAMAT TAMAN KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja; dan
b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Taman melalui Sekretaris Camat.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TAMAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 61 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

No	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Camat Taman	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Taman	Anggota	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Taman	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Taman	Anggota	
6.	Kepala Seksi Trantibum pada Kecamatan Taman	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Taman	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Taman	Anggota	
9.	Staf pada Kecamatan Taman	Anggota	SHELA ROSALIA
10.	Staf pada Kecamatan Taman	Anggota	WARI RAHAYU
11.	Staf pada Kecamatan Taman	Anggota	CARINTO

CAMAT TAMAN

IRFAN SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

BERITA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TAMAN TAHUN 2026

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2025 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan Taman

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan hal berikut

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Tahun 2025 yang disampaikan Camat Taman (Drs. SUKISMAN, M.A).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2025 sebagaiman telah dirangkum menjadi keputusan maka pada

Hari dan Tanggal	Rabu, 23 Juni 2025
Jam	09.00 s/d selesai
Tempat	Pendopo Kecamatan Taman

Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026

MENYEPAKATI :

Rencana Kerja Kecamatan Taman Tahun 2026 agar segera ditetapkan dan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja Kecamatan Taman dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar capaian kinerjanya bias tercapai

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan sebagaimana mestinya

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Andi Susanto, S.IP	Sekertaris Camat	
2	Saryanto, S.E, M.Si	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan/ Plt. Kepala Seksi Pelayanan	
3	Moch. Teguh Arwibowo, S.M	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
4	Teguh Ambariyanto, S.KM	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	
5	A. Faozi, S.E	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	
6	Edi Siswanto, S.H	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	Wari Rahayu, A.Ma	Pelaksana	
8	Shela Rosalia, A. Md. Akun	Pelaksana	

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

Dipindai dengan CamScanner

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Kecamatan Taman
Kabupaten/kota:Pemalang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Taman, tanggal Oktober 2025

CAMAT TAMAN

Drs. SUKISMAN, M.A

Pembina Tk.I

NIP.19671220 199412 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kerja (Renja) Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup sesuai dengan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Tahap perumusan rancangan Renja;
b. Tahap penyajian rancangan Renja;
c. Persiapan penyusunan;
d. Penyusunan rancangan awal;
e. Penyusunan rancangan;
f. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
g. Perumusan rancangan; dan
h. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026, disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Sedangkan Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Peran penting kecamatan adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat diwilayahnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Peran ini mencakup tugas-tugas seperti pengoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana pelayanan umum, pembinaan pengawasan kegiatan desa dan kelurahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang tahun 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6)
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun xxx Nomor xxx)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx Tahun xxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor xxx Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dalam rangka melaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan satu tahunan untuk memberikan arah pembangunan dan sinergitas program dan kegiatan, baik yang dilakukan sendiri oleh Kecamatan Comal Kabupaten

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemalang dan yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat untuk menggambarkan capaian kinerja yang dapat dituangkan ke dalam Renja dan RKA PD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Kecamatan Comal;
3. Memberikan gambaran Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk mencapai target pelayanan, pada Tahun 2026 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penunjang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang RPJMD 2025-2029.

Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2025-2029 yaitu: **"PEMALANG BERCAHAYA - Bersih, Cakap, Handal, Mulya"**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

Bersih, Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Cakap, dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal, dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislative bersama unsur masyarakatnya.

Mulya, Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan local sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religious.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi sebagai berikut :

MISI 1 "RESIK"

Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.

MISI 2 "HIJAU"

Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM di masyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

MISI 3 "APIK"

Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.

MISI 4 "PEDULI"

Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

MISI 5 "SILATURAHMI"

Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara gotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.

MISI 6 "ORGANISATORIS"

Meningkatkan Pemerintah yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

MISI 7 "DIGITALISASI"

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi

MISI 8 "IKHLAS"

Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang. Pelayanan Kecamatan terdapat dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan diwilayah kecamatan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Pencapaian sasaran ini apabila dikaitkan dengan pelayanan Kecamatan Comal diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dalam tata pemerintahan.

Pada tahun 2024 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.222.853.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.779.261.672 atau sebesar 91,51% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 443.591.328,- Berdasarkan Renstra Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Kecamatan Comal melaksanakan 6 Program, 16 Kegiatan dan 67 Sub

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kegiatan.

Adapun Program, kegiatan dan Sub.Kegiatan Kecamatan Comal sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Sub KegiatanEvaluasiKinerjaPerangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
c. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
c. Sub Kegiatan Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan perundang-Undangan
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
f. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
g. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Comal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Comal memiliki 2 sasaran strategis, dan ke 2 sasaran tersebut tercapai.
2. Kecamatan Comal ada 6 Program, 16 Kegiatan dan 67 Sub.Kegiatan, dari Program kegiatan tersebut semuanya tercapai dengan hasil sangat tinggi.

Pencapaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun 2024 dan perkiraan capaian target tahun berjalan (2025) dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Comal Tahun 2024 Dan Pencapaian RENSTRA Kecamatan Comal s/d Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan n Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+	11=(10/4)
	URUSAN								
	BIDANG								
	UNIT ORGANISASI								
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				100 %			100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	2 dok	100 %	2 dok	2 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 dok	12 dok	100 %	12 dok	12 dok	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 dok	2 dok	100 %	2 dok	2 dok	100 %
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat**							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		12 lap	12 lap	100 %	12 lap	12 lap	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah							
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		2 lap	2 lap	100 %	2 lap	2 lap	100 %
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang_undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		24 dok	24 dok	100%	24 dok	24 dok	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		24 lap	24 lap	100%	24 lap	24 lap	100 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100 %
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah							
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		3 unit	3 unit	100 %	3 unit	3 unit	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		4 unit	4 unit	100 %	4 unit	4 unit	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029 (akhir periode Renstra)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan (Th 2025/ n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Th 2024	Realisasi Renja Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		14 unit	14 unit	100 %	14 unit	14 unit	100 %
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10 unit	10 unit	100 %	10 unit	10 unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100 %
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**							
1.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		2 dok	2 dok	100 %			100 %
2.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan							
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan		1 dok	1 dok	100 %			100 %
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan		1 lap	1 lap	100 %			100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan		2 lap	2 lap	100 %			100 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan		100 dok	100 dok	100 %	100 dok	100 dok	100 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan		12 lap	12 lap	100 %	12 lap	12 lap	100 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**							
1.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**							
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		6 lembaga kemasyarakatn	6 lembaga kemasyarakatn	100 %	6 lembaga kemasyarakatn	6 lembaga kemasyarakatn	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		12 lap	12 lap	100 %	12 lap	12 lap	100 %
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**							
1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya**							
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		1	1	100 %	1	1	100 %
2.	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakanya**							
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia		5	5	100 %	5	5	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase **potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**							
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**							
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia		250	250	100 %	250	250	100 %
	Penanganan Konflik, Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		2	2	100 %	2	2	100 %
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan		12	12	100 %	12	12	100 %
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik**							
1.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**							
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa		2	2	100 %	2	2	100 %
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa		1	1	100 %	1	1	100 %
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		1	1	100 %	1	1	100 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa		1	1	100 %	1	1	100 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa		1	1	100 %	1	1	100 %
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		2	2	100 %	2	2	100 %
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		2	2	100 %	2	2	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		1	1	100 %	1	1	100 %
	KELURAHAN PURWOHARJO								
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Sakip, Indeks RB**							
1.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**							
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	12	100 %	12	12	100 %
2.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**							
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan		12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	12	100 %	12	12	100 %
3.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**							
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		4	4	100 %	4	4	100 %
	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		7	7	100 %	7	7	100 %
2.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.	**Kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Jumlah kehadiran lembaga peserta musrenbang desa dan musrenbang kecamatan**							
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan		5	5	100 %	5	5	100 %
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1	1	100 %	1	1	100 %
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		6	6	100 %	6	6	100 %

Pemalang, Nopember 2025
Camat Comal
Kabupaten Pemalang

DEDI SARWOADJI, AP.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19741206 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Comal secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal selama tahun 2025–2029 adalah "Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Comal sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Comal selama tahun 2025-2029, adalah "Meningkatnya pelayanan kecamatan". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal tercantum dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Pagu/Target2025	Realisasi CapaianRKPD		Tingkat capaian kinerja RKPD TW III 2025	Status
					2024	2025 TW III		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**Rp. 15.648.600**		**Rp. 10.206.400**		
1	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	74,44	74,44	74,44	55,83	75,00	ST
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**Rp. 1.441.405.340**		**Rp. 288.972.700**		
2	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	75,00	75,00	ST
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**Rp. 102.567.800**		**Rp. 8.702.200**		
3	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	75,00	75,00	ST
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**Rp. 124.611.100**		**Rp. 79.770.000**		
4	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	75,00	75,00	ST
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**Rp. 23.387.200**		**Rp. 9.984.000**		
5	Persentase Desa bertata kelola Pemerintahan baik	%	88,89	83,33	77,78	62,49	75,00	ST

Capaian kinerja seluruh indikator program sangat tinggi karena seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dan terciptanya Kerjasama yang baik antar ASN di kecamatan sesuai dengan tusi masing-masing. Dilihat dari capaian keuangannya sangat tinggi. Capaian serapan anggaran sampai dengan TW III Tahun 2025 sebesar Rp. 3.275.621.769 atau 54,31%.

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Tujuan dilakukannya evaluasi tersebut adalah untuk :

- Memperoleh informasi tentang implentasi Sistem SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Evaluasi dilakukan melalui 5 Komponen manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan Inspektorat, nilai yang didapatkan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	21,56
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	20,39
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	9,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	15,32
	Jumlah	100 %	66,67

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Kecamatan Comal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Comal perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Comal untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Comal yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Comal juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Comal.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD 2025- 2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan Comal, maka fungsi dan tugas Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang terkait erat dengan pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pemalang

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN COMAL						**4.659.788.970,00**							**4.659.788.970,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.659.788.970,00**							**4.659.788.970,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.659.788.970,00**							**4.659.788.970,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**						**4.439.475.770,00**						**-**	**4.439.475.770,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Comal)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.439.475.770,00**	-	-	-	-	-	-	**4.439.475.770,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi													
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun*	-			20 dokumen	32.667.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	32.667.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.221.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.221.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.754.800,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.754.800,00	KECAMATAN COMAL

	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.719.600,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.719.600,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.706.900,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.706.900,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.287.300,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.287.300,00	KECAMATAN COMAL
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	6.089.300,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		6.089.300,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												pertanian dan perikanan				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.888.100,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.888.100,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun*	-			27 dokumen	3.848.909.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	3.848.909.750,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											pemberantasan kemiskinan.	nisasi pertanian dan perikanan				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.842.729.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.842.729.000,00	KECAMATAN COMAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.982.100,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.982.100,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.198.650,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.198.650,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun*	-			3 dokumen	4.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.000.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun*	-			61 dokumen	177.280.220,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	177.280.220,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.521.100,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.521.100,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	129.801.220,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		129.801.220,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.040.400,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.040.400,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	31.418.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		31.418.000,00	KECAMATAN COMAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.999.500,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		1.999.500,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia*	-			15 unit	86.075.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	86.075.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		15.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	71.075.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		71.075.000,00	KECAMATAN COMAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun*	-			36 dokumen	177.963.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	177.963.800,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.799.800,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.799.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.845.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		29.845.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	143.319.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		143.319.000,00	KECAMATAN COMAL
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2026	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.580.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	112.580.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	43.130.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		43.130.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15.425.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		15.425.000,00	KECAMATAN COMAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.275.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		7.275.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.439.475.770,00**	-	-	-	-	-	-	**4.439.475.770,00**	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	44.250.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	-		44.250.000,00	KECAMATAN COMAL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**17.890.000,00**						**-**	**17.890.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Comal)]	**Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**17.890.000,00**	-	-	-	-	-	-	**17.890.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tersusun*	-			2 dokumen	5.390.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	5.390.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	5.390.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikana	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.390.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

												n				
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang tersusun*	-			4 dokumen	7.500.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	7.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											pembe rantasan kemiskin an.	nisasi pertania n dan perikana n				
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang tersusun*	-			112 dokumen	5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	5.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**73.235.000,00**						**-**	**73.235.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Comal)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **61.75**	**100** **68.12**	**100** **75.50**	**100**	**73.235.000,00**	-	-	-	-	-	-	**73.235.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tersusun*	-			19 dokumen	73.235.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hiliri sasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	73.235.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakat an	8.735.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertania n dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		8.735.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		34.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		30.500.000,00	KECAMATAN COMAL
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**10.022.400,00**						**-**	**10.022.400,00**	
		[Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Comal)]	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.022.400,00**	-	-	-	-	-	-	**10.022.400,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersusun*	-			1 laporan	5.022.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	5.022.600,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.022.600,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.022.600,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun*	-			1 laporan	4.999.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	4.999.800,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	4.999.800,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.999.800,00	KECAMATAN COMAL
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**87.665.800,00**						**-**	**87.665.800,00**	
		[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Comal)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**87.665.800,00**	-	-	-	-	-	-	**87.665.800,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun*	-			214 dokumen	87.665.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	87.665.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun				200 Orang	61.666.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		61.666.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								rantasan kemiskinan.	pertanian dan perikanan				
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	1.999.800,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		1.999.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		24.000.000,00	KECAMATAN COMAL
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**31.500.000,00**						**-**	**31.500.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Comal)]	**Jumlah Desa yang Naik Statusnya**	**3**	**3**	**3**	**2**	**31.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**31.500.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun*	-			11 dokumen	31.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	31.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.500.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
		KELURAHAN PURWOHARJO						**480.940.030,00**							**480.940.030,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**480.940.030,00**							**480.940.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**480.940.030,00**							**480.940.030,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**211.257.830,00**						**-**	**211.257.830,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Comal)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**211.257.830,00**	-	-	-	-	-	-	**211.257.830,00**	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun*	-			60 dokumen	85.926.330,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	85.926.330,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.878.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		2.878.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	pertanian dan perikanan				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	70.651.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		70.651.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3.797.330,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		3.797.330,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		2.600.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		6.000.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia*	-			7 dokumen	12.675.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	12.675.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	3.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		3.000.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.675.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		9.675.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun*	-			36 dokumen	89.026.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	89.026.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.450.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		6.450.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.084.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		19.084.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.492.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		63.492.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara*	-			11 dokumen	23.630.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	23.630.500,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	7.787.500,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		7.787.500,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.300.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		4.300.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.543.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		11.543.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**266.132.200,00**						**-**	**266.132.200,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Comal)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**266.132.200,00**	-	-	-	-	-	-	**266.132.200,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan yang tersusun*	-			12 dokumen	266.132.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	266.132.200,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	12.948.200,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		12.948.200,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		100.000.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	153.184.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		153.184.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**3.550.000,00**						**-**	**3.550.000,00**	
		[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Comal)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.550.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.550.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun*	-			1 dokumen	3.550.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	3.550.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				384 Orang	3.550.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		3.550.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
								5.140.729.000,00							**5.140.729.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun*	-			1 dokumen	3.550.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moderrnisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	3.550.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				384 Orang	3.550.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		3.550.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	J U M L A H						**5.140.729.000,00**							**5.140.729.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok- pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Comal yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.5

USULAN KEGIATAN FISIK
PRIORITAS MUSRENBANG KECAMATAN COMAL TAHUN 2025
UNTUK PELAKSANAAN TAHUN 2026

DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN COMAL

NO	KELURAHAN/DESA	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	KEL. PURWOHARJO	Rabat Beton	RT 09 RW 04	500 x 4 m	195.572.000
2	TUMBAL	Pembangunan Drainase	Dusun Silayur RW 02	385 x 60 x 50 m	140.000.000
3	AMBOKULON	Pembangunan Rabat Beton	Dusun III	170 x 5 m	140.000.000
4	GANDU	Talud Sungai Kebo Sasaran Usaha Pertanian	RT 01 RW 01, 03	500 m	140.000.000
5	KEBOJONGAN	Sender Saluran Irigasi	RT 03 RW 01	400 m	140.000.000
6	KLEGEN	Talud Pertanian Pertanian	Pertanian Desa Klegen	150 m	140.000.000
7	SUSUKAN	Pembangunan Jembatan	RT 4 RW 2	8 x 4 m	140.000.000
8	GEDEG	Talud sungai (Kali Klethek)	RT 08 RW 03	600 m	110.000.000
TOTAL (Rp)					**1.145.572.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

USULAN KEGIATAN NON FISIK
PRIORITAS MUSRENBANG KECAMATAN COMAL TAHUN 2025
UNTUK PELAKSANAAN TAHUN 2026

DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN COMAL

NO	DESA/KEL	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	PURWOSARI	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Purwosari	4 Kelompok	35.000.000
2	PECANGAKAN	Pelatihan Hantaran	Desa Pecangakan	1 Paket	15.000.000
3	SARWODADI	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Desa Sarwodadi	25 Peserta	25.000.000
4	GINTUNG	Pelatihan Tata Rias	Desa Gintung	30 Orang	42.500.000
5	KAUMAN	Pelatihan Kerajinan Tangan	Desa Kauman	1 Paket	40.000.000
TOTAL (Rp)					**157.500.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

HASIL VERIFIKASI USULAN KEGIATAN FISIK MUSRENBANG TAHUN 2025
DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN COMAL

NO	DESA/KELURAHAN	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SWADAYA (Rp)	ANGGARAN(Rp)	TOTAL (Rp)
1	TUMBAL	Pembangunan Drainase	Dusun Silayur RW 02	385 x 60 x 50 m	5.000.000	253.200.000	258.200.000
2	PECANGAKAN	Rabat Beton	Dusun IV	250 x 3,5 x 0,15 m	5.000.000	400.000.000	405.000.000
3	PURWOSARI	Normalisasi dan Talud Sungai Banger	Desa Purwosari	4 x 1250 m	7.000.000	250.000.000	257.000.000
4	SIKAYU	Pembangunan Drainase	Perbatasan Desa Sikayu-Sukorejo	400 x 0,40 m	20.000.000	400.000.000	420.000.000
5.	SIDOREJO	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	RT 5 RW 2 dan RT 1 RW 3	500 x 1 x 0,30 x 2 m	40.000.000	400.000.000	440.000.000
6	LOWA	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW 03	372 m	3.700.000	300.000.000	303.700.000
7	AMBOKULON	Pembangunan Rabat Beton	Dusun III	300 x 5 m	10.000.000	200.000.000	210.000.000
8	GEDEG	Talud sungai (Kali Klethek)	RT 08 RW 03	600 m	10.000.000	400.000.000	410.000.000
9	GANDU	Talud Sungai Kebo Sasaran Usaha Pertanian	RT 01 RW 01, 03	500 m	10.000.000	300.000.000	310.000.000
10	GINTUNG	Ready Mix Jalan Utama	RT 01 RW 01	175 x 4 x 0,2 m	15.000.000	192.000.000	207.000.000
11	SARWODADI	Pembangunan Rabat Beton	RT 04 RW 01	400 x 3,5 x 0,20 m	9.000.000	360.000.000	369.000.000
12	SUSUKAN	Pembangunan Jembatan	RT 4 RW 4	8 x 4 m	4.500.000	150.000.000	154.500.000
13	KLEGEN	Talud Pertanian Pertanian	Pertanian Desa Klegen	150 m	2.700.000	200.000.000	202.700.000
14	WONOKROMO	Talud Penahan Jalan Kanan Kiri	Sawah Blok Perangkat	500 m	7.500.000	250.000.000	257.500.000
15	KEBOJONGAN	Sender Saluran Irigasi	RT 03 RW 01	400 m	3.000.000	250.000.000	253.000.000
16	KANDANG	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Blook 007	314 x 2,5 x 0,15 m	7.500.000	150.000.000	157.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

17	KAUMAN	Rabat Beton Jalan Tembus Kauman-Gintung	RT 03 RW 03	380 m	4.000.000	250.000.000	254.000.000
18	KEL. PURWOHARJO	Rabat Beton	RT 09 RW 04	500 x 4 m	5.000.000	400.000.000	405.000.000
J U M L A H (Rp)							**5.274.100.000**

HASIL VERIFIKASI USULAN KEGIATAN Non FISIK MUSRENBANG TAHUN 2025
DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN COMAL

NO	DESA/KELURAHAN	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SWADAYA (Rp)	ANGGARAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	TUMBAL	Rias Pengantin	Desa Tumbal	1 Paket	3.000.000	75.000.000	78.000.000
2	PECANGAKAN	Pelatihan Hantaran	Desa Pecangakan	1 Paket	1.000.000	20.000.000	21.000.000
3	PURWOSARI	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Purwosari	4 Kelompok	1.500.000	40.000.000	41.500.000
4	SIKAYU	Pelatihan Setir Mobil	Desa Sikayu	1 Paket	5.000.000	25.000.000	30.000.000
5	SIDOREJO	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Sidorejo	1 Paket	3.000.000	30.000.000	33.000.000
6	LOWA	Ternak Lele	Desa Lowa	1 Paket	2.000.000	50.000.000	52.000.000
7	AMBOKULON	Pelatihan Bengkel Motor	Desa Ambokulon	25 Orang	2.000.000	50.000.000	52.000.000
8	GEDEG	Pelatihan Pembuatan Pupuk Insektisida Organik Tanaman Padi	Desa Gedeg	20 Orang	1.000.000	50.000.000	51.000.000
9	GANDU	Pelatihan Buket Bunga	Desa Gandu	20 Orang	2.000.000	50.000.000	52.000.000
10	GINTUNG	Pelatihan Tata Rias	Desa Gintung	30 Orang	5.000.000	50.000.000	55.000.000
11	SARWODADI	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Desa Sarwodadi	25 Peserta	1.500.000	30.000.000	31.500.000
12	SUSUKAN	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Susukan	40 Orang	1.500.000	50.000.000	51.500.000
13	KLEGEN	Pelatihan Peracik Kopi (BARISTA)	Desa Klegen	10 Orang	1.000.000	25.000.000	26.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

14	WONOKROMO	Pelatihan Membuat Buket	Desa Wonokromo	1 Paket	2.500.000	50.000.000	52.500.000
15	KEBOJONGAN	Pelatihan Menjahit	Desa Kebojongan	50 Orang	3.000.000	50.000.000	53.000.000
16	KANDANG	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Kandang	1 Paket	3.000.000	60.000.000	63.000.000
17	KAUMAN	Pelatihan Kerajinan Tangan	Desa Kauman	1 Paket	2.500.000	45.000.000	47.500.000
18	KEL. PURWOHARJO	Pelatihan Setir Mobil + SIM	Kel. PURWOHARJO	20 Orang	2.000.000	80.000.000	82.000.000
J U M L A H (Rp)							**872.500.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN, SASARAN KECAMATAN COMAL

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

3.1.1 Tujuan

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Comal secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum**.** Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal selama tahun 2025–2029 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Comal sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Comal dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Comal selama tahun 2025- 2029, adalah "**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

3.2. Strategi Rencana Kerja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Strategi dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu Terwujudnya Pemalang Bercahahaya, Bersih, Cakap, Handal dan Mulya. dengan demikian strategi ini merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Perumusan Strategi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang didasarkan pada kriteria :

1. Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3. Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dengan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).

Dari keempat strategi tersebut selanjutnya dilakukan penahapan Renstra Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan ini sangat penting karena memungkinkan pengelolaan sumber daya dan waktu secara efisien, mendukung koordinasi antar sektor, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian	Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
				2025	2026	2029
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang berkualitas dan merata		Jumlah desa/kelurahan mandiri di Kecamatan	Jumlah	3	2	2

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	Nilai	84,50	85,00	86,50
		Prosentase meningkatnya jumlah Desa Mandiri	%	17,65	29,41	64,69

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Secara garis besar Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan teknis bidang kewilayahan.
2. Jumlah Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebanyak 6 (enam) Program dengan 16 (enam belas) Kegiatan, dan 70 (Tujuh puluh) Sub Kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 4.675.788.970,- (Empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Comal memuat 6 program, 17 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub KegiatanEvaluasiKinerjaPerangkat Daerah

2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
e. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
f. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
d. Sub Kegiatan Peningkatan Patisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa
e. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
g. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
h. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
c. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
d. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
b. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan perundang-Undangan
d. Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipati

Adapun rekapitulasi perubahan anggaran tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN COMAL						**4.674.161.950,00**							**4.675.788.970,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.674.161.950,00**							**4.675.788.970,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.674.161.950,00**							**4.675.788.970,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.425.348.750,00**						**-**	**4.439.475.770,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Comal)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.425.348.750,00**	-	-	-	-	-	-	**4.439.475.770,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun*	-			20 dokumen	32.667.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	32.667.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.221.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.221.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.754.800,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.754.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.719.600,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.719.600,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.706.900,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.706.900,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.287.300,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.287.300,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	6.089.300,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		6.089.300,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.888.100,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.888.100,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun*	-			27 dokumen	3.729.790.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	3.848.909.750,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.723.610.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.842.729.000,00	KECAMATAN COMAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.982.100,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.982.100,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.198.650,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.198.650,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun*	-			3 dokumen	4.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	4.000.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.000.000,00	KECAMATAN COMAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun*	-			61 dokumen	199.508.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	177.280.220,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.552.500,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.521.100,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan					
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	149.334.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		129.801.220,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.040.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.040.400,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	33.082.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		31.418.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		1.999.500,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia*	-			15 unit	86.689.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	86.075.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		15.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	71.689.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		71.075.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun*	-			36 dokumen	169.288.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	177.963.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.799.500,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.799.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	38.945.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		29.845.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	125.544.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		143.319.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera*	-			5 dokumen	203.405.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	112.580.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	43.130.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		43.130.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15.350.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		15.425.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.275.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		7.275.000,00	KECAMATAN COMAL
		-	-	-	-	-	-	**4.425.348.750,00**	-	-	-	-	-	-	**4.439.475.770,00**	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	135.150.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P4. Peningkatan infrastruktur yang mampu menguran gi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangun an; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		44.250.000,00	KECAMATAN COMAL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**17.890.000,00**						**-**	**17.890.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas penyeelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Comal)]	**Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**100**	**100**	**100**	**100**	**17.890.000,00**	-	-	-	-	-	-	**17.890.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tersusun*	-			2 dokumen	5.390.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	5.390.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	5.390.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.390.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang tersusun*	-			4 dokumen	7.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	7.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang tersusun*	-			112 dokumen	5.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-		5.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang			KECAMATAN COMAL
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		2.500.000,00	KECAMATAN COMAL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**73.235.000,00**						**-**	**73.235.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Comal)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100** **61.75**	**100** **68.12**	**100** **75.50**	**100**	**73.235.000,00**	-	-	-	-	-	-	**73.235.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tersusun*	-			19 dokumen	73.235.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	73.235.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	8.735.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		8.735.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		34.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30.500.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		30.500.000,00	KECAMATAN COMAL
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**10.022.400,00**						**-**	**10.022.400,00**	
		[Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Comal)]	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.022.400,00**	-	-	-	-	-	-	**10.022.400,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersusun*	-			1 laporan	5.022.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	5.022.600,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.022.600,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		5.022.600,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun*	-			1 laporan	4.999.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	4.999.800,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	4.999.800,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.999.800,00	KECAMATAN COMAL
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**99.665.800,00**						**-**	**87.665.800,00**	
		[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Comal)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99.665.800,00**	-	-	-	-	-	-	-	**87.665.800,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

																GGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun*	-			214 dokumen	99.665.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	87.665.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan				200 Orang	73.666.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		61.666.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	1.999.800,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		1.999.800,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

																PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		24.000.000,00	KECAMATAN COMAL
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**48.000.000,00**						**-**	**47.500.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Comal)]	**Jumlah Desa yang Naik Statusnya**	**3**	**3**	**3**	**2**	**48.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**47.500.000,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun*	-			11 dokumen	48.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang	-	47.500.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT D
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				16 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		16.000.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		3.500.000,00	KECAMATAN COMAL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang		4.000.000,00	KECAMATAN COMAL
		KELURAHAN PURWOHARJO						**527.711.050,00**							**480.940.030,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**527.711.050,00**							**480.940.030,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**527.711.050,00**							**480.940.030,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**211.212.850,00**						**-**	**211.257.830,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Comal)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**211.212.850,00**	-	-	-	-	-	-	**211.257.830,00**	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun*	-			60 dokumen	86.575.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	85.926.330,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

																GGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.877.500,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		2.878.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	70.650.350,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		70.651.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4.450.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		3.797.330,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.598.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		2.600.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

																H PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		6.000.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia*	-			7 dokumen	13.231.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	12.675.000,00	KELURAHAN PURWOH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				ARJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	2.912.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		3.000.000,00	KELURAHANPURWOHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.319.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		9.675.000,00	KELURAHANPURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun*	-			36 dokumen	89.026.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	89.026.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.450.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		6.450.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.084.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		19.084.000,00	KELURAHAN PURWOH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				ARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.492.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		63.492.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

																KAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara*	-			11 dokumen	22.380.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	23.630.500,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	7.187.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		7.787.500,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	3.650.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		4.300.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.543.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan moder nisasi pertanian	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		11.543.000,00	KELURAHAN PURWOH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

											rantasan kemiskinan.	dan perikanan				ARJO
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**312.948.200,00**						**-**	**266.132.200,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Comal)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif** **Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**312.948.200,00**	-	-	-	-	-	-	**266.132.200,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan yang tersusun*	-			3 dokumen	312.948.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	266.132.200,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	12.948.200,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		12.948.200,00	KELURAHAN PURWOHARJO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	146.476.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		100.000.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	153.524.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		153.184.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**3.550.000,00**							**-**	**3.550.000,00**	
		[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Comal)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.550.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**3.550.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun*	-			1 dokumen	3.550.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal	-	3.550.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				384 Orang	3.550.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Purwoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal		3.550.000,00	KELURAHAN PURWOHARJO
	J U M L A H							**5.201.873.000,00**						**5.156.729.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Comal merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Comal Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Comal memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Comal secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Comal Tahun Tahun 2026 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Comal Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Comal Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Comal Tahun 2026.

Pemalang, Oktober 2025
Camat Comal
Kabupaten Pemalang

DEDI SARWOADJI, AP.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19741206 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/ Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota : Kecamatan Comal

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerahdan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Pemalang, Nopember 2025
Camat Comal
Kabupaten Pemalang

EDI SARWOADJI, AP.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19741206 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL

KEPUTUSAN CAMAT COMAL
NOMOR : 050 / 57 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

CAMAT COMAL
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor xxx Tahun xxx tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx Tahun xxx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor xx)

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan Informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
b. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Comal.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 13 Nopember 2025

CAMAT COMAL
KABUPATEN PEMALANG

DEDI SARWOADJI, AP.,MH
Pembina Tingkat I
NIP.19741206 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT COMAL KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050 / 57 / Kec.Comal / 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Comal	Penanggung Jawab	
2	Sekcam Comal	Ketua	
3	Kasubbag Binprokeu	Sekretaris	
4	Kasi Tapem	Anggota	
5	Kasi PMD	Anggota	
6	Kasi Pelayanan	Anggota	
7	Kasi Trantibum	Anggota	
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Pelaksana pada Subbag Binprokeu	Anggota	
10	Pelaksana pada Subbag Binprokeu	Anggota	

Pemalang, 13 Oktober 2025

CAMAT COMAL
KABUPATEN PEMALANG

DEDI SARWOAJI, A.P., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19741206 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

FF. RENCANA KERJA KECAMATAN AMPELGADING TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ampelgading yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Ampelgading merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Ampelgading melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Ampelgading dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Ampelgading mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Ampelgading mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Ampelgading dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Ampelgading untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampelgading dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2025, pengendalian kegiatan tahun 2025, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Ampelgading
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Ampelgading
Tahun 2026

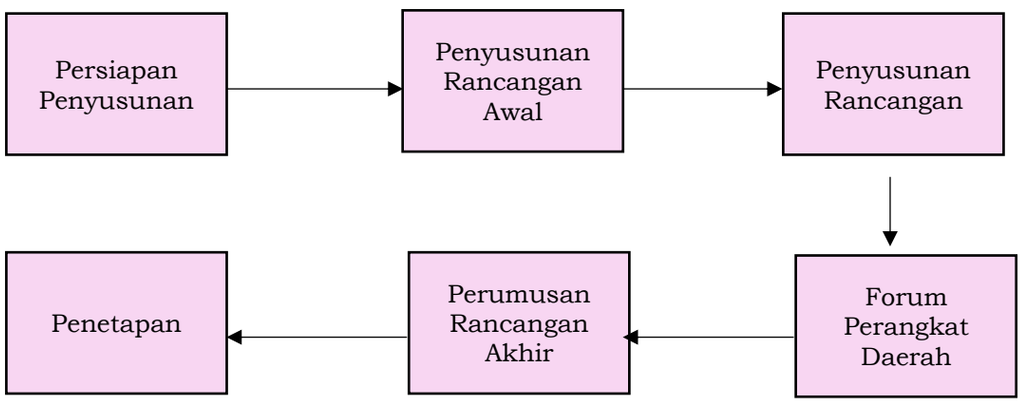

Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Ampelgading tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

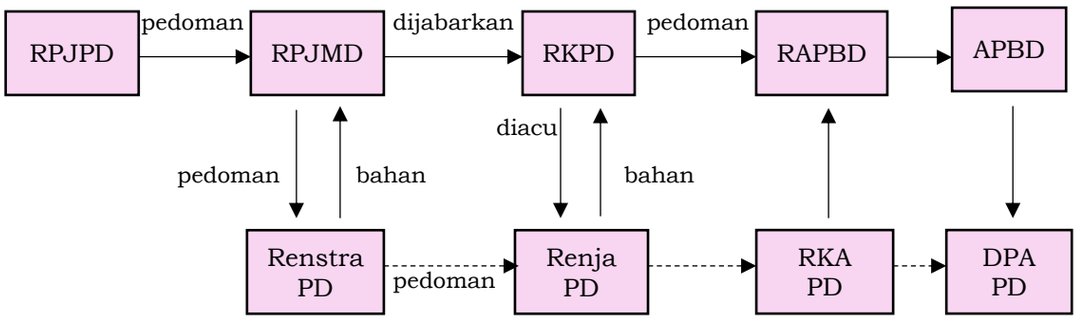

Renja Kecamatan Ampelgading berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampelgading tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Ampelgading);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan PembangunandanKeuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Ampelgading adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2025 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Ampelgading tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Ampelgading sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Ampelgading;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Ampelgading tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Ampelgading Tahun 2025, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2026 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Ampelgading, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ampelgading, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ampelgading, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ampelgading, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ampelgading, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampelgading beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Ampelgading.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN AMPELGADING TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ampelgading Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Ampelgading

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Ampelgading pada tahun 2023 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Ampelgading sebesar Rp 3.053.632.000,00,- (Tiga milyar lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terbagi dalam 6 program, 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 2.864.053.147,00,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 93,79%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Ampelgading sebesar Rp 3.040.674.000,- (Tiga milyar empat puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 39 sub

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp ..... atau sebesar ....%

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Ampelgading telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun 2025, Kecamatan Ampelgading telah melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 6 Program, 14 Kegiatan dan 49 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Faktor – faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Keseriusan semua unsur di Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan tugas
   b. Kedisiplinan yang baik dari atasan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
   c. Dapat menggunakan/merealisasikan anggaran yang ada dengan efektif dan efisien
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Ampelgading yaitu tercapai di tahun 2023;

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ampelgading dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ampelgading dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ampelgading s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP		51,65	60	60,04	100	62	40	100
		IRB		40,63	42					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah aktivitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	……..dokumen	……..dokumen	7 Aktivitas	7 Aktivitas	100 %	……..dokumen	……..dokumen	….. %
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun								
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.1.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
7.1.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.1.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Perubahan DPA-SKPD	DPA-SKPD yang Tersusun								
7.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	24 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	24 Dokumen		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
7.1.1.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**3 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	**100%**	**3 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	100%
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	20 / 84		15 Orang	15 Orang	100%	13 orang/bulan	%	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		dan Tunjangan ASN								
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7.1.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	0	0
7.1.1.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aktivitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**1 Aktivitas**	**1 Aktivitas**	**100%**	**1 Aktivitas**	**1 Aktivitas**	**100%**
7.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	250 orang		40 Orang	40 Orang	100%	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.1.1.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%		**7 Aktivitas**	**7 Aktivitas**	**100%**	**7 Aktivitas**	**7 Aktivitas**	**100%**
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	24 Paket		9 Paket	9 Paket	100%	9 Paket	9 Paket	100%
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	36 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	0	0	0
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	20 Paket		7 Paket	7 Paket	100%	0	0	0
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	35 Paket		53 Paket	53 Paket	100%	53 Paket	53 Paket	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	15 Paket		5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terfasilitasi	1140 Laporan		361 Laporan	361 Laporan	100%	396 Laporan	396 Laporan	100%
7.1.1.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Aktivitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%		1 Aktivitas	1 Aktivitas	**100%**			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.1.1.2.07.1	Pengadaan kendaraan perorangan dan kendaraan dinas jabatan		3 unit		0	0	0	0	0	
7.1.1.2.07.5	Pengadaan mebel		22 unit		0	0	0	1 Unit	1 Unit	
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25 unit		2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	
7.1.1.2.07.9	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		25 unit		0	0	0	0	0	
7.1.1.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya				0	0	0	0	0	
7.1.1.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aktivitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100%**		**3 Aktivtas**	**3 Aktivtas**	**100%**	**3 Aktivtas**	**3 Aktivtas**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Pemerintahan Daerah								
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	130 Laporan	130 Laporan	
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Rekening jasa Sumber daya yang dibayarkan tiap bulan	15 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/bulan)	95 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	
7.1.1.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Aktivitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**		**4 Aktivitas**	**4 Aktivitas**	**100%**	**4 Aktivitas**	**4 Aktivitas**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Pemerintahan Daerah								
7.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit		14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	
7.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		37 Unit	37 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.1.2..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan public yang tersedia**	**88,89%**		**98,89%**	**87,89%**	**88,87%**	**88,89%**	**88,89%**	
7.1.2.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Aktivitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**		**1 Aktivitas**	**1 Aktivitas**	**100%**	**1 Aktivitas**	**1 Aktivitas**	
7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	
7.1.2.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja**	**Jumlah Aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak**			**3 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	**100%**	**3 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								
7.1.2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	35 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	
7.1.2.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	35 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	100%	60 Laporan	60 Laporan	
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan	100 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.1.2.2.04.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Aktivitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**		**2 Aktivitas**	**2 Aktivitas**	**100%**	**2 Aktivitas**	**2 Aktivitas**	
7.1.2.2.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilkasanakan	25 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	
7.1.2.2.04.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	1430 Laporan		288 Laporan	288 Laporan	100%	286 Laporan	286 Laporan	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		pada Urusan Pemerintahan								
7.1.2..	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masysrakat desa dan kelurahan yang aktif**	**97,00%**		**97%**	**96%**	**98,96%**	**97%**	**97%**	**100%**
7.1.3.2.01.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Aktivitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**15 Aktivitas**	**9 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	**100%**	**3 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	**100%**
7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100%	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.1.3.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan								
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80 Laporan	48 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	16 Laporan	100%
7.1.4..	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**-**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.1.4.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Aktivitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**5 Aktivitas**	**3 Aktivitas**	**1 Aktivitas**	**1 Aktivitas**	**100%**	**1 Aktivitas**	**1 Aktivitas**	
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	JumlahLaporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.1.5..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**Prosentase potensi konflik tingkat**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	PEMERINTAHAN UMUM	**desa dan kecamatan yang tertangani**								
7.1.5.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**20 Aktivitas**	**15 Aktivitas**	**4 Aktivitas**	**4 Aktivitas**	**100%**	**4 Aktivitas**	**4 Aktivitas**	
7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	750 Orang	450 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	150 Orang	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.1.5.2.01.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	90 Orang	54 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	18 Orang	18 Orang	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		dan Ketahanan Nasional								
7.1.5.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	10 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
7.1.5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.1.6..	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa bertatakelola pemerintahan baik**	**87,50%**		**87,50%**	**84,50**	**96,57%**	**87,5%**	**87,5%**	**100%**
7.1.6.2.01.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Jumlah Aktivitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**	**50 Aktivitas**	**30 Aktivitas**	**10 Aktivitas**	**10 Aktivitas**	**100%**	**10 Aktivitas**	**10 Aktivitas**	**100%**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pemerintahan Desa	**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7.1.6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	80 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80 Dokumen	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	80 Dokumen	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Pendayagunaan Aset Desa								
7.1.6.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	80 Dokumen	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
7.1.6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	65 Dokumen		0	0	0	13 Dokumen	0	
7.1.6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	80 Dokumen	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.1.6.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	28 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	
7.1.6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	80 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen
7.1.6.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangun Partisipatif	80 Dokumen	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
7.1.6.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi	80 Dokumen	48 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ampelgading Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampelgading

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	-	√	-	82,00	84,00	85,00	86,00	87,91		85,00	86,00	
2	Cakupan layanan kecamatan	%	-	√	-	93,44	94,68	94,68	94,68	87,72		94,68	94,68	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				60,00	62,00	64,00	68,00	40,63		64,00	68,00	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				41,00	51,00	61,00	71,00	51,65		61,00	71,00	
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				87,30	87,30	87,30	87,30	87,3		87,30	87,30	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				95,71	96,00	96,30	96,79	95,71		96,30	96,79	
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				73,74	79,00	89,49	84,49	91,35		89,49	84,49	

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ampelgading

Kecamatan Ampelgading adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Ampelgading berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan
b. Indeks Kepuasan Masyarakat
c. Nilai SAKIP OPD
d. Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun
e. Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif
f. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
g. Persentase konflik di masyarakat yang ditangani

Jumlah desa yang naik statusnya

Pada tahun 2024 IKM Kecamatan Ampelgading sebesar 88,19 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Ampelgading. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ampelgading meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2024, cakupan layanan Kecamatan Ampelgading tersebut mencapai 91,35% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah bidang pelayanan publik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Ampelgading meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 87,89% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 87,72% kewenangan dari total keseluruhan, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 95,71%, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus dipertahankan agar kinerjanya trantibum di Kecamatan Ampelgading tetap bisa dipertahankan. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 73,74% yaitu sebanyak 12 desa dari 16 desa di Kecamatan Ampelgading. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Ampelgading.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2023, Kecamatan Pemalang mendapat nilai SAKIP sebesar 51,65 (kategori C) dan IRB sebesar 40,63 (kategori ...)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Ampelgading perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Ampelgading untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Ampelgading yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Ampelgading juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

"Pemalang Bercahaya" Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah **Pemalang Bersih, Cakap, Handal, Mulya** dijabarkan sebagai berikut :

- **Bersih**: Pemalang menjadi kabupaten dengan lingkungan bersih dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
- **Cakap**: Masyarakat Pemalang unggul, berdaya saing, kreatif, memanfaatkan jejaring nasional, dan memiliki akhlak mulia.
- **Handal**: Pemerintahan tangguh dengan kepemimpinan kolaboratif yang bisa dipercaya; eksekutif-legislatif-masyarakat bekerja sama.
- **Mulya**: Pembangunan yang maju, lestari, berbudaya, berbasis vison jangka panjang dengan sinergi alam dan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa akronim **"RHAPSODI"**, dengan penjabaran sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- **Resik**: Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih (udara, air, tanah terjaga, pengelolaan sampah baik).
- **Hijau**: Mengembangkan ekonomi hijau — pertanian ramah lingkungan, industri hijau, pariwisata ramah lingkungan, UMKM sirkular.
- **Apik**: Penataan wilayah dan infrastruktur yang baik; membangun dari desa hingga kota; infrastruktur ramah dan tertata.
- **Peduli**: Pemerintahan peduli terhadap semua lapisan masyarakat (pendidikan, kesehatan, karakter, pemuda).
- **Silaturahmi**: Masyarakat harmonis, guyub, gotong-royong, tepa selira, sejahtera.
- **Organisatoris**: Tata pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi; good governance.
- **Digitalisasi**: Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan reformasi birokrasi; meningkatkan daya saing masyarakat.
- **Ikhlas**: Menguatkan spiritualitas, kearifan lokal, budaya dan bahasa lokal dalam kehidupan masyarakat Pemalang.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah **"Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia"** dan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 RPD tahun 2024 – 2026 RPD Jateng 2024-2026 menetapkan tujuan pembangunan: **"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari."**

Kebijakan provinsi di atas bisa dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan kecamatan:

- **Program ketahanan pangan**: kegiatan pemberdayaan pertanian lokal, penyuluhan pertanian berkelanjutan, atau sinergi proyek dengan Dinas Pertanian Provinsi untuk mendukung swasembada pangan.
- **Peningkatan ekonomi lokal**: mendorong pengembangan UMKM berbasis sektor unggulan di kecamatan, misalnya pertanian, pariwisata lokal, ekonomi kreatif, sesuai dengan "ekonomi berdaya saing dan berkelanjutan."

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- **SDM**: Investasi dalam pelatihan, pendidikan lokal, program kesehatan masyarakat, dan karakter bagi warga kecamatan untuk mendukung target provinsi meningkatkan kualitas SDM.
- **Lingkungan**: Program konservasi, pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan, atau penghijauan bisa menjadi bagian dari renja kecamatan, relevan dengan sasaran ketahanan lingkungan.
- **Pemerintahan**: Perkuat tata kelola pemerintahan kecamatan melalui transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi antar berbagai lembaga pemerintahan (desa, kabupaten, provinsi).

Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
3. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
5. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
6. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Ampelgading mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Ampelgading adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Adanya peraturan terkait Kecamatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Ampelgading.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Ampelgading ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Ampelgading dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Ampelgading. Renja Kecamatan Ampelgading disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Ampelgading.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.873.979.000,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.873.979.000,00**	
	KECAMATAN	**Kecamatan Ampelgading**			**2.873.979.000,00**	**KECAMATAN**	**Kecamatan Ampelgading**			**2.873.979.000,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kecamatan Ampelgading**			**2.708.979.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ampelgading**			**2.708.979.000,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Ampelgading**			**41.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Ampelgading**			**41.000.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ampelgading	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		1.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		1.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ampelgading	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan*		0,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan*		0,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			RKA-SKPD					*RKA-SKPD*			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*		0,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*		0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		2.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		2.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan		-	-	2.126.479.000,00	Administrasi Keuangan		-	-	2.126.479.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		2.123.979.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		2.123.979.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		2.500.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*		0,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*		0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*		0,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*		0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	202.775.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	202.775.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe*		11.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe*		11.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No		Rencangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		*nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*			nerangan Bangunan Kantor		*nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		0,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		4.930.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		4.930.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		126.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		126.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		21.345.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		21.345.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		2.640.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		2.640.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		36.860.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		36.860.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	9.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan		-	-	9.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					g Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*		9.500.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*		9.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	199.850.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	199.850.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		16.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		16.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		23.168.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		23.168.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		160.182.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		160.182.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	159.375.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	159.375.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau*		96.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau*		96.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			
	Pemeliharaan Mebel	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*		10.000.000,00	Pemeliharaan Mebel		*Jumlah Mebel yang Dipelihara*		10.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	159.375.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	159.375.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*		17.970.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*		17.970.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	11.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	11.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		2.500.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	159.375.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta		-	-	159.375.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintahan Daerah					han Daerah					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		35.405.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		35.405.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kecamatan Ampelgading**	**-**	**-**	**15.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**-**	**-**	**15.000.000,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	**-**	**-**	**2.500.000,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**-**	**-**	**2.500.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		2.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		2.500.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	8.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	-	8.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*		2.500.000,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*		2.500.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*		3.500.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*		3.500.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		2.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		2.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	4.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		-	-	4.500.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*		2.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*		2.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizi*		2.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizi*		2.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	yang terkait dengan Nonperizinan		*nan pada Urusan Pemerintahan*			terkait dengan Nonperizinan		*nan pada Urusan Pemerintahan*			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Ampelgading**	**-**	**-**	**47.500.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**-**	**-**	**47.500.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	47.500.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	47.500.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*		3.500.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*		3.500.000,00	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*		29.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*		29.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarak*		15.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarak*		15.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No		Rencangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Wilayah Kecamatan		*at di Wilayah Kecamatan*			Kecamatan		*at di Wilayah Kecamatan*			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kecamatan Ampelgading**	**-**	**-**	**0,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**-**	**-**	**0,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	0,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	0,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		0,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kecamatan Ampelgading**	**-**	**-**	**66.500.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**-**	**-**	**66.500.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	66.500.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	-	66.500.000,00	
	Pembinaan Wawasan	**Kecamatan**	*Jumlah Orang yang Mengikuti*		57.500.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsa		*Jumlah Orang yang Mengikuti*		57.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Ampelgading**	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			an dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*		0,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*		0,00	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan*		0,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundan		*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan*		0,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peraturan Perundang-Undangan		*Peraturan Perundang-Undangan*			g-Undangan		*Peraturan Perundang-Undangan*			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		9.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		9.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kecamatan Ampelgading**	**-**	**-**	**36.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**-**	**-**	**36.000.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kecamatan Ampelgading**	-	-	36.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	36.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*		7.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*		7.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*		6.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*		6.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuanga	**Kecamatan**	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi*		5.500.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi*		5.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	n Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Ampelgading**	*dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*			Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		*dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*		0,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*		0,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*		5.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*		5.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*		2.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*		2.000.000,00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*		5.000.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*		5.000.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemban	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembang*		0,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembang		*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembang*		0,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	gunan Desa		*unan Desa*			unan Desa		*unan Desa*			
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*		3.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*		3.500.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Kecamatan Ampelgading**	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*		2.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*		2.000.000,00	

1.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk tahun 2025 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampelgading yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.7
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2.					Sudah diakomodir pada Musrenbang Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN Ampelgading

Kecamatan Ampelgading dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Ampelgading harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Ampelgading secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Ampelgading tahun 2026 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima, meningkatnkan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Ampelgading dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Ampelgading tahun 2025, adalah "**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah**". Sasaran tersebut diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Nilai SAKIP.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Ampelgading tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ampelgading Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	65
2		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	%	90,20
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	67

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada anggaran tahun 2026, Kecamatan Ampelgading merencanakan sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Ampelgading dengan kebutuhan dana sebesar Rp 3.294.448.000,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN AMPELGADING

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ampelgading yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan mebel
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
b. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ampelgading Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7....	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**3.294.448.000**	**DAU**				**3.294.448.000**
7.1...	**KECAMATAN ADMINISTRASI**	**Indek Kepuasan Masysrakat (IKM)**			**Ampelgading**				**3.294.448.000**	**DAU**				**3.340.923.000**
		Nilai SAKIP OPD												
7.1.1.1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi**			**Ampelgading**	**100%**			**2.779.880.000**	**DAU**		**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang**	**100%**	**3.156.423.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi			Ampelgading	**100%**						**Terpenuhi** **Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**100%**	
7.1.1.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah Sesuai Regulasi**	Ampelgading	**100%**		**5 Dokumen**	**11.272.800**	**DAU**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi**	**100%**	**15.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ampelgading	100%	2 Dokumen	100%	1.125.000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ampelgading	100%	2 Dokumen	100%	1.185.000	DAU		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	2 Dokumen	2.500.000
7.1.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ampelgading	100%	1 Dokumen	100%	1.275.000	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1.500.000
7.1.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Ampelgading	100%	2 Dokumen	100%	1.275.000	DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	2 Dokumen	1.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Sesuai Regulasi		Dokumen DPA-SKPD										
7.1.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ampelgading	100%	2 Dokumen	100%	1.712.800	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	2 Dokumen	2.500.000
7.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ampelgading	100%	4 Laporan	100%	2.000.000	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 Laporan	2.500.000
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ampelgading	100%	4 Laporan	100%	2.000.000	DAU		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Sesuai Regulasi	Daerah yang Tersusun									yang Tersusun		
7.1.1.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi**	**Persentase Dokumen Keuangan Disusun Sesuai Regulasi**	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Regulasi**	Ampelgading	**100%**		**100%**	**2.121.423.000**			**Persentase Dokumen Keuangan Disusun Sesuai Regulasi**	**100%**	**2.578.241.000**
7.1.1.2.05.10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Ampelgading	100%	14 orang/bulan	100%	2.118.548.000	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	2.574.741.000
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan	Ampelgading	100%	1 Laporan	100%	1.639.000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				akhir tahun SKPD										
7.1.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ampelgading	100%	1 Dokumen	100%	1.236.000	DAU		Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000
7.1.1.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi**	**Persentase Fasilitasi Admininstrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi**	**Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	Ampelgading	**100%**		**100%**	**171.654.400**			**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Regulasi**	**100%**	**182.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ampelgading	100%	9 Paket	100%	12.245.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	9 Paket	9.000.000
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Ampelgading	100%	12 Paket	100%	58.065.900	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Paket	110.000.000
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Ampelgading	100%	5 Paket	100%	39.663.500	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5 Paket	20.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ampelgading	100%	2 Dokumen	100%	3.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.000.000
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Terselenggarannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ampelgading	100%	250 Laporan	100%	58.680.000	DAU		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terfasilitasi	250 Laporan	40.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	Ampelgading	100%		**100%**	**35.753.200**			**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**100%**	**25.000.000**
7.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah paket mebel yang disediakan	Tersedianya mebel	Ampelgading	100%	1 Unit		8.000.000			Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	10.000.000
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampelgading	100%	1 Unit	100%	49.879.800			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**Ampelgading**	**100%**	**100%**	**100%**	**221.450.000**	**DAU**		**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**100%**	**210.182.000**
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Ampelgading	100%	130 Laporan	100%	16.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Laporan	20.000.000
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Laporan Rekening jasa Sumber daya yang dibayarkan tiap bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ampelgading	100%	3 Laporan	100%	47.668.000	DAU		Jumlah Laporan Rekening jasa Sumber daya yang dibayarkan tiap bulan	3 Laporan	30.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/bulan)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ampelgading	100%	6 Laporan	100%	157.782.000			Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/bulan)	6 Laporan	160.182.000
7.1.1.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Ampelgading**	100%		**100%**	**196.200.000**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**146.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ampelgading	100%	14 Unit	100%	106.040.000	DAU		Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	85.000.000
7.1.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya Mebel	Ampelgading	100%	4 Unit	100%	3.350.000	DAU		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	6.000.000
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Ampelgading	100%	18 Unit	100%	29.580.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian Yang Terpenuhi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya Gedung Kantor dan BangunanLainnya		100%	2 Unit	100%	57.230.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	40.000.000
7.1.2..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**				**91,00%**		**100%**	**11.800.000**			**Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**90,94**	**14.000.000**
7.1.2.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	**Ampelgading**	**91,00%**		**1 Dokumen**	**5.000.000**	**DAU**		**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Dokumen**	**3.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggarannya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Ampelgading	100%	6 Dokumen	100%	5.000.000			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	3.000.000
7.1.2.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang tersusun**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Ampelgading**	100%	**2 Laporan**	**100%**	**3.750.000**	**DAU**		**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang tersusun**	**2 Laporan**	**5.500.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Ampelgading	100%	4 Dokumen	100%	2.500.000	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	3.000.000
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ampelgading	100%	6 Laporan	100%	1.250.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.2.2.04.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan	**Ampelgading**	**100%**		**Kegiatan**	**3.050.000**	**DAU**		Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas		**5.500.000**
7.1.2.2.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilkasanakan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Ampelgading	100%	2 Dokumen	100%	1.400.000	DAU		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilkasanakan	2 Dokumen	2.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.2.2.04.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Ampelgading	100%	286 Laporan	100%	1.650.000	DAU	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	286 Laporan	3.000.000
7.1.2..	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**		**Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Ampelgading**	**96,00%**		**100%**	**50.250.000**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif**	**98,10**	**59.000.000**
7.1.3.2.01.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase masyarakat desa yang aktif**	**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tersusun**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Ampelgading**	**96,00%**	**3 Laporan**	**100%**	**50.250.000**	**DAU**		**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang tersusun**	**3 Laporan**	**59.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Ampelgading	96,00%	10 Lembaga Kemasyarakatan	100%	3.750.000	DAU		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.3.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan yang tersusun	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	Ampelgading	96,00%	1 Dokumen	100%	31.500.000	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan yang tersusun	1 Dokumen	35.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ampelgading	96,00%	16 Laporan	100%	15.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	20.000.000
7.1.4..	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**				**100%**	-	**100%**	**17.000.000**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100%**	**0**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.4.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**Jumlah Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Ampelgading	**100%**	**1 Laporan**	**100%**	**17.000.000**			**Jumlah Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersusun**	**1 Laporan**	**0**
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan		JumlahLaporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Ampelgading	100%	1 Laporan		17.000.000			JumlahLaporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan		0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.5..	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani			Ampelgading	100%		100%	147.968.000	DAU		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	100%	64.500.000
7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Ampelgading	100%	2 Laporan	100%	147.968.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	64.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	Jumlah Orang yang mengikuti PembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ampelgading	100%	150 Orang	100%	127.968.000	DAU		Jumlah Orang yang mengikuti PembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	48.218.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Ampelgading	100%	3 Dokumen	0%	20.000.000	DAU			3 Dokumen	9.500.000
7.1.6..	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah desa yang naik statusnya**			**Ampelgading**	**1 Desa**	**1 Desa**	**100%**	**287.550.000**	**DAU**		**Jumlah desa yang naik statusnya**	**1 Desa**	**47.000.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.6.2.01.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	**Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang tersusun**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Ampelgading**	**1 Desa**	**8 Laporan**	**100%**	**287.550.000**	**DAU**		**Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang tersusun**	**8 Laporan**	**47.000.000**
7.1.6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Ampelgading	1 Desa	16 Dokumen	100%	60.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	9.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Ampelgading	1 Desa	16 Dokumen	100%	8.000.000	DAU		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	6.500.000
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Ampelgading	1 Desa	16 Dokumen	100%	10.000.000	DAU		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	5.500.000
7.1.6.2.01.6	Faslitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka pelaksanan pemilihan kepala desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa	Ampelgading	1 Desa	13 Dokumen	100%	182.550.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanan pemilihan kepala desa	13 Dokumen	15.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Ampelgading	1 Desa	16 Dokumen	100%	10.000.000	DAU		Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	16 Dokumen	2.500.000
7.1.6.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Ampelgading	1 Desa	16 Dokumen	100%	5.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen	5.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.1.6.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang naik statusnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangun Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 Desa	16 Dokumen	100%	5.000.000			Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangun Partisipatif	16 Dokumen	0
7.1.6.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 Desa	16 Dokumen	100%	7.000.000			Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Dokumen	2.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Ampelgading merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Ampelgading Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Ampelgading memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Ampelgading secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ampelgading Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Plt. Camat Ampelgading
Kabupaten Pemalang

DEDI SARWOAJI, AP., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19741206 199311 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

GG. RENCANA KERJA KECAMATAN BODEH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bodeh yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Bodeh merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bodeh yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Bodeh melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Bodeh dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Bodeh mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Bodeh mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Bodeh dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Bodeh untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bodeh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2025, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Bodeh
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Forpincam, Kepala Dinas/ Instansi Tk. Kecamatan, Kepala Desa, TP. PKK Desa serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Bodeh
Tahun 2026

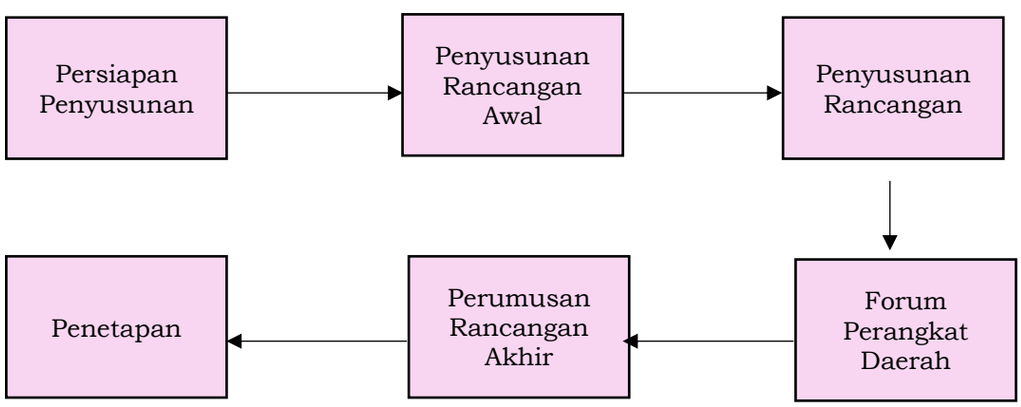

Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Bodeh tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

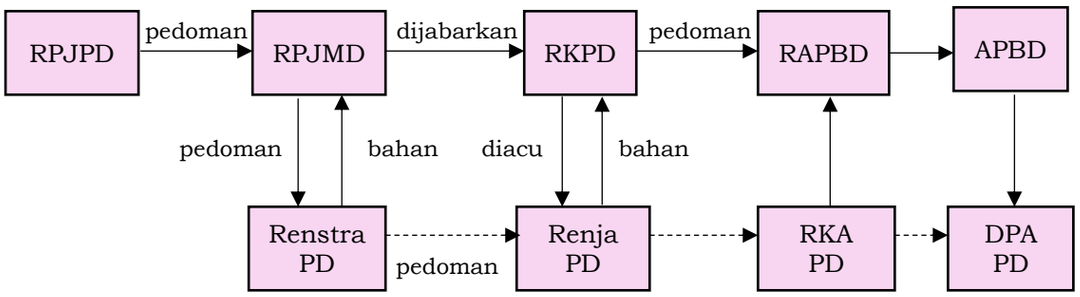

Renja Kecamatan Bodeh berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bodeh tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Bodeh tahun 2025, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

https://jdih.pemalangkab.go.id/

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Bodeh);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Bodeh adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Bodeh tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bodeh sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Bodeh;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Bodeh tahun 2026;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bodeh Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bodeh tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Bodeh, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bodeh, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bodeh, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bodeh, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bodeh, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bodeh beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Bodeh.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BODEH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bodeh Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bodeh

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari sub kegiatan/ kegiatan/ program/ sasaran/ tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Bodeh pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Bodeh sebesar Rp. 3.213.056.000,- namun mengalami perubahan tambahan anggaran Rp. 105.000.000,- sehingga menjadi Rp. 3.318.056.000,- Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 3.169.574.899,- atau sebesar 95,53 % sedangkan fisik telah tercapai 100%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Bodeh sebesar Rp 3,467,227,000,- yang terbagi dalam 5 program, 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.536.471.586,- atau sebesar 44,31 % sedangkan fisik telah tercapai 43,89 %.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Bodeh telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi

Adapun hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Bodeh telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Semua Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, dengan capaian anggaran rata rata 95,53 % sedangkan fisik telah tercapai 100%.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yaitu tercapai di tahun 2024;
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang akan dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian ditahun depan yaitu dengan lebih meningkatkan dalam :
   a. Evaluasi hasil pelaksanaan/ capaian tahun 2025.
   b. Eventarisir kegiatan yang dimungkinkan tidak/ kurang tercapai.
   c. Mengkoordinasikan dengan pengampu kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang dimungkin akan timbul.
   d. Perencanaan yang lebih baik lagi ditahun berikutnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bodeh dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bodeh dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bodeh s/d Tahun 2025
Kabupaten Pemalang

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th. 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tk Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)/3	12=(10/4*100%)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	79,25	79,99	78,25	81,05	103,57	78,85	80,1	101,07
		SAKIP	40	48,9	39	54,85	140,6	40	61,41	153,52
		IRB	39	40,69	38	58,70	154,47	67,66	67,66	173,48
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	55 Dokumen	26	5	5	100	13	44	80

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		daerah yang tersusun								
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel**	**100 %**	**47**	**9**	**9**	**100**	**23**	**80**	**80**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	12 Dok	6	3	3	100 %	3	12	100
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	4 Dok	2	0	0	0	1	3	75
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	4 Dok	2	0	0	0	1	3	75
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	4 Dok	2	1	1	100%	1	4	100
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	4 Dok	2	1	1	100%	1	4	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dokumen)	12 Dok	6	0	0	0	3	9	75
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	15 Dok	6	0	0	0	3	9	60
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Keluaran Kegiatan	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**60 Laporan**	**30**	**15**	**15**	**100**	**15**	**60**	**100**
	Hasil Kegiatan	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel**	**100**	**33**	**25**	**25**	**100**	**25**	**100**	**100**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan (orang/bulan)	95/56 Org/ bl	38/28	17/14	17/14	100%	16/14	55/56	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (dokumen)	4 dok	2	1	1	100	1	4	100
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun**	**8 Dokumen**	**5**	**1**	**1**	**100**	**1**	**6**	**75**
	Hasil Kegiatan	**Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan**	**100**	**62,5**	**16,66**	**16,66**	**100**	**16,66**	**75**	**75**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (dokumen)	4 Dok	3	1	1	100	1	4	100
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang tersusun (dokumen)	4 Dok	2	0	0	0	0	2	50

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**161 Layanan**	**78**	**39**	**39**	**100**	**39**	**161**	**100**
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**48**	**24**	**24**	**100**	**24**	**100**	**100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 Paket	8	4	4	100	4	16	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	10	5	5	100	5	25	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	16 Paket	8	4	4	100	4	16	100
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan (jenis/bulan)	48 Paket	24	12	12	100	12	48	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan	8 Dokumen	4	2	2	100	2	8	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**56 Unit**	**15**	**14**	**18**	**100%**	**8**	**41**	**73,2**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**26,7**	**25**	**32,1**	**128**	**14,2**	**73,2**	**73,2**
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli (unit)	2 Unit	2	0	0	0	0	2	100
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli (unit)	28 Unit	7	7	4	57	7	18	64
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli (unit)	24 Unit	6	6	13	0	0	19	79
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dibeli (unit)	2 Unit	0	1	1	100	1	2	100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**144 Jasa**	**72**	**36**	**36**	**100**	**36**	**144**	**100**
	Hasil Kegiatan	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**50**	**25**	**25**	**100**	**25**	**100**	**100**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		yang dibayar tiap bulan								
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Laporan	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	48 Laporan	24	12	12	100	12	48	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**210 Unit**	**188**	**167**	**167**	**100**	**167**	**216**	**102,8**
	Hasil Kegiatan	**Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**89,5**	**79,5**	**79,5**	**100**	**79,5**	**102,8**	**102,8**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang beriin dan terpelihara	54 Unit	32	11	11	100	11	54	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	153 Unit	153	153	153	100	153	153	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	3 Unit	3	3	3	100	3	3	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	**85**	**85**	**85**	**89,99**	**105,87**	**85**	**86,55**	**101,95**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan**	**48 Data**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**50**
	Hasil Kegiatan	**Persentase data pemerintahan yang dipublikasi**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia	48 dokumen	24	0	0	0	0	24	50
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani**	**120 Kasus**	**22**	**30**	**11**	**36,6**	**30**	**63**	**52,5**
	Hasil Kegiatan	**Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan**	**100**	**3,36**	**25**	**9,1**	**36,4**	**25**	**52,5**	**52,5**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen pelayanan yang disusun	76 Dokumen	0	19	0	0	19	0	0
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	12	6	6	100	6	24	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	20 Laporan	10	5	5	100	5	20	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia**	**220 Pelayanan**	**110**	**51**	**1**	**1,96**	**55**	**166**	**75,4**
	Hasil Kegiatan	**Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia**	**100**	**50**	**23,1**	**0,45**	**0,019**	**25**	**75,4**	**75,4**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen izin non usaha yang diterbitkan	200 Dokumen	100	50	0	0	50	100	50
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4 Laporan	2	1	1	100	1	4	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelimpahan Kewenangan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelimpahan Kewenangan Lainnya	16 Laporan	8	0	0	0	4	12	75
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase masyarakat desa yang aktif**	**86,17**	**85,17**	**85,67**	**91**	**106,22**	**86,17**	**87,44**	**101,47**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)**	**252 Orang**	**312**	**63**	**63**	**100**	**57**	**333**	**132,1**
	Hasil Kegiatan	**Persentase kehadiran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Desa / Kel + Kec)**	**100**	**123,8**	**25**	**25**	**100**	**22,6**	**132,1**	**132,1**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakat yang berpartisipasi dalam forum musdes	60 Lembaga kemasyarakatan	30	15	15	100	15	60	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan keg. Pemberdayaan masya. Yg dilakukan oleh pemerintah dan swasta.	4 Dokumen	2	1	1	100	1	4	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	4 Laporan	2	1	1	100	2	4	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Wilayah Kecamatan								
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif**	**48 Lembaga**	**24**	**12**	**12**	**100**	**0**	**36**	**75**
	Hasil Kegiatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**100**	**50**	**25**	**25**	**100**	**0**	**75**	**75**
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembagaan kemasyarakatan yang difasilitasi	48 Lembaga	24	12	12	100	12	48	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguang Trantibum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4 Laporan**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**75**
	Hasil Kegiatan	**Persentase Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**	**25**	**75**	**75**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2	0	0	0	1	3	75
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakannya**	**1 Peraturan**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**100**
	Hasil Kegiatan	**Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 Laporan	4	2	2	100	2	8	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**600 Orang**	**300**	**150**	**150**	**100**	**150**	**600**	**100**
	Hasil Kegiatan	**Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**100**	**50**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti wawasan kebangsaan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600 orang	300	150	150	100%	150	600	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa		0	0	0	0	0	0	0
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan		0	0	0	0			
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dukumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	8 Dokumen	4	2	2	100	2	8	100
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang bertata kelola pemerintahan yang baik**	**78,95**	**73,68**	**78,95**	**78,95**	**100**	**78,95**	**77,19**	**97,77**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**894 Dokumen**	**361**	**209**	**209**	**100**	**286**	**856**	**95,75**
	Hasil Kegiatan	**Persentase Jumlah , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi**	**100**	**60,3**	**23,3**	**23,3**	**100**	**31,9**	**95,75**	**95,75**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	152 Dokumen	76	38	38	100	38	152	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dukumen administrasi desa yang difasilitasi	76 Dokumen	38	19	19	100	19	76	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa desa yang difasilitasi	152 Dokumen	76	38	38	100	38	152	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di Fasilitasi	152 Dokumen	76	38	38	100	38	152	100
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi.	1 Dokumen	0	0	0	0	1	1	100
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	76 Dokumen	38	19	19	100	19	76	100
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	57 Dokumen	19	0	0	0	19	38	66,6
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) (desa/kegiatan	76 Dokumen	38	19	19	100	38	76	100
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	76 Dokumen	38	19	19	100	38	76	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	76 Dokumen	38	19	19	100	38	76	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bodeh Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bodeh

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		78,25	78,85	79	79,25	80,53	81,99	82	83	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		83	83	84	84	89,99	91,58	92	93	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				38	39	39,5	40	0	0	39,5	40	IRB tidak dievaluasi
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				39	40	40,5	41	54,58	61,41	65	67	
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				66	67	67,5	68	80	80	83	83	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				99	99	99	99	91	93,67	94	94	
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				85	85	86	86	78,95	84,22	89	89	

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bodeh

Kecamatan Bodeh adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa , pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Bodeh berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Cakupan layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif

https://jdih.pemalangkab.go.id/

g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2024 IKM Kecamatan Bodeh sebesar 81,99 dimana angka tersebut masuk dalam kategori Baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Bodeh. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bodeh meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2024, cakupan layanan Kecamatan Bodeh tersebut mencapai 91,58% dari target 90,02%.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Bodeh meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100 % melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 11 jenis kewenangan dari total 17 jenis kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 70 %, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 93,67 % dari target 86,17 % target telah terlampui disebabkan karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa dan kecamatan hampir semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa pada perencanaan pembangunan sudah 92 %, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Adapun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100 % tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Bodeh. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik telah tercapai sebesar 84,22 % dari target 78,95 yang berarti sebanyak 16 desa dari 19 desa di Kecamatan Bodeh. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Bodeh.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2024, Kecamatan Bodeh mendapat nilai SAKIP sebesar 61,41 (kategori B) adanya peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2024 dikarenakan adanya perbaikan dalam manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasildan untuk IRB tidak dilakukan evaluasi di tingkat OPD/ Kecamatan, tapi di tingkat Kabupaten namun demikian IRB Kecamatan mendukung nilai IRB tingkat Kabupaten. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Bodeh untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Perlu adanya tambahan SDM yang berkualitas.
c. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
d. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Bodeh perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Bodeh untuk mendukung pencapaian program

https://jdih.pemalangkab.go.id/

prioritas RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bodeh yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa dan kecamatan
e. Masih adanya desa bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Bodeh juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bodeh justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah :

"**Pemalang Bercahaya – Bersih Cakap Handal Mulya"**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

Resik

Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

Hijau

Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industry hijau yang berkelanjutan.

Apik

Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

Peduli

Meningkatkan Pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan masyarakat .

Silaturahmi

Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Organisatoris

Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur,sistematis, melayani dan mengayomi.

Digitalisasi

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi yang menjadi generasi yang pintar.

Ikhlas

Menghadirkan Kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya local masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) program unggulan, yaitu :

1. Seragam sekolah dan LKS gratis
   Merupakan program pemberian seragam sekolah dan LKS gratis untuk siswa di tingkat PAUD, SD, dan SMP pada tahun ajaran baru dengan tujuan mengurangi pengeluaran biaya pendidikan.
2. Jalan halus dan merata
   Merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan kabupaten dan kelengkapannya yang memiliki banyak kerusakan agar menjadi halus dan pembangunannya merata di semua wilayah, sehingga nyaman dan aman untuk dilalui oleh pengguna jalan. Program ini dapat berbentukrekonstruksi, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin jalan.
3. Jalan halus dan merata
   Merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan kabupaten dan kelengkapannya yang memiliki banyak kerusakan agar menjadi halus dan pembangunannya merata di semua wilayah, sehingga nyaman dan aman untuk dilalui oleh pengguna jalan. Program ini dapat berbentukrekonstruksi, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin jalan.
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya
   Merupakan strategi penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan sebagainya) melalui program pembangunan pemerintah daerah yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja sehingga tercapai penurunan pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Program pembangunan tersebut akan diarahkan pada proyek proyek yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti: Pembangunan jalan/jembatan sederhana, revitalisasi saluran drainase, perbaikan saluran irigasi, bersih- bersih sungai/saluran irigasi dan kegiatan yang sejenisa lainnya.
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM
   Merupakan program dukungan yang diberikan pemerintah atau lembaga keuangan terkait kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Bantuan ini bisa berupa dana tunai, akses permodalan dengan bunga rendah, atau program pelatihan bisnis. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. WIFI gratis tiap desa
   Merupakan upaya pemerintah aerah dalam hal pemberian akses internet nirkabel yang disediakan secara gratis (tanpa biaya) kepada semua masyarakat perdesaan. Pada akhirnya seluruh desa terkoneksi jaringan internet, meningkatkan aksesibilitas internet dan mengurangi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh

https://jdih.pemalangkab.go.id/

manfaat dari teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.

7. Satu ambulance, satu desa
   Merupakan program yang bertujuan untuk memastikan setiap desa/kelurahan memiliki fasilitas transportasi medis, dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. Program ini memiliki tujuan utama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan pelayanan publik di daerah perdesaan.
8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah
   Merupakan strategi dalam mengukuhkan posisi Kabupaten Pemalang sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah dan menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Pemalang dengan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Jaminan ketersediaan bibit unggul tidak terikat hanya untuk komoditas padi tetapi juga untuk komoditas perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Sedangkan jaminan ketersediaan pupuk murah bertujuan untuk memastikan petani di Kabupaten Pemalang memiliki akses mudah dan murah terhadap pupuk yang berkualitas sesuai data Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).
9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren
   Pemberian kendaraan operasional untuk pondok pesantren dalam mendukung berbagai aktivitas pendidikan, pengajaran, dakwah. Dimana keberadaan pondok pesantren ini memiliki peran penting dalam menjaga moral dan nilai nilai di tengah masyarakat.
10. Insentif untuk guru, TPQ, Madin dan Marbot
    Pemberian insentif atau bantuan honorarium untuk guru di satuan pendidikan dasar serta guru di lingkungan TPQ, Madrasah Diniyah dan petugas di lingkungan Masjid (Marbot) dengan tujuan untuk memberikan tambahan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
11. Santuan kematian Rp 3.000.000
    Merupakan program pemberian bantuan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan akibat meninggalnya seseorang untuk meringankan beban finansial dan sosial yang ditimbulkan dari kematian tersebut. Bantuan ini dapat berupa uang tunai atau bentuk lain yang bermanfaat. Target utama program ini adalah masyarakat miskin yang terdata pada DTKS atau DTSEN serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Pekerja Rentan. Program ini akan melibatkan Dinas yang membidangi urusan Sosial terkait data DTKS atau DTSEN dan Dinas yang membidangi urusan Tenaga Kerja untuk MBR/Pekerja Rentan.
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka
    Program yang bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat dalam rangka membuka pintu tol baru yang ada di Kabupaten Pemalang sehingga semakin memudahkan akses menuju wilayah Kabupaten Pemalang serta meningkatkan peluang investasi dan perekonomian.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Pemalang mendukung misi keempat Peduli yaitu “Meningkatkan Pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan masyarakat” dan Misi ketujuh Organisatoris yaitu “Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur,sistematis, melayani dan mengayomi” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan public yang baik dengan indikator kinerja Nilai Sakip, Maturitas SPIP dan Indeks Pelayanan Publik. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan tersebut dengan melaksanakan program Penunjang urusan pemerintahan daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kabupaten/kota dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Disesuaikan dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 adalah **"Penguatan ekonomi melalui ketahanan pangan nasional,Peningkatan kualitas sumber manusia (SDM)"**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026, diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan",** dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Mewujudkan misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
b. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dab merata.
c. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
d. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
e. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Kecamatan Bodeh mendukung prioritas pembangunan penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan dengan menciptakan suasana kerja yang resik baik di lingkungan maupun di tata kelola pemerintahan, ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah, pembinaan PKK dan Posyandu, penurunan angka stunting, memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan semakin meningkatkan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan di desa.

Kecamatan Bodeh dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun dilingkungan eksternal

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Bodeh. Renja Kecamatan Bodeh disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Bodeh dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Bodeh.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	UNSUR KEWILAYAHAN				3.083.438.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				3.083.438.000,00	
	KECAMATAN	Kecamatan Bodeh			3.083.438.000,00	KECAMATAN	Kecamatan Bodeh			3.083.438.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bodeh			2.978.429.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bodeh			2.978.429.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh			11.378.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh			11.378.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.900.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.900.500,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.925.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.925.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.742.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.742.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.955.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.955.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.925.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.925.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.931.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.931.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh		17/14 Orang/bulan	2.333.438.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh		17/14 Orang/bulan	2.333.438.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bodeh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14 Orang/bulan	2.333.438.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bodeh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14 Orang/bulan	2.333.438.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh		1 Laporan	2.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh		1 Laporan	2.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	50 Paket	255.272.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	50 Paket	255.272.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.541.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.541.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	132.817.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	132.817.500,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.700.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	83.214.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	83.214.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bodeh	-	-	23.550.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bodeh	-	-	23.550.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bodeh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.550.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Bodeh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.550.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	36 Laporan	247.535.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	36 Laporan	247.535.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.951.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.951.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.002.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.002.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168.582.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168.582.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bodeh	-	-	105.255.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bodeh	-	-	105.255.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	42.220.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	42.220.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bodeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	33.035.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bodeh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	33.035.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bodeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bodeh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bodeh	-	-	4.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bodeh	-	-	4.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bodeh	-	-	4.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bodeh	-	-	4.000.000,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bodeh	-	-	51.099.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bodeh	-	-	51.099.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bodeh	-	-	48.699.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bodeh	-	-	48.699.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.413.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.413.000,00	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.286.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.286.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bodeh	-	-	2.400.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bodeh	-	-	2.400.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.400.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bodeh	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2.400.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bodeh	-	-	32.510.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bodeh	-	-	32.510.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bodeh	-	-	32.510.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bodeh	-	-	32.510.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bodeh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	29.510.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bodeh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	29.510.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bodeh	-	-	17.400.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bodeh	-	-	17.400.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bodeh	-	-	17.400.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bodeh	-	-	17.400.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2.850.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	2.850.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.850.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2.850.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.850.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	2.850.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	2.850.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	2.850.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Bodeh	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	
					3.083.438.000,00					3.083.438.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bodeh yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

NO	DESA	KEGIATAN USULAN MUSRENBANGDES	PENETAPAN DALAM MUSRENBANGKEC	
		SESUDAH VERIFIKASI	KEGIATAN	PAGU USULAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**BABAKAN**	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) jalan penghubung Desa Babakan - Jraganan Blok Krantilan Volume = P : 249 m3	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) jalan penghubung Desa Babakan - Jraganan Blok Krantilan Volume = P : 249 m3	**186.000.000,-**
2	**KEBANDARAN**	Pembangunan talud jalan tembus Kebandaran - Jraganan Blok 09-10 Rt. 06 Rw. 02 Volume = P : 281 m3	Pembangunan talud jalan tembus Kebandaran - Jraganan Blok 09-10 Rt. 06 Rw. 02 Volume = P : 281 m3	**210.000.000,-**
3	**JRAGANAN**	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) jalan penghubung Desa Kesesirejo - Jraganan Blok Gempol Volume = P : 517 m x 4 x 0,19 m	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) jalan penghubung Desa Kesesirejo - Jraganan Blok Gempol Volume = P : 517 m x 4 x 0,19 m	**175.000.000,-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4	**KARANGBRAI**	Pembangunan talud jalan tembus Karangbrai-Jraganan Rt 17 Rw 05 Volume = P 281 m3	Pembangunan talud jalan tembus Karangbrai-Jraganan Rt 17 Rw 05 Volume = P 281 m3	**210.000.000,-**
5	**KESESIREJO**	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) jalan penghubung Desa Kesesirejo - Jraganan Blok Mlaya Volume = P : 517 m x 4 x 0,19 m	Pemeliharaan Jalan Desa (Pembuatan Telford) jalan penghubung Desa Kesesirejo - Jraganan Blok Mlaya Volume = P : 517 m x 4 x 0,19 m	**175.000.000,-**
6	**LONGKEYANG**	Pembangunan Rabat Beton penghubung longkeyang-pagilaran rt 15 rw 04 Volume 375 m x 3 m x 0,12	Pembangunan Rabat Beton penghubung longkeyang-pagilaran rt 15 rw 04 Volume 375 m x 3 m x 0,12	**170.000.000,-**
7	**GUNUNGBATU**	Pembangunan Gang Rabat Beton RT. 01-Rw. 04 volume 480 m x 2 m x 0,15 m	Pembangunan Gang Rabat Beton RT. 01-Rw. 04 volume 480 m x 2 m x 0,15 m	**181.444.000,-**
			Jumlah Pagu Usulan	**1.307.444.000**

NO	DESA	KEGIATAN USULAN MUSRENBANGDES SESUDAH VERIFIKASI	PENETAPAN DALAM MUSRENBANGKEC	PAGU USULAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PAYUNG	Pelatihan Tataboga 20 Peserta Rp. 30.000.000	Pelatihan Tataboga 20 Peserta Rp. 30.000.000	30.000.000,-
2	PASIR	Pelatihan Hendycraft/Kerajinan Tangan 30 orang Rp. 30.000.000,-	Pelatihan Hendycraft/Kerajinan Tangan 30 orang Rp. 30.000.000,-	30.000.000,-
3	MUNCANG	Pelatihan Karawitan 30 Peserta Rp. 37.750.000,-	Pelatihan Karawitan 30 Peserta Rp. 37.750.000,-	37.750.000,-
4	KELANGDEPOK	Pelatihan Karawitan 30 Peserta Rp. 37.750.000,-	Pelatihan Karawitan 30 Peserta Rp. 37.750.000,-	37.750.000,-
5	PENDOWO	Pelatihan Perbengkelan 16 Peserta Rp. 69.000.000	Pelatihan Perbengkelan 16 Peserta Rp. 69.000.000	69.000.000,-
			Jumlah Pagu Usulan	**204.500.000,-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BODEH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Bodeh Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Bodeh Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2029.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dab merata.
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bodeh

Kecamatan Bodeh dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bodeh harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bodeh secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. **Tujuan**

Tujuan Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026 adalah **"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan"**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bodeh sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima, meningkatkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat.

B. **Sasaran**

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bodeh dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bodeh tahun 2026, adalah **"Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah"**. Sasaran tersebut diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Nilai SAKIP.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bodeh tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bodeh Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	68,42
2	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatny a kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	87,5
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	67

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Bodeh merencanakan sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup diseluruh wilayah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kecamatan Bodeh dengan kebutuhan dana sebesar Rp 3.083.438.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BODEH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bodeh yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
   b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
   a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
   1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      d. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
      f. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bodeh Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BODEH						**3.813.714.000,00**							**3.744.900.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.813.714.000,00**							**3.744.900.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.813.714.000,00**							**3.744.900.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.655.994.000,00**						**-**	**3.624.200.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.280.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	17.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.900.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.260.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.300.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.000.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.570.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.950.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.900.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.500.000,00	KECAMATAN BODEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.842.366.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	2.912.200.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20/14 Orang/bulan	2.830.896.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.900.000.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.550.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		5.700.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.820.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		2.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.750.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.350.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		1.500.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	319.742.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	265.000.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		9.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Comal, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		4.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	60.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		140.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.982.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		24.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.760.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	209.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		84.000.000,00	KECAMATAN BODEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	71.870.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	46.870.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		21.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		24.000.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	248.106.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	249.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.924.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		76.500.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	166.182.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		170.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	149.630.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	132.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	43.490.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		43.000.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	52.790.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		34.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	53.350.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		55.000.000,00	KECAMATAN BODEH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.000.000,00**						**-**	**6.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**55.200.000,00**						**-**	**51.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	-			1 Dokumen	55.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	KECAMATAN BODEH	-	51.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.200.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	KECAMATAN BODEH		6.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	KECAMATAN BODEH		4.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	KECAMATAN BODEH		41.000.000,00	KECAMATAN BODEH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**15.000.000,00**						**-**	**8.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	6.200.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	-		3.200.000,00	KECAMATAN BODEH

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		2.500.000,00	KECAMATAN BODEH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**45.020.000,00**						**-**	**34.000.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	45.020.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	34.000.000,00	KECAMATAN BODEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	40.020.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		31.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**32.500.000,00**						**-**	**21.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	32.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN BODEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		3.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif P3.Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern	-		4.000.000,00	KECAMATAN BODEH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIOR NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				19 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Bodeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-
	J U M L A H							**3.813.714.000,00**			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Out Put Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasi Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.083.438.000,00					3.596.500.000,00
7	01				KECAMATAN								3.083.438.000,00					3.596.500.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-			2.978.429.000,00				-	3.468.000.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-			11.378.500,00				-	23.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Bodeh	40,5	1 Dokumen	100	1.900.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Bodeh	40,5	1 Dokumen	100	1.925.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	4.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Bodeh	40,5	1 Dokumen	100	1.742.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Bodeh	40,5	1 Dokumen	100	1.955.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Bodeh	40,5	1 Laporan	100	1.925.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	3.000.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Bodeh	40,5	1 Laporan	100	1.931.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	4.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Kecamatan Bodeh	-	17/14 Orang/bulan	100	2.333.438.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	2.700.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bodeh	40,5	17/14 Orang/bulan	100	2.333.438.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	41	2.700.000.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Kecamatan Bodeh	-	1 Laporan	100	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	3.000.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	Kecamatan Bodeh	0	1 Laporan	100	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	3.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun		Kecamatan Bodeh	-	50 Paket	100	255.272.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	283.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai IRB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	6 Paket	100	8.541.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	10.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai IRB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	6 Paket	100	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai IRB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	12 Paket	100	132.817.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	150.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai IRB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	12 Paket	100	24.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	25.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IRB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	2 Dokumen	100	2.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bodeh	0	12 Laporan	100	83.214.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	90.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	23.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	75.000.000,00
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IRB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	1 Unit	100	23.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	30.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		Kecamatan Bodeh	-	36 Laporan	100	247.535.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	264.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bodeh	0	12 Laporan	100	2.951.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	4.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	12 Laporan	100	76.002.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	80.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bodeh	0	12 Laporan	100	168.582.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	180.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	105.255.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	120.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IRB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bodeh	0	11 Unit	100	42.220.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	45.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IRB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Bodeh	0	39 Unit	100	33.035.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	40.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IRB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bodeh	0	1 Unit	100	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Nilai IRB	0	35.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	6.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	4.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	6.000.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	67,5	1 Laporan	100	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase pelayanan publik yang tersedia	68	3.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	67,5	1 Laporan	100	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase pelayanan publik yang tersedia	68	3.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	51.099.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	57.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	48.699.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	54.500.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bodeh	86,67	1 Lembaga Kemasyarakatan	100	5.413.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase masyarakat desa yang aktif	87,17	6.500.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Persentase Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Bodeh	86,67	1 Dokumen	100	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase masyarakat desa yang aktif	87,17	3.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							di Wilayah Kerja Kecamatan											
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bodeh	86,67	1 Laporan	100	40.286.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase masyarakat desa yang aktif	87,17	45.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	3.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Bodeh	86,67	1 Laporan	100	2.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase masyarakat desa yang aktif	87,17	3.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	32.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	44.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	32.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	44.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Bodeh	100	150 Orang	100	29.510.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100	40.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bodeh	100	1 Dokumen	100	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100	4.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	17.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	21.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-		Kecamatan Bodeh	-	-	100	17.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			-	21.000.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bodeh	86	1 Dokumen	100	2.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	3.500.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Bodeh	86	1 Dokumen	100	2.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	3.500.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Bodeh	86	1 Dokumen	100	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	4.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bodeh	86	1 Dokumen	100	2.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	3.500.000,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Bodeh	86	1 Dokumen	100	2.850.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	3.500.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Bodeh	86	1 Dokumen	100	3.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	3.000.000,00
JUMLAH													3.083.438.000,00					3.596.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Bodeh merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Bodeh Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Bodeh memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Bodeh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bodeh Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bodeh Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Bodeh Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Bodeh Tahun 2026.

CAMAT BODEH

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BODEH

MISBAHUDIN, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19690309 199209 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

HH. RENCANA KERJA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ulujami yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Ulujami merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ulujami yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Ulujami melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Ulujami dirumuskan secara

https://jdih.pemalangkab.go.id/

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Ulujami mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Ulujami mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Ulujami dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Ulujami untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Ulujami
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Ulujami
Tahun 2026

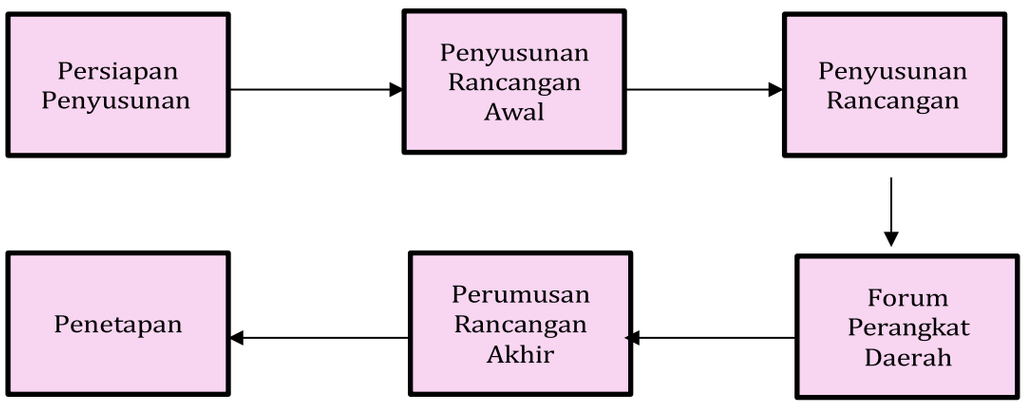

Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Ulujami tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

Gambar 1.2

Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

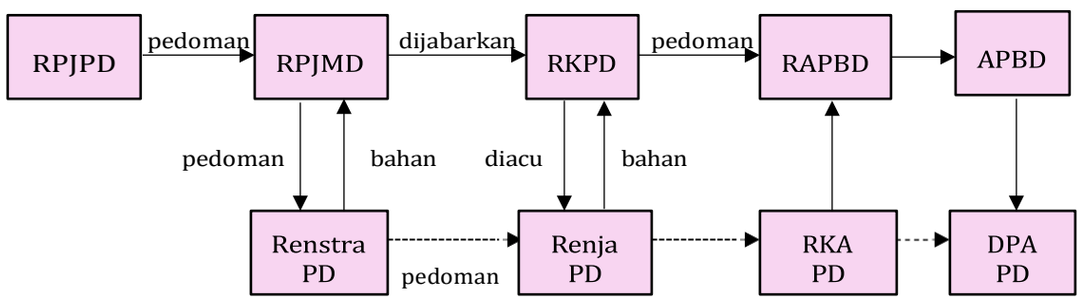

Renja Kecamatan Ulujami berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Bodeh);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1); \
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Ulujami adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Ulujami tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Ulujami sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Ulujami;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Ulujami tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami tahun 2024 dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2024 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Ulujami, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ulujami, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulujami, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ulujami, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ulujami, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ULUJAMI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Ulujami

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/ kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Ulujami pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Ulujami sebesar Rp. **3.335.266.000** yang terbagi dalam 6 program, 16 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut sebesar tiga milar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. **2.831.342.212,-** atau mencapai 84,89%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan sebesar **Rp. 2.909.547.000,-** yang terbagi dalam **6** program, **16** kegiatan dan **53** sub kegiatan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 1.245.023,836,- atau sebesar **38,88** % dari total anggaran 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Ulujami telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 0 Program, 0 Kegiatan dan 0 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Ada **6** Program, **16** Kegiatan dan **53** Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Ada 0 Program, 0 Kegiatan dan 0 Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Besarmya dana yang tersedia tidal bisa mencukupi keseluruhan pelaksanaan kegiatan (Plafon kegiatan masih ditentukan dari tingkat Kabupaten)
   b. SKPD Kecamatan belum maksimal menjadi SKPD Murni
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Ulujami yaitu tercapai di tahun 2024;
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Dilaksanakan Rapat kerja Penyusunan anggaran dan fisik .
   b. Dilaksanakan evaluasi capaian anggaran dan fisik .

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang sebagai beriku

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulujami dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ulujami s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 =(6/5*100 %)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4*100%)
	KECAMATAN ULUJAMI	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan**	86,35	86, 18	86,74	100	86,18	86,46	100,4
	KECAMATAN	**Cakupan layanan kecamatan (%)**	92,07	89,25	87,93	106	86,32	87,12	105,2
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**IRB**	46,18	45,20	40,66	89,96	46,08	43,37	93,91
		SAKIP	35,53	35,37	**33,86**	95,73	35,40	**48,10**	135,37
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**	**15**	**15**	**15**	100	**15**	**7**	46.67
	Hasil	**Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	4	3	3	100	3	0	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dokumen)	4	4	4	100	4	2	50

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	4	4	4	100	4	4	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**	25	25	25	100	25	22	100
	Hasil	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan (orang/bulan)	22	22	22	100	22	22	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**2**	**2**	**2**	100	**2**	**1**	50
	Hasil	**Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang Tersusun	1	1	1	100	1	0	-
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yanag tersusun	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
	Keluaran Kegiatan	**Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas**	**330**	**330**	**330**	100	**147**	**0**	50
	Hasil Kegiatan	**Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	-
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang/kegiatan)	308	308	308	100	125	0	-

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi Peraturan perundang undangan	22	22	22	100	22	0	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**64/12**	**64**	**64**	100	**64**	**28**	43.75
	Hasil	**Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis/bulan)	12	12	12	100	12	4	33.33
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (unit)	2/12	12	12	100	12	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan (jenis/bulan)	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan (jenis/bulan)	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan (jenis/bulan)	12	12	12	100	12	5	41.67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kegiatan)	12	12	12	100	2	6	50
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata	2	2	2	100	2	1	50
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (unit)**	**6**	**4**	**4**	100	**4**	**0**	-
	Hasil	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli (unit)	4	4	4	100	4	0	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**1.224**	**1.224**	**1.224**	100	**1.224**	**612**	**50**
	Hasil	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar tugas**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**-**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim (surat)	250	1.200	1.200	100	1.200	600	**50**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar (rekening/bulan)	12/12	12	12	100	12	6	**50**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar (orang/bulan)	72/12	72	72	100	72	36	**50**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**99**	**99**	**99**	100	**99**	**31**	**31.31**
	Hasil	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya (unit)	14	14	14	100	14	6	**50**
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah meubel yang terpelihara	35	35	35	100	35	0	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	43	43	43	100	43	24	**55.81**
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	4	4	4	100	4	-	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	3	3	3	100	3	1	**33.33**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	87,30	87,30	86,6	100	86,6	86,6	-
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								
	Keluaran	**Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi**	**1**	**1**	**1**	100	**1**	**1**	-
	Hasil	**Persentase data pemerintahan yang dipublikasi**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	1	1	1	100	1	1	**100**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								
	Keluaran	**Jumlah pengaduan masyarakat yang Terselesaikan**	**127**	**127**	**127**	100	**127**	**1**	0.78

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil	**Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah SOP pelaanan yang tersusun	1	1	1	100	1	1	100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	6	6	6	100	6	0	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani (kasus)	120	120	120	100	120	0	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								
	Keluaran	**Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang Tersedia**	**2.677**	**2.677**	**2.677**	100	**2.677**	**894**	33.39
	Hasil	**Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah izin non usaha yang diterbitkan	2.640	2.640	2.640	100	2.640	894	33.86
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	18	18	18	100	18	4	22.22
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan yang tersedia	19	19	19	100	19	10	52.63
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**96,79**	**95,36**	**92,36**	100	**66,25**	**66,25**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								
	Keluaran	**Jumlah peserta Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)**	**198**	**198**	**198**	100	**198**	**162**	81.81
	Hasil	**Rerata dari persentase kehadiran Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa (orang/kegiatan)	140	36	36	100	36	0	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (orang/kegiatan)	18	150	150	100	150	150	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %
	yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kab. Yang didampingi	12	12	12	100	12	12	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum**								
	Keluaran	**Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya**	**36**	**36**	**36**	100	**36**	**0**	-
	Hasil	**Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas (orang)	36	36	36	100	36	0	-
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya**	**1**	**1**	**1**	100	**1**	**0**	-
	Hasil	**Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	1	1	1	100	1	0	-
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								
	Keluaran	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**92**	**92**	**92**	100	**92**	**5**	5.43

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD 2023	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil	**Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Pemalang, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2	2	2	100	2	2	100
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	18	18	18	100	18	0	-
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial desa dan Kecamatan	60	60	60	100	60	0	-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompomcam	12	12	12	100	12	3	25
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan Baik**	**84,49**	**71,88**	**61,11**	100	**61,11**	**61,11**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
	Keluaran	**Jumlah desa bertata kelola pemerintahan Baik**	**211**	**211**	**211**	100	**211**	**96**	45.49
	Hasil	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan**	**100**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	18	18	18	100	18	2	11.11

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi Desa	18	18	18	100	18	18	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	18	18	18	100	18	0	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas kepala desa dan Perangkat desa	17	17	17	100	17	0	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan	36	36	36	100	36	0	-
	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	fungsi Badan Permusyawaratan Desa							
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	10	10	10	100	10	0	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan desa (RPJMDes dan RKP Des)	18	18	18	100	18	18	100
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi masyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	18	18	18	100	18	18	100
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan desa	58	58	58	100	58	58	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2022-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	fungsi Badan Permusyawaratan Desa							
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	10	10	10	100	10	0	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perencanaan desa (RPJMDes dan RKP Des)	18	18	18	100	18	18	100
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi masyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	18	18	18	100	18	18	100
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan desa	58	58	58	100	58	58	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulujami

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		86,18	86,23	86,26		**88,74**		86,26		
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		86,32	86,32	87,93		**89,25**		89,30		
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks			√	45,08	46,12	46,16		**45,08**		46,18		
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai			√	35,40	35,44	35,47		**48,10**		35,47		
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%			√	86,60	86,60	86,60		86,60		86,60		
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%			√	78,33	78,33	80,25		78,33		80,25		
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%			√	100	100	100		100		100		
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%			√	100	100	100		100		100		
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%			√	66,67	66,67	72,22		66,67		72,22		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ulujami

Kecamatan Ulujami adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Ulujami berdasarkan Renstra tahun 2022-2026 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Cakupan layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2024 IKM Kecamatan Ulujami sebesar **88,84** dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Ulujami. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujami meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2024, cakupan layanan Kecamatan Ulujami tersebut mencapai 100 % dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Ulujami meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100 % melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 6 kewenangan dari total 6 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 100 %, hal ini disebabkan keterbatasan personil

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100 % karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/ kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100 %, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Ulujami. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 100% yaitu sebanyak 0 desa dari 18. desa di Kecamatan Ulujami. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Ulujami.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2024, Kecamatan Ulujami mendapat nilai SAKIP sebesar **60,04** dan untuk IRB tidak dilakukan evaluasi di tingkat OPD/Kecamatan, tapi di tingkat Kabupaten namun demikian IRB Kecamatan mendukung nilai IRB tingkat Kabupaten. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Ulujami perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Ulujami untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Ulujami yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia;
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa / kelurahan dan kecamatan;
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik;
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja;
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Ulujami juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan;
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Ulujami justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029adalah :

"TERWUJUDNYA PEMALANG "BERCAHAYA" – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bersih

Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Cakap

Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional.Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal

Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

MULYA

MULYA: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasanproses pencapaian tujuan, maka ditetapka 8 (delapan) misi pembangunan jangka

https://jdih.pemalangkab.go.id/

menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4. **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan Teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase **Bersih dan Handal** dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan
Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi,misi, program RPJMD 2025-2029 merupakan target capaian yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Ulujami sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program- program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Ulujami tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Ulujami,sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Bercahaya: Bersih,Cakap, Handal dan				
Resik : Menciptakan budaya dan lingkungan yang Bersih	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda Dan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat Desa dan kelurahan 3. Belum	1. Tuntutan masyarakat Akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan Nyaman 2. Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat desa/keluraha n untuk aktif Dalam perencanaan, pelaksanaan Dan pengawasan pembangunan	1. Adanya Teknologi Informasi yang dapat Digunakan Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyara Kat 2. Adanya PD Dan Pendamping desa yang Dapat Mendukung Fasilitasi Pemberdayaa n masyarakat desa/kelurah An 3. Adanya Linmas

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	Optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik 6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan 6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran 7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa 6. Adanya pendampingan dari PD terkait 7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar	1. Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City, dan kualitas layanan aduan masyarakat; 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasaan pada masyarakat			

Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.
2. Meningkatkan daya saing pembangunan daerah.
3. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan.
5. Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel.

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sehat dan nyaman dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah

2. Tujuan 2 Meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel dengan sasaran sebagai berikut:
   - Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik
3. Tujuan 3 Meningkatkan daya saing pembangunan daerah dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi lokal
   b. Meningkatnya kualitas SDM daerah
   c. Meningkatnya kemandirian pangan
   d. Meningkatnya pengendalian harga bahan pokok dan penting
   e. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
   f. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan
   g. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
   h. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi
4. Tujuan 4 Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
   b. Meningkatnya penanganan pengangguran
5. Tujuan 5 Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang menciptakan keamanan dengan nilai nilai budaya dan kegotong-royongan dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan secara harmonis dan kondusif

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Meningkatnyaketahanan daerah dalam menghadapi bencana
c. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2025-2029 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Ulujami. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait;
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah **"Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia"**. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut dipetakan untuk menetukan isu strategis di Tahun 2026, diarahkan pada:

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan kecamatan di tahun 2024, yaitu sebesar 89%
b. Belum optimalnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
c. Perlu koordinasi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan
d. Perlu koordinasi dalam penanganan potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan
e. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa, dimana di tahun 2024 baru sebanyak 84% desa yang sudah bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum Optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
g. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
h. Pemenuhan dan perbaikan sarpras kecamatan
i. Terlalu banyak SIM yang harus di entry di tingkat desa sementara SDM yang paham IT di tingkat desa terbatas
j. Perlu peningkatan kapasitas linmas
k. Perlu penganggaran fasilitasi lembaga kemasyarakatan selain PKK

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Ulujami tahun 2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dokumen penganggaran;

7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Ulujami adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Ulujami mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Ulujami adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :
    a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
    b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
    c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

Adanya peraturan terkait Kecamatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Ulujami.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Ulujami ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Ulujami dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Ulujami. Renja Kecamatan Ulujami disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Ulujami.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN ULUJAMI				**2.955.916.322**					**2.955.916.322**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec. Ulujami**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.745.167.322**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec. Ulujami**	**Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	2.745.167.322	
I.1	**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujami**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**15 dok**	18.364.000	**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujami**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**15 dok**	18.364.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	3 dok	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	3 dok	3.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	1 dok	2.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	1 dok	2.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun	1 dok	2.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)	1 dok	2.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	4 dok	4.343.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	4 dok	4.343.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	4 dok	3.021.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ulujami	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	4 dok	3.021.000	
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujami**	**Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi keuangan**	**17 Org**	2401699000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujami**	**Jumlah ASN yang difasilitasi administrasi keuangan**	**17 Org**	**2.401.699.000**	
			Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	**1 Dok**				**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**	**1 Dok**		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulujami	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan (orang/bulan)	17 orng / bln	2.123.588.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulujami	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan (orang/bulan)	17 orng / bln	2.123.588.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang Disusun	1 Dok	2.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Ulujami	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semeste	1 Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Ulujami	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semeste	1 Dok	2.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD		SKPD yang tersusun (dokum			Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD		SKPD yang tersusun (dokum			
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Ulujami	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun (dokumen)	1 Dok	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Ulujami	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun (dokumen)	1 Dok	2.000.000	
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun (dokumen)**	**2 Dok**	**2.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah**	**Kec. Ulujami**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun (dokumen)**	**2 Dok**	**2.000.000**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun (dokumen)	1 Dok	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun (dokumen)	1 Dok	1.000.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun (dokumen)	1 Dok	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun (dokumen)	1 Dok	1.000.000	
I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas**	**22 orng**	**6.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujami**	**Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan Kapasitas**	**22 orng**	6.000.000	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang/kegiatan)	308 Org / Keg.	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang/kegiatan)	308 Org / Keg.	5.000.000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang/kegiatan)	22 Org / Keg.	1.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang/kegiatan)	22 Org / Keg.	1.000.000	Untuk optimalisasi program
01.05	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah aktifitas administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	**8 aktf**	128.062.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Ulujami**	**Jumlah aktifitas administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	8 aktf	128.062.000	
			Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (layanan)	**8 Lyanan**				**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (layanan)**	8 Lyanan		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ulujami	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	10 Jns / bln	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ulujami	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	10 Jns / bln	5.000.000	Untuk optimalisasi program
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ulujami	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis/bulan)	3 Jns / bln	99.667.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ulujami	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis/bulan)	3 Jns / bln	99.667.000	Untuk optimalisasi program
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ulujami	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	1 Jns / bln	4.895.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ulujami	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	1 Jns / bln	4.895.000	
			Jumlah penggandaan yang tersedia (lembar)	10000 lembar				Jumlah penggandaan yang tersedia (lembar)	10000 lembar		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Ulujami	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	3 Jns / bln	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	3 Jns / bln	2.500.000	
		Kec.	Jumlah peraturan perundang-	5 Buku				Jumlah peraturan perundang-	5 Buku	0	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
		Ulujami	undangan yang tersedia (buku)					undangan yang tersedia (buku)			
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (kegiatan)	2 kegiatan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulujami	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (kegiatan)	2 kegiatan	15.000.000	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ulujami	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata (jenis)	3 jenis	1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Ulujami	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata (jenis)	3 jenis	1.000.000	
01.06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Ulujami			**34.715.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Ulujami			**34.715.000**	
							Kec. Ulujami				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		34.715.000					34.715.000	
01.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah aktifitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**3 aktifitas**	**147.338.322**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah aktifitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	3 aktifitas	**147.338.322**	
			Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (jasa)	**3 Jasa**				**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (jasa)**	3 Jasa		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ulujami	Jumlah surat dinas yang terkirim (surat)	1200 surat	15.010.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ulujami	Jumlah surat dinas yang terkirim (surat)	1200 surat	15.010.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ulujami	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (jenis/bulan)	3 Jns / bln	49.756.322	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ulujami	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (jenis/bulan)	3 Jns / bln	49.756.322	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ulujami	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang /bulan)	6 Org / Bln	82.572.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ulujami	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/bulan)	6 Org / Bln	82.572.000	
01.08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**	**92 Unit**	278.100.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**	**92 Unit**	278.100.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ulujami	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara (unit)	14 unit	108.963.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ulujami	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara (unit)	14 unit	108.963.080	Untuk BBM dan pemeliharaan dinas
2	Pemeliharaan Mebel	Kec. Ulujami	Jumlah mebel yang terpelihara	7 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Ulujami	Jumlah mebel yang terpelihara	7 unit	15.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ulujami	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	4 unit	7.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ulujami	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	4 unit	7.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujami	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2 unit	147.137.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Ulujami	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2 unit	147.137.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Ulujami	**Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**81,11%**	**24.993.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Ulujami	**Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**81,11%**	**24.993.000**	
II.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Ulujami	**Jenis data pemerintahan yang dipublikasi (data)**	**12 Data**	**1.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Ulujami	**Jenis data pemerintahan yang dipublikasi (data)**	12 Data	**1.000.000**	
		Kec.	**Jumlah laporan**	**12 Dok**				**Jumlah laporan**	12 Dok		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
		Ulujami	**perkembangan capaian PBB**					**perkembangan capaian PBB**			
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ulujami	Jenis data pemerintahan yang tersedia (data)	12 Data	1.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ulujami	Jenis data pemerintahan yang tersedia (data)	12 Data	**1.000.000**	
II.2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec. Ulujami	**Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani**	**120 Kasus**	**11.993.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec. Ulujami	**Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani**	**120 Kasus**	**11.993.000**	
		Kec. Ulujami	**Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan (kasus)**	**120 Kasus**				**Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan (kasus)**	**120 Kasus**		
1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun (peraturan)	3 per.	1.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun (peraturan)	3 per.	**1.000.000**	
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi (layanan)	30 Lyanan	5.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi (layanan)	30 Lyanan	**5.000.000**	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani (kasus)	120 kasus	5.993.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani (kasus)	120 kasus	**5.993.000**	
II.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Ulujami	**Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia (kewenangan)**	**3 kewenangan**	**12.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Ulujami	**Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia (kewenangan)**	**3 kewenangan**	**12.000.000**	
		Kec. Ulujami	**Jumlah pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan**	**3 kewenangan**			Kec. Ulujami	**Jumlah pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang dilaksanakan**	**3 kewenangan**	**0**	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Ulujami	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan (izin)	2640 izin	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Ulujami	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan (izin)	2640 izin	**5.000.000**	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Ulujami	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun (dokumen)	18 Dok	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Ulujami	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun (dokumen)	18 Dok	**5.000.000**	
			Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan (surat)	2000 surat				Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan (surat)	2000 surat		
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ulujami	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia (kewenangan)	2 Kewenangan	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Ulujami	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia (kewenangan)	2 Kewenangan	**2.000.000**	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Ulujami	**Persentase masyarakat desa yang berdaya**	**78.83 %**	**35.998.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Ulujami	**Persentase masyarakat desa yang berdaya**	**78.83 %**	**35.998.000**	
III.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Ulujami	**Jumlah peserta Musrenbang (Desa /Kelurahan + Kecamatan) (orang)**	**150 orang**	**35.998.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Ulujami	**Jumlah peserta Musrenbang (Desa /Kelurahan + Kecamatan) (orang)**	**150 orang**	**35.998.000**	
			Jumlah peserta musyawarah perencanaan	**150 orang**				**Jumlah peserta musyawarah perencanaan**	**150 orang**		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
			pembangunan kecamatan					**pembangunan kecamatan**			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ulujami	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan (orang)	36 Orang	5.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ulujami	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan (orang)	**36 Orang**	**5.000.000**	
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan (orang)	150 orang	28.998.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan (orang)	**150 orang**	**28.998.000**	Untuk efektifitas program
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi (desa/kelurahan)	12 Desa	2.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi (desa/kelurahan)	**12 Desa**	**2.000.000**	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Ulujami	**Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**80%**	**6.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Ulujami	**Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani**	**80%**	**6.000.000**	
IV.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Ulujami	**Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya (orang)**	**36 orang**	**5.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Ulujami	**Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya (orang)**	**36 orang**	**5.000.000**	
		Kec. Ulujami	**Jumlah peserta peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban umum**	**36 orang**				**Jumlah peserta peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban umum**	**36 orang**		
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pelatihan Linmas (orang)	36 orang	5.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pelatihan Linmas (orang)	36 orang	5.000.000	
IV.2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya (peraturan)**	**2 Praturan**	**1.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kec. Ulujami	**Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya (peraturan)**	**2 Praturan**	**1.000.000**	
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ulujami	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring (peraturan)	2 Peraturan	1.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Ulujami	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring (peraturan)	2 Peraturan	1.000.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Ulujami	**Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (%)**	**100%**	**62.758.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Ulujami	**Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (%)**	**100%**	**62.758.000**	
V.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**	Kec. Ulujami	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan**	**10 Orang**	**62.758.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**	Kec. Ulujami	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan**	**10 Orang**	**62.758.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Daerah		**nasional (orang)**			**Daerah**		**nasional (orang)**			
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ulujami	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun (dokumen)	2 Dok	47.158.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Ulujami	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun (dokumen)	2 Dok	47.158.000	
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa (orang)	18 orng	1.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa (orang)	18 orng	1.000.000	
3	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan (kasus)	60 kasus	1.000.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ulujami	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan (kasus)	60 kasus	1.000.000	
4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam (tema)	12 tema	13.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ulujami	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam (tema)	12 tema	13.600.000	Untuk optimalisasi program
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec. Ulujami	**Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik**	**55,56%**	**31.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec. Ulujami	**Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik**	**56%**	**31.000.000**	
VI.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Ulujami	**Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik (desa)**	**18 Desa**	**31.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Ulujami	**Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik (desa)**	**18 Desa**	**31.000.000**	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades (desa/kegiatan)	18 Ds / Keg.	1.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades (desa/kegiatan)	18 Ds / Keg.	1.000.000	
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa (desa/kegiatan)	18 Ds	3.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa (desa/kegiatan)	18 Ds	3.000.000	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (desa/kegiatan)	18 Ds / Keg.	3.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (desa/kegiatan)	18 Ds / Keg.	3.000.000	
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (orang/kegiatan)	72 Org / Keg.	3.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (orang/kegiatan)	72 Org / Keg.	3.000.000	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (orang/kegiatan)	36 Orang / Kgiatn	3.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (orang/kegiatan)	36 Orang / Kgiatn	3.000.000	
6	Rekomendasi Pengangkatan	Kec.	Jumlah rekomendasi	10 surat	5.000.000	Rekomendasi Pengangkatan	Kec.	Jumlah rekomendasi	10 surat	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	dan Pemberhentian Perangkat Desa	Ulujami	pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan (surat)			dan Pemberhentian Perangkat Desa	Ulujami	pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan (surat)			
7	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) (desa/kegiatan)	18 Desa / Keg.	3.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) (desa/kegiatan)	18 Desa / Keg.	3.000.000	
8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (desa/kegiatan)	18 Desa	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Ulujami	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (desa/kegiatan)	18 Desa	5.000.000	
9	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa (orang/kegiatan)	58 Orang / Keg.	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Ulujami	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa (orang/kegiatan)	58 Orang / Keg.	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2025 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**USULAN KEGIATAN PIWK**				
A	**FISIK**				
1	Peningkatan jalan penghubung samong-rowosari (dk kweden)	Rowosari	Meningkatkan Transportasi	P: 600 L:3	Terverifikasi 151.002.000
2	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Botekan	Meningkatkan Transportasi	Volume : 500 m X 4 m	Terverivikasi 75.000.000
3	Pembangunan Talud	Sukorejo	Meningkatkan Transportasi dan mengamankan badan jalan	Volume P:250 M	Terverifikasi 75.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Ambowetan	Meningkatkan Transportasi	Volume P:700 M	Terverifikasi 75.000.000
5	Pembangunan Talud	Pagergunung	Meningkatkan Transportasi dan mengamankan badan jalan	Volume P:500 M	Terverifikasi 75.000.000
6	Pembangunan Talud	Wiyorowetan	Meningkatkan Transportasi dan mengamankan badan jalan	Volume P:500 M	Terverifikasi 75.000.000
7	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Tasikrejo	Meningkatkan Transportasi	Volume P:500 M x 3 M	Terverifikasi 75.000.000
8	Pembangunan Talud	Kaliprau	Meningkatkan Transportasi dan mengamankan badan jalan	Volume P:300M X1,5m	Terverifikasi 226.005.000
9	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Padek	Meningkatkan Transportasi	Volume P:200M x 3M	Terverifikasi 75.000.000
10	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Blendung	Meningkatkan Transportasi	Volume P:500M	Terverifikasi 75.000.000
11	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Ketapang	Meningkatkan Transportasi	Volume 200 m 350 cm x 15 cm	Terverifikasi 75.000.000
12	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Limbangan	Meningkatkan Transportasi	Volume 1.500 x 3,5 m	Terverifikasi 75.000.000
13	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Mojo	Meningkatkan Transportasi	Volume 320 x 3 meter	Terverifikasi 75.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

14	Pemeliharaan Jalan Desa (pengaspalan, pengerasan, pavingisasi, perbaikan, peningkatan fungsi jalan, pelebaran, pembuatan Telford, bronjong)	Pesantren	Meningkatkan Transportasi	Volume 200M x 1,5M x 0,3M	Terverifikasi 75.000.000
B	**NON FISIK**				
1	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Botekan	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Volume 30 orang	Terverifikasi 30.000.000
2	Pelatihan IT Desa	Sukorejo	Terlaksananya Pelatihan IT Desa	Volume 20 orang	Terverifkasi 30.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ULUJAMI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025 – 2045 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk – produk yang ramah lingkungan.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 -2029 diarahkan pada **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter"**, yang dijabarkan dalam empat prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakte dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun keempat RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan implementasi *Smart City;*
2. Peningkatan reformasi birokrasi;
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis tehnologi;
4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa;
5. Perlindungan, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan;
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar;
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ulujami

Kecamatan Ulujami dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Ulujami secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan".**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ulujami sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Ulujami dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Ulujami tahun 2026, adalah "**Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ulujami tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulujami Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	Jumlah desa di kecamatan yang memiliki status desa mandiri/jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut dikali 100	%	44,44
2		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	%	88,86
			NILAI SAKIP	Nilai	60,1

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Ulujami merencanakan sebanyak 6

https://jdih.pemalangkab.go.id/

program, 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Ulujami dengan kebutuhan dana sebesar **Rp. 2.955.916.322,-** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ULUJAMI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ulujami yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
d. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
e. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ulujami Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	TOTAL				**2.955.916.322**				**5.075.703.000**
7	**Unsur Kecamatan**								
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**2.745.167.322**				**4.822.103.000**
7.01.01.2.01	**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**18.364.000**				**46.700.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	3 dok	3.000.000	APBD		3 dok	4.200.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	1 dok	2.000.000	APBD		1 dok	3.500.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	1 dok	2.000.000	APBD		1 dok	3.500.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun	Kec. Ulujami	1 dok	2.000.000	APBD		1 dok	3.500.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	1 dok	2.000.000	APBD		1 dok	3.500.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	4 dok	4.343.000	APBD		4 dok	12.500.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	4 dok	3.021.000	APBD		4 dok	16.000.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.130.588.000**				**3.744.403.000**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan (orang/bulan)	Kec. Ulujami	22 orng / bln	2.123.588.000	APBD		22 orng / bln	3.735.403.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kec. Ulujami	1 Dok	2.500.000	APBD		1 Dok	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semester SKPD yang tersusun (dokum	Kec. Ulujami	1 Dok	2.500.000	APBD		1 Dok	3.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	1 Dok	2.000.000	APBD		1 Dok	3.000.000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah**				**2.000.000**				**2.400.000**
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	1 Dok	1.000.000	APBD		1 Dok	1.200,00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	1 Dok	1.000.000	APBD		1 Dok	1.200.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**6.000.000**				**16.700.000**
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan (orang/kegiatan)	Kec. Ulujami	308 Org / Keg.	5,000,000	APBD		308 Org / Keg.	15,500,000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang/kegiatan)	Kec. Ulujami	22 Org / Keg.	1,000,000	APBD		22 Org / Keg.	1,200,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**128.062.000**				**355.200.000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Kec. Ulujami	10 Jns / Bln	5.000.000	APBD		10 Jenis / bulan	10,500,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis/bulan)	Kec. Ulujami	3 Jns / bln	99.667.000	APBD		3 Jenis / bln	275,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis/bulan)	Kec. Ulujami	1 Jns / bln	4.895.000	APBD		1 Jenis / bln	10,500,000
		Jumlah penggandaan yang tersedia (lembar		10000 lbr				10000 lbr	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis/bulan)	Kec. Ulujami	3 Jns / bln	2.500.000	APBD		3 Jenis / bln	4,000,000
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia (buku)		5 Buku				5 Buku	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (kegiatan)	Kec. Ulujami	2 kegiatan	15,000,000	APBD		2 kegiatan	28,000,000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata (jenis)	Kec. Ulujami	3 jenis	1,000,000	APBD		3 jenis	1,200,000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**34.715.000**				**151.500.000**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**146.311.422**				**151.500.000**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim (surat)	Kec. Ulujami	1200 surat	15,001,000	APBD		1200 surat	15,500,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (jenis/bulan)	Kec. Ulujami	3 Jns / bln	40,756,822	APBD		3 Jenis / bulan	45,500,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan (orang/bulan)	Kec. Ulujami	6 Org/Bln	90,553,600	APBD		6 Org / Bulan	90,500,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**271.665.585**				**386.700.000**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap.	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara (unit)	Kec. Ulujami	14 unit	100.548.080	APBD		14 unit	232,000,000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara (unit)	Kec. Ulujami	35 unit	1,935,000	APBD		35 unit	1,200,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (unit)	Kec. Ulujami	43 unit	7,000,000	APBD		43 unit	48,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	Kec. Ulujami	1 unit	94,986,505	APBD		4 unit	75,000,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	Kec. Ulujami	2 unit	70,196,000	APBD		3 unit	30,500,000
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**24.993.000**				**44.100.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**1.000.000**				**1.200.000**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia (data)	Kec. Ulujami	12 Data	1.000.000	APBD		12 Data	1.200.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**11.993.000**				**12.700.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun (peraturan)	Kec. Ulujami	3 per.	1.000.000	APBD		3 peraturan	1.200.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi (layanan)	Kec. Ulujami	30 Lyanan	5,000,000	APBD		30 Layanan	5,500,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani (kasus)	Kec. Ulujami	120 kasus	5,993,000	APBD		120 kasus	6,000,000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**12.000.000**				**30.200.000**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan (izin)	Kec. Ulujami	2640 izin	5,000,000	APBD		2640 izin	16,000,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	18 Dok	5,000,000	APBD		18 Dok	12,000,000
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan (surat)		2000 surat				2000 surat	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia (kewenangan)	Kec. Ulujami	2 Kewenangan	2,000,000	APBD		2 Kewenangan	2,200,000
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**36.000.000**				**52.900.000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**35.000.000**				**51.700.000**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan (orang)	Kec. Ulujami	36 Orang	5,000,000	APBD		36 Orang	9,500,000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan (orang)	Kec. Ulujami	150 orang	29,000,000	APBD		150 orang	41,000,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi (desa/kelurahan)	Kec. Ulujami	12 Desa	1,000,000	APBD		12 Desa	1,200,000
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**1.000.000**				**1.200.000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi (lembaga)	Kec. Ulujami	1 Lmbaga	1.000.000	APBD		1 Lmbaga	1.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**6.000.000**				**16.500.000**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**1.000.000**				**1.500.000**
7.01.04.7.04.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring (peraturan)	Kec. Ulujami			2 prturan
7.01.04.7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**5.000.000**				**15.000.000**
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas (orang)	Kec. Ulujami	36 orng	5.000.000	APBD		36 orng	15.000.000
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**53.658.000**				**87.400.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**53.658.000**				**87.400.000**
7.01.05.2.02.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun (dokumen)	Kec. Ulujami	2 Dok	47.158.000	APBD		2 Dok	80.000.000
7.01.05.2.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa (orang)	Kec. Ulujami	18 orng	1.000.000	APBD		18 orng	1.200.000
7.01.05.2.02.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan (kasus)	Kec. Ulujami	60 kasus	1,000,000	APBD		60 kasus	1,200,000
7.01.05.2.02.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam (tema)	Kec. Ulujami	12 tema	4,500,000	APBD		12 tema	5,000,000
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**31,000,000**				**52,700,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**31,000,000**				**52,700,000**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades (desa/kegiatan)	Kec. Ulujami	18 Ds / Keg.	1,000,000	APBD		18 Ds / Keg.	1,200,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa (desa/kegiatan)	Kec. Ulujami	18 Ds	3,000,000	APBD		18 Ds	5,500,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (desa/kegiatan)	Kec. Ulujami	18 Ds / Keg.	3,000,000	APBD		18 Ds / Keg.	5,500,000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (orang/kegiatan)	Kec. Ulujami	72 Org / Keg.	3,000,000	APBD		72 Org / Keg.	6,500,000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (orang/kegiatan)	Kec. Ulujami	36 Orang / Kgiatn	3,000,000	APBD		36 Orang / Kegiatan	6,500,000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan (surat)	Kec. Ulujami	10 surat	5,000,000	APBD		10 surat	5,500,000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) (desa/kegiatan)	Kec. Ulujami	18 Desa / Keg.	3,000,000	APBD		18 Desa / Kegiatan	5,500,000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (desa/kegiatan)	Kec. Ulujami	18 Desa	5,000,000	APBD		18 Desa	5,500,000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa (orang/kegiatan)	Kec. Ulujami	58 Orang / Keg.	5,000,000	APBD		58 Orang / Kegiatan	11,000,000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Ulujami merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Ulujami Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Ulujami memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Ulujami secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Ulujami Tahun 2026.

Ulujami, Septembe 2025
CAMAT ULUJAMI

MUHIBIN, A.Md, S.H.
Pembina
NIP. 19720112 199603 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050/ /TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor .... Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal
BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050/ /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN ULUJAMI
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Ulujami	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Ulujami	Ketua	
3.	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Ulujami	Sekretaris	
4. '	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Ulujami	Anggota	
9.	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Ulujami	Anggota	DARWATI, S.1P.
10.	Pengelola Barang Milik Daerah pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ulujami	Anggota	EKO HAD1 PURNOMO
11.	Bendahara pada Kecamatan Ulujami	Anggota	Y. RETNONINGSIH

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dokumentasi Forum Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Ulujami Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA) KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempet di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam lampiran I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

a. Pemaparan materi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami yang disampaikan oleh Muhibin, A.Md, SH. Camat Ulujami
b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026, maka pada :

Hari dan tanggal : Rabu, 5 September 2026
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang PKK Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026

MENYEPAKATI

Kesatu : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Renja Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran II berita acara ini

Kedua : Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini

Ketiga : Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini

Keempat: Rumusan saran masukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Berita Acara hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2026 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulujami Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ulujami, 5 Septembe 2025
Camat Ulujami,

MUHIBIN,A.Md,SH
Pembina
NIP 19720112 199603 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/kota: Kecamatan Ulujami

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas	√			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Camat Ulujami,

M.UHIBIN,A.Md,SH
Pembina
NIP 19720112 199603 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja PD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2025,dengan demikian Kecamatan Bantarbolang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Bantarbolang mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Bantarbolang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Bantarbolang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi dan Bagian
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang tahun 2026
   - Masukan atas pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP,Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat danPemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Rencana KerjaKecamatan Bantarbolangtahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
Tahun 2026

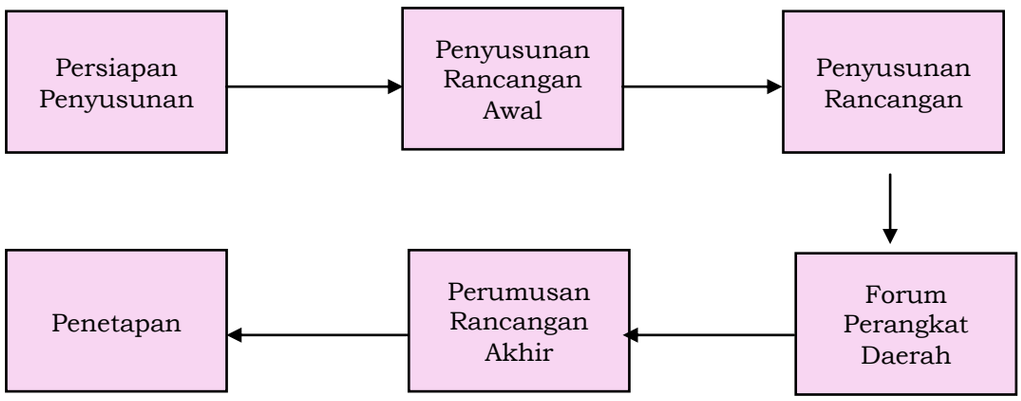

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029.

Gambar 1.2
Keterkaitan Rencana Kerja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

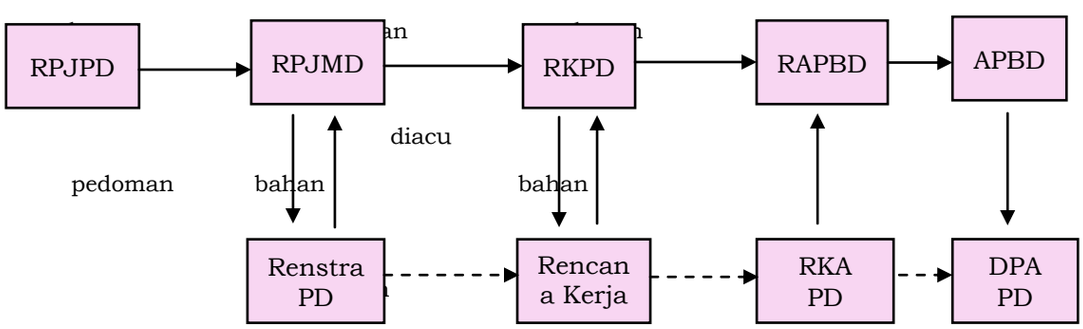

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. PeraturanPemerintahNomor39Tahun2006tentangTataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata CaraEvaluasi RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2008 Nomor23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2009 Nomor1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten PemalangTahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor14)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPemalang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati PemalangNomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas,FungsidanTataKerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Ranwal Rencana Kerja KecamatanBantarbolangsebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Bantarbolang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadiacuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Bantarbolangtahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan,berisi tentang latar belakang,landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025,pencapaian target Renstra Kecamatan Bantarbolang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang,isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang, review terhadap rancangan awal RKPD,penelaahan usulan program,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan KecamatanBantarbolang, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BANTARBOLANG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2025 dan Capaian Renstra KecamatanBantarbolang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi,yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Bantarbolang sampai dengan triwulan III Tahun 2025, estimasi tahun 2026 dan prakiraan maju rencana Tahun 2027dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2025

Jumlah anggaran Kecamatan Bantarbolang setelah perubahan sebesar Rp.3.160.853.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 17 kegiatan dan 55 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut pada triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp. 2.069.932.437,00 atau sebesar 65,49%.

Estimasi Tahun Aggaran 2026

Jumlah rencana anggaran Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 sebesar Rp.3.483.830.000,00 yang terbagi dalam 6 program,17 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun Aggaran 2027

Jumlah rencana anggaran Kecamatan Bantarbolang Tahun 2027 sebesar Rp.3.708.240.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 17 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, Kecamatan Bantarbolang sudah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bantarbolang s/d Tahun Anggaran 2025 :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	182,16	54,35	60,30	60,40	100,17	67,41	182,16	100,00
		Indeks Reformasi Birokrasi	28,44	12,72	13,72	0	0	14,72	28,44	100,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	40	18	15	15	100	7	40	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		tersusun								
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	***40***	***28***	***15***	***15***	***100***	***7***	***40***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	286,91	140,24	100	100	100	46,67	286,91	100
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkatd aerah yang tersusun	***286,91***	140,24	100	100	100	46,7	286,91	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	11	5	3	3	100	3	11	100
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	***11***	***5***	***3***	***3***	***100***	***3***	***11***	***100***
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	2	1	1	100	1	4	100
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	4	2	1	1	100	1	4	100
		Jumlahdokume	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		n perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD								
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	4	2	1	1	100	1	4	100
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	3	1	1	1	100	1	3	100
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil	***3***	***1***	***1***	***1***	***100***	***1***	***3***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	13	5	4	4	100	4	13	100
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	***13***	***5***	***4***	***4***	***100***	***4***	***13***	***100***
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	10	3	4	4	100	4	10	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		disusun								
		Jumlahl aporan evaluasi kinerja perangkat daerah	***10***	***3***	***4***	***4***	***100***	***4***	***10***	***100***
7.01.01.2.02	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	58	30	14	14	100	14	58	100
		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	***58***	***30***	***14***	***14***	***100***	***14***	***58***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	428,57	228,57	100	100	100	100	428,57	100
		Persentase	***428,57***	***228,57***	***100***	***100***	***100***	***100***	***428,57***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel								
7.01.01.2.02.01	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersediagaji dan tunjangan	51/14	17/14	17 /14	17/11	78,57	17/14	51/14	100
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	***51/14***	***17/14***	***17 /14***	***17/11***	***78,57***	***17/14***	***51/14***	***100***
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	4	3	1	1	100	1	4	100
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koodinasi penyusunanlaporan keuangan akhir tahun SKPD	***4***	***3***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulana/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	51	29	11	11	100	11	51	100
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	***51***	***29***	***11***	***11***	***100***	***11***	***51***	***100***
7.01.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	4	2	1	1	100	1	4	100
		Jumlah dokumen pelaporan dan	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		analisis prognosis realisasi anggaran								
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	8	4	2	2	100	2	8	100
		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	***8***	***4***	***2***	***2***	***100***	***2***	***8***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	400	200	100	100	100	100	400	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	***400***	***200***	***100***	***100***	***100***	***100***	***400***	***100***
7.01.01.2.03.01	PenyusunanPerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	4	2	1	1	100	1	4	100
		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	4	2	1	1	100	1	4	100
		Jumlah laporanr ekonsiliasi dan penyusunan	***4***	***1***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		laporan barangmilik daerah pada SKPD								
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	68	38	20	20	100	10	68	100
		Jumlahpegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	***68***	***28***	***20***	***20***	***100***	***10***	***68***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	390,91	200	100	100	100	100	390,91	100
		Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	***390,91***	***200***	***100***	***100***	***100***	***90,91***	***390,91***	***100***
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkap	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributke lengkapan	0	0	0	0	0	0	0	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	annya									
		Jumlah paket pakaiandinas beserta atributkelengkapan	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	86	24 /1	10	10	100	52	86	100
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	***86***	***24 /1***	***10***	***10***	***100***	***52***	***86***	***100***
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan								
		Jumlah orang yang mengikuti								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	KeluaranKegiatan	Jumlah layanan administrasiumum perangkat daerah yang tersedia	51	29	12	12	100	10	51	100
		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	***51***	***29***	***12***	***12***	***100***	***10***	***51***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	659,24	468,33	100	100	100	90,91	659,24	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Persentase ketersediaan layanan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	***659,24***	***468,33***	***100***	***100***	***100***	***90,91***	***659,24***	***100***
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	45/12	22/12	11/12	11/12	100,00	12/12	45/12	100
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	***45/12***	***22/12***	***11/12***	***11/12***	***100,00***	***12/12***	***45/12***	***100***
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16	10	5	5	100	1	16	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	***16***	***10***	***5***	***5***	***100***	***1***	***16***	***100***
7.01.01.2.06.03	PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	16	10	5	5	100	1	16	100
		Jumlah paket peralatan rumahtangga yang disediakan	***16***	***10***	***5***	***5***	***100***	***1***	***16***	***100***
7.01.01.2.06.04	Penyediaanbahan logistikkantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersesia	17/12	7/12	5/12	5/12	100	5/12	17/12	100
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	***17/12***	***7/12***	***5/12***	***5/12***	***100***	***5/12***	***17/12***	***100***
7.01.01.2.06.05	Penyediaanbarangcetakandan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	7/12	4/12	2/12	2/12	100,00	1/12	7/12	100
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	***7/12***	***4/12***	***2/12***	***2/12***	***100,00***	***1/12***	***7/12***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		disediakan								
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	3/12	1/12	1/12	1/12	100,00	1/12	3/12	100
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	***3/12***	***1/12***	***1/12***	***1/12***	***100,00***	***1/12***	***3/12***	***100***
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	8	4	2	2	100,00	2	8	100
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	***8***	***4***	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***8***	***100***
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerinta									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	h Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumla h barang milik daerah yang tersedia	161	17	73	73	100	71	161	100
		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	***161***	***17***	***73***	***73***	***100***	***71***	***161***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	288,89	88,89	100	100	100	100	288,89	100
		Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	***288,89***	***88,89***	***100***	***100***	***100***	***100***	***288,89***	***100***
7.01.01.2.07.02	PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	2	1	1	1	100	0	2	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	***2***	***2***	***1***	***1***	***100***	***0***	***2***	***100***
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	12	10	1	1	100	1	12	100
		Jumlah paket mebel yang disediakan	***12***	***10***	***1***	***1***	***100***	***1***	***12***	***100***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	10	6	2	2	100	2	10	100
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	***10***	***6***	***2***	***2***	***100***	***2***	***10***	***100***
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan	95	41	36	36	100	18	95	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		pemerintahan daerah yang tersedia								
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	***95***	***41***	***36***	***36***	***100***	***18***	***95***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	591,67	400	100	100	100	91,67	591,67	100
		Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	***591,67***	***400***	***100***	***100***	***100***	***100***	***591,67***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.08.01	Penyediaanjasasuratmenyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	3999	1999	1000	1000	100	1000	3999	100
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	***47***	***23***	***12***	***12***	***100***	***12***	***47***	***100***
7.01.01.2.08.02	Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan	20/12	5/12	3/12	3/12	100	12	20/12	100
		Jumlah laporan penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	36	***22***	***12***	***12***	***100***	***12***	***36***	***100***
7.01.01.2.08.04	Penyediaanjasapelayananumumkantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	56/12	27/12	13/12	13/12	100	16/12	56/12	100
		Jumlahlaporan penyediaanjasa pelayananumumkantor yang disediakan	***56***	***27***	***13***	***13***	***100***	***16***	***56***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	191	115	30	28	100	76	191	100
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	***191***	***115***	***30***	***30***	***100***	***76***	***191***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	393,33	193,33	100	100	100	100	393.33	100
		Persentase barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan daerah	***393,33***	***193,33***	***100***	***100***	***100***	***100***	***393.33***	***100***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas	38	18	10	10	100	13	41	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	BiayaPemeliharaan Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	yang berizin dan terpelihara								
		Jumlah kendaraan dinas operasional ataulapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	***38***	***18***	***10***	***10***	***100***	***13***	***41***	***100***
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	192	66	90	90	100	36	192	100
		Jumlah mebel yang dipelihara	***192***	***66***	***90***	***90***	***100***	***36***	***192***	***100***
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaanperalatan dan mesinlainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	68	20	26	26	100	22	68	100
		Jumlah peralatan dan mesinlainnya yang	***68***	***20***	***26***	***26***	***100***	***22***	***68***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		dipelihara								
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasigedungkantor dan bangunanlainnya	Junlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	12	6	3	3	100	3	12	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	***12***	***6***	***3***	***3***	***100***	***3***	***12***	***100***
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasisarana dan prasaranagedung kantorataubangunanlainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	3	1	1	1	100	1	3	100
		Jumlahsarana dan prasaranagedungkantor/bangunanlainnya yang dipelihara/direhabilitasi	***3***	***1***	***1***	***1***	***100***	***1***	***3***	***100***
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasisarana dan prasaranapenduk	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung	4	2	1	1	100	1	4	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	ung gedung kantor ataubangunan lainnya	kantor/bangunan lainnya yang terpelihara								
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	347,92	163,48	92,22	92,22	100	92,22	347,92	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Keluaran Kegiatan	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi	3	2	1	1	100	1	4	100
		Jenis data	***3***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		pemerintahan yang dipublikasi								
	Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	280	200	80	100	100	80	360	100
		Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	***280***	***100***	***80***	***100***	***100***	***80***	***360***	***100***
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	4	2	1	1	100	1	4	100
		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingka t kecamatan	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
	KeluaranKegiatan	Jumlahpengaduanmasyarakat yang terselesaikan	15	7	4	4	100	4	15	100
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***15***	***7***	***4***	***4***	***100***	***4***	***15***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	360	200	80	80	100	80	360	100
		Persentasedokumenpelayanankepadamasyarakatterselesaika	***360***	***200***	***80***	***80***	***100***	***80***	***360***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		n								
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP peleyanan yang tersusun	105	35	35	35	100	35	105	100
		Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	***4***	***2***	***1***	***1***	***100***	***1***	***4***	***100***
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	30	10	10	10	100	10	30	100
		Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan	***8***	***4***	***2***	***2***	***100***	***2***	***8***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		minimal di wilayah kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkata n Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	6	4	1	0	0	2	6	100
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	***6***	***4***	***1***	***0***	***0***	***2***	***6***	***100***
7.01.02.2.04	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	56	22	17	17	100	17	56	100
		Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terususn	***56***	***22***	***17***	***17***	***100***	***17***	***56***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	309,44	109,44	100	100	100	100	309,44	100
		Persentasedokumenpelayananberdasarpelimpahankewenanga	***309,44***	***109,44***	***100***	***100***	***100***	***100***	***309,44***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		nBupati kepada Camat yang tersedia								
7.01.02.2.04.01	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdenganpelayananperizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	76	59	17	17	100	17	76	100
		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	***76***	***59***	***17***	***17***	***100***	***17***	***76***	***100***
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaanurusanpemerintahan yang terkaitdengan non perizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	17	17	0	0	0	0	17	100
		Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan	302,34	141,67	94	94	100	66,67	302,34	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	KELURAHAN	yang aktif								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)	90	90	0	0	0	0	90	100
		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	***7***	***2***	***3***	***3***	***100***	***2***	***7***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran Musrenbang desa dan musrenbang kecamatan	308,37	141,67	100	100	100	66,67	308,37	100
		Persentase kehadiran Lembaga peserta murenbang desa dan musrenbang kecamatan	***308,37***	***141,67***	***100***	***100***	***100***	***66,67***	***308,37***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.03.2.01.01	PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi musrenbang desa	60	60	0	0	0	0	60	100
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasidalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	***3***	***1***	***1***	***1***	***100***	***1***	***3***	***100***
\7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	60	60	0	0	0	0	60	100
		Jumlah dokumen sinkronisasi	***3***	***1***	***1***	***1***	***100***	***1***	***3***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan								
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	3	1	1	1	100	1	3	100
		Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	***3***	***1***	***1***	***1***	***100***	***1***	***3***	***100***
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Kecamatan									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	3	2	1	1	100	0	3	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	***3***	***2***	***1***	***1***	***100***	***0***	***3***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	300	200	100	100	100	0	300	100
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	***300***	***200***	***100***	***100***	***100***	***0***	***300***	***100***
7.01.03.2.03.02	PeningkatanKapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	30	30	0	0	0	0	30	100
		Jumlah	***2***	***0***	***1***	***1***	***100***	***1***	***2***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkankapasitasnya								
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentasegangguantrantibumtingkatdesa dan kecamatan yang dapatdiselesaikan di KecamatanBantarbolang	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat	34	34	0	0	0	0	**34**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		kapasitasnya								
		Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	***34***	***34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	100	100	0	0	0	0	100	100
		Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100***	***100***
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansivertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta pelatihan linmas	34	34	0	0	0	0	34	100
		Jumlah laporan hasil	***8***	***0***	***4***	***4***	***100***	***4***	***8***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan								
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda/Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	5	5	0	0	0	0	5	100
		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturankepal	***6***	***4***	***1***	***1***	***100***	***1***	***6***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		adaerah								
	Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	260	100	80	80	100	80	260	100
		Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	***260***	***100***	***80***	***80***	***100***	***80***	***260***	***100***
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda/Perbup yang dimonitoring	5	5	0	0	0	0	5	100
		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan	***2***	***0***	***1***	***1***	***100***	***1***	***2***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	360,46	172,22	100	100	100	88,24	360,46	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasankebangsaan dan ketahanan nasional	710	260	350	350	100	100	710	100
		Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	***710***	***260***	***350***	***350***	***100***	***100***	***610***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	272,22	272,22	100	100	100	88,24	306,46	100
		Persentase masyarakat yang pahamwawasan kebangsaan dan	***306,46***	***272,22***	***100***	***100***	***100***	***88,24***	***306,46***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		ketahanannasional								
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringan hari besar nasional, hari jadi kab, hari besar agama, festival budaya yang tersusun	2	2	0	0	0	0	2	100
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasankeban	***480***	***130***	***250***	***250***	***100***	***100***	***480***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		gsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	135	35	50	50	100	50	135	100
		Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	***135***	***35***	***50***	***50***	***100***	***50***	***135***	***100***
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	4	4	0	0	0	0	4	100
		Jumlahlaporan konflik yang	***4***	***0***	***4***	***0***	***0***	***4***	***4***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah unsur Forkompimcam yang berkoordinasi	3/12	3/12	0	0	0	0	3/12	100
		Jumlah dokumen tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	***9***	***3***	***3***	***3***	***100***	***3***	***9***	***100***
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	243,94	135,97	94,12	94,12	94,12	13,85	243,94	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Keluaran Kegiatan		18	8	0	0	0	10	18	100
		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	**133**	**0**	***95***	**61**	**64,21**	***72***	***133***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertatakelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	208,64	135,97	100	58,82	58,82	13,85	208,64	100
		Persentase desa bertata kelola pemerintahanbaik yang dicapaidibanding target pada tahunberkenaan	***208,64***	***135,97***	***100***	***58,82***	***58,82***	***13,85***	***208,64***	***100***
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan	Jumlah desa yang difasilitasi	47	30/7	17	17	100	0	47	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	peraturan desa dan peraturan kepala desa	penyusunan Perdes dan Perkades								
		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	***47***	***30/7***	***17***	***17***	***100***	***0***	***47***	***100***
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina bukuadministrasi desa	51	34/1	17	17	100	0	51	100
		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangkaadministrasi tata pemerintahan desa	***51***	***34/1***	***17***	***17***	***100***	***0***	***51***	***100***
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	68	34/1	17	17	100	17	68	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	***68***	***34/1***	***17***	***17***	***100***	***17***	***68***	***100***
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas kepala desa dan perangkat desa	17/1	17/1	0	0	0	0	17/1	100
		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat	***17/1***	***17/1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17/1***	***100***
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	7	0	7	7	100	0	7	100
		Jumlah	***7***	***0***	***0***	***0***	***100***	***0***	***7***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		dokumen fasilitasi dalamrangkapelaksanaanpemilihankepaladesa								
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratandesa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	85/1	85/1	0	0	0	0	85/1	100
		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7.01.06.2.01.08	RekomendasiPengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	30	10	10	10	100	0	30	100
		Jumlah dokumen	***30***	***10***	***10***	***10***	***100***	***0***	***30***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa								
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlahdesa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	34/1	17/1	17	0	0	0	34/1	100
		Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	***34/1***	***17/1***	***17***	***0***	***0***	***0***	***34/1***	***100***
7.01.06.2.01.13	Fasilitasipenyusunanperencanaan pembangunanpartisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	34/1	17/1	0	0	0	0	34/1	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/BidangUrusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program danKegiatan (Renja PD Tahun 2025)	PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PDTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	***34/1***	***17/1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34/1***	***100***
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	52/1	51/1	0	0	0	1	52/1	100
		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	***52/1***	***51/1***	***0***	***0***	***0***	***1***	***52/1***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 Analisis Kinerja PelayananKecamatanBantarbolang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja PelayananKecamatanBantarbolang
KabupatenPemalang

No.	Indikator	SPM/standarnasional	IKU	IKK	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		CatatanAnalisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	-	√	-	82	84	85	86	82,94	82,71	85		
2	Cakupan layanan kecamatan	-	√	-	94,69	96,07	96,27	96,47	83,20	9,95	96,27		
3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	12,72	13,72	14,72	15,72	0,00	0,00	14,72		
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	√	-	48,89	50,89	52,89	54,89	54,35	0,00	52,89		
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	-	-	-	92,22	92,22	92,22	100	100	49,99	92,22		
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	-	-	-	93	94	95	96	150	1,00	95		
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100	0,00	100		
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	-	-	-	100	100	100	100	100	0,00	100		
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	-	-	-	88,24	94,12	94,12	94,12	100	0,00	94,12		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Bantarbolang berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Cakupanlayanankecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
f. Persentase masyarakatdesa dan kelurahan yang aktif
g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2024 IKM Kecamatan Bantarbolang mencapai indeks 101,15 dimana target di tahun 2023 sebesar 82 sehingga status capaiannya termasuk Sangat Tinggi, hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Bantarbolang. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2023 cakupan layanan Kecamatan Bantarbolang masih Sedang yaitu mencapai 87,862% dimana target tahun 2023 sebesar 94,69%.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Bantarbolang meliputi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi tercapai 108,44% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 2 kewenangan dari total 2 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 100%.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif Tahun 2023 mencapai 100%, indikator kinerja persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan Tahun 2023 mencapai 150% dan indikator kinerja potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani Tahun 2024 mencapai100%. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik tercapai 100%.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), pada tahun 2024 Kecamatan Bantarbolang mendapat nilai SAKIP sebesar 54,35(kategori CC) dan IRB tahun 2024 belum bisa dinilai oleh Tim dari Inspektorat karena belum ada petunjuk teknis dalam penilaian evaluasi RB OPD. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perluada*reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Bantarbolang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Bantarbolang untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bantarbolang yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnyadesabertatakelolapemerintahanbaik
f. Belum optimalnyaakuntabilitaskinerja
g. Belum optimalnyapelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Bantarbolang juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih adamasyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkatdesa/kelurahan dan kecamatan
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandanganterhadapsuatuhalantarmasyarakat di tingkatdesa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bantarbolang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030 adalah :

VISI :

"**PEMALANG BERCAHAYA" (BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA)**

1. **Bersih** dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

MISI :

Dalam rangka mencapai visi **PEMALANG BERCAHAYA**, berikut ini misi RPJMD berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.

5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotongroyong, tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Gotujuavernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Bantarbolang mendukung dan mengimplementasikan dalam Renstra dan RPJMD dengan indikator yang sesuai untuk mencapai tujuan daerah. Dalam mendukung Visi dn Misi Kecamatan Bantarbolang mempunyi komitmen meningkatkn pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata–rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan misi unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Bantarbolang mendukung visi organisatoris untuk menciptakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping mendukung Visi dan Misi, Kecamatan Bantarbolang juga mendukung program unggulaan yang diharapkan dapat menjadi upaya akselerasi peningkatan kesejahteran masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang khususnya warga masyarakat di Kecamatan Bantarbolang .

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang tahun 2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang masih minim belum bisa memperbaiki sarana dan prasarana kecamatan,sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
2. Belum adanya inovasi pelayanan sehingga Masyarakat akan merasa lebih puas terhadap seluruh pelayanan kecamatan;
3. Masih rendahnya kesadaran dari pemerintahan desa untuk menyelesaikan segala administrasi yang dibebankan kepada pemerintahan desa;
4. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap laporan potensi konflik dan gangguan ketertiban dan ketentraman di wilayahnya;

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkatdesa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingandari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Bantarbolang mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance*disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Bantarbolang adalah :

1. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
   - PeraturanBupatiPemalangNomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

   Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Bantarbolang.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan kedepan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Bantarbolang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagaidasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang. Renja Kecamatan Bantarbolang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Bantarbolangdengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia),*Money* (Dana),*Machine* (Sarpras),*Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (BahanKerja).Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Bantarbolang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
KabupatenPemalang

Nama Perangkat Daerah : KecamatanBantarbolang Lembar 1 dari 12

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec.Bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	14,72	3.094.497.540	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec.Bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	14,72	3.158.303.000	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67,41				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah	67,41		
1.1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			4.332.700	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			2.600.110	
	KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	14 dok		KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	14 dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumenperencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			2.478.442.760	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			2.344.690.200	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	14 dok		KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	14 dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	100%		
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			746.920	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			496.920	
	KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen administrasi barangmilik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2 dok		Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			580.400	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			50.580.400	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	20 orang		KeluaranKegiatan		Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	20 orang		
	Hasil Kegiatan		Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	100%		Hasil Kegiatan		Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	100%		
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Bantarbolang			173.550.310					144.088.310	
	KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	8 dok		Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	8 dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Kec.Bantarbolang			31.543.550	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Kec.Bantarbolang			115.385.000	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	7 unit		Keluaran Kegiatan		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	7 unit		
	Hasil Kegiatan		Persentasebarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintah yang tersedia	100%		Hasil Kegiatan		Persentase barang milik daerah penunjangurusanpemerintah yang tersedia	100%		
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Kec.Bantarbolang			249.247.000	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Kec.Bantarbolang			250.556.600	
	KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	36 dok		Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	0		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	0		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Kec.Bantarbolang			190.369.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Bantarbolang			196.100.000	
	KeluaranKegiatan		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	10 unit		KeluaranKegiatan		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	10 unit		
	Hasil Kegiatan		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	100%		Hasil Kegiatan		Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%		
2	Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.Bantarbolang	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	92,22%	2.217.040	Program PenyelenggaraaPemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.Bantarbolang	PersentasePelayanan Publik yang tersedia	92,22%	1.075.240	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Bantarbolang			205.440	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Bantarbolang			205.440	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	1 dok		KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	1dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	80%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	80%		
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Bantarbolang			616.320	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Bantarbolang			616.320	
	KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	2 dok		Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidakdilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	2		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen penyelenggaraan urusanpemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	80 %		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangka tdaerah yang ada di kecamatan yang tersusun	100		
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Bantarbolang			-	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Bantarbolang				
	Keluaran		Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	-		Keluaran		Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	-		
	Hasil		Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dalam kondisi baik	-		Hasil		Persentaseprasarana dan sarana pelayananumumdalamkondisibaik	-		
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Bantarbolang			253.480	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Kec.Bantarbolang			253.480	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	17 dok		Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkankepada camat yang tersusun	17 dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	100 %		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan CatatanPenting					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.Bantarbolang	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	95%	28.667.720	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.Bantarbolang	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	95%	27.168.720	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Bantarbolang			24.417.840	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Bantarbolang			24.417.840	
	KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	3 dok		KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	3 dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase kehadiran lembaga peserta musrenbangdesa dan musrenbangkecamatan	100%		Hasil Kegiatan		Persenta sekehadiran lembaga peserta musrenbangdesa dan musrenbangkecamatan	100%		
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Bantarbolang			2.550.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Bantarbolang			2.550.000	
	KeluaranKegiatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	1 lembaga kemasyarakatan		KeluaranKegiatan		Jumlahlembagakemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	1 lembaga kemasyarakatan		
	Hasil Kegiatan		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat	16,67%		Hasil Kegiatan		Persentase lembaga kemasyarakatan	16,67%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			kecamatan yang aktif					tingkat kecamatan yang aktif			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Bantarbolang	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	8.600.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Bantarbolang	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	8.600.000	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Bantarbolang			6.050.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Bantarbolang			6.050.000	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	4 laporan		KeluaranKegiatan		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum yang tersusun	4 laporan		
	Hasil Kegiatan		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum yang tersusun	100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Kec.Bantarbolang			2.550.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Bantarbolang			2.550.000	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	1 laporan		Keluaran Kegiatan		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturankepala daerah yang tersusun	1 laporan		
	Hasil Kegiatan		Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	80%		Hasil Kegiatan		Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	80%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Bantarbolang	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	46.393.040	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Bantarbolang	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	18.777.640	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Bantarbolang			46.393.040	Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Bantarbolang			18.777.640	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah Masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	120 orang		Keluaran Kegiatan		Jumlah Masyarakat yang paham wawasankebangsaan dan ketahanan nasional	100 orang		
	Hasil Kegiatan		ProsentaseJumlah Masyarakat yang pahamwawasankebangsaan dan ketahanannasional	100%		Hasil Kegiatan		Prosentase Jumlah Masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%		

\

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					CatatanPenting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Bantarbolang	Persentase desa bertatakelola pemerintahan baik	94,12%	9.752.560	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Bantarbolang	Persentase desa bertatakelola pemerintaha nbaik	94,12%	8.183.860	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Bantarbolang			9.752.560	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Bantarbolang			8.183.860	
	Keluaran Kegiatan		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	17 dok		KeluaranKegiatan		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	17 dok		
	Hasil Kegiatan		Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	100%		Hasil Kegiatan		Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	100%		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan(*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar,terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*.Mekanisme secara *top down*ya itu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD,sedangkan mekanisme secara*bottomup* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
Kegiatan Fisik				
1	Pembangunan Jalan Lenggerong - Peguyangan	Desa Lenggerong	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
2	Pelebrn Jaln Pedagung - Gumanti	Desa Pedagung	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
3	Pembangunan jlan penghubung dusun Penusuhan dengan Desa Surajaya	Desa Kuta	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
4	Pembangunan Jaln penghubung Desa Sambeng dengan Desa Pegiringan	Desa Sambeng	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan (Rangking)
5	-Sender Talud kali Uyah Rt. 09 / 03 - Rehab Jembatan Blok Makam Dusun Wangkaldoyong	Desa Sumurkidang	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
6	- Pembangunan jalan penghubung Dusun Krajan dengan Dusun Pulasari - Bronjong kli Comal	Desa Suru	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
7	Pembangunan Rabat Beton Jalan usaha tani Dusun Kaliruyung	Desa Bantarbolang	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
8	Pembangunan bronjong di pemakaman Dusun Purana Timur	Desa Purana	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
9	Pengerasan Jalan Penghubung antar desa dan antar Kecamatan	Desa Pegiringan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	
Kegiatan Non Fisik				
1	Pelatihan Pembuatan pupuk organik	Desa Lenggerong	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
2	Pelatihan menjahit	Desa Suru	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
3	Pelatihan pembuatan pakan ternak	Desa Wangkaldoyong	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
4	Pelatihan Membatik	Desa Pedagung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
5	Pelatihan Pembuatan pakan ternak besar	Desa Kuta	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
6	Pelatihan pengelolaan sampah	Desa Sambeng	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
7	Pelatihan pengolahan sampah organik dri limbah	Desa Bantarbolang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
8	Ketrampilan merajut benang	Desa Purana	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	
9	Pelatihan menjahit	Desa Pegiringan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANTARBOLANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025 – 2029 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan pangan dan Energi, serta Ekonomi yang produktif dan insklusif”**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan program prioritas , meliputi :

1. Sekolah Rakyat;
2. Digitalisasi Pendidikan;
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Pengelolaan Sampah
6. Pembangunan perumahan (termasuk pembangunan 3 juta unit hunian)
7. Giant Sea Wall Pesisir Utara Jawa

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 -2029 diarahkan pada "**Penguatan Pembangunan Berkelanjutan**" dan "**Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional**". Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan pada penguatan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan penekanan khusus pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta upaya menjadi "Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045".

Arah Kebijakan dan Fokus :

- **Perekonomian yang Berdaya Saing:** Mengembangkan perekonomian yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- **Ketahanan Pangan:** Memperkuat sektor pertanian, termasuk memperhatikan kondisi petani, dan menjamin pasokan pangan.
- **Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi hasil produksi, seperti jalan provinsi, jalan produksi, dan infrastruktur publik lainnya seperti sarana olahraga dan ruang terbuka hijau.
- **Kesejahteraan Masyarakat:** Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- **Indonesia Emas 2045:** Arah kebijakan pembangunan ini sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta propinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah dengan kualitas lingkungan yang bersih, insftrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia "**dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Pertanian sebagai penyngga pangan Jawa Tengah*;*
2. Hilirisasi dan moderinisasi pertanian dan perikanan;
3. Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolan pertanian dan perikanan budidaya modern ;
4. Peningkatan insfrstruktur yng mmpu mengurangi kesenjangan dn mendorong pemertan pembangunan, jlan mantap dan konektivitas antr wilyah menjadi prioritas dlm rngka mempercepat distribusi barang dn jasa;
5. Penyediaan lapangan kerja mellui program padt karya pda pengelolaan sumber daya air dan ke PU an;
6. Mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan pemberian insentif pada pemilik sawah mellui akses pupuk murah, bibit berkulitan dan pendampingan untuk pasca panen;
7. Penguatan Kopersi Merah Putih yang mmpu menjadi mitra petani;
8. Mendorong BUMDES dn BUMDEsma dlam penguatan kemndirian pangan;
9. Penguatan cadangan pangan dan penguatan keanekaragaman bahan serta keamanan pangan;
10. Peningkatn kondusifitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah;
11. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan kolaborasi pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana;
12. Peningkatan kesadaran masyarakat dalaam melakukan pilh sampah dan pengelolaan kontrol landfiil TPA. Peningkatan pilah sampah pada semua sektor baik publik mupun swasta, pengutan bank sampah;
13. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang mudah diakses masyarakat, persiapan pemenuhan kebutuhan sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah unggulan, memperkuat sekolah inklusi dan kesetaraan;
14. Peningkatan perilaku hidup sehat dan pelayanan kesehatan;
15. Peningkatan budaya masyrakat yang berkolaborsi dengan pariwisata mampu mendorong perekonomian daerah;
16. Peningkatan perlindungan sosial pada PPKS, terutama pada PPKS terlantar, penguatan rumah singgah dalam penanganan PPKS;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

17. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Goverment, Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesioanlisme ASN, peningkatan budaya kerja.

Dari program prioritas tersebut Kecamatan Bantarbolang membuat perumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada point-17 Yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Goverment, Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesioanlisme ASN, peningkatan budaya kerja"

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good and clean governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bantarbolng harus terus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Bantarbolang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2026 adalah "**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan** ". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang sebagai Perangkat Daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi . Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bantarbolang tahun 2026, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat** ".Adapun indikatornya adalah Nilai SKM dan Prosentse meningkatnya jumlh desa mandiri. Indiktor tersebut diukur dengan cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.;

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi dan pengurangang an kesenjangan pendapatan masyarakat diwilayah Kecamatan		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85
2		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dn pemberdayaan masyarakat	Cakupan layanan kecamatan	%	96,27

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2025,Kecamatan Bantarbolang merencanakan sebanyak 6 program, 17 kegiatan dan 55 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Bantarbolang dengan kebutuhan dana sebesar Rp.2.811.235.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Sedangkan pada tahun 2026 Kecamatan Bantarbolang merencanakan 6 program, 17 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan prakiraan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.661.650.000 seperti pada tabel 3.2 berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 3.2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN PEMALANG

Nama Perangkat Daerah : KecamatanBantarbolang

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KecamatanBantarbolang				3.160.853.000,00				3.483.830.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.160.853.000,00				3.483.830.000,00
7	01				KECAMATAN				3.160.853.000,00				3.483.830.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			3.094.497.540,00			-	2.952.476.350,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -				2.600.110,00			-	21.300.350,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	478.450,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	3.220.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	336.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.050.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	336.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	2.940.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	336.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.050.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	336.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	2.940.350,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	4 Laporan	439.260,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	3.050.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	3 Laporan	336.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	3.050.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	01	2.02		AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah				2.344.690.200,00				2.300.254.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 orang/14 bulan Orang/bulan	2.343.945.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 orang/14 bulan Orang/bulan	2.292.224.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	231.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.300.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	11 Laporan	292.680,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Laporan	2.400.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	JumlahDokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	221.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.530.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				496.920,00				3.200.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	290.880,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	1.200.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	206.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.000.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Laporan	0,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.580.400,00				5.365.000,00
7	01	01	2.05	0002	PengadaanPakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtributKelengkapan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Paket	0,00
7	01	01	2.05	0010	SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang MengikutiSosialisasiPeraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	100 Orang	50.580.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	5.365.000,00
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Orang	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.088.310,00				141.807.250,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Paket	18.525.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	10.983.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.826.540,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	28.821.750,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.596.570,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	6.867.500,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	5 Paket	25.984.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Paket	27.795.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	9.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	JumlahDokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Dokumen	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	2 Laporan	75.406.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	57.840.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Dokumen	600.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				115.385.000,00				49.160.000,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	45.000.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	71 Unit	23.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		71 Unit	25.580.000,00
7	01	01	2.07	0006	PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	Unit	91.685.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Unit	23.580.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.556.600,00				238.106.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.284.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	7.700.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	27.366.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	25.500.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Laporan	0,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	13/12 Laporan	204.906.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13/12 Laporan	204.906.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.080.000,00				165.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	Unit	122.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Unit	60.300.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	90 Unit	5.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		90 Unit	5.100.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	RencanaTahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	26 Unit	24.240.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26 Unit	11.010.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	3 Unit	14.139.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	0,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.040.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	15.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.215.500,00				7.500.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				205.440,00				9.200.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	205.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	9.200.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	RencanaTahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	02	2.02		PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				616.320,00				18.400.000,00
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiata nPelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	JumlahDokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	205.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.660.000,00
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	2 Laporan	205.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	6.660.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	2 Laporan	205.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	6.080.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				253.480,00				3.900.250,00
7	01	02	2.04	0002	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	JumlahLaporanPelaksanaan Nonperizinan pada UrusanPemerintahan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 Laporan	253.480,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	3.900.250,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				29.728.720,00				64.699.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				27.168.720,00				56.899.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	RencanaTahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	200.880,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Lembaga Kemasyarakatan	12.804.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.417.840,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	34.345.000,00
7	01	03	2.01	0003	PeningkatanEfektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	9.750.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.550.000,00				5.600.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7	01	03	2.03	0002	PeningkatanKapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Lembaga Kemasyarakatan	5.600.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				8.600.000,00				13.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum				6.050.000,00				8.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	RencanaTahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas denganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	JumlahLaporan Hasil SinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	4 Laporan	6.050.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	8.000.000,00
7	01	04	2.02		KoordinasiPenerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah				2.550.000,00				5.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/SinergidenganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	JumlahLaporanKoordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				18.777.640,00				200.464.600,00
7	01	05	2.01		PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				37.831.760,00				46.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	PembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangkaMemantapkanPengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang MengikutiPembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangkaMemantapkanPengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	600 Orang	14.625.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1000 Orang	178.005.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	RencanaTahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	50 Orang	2.555.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Orang	2.650.000,00
7	01	05	2.01	0005	PenangananKonflik Sosial SesuaiKetentuanPeraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	4 Laporan	170.880,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	7.290.000,00
7	01	05	2.01	0008	PelaksanaanTugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.420.320,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	12.519.600,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				8.183.860,00				223.889.800,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8.925.920,00				17.550.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	410.380,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Dokumen	8.300.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	440.880,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Dokumen	10.364.800,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	440.880,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Dokumen	3.965.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	RencanaTahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	200.880,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Dokumen	7.140.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	151.200.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	464.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	26.690.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	415.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Dokumen	7.300.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	411.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Dokumen	2.765.000,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	411.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Dokumen	2.165.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan / BidangUrusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	RencanaTahun 2025				CatatanPenting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Pemalang, Bantarbolang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.988.320,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	4.000.000,00
J U M L A H									**3.160.853.000,00**	**J U M L A H**			**3.483.830.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTARBOLANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub KegiatanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
   j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel4.1.RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATENPEMALANG

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Bantarbolang

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	IndikatorKinerja			RencanaTahun2025						Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	TargetCapaianKinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		TargetCapaianKinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiat				Tolak Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kecamatan								3.483.830.000,00					3.708.240.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.483.830.000,00					3.708.240.000,00
7	01				KECAMATAN								3.483.830.000,00					3.708.240.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.483.830.000,00			-		3.708.240.000,00
7	01	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran,danEvaluasiKinerjaPerangkat Daerah								21.300 350,00			-		23.900.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkat	Kab.Pemalang,Bantarbolang,Semua Kel/Desa	50.89	3Dokumen	100%	3.220.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3 Dokumen	3.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pemalang,Bantarbolang,Semua Kel/Desa	50.89	1Dokumen	100%	3.050.000,00	DANATRANSFERUM UM-DANA ALOKASIUMU		Nilai Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	3.500.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pemalang,Bantarbolang,Semua Kel/Desa	50.89	1Dokumen	100%	2.940.000,00	DANATRANSFERUM UM-DANA ALOKASIUMU		Nilai Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	3.200.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pemalang,Bantarbolang,Semua Kel/Desa	50.89	1Dokumen	100%	3.050.000,00	DANATRANSFERUM UM-DANA ALOKASIUMU		Nilai Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	3.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			PaguIndikatif(Rp)	SumberDana		TargetCapaianKinerja		Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	50.89	1Dokumen	100%	2.940.350,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		NilaiSistem AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah	1 Dokumen	3.200.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	50.89	4Laporan	100%	3.050.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4Laporan	3.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi	TargetCapaianKinerja			PaguIndikatif(Rp)	Sumber Dana		TargetCapaianKinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiata				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kab.Pemalang,Bantarbolang,SemuaKel/Desa	50.89	3Laporan	100%	3.050.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Nilai Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah	3Laporan	3.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.300.254.000,00					2.576.040.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	50.89	17 orang/14bulanOrang/bulan	100%	2.292.224.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM			17 orang/14bulan Orang/bulan	2.567.290.000,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	50.89	1Laporan	100%	2.300.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta	1Laporan	2.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	SumberDana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	JumlahLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPDdanLaporanKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	PersentaseLaporanAdministrasiKeuanganPerangkatDaerahyangAkuntabel	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	50.89	11Laporan	100%	4.200.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11 Laporan	4.500.000,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	50.89	1Dokumen	100%	1.530.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	1.750.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3.200.000,00					4.800.000,00
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Sesuai	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	1Dokumen	100%	1.200.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks ReformasiBirokrasi	1 Dokumen	1.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi	TargetCapaianKinerja			PaguIndikatif(Rp)	SumberDana		TargetCapaianKinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Sesuai	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	1Laporan	100%	2.000.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	1Laporan	2.300.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang MilikDaerahpada SKPD	IndeksReformasiBirokrasi	JumlahLaporanPenatausahaanBarangMilikDaerahpadaSKPD	PersentaseDokumenAdministrasiBarangMilikDaerahyangSesuaiKetentuan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	0Laporan	100%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	0Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5.365.000,00					7.500.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan PakaianDinasbesertaAtributKelengkapannya	IndeksReformasiBirokrasi	JumlahPaketPakaianDinasbesertaAtributKelengkapan	PersentasePegawaiyangMeningkatKapasitasnya	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	0Paket	100%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	0Paket	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndik
										Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan	Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya	Kab.Pemalang,Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	10Orang	100%	5.365.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIU		Indeks Reformasi Birokrasi	15Orang	7.500.000,00
7	01	01	2.05	0011	BimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-Undangan	IndeksReformasiBirokrasi	JumlahOrangyang MengikutiBimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-Undangan	PersentasePegawaiyangMeningkatKapasitasnya	Kab.Pemalang,Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	0	0%	0	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	0	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah													155.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	1Paket	100%	10.983.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	1Paket	13.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	1Paket	100%	28.821.750,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	1Paket	32.500.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	1Paket	100%	6.867.500,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	1Paket	8.500.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	5 Paket	100%	27.795.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	5Paket	31.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yangDisediakan	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	1Paket	100%	2.750.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	1Paket	4.500.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72		0%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	12 Laporan	100%	57.840.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	12 Laporan	65.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	PenatausahaanArsipDinamispadaSKPD	IndeksReformasiBirokrasi	JumlahDokumenPenatausahaanArsipDinamispadaSKPD	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum yang Memperlancar Pelaksanaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	0Dokumen	100%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	0 Dokumen	0,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	IndikatorKinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/PaguIndikati
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								49.160.000,00					67.000.000,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan KendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah UnitKendaraanPeroranganDinasatauKendaraanDinasJabatanyangDisediakan	PersentaseBarang MilikDaerahyang MemperlancarPelaksanaanTugas		13.72	0Unit	100%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	0Unit	0,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Memperlancar Pelaksanaan Tugas	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	71Unit	100%	25.580.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	71Unit	32.500.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang Memperlancar PelaksanaanTugas	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	3Unit	100%	23.580.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	5 Unit	30.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	PengadaanSaranadanPrasaranaGedungKantoratauBangunanLainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	JumlahUnitSaranadanPrasaranaGedungKantoratauBangunanLainnyayangDisediakan	PersentaseBarang MilikDaerahyang MemperlancarPelaksanaanTugas	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	0Unit	100%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	2 Unit	5.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			PaguIndikatif(Rp)	SumberDana		TargetCapaianKinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								238.106.000,00					265.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Persentase Ketersediaan Laporan Jasa Penunjang Urusan PemerintahDaerah yang Memperlancar Pelaksanaan Tugas	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	12Laporan	100%	7.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Indeks ReformasiBirokrasi	12 Laporan	10.500.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,SumberDaya Air dan Listrik	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Persentase Ketersediaan Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memperlancar PelaksanaanTugas	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	12Laporan	100%	25.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Indeks ReformasiBirokrasi	12 Laporan	28.750.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yangMemperlancar Pelaksanaan Tugas	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	0Laporan	100%	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Indeks ReformasiBirokrasi	1Laporan	1.750.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi	TargetCapaianKinerja			PaguIndikatif(Rp)	SumberDana		TargetCapaianKinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memperlancar PelaksanaanTugas	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	13/12 Laporan	100%	204.906.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	13/12 Laporan	224.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								193.283.750,00					193.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PersentaseBarang Milik Daerah yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	10Unit	100%	60.300.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	10Unit	65.500.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Menunjang Urusan PemerintahDaerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	90Unit	100%	5.100.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		IndeksReformasiBirokrasi	90Unit	7.500.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	26Unit	100%	11.010.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	26Unit	12.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi	TargetCapaianKinerja			PaguIndikatif(Rp)	SumberDana		TargetCapaianKinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	3Unit	100%	101.873.750,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	3Unit	75.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	Persentase Barang Milik Daerah yang Menunjang Urusan PemerintahDaerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	0Unit	0%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	1Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Menunjang Urusan PemerintahDaerah	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	13.72	1Unit	100%	15.000.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Indeks Reformasi Birokrasi	1Unit	17.500.000,00
7	01	02			PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								31.500.250,00					40.500.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan PemerintahandiTingkat Kecamatan								9.200.000,00					11.500.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Publikyang Tersedia	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Persentase Dokumen Pemerintahan yangDipublikasi	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	92.22%	1Dokumen	80%	9.200.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase PelayananPublik yang Tersedia	1 Dokumen	11.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			PaguIndikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	03			PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATDESADANKELURAHAN								62.499.000,00					74.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								56.899.000,00					65.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Persentase Masyarakat Desa yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Persentase Kehadiran Lembaga Peserta MusrenbangDesa dan MusrenbangKecamatan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94%	1 LembagaKemasyarakatan	100%	12.804.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase Masyarakat Desa yang Aktif	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa yang Aktif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94%	1Dokumen	100%	34.345.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseMasyarakatDesa yang Aktif	1 Dokumen	37.500.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa yang Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Persentase Kehadiran Lembaga Peserta MusrenbangDesa dan MusrenbangKecamatan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94%	1Laporan	100%	9.750.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseMasyarakatDesa yang Aktif	1Laporan	12.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	HasilKegiatan	Lokasi	TargetCapaianKinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								5.600.000,00					9.000.000,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yangTerfasilitasi	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94%	0LembagaKemasyarakatan	80%	0,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase MasyarakatDesayangAktif	0 LembagaKemasyarakatan	1.500.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yangTerfasilitasi	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94%	1LembagaKemasyarakatan	80%	5.600.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase MasyarakatDesayangAktif	1 LembagaKemasyarakatan	7.500.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								13.000.000,0					17.500.000,0
7	01	04	2.01		KoordinasiUpayaPenyelenggaraanKetenteramandanKetertibanUmum								8.000.000,00					10.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayahKecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat desa dan Kecamatan yangDapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Persentase Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yangTersusun	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	100%	4 Laporan	100%	8.000.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan	4Laporan	10.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								5.000.000,00					7.500.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban UmumTingkat desa dan Kecamatan yangDapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Perda dan Perbup yang Dikoordinasikan Penegakannya	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	100%	1Laporan	80%	5.000.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase GangguanKetentramandanKetertibanUmumTingkatdesadanKecamatanyangDapatDiselesaikan	1Laporan	7.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			PaguIndikatif(Rp)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								200.464.600,00					202.500.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan KepalaDaerah								200.464.600,00					202.500.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yangTertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Masyarakat yang Paham Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	100%	600Orang	100%	178.005.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase PotensiKonflikTingkatDesadanKecamatanyangTertangani	600Orang	175.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				Tolak Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi,KoordinasidanPembinaan(Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yangTertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasidan Pembinaan(Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Persentase Masyarakat yang Paham Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	100%	50Orang	100%	2.650.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentasePotensiKonflikTingkatDesadanKecamatanyangTertangani	50Orang	3.500.000,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Tertangani	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Masyarakat yang Paham Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	100%	4Laporan	100%	7.290.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Tertangani	4Laporan	9.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yangTertangani	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Persentase Masyarakat yang Paham Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	100%	3Dokumen	100%	12.519.600,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentasePotensiKonflikTingkatDesadanKecamatanyangTertangani	3 Dokumen	15.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			PaguIndikatif(Rp)	SumberDana		Target Capaian		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								223.889.800,00					81.500.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi,RekomendasidanKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahn Desa								223.889.800,00					17.550.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan KepalaDesa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada Tahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	17 Dokumen	100%	8.300.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseDesa Bertata Kelola Pemerintahan Baik	17 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PersentaseDesa BertataKelolaPemerintahanBaik	JumlahDokumenyang DifasilitasidalamrangkaAdministrasiTataPemerintahanDesa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada	Kab.Pemalang, Bantarbolang,Semua Kel/Desa	94.12%	17 Dokumen	100%	10.364.800,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseDesa Bertata Kelola PemerintahanBaik	17 Dokumen	12.500.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada Tahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	17 Dokumen	100%	3.965.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseDesa Bertata Kelola Pemerintahan Baik	17 Dokumen	6.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	KeluaranSubKegiatan	HasilKegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target padaTahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa		17 Dokumen	100%	7.140.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase DesaBertataKelolaPemerintahan Baik	17 Dokumen	9.000.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa	Persentase DesaBertata Kelola Pemerintahan Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa	Persentase DesaBertata KelolaPemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada Tahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	0Dokumen	100%	151.200.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase DesaBertataKelolaPemerintahan Baik	0 Dokumen	0,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas danFungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa BertataKelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada Tahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	17 Dokumen	100%	26.690.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		Persentase Desa Bertata KelolaPemerintahan Baik	12 Dokumen	30.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						CatatanPenting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	SumberDana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	06	2.01	0008	RekomendasiPengangkatandanPemberhentianPerangkatDesa	PersentaseDesaBertataKelolaPemerintahanBaik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase DesaBertata KelolaPemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target padaTahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	10 Dokumen	100%	7.300.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseDesaBertataKelolaPemerintahanBaik	10 Dokumen	9.000.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa BertataKelola Pemerintahan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada Tahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	17 Dokumen	100%	2.765.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseDesa Bertata KelolaPemerintahan Baik	17 Dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa BertataKelolaPemerintahan Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase DesaBertata Kelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	17 Dokumen	100%	2.165.000,00	DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASIUMUM		PersentaseDesa Bertata KelolaPemerintahan Baik	17 Dokumen	5.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasi lKegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		KebutuhanDana/PaguIndikatif
										Program	Keluaran SubKegiatan	HasilKegiatan				TolakUkur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyaraka tDesa	Persentase DesaBertataKelola Pemerintahan Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik yang Dicapai Dibanding Target pada Tahun Berkenaan	Kab.Pemalang, Bantarbolang,SemuaKel/Desa	94.12%	1Dokumen	100%	4.000.000,00	DANA TRANSFERUM UM-DANA ALOKASI UMUM		Persentase Desa Bertata Kelola Pemerintahan Baik	1 Dokumen	5.000.000,00
JUMLAH													**3.483.830.000,00**	**JUMLAH**				**3.708 240.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus di akomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2026.

CAMAT BANTARBOLANG
KAMAT BANDUDONGKAL,

SLAMET EDI RIYANTO, SE.,MM
Pembina
NIP. 197210 199403 1 008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Randudongkal yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Randudongkalmerupakan penjabaran Renstra Kecamatan Randudongkal yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Randudongkal melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Randudongkal dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Randudongkal mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Randudongkalmengingat:

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Randudongkal dalam 1 (satu) tahun;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Randudongkal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Randudongkaltahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Randudongkal
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh TimPenyusun Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Randudongkal
Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

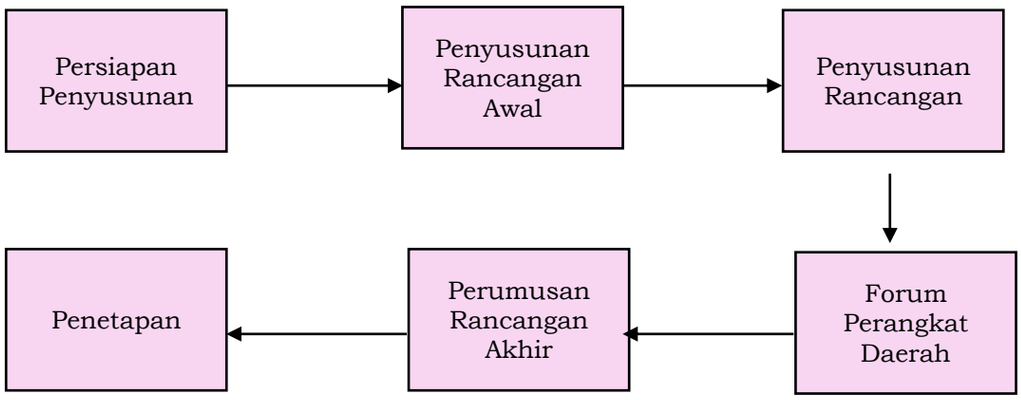

Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Randudongkaltahun 2024-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2024-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

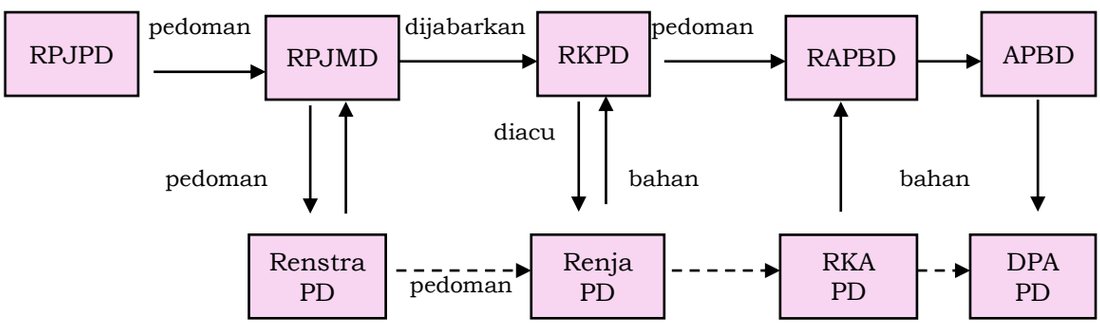

Renja Kecamatan Randudongkal berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Randudongkal tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 36);

24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan

Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan,

Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan

Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 224);

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Noreg

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

    Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

    Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang

    Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

    Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

    Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038

    (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan

    Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang

    Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2039

    (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan

    Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 143);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

    Pemalang Tahun 2024-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

    2021 Nomor 7)

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

    Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah

    diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

    tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

    2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).
45. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Randudongkal adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Randudongkal tahun 2024-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Randudongkal sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Randudongkal;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Randudongkal tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2024, Pencapaian target Renstra Kecamatan Randudongkal, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Randudongkal, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Randudongkal, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Randudongkal, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dansasaran Renja Kecamatan Randudongkal, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan KecamatanRandudongkal, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Randudongkal beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Randudongkal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN RANDUDONGKAL
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Randudongkal

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan /program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yangakan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi

Pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Randudongkal pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024 Jumlah anggaran Kecamatan Randudongkal sebesar Rp. 3.194.083.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 16 kegiatan dan 58 sub kegiatan, dari jumlah anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.051.063.156,- atau sebesar 95,52 %.

<u>Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)</u>

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Randudongkal sebesar Rp. 3.204.844.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 16 kegiatan dan 55 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan III per 31 Agustus 2025, anggaran

https://jdih.pemalangkab.go.id/

yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.792.085.054,00 atau sebesar 55,91 %.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Randudongkal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya tinggi sekalipun tidak 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Randudongkal telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada - Program, - Kegiatan dan - Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan,
2. Ada 6 Program, 16 Kegiatan dan 58 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan,
3. Ada - Program, - Kegiatan dan - Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan,
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Seluruh kegiatan sudah berjalan sesuai target kinerja baik program kegiatan maupun sub kegiatan, namun demikian perlu ditingkatkan dalam penyajian administrasi dan pelaporan,
   b. Perlu adanya Sumber Daya Manuasia dalam bidang Keuangan dan IT (Informasi dan Teknologi) sebagai penunjang agar administrasi pelaporan bisa lebih baik,
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Randudongkal yaitu belum tercapai di tahun 2024,
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana kegiatan,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Didukung dengan pengadaan sarana dan prasarana kerja serta jaringan internet yang memadai.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Randudongkal dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Randudongkal dan Pencapaian Renstra Kecamatan Randudongkal s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Nomor	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7	**Unsur Kewilayahan**									
7.01	**Kecamatan**									
		SAKIP	**40**	**20**	**30**	**30**	**100**	**40**	**40**	**100**
		IRB								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		824 dokumen	618 dokumen	**206 dokumen**	**206 dokumen**	**100 %**	**206 dokumen**	**824 dokumen**	**100 %**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	52 dokumen	39 dokumen	**13 dokumen**	**13 dokumen**	**100 %**	**13 dokumen**	**52 dokumen**	**100 %**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	8 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	8 dokumen	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		daerah yang tersusun								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	18 Laporan	6 Laporan	6 laporan	100 %	6 Laporan	24 Laporan	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**128 Laporan**	**96 laporan**	**32 laporan**	**32 laporan**	**100 %**	**32 laporan**	**96 laporan**	**100 %**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang/bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 bulan	42 bulan	14 bulan	14 bulan	100 %	14 bulan	56 bulan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 laporan	6 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 laporan	8 laporan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56 laporan	42 laporan	14 laporan	14 laporan	100 %	14 laporan	56 laporan	100 %
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen	6 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	8 Dokumen	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	**Jumlah Dokumen Administrasi**	**8 dokumen**	**6 dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100 %**	**2 dokumen**	**8 dokumen**	**100 %**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Perangkat Daerah	**Barang Milik Daerah yang tersusun**								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	4 laporan	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**108 Orang**	**81 Orang**	**27 Orang**	**27 Orang**	**100 %**	**100 Orang**	**108 Orang**	**100 %**
	Sosialisasi Peraturan Perundangiundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	108 Orang	81 Orang	27 Orang	27 Orang	100 %	100 Orang	108 Orang	100 %
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan**	**252 paket**	**189 paket**	**63 paket**	**63 paket**	**100 %**	**63 paket**	**252 paket**	**100 %**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (paket)	68 paket	51 paket	17 paket	17 paket	100 %	17 paket	68 paket	100 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40 paket	30 paket	10 paket	10 paket	100 %	10 paket	40 paket	100 %
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia (paket)	56 paket	42 paket	14 paket	14 paket	100 %	14 paket	56 paket	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang tersedia (paket)	56 paket	42 paket	14 paket	14 paket	100 %	14 paket	56 paket	100 %
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia (dokumen)	56 dokumen	42 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100 %	14 dokumen	56 Dokumen	100 %
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang**	**Jumlah Pengadaan**	**8 unit**	**6 unit**	**2 unit**	**2 unit**	**100 %**	**5 unit**	**8 unit**	**100 %**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	8 unit	6 unit	2 unit	2 unit	100 %	5 unit	8 unit	100 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (jasa)**	**144 laporan**	**108 laporan**	**36 laporan**	**36 laporan**	**100 %**	**36 laporan**	**144 laporan**	**100 %**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat (laporan)	48 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	48 laporan	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan (laporan)	48 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	48 laporan	100 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	48 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	48 laporan	100 %
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**	**124 unit**	**93 unit**	**31 unit**	**31 unit**	**100 %**	**39 unit**	**124 unit**	**100 %**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	48 unit	36 unit	12 unit	12 unit	100 %	12 unit	48 unit	100 %
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	24 unit	18 unit	6 unit	6 unit	100 %	6 unit	24 unit	100 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (unit)	40 unit	30 unit	10 unit	10 unit	100 %	15 unit	40 unit	100 %
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	12 unit	9 unit	3 unit	3 unit	100 %	3 unit	12 unit	100 %
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**		**160 dokumen**	**120 dokumen**	**40 dokumen**	**40 dokumen**	**100 %**	**40 dokumen**	**160 dokumen**	**100 %**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**16 dokumen**	**12 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**100 %**	**4 dokumen**	**16 dokumen**	**100 %**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	16 dokumen	100 %
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yg ada di Kecamatan**	**20 laporan**	**15 laporan**	**5 laporan**	**5 laporan**	**100 %**	**5 laporan**	**20 laporan**	**100 %**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	3 laporan	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	9 laporan	3 laporan	3 laporan	100 %	1 laporan	12 laporan	100 %
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Dilimpahkan Kepada Camat**	**124 laporan**	**93 laporan**	**31 laporan**	**31 laporan**	**100 %**	**31 laporan**	**124 laporan**	**100 %**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Terkait dgn Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	48 dokumen	100 %
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Terkait dgn Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonprizinan pada Urusan Pemerintahan	72 laporan	54 laporan	18 laporan	18 laporan	100 %	18 laporan	72 laporan	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	4 laporan	100 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**84 laporan**	**63 laporan**	**21 laporan**	**21 laporan**	**100 %**	**21 laporan**	**84 laporan**	**100 %**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**84 laporan**	**63 laporan**	**21 laporan**	**21 laporan**	**100 %**	**21 laporan**	**84 laporan**	**100 %**
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	48 laporan	100 %
7.01.04	**PROGRAM KOOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**28 laporan**	**21 laporan**	**7 laporan**	**7 laporan**	**100 %**	**7 laporan**	**28 laporan**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**4 laporan**	**3 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**100 %**	**1 laporan**	**4 laporan**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	4 laporan	100 %
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**24 laporan**	**18 Laporan**	**6 laporan**	**6 laporan**	**100 %**	**6 laporan**	**24 laporan**	**100 %**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinegritas dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinegritas	24 laporan	18 Laporan	6 laporan	6 laporan	100 %	6 laporan	24 laporan	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**588 laporan**	**441 laporan**	**147 laporan**	**147 laporan**	**100 %**	**147 laporan**	**588 laporan**	**100 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya**	**588 laporan**	**441 laporan**	**147 laporan**	**147 laporan**	**100 %**	**147 laporan**	**588 laporan**	**100 %**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100 %	100 orang	400 orang	100 %
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Koordinasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Koordinasi)Wawasan Kebangsaan dan	100 orang	75 orang	25 orang	25 orang	100 %	-	100 orang	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	40 laporan	30 laporan	10 laporan	10 laporan	100 %	10 laporan	40 laporan	100 %
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	48 dokumen	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**660 dokumen**	**495 dokumen**	**165 dokumen**	**165 dokumen**	**100 %**	**165 dokumen**	**660 dokumen**	**100 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**660 dokumen**	**495 dokumen**	**165 dokumen**	**165 dokumen**	**100 %**	**165 dokumen**	**660 dokumen**	**100 %**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	72 dokumen	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	18 dokumen	72 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan desa	72 dokumen	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	18 dokumen	72 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72 dokumen	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	18 dokumen	72 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	72 dokumen	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	18 dokumen	72 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	68 dokumen	48 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100 %	16 dokumen	68 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.07	Faslitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	54 dokumen	51 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100 %	17 dokumen	54 dokumen	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	Permusyawaratan Desa	rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24 dokumen	18 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	24 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	72 dokumen	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	18 dokumen	72 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	72 dokumen	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	18 dokumen	72 dokumen	100 %
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	72 dokumen	54 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %	18 dokumen	72 dokumen	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Randudongkal

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Randudongkal Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan 2027, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Randudongkal

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		80	80			80	80			
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		95,22	95,22			93,37	95,22			
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				31,05	31,05			31.05	31,05			
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				42,89	42,89			42,89	42,89			
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				93,33	93,33			93,33	94,50			
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				100	100			100	100			
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100			100	100			
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100			100	100			
9	Persentase desa	%				94,44	95,44			94,44	95,44			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	bertata kelola pemerintahan baik													

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Randudongkal berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Cakupan layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2024 IKM Kecamatan Randudongkal sebesar 93,37 dimana angka tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi, namun dekian perlu ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Randudongkal. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Randudongkal meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2024, cakupan layanan Kecamatan Randudongkal tersebut mencapai 100 % dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah Prosentase pelayanan publik yang tersedia dan presentase Desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Randudongkal meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 16 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 53,33%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi, danjuga kurangnya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir, Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100%, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

adapun prosentase indikator gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Randudongkal. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik tercapai ...% yaitu sebanyak ... desa dari ... desa di Kecamatan Randudongkal. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Pihak Kecamatan Randudongkal.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2024, Kecamatan Randudongkal mendapat nilai SAKIP sebesar 67,15 (kategori Baik) dan IRB sebesar ... (kategori ...) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkannilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulan SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkankualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Randudongkal perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Randudongkal untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029, Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Randudongkal yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia,
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan,
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan,
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan,
e. Masih belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan yang baik,
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Randudongkal juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, diantara hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat,
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,
c. Masih adanya masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan,
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan,
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran,
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

Visi Kabupaten Pemalang :

“**PEMALANG BERCAHAYA**” (**BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA)**

1. **Bersih** dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

MISI:

Dalam rangka mencapai visi **PEMALANG BERCAHAYA**, berikut ini misi RPJMD berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik** : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Misi 2 Hijau** : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik** : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
4. **Misi 4 Peduli** : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. **Misi 5 Silaturahmi** : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotongroyong, tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. **Misi 6 Organisatoris** : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Gotujuavernance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi** : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas** : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Randudongkal tahun 2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5. Adanya Perangkat Daerah dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Randudongkal mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Randudongkal adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

   Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.
2. Adanya peraturan terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat,
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang.

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Randudongkal.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Randudongkal kedepan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholderterkait seperti perangkat daerah Kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan danmasyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukanserta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Randudongkal dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Randudongkal. Renja Kecamatan Randudongkal disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Randudongkal dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Randudongkal.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN			570	**3.370.312.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**			570	**3.370.312.000**	
	KECAMATAN	**Kecamatan Randudongkal**		**570**	**3.370.312.000**	**KECAMATAN**	**Kecamatan Randudongkal**		**570**	**3.370.312.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Randudongkal**		197	**3.090.519.600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Randudongkal**		**197**	**3.090.519.600**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**	13	**22.626.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**	**13**	**22.626.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	2	3.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	2	3.100.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	2.905.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	2.905.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Dokumen RKA-SKPD					RKA-SKPD			
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.940.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.940.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.646.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.646.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.935.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.935.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	4.800.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3.300.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	32	**2.501.022.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**32**	**2.501.022.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.494.092.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	2.494.092.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2.300.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14	3.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14	3.100.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosu Realisasi Anggaran	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun (dokumen)	2	1.530.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosu Realisasi Anggaran	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun (dokumen)	2	1.530.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun**	2	5.855.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun**	2	5.855.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	1	4.135.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	1	4.135.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.720.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.720.000	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**		27	5.600.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**		27	5.600.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundangiundangan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	27	5.600.000	Sosialisasi Peraturan Perundangiundangan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	27	5.600.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan**	54	121.596.100	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan**	54	121.596.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (paket)	12	11.920.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (paket)	12	11.920.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	6.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	6.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia (paket)	12	53.205.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia (paket)	12	53.205.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah paket barang cetakan yang tersedia (paket)	12	18.710.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah paket barang cetakan yang tersedia (paket)	12	18.710.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia (dokumen)	12	4.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia (dokumen)	12	4.200.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	4	23.380.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	4	23.380.600	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3.680.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3.680.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	4	102.704.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	4	102.704.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Unit Mebel yang tersedia	2	32.400.000	Pengadaan Mebel	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Unit Mebel yang tersedia	2	32.400.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	2	70.304.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	2	70.304.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (jasa)**	36	198.920.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (jasa)**	36	198.920.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat (laporan)	12	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat (laporan)	12	2.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	41.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan (laporan)	12	41.700.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	12	155.220.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	12	155.220.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**	29	132.196.500	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**	29	132.196.500	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12	24.310.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12	24.310.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Mebel yang dipelihara	4	12.150.000	Pemeliharaan Mebel	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Mebel yang dipelihara	4	12.150.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (unit)	10	10.220.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (unit)	10	10.220.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	3	85.516.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	3	85.516.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Randudongkal**		39	30.364.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Randudongkal**		39	30.364.000	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	4	7.065.000	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	4	7.065.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	7.065.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	7.065.000	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yg ada di Kecamatan	4	9.824.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yg ada di Kecamatan	4	9.824.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1	5.149.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1	5.149.000	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	1	2.300.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	2.300.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2.375.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2.375.000	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Dilimpahkan Kepada Camat	31	13.475.000	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Dilimpahkan Kepada Camat**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Dilimpahkan Kepada Camat	31	13.475.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Terkait dgn Pelayanan Perizinan Non Usaha	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	6.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Terkait dgn Pelayanan Perizinan Non Usaha	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	6.050.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Terkait dgn Nonperizinan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonprizinan pada Urusan Pemerintahan	18	3.425.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg Terkait dgn Nonperizinan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonprizinan pada Urusan Pemerintahan	18	3.425.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	4.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	4.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Randudongkal**		17	83.555.400	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Randudongkal**		17	83.555.400	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17	83.555.400	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17	83.555.400	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	30.562.400	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	30.562.400	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	52.993.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	52.993.000	
7.01.04	**PROGRAM KOOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Randudongkal**		5	17.455.000	**PROGRAM KOOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Randudongkal**		5	17.455.000	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	1	13.000.000	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	1	13.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**		4	4.455.000	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**		4	4.455.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinegritas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinegritas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4		Koordinasi/Sinegritas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinegritas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Randudongkal**		147	40.818.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Randudongkal**		147	40.818.000	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya	147	40.818.000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya	147	40.818.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	18.043.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	18.043.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Koordinasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Koordinasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25	10.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Koordinasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Koordinasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25	10.000.000	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	10	5.500.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	10	5.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			undangan								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	7.275.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	7.275.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Randudongkal**		**165**	**107.600.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Randudongkal**		**165**	**107.600.000**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**165**	**107.600.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Randudongkal**	**Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**165**	107.600.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	6.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18	6.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan desa	18	9.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan desa	18	9.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	8.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	8.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	8.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	8.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16	40.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16	40.000.000	
7.01.06.2.01.07	Faslitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17	6.200.000	Faslitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17	6.200.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6	7.200.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6	7.200.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18	8.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18	8.000.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18	7.200.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18	7.200.000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	8.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Kecamatan Randudongkal**	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	8.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar,terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (ForumPD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottomup* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masingelemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Randudongkal yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.7

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Irigasi	Desa Lodaya	Terbangunnya Jaringan Irigasi Pertanian	P. 180 m	
2.	Pembangunan Jalan Penghubung Rembul - Lodaya	Desa Rembul	Terbangunnya Jalan penghubung antar desa yang baik	400 x 2,5 m	
3.	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani	Desa Semaya	Terbangunnya Talud jalan usaha tani yang termanfaatkan	310 m	
4.	Pembangunan Drainase Jalan Desa	Desa Semingkir	Terbangunnya Drainase Jalan Desa	220 m	
5.	Pembangunan Jalan Baru untuk Sarpras Wisata	Desa Kecepit	Terbangunnya Jalan Baru untuk Sarpras Wisata	129 m	
6.	Pengaspalan Jalan Lapangan Olahraga	Desa Gongseng	Terbangunnya Jalan Lapangan Olahraga	320 x 3 m	
7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju Buper	Desa Randudongkal	Terbangunnya Jalan Rabat Berton Menuju Buper	200 x 3.5 x 0.15 m	
8.	Pembangunan Jalan Karangmoncol-Randudongkal	Desa Karangmoncol	Terbangunnya Jalan Karangmoncol-Randudongkal	220 m	
9.	Peningkatan Jalan Mejagong-Penusupan	Desa Mejagong	Terbangunnya Jalan Mejagong-Penusupan	200 x 3 x 0.15 m	
10.	Sarpras Pendukung Pengelolaan Sampah	Desa Mangli	Terbangunnya Sarpras Pendukung Pengelolaan Sampah	1 Paket	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Gembyang	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sampah	20 orang	
12.	Pelatihan Budidaya Jamur	Desa Kalimas	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Jamur	20 orang	
13.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Kalitorong	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sampah	20 orang	
14.	Pelatihan Koperasi Perdagangan	Desa Kreyo	Terlaksananya Pelatihan Koperasi Perdagangan	20 orang	
15.	Pelatihan Digitalisasi	Desa Kejene	Terlaksananya Pelatihan Digitalisasi	20 orang	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RANDUDONGKAL

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025 – 2029 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"** yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk – produk yang ramah lingkungan.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026 diarahkan pada **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter"**, yang dijabarkan dalam empat prioritas sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakte dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan ;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada ***"Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumber daya manusia"***

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Randudongkal dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Randudongkal secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026 adalah "**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randudongkal sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Randudongkal dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Randudongkal tahun 2026, adalah "**Meningkatnya pelayanan kecamatan**", Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Randudongkal Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan		Indeks kepuasan	Indeks	96,22.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

	pelayanan kecamatan yang prima		masyarakat terhadap layanan kecamatan		
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	100

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, yaitu Visi **Bersih** yang dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Pada tahun 2026, Kecamatan Randudongkal merencanakan sebanyak 6 program, 16 kegiatan dan 55 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Randudongkal dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.380.812.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RANDUDONGKAL

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indicator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Randudongkal yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD,
   d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD,
b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor,
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
   g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
   h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga .
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel,
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel,
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
   d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa,
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemelihan Kepala Desa,
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa,
   i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif,
   j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

lang Urusan/ Program/ an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Target
LAYAHAN												
								3.380.812.000				
ENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**21.014.500**				
Dokumen Perencanaan erah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	3 Dokumen	100 %	3,239,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai
n Penyusunan Dokumen	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (dokumen)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	1 Dokumen	100 %	2,713,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai
n Penyusunan Dokumen KA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD (dokumen)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	1 Dokumen	100 %	2,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai
n Penyusunan DPA-	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD (dokumen)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	1 Dokumen	100 %	3,262,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai
n Penyusunan PA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	1 Dokumen	100 %	3,044,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai
n Penyusunan Laporan rja dan Ikhtisar Realisasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	3,628,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai

https://jdih.pemalangkab.go.id/

rja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	4 Laporan	100 %	2,471,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45Nilai	
Keuangan Perangkat Daerah								**3.623.770.750**					
aji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	23 Orang/14 Bulan	100 %	3,617,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai	
n Penyusunan Laporan hir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	1 Laporan	100 %	4,180,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45 Nilai	
n Penyusunan Laporan lanan/ Triwulanan/ KPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	45Nilai	
Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**4.000.000**					
Perencanaan Kebutuhan Daerah SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	2 Dokumen	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	
lan Penyusunan Laporan Daerah pada SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	40 Nilai	2 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45Nilai	
Umum Perangkat Daerah								**189.511.230**					
omponen Instalasi angan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Paket	100 %	4,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Paket	100 %	141,800,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45Nilai
arang Cetakan dan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Paket	100 %	5,503,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
ahan Bacaan dan undang- undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	24 Dokumen	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
aan Rapat Koordinasi dan KPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	24 Laporan	100 %	31,308,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45Nilai
anArsipDinamispadaSKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	2 dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45Nilai
arang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**102.082.490**				
endaraan Perorangan endaraan Dinas Jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	1 Unit	100 %	38,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
ebel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	10 unit	100 %	28,231,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45Nilai
ralatan dan Mesin	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42Nilai	4 Unit	100 %	36.744,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45Nilai
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**183.063.000**				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

asa Surat Menyurat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
asa Komunikasi, Sumber Listrik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	22.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
asa Pelayanan Umum	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	155,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**129.808.000**				
asa Pemeliharaan, Biaya , Pajak dan Perizinan nas Operasional atau	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	14 Unit	100 %	42,774,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
Mebel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	2 Unit	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
Peralatan dan Mesin	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	10 Unit	100 %	15,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
/Rehabilitasi Gedung angunan Lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	2 Unit	100 %	20,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
/Rehabilitasi Sarana dan ndukung Gedung Kantor an Lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	2 Unit	100 %	48.324.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai
ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								**17.890.000**				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

enyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								**5.390.000**				
Efektifitas erintahan di natan	Persentase pelayanan publik yang tersedia di Tingkat Kecamatanl	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	74,44 %	2 Dokumen	100 %	5.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan 11isban yang tersedia di Kecamatan Kecamatan Comal	74,44 %
raan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								**7.500.000**				
Kegiatan pada Masyarakat	Persentase pelayanan publik yang tersedia di Kecamatan Kecamatan Comal	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	74,44 %	1 dokumen	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan 11isban yang tersedia di Kecamatan KECAMATAN COMAL	74,44 %
cepatan tandar Pelayanan layah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	74,44%	1 Laporan	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan 11isban yang tersedia di Kecamatan KECAMATAN COMAL	74,44 %
Efektifitas Pelayanan kepada i Wilayah	Persentase pelayanan 11isban yang tersedia di Kecamatan KECAMATAN COMAL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	Kab. Pemalang, KECAMATAN COMAL	74,44 %	2 Laporan	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan 11isban yang tersedia di Kecamatan KECAMATAN COMAL	74,44 %
Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**5.000.000**				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Urusan Pemerintahan dengan Pelayanan Usaha	Persentase pelayanan 12isban yang tersedia di Kecamatan Kecamatan Comal	Jumlah Laporan pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	74,44 %	100 dokumen	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan 12isban yang tersedia di Kecamatan Kecamatan Comal	74,44 %
Urusan Pemerintahan engan Nonperizinan	Persentase pelayanan 12isban yang tersedia di Kecamatan Kecamatan Comal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	74,44 %	12 Laporan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan 12isban yang tersedia di Kecamatan Kecamatan Comal	74,44 %
EMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								**73.235.000**				
egiatan Pemberdayaan Desa								**73.235.000**				
Partisipasi Masyarakat Musyawarah Pembangunan di Desa	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa (orang/kegiatan)	**Persentase jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	6 lembaga	100 %	8,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 %
Program Kerja dan berdayaan Masyarakat an oleh Pemerintah dan ayah Kerja Kecamatan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**Persentase jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	1 Dokumen	100 %	34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			pelaksanaan tugas									
Efektifitas Kegiatan n Masyarakat di Wilayah	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Persentase jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	12 Laporan	100 %	30.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 %
OORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								**10.000.000**				
enerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**5.000.000**				
nergi dengan Perangkat Tugas dan Fungsinya di akan Peraturan ndangan dan/atau gara Republik Indonesia	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas**	100 %
paya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								**5.000.000**				
ngan Kepolisian Negara onesia, Tentara Nasional Instansi Vertikal di matan	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas**	100 %
ENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								**79.865.000**				
raan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								**79.865.000**				

https://jdih.pemalangkab.go.id/

awasan Kebangsaan dan asional dalam rangka n Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar olik Indonesia Tahun rian Bhinneka Tunggal ertahanan dan Keutuhan Negara ublik Indonesia	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	200 Orang	100 %	53,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	100 %
Konflik Sosial Sesuai raturan Perundang-	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	**Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, KECAMATAN COMAL	100%	2 Laporan	100%	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	100 %
Tugas Forum Koordinasi Kecamatan	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	**Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang,Kecamatan Comal	100 %	12 Dokumen	100 %	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	100 %
EMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								**28.000.000**				
komendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								**28.000.000**				
yusunan Peraturan Desa n Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	83,33%	2 Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

inistrasi Tata Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	83,33%	1 Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%
gelolaan Keuangan Desa gunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	83,33%	1 Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%
ksanaan Tugas Kepala angkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatam Comal	83,33%	1 Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%
ksanaan Tugas dan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	83,33%	1 Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%
Pengangkatan dan n Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	83,33%	2 Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%
kronisasi Perencanaan Daerah dengan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	83,33%	2 Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			menunjang pelaksanaan tugas										
yusunan Program dan Pemberdayaan esa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	**Persentase jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pangawasan pemerintah desa yang menunjang pelaksanaan tugas**	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	83,33%	1Dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,89%	
							TOTAL	**4,462,239.970**					

dang Urusan/ Program/ tan/ Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2025**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026**	
	Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**	
					Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	
LAYAHAN												
								555.350.030				
ENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								**237.217.830**				
Umum Perangkat Daerah								**126.522.200**				
omponen Instalasi angan Bangunan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Paket	100 %	3.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	3.450.000
ahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Paket	100 %	110.293.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	110.293.200
arang Cetakan dan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Paket	100 %	4.179.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	4.179.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)						Umum				
ahan Bacaan dan undang- undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Dokumen	100 %	2.600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	2.600,000
aan Rapat Koordinasi si SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	6.000.000
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								99.307.630					**99.307.630**
asa Surat Menyurat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	6,450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	6,450.000
asa Komunikasi, Air dan Listrik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45Nilai	15,000.000
asa Pelayanan r	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	12 Laporan	100 %	77.857.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	77.857.630

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)						Umum				
n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**11.388,000**					**11.388.000**
asa Pemeliharaan, haraan, Pajak dan daraan Dinas tau Lapangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42Nilai	4 Unit	100 %	8.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	8.468,000
Peralatan dan Mesin	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	42 Nilai	7 Unit	100 %	2,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	45 Nilai	2.920.000
EMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								**318.132,200**					**318.132.200**
nberdayaan Kelurahan								**318.132,200**					**318.132.200**
Partisipasi alam Forum Perencanaan n di Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	5 lembaga kemasyarakatan	100 %	12,948,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 %	12.948.200
n Sarana dan urahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	1 unit	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 %	100,000.000
n Masyarakat di	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan (%)	Kab. Pemalang, Kecamatan Comal	100 %	6 pokmas/ormas	100 %	205.184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 %	205,184,000
							TOTAL	**5.017.590.000**					

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2026

Organisasi : Kecamatan Randudongkal

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

...ian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah				
			Tahun - 1	Tahun N			
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
...N							
...NGGARAN ...PELAYANAN PUBLIK							
...araan Kegiatan ...t Kecamatan							
...Kegiatan Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		7.065.000			
...an Pemerintahan yang ...n Unit Kerja Perangkat ...camatan							
...Pelayanan kepada ...an	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		5.149.000			
...ncapaian Standar ...ilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.300.000			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pelaksanaan Pelayanan Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.375.000			
emerintahan yang mat							
emerintahan yang an Perizinan Non Usaha	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		6.050.000			
emerintahan yang terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		3.425.000			
emerintahan yang ngan Lain yang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		4.000.000			
AYAAN MASYARAKAT AN							
mberdayaan Desa							
erja dan Kegiatan akat yang Dilakukan yasta di Wilayah Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		30.562.400			
Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		52.993.000			
SI KETENTRAMAN UM							
elenggaraan rtiban Umum							
lisian Negara Republik onal Indonesia dan yah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		13.000.000			
an Penegakan Peraturan Kepala							
an Perangkat Daerah nya di Bidang Perundang-Undangan gara Republik Indonesia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		4.455.000			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

GGARAAN URUSAN M							
n Pemerintahan Umum ala Daerah							
ebangsaan dan am rangka alan Pancasila, ndang Dasar Negara un eka Tunggal Ika serta eliharaan Keutuhan blik Indonesia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		18.043.000			
n Pembinaan (Bimtek, Wawasan Kebangsaan l	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		10.000.000			
sial Sesuai Ketentuan ndangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		5.500.000			
um Koordinasi Pimpinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		7.275.000			
N DAN PENGAWASAN A							
dan Koordinasi vasan Pemerintahan							
eraturan Desa dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		6.000.000			
ata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		9.000.000			
euangan Desa dan esa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		8.000.000			
Tugas Kepala Desa dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		8.000.000			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemilihan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		40.000.000			
Tugas dan Fungsi Badan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		6.200.000			
katan dan kat Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		7.200.000			
erencanaan dengan Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		8.000.000			
erencanaan tif	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		7.200.000			
rogram dan yaan Masyarakat Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		8.000.000			
HAN BIDANG XX							
NG URUSAN RAH							
garan, dan Evaluasi ah							
Perencanaan Perangkat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		3.100.000			
unan Dokumen RKA-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.905.000			
unan Dokumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.940.000			
unan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.646.000			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

unan Perubahan DPA-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.935.000			
unan Laporan Capaian lisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		4.800.000			
kat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		3.300.000			
Perangkat Daerah							
njangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.494.092.000			
unan Laporan Keuangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.300.000			
unan Laporan Keuangan emesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		3.100.000			
dan Analisis Prognosis	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		1.530.000			
k Daerah pada							
an Kebutuhan Barang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		4.135.000			
sunan Laporan Barang D	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		1.720.000			
an Perangkat Daerah							
erundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		5.600.000			
angkat Daerah							

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Instalasi gunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		11.920.000			
n dan Perlengkapan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		6.500.000	10.500.000		
ogistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		53.205.500			
Cetakan dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		18.710.000			
acaan dan Peraturan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		4.200.000			
pat Koordinasi dan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		23.380.600			
Dinamis pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		3.680.000			
Milik Daerah emerintah Daerah							
	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa			32.400.000		
n dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa			70.304.000		
nunjang Urusan n							
rat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		2.000.000			
munikasi, Sumber	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		41.700.000			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

ayanan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		155.220.000			
lilik Daerah Penunjang aerah							
liharaan, Biaya k Kendaraan Kendaraan Dinas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		24.310.000			
	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		12.150.000			
dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		10.220.000			
asi Sarana dan Gedung Kantor atau	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Pemalang, Randudongkal, Semua Kel/Desa		85.516.500			
		Jumlah		**3.267.608.000**	**113.204.000**		

Pemalang, September 2025
Camat Randudongkal

SLAMET EDY RIYANTO, S.E., M.M.
NIP. 197207101993041008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Randudongkal merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Randudongkal Tahun 2025 - 2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Randudongkal memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Randudongkal secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsidan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Randudongkal Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja KecamatanRandudongkal Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2026.

CAMAT Randudongkal

SLAMET EDY RIYANTO, S.E, M.M
Pembina
NIP. 197207101994031008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah mengacu pada RPMJD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Renstra Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi Kecamatan Randudongkal maupun semua pihak yang berkepentingan.

Pemalang, September 2025
Camat Randudongkal

SLAMET EDI RIYANTO, S.E, M.M
Pembina
NIP. 197207101994031008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2026
2. Bukti pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka menyusun Renja Kecamatan Randudongkal tahun 2026
3. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERSAMA INSTANSI TERKAIT

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Kecamatan Randudongkal Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Randudongkal, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

Pemalang, September 2025
CAMAT RANDUDONGKAL

SLAMET EDI RIYANTO, S.E, M.M
Pembina
NIP. 19720710199403 1 008

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Randudongkal yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.7

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2.					

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Warungpring yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Warungpring merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Warungpring yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Warungpring melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Warungpring dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Warungpring mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Warungpring mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Warungpring dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Warungpring untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Warungpring dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2025, dan RKPD tahun 2025)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Warungpring
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   Melaksanakan FGD dengan mengundang : Puskesmas di Wilayah Kecamatan Warungpring, UPJI Wilayah III Randusongkal, Kepolisian Sektor Kecamatan Warungpring, Posramil Kecamatan Warungpring, Pemerintah Desa se Kecamatan Warungpring, LSM / Tokoh Masyarakat, Pengguna Layanan, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renja Kecamatan Warungpring
Tahun 2026

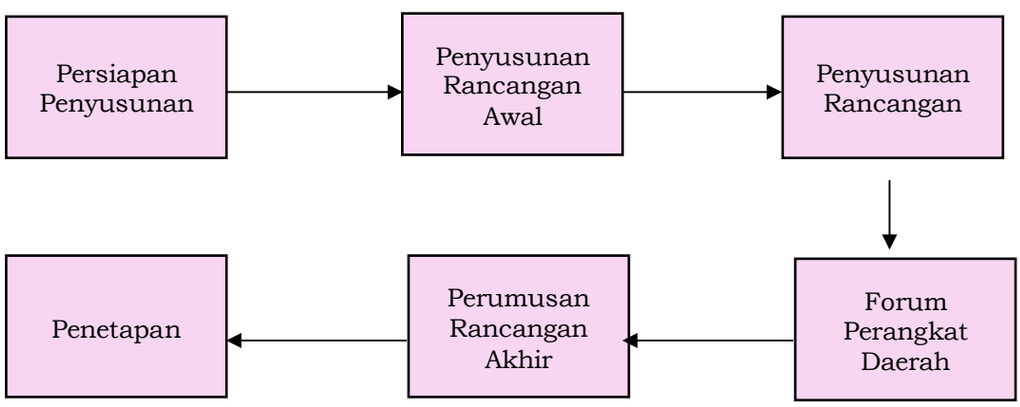

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Warungpring tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

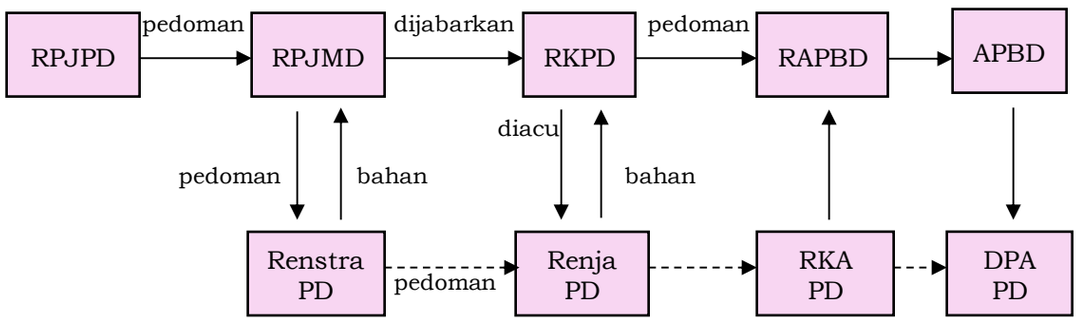

Renja Kecamatan Warungpring berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Warungpring tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Warungpring adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Warungpring tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Warungpring sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Warungpring;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Warungpring tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2023, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Warungpring tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2023 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Warungpring, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Warungpring, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Warungpring, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Warungpring, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Warungpring, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Warungpring beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Warungpring.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WARUNGPRING TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Warungpring

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Warungpring pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Warungpring sebesar Rp 2.965.665.000 ,- yang terbagi dalam 6 program, 17 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 2.886.958.957 ,- atau sebesar 97,35 %.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Warungpring sebesar Rp 2.614.411.000 ,- yang terbagi dalam 6 program, 17 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.487.772.570 ,- atau sebesar 56,91 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Warungpring telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan berapa pegawainya pensiun

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Warungpring telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 1 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Ada 5 Program, 14 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Ada 3 (dua) orang pegawai pensiun
   b. Evisiensi penggunaan sumbar daya listrik, internet dan air sehingga penyerapan anggaran disesuakan dengan tagihan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pemalang yaitu tercapai di tahun 2023;
5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Memaksimalkan analisa perencanaan tarjet anggaran

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Warungpring dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang sebagai berikut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Warungpring dan Pencapaian Renstra Kecamatan Warungpring s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7	UnsurKewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlahdokumenperencanaan, penganggaran dan evaluasikinerjaperangkatdaerah yang tersusun	62	28	16	16	100	16	60	96,77
		Persentasedokumenperencanaan, penganggar	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		an dan evaluasikinerjaperangkatdaerah yang ditetapkantepatwaktu dan sesuaiketentuan								
7.01.01.2.01.01	PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah***	12	6	3	3	100	3	12	100
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	***Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD***	4	2	1	1	100	1	4	100
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen	***Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD***	4	2	1	1	100	1	4	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	PerubahanRKA-SKPD	***dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD***								
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDokumen DPA-SKPD	***Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD***	4	2	1	1	100	1	4	100
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	***Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD***	4	2	1	1	100	1	4	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian	***Jumlah Laporan Capaian***	16	8	4	4	100	4	16	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	***Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD***								
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	16	6	5	5	100	5	16	100
7.01.01.2.02	**AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah**									
		Jumlahlaporankeuangan perangkat daerah yang tersusun	**57 dokumen**	**24 dokumen**	**15 dokumen**	**15 dokumen**	**100**	**15 dokumen**	**54 dokumen**	**94,73 %**
	Hasil Kegiatan									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Persentaselaporankeuanganperangkatdaerah yang akuntabel	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan*	62	30	15	12	80	14	56	90,32%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi laporan akhir*	4	2	1	1	100	1	4	100
7. 01.2.03	**Administrasi Brang Milik Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daeah yang tersusun***	**10**	**2**	**1**	**1**	**100**	**1**	**4**	**40%**
	Keluaran Kegiatan	***Prosentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daeah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		yang sesuai ketentuan								
7. 01.01.2.03. 01	**Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	***Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD***	6	2	1	1	100	1	4	66,67 %
	Administrasu kepegawaian Perangkat Daerah									
	Keluaran Kegiatan	***Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas***	88	18	18	18	100	18	54	75 %
	Hasil Kegiatan	***Prosentase pegawai yang meningkat kapasitasnya***	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	***Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan***	40	0	18	18	100	18	36	90 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	***Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis***	30	18	0	0	100	0	18	60 %
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	***Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (layanan)***	7	7	7	7	100	7	7	100
	Hasil Kegiatan	***Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar***	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		pelaksanaan tugas (%)								
7.01.01.2.06.01	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*	14	8	4	4	100	2	14	100 %
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	10	4	3	3	100	3	10	100 %
7.01.01.2.06.03	PenyediaanPeralatanRumah Tangga	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (unit)*	12	10	1	1	100	1	12	100 %
7.01.01.2.06.04	PenyediaanBahanLogistik Kantor	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	52	37	6	6	83,33	9	52	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.06.05	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	7	4	2	2	100	1	7	100 %
7.01.01.2.06.09	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (kegiatan)*	135	72	1	1	100	48	121	89,62 %
7.01.01.2.06.09	PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	*Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata*	6	2	2	2	100	2	6	100 %
7.01.01.2.07	**PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	KeluaranKegiatan	***Jumlah barang milik daerah yang terpelihara***	119	17	12	12	100	83	30	94,11 %
	Hasil Kegiatan	***Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)***	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.07.05	PengadaanMebel	*Jumlah mebel yang dibeli (unit)*	95	6	9	9	100	80	95	100 %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin laiinya	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli (unit)*	12	6	2	2	100	2	10	83,33 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dibeli*	13	5	1	1	100	1	7	53,84 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran	***Jumlah laporan penyedi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia***	138	63	33	33	100	39	135	97,12 %
	Hasil Kegiatan	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan***	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat***	48	24	12	12	100	12	48	100 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah laporan penyedia jasa SDA dan listrik yang disediakan*	48	24	12	12	100	12	48	100 %
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar*	12	3	3	3	100	3	9	75 %
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	*Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	42	12	6	6	100	12	30	71,4 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Keluaran	***Jumlah barang milik daerah yang terpelihara***	176	113	25	25	100 %	19	157	89,20 %
	Hasil Kegiatan	***Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar***	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	***Jumlah kendaraaan perorangan***	48	24	12	12	100	12	48	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*dinas atau kendaraan dinas jabatan yanr dipelihara dan dibayarkan pajaknya*								
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah mebel yang dipelihara*	107	50	2	2	100	3	55	51,40 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Jumah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara***	42	26	9	9	100	3	38	90,47 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	***Jumah gedung kantor dan banguan lainnya yang dipeihara/direhabilitasi***	6	3	2	2	100	1	6	100 %
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPen	***Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung***	16	10	0	0	100	0	10	62,50 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	dukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	***kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara***								
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**									
7.01.02.2.01	**KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**									
	Kegiatan	**Jenis dokumen pemerintahan yang dipublikasi (data)**	**36**	12	12	12	100	12	36	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi (%)	**100 %**	**100 %**	100 %	100 %	**100 %**	**80 %**	**80 %**	**80 %**
7.01.02.2.01.02	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahandi Tingkat Kecamatan	***Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	36	12	12	12	100	12	36	100 %
7.01.02.2.02	**PenyelenggaraanUrusanPemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di Kecamatan**									
		Jenisdokumenpelayana	**85**	0	37	37	100	36	75	85,88 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		nkepadamasyarakat yang terselesaikan								
		Persentasedokumenpelayanankepadamasyarakat yang terselesaikan	**100 %**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.2.02.02.01	PerencanaanKegiatanPelayanankepada Masyarakat di Kecamatan	***JumlahdokumenPerencanaanKegiatanPelayanankepada Masyarakat di Kecamatan***	35	0	12	12	100	12	24	68,57 %
7.01.02.2.02.02	FasilitasiPercepatanPencapaianStandarPelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	***JumlahlaporanFasilitasiPercepatan PencapaianStandarPelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan***	22	0	10	10	100	12	22	100 %
7.01.02.2.02.03	PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelaya	***JumlahlaporanPeningkatanEfektifitasPelaksana***	28	0	15	15	100	12	27	96,42 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	nankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	***anPelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan***								
7.01.02.2..04	**Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang Dilimpahkan kepadaCamat**									
	Keluaran Kegiatan	***Jumlah Dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia (kewenangan)***	**7**	7	7	7	100	7	7	100
	Hasil kegiatan	***Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan***	23,33 %	23,33 %	23,33 %	23,33 %	100 %	23,33 %	23,33 %	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Bupati kepada Camat yang tersedia (%)								
7.01.02.2..04.01	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdengan PelayananPerizinanNon Usaha	***Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan***	48	20	7	7	100	12	39	76,47 %
7.01.02.2..04.02	PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan	***Jumlah laporan nonperizinan pada urusan pemerintah***	18	6	6	6	100	6	18	100 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.03.2.01	**KoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa**									
	Keluaran Kegiatan	***Jumlahlaporankoordinasikegiatanpemberdayaandesa***	37	8	12	12	100 %	7	27	72,97 %
	Hasil Kegiaan	***Presentaselaporankoordinasikegiatanpemberdayaandesa***	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.03.2.01.01	PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	***Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasidalam forum musyawarahperencanaanpembangunan di desa***	48	0	24	24	100 %	24	48	100 %
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	***JumlahdokumenSinkronisasi Program Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yang dilakukan***	***13***	6	6	6	100 %	1	13	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Wilayah KerjaKecamatan	***oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah KerjaKecamatan***								
7.01.03.2.01.03	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	***JumlahlaporanPeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	**26**	2	12	12	100 %	12	26	100 %
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									
	Keluaran kegiatan	***Jumlah laporan dari desa/kelurahan***	7	1	0	0	100 %	0	1	14 %
	Hasil Kegiatan	***Presentase kegiatan yang berasal dari dana keluranan yang terlaksana***	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.03.2.01.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	7	1	0	0	100 %	0	1	14, %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Keluaran Kegiatan	***Jenislaporanhasilsunergitasdengan kepolisian Negara RepubikIndonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan instansivertikal di wilayah***	**12**	0	6	6	100 %	6	12	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		kecamatan yang tersusun								
	Hasil Kegiatan	***PersentaseJenislaporanhasilsunergitasdengankepolisian Negara RepubikIndonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan instansivertikal di wilayah kecamatan yang tersusun***	100 %	0	100 %	100 %	100 %	100 %	00 %	00 %
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	***JumlahLaporanSinergitasdenganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di***	**12**	0	6	6	100 %	6	12	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Wilayah Kecamatan								
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	**JumlahPerda dan Perbup yang dikoordinasikanpenegakannya**	22	0	10	10	100 %	10	14	51,81 %
	Hasil Kegiatan	***PersentasePerda dan Perbup yang dikoordinasikanpenegakannya***	**100 %**	0	100 %	100 &	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	JumlahlaporanhasilKoordinasi/SinergiDenganPerangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di BidangPenegakanPeraturanPerundang-Undangan	22	0	10	10	100 %	4	14	51,81 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atauKepolisianNegara Republik Indonesia								
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									
7.01.05.2.01	**PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmumsesuaiPenugasanKepala Daerah**									
	Keluaran Kegiatan	***JumlahdokumenPenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmumsesuaiPenugasanKepala Daerah***	**32**	8	10	10	100 %	14	32	100 %
	Hasil Kegiatan	***ProsentasedokumenPenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmumsesuaiPenugasanKepala Daerah***	**100 %**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.05.2.01.01	PembinaanWawasanKebangsaan dan KetahananNasional dalamrangkaMemantapkanPengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	***Jumlah orang yang mengikutiPembinaanWawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangkaMemantapkanPengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia***	**1300**	**400**	500	**500**	100 %	600	**1500**	115 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (bintek, sosialisasi , konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	***Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (bintek, sosialisasi , konsultasi (wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional***	370	0	0	0	100 %	0	0	0 %
7.01.05.2.01.05	PenangananKonflikSosialsesuaiKetentuanPeraturan Perundang-Undangan	***Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan***	12	0	6	6	100 %	6	12	100 %
7.01.05.2.01.08	PelaksanaanTugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	***JumlahdokumenTugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan***	14	6	2	2	100	6	14	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN**									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	DAN PEMERINTAHAN DESA									
7.1.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahanDesa**									
		JumlahdokumenFasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	**149**	54	42	42	100 %	40	96	64,42 %
	Hasil Kegiatan	**ProsentaseFasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan**	**100 %**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		PemerintahanDesa								
7.1.06.2.01.01	FasilitasiPenyusunanPeraturanDesa dan PeraturanKepala Desa	***Jumlah dokumen yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (desa/kegiatan)***	18	6	6	6	100 %	6	18	100 %
7.1.06.2.01.02	FasilitasiAdministrasi Tata PemerintahanDesa	***Jumlah dokumen yang difasiitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa)***	18	6	6	6	100 %	6	18	100 %
7.1.06.2.01.03	FasilitasiPengelolaanKeuanganDesa dan PendayagunaanAsetDesa	***Jumlahdokumen yangdifasilitasipengelolaankeuangandesa dan***	18	6	6	6	100 %	6	18	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		pendayagunaanasetdesa								
7.1.06.2.01.05	FasilitasiPelaksanaanTugasKepalaDesa dan PerangkatDesa	***Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa***	18	6	0	0	100 %	6	12	66,67%
7.1.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	***Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa***	5	0	0	0	100 %	0	0	0 %
7.1.06.2.01.07	FasilitasiPelaksanaanTugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	***Jumlah dokumen fasilitasi daam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa***	18	6	0	0	100 %	6	12	66,66 %
7.1.06.2.01.08	RekomendasiPengangkatan dan	***Jumlahdokumenrekomen***	10	0	6	6	100 %	4	10	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	PemberhentianPerangkatDesa	***dasipengangkatan dan pemberhentianperangkatdesa***								
7.1.06.2.01.09	FasilitasiSinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	***JumlahdokumenSinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa***	18	6	6	6	100 %	0	12	66,66 %
7.1.06.2.01.11	FasilitasiPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas (orang)	0	6	0		100	0	6	100
7.1.06.2.01.13	Fasilitasipenyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	***Jumlah dokumen fasilitasidalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif***	12	6	6	0	0	0	6	33,33 %
7.1.06.2.01.16	FasilitasiPenyusunan Program dan	***Jumlah dokumen fasilitasi***	18	6	6	6	100	6	18	100 %

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan(Renstra PD) Tahun 2021-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub. KegiatanTahun 2024			Target Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	PerkiraanRealisasiCapaianTarget Renstra PD s/d Triwulan Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2024	RealisasiRenja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d 2024	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6*100 %)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	PelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa	***dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa***								

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Warungpring

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	-	√	√	84	86	88	90	84,73		90	92	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√	√	86,33	86,67	90,33	90,67	87,66		90,67	91,00	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	27,08	27,58	28,08	28,58			28,58	29,08	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	-	√	-	39,03	39,58	40,38	40,59	52,7	60,04	40,59	41,08	
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%	-	-		74,44	74,44	74,44	74,44	74,44		74,44	74,44	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	-	-	100	100	100	100	100		100	100	
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	100	100	100	100	100		100	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	-	-	100	100	100	100	100		100	100	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	-	-	-	66,67	66,67	66,67	83,33	66,67		83,33	83,33	

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Warungpring

Kecamatan Warungpring adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Warungpring berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Nilai SAKIP
c. Persentase pelayanan publik yang tersedia
d. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
e. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
f. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
g. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2024 IKM Kecamatan Warungpring sebesar 84,73 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Warungpring. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Warungpring meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2024, cakupan layanan Kecamatan Warungpring tersebut mencapai 101 % dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah penanganan pengaduan masyarakat,karena masyarakat cenderung tidak memfungsikan kotak aduan yang disediakan di Kecamatan Warungpring dalam menyampaiakn aduan.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Warungpring meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 74,44% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 7 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 23,33 %, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100 % karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100 %, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100 % tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Warungpring. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 66,67 % yaitu sebanyak 4 desa dari 6 desa di Kecamatan Warungpring. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Warungpring.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2024, Kecamatan Pemalang mendapat nilai SAKIP sebesar 60,04 (kategori CC) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Warungpring perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Warungpring untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Warungpring yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Warungpring juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH CAKAP HANDAL, MULYA”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bersih

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan

Cakap

Cakap dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal

Handal dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

MULYA

Mulya: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

1. Resik

   Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih
2. Hijau
   Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan
3. Apik
   Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4. Peduli
   Meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
5. Silaturahmi
   Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong,tepa selira dan sejahtera
6. Organisatoris
   Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7. Digitalisasi
   Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Ikhlas
   Menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD tahun 2024 – 2026 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**", maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2025, diarahkan pada "**Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah**", dengan prioritas pembangunan meliputi :

a. Peningkatan Implementasi *Smart City*.
b. Peningkatan Reformasi Birokrasi.
c. Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Tehnologi.
d. Penguatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengembangan Pembangunan Desa.
e. Perlindungan, Pengembangan dan Reaktualisasi Nilai Budaya Daerah.
f. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Secara Berkelanjutan.
g. Penanganan Kemiskinan melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar.
h. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring tahun 2025, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Warungpring adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Warungpring mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Warungpring adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

   Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.
2. Adanya peraturan terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

   Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Warungpring.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Warungpring ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Warungpring dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Warungpring. Renja Kecamatan Warungpring disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Warungpring, *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Warungpring.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.751.102.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.751.102.000**	
	KECAMATAN	**Kecamatan Warungpring**			**2.751.102.000**	**KECAMATAN**	**Kecamatan Warungpring**			**2.751.102.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kecamatan Warungpring**			**2.558.445.600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Warungpring**			**2.558.445.600**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kecamatan Warungpring**			**30.088.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Warungpring**			**30.088.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.559.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.559.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.878.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.878.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.633.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.633.900,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.633.900,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.633.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,895,400,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,895,400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.215.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.215.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4.243.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4.243.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kecamatan Warungpring**			**2.153.833.600**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Warungpring**			**2.153.833.600**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Warungpring	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/14 bulan	2.151.102.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Warungpring	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/14 bulan	2.151.102.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	2.731.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	2.731.600	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencangan Awal RKPD			Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Kecamatan Warungpring			**3.310.700**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah**	Kecamatan Warungpring			**3.310.700**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.310.700	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.310.700	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Warungpring			**2.613.100**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Warungpring			**2.613.100**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	2.613.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	2.613.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**118.919.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**118.919.900**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.388.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.388.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9.512.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9.512.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	53.338.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	53.338.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.615.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.615.200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	34.565.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	34.565.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dok	2.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dok	2.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah PenujangUrusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Warungpring			**31.974.900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah PenujangUrusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Warungpring			**31.974.900**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unil	15.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unil	15.200.000	
	Penyediaan Barang	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.615.200	Penyediaan Barang Cetakan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.615.200	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Cetakan dan Penggandaan					dan Penggandaan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	34.565.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	34.565.500	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dok	2.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dok	2.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah PenujangUrusan Pemerintah Daerah				**31.974.900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah PenujangUrusan Pemerintah Daerah**				**31.974.900**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.200.000	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kntor atau Banguna Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.774.900	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kntor atau Banguna Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.774.900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				**157.595.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**				**157.595.200**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintahan Daerah					**Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan	12 Lap	35.000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan	12 Lap	35.000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	20.499,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	20.499,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lap	94.572.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lap	94.572.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kecamatan Warungpring	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	32.315.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kecamatan Warungpring	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	32.315.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kendaraan Dinas Jabatan					Kendaraan Dinas Jabatan					
	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Warungpring	Jumlah Mebel yang Dipelihara		7.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Warungpring	Jumlah Mebel yang Dipelihara		7.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15.294.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Warungpring	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15.294.600	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**32.839.900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**32.839.900**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**3.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**3.000.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (laporan)		3.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (laporan)		3.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				**14.499.900**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**14.499.900**	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		14.749.900	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		14.749.900	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4.500.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4.500.000	
	Peningkatan Efektifitas	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Lap	5.250.000	Peningkatan Efektifitas	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Lap	5.250.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**15.340.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**15.340.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dok	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dok	10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Lap	5.340.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Lap	5.340.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	28.811.900	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	28.811.900	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	30.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	30.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI					**PROGRAM KOORDINASI**					

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 lap	4.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 lap	4.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**					

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia	4 lap	**2.500.000**	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia	4 lap	**2.500.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	500 orang	40.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Kecamatan Warungpring	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	500 orang	40.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	6 Lap	5.000.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	6 Lap	5.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	6 Dok	13.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	6 Dok	13.500.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (laporan)	6 Dok	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (laporan)	6 Dok	5.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dok	4.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dok	4.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dok	4.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dok	4.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pendayagunaan Aset Desa					Pendayagunaan Aset Desa					
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dok	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dok	4.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dok	3.004.600	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dok	3.004.600	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dok	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dok	4.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dok	4.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dok	4.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dok	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Warungpring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dok	5.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2025 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Warungpring yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.7
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.	Rehabilitasi saluran irigasi TRACAK	Desa Pakembaran	Jumlah volume irigasi yang mengaliri pertanian persawahan yang dibangun	P=124 m L= 1 m T= 1m	
2.	Drainase jalan raya	Jalan raya Warungpring – Pamulihan	Jumlah volume drainase yang dibangun	261 x 1 x 0,5 m	
3.	Draunase jalan	Jalan raya Karangdawa	Jumlah volume drainase yang dibangun	173 x 1 x 0,5 m	
4.	Pengaspalan jalan	Desa Datar	Jumlah volume jalan yang dibangun	207 x 1 x 0,5 m	
5.	Drainase jalan dan talud	Desa Cibuyur Rt.42 RW 06	Jumlah volume drainase yang dibangun	P1.= 29. T1=1,75m P2.= 17. T2=2 m	
6.	Drainase jalan raya Mereng	Desa Mereng			

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WARUNGPRING

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Kecamatan Warungpring Tahun 2025 - 2029

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata.
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Warungpring

Kecamatan Warungpring dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Warungpring harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Warungpring secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Warungpring tahun 2026 adalah **"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan".** Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warungpring sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator mandiri di Wilayah Kecamatan

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Warungpring dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Warungpring tahun 2026, adalah "**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator IKM dan Nilai SAKIP OPD.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Warungpring tahun 2025 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Warungpring Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	50
2		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	Indeks	92
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	65

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Warungpring merencanakan sebanyak 6 program, 17 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Warungpring dengan kebutuhan dana sebesar Rp 3.363.154.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAU Terarah.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WARUNGPRING

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indicator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Warungpring yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

https://jdih.pemalangkab.go.id/

h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
   i. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
   k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Warungpring Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027		
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
				KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					3.363.154.000					3.581.439.287
7.01	KECAMATAN					3.363.154.000					3.581.439.287
	Kecamatan Pemalang					3.363.154.000					3.581.439.287
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)				2.914.067.200,00			Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi (%)	100,00	3.448.572,00
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)							Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi (%)	100,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**0**	**22.463.600,00**	**DAU**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi (Dokumen)**	**5**	**39.500.00,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	3 Dokumen		4.482.600,00	DAU		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2 Dokumen	5.500.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		2.637.500,00	DAU		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	6.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		2.674.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4.000.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		2.427.500,00	DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	6.000.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen		2.717.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	6.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	18 Dokumen		4.464.000,00	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	18 Dokumen	5.500.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4 Dokumen		3.061.000,00	DAU		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	4	4.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0		2.500.000,00	DAU		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1 Dokumen	2.000.000,00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**100**	**2.469.113.900,00**	**DAU**		**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**2.469.113.900,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	110 Orang		**2.466.982.000,00**	DAU		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	18 Orang	**2.466.982.000,00**
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	0		-	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Tugas ASN (Dokumen)						(Dokumen)		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan		2.131.900,00	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	3.500.000,00
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**100**	**2.393.850,00**	**DAU**		**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (%)**	**100**	**4.500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		2.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	2.500.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		2.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	2.500.000,00
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**100**	**2.524.600,00**	**DAU**		**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi (%)**	**100**	**3.500.000,00**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		-	DAU		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	1.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	32 Orang		2.524.600,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	32 Orang	3.500.000,00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**100**	**166.396.750,00**	**DAU**		**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi (%)**	**100**	**170.000.000,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		5.496.750,00	DAU		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	6.500.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket		7.520.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	7.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	12 Paket		15.005.000,00	DAU		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	11.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			disediakan (Paket)						(Paket)		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket		93.941.000,00	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12 Paket	95.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket		10.300.000,00	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	12 Paket	11.000.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Dokumen		2.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2 Laporan	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan		31.600.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	100 Laporan	36.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			(Laporan)								
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0		2.534.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	3.500.000,00
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100**	**75.291.000,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (%)**	**100**	**32.000.000,00**
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit			DAU		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1 Unit	33.815.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit			DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit	6.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit		41.109.000,00	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	9 Unit	121.120.000,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		34.182.000,00	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	16.000.000,00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**142.532.000,00**	**DAU**		**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**141.000.000,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan		11.500.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	12.500.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		26.460.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	23.500.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan		10.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	11.000.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**100**	**108.642.500,00**	**DAU**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (%)**	**100**	**94.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	16		63.760.000,00 -	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipleihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit	51.000.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit			DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1Unit	2.500,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15 Unit		15.000.000,00	DAU		jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15 Unit	16.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 Unit		7.500.000,00	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	6.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit		22.382.500,00	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	21.000.000,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		-	DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	50.000.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**				**25.095.000,00**			**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)**	**76,67**	**32.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**0**	**2.870.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**4.000.000,00**
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen		2.870.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen	4.000.000,00
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**0**	**12.410.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Laporan / Dokumen)**	**0**	**16.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1 Dokumen		4.735.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	1 Dokumen	6.000.000,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan		3.000.000,00	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	4.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan		4.675.000,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	6.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**0**	**9.815.000,00**	**DAU**		**Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas (Kegiatan)**	**0**	**12.000.000,00**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4 Laporan		5.010.000,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4 Laporan	6.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1 Laporan		4.805.000,00	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1 Laporan	6.000.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**				**71.267.800,00**			**Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif (%)**	**100,00**	**76.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

		Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)							**Persentase sarana prasarana kelurahan dalam kondisi baik (jalan dan drainase lingkungan) (%)**	**67,25**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**0**	**71.267.800,00**	**DAU**		**Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**76.000.000,00**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1 Lembaga		3.000.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1 Lembaga	4.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen		28.252.500,00	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen	36.000.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan		40.015.300,00	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2 Laporan	36.000.000,00
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**0**	**1.000,00**			**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi (Lembaga Kemasyarakatan)**	**4 Lembaga**	**500.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		1.000,00	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4 Lembaga	500.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**		**100,00**		**22.455.500,00**			**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)**	**100,00**	**22.130.000,00**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**0**	**12.225.000,00**	**DAU**		**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**11.880.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Laporan		16.225.000,00	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Laporan	5.000.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	0		-	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat (Laporan)	1 Laporan	250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**		**0**	**7.230.500,00**	**DAU**		**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**0**	**3.250.000,00**
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0		7.230.500,00	DAU		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1 Laporan	3.250.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**				**169.658.500,00**			**Persentase konflik di masyarakat yang ditangani (%)**	**100,00**	**73.000.000,00**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**11**	**DAU**	**169.658.500,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**11**	**73.000.000,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500 Orang		140.508.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	500 Orang	51.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30 Orang		5.000.000,00	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30 Orang	500.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	4 Laporan		2.300.500,00	DAU		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	4 Laporan	6.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4 Dokumen		26.850.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4 Laporan	18.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**				**160.610.000,00**			**Jumlah desa yang naik statusnya (Desa)**	**5,00**	**38.928.000,00**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**30**	**160.610.000,00**	**DAU**		**Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun (Laporan / Dokumen)**	**30**	**38.928.000,00**
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	16 Dokumen		3.370.000,00	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	16 Dokumen	5.000.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	6 Dokumen		3.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	6 Dokumen	5.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Pemerintahan Desa (Dokumen)						Pemerintahan Desa (Dokumen)		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	16 Dokumen		3.500.000,00	DAU		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	16 Dokumen	5.000.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2 Dokumen		3.100.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2 Dokumen	5.000.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	15 Dokumen		140.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan	0	5.000.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Kepala Desa (Dokumen)						Kepala Desa (Dokumen)		
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	6 Dokumen		3.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	6	5.000.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0		1.640.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	5 Dokumen	3..500.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	3 Dokumen		-	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	3 Dokumen	3.510.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Pembangunan Desa (Dokumen)						Desa (Dokumen)		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0		-	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1 Dokumen	500.000,00
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2 Dokumen		2.500.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	2 Dokumen	2.500.000,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen		3.000.000,00	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	5.428.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

			Desa (Dokumen)						Desa (Dokumen)		

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Warungpring merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Warungpring Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2025.
2. Renja Kecamatan Warungpring memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Warungpring secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungpring Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Warungpring Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kecamatan Warungpring Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Warungpring Tahun 2026.

CAMAT WARUNGPRING

VIVIEN WIDYASARI, S.STP.,MM
Pembina Tk1
NIP:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah;

e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;

f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Keschatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelernggaraan *E-Government*	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelernggaraan *E-Government*
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksan
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabaat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

https://jdih.pemalangkab.go.id/

LL. RENCANA KERJA KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Moga tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Moga merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Moga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Moga melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Moga dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Moga mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Moga mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Moga dalam 1 (satu) tahun;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Moga tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2025
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2025
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Moga
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP,Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Moga
Tahun 2026

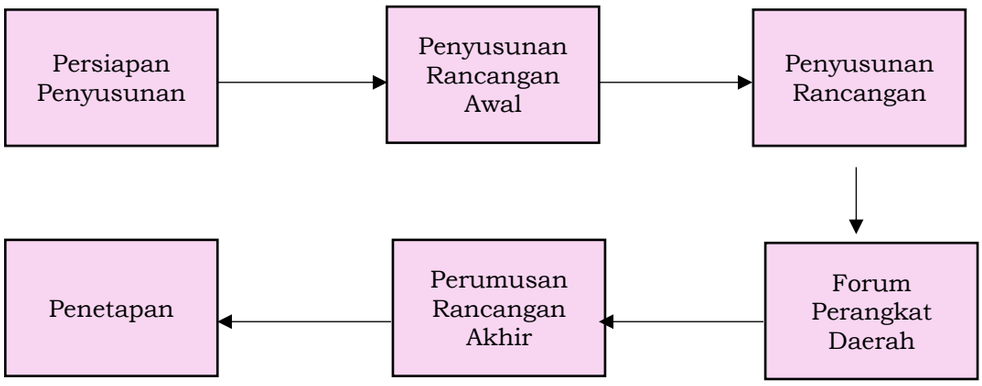

Renja Kecamatan Moga tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Moga tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

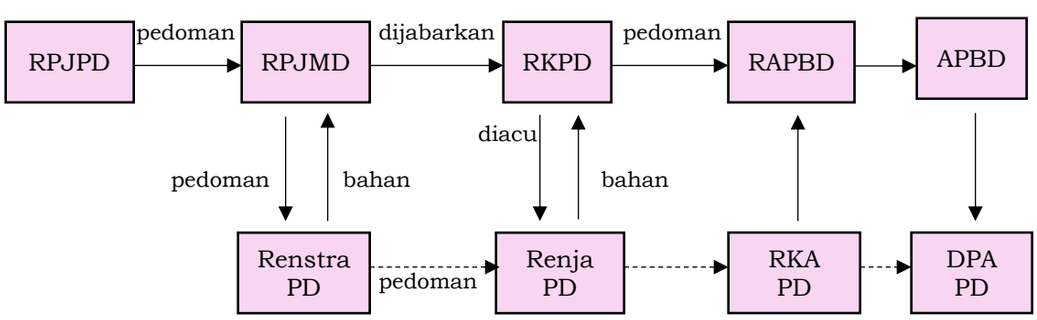

Renja Kecamatan Moga berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang tahun 2023, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Moga tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Moga);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

37. Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Moga adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Moga tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Moga sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Moga;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Moga tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Moga tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Moga Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Moga tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2023 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Moga, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Moga, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moga, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moga, program, kegiatan dan sub kegiatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Moga, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Moga.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOGA
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Moga

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Moga pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Moga sebesar Rp 1.792.169.000 yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 2.511.931.995 atau sebesar 90%.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Moga sebesar Rp 2.835.788.000, dan adanya efisiensi anggaran di tahun 2025 sehingga anggaran di kecamatan moga setelah efisiensi sebesar Rp. 2.739.096.000 untuk membiayai yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.154.120.428 atau sebesar 42,15 %`

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Moga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Efisiensi anggaran di Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan serta Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Moga telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 5 Program, 12 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Terdapat efisiensi penggunaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan disebabkan adanya pegawai yang purna tugas sehingga Anggaran pada sub kegiatan tersebut terrealisasi sebesar 85,91%
   b. Terdapat efisiensi pada subkegiatan Penyediaan sumber daya air, listrik dan telepon sehingga anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar 79,08%. Serta efisiensi di Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan kepala Desa terealisasi sebesar Rp. 98,50%
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pemalang yaitu (tercapai/ tidak tercapai) di tahun 2024;
4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2025
   b. Pencermatan Anggaran serta Pelaksanaannya
   c. Penyesuaian pagu anggaran untuk kegiatan yang tertunda.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Moga dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang sebagai berikut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga dan Pencapaian Renstra Kecamatan Moga s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4(5+6+9)*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6*100%)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4*100%)*
'7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	95,9	30,9	31	47,1	151,94	34	112	116,79
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	93,02	28,02	34,00	38,59	113,50	31	97,61	104,93
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	40	14	13	15	115,38	13	42	105,00
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	***Dokumen***	***40***	***14***	***13***	***15***	***115,38***	***13***	***42***	***105,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	25	15	5	5	100,00	5	25	100,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Dokumen***	25	15	***5***	***5***	***100,00***	***5***	***25***	***100,00***
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	***Dokumen***	5	3	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***5***	***100,00***
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	***Dokumen***	5	3	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***5***	***100,00***
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	***Dokumen***	5	3	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***5***	***100,00***
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	***Dokumen***	5	3	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***5***	***100,00***
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	20	12	4	4	100,00	4	20	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Laporan***	20	12	***4***	***4***	***100,00***	***4***	***20***	***100,00***
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Laporan***	10	***2***	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***6***	***60,00***
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	9	3	3	3	100,00	3	9	100,00
		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	***Dokumen***	***27***	***3***	***3***	***3***	***100,00***	***21***	***27***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase dokumen administrasi keuangan	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perangkat daerah yang tersusun									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	Orang/ bulan	51/42	17/14	17/14	17/14	100,00	17/14	51/42	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	***Orang/ bulan***	***51/42***	***17/14***	***17/14***	***17/14***	***100,00***	***17/14***	***51/42***	***100,00***
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Dokumen	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	***Laporan***	5	3	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***5***	***100,00***
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Dokumen	5	51	17	17	100,00	1	69	1380,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	***Laporan***	95	51	***17***	***17***	***100,00***	***19***	***87***	***91,58***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD									
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Dokumen	5	3	1	0	0,00	1	4	80,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	***Dokumen***	5	3	***1***	***0***	***0,00***	***1***	***4***	***80,00***
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	17	5	6	6	100,00	6	17	100,00
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***Dokumen***	***992***	***552***	***219***	***139***	***63,47***	***221***	***912***	***91,94***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis/ bulan	***40/12***	8/12	12	12	100,00	12	24/36	100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	***Paket***	60	36	***12***	***12***	***100,00***	***12***	***60***	***100,00***
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	30	0	5	5	100,00	6	11	36,67
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	***Paket***	60	36	***12***	***12***	***100,00***	***12***	***60***	***100,00***
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis/ bulan	60	0	12	12	100,00	12	***24***	40,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	***Dokumen***	60	36	***12***	***12***	***100,00***	***12***	***60***	***100,00***
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis/ bulan	60	36	12	12	100,00	12	*60*	100,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	***Paket***	60	36	***12***	***12***	***100,00***	***12***	***60***	***100,00***
7.01.01.2.06.05	PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis/ bulan	60	36	12	12	100,00	12	*60*	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	105000	29400	19.000	19.000	100,00	21.000	69.400	66,10
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	***Paket***	60	36	***12***	***12***	***100,00***	***12***	***60***	***100,00***
7.01.01.2.06.06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan	Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis/ bulan	120	72	24	24	100,00	24	*120*	100,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	***Laporan***	120	72	***24***	***24***	***100,00***	***24***	***120***	***100,00***
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan	675	300	135	55	40,74	135	490	72,59
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Laporan***	675	300	***135***	***55***	***40,74***	***135***	***490***	***72,59***
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Jenis	10	0	0	0	0,00	2	2	20,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	***Dokumen***	10	0	***0***	***0***	***0,00***	***2***	***2***	***20,00***
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	17	5	6	6	100,00	6	17	100,00
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***Unit***	***76***	***45***	***1***	***3***	***300,00***	***30***	***76***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tersedia	Unit	5	0	0	0	#DIV/0!	1	***1***	***20,00***
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	***Unit***	5	0	***0***	***0***	***0,00***	***1***	***1***	***20,00***
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	90	6	0	0	0,00	18	24	26,67
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	***Unit***	90	6	***0***	***0***	***0,00***	***18***	***24***	***26,67***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	55	39	1	1	100,00	11	51	92,73
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	***Unit***	55	39	***1***	***1***	***100,00***	***11***	***51***	***92,73***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0	0	2	0,00	0	0	0,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	***Unit***	0	0	***0***	***2***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	78	45	3	3	100,00	30	78	100,00
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***Unit***	***78***	45	3	3	***100,00***	30	***78***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tersedia	Unit	5	0	0	0	0,00	1	***1***	***20,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	***Unit***	5	0	***0***	***0***	***0,00***	***1***	***1***	***20,00***
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit	90	6			#DIV/0!	18	24	26,67
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	***Unit***	90	6			***#DIV/0!***	***18***	***24***	***26,67***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	55	39	3	3	100,00	11	53	96,36
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	***Unit***	55	39	***3***	***3***	***100,00***	***11***	***53***	***96,36***
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	9	3	3	3	100,00	3	9	100,00
		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***Dokumen***	***130***	78	26	26	***100,00***	26	***130***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersusun	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	2000	1200	400	400	***100,00***	400	***2000***	***100,00***
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Laporan***	10	6	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***10***	***100,00***
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi,SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan	Jenis/ bulan	15	9	3	3	100,00	3	***15***	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	***Laporan***	60	36	***12***	***12***	***100,00***	***12***	***60***	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/ bulan	60	36	12	12	100,00	12	***60***	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	***Laporan***	60	36	***12***	***12***	***100,00***	***12***	***60***	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	502	198	177	114	64,41	127	439	87,45

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***Unit***	***502***	***198***	***177***	***114***	***64,41***	***127***	***439***	***87,45***
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berijin dan terpelihara	Unit	70	36	12	12	100,00	14	62	88,57
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	***Unit***	70	36	***12***	***12***	***100,00***	***14***	***62***	***88,57***
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	540	147	97	97	100,00	108	352	65,19
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	***Unit***	540	147	***97***	***97***	***100,00***	***108***	***352***	***65,19***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	10	6	2	2	100,00	2	10	100,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	***Unit***	10	6	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***10***	***100,00***
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	15	9	3	3	100,00	3	15	100,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	***Unit***	15	9	***3***	***3***	***100,00***	***3***	***15***	***100,00***
7.01.02	Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%	223,05	74,17	74,44	84,5	113,51	74,44	233,11	104,51
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	Keluaran Kegiatan	Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data	14	5	5	5	100,00	4	14	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	***Dokumen***	***14***	***5***	***5***	***5***	***100,00***	***4***	***14***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia	Data	20	15	5	5	100,00	4	24	120,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Dokumen***	20	15	***5***	***5***	***100,00***	***4***	***24***	***120,00***
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	6	0	3	3	100,00	3	6	100,00
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***Dokumen***	***15***	***0***	***3***	***3***	***100,00***	***12***	***15***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***100***	***100,00***
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	Layanan	5	0	4	4	100,00	1	5	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	***Laporan***	20	0	***4***	***4***	***100,00***	***4***	***8***	***40,00***
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	Kasus	15	9	3	3	100,00	3	15	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	***Laporan***	15	9	***3***	***3***	***100,00***	***3***	***15***	***100,00***
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kewenangan	4	0	2	2	100,00	2	4	100,00
		Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***Dokumen***	***67***	***0***	***2***	***2***	***100,00***	***65***	***67***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	275	100	100	100	100,00	75	275	100,00
		Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***%***	***275***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***75***	***275***	***100,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Izin	275	135	50	50	100,00	55	240	87,27
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	***Dokumen***	275	135	***50***	***50***	***100,00***	***55***	***240***	***87,27***
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	Izin	5	30	1	1	100,00	1	32	640,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	***Laporan***	50	30	***10***	***10***	***100,00***	***10***	***50***	***100,00***
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	294	100	100	100	100,00	94	294	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan	Orang	250	75	65	65	100,00	110	250	100,00
		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***Dokumen***	***9***	***3***	***3***	***3***	***100,00***	***3***	***9***	***100,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran musyawarah pembangunan (Desa/Kel+Kec)	%	285	100	100	100	100,00	85	285	100,00
		Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***%***	***285***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***85***	***285***	***100,00***
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang	550	225	65	65	100,00	110	400	72,73
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	***Dokumen***	5	3	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***5***	***100,00***
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbangkab yang didampingi	Desa/ kelurahan	20	21	4	4	100,00	4	29	145,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	***Dokumen***	10	3	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***7***	***70,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	294	100	100	100	100,00	94	294	100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Orang	50	0	30	30	100,00	20	50	100,00
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***Laporan***	***2***	***0***	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***2***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%	180	0	100	100	100,00	80	180	100,00
		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***%***	***180***	***0***	***100***	***100***	***100,00***	***80***	***180***	***100,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Orang	100	0	30	30	100,00	20	50	50,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	***Dokumen***	5	0	***1***	***1***	***100,00***	***1***	***2***	***40,00***
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan	8	0	4	4	100,00	4	8	100,00
		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***Laporan***	***8***	***0***	***4***	***4***	***100,00***	***4***	***8***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	%	180	0	100	100	100,00	80	180	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***%***	***180***	***0***	***100***	***100***	***100,00***	***80***	***180***	***100,00***
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Perda dan Perbub yang dimonitoring	Peraturan	20	0	4	4	100,00	4	8	40,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	***Laporan***	20	0	4	4	***100,00***	***4***	***8***	***40,00***
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang	36	3	30	30	100,00	3	36	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***Dokumen***	***55***	***17***	***20***	***20***	***100,00***	***18***	***55***	***100,00***
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***300***	***100,00***
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan	Orang	2250	6	2	2	100,00	450	458	20,36

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	***Orang***	750	9	***30***	***30***	***100,00***	***150***	***189***	***25,20***
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Orang	150	0	30	30	100,00	30	60	40,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	***Orang***	250	0	***30***	***30***	***100,00***	***50***	***80***	***32,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	Kasus	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	***Laporan***	15	3	***3***	***3***	***100,00***	***3***	***9***	***60,00***
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	Tema	75	45	15	15	100,00	15	75	100,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	***Dokumen***	75	45	***15***	***15***	***100,00***	***15***	***75***	***100,00***
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	220	70	70	70	100,00	80	220	100,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	24	9	9	9	100,00	6	24	100,00
		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***Dokumen***	***83***	***9***	***9***	***9***	***100,00***	***65***	***83***	***100,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00
		Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100,00***	***100***	***300***	***100,00***
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Desa/ kegiatan	50/60	10/40	10/10	10/10	100,00	10/10	10/60	#VALUE!
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	***Dokumen***	50	15	***10***	***10***	***100,00***	***10***	***35***	***70,00***
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa/ kegiatan	10 / 35	10/35	10/35	10/35	100,00	10/35	10/105	100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	***Dokumen***	***10/35***	***35***	***35***	***35***	***100,00***	***35***	***105***	***0,80***
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Desa/ kegiatan	10/2	10/25	10/2	10/2	100,00	10/2	10/29	***103,71***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	***Dokumen***	***10/25***	***25***	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***29***	***0,06***
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Orang/ kegiatan	30/6	30/2	30/2	30/2	100,00	30/2	30/6	***100,00***
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	***Dokumen***	***30***	***6***	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***10***	***33,33***
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Orang/ kegiatan	20/6	20/2	20/2	20/2	100,00	20/2	20/6	***100,00***
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	***Dokumen***	***10***	***6***	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***10***	***100,00***
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Surat	20	***0***	0	0	0,00	4	4	20,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	***Dokumen***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***4***	***4***	***20,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa/ kegiatan	10/8	***0***	10/4	10/4	100,00	10/4	10/8	100,00
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	***Dokumen***	***20***	***0***	***4***	***4***	***100,00***	***4***	***8***	***40,00***
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Desa/ kegiatan	10/14	10/10	10/2	10/2	100,00	10/2	10/14	100,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	***Dokumen***	***10***	***10***	***2***	***2***	***100,00***	***2***	***14***	***140,00***
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	Orang/ kegiatan	20/4	20/2	0	0	0,00	20/2	20/4	100,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	***Dokumen***	***10***	***2***	***0***	***0***	***0,00***	***2***	***4***	***40,00***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Moga Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	-	√	-	20	20	30	30	40	20	20	20	20	
2	Indek Kepuasan masyarakat	%	-	√	-	90	91	92	93	94	89,28	90,89	90	91	
3	Nilai Sakip OPD			√		67	68	69	70	71	60,14	66,72	67	68	
4	Prosentase Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi	%	-	-	√	100	100	100	100	100	38,59	-	32	33	
5	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	%	-	-	√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	%	-	-	√	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	74,44	74,44	86,7	86,7	
7	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	%	-	-	√	95	95	95	95	95	84	84	95	95	
8	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	-	-	√	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
9	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	%	-	-	√	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
10	Jumlah desa yang naik statusnya	%	-	-	√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moga

Kecamatan Moga adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Moga berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Cakupan layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2025 IKM Kecamatan Moga sebesar 89,26 dimana angka tersebut masuk dalam kategori **baik**, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Moga. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moga meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2023, cakupan layanan Kecamatan Moga tersebut mencapai 96,10% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah Moga.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Moga meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100 % melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 20 kewenangan dari total 33 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 74,33 %, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 80 % karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 80 %, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Moga. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 80.% yaitu sebanyak 8 desa dari 10 desa di Kecamatan Moga. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Moga.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2025, Kecamatan Moga mendapat nilai SAKIP sebesar 66,74 (kategori B) dan IRB sebesar 38,59 (kategori C) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Moga perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Moga untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Moga yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Moga juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Moga justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah "**PEMALANG BERCAHAYA, BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA**". Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. **MULYA**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Pemalangyang terpilih:

1. **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik
2. **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa
4. **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi
5. **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal, Keterkaitan Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase Bersih dan Handal dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 1 Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; **Misi 6 Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi dan **Misi 7 Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 2 Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan; **Misi 3 Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan **Misi 4 Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan **Misi 5 Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan **Misi 8 Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tersebut, maka Kecamatan Moga sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Kecamatan lebih dititikberatkan pada pencapaian misi keenam Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yaitu **: "ORGANISATORIS "** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Moga tahun 2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Moga mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system

https://jdih.pemalangkab.go.id/

perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Moga adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

   Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Adanya peraturan terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

   Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Moga.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Moga ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Moga dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Moga. Renja Kecamatan Moga disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Moga dengan mempertimbangkan faktor 5 M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Moga.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	KECAMATAN	**Kec Moga**			**2.965.606.000**	**KECAMATAN**	**Kec Moga**			**3.050.176.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kec Moga**	Prosentase Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi	**100**	**2.646.944.100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec Moga**	Prosentase Layanan Umum Kepegawaian yang terpenuhi	**100**	**2.530.189.100**	
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**100**				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	**100**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Moga**	**Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**16 dok**	**17.692.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Moga**	**Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**16 dok**	**18.492.000**	
			Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	**100%**				**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**100%**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Moga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.308.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Moga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.108.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.582.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.582.600	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.536.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.536.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.924.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.924.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.040.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Moga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Moga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.300.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Moga	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Baerita Acara			Kec Moga	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Baerita Acara		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec Moga**	**Tersedianya Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**18 dok**	**2.068.196.300**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec Moga**	**Tersedianya Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**17 dok**	**1.942.466.300**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
			Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	**100%**				**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi**	**100%**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Moga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ 14 bulan	2.064.162.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Moga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ 14 bulan	1.938.432.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	899.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	899.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	3.135.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	3.135.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec Moga**	**Tersedianya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**42 Paket**	**152.356.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Moga**	**Tersedianya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**42 Paket**	**160.531.600**	
			Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	**100%**				**Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**100%**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Moga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.836.750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec Moga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.836.750	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Moga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Moga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kec Moga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.823.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Moga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.823.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Moga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.962.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Moga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	57.462.850	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Moga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Moga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.327.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Moga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Moga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Moga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	4.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Moga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	4.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Laporan	70.234.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Laporan	70.582.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec Moga**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**23 Unit**	**121.081.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec Moga**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia**	**23 unit**	**121.081.200**	
			Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	**100%**				**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100%**		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kec Moga	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	79.028.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kec Moga	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	79.028.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Pengadaan Mebel	Kec Moga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	18.800.000	Pengadaan Mebel	Kec Moga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	18.800.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Moga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	23.253.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Moga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23.253.200	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Moga	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Moga	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Moga**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**415 laporan**	**189.690.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Moga**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**415 laporan**	**189.690.000**	
			Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	**100%**				**Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100%**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	159.190.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Moga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	159.190.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Moga**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**125 unit**	**97.928.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Moga**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**125 unit**	**97.928.000**	
			Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	**100%**				**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas**	**100%**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Moga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	49.898.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Moga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	49.898.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Moga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	18.930.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Moga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	18.930.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Moga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit	11.640.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Moga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit	11.640.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Moga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	17.460.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Moga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	17.460.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec Moga**	**Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**86,70%**	**18.000.750**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Moga**	**Persesntase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**86,70 %**	**17.250.750**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec Moga**	**Tersedinya dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**4 dokumen**	**5.150.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kec Moga**	**Tersedinya dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**4 dokumen**	**4.400.000**	
			Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	**100%**				**Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun**	**100%**		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	5.150.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4.400.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	**10 dokumen**	**7.024.750**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	**10 dokumen**	**7.024.750**	
			Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	**100%**				**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun**	**100%**		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec Moga	Jumlah laporan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	2.200.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	2.200.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen	3.524.750	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen	3.524.750	
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun**	**45 Dokumen**	**3.626.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun**	**45 Dokumen**	**3.626.000**	
			Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**100%**				**Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Moga	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	45 Dokumen	3.626.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Moga	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	45 Dokumen		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Moga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Moga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	3.626.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec Moga**	**Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**94%**	**99.154.750**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Kec Moga**	**Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif**	**94%**	**99.154.750**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
						DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**10 lembaga**	**99.154.750**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**10 lembaga**	**99.154.750**	
			Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	**100%**				**Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**100%**		
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec Moga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.932.750	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	42.932.750	
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kec Moga	Jumlah dokumen sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1 Dokumen	16.500.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec Moga	Jumlah dokumen sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	1 Dokumen	16.500.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	39.722.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	39.722.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kec Moga**	**Terbinanya lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**15 lembaga**	**-**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kec Moga**	**Terbinanya lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**15 lembaga**	**-**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	**100%**		**Tingkat Kecamatan**		**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**100%**		
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Kec Moga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga		
	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kec Moga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	10 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kec Moga**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**100%**	**5.475.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec Moga**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**100%**	**8.450.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kec Moga**	**Tersedinya laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**12 Laporan**	**5.475.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec Moga**	**Tersedinya laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**12 Laporan**	**8.450.000**	
			Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	**100%**				**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**100%**		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	12 Laporan	5.475.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Moga	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan	12 Laporan	8.450.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Kec Moga**	**Tersedianya laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terssusun**	**4 Laporan**	**-**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec Moga**	**Tersedianya laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang**	**4 Laporan**	**-**	
			Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	**100%**				**Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya**	**100%**		
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Kec Moga**	Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan atau kepolisan negara RI	4 Laporan		**Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**Kec Moga**	Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan atau kepolisan negara RI	4 Laporan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kec Moga**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100%**	**91.188.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec Moga**	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100%**	**183.738.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec Moga**	**Tersedinya dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**10 Dokumen**	**91.188.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec Moga**	**Tersedinya dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**10 Dokumen**	**183.738.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
			Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	**100%**				**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**100%**		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Moga	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	450 Orang	73.288.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Moga	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	450 Orang	165.838.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Moga	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	30 Orang	3.350.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Moga	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	30 Orang	3.350.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Moga	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan	4 Laporan	1.950.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Moga	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan	4 Laporan	1.950.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Moga	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 Dokumen	12.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Moga	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 Dokumen	12.600.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kec Moga**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	**20%**	**104.843.400**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Moga**	**Jumlah desa yang naik statusnya**	**20%**	**211.393.400**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**120 Dokumen**	**104.843.400**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Moga**	**Tersedianya dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**120 Dokumen**	**211.393.400**	
			Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	**100%**				**Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun**	**100%**		
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Kec Moga	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	10 Dokumen	3.500.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Moga	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	10 Dokumen	3.500.000	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	10 Dokumen	9.348.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	10 Dokumen	9.348.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec Moga	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10 Dokumen	7.084.600	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Moga	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10 Dokumen	20.834.600	
	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perankat daerah	30 Dokumen	7.280.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perankat daerah	30 Dokumen	7.280.000	
	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	57.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	150.300.000	
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyaratan Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa	20 Dokumen	6.390.800	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Permusyawaratan Desa	20 Dokumen	6.390.800	
	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen	2.145.500	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Dokumen	2.145.500	
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec Moga	JumlJumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	10 Dokumen	3.795.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec Moga	JumlJumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan (RKPDes dan APBDes) Desa	10 Dokumen	3.795.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.965.606.000**	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
			(RKPDes dan APBDes) Desa								
	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec Moga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	20 Dokumen		Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec Moga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	20 Dokumen		
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10 Dokumen	3.399.500	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10 Dokumen	3.399.500	
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	4.400.000	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec Moga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	4.400.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.5
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Rangking)
A	Kegiatan Fisik/Infrastruktur				
1	Pelebaran Jalan Dusun Benjaran RT 17 RW 03	Desa Plakaran	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	500 x 2 m	
2	Pelebaran Jalan Pertanian Penghubung Jalan Antar Desa Mandiraja-Gendoang RT 08 RW 01 Dusun Krajan Barat	Desa Mandiraja	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	75 1 x 0,15 x 450 m	
3	Pembangunan Talud Jalan Kali Warman RT 33 RW 08 Dusun Mijen	Desa Walangsanga	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	40 x 4,7 m	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4	Pembangunan Jalan Aspal Dk Krajan RT.03 RW.06	Desa Sima	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	345 x 2.5 m	
5	Pembangunan Drainase Jalan Brawijaya RT 09 RW 05 Dukuh Krajan Timur	Desa Banyumudal	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	200 40 m	
6	Pembangunan Jalan Aspal Tanjung Tembus Jalan Ambring RT 01 RW 10 tembus RT 03 RW 10 Dusun Moga IV Brawijaya RT 09 RW 05 Dukuh Krajan Timur	Desa Moga	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	500 m	
7	Pembangunan Jaringan Air Bersih RT 08 – 09 RW 02 Dukuh Temu Brawijaya RT 09 RW 05 Dukuh Krajan Timur	Desa Wangkelang	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	200 m	
8	Pengaspalan Jl. Penghubung Antar Desa Kebanggan Dan Pepedan RT 04 RW 01 ' RT 08 – 09 RW 02 Dukuh Temu Brawijaya RT 09 RW 05 Dukuh Krajan Timur	Desa Kebanggan	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	278 m	
9	Pengaman Jalan Desa RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Kebanggan Dan Pepedan RT 04 RW 01 ' RT 08 – 09 RW 02 Dukuh Temu Brawijaya RT 09 RW 05 Dukuh Krajan Timur	Desa Pepedan	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	400 m	
10	Pelebaran Jembatan Kali Kerep RT 10 RW 01 Dusun Karanganyar Desa Kebanggan Dan Pepedan RT 04 RW 01 ' RT 08 – 09 RW 02 Dukuh Temu Brawijaya RT 09 RW 05 Dukuh Krajan Timur	Desa Gendoang	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	12 m x 5 m	
11	Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan RT 05 RW 01 Dusun Krajan Barat RT 08 – 09 RW 02 Dukuh Temu Brawijaya RT 09 RW 05 Dukuh Krajan Timur	Desa Banyumudal	Meningkatnya infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	145 m	
B	Kegiatan Non Fisik				
1	Pelatihan Teknisi Komputer	Desa Pepedan	Meningkatnya Kemampuan dalam memperbaiki Komputer	20 Orang	
2	Pelatihan Komputer untuk PKK	Desa Banyumudal	Meningkatnya kemampuan dalam mengoperasikan komputer	20 Orang Kader dan Pengurus PKK	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOGA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Moga Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Moga Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025 – 2029 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk – produk yang ramah lingkungan.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026 diarahkan pada **"Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter"**, yang dijabarkan dalam empat prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakte dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan implementasi *Smart City;*
2. Peningkatan reformasi birokrasi;
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis teknologi;
4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa;
5. Perlindungan, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan;
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar;
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moga

Kecamatan Moga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Moga harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Moga secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Moga tahun 2026 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moga sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dan meningktakan kemajuan desa yang lebik baik maju dan mandiri. Tujuan tersebut diukur dengan indikator **Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan** yang merupakan hasil dari Indek desa membangun yang merupakan acuan dalam penentuan status.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Moga dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Moga tahun 2026, adalah "**Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik, serta Nilai Sakip OPD yang di ukur dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja OPD;

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moga tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	20	20	30	30	40	40	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mencapai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Nilai SKM	%	91	92	93	94	95	96	
			Nilai Sakip OPD	Angka	66	67	68	69	70	71	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Moga merencanakan sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Moga dengan kebutuhan dana sebesar Rp 3.050.176.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOGA

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    h. Sub Kegiatan Jamuan Tamu
    i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasionak atau Lapangan
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisispasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
   d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisispatif
l. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Moga Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN								3.050.176.000				3.080.176.000
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.530.189.100				2.530.189.100
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah								18.492.000				18.492.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100%	7.108.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	7.108.500
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	1.582.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.582.600

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	1.536.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.536.900
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	1.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD)	1 Dokumen	1.924.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	100%	3.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	3.040.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	100%	2.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	2.300.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.942.466.300	0			1.942.466.300
7	1	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah PNS yang dibayar gajinya	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	17 orang/ 14 bulan	100%	1.938.432.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	1.938.432.000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase jumlah laporan keuangan yang tersusun	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 laporan	100%	899.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1Laporan	899.300
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	17 laporan	100%	3.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	17 laporan	3.135.000
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 dokumen	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								160.531.600				160.531.600

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	12 paket	100%	7.836.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	7.836.750
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	12 paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	0
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	10.823.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	JumlahnPeralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	10.823.000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Penyediaan paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	12 paket	100%	57.462.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	57.462.850
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	12 paket	100%	6.327.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	6.327.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	24 dokumen	100%	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	3.000.000
7	1	1	2.06	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	24 dokumen	100%	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	4.500.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	55 laporan	100%	70.582.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 laporan	70.582.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								121.081.200				121.081.200
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 unit	100%	79.028.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang tersedia	1 unit	79.028.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan mebel	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah paket mebel yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 unit	100%	18.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	18.800.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%	23.253.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	23.253.200
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah Unit Gedi=ung Kantor Atau bangunan lainnyayang disediakab	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau bangunan lainnyayang disediakab	1 Unit	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								189.690.000				189.690.000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	2 laporan	100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	12 laporan	100%	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	25.500.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	12 laporan	100%	159.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	159.190.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								97.928.000				97.928.000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	13 unit	100%	49.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	49.898.000
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah Mebel yang dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	18.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Unit	18.930.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	33 unit	100%	11.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 unit	11.640.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%	17.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	17.460.000
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								17.250.750				17.250.750
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								4.400.000				4.400.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan efektifitas kegaitan pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	74,44%	1 Dokumen	100%	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	4.400.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								9.224.750				9.224.750
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiktersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan		1 Dokumen	100%	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Laporan	2.200.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan		1 laporan	100%	3.524.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.524.750
7	1	2	2.02	3	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan		3 laporan	100%	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86,70%	3.500.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								3.626.000				3.626.000
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	74,44%	5 dokumen	100%	3.626.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	3.626.000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	74,44%	10 laporan	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	0
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								99.154.750				119.154.750
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								99.154.750				99.154.750

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Dalam perencanaan pembangunana Desa	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	94%	1 Lembaga	100%	42.932.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	42.932.750
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	94%	2 Dokumen	100%	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Laporan	16.500.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	94%	2 laporan	100%	39.722.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	39.722.000
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Tingkat Kecamatan								0				20.000.000
7	1	3	2.03.	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatn	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persetyase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di tingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	94%	1 Lembaga	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Laporan	10.000.000
7	1	3	2.03.	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persetyase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di tingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	94%	1 Lembaga	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	10.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								8.450.000				18.450.000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								8.450.000				8.450.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase jenis laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan yang tersusun	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 laporan	100%	8.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	8.450.000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Desa												10.000.000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan na/atau Kepolisian Negara Republik Indnesia	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Jumlah Sinergitas dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan na/atau Kepolisian Negara Republik Indnesia	Persentase jumlah sinergitas perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan na/atau Kepolisian Negara Republik Indnesia	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	1 laporan	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sinergitas dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan na/atau Kepolisian Negara Republik Indnesia	2 Laporan	10.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								183.738.000				183.738.000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								183.738.000				183.738.000
7	1	5	2.01	1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	150 orang	100%	165.838.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik	450 Orang	165.838.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	30 orang	100%	3.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	3.350.000
7	1	5	2.01	5	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	2 laporan	100%	1.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Laporan	1.950.000
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	100%	12 dokumen	100%	12.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	12.600.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								211.393.400				211.393.400
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								211.393.400				211.393.400
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	1 Dokumen	100%	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 Dokumen	3.500.000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	10 dokumen	100%	9.348.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	9.348.000
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	2 dokumen	100%	20.834.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen	20.834.600

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	2 dokumen	100%	7.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	7.280.000
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	10 dokumen	100%	150.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	150.300.000
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	2 dokumen	100%	6.390.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	6.390.800
7	1	6	2.01	8	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	3 dokumen	100%	2.145.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	2.145.500
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi sinkronisasi perencaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	4 dokumen	100%	3.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen	3.795.000
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	1 Dokumen	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	0

https://jdih.pemalangkab.go.id/

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				RENCANA TAHUN 2026					RENCANA TAHUN 2027		
						Capaiaan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHAN DANA
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	1 dokumen	100%	3.399.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	3.399.500
7	1	6	2.01	16	Fasilitasi penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target tahun berkenaan	Kab. Pemalang, Moga, Semua Kelurahan	80%	1 dokumen	100%	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	4.400.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Moga merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Moga Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Moga memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Moga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moga Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Moga Tahun 2026.

Pemalang, September 2025
CAMAT MOGA

HARINTO,S.STP
Pembina
NIP. 19821010 200212 1 001

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pulosari yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Pulosari merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pulosari yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Pulosari melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Pulosari dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Pulosari mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Pulosari mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Pulosari dalam 1 (satu) tahun;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pulosari untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2025)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Pulosari
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang: Dinpermasdes, Puskesmas Pulosari, Penyuluh Pertanian di wilayah Kecamatan Pulosari, KWK Kecamatan Pulosari, UPJI III Banjaranyar, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan yang terkait.
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Pulosari
Tahun 2026

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Pulosari tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

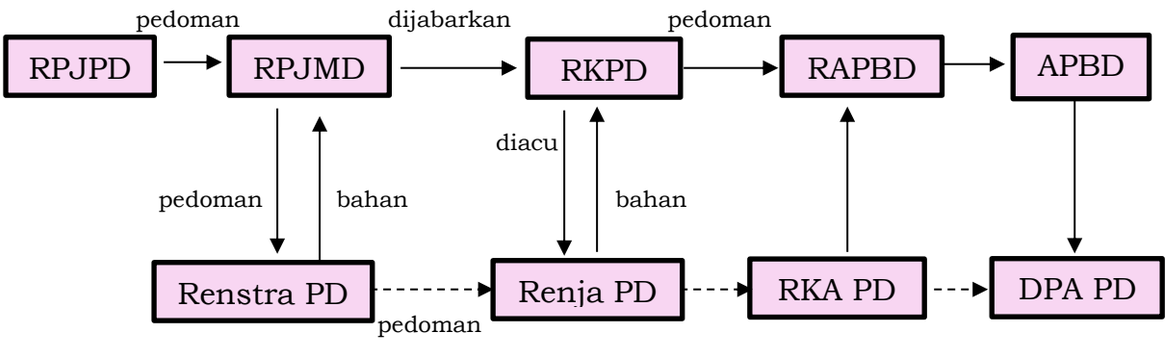

Renja Kecamatan Pulosari berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pulosari adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pulosari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pulosari sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Pulosari;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Pulosari tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pulosari tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistemnatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PULOSARI TAHUN 2024

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pulosari

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukurkan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif

Berkaitan dengan hal itu guna mengetahui sejauh mana tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Pulosari tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

2.1.1. Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Tahun 2024 total penetapan anggaran Kecamatan Pulosari sebesar Rp. 2.870.199.000,00 dan pada anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 2.984.399.000,00 bertambah 3,97%. Dan realisasi anggaran sampai dengan 2024 adalah sebesar Rp. 2.785.305.595,00 atau sebesar 93,33% dari total anggaran setelah perubahan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

2.1.2. Perkiraan Capaian Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Pulosari pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.853.346.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan III,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.624.711.025 atau sebesar 73,77%.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2025, Kecamatan Pulosari telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan dengan adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan namun anggaran dalam proses pencairan.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SAKIP**	**Indeks**	**37,00**	**58,70**	**37,00**	**60,82**	**164,38**	**67,40**	**186,92**	**505,19**
		IRB	**Skor**	**35,50**		**35,50**		**-**			**-**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**14**	**13**	**14**	**14**	**100**	**15**	**42**	**300**
	Keluaran	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**	**dokumen**	**14**	**13**	**14**	**14**	**100**	**15**	**42**	**300**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Hasil	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	100	3	7	350
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	1	1	100	1	2	200
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	4	4	100	4	12	300
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	4	4	4	100	4	12	300
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**14**	**18**	**14**	**14**	**100**	**30**	**62**	**442,8571429**
	Keluaran	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**	**dokumen**	**29**	18	**29**	14	48	30	62	214

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Hasil	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	15	15	15	15	100	16	46	307
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	1	100	1	3	300
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Dokumen	12	16	12	12	100	12	40	333
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia**	**Bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**36**	**300**
	Keluaran	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (layanan)**	**Bulan**	**12**	12	**12**	12	100	168	192	1.600
	Hasil	**Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)**	**%**	**100**	100	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	12	12	12	12	100	12	36	300

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	21	12	12	100	12	45	375
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	135	116	135	151	112	120	387	287
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintaah daerah yang tersedia**	**Bulan**	**12**	**36**	**12**	**12**	**100**	**1**	**49**	**408**
	Keluaran	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (jasa)**	**jasa**	**3**	**36**	**3**	**3**	**100**	**1**	**40**	**1.333**
	Hasil	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)**	**%**	**100**	**-**	**100**	**400**	**400**	**100**	**500**	**500**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	120	12	120	150	125	1	163	136

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listri yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	100	144	168	1.400
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	100	144	168	1.400
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara**	**Unit**	**30**	**44**	**30**	**43**	**143**	**100**	**187**	**623**
	Keluaran	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**	**unit**	**30**	44	**30**	43	143	120	207	690
	Hasil	**Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**143**	**143**	**12**	**255**	**255**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	16	17	16	16	100	12	45	281

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Operasional atau Lapangan	terpelihara dan dibayarkan Pajaknya									
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	5	5	100	38	48	960
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	17	17	17	17	100	38	72	424
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	2	2	2	2	100	100	104	5.200
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	3	3	3	3	100	14	20	667
7.01.02.2.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	**%**	**94,44**	**83,33**	**94,44**	**89**	**95**	**5**	**178**	**188**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Dokumen**	**2**	**3**	**2**	**2**	**100**	**17**	**22**	**1.100**
	Keluaran	**Jenis dokumen pemerintahan yang dipublikasi (dokumen)**	Data	**2**	**3**	**2**	**2**	**100**	**2**	**7**	**350**
	Hasil	**Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi (%)**	%	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**36,00**	**236,00**	**236,00**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahaan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jenis dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia**	**Kewenangan**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**12**	**62**	**248**
	Keluaran	**Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun**	**Dokumen**	**12**	**25**	**12**	**12**	**100**	**100**	**137**	**1.142**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Hasil	**Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia (%)**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**12**	**112**	**112**
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	12	82	12	12	100	24	118	983
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	12	12	100	24	48	400
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa yang aktif**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana**	**Kegiatan**	**2**	**72**	**2**	**2**	**100**	**12**	**86**	**4.300**
	Keluaran	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**Dokumen**	**2**	**1**	**2**	**2**	**100**	**12**	**15**	**750**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Hasil	**Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun**	**%**	**100**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100,00**	**15,00**	**215,00**	**215,00**
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1	1	100	13	15	1.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	12	100	13	37	308
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang terlaksana**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1**		**1**	**1**	**100**	**100**	**201**	**20.100**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Keluaran	**Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1**		**1**	**1**	**100**	**1**	**14**	**1.400**
	Hasil	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif**	**%**	**100**		**100**		**-**	**12**	**24**	**24**
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	1		1	1	100	2	103	10.300
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	1		1	1	100	2	15	1.500
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**%**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**300**	**300**
7.01.04.2.01.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jenis laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi**	**laporan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**1**	**113**	**942**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Vertikal di Wilayah Kecamatan									
	Keluaran	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**Laporan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**1**	**213**	**1.775**
	Hasil	**Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**24,00**	**224,00**	**224,00**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	**12**	12	**12**	**100**	**24**	**236**	**1.967**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.03.2.03.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12		12	**12**	**100**	**24**	**48**	**400**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**%**	**100,00**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**275**	**275**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**Orang**	**200**	**100**	**200**	**200**	**100**	**12**	**221**	**111**
	Keluaran	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**Dokumen**	**12**	**200**	**12**	**12**	**100**	**12**	**33**	**275**
	Hasil	**Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**375,00**	**375,00**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	200	200	200	100	200	412	206
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12	12	12	100	200	224	1.867
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik**	**%**	**75,00**	**75**	**75,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**	**187,00**	**249,33**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Jumlah Desa bertata kelola pemerintahan baik**	**Desa**	**9**	**9**	**9**	**9**	**100**	**200**	**221**	**2.456**
	Keluaran	**Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik (desa)**	**Desa**	**9**	**9**	**9**	**9**	**100**	**12**	**21**	**233**
	Hasil	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan (%)**	**%**	**100**	**75,00**	**100**		**-**	**9**	**21**	**21**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	12	12	12	100	9	33	275
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahaan Desa	Dokumen	12	12	12	12	100	9	33	275

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12	12	12	100	100	124	1.033
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	12	12	12	100	12	36	300
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang Dilaksanakan	Desa	0	-	0	-	#DIV/0!	12	24	#DIV/0!
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	12	12	12	12	100	12	24	200
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	12	12	12	12	100	12	24	200
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Desa	12	12	12	12	100	8	20	167

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pembangunan Partisipatif	Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	12	12	12	12	100	12	24	200
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	12	12	12	12	100	2	14	117
7.01.06.2.01.17	Koordinas Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	12	12	12	12	100	12	24	200

https://jdih.pemalangkab.go.id/

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari

Analisi Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah Ditentukan dalam Renstra Kecamatan Pulosari berupa Indikator Camat Pulosari sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulosari
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		v		79	79	80	80	86,95	81,77	80	80	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		v		93,89	93,89	93,89	93,89	84,68	91,67	93,89	93,89	
3	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%				94,44	94,44	94,44	94,44	46,59	83,33	94,44	94,44	
4	Persentase masyarakat desa yang aktif	%				100	100	100	100	54,00	100	100	100	
5	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				75	75	75	75	75	75	75	75	

Untuk realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 belum dapat dilakukan perhitungan hal ini disebabkan perhitungan realisasi dilakukan pada akhir tahun 2025

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penentuan isu-isu pentinga diperlukan kecermatan dan ketepatan sehingga dapat menentukan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah pulosari serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan mempunyai fungsi penyelanggara urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Pulosari berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Cakupan layanan kecamatan
3. Nilai SAKIP
4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
5. Persentase pelayanan publik yang tersedia
6. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
7. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
8. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
9. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Isu-isu penting yang menjadi permasalah dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pulosari antara lain:

1. Belum Optimalnya pelaksaanaan pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
2. Masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang perencanaan.
3. Masih lemahnya peyediaan dan pengelolaan data.
4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur baik di tingkat kecamatan maupun pemerintah desa.
5. Diperlukan adanya pembaharuan Perbub No. 58 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Sentra Agribisnis Sayur dan kopi di Kecamatan Pulosari Kab. Pemalang Tahun 2019-2024 yang telah habis pada tahun 2024 sebagai pedoman Pembangunan perdesaan.

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pemalang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala

https://jdih.pemalangkab.go.id/

kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030, Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode RPJMD Tahun 2025-2030 adalah

"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP,HANDAL, MULYA"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. **Bersih** dimaknai Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi Dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA**: Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi Dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. Mulya ini juga menjadi Visi dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 Adil.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2030, yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.
4. Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan Good Governance, Clean Governance dalam konsep tata Kelola pemerintahan yang baik.
7. Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi

8. Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Keterkaitan pencapaian Visi dengan Misi adalah sebagai berikut:

Frase Bersih, Handal dalam Visi akan dicapai dengan Misi 1 Resik: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih; Misi 4 Peduli: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat; dan Misi 6 Organisatoris: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.

Frase Cakap dalam Visi akan dicapai dengan Misi 2 Hijau: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industry hijau yang berkelanjutan; Misi 3 Apik: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah dan Misi 7 Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

Frase MULYA dalam Visi akan dicapai dengan Misi 5 Silaturahmi: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera dan Misi 8 Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah ***"Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia"*** dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 adalah **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026, dengan prioritas pembangunan meliputi :

1. Memperkuat Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat serta daya saing sumberdaya manusia;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan;
3. Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern.
4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemertaan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.
5. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya pada pengelolaan sumberdaya air dan ke PU an.
6. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pemberian insentif pada pemilik sawah melalui akses pupuk murah, bibit berkualitas dan pendampingan untuk pasca panen.
7. Penguatan koperasi merah putih yang mampu menjadi mitra petani.
8. Mendorong BUMDES dan BUMDEsma dalam penguatan kemandirian pangan.
9. Penguatan cadangan pangan dan penguatan keaneragaman bahan serta keamanan pangan.
10. Peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.
11. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan kolaborasi pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana.
12. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pilah sampah dan pengelolaan kontrol landfiil TPA. Peningkatan pilah sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta, penguatan bank sampah.
13. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang mudah diakses masyarakat, persiapan sekolah rakyat, sekolah garuda, memperkuat sekolah inklusi dan kesetaraan dalam mendorong harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah. Penyediaan lokasi untuk pembangunan SMA/SMK dalam rangka mengurangi blankspot (wilayah tanpa SMA/SMK).
14. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan kesehatan.
15. Pelaksanaan Program Makan Bergizi pada anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada penyakit tidak menular. Penyediaan ambulan gratis dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal. Peningkatan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan tingkat kelahiran yang direncanakan, usia perkawinan yang semakin matang.
16. Peningkatan budaya masyarakat yang berkolaborasi dengan pariwisata

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mampu mendorong perekonomian daerah. Penguatan dan pemberdayaan kelompok kelompok seni dan budaya serta pelestarian cagar budaya.

17. Peningkatan perlindungan sosial pada PPKS terutama pada PPKS yang terlantar, penguatan rumah singgah dalam penanganan PPKS. Penguatan data penduduk miskin sehingga mampu menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan.
18. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan Good and Clean Government, peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan budaya kerja.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Pulosari tahun 2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pulosari adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kecamatan Pulosari mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good gavernance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Pulosari adalah :

1. Terbitnya Perubahan atas Undangan-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berakibat pada masa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Perencanaan di Pemerintahan Desa;
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
   - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

   Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.
3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Pulosari.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Pulosari ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Pulosari dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

3.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Pulosari. Renja Kecamatan Pulosari disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Pulosari.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

Kabupaten Pemalang

Perangkat Daerah : Kecamatan Pulosari

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				2.870.199.000					**3.007.135.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**SAKIP**	**39 Skor**	**2.666.763.500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Pulosari**	**SAKIP**	**39 Skor**	**2.636.758.500**	
		Prosentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**				**Prosentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun***	***14 Dokumen***	***30.356.500***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kec. Pulosari***	***Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun***	***14 Dokumen***	***30.356.500***	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.504.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.504.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.021.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.021.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.021.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.021.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.974.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.974.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.710.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.710.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	7.124.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	7.124.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun***	***26 Laporan***	***2.130.322.000***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun***	***26 Laporan***	***2.130.322.000***	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	2.120.199.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pulosari	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	2.120.199.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.248.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.248.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	7.194.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	7.194.500	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	680.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	680.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia***	***36 Paket***	***147.355.600***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kec. Pulosari***	***Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia***	***36 Paket***	***147.350.600***	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	9.315.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	9.315.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	88.989.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pulosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	88.989.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.021.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.016.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.620.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.620.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	33.410.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	33.410.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			***20.000.000***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Kec. Pulosari***			***35.000.000***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	15.000.000	kebutuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan, belum dapat dianggarkan untuk pembelian mebel dikarenakan katerbatasan anggaran
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pulosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah jasa penunjang urusan pemerintaah daerah yang tersedia***		***153.096.000***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah jasa penunjang urusan pemerintaah daerah yang tersedia***		***153.096.000***	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.696.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.696.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara***		***185.633.400***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Kec. Pulosari***	***Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara***		***140.633.400***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	93.800.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	93.800.400	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Pulosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara.Direhabilitasi	2 Unit	63.580.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pulosari	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara.Direhabilitasi	2 Unit	13.580.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	8.253.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	8.253.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	**94,44%**	**8.636.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelayanan publik yang tersedia**	**94,44%**	**9.652.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	***Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan***	***2 Dokumen***	***3.000.000***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di***	***Kec. Pulosari***	***Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan***	***2 Dokumen***	***4.016.000***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Tingkat Kecamatan				***Tingkat Kecamatan***					
	peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Masyarakat di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	3.000.000	peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Masyarakat di tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4.016.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang tersedia***	***25 Kewenangan***	***5.636.000***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Kec. Pulosari***	***Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan bupati kepada camat yang tersedia***	***25 Kewenangan***	***5.636.000***	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	12 Dokumen	2.920.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan yang dilaksanakan	12 Dokumen	2.716.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4 Laporan	2.716.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	4 Laporan	2.920.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase masyarakat desa yang aktif**	**100%**	**58.152.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase masyarakat desa yang aktif**	**100%**	**58.152.000**	
	Koordinasi Kegiatan	***Jumlah peserta musrenbang (Desa/Kelurahan+Kecamatan)***	***72 Orang***	***43.037.000***	***Koordinasi Kegiatan***	***Kec. Pulosari***	***Jumlah peserta musrenbang (Desa/Kelurahan+Kecamatan)***	***72 Orang***	***43.037.000***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemberdayaan Desa				***Pemberdayaan Desa***					
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	32.910.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	32.910.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.127.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.127.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya***	***1 Lembaga***	***15.115.000***	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***		***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya***	***1 Lembaga***	***15.115.000***	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.115.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pulosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.115.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**100%**	**12.250.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Pulosari**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**	**100%**	**12.250.000**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah Upaya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana***	***2 Kegiatan***	***12.250.000***	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		***Jumlah Upaya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana***	***2 Kegiatan***	***12.250.000***	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.000.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	6.250.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	6.250.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**100%**	**68.460.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Pulosari**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**100%**	**195.270.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang terlaksana***	***2 Kegiatan***	***68.460.500***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***		***Jumlah kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang terlaksana***	***2 Kegiatan***	***195.270.000***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	59.310.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Pulosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	186.120.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	9.150.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	9.150.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik**	**75%**	**55.937.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Pulosari**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik**	**75%**	**95.052.500**	
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan	***Jumlah Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana***	***12 Desa***	***55.937.000***	***Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan***		***Jumlah Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana***	***12 Desa***	***95.052.500***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengawasan Pemerintah Desa				***Pengawasan Pemerintah Desa***					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	6.648.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	6.648.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4.558.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	10.558.000	diperlukan peningkatan pembinaan dan Pengawasan terhadap administrasi tata pemerintahan desa dikarenakan masih banyak ditermukan Pemdes yang belum tertib administrasinya
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	2.551.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5.551.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	8.796.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	28.796.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Faslitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	12.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen Faslitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	-	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	2.157.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	4.470.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	4.470.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	4.470.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Kerja sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		-	Fasilitasi Kerja sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kec. Pulosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Dokumen	2.488.500	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	4.769.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	4.769.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	12 Laporan	2.145.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pulosari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	12 Laporan	2.145.000	
	Koordinas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan		-	Koordinas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	Diperlukan adanaya pembaharuan Perbub No. 58 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Sentra Agribisnis Sayur dan kopi di Kecamatan Pulosari Kab. Pemalang Tahun 2019-2024 yang telah habis pada tahun 2024

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah "**Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"** dengan prioritas pembangunan 2026 pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas danberkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun ketiga RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Peningkatan Kemandirian Masyarakat yang Bertumpu pada Penguatan Ekonomi Kearifan Lokal dan SDM yang berdaya Saing idukung dengan Infrastruktur yang merata**" dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
2. Fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan desa sinergi;
3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota;
4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;
5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak Covid

https://jdih.pemalangkab.go.id/

5.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kecamatan Pulosari dengan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Dan terhadap arah kebikan prioritas nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kecamatan pulosari yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

5.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pulosari

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulosari pada tahun 2026 adalah " **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulosari sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Meningkatnya Desa Mandiri (%).

3.2.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pulosari dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan selama tahun 2026, adalah **"Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah"** . Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil survey kepada Masyarakat pengguna layanan di kecamatan pulosari dan Indikator Nilai SAKIP OPD.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pulosari dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan		Persentase Meningkatnya Desa Mandiri (%)	%	25
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	Angka	87,25
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	Angka	60,82

5.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati terhadap pencapaian misi ke 2 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Pada tahun 2026, Kecamatan Pulosari merencakan program sebanyak 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dengan 61 (enam Puluh satu) Sub Kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.132.283.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PULOSARI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pulosari yang akan dilaksanakan pada tahun 2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
      d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
      b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
   c. Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait;
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
   2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
   3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga;
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
      c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
      d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
      b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
   g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
   i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
   j. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
   k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
   l. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
   m. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   n. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya;
   o. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang
Tahun 2026

Unit Organisasi : Kecamatan Pulosari
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Pulosari

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							**2.883.914.000**					**3.408.069.220**
7	01	01			KECAMATAN							**2.883.914.000**					**3.408.069.220**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**			**35,50 Skor**			**2.563.451.500**	**DAU**				**2.939.214.220**
7	**01**					**Prosentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah**			**100%**								
7	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Nilai SAKIP***	***Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun***	***Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu***	***35,50 Skor***	***32 Dokumen***	***100%***	***38.680.000***	***DAU***		***Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun***	***32 Dokumen***	***54.325.000***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								dan Sesuai Ketentuan									
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	39 Skor	2 Dokumen	100%	10.450.000	DAU		Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	35,50 Skor	1 Dokumen	100%	3.880.000	DAU		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	35,50 Skor	1 Dokumen	100%	1.500.000	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	35,50 Skor	1 Dokumen	100%	2.200.000	DAU		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	35,50 Skor	1 Dokumen	100%	1.500.000	DAU		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.945.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	35,50 Skor	4 Laporan	100%	7.200.000	DAU		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.880.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	35,50 Skor	4 Laporan	100%	6.400.000	DAU		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	12.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan									
7	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	35,50 Skor	1 Laporan	100%	5.550.000	DAU		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000
7	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Nilai SAKIP***	***Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun***	***Prosentase Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel***	***35,50 Skor***	***26 Laporan***	***100%***	***2.000.518.000***	***DAU***		***Jumlah Laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun***	***26 Laporan***	***2.221.026.020***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	35,50 Skor	20 Orang/ Bulan	100%	1.989.818.000	DAU		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	. 2.206.121.020
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	35,50 Skor	1 Laporan	100%	2.200.000	DAU		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.205.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Prosentase Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	35,50 Skor	12 Laporan	100%	7.800.000	DAU		Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Jumlah Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	12.000.000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prosentase Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	35,50 Skor	1 Dokumen	100%	700.000	DAU		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	700.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35,50 Skor		100%	34.653.000					57.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				35,50 Skor	40 Paket	100%	3.000.000					12.000.000
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35,50 Skor	20 Orang	100%	31.653.000					45.000.000
7	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)***	***Jumlah layanan umum administrasi perangkat daerah yang tersedia***	***Prosentase ketersediaan paket umum administrasi perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas***	***35,50 Skor***	***36 Paket***	***100%***	***156.909.500***	***DAU***		***Jumlah layanan umum administrasi perangkat daerah yang tersedia***	***36 Paket***	***160.060.000***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Prosentase ketersediaan paket administrasi umum	35,50 Skor	12 Paket	100%	4.998.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas									
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	35,50 Skor	12 Paket	100%	94.171.500	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prosentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	35,50 Skor	12 Paket	100%	16.440.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.440.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Prosentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	35,50 Skor	12 Dokumen	100%	1.680.000	DAU		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.620.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar	35,50 Skor	100 Laporan	100%	39.620.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	40.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								pelaksanaan tugas									
7	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)***	***Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia***	***Prosentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar tugas***	***36,50 Skor***	***3 Unit***	***100%***	***32.819.000***	***DAU***		***Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia***	***Unit***	***140.000.000***
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prosentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar tugas	36,50 Skor	1 Unit	100%	0	DAU		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Prosentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar tugas	36,50 Skor	2 Unit	100%	32.819.000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	40.000.000
7	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)***	***Jumlah jasa penunjang urusan pemerintaah daerah yang tersedia***	***Prosentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas***	***36,50 Skor***	***48 Laporan***	***100%***	***147.896.000***	***DAU***		***Jumlah jasa penunjang urusan pemerintaah daerah yang tersedia***	***0***	***154.696.000***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	36,50 Skor	50 Laporan	100%	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Prosentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	36,50 Skor	12 Laporan	100%	26.400.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prosentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	36,50 Skor	12 Laporan	100%	116.496.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	117.696.000
7	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)***	***Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara***	***Persentase Ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar tugas***	***36,50 Skor***		***100%***	***151.976.000***	***DAU***		***Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara***	***0***	***152.107.200***
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar tugas	36,50 Skor	16 Unit	100%	82.115.000	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	82.127.200
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase Ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar tugas	36,50 Skor	4 Unit	100%	2.000.000	DAU		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Ketersediaan barang milik daerah yang	36,50 Skor	10 Unit	100%	14.320.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	14.980.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								memperlancar tugas									
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar tugas	36,50 Skor	2 Unit	100%	53.541.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik yang tersedia**			**94,44%**	**94,44%**		**22.250.000**	**DAU**				**37.160.000**
7	***01***	***02***	***2.01***		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Persentase pelayanan publik yang tersedia***	***Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan***	***Persentase dokumen yang dipublikasikan di tingkat kecamatan***	***94,44%***	***12 Dokumen***	***100%***	***8.500.000***	***DAU***		***Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan***	***12 Dokumen***	***17.500.000***
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase dokumen yang dipublikasikan di tingkat kecamatan	94,44%	12 Laporan	100%	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	7.500.000
7	01	01	2.04	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2 Dokumen		3.500.000			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000
7	***01***	***02***	***2.04***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah***	***Persentase pelayanan publik yang tersedia***	***Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan SOP yang tersusun***	***Pesentase dokumen pelayanan berdasarkan pelimpahan kewengangan bupati kepada***	***94,44%***	***2 Dokumen***	***83,33%***	***8.200.000***	***DAU***		***Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat dan SOP yang tersusun***	***2 Dokumen***	***15.000.000***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					yang Ada di Kecamatan			***camat yang tersedia***									
7	01	02	2.01		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Pesentase dokumen pelayanan berdasarkan pelimpahan kewengangan bupati kepada camat yang tersedia	94,44%	1 Dokumen	83,33%	5.200.000	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	1 Dokumen	7.500.000
7	01	02	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pesentase dokumen pelayanan berdasarkan pelimpahan kewengangan bupati kepada camat yang tersedia	94,44%	4 Laporan	83,33%	3.000.000	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.500.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelimpahan kewenganan Bupati Kepada Camat			12 Laporan		5.550.000			Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelimpahan kewenganan Bupati Kepada Camat	12 Laporan	4.660.000
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan		2.500.000			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1.800.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan		3.050.000			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	2.860.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat desa yang berdaya**			**100%**			**72.747.500**	**DAU**				**93.695.000**
7	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Persentase masyarakat desa yang berdaya***	***Jumlah peserta musrenbang (Desa /Kelurahan + Kecamatan)***	***Prosentase dokumen kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun***	***100%***	***13 Dokuem/laporan***	***100%***	***43.075.000***	***DAU***		***Jumlah peserta musrenbang (Desa /Kelurahan + Kecamatan)***	***13 Dokuem/laporan***	***48.695.000***
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase masyarakat desa yang berdaya	Jumlah Dokumen Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Prosentase dokumen kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	100%	1 Dokumen	100%	33.325.000	DAU		Jumlah Dokumen Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	38.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat desa yang berdaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase dokumen kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	100%	12 Laporan		9.750.000	DAU		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.695.000
7	***01***	***03***	***2.03***		***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	***Persentase masyarakat desa yang aktif***	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya***	***Prosentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang terlaksana***	***100%***	***2 Lembaga***	***100%***	***15.197.500***	***DAU***		***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya***	***1 Lembaga***	***20.000.000***
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Prosentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat	100%	1 Lembaga Kemasyarakatan	100%	5.000.000	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								kecamatan yang terlaksana									
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase masyarakat desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Prosentase Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang terlaksana	100%	1 Lembaga Kemasyarakatan	100%	10.197.500	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah keluarga peserta program pemberdayaan			160 Keluarga		14.475.000			Jumlah keluarga peserta program pemberdayaan		25.000.000
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			40 Keluarga		10.000.000			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		15.000.000
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			30 Keluarga		2.375.000			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		5.000.000
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			30 Keluarga		2.100.000			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		5.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan**			**100%**			**10.000.000**	**DAU**				**20.000.000**
7	***01***	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan***	***Jumlah Upaya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana***	***Prosentase jenisLaporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan***	***100%***	***12 Laporan***	***100%***	***10.000.000***	***DAU***		Jumlah Upaya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	12 Laporan	***20.000.000***
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase jenisLaporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	12 Laporan	100%	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarkat	Prosentase jenisLaporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	4 Laporan	100%	5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarkat	4 Laporan	10.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**	**Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani**		**100,00 %**	**1**		**152.825.000**	**DAU**		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	1	**163.000.000**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani***	***Jumlah kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang terlaksana***	***Prosentase Masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dam ketahanan nasional serta seni dan budaya lokal***	***2 Kegiatan***	***15 Dokumen/ Laporan***	***100%***	***152.825.000***	***DAU***		Jumlah kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang terlaksana	15 Dokumen/ Laporan	***163.000.000***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase Masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dam ketahanan nasional serta seni dan budaya lokal	200 Orang	200 Orang	100%	143.575.000	DAU		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	150.000.000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dam ketahanan nasional serta seni dan budaya lokal	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	9.250.000	DAU		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	13.000.000
7	**01**	**05**	**2.01**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik**			**75,00%**	**0,75**		**62.640.000**	**DAU**		0	0,75	**155.000.000**
7	***01***	***05***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa***	***Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik***	***Jumlah Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana***	***Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada***	***75,00%***	***121 Dokumen***	***75,00%***	***62.640.000***	***DAU***		Jumlah Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana	121 Dokumen	***155.000.000***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								tahun berkenaan									
7	01	05	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	12 Dokumen	75,00%	6.100.000	DAU		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12.000.000
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	12 Dokumen	75,00%	9.600.000	DAU		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12.000.000
7	01	05	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	12 Dokumen	75,00%	3.500.000	DAU		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	6.000.000
7	01	05	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding	75,00%	2 Dokumen	75,00%	7.200.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	50.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								target pada tahun berkenaan									
7	01	05	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Faslitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	8 Dokumen	75,00%	7.750.000	DAU		Jumlah Dokumen Faslitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Dokumen	8.000.000
7	01	05	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	12 Dokumen	75,00%	4.300.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12.000.000
7	01	05	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	5 Dokumen	75,00%	1.440.000	DAU		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	5.000.000
7	01	05	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada	75,00%	12 Dokumen	75,00%	4.050.000	DAU		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	6.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								tahun berkenaan									
7	01	03	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			1 Dokumen		3.600.000			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	5.000.000
7	01	03	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			12 Dokumen		2.000.000			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	6.000.000
7	01	05	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	1 Dokumen	75,00%	2.600.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	6.000.000
7	01	05	2.01	0014	Fasilitasi Kerja sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	12 Dokumen	75,00%	2.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Dokumen	5.000.000
7	01	05	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding	75,00%	12 Dokumen	75,00%	3.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	6.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode					Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								target pada tahun berkenaan									
7	01	05	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	12 Laporan	75,00%	2.500.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	12 Laporan	6.000.000
7	01	05	2.01	0018	Koordinas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang di capai dibanding target pada tahun berkenaan	75,00%	6 Laporan	75,00%	3.000.000			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	10.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah:

1. Renja Kecamatan Pulosari merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Pulosari Tahun 2025-2030 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Pulosari memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Pulosari secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Pulosari Tahun 2026.

CAMAT PULOSARI

AGUS MULYADI, S.IP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19790817 199803 1 004

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NN. RENCANA KERJA KECAMATAN BELIK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Belik tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Belik yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Belik merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Belik yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Belik melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025. Renja Kecamatan Belik dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Belik mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Belik mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Belik dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Belik untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Belik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Belik tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Belik tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi se Kecamatan Belik
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Belik tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Belik
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Puskesmas Belik, UPJI Wilayah Belik, Kepolisian Sektor Kecamatan belik, Koramil 11 Belik, Pemerintah Desa se-Kecamatan Belik, LSM/Tokoh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Belik tahun 2025
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Belik
Tahun 2025

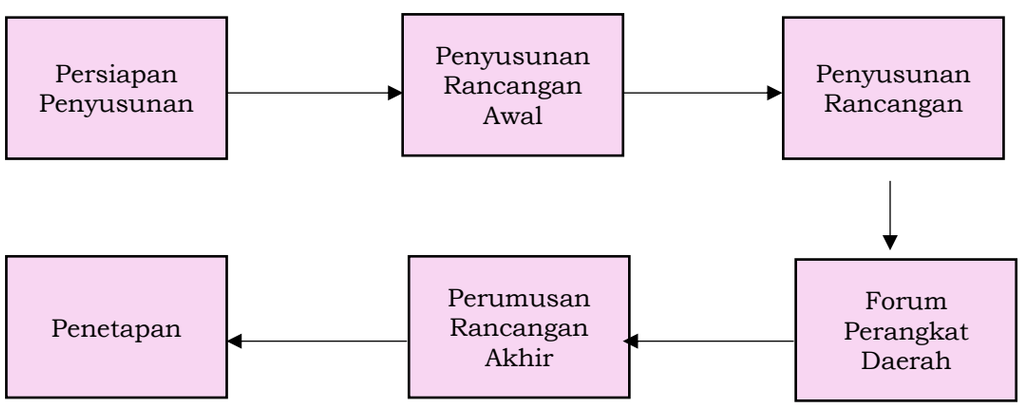

Renja Kecamatan Belik tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Belik tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

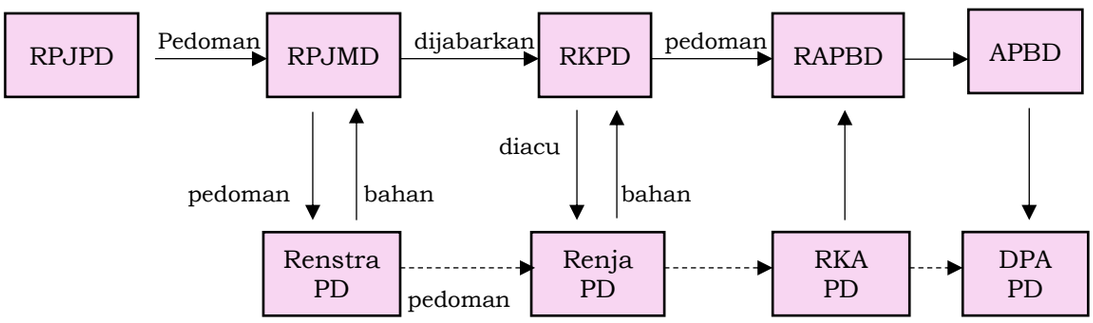

Renja Kecamatan Belik berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Belik tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Belik tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Belik adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Belik tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Belik sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Belik;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Belik tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Belik tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Belik Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Belik tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2025 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Belik, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Belik, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Belik, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Belik, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Belik, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Belik, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Belik beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Belik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BELIK TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Belik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Belik

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Belik pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Belik sebesar Rp 2.894.548.000 yang terbagi dalam 6 program, 15 kegiatan dan 50 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 2.723.345.888 atau sebesar 94,09 %.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Belik sebesar Rp 2.960.548.000 yang terbagi dalam 6 program, 17 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.2223.977.620 atau sebesar 43.16 %.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Belik telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih sedang.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Belik telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Ada 2 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Ada 5 Program, 15 Kegiatan dan 52 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Ada 0 Program, 0 Kegiatan dan 0 Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Efisiensi penggunaan listik, telepon, dan internet sesuai dengan program penghematan energi sehingga anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak dapat terserap 100% atau diserap sebesar 84,99 % atau dapat di hemat sebesar 15,01 %
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Belik yaitu tercapai di tahun 2024;
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Perencanaan dan Penganggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
   b. Lebih cermat dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga serapan anggaran sesuai denga napa yang telah di rencanakan.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Belik dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang sebagai berikut

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Belik dan Pencapaian Renstra Kecamatan Belik s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
'7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	117,03		39,01		0,00	42,01		0,00
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	123,03		40,01		0,00	45,01		0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	*42*	13	16	16	100	13	42	100
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	***Dokumen***	***39***	***13***	***13***	***13***	***100***	***13***	***39***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		perangkat daerah yang tersusun									
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	9	3	4	4	100	2	9	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Dokumen***	***12***	***4***	***4***	***4***	100	***4***	12	100
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	12	4	4	4	100	4	12	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Dokumen RKA SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	***Dokumen***	***3***	***1***	***1***	***1***	100	***1***	3	100
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	***Dokumen***	***3***	***1***	***1***	***1***	100	***1***	3	100
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	***Dokumen***	***3***	***1***	***1***	***1***	100	***1***	3	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	***Dokumen***	***3***	***1***	***1***	***1***	100	***1***	3	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	9	3	3	3	100	3	9	100
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Laporan***	***9***	***3***	***3***	***3***	100	***3***	9	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	2	2	2	100	2	6	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Laporan***	***6***	***2***	***2***	***2***	100	***2***	6	100
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	54	18	18	18	100	18	54	100
		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	***Laporan***	***54***	18	18	18	***100***	***18***	***54***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	Orang/ bulan	17/42	17/14	17/14	17/14	100	17/14	17/42	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	***Orang/ bulan***	***17/42***	***17/14***	***17/14***	***17/14***	***100***	***17/14***	***17/42***	***100***
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Dokumen*	36	*12*	*12*	*12*	100	***12***	36	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	***Dokumen***	36	***12***	***12***	***12***	100	***12***	36	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	***Laporan***	3	***1***	***1***	***1***	100	***1***	3	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan	14	***4***	***4***	***4***	100	***6***	14	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	***Laporan***	14	***4***	***4***	***4***	100	***6***	14	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	***1***	***1***	***1***	100	***1***	3	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	***Dokumen***	3	***1***	***1***	***1***	100	***1***	3	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	12	4	4	4	100	4	12	100
		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***Dokumen***	***249***	***116***	***66***	***66***	***100***	***67***	***249***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis/ bulan	4/36	4/12	3/12	3/12	100	4/12	4/36	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	***Paket***	***11***	***4***	***3***	***3***	***100***	***4***	***11***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis/ bulan	25/36	2/12	25/12	25/12	100	25/12	25/36	100
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	***Paket***	***52***	***2***	***25***	***25***	***100***	***25***	***52***	***100***
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis/ bulan	2/36	2/12	2/12	2/12	100	2/12	2/36	100
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Lembar	5612	2000	1806	1806	100	1806	5612	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	***Paket***	***6***	***2***	***2***	***2***	***100***	***2***	***6***	***100***
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kegiatan	180	108	36	36	100	36	180	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Laporan***	***180***	***108***	***36***	***36***	***100***	***36***	***180***	***100***
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pemerintah Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	10	0	6	6	100	4	10	100
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***Unit***	***10***	***0***	***6***	***6***	***100***	***4***	***10***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	10	0	6	6	100	4	10	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	***Unit***	***10***	***0***	***6***	***6***	***100***	***4***	***10***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	12	4	4	4	100	4	12	100
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	***Laporan***	***156***	***36***	***48***	***48***	***100***	***72***	***156***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Surat	2400	800	800	800	100	800	2400	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Laporan***	***36***	***12***	***12***	***12***	***100***	***12***	***36***	***100***
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi,SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan	Jenis/ bulan	3/36	3/12	3/12	3/12	100	3/12	3/36	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	***Laporan***	***60***	***12***	***12***	***12***	***100***	***36***	***60***	***100***
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Jenis/ bulan	17/24	0	17/12	17/12	100	3/12	3/24	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	***Laporan***	***24***	***0***	***12***	***12***	***100***	***12***	***24***	***100***
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Orang/ bulan	9/36	9/12	9/12	9/12	100	10/12	10/36	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	***Laporan***	***36***	***12***	***12***	***12***	***100***	***12***	***36***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Kantor yang Disediakan									
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	63	19	22	22	100	22	63	100
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	***Unit***	***63***	***19***	***22***	***22***	***100***	***22***	***63***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berijin dan terpelihara	Unit	48	16	16	16	100	16	48	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	***Unit***	***48***	***16***	***16***	***16***	***100***	***16***	***48***	***100***
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	6	0	3	3	100	3	6	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	***Unit***	***6***	***0***	***3***	***3***	***100***	***3***	***6***	***100***
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	9	3	3	3	100	3	9	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	***Unit***	***9***	***3***	***3***	***3***	***100***	***3***	***9***	***100***
7.01.02	Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%	279,99	93,33	93,33	93,33	100,00	99,62	99,62	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	Keluaran Kegiatan	Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan	Data	10	0	5	5	100	5	10	100
		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	***Dokumen***	***10***	***0***	***5***	***5***	***100***	***5***	***10***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	290	95	100	100	100	95	290	100
		Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	***%***	***290***	***95***	***100***	***100***	***100***	***95***	***290***	***100***
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang tersedia	Data	10	0	5	5	100	5	10	100
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Dokumen***	***10***	***0***	***5***	***5***	***100***	***5***	***10***	***100***
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Kasus	10	0	5	5	100	5	10	100
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	***Dokumen***	***42***	***0***	***21***	***21***	***100***	***21***	***42***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	**%**	***300***	**100**	**100**	**100**	***100***	**100**	***300***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		yang ada di kecamatan yang tersusun									
7.01.0 2.2.02. 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	Peraturan	20	0	10	10	100	10	20	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	***Dokumen***	***20***	***0***	***10***	***10***	***100***	***10***	***20***	***100***
7.01.0 2.2.02. 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	Layanan	12	0	6	6	100	6	12	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	***Laporan***	***12***	***0***	***6***	***6***	***100***	***6***	***12***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	Kasus	10	0	5	5	100	5	10	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	***Laporan***	***10***	***0***	***5***	***5***	***100***	***5***	***10***	***100***
7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar limpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kewenangan	21	7	7	7	100	7	21	100
		Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***Dokumen***	***445***	***215***	***115***	***115***	***100***	***115***	***445***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	225	75	75	75	100	75	225	100
		Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	***%***	***225***	***75***	***75***	***75***	***100***	***75***	***225***	***100***
7.01.0 2.2.04. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Izin	400	200	100	100	100	100	400	100
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	***Dokumen***	***400***	***200***	***100***	***100***	***100***	***100***	***400***	***100***
7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	Dokumen	45	15	15	15	100	15	45	100
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	Surat	40	0	20	20	100	20	40	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	***Laporan***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***
7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	300	100	100	100	100	100	300	100,00
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan	Orang	250	75	100	100	100	75	250	100
		Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***Dokumen***	***31***	***17***	***7***	***7***	***100***	***7***	***31***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran musyawarah pembangunan (Desa/Kel+Kec)	%	300	100	100	100	100	100	300	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Orang	70	15	30	30	100	25	70	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	***Lembaga kemasyarakatan***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***
7.01.0 3.2.01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang	250	75	100	100	100	75	250	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	***Dokumen***	***3***	***1***	***1***	***1***	***100***	***1***	***3***	***100***
7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang kab yang didampingi	Desa/ kelurahan	***33***	15	3	3	***100***	15	***33***	***100***
		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	Lembaga	***6***	0	5	5	***100***	1	***6***	***100***
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	***Laporan***	***25***	***15***	***5***	***5***	***100***	***5***	***25***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
7.01.04.2.01	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah gangguan keamanan ketertiban yang tertangani	satuan	100	0	50	50	100	50	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***Laporan***	***2***	***0***	***1***	***1***	***100***	***1***	***2***	***100***
	Hasil Kegiatan	Prsentase gangguan keamanan ketertiban yang tertangani	%	300	100	100	100	100	100	300	100
		Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan keamanan ketertiban yang tertangani	satuan	100	0	50	50	100	50	100	100
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	***Laporan***	***2***	***0***	***1***	***1***	***100***	***1***	***2***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
7.01.0 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	Peraturan	20	0	10	10	100	10	20	100
		Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***Laporan***	***20***	***0***	***10***	***10***	***100***	***10***	***20***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya	%	300	100	100	100	100	100	300	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.0 4.2.02. 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Perda dan Perbub yang dimonitoring	Peraturan	20	0	10	10	100	10	20	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	***Laporan***	***20***	***0***	***10***	***10***	***100***	***10***	***20***	***100***
7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	300	100	100	100	100,00	100	300	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Pemerintahan Umum										
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Orang	90	30	30	30	100	30	90	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***Dokumen***	***15***	***3***	***6***	***6***	***100***	***6***	***15***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	300	100	100	100	100	100	300	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	***%***	***300***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***300***	***100***
7.01.05.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten yang dilaksanakan	Dokumen	8	2	3	3	100	3	8	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	***Orang***	***90***	***30***	***30***	***30***	***100***	***30***	***90***	***100***
7.01.0 5.2.01. 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Orang	90	30	30	30	100	30	90	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	***Orang***	***90***	***30***	***30***	***30***	***100***	***30***	***90***	***100***
7.01.0 5.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	Tema	4	0	2	2	100	2	4	100
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	***Dokumen***	***4***	***0***	***2***	***2***	***100***	***2***	***4***	***100***
7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	233,33	73,33	80	80	100,00	80	233,33	100,00
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	Desa	40	10	15	15	100	15	40	100
		Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***Dokumen***	***331***	***110***	***111***	***111***	***100***	***110***	***331***	***100***
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	235	75	80	80	100	80	235	100
		Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	***%***	***235***	***75***	***80***	***80***	***100***	***80***	***235***	***100***
7.01.0 6.2.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Desa/ kegiatan	45	15	15	15	100	15	45	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	***Dokumen***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***
7.01.0 6.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Desa/ kegiatan	45	15	15	15	100	15	45	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	***Dokumen***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***
7.01.0 6.2.01. 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Desa/ kegiatan	45	15	15	15	100	15	45	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	***Dokumen***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
7.01.0 6.2.01. 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Orang/ kegiatan	135	45	45	45	100	45	135	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	***Dokumen***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***
7.01.0 6.2.01. 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa	1	0	1	1	100	0	1	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	***Dokumen***	***1***	***0***	***1***	***1***	***100***	***0***	***1***	***100***
7.01.0 6.2.01. 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Orang/ kegiatan	90	30	30	30	100	30	90	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	***Dokumen***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***
7.01.0 6.2.01. 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Surat	12	4	4	4	100	4	12	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	***Dokumen***	***12***	***4***	***4***	***4***	***100***	***4***	***12***	***100***
7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa/ kegiatan	45	15	15	15	100	15	45	100
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	***Dokumen***	***45***	***15***	***15***	***15***	***100***	***15***	***45***	***100***

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2022 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4*100%)
		dengan Pembangunan Desa									

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Belik Tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi Tahun 2025 dan 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Belik

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		85,31	86,31	87,31	87,31	87,31	87,31	87,31	87,31	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		94,07	96,02	96,31	96,31	96,31	96,31	96,31	98,27	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				42,01	45,01	48,01	48,01	48,01	48,01	48,01	51,1	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai				45,01	45,01	48,01	48,01	57,13	66,72	60,5	60,5	
5	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%				87,00	88,44	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89	91,33	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%				100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%				83,33	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,90	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Belik

Kecamatan Belik adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Belik berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Cakupan layanan kecamatan
c. Nilai SAKIP
d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2024 IKM Kecamatan Belik sebesar 86,231 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Belik. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Belik meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2024, cakupan layanan Kecamatan Belik tersebut mencapai 97 % dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Belik meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 19 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 63,33%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100%, perlu didorong pula partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Belik. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 75% yaitu sebanyak 9 desa dari 13 desa di Kecamatan Belik. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu

https://jdih.pemalangkab.go.id/

sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Belik.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2024, Kecamatan Belik mendapat nilai SAKIP sebesar 66,72(kategori B) dan IRB sebesar 53,01 (kategori B) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Belik untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Belik perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Belik untuk mendukung pencapaian program prioritas RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Belik yaitu :

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa dan kecamatan
e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Belik juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan
f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Belik justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

https://jdih.pemalangkab.go.id/

“Pemalang Bercahaya – Bersih Cakap Handal Mulya”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

Resik

Menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.

Hijau

Meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui ndustry hijau yang berkelanjutan.

Apik

Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.

Peduli

Meningkatkan Pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan

masyarakat .

Silaturahmi

Meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan

sejahtera.

Organisatoris

Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur,sistematis, melayani dan

mengayomi

Digitalisasi

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan

kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi yang menjadi generasi yang pintar.

Ikhlas

Menghadirkan Kembali kehidupan spiritual, kearifan, Bahasa dan budaya local

masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) program unggulan, yaitu :

1. Seragam sekolah dan LKS gratis

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Merupakan program pemberian seragam sekolah dan LKS gratis untuk siswa di tingkat PAUD, SD, dan SMP pada tahun ajaran baru dengan tujuan mengurangi pengeluaran biaya pendidikan.

2. Jalan halus dan merata

Merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan kabupaten dan kelengkapannya yang memiliki banyak kerusakan agar menjadi halus dan pembangunannya merata di semua wilayah, sehingga nyaman dan aman untuk dilalui oleh pengguna jalan. Program ini dapat berbentuk rekonstruksi, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin jalan.

3. Revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu sampai hilir

Merupakan program upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih yang tersedia bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari sumber air di hulu (mata air, sungai, danau hutan dll) hingga distribusi air di hilir (rumah tangga, industri, pertanian dll). Upaya tersebut meliputi beberapa aspek seperti perlindungan sumber air, pemeliharaan infrastruktur, pengawasan kualitas air, partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga serta penerapan teknologi dan inovasi.

4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya

Merupakan strategi penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan sebagainya) melalui program pembangunan pemerintah daerah yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja sehingga tercapai penurunan pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Program pembangunan tersebut akan diarahkan pada proyek-proyek yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti:
Pembangunan jalan/jembatan sederhana, revitalisasi saluran

https://jdih.pemalangkab.go.id/

drainase, perbaikan saluran irigasi, bersih- bersih sungai/saluran irigasi dan kegiatan yang sejenisa lainnya.

5. Bantuan modal usaha untuk UMKM

Merupakan program dukungan yang diberikan pemerintah atau lembaga keuangan terkait kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Bantuan ini bisa berupa dana tunai, akses permodalan dengan bunga rendah, atau program pelatihan bisnis. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. WIFI gratis tiap desa

Merupakan upaya pemerintah aerah dalam hal pemberian akses internet nirkabel yang disediakan secara gratis (tanpa biaya) kepada semua masyarakat perdesaan. Pada akhirnya seluruh desa terkoneksijaringan internet, meningkatkan aksesibilitas internet dan mengurangi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.

7. Satu ambulance, satu desa

Merupakan program yang bertujuan untuk memastikan setiap desa/kelurahan memiliki fasilitas transportasi medis, dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. Program ini memiliki tujuan utama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan pelayanan publik di daerah perdesaan.

8. Jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah

Merupakan strategi dalam mengukuhkan posisi Kabupaten Pemalang sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah dan menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Pemalang dengan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Jaminan ketersediaan bibit unggul tidak terikat hanya untuk komoditas padi tetapi juga untuk

https://jdih.pemalangkab.go.id/

komoditas perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Sedangkan jaminan ketersediaan pupuk murah bertujuan untuk memastikan petani di Kabupaten Pemalang memiliki akses mudah dan murah terhadap pupuk yang berkualitas sesuai data Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).

9. Bantuan kendaraan operasional pondok pesantren

Pemberian kendaraan operasional untuk pondok pesantren dalam mendukung berbagai aktivitas pendidikan, pengajaran, dakwah. Dimana keberadaan pondok pesantren ini memiliki peran penting dalam menjaga moral dan nilai-nilai di tengah masyarakat.

10. Insentif untuk guru, TPQ, Madin dan Marbot

Pemberian insentif atau bantuan honorarium untuk guru di satuan pendidikan dasar serta guru di lingkungan TPQ, Madrasah Diniyah dan petugas di lingkungan Masjid (Marbot) dengan tujuan untuk memberikan tambahan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

11. Santuan kematian Rp 3.000.000

Merupakan program pemberian bantuan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan akibat meninggalnya seseorang untuk meringankan beban finansial dan sosial yang ditimbulkan dari kematian tersebut. Bantuan ini dapat berupa uang tunai atau bentuk lain yang bermanfaat. Target utama program ini adalah masyarakat miskin yang terdata pada DTKS atau DTSEN serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Pekerja Rentan. Program ini akan melibatkan Dinas yang membidangi urusan Sosial terkait data DTKS atau DTSEN dan Dinas yang membidangi urusan Tenaga Kerja untuk MBR/Pekerja Rentan.

12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka

Program yang bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat dalam rangka

https://jdih.pemalangkab.go.id/

membuka pintu tol baru yang ada di Kabupaten Pemalang sehingga semakin memudahkan akses menuju wilayah Kabupaten Pemalang serta meningkatkan peluang investasi dan perekonomian.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Pemalang mendukung misi keempat Peduli yaitu "Meningkatkan Pemerintahan yang kuat, cerdas,peduli dan milik semua lapisan masyarakat" dan Misi ketujuh Organisatoris yaitu "Meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur,sistematis, melayani dan mengayomi" yang dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatnya reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan public yang baik dengan indikator kinerja Nilai Sakip, Maturitas SPIP dan Indeks Pelayanan Publik. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Pemalang mendukung program unggulan tersebut dengan melaksanakan program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Disesuaikan dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026 adalah **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 adalah **"Penguatan ekonomi melalui ketahanan pangan nasional,Peningkatan kualitas sumber manusia (SDM)"**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026, diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"**, dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 difokuskan pada :

a. Mewujudkan misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
b. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dab merata.
c. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
d. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
e. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Kecamatan Pemalang mendukung prioritas pembangunan penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan dengan menciptakan suasana kerja yang resik baik di lingkungan maupun di tata kelola pemerintahan, ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah, pembinaan PKK dan Posyandu, penurunan angka stunting, memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan semakin meningkatkan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan di desa dan kelurahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kecamatan Pemalang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal

.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Belik. Renja Kecamatan Belik disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Belik.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN					**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	KECAMATAN	**Kecamatan Belik**			**3.054.939.000**	**KECAMATAN**	**Kecamatan Belik**			**3.054.939.000**	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Belik**			**2.820.111.250,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Belik**			**2.820.111.250,00**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**		**16.741.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**		**16.741.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang	2 Dokumen	3.361.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.361.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			disusun (dokumen)								
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun (dokumen)	1 Dokumen	2.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.250.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	1 Dokumen	2.590.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.590.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang	1 Dokumen	2.237.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 dokumen	2.237.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			disusun (dokumen)					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun (dokumen)	1 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**		2.161.144.500,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)**		2.161.144.500,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Belik	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan	18 orang/bulan	2.142.321.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Belik	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangannya (orang/bulan)	18 orang/bulan	2.142.321.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			tunjangannya (orang/bulan)								
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12 Dokumen	6.125.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12 Dokumen	6.125.500,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (dokumen)	1 Laporan	3.150.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (dokumen)	1 Laporan	3.150.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun (dokumen)	16 Laporan	8.048.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun (dokumen)	16 Laporan	8.048.000,00	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kecamatan Belik	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang	1 Dokumen	1.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Kecamatan Belik	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang	1 Dokumen	1.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Realisasi Anggaran		disusun (dokumen)			Realisasi Anggaran		disusun (dokumen)			
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun (laporan)**		**2.700.000**					**2.700.000**	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	2 Dokumen	1.807.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	2 Dokumen	1.807.000,00	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Belik	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	2.286.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Belik	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Laporan	2.286.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 Laporan	2.500.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 Laporan	2.500.000,00	
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)**		4.400.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)**		4.400.000,00	
I	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Belik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang/kegiatan)	27 Orang	4.400.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Belik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang/kegiatan)	27 Orang	4.400.000,00	
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang**		276.933.600,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang**		276.933.600,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			tersedia (layanan)					tersedia (layanan)			
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Belik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.998.000,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Belik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.998.000,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Belik	Jumlah Paket Perakatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 uni	56.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Belik	Jumlah Paket Perakatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 uni	56.000.000,00	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Belik	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis)	6 paket	700.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Belik	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (jenis)	6 paket	700.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Belik	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis)	3 Paket	136.355.600,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Belik	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis)	3 Paket	136.355.600,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Belik	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis)	2 Paket	6.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Belik	Jenis barang cetakan yang tersedia (jenis)	2 Paket	6.500.000,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Belik	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis)	1 Dokumen	1.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Belik	Jenis surat kabar yang tersedia (jenis)	1 Dokumen	1.680.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (orang/keg)	200 laporan	70.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Belik	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi (orang/keg)	200 laporan	70.700.000	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Belik	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata (jenis)	Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Belik	Jenis arsip dinamis SKPD yang tertata (jenis)	Dokumen		
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (unit)**		36.400.000,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah barang milik daerah yang tersedia (unit)**		36.400.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Belik	Jumlah paket mebel yang disediakan	9 Unit	36.400.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Belik	Jumlah paket mebel yang disediakan	9 uni	36.400.000,00	
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**		**178.018.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**		**178.018.000**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Belik	Jumlah surat dinas yang dikirim dengan baik (surat)	75 Laporan	15.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Belik	Jumlah surat dinas yang dikirim dengan baik (surat)	75 Laporan	15.400.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Belik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (rekening/bulan)	3 Laporan	20.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Belik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan (rekening/bulan)	3 Laporan	20760000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Belik	Jumlah SDM Non PNS kebersihan kantor yang dibayar tiap bulan	12 Laporan	141858000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Belik	Jumlah SDM Non PNS kebersihan kantor yang dibayar tiap bulan	12 Laporan	141858000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**		139.881.150,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)**		139.881.150,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Belik	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara (unit)	16 Unit	139.881.150,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Belik	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara (unit)	16 Unit	139.881.150,00	
2	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Belik	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10 unit	4.500.000	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Belik	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10 unit	4.500.000	
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Belik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (unit)	12 Unit	8.030.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Belik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara (unit)	12 Unit	8.030.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Belik	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 Unit	99.333.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Belik	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 Unit	99.333.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Belik**	**Prosentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		21.759.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Belik**	**Prosentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		21.759.000,00	
IX	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Belik**	**Jenis data pemerintahan yang dipublikasi**		**10.400.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Belik**	**Jenis data pemerintahan yang dipublikasi**		**10.400.000**	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Belik	Jenis data pemerintahan yang tersedia	12 Dokumen	**10.400.000**	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Belik	Jenis data pemerintahan yang tersedia	12 Dokumen	**10.400.000**	
X	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani (kasus)**		6.250.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani (kasus)**		6.250.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.150.000,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.150.000,00	
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1.500.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1.500.000,00	
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani (kasus)	8 Laporan	2.600.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani (kasus)	8 Laporan	2.600.000,00	
XI	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan**		5.109.000,00	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan**		5.109.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Dilimpahkan kepada Camat		**Bupati kepada Camat yang tersedia**			**kepada Camat**		**Bupati kepada Camat yang tersedia**			
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Belik	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan (izin)	**12 dokumen**	5.109.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Belik	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan (izin)	12 dokumen	5.109.000,00	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Belik	Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	12 laporan	3.898.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Belik	Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	12 laporan	3.898.000,00	
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Belik**	**Prosentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		72.965.000,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Belik**	**Prosentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		72.965.000,00	
XII	**Koordinasi Kegiatan**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah peserta Musrenbang (Desa +**		42.495.000,00	**Koordinasi Kegiatan**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah peserta Musrenbang (Desa +**		42.495.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemberdayaan Desa		**Kecamatan) (orang)**			**Pemberdayaan Desa**		**Kecamatan) (orang)**			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Belik	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa	6 lembaga kemasyarakatan	5.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Belik	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa	6 lembaga kemasyarakatan	5.000.000,00	
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1 Dokumen	34.895.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1 Dokumen	34.895.000,00	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	1 Laporan	2.600.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	1 Laporan	2.600.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)			
XIII	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina**		30.470.000,00	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina**		30.470.000,00	
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Belik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina	6 lembaga	30.470.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Belik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina	6 lembaga	30.470.000,00	
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Belik**	**Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani**		12.213.000,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Belik**	**Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani**		12.213.000,00	
XIV	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	**Kecamatan Belik**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		5.990.000,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**	**Kecamatan Belik**	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara		5.990.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dan Ketertiban Umum		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)			**Ketertiban Umum**		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)			
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	5.990.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Laporan	5.990.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	**Kecamatan Belik**	**Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasika**	**1 peraturan**	6.223.000,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	**Kecamatan Belik**	**Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan**	**1 peraturan**	6.223.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peraturan Kepala Daerah		**n penegakkannya**			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**penegakkannya**			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1 Laporan	6.223.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Belik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1 Laporan	6.223.000	
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Belik**	**Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**		60.250.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Belik**	**Prosentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		60.250.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penugasan Kepala Daerah								
XV	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**		60.250.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**		60.250.000,00	
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Kecamatan Belik	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	300 orang	54.900.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Kecamatan Belik	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	300 orang	54.900.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	4 Dokumen	5.350.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Belik	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	4 Dokumen	5.350.000,00	
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Belik**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik di Kecamatan Belik**		67.640.750,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Belik**	**Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik di Kecamatan Belik**		67.640.750,00	
XVI	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik**		67.640.750,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Belik**	**Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik**		67.640.750,00	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan	13 Dokumen	4.835.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan	13 Dokumen	4.835.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dan Peraturan Kepala Desa		Perdes dan Perkades			Peraturan Kepala Desa		Perdes dan Perkades			
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	13 Dokumen	10.532.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	13 Dokumen	10.532.000,00	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	13 Dokumen	11.428.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	13 Dokumen	11.428.000,00	
4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Belik	Jumlah kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan yang dilaksanakan	3 Laporan	3.000.000,00	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Belik	Jumlah kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan yang dilaksanakan	3 Laporan	3.000.000,00	
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Belik	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	4.522.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Belik	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	4.522.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Belik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	10.000.000,00	
7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Belik	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (orang/kegiatan)	1 Dokumen	4.090.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Belik	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (orang/kegiatan)	1 Dokumen	4.090.000,00	
8	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) (desa/kegiatan)	12 Dokumen		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) (desa/kegiatan)	12 Dokumen		
9	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Belik	Jumlah monitoring kegiatan PPKM skala mikro	13 Dokumen	8.253.750,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Belik	Jumlah monitoring kegiatan PPKM skala mikro	13 Dokumen	8.253.750,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Rencangan Awal RKPD					Rencana Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
10	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	13 Dokumen	4.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Belik	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	13 Dokumen	4.500.000,00	
11	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Belik	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa (orang/kegiatan)	13 Dokumen	6.480.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Belik	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa (orang/kegiatan)	13 Dokumen	6.480.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Belik yang merupakan usulan dari masyarakat hasil musrenbang kecamatan.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

NO	DESA	USULAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER ANGGARAN	
					APBD	NON APBD
KEGIATAN FISIK						
1	GOMBONG	Rabat Jalan Pertanian	Dusun Kandang Gotong, RT.05/RW.01, Desa Gombong	(2,5 x 210 x 0,15) m	110.500.000	
2	BELIK	Pengaspalan Jalan	Dusun Rimpak,RT.03/RW.06,Desa Belik	(3 x 235) m	106.000.000	
3	GUNUNGTIGA	Rabat Jalan Pertanian	Dusun II, Dukuh Kenteng, RT.07/RW.03, Desa Gunungtiga	(3 x 168 x 0,15) m	106.000.000	
4	KUTA	Telford	Dukuh Gampeng, Dusun Kuta Kidul, RT.17/RW.04, Desa Kuta	(3 x 420 x 0,2) m	112.500.000	
5	BADAK	Rabat Jalan Pertanian	Dusun Situmpeng, RT.04/RW.07, Desa Badak	(3 x 177 x 0,15) m	112.000.000	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

6	GUNUNGJAYA	Rabat Jalan Pertanian	Dukuh Kopijemi, Dusun Penyawungan, RT.02/RW.09, Desa Gunungjaya	(3 x 169 x 0,15) m	106.500.000	
7	BELUK	Pengaspalan Jalan	Jalan Poros Desa Dukuh Kalitengah - Pekutukan, RW.05 - RW.06	(4 x 178) m	107.000.000	
8	MENDELEM	Rabat Beton	Jalan Bodas - Mejingklak, RT.01/RW.11 - RT.02/RW.10	(3 x 180 x 0,15) m	113.499.300	
9	BULAKAN	Rabat Beton	Jalan Kalikeji, RT.03/RW.09, Desa Bulakan	(3 x 169 x 0,15) m	106.500.000	
10	SODONG BASARI	Talud dan Pengurugan Badan Jalan	Dusun Sodong Barat, RT.05/RW.01, Desa Sodong Basari	(2,5 x 120 x 0,375) m	112.500.000	
11	KALISALEH	Talud Kalinanggung	RT.02/RW.02, Desa Kalisaleh	(3 x 93,5 x 0,4) m	112.200.000	
12	SIKASUR	Sarpras Wisata (Kios Semi Permanen UMKM)	Telaga Silating, Desa Sikasur	8 unit	106.000.000	
13	SIMPUR	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan	Dusun Barong - Krikil, Desa Simpur	(3 x 176 x 0,15) m	111.000.000	
TOTAL					1.422.199.300	

NON FISIK

NO	DESA	USULAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER ANGGARAN	
					APBD	NON APBD
1	BELUK	Pelatihan Pengolahan/Pengelolaan Sampah	Desa Belik	50 Orang	26.907.700	
2	BADAK	Pelatihan Tata Boga (Pengolahan Makanan)	Desa Badak	40 Orang	50.000.000	
3	GUNUNGJAYA	Pelatihan IT Desa	Desa Gunungjaya	25 Orang	30.000.000	
4	SIKASUR	Pelatihan Keolahragaan (Pembinaan/Pelatihan Sepak Bola)	Desa Sikasur	1 Paket	30.000.000	
TOTAL					**136.907.700**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BELIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Belik Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Belik Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Kecamatan Belik Tahun 2025 - 2029

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada “Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan” dengan prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dab merata.
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
5. Peningkatan produktivitas ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Belik

Kecamatan Belik dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Belik harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Belik secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Belik tahun 2026 adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Belik sebagai PD yang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di Wilayah Kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator mandiri di Wilayah Kecamatan

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Belik dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Belik tahun 2026, adalah "Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah". Sasaran tersebut diukur dengan indikator IKM dan Nilai SAKIP OPD.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Belik tahun 2025 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Belik Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	87,31
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	96,31

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Belik merencanakan sebanyak 6 program, 17 kegiatan dan 55 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Belik dengan kebutuhan dana sebesar Rp 3.054.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BELIK

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Belik yang akan dilaksanakan pada tahun 202 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      c. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
   c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawaasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
   e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa
   g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
   j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Belik Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Unit Organisasi : Kabupaten Pemalang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Belik

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Belik								3.054.939.000					3.217.494.447
7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.054.939.000					3.217.494.447
7	01				KECAMATAN								3.054.939.000					3.217.494.447
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.820.111.250					3.098.298.047
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24.201.000					24.201.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	3.361.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.361.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							SKPD									SKPD		
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	2.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.250.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
						-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	2.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.590.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
						-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	2.237.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun	1 Dokumen	3.500.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							an Dokumen Perubahan DPA-SKPD								an Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	2.303000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.500.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.161.144.500					2.377.394.297
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	18 Orang/bulan	-	2.142.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.354.570.797
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	12 Dokumen	-	6.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	7.125.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							SKPD									SKPD		
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	3.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	4.150.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							Keuangan Akhir Tahun SKPD								Keuangan Akhir Tahun SKPD		
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	16 Laporan	-	8.048.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	9.048.000
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.500.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6.593.000					10.050.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	2 Dokumen	-	1.807.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.800.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	2 Laporan	-	2.286.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.300.000
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.950.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								4.400.000					5.400.000
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	27 Orang	-	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	5.400.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								276.933.600					311.953.600
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	4.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.998.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	4Paket	-	56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4Paket	66.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							yang Disediakan									yang Disediakan		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	-	6 Paket	-	700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	3.700.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan logistic kantor													
						-	Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	-	3 Paket		136.355.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket logistik kantor yang Disediakan	3 paket	146.355.600
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	2 Paket	-	6.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.500.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	1.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.700.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	200 Laporan	-	70.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	80.700.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								36.400.000					40.400.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa		60 Unit	-	36.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	40.400.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								178.018.000					182.018.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	75 Laporan	-	15,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75 Laporan	17.400.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	3 Laporan	-	20.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	22.760.000,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	12 Laporan	-	141.858.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.858.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								139.881.150					146.881.150
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	16 Unit	-	28.018.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	16 Unit	30.018.150

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							Perizinannya									Perizinannya		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								4.500.000					6.500.000
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	10 Unit	-	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.500.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	12 Unit	-	8.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.030.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	3 Unit	-	99.333.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.333.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								21.759.000					11.120.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								10.400.000					5.800.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	12 Dokumen	-	10.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	5.800.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								6.250.000					2.822.000
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	2.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1.000.000
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	4 Laporan	-	1500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	822.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilay	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	8 Laporan	-	2.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilay	8 Laporan	1.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							ah Kecamatan									ah Kecamatan		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								5.109.000					2.498.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	12 Dokumen	-	3.898.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1.000.000
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	12 Laporan	-	1.211.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	600.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								72.965.000					42.663.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								42.495.000					25.193.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangu	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangu	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							nan di Desa									nan di Desa		
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
						-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	34.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah	1 Dokumen	20.593.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Keca	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	2.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Keca	1 Laporan	1.600.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							matan									matan		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								30.470.000					15.000.000
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	30.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2470000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							sitas nya											
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								12.213.000					5032000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								5990000					2990000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	5990000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2990000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								6223000					2042000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
						-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Laporan	-	6223000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	2042000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.250.000					37.660.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.250.000					37.660.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	300 Orang	-	60.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo	300 Orang	37,660.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							nesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									nesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bintek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional													4.000.000
							Jumlah ornag yang	-	Kab. Pemalang, Belik,	-		-		Dana Transfer Umum-		Jumlah ornag yang	26 Oang	4.000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bintek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional		Semua Kel/ Desa					Dana Alokasi Umum		mengikuti Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bintek, Sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Keca	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	4 Dokumen	-	5.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Keca	4 Dokumen	2.760.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							mata n								mata n		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								67.640.750					22.721.400
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								67.640.750					22.721.400
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa													
						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	13 Dokumen	-	4.4835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	1.835.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	13 Dokumen	-	10.532.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	3.532.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	13 Dokumen	-	11.428.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	3.428.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan												
						-	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	3 Laporan	-	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3 Laporan	1.971.400
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa												
						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	2 Dokumen	-	4.522.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	2 Dokumen	1.522.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							dan Perangkat Desa								dan Perangkat Desa		
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan Kepala desa												
							Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan Kepala desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	10 Dokumen	-	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan Kepala desa	10 Dokumen	2.000.000
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	1 Dokumen	-	4.090.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1.200.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan danPemebrhentian Perangkat Desa													
						-	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan danPemebrhentian Perangkat Desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	0	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rekomendasi Pengangkatan danPemebrhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1000.000
7	01	06	2.01	0009	Rekomendasi Pengangkatan danPemebrhentian Perangkat Desa													
							Jumlah Doku	-	Kab. Pemalang,	-	0	-	0	Dana Transfer		Rekomendasi	1 Dokumen	1000.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

							men Rekomendasi Penganggatan danPemebrhentian Perangkat Desa		Belik, Semua Kel/ Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		Penganggatan danPemebrhentian Perangkat Desa		
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	13 Dokumen	-	8.253.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 Dokumen	1.253.000
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													

https://jdih.pemalangkab.go.id/

						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/ Desa	-	13 Dokumen	-	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Dokumen	1.500.000
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
						-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	Kab. Pemalang, Belik, Semua Kel/Desa	-	13 Dokumen	-	6.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 Dokumen	2.480.000

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Belik merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Belik Tahun 2025-2029.
2. Renja Kecamatan Belik memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Belik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belik Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Belik Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Belik Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Belik Tahun 2026.

CAMAT BELIK

MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19750213 200604 1 005

https://jdih.pemalangkab.go.id/

OO. RENCANA KERJA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Renja Kecamatan Watukumpul merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Watukumpul yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Watukumpul melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2026. Renja Kecamatan Watukumpul dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Watukumpul mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Watukumpul mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Watukumpul untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan RKPD tahun 2026)
2. Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Seksi-seksi
   - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
   - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026
   - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Watukumpul
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP,Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
   - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026
   - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
   - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul
Tahun 2026

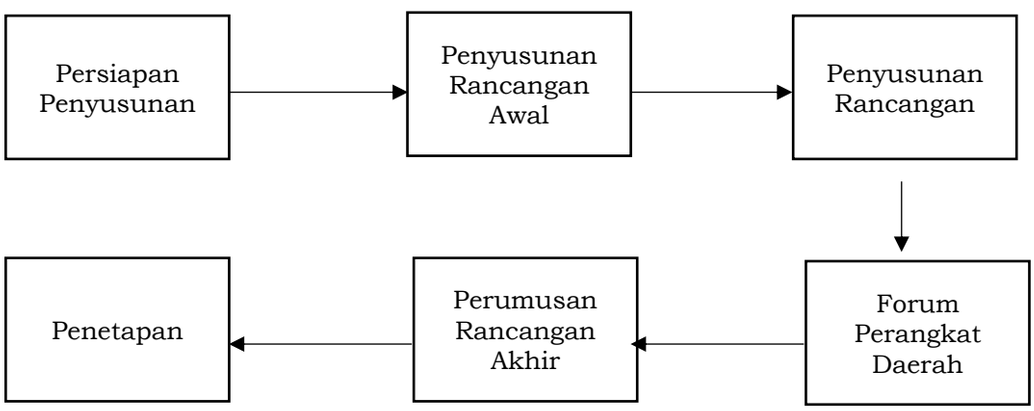

Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Watukumpul tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang

https://jdih.pemalangkab.go.id/

tahun 2026 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

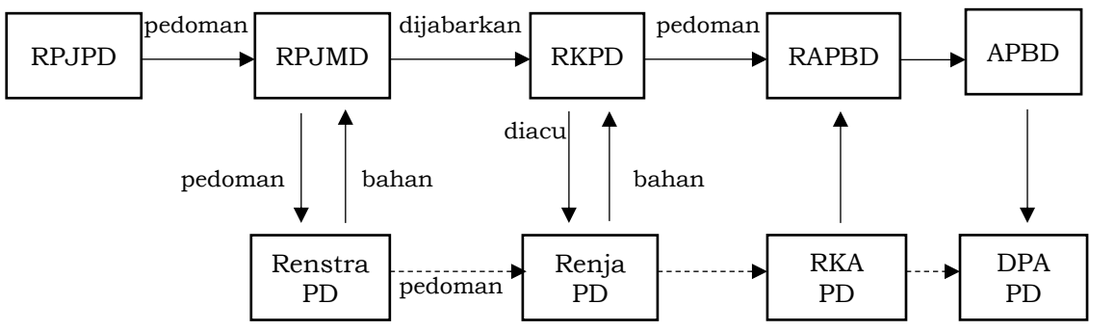

Renja Kecamatan Watukumpul berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

https://jdih.pemalangkab.go.id/

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2026 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Watukumpul tahun 2025-2029.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Watukumpul;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Watukumpul tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2024, Pencapaian target Renstra Kecamatan Watukumpul, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Watukumpul, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Watukumpul, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Watukumpul, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Watukumpul

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Watukumpul pada tahun 2024 dan estimasi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2024

Jumlah anggaran Kecamatan Watukumpul sebesar Rp. 2.942.496.000,- yang terbagi dalam 6 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan IV, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.581.231.934,- atau sebesar 87,72 %.

Tahun Anggaran 2025 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Watukumpul sebesar Rp. 2.758.931.000,- yang terbagi dalam 6 program, 16 kegiatan dan 50 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.222.680.929,- atau sebesar 44,32 %.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 6 Program, 13 Kegiatan dan 44 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Watukumpul yaitu tercapai di tahun 2024;

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul dan Pencapaian Renstra Kecamatan Watukumpul s/d Tahun 2025 Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	37,32	0	36,82	0	0,00	37,32	37,32	100,00
		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	36,8	59,05	36,30	63,76	175,65	36,8	36,8	100,00
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	69	14	14	14	100,00	14	42	60,87

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	*Laporan/ Dokumen*	*14*	*14*	*14*	*14*	*100,00*	*14*	*42*	*300,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	%	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	2	2	2	100,00	2	6	54,55
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen*	*2*	*2*	*2*	*2*	*100,00*	*2*	*6*	*300,00*
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*3*	*300*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*3*	*300*
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*3*	*300*
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*3*	*300*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Laporan*	*4*	*4*	*4*	*4*	*100,00*	*4*	*12*	*300,00*
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	4	4	4	100,00	4	12	66,67
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	*4*	*4*	*4*	*4*	*100,00*	*4*	*12*	*300,00*
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Laporan	75	15	15	15	100,00	15	45	60,00
		Jumlah Laporan/Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	*Laporan*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	17/70	14/14	14/14	14/14	100,00	13/14	13/42	75
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang/ bulan*	*17/14*	*14/14*	*14/14*	*14/14*	*100,00*	*17/14*	*17/42*	*300*
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Laporan*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*3*	*300*
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Laporan	10	0	0	0	#DIV/0!	2	2	20,00
		Jumlah Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	*Laporan/ Dokumen*	*2*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*2*	*2*	*100,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	%	100	0	0	0	#DIV/0!	100	100	100
		Persentase Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	*%*	*100*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*100*	*100*	*100*
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	0	0	0	#DIV/0!	2	2	20,00
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Laporan*	*2*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*2*	*2*	*100,00*
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	0	0	0	#DIV/0!	2	2	40,00
		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	*Kegiatan*	*1*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*1*	*1*	*100,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	%	100	0	0	0	#DIV/0!	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	*%*	*100*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*100*	*100*	*100*
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Prundang-Undangan	Orang	85	0	0	0	#DIV/0!	25	25	29,41
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Prundang-Undangan	*Orang*	*25*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*109*	*109*	*436,00*
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	377	67	30	35	116,67	47	149	39,52
		Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	*Layanan*	*5*	*4*	*4*	*4*	*100,00*	*5*	*13*	*260,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	4	4	5	125,00	5	14	70,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*5*	*4*	*4*	*5*	*125,00*	*5*	*14*	*280,00*
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	125	25	12	13	108,33	21	59	47,20
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Paket*	*18*	*25*	*12*	*13*	*108,33*	*21*	*59*	*327,78*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	2	2	5	250,00	5	12	80,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Paket*	*5*	*2*	*2*	*5*	*250,00*	*5*	*12*	*240,00*
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	192	36	12	12	100,00	12	60	31,25
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Laporan*	*12*	*36*	*12*	*12*	*100,00*	*12*	*60*	*500,00*
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	25	0	0	0	#DIV/0!	4	4	16,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Dokumen*	*4*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*4*	*4*	*100,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Unit	30	0	0	0	#DIV/0!	4	4	13,33
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia	*Unit*	*4*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*4*	*4*	*100,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	%	100	0	0	0	#DIV/0!	100	100	100
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia	*%*	*100*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*100*	*100*	*100*
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	0	0	0	#DIV/0!	2	2	20,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Unit*	*2*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*2*	*2*	*100,00*
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	0	0	0	#DIV/0!	2	2	10,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Unit*	*2*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*2*	*2*	*100,00*
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	Laporan	360	72	72	72	100,00	72	216	60,00
		Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Layanan*	*4*	*4*	*4*	*4*	*100,00*	*4*	*4*	*100,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	12	12	12	100,00	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*100,00*	*12*	*36*	*300*
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	180	36	36	36	100,00	36	108	60,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Laporan*	*36*	*36*	*36*	*36*	*100,00*	*36*	*108*	*300,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*100,00*	*12*	*36*	*300,00*
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100,00	12	36	60
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*12*	*12*	*12*	*12*	*100,00*	*12*	*36*	*300*
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	256	22	31	40	129,03	26	88	34,38
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara	*Unit*	*28*	*22*	*31*	*40*	*129,03*	*28*	*90*	*321,43*
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	16	13	12	92,31	3	31	34,44
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	*3*	*16*	*13*	*12*	*92,31*	*3*	*31*	*1033,33*
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	140	0	2	3	150,00	10	13	9,29
		Jumlah Mebel yang dipelihara	*Unit*	*10*	*0*	*2*	*3*	*150,00*	*10*	*13*	*130,00*
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	3	13	22	169,23	11	36	240,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Unit*	*13*	*3*	*13*	*22*	*169,23*	*13*	*38*	*292,31*
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	3	3	3	100,00	2	8	72,73
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Unit*	*2*	*3*	*3*	*3*	*100,00*	*2*	*8*	*400,00*
7.01.02	Program Penyelenggaraa Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	%	93,33	93,33	93,33	93,33	100,00	93,33	93,33	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	*%*	*70,00*	*100,00*	*70,00*	*70,00*	*100,00*	*70,00*	*70,00*	*100,00*
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Dokumen	25	5	1	1	100,00	3	9	36,00
		Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tersusun	*Laporan/ Dokumen*	*3*	*5*	*1*	*1*	*100,00*	*3*	*9*	*300,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase Laporan/Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tersusun	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	25	5	1	1	100,00	3	9	36,00
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Dokumen*	*3*	*5*	*1*	*1*	*100,00*	*3*	*9*	*300,00*
7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Dokumen	99	21	8	8	100,00	8	37	37,37
		Jumlah Laporan/Dokumen Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Laporan/ Dokumen*	*29*	*21*	*8*	*8*	*100,00*	*8*	*37*	*127,59*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Laporan/ Dokumen Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.0 2.2.02. 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	50	10	2	2	100,00	2	14	28,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	*Dokumen*	*2*	*10*	*2*	*2*	*100,00*	*2*	*14*	*700,00*
7.01.0 2.2.02. 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	30	6	2	2	100,00	2	10	33,33
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*2*	*6*	*2*	*2*	*100,00*	*2*	*10*	*500,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	19	5	4	4	100,00	4	13	68,42
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*25*	*5*	*4*	*4*	*100,00*	*4*	*13*	*52,00*
7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	Dokumen	575	100	601	801	133,28	801	1702	296,00
		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Menunjang Pelaksanaan Tugas	*Kegiatan*	*2*	*1*	*2*	*2*	*100,00*	*2*	*5*	*250,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun	%	100	75	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Menunjang Pelaksanaan Tugas	*%*	*100*	*75*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.0 2.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	500	100	600	800	133,33	800	1700	340,00
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	*Dokumen*	*600*	*100*	*600*	*800*	*133,33*	*800*	*1700*	*283,33*
7.01.0 2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	75	0	1	1	100,00	1	2	2,67
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	*Laporan*	*4*	*0*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*2*	*50,00*
7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	Dokumen	33	6	5	5	100,00	6	17	51,52
		Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Tersusun	*Laporan/ Dokumen*	*6*	*6*	*5*	*5*	*100,00*	*6*	*17*	*283,33*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Laporan/Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Tersusun	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasya rakatan	75	0	0	0	#DIV/0!	15	15	20,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Lembaga kemasya rakatan*	*15*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*15*	*15*	*100,00*
7.01.0 3.2.01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*3*	*300*
7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23	5	4	4	100,00	4	13	56,52
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*4*	*5*	*4*	*4*	*100,00*	*4*	*13*	*325,00*
7.01.0 4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*
7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Laporan	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
		Jumlah Laporan/ Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersusun	*Laporan/ Dokumen*	*1*	*0*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*2*	*200,00*
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Laporan/ Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersusun	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.0 4.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Laporan*	*1*	*0*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*2*	*200,00*
7.01.0 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	Laporan	10	2	2	2	100,00	2	6	60
		Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tersusun	*Laporan/ Dokumen*	*2*	*2*	*2*	*2*	*100,00*	*2*	*6*	*300*
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Persentase Laporan/Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Tersusun	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*
7.01.0 4.2.02. 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	10	2	2	2	100,00	2	6	60
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Laporan*	*2*	*2*	*2*	*2*	*100,00*	*2*	*6*	*300*
7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
		Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Dokumen	20	4	5	5	100,00	6	15	75
		Jumlah Laporan/Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Tersusun	*Laporan/ Dokumen*	*6*	*5*	*5*	*5*	*100,00*	*6*	*16*	*266,67*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100
		Persentase Laporan/Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Tersusun	*%*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.0 5.2.01. 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	150	30	30	30	100,00	200	260	173,33

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Orang*	*200*	*30*	*30*	*30*	*100,00*	*200*	*260*	*130,00*
7.01.0 5.2.01. 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	150	30	30	30	100,00	30	90	60,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Orang*	*30*	*30*	*30*	*30*	*100,00*	*30*	*90*	*300,00*
7.01.0 5.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	2	2	2	100,00	3	7	70,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Dokumen*	*3*	*2*	*2*	*2*	*100,00*	*3*	*7*	*233,33*
7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	86,67	80	86,67	86,67	100,00	86,67	86,67	100,00
		Jumlah Desa yang Naik Statusnya	*Desa*	*2*	*0*	*2*	*2*	*100,00*	*2*	*4*	*200,00*
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Dokumen	547	110	121	128	105,79	128	366	66,91
		Jumlah Laporan/Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Tersusun	*Laporan/ Dokumen*	*132*	*110*	*121*	*128*	*105,79*	*128*	*366*	*277,27*
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	%	100	80	100	100	100,00	100	100	100,00

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Persentase Laporan/Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Tersusun	*%*	*100*	*80*	*100*	*100*	*100,00*	*100*	*100*	*100,00*
7.01.0 6.2.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	75	15	15	15	100,00	15	45	60
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Dokumen*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300*
7.01.0 6.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	75	15	15	15	100,00	15	45	60
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Dokumen*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300*
7.01.0 6.2.01. 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	75	15	15	15	100,00	15	45	60

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Dokumen*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300*
7.01.0 6.2.01. 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	60	15	15	15	100,00	15	45	75
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Dokumen*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300*
7.01.0 6.2.01. 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	13	0	11	11	100,00	11	22	169,23
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Dokumen*	*11*	*0*	*11*	*11*	*100,00*	*11*	*22*	*200,00*
7.01.0 6.2.01. 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	75	15	15	15	100,00	15	45	60,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Dokumen*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5*100%)
7.01.0 6.2.01. 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	20	4	4	11	275,00	11	26	130
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Dokumen*	*11*	*4*	*4*	*11*	*275,00*	*11*	*26*	*236,36*
7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	75	15	15	15	100,00	15	45	60
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Dokumen*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300*
7.01.0 6.2.01. 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	75	15	15	15	100,00	15	45	60
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Dokumen*	*15*	*15*	*15*	*15*	*100,00*	*15*	*45*	*300*
7.01.0 6.2.01. 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	1	1	1	100,00	1	3	75
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	*Dokumen*	*5*	*1*	*1*	*1*	*100,00*	*1*	*3*	*60*

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 dan 2025 serta proyeksi Tahun 2026 dan 2027, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		88	90	92	NA	90,66	91,01	92	NA	
	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	*%*		√		*20,00*	*20,00*	*26,67*	*26,67*	*20,00*	*20,00*	*26,67*	*26,67*	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		96,00	96,00	97,33	NA	96,00	96,00	97,33	NA	
	IKM	*Nilai*		√		*88*	*91,01*	*91,02*	*91,03*	*90,66*	*91,01*	*91,02*	*91,03*	
	Nilai SAKIP OPD	*Nilai*		√		*36,30*	*63,76*	*63,86*	*63,91*	*63,76*	*68,02*	*63,86*	*63,91*	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	36,82	37,32	37,82	NA	0	0	37,82	NA	
	Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	*%*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	-	-	-	36,30	36,80	37,30	NA	63,76	68,02	37,30	NA	
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi	*%*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
5	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	-	-	-	93,33	93,33	93,33	NA	93,33	93,33	93,33	NA	
	Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	*%*	-	-	-	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	NA	
	Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	*%*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
7	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	NA	
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	*%*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	NA	
	Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	*%*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	-	-	-	86,67	86,67	93,33	NA	86,67	86,67	93,33	NA	
	Jumlah desa yang naik statusnya	*Desa*	-	-	-	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul berdasar Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat dari :

a. Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan
b. Indeks Kepuasan Masyarakat
c. Nilai SAKIP OPD
d. Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi
e. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi
f. Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun
g. Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif
h. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
i. Persentase konflik di masyarakat yang ditangani
j. Jumlah desa yang naik statusnya

Pada tahun 2024, jumlah desa dengan status mandiri diwilayah kecamatan ada 3 desa dari total 15 desa atau sebesar 20,00. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM, masalah disektor ekonomi (potensi ekonomi lokal yang tidak berkembang, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya partisipasi masyarakat), dan administrasi desa yang belum terkelola baik.

IKM Kecamatan Watukumpul sebesar 90,66 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Watukumpul. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2024, Kecamatan Watukumpul mendapatkan nilai SAKIP sebesar 63,76 sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah :

a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Watukumpul untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
b. Menjadikan hasil SAKIP sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal;
c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Watukumpul meliputi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, penanganan pengaduan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan seperti laporan kependudukan desa, laporan monev PBB dan laporan monografi. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 21 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 70%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Untuk persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif sudah mencapai 100% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan semuanya hadir. Walaupun partisipasi masyarakat desa/kelurahan pada perencanaan pembangunan sudah 100%, perlu didorong partisipasi masyarakat desa dan lembaga masyarakat pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dan persentase konflik dimasyarakat yang ditangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Watukumpul. Sedangkan untuk indikator jumlah desa yang naik statusnya yaitu sebanyak 2 desa dari 15 desa di Kecamatan Watukumpul. Hal ini disebabkan tata kelola pemerintahan desa yang belum optimal, kondisi geografis dan infrastruktur yang buruk, kesenjangan sosial ekonomi antarwarga, perbedaan tradisi dan budaya yang kuat bisa memengaruhi pola pembangunan, ketidak sesuaian data , hambatan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan air bersih. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Watukumpul. Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi dan persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Watukumpul perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Watukumpul untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Watukumpul yaitu:

a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
b. Masih rendahnya peran serta Masyarakat desa dan kelurahan
c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum Tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik
f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Watukumpul juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahanan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Watukumpul justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

"PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bersih

Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.

Cakap

Dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Handal

Dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

Mulya

Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Misi 1 Resik : menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
   Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. Misi 2 Hijau : meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi,

https://jdih.pemalangkab.go.id/

pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.

3. Misi 3 Apik : meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penaatan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. Misi 4 Peduli : meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi ewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
5. Misi 5 Silaturahmi : meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. Misi 6 Organisatoris : meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Misi 7 Digitalisasi : memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. Misi 8 Ikhlas : menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.
   Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Watukumpul mendukung misi keenam yaitu "meningkatkan pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi" yang dicapai melalui tujuan daerah berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan dengan indikator tujuan persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan. Dalam mencapai tujuan diatas ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah dengan indikator kinerja IKM dan Nilai SAKIP OPD.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** dan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan pada Rantekno RPJMD tahun 2025-2029 diarahkan pada tema "**Penguatan Landasan Transformasi**", maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2026, diarahkan pada "**Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan**", dengan prioritas pembangunan meliputi :

a. Mewujudkan Misi RESIK dengan Peningkatan pengelolaan persampahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

b. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata.
c. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.
d. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak.
e. Peningkatan produktivitas ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul tahun 2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Watukumpul mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good gavernance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul adalah :

1. Adanya peraturan terkait perencanaan penganggaran :
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

https://jdih.pemalangkab.go.id/

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

2. Terbitnya peraturan terkait Kecamatan :
   - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
   - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

   Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Watukumpul.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Watukumpul dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul. Renja Kecamatan Watukumpul disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Watukumpul

https://jdih.pemalangkab.go.id/

dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Watukumpul.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Watukumpul				**2.971.032.000,00**	**Kecamatan Watukumpul**				**2.971.032.000,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2.971.032.000,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.971.032.000,00**	
	KECAMATAN				**2.971.032.000,00**	**KECAMATAN**				**2.971.032.000,00**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.476.089.200,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.476.089.200,00**	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**2.476.089.200,00**			**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**2.476.089.200,00**	
1)	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**14 Laporan/ Dokumen**	**11.180.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai regulasi**	**14 Laporan/ Dokumen**	**11.180.000,00**	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.800.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.800.000,00	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.700.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.280.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.280.000,00	
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000,00	
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000,00	
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.100.000,00	
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.500.000,00	
2)	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi***	***15 Laporan/ Dokumen***	***2.033.350.000,00***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi***	***15 Laporan/ Dokumen***	***2.033.350.000,00***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	2.032.350.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	2.032.350.000,00	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	
3)	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah tersusun sesuai regulasi***	***2 Laporan/ Dokumen***	***1.500.000,00***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah tersusun sesuai regulasi***	***2 Laporan/ Dokumen***	***1.500.000,00***	
a.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.500.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.500.000,00	
4)	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi***	***1 Kegiatan***	***2.000.000,00***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi***	***1 Kegiatan***	***2.000.000,00***	
a.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	2.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	2.000.000,00	
5)	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah fasilitasi administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan***	***6 Layanan***	***111.241.400,00***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Jumlah fasilitasi administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan***	***6 Layanan***	***111.241.400,00***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.799.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.799.500,00	
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	15.114.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	15.114.000,00	
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	27.795.900,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	27.795.900,00	
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.222.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.222.000,00	
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.310.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.310.000,00	
f.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6)	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia***	***13 Unit***	***53.679.800,00***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia***	***13 Unit***	***53.679.800,00***	
a.	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	14.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	14.000.000,00	
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	39.679.800,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	39.679.800,00	
7)	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	***3 Layanan***	***170.358.000,00***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah***	***3 Layanan***	***170.358.000,00***	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000,00	
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.858.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.858.000,00	
8)	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara***	***68 Unit***	***92.780.000,00***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara***	***68 Unit***	***92.780.000,00***	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	47.780.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	47.780.000,00	
b.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	15.000.000,00	
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**70,00 %**	**42.900.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**70,00 %**	**42.900.000,00**	
1)	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun***	***2 Laporan/ Dokumen***	***10.000.000,00***	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun***	***2 Laporan/ Dokumen***	***10.000.000,00***	
a.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	10.000.000,00	
2)	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		***Jumlah laporan/dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan***	***6 Laporan/ Dokumen***	***21.000.000,00***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		***Jumlah laporan/dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan***	***6 Laporan/ Dokumen***	***21.000.000,00***	
a.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	6.000.000,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	6.000.000,00	
b.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.000.000,00	
3)	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas***	***2 Kegiatan***	***11.900.000,00***	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***		***Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas***	***2 Kegiatan***	***11.900.000,00***	
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengaan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600 Dokumen	5.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengaan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600 Dokumen	5.000.000,00	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	6.900.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	6.900.000,00	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif**	**100%**	**68.093.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif**	**100%**	**68.093.500,00**	
1)	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun***	***6 Laporan/ Dokumen***	***68.093.500,00***	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun***	***6 Laporan/ Dokumen***	***68.093.500,00***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000,00	
b.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	27.700.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	27.700.000,00	
c.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	31.593.500,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	31.593.500,00	
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100 %**	**41.500.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100 %**	**41.500.000,00**	
1)	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun***	***1 Laporan/ Dokumen***	***24.500.000,00***	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun***	***1 Laporan/ Dokumen***	***24.500.000,00***	
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	24.500.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	24.500.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun***	***2 Laporan/ Dokumen***	***17.000.000,00***	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun***	***2 Laporan/ Dokumen***	***17.000.000,00***	
a.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	17.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	17.000.000,00	
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100%**	**91.124.800,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100%**	**91.124.800,00**	
1)	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun***	***5 Laporan/ Dokumen***	***91.124.800,00***	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***		***Jumlah laporan/dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun***	***5 Laporan/ Dokumen***	***91.124.800,00***	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	40.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	40.000.000,00	
b.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	31.124.800,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	31.124.800,00	
c.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	20.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	20.000.000,00	
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Jumlah Desa yang Naik Statusnya**	**2 Desa**	**251.324.500,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Jumlah Desa yang Naik Statusnya**	**2 Desa**	**251.324.500,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah laporan/dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun***	***121 Laporan/ Dokumen***	***251.324.500,00***	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		***Jumlah laporan/dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun***	***121 Laporan/ Dokumen***	***251.324.500,00***	
a.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	15.214.500,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	15.214.500,00	
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15.000.000,00	
c.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	35.800.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	35.800.000,00	
d.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	10.000.000,00	
e.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 Dokumen	110.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 Dokumen	110.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 Dokumen	10.000.000,00	
g.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	10.000.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	10.000.000,00	
h.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	20.310.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	20.310.000,00	
i.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15 Dokumen	10.000.000,00	
j.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	15.000.000,00	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismennya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2026 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Kegiatan Fisik Infrastruktur				
1.	Pembangunan Jalan Dusun Jaha Desa Tundagan ke Desa Klesem Pekalongan	Dusun Bangsal RT 20 RW 05 Desa Tundagan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	500 m x 3 m	
2.	Pembangunan Bronjong Pengaman Pemukiman Dusun Sirongge RT 13/14 RW 04 Desa Tundagan	Dusun Sirongge RT 13/14 RW 04 Desa Tundagan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	150 m x 3 m x 0,60 m	
3.	Pembuatan rabat Beton Dusun Tembelang RT 12 RW 04 Desa Tlagasana ke Desa Karanggondang, Kandangserang, Pekalongan	Dusun Tembelang RT 12 RW 04 Desa Tlagasana	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	400 m x 3 m	
4.	Pembuatan Jalan Dusun Bantarsari ke TPST Desa Bongas	Dusun Bantarsari Desa Bongas	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	350 m x 2,5 m	
5.	Pengaspalan Jalan Pertanian Dusun Sipedang RT 20 RW 01 Desa Cawet	Desa Cawet	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	400 m x 3 m	
6.	Pengaspalan Jalan RT 06 RW 06 Dusun Playangan Desa Majalangu	Dusun Playangan RT 06 RW 06 Desa Majalangu	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	400 m x 3 m	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
7.	Pengaspalan Jalan Gapura-Bodas	Dusun Kadedelan RT 06 RW 02 Desa Gapura	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	300 m x 3 m	
8.	Pembuatan Rabat Beton Dusun Celeleng Desa Majakerta ke Dusun Watucandi Desa Watukumpul	Dusun Celeleng RT 03 RW 03 Desa Majakerta	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	400 m x 3 m	
9.	Pengaspalan Jalan Dusun Bentang Desa Tambi ke Desa Sanguwatang KarangJambu Purbalingga	Dusun Bentang Desa Tambi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	400 m x 3 m	
B.	Kegiatan Non Fisik				
1.	Pelatihan Pengolahan Sampah	Desa Wisnu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 orang x 2 hari	
2.	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	Desa Cikadu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	25 orang x 1 hari	
3.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Majalangu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 orang x 2 hari	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WATUKUMPUL

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Tema RPJMN Tehnokratik 2025–2029 meliputi Transformasi sosial, Transformasi ekonomi, Transformasi tata kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sedangkan untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**, yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan, meliputi :

1. Pangan dan Energi, diarahkan pada optimalisasi BULOG, pelaksanaan *food estate,* peningkatan bauran *ethanol* dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir dan pengelolaan sampah;
2. Ekonomi produktif dan inklusif, diarahkan pendidikan dan kesehatan, birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, pertahanan semesta diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan kemampuan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional dari gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi lokal melaui koperasi desa/kelurahan merah putih.

Tema daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan pada Rantekno RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada Tema **"Penguatan Landasan Transformasi"**. Tahap pertama ini diarahkan pada kebijakan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 di prioritaskan pada :

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakte dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang merupakan tahun pertama RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **"Penguatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur, sumber daya manusia serta tata kelola pemerintahan"** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Misi RESIK dengan peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata;
3. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter;
4. Peningkatan implementasi transformasi birokrasi yang berdampak;
5. Peningkatan produktivitas ekonomi;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Watukumpul harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Watukumpul secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026 adalah "**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan**". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator persentase desa dengan status mandiri di wilayah Kecamatan.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Watukumpul tahun 2026, adalah

https://jdih.pemalangkab.go.id/

"**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah**". Sasaran tersebut diukur dengan indikator IKM dan Nilai SAKIP OPD.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2026 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Watukumpul Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	26,67
2.		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	Nilai	91,02
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	63,91

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2026, Kecamatan Watukumpul merencanakan sebanyak 6 program, 16 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Watukumpul dengan kebutuhan dana sebesar Rp 2.971.032.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WATUKUMPUL

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2026. Berikut program, kegiatan dan sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan pada tahun 2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
      b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
      c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

https://jdih.pemalangkab.go.id/

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
      c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
      h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
      j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kecamatan Watukumpul						**2.971.032.000,00**							**3.038.035.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.971.032.000,00**							**3.038.035.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.971.032.000,00**							**3.038.035.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi***	**-**			**100 %**	**2.476.089.200,00**						**-**	**2.673.493.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Watukumpul)]	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi** **Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.476.089.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.673.493.000,00**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun sesuai regulasi	-			14 Laporan/Dokumen	11.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	11.780.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		1.800.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		1.700.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.280.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		1.280.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		1.400.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		1.400.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.100.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		2.400.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		1.800.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan/dokumen keuangan tersusun sesuai regulasi*	-			15 Laporan/Dokumen	2.033.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	2.253.805.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.032.350.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		2.252.605.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		1.200.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah tersusun sesuai regulasi*	-			2 Laporan/Dokumen	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	2.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		2.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai regulasi*	-			1 Kegiatan	2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	2.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	2.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		2.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah fasilitasi administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan*	-			6 Layanan	111.241.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	97.300.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.799.500,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		5.800.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	15.114.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		6.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				21 Paket	27.795.900,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		28.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	9.222.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		9.500.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.310.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		45.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		3.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*	-			13 Unit	53.679.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	27.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	14.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		7.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	39.679.800,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		20.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			3 Layanan	170.358.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	198.828.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		6.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	22.500.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		24.246.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	141.858.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		168.582.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*	-			68 Unit	92.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	80.780.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	47.780.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		47.780.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		5.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		8.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		20.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun***	**-**			**70,00 %**	**42.900.000,00**						**-**	**44.900.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Watukumpul)]	**Persentase pelimpahan kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun**	**70**	**70**	**70**	**70**	**42.900.000,00**	-	-	-	-	-	-	**44.900.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan/dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun*	-			2 Laporan /Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	10.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		10.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah laporan/dokumen urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan*	-			6 Laporan /Dokumen	21.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	23.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		6.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		12.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		5.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas*	-			2 Kegiatan	11.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	11.900.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan penyeludupan.					
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				600 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		5.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	6.900.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		6.900.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif***	**-**			**100%**	**68.093.500,00**						**-**	**68.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Watukumpul)]	**Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**68.093.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68.000.000,00**	**-**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun*	-			6 Laporan/Dokumen	68.093.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	68.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		9.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	27.700.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		28.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	31.593.500,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		31.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani***	**-**			**100 %**	**41.500.000,00**						**-**	**33.000.000,00**	
		[Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Watukumpul)]	**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**41.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.000.000,00**	**-**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah laporan/dokumen koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun*	-			1 Laporan/Dokumen	24.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	18.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan penyeludupan.					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	24.500.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		18.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah laporan/dokumen koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun*	-			2 Laporan/Dokumen	17.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	15.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	17.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		15.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani***	**-**			**100%**	**91.124.800,00**							**55.832.000,00**	

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Watukumpul)]	**Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani**	**100**	**100**	**100**	**100**	**91.124.800,00**	-	-	-	-	-	-	**55.832.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah laporan/dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun*	-			5 Laporan /Dokumen	91.124.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	55.832.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	40.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		40.832.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	31.124.800,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		5.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		10.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Desa yang Naik Statusnya***	**-**			**2 Desa**	**251.324.500,00**						**-**	**162.810.000,00**	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Watukumpul)]	**Jumlah Desa yang Naik Statusnya**	**2**	**2**	**2**	**2**	**251.324.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**162.810.000,00**	**-**

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah laporan/dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun*	-			121 Laporan/Dokumen	251.324.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul	-	162.810.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15 Dokumen	15.214.500,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		15.500.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		16.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	35.800.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		35.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				15 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		10.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				11 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		20.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				15 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		10.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		10.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				15 Dokumen	20.310.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		20.310.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				15 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		10.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														

https://jdih.pemalangkab.go.id/

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis P2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan	Kecamatan Watukumpul		16.000.000,00	KECAMATAN WATUKUMPUL

https://jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Watukumpul merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
2. Renja Kecamatan Watukumpul memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih ***indikatif*** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Watukumpul secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watukumpul Tahun 2026 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2026 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan

https://jdih.pemalangkab.go.id/

Watukumpul Tahun 2026 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2026.

CAMAT WATUKUMPUL

AGUS SYARIF NURHADI, S.H
Pembina Tk.I
NIP. 19680813 199903 1 005

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO